

2019
Laporan Tahunan
Annual Report



STRENGTHENING THE STRENGTH



#BUMNuntukIndonesia

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan ruang lingkup tugas melakukan pengelolaan aset Negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN, kegiatan investasi, dan kegiatan pengelolaan aset BUMN. Adakalanya kata "PPA" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) secara umum.

This Annual Report contains statements of financial conditions, operational outcome, projections, plans, strategies, policies, and objectives of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), which are classified as forward-looking statements in the application of laws and regulations, except for historical matters. Statements found in this Annual Report are subject to known and unknown risks (prospective) and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reported.

Prospective statements in this Annual Report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), and the business environment where the Company conducts business. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) shall have no guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

This Annual Report contains the word "the Company" which is defined as a State-Owned Enterprise (SOEs) with the scope of duties to manage the assets of former Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), restructuring and/or revitalization (R/R) of SOEs, investment activities, and activities asset management of SOEs. The word "PPA" is at times used to simply refer to PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in general.



Tentang Laporan Tahunan 2019

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

About PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 2019 Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2019 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan tema *"Strengthening the Strength"*

Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan data dan perkembangan bisnis Perusahaan di sepanjang tahun 2019 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Laporan Tahunan 2019 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) diterbitkan sesuai dengan pasal 66 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pasal 22 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dollar AS", USD atau "US\$" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang "Rupiah" sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Tahunan 2019 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di *website* resmi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yaitu <http://www.ptppa.com>.

Welcome to the 2019 Annual Report of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) with the theme "Strengthening the Strength"

The theme was chosen based on in-depth analysis and study based on data and business developments of the Company throughout 2019 and the Company's future business sustainability.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 2019 Annual Report was issued in accordance with article 66 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as well as article 22 of Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The unit of currency denominated in "Rupiah", "Rp" or "IDR" refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar", "USD" or "US \$" refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in "Rupiah" currency in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 2019 Annual Report is presented in two languages, i.e. Indonesian and English by using the type and size of letters that are easy to read and printed with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on the official website of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) <http://www.ptppa.com>.



TENTANG TEMA LAPORAN TAHUNAN 2019

ABOUT 2019 ANNUAL REPORT THEME

Strengthening the Strength

Sebagai satu-satunya agen restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN, PPA menyadari bahwa penyehatan korporasi khususnya BUMN, begitu penting agar tetap mampu menjadi agen pembangunan serta menjadi mesin penggerak perekonomian nasional. Untuk itu, Perusahaan terus memperkuat kekuatan dalam melaksanakan amanah Pemerintah sebagai agen restrukturisasi BUMN baik melalui skema penyertaan modal maupun pemberian pendanaan.

Di samping tetap melaksanakan tugas R/R BUMN serta pengelolaan aset, PPA pun tetap menjalankan strategi pertumbuhan Perusahaan terutama melalui kegiatan investasi dan *advisory*, sebagai upaya Perusahaan dalam memperkuat diri guna melaksanakan amanah Pemerintah. Selain itu, berbekal spesialisasi PPA di bidang penyehatan korporasi dan pengelolaan *distressed asset*, PPA pun memperluas manfaat melalui kerja sama dengan perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara ("Himbara") untuk membantu mengurangi kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*.

Sejalan dengan tema Laporan Tahunan 2019 yakni "*Strengthening the Strength*", di tahun 2019, PPA terus meningkatkan kerja sama dalam rangka membangun aliansi strategis dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Dalam rangka memperkuat jaringan internasional di bidang pengelolaan aset, saat ini PPA juga telah resmi tercatat sebagai *general member* International Public Asset Management Company Forum (IPAF) yang merupakan forum internasional *asset management company* dari berbagai Negara.

As the sole agent of SOEs restructuring and/or revitalization (R/R), PPA is aware that the restructuring of corporations, especially SOEs, is very important that they remain capable of being agents of development and a driving force for the national economy. To that end, the Company continues to strengthen its power in carrying out the mandate of the Government as an SOEs restructuring agent both through capital participation schemes and funding.

In addition to continuing to carry out the tasks of R/R of SOEs and asset management, PPA also continues to carry out the Company's growth strategy primarily through investment and advisory activities, as an effort by the Company to strengthen itself to carry out the mandate of the Government. In addition, armed with PPA's specialization in the field of corporate restructuring and management of distressed assets, PPA also extends benefits through cooperation with banks members of the State Owned Bank Association ("Himbara") to help reduce non-performing loans or NPLs.

In line with the theme of the 2019 Annual Report, "Strengthening the Strength", in 2019, PPA continued to enhance cooperation in order to build strategic alliances with various parties at home and abroad. In order to strengthen the international network in the field of asset management, currently PPA has also been officially listed as a general member of the International Public Asset Management Company Forum (IPAF) which is an international forum for asset management companies from various countries.



KESINAMBUNGAN TEMA

THEME CONTINUITY



Laporan Tahunan 2018 | 2018 Annual Report

REPOSITIONING FOR THE FUTURE GROWTH

Tahun 2018, Perusahaan memperkuat eksistensi dengan menjadikan investasi sebagai landasan bagi pengembangan ke depan. Tema "*Repositioning for the Future Growth*" memberikan gambaran tentang kinerja Perusahaan di tahun 2018, sebagai hasil dari keputusan investasi yang telah dilakukan di tahun 2017.

In 2018, the Company strengthened its existence in 2018 by placing investment as foundation for future development. The theme of "*Repositioning for the Future Growth*" illustrates the Company's performance in 2018, as result of investment decision taken in 2017.



Laporan Tahunan 2017 | 2017 Annual Report

OPTIMIZING STRENGTHS INTO EXCELLENCE. ENHANCING CAPACITY FOR GROWTH

Tahun 2017 mengambil tema "*Optimizing Strengths Into Excellence. Enhancing Capacity for Growth*". Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis serta kajian yang komprehensif terhadap fakta dan perkembangan bisnis Perusahaan pada 2017. Selain itu, tema tersebut juga dipilih dengan mempertimbangkan proyeksi keberlanjutan bisnis Perusahaan.

The year 2017 took the theme "*Optimizing Strengths Into Excellence. Enhancing Capacity for Growth*". The theme was chosen based on a comprehensive analysis and study of the facts and developments of the Company's business in 2017. In addition, the theme was also chosen by considering the projected sustainability of the Company's business.



Laporan Tahunan 2016 | 2016 Annual Report

CREATING AND SUSTAINING VALUE: UNCOVERING THE HIDDEN POTENTIALS

Tahun 2016 mengusung tema "*Creating and Sustaining Value: Uncovering the Hidden Potentials*". Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis serta kajian yang komprehensif terhadap fakta dan perkembangan bisnis Perusahaan pada 2016. Selain itu, tema tersebut juga dipilih dengan mempertimbangkan proyeksi keberlanjutan bisnis Perusahaan.

The year 2016 carried the theme "*Creating and Sustaining Value: Uncovering the Hidden Potentials*". The theme was chosen based on a comprehensive analysis and study of the facts and developments of the Company's business in 2016. Besides that, the theme was also chosen by considering the Company's business sustainability projections.

TUMBUH BERSAMA

GROW TOGETHER

Sebagai BUMN yang diberikan amanah penting oleh Pemerintah dalam rangka menopang laju pertumbuhan perekonomian nasional, PPA selalu siap melaksanakan tugasnya dalam melakukan R/R BUMN. Sebagai agen pembangunan nasional, Perusahaan BUMN diberikan tugas khusus oleh Pemerintah dalam meningkatkan laju perekonomian nasional. Untuk itu, PPA senantiasa siap melaksanakan tugasnya sebagai agen R/R BUMN agar dapat tumbuh berkelanjutan.

Pelaksanaan tugas R/R BUMN sampai dengan tahun 2019 telah membuahkan hasil, dimana terdapat dua BUMN karya yang berhasil disehatkan dengan skema penyertaan modal serta telah mampu tumbuh dan *profitable* yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan PT Nindya Karya (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2012 hingga saat ini, PT Nindya Karya masih tercatat sebagai entitas anak PPA. Sejauh ini, PT Nindya Karya telah mencatatkan peningkatan kinerja yang signifikan dan sedang dalam proses persiapan pengembalian kepada Pemerintah yang paling lambat dilaksanakan pada tahun 2022.

Per 31 Desember 2019, terdapat sepuluh BUMN yang masih dalam program R/R oleh PPA sesuai dengan surat penugasan yang telah diberikan oleh Menteri BUMN kepada PPA yang terdiri dari satu BUMN melalui skema penyertaan modal yaitu PT Nindya Karya dan sembilan BUMN melalui skema *financial controlling* yaitu:

1. PT Dirgantara Indonesia (Persero);
2. PT Industri Kapal Indonesia (Persero);
3. PT PAL Indonesia (Persero);
4. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero);
5. PT Kertas Kraft Aceh (Persero);
6. PT Kertas Leces (Persero);
7. PT Industri Sandang Nusantara (Persero);
8. PT Industri Gelas (Persero);
9. PT Survai Udara Panas (Persero).

Di samping melaksanakan amanah Pemerintah, PPA juga terus menjalankan strategi pertumbuhan Perusahaan terutama melalui kegiatan investasi dan *advisory*. Dalam bidang investasi, Perusahaan melanjutkan pengembangan investasi yang telah dilakukan dan semakin proaktif untuk menginisiasi peluang investasi yang baru, antara lain berupa kerja sama dengan perbankan Himbara dalam rangka pengelolaan *Non Performing Loan*. Sedangkan pada bidang *advisory*, Perusahaan berupaya untuk memperkuat posisi dengan memanfaatkan akses Perusahaan ke pasar. PPA optimis kelangsungan usaha Perusahaan akan berjalan dengan baik seiring dengan strategi jangka panjang Perusahaan yang tertuang dalam Rencana jangka Panjang Perusahaan Tahun 2019-2023 yang bertujuan untuk menjadikan PPA sebagai perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi.

As an SOEs that has been entrusted with an important mandate by the Government in sustaining the national economic growth rate, PPA is always ready to carry out its duties in R/R of SOEs. As a national development agent, SOEs companies are given special duties by the Government in increasing the pace of the national economy. For this reason, PPA is ready to perform its duties as an SOEs R/R agent in order to grow sustainably.

The implementation of SOEs R/R duties up to 2019 has produced encouraging results, in which there were two SOEs that have been successfully revitalized with a capital participation scheme and have been able to grow and be profitable, namely PT Waskita Karya (Persero) Tbk between 2010 and 2012, and PT Nindya Karya (Persero). Pursuant to the Regulation of the Government of Republic of Indonesia No. 69 of 2012 to date, PT Nindya Karya is still listed as a subsidiary of PPA. To date, PT Nindya Karya has recorded a significant performance improvement and is in the process of preparing a return to the Government that will be executed no later than 2022.

As of December 31, 2019, there were ten SOEs that were still in the R/R program by PPA in accordance with the assignment letter given by the Minister of SOEs to PPA, consisting of one SOEs through a capital participation scheme, namely PT Nindya Karya, and nine SOEs through a financial controlling scheme namely:

1. PT Dirgantara Indonesia (Persero);
2. PT Industri Kapal Indonesia (Persero);
3. PT PAL Indonesia (Persero);
4. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero);
5. PT Kertas Kraft Aceh (Persero);
6. PT Kertas Leces (Persero);
7. PT Industri Sandang Nusantara (Persero);
8. PT Industri Gelas (Persero);
9. PT Survai Udara Panas (Persero).

In addition to carrying out the Government's mandate, PPA also continues to carry out the Company's growth strategy, mainly through investment and advisory activities. In the investment sector, the Company continues to develop the investments that have been made and be more proactive to initiate new investment opportunities, including in the form of cooperation with State Owned Bank Association in NPL management. While in the advisory sector, the Company seeks to strengthen its position by utilizing the Company's access to the market. PPA is optimistic that the Company's business continuity will run well in line with the Company's long-term strategy as set out in the 2019-2023 Corporate Long-Term Plan, which aims to make PPA a leading investment company and trusted partner in corporate restructuring.

PERFORMA 2019

2019 PERFORMANCE



Aset Konsolidasian

2019: Rp14,41 triliun
2018: Rp11,74 triliun

Consolidated Assets

2019: Rp14,41 trillion
2018: Rp11,74 trillion

▲ **22,74%**

Ekuitas

2019: Rp5,42 triliun
2018: Rp5,26 triliun

Equity

2019: Rp5,42 trillion
2018: Rp5,26 trillion

▲ **3,04%**



Skor GCG

GCG score
2019: 88,53
2018: 88,13

Skor penilaian GCG tahun buku 2019 tergolong '**Sangat Baik**'. Penilaian GCG juga telah dilaksanakan pada entitas anak yang telah dimulai oleh PT Nindya Karya sejak tahun buku 2014, sedangkan PT PPA Finance dan PT PPA Kapital untuk pertama kali pada tahun buku 2019 sebagai bentuk upaya menjalankan bisnis yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada grup PPA.

GCG assessment score for the fiscal year 2019 was 'Very Good'. GCG assessment has also been carried out on subsidiaries, started by PT Nindya Karya since the fiscal year 2014, while PT PPA Finance and PT PPA Kapital was in the fiscal year 2019 for the first time, as an effort to conduct a business that prioritizes the principles of good corporate governance within PPA Group.



Menjadi Anggota IPAF

Become a Member of IPAF

PPA telah resmi tercatat sebagai *general member* International Public Asset Management Company Forum (IPAF). Forum internasional yang beranggotakan 14 *asset management company* dari berbagai Negara Asia antara lain Kazakhstan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, China, Vietnam dan Indonesia.

PPA has been officially listed as a general member of the International Public Asset Management Company Forum (IPAF). An international forum consisting of 14 asset management companies from various Asian countries including Kazakhstan, South Korea, Thailand, Malaysia, China, Vietnam and Indonesia.



Tingkat kesehatan Perusahaan mencapai **klasifikasi "AA" kategori BUMN "Sehat"**.

Implementasi kebijakan strategis dan berbagai inisiasi yang telah dilakukan di sepanjang tahun 2019 mampu meningkatkan kinerja Perusahaan.

The Company's soundness index reached **"AA" classification with "Healthy" SOEs category**.

The implementation of strategic policies and a variety of initiatives carried out throughout 2019 were able to improve the Company's performance.



Nindya Karya Berhasil Tumbuh

Nindya Karya Successfully Grows

Peningkatan kinerja yang signifikan dan sedang dalam proses persiapan pengembalian kepada Negara RI pada tahun 2021/2022.

Significant performance improvement and is in the process of preparing to be returned to the Republic of Indonesia in 2021/2022.



Pertumbuhan pendapatan **hasil investasi sebesar 22,37%** dari pendapatan tahun sebelumnya.

Revenue from investment grew by 22.37% compared to the previous year's revenue.



Tahun 2019 telah dilakukan perbaikan struktur pendanaan melalui diversifikasi sumber dana selain perbankan juga diperoleh sumber dana baru melalui penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) dan Surat Berharga Komersial (SBK) untuk menekan *cost of fund* dan menjaga Kas Perusahaan tetap diatas Rp1 triliun yang diperoleh dari penerbitan MTN dan SBK sebesar total Rp850 miliar.

In 2019, the funding structure has been improved through diversification of funding sources in addition to banks. New funding sources have also been acquired through the issuance of Medium Term Notes (MTN) and Commercial Paper (CP) to reduce the cost of funds and maintain the Company's Cash above Rp1 trillion, which was obtained from MTN and CP issuance totaling Rp850 billion.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

6	Kesinambungan Tema Theme Continuity
7	Tumbuh Bersama Grow Together
8	Performa 2019 2019 Performance

KILAS KINERJA 2019

Performa 2019

14	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Data Highlights
20	Ikhtisar Saham Share Highlights
21	Informasi Tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konversi, Serta Pendanaan Lainnya Information on Issuance Of Bonds, Sharia Bonds or Convertible Bonds, And Other Funding
22	Kilas Peristiwa Event Highlights

LAPORAN MANAJEMEN

Management REPORT

42	Dewan Komisaris Board of Commissioners
44	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioner Report
64	Direksi Board of Directors
66	Laporan Direksi Board of Directors Report
86	Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2019 Accountability on 2019 Annual Report

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

90	Identitas Perusahaan Company Identity
91	Riwayat Singkat PPA Brief History of PPA
94	Jejak Langkah Milestones
96	Bidang Usaha, Produk Dan Jasa, Serta Pasar Yang Dilayani Line of Business, Products and Services, and Markets Served
104	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture
107	Makna Logo Perusahaan The Meaning of Company Logo
108	Struktur Organisasi Organizational Structure
110	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
113	Profil Direksi Board of Directors Profile

117	Profil Manajemen Senior Senior Management Profile
121	Demografi Karyawan Dan Pengembangan Kompetensi Employee Demographics and Competency Development
131	Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Dan Manajemen Risiko Education and/or Training of Board Of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, and Risk Management
135	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition
136	Struktur Grup Dan Kelompok Usaha Group Structure and Business Group
137	Entitas Induk, Entitas Anak Dan Ventura Bersama Parent Entity, Subsidiaries, and Joint Ventures
164	Informasi Tentang Kronologis Penerbitan Dan Pencatatan Saham Serta Kronologis Penerbitan Dan Pencatatan Efek Lainnya Information on The Chronology of Share Issuance and Listing as Well as The Chronology of Other Securities Issuance and Listing
165	Lembaga Dan Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professionals
167	Penghargaan Dan Sertifikasi Award and Certification
168	Informasi Pada Situs Web Perusahaan Information on Company's Website

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

172	Tinjauan Perekonomian Dan Industri Economy and Industry Overview
174	Kebijakan Strategis 2019 Strategic Policy 2019
175	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Review per Business Segment
197	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
201	Tinjauan Keuangan dan Informasi Material Lainnya Financial Review and Other Material Information
277	Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Index
279	Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity
282	Prospek Usaha Tahun 2020 dan Rencana Strategis 2020 Business Outlook and Strategic Planning



285	Peta Jalan Usaha: Rencana Pengembangan Jangka Panjang Business Road Map: Long -Term Development Plan

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

290	Pemahaman Mendasar Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Basic Understanding of Good Corporate Governance
292	Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup PPA Development of Good Corporate Governance Implementation in PPA
323	Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance Organ Structure
564	Manajemen Risiko Risk Management
579	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
586	<i>Corporate Social Responsibility</i>
587	Perkara Penting Litigation
594	Akses Informasi dan Data Perusahaan Corporate Information and Data Access
600	Tata Kelola Teknologi dan Informasi Technology and Information Governance
618	Kode Etik Code of Conduct
626	Pengendalian Gratifikasi Gratification Control
629	Pedoman Perusahaan Terkait Keterlibatan Dalam Aktivitas Politik Corporate Guidelines Related to Engagement in Political Activities
629	Kebijakan Anti Korupsi Anti Corruption Policy
630	Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Goods And Services Procurement Policy
631	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Official Wealth Report (LHKPN)
635	<i>Whistleblowing System</i>
641	Transparansi Praktik Bad Governance Transparency Of Bad Governance Practices

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility

647	Kebijakan Dan Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Policy and Governance of Corporate Social Responsibility
655	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Corporate Social Responsibility in Human Rights
658	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Operasi Yang Adil Corporate Social Responsibility in Fair Operations
662	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibility in Environment
668	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Atas Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Corporate Social Responsibility in Employment, Occupational Health and Safety
685	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/Jasa Serta Konsumen dan Pemasok Corporate Social Responsibility in Responsibility to Product/ Services, Consumers and Suppliers
690	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility in Social Community Development

700 LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN Company Financial Statements

892 KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018 2018 Annual Report Award Criteria

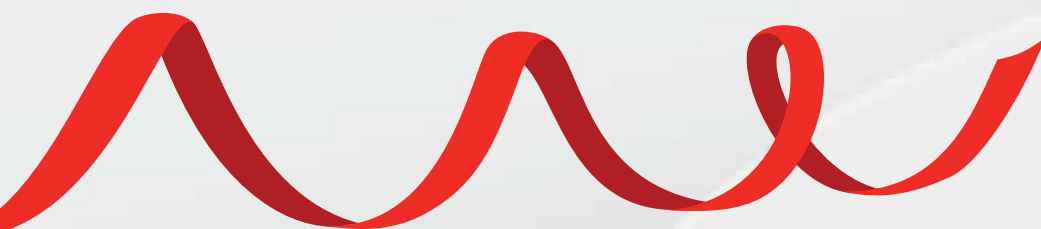


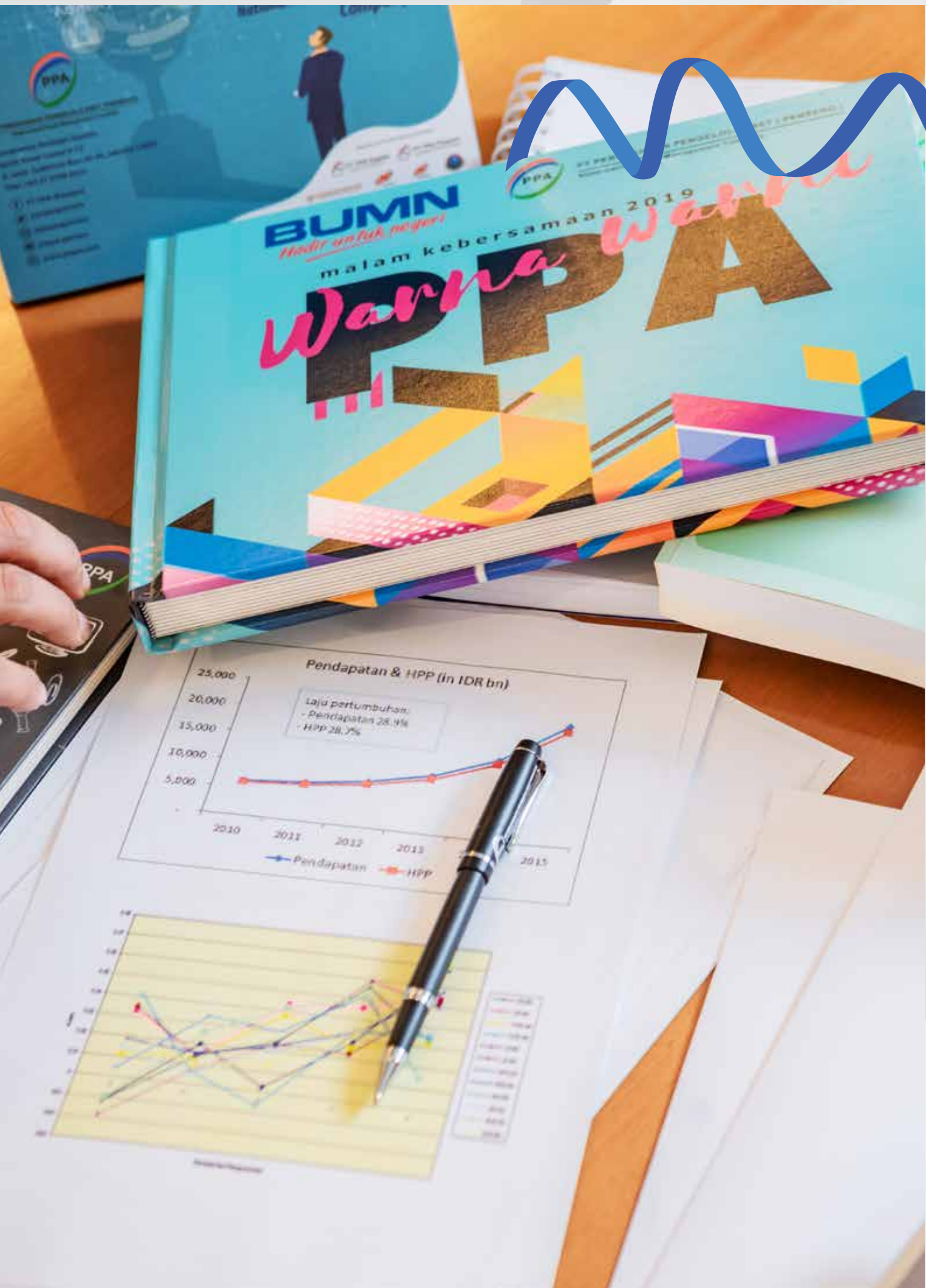


KINERJA PERFORMA 2019

Total aset perusahaan tumbuh hingga **22,74%**, begitu juga pertumbuhan investasi yang meningkat hingga **224,67%** dibandingkan tahun sebelumnya.

Total assets the company grew by **22.74%**, as well as the growth in investments, which increased to **224.67%** compared to the previous year.





IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

KEY FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

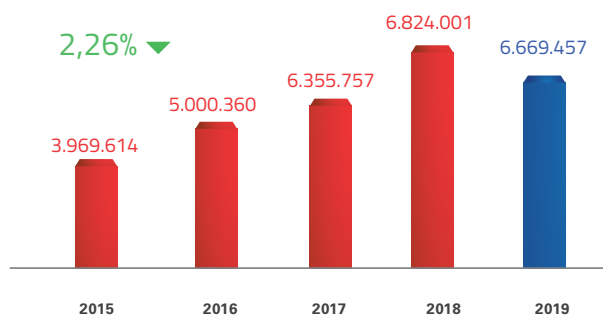
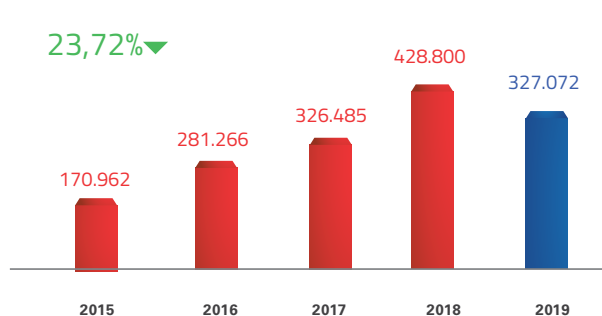
Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(Dalam Jutaan Rupiah)

(In million rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015	YoY 2018- 2019 (%)	CAGR 2015- 2019 (%)
Pendapatan Usaha Revenues							
Pendapatan Jasa Konstruksi Construction Service Revenues	5.783.502	6.077.796	5.768.613	4.658.086	3.613.197	-4,84%	12,48%
Pinjaman yang Diberikan Revenues from Interest and Provision of Loans	198.908	210.458	203.674	175.756	196.457	-5,49%	0,31%
Pendapatan Hasil Investasi Revenues from Investment	273.367	223.398	133.686	135.232	127.533	22,37%	21,00%
Pendapatan Manufaktur Manufacturing Revenues	-	144.629	89.988	-	-	-	n.a
Penjualan Sales	348.251	120.611	62.015	-	-	188,74%	n.a
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi Revenues from Consulting Fee	60.432	41.745	17.859	13.378	11.473	44,76%	51,49%
Pendapatan Properti Property Revenues	-	3.031	4.561	-	-	-	n.a
Pendapatan Sewa alat Revenues from Equipment Rental	-	1.455	-	-	-	-	n.a
Pendapatan Penggantian Biaya Revenues from Reimbursable Cost	4.997	878	26.667	2.029	1.429	469,13%	36,75%
Pendapatan Imbalan Pengelolaan Aset (IPA) Revenues from Asset Management Fee (IPA)	-	-	13.444	13.879	14.365	-	n.a
Pemetaan Mapping	-	-	-	2.000	5.160	-	n.a
JUMLAH PENDAPATAN USAHA Total Revenues	6.669.457	6.824.001	6.355.757	5.000.360	3.969.614	-2,26%	13,85%
Beban Usaha Operating Expenses	(6.289.760)	(6.292.565)	(5.782.914)	(4.586.191)	(3.608.667)	-0,04%	14,90%
Laba Usaha Operating Income	379.697	531.436	572.843	414.169	360.947	-28,55%	1,27%
Pendapatan Bunga Interest income	15.424	15.514	10.785	11.618	12.599	-0,58%	5,19%
Beban Bunga dan Keuangan Interest Expenses and Financial Charges	(89.230)	(76.004)	(65.334)	(103.880)	(104.113)	17,40%	-3,78%

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015	YoY 2018- 2019 (%)	CAGR 2015- 2019 (%)
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi Increase in Fair Value of Investment Properties	-	75.448	11.977	3.273	6.559	- -	n.a
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(159.199)	(174.168)	(16.337)	(137.840)	(105.571)	-8,59% ●	10,82% ●
Bagian Laba Ventura Bersama Share of Profit of Joint Venture	66.706	106.821	133.038	63.283	37.431	-37,55% ●	15,54% ●
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	122.076	(37.387)	(162.042)	(65.404)	(23.530)	-426,52% ●	n.a
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	335.711	441.660	332.930	283.400	185.888	-23,99% ●	15,93% ●
Pajak Penghasilan Income Tax	(8.639)	(12.860)	(6.445)	(2.134)	(14.926)	-32,82% ●	-12,78% ●
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	327.072	428.800	326.485	281.266	170.962	-23,72% ●	17,61% ●
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(10.119)	61.779	250.968	15.750	(40.961)	-116,38% ●	-29,50% ●
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan Total Other Comprehensive Income for the Year	316.951	490.579	577.453	297.016	130.001	-35,39% ●	24,96% ●
Penghasilan Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Income for the Year Attributable To							
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	324.913	426.077	324.045	279.466	170.274	-23,74% ●	17,53% ●
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	2.159	2.723	2.440	1.800	688	-20,71% ●	33,10% ●
Jumlah Total	327.072	428.800	326.485	281.266	170.962	-23,72% ●	17,61% ●
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Comprehensive Income for the Year Attributable To							
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	314.854	467.878	572.411	295.242	129.337	-32,71% ●	24,91% ●
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	2.097	22.701	5.042	1.774	664	-90,76% ●	33,31% ●
Jumlah Total	316.951	490.579	577.453	297.016	130.001	-35,39% ●	24,96% ●
Laba per Saham (dalam Rupiah penuh) Earnings per Share (in full Rupiah)	108.424	142.183	108.134	93.258	85.280	-23,74% ●	6,19% ●

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL DATA HIGHLIGHTSPendapatan Usaha (Rp-juta)
Revenues (Rp-million)Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp-juta)
Profit (Loss) for the Year (Rp-million)

Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Position

(Dalam Jutaan Rupiah)

(In million rupiah)

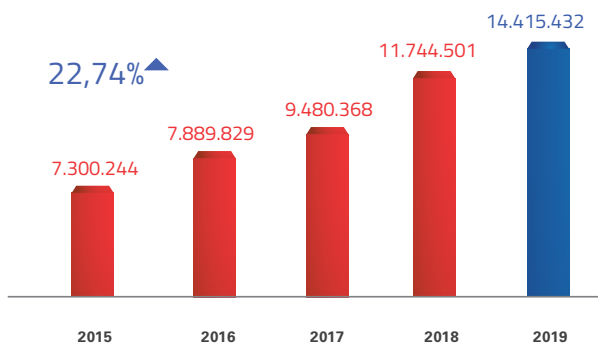
Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015	YoY 2018-2019 (%)	CAGR 2015-2019 (%)
Aset Asset							
Kas dan Setara Kas Cash and cash equivalents	1.107.636	1.365.617	1.694.156	1.534.252	2.346.889	-18,89%	-17,11%
Pinjaman Investasi Jangka Pendek Short-term Investment Loans	1.445.630	445.264	288.944	57.741	27.204	224,67%	170,00%
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization	1.416.472	1.388.273	1.356.385	1.351.876	1.062.301	2,03%	7,46%
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Ventures	321.808	336.085	348.689	340.884	276.005	-4,25%	3,91%
Investasi Jangka Panjang Lainnya Other Long Term Investment	102.940	138.053	41.818	42.535	592	-25,43%	263,13%
Aset Tetap Fixed Assets	1.556.796	1.068.044	716.622	386.165	424.591	45,76%	38,38%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	8.671.359	7.280.098	6.015.024	5.296.363	5.102.888	19,11%	14,17%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	5.744.073	4.464.403	3.465.344	2.593.466	2.197.355	28,66%	27,15%
Jumlah Aset Total Assets	14.415.432	11.744.501	9.480.368	7.889.829	7.300.244	22,74%	18,54%

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015	YoY 2018-2019 (%)	CAGR 2015-2019 (%)
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity							
Liabilitas Jangka Pendek Current liabilities	7.101.679	5.440.230	3.715.530	3.109.266	2.695.688	30,54% ●	27,40% ●
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current liabilities	1.890.210	1.042.228	1.055.147	629.235	740.032	81,36% ●	26,42% ●
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	8.991.888	6.482.458	4.770.677	3.738.501	3.435.716	38,71% ●	27,19% ●
Jumlah Ekuitas Total Equity	5.423.544	5.262.043	4.709.691	4.151.328	3.864.528	3,07% ●	8,84% ●
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	14.415.432	11.744.501	9.480.368	7.889.829	7.300.244	22,74% ●	18,54% ●

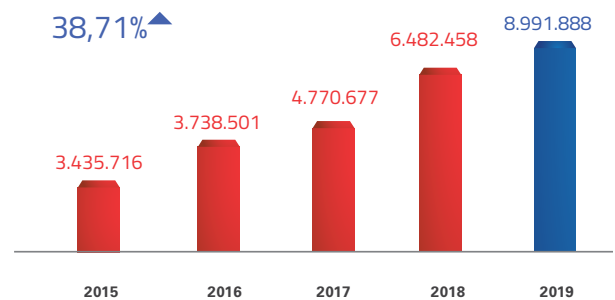
Perusahaan tidak memiliki entitas asosiasi, dengan demikian tidak memiliki akun investasi pada entitas asosiasi.

The company did not have associated entity, Therefore, did not have investment account in associated entity.

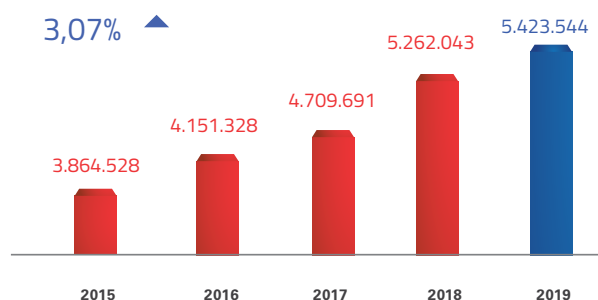
Jumlah Aset (Rp-juta)
Total Assets (Rp-million)



Jumlah Liabilitas (Rp-juta)
Total Liabilities (Rp-million)



Jumlah Ekuitas (Rp-juta)
Total Equity (Rp-million)

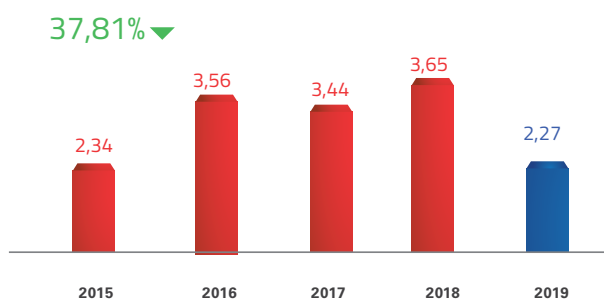
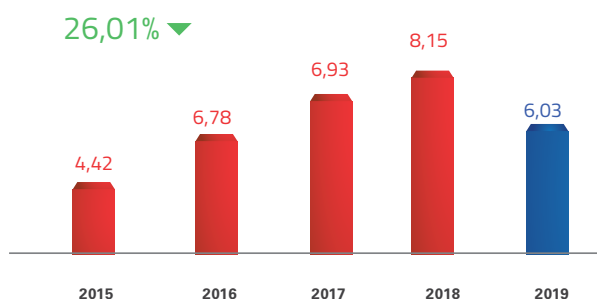
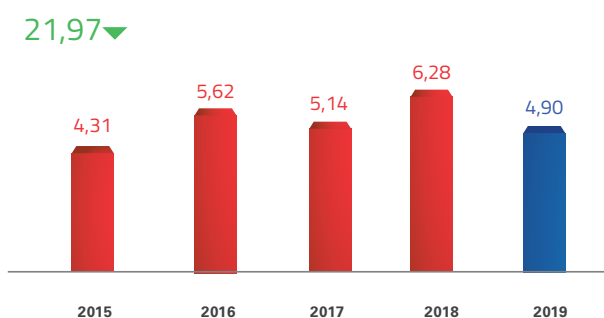
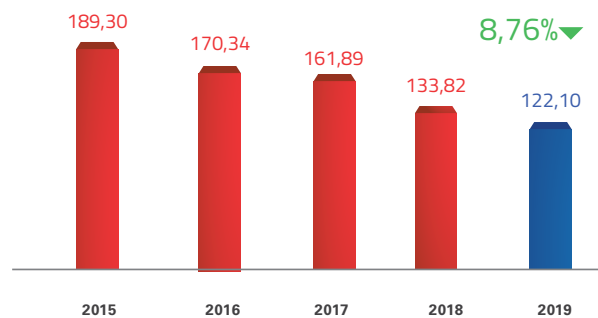


IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

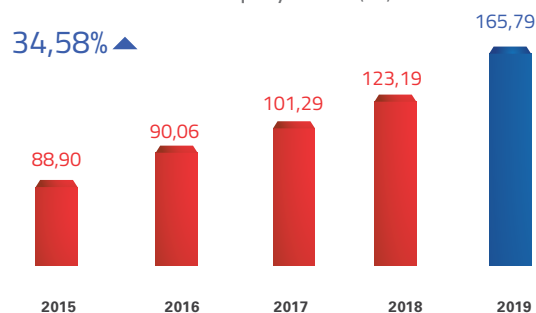
Rasio-rasio Keuangan

Financial Ratio

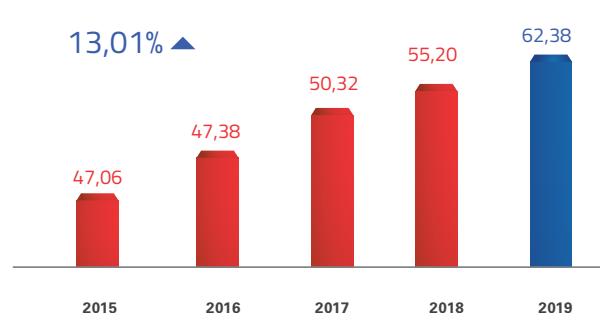
Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015	YoY 2018- 2019 (%)	CAGR 2015- 2019 (%)
Rasio Laba Bersih terhadap Aset (%) Return on Asset Ratio (%)	2,27%	3,65%	3,44%	3,56%	2,34%	-37,81%	-0,76%
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas (%) Return on Equity Ratio (%)	6,03%	8,15%	6,93%	6,78%	4,42%	-26,01%	8,07%
Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan (%) Net Profit Margin (%)	4,90%	6,28%	5,14%	5,62%	4,31%	-21,97%	3,26%
Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar (%) Current Ratio (%)	122,10%	133,82%	161,89%	170,34%	189,30%	-8,76%	-10,38%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	165,79%	123,19%	101,29%	90,06%	88,90%	34,58%	16,86%
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%) Debt to Asset Ratio (%)	62,38%	55,20%	50,32%	47,38%	47,06%	13,01%	7,30%

Rasio Laba Bersih terhadap Aset (%)
Return on Asset (%)Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas (%)
Return on Equity (%)Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan (%)
Net Profit Margin (%)Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar (%)
Current Ratio (%)

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)
Debt to Equity Ratio (%)



Rasio Liabilitas terhadap Aset (%)
Debt to Asset Ratio (%)



IKHTISAR OPERASI DAN ORGANISASI

OPERATIONAL AND ORGANIZATIONAL HIGHLIGHTS

	2019	2018	2017	2016	2015
Penugasan Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN SOEs Restructuring/Revitalization Assignment	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kinerja Performance Indicators	101,40	104,84	102,35	97,9	105,6
Tingkat Kesehatan Perusahaan* Company Soundness Index*	90,00	93,50	94,00	92,50	92,00
Assessment Penerapan GCG** GCG Assessment **	88,53	88,13	88,04	87,47	85,96
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)*** Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) ***	-	511,25	507,50	477,75	437,25

*) Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan kategori "sehat" (AA; $80 < \text{Total Skor} \leq 95$) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

**) Assessment penerapan GCG dengan kategori "sangat baik" menggunakan metode berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

***) Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dengan kategori "good performance" berdasarkan agregat pandangan holistik dari keempat faktor dimensi penilaian ADLI untuk PROSES atau LeTCl untuk Hasil. Dalam menetapkan asumsi kisaran rentang nilai awal disarankan untuk tidak memudahkan dengan cara membandingkan atau merata-ratakan hasil penilaian dari masing-masing dimensi penilaian A, D, L pada penilaian PROSES dan I atau Le, T, C dan I pada penilaian Hasil.

*) Company Soundness Index with the category of "Healthy" (AA; $80 < \text{Total Score} \leq 95$) based on the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 concerning Soundness Level Assessment of State Owned Enterprises

**) Assessment of GCG implementation with the category of "very good" using a method based on a copy of the Decree of Secretary of Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Evaluation and Assessment for the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

***) Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) with the category of "good performance" based on an aggregate holistic view of the four factors of the ADLI assessment dimension for PROCESS or LeTCl for Results. In determining the assumption of a range of initial value, it is recommended not to make it easy by comparing or averaging the assessment result from each of the dimensions of assessment A, D, L in the PROCESS assessment and I or Le, T, C and I in the RESULT assessment.

IKHTISAR SAHAM

SHARE HIGHLIGHTS

Informasi Jumlah Saham

Hingga 31 Desember 2019, PPA tidak menerbitkan saham kepada publik dan tidak mencatat/memperdagangkan sahamnya di bursa efek manapun. Jumlah keseluruhan saham sebanyak 2.996.688 lembar saham atau 100,00% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Information on Number of Shares

As of December 31, 2019, PPA has not issued shares to the public and has not listed/traded its shares on any stock exchange. The total number of shares amounted to 2,996,688 shares or 100.00% is owned by the Republic of Indonesia.

Dividen Saham

Pembagian Dividen Saham untuk tahun buku 2018 yang dibagikan di tahun 2019 dan Dividen Saham untuk tahun buku 2017 yang dibagikan di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Share Dividends

The distribution of Share Dividends for fiscal year 2018 distributed in 2019 and Share Dividends for fiscal year 2017 distributed in 2018 are as follows:

Dividen Saham Share Dividends	2019 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2018) 2019 (for Share Dividends of fiscal year 2018)	2018 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2017) 2018 (for Share Dividends of fiscal year 2017)
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) Cash Dividends Distributed (Rp)	42.608 juta 42,608 million	20.000 juta 20,000 million
Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividends per Share (Rp/share)	14.218	6.674
Rasio Pembayaran Dividen Dividends Payment Ratio	10,00%	6,13%
Tanggal Pengumuman Announcement Date	3 Mei 2019 May 3, 2019	20 Mei 2018 May 20, 2018
Tanggal Pembayaran Payment Date	28 Mei 2019 May 28, 2019	31 Mei 2018 May 31, 2018

Informasi tentang Aksi Korporasi Saham

PPA tidak melakukan aksi korporasi saham di sepanjang tahun 2019. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan serta volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. PPA juga tidak memiliki informasi terkait aksi penghentian sementara perdagangan saham (*Suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*Delisting*).

Information on Corporate Actions of Shares

PPA did not take any corporate action in 2019. Accordingly, there was no information regarding market capitalization based on prices on the Stock Exchange where shares were listed; highest, lowest and closing share price based on prices on the Stock Exchange where shares are listed; trading volume of shares on the Stock Exchange where shares are listed; and information in the form of a chart where the closing price based on prices on the Stock Exchange where shares are listed and the trading volume of shares on the Stock Exchange where shares are listed. PPA also did not have any information regarding the suspension of share trading (*Suspension*) and/or delisting of share (*Delisting*).

INFORMASI TENTANG PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ON ISSUANCE OF BONDS, SHARIA BONDS OR CONVERTIBLE BONDS, AND OTHER FUNDING

PPA memanfaatkan instrumen keuangan lainnya untuk memperkuat permodalan, salah satunya dengan menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) dan Surat Berharga Komersial (SBK)

PPA is utilizing other financial instruments to strengthen its capital, one of which is by issuing Medium Term Notes (MTN) and Commercial Paper (CP)

Hingga akhir tahun 2019, PPA tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar. Namun demikian, di tahun 2019 PPA menerbitkan surat utang jangka menengah, atau *Medium Term Notes* (MTN).

Until the end of 2019, PPA did not issue bonds, sharia bonds, convertible bonds, or other securities, as well as other forms of funding. Therefore, there is no information related to outstanding bonds/sharia bonds/convertible bonds. However, in 2019 PPA issued Medium-Term Notes (MTN).

PPA telah menerbitkan surat utang jangka menengah, atau MTN dan SBK di tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

PPA has issued Medium Term Notes (MTN) and Commercial Paper (CP) in 2019 with the following details:

<i>Medium Term Notes</i>	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)	Tanggal Terbit Issuance Date	Jangka Waktu Period	Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat dari Pefindo Rating from Pefindo
MTN I PPA Tahun 2019 Seri A PPA MTN I 2019 Series A	300.000	8 November 2019 November 8, 2019	2 tahun 2 years	8 November 2021 November 8, 2021	10,05% p.a	idA (Single A)
MTN I PPA Tahun 2019 Seri B PPA MTN I 2019 Series B	450.000	8 November 2019 November 8, 2019	3 tahun 3 years	8 November 2022 November 8, 2022	10,30% p.a	idA (Single A)
Surat Berharga Komersial Commercial Paper	100.000	27 November 2019 November 27, 2019	1 tahun 1 year	28 November 2020 November 28, 2020	7,50% p.a	idA (Single A)

KILAS PERISTIWA

EVENT HIGHLIGHTS

07. JANUARI | JANUARY



Perusahaan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PPA tahun 2019, di Ruang Rapat Kementerian BUMN. Acara ini dipimpin oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, serta dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT PPA.

The Company has held a General Meeting of Shareholders on the Corporate Work Plan and Budget of PT PPA in 2019, in the Meeting Room of the Ministry of SOEs. The event was led by Deputy Minister of Restructuring and Business Development of the Ministry of SOEs, Aloysius Kiik Ro, and was attended by Board of Commissioners and Board of Directors of PT PPA.

07. JANUARI | JANUARY



Perusahaan menggelar *Town Hall Meeting* di *Conference Room* lantai 9 untuk menyampaikan kinerja tahun 2018 dan harapan tahun 2019 kepada karyawan yang dihadiri oleh seluruh karyawan PT PPA, PT PPAF dan PT PPAK, sekaligus sebagai ajang silaturahmi awal tahun bagi Manajemen dan Karyawan.

The Company held a *Town Hall Meeting* in the 9th Floor *Conference Room* to deliver 2018 performance and 2019 expectations to employees attended by all employees of PT PPA, PT PPAF and PT PPAK, as well as an early annual gathering event for Management and Employees.

16. JANUARI | JANUARY



Untuk pertama kalinya di tahun 2019 Perusahaan melaksanakan *PPA Group - 1st Quarter Meeting* di *Conference Room* lantai 9, yang dihadiri oleh jajaran Direksi PT PPA beserta Direksi dari anak dan cucu perusahaan. Agenda kegiatan ini adalah Pemaparan *Highlight* Pencapaian Kinerja 2018 dan Rencana Kegiatan dari masing-masing Perusahaan.

For the first time in 2019 the Company held *PPA Group - 1st Quarter Meeting* in the 9th Floor *Conference Room*, which was attended by Board of Directors of PT PPA along with Board of Directors of the Company's subsidiaries and subsidiaries of subsidiary. The agenda of this activity is the Exposure of 2018 Performance Achievements Highlights and the Activity Plans of each Company.

16. JANUARI | JANUARY



Bertempat di Ruang Teamwork PT PPA, Perusahaan telah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja antara PT PPA dengan PT Polytama Propindo dengan plafon sebesar Rp100 miliar.

Located at PT PPA Teamwork Room, the Company has signed the Working Capital Loan Agreement between PT PPA and PT Polytama Propindo with a loan ceiling of Rp100 billion.

17. JANUARI | JANUARY



Perusahaan melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Investasi Proyek Pengembangan Pabrik Pupuk dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja kepada PT Magnesium Gosari Internasional dengan total fasilitas pinjaman yang diberikan sebesar Rp251 miliar, sebagai komitmen PT PPA mendukung pengembangan industri pupuk berbasis *dolomit* melalui PT MGI.

The Company signed an Agreement on Providing Investment Loan Facility for Fertilizer Plant Development Project and Working Capital Loan Facility Agreement to PT Magnesium Gosari Internasional with a total loan facility of Rp251 billion, as PT PPA's commitment to support the development of dolomite-based fertilizer industry through PT MGI.

18. JANUARI | JANUARY



Perusahaan melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Wadah Milenial PT PPA yang dihadiri oleh Generasi Milenial PT PPA.

The Company held a socialization on the Formation of PT PPA Millennial Forum, which was attended by the Millennial generation of PT PPA.

24 JANUARI | JANUARY



Perusahaan melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Investasi Pendanaan Proyek Pengadaan Kapal *Floating Storage Unit* dengan PT Lintas Samudra Sejahtera - Jaya Samudra Karunia Internasional Group.

The Company entered into a Signing of the Investment Cooperation Agreement for the Procurement of Floating Storage Ship Unit Project with PT Lintas Samudra Sejahtera - Jaya Samudra Karunia International Group.

31. JANUARI - 1 FEBRUARI | JANUARY - 1 FEBRUARY



Perusahaan melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PPA Tahun 2019.

The Company held a Work Meeting with the agenda of PT PPA's 2019 Corporate Work Plan and Budget (Budget and Planning).

31. JANUARI | JANUARY



10 (sepuluh) Millennials PT PPA hadir memberi dukungan Partisipasi 1000 Millennials BUMN dalam acara "*Green Fest 2019*" di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk bertujuan meningkatkan kepedulian dan antusiasme generasi millennial Indonesia terhadap bidang agrikultur, termasuk mendorong lahirnya ide-ide dan inovasi baru di bidang tersebut, sekaligus mendorong para millennial untuk berkarya di daerah masing-masing serta meningkatkan gaya hidup sehat.

10 (ten) Millennials of PT PPA was present to support the participation of 1000 Millennial SOEs in the "*Green Fest 2019*" event in Jakarta. This activity aims to increasing the awareness and enthusiasm of the Indonesian millennial generation in the field of agriculture, including encouraging the birth of new ideas and innovations in this field, as well as encouraging millennials to achieve in their respective areas and improve healthy lifestyles.

KILAS PERISTIWA
EVENT HIGHLIGHTS

08 FEBRUARI | FEBRUARY



PPA melakukan penyaluran bantuan pasca bencana banjir dan longsor Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Gowa yang terjadi pada 22 Januari 2019. Penyaluran bantuan dilakukan oleh *Millenials* PT PPA yang dikoordinir oleh Unit PKBL PT PPA serta bersinergi dengan PT Pelindo IV (Persero) selaku koordinator BUMN dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa untuk proses penyaluran di lapangan.

PPA distributed donation in the amount of Rp51 million after the flood and landslide disaster in South Sulawesi, especially in Gowa Regency, which occurred on January 22, 2019. The distribution of donation was carried out by *Millenials* of PT PPA, coordinated by PT PPA CSR Unit and synergized with PT Pelindo IV (Persero) as the SOEs coordinator and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Gowa Regency for the distribution process in the field

19. FEBRUARI | FEBRUARY



PPA bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Donor Darah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun PT PPA ke-15.

PPA in collaboration with the Indonesian Red Cross DKI Jakarta Province held a Blood Donation to celebrate the PT PPA's 15th Anniversary of PT PPA Birthday.

08.-10. FEBRUARI | FEBRUARY



PPA melaksanakan Rapat Kerja Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen PT PPA Tahun 2019 dalam rangka Pemaparan Realiasi Kinerja Tahun 2018 serta Pemaparan Strategi dan Rencana Kerja untuk pencapaian target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dari masing-masing Divisi.

PPA held the 2019 Work Meeting of PT PPA's Business Advisory and Asset Management Directorate in the context of Exposure of 2018 Performance Realization and Explanation of Strategies and Work Plans to achieve the target of 2019 Corporate Work Plan and Budget (Budget and Planning) from each Division

15. FEBRUARI | FEBRUARY



PPA mengadakan acara Penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara PT Bank Mega dan PT PPA, dengan total pinjaman PT PPA di Bank Mega menjadi Rp1 triliun.

PPA held the signing of Working Capital Credit Agreement between PT Bank Mega and PT PPA, with PT PPA's total loan at Bank Mega becoming Rp1 trillion.

22. FEBRUARI | FEBRUARY



Perusahaan melaksanakan acara *Meet and Greet*: Mengenal Lebih Dekat Ibu Loeke Larasati Agoestina, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

The Company held a Meet and Greet event: Getting To Know Ms. Loeke Larasati Agoestina, Deputy Attorney General for Civil and State Administration.

26. FEBRUARI | FEBRUARY



Perusahaan melaksanakan penandatanganan Perjanjian Pokok Kerja Sama Investasi dan Operasional antara PT PPA dan PT Rejeki Intilogam Jaya. Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Surat Utang Konversi PT RILJ, serta Penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja dan Investasi Kepada PT RILJ dengan plafon maksimum sebesar Rp150 miliar.

The Company signed the Principal Investment and Operational Cooperation Agreement between PT PPA and PT Rejeki Intilogam Jaya. The Signing of PT RILJ's Conversion Debt Sale and Purchase Agreement, and the Signing Agreement for the Provision of Working Capital and Investment Loans to PT RILJ with a maximum loan ceiling of Rp150 billion.

28. FEBRUARI | FEBRUARY



Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja antara PT PPA dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan plafon sebesar Rp140 miliar. Kerja sama ini dilakukan guna mendukung kegiatan investasi PPA.

Signing of the Deed of Working Capital Credit Agreement between PT PPA and PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk with a loan ceiling of Rp140 billion. This collaboration is carried out to support PPA investment activities.

8. MARET | MARCH



Penandatanganan Perjanjian penambahan plafon fasilitas pinjaman sebesar Rp37,5 miliar kepada PT National Utility Helicopters dengan jangka waktu sampai dengan 25 Juli 2021.

Signing of the agreement for addition of loan facility ceiling of Rp37.5 billion to PT National Utility Helicopters for a period up to July 25, 2021.

28. FEBRUARI | FEBRUARY



Penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Penambahan Plafon Kredit Swadana antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT PPA dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp226 miliar dan Rp378 miliar, serta penambahan plafon Kredit Swadana sebesar Rp90 miliar.

Signing of the Working Capital Credit Agreement and Signing of the Agreement on Swadana Credit Ceiling Addition between PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and PT PPA with the Working Capital Credit Agreement of Rp226 billion and Rp378 billion, and the addition of Swadana Credit Ceiling of Rp90 billion.



22. MARET | MARCH

Penandatanganan Perjanjian Pengambilalihan PT Rejeki Inti Logam Jaya.

Signing of the Takeover Agreement of PT Rejeki Inti Logam Jaya.

KILAS PERISTIWA
EVENT HIGHLIGHTS

25.-29. MARET | MARCH



Perusahaan melaksanakan Asesmen Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul PT PPA tahun 2018.

The Company conducted an Assessment on PT PPA's Implementation of Superior Performance Assessment Criteria in 2018.

01. APRIL | APRIL



Pengangkatan Dikdik Permadi Yoffana sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen PT PPA, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-76/MBU/01/2019 tertanggal 1 April 2019.

Appointment of Dikdik Permadi Yoffana as Business Advisory and Asset Management Directorate of PT PPA, in accordance with the Decree of Minister of SOEs as the GMS of PT Perusahaan Pengelola Aset Number SK-76/MBU/01/2019 dated April 1, 2019.

05. APRIL | APRIL



Coffee Afternoon bertema "Shape Your Future"

Coffee Afternoon adalah wadah pertemuan karyawan milenial PT PPA yang bertujuan untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan mendapatkan inspirasi.

Coffee Afternoon with the theme "Shape Your Future"

Coffee Afternoon is a meeting forum for PT PPA's millennial employees with the purpose of sharing information, express aspirations and get inspiration.

10. APRIL | APRIL

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek Pengembangan Properti di kawasan Danau Bogor Raya antara PT Adhi Commuter Properti, PT Taman Kuling Raya, PT Sejahtera Eka Graha dan PT PPA.

Signing of the Cooperation Agreement on Property Development Project in the area of Lake Bogor Raya between PT Adhi Commuter Properti, PT Taman Kuling Raya, PT Sejahtera Eka Graha and PT PPA.



12. APRIL | APRIL



PPA melakukan penyaluran bantuan kepada warga di Kecamatan Dayeuhkolot dan Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang mengalami bencana banjir luapan Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum pada 8 April 2019.

PPA distributed donation to residents in Dayeuhkolot District and Baleendah District, Bandung Regency, West Java, which were affected by Cikapundung River and Citarum River floods on April 8, 2019.

21. APRIL | APRIL



PPA menyampaikan komitmennya membangun negeri melalui Program Beasiswa Tingkat Sarjana Anak Mentawai 2019/2020 pada Seminar Nasional "Redesain Paradigma Tantangan Globalisasi: Kompetisi vs Kolaborasi" yang diselenggarakan oleh Yayasan Aksi Peduli Bangsa di Padang.

PPA conveyed its commitment to develop the country through the Mentawai Children's Undergraduate Scholarship Program 2019/2020 at the National Seminar on "Redesigning the Paradigm of Globalization Challenges: Competition vs Collaboration" organized by Aksi Peduli Bangsa Foundation in Padang.

30. APRIL | APRIL



Telah dilaksanakan PPA Group - 1st Quarter Meeting yang dihadiri oleh Direksi PT PPA dan Direksi dari anak dan cucu perusahaan PT PPA, dengan agenda Pemaparan Pencapaian Kinerja Triwulan-1 dari masing-masing perusahaan. Acara pertemuan rutin ini diadakan dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan sebagai wadah komunikasi, serta media *monitoring* atas *performance* dari masing-masing perusahaan di lingkungan PPA Group.

PPA Group - 1st Quarter Meeting has been held and attended by Board of Directors of PT PPA and Board of Directors of PT PPA's subsidiaries and subsidiaries of subsidiary, with the agenda of acknowledging the 1st Quarter Performance Achievement of each company. This regular meeting was held in order to increase rapport and as a forum for communication, as well as media *monitoring* of the performance of each company in PPA Group.

03. MEI | MAY



Bertempat di GBI Anastasis Pulo Gebang, Difabel Agape Ministry dengan didukung oleh Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PPA melaksanakan Bakti Paskah 2019, yaitu pemberian bantuan sembako kepada para penyandang cacat tuna netra beserta keluarganya.

Located at GBI Anastasis Pulo Gebang, Difabel Agape Ministry and supported by PT PPA Partnership and Community Development Program Unit carried out the 2019 Easter Service, namely the provision of basic food assistance to people with visual impairments and their families.

KILAS PERISTIWA
EVENT HIGHLIGHTS

03 MEI | MAY



PPA melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2018.

PPA held a General Meeting of Shareholders (GMS) on the Financial Statements of PT PPA for the 2018 Fiscal Year.

10. MEI | MAY



Penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Piutang antara PT PPA dan PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Signing of the Addendum Agreement on Receivables Management Agreement between PT PPA and PT Bank Tabungan Negara (Persero).

10. MEI | MAY



Sharing session "Be Passionate with Your Hobby", bersama Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja PT PPA, Ajar Setiadi.

Sharing session "Be Passionate with Your Hobby", with PT PPA's Finance and Support Directorate, Ajar Setiadi.

20. MEI | MAY



Milenial PPA berbagi berkah bersama anak-anak yatim dan dhuafa di Panti Asuhan Terpadu Yatim dan Dhuafa Al-Andalusia.

PPA's Millennial shares blessings with orphans and underprivileged orphans at Al-Andalusia Dhuafa and Orphanage.

20. MEI | MAY



PPA melakukan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 Tahun 2019.

PPA conducted the 111th National Awakening Day Commemoration Ceremony in 2019.

22. MEI | MAY



Buka Puasa Keluarga Besar PPA.

Break-fasting of PPA Big Family.

23. MEI | MAY



Penyerahan Bantuan Dana untuk Sarana Prasarana/Operasional, Santunan dan Bingkisan untuk 1000 Anak Yatim dan Duafa, dengan nilai total bantuan sebesar Rp500 juta.

Submission of Funds Assistance for Infrastructure/Operational Facilities, Compensation and Gifts for 1000 Orphans and Duafa, with a total value of Rp500 million.

23. MEI | MAY



PPA bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Semen Padang bersinergi melaksanakan Safari Ramadan 1440H di Provinsi Sumatera Barat, menjangkau 1.000 anak dari Pondok Pesantren, Panti Asuhan dan Sekolah Luar Biasa di beberapa kabupaten/kota.

PPA together with PT Kereta Api Indonesia (Persero) and PT Semen Padang in synergy to carry out the Ramadan Safari 1440H in West Sumatra Province, reaching 1000 children from Islamic Boarding Schools, Orphanages and Special Schools in several districts/cities.

24. MEI | MAY



Pasar Murah 1000 Paket Sembako di Padang bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Semen Padang.

The Cheap Market of 1000 Basic Food Packages in Padang with PT Kereta Api Indonesia (Persero) and PT Semen Padang.

27. MEI | MAY



Buka Puasa Bersama PPA dan Forum Wartawan BUMN.

Iftar with PPA and SOEs Journalists Forum.

30. MEI | MAY



PPA melepas ratusan pemudik tujuan Provinsi Lampung, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dalam rangka mudik gratis BUMN.

PPA released hundreds of travelers to the provinces of Lampung, Central Java and DI Yogyakarta in the context of SOEs free homecoming.

01. JUNI | JUNE



PPA melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila.

PPA held the Pancasila Birthday Commemoration Ceremony.

02. JUNI | JUNE



PPA menyalurkan 1.500 Paket Pangan Murah di Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

PPA distributed 1,500 Cheap Food Packages in Sukun District, Malang City, East Java Province.

10. JUNI | JUNE



Halal Bihalal Keluarga Besar PPA.

Halal Bihalal of PPA Big Family.

KILAS PERISTIWA
EVENT HIGHLIGHTS

12 JUNI | JUNE



PPA memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Varuna Tirta Prakasya, yaitu BUMN yang bergerak di bidang usaha jasa logistik nasional dan internasional.

PPA provided working capital loans to PT Varuna Tirta Prakasya, a state-owned company engaged in the business of national and international logistics services.

14 JUNI | JUNE



Penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman *Standby Loan* antara PT PPA dengan PT Pratama Persada Airborne dengan plafon sebesar Rp10 miliar.

Signing of the Standby Loan Lending Agreement between PT PPA and PT Pratama Persada Airborne with a loan ceiling of Rp10 billion.

30. JUNI | JUNE



PPA turut berpartisipasi dalam acara *Grand Launching LinkAja* bersama ribuan karyawan dari berbagai BUMN.

PPA participated in the LinkAja Grand Launching event with thousands of employees from various SOEs.

01. JULI | JULY



PPA dan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ("Bank Banten") melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional.

PPA and PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ("Bank Banten") signed an agreement for the extension of Transactional Working Capital Credit Facility.

16. JULI | JULY



PPA menggelar Program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) di Kota Padang bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Semen Padang.

PPA held the Student Know Archipelago Program (SMN) in Padang City with PT Kereta Api Indonesia (Persero) and PT Semen Padang.

23. JULI | JULY



Pemberhentian dengan hormat atas Bapak Henry Sihotang yang berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Utama, dan Bapak Ajar Setiadi yang berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Serta pemberhentian dengan hormat atas Ibu Lydia Silvanna Djaman dari jabatannya sebagai Komisaris, serta pada saat bersamaan dilakukan pengangkatan atas Bapak Iman Rachman sebagai Direktur Utama, dan pengangkatan Bapak R. Muhammad Irwan sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja.

Honorably dismissal of Henry Sihotang who ended his term of office as President Director, and Ajar Setiadi who ended his term as Finance and Support Director and Honorably dismissal of Lydia Silvanna Djaman who ended his term of office as Commissioner, as well as the appointment of Iman Rachman as President Director, and the appointment of R Muhammad Irwan as Finance and Support Director.

30. JULI | JULY



PPA melaksanakan *Group Meeting* yang dihadiri oleh Direksi PT PPA dan Direksi dari anak dan cucu perusahaan dengan agenda Review Kinerja Triwulan II.

PPA held a Group Meeting which was attended by Board of Directors of PT PPA and subsidiaries with the agenda of Exposure of the 2nd Quarter Performance review.

05. AGUSTUS | AUGUST



PPA dan PT Bahana Artha Ventura (PT BAV) telah melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2019.

PPA and PT Bahana Artha Ventura (PT BAV) have signed a Memorandum of Understanding on the Distribution of Partnership Program in 2019.

06. AGUSTUS | AUGUST



Penyerahan salinan Surat Keputusan dimaksud oleh Direktur Utama PT PPA, Bapak Iman Rachman, selaku Pemegang Saham mayoritas PT PPA Kapital, kepada Ibu Lengga Nurullah yang diangkat sebagai Direktur PT PPA Kapital dan Bapak Fatah Setiawan Topobroto yang berakhir masa tugasnya.

Submission of a copy of the Decree referred to by President Director of PT PPA, Iman Rachman, as the major shareholder of PT PPA Kapital, to Lengga Nurullah who was appointed as Director of PT PPA Kapital and Fatah Setiawan Topobroto who ended his term of office.

13. AGUSTUS | AUGUST



PPA Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) mengadakan aksi donor darah dalam rangka memperingati HUT RI ke-74.

PPA in collaboration with the Indonesian Red Cross (PMI) held a blood donation in commemoration of the 74th Indonesian Independence Day.

17. AGUSTUS | AUGUST



Kegiatan Pasar Murah BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN) di kota Padang bersama PT KAI dan PT Semen Padang.

Bazaar by SOEs Present for the Country (BHUN) in the city of Padang with PT KAI and PT Semen Padang.

KILAS PERISTIWA
EVENT HIGHLIGHTS

17. AGUSTUS | AUGUST



PPA melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74.

PPA held the 74th Indonesian Independence Day Commemoration Ceremony.

20. AGUSTUS | AUGUST



PPA dan PT Bintang Abadi Sempurna (PT BAS) telah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Investasi dengan plafon sebesar Rp50 miliar.

PPA and PT Bintang Abadi Sempurna (PT BAS) have signed an Investment Cooperation Agreement with a loan ceiling of Rp50 billion.

25.-26. AGUSTUS | AUGUST



PPA berpartisipasi dalam *Workshop Manual Brew Bina Barista Muda* bertempat di Café Men Bar yang berlokasi di Komplek Pajak, Cipadu, Kota Tangerang Selatan.

PPA participated in the Manual Brew Workshop of Bina Barista Muda located at Café Men Bar located in the Tax Complex, Cipadu, South Tangerang City.

30 AGUSTUS | AUGUST



PPA menggelar *Kick Off Meeting* penerbitan *Medium Term Notes* (MTN), Surat Berharga Komersial (SBK) dan Obligasi PT PPA tahun 2019. PT PPA berencana akan menerbitkan MTN sebesar Rp750 miliar, SBK sebesar Rp100 miliar dan Obligasi sebesar Rp1 triliun.

PPA held a Kick Off Meeting for the issuance of Medium Term Notes (MTN), Commercial Paper (CP) and Bonds of PT PPA in 2019. PT PPA plans to issue MTN of Rp750 billion, CP of Rp100 billion and Bonds of Rp1 trillion.

25. SEPTEMBER | SEPTEMBER



PPA menggelar Sosialisasi Rencana Penerbitan *Medium Term Notes* I PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2019.

PPA held a socialization plan for the Issuance of 2019 Medium Term Notes I of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

26. SEPTEMBER | SEPTEMBER



Milenials PPA menggalang donasi dari seluruh karyawan dengan total dana terkumpul sebesar Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk memberikan bantuan di bidang pendidikan dalam bentuk pembangunan gedung sekolah permanen di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi yang terdampak bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 28 September 2018.

PPA Millennials collected donation from all employees with a total fund of Rp76,000,000 (seventy-six million rupiah) to provide assistance in education in the form of construction of permanent school building in Dolo District, Sigi Regency affected by the earthquake and tsunami natural disaster on September 28, 2018.

17. OKTOBER | OCTOBER



PPA bersinergi dengan PT KAI dan PT Semen Padang meneruskan rangkaian Program BUMN Hadir untuk Negeri (BHUN) di Provinsi Sumatera Barat. Ketiga BUMN tersebut bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

PPA in synergy with PT KAI and PT Semen Padang continued the series of SOEs Present for the Country (BHUN) Program in West Sumatra Province. These three SOEs collaborated with the National Narcotics Agency (BNN) of West Sumatra Province and held the socialization on the Prevention, Eradication, Abuse and Circulation of Narcotics Darkness (P4GN).

26. SEPTEMBER | SEPTEMBER



PPA berkerja sama dengan Laz Nasional Yakesma telah menyalurkan bantuan senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) kepada korban terdampak kabut asap di wilayah Riau dan Kalimantan Tengah.

PPA in collaboration with Laz National Yakesma has distributed donation in the amount of Rp70,000,000 (seventy million Rupiah) to victims affected by the haze in Riau and Central Kalimantan regions.

18. OKTOBER | OCTOBER

PPA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) menandatangani Kesepakatan Bersama terkait Sinergitas Pembiayaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat.

PPA, the Government of West Java Province and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten, Tbk (BJB Bank) signed a Joint Agreement related to the Synergy of Financing and Development of Regional Owned Enterprises of West Java Province.

22. OKTOBER | OCTOBER



11.-13. OKTOBER | OCTOBER



Dewan Komisaris dan Direksi PT PPA bersama Direksi entitas anak yaitu PT PPA Kapital, PT PPA Finance dan PT Ninda Karya (Persero) menghadiri Rapat Kerja dengan agenda Pembahasan Perkembangan Pencapaian Target RKAP Tahun 2019 bertempat di Bandung.

Board of Commissioners and Board of Directors of PT PPA together with Board of Directors of its subsidiaries, PT PPA Kapital, PT PPA Finance and PT Ninda Karya (Persero) attended the Work Meeting with the agenda of Discussing the Progress of 2019 Budget and Planning Targets Achievement, located in Bandung.



PPA telah menyalurkan beasiswa kepada 12 orang mahasiswa/i asli Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sedang menempuh pendidikan jenjang Sarjana di berbagai universitas di Kota Padang. Beasiswa yang telah disalurkan senilai Rp144 juta (seratus empat puluh empat juta Rupiah). PT PPA memelopori penyaluran beasiswa pendidikan kepada anak-anak dari pedalaman Mentawai yang saat ini telah diikuti oleh beberapa BUMN lainnya.

PPA has distributed scholarships to 12 students from Mentawai Islands Regency who are pursuing their undergraduate education at various universities in the city of Padang. Scholarships that have been distributed amounted to Rp144 million (one hundred forty four million Rupiah). PPA pioneered the distribution of educational scholarships to children from Mentawai inland, which has now been followed by several other SOEs.

KILAS PERISTIWA
EVENT HIGHLIGHTS

25. OKTOBER | OCTOBER



PPA menyelenggarakan Diskusi *Friday Afternoon* dengan topik terkait *Governance* (tata kelola), *Risk* (Pengendalian Risiko), dan *Compliance* (Kepatuhan) atau GRC dengan narasumber Bapak Hendy Fakhruddin dari perusahaan konsultan Crowe Indonesia.

PPA held Friday Afternoon Discussion with the topics of Governance, Risk and Compliance or GRC with guest speaker Hendy Fakhruddin from Crowe Indonesia consulting company.

25. OKTOBER | OCTOBER



PPA meraih penghargaan "The Best SOEs 2019" (BUMN Terbaik) kategori BUMN selama 5 tahun berturut-turut pada ajang Infobank State Owned Enterprises (SOE) Award 2019. PT PPA juga menerima penghargaan atas kinerja tahun 2018 yang dinilai "Sangat Bagus" atau *Excellent*.

PPA won "The Best SOEs 2019" of SOEs category for 5 consecutive years at the 2019 Infobank State Owned Enterprises (SOE) Award. PT PPA also received an award for 2018 performance rated "Excellent".

28. OKTOBER | OCTOBER



Town Hall Meeting mengenai capaian kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2019.

Town Hall Meeting regarding performance achievements up to the third quarter of 2019.

28. OKTOBER | OCTOBER



PPA melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91.

PPA held the 91st Youth Oath Day commemoration ceremony.

29. OKTOBER | OCTOBER



Direktur Investasi PT PPA Bapak Nasrizal Nazir menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Economic & Capital Market Outlook 2020 yang diselenggarakan oleh Majalah Investor dengan tema "Proyeksi Sektor-sektor Unggulan dan Produk-produk Investasi yang Menguntungkan di Tahun 2020".

PT PPA's Investment Director Nasrizal Nazir was one of the speakers at the 2020 Economic & Capital Market Outlook Seminar organized by Investor Magazine with the theme "Leading Sectors & Profitable Investment Products Outlook in 2020".

01. NOVEMBER | NOVEMBER



PPA menandatangani Perjanjian Penerbitan *Medium Term Notes I* Tahun 2019 senilai Rp750 miliar.

PPA signed the 2019 Medium Term Notes I Issuance Agreement worth Rp750 billion.

04. NOVEMBER | NOVEMBER



PPA menjalin kerja sama dengan perusahaan bidang peternakan unggas yaitu PT Widodo Makmur Unggas.

PPA has formed a partnership with a poultry farm company, PT Widodo Makmur Unggas.

06. NOVEMBER | NOVEMBER



PPA dan Bank BJB menandatangani perjanjian kredit modal kerja di Bandung, Jawa Barat.

PPA and BJB Bank signed a working capital loan agreement in Bandung, West Java.

07. NOVEMBER | NOVEMBER



PPA Group Meeting membahas perkembangan capaian kinerja PT PPA serta anak dan cucu perusahaan sampai dengan triwulan III tahun 2019.

PPA Group Meeting discussed the progress of performance achievements of PT PPA as well as its subsidiaries until the third quarter of 2019.

11. NOVEMBER | NOVEMBER



PPA melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2019.

PPA held a Heroes Day commemoration ceremony in 2019.

11.-13. NOVEMBER | NOVEMBER



Direktur Utama PPA Bapak Iman Rachman menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Nasional *Tax Forum* BUMN 2019 yang diselenggarakan oleh Tax Forum BUMN di Surabaya, Jawa Timur. Seminar nasional mengangkat tema 'Harmonisasi Aturan Perpajakan yang Berkeadilan di Era Transformasi Digital untuk Meningkatkan Penerimaan Negara'.

PPA's President Director Iman Rachman was one of the speakers at the 2019 SOEs Tax Forum National Seminar organized by the SOEs Tax Forum in Surabaya, East Java. The national seminar raised the theme 'Harmonization of Equitable Tax Laws in the Era of Digital Transformation to Increase State Revenue'.

KILAS PERISTIWA
EVENT HIGHLIGHTS

14. - 16. NOVEMBER | NOVEMBER



PPA menyelenggarakan *media gathering* PPA selama 3 hari di Hotel Grand Mecure Bandung. *Media gathering* diikuti oleh perwakilan jurnalis dari 20 media cetak dan *online*.

PPA held a PPA media gathering for 3 days in Bandung. The media gathering was attended by representatives of journalists from 20 print and online media.

21. NOVEMBER | NOVEMBER



PPA menanam 300 bibit pohon mangrove di Taman Wisata Angke Kapuk, Jakarta Utara dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia menggandeng Komunitas KeMANGTEER atau KeSEMat Mangrove *Volunteer*.

PPA planted 300 mangrove tree seedlings in Taman Wisata Angke Kapuk, North Jakarta in commemoration of World Tree Day in partnership with KeMANGTEER Community or KeSEMat Mangrove Volunteer.

27. NOVEMBER | NOVEMBER



PPA menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK), dimana PPA menjadi salah satu perusahaan pertama sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 di Indonesia yang menerbitkan SBK.

PPA issued Commercial Paper (CP), where PPA is one of the first since the issuance of Bank Indonesia regulation number 19/9/PBI/2017 companies in Indonesia to issue CP.

28. NOVEMBER | NOVEMBER



PPA menjalin kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkait pengambilalihan dan pengelolaan aset bermasalah atau NPL BRI.

PPA cooperated with PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) in the acquisition of BRI's Non Performing Loans (NPL).

29. NOVEMBER | NOVEMBER



PPA menjalin kerja sama dengan perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yaitu PT Varia Intra Finance ("PT VIF") dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dengan plafon sebesar Rp160 miliar.

PPA cooperated with multifinance companies, namely PT Varia Intra Finance ("PT VIF") in terms of providing financing facilities with a loan ceiling of Rp160 billion.

03. DESEMBER | DECEMBER



PPA melalui program Bina Lingkungan menyalurkan bantuan Program Beasiswa Anak Autis melalui Rumah Autis dalam naungan Cagar Foundation.

PPA through the Community Development program distributed donation for the Autistic Children Scholarship Program through the Autistic Home under Cagar Foundation.

06. DESEMBER | DECEMBER



PPA memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja kepada PT Gasuma Federal Indonesia (PT GFI), yaitu perusahaan yang bergerak di sektor energi khususnya produksi gas suar (*flare gas*).

PPA provided working capital financing facilities to PT Gasuma Federal Indonesia (PT GFI), which is a company engaged in the energy sector, especially the production of flare gas.

06. DESEMBER | DECEMBER



PPA memberikan pembiayaan dana talangan sebesar Rp20,8 miliar kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

PPA provided a bridge financing of Rp20.8 billion to PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

KILAS PERISTIWA
EVENT HIGHLIGHTS

11. DESEMBER | DECEMBER



Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan *Korea Asset Management Corporation* (KAMCO). Kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi, pengembangan kompetensi karyawan dan penajakan peluang investasi pada NPL perbankan antara kedua belah pihak.

Signing of the Memorandum of Understanding with Korea Asset Management Corporation (KAMCO). The cooperation includes the exchange of information, employee competency development and exploring investment opportunities in Non-Performing Loan (NPLs) between the two parties.

12. DESEMBER | DECEMBER



PPA bekerja sama dengan PT Bahana Artha Ventura memberikan pelatihan kepada 150 mitra binaan Program Kemitraan BUMN 2019 dengan tema "UMKM Naik Kelas" di Denpasar, Bali.

PPA cooperated with PT Bahana Artha Ventura in providing training to 150 fostered partners of the 2019 SOEs Partnership Program with the theme "MSMEs are Promoted to Higher Class (UMKM Naik Kelas)" in Denpasar, Bali.

16. DESEMBER | DECEMBER



PPA dan PT Bank Mandiri (Persero) menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja IDR dan USD.

PPA and PT Bank Mandiri (Persero) signed the IDR and USD Working Capital Facility Agreement.

19 DESEMBER | DECEMBER



"Warna-warni PPA" yang merupakan acara kebersamaan seluruh karyawan Grup PPA.

"Colorful PPA" which is a gathering event for all employees of PPA Group.

19 DESEMBER | DECEMBER



Kunjungan Direksi PPA ke Kantor Redaksi Harian Kompas.
PPA's Board of Directors Visited Kompas Daily Editorial Office.

20. DESEMBER | DECEMBER



Pemberian pinjaman oleh PPA kepada PT National Utility Helicopters (PT NUH) sebesar Rp98 miliar.

PPA provided loan facility to PT National Utility Helicopters (PT NUH) amounting to Rp98 billion.

20. DESEMBER | DECEMBER



PPA melaksanakan Sosialisasi *Good Corporate Governance* (GCG) Grup PT PPA Tahun Buku 2019.

PPA carried out PT PPA Group Good Corporate Governance (GCG) Socialization for Fiscal Year 2019.

20. DESEMBER | DECEMBER



PPA bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Piutang dan Perjanjian Pengalihan (*Cessie*) atas nama PT Primarindo Asia Infrastructure, Tbk senilai USD1,7juta dan PT Ade Textile Industries senilai USD18,5juta.

PPA and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed a PPA signed the Sales and Purchase Agreement of Receivables of PT Primarindo Asia Infrastructure, Tbk in the amount of US\$ 1.7 million and PT Ade Textile Industries in the amount of US\$ 18,5 million.

23. DESEMBER | DECEMBER



PPA menggelar upacara memperingati Hari Ibu ke-91.

PPA held a ceremony to commemorate the 91st Mother's Day.

23. DESEMBER | DECEMBER



PPA dan PT Penta Capital Indonesia (PT PCI) menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan senilai Rp49.525 miliar.

PPA and PT Penta Capital Indonesia (PT PCI) signed a Facility Agreement amounted to Rp49,525 billion.



LAPORAN **MANAJEMEN** MANAGEMENT REPORT

Memperkuat keunggulan kompetitif melalui kemampuan Restrukturisasi/Revitalisasi merupakan jalan yang tepat bagi PPA untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Strengthening the competitive advantage through the ability to restructure/revitalize is the right way for PPA to grow sustainably.





DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

EDY PUTRA IRAWADY

1

Komisaris Utama | *President Commissioner*

TIRTA HIDAYAT

2

Komisaris Independen | *Independent Commissioner*

DIDYK CHOIROEL

3

Komisaris | *Commissioner*



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT



EDY PUTRA IRAWADY
Komisaris Utama
President Commissioner

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan Pengelola Aset (Persero), disebut juga "Perusahaan" atau "PPA", yang telah berupaya keras untuk mencapai berbagai indikator kinerja operasional dan keuangan, sebagai bagian integral dari upaya perusahaan untuk mencapai visi perusahaan yaitu "Menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi", melalui kegiatan yang tergambar dari misi yaitu "Memberikan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan investasi, restrukturisasi, pengelolaan aset dan *advisory*".

Tahun 2019 merupakan periode dimana proses transformasi Perusahaan tumbuh, berproses dan berkembang sesuai dengan target-target yang telah dibangun melalui Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP"), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP"). Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 ini diharapkan menjadi landasan untuk mencapai Rencana Strategis dan keunggulan daya saing secara berkelanjutan.

Fokus pengembangan usaha melalui mandat restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara telah membawa PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), disebut juga "Perusahaan" atau "PPA", berkontribusi aktif terhadap penyehatan korporasi BUMN. Di tengah pertumbuhan Perusahaan, Dewan Komisaris berperan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan operasi dan bisnis yang dilakukan Direksi.

Board of Commissioners would like to express highest appreciation to Board of Directors and all employees of Perusahaan Pengelola Aset (Persero), hereinafter referred to as the "Company" or "PPA", who have worked hard to achieve various indicators of operational and financial performance, as an integral part of the Company's efforts to achieve its vision "To become a reputable investment company and trusted partner in corporate restructuring", through the activities as illustrated in its mission "To provide sustainable growth for all stakeholders through investment, restructuring, asset management and advisory activities".

The year 2019 was a period where the Company's transformation processes grow, process and develop in accordance with the targets as set forth in the Company's Long Term Plan ("RJPP"), and Work Plan and Budget. The performance achieved in 2019 is expected to become the foundation to achieve the Strategic Plan and sustainable competitive advantage.

The focus of business development through the mandate of restructuring and revitalization of State-Owned Enterprises has brought PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), hereinafter referred to as the "Company" or "PPA", to contribute actively to the restructuring of SOEs corporations. In the midst of the Company's growth, Board of Commissioners plays a role to supervise the management of operations and business conducted by Board of Directors.

Upaya PPA untuk meningkatkan kompetensinya menjadi catatan penting bagi PPA untuk dapat menciptakan nilai tambah, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

PPA's efforts to improve its competency became an important note for PPA to be able to create added value, both for the Company as well as for shareholders and stakeholders.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Untuk itu, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan sekilas laporan fungsi pengawasan dalam laporan tahunan Perusahaan tahun 2019 ini; sekaligus sebagai bagian dari pelaporan pengawasan atas kinerja Perusahaan di sepanjang tahun 2019.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa mengarungi tahun 2019 ini dengan lancar dan diiringi dengan keberhasilan pencapaian kinerja positif Perusahaan.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 melambat, yang menyebabkan ketidakpastian pasar keuangan global. Isu sentral dalam perekonomian global di antaranya adalah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Dampak dari perang dagang tersebut menyebabkan berkurangnya *volume* perdagangan dunia yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dunia. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 hanya berada pada *level* 3,0%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,0% pada 2019, menurun dari 3,6% pada 2018, dan kemudian pulih terbatas menjadi 3,1% pada 2020, ditopang pertumbuhan negara berkembang.

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga ditopang konsumsi rumah tangga, ekspansi fiskal, serta perbaikan ekspor. Tingkat inflasi per Desember 2019 tercatat sebesar 2,7% (YoY), lebih rendah sekitar 1% dari yang ditargetkan Bank Indonesia yaitu sebesar 3,5%. Terkendalnya inflasi dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti, inflasi *volatile food* yang cenderung rendah serta inflasi *administered price* yang relatif terjaga. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga inflasi ini tidak terlepas dari fungsi koordinasi bersama dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kemudian, struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama, yaitu pengolahan, pertanian, dan perdagangan. sampai dengan akhir 2019, industri pengolahan memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 4,29%, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 3,92%, dan perdagangan sebesar 4,46%.

To that end, please allow Board of Commissioners to briefly report its supervisory function in the Company's 2019 annual report; as well as part of the report on supervision over the Company's performance throughout 2019.

Dear Shareholders and Stakeholders,

With praise and thanks to Allah SWT, Almighty God, for His countless blessings, we were able to smoothly sail through the year of 2019 with the success of achieving the Company's positive performance.

In general, the growth of the world economy in 2019 was slowing down and caused an uncertainty in global financial market. The central issues in the global economy included a trade war between the United States (US) and China. This trade war has impacted on a reduction in the volume of world trade which slowed the pace of world economic growth. IMF predicted that global economic growth in 2019 was only at 3.0%. Bank Indonesia forecasted the world economic growth at 3.0% in 2019, declining from 3.6% in 2018, and then recovering to a limited 3.1% in 2020, supported by the growth in developing countries.

In 2019, Indonesia's economic growth was able to be maintained, sustained by household consumption, fiscal expansion and export improvement. The inflation rate as of December 2019 was recorded at 2.7% (YoY), lower by approximately 1% than Bank Indonesia's target of 3.5%. Controlled inflation was influenced by low core inflation, volatile food inflation which tended to be low and relatively maintained administered price inflation. The success of Bank Indonesia in maintaining inflation was inseparable from the joint coordination function with the central and regional Government.

Then, the structure of the Indonesian economy was still dominated by 3 (three) main business fields, namely processing, agriculture, and trade. Until the end of 2019, the processing industry had the highest growth of 4.29%, followed by the agriculture sector at 3.92%, and trade at 4.46%.

Investasi mulai tercatat meningkat di beberapa daerah terkait hilirisasi nikel, dan diperkirakan akan terus meningkat dengan sejumlah kebijakan transformasi ekonomi yang ditempuh Pemerintah serta mulai meningkatnya keyakinan dunia usaha. Investasi bangunan juga terus membaik didorong peningkatan kegiatan konstruksi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sehingga secara keseluruhan tahun 2019 mencapai 5,0%.

Perbaikan kondisi makro ekonomi nasional secara umum berdampak positif bagi perekonomian nasional dan turut menyumbang cukup signifikan bagi kinerja Perusahaan. Dewan Komisaris mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan kinerja di segala lini untuk menjawab perbaikan makro ekonomi nasional melalui kerja keras dan inovasi di berbagai lini bisnis sehingga akan membawa perbaikan di masa yang akan datang.

Tahun 2019 merupakan tonggak awal pendanaan dari pasar modal. Dari sisi keuangan, merupakan sebuah keberhasilan untuk masuk ke pasar keuangan yang lebih luas. Pada tahun 2019, Perusahaan berhasil menerbitkan SBK dan MTN dan dilanjutkan pada tahun 2020 dengan menerbitkan Obligasi Korporasi. Keberhasilan ini menggambarkan kepercayaan otoritas dan pelaku pasar (*market confidence*).

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan dan Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Pembentukan Organ Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama Perusahaan merupakan bagian dari kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi berperan mengelola operasi dan bisnis Perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris memiliki peran untuk mengawasi jalannya operasi dan bisnis yang dijalankan Direksi.

Hubungan kerja antara kedua organ ini dibangun dengan saling menghormati antar keduanya. Terdapat batasan dari tanggung jawab dan peran yang dijalankan baik oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan Perusahaan dan kelompok usaha oleh Direksi, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Investment has begun to increase in several regions related to nickel downstreaming, and is expected to continue to increase with a number of economic transformation policies pursued by the Government and the growing confidence of business community. Building investment also continued to improve, driven by increased of construction activities. With these developments, Indonesia's economic growth reaching 5.0% in 2019.

The improvement in national macroeconomic conditions has generally brought positive impact on national economy and contributed significantly to the Company's performance. Board of Commissioners invites all stakeholders to jointly increase performance in all lines to answer the national macroeconomic improvements through hard work and innovation in all lines of business to drive improvements in the future.

2019 was the initial milestone of funding from the capital market. In terms of finance, entering the broader financial market is a success. In 2019, the Company succeeded in issuing Commercial Paper (CP) and Medium Term Notes and continued in 2020 by issuing Corporate Bonds. This success illustrates the confidence of the authorities and market participants (*market confidence*).

Supervision of the Implementation of Corporate Strategy and Providing Advice to Board of Directors

The establishment of Board of Commissioners and Board of Directors as the main organs of the Company is part of compliance with applicable laws and regulations, particularly Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Board of Directors has the role of managing the Company's operations and business, while Board of Commissioners has the role to oversee the operations and business conducted by Board of Directors.

The working relationship between the two organs is built with mutual respect between the two. There are boundaries to the responsibilities and roles that are carried out by both Board of Commissioners and Board of Directors. Board of Commissioners is tasked with supervising the management of the Company and business groups by Board of Directors, advising Board of Directors, and ensuring that the Company implements Good Corporate Governance (GCG).

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 15 Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP"), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP"), ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Sesuai Anggaran Dasar, Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit sekali setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 26 kali rapat yang terdiri dari Rapat Rutin Internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali, dan Rapat Rutin Gabungan dengan Direksi sebanyak 12 kali, serta Rapat Khusus Gabungan dengan Direksi sebanyak 2 kali dalam rangka pembahasan RJPP Tahun 2019-2023 dan RKAP Tahun 2020.

Kunci utama dari keberhasilan penerapan kebijakan strategis oleh manajemen terletak pada kolaborasi yang harmonis antara Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui rapat-rapat seperti yang telah dijelaskan di atas, Dewan Komisaris memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi, sekaligus membuka ruang diskursus terhadap permasalahan yang dihadapi Direksi. Pengawasan atas implementasi strategi oleh Direksi juga dilakukan Dewan Komisaris pada lingkup pelaksanaan prinsip GCG untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan nilai budaya perusahaan.

Beberapa pandangan, saran dan masukan yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah sebagai berikut:

The supervisory function by Board of Commissioners refers to Article 15 of the Company's Articles of Association, i.e. supervising the management policies, the Company's general management and the Company's business carried out by Board of Directors and providing advice to Board of Directors, including oversight over the implementation of the Company's Long-Term Plan ("RJPP"), the Company's Work Plan and Budget, the provisions of the Articles of Association and the General Meeting of Shareholders' Decrees, as well as laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

In accordance with the Articles of Association, Board of Commissioners shall convene a meeting at least once a month and Board of Commissioners may invite Board of Directors in this meeting. Throughout 2019, Board of Commissioners held 26 meetings, consisting of 12 Regular Internal Meetings of Board of Commissioners, and 12 Regular Joint Meetings with Board of Directors, and 2 Special Joint Meetings with Board of Directors to discuss the 2019-2023 RJPP and 2020 Budget and Planning.

The key to successful implementation of strategic policies by the management lies in harmonious collaboration between Board of Commissioners and Board of Directors. Through meetings as explained above, Board of Commissioners provides supervision and advice to Board of Directors, as well as opening for problems faced by Board of Directors. Supervision over the implementation of strategies by Board of Directors is also carried out by Board of Commissioners in the scope of GCG principles implementation to ensure that the overall management of the Company complies with applicable laws and regulations and corporate cultural values.

Several views, suggestions and input provided by Board of Commissioners to Board of Directors are as follows:

1. Kinerja Keuangan

Secara umum, kinerja keuangan secara konsolidasi maupun pada masing-masing entitas anak masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RKAP, namun dari sisi Perusahaan berhasil mencapai dua kali dari target laba RKAP induk. Ketidaktercapaian secara konsolidasi terutama karena rendahnya capaian kinerja entitas anak perusahaan terutama PT Nindya Karya dan PT PPA Kapital.

Kehadiran Direksi baru memberikan perbaikan secara proses bisnis baik dalam tataran Perusahaan maupun entitas anak, antara lain:

- (1) Peningkatan pengendalian terhadap eksekusi investasi melalui rekomendasi dari Komite Investasi & Manajemen Risiko dalam rangka meningkatkan efektivitas pengembalian investasi/pembiayaan,
- (2) Pembentukan *task force* penagihan piutang terutama yang terindikasi dalam pengawasan dan tidak lancar,
- (3) Memperbaiki likuiditas Perusahaan melalui penerbitan Surat Berharga Komersial (SBK) dan *Medium Term Note* (MTN) untuk pembayaran utang dan efisiensi biaya modal kerja/investasi.

Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar:

- (1) Meningkatkan pendapatan yang dapat direalisasikan dengan cepat termasuk pendapatan jasa (*fee*) yang bersifat tunai (*cash*),
- (2) Meningkatkan efisiensi beban usaha terutama untuk biaya-biaya yang dapat dikontrol. Selain itu,
- (3) Melakukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan pendapatan agar arus kas yang berasal dari aktivitas operasi dapat menjadi meningkat, serta
- (4) tidak melakukan *capital expenditure* kecuali sangat diperlukan dan mempunyai dampak yang jelas dan terukur.

1. Financial Performance

In general, the consolidated or respective financial performance in each subsidiary were still far below the target set in the Budget and Planning, but the Company got double achievement in profit compared to parent entity's Budget and Planning. The consolidation was not achieved mainly due to the low performance of subsidiaries, especially PT Nindya Karya and PT PPA Kapital.

The presence of new Directors has brought positive improvements to business processes both at the level of the Company and subsidiaries, including:

- (1) Increased control over investment execution through recommendations from the Investment & Risk Management Committee in order to increase the effectiveness of return on investment/financing,
- (2) Establishment of task force to collect non performance receivables under supervision and non-performing,
- (3) Improved liquidity of the Company through the issuance of Commercial Paper (CP) and Medium Term Notes (MTN) for debt repayment and to reduce cost of fund.

Board of Commissioners recommends Board of Directors to:

- (1) Increase revenue that can be realized immediately, including quick cash income,
- (2) Increase the efficiency of operating expenses, especially for costs that can be controlled.
- (3) Make breakthroughs in increasing revenue so that cash flow from operating activities can be increased,
- (4) Does not make any capital expenditure unless it is absolutely necessary and has a clear and measurable impact.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS**2. Kinerja Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN**

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan masih melanjutkan untuk melaksanakan penugasan terkait dengan Restrukturisasi dan Revitalisasi terhadap 9 (sembilan) BUMN. Dari sembilan BUMN tersebut, enam diantaranya menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yaitu:

- (1) PT Dirgantara Indonesia (Persero), yang pada saat ini masih dalam proses penguatan jaminan atas pinjaman dari PT PPA;
- (2) PT PAL Indonesia (Persero), dimana PPA masih terus melakukan *monitoring* pelaksanaan hasil restrukturisasi;
- (3) PT Industri Kapal Indonesia (Persero), dimana PPA juga masih terus melakukan *monitoring* hasil restrukturisasi;
- (4) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), yang pada saat ini sedang mengupayakan pencarian investor dalam rangka pelaksanaan putusan homologasi atas gugatan pailit;
- (5) PT Industri Gelas (Persero) dan
- (6) PT Kertas Kraft Aceh (Persero), keduanya masih dalam upaya revitalisasi operasional.

Selain itu, untuk pelaksanaan Restrukturisasi dan Revitalisasi terhadap 3 (tiga) BUMN, dilakukan dengan pemberian dana talangan yaitu:

- (1) PT Survai Udara Panas (Persero), yang digunakan untuk membayar hak-hak normatif karyawan, pengambilalihan entitas anak serta untuk membiayai proyek terkontrak termasuk entitas anak;
- (2) PT Kertas Leces (Persero), yang digunakan untuk membayar hak-hak normatif karyawan; dan
- (3) PT Industri Sandang Nusantara (Persero), yang digunakan untuk pinjaman modal kerja.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Perusahaan, baik secara finansial melalui pemberian pinjaman dan/atau restrukturisasi atas kewajibannya maupun dukungan lainnya seperti mencari investor strategis, partner bisnis dan pendampingan penyusunan *business plan*. Di sisi lain, Perusahaan tidak memiliki perwakilan baik sebagai Direksi maupun Komisaris pada BUMN terkait, sehingga tidak dapat melakukan pemantauan terhadap kinerja maupun kebijakan perusahaan secara lebih efektif. Progres yang cukup menarik pada skema Restrukturisasi dan Revitalisasi PT Industri Gelas melalui skema pelunasan sebagian utang atas kewajiban dengan cara penjualan sebagian aset dan dikombinasikan dengan optimalisasi lahan/pabrik yang masih ada untuk digunakan dalam bisnis *fiber glass*.

2. SOEs Restructuring and Revitalization Performance

Until the end of 2019, the Company continued to carry out assignments related to Restructuring and Revitalization of 9 (nine) SOEs, which include six SOEs using State Capital Participation funds. These six SOE's are:

- (1) PT Dirgantara Indonesia (Persero), which is currently in the process of strengthening collateral coverage for loans from PT PPA;
- (2) PT PAL Indonesia (Persero), in which PPA continues to monitor the implementation of restructuring results;
- (3) PT Industri Kapal Indonesia (Persero), in which PPA also continues to monitor the restructuring results;
- (4) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), which is currently searching for investors in the context of implementing a homologation ruling on bankruptcy proceedings;
- (5) PT Industri Gelas (Persero) and
- (6) PT Kertas Kraft Aceh (Persero), both of which are still in the operational revitalization.

In addition, Restructuring and Revitalization of 3 (three) SOEs where bailout funds will be carried out are:

- (1) PT Survai Udara Panas (Persero), which is used to pay for employees' normative rights, takeover of subsidiaries and contracted projects financing including subsidiaries;
- (2) PT Kertas Leces (Persero), which is used to pay employees' normative rights; and
- (3) PT Industri Sandang Nusantara (Persero), which is used for working capital loans.

A variety of efforts have been made by the Company, both financially through lending and/or restructuring of obligations and other support such as finding strategic investors, business partners and assistance in preparing a business plan. On the other hand, the Company does not have representatives either as Director or Commissioner of relevant SOEs, thus cannot monitor those companies' performance and policies more effectively. Interesting progress is seen in Restructuring and Revitalization scheme of PT Industri Gelas through a partial debt repayment scheme for liabilities by selling some assets and combined with optimizing existing land/factories to be used in fiber glass business.

Terkait Restrukturisasi dan Revitalisasi PT Industri Gelas, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek bisnis gelas ke depan dapat kembali membaik khususnya terkait usaha gelas dekoratif untuk interior/eksterior bangunan dan gelas minuman dalam rangka mengurangi penggunaan plastik.

Dalam pelaksanaan Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN tersebut, Direksi disarankan agar:

- (1) Menyiapkan opsi-opsi pola Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN yang layak (*feasible*) dan dapat dijalankan (*reliable*) serta pelaksanaannya tidak menimbulkan tambahan beban baik kepada BUMN yang R/R maupun kepada Perusahaan,
- (2) Mengupayakan dana talangan untuk kegiatan Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN dapat segera digantikan dengan dana PMN, baik melalui *aligning* proposal Restrukturisasi dan Revitalisasi maupun realokasi dana Restrukturisasi dan Revitalisasi antar BUMN, atau melalui *asset settlement* dalam rangka menjaga kinerja korporasi baik secara tata kelola maupun likuiditas,
- (3) Mengkaji alternatif pembukuan Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN terkait *treatment* akuntansi mengenai pencadangan piutang yang tidak lancar,
- (4) Meningkatkan koordinasi khususnya dengan Kementerian Keuangan agar usulan-usulan Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN yang telah disampaikan dapat segera dilakukan pembahasan guna mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan yaitu terkait Restrukturisasi dan Revitalisasi PT Survei Udara Penas, PT Industri Gelas, PT Industri Sandang Nusantara dan, PT Kertas Kraft Aceh.

3. Kinerja Investasi

Kegiatan investasi Perusahaan saat ini dilakukan di berbagai macam industri yang memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda-beda, sehingga diperlukan keahlian yang beragam agar dapat sukses dalam melakukan investasi, terutama dari aspek Sumber Daya Manusia. Ke depannya, Direksi diharapkan dapat lebih fokus pada beberapa bidang industri yang dikuasai dengan baik oleh Perusahaan (dengan sumber daya yang dimilikinya) dan dinilai dapat memberikan imbal hasil investasi yang lebih

Regarding PT Industri Gelas Restructuring and Revitalization, Board of Commissioners have an opinion that the future prospect of glass business might improve, especially decorative glass for interior/exterior of buildings and beverage glass in order to reduce the use of plastic.

In implementing SOEs Restructuring and Revitalization, Board of Directors are recommended to:

- (1) Prepare feasible and reliable SOEs Restructuring and Revitalization pattern options of and the implementation does not create additional burdens both for SOEs that are R/R as well as for the Company,
- (2) Strive for bailout funds for SOEs restructuring and revitalization, hence can be immediately replaced with State Capital Participation funds, either through aligning R/R proposals or reallocation of funds for SOEs Restructuring and Revitalization, or through asset settlement in order to maintain corporate performance both in governance and liquidity,
- (3) Review alternative bookkeeping of SOEs Restructuring and Revitalization related to accounting treatment on non-current receivables reserves,
- (4) Improve coordination, especially with the Ministry of Finance, so that the proposals regarding SOEs Restructuring and Revitalization that have been submitted can be immediately discussed to obtain approval from the Minister of Finance, namely related to the Restructuring and Revitalization of PT Survei Udara Penas, PT Industri Gelas, PT Industri Sandang Nusantara and, PT Kertas Kraft Aceh.

3. Investment Performance

The Company's investment activities are currently carried out in a variety of industries that have different characteristics and problems, so that diverse expertise is needed in order to be successful in investing, especially from the aspect of Human Capital. Going forward, Board of Directors is expected to be able to focus more on a number of industry sectors that are well controlled by the Company (with its resources) and are considered to be able to provide better investment returns for the

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

baik bagi Perusahaan. Dalam rangka pengendalian investasi, pada tahun 2019, Direksi telah menyusun *negative list* jenis investasi yang tidak boleh atau sangat ketat untuk dieksekusi. Selain itu, Direksi menyusun *threshold* eksekusi investasi mengingat *playing field* yang sama antara induk dengan entitas anak khususnya PT PPA Kapital dan PT PPA Finance. Pada akhir tahun 2019, Direksi telah melakukan kesepahaman dengan beberapa Bank dalam rangka pengelolaan piutang tidak lancarnya, dengan skema bahwa Perusahaan mendapatkan *grace periode* dan *management fee*, disertai dengan alternatif penempatan manajemen baik secara langsung (wakil Perusahaan) maupun tidak langsung (konsultan) untuk memastikan pengembalian piutang.

Hasil kunjungan Dewan Komisaris ke cucu Perusahaan yaitu PT Matoa Kidung Samudera, dan PT Matoa Kidung Bahtera yang bergerak di bidang kapal keruk menunjukkan adanya penurunan kinerja yang disebabkan tidak diperolehnya pekerjaan pengerukan dan adanya keterlambatan pembayaran hasil pekerjaan dari PT Timah (Persero) Tbk. Sedangkan hasil kunjungan ke PT Magnesium Gosari Internasional yang bergerak di bidang pabrik pupuk dolomit menunjukkan masih terdapat beberapa hal terkait operasional dan pemasaran yang perlu diperbaiki.

Terhadap kondisi tersebut Dewan Komisaris telah menyampaikan saran kepada Direksi yaitu:

- (1) Untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pembiayaan termasuk menetapkan struktur pinjaman yang dapat memitigasi risiko dan memenuhi *compliance*. Kemudian,
- (2) Perlu ditetapkan suatu sistem pengawasan (*monitoring*) yang ketat sehingga fungsi sistem peringatan dini (*early warning system*) dapat berjalan secara efektif.
- (3) Dalam jangka panjang, Direksi perlu menyeimbangkan antara kegiatan investasi yang dapat memberikan hasil secara berkelanjutan (*recurring income*) dan investasi jangka pendek yang memberikan imbal hasil (*return*) tinggi dengan tetap memperhatikan faktor risiko dan kemampuan perusahaan untuk memitigasi risiko terkait, dan

Company. In terms of investment management, in 2019, Board of Directors has compiled a negative list of investment types that are prohibited or very strict to be executed. Board of Directors also established an investment execution threshold given the same playing field between the parent and subsidiary entities, especially PT PPA Kapital and PT PPA Finance. At the end of 2019, Board of Directors has entered into agreement with several Banks in the framework of managing non-performing loans, with a scheme that the Company receives a grace period and management fee, accompanied by alternative placement of management representative both directly (Company representative) or indirectly (consultant) to ensure the return of receivables.

The result of Board of Commissioners' visit to the PPAK subsidiaries namely PT Matoa Kidung Samudera and PT Matoa Kidung Bahtera that are engaged in dredging, showed performance decrease due to the failure to obtain the dredging works and the rescheduled payment of work results from PT Timah (Persero) Tbk. While the result of visit to PT Magnesium Gosari Internasional that is engaged in dolomite fertilizer manufacturing, showed that there were still a number of operational and marketing issues that needed to be improved.

With regard to these conditions, Board of Commissioners has submitted the following recommendations to Board of Directors:

- (1) To further enhance supervision over financing including establishing a loan structure that can mitigate risks and meet compliance. Then,
- (2) A strict monitoring system needs to be established so that the function of early warning system can run effectively.
- (3) In the long run, Board of Directors needs to balance investment activities that can provide recurring income and short-term investments that provide high return with due regard to risk factors and the Company's ability to mitigate related risks, and

(4) Terkait kegiatan investasi dalam bentuk pembelian *cessie* piutang debitur NPL hendaknya melakukan evaluasi secara seksama termasuk terhadap jaminan (*collateral*), dokumentasi yang diperlukan (GCG), dan kepatuhan terhadap peraturan/kebijakan (*compliance*).

4. Kegiatan Jasa Pengelolaan Aset dan Jasa Konsultasi

Dengan tidak diperolehnya lagi penugasan pengelolaan aset eks BPPN dari Kementerian Keuangan sejak awal tahun 2018, sehingga pada tahun 2019 Perusahaan tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan aset Eks BPPN. Adapun pelaksanaan jasa konsultasi bisnis belum cukup optimal sehingga sampai dengan akhir tahun, baru terdapat beberapa jasa konsultasi antara lain kajian restrukturisasi PT Inti (Persero) dan jasa penyediaan *financial advisor* pada kegiatan jasa konsultasi PWC di PTPN III. Direksi dan Dewan Komisaris menyadari bahwa banyak potensi kegiatan Jasa Pengelolaan Aset dan Konsultasi sehingga secara bertahap terus dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam bidang ini.

Pengalaman kesuksesan Perusahaan dalam Restrukturisasi dan Revitalisasi beberapa BUMN sebelumnya seperti PT Waskita Karya, PT Djakarta Llyod, dan PT Nindya Karya, selayaknya dapat menjadi pengalaman yang dapat menambah *credential* bagi Perusahaan sehingga akan menarik bagi BUMN, BUMD atau pun swasta.

5. Kinerja Perbendaharaan/*Treasury*

Direksi telah melakukan terobosan melalui penerbitan surat utang yaitu Surat Berharga vw Komersial (SBK), Surat Utang Jangka Medium (MTN). Terobosan tersebut terutama dalam rangka dan sebagai upaya memperoleh pembiayaan modal kerja/investasi yang lebih murah dan jangka waktu yang lebih panjang.

(4) Related to investment activities in the form of purchasing NPL debtor credit receivable *cessie*, a careful evaluation shall be made, including collateral, necessary documentation (GCG), and compliance with regulations/policies.

4. Asset Management and Advisory Service Activities

With the end of assignment of ex-IBRA asset management from the Ministry of Finance since the beginning of 2018, the Company did not carry out the activities of ex-IBRA asset management in 2019. The business advisory service has not been running optimally, so that until the end of the year there were several advisory services obtained, including restructuring analysis advisory of PT Inti (Persero) and financial advisory service in PWC consulting service at PTPN III. Board of Directors and Board of Commissioners are fully aware on huge potential of Asset Management and Advisory Service activities, hence Human Capital competency development in this field continued to be performed gradually.

The Company's success experience in the Restructuring and Revitalization of several previous SOEs such as PT Waskita Karya, PT Djakarta Llyod, and PT Nindya Karya, should be a valuable experience that can add the Company's credential and attract the attention of SOEs, Regional Owned Enterprises (ROEs) or even private sector.

5. Treasury Performance

Board of Directors has made a breakthrough through the issuance of debt securities, namely Commercial Paper (CP) and Medium-Term Note (MTN). This breakthrough was done as an effort to obtain cheaper working capital/investment financing with a longer period of time.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam pengelolaan *Treasury*, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar:

- (1) Meningkatkan pemahaman terhadap kondisi perekonomian global saat ini, termasuk pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan, nilai tukar mata uang Rupiah dan pergerakan tingkat suku bunga, agar dapat menetapkan kebijakan *treasury* yang baik sehingga tetap dapat memperoleh imbal hasil (*return*) yang optimal.
- (2) Penyaluran/penerusan pinjaman kepada perusahaan anak terutama yang menggunakan dana pihak ketiga (lembaga perbankan) dengan beban bunga (*interest bearing*), hendaknya dilakukan dengan hati-hati melalui evaluasi yang cermat atas penggunaannya pada entitas anak yang bersangkutan mengingat adanya tambahan *spread* yang diharapkan Perusahaan seharusnya berimplikasi pada pengetatan objek investasi yang diharapkan lebih *profitable*.

6. Kinerja Pengelolaan Entitas Anak

Realisasi operasional entitas anak masih belum optimal, ditandai dengan tidak tercapainya target pendapatan. Terkait hal tersebut sejak pertengahan tahun 2019, Direksi telah mulai melakukan beberapa langkah perbaikan terhadap tata kelola entitas anak yaitu melalui percepatan dan konsolidasi pelaporan bulanan, penerapan asesmen GCG, serta peningkatan monitoring terhadap entitas anak yang dilaksanakan oleh Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Monitoring Kinerja yang diposisikan di bawah Direktur Utama.

Hasil kunjungan Dewan Komisaris pada proyek PT Nindya Karya pada pengembangan *container yard* Terminal Teluk Lamong PT Pelindo III (Persero) menunjukkan cukup baiknya kemampuan kompetitif PT Nindya Karya pada konstruksi pelabuhan dan adanya potensi kontrak lanjutan pada rencana pengembangan lebih lanjut pada Terminal Teluk Lamong. Realisasi kontrak PT Nindya Karya hingga awal triwulan keempat masih rendah dikarenakan terdapat penundaan lelang Kementerian PUPR serta lesunya industri konstruksi.

In managing *Treasury*, Board of Commissioners recommends Board Directors to:

- (1) Improve understanding on current conditions of global economy, including movements in the Composite Stock Price Index, the exchange rate of Rupiah and interest rate movements, in order to establish a good treasury policy and still obtain optimal returns.
- (2) Distribution of loans to subsidiaries, especially those using third party funds (banking institutions) with interest bearing, should be done carefully through prudent evaluation of the use in the relevant subsidiaries, bearing in mind that there are additional spreads that are expected by the Company to have implications on tightening investment object to be more profitable.

6. Subsidiary Performance Management

The operational realization of subsidiaries have not yet optimal, marked by the failure to achieve revenue target. Related to this, since mid-2019, Board of Directors has begun to take several measures to improve the governance of subsidiaries, namely through the acceleration and consolidation of monthly reporting, application of GCG assessment, and increased monitoring of subsidiaries that are carried out by the Company's Strategic Planning and Performance Monitoring Division under the President Director.

The result of Board of Commissioners' visit to PT Nindya Karya's project on the development of PT Pelindo III (Persero) Teluk Lamong Terminal container yard showed that PT Nindya Karya's competitive ability in port construction was good and there was a potential for advance contract on the plan for further development of Teluk Lamong Terminal. The realization of PT Nindya Karya's contract until the beginning of the fourth quarter was still low due to the auction delay of the Ministry of Public Works and Housing and the sluggishness of construction industry.

Terkait hal ini, Dewan Komisaris menyarankan Direksi agar:

- (1) Dilakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kinerja entitas anak, baik pencapaian pendapatan usaha maupun pengendalian atas biaya/beban yang dikeluarkan oleh masing-masing entitas anak, agar masing-masing dapat mencapai kinerja, dengan penerapan target progresif atau minimal sesuai target RKAP yang telah ditetapkan.
- (2) Menerapkan tata kelola entitas anak (*subsidiary governance*) dengan baik, sehingga entitas anak tidak saja dikelola dengan baik (*well-managed*) tetapi juga dikelola dengan tata kelola yang baik dan menciptakan *confidence* bagi semua pemangku kepentingan (*well-governed*).
- (3) Sesuai tujuan pendirian, hendaknya seluruh entitas anak yang terkonsolidasi dapat berkontribusi positif terhadap kinerja induk. Selanjutnya
- (4) Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan *monitoring* Direksi agar menyusun peta penugasan karyawan sebagai Direksi atau Komisaris pada entitas anak maupun afiliasi termasuk kebijakan remunerasinya.

7. Kinerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Sepanjang tahun 2019, Perusahaan telah menyalurkan dana Program Kemitraan (PK) sebanyak Rp9,16 miliar atau 87,99% dari jumlah dana tersedia yang menyerap 62 mitra binaan baru dari total 333 mitra binaan. Adapun untuk program Bina Lingkungan (BL) dapat disalurkan sebanyak Rp2,0 miliar atau 100% dari jumlah dana tersedia. Pencapaian target penyaluran PK, kolektibilitas Pengembalian Dana PK, dan penyaluran Dana BL berturut-turut 87,99%, 98,82%, dan 100%. Manajemen mengambil kebijakan lebih *prudent* terhadap penyaluran dana PK.

In this regard, Board of Commissioners recommends Board of Directors to:

- (1) Continuously monitor the performance of subsidiaries, both the achievement of operating revenues and the control of costs/expenses incurred by each subsidiary, so that each can achieve favorably performance, by applying progressive targets or at least according to the specified Budget and Planning targets.
- (2) Implement good governance of subsidiaries, thus the subsidiaries are not only managed properly (*well-managed*) but are also managed with good governance and create confidence for all stakeholders (*well-governed*).
- (3) In accordance with the objectives of the establishment, all consolidated subsidiaries should contribute positively to the parent entity's performance.
- (4) In the context of increasing the effectiveness of Board of Directors' monitoring, the assignment of employees as Director or Commissioner in subsidiaries and affiliates including their remuneration policy should be mapped.

7. Social and Environmental Responsibility Performance

Throughout 2019, the Company has channeled Partnership Program (PP) funds totaling Rp9.16 billion or 87.99% of the total available funds and absorbing 62 new fostered partners out of a total of 333 fostered partners. As for the Community Development program was distributed as much as Rp2.0 billion or 100% of the total available funds. The achievement of target for (PP) Funds distribution, collectability (PP) Fund Refund, and Funds distribution were 87.99%, 98.82%, and 100%, respectively. The management took a more prudent policy towards channeling (PP) funds.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS**Penilaian atas Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan Perusahaan**

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, serta memperhatikan kinerja Direksi selama tahun 2019, pada prinsipnya jajaran Direksi yang baru telah menunjukkan banyak perbaikan dari sisi manajerial antara lain melakukan inisiasi transformasi pola bisnis Perusahaan, restrukturisasi dan revitalisasi entitas anak, serta komitmen peningkatan kompetensi Perusahaan yang dilakukan secara bertahap melalui peningkatan pelatihan karyawan & manajemen secara global dan keikutsertaan Perusahaan menjadi anggota *International Public AMC Forum* (IPAF).

Selain itu dari sisi keuangan, manajemen menerbitkan SBK dan MTN guna mengejar *missmatch* investasi masa lalu yang akan diikuti dengan penerbitan obligasi berseri Pada Tahun 2020. Pada akhir tahun 2019, manajemen juga telah melakukan MoU sinergi dengan bank daerah dan bank swasta dalam jasa pengelolaan NPL dengan skema baru yang lebih *feasible* dan *profitable* bagi manajemen. Selanjutnya berdasarkan Kontrak Manajemen Tahun 2019, Direksi diminta untuk merealisasi KPI RKAP Tahun 2019, dan sesuai hasil Laporan Auditor Independen KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Global) realisasi KPI Direksi Tahun 2019 mencapai 101,40%.

Pandangan atas Prospek Usaha dari Perusahaan yang Disusun Direksi

Dalam rencana pengembangan, manajemen telah mencetuskan program transformasi pola bisnis, tata kelola dan sumber daya perusahaan yang mengarah kepada peran Perusahaan diharapkan menjadi badan yang berperan dalam penyelesaian presistemik penyehatan perbankan, agen Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN, dan sebagai perusahaan investasi dalam proyek *brown field*. Selain itu Perusahaan juga melakukan penyesuaian kebijakan investasi, dimana investasi yang telah dilakukan oleh Perusahaan harus didivestasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau keuntungan minimal 20%.

Prospek 5 (lima) tahun merupakan masa yang relatif panjang, terlebih menyangkut aspek perubahan lingkungan bisnis termasuk iklim investasi dan lanskap jasa keuangan, maka baik di Perusahaan maupun entitas anak perlu menerapkan manajemen yang terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik (*best practice*) tentang tata kelola (*governance*), manajemen

Assessment on Board of Directors' Performance in Company Management

Based on the result of our supervision, and taking into account the performance of Board of Directors during 2019, in principle, the new Board of Directors has shown many improvements in terms of managerial, including initiating the transformation of Company's business patterns, restructuring and revitalizing of subsidiaries, as well as commitment to increase the Company's competency gradually through increasing employee & management training globally and Company's participation as a member of the International Public AMC Forum (IPAF).

In terms of finance, the Management issued CP and MTN to catch up with the past investment mismatch which will be followed by the issuance of serial bonds in 2020. At the end of 2019, the Management has also conducted a synergy MoU with regional banks and private banks in NPL management services with a new scheme that is more feasible and profitable for the Management. Furthermore, based on the 2019 Management Contract, Board of Directors was requested to realize the 2019 Budget and Planning KPI, and according to the results of Independent Auditor's Report, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Global), the realization of the 2019 Board of Directors KPI reached 101.40%.

View on the Company's Business Outlook Compiled by Board of Directors

In the development plan, the management has initiated a transformation program of business patterns, corporate governance and resources that lead to the Company's role which is expected to be an institution that plays a role in the presystemic settlement of banking restructuring, SOEs Restructuring and Revitalization agents, and as an investment company in the brown field project. In addition, the Company also made adjustments to investment policies, where investments made by the Company must be divested within a period of 5 (five) years and/or a profit of at least 20%.

The 5 (five) years outlook is a relatively long period, especially concerning the aspect of business environment changes including the investment climate and financial services landscape. Therefore, both the Company and its subsidiaries need to apply an open management in accordance with best practice regarding systematic and integrated governance, risk

risiko dan kepatuhan (*compliance*) secara tersistem dan terintegrasi agar perusahaan mampu menjaga keberlanjutan (*sustainability*) usahanya dan memelihara hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) sehingga dapat bertahan dalam kondisi persaingan di masa yang akan datang. Pandangan pihak ketiga terhadap rencana pengembangan kiranya diperlukan dalam memberikan masukan yang lebih independen dan lebih mendalam serta membantu manajemen dalam merumuskan alternatif kebijakan yang lebih tepat.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham dari Negara Republik Indonesia, dan regulator yang berkepentingan pada perkembangan dunia usaha Indonesia, telah berkomitmen untuk mendorong penerapan prinsip dan praktik GCG sebagai sebuah nilai yang wajib diimban oleh seluruh BUMN. Perusahaan menyambut dengan tangan terbuka atas niat baik dari regulator, terutama karena penerapan GCG melalui 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, terbukti memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan dunia usaha dan iklim investasi.

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan GCG oleh Direksi, Dewan Komisaris memandang implementasi GCG di lingkup Perusahaan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pengembangan struktur organ dan perangkat kebijakan yang terus diperbaharui, hingga evaluasi dan pemantauan GCG, menjadi cerminan komitmen Direksi untuk dapat menerapkan prinsip dan praktik GCG di seluruh elemen operasi dan bisnis Perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) organ penunjang, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko & GCG. Komite Audit memiliki fungsi utama untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit guna mendapatkan kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Sedangkan Komite Pemantau Risiko & GCG membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik di lingkup Perusahaan; termasuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko.

management and compliance so that the Company is able to maintain its business sustainability and maintain good relations with stakeholders in order to be survive in the increasingly fierce competition in the future. A third party's views on the development plan would be required in order to provide more independent and in depth input as well as assisting the management in formulating more appropriate policy alternatives.

Views on Corporate Governance Implementation

The Ministry of SOEs as the power of attorney of the shareholder, the Republic of Indonesia, and as a regulator with an interest in the development of Indonesia's business world, have committed to encourage the application of GCG principles and practices as a value that must be assumed by all SOEs. The Company welcomes the good intention of the regulator, especially as the implementation of GCG through 5 (five) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, has proven to have a positive impact on the sustainability of the business world and investment climate.

As an organ tasked with supervising GCG implementation by Board of Directors, Board of Commissioners observes that the implementation of GCG within the Company continues to increase from time to time. The development of organ structures and policy tools that are continually updated, to the evaluation and monitoring of GCG, reflect Board of Directors' commitment to apply the principles and practices of GCG in all elements of the Company's operations and business.

In carrying out its supervisory function, Board of Commissioners is assisted by 2 (two) supporting organs, namely Audit Committee and Risk Oversight & GCG Committee. The Audit Committee has the main function to monitor and evaluate the planning and implementation of audit and to monitor the follow-up of audit results in order to obtain adequate internal control, including the adequacy of financial reporting process. Whereas the Risk Oversight & GCG Committee assists Board of Commissioners to ensure that GCG principles have been implemented properly within the scope of the Company; including ensuring the effectiveness of risk management implementation.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Kunci utama dari pelaksanaan prinsip GCG adalah pengelolaan risiko di hulu sebagai *early warning system*, membentuk dan menjalankan kesadaran risiko operasional Perusahaan dan pengelolaan keuangan, serta proses atau tahapan audit di hilir; baik audit secara internal maupun audit independen yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Keberadaan Komite Pemantau Risiko & GCG di bawah Dewan Komisaris, serta fungsi Manajemen Risiko dan Komite Investasi & Manajemen Risiko di bawah Direksi telah menunjukkan keseriusan Perusahaan dalam pengelolaan risiko yang berimbang. Pada tingkat audit, Komite Audit di bawah Dewan Komisaris dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) di bawah Direksi membentuk komposisi pengelolaan audit yang baik, yang dibarengi dengan audit independen atas laporan keuangan Perusahaan oleh Akuntan Publik.

Dewan Komisaris memandang, Direksi secara bertahap mengevaluasi implementasi *Talent Management System* secara berkesinambungan, antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi yang relevan dengan dinamika bisnis, pemberian motivasi kerja dan *spirit* bersaing sehingga mampu menggerakkan potensi sumber daya manusia yang ada guna mendorong terciptanya organisasi pembelajar dan organisasi yang memiliki daya tahan dalam menghadapi persaingan bisnis.

Pada sisi tata kelola pelaporan, Komite Audit bersama manajemen merancang rekomendasi pelaporan minimal kinerja operasional. Untuk selanjutnya, Direksi dapat mengembangkannya menjadi sistem pelaporan dan analisa data yang data terintegrasi Teknologi Informasi ("TI") dalam rangka pengambilan keputusan sesuai kebutuhan Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris memandang penguatan peran SPI, Divisi *Risk Management* dan fungsi *compliance*, dan penerapan manajemen risiko secara terpadu (*Enterprise Risk Management*) di seluruh lini organisasi secara bertahap telah dimulai Direksi melalui restrukturisasi organisasi sejak bulan Agustus 2019 dan pengkayaan SPI *Charter* pada Januari 2020 ini. Diharapkan ke depan setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan semua jenis risiko dapat dimitigasi, dimonitor, diukur dan dikendalikan.

The main key of GCG principle implementation is the upstream risk management as an early warning system, establishing and executing the Company's operational risk awareness and financial management, as well as the downstream audit process or stage; both internal audit and independent audit conducted by Public Accountants. The presence of Risk Oversight & GCG Committee under Board of Commissioners, as well as Risk Management function and Investment & Risk Management Committee under Board of Directors have shown the Company's seriousness in managing risk in a balance manner. At the audit level, Audit Committee under Board of Commissioners and Internal Audit Unit (SPI) under Board of Directors form a good audit management composition, which is accompanied by an independent audit of the Company's financial statements by Public Accountant.

Board of Commissioners view that Board of Directors are gradually evaluating the implementation of Talent Management System on an ongoing basis, among others through enhancing organizational capacity and capability that are relevant to business dynamics, providing work motivation and a competitive spirit so as to be able to drive the potential of existing human capital to encourage the creation of learning organization and organization with resilience in the face of business competition.

In terms of reporting governance, Audit Committee and management drafted recommendations for minimum reporting of operational performance. Going forward, Board of Directors can develop it into an Information Technology (IT) integrated reporting system and data analysis in order to make decisions that suitable to the Company's needs. In addition, Board of Commissioners sees the strengthening of the role of Internal Audit Unit, Risk Management Division and compliance functions, and the implementation of integrated risk management (Enterprise Risk Management) across all lines of the organization that have been gradually began by Board of Directors through organizational restructuring since August 2019 and the enrichment of SPI *Charter* in January 2020. In the future, each activity is expected to be carried out by promoting the precautionary principle and all types of risks can be mitigated, monitored, measured and controlled.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah manajemen untuk melakukan *assessment* atau penilaian penerapan GCG secara periodik tahunan, melalui *Self Assessment* oleh tim internal Perusahaan yang didasarkan pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. *Assessment* penerapan GCG untuk tahun 2019 dilakukan oleh pihak independen dengan skor 88,53 dengan predikat "Sangat Baik", mengalami peningkatan dari skor *assessment* penerapan GCG tahun 2018 dengan skor 88,13 juga dengan predikat "Sangat Baik". *Assessment* penerapan GCG dapat memberikan gambaran tentang kemajuan penerapan GCG yang telah dilakukan Perusahaan, yang didapatkan dari rekomendasi yang menjadi evaluasi dan peningkatan penerapan GCG Perusahaan di masa mendatang.

Lebih dari itu semua, Dewan Komisaris memandang penerapan prinsip GCG terletak pada komitmen seluruh Insan PPA untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kekuatan fundamental ini menjadi tanggung jawab Direksi untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang dilandasi oleh integritas seluruh pihak. Dewan Komisaris berkomitmen untuk bahu-membahu bersama-sama dengan Direksi dalam upaya meletakkan fondasi tersebut, dan memperkuat pertumbuhan kinerja Perusahaan dengan basis fondasi yang kuat.

Dewan Komisaris berharap, seluruh upaya untuk mengembangkan penerapan GCG oleh Direksi turut memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.

Pandangan atas Penerapan *Whistleblowing System* dan Peran Dewan Komisaris dalam *Whistleblowing System* Perusahaan

Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistle Blowing System* (WBS) merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan pengaduan atau pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkup Perusahaan dengan mengutamakan kerahasiaan identitas pelapor. Perusahaan telah memiliki WBS yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-3/PPA/0119 tanggal 14 Januari 2019 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*-WBS), yang memperbarui pedoman WBS sebelumnya.

Board of Commissioners also appreciates the management's step to conduct an annual periodic assessment or evaluation of GCG implementation, through Self Assessment by the Company's internal team which is based on a copy of the Decree of Secretary of Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The GCG assessment for 2019 was conducted by an independent party with a score of 88.53 and the title of "Very Good", an increase from the score of GCG assessment in 2018 with a score of 88.13 and also the title of "Very Good". The assessment of GCG implementation can provide an overview of the progress of GCG implementation that has been carried out by the Company, which is obtained from recommendations that become evaluations and improvements in GCG implementation in the future.

Above all, Board of Commissioners has been observing that the implementation of GCG principles lies in the commitment of all PPA People to realize accountable corporate management. This fundamental strength becomes the responsibility of Board of Directors to be able to realize sustainable growth, which is based on the integrity of all parties. Board of Commissioners is committed to work together with Board of Directors in the pursue of laying this foundation, and strengthening the Company's performance growth with a strong foundation.

Board of Commissioners hopes that all efforts undertaken to develop GCG implementation by Board of Directors also provide a strong foundation for the Company's sustainable growth.

View on the *Whistleblowing System* and the Role of Board of Commissioners in the Company's *Whistleblowing System*

The Violation Reporting System, or *Whistle Blowing System* (WBS), is a mechanism that enables complaints or reporting of violations that occur within the Company's scope by prioritizing the confidentiality of the whistleblower's identity. The Company already has a WBS that is regulated based on Board of Directors Decree No. SK-3/PPA/0119 dated January 14, 2019 concerning *Whistleblowing System* (WBS) Policy, which updated the previous WBS guidelines.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Mekanisme WBS Perusahaan diterapkan dalam rangka menegakkan peraturan serta semangat keterbukaan terhadap pelaporan dari pihak manapun. Pihak pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan. Identitas pelapor bersifat rahasia dan laporan dapat disampaikan oleh pelapor tanpa mencantumkan identitasnya (anonim); kecuali jika terdapat langkah hukum yang mengharuskan identitas pelapor menjadi terbuka di hadapan pengadilan. Perusahaan memiliki Fungsi Penerima Laporan yang berasal dari Divisi Satuan Pengawasan Intern. Fungsi ini dibentuk secara khusus untuk mengelola seluruh pengaduan laporan yang masuk untuk diverifikasi dan diproses ke tahapan selanjutnya.

Dalam mekanisme WBS yang berlaku di Perusahaan, Dewan Komisaris berperan sebagai pemantau akhir, terutama jika terdapat pelaporan pelanggaran yang masuk melalui mekanisme WBS yang memiliki tingkat urgensi tinggi. Selain itu, Dewan Komisaris juga menjadi penerima laporan di tingkat puncak, apabila yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Direksi. Sebaliknya, jika yang diduga melakukan pelanggaran adalah anggota Dewan Komisaris, maka laporan dugaan terjadinya pelanggaran dikirimkan langsung kepada Direktur Utama. Laporan yang masuk kepada Dewan Komisaris akan diverifikasi dan ditelaah lebih lanjut, dan akan mengambil langkah-langkah terbaik jika diperlukan.

Di sepanjang tahun 2019, terdapat 1 (satu) pengaduan yang masuk melalui mekanisme WBS, dan telah ditindaklanjuti dengan hasil bahwa pengaduan tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga pengaduan ditutup.

Penilaian Kinerja Organ di Bawah Dewan Komisaris

Organ Dewan Komisaris terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris; Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko & GCG. Pengawasan melalui Sekretaris dan Komite dilakukan atas aspek-aspek strategis dan operasional Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Komisaris dan Komite. Dewan Komisaris dan Komite. Sekretaris Dewan Komisaris berkoordinasi langsung maupun tidak langsung dengan manajemen dan para pemangku kepentingan dalam menjaga harmoni dan tata kelola administrasi.

The Company's WBS mechanism is applied in order to enforce regulations and a spirit of transparency to reporting from any party. A whistleblower may submit a report of alleged violations based on evidence that can be accounted for and in good faith for the benefit of the Company. The whistleblower's identity is confidential and the report can be submitted by the whistleblower without mentioning his/her identity (anonymous); except if there are legal steps that require the whistleblower's identity to be open before the court. The Company has a Report Receiver Function from the Internal Audit Division, that was formed specifically to manage all incoming complaint reports to be verified and processed to the next stage.

In the WBS mechanism applicable in the Company, Board of Commissioners acts as the final supervisor, especially if there are reports of violation that enter through the WBS mechanism with a high degree of urgency. Besides that, Board of Commissioners is also the recipient of reports at the top level, if a member of Board of Directors is suspected of committing a violation. Conversely, if a member of Board of Commissioners is suspected of committing a violation, then the report of alleged violation is sent directly to President Director. Reports submitted to Board of Commissioners will be verified and reviewed further, and the best steps will be taken if necessary.

Throughout 2019, there were 1 (one) complaint that came through the WBS mechanism, and it has been followed up with the result that the complaint did not meet the requirements, hence the complaint was closed.

Performance Assessment of Organs Under Board of Commissioners

Board of Commissioners' organs consist of Secretary of Board of Commissioners; Audit Committee and Risk Oversight & GCG Committee. The supervision through the Secretary and the Committees is executed on strategic and operational aspects of the Company as stipulated in the Budget Work Plan of Board of Commissioners and Committees. The Secretary of Board of Commissioners coordinates directly or indirectly with the management and stakeholders in maintaining harmony and administrative governance.

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko & GCG, mengadakan rapat-rapat dengan manajemen, serta bersama-sama melakukan telaahan terhadap usulan aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi, mengevaluasi laporan berkala yang disampaikan manajemen, *monitoring* tindak lanjut hasil *auditor/asesor* baik internal maupun eksternal, serta mendampingi komisaris dalam kunjungan kerja. Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko & GCG periode tahun 2019 tergolong sangat baik dengan pencapaian nilai masing-masing 99,38%, 99,2% dan 98,40%.

Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh seluruh anggota komite, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris di Tahun 2019

Di tahun 2019 Pemegang Saham memutuskan untuk melakukan perubahan jumlah dan susunan Dewan Komisaris, dengan keputusan memberhentikan Lydia Silvanna Djaman dari jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-160/MBU/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Dengan demikian, terdapat perubahan jumlah keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan, dari 4 (empat) orang per 31 Desember 2018 menjadi 3 (tiga) orang per 31 Desember 2019.

Berikut disampaikan kronologi susunan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2019 dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019.

The Audit Committee and the Risk Oversight & GCG Committee, hold meetings with the management, and jointly review the proposed corporate actions submitted by Board of Directors, evaluate periodic reports submitted by the management, monitor the follow up of the results of internal and external auditors/assessors, and accompanying the commissioners on a work visit. The performance of Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee and Risk Oversight & GCG Committee for the 2019 period were very good with the achievement score of 99.38%, 99.2% and 98.40%, respectively.

With all the work carried out by all committee members, please allow Board of Commissioners to express high appreciation and gratitude.

Changes in Board of Commissioners Composition in 2019

In 2019, the Shareholders decided to change the number and composition of Board of Commissioners, with the decision to dismiss Lydia Silvanna Djaman from her position as a Commissioner of the Company in accordance with the Decree of Minister of SOEs as the GMS of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No. SK-160/MBU/07/2019 dated July 23, 2019 concerning the Dismissal of Members of Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Accordingly, there was a change in the number of members of the Company's Board of Commissioners, from 4 (four) people as of December 31, 2018 to 3 (three) people as of December 31, 2019.

The following is a chronology of the composition of Board of Commissioners throughout 2019 and the composition of Board of Commissioners as at December 31, 2019.

Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2019

Chronology of Changes in Board of Commissioners Composition throughout 2019

Periode 1 Januari - 22 Mei 2019 Period of January 1 – May 22, 2019	Periode 22 Mei - 31 Desember 2019 Period of May 22 – December 31, 2019	Keterangan Remark
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) Edy Putra Irawady (President Commissioner)	Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) Edy Putra Irawady (President Commissioner)	-
Didyk Choeroel (Komisaris) Didyk Choeroel (Commissioner)	Didyk Choeroel (Komisaris) Didyk Choeroel (Commissioner)	-

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERSKronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2019
Chronology of Changes in Board of Commissioners Composition throughout 2019

Periode 1 Januari - 22 Mei 2019 Period of January 1 – May 22, 2019	Periode 22 Mei - 31 Desember 2019 Period of May 22 – December 31, 2019	Keterangan Remark
Lydia Silvanna Djaman (Komisaris) Lydia Silvanna Djaman (Commissioner)		Lydia Silvanna Djaman tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 22 Mei 2019 dengan alasan yang bersangkutan telah diangkat sebagai Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 22 Mei 2019. Lydia Silvanna Djaman no longer served as a Commissioner since May 22, 2019 due to her appointment as a Commissioner of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk in accordance with the Decision of the Annual GMS of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dated May 22, 2019.
Tirta Hidayat (Komisaris Independen) Tirta Hidayat (Independent Commissioner)	Tirta Hidayat (Komisaris Independen) Tirta Hidayat (Independent Commissioner)	-

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 Board of Commissioners Composition as at December 31, 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) Edy Putra Irawady (President Commissioner)	- Periode Kedua (2016-2021): Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK- 78/MBU/04/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset - Periode Pertama (2011-2016): Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. KEP-92/MBU/2011 tanggal 14 April 2011, kemudian diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-430/MBU/2012 tanggal 3 Desember 2012. - Second Period (2016-2021): Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-78/MBU/04/2016 dated April 14, 2016 concerning Dismissal and Appointment of President Commissioner of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) - First Period (2011-2016): Appointed as Commissioner based on Decree of Minister of SOEs as the GMS No. KEP-92/MBU/2011 dated April 14, 2011; then appointed as President Commissioner based on Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-430/MBU/2012 dated 3 December 2012.	14 April 2016 - RUPS Tahun 2021 April 14, 2016 – 2021 GMS	Ke-2 2nd
Didyk Choirel (Komisaris) Didyk Choirel (Commissioner)	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-87/MBU/04/2018 tanggal 12 April 2018 Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-87/MBU/04/2018 dated April 12, 2018	12 April 2018 - RUPS Tahun 2023 April 12, 2018 – 2023 GMS	Ke-1 1st
Tirta Hidayat (Komisaris Independen) Tirta Hidayat (Independent Commissioner)	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-104/MBU/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-104/MBU/06/2017 dated June 5, 2017 jo. SK-87/MBU/04/2018 dated April 12, 2018	5 Juni 2017 - RUPS Tahun 2022 June 5, 2017 – 2022 GMS	Ke-1 1st

Pergantian dan perubahan susunan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi wewenang dari pemegang saham.

The replacement and changes in the composition of Board of Commissioners is entirely the authority of the shareholders.

Apresiasi Pemangku Kepentingan

Kepada pemegang saham, Dewan Komisaris menghaturkan rasa terima kasih atas kepercayaan dan pembinaan yang telah diberikan. Demikian pula kepada regulator dan para pemangku pelayanan publik, Dewan Komisaris menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas fasilitas dan dukungan yang telah diberikan. Bagi para mitra kerja, Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini dan kami berharap untuk dapat terus meningkatkan pelayanan agar dapat memenuhi ekspektasi para pengguna jasa. Kepada mitra usaha, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang terus-menerus, dalam masa yang baik maupun yang sulit. Penghargaan juga kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan lainnya.

Appreciation to the Stakeholders

To the shareholders, Board of Commissioners would like to send a gratitude for the trust and guidance that has been given. Likewise for regulators and public service stakeholders, Board of Commissioners would like to express a deepest gratitude for the facilities and support that has been provided. For all work partners, Board of Commissioners would like to say thank you for the good cooperation that has been established so far and we hope to continue to improve services in order to meet the expectations of service users. To our business partners, we would also like to say thank you for your continued support, in both good and difficult times. The same appreciation also goes to other stakeholders.

Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan rasa bangga kepada Direksi dan Karyawan atas sinergi yang tercipta. Semoga hubungan yang harmoni ini dan semangat bersama untuk meningkatkan prestasi mampu menjadi dasar bagi Perusahaan untuk terus tumbuh secara berkelanjutan, serta mampu terus memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan. Akhir kata, semoga hubungan dan kerjasama yang harmonis selama ini dengan seluruh Pemangku Kepentingan senantiasa terjaga di masa yang akan datang.

As a closure, Board of Commissioners would like to say to Board of Directors and Employees that we are very proud on the synergy that had been created. Hopefully this harmonious relationship and mutual enthusiasm to improve achievement can be the basis for the Company to continue to grow sustainably, and be able to continue providing added value to shareholders and all stakeholders. Finally, we hope that the harmonious relations and cooperation with all Stakeholders that have been created up to date, will always be maintained in the future.

Jakarta, 27 Maret 2020
Jakarta, March 27, 2020

Atas nama Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
On behalf of Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)



EDY PUTRA IRAWADY
Komisaris Utama
President Commissioner

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

IMAN RACHMAN

Direktur Utama | *President Director*

1

NASRIZAL NAZIR

Direktur Investasi | *Investment Director*

2

DIKDIK PERMADI YOFFANA

Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen
Business Advisory and Asset Management Director

3

R. MUHAMMAD IRWAN

Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja
Finance and Support Director

4



LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS REPORT



IMAN RACHMAN
Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan ruang lingkup tugas melakukan pengelolaan aset Negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), R/R BUMN, kegiatan investasi, dan pengelolaan aset BUMN, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), disebut juga "Perusahaan" atau "PPA", memiliki peran vital dan kontribusi yang besar bagi perkembangan korporasi BUMN/swasta di Indonesia. Berbagai pencapaian penting yang diraih PPA sepanjang tahun 2019 merupakan anugerah yang patut kita syukuri di tengah kondisi ekonomi global yang kurang stabil serta estafet kepemimpinan baik di PPA maupun Kementerian BUMN. Sebuah tantangan bagi PPA untuk mempertahankan kinerja grup PPA dengan tetap melaksanakan penugasan R/R BUMN secara optimal.

Inisiasi Strategis dan Program Tahun 2019

Selama tahun 2019, Direksi telah menerapkan sejumlah kebijakan dan strategi Perusahaan untuk mengoptimalkan aktivitas perusahaan, antara lain: 1) menghimpun pendanaan eksternal *nonbank* melalui penerbitan MTN dan Surat Berharga Komersial; 2) penyempurnaan proses bisnis investasi/pembiayaan, R/R, dan jasa konsultasi melalui pembaharuan prosedur dan kebijakan, pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko, 3) dukungan teknologi informasi

Dear Shareholders and Stakeholders,

As a State-Owned Enterprise (SOE) with the scope of duties to manage the assets of former National Bank Restructuring Agency (IBRA), R/R of SOEs, investment activities, and management of SOEs' assets, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), hereinafter referred to "The Company" or "PPA", has a vital role and a major contribution to the development of SOEs/private corporations in Indonesia. A number of important achievements that have been achieved by PPA throughout 2019 are a blessing that we should be thankful for in the midst of unstable global economic conditions and the relay of leadership both at PPA and the Ministry of SOEs. It is quite a challenge for PPA to maintain the performance of PPA group by continuing to carry out the assignment of SOEs R/R optimally.

Initiation of Strategic Policies and Programs in 2019

In 2019, Board of Directors has implemented a number of Company policies and strategies to optimize its activities, including: 1) raising external non-bank funding through the issuance of Medium Term Notes and Commercial Paper; 2) improving the business process of investment/financing, R/R, and consulting services through updating procedures and policies, establishing an Investment and Risk Management Committee, 3) increasing information technology support by creating financial performance monitoring

Upaya memperkuat kompetensi PPA pada Restrukturisasi/ Revitalisasi dan Investasi serta penguatan permodalan jangka panjang akan memberikan kemampuan PPA untuk terus berkompetisi sekaligus berkontribusi bagi industri dan korporasi Indonesia.

The efforts made to build up PPA's competency in Restructuring/ Revitalization, Investment, long-term capital strengthening will provide the ability for PPA to continue to compete while contributing to Indonesia's industry and corporation.

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

dengan pembuatan *dashboard* pemantauan kinerja keuangan, pengembangan *mobile office*, dan *core system*, 4) serta pembaruan struktur organisasi, rotasi karyawan sesuai kebutuhan bisnis, dan penerapan *key performance indicator* sampai tingkat individu, serta 5) mulai membangun tata kelola yang terintegrasi sampai dengan entitas anak.

Sampai dengan tahun 2019, PPA terus berkomitmen melaksanakan amanah sebagai agen restrukturisasi BUMN, baik melalui skema penyertaan modal maupun *financial controlling*. Upaya R/R atau penyehatan korporasi yang telah dilakukan antara lain : 1) optimalisasi aset *idle* melalui kerja sama dengan *partner* strategis, baik sesama BUMN maupun swasta; 2) *advisory* dan pendampingan aspek operasional, keuangan maupun organisasi; 3) dan pemberian dukungan pembiayaan untuk investasi maupun modal kerja. Per 31 Desember 2019, terdapat 10 BUMN yang masih dalam program R/R oleh PPA sesuai dengan surat penugasan yang telah diberikan oleh Menteri BUMN kepada PPA yang terdiri dari satu BUMN melalui skema penyertaan modal yaitu PT Nindya Karya dan 9 (sembilan) BUMN melalui skema *financial controlling* yaitu:

1. PT Dirgantara Indonesia (Persero);
2. PT Industri Kapal Indonesia (Persero);
3. PT PAL Indonesia (Persero);
4. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero);
5. PT Kertas Kraft Aceh (Persero);
6. PT Kertas Leces (Persero);
7. PT Industri Sandang Nusantara (Persero);
8. PT Industri Gelas (Persero);
9. PT Survai Udara Penas (Persero).

PPA sangat menyadari sebagai satu-satunya agen R/R BUMN, peran penyehatan korporasi begitu penting dalam menopang sesama BUMN agar tetap mampu menjadi agen pembangunan serta menjadi mesin penggerak ekonomi Indonesia. Pelaksanaan tugas R/R BUMN sampai dengan tahun 2019 telah membuahkan hasil. Terdapat dua BUMN yang berhasil disehatkan dengan skema penyertaan modal serta telah mampu tumbuh dan *profitable* yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita Karya") dan PT Nindya Karya ("Nindya Karya"). Waskita Karya masuk program R/R oleh PPA pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 telah dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan saat ini menjadi salah satu BUMN konstruksi yang terbesar di Indonesia.

dashboard, developing *mobile office*, and *core system*, 4) updating organizational structure, employee rotation according to business needs, and the application of key performance indicators up to the individual level, and 5) starting to build integrated governance up to the subsidiaries.

Until 2019, PPA continues its commitment to carry out the mandate as an SOEs restructuring agent, both through capital investment and financial controlling scheme. R/R or corporate restructuring that have been carried out include: 1) optimizing idle assets through cooperation with strategic partners, both fellow SOEs and private sector; 2) advisory and assistance in the operational, financial and organizational aspects; 3) and providing financial support for investment and working capital. As of December 31, 2019, 10 SOEs were still in the R/R program by PPA in accordance with the assignment letter given by the Minister of SOEs to PPA consisting of one SOEs through a capital participation scheme, namely PT Nindya Karya, and 9 (nine) SOEs through a financial controlling scheme, namely:

1. PT Dirgantara Indonesia (Persero);
2. PT Industri Kapal Indonesia (Persero);
3. PT PAL Indonesia (Persero);
4. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero);
5. PT Kertas Kraft Aceh (Persero);
6. PT Kertas Leces (Persero);
7. PT Industri Sandang Nusantara (Persero);
8. PT Industri Gelas (Persero);
9. PT Survai Udara Penas (Persero).

PPA is well aware that as the only SOEs R/R agent, the role of corporate restructuring is very important in sustaining fellow SOEs so that they can continue to be a development agent and a driving force of Indonesia's economy. The implementation of SOEs R/R up to 2019 has shown an encouraging results. Two SOEs have been successfully revitalized with a capital participation scheme and have been able to grow and be profitable, i.e. PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita Karya") and PT Nindya Karya ("Nindya Karya"). Waskita Karya entered the R/R program by PPA in 2010 and has been returned to the Government of the Republic of Indonesia in 2012, and is currently one of the largest construction SOEs in Indonesia.

Nindya Karya masuk program R/R oleh PPA pada tahun 2012 dan tercatat sebagai entitas anak PPA, saat ini Nindya Karya menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dan sedang dalam proses persiapan pengembalian kepada Negara Republik Indonesia melalui mekanisme *initial public offering* yang direncanakan pada tahun 2021/2022 setelah memperoleh persetujuan pemegang saham. Di samping itu, Perusahaan memberikan pembiayaan terhadap tujuh BUMN yang belum *bankable*, baik itu BUMN yang masuk dalam Program R/R maupun tidak, agar tetap beroperasi yaitu PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Survai Udara Penas (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Ketujuh BUMN tersebut saat ini telah menunjukkan kinerja keuangan yang membaik. PPA juga telah membantu menyelesaikan kewajiban ribuan karyawan, optimalisasi dan pengamanan aset atas empat BUMN yaitu PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero). Selain pelaksanaan R/R yang dilakukan berdasarkan surat penugasan dari pemegang saham, PPA juga membantu BUMN yang mengalami kesulitan keuangan. Sampai dengan tahun 2019, melalui anak usaha yakni PT PPA Finance, terdapat 5 BUMN yang telah diberikan pembiayaan baik untuk *project financing* maupun modal kerja yaitu PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Survai Udara Penas (Persero), PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri Gelas (Persero), dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Berbekal spesialisasi di bidang penyehatan korporasi dan pengelolaan *distressed asset*, PPA pada tahun 2018 mulai melakukan pengelolaan/pengambilalihan NPL Bank Himpunan Bank Milik Negara ("Himbara"). Pengelolaan NPL dilakukan dengan cara merestrukturisasi bisnis debitur perbankan yang mengalami kesulitan usaha namun masih memiliki prospek bisnis. PPA memulai mengelola/mengambil alih pinjaman Bank BNI yaitu PT Bondi Syad Mulia ("BSM") yang bergerak di bidang *galvanizing*, kemudian di awal tahun 2019, PPA kembali melakukan pengelolaan/pengambilalihan NPL Bank Mandiri yaitu PT Rejeki Inti Logam Jaya yang bergerak di bidang produksi aluminium ingot. Keduanya saat ini sudah menunjukkan kinerja yang baik.

Nindya Karya entered the R/R program by PPA in 2012 and is registered as a subsidiary of PPA, currently Nindya Karya has shown a significant performance improvement and is in the process of preparing a return to the Republic of Indonesia through an initial public offering mechanism planned for 2021/2022 after obtaining shareholders' approval. In addition, the Company provides financing for seven non-bankable SOEs, both SOEs that are included in the R/R Program or not, in order to continue their operations, namely PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Survai Air Penas (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Industri Sandang Nusantara (Persero). The seven SOEs have now shown an improvement in their financial performance. PPA has also assisted to settle the obligations for thousands of employees, optimizing and securing the assets of four SOEs, namely PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), and PT Kertas Leces (Persero). In addition to the R/R based on assignment letters from shareholders, PPA also helps SOEs that are experiencing financial difficulties. Until 2019, through a subsidiary, i.e. PT PPA Finance, funding has been given for 5 SOEs, both for project financing and working capital, namely PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Survai Air Penas (Persero), PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero), PT Industri Gelas (Persero), and Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Armed with specialization in the field of corporate restructuring and management of distressed assets, in 2018, PPA began to manage/take over the Non-Performing Loans (NPL) of State-Owned Bank Association ("Bank Himbara"). The management of NPL is done by restructuring the business of banking debtors experienced business difficulties, yet still possess business prospects. PPA started to manage/take over Bank BNI's Loan, namely PT Bondi Syad Mulia ("BSM") which is engaged in galvanizing, then in early 2019, PPA managed/took over Bank Mandiri's NPL, namely PT Rejeki Inti Logam Jaya which is engaged in aluminum ingot production. At present, both of them have shown good performance.

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

Berdasarkan pengalaman pengelolaan/pengambilalihan NPL tersebut di atas, PPA kemudian mencoba untuk memperluas kerja sama dengan perbankan anggota Bank Himbara untuk membantu mengurangi kredit bermasalah atau NPL. PPA saat ini telah menjalin kerja sama pengelolaan NPL dengan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN dan Bank BNI. Setelah ditandatanganinya kerja sama dengan Bank Himbara, pada akhir tahun 2019, PPA kembali mengelola/mengambil alih NPL Bank Mandiri yaitu PT Ade Textile Industries yang bergerak di bidang produksi tekstil dan PT Primarindo Asia Infrastructure yang bergerak di bidang produksi alas kaki.

Pada tahun 2019, PPA mencatat peningkatan investasi yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah investasi sebesar Rp1.445 triliun atau tumbuh sebesar 224,67% dibandingkan dengan investasi yang dilakukan pada tahun 2018.

Tujuan PPA mengelola NPL yaitu membantu pemerintah dalam upaya preventif mencegah sistemik perbankan dan sebagai wujud sinergi BUMN, serta langkah awal mewujudkan cita-cita sebagai *National Asset Management Company* PPA juga menetapkan kriteria dan proses *due diligence* aspek *marketing*, produksi, operasional, aset, legalitas, kecukupan jaminan, *independent appraisal* dan *cashflow*. Kriteria utama yang ditetapkan yaitu *free and clear* atau tidak terkait perkara hukum, kelayakan usaha, dan prospek bisnis.

Pada triwulan IV tahun 2019, PPA berhasil menghimpun pendanaan eksternal non perbankan untuk memperkuat struktur pendanaan dengan total sebesar Rp850 miliar. Pendanaan tersebut terdiri dari instrument *Medium Term Notes* (MTN) senilai Rp750 miliar yang diterbitkan dalam dua seri yaitu seri A senilai Rp300 miliar dengan jangka waktu dua tahun dan seri B senilai Rp450 miliar dengan jangka waktu tiga tahun. Selain itu, Perusahaan juga menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) sebesar Rp100 miliar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek.

Based on the aforementioned NPL management/takeover experiences, PPA then tried to expand cooperation with banks belonging to Bank Himbara to assist in reducing non-performing loans or NPLs. Currently, PPA has established cooperation in managing NPLs with Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN and Bank BNI. After the signing of collaboration with Bank Himbara, at the end of 2019, PPA once again managed/took over Bank Mandiri's NPL, namely PT Ade Textile Industries which is engaged in textile production and PT Primarindo Asia Infrastructure which is engaged in footwear production.

In 2019, PPA recorded a significant increase in investment, as evidenced by the total investment amounted to Rp1,445 trillion or grew by 224.67% compared to the investment made in 2018.

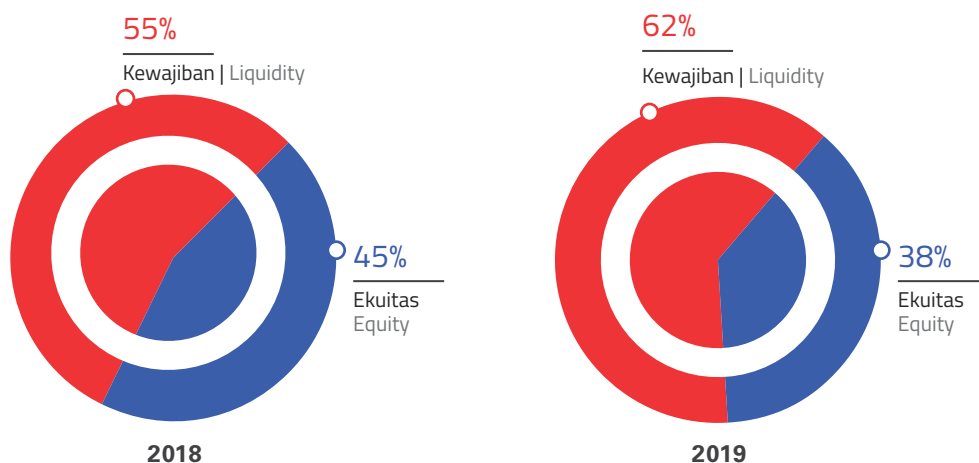
PPA's objective of NPL management is to assist the government in banking systemic preventive efforts and as a form of SOEs synergy, as well as the initial steps to realize the aspiration of becoming a National Asset Management Company. PPA also set the criteria and due diligence process on the aspect of marketing, production, operations, assets, legality, adequacy of guarantees, independent appraisal and cash flow. The main criteria set are free and clear or not related to legal cases, business feasibility, and business prospects.

In the fourth quarter of 2019, PPA managed to acquire Rp850 billion non-banking funding in total to strengthen its funding structure. The funding consists of Medium Term Notes (MTN) instrument worth Rp750 billion that were issued in two series, series A worth Rp300 billion with a two-year term and series B worth Rp450 billion, with a three-year term. In addition, the Company also issued Commercial Paper (CP) in the amount of Rp100 billion to fulfill the short-term funding needs.

PPA tercatat menjadi salah satu BUMN pelopor penerbit SBK sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017. Penerbitan ini merupakan salah satu strategi Perusahaan dalam penguatan struktur pendanaan. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat atas MTN I Tahun 2019 PT PPA yaitu idA (*Single A*), peringkat atas perusahaan yaitu idA (*Single A; Stable Outlook*), dan peringkat atas SBK yaitu idA1 (*Single A-One*). Komposisi permodalan PPA menjadi sebagai berikut.

PPA is listed as one of the pioneering SOEs issuing CP in Indonesia since the issuance of Bank Indonesia regulation number 19/9/PBI/2017. This issuance is one of the Company's strategies in strengthening the funding structure. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) gave the rating of idA (*Single A*) for the PT PPA 2019 MTN I, idA (*Single A; Stable Outlook*) for the Company, and idA1 (*Single A-One*) for the CP. PPA capital composition is as follows.

Komposisi Permodalan PPA
PPA Capital Composition



Pada tahun 2019, PPA juga meningkatkan kerja sama dalam rangka membangun aliansi strategis dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, PPA telah menjalin sinergitas dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk) dalam rangka revitalisasi dan pengembangan BUMD Provinsi Jawa Barat. Di kancah internasional, PPA telah bekerjasama dengan Korea Asset Management Corporation (KAMCO) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran informasi, pengembangan kompetensi karyawan dan peninjauan peluang kerja sama pengelolaan NPL perbankan antara kedua belah pihak. Selain itu, PPA juga telah resmi tercatat sebagai *general member* International Public Asset Management Company Forum atau IPAF. Forum internasional tersebut beranggotakan 14 *asset management company* dari berbagai Negara antara lain Kazakhstan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, China, Vietnam dan Indonesia.

In 2019, PPA also increased cooperation in building strategic alliances with a number of parties at home and abroad. Domestically, PPA has established synergy with the Regional Government of West Java Province and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten (Tbk) in the context of revitalizing and developing ROEs of West Java Province. On the international scale, PPA has collaborated with Korea Asset Management Corporation (KAMCO) through the signing of a Memorandum of Understanding with the scope of cooperation covering information exchange, employee competency development and exploring opportunities for cooperation in managing banking NPLs between the two parties. In addition, PPA has also been officially registered as a general member of the International Public Asset Management Company Forum or IPAF. This international forum consists of 14 asset management companies from various countries including Kazakhstan, South Korea, Thailand, Malaysia, China, Vietnam and Indonesia.

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT**Kinerja Keuangan**

Laporan Keuangan Konsolidasian 2019 PPA dan Entitas Anak telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang tergabung dalam RSM Indonesia dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian", dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Tingkat kesehatan Perusahaan mencapai klasifikasi "AA" kategori BUMN "Sehat". Implementasi kebijakan strategis dan berbagai inisiasi yang telah dilakukan di sepanjang tahun 2019 mampu meningkatkan kinerja PPA.

Posisi keuangan PPA mengalami peningkatan signifikan. Aset konsolidasian per akhir 2019 sebesar Rp14,41 triliun meningkat sebesar 22,74% dari 2018 sebesar Rp11,74 triliun. Ekuitas per akhir 2019 sebesar Rp5,42 triliun, meningkat 3,04% dari 2018 sebesar Rp5,26 triliun.

Pendapatan usaha konsolidasian 2019 sebesar Rp6,67 triliun, atau 98% dari pendapatan usaha konsolidasian 2018 sebesar Rp6,82 triliun. Perolehan laba bersih tahun berjalan konsolidasian tahun 2019 sebesar Rp327,07 miliar atau 76% dari laba bersih tahun berjalan konsolidasian 2018 sebesar Rp428,80 miliar.

Belum tercapainya pendapatan usaha dan laba bersih tahun berjalan konsolidasian disebabkan oleh kinerja entitas anak yang belum sesuai dengan harapan, terutama karena kondisi industri konstruksi sebagai sektor yang digeluti entitas anak mengalami penurunan terutama pekerjaan infrastruktur yang sumber pendanaannya berasal dari APBN. Namun demikian pendapatan usaha dan laba bersih tahun berjalan di induk Perusahaan (*stand alone*) mencatat pencapaian di atas target RKAP tahun 2019. Pendapatan usaha induk Perusahaan 2019 sebesar Rp540,64 miliar atau 134,54% dari target RKAP dan laba bersih sebesar Rp150,82 miliar atau 235,90% dari target RKAP.

Tantangan dan Penyelesaiannya

Tantangan dan risiko yang terus meningkat tidak menyurutkan langkah PPA untuk terus menciptakan strategi-strategi bisnis berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Financial Performance

The 2019 Consolidated Financial Statements of PPA and Subsidiaries have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, a member of RSM Indonesia, with "Unqualified" opinion, in all material respects in accordance with financial accounting standards in Indonesia. The Company's soundness index reached an "AA" classification, in the category of "Healthy" SOEs. The implementation of strategic policies and various initiatives carried out throughout 2019 has led to improve PPA performance.

PPA's financial position has increased significantly. As of the end of 2019, the consolidated assets amounted to Rp14.41 trillion, increased by 22.74% from 2018 of Rp11.74 trillion. While the equity as of the end of 2019 was Rp5.42 trillion, increased by 3.04% from 2018 of Rp5.26 trillion.

The 2019 consolidated revenues amounted to Rp6.67 trillion, or 98% of the 2018 consolidated revenues of Rp6.82 trillion. The consolidated net income for the year 2019 was Rp327.07 billion or 76% of the consolidated net income for the year 2018 amounting to Rp428.80 billion.

The target of consolidated revenues and net income for the year have not been achieved due to the performance of subsidiaries that has not been in line with expectations, especially because the condition of construction industry as subsidiaries' business sector experienced a declining, mainly the infrastructure works whose funding sources come from the state budget. However, the revenues and net income of the holding company (*stand alone*) recorded an achievement above the 2019 Budget and Planning target. The revenues of the holding company in 2019 amounted to Rp540.64 billion or 134.54% of the Budget and Planning target and net income amounted to Rp150.82 billion or 235.90% of the Budget and Planning target.

Challenges and Solutions

The increasing challenges and risks do not diminish PPA's spirit to continue creating sustainable business strategies that are in line with the principles of good corporate governance.

Tantangan sumber pendanaan non perbankan dengan *cost of fund* lebih rendah, baik jangka pendek maupun jangka menengah telah diperoleh. Pada 2020, Perusahaan telah merencanakan penerbitan obligasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang. Perolehan pendanaan dengan *cost of fund* lebih rendah tersebut telah sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha PPA khususnya investasi/pembiayaan.

Kebutuhan pendanaan jangka pendek dan/atau jangka panjang, baik melalui perbankan dan/atau *strategic investor* dan/atau penerbitan surat utang (MTN dan/atau Obligasi dan/atau Surat Utang lainnya) pada tahun 2020 sebesar Rp10 triliun. Kebutuhan tambahan pendanaan tersebut untuk kegiatan investasi/pembiayaan yang sudah direncanakan sebesar Rp5,2 triliun serta estimasi tambahan pendanaan untuk kegiatan investasi/pembiayaan lainnya sebesar Rp4,8 triliun.

Tantangan PPA pada tahun 2020, selain pendanaan yaitu inovasi bisnis untuk memperkuat keunggulan kompetitif PPA di tengah kompetisi antar korporasi yang semakin ketat. Pada Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen, PPA mengusulkan kepada Pemegang Saham agar setiap penugasan penyehatan BUMN dapat dilakukan menggunakan skema penyertaan modal agar pelaksanaan R/R lebih optimal dan memberikan nilai tambah. Kegiatan usaha di bidang konsultasi bisnis juga telah menyesuaikan kebutuhan setiap pelanggan. Pada tahun 2019 PPA telah memberikan berbagai jenis produk konsultasi bisnis kepada perusahaan swasta maupun BUMN dari bidang industri yang beragam.

Pada Direktorat Investasi, telah terimplementasi strategi anorganik yaitu akuisisi perusahaan melalui penyertaan modal/pembelian kepemilikan (saham) baik secara penuh maupun parsial dengan target maksimal empat perusahaan setiap tahunnya. Selain itu, telah menyesuaikan layanan jasa dengan kebutuhan pelanggan melalui pengayaan produk/jasa seperti *pre-IPO financing*, *bridge financing*, investasi melalui penyertaan modal maksimal dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun, dan pengelolaan NPL perbankan. Aktivitas bisnis telah mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan capaian indeks kepuasan pelanggan 2019 sebesar 4,31 atau di atas target RKAP 2019 yaitu 3,0.

The challenges of non-banking funding sources with lower cost of fund, both short and medium term have been faced. In 2020, the Company is planning to issue bonds to meet long-term funding needs. Such fund collecting with lower cost of fund is in accordance with the needs of PPA's business activities, especially investment/financing.

Short-term and/or long-term funding needs, both through banking and/or strategic investors and/or the issuance of debt securities (MTN and/or Bonds and/or other Debt Securities) in 2020 amounting to Rp10 trillion. The additional funding requirement for the planned investment/financing activities is Rp5.2 trillion and the estimated additional funding for other investment/financing activities is Rp4.8 trillion.

Besides funding, the challenge that PPA has to deal with in 2020 is business innovation to strengthen PPA's competitive advantage in the midst of tighter competition between corporations. At the Business Advisory and Asset Management Directorate, PPA proposes to Shareholders that each SOEs restructuring assignment can be carried out using a capital participation scheme so that the implementation of R/R is more optimal and can provide added value. Activities in business advisory have also adjusted the needs of each customer. In 2019, PPA has provided various types of business advisory products to private companies and SOEs from various fields of industry.

At the Investment Directorate, an inorganic strategy has been implemented, i.e. the acquisition of companies through equity participation/purchase of ownership (shares) both fully and partially with a maximum target of four companies each year. In addition, services have been adjusted to customer needs through enrichment of products/services such as *pre-IPO financing*, *bridge financing*, investment through maximum equity participation with a term of 8 (eight) years, and management of banking NPLs. The business activities have been able to lead to customer satisfaction with the achievement of the 2019 customer satisfaction index of 4.31 or above the 2019 Budget and Planning target of 3.0.

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

Tantangan dari aspek SDM untuk meningkatkan daya saing perusahaan juga telah ditangani pada tahun 2019 melalui penyusunan *Road Map* Transformasi SDM Industry 4.0 2019-2023, pelatihan, pembaruan manajemen karir, pembaruan penilaian kerja berbasis *balance scorecard* menuju 360° *HC Assessment*, dan IT based *human capital*. Dari sisi *training*, sebanyak 91% karyawan telah mengikuti *training* baik *inhouse training*, *public training*, sertifikasi profesi, seminar, dan *sharing session*. Dari sisi manajemen karir, telah terlaksana promosi dengan mekanisme rekrutmen internal untuk beberapa posisi Kepala Divisi, Kepala Grup dan Kepala Unit serta penugasan karyawan ke anak/cucu perusahaan maupun menjadi *talent pool* untuk Direksi entitas anak/BUMN lain. Pengelolaan SDM juga telah menerapkan IT based *human capital* melalui implementasi *Human Resources Integrated System* (HRIS), *smart office*, PPA Mobile, infrastruktur *data center*, *cloud PPA*, dan *mobile office*. Berbagai upaya tersebut mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dengan capaian indeks kepuasan karyawan 2019 mencapai 3,87 atau di atas target RKAP sebesar 3,0.

Prospek dan Pengembangan Usaha

Sejalan dengan kebutuhan sumber pendanaan dengan jangka waktu panjang dan bunga yang murah, Perusahaan menargetkan menerbitkan surat utang obligasi di tahun 2020 dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1 Triliun. Obligasi akan diterbitkan dengan 3 struktur jangka waktu yang berbeda, yaitu 3, 5 dan 7 tahun dengan skema pembayaran bunga dilakukan secara triwulanan dan tanpa jaminan (*clean basis*). Penerbitan obligasi tersebut untuk menunjang kebutuhan modal kerja dan/atau *refinancing* atas fasilitas pinjaman yang diterima, baik yang ada di PPA Induk maupun di entitas anak.

The challenges from the Human Capital aspect to improve the Company's competitiveness have also been addressed in 2019 through the preparation of the Industry 4.0 HC Transformation Road Map 2019-2023, training, updating career management, renewal of balanced scorecard based-performance assessment towards 360° HC Assessment, and IT based-human capital. In terms of training, as many as 91% of employees have participated in training namely in-house trainings, public trainings, professional certifications, seminars, and sharing sessions. In terms of career management, promotion has been carried out with internal recruitment mechanism for several positions of Division Head, Group Head and Unit Head as well as assignment of employees to subsidiaries/subsidiaries of subsidiary of the Company and talent pool for Directors of subsidiaries/other SOEs. HC management has also applied IT based human capital through the implementation of Human Resources Integrated System (HRIS), smart office, PPA Mobile, data center infrastructure, PPA cloud, and mobile office. These efforts have led to employee satisfaction with the achievement of employee satisfaction index in 2019 reaching 3.87 or above the Budget and Planning target of 3.0.

Business Outlook and Development

In line with the need for long-term funding sources and low interest rates, the Company is targetting to issue bonds in 2020 with a maximum value of Rp1 Trillion. The bonds will be issued with 3 different time structures, namely 3, 5 and 7 years with quarterly interest payment scheme and without collateral (*clean basis*). The bond issuance is intended to support the working capital needs and/or refinancing of the loan facilities received, both those in the Holding PPA, and in the subsidiaries.

Untuk mendukung pencapaian target RKAP 2020 PPA Induk merencanakan untuk tetap fokus pada beberapa program kerja atau kegiatan sebagai berikut:

1. *Investasi*

PPA merencanakan kegiatan investasi/pembiayaan melalui skema kerja sama, *trading* dan pengelolaan dan/atau pembelian *distressed asset* (NPL) terutama, dari Bank BUMN. PPA merencanakan untuk melakukan kegiatan investasi pada beberapa bidang industri antara lain: pertanian, kimia dan farmasi, listrik, gas dan air, transportasi, gudang, komunikasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran dan lain-lain. Dalam bidang properti, PPA dapat melakukan investasi langsung berupa pengembangan aset/lahan milik PPA bekerjasama dengan pihak kontraktor maupun *developer*, ataupun melalui pemberian pembiayaan pada perusahaan properti.

2. *Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi*

PPA masih melanjutkan kegiatan R/R berdasarkan penugasan dari Menteri BUMN. Pelaksanaan R/R dapat disertai dengan pemberian bantuan dalam bentuk pendanaan maupun investasi kepada BUMN yang dilakukan R/R.

3. *Advisory*

PPA memberikan jasa konsultasi bisnis dan pengelolaan aset bagi BUMN, BUMD, Lembaga Pemerintah, dan Non BUMN/BUMD. Jasa konsultasi tersebut diantaranya dapat berupa *asset mapping*, *asset disposal*, *asset development*, *business plan*, *merger & acquisitions*, *business valuation & financial modeling*, *feasibility study*, Penyusunan Standar Operasi & Prosedur ("SOP"), restrukturisasi utang, *sustainability services* dan *financial arranger*.

4. *Financing*

PPA memberikan pembiayaan yang meliputi pembiayaan proyek (*project financing*), pembiayaan talangan (*bridge financing*), dan pembiayaan akuisisi (*buy out financing*).

To support the achievement of the Budget and Planning 2020 target, the Holding PPA plans to keep its focus on the following work programs or activities:

1. *Investment*

PPA is planning the investment/financing activities through cooperation, trading and management schemes and/or purchase of distressed assets (NPL), primarily through state-owned banks. PPA plans to carry out investment activities in several industrial sectors including: agriculture, chemical and pharmaceutical, electricity, gas and water, transportation, warehouse, communication, housing, industrial estates and offices and others. In the property sector, PPA performs direct investments in asset/land development owned by PPA in collaboration with contractors and developers, or through the provision of financing to property companies.

2. *Restructuring and/or Revitalization*

PPA is continuing the R/R activities based on assignments from the Minister of SOEs. The implementation of R/R can be accompanied by providing assistance in the form of funding and investment to SOEs carried out by R/R.

3. *Advisory*

PPA provides business consulting services and asset management for SOEs, ROEs, Government Institutions, and Non-SOEs/ROEs. These advisory services include asset mapping, asset disposal, asset development, business plan, merger & acquisition, business valuation & financial modeling, feasibility study, Standard Operating & Procedures ("SOP"), drafting debt restructuring, sustainability services and financial arranger.

4. *Financing*

PPA provides project financing, bridge financing, and acquisition financing.

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

Adapun sasaran kinerja yang menjadi harapan pemegang saham untuk tahun 2020 terdiri dari sasaran keuangan dan non keuangan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Sasaran Keuangan

- a. *Absolute Target*, adalah target dalam nilai mutlak, merupakan indikator yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dan tingkat pengembalian bagi pemegang saham. *Absolute Target* ditetapkan sebagai berikut:

No	Indikator Indicators	RKAP 2020 (Rp-juta) Budget and Planning 2020 (Rp-million)
1	Aset Assets	20.188.700
2	Laba Bersih Net Income	531.900
3	Ekuitas Equity	5.511.400
4	CAPEX	1.108.400
5	Deviden Dividend	47.000

- b. *Main Target*, adalah indikator-indikator utama yang dapat menggambarkan keberhasilan akan kinerja dari suatu perusahaan dan dapat diperbandingkan. Target harus lebih baik dari pencapaian tahun sebelumnya dan/atau lebih tinggi dari rata-rata industrinya. *Main Target* ditetapkan sebagai berikut:

No	Indikator Indicators	RKAP 2020 Budget and Planning 2020
1	<i>Sales to Average Asset</i>	58,29%
2	a. <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	1,77
	b. <i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	22,87
3	a. <i>EBITDA Margin</i>	20,04%
	b. <i>Net Profit Margin</i>	4,99%
4	a. <i>Return on Equity (ROE)</i>	9,65%
	b. <i>Return on Asset (ROA)</i>	2,64%
5	<i>Market Share</i>	n.a
6	<i>Current Ratio</i>	208,22%
7	<i>Operating Cashflow to Sales</i>	-10,83%
8	<i>Cashflow to Debt Ratio</i>	-7,86%

The performance targets that are expected by shareholders for 2020 consist of financial and non-financial targets as follows:

1. Financial Targets

- a. *Absolute Target*, is a target in absolute value, is an indicator that illustrates a company's financial position and return for shareholders. *Absolute Targets* are set as follows:

- b. *Main Target*, is the main indicators that can describe a company's performance success and comparable. The target must be better than the achievement of previous year and/or higher than the industry average. *Main targets* are set as follows:

- c. *Specific Target*, adalah indikator tambahan yang bersifat lebih spesifik terhadap *industry* tertentu yang dapat dibandingkan dengan pasar untuk menilai hubungan kinerja keuangan dan operasional suatu perusahaan, dengan target harus lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya dan/atau lebih tinggi dari rata-rata industri. *Specific Target* ditetapkan sebagai berikut:

- c. *Specific Target*, is additional indicator that is more specific to a particular industry that can be compared with the market to assess the relationship of company's financial and operational performance, with the targets that must be higher than the achievement of previous year and/or higher than the industry average. *Specific Targets* are set as follows:

No	Indikator Indicators	RKAP 2020 Budget and Planning 2020
1	<i>Revenue per Employee</i> (Rp Juta) Revenue per Employee ((Rp Million)	4.263
2	BOPO	89%
3	<i>Number of new services/products</i>	7 Proyek/projects
4	<i>Yield on Investment</i>	4%

2. Sasaran Non Keuangan

2. Non-Financial Targets

No	Indikator Indicators	RKAP 2020 Budget and Planning 2020
1	Sinergi BUMN SOEs Synergy	Kerja sama >3,5% modal disetor Cooperation >3,5% paid-up capital
2	Penugasan Pemerintah/ Penugasan Khusus/Restrukturisasi/Revitalisasi Government Assignments / Special/Restructuring/Revitalization Assignments	100%
3	Skor GCG GCG score	90
4	Efektivitas Penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Effectiveness of Funds Distribution for the Partnership and Community Development Program	100%
5	Tingkat Kolektibilitas dana Program Kemitraan Collectibility Rate of Partnership Program Funds	75%

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Melanjutkan penguatan proses bisnis di internal, PPA mengedepankan penguatan organisasi dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG). Sebagai BUMN yang melakukan R/R kepada BUMN dan korporasi lainnya, PPA memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk melaksanakan pengelolaan bisnis dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip GCG ini terutama didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance*.

Implementation of Corporate Governance

Continuing the efforts to strengthen internal business processes, PPA promotes organizational strengthening by applying the principles of Good Corporate Governance (GCG). As an SOEs that conducts R/R to SOEs and other corporations, PPA has a high moral responsibility to carry out business management in compliance with applicable laws and regulations. The application of GCG principles is mainly based on 5 (five) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, as released in Good Corporate Governance Code.

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

PPA telah mengupayakan untuk melaksanakan seluruh prinsip GCG yang dituangkan dalam skema organisasi dan perangkat kebijakan, maupun di berbagai program dan kegiatan. Pada perangkat kebijakan, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun berbagai pedoman dan peraturan yang dapat memberikan batasan tanggung jawab pada setiap organ Perusahaan. Batasan ini menjadi penting agar pola hubungan antar organ dapat terjalin dengan harmonis, dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, PPA juga menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham untuk menentukan beberapa kebijakan strategis bagi kelangsungan Perusahaan.

Keberadaan berbagai organ pendukung Direksi seperti Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Fungsi Manajemen Risiko, hingga Komite Investasi dan Manajemen Risiko, menandakan keseriusan manajemen untuk melakukan pengelolaan organisasi yang akuntabel dan memiliki prinsip kehati-hatian. Organ pendukung ini menciptakan pola pengendalian internal yang sistematis, mulai dari pengelolaan risiko di hulu hingga audit internal di hilir.

PPA has endeavored to implement all GCG principles as outlined in the organizational scheme and policy instruments, as well as in a variety of programs and activities. In the policy tools, Board of Directors together with Board of Commissioners compiles various guidelines and regulations that can limit the responsibilities of each Corporate organ. This limitation becomes important so that the relationship pattern between organs can be intertwined harmoniously, and is able to support the achievement of a predetermined vision and mission. In addition, PPA also held a General Meeting of Shareholders (GMS) as a forum for shareholders to decide some strategic policies for the survival of the Company.

The existence of various supporting organs of Board of Directors, such as the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit, the Risk Management Function, the Investment and Risk Management Committee, indicates the management's seriousness to carry out an accountable and prudent organization. These supporting organs create a systematic pattern of internal control, starting from upstream risk management to downstream internal audit.

Organ
Pendukung
DireksiSupporting
Organs of
Board of
Directors

Hasil tata kelola kemudian dievaluasi melalui *assessment* penerapan GCG, yang didasarkan pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Penilaian meliputi 6 (enam) aspek yaitu aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, aspek Direksi, aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta aspek lainnya. Penilaian di tahun 2019 dilakukan oleh penilai independen PT Adikarya Gemilang Solusindo.

PPA memperoleh skor penilaian GCG tahun buku 2019 sebesar 88,53 tergolong 'Sangat Baik'. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2018 yaitu sebesar 88,13. *Assessment* GCG juga telah dilaksanakan pada entitas anak yaitu PT PPA Finance dan PT PPA Kapital untuk pertama kali sebagai bentuk upaya menjalankan bisnis yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada grup PPA. Salah satu penyempurnaan proses bisnis yang mengedepankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan melalui pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko untuk mengkaji kelayakan usulan dari grup bisnis dari berbagai aspek.

Perusahaan terus berkomitmen untuk terus memperbarui *soft structure* penerapan GCG dan manajemen risiko melalui komitmen, kebijakan, pedoman dan prosedur. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik juga diterapkan melalui keterbukaan informasi baik internal maupun eksternal. Komunikasi internal antara Manajemen dengan karyawan dilakukan melalui pertemuan *leaders meeting*, *leaders lunch*, *town hall meeting*, dan PPA Group Meeting serta secara tertulis melalui media internal yaitu buletin SAPPa. Keterbukaan komunikasi eksternal dilaksanakan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik melalui *website* dan media *social*, hubungan dengan media massa dan kegiatan *branding*.

The results of governance are then evaluated through an assessment of GCG implementation, which is based on the Decree of Secretary of Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation for the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The assessment includes 6 (six) aspects, i.e. the aspects of Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance, Shareholders and GMS, Board of Commissioners/Supervisory Board, Board of Directors, Information Disclosure and Transparency, as well as Other aspects. The assessment in 2019 was carried out by an independent assessor, PT Adikarya Gemilang Solusindo.

PPA obtained a score of 88.53 or classified as 'Very Good' in the GCG assessment for the fiscal year 2019. This achievement increased from 2018 which was 88.13. GCG assessment has also been carried out on subsidiaries, namely PT PPA Finance and PT PPA Kapital for the first time as an effort to run a business that prioritizes the principles of good corporate governance within PPA group. One of the improvements in business processes that promote the application of good corporate governance is strengthening the control and supervision function through the establishment of an Investment and Risk Management Committee with the task of reviewing the feasibility of proposals from business group from various aspects.

The Company continues to be committed to continually updating the GCG soft structure and risk management through commitments, policies, guidelines and procedures. In addition, good corporate governance is also implemented through the disclosure of internal and external information. Internal communication between management and employees is carried out through *leaders meeting*, *leaders lunch*, *town hall meetings*, and PPA Group Meetings and in writing through internal media, i.e. SAPPa bulletin. While external communication is carried out through the application of Public Information Disclosure through website and social media, media relations and branding activities.

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

Manajemen meyakini bahwa faktor integritas menjadi kunci bagi penerapan prinsip GCG. Manajemen menekankan pentingnya integritas sebagai salah satu tata nilai yang mendasar dalam pembentukan etika seluruh insan PPA, baik etika usaha maupun etika keseharian. Dengan integritas yang tinggi, PPA akan mampu mewujudkan keinginannya untuk memperkuat keunggulan kompetitif, dan menjadi mitra bagi korporasi lain dalam program restrukturisasi/revitalisasi.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai perusahaan BUMN, PPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosial. PPA telah mengembangkan program tanggung jawab sosial yang efektif dan tepat sasaran sebagai wujud pengabdian kepada Negara.

Selain fokus pada bisnis, PPA juga terus meningkatkan komitmennya pada pemenuhan aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*/"CSR") melalui dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sampai dengan tahun 2019, PPA bersama PT Bahana Artha Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Daerah telah menyalurkan dana Program Kemitraan kepada lebih dari 600 mitra binaan yang tersebar di 17 provinsi dengan nilai penyaluran lebih dari Rp70 miliar.

Melalui Program Bina Lingkungan, PPA ikut berperan serta menjalankan program pemerintah untuk membantu daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) bekerja sama dengan Yayasan Aksi Peduli Bangsa dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pedalaman Mentawai Provinsi Sumatera Barat antara lain, memberikan bantuan sarana air bersih, sarana listrik tenaga surya, beasiswa pendidikan untuk tingkat perguruan tinggi, pembangunan asrama pendidikan putri dan budidaya ternak bebek percontohan.

Pada bidang pendidikan dan pelatihan, PPA telah melaksanakan berbagai program di antaranya Program Beasiswa untuk tingkat SMA di SMK Plampang di Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Program Beasiswa pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui Yayasan Cagar Foundation – Rumah Autis yang berpusat di Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Program Pelatihan dan Pengembangan Petani Kopi bekerja sama dengan Kampus Institut Pertanian Bogor, di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

The management believes that the integrity factor is the key for the implementation of GCG principles. Therefore, the management emphasizes the importance of integrity as one of the fundamental values in the formation of ethics for all PPA people, both business ethics and daily ethics. With high integrity, PPA will be able to realize its desire to strengthen competitive advantage, and become partners for other corporations in the restructuring/revitalization program.

Corporate Social Responsibility

As a state-owned enterprise, PPA has social obligations and responsibilities. PPA has developed an effective and targeted social responsibility program as a form of devotion to the State.

In addition to focusing on business, PPA also continues to increase its commitment to fulfilling the social and environmental responsibility aspect ("Corporate Social Responsibility"/"CSR") through the funds of Partnership and Community Development Program. Until 2019, PPA together with PT Bahana Artha Ventura and Perusahaan Modal Ventura Daerah has channeled Partnership Program funds to more than 600 fostered partners spread across 17 provinces with a distribution value of more than Rp70 billion.

Through the Community Development Program, PPA has a role in running the government programs to assist regions the underdeveloped, front and outermost in collaboration with Aksi Peduli Bangsa Foundation in carrying out community empowerment programs in Mentawai of West Sumatra Province, among others, providing assistance in clean water facility, solar electricity facility, scholarship for college level, construction of girls' dormitory and duck farming.

In the field of education and training, PPA has carried out various programs including the Scholarship Program for high school level at SMK Plampang in Yogyakarta, the Scholarship Program for children with special needs through Cagar Foundation – Rumah Autis located in Bekasi, West Java Province and Coffee Farmer Training and Development Program in collaboration with the Bogor Agricultural Institute Campus, in Kepahiang Regency, Bengkulu Province.

Sebagai bentuk kontribusi dalam melestarikan alam, PPA melaksanakan penanaman mangrove di Kawasan Kapuk, Jakarta. PPA juga selalu berpartisipasi aktif dalam memberikan bantuan di setiap situasi tanggap dan pasca bencana yang terjadi di negeri ini.

As a form of contribution in preserving nature, PPA carried out mangrove planting in Kapuk area, DKI Jakarta Province. PPA also actively participates in providing assistance in every quick response and post-disaster situation that occurs in this country.

Perubahan Komposisi dan Nomenklatur Direksi

Changes in Board of Directors Composition and Nomenclature

Di sepanjang tahun 2019 Pemegang Saham melakukan pergantian susunan Direksi, sebagai berikut:

Throughout 2019, the Shareholders made the following changes to the composition of Board of Directors:

1. Pada tanggal 1 April 2019, Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Andi Saddawero, diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya yang telah usai. Dikdik Permadi Yoffana diangkat sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen yang baru. Pergantian ini sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan No. SK-76/MBU/04/2019 tertanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.
2. Pada tanggal 23 Juli 2019, Direktur Utama Henry Sihotang, dan Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Ajar Setiadi, diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya yang telah usai. Iman Rachman diangkat sebagai Direktur Utama yang baru, sedangkan R. Muhammad Irwan diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja yang baru. Pergantian ini sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan No. SK-159/MBU/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

1. On April 1, 2019, Andi Saddawero as Business Advisory and Asset Management Director, was honorably dismissed because his term of office had ended. Dikdik Permadi Yoffana was appointed as the new Business Advisory and Asset Management Director. This replacement is in accordance with the Decree of Minister of SOEs as Company GMS No. SK-76/MBU/04/2019 dated April 1, 2019 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
2. On July 23, 2019, Henry Sihotang as President Director and Ajar Setiadi as Finance and Support Director, were honorably dismissed because their term of office had ended. Iman Rachman was appointed as the new President Director, while R. Muhammad Irwan was appointed as the new Finance and Support Director. This replacement is in accordance with the Decree of Minister of SOEs as Company GMS No. SK-159/MBU/07/2019 dated July 23, 2019 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

Berikut disampaikan kronologi susunan Direksi di sepanjang tahun 2019 dan susunan Direksi per 31 Desember 2019.

The following is the chronology of Board of Directors composition throughout 2019 and the composition as of December 31, 2019.

Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2019
Chronology of Changes in Board of Directors Composition throughout 2019

Periode 1 Januari - 1 April 2019 Period of January 1 – April 1, 2019	Periode 1 April - 22 Mei 2019 Period of April 1 – May 22, 2019	Periode 22 Mei - 23 Juli 2019 Period of May 22 – July 23, 2019	Periode 23 Juli - 31 Desember 2019 Period of July 23 – December 31, 2019	Keterangan Remark
Henry Sihotang (Direktur Utama) Henry Sihotang (President Director)	Henry Sihotang (Direktur Utama) Henry Sihotang (President Director)			Henry Sihotang tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 23 Juli 2019 karena masa jabatannya yang telah usai. Henry Sihotang no longer served as President Director since July 23, 2019 because his term had ended.
Andi Saddawero (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) Andi Saddawero (Business Advisory and Asset Management Director)				Andi Saddawero tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 1 April 2019 karena masa jabatannya yang telah usai. Andi Saddawero no longer served as Director since April 1, 2019 because his term of office has ended.
Ajar Setiadi (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) Ajar Setiadi (Finance and Support Director)	Ajar Setiadi (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) Ajar Setiadi (Finance and Support Director)			Ajar Setiadi tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 23 Juli 2019 karena masa jabatannya yang telah usai. Ajar Setiadi no longer served as Director since July 23, 2019 because his term of office has ended.
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) Nasrizal Nazir (Investment Director)	Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) Nasrizal Nazir (Investment Director)	Nasrizal Nazir (Direktur Investasi dan Plt. Direktur Utama) Nasrizal Nazir (Investment Director and Acting President Director)	Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) Nasrizal Nazir (Investment Director)	-
	Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director)	Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen dan Plt. Direktur Keuangan & Dukungan Kerja) Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director and Acting Finance and Support Director)	Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director)	Dikdik Permadi Yoffana menjabat sebagai Direktur sejak 1 April 2019. Dikdik Permadi Yoffana has served as Director since April 1, 2019.

Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2019

Chronology of Changes in Board of Directors Composition throughout 2019

Periode 1 Januari - 1 April 2019 Period of January 1 – April 1, 2019	Periode 1 April - 22 Mei 2019 Period of April 1 – May 22, 2019	Periode 22 Mei - 23 Juli 2019 Period of May 22 – July 23, 2019	Periode 23 Juli - 31 Desember 2019 Period of July 23 – December 31, 2019	Keterangan Remark
			Iman Rachman (Direktur Utama) Iman Rachman (President Director)	Iman Rachman menjabat sebagai Direktur Utama sejak 23 Juli 2019 Iman Rachman has served as President Director since July 23, 2019
			R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) R. Muhammad Irwan (Finance and Support Director)	R. Muhammad Irwan menjabat sebagai Direktur sejak 23 Juli 2019 R. Muhammad Irwan has served as Director since July 23, 2019

Dengan demikian, susunan Direksi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Accordingly, the composition of Board of Directors as of December 31, 2019 is as follows:

Susunan Direksi per 31 Desember 2019

Board of Directors Composition
as of December 31, 2019

Direksi Board of Directors	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Iman Rachman (Direktur Utama) Iman Rachman (President Director)	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-159/MBU/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-159/MBU/07/2019 dated July 23, 2019	23 Juli 2019 - RUPS Tahun 2024 July 23, 2019 – 2024 GMS	Ke-1 1st
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) Nasrizal Nazir (Investment Director)	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-14/MBU/01/2018 tertanggal 16 Januari 2018 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-14/MBU/01/2018 dated January 16, 2018	16 Januari 2018 - RUPS Tahun 2023 January 16, 2018 – 2023 GMS	Ke-1 1st
Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director)	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-76/MBU/04/2019 tertanggal 1 April 2019 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-76/MBU/04 /2019 dated April 1, 2019	1 April 2019 - RUPS Tahun 2024 April 1, 2019 – 2024 GMS	Ke-1 1st
R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) R. Muhammad Irwan (Finance and Support Director)	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-159/MBU/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-159/MBU/07/2019 dated July 23, 2019	23 Juli 2019 - RUPS Tahun 2024 July 23, 2019 – 2024 GMS	Ke-1 1st

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT**Akhir Kata**

Secara khusus Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan bisnis Perusahaan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham serta mitra korporasi, baik BUMN maupun sektor swasta. Demikian pula kepada regulator, pemasok, dan mitra usaha, Direksi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah tercipta.

Kepada seluruh karyawan Insan PPA, izinkan Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan. Seluruh pencapaian ini akan menjadi dasar bagi Perusahaan untuk dapat mengoptimalkan potensinya dan meraih kinerja terbaiknya di masa yang akan datang.

Final Words

Board of Directors would like to specially express respect and gratitude to Board of Commissioners for the directives and strategic partnership in the Company's operational and business management. Board of Directors would also like to thank the shareholders and corporate partners, both SOEs and private sector. Likewise for regulators, suppliers and business partners, Board of Directors would like to send gratitude for the cooperation that has been created.

To all PPA employees, please allow Board of Directors to convey highest appreciation for the dedication that has been given. All of these achievements will be the footing for the Company to optimize its potential and achieve its best performance in the future.

Jakarta, 27 Maret 2020
Jakarta, March 27, 2020

Atas nama Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
On behalf of Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset
(Persero)



IMAN RACHMAN
Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2019 telah di muat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

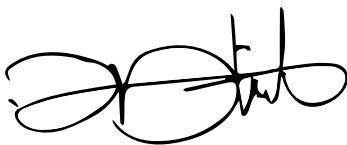
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Maret 2020

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



EDY PUTRA IRAWADY
Komisaris Utama
President Commissioner



DIDYK CHOIROEL
Komisaris
Commissioner



TIRTA HIDAYAT
Komisaris Independen
Independent Commissioner

STATEMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE 2019 ANNUAL REPORT OF PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

We, the undersigned, testify that all information contained in the 2019 Annual Report of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) has been presented in its entirety and are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statement of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, March 27, 2020

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS



IMAN RACHMAN
Direktur Utama
President Director



NASRIZAL NAZIR
Direktur Investasi
Investment Director



DIKDIK PERMADI YOFFANA
**Direktur Konsultasi Bisnis
dan Aset Manajemen**
Business Advisory and Asset
Management Director



R. MUHAMMAD IRWAN
**Direktur Keuangan
dan Dukungan Kerja**
Finance and Support Director



PROFIL **PERUSAHAAN**

COMPANY PROFILE

Hingga akhir tahun 2019, PPA menangani 10 (sepuluh) BUMN melalui R/R dalam memenuhi aspirasi Pemegang Saham.

Until the end of 2019, PPA has been handling 10 (ten) SOEs through R/R in order to meeting the Shareholders aspirations.





IDENTITAS PERUSAHAAN

COMPANY IDENTITY

	Nama Perusahaan Company Name	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	27 Februari 2004 February 27, 2004
	Status dan Badan Hukum Status and Legal Entity	Perseroan Terbatas (PT) / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Limited Liability Company (PT)/State-Owned Enterprise
	Dasar Hukum Pembentukan Legal Basis of Establishment	- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 27 Februari 2004. - Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 4 September 2008. - Government Regulation Number 10 of 2004 concerning Establishment of a Company (Persero) in Asset Management sector dated February 27, 2004. - Government Regulation Number 61 of 2008 as Amendment to Government Regulation Number 10 of 2004 concerning Establishment of a Company (Persero) in Asset Management sector dated September 4, 2008.
	Maksud dan Tujuan Pendirian Purposes and Objectives of Establishment	Pengelolaan Aset eks BPPN, R/R Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kegiatan Investasi, serta kegiatan Pengelolaan Aset BUMN Ex-IBRA Asset Management, Restructuring R/R of State-Owned Enterprises (SOEs), investment activities, and Asset Management activities of SOEs
	Kepemilikan Saham Share Ownership	Pemerintah Republik Indonesia, 100,00% Government of the Republic of Indonesia, 100.00%
	Modal Dasar Authorized Capital	Rp5.000.000.000.000,-
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-in Capital	Rp2.996.688.000.000,-
	Rating Perusahaan Company Rating	Single A (Rating oleh Pefindo)
	Rating Surat Utang Debt Securities Rating	Single A (Rating oleh Pefindo)
	Jumlah Karyawan Number of Employees	176 orang 176 people
	Jaringan Usaha Business Network	3 (tiga) Entitas Anak Langsung dan 8 (delapan) Entitas Anak Tidak Langsung 3 (three) Direct Subsidiaries and 8 (eight) Indirect Subsidiaries
	Alamat Address	Sampoerna Strategic Square. North Tower 9 th - 12 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Pusat 12930, DKI Jakarta, Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Central Jakarta 12930, DKI Jakarta, Indonesia Telepon Phone : +62 21 5798 2222 Faksimili Facsimile : +62 21 577 2443
	Surel & Situs Mail & Website	corpsec@ptppa.com www.ptppa.com
	Sosial Media Social Media	 @ptppapersero  @ptppapersero  @ptppapersero
	Kontak Perusahaan Company Contact	Sekretaris Perusahaan : Edi Winanto Corporate Secretary : Edi Winanto

Informasi terkait data entitas anak dan cucu disampaikan pada halaman 138

Information related to subsidiaries and subsidiaries of subsidiary is presented on page 138

RIWAYAT SINGKAT PPA

BRIEF HISTORY OF PPA



Sekilas Tentang PPA

Dengan tujuan melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara hukum, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), disebut juga dengan "Perusahaan" atau "PPA" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Perusahaan didirikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PPA At A Glance

With the objective to manage the non-litigant assets of ex-Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), also referred to as "the Company" or "PPA" was established based on Government Regulation No. 10 of 2004 dated February 27, 2004 concerning the Establishment of a Company (Persero) in Asset Management. The Company was initially founded for a period of 5 (five) years, and can be extended with the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS).

RIWAYAT SINGKAT PPA
BRIEF HISTORY OF PPA

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004. Selanjutnya Perusahaan menerima tugas dari Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan aset eks BPPN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 yang dibuat oleh Menteri Keuangan dan Perusahaan.

Melihat kemampuan Perusahaan dalam mengelola aset eks BPPN, maka dipandang perlu untuk memberikan tugas tambahan kepada Perusahaan terutama untuk membantu Pemerintah dalam upaya penyehatan BUMN yang bermasalah. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk meninjau kembali strategi dan merumuskan ulang maksud dan tujuan Perusahaan. Selanjutnya Pemerintah memperluas maksud dan tujuan Perusahaan dengan menambah ruang lingkup tugas Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset sehingga maksud dan tujuan Perusahaan menjadi sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset Negara eks BPPN;
2. R/R BUMN;
3. Kegiatan investasi; serta
4. Kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemegang Saham Perusahaan menerbitkan Keputusan Pemegang Saham (di luar RUPS) No. KEP-164/MBU/2008 yang dituangkan dalam Akta No. 2 tanggal 10 September 2008 dibuat di hadapan Lindawati Wiranata, S.H. tanggal 5 September 2008. Keputusan tersebut kemudian mengubah masa tugas Perusahaan dari lima tahun menjadi waktu yang tidak terbatas (*going concern*).

Pada tahun 2014, melalui kajian yang mendalam, dan untuk mendukung pengembangan rencana bisnis dan usaha Perusahaan, Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pada 12 Februari 2014 melalui Surat No. S-68/MBU/2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang dituangkan dalam Akta No. 62 tanggal 21 Februari 2014, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta.

The Company was established based on Deed of Establishment No. 7 dated February 27, 2004 made before a Notary Lenny Janis Ishak, S.H., in Jakarta and was ratified by the Ministry of Law and Human Rights No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 dated March 9, 2004. Furthermore, the Company received an assignment from the Minister of Finance to manage the assets of ex-IBRA as stipulated in the Asset Management agreement dated March 24, 2004 made by the Minister of Finance and the Company.

With due observance to the Company's ability in managing ex-IBRA's assets, it is deemed necessary to entrust additional assignment to the Company, mainly to assist the Government to revitalize troubled SOEs. This was the consideration for the Government to review the strategy and reformulate the Company's purposes and objectives. Furthermore, the Government expanded the Company's purposes and objectives by increasing the scope of duties of the Company according to Government Regulation No. 61 of 2008 as Amendment to Government Regulation No. 10 of 2004 concerning Establishment of a Company (Persero) in Assets Management sector dated September 4, 2008, into as follows:

1. Ex-IBRA Assets Management;
2. SOEs R/R;
3. Investment Activities; and
4. SOEs Assets Management Activity.

To follow-up this Government Regulation, Shareholders of the Company issued a Shareholder Resolution (in lieu of GMS) No. KEP-164/MBU/2008 as declared in Deed No. 2 dated September 10, 2008, made before Lindawati Wiranata, S.H. dated September 5, 2008. This resolution amended the Company's duration of association from 5 (five) years to unspecified time (*going concern*).

In 2014, after an in-depth review, and in order to support the development of the Company's business plans, the Minister of SOEs as the Company's GMS determined an amendment to the Company's Articles of Association on February 12, 2014, through Letter No. S-68/MBU/2014 concerning Amendment to Articles of Association of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) as declared in Deed No. 62 dated February 21, 2014 drafted before Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta.

Perubahan tersebut memperluas maksud dan tujuan Perusahaan, sehingga selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perusahaan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan yaitu melalui:

1. Jasa Konsultansi berupa:
 - a. Konsultansi Bisnis dan Manajemen;
 - b. Konsultansi Penjualan dan/atau Pengembangan Aset.
2. Pengelolaan aset milik: negara selain aset negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk entitas anak BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang;
 - b. Melakukan penyewaan aset;
 - c. Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang;
 - d. Melakukan restrukturisasi perusahaan; dan
 - e. Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain.

Seiring dengan perkembangan tersebut, daya saing Perusahaan terus diperkuat baik dari sisi keuangan, operasional hingga pada aspek sumber daya manusia dengan pembentukan budaya Perusahaan yang kuat.

Informasi Perubahan Nama

Sejak berdirinya sampai dengan akhir tahun 2019, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama.

The amendment then expanded the Company's purposes and objectives, hence besides main business activities mentioned above, the Company is also eligible to perform business activity with regards to the Company's resources optimization, through:

1. Advisory service:
 - a. Business and management consulting;
 - b. Assets sales and/or development consulting.
2. Management of assets owned by: Government excluding Government's Assets from IBRA; Regional Government; Legal Entity that is owned and/or established by Government excluding State-Owned Enterprise; Regional Owned-Enterprise and Private Enterprise, including subsidiaries of SOEs, Joint Ventures, covering following activities:
 - a. Assets trading, including stocks and receivables;
 - b. Assets leasing;
 - c. Receivables restructuring, including receivables collection;
 - d. Corporate restructuring; and
 - e. Assets development and utilization including partnership with other parties.

In line with this development, the Company's competitiveness is continuously strengthened both in terms of financial and operational aspects up to human capital aspect within strong corporate culture establishment.

Information on Changes in Company's Name

Since its establishment until the end of 2019, the Company has never changed its name.

JEJAK LANGKAH

MILESTONES

2008

- Perluasan maksud dan tujuan Perusahaan menjadi:
 - Pengelolaan Aset eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan
 - Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN
 - Investasi
 - Pengelolaan Aset BUMN
- Perubahan jangka waktu berdirinya Perusahaan dari lima tahun menjadi tidak terbatas.
- Expansion of the Company's purposes and objectives:*
 - Ex-IBRA Asset Management for and on behalf of the Minister of Finance*
 - SOEs Restructuring/Revitalization*
 - Investment*
 - SOEs Asset Management*
- Changes to the Company's duration of association from five years to unspecified time (going concern).*

2004

Perusahaan didirikan dengan nama PT Perusahaan Pengelola Aset berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 pada tanggal 27 Februari 2004, dengan tujuan melakukan pengelolaan aset eks BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

The Company was established with the name PT Perusahaan Pengelola Aset through Government Regulation No. 10 of 2004 dated February 27, 2004 with purpose to manage ex-IBRA assets for and on behalf of the Minister of Finance.

2009

Pembentukan entitas anak, PT PPA Finance ("PPAF").

Establishment of a subsidiary, PT PPA Finance ("PPAF").

2010

Sejak 20 Juli 2010, PT Waskita Karya menjadi entitas anak Perusahaan melalui Program Restrukturisasi/Revitalisasi dengan skema penyertaan modal.

As of July 20, 2010, PT Waskita Karya became a subsidiary of the Company under Restructuring/Revitalization Program through the capital investment scheme.

2011

Pembentukan entitas anak, PT PPA Kapital ("PPAK").

Establishment of a subsidiary, PT PPA Kapital ("PPAK").

2012

- Sejak 13 Agustus 2012, PT Nindya Karya menjadi entitas anak Perusahaan melalui Program Restrukturisasi/Revitalisasi dengan skema penyertaan modal.
- Pelepasan PT Waskita Karya sebagai entitas anak Perusahaan.

- As of August 13, 2012, PT Nindya Karya became a subsidiary of the Company under Restructuring/Revitalization Program through the capital investment scheme.*
- Release of PT Waskita Karya as a subsidiary of the Company.*

2014

Perusahaan melakukan transformasi bisnis dengan lebih mengembangkan kegiatan investasi untuk mendukung *sustainability* Perusahaan.

The Company made a business transformation by further developing the investment activities to support the Company's sustainability.

2019

2018

Pendirian PT Magnesium Gosari International (entitas anak PPAK), PT SIPPA Kemasan International (entitas anak PPAK) dan pengambilalihan PT Bondi Syad Mulia oleh PPAK.

Establishment of PT Magnesium Gosari International (subsidiary of PPAK), PT SIPPA Kemasan International (subsidiary of PPAK) and acquisition of PT Bondi Syad Mulia by PPAK.

2017

Perusahaan menginisiasi pengembangan segmen bisnis baru pada industri pupuk.

The Company initiated new business segment development in the fertilizer industry.

2015

Perusahaan mulai melakukan penetrasi ke pasar investasi sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP").

The Company initiated penetration towards investment market in accordance with the Corporate Long-term Plan ("RJPP").

2016

- Perusahaan melakukan perbaikan struktur pendanaan dengan menerbitkan *Medium Term Notes* ("MTN") dan Surat Berharga Komersial ("SBK").
- Perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan dan merevitalisasi BUMD di Jawa Barat dengan dukungan dari Bank BJB.
- Perusahaan menjalin kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") dalam pengelolaan *Non Performing Loan*.
- Perusahaan merintis kerja sama dengan *Korea Asset Management Corporation* (KAMCO). Kerja sama meliputi pertukaran informasi, pengembangan kompetensi karyawan dan peninjauan peluang investasi pada *Non Performing Loan* (NPL) perbankan antara kedua belah pihak.
- Perusahaan bergabung dalam keanggotaan International Public AMC Forum ("IPAF") dalam rangka memperkuat jaringan internasional di bidang pengelolaan aset.
- The Company improved the funding structure by issuing Medium Term Notes ("MTN") and Commercial Paper ("CP").*
- The Company is working with the West Java Provincial Government to develop and revitalize ROEs in West Java with the support from BJB Bank.*
- The Company is cooperating with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") in managing Non-Performing Loans.*
- The Company initiated a cooperation with Korea Asset Management Corporation (KAMCO). The cooperation includes information exchange, employee competency development and exploring investment opportunities in Non-Performing Loans (NPLs) in banking between the two parties.*
- The Company joined the membership of the International Public AMC Forum ("IPAF") to strengthen the international network in the field of asset management.*

- Pelaksanaan kegiatan investasi yang diimplementasikan melalui sejumlah penandatanganan kerja sama.
- Melakukan pengelolaan aset dengan menciptakan nilai investasi guna mendukung Perusahaan dalam *creating value*.
- Perusahaan menjalankan model bisnis secara konsisten sesuai visi dan misi.
- Implementation of investment activities.*
- Assets management activity by creating investment value in order to support the Company in creating value.*
- Implementation of consistent business model according to the vision and mission.*

BIDANG USAHA, PRODUK DAN JASA, SERTA PASAR YANG DILAYANI

LINE OF BUSINESS, PRODUCTS AND SERVICES, AND MARKETS SERVED

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar Terakhir dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan No. 62 tanggal 21 Februari 2014, Perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

Business Activities Based on the Latest Articles of Association and Business Activities Conducted

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association as stated in the Deed of the Company's Meeting Decision No. 62 dated February 21, 2014, the Company carries out the following business activities:

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not yet Carried Out	Kegiatan yang Dijalankan Activities Carried Out
Kegiatan Usaha Utama Core Business		
Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan The management of state assets derived from the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) after the expiration and dissolution of IBRA, for and on behalf of the Ministry of Finance	✓	Perusahaan melakukan pengelolaan aset eks BPPN antara lain: 1. Melakukan divestasi saham bank, diantaranya saham Bank Permata, saham Bank Danamon, saham Bank BCA, saham Bank BII, saham Bank Niaga, saham Bank BTPN dan saham Bank Maybank Indonesia; 2. Melakukan divestasi saham non bank, diantaranya saham PT Bali Nirwana Resort dan saham PT Dipasena Citra Darmaja; 3. Melakukan pengamanan, pemutakhiran dokumen dan penjualan aset properti; 4. Melakukan pengelolaan Grup Texmaco; 5. Melakukan pengelolaan dan restrukturisasi Grup Tuban Petro; 6. Melakukan pengelolaan Grup Sejahtera Eka Graha. The Company carries out ex IBRA's asset management including: 1. Conducted the divestment of bank shares, including shares of Bank Permata, Bank Danamon, Bank BCA, Bank BII, Bank Niaga, Bank BTPN and Bank Maybank Indonesia; 2. Conducted the divestment of non-bank shares, including shares of PT Bali Nirwana Resort and PT Dipasena Citra Darmaja; 3. Conducted the safeguarding, updating documents and selling of property assets; 4. Managed Texmaco Group; 5. Managed and restructured Tuban Petro Group; 6. Managed Sejahtera Eka Graha Group.
R/R Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Restructuring and/or Revitalization of State-Owned Enterprises (SOEs)	✓	Perusahaan melakukan R/R BUMN antara lain: 1. PT WK, ▪ Melakukan restrukturisasi keuangan termasuk memberikan suntikan dalam bentuk penyertaan modal sehingga ekuitas kembali menjadi positif; ▪ Setelah sehat PT WK dikembalikan ke Pemerintah dan kemudian melakukan <i>Initial Public Offering</i> ("IPO"). 2. PT NK, ▪ Melakukan restrukturisasi keuangan termasuk memberikan suntikan dalam bentuk penyertaan modal sehingga ekuitas kembali menjadi positif; ▪ Saat ini kondisi PT NK sudah sehat dan siap dikembalikan ke Pemerintah. 3. Melakukan R/R terhadap PT DI termasuk memberikan pembiayaan modal kerja dan memfasilitasi kerja sama antara PT DI dengan <i>Airbus Military</i>, Spanyol. 4. Melakukan R/R terhadap PT IKI termasuk memberikan pembiayaan modal kerja. 5. Melakukan R/R terhadap PT PAL termasuk memberikan pembiayaan modal kerja. The Company carries out restructuring and/or revitalization of SOEs, including: 1. PT WK, ▪ Carried out financial restructuring including providing equity participation, so that equity returned to be positive; ▪ After being revitalized, PT WK was returned to the Government and then performed an Initial Public Offering ("IPO"). 2. PT NK, ▪ Carried out financial restructuring including providing equity participation, so that equity returned to be positive; ▪ Currently, PT NK's condition is already revitalized and ready to be returned to the Government. 3. Carried out R/R on PT DI, including providing working capital financing and facilitating cooperation between PT DI with Airbus Military, Spain. 4. Carried out R/R on PT IKI, including providing working capital financing. 5. Carried out R/R on PT PAL, including providing working capital financing.

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not yet Carried Out	Kegiatan yang Dijalankan Activities Carried Out
R/R Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Restructuring and/or Revitalization of State- Owned Enterprises (SOEs)	✓	6. PT MNA: ▪ Membantu penyelesaian permasalahan karyawan dengan melakukan pembayaran atas hak-hak normatif karyawan; ▪ Melakukan pendampingan dalam mencari mitra strategis untuk mengoperasikan kembali PT MNA; ▪ Melakukan pendampingan PT MNA pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"); ▪ Melakukan pendampingan dalam proses kerja sama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) dan beberapa BUMN lain dalam bidang usaha pengangkutan kargo. 7. PT KKA, ▪ Membantu penyelesaian permasalahan karyawan termasuk memberikan bantuan pinjaman; ▪ Membantu upaya untuk mengoperasikan kembali pabrik kertas PT KKA dengan tahap awal restrukturisasi melakukan optimalisasi fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dioperasikan kombinasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dalam rangka sinergi BUMN dengan Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN). 8. PT Kertas Leces: ▪ Membantu penyelesaian permasalahan karyawan termasuk memberikan bantuan pinjaman; ▪ Melakukan pendampingan dalam proses PKPU. 9. PT Iglas: ▪ Membantu penyelesaian permasalahan karyawan termasuk memberikan bantuan pinjaman; ▪ Melakukan pendampingan dalam penanganan aset berstatus sengketa dengan Pemerintah Kota Surabaya; ▪ Melakukan kajian transformasi bisnis. 10. PT Penas, membantu program restrukturisasi SDM dan keuangan, serta organisasi dan manajemen. 11. PT BBI, melakukan R/R dan pembiayaan modal kerja. 12. PT PANN, menyusun kajian restrukturisasi dan penanganan PT PPM secara menyeluruh, baik keuangan maupun operasional. 6. PT MNA: ▪ Helped in resolving employee problems by making payments to employees' normative rights; ▪ Assisted in finding a strategic partner in order for PT MNA to re-operate; ▪ Assisted PT MNA during the Delay of Debt Payment Obligations ("PKPU"); ▪ Assisted in the process of cooperation with PT Garuda Indonesia (Persero) and several other SOEs in the field of cargo transportation business. 7. PT KKA, ▪ Helped in resolving employee problems including providing loan assistance; ▪ Assisted in the efforts to re-operate PT KKA paper mill with the initial stage of restructuring to optimize the Steam Power Plant (PLTU) facility which is operated in combination with the Gas Engine Power Plant (PLTMG) in the context of SOEs synergy with the State Electric Company (Persero) (PT PLN). 8. PT Kertas Leces: ▪ Assisted in resolving employee problems including providing loan assistance; ▪ Assisted in the PKPU process. 9. PT Iglas: ▪ Helped in resolving employee problems including providing loan assistance; ▪ Assisted in handling assets in dispute status with the Government of Surabaya; ▪ Conducted business transformation studies. 10. PT Penas, helped the HR and financial restructuring program, as well as organization and management. 11. PT BBI, conducted R/R and working capital financing. 12. PT PANN, compiled a comprehensive review of PT PPM's restructuring and handling, both financial and operational.

BIDANG USAHA, PRODUK DAN JASA, SERTA PASAR YANG DILAYANI
LINE OF BUSINESS, PRODUCTS AND SERVICES, AND MARKETS SERVED

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not yet Carried Out	Kegiatan yang Dijalankan Activities Carried Out
Kegiatan investasi Investment Activities	✓	Kegiatan investasi Perusahaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: - Investasi langsung maupun tidak langsung berupa: - Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya; - Penempatan dana pada suatu proyek atau kegiatan usaha lainnya; - Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/penyewaan aset; - Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali. - Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa: - Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat di Bursa Efek; dan - Pembelian saham, <i>warrant</i> dan produk derivatif lainnya melalui Bursa Efek. Kegiatan investasi yang dilakukan Perusahaan antara lain pada: - PT PPA Kapital (entitas anak). Total investasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp936.263 juta. - PT Bondi Syad Mulia, bergerak di bidang jasa <i>galvanizing</i> untuk produk besi dan baja di daerah Rungkut Surabaya. Total investasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp193 miliar. - PT PPAF adalah entitas anak di bidang usaha <i>Leasing, Consumer Financing, dan Factoring</i>. Total investasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp392,6 miliar. - PT Wisarada Sarana Aviasi, bidang jasa sewa helikopter. Total investasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp122 miliar. - PT Rejeki Inti Logam Jaya, bidang usaha produsen dan pengolahan aluminium di daerah Tangerang, Banten. Total investasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp73 miliar. - PT Gasuma Federal Indonesia, bidang usaha pengolahan gas di Jakarta. Total investasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp312 miliar. - PT Varia Intra Finance, bidang usaha pembiayaan <i>multi finance</i> berdomisili di Jakarta. Total investasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp160 miliar. - PT Polytama Propindo, bidang usaha produksi polypropylene baik jenis pellet maupun granule di Indramayu. Total investasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp300 miliar. The Company's investment activities are as follows: - Direct and indirect investment in the form of: - Provision of loans to fund projects and/or other business activities; - Fund placement in a project and/or other business activity; - Purchasing, development, and/or selling/leasing of assets; - Temporary Investment (in terms of establishment, purchase of issued/portfolio shares) in company in order to enhance its value for resale. - Investment in Marketable Securities in the form of: - Purchasing of bonds, including quasi-equity listed or not listed on the Stock Exchange; - Purchasing of stock, warrant, and other derivative products through the Stock Exchange. The investment activities carried out by the Company include: - PT PPA Kapital (a subsidiary). Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp936,263 million. - PT Bondi Syad Mulia, engaged in galvanizing services for iron and steel products in Rungkut area of Surabaya. Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp193 billion. - PT PPAF is a subsidiary in the business of Leasing, Consumer Financing, and Factoring. Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp392.6 billion. - PT Wisarada Sarana Aviasi, helicopter rental services. Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp122 billion. - PT Rejeki Inti Logam Jaya, aluminum manufacturing and processing business in Tangerang, Banten. Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp73 billion. - PT Gasuma Federal Indonesia, gas processing business in Jakarta. Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp312 billion. - PT Varia Intra Finance, multi-finance business in Jakarta. Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp160 billion. - PT Polytama Propindo, polypropylene production business in both pellet and granule types in Indramayu. Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp300 billion.

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not yet Carried Out	Kegiatan yang Dijalankan Activities Carried Out
Kegiatan investasi Investment Activities	✓	9. PT Lintas Samudra Sejahtera, perusahaan kapal dan pendukung pembangkit tenaga listrik internasional. Total investasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp444,7 miliar. 10. PT Magnesium Gosari International, bidang usaha industri pupuk di Gresik, Jawa Timur. Total investasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp200,1 miliar. 11. PT Polowijo Gosari, bidang usaha industri pupuk di Gresik, Jawa Timur. Total investasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp134,6 miliar. 12. PT Widodo Makmur Unggas, bidang usaha peternakan ayam di daerah Jawa Barat. Total investasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp50 miliar. 13. PT National Utility Helicopters bidang jasa sewa helikopter di Kalimantan. Total investasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp77,8 miliar. 9. PT Lintas Samudra Sejahtera, international ship company and power plant supporting. Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp444.7 billion. 10. PT Magnesium Gosari International, fertilizer industry business in Gresik, East Java. Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp200.1 billion. 11. PT Polowijo Gosari, fertilizer industry business in Gresik, East Java. Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp134.6 billion. 12. PT Widodo Makmur Unggas, chicken farming business in West Java. Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp50 billion. 13. PT National Utility Helicopters, helicopter rental services in Kalimantan. Total investment as at December 31, 2019 amounting to Rp77.8 billion.
Kegiatan pengelolaan aset BUMN SOE's asset management activities	✓	PT Pertamina
Kegiatan Usaha Penunjang Supporting Business		
1. Jasa Konsultansi, berupa jasa konsultansi: a. Bisnis dan manajemen; b. Penjualan dan/atau pengembangan aset. 1. Advisory services, in the form of consulting for: a. Business and management; b. Assets sales and/ or development.	✓	1. Pemberian Jasa Penasehat Keuangan PT Hotel Indonesia Natour (Persero). 2. Jasa Konsultasi dan pendampingan Pencarian Investor Dalam Rangka Kerja Sama Pendayagunaan Aset Area Non Pabrik Milik PT Pupuk Kujang. 3. Pemberian Jasa Kajian Restrukturisasi Hutang PT Petro Energy. 4. Pemberian Jasa Konsultasi Restrukturisasi dan Optimalisasi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). 5. Pemberian Jasa kepada PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia dalam Rangka Restrukturisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero). 6. Pemberian Jasa Konsultasi Penyusunan Draft SOP Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Pendampingan Pelaksanaan Pendayagunaan Lahan PT KS Tahap II. 7. Program Penjualan Aset Milik Pertamina Foundation. 8. Jasa Konsultasi Kajian Alternatif Pengelolaan Aset Melalui Pihak Ketiga dan Perusahaan Manajemen Aset Yang didirikan oleh LPS. 9. Pemberian Jasa Kajian Kelayakan atas Rencana Pembangunan Pabrik Katalis PT Pupuk Kujang. 10. Pemberian Jasa Konsultasi Restrukturisasi Hutang PT Dua Putra Utama Makmur, Tbk. 11. Pemberian Jasa Konsultasi Restrukturisasi Hutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor. 1. Financial Advisory Services for PT Hotel Indonesia Natour (Persero). 2. Consulting and advisory services for investor search in the utilization of PT Pupuk Kujang's Non-Factory Area Assets. 3. Debt Restructuring Study Services for PT Petro Energy. 4. Restructuring and Optimization Consulting Services for PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). 5. Providing Services for PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia in the Restructuring of PT Perkebunan Nusantara III (Persero). 6. Consulting Services for the Formulation of SOP for the Cooperation of the Utilization of Fixed Assets of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk and the Assistance for the Implementation of Land Use of PT KS Phase II. 7. Assets Sales Program Pertamina Foundation. 8. Consulting Services of Alternative Asset Management Through Third Parties and Asset Management Companies established by LPS. 9. Feasibility Study Services for PT Pupuk Kujang Catalyst Plant Development Plan. 10. Debt Restructuring Consulting Services for PT Dua Putra Utama Makmur, Tbk. 11. Debt Restructuring Consulting Services for Import Export Financing Institutions.

BIDANG USAHA, PRODUK DAN JASA, SERTA PASAR YANG DILAYANI
LINE OF BUSINESS, PRODUCTS AND SERVICES, AND MARKETS SERVED

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not yet Carried Out	Kegiatan yang Dijalankan Activities Carried Out
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk entitas anak BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut: - Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang; - Melakukan penyewaan aset; - Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang; - Melakukan restrukturisasi perusahaan; - Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain. 2. Management of: State-owned assets, Non-IBRA State Assets; Regional Government; legal entities owned and/ or established by the State excluded State-Owned Enterprise; Regional-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises, including SOE's subsidiaries, joint ventures, including the following activities: - Asset trading, including stock and receivables; - Asset leasing; - Receivables restructuring, including receivables collection; - Company restructuring; - Asset development and utilization, including cooperation with other parties.	✓	- Restrukturisasi utang PT Prabu Wahana International. - Restrukturisasi utang PT Carpediem Mandiri. - Debt restructuring of PT Prabu Wahana International. - Debt restructuring of PT Carpediem Mandiri.

Perusahaan senantiasa mengimplementasikan kebijakan strategis guna memanfaatkan usaha yang tepat, antara lain dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada dengan menerapkan praktik usaha berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan secara konsisten. Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, Perusahaan mengedepankan kerja sama dengan berbagai pihak dan mitra kerja strategis dengan tujuan untuk meningkatkan nilai Perusahaan.

The Company continuously implement strategic policies to effectively improve its business, among others by making use of existing business opportunities through the consistent application of business practices based on prudent and corporate governance principles. To attain optimum performance, the Company prioritizes cooperation with various parties and strategic work partners with the aim to enhance the Company's value for all stakeholders.

Secara garis besar, bidang usaha Perusahaan saat ini adalah:

Current lines of business of the Company are generally as follows:

Pengelolaan Aset eks BPPN Ex-IBRA Asset Management	R/R BUMN SOEs R/R	Investasi Investment	Pengelolaan Aset BUMN dan lainnya Asset Management of SOEs and others
- Melakukan penjualan aset properti, saham dan piutang. - Melakukan penyewaan aset properti. - Melakukan penagihan piutang. - Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset. - Melakukan restrukturisasi atas aset properti, saham dan piutang guna meningkatkan nilainya. - Trading of property assets, shares and receivables. - Property assets leasing. - Receivables collecting. - Cooperating with other parties to increase the value of assets. - Restructuring property assets, shares and receivables to increase its value.	- Restrukturisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja BUMN. - Revitalisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja BUMN. - Restructuring the company to improve the performance of SOEs. - Revitalization the company to improve the performance of SOEs.	- Investasi langsung maupun tidak langsung. - Investasi pada instrumen surat berharga. - Direct or indirect investment. - Investment in securities instruments.	- Pengembangan dan pendayagunaan aset untuk meningkatkan nilainya. - Jasa konsultansi bisnis dan manajemen. - Pengelolaan aset milik Pemda, BUMD, dan Swasta termasuk entitas anak BUMN. - Development and utilization of assets to increase its value. - Business and management consulting services. - Pengelolaan aset milik Management of assets owned by the Regional Government, ROE, and Private Companies, including subsidiaries of SOEs.

Produk dan Jasa serta Pasar yang Dilayani

Products, Services, and Market Served

1. Finance

Secara garis besar, jasa pembiayaan Perusahaan bersifat efisien dan fleksibel dengan memperhatikan kebutuhan klien. Pembiayaan tersebut disalurkan oleh Perusahaan atau Entitas Anak dan Entitas Asosiasi kepada BUMN maupun Swasta yang bergerak di bidang konstruksi, manufaktur serta bidang potensial lainnya dalam rangka mendukung penyelesaian proyek maupun kegiatan investasi. Cakupan kegiatan usaha pada jasa pembiayaan antara lain:

- Anjak Piutang (*Factoring*);
- Pembiayaan Konsumen/Multi Guna (*Consumer Financing*);
- Sewa Guna Usaha (*Leasing*);

1. Finance

The Company's financing service is generally efficient and flexible by concerning requirements of the clients. Most of the financing is disbursed by the Company or Subsidiary and Associated Entity to SOEs or Private Companies operated in construction, manufacturing and other potential sectors either to support completion of project or investment activities. Scope of business activity including:

- Factoring;
- Consumer Financing;
- Leasing;

BIDANG USAHA, PRODUK DAN JASA, SERTA PASAR YANG DILAYANI
LINE OF BUSINESS, PRODUCTS AND SERVICES, AND MARKETS SERVED

- d. Pembiayaan Modal Kerja (*Working Capital Financing*);
- e. Pembiayaan Proyek (*Project Financing*);
- f. Pembiayaan Jangka Pendek Sementara (*Bridge Financing*);
- g. Pembiayaan sebelum IPO (*pre-IPO Financing*).

2. *Advisory*

Perusahaan memberikan jasa konsultasi bisnis melalui perancangan langkah-langkah strategis agar klien dapat memperluas dan mencapai target bisnis. Konsultasi yang disediakan antara lain:

- a. *Business Plan*;
- b. *Business Valuation & Financial Modelling*;
- c. *Due Dilligence*;
- d. *Feasibility Study*;
- e. *Financial Arranger*;
- f. *Merger & Acquisition*;
- g. Penyusunan Standar Operasi & Prosedur (SOP);
- h. Restrukturisasi Hutang;
- i. *Sustainability Services*.

Setiap tahun permintaan terhadap jasa *advisory* terus meningkat, hal ini turut mempengaruhi ragam jenis layanan yang diberikan oleh Perusahaan, yang meliputi:

- a. Tahapan program restrukturisasi hingga eksekusi suatu perusahaan;
- b. *Business Review and Financial Project Development*;
- c. Program pendampingan dalam rangka pendayagunaan tanah/aset tetap suatu perusahaan; dan
- d. Kajian bisnis terkait penataan dan penyehatan suatu perusahaan.

3. *Investasi*

Dengan kemampuan mengakses pasar yang luas serta hubungan kelembagaan yang kuat, Perusahaan memberikan peningkatan nilai ekonomi baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang melalui pengelolaan dan pengembangan investasi klien/mitra strategis. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk penempatan dana pada suatu aset/proyek, pembelian aset serta instrumen investasi lainnya.

Jenis jasa yang diberikan Perusahaan terkait

- d. Working Capital Financing;

- e. Project Financing;
- f. Bridge Financing;

- g. Pre-IPO Financing.

2. *Advisory*

The Company provides business advisory service by designing strategic initiatives to support the clients expanding and achieving business target. The advisory service includes:

- a. Business Plan;
- b. Business Valuation & Financial Modelling;
- c. Due Dilligence;
- d. Feasibility Study;
- e. Financial Arranger;
- f. Merger & Acquisition;
- g. Standard Operating & Procedure (SOP) Preparation;
- h. Debt Restructuring;
- i. Sustainability Services.

Advisory service demand is increasing every year, hence influences the type of services provided by the Company, including:

- a. Company restructuring program until the execution phase;
- b. Business Review and Financial Project Development;
- c. Mentoring program in order to utilize land/fixed assets of a company; and
- d. Business Review in relation to the administration and improvement of a company.

3. *Investment*

With the capability to access broad market and strong institutional relation, the Company provides economic value increase, both short, medium and long-term, through the management and development of client/strategic partners' investment. These efforts are carried out in the form of funds investment in an assets/project, assets acquisition as well as other investment instruments.

Type of services provided by the Company related

investasi antara lain dalam bentuk pembiayaan dan saham/surat berharga sebagai investasi jangka pendek, kerja sama operasi sebagai investasi jangka menengah, serta investasi dalam bentuk penyertaan dan investasi properti sebagai investasi jangka panjang.

Pada tahun 2019, Perusahaan juga terus mencari peluang untuk berinvestasi pada bidang/industri yang sesuai dengan kriteria investasi Perusahaan, selain tetap melanjutkan investasi yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

4. Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

Secara garis besar, Perusahaan menyediakan jasa R/R dalam rangka mendukung suatu perusahaan mencapai pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang berkesinambungan. Dalam hal ini, fokus jasa yang diberikan Perusahaan meliputi *Corporate Restructuring* dan *Debt Restructuring*.

Hingga saat ini, Perusahaan melaksanakan kegiatan R/R untuk sejumlah BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri BUMN. Kegiatan tersebut mencakup:

- a. Penyelesaian terhadap masalah ketenagakerjaan;
- b. Pengembangan potensi BUMN;
- c. Pemberian dana investasi untuk mengoperasikan kembali/meningkatkan kinerja BUMN;
- d. Pemantauan kinerja BUMN.

Inisiasi Strategis

1. Perusahaan melakukan perbaikan struktur pendanaan dengan menerbitkan *Medium Term Notes* ("MTN") dan Surat Berharga Komersial ("SBK").
2. Perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan dan merevitalisasi BUMD di Jawa Barat dengan dukungan dari Bank BJB.
3. Perusahaan menjalin kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") dalam pengelolaan *Non Performing Loan*.
4. Perusahaan merintis kerja sama dengan *Korea Asset Management Corporation* (KAMCO).

Kerja sama meliputi pertukaran informasi, pengembangan kompetensi karyawan dan peninjauan peluang investasi pada *Non Performing Loan* (NPL) perbankan antara kedua belah pihak.

to investment includes financing and shares/marketable securities as short-term investment, joint operation as medium-term investment and investment in form of property placement and investment and long-term investment.

In 2019, the Company also continuously sought opportunity to invest in sector/industry that is suitable with the Company's investment criteria, besides also continuing investments in previous years.

4. Restructuring and/or Revitalization

In general, the Company provides R/R service to support a Company achieving sustainable business growth and development. In this case, focus of services provided by the Company includes Corporate Restructuring and Debt Restructuring.

Currently, the Company performs R/R activity for several SOEs according to assignment from Minister of SOEs. The activity includes:

- a. Industrial dispute settlement;
- b. SOEs potential development;
- c. Investment disbursement to re-operate/increase performance of the SOEs;
- d. SOEs performance monitoring.

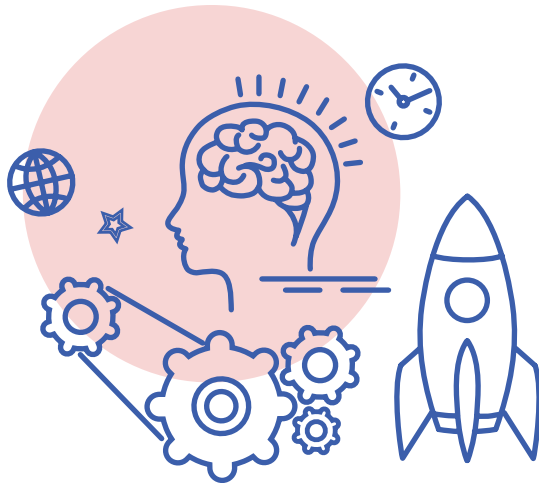
Strategic Initiatives

1. The Company improves funding structure by issuing Medium Term Notes ("MTN") and Commercial Paper ("CP").
2. The Company cooperates with the Government of West Java Province to develop and revitalize ROEs in West Java with the support from BJB Bank.
3. The Company cooperates with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") in managing Non-Performing Loans.
4. The Company initiated cooperation with Korea Asset Management Corporation (KAMCO).

The cooperation includes information exchange, employee competency development and exploring investment opportunities in Non-Performing Loans (NPLs) in banking between the two parties.

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE



VISI | VISION

Menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi

To be a leading investment company and trusted partner in corporate restructuring



MISI | MISSION

1. Memberikan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan investasi, restrukturisasi, pengelolaan aset dan *advisory*.
 2. Menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional dan memiliki integritas tinggi.
 3. Menerapkan manajemen yang terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
 4. Memberikan kontribusi kepada pembangunan lingkungan dan masyarakat.
-
1. Provide sustainable growth for all stakeholders through investment, restructuring, asset management and advisory activities.
 2. Develop excellent, professional and high-integrity human resources.
 3. Implement a transparent management according to good corporate governance principles, risk management and compliance in an integrated manner.
 4. Contribute to environment and community development.

Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi atas Visi, Misi dan Budaya Kerja

Seluruh hal yang tercantum dalam visi, misi, dan nilai budaya atau filosofi Perusahaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta dituangkan dalam RJPP tahun 2018-2022.

Peninjauan atas Visi, Misi dan Budaya Kerja dalam Lima Tahun Terakhir

Visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RJPP tahun 2018-2022 merupakan peninjauan atas visi dan misi sebelumnya sebagaimana tertuang dalam RJPP tahun 2015-2019.

Budaya Perusahaan

Untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki Budaya Kerja yang baik. Demi terbentuk budaya kerja yang baik, Perusahaan secara berkelanjutan dan terstruktur menanamkan nilai-nilai (*Core Values*) Perusahaan yaitu SEEIT (*Stewardship, Entrepreneurship, Excellence, Integrity & Teamwork*). Agar SEEIT menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari seluruh insan Perusahaan, maka telah dilaksanakan program internalisasi *Core Values*, sebagai berikut:

1. Sosialisasi *Core Values*;
2. Penyusunan *Gesture Core Values*;
3. Implementasi *Gesture Core Values* pada saat dimulainya acara-acara pelatihan, *morning briefing* tiap satuan kerja serta acara-acara kebersamaan karyawan;
4. Pembentukan Tim *Core Values* yang bertugas menyusun program kerja internalisasi nilai-nilai perusahaan kepada seluruh insan Perusahaan.

Board of Commissioners and Board of Directors Approval on Vision, Mission and Corporate Culture

The entire explanation in the Company's vision, mission and corporate values or philosophy have been agreed and signed by Board of Commissioners and Board of Directors and declared in the Company's long-term plan 2018-2022.

Review on Vision, Mission and Corporate Culture in Five Recent Years

The vision and mission as disclosed in the Company's long-term plan 2018-2022 is a result of a review of the previous vision and mission as stipulated in the Company's long-term plan 2015-2019.

Corporate Culture

To achieve the Company's Vision and Mission, human resources that are equipped with proper Corporate Culture are required. To that end, the Company continuously and structurally embeds Corporate Core Values, named SEEIT (*Stewardship, Entrepreneurship, Excellent, Integrity & Teamwork*). A number of Core Values internalization programs have been carried out in order to manifest SEEIT in employees everyday resides, such as:

1. Core Values dissemination;
2. Creating of Core Values gesture;
3. Implementation of Core Values gesture at the beginning of training events, morning briefing for every Division, also employee team building events;
4. Establishment of Core Values Team that is tasked to prepare the corporate values work program to all employees.

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE

Nilai-nilai Perusahaan merupakan fondasi dan panduan dari setiap insan Perusahaan dalam melakukan pekerjaan untuk mendorong tercapainya tujuan Perusahaan. Nilai-nilai Perusahaan harus dapat memotivasi insan Perusahaan guna mencapai tujuan sebagaimana tercermin dalam Visi dan Misi perusahaan.

Nilai-nilai perusahaan sangat berkaitan dengan tujuan Perusahaan. Untuk itu, setiap individu dalam Perusahaan harus memahami tujuan Perusahaan dengan baik. Adanya pemahaman yang sama diantara manajemen dan karyawan, akan membentuk budaya kerja perusahaan yang kondusif dan inovatif. Sehingga, pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan dedikasi dan semangat yang tinggi serta berorientasi pada hasil (*result oriented*). Tata Nilai Perusahaan disusun oleh Tim Tata Nilai yang kemudian dicantumkan dalam RJPP Perusahaan tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Corporate Values serve as the foundation and guide for every personnel to work in the pursuit of achieving the Company's goals. The values must be able to motivate all employees to achieve the objectives as reflected on the Company's Vision and Mission.

Corporate values are closely related with the Company's objectives. Therefore, every individual within the Company must truly understand the Company's goals. Through mutual understanding between the management and employees, a conducive and innovative corporate culture can be formed. Hence, work is carried out through high dedication and is result-oriented. The Corporate Values were compiled by the Corporate Values Team which then included in the Company's long-term plan 2015-2019 as follows:

STEWARDSHIP

Melaksanakan amanah para *stakeholder* dan meninggalkan *legacy*.

To carry out the stakeholders' mandate and leave a legacy.

ENTREPRENEURSHIP

Selalu mencari peluang untuk mengembangkan bisnis.

Always finding business development opportunities.

EXCELLENCE

Memberikan hasil yang terbaik dalam setiap tugas.

Provide the best results in every task.

INTEGRITY

Selalu menerapkan standar etika yang tinggi dan memenuhi komitmen setiap tugas.

Always implementing high ethical standards and consistently fulfilling every commitment.

TEAMWORK

Komitmen untuk selalu bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Commitment to always work together and achieve mutual objectives.

MAKNA LOGO PERUSAHAAN THE MEANING OF COMPANY LOGO



Logo PT PPA merupakan identitas utama perusahaan sebagai pengenalan kepada publik dan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) yang ditampilkan secara jelas dan konsisten.

PT PPA's logo is the main identity of the company to the public and stakeholder identification, which is displayed clearly and consistently.

MERAH

Melambungkan keberanian dalam menunaikan tugas sesuai mandat, menilai risiko dan mengelolanya dengan pertimbangan matang dan bertindak sesuai nilai-nilai utama Perusahaan.

RED

Symbolizes courage in carrying out duties according to the mandate, assessing and managing risks with careful consideration and displaying behavior that is in line with the Company's core values.

BIRU

Melambungkan kesatuan nilai yang ditunjukkan melalui perilaku dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, dengan semangat mencapai hasil sempurna serta mengutamakan kejujuran.

BLUE

Symbolizes the unity of value shown through behavior and ability to carry out tasks and works, with the spirit of achieving excellent results and prioritizing honesty.

HIJAU

Melambungkan tujuan pertumbuhan jangka panjang, selalu berkembang dalam kompetensi dan keahlian, menjadi lebih baik dari hari kemarin dalam setiap langkah dan tujuan perusahaan.

GREEN

Symbolizes the goal of long-term growth, constant development of competencies and expertise, becoming better than yesterday in every step and goal of the company.

Logo PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) memiliki tiga elemen utama, yaitu: tiga garis lengkung - dua di atas dan satu di bawah - yang secara utuh melambungkan perputaran roda; tulisan PPA di tengah lengkungan; dan logotype yang terdiri dari nama serta keterangan bentuk perusahaan di samping kanan logogram. Tiga garis lengkung tersebut memiliki warna merah, biru dan hijau dengan tulisan PPA dan nama serta slogan perusahaan menggunakan warna hitam.

The logo of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) has three main elements, namely: the three curved lines - two above and one below - which symbolize the rotation of a wheel; the word PPA in the middle of the arch; and the logotype consisting of name and form of the company to the right of the logogram. The three curved lines have red, blue and green colors with the words PPA, while the company's name and slogan is in black color.

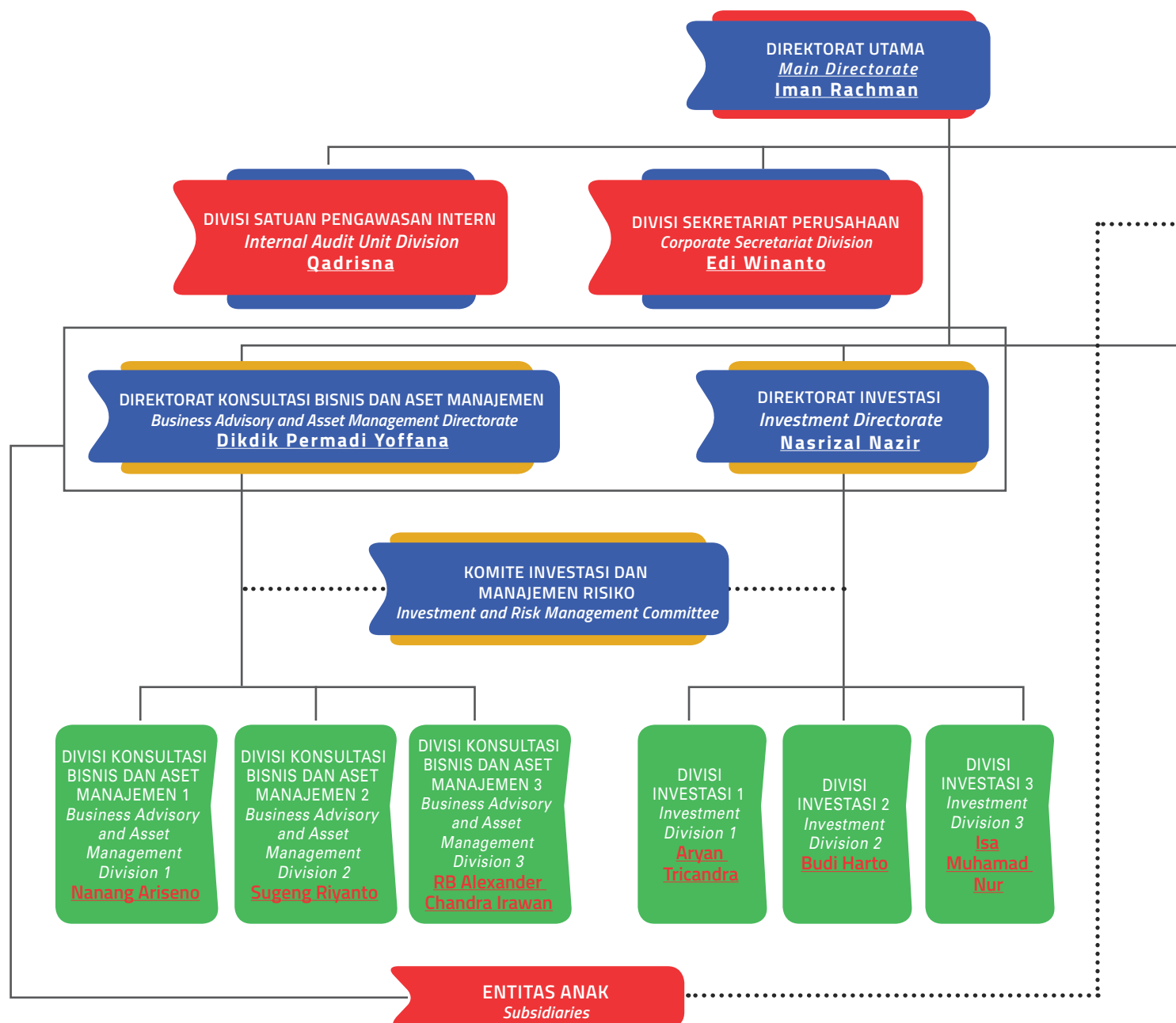
Logotype 'PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) *State-Owned Asset Management Company*' ditempatkan sejajar dengan sumbu tengah logogram untuk mewakili kesejajaran di antara semua anggota perusahaan, baik dalam posisi pimpinan mau pun karyawan sehingga dapat menciptakan sinergi yang baik dalam memberikan solusi inovatif bagi para mitra usaha.

The logotype 'PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) *State-Owned Asset Management Company*' is placed parallel to the central axis of the logogram to represent alignment among all company members, both in leadership and employee positions, so as to create good synergy in providing innovative solutions for all business partners.

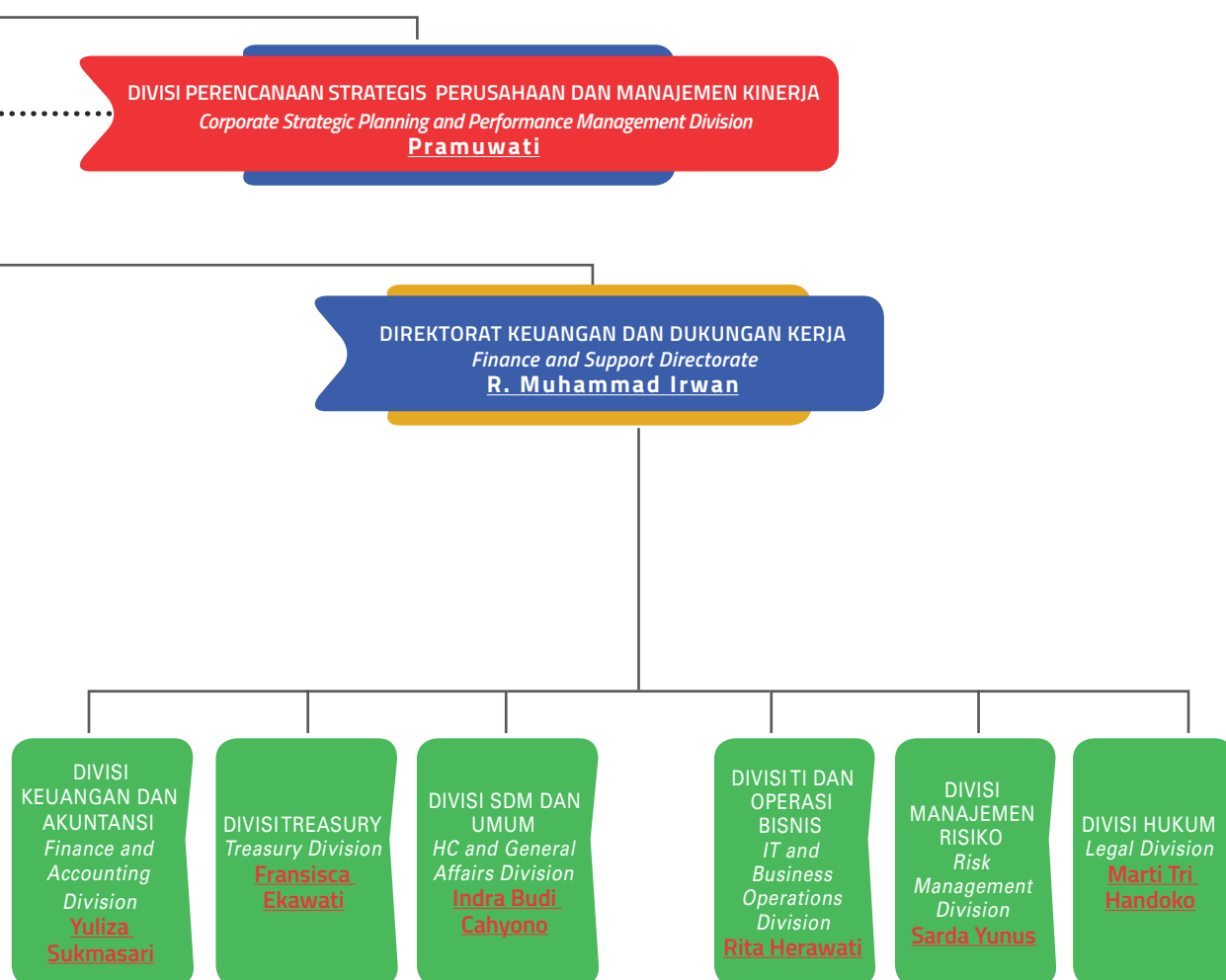
STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Perusahaan per 31 Desember 2019 telah disahkan melalui Keputusan Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No. SK-53/PPA/0919 tanggal 11 Sptember 2019, sebagai berikut:



Below is the Company's organizational structure as of December 31, 2019 that has been approved through the Decree of Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No. SK-53/PPA/0919 dated September 11, 2019:



PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

EDY PUTRA IRAWADY

Komisaris Utama | President Commissioner

Periode Jabatan: 14 April 2016 - RUPS Tahun 2021, Periode ke-2
Service Period: April 14, 2016 – 2021 GMS, 2nd Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 62 tahun
Kelahiran Kualatungkal, 5 Oktober 1957

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak tahun 2011 berdasarkan keputusan RUPS KEP-92/MBU/2011 tanggal 14 April 2011 untuk masa jabatan 2011-2016. Di tahun 2012 diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-430/MBU/2012 tanggal 3 Desember 2012 dengan meneruskan sisa masa jabatan hingga tahun 2016. Diangkat kembali di tahun 2016 untuk periode masa jabatan ke-2 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK- 78/MBU/04/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk masa jabatan 2016-2021.

Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris

Tidak Ada.

Pendidikan

Sarjana (S1) bidang Hukum dari Universitas Indonesia (1981), dan Master (S2) of Arts in International Graduate Transaction (M.A.I.T) dari George Mason University, Virginia, Amerika Serikat (1993).

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang Hukum dan Ekonomi Makro.

Pengalaman Kerja

Berkarir di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (November 2017-sekarang), sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri (2012-2017); Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan (2005-2012); Plt. Asisten Deputi III Menko Perekonomian Urusan Pemanfaatan SDA Pertanian dan Peternakan (2002-2004); Asisten Deputi Menko Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan (2001-2005); Pelaksana Harian Asisten Deputi Menko Perekonomian Urusan Pemanfaatan SDA Pertanian dan Peternakan (2002-2004); dan Asisten Deputi Menko Ekuin Urusan Industri Olahan (2000-2001).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi serta Sertifikasi Profesi

- The 6th Internasional Financial Cooperation Forum.
- Sertifikasi *Kompetensi level Certified Risk Profesional*.

Rangkap Jabatan

- Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2017-sekarang).
- Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2019-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Memiliki hubungan afiliasi dengan Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali melalui rangkap jabatan. Namun demikian rangkap jabatan ini tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.

Personal data

Indonesian citizen
62 years old
Born in Kualatungkal, October 5, 1957

Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Appointment History and Legal Basis

First served as a Commissioner of the Company since 2011 based on the GMS resolution KEP-92/MBU/2011 dated April 14, 2011 for a term of 2011-2016. In 2012, appointed as President Commissioner based on the Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-430/MBU/2012 dated December 3, 2012 by continuing the remaining terms up to 2016. Reappointed in 2016 for the second term of office based on the Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-78/MBU/04/2016 dated April 14, 2016 concerning Dismissal and Appointment of President Commissioner of the Company PT Perusahaan Pengelola Aset for 2016-2021 term of office.

Assignment in the Scope of Board of Commissioners

None.

Education

Bachelor of Law from the University of Indonesia (1981), and Master of Arts in International Graduate Transaction (M.A.I.T) from George Mason University, Virginia, United States (1993).

Expertise

Having expertise in the field of Law and Macro Economics.

Work Experience

Pursued career at the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia. Also served as Special Staff of the Coordinating Minister for Economic Affairs (November 2017-present), previously serving as Deputy for Commerce and Industry Coordination (2012-2017); Deputy for Industry and Trade Coordination (2005-2012); Acting Assistant Deputy III of Coordinating Minister for Economic Affairs Utilization of Agricultural and Livestock Natural Resources (2002-2004); Assistant Deputy of Coordinating Minister for Economic Affairs for Maritime Affairs and Fisheries (2001-2005); Daily Assistant to the Coordinating Minister for Economic Affairs for Utilization of Agricultural and Livestock Natural Resources (2002-2004); and Assistant Deputy of Coordinating Minister for Economic Affairs in Processed Industrial (2000-2001).

Training, Competency Development, and Professional Certification

- The 6th International Financial Cooperation Forum.
- Competency Certification of Certified Risk Profesional level.

Concurrent Position

- Special Staff of the Coordinating Minister for Economic Affairs (2017-present).
- Expert Team of the Coordinating Minister for Economic Affairs (2019-present).

Affiliation

Having an affiliation with the Government of the Republic of Indonesia as the major/controlling shareholder through concurrent position. However, this concurrent position is not violating the prevailing laws and regulations.

Information on Company Share Ownership

The Company does not trade its shares to the public, and does not have a Share Ownership Program by Management.



DIDYK CHOIROEL

Komisaris | Commissioner

Periode Jabatan: 12 April 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode ke-1
Service Period: April 12, 2018 – 2023 GMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 48 tahun
Kelahiran Malang, 16 April 1971

Personal Data

Indonesian citizen
48 years old
Born in Malang, April 16, 1971

Domisili

Tangerang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Domicile

Tangerang, South Tangerang, Indonesia.

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-87/MBU/04/2018 tertanggal 12 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan 2023. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

Appointment History and Legal Basis

Appointed as Commissioner based on the Decree of Minister of SOEs as the GMS No. SK-87/MBU/04/2018 dated April 12, 2018 concerning the Dismissal and Appointment of Board Commissioners Members of the Company PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) for a period of 5 (five) years or up to 2023. Previously, he has never served in the Company's Board of Commissioners.

Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris

Ketua Komite Audit PT PPA 2018 - sekarang.

Assignment in the Scope of Board of Commissioners

Chairman of Audit Committee of PT PPA 2018 – present.

Pendidikan

Sarjana (S1) bidang Ilmu Administrasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram (1998), Pasca Sarjana (S2) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta (2001) dan dari Universitas Gajah Mada (2005).

Education

Bachelor of Administration from the Mataram Institute of Administrative Sciences (1998), Master Degree from the Jakarta School of Economics (2001) and from Gajah Mada University (2005).

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang keuangan dan administrasi negara.

Expertise

Having expertise in the field of finance and state administration.

Pengalaman Kerja

Berkarir di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2018-sekarang), Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan (2016-2018), Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau (2014-2016), Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Perbendaharaan (2010-2014), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar (2008-2010).

Work Experience

Pursued career at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Served as Director of State Treasury Management of Directorate General of Treasury at Ministry of Finance (2018-present), Director of Budget Implementation of Directorate General of Treasury (2016-2018), Head of Regional Office of Directorate General of Treasury at Riau Islands Province (2014-2016), Head of Organization and Administration Section of Directorate General of Treasury (2010-2014), Head of Blitar State Treasury Service Office (2008-2010).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi serta Sertifikasi Profesi

Full Day Seminar Auditor's Talk untuk penguatan peran Satuan Pengawas Intern (SPI).

Training, Competency Development and Professional Certification

Full Day Auditor's Talk Seminar to strengthen the role of Internal Audit Unit (SPI).

Rangkap Jabatan

Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2018-sekarang).

Concurrent Position

Director of State Treasury Management of Directorate General of Treasury at the Ministry of Finance (2018-present).

Hubungan Afiliasi

Memiliki hubungan afiliasi dengan Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali melalui rangkap jabatan. Namun demikian rangkap jabatan ini tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Affiliation

Having an affiliation with the Republic of Indonesia as the major/controlling shareholder through concurrent position. However, this dual position is not violating the prevailing laws and regulations.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.

Information on Company Share Ownership

The Company does not trade its shares to the public, and does not have a Share Ownership Program by Management.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

TIRTA HIDAYAT

Komisaris Independen | Independent Commissioner

Periode Jabatan: 5 Juni 2017 - RUPS Tahun 2022, Periode ke-1
Service Period: June 5, 2017 – 2022 GMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 61 tahun
Kelahiran Banda Aceh, 9 Maret 1959

Domisili

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-104/MBU/06/2017 tertanggal 5 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan 2022. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris

Ketua Komite Pemantau Risiko & GCG PT PPA Tahun 2017.

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Indonesia (1985), Master of Science dari Regional Science, Cornell University, New York, Amerika Serikat (1987), dan Doctor of Philosophy (PhD) (S3) dari Regional Science, Cornell University, New York, Amerika Serikat (1991).

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang ekonomi, keuangan dan manajemen risiko.

Pengalaman Kerja

Menjabat sebagai Asisten Koordinator untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) (2015-2017); Wakil Presiden Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015); Komisaris PT Angkasa Pura II (Persero) (2007-2010); Komisaris PT Bank Permata Tbk (2002-2006); Deputi Ekonomi, Infrastruktur, dan Kelautan (2007-2017), Kepala Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (2000-2002); serta menjabat di Bappenas (1993-1998) sebagai Kepala Biro.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi serta Sertifikasi Profesi

Head of Event- Konferensi Risk Beyond 2019 International Conference
Sertifikasi Kompetensi level Certified Risk Profesional.

Rangkap Jabatan

Ketua Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2019-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan pemegang saham Perusahaan.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.

Personal Data

Indonesian citizen
61 years old
Born in Banda Aceh, March 9, 1959

Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Appointment History and Legal Basis

Appointed as an Independent Commissioner based on the Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-104/MBU/06/2017 dated June 5, 2017 concerning the Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of the Company PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) for a period of 5 (five) years or up to 2022. Previously, he has never served in the Company's Board of Commissioners.

Assignment in the Scope of Board of Commissioners

Chairman of PT PPA Risk Monitoring & GCG Committee in 2017.

Education

Bachelor of Economics from the University of Indonesia (1985), Master of Science from Regional Science, Cornell University, New York, United States (1987), and Doctor of Philosophy (PhD) (PhD) from Regional Science, Cornell University, New York, United States (1991).

Expertise

Having expertise in the fields of economics, finance and risk management.

Work Experience

Served as Assistant Coordinator for the Coordinating Minister for Economic Affairs; Commissioner of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) (2015-2017); Vice President Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015); Commissioner of PT Angkasa Pura II (Persero) (2007-2010); Commissioner of PT Bank Permata Tbk (2002-2006); Deputy for Economy, Infrastructure and Maritime Affairs (2007-2017), Head of Research and Development of the Ministry of Manpower and Transmigration (2000-2002); and served in Bappenas (1993-1998) as Head of Bureau.

Training, Competency Development and Professional Certification

Head of Event - Risk Beyond 2019 International Conference
Competency Certification of Certified Risk Profesional Level.

Concurrent Position

Chairman of the Coordinating Minister for Economic Affairs Assistance Team (2019-present).

Affiliation

Has no affiliation with other members of Board of Commissioners, members of Board of Directors and shareholders of the Company.

Information on Company Share Ownership

The Company does not trade its shares to the public, and does not have a Share Ownership Program by Management.

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE



IMAN RACHMAN

Direktur Utama | President Director

Periode Jabatan: 23 Juli 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode ke-1
Service Period: July 23, 2019 – 2024 GMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun
Kelahiran Jakarta, 31 Mei 1972

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-159/MBU/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan 2024. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi PT PPA.

Pendidikan

Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat (1995), dan Master of Business Administration in Finance di Leeds University Business School, Leeds, West Yorkshire, Inggris (1997).

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi dan manajemen bisnis.

Pengalaman Kerja

Sebelum menduduki jabatannya di PT PPA, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2019), Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2018), Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas (2003-2016), dan Manager di PT Danareksa Sekuritas (1998-2003).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi serta Sertifikasi Profesi

Menjadi Narasumber pada Seminar Nasional *Tax Forum - Digitalisasi Perpajakan*, *How to Become Best CFO* pada UNESA Surabaya, memperoleh *award Corporate Finance Qualification* dari ICAEW.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.

Personal Data

Indonesian citizen
47 years old
Born in Jakarta, May 31, 1972

Domicile

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Appointment History and Legal Basis

Appointed as President Director based on the Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-159/MBU/07/2019 dated July 23, 2019 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of the Company PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) for a period of 5 (five) years or up to 2024. Previously, he has never served in PPA's Board of Directors.

Education

Bachelor of Economics from Padjadjaran University, Bandung, West Java (1995), and Master of Business Administration in Finance at Leeds University Business School, Leeds, West Yorkshire, England (1997).

Expertise

Having expertise in finance, investment and business management.

Work Experience

Prior to his position at PT PPA, he served as Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2019), Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2018), Investment Banking Director of PT Mandiri Sekuritas (2003-2016), and Manager of PT Danareksa Sekuritas (1998-2003).

Training, Competency Development and Professional Certification

Being a guest speaker at the National Seminar on Tax Forum - Taxation Digitalization, How to Become Best CFO at UNESA Surabaya, received a Corporate Finance Qualification award from ICAEW.

Concurrent Position

Does not have concurrent position.

Affiliation

Has no affiliation with other Directors, members of Board of Commissioners, or with major/controlling shareholders.

Information on Company Share Ownership

The Company does not trade its shares to the public, and does not have a Share Ownership Program by Management.

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE

**NASRIZAL NAZIR****Direktur Investasi | Investment Director**

Periode Jabatan: 16 Januari 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode ke-1
Service Period: January 16, 2018 – 2023 GMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 55 tahun
Kelahiran Padang, 12 September 1964

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur Investasi sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-14/MBU/01/2018 tertanggal 16 Januari 2018 tentang Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan 2023. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi PT PPA.

Pendidikan

Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989), serta Master of Business Administration bidang Finance di University of Wisconsin, Milwaukee, USA (1996).

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang Keuangan dan Investasi.

Pengalaman Kerja

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Chief Financial Officer di PT Polytama Propindo (2016-2017); Direktur Pembiayaan, Risk Management/Finance di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2013-2016); Associate Director Corporate Planning/Finance PT Wintermar Offshore Marine Tbk (2011-2013); Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2011); Assistant Vice President Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2005); dan Kepala Tim Pembiayaan Proyek di Bank Pembangunan Indonesia Cabang Makassar, Sulawesi Selatan (1996-1999).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi serta Sertifikasi Profesi

2019 IFA Crossroads Asia - Pacific.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.

Personal Data

Indonesian citizen
55 years old
Born in Padang, September 12, 1964

Domicile

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Appointment History and Legal Basis

Appointed as Investment Director in accordance with the Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-14/MBU/01/2018 dated January 16, 2018 concerning Changes to Nomenclature, Job Transfer and Appointment of Members of Board of Directors of the Company PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) for a period of 5 (five) years or up to 2023. Previously, he has never served in PT PPA's Board of Directors.

Education

Bachelor of Economics at Gadjah Mada University, Yogyakarta (1989), and Master of Business Administration in Finance at the University of Wisconsin, Milwaukee, USA (1996).

Expertise

Having expertise in the field of Finance and Investment.

Work Experience

Previously served as Chief Financial Officer of PT Polytama Propindo (2016-2017); Director of Financing, Risk Management/Finance of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2013-2016); Associate Director of Corporate Planning/Finance of PT Wintermar Offshore Marine Tbk (2011-2013); Vice President of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2011); Assistant Vice President Corporate Banking of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2005); and Head of Project Financing Team at Makassar Development Bank, Makassar Branch, South Sulawesi (1996-1999).

Training, Competency Development and Professional Certification

2019 IFA Crossroads Asia - Pacific.

Concurrent Position

Does not have concurrent position.

Affiliation

Has no affiliation with other Directors, members of Board of Commissioners, or with major/controlling shareholders.

Information on Company Share Ownership

The Company does not trade its shares to the public, and does not have a Share Ownership Program by Management.



DIKDIK PERMADI YOFFANA

Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Business Advisory and Asset Management Director

Periode Jabatan: 1 April 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode ke-1
Service Period: April 1, 2019 – 2024 GMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun
Kelahiran Bandung, 16 Juni 1972

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-76/MBU/01/2019 tertanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan 2024. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.

Pendidikan

Sarjana Ekonomi bidang manajemen dari Universitas Padjajaran, Bandung (1995), dan Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Jakarta (2019).

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, dan restrukturisasi perusahaan.

Pengalaman Kerja

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Executive Vice President Business Advisory & Asset Management di PT PPA (2009-2019), Senior Manager Restrukturisasi/Revitalisasi dan Pengelolaan Aset di PT PPA (2004-2009), Senior Officer di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2004), dan Relationship Manager di Bank Nusa Internasional (1995-1999).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi serta Sertifikasi Profesi

IFX-RHB Investment Summit 2019.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.

Personal Data

Indonesian citizen
47 years old
Born in Bandung, June 16, 1972

Domicile

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Appointment History and Legal Basis

Appointed as Business Advisory and Asset Management Director based on the Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-76/MBU/01/2019 dated April 1, 2019 concerning the Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of the Company PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) for a period of 5 (five) years or up to 2024. Previously, he never served in the Company's Board of Directors.

Education

Bachelor of Economics in Management from Padjadjaran University, Bandung (1995), and Masters in Management at the Faculty of Economics, Gajah Mada University, Jakarta (2019).

Expertise

Having expertise in finance, investment and corporate restructuring.

Work Experience

Previously served as Executive Vice President of Business Advisory & Asset Management at PT PPA (2009-2019), Senior Manager of Restructuring/Revitalization and Asset Management at PT PPA (2004-2009), Senior Officer at the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999-2004), and Relationship Manager at Bank Nusa Internasional (1995-1999).

Training, Competency Development and Professional Certification

IFX-RHB Investment Summit 2019.

Concurrent Position

Does not have concurrent position.

Affiliation

Has no affiliation with other Directors, members of Board of Commissioners, or with major/controlling shareholders.

Information on Company Share Ownership

The Company does not trade its shares to the public, and does not have a Share Ownership Program by Management.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE**R. MUHAMMAD IRWAN****Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja**
Finance and Support Director

Periode Jabatan: 23 Juli 2019 – RUPS Tahun 2024, Periode ke-1
Position Period: July 23, 2019 – 2024 GMS, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 48 tahun
Kelahiran Palembang, 8 Februari 1971

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-159/MBU/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan 2024. Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.

Pendidikan

Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Magister (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002), dan Magister (S2) Manajemen di Universitas Prasetya Mulya, Jakarta (2017).

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang hukum dan keuangan.

Pengalaman Kerja

Sebelum menduduki jabatannya di PT PPA, beliau menjabat sebagai Managing Director, Operation, Finance & Accounting, IT, and HR PT Danareksa Sekuritas (2018-2019), sebagai Senior Vice President, Portfolio Management and Advisory PT Danareksa (Persero) (2018), Director, Operation, Finance & Accounting, IT, Risk Management, Legal di PT CIMB Securities Indonesia (2014-2017), Managing Director, Legal, Compliance, Human Resource and Corporate Secretary PT Maybank Kim Eng Securities (2013-2014), Executive Vice President, Legal, Compliance and Corporate Secretary di PT Mandiri Sekuritas (2009-2013); Vice President Legal, Corporate Communication and General Affairs di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2004-2009), dan Legal Officer di PT Kliring Deposit Efek Indonesia (1994-1996).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi serta Sertifikasi Profesi

1st ASEAN CPA Conference, Professional Recognition Program (PRP) CPMA, dan The 6st International Financial Cooperation Forum.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.

Personal Data

Indonesian citizen
48 years old
Born in Palembang on February 8, 1971

Domicile

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Appointment History and Legal Basis

Appointed as Finance and Support Director based on the Decree of Minister of SOEs as GMS No. SK-159/MBU/07/2019 dated July 23, 2019 concerning Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of the Company PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) for a period of 5 (five) years or up to 2024. Previously, he has never served in the Company's Board of Directors.

Education

Bachelor of Laws from the University of Indonesia (1994), Masters of Legal Studies at the Faculty of Law, University of Indonesia (2002), and Master of Management at Prasetya Mulya University, Jakarta (2017).

Expertise

Having expertise in the fields of law and finance.

Work Experience

Prior to his position at PT PPA, he served as Managing Director, Operations, Finance & Accounting, IT, and HR at PT Danareksa Sekuritas (2018-2019), as Senior Vice President, Portfolio Management and Advisory at PT Danareksa (Persero) (2018), Director, Operation, Finance & Accounting, IT, Risk Management, Legal at PT CIMB Securities Indonesia (2014-2017), Managing Director, Legal, Compliance, Human Resources and Corporate Secretary at PT Maybank Kim Eng Securities (2013-2014), Executive Vice President, Legal, Compliance and Corporate Secretary at PT Mandiri Sekuritas (2009-2013); Vice President of Legal, Corporate Communication and General Affairs at PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2004-2009), and Legal Officer at PT Kliring Deposit Efek Indonesia (1994-1996).

Training, Competency Development and Professional Certification

1st ASEAN CPA Conference, Professional Recognition Program (PRP) CPMA, and The 6st International Financial Cooperation Forum

Concurrent Position

Does not have concurrent position.

Affiliation

Has no affiliation with other Directors, members of Board of Commissioners, or with major/controlling shareholders.

Information on Company Share Ownership

The Company does not trade its shares to the public, and does not have a Share Ownership Program by Management.

PROFIL MANAJEMEN SENIOR

SENIOR MANAGEMENT PROFILE



QADRISNA

Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit Division

Usia Age	:	56 tahun 56 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	1 Juli 2019 July 1, 2019
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	17 Mei 2004 May 17, 2004



EDI WINANTO

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Head of Corporate Secretariat Division

Usia Age	:	56 tahun 56 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	16 September 2016 September 16, 2016
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	15 Maret 2004 March 15, 2004



MARTI TRI HANDOKO

Kepala Divisi Hukum
Head of Legal Division

Usia Age	:	54 tahun 54 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	7 Januari 2020 January 7, 2020
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	15 Maret 2004 March 15, 2004



SARDA YUNUS

Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management Division

Usia Age	:	48 tahun 48 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	11 September 2016 September 11, 2016
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	1 Juni 2004 June 1, 2004

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT PROFILE**PRAMUWATI**

Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan
dan Manajemen Kinerja
*Head of Corporate Strategic Planning and
Performance Management Division*

Usia Age	:	45 tahun 45 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	9 April 2018 April 9, 2018
Bergabung di Perusahaan <i>Joined the Company</i>	:	9 April 2018 April 9, 2018

**NANANG ARISENO**

Kepala Divisi Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen 1
*Head of Business Advisory and Asset Management
Division 1*

Usia Age	:	47 tahun 47 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	1 Oktober 2019 October 1, 2019
Bergabung di Perusahaan <i>Joined the Company</i>	:	1 Juli 2011 July 1, 2011

**SUGENG RIYANTO**

Kepala Divisi Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen 2
*Head of Business Advisory and Asset Management
Division 2*

Usia Age	:	45 tahun 45 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	1 Oktober 2019 October 1, 2019
Bergabung di Perusahaan <i>Joined the Company</i>	:	15 September 2010 September 15, 2010

**RB ALEXANDER CHANDRA IRAWAN**

Kepala Divisi Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen 3
*Head of Business Advisory and Asset Management
Division 3*

Usia Age	:	41 tahun 41 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	1 Oktober 2019 October 1, 2019
Bergabung di Perusahaan <i>Joined the Company</i>	:	29 September 2014 September 29, 2014



ARYAN TRICANDRA
Kepala Divisi Investasi 1
Head of Investment Division 1

Usia Age	:	51 tahun 51 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	1 Oktober 2019 October 1, 2019
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	15 Maret 2004 March 15, 2004



BUDI HARTO
Kepala Divisi Investasi 2
Head of Investment Division 2

Usia Age	:	54 tahun 54 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	1 Juni 2019 June 1, 2019
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	4 Mei 2004 May 4, 2004



ISA MUHAMAD NUR
Kepala Divisi Investasi 3
Head of Investment Division 3

Usia Age	:	50 tahun 50 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	9 Juli 2018 July 9, 2018
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	4 Mei 2004 May 4, 2004



YULIZA SUKMASARI
Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
Head of Finance and Accounting Division

Usia Age	:	49 tahun 49 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	7 Januari 2020 January 7, 2020
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	15 Maret 2004 March 15, 2004

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
SENIOR MANAGEMENT PROFILE

RITA HERAWATI
Kepala Divisi TI dan Operasi Bisnis
Head of IT and Business Operations Division

Usia Age	:	49 tahun 49 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	7 Januari 2020 January 7, 2020
Bergabung di Perusahaan <i>Joined the Company</i>	:	15 Maret 2004 March 15, 2004



INDRA BUDI CAHYONO
Kepala Divisi SDM dan Umum
Head of HC and General Affairs

Usia Age	:	44 tahun 44 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	14 Juni 2019 June 14, 2019
Bergabung di Perusahaan <i>Joined the Company</i>	:	14 Maret 2019 March 14, 2019



FRANSISCA EKAWATI
Kepala Divisi Treasury
Head of Treasury Division

Usia Age	:	54 tahun 54 years old
Menjabat Sejak Served Since	:	1 Juni 2019 June 1, 2019
Bergabung di Perusahaan <i>Joined the Company</i>	:	4 Mei 2004 May 4, 2004

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT

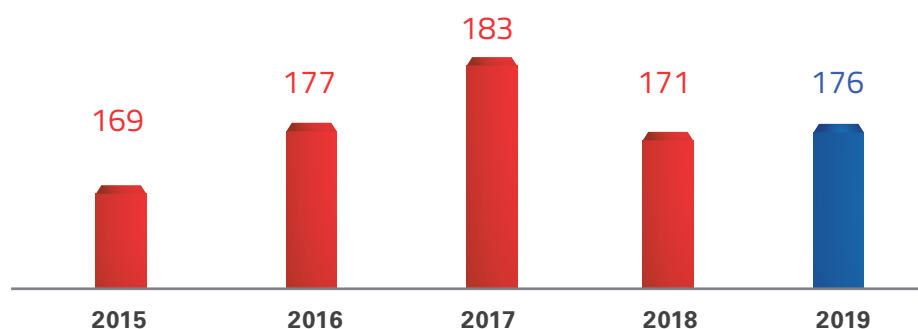
Demografi Karyawan

Per 31 Desember 2019, jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 176 orang, meningkat 2,92% atau sebanyak 5 orang dari jumlah karyawan pada 2018 sebanyak 171 orang.

Employee Demographics

As of December 31, 2019, the Company has 176 employees, an increase of 2.92% or as many as 5 employees from the number of employees in 2018 of 171 employees.

Jumlah Karyawan dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir
Number of Employees in the Last 5 (Five) Years



Perkembangan jumlah dan demografi karyawan Perusahaan dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

The development of the number and demographics of the Company's employees in the last 2 (two) years can be seen in the description below.

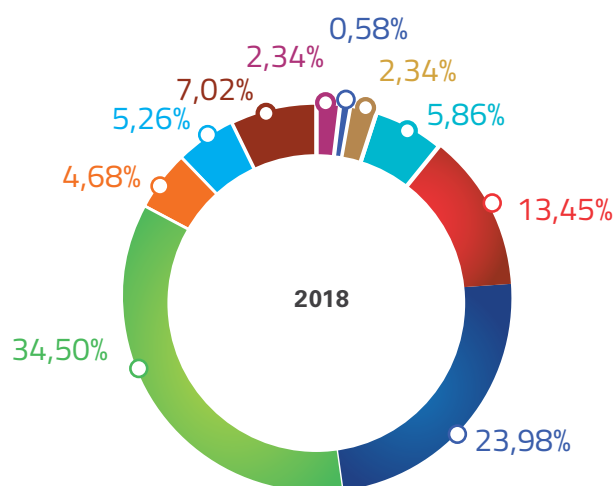
Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan(orang)
Employee Composition by Organization Level/Position (person)

Level Organisasi/ Jabatan Organization/Position Level	2019				2018				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	-	3	1,70%	3	1	4	2,34%	-1	-25,00%	●
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	1	-	1	0,57%	1	-	1	0,58%	-	-	-
Direksi Board of Directors	4	-	4	2,27%	4	-	4	2,34%	-	-	-
Kepala Divisi Division Head	10	5	15	8,52%	7	3	10	-5,85%	5	50,00%	●
Kepala Grup Group Head	15	5	20	11,36%	19	4	23	13,45%	-3	-13,04%	●
Kepala Unit Unit Head	21	18	39	22,16%	25	16	41	23,98%	-2	-4,88%	●
Officer	37	25	62	35,23%	35	24	59	34,50%	3	5,08%	●

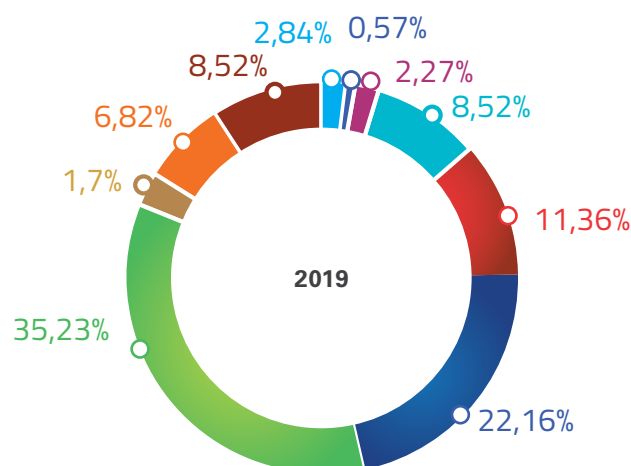
DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENTKomposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan(orang)
Employee Composition by Organization Level/Position (person)

Level Organisasi/ Jabatan Organization/Position Level	2019				2018				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Sekretaris Secretary	0	5	5	2,84%	-	9	9	5,26%	-4	-44,44%
Staf Staff	7	5	12	6,82%	5	3	8	4,68%	4	50,00%
Penugasan Assignment	15	-	15	8,52%	12	0	12	7,02%	3	25,00%
JUMLAH Total	113	63	176	100%	111	60	171	100%		

L = Laki-laki / P = Perempuan | M = Male / F = Female

Data karyawan entitas anak dan cucu perusahaan
terdapat pada halaman 138.Data on employees of subsidiaries and subsidiaries of
subsidiary are available on page 138.

- Dewan Komisaris | Board of Commissioners
- Sekretaris Dewan Komisaris | Secretary of Board of Commissioners
- Direksi | Board of Directors
- Penugasan | Assignment
- Staf | Staff

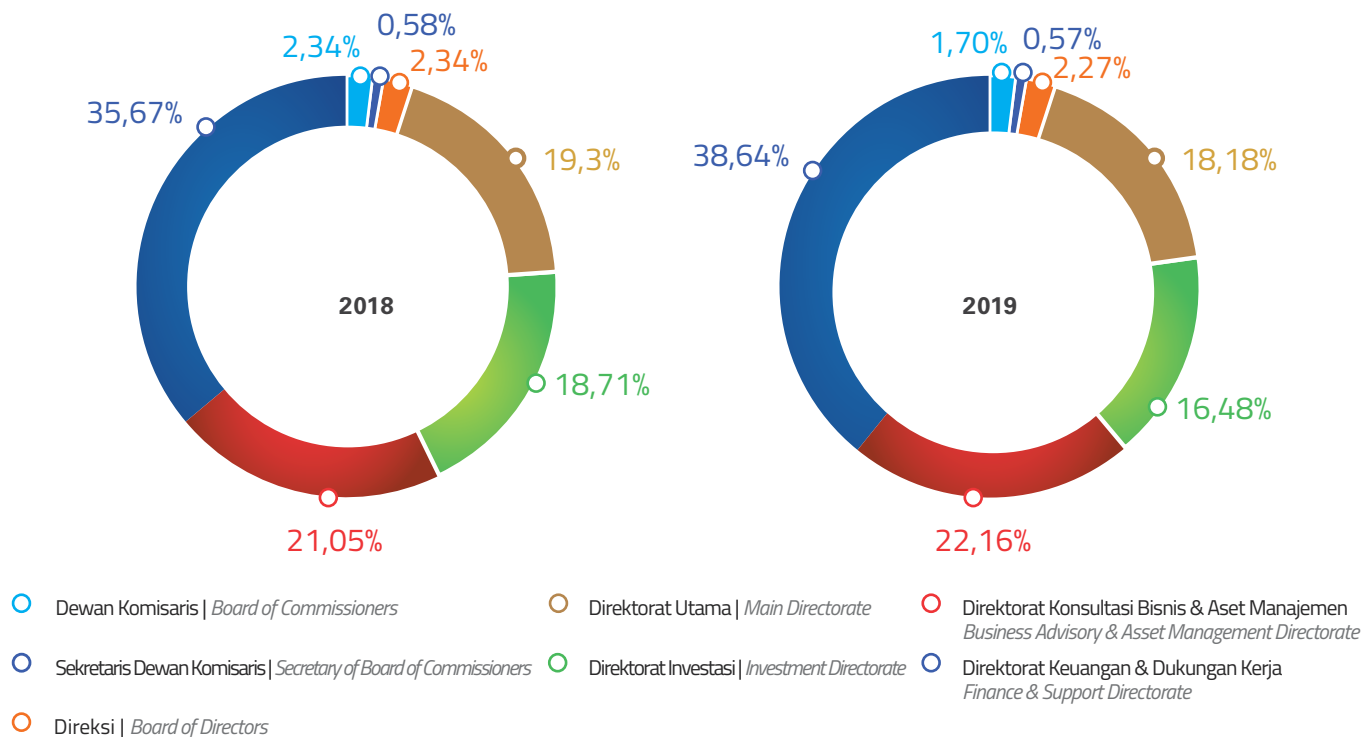


- Kepala Divisi | Division Head
- Kepala Group | Group Head
- Kepala Unit | Unit Head
- Officer
- Sekertaris | Secretary

Komposisi Karyawan Berdasarkan Penugasan (orang)
Employee Composition by Assignment (person)

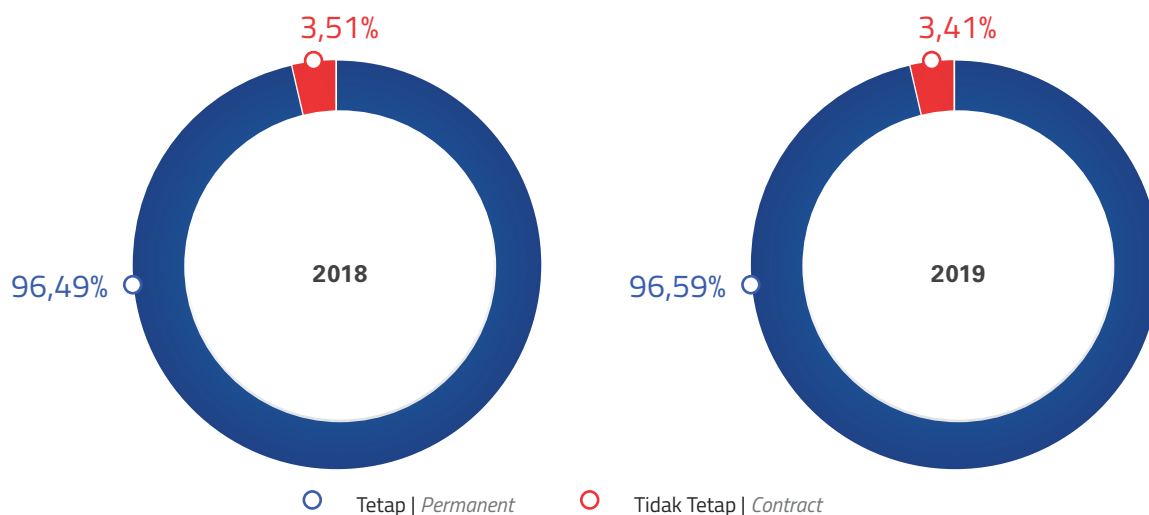
Penugasan Assignment	2019				2018				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	-	3	1,70%	3	1	4	2,34%	-1	-25,00%	●
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	1	-	1	0,57%	1	-	1	0,58%	-	-	—
Direksi Board of Directors	4	-	4	2,27%	4	-	4	2,34%	-	-	—
Direktorat Utama Main Directorate	17	15	32	18,18%	22	11	33	19,30%	-1	-3,03%	●
Direktorat Investasi Investment Directorate	21	8	29	16,48%	22	10	32	18,71%	-3	-9,38%	●
Direktorat Konsultasi Bisnis & Aset Manajemen Business Advisory & Asset Management Directorate	25	14	39	22,16%	22	14	36	21,05%	3	8,33%	●
Direktorat Keuangan & Dukungan Kerja Finance & Support Directorate	42	26	68	38,64%	37	24	61	35,67%	7	11,48%	●
JUMLAH Total	113	63	176	100%	111	60	171	100%			

L = Laki-laki / P = Perempuan | M = Male / F = Female

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENTKomposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)
Employee Composition by Employment Status (person)

Status Status	2019				2018				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Tetap Permanent	110	60	170	96,59%	105	60	165	96,49%	5	3,03%
Tidak tetap Contract	3	3	6	3,41%	6	-	6	3,51%	-	-
JUMLAH Total	113	63	176	100%	111	60	171	100%		

L = Laki-laki / P = Perempuan | M = Male / F = Female

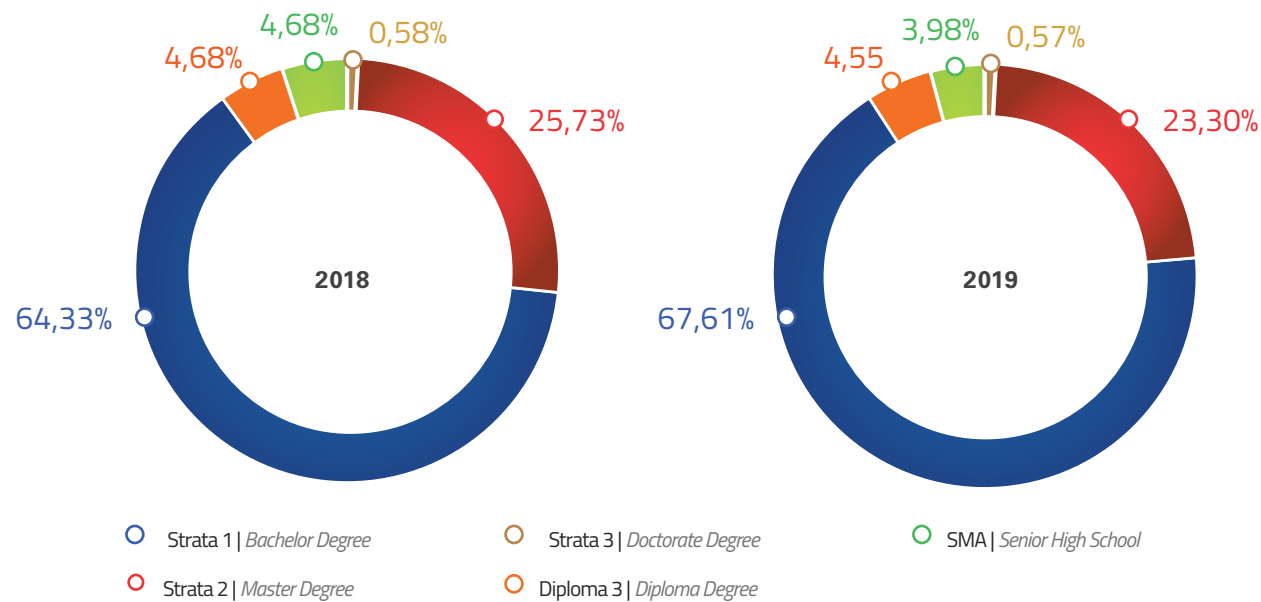


Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat pendidikan (orang)
Employee Composition by Education Level (person)

Tingkat Pendidikan Education Level	2019				2018				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Strata 3 Doctorate Degree	1	-	1	0,57%	1	-	1	0,58%	-	-	-
Strata 2 Master Degree	32	9	41	23,30%	33	11	44	25,73%	-3	-6,82%	●
Strata 1 Bachelor Degree	74	45	119	67,61%	70	40	110	64,33%	9	8,18%	●
Diploma 3 Diploma Degree	1	7	8	4,55%	1	7	8	4,68%	-	-	-
SMA Senior High School	5	2	7	3,98%	6	2	8	4,68%	-1	-12,50%	●
JUMLAH Total	113	63	176	100%	111	60	171	100%			

L = Laki-laki / P = Perempuan | M = Male / F = Female

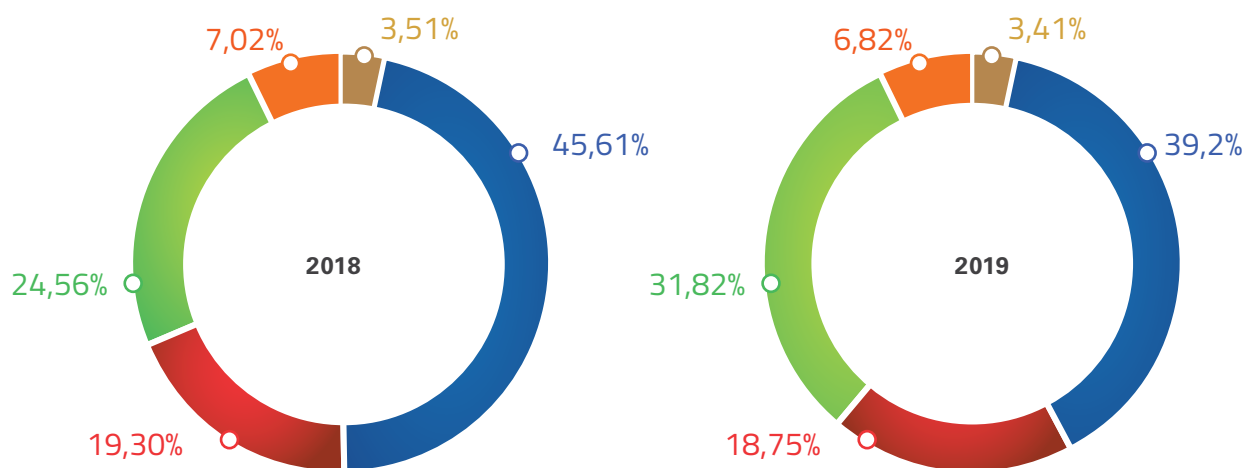
DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT



Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia (Tahun)
Employee Composition by Age (Years)

Rentang Usia Age Range	2019				2018				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
> 55 Tahun > 55 years	5	1	6	3,41%	6	0	6	3,51%	-	-
46-55 Tahun 46-55 years	51	18	69	39,20%	59	19	78	45,61%	-9	-11,54%
36-45 Tahun 36-45 years	20	13	33	18,75%	19	14	33	19,30%	-	-
26-35 Tahun 26-35 years	33	23	56	31,82%	23	19	42	24,56%	14	33,33%
<25 Tahun <25 years	4	8	12	6,82%	4	8	12	7,02%	-	-
JUMLAH Total	113	63	176	100%	111	60	171	100%		

L = Laki-laki / P = Perempuan | M = Male / F = Female



○ > 55 Tahun | > 55 years
 ○ 46-55 Tahun | 46-55 years
 ○ 36-45 Tahun | 36-45 years
 ○ 26-35 Tahun | 26-35 years
 ○ <25 Tahun | <25 years

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)

Employee Composition by Gender (person)

Gender	2019		2018		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	Jumlah Amount	Komposisi Composition (%)	
Laki-laki Male	113	64,20%	111	64,91%	2	1,80%	●
Perempuan Female	63	35,80%	60	35,09%	3	5,00%	●
JUMLAH Total	176	100%	171	100,00%			

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT**Pendidikan dan Pelatihan: Program Pengembangan Kompetensi Karyawan**

Dalam rangka mengembangkan kompetensi karyawan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja, Perusahaan melakukan pendidikan dan pelatihan berbagai bidang baik di internal maupun eksternal. Berikut ini pelaksanaan *training* yang telah dilakukan pada tahun 2019.

Education and Training: Employee Competency Development Program

In order to develop employee competencies and motivate employees to improve their performance, the Company organizes education and training in various fields both internal and external. The following is the training held in 2019.

Public Training

Direktorat Directorate	Jumlah Subjek Number of Subjects	Jumlah Peserta Number of Participants	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Direksi, Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Komite Directors, Commissioners, Secretary of BOC, and Committees	11	12	411.452.533
Utama Main	32	19	259.073.841
Konsultasi Bisnis & Aset Manajemen Business Advisory & Asset Management	2	2	15.517.804
Investasi Investment	12	11	95.257.286
Keuangan & Dukungan Kerja Financial & Support	53	46	399.058.785
JUMLAH Total	110	90	1.180.360.249

Inhouse Training

No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta Number of Participants	Biaya (Rp) Cost (Rp)
1	<i>Amazing Slide Presentation Batch 1</i>	21 - 22 Januari 2019 January 21-22, 2019	15	34.421.817
2	<i>Amazing Slide Presentation Batch 2</i>	23 - 24 Januari 2019 January 23-24, 2019	15	34.421.817
3	<i>Amazing Slide Infographic Batch 1</i>	29 - 30 Januari 2019 January 29-30, 2019	13	39.421.817
4	<i>Design Sprint + Innovation Class</i>	23 - 25 April 2019 April 23-25, 2019	7	28.000.000
5	<i>Amazing Slide Infographic Batch 2</i>	29 - 30 April 2019 April 29-30, 2019	10	38.337.660
6	Sosialisasi Core Sistem Operasi Bisnis Socialization of Business Operating Core Systems	29 April 2019 April 29, 2019	20	640.000
7	<i>How Millennials are Dealing and Rebuilding the Company's Vision</i>	30 April 2019 April 30, 2019	7	2.100.000
8	UAT Core Sistem Operasi Bisnis UAT Business Operating Core System	09 Mei 2019 May 9, 2019	45	2.010.000

Inhouse Training

No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta Number of Participants	Biaya (Rp) Cost (Rp)
9	<i>Advance Excel</i>	06 Juli 2019 July 6, 2019	20	30.962.200
10	Orientasi dan Sosialisasi Karyawan 2019 Employee Orientation and Socialization 2019	12 - 13 Juli 2019 July 12-13, 2019	20	85.500.000
11	<i>Design Thinking Batch 1</i>	16 - 17 Juli 2019 July 16-17, 2019	15	55.055.000
12	Sosialisasi <i>Smart Meeting Room</i> Socialization <i>Smart Meeting Room</i>	17 Juli 2019 July 17, 2019	22	1.100.000
13	<i>Design Thinking Batch 2</i>	23 - 24 Juli 2019 July 23-24, 2019	16	55.055.000
14	Dasar Perkreditan dan Investasi Basics of Credit and Investment	01 - 02 Agustus 2019 August 01-02, 2019	17	7.908.000
15	<i>Design Thinking Batch 3</i>	26 - 27 September 2019 September 26-27, 2019	16	65.835.000
16	<i>Public Speaking and Communication Skills Batch 1</i>	02 - 03 Oktober 2019 October 02-03, 2019	20	81.500.000
17	<i>Public Speaking and Communication Skills Batch 2</i>	09 - 10 Oktober 2019 October 09-10, 2019	20	81.500.000
18	Sosialisasi HRIS Versi 6 Socialization of HRIS 6 th Version	19 November 2019 November 19, 2019	82	8.169.260
19	<i>English Club</i>	08 November 2019 - <i>On Going</i> November 8, 2019 - <i>On Going</i>	15	49.277.998
20	<i>Business English</i>	27 November 2019 - <i>On Going</i> November 27, 2019 - <i>On Going</i>	28	240.240.000
21	Sosialisasi <i>Mobile Office</i> Mobile Office Socialization	13 Desember 2019 December 13, 2019	48	4.132.500
22	<i>Financial Analysis & Reporting</i>	16 - 17 Desember 2019 December 16-17, 2019	13	10.103.770
23	Motivasi Akhir Tahun End of Year Motivation	19 Desember 2019 December 19, 2019	176	640.000.000
JUMLAH Total				55.691.839

Sharing Session / Friday Afternoon

Topik Topic	Tanggal Date	Jumlah Peserta Number of Participants
<i>Be Passionate with your Hobby</i>	10 Mei 2019 May 10, 2019	70
Yuk Nabung Saham <i>Stock Savings</i>	14 Juni 2019 June 14, 2019	46

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Sharing Session / Friday Afternoon

Topik Topic	Tanggal Date	Jumlah Peserta Number of Participants
<i>Advisory for IPO Preparation</i>	9 Agustus 2019 August 9, 2019	138
<i>Lean Thinking Management Skills</i>	30 Agustus 2019 August 30, 2019	67
<i>Organization Strategy to Combat Bribery</i>	12 September 2019 September 12, 2019	82
<i>Integrated Governance, Risk and Compliance</i>	25 Oktober 2019 October 25, 2019	58
JUMLAH Total		461

Realisasi anggaran pelatihan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut: The realization of training budget for 2019 is as follows:

Pelatihan Traning	Biaya (Rp) Cost (Rp)
<i>Public Training</i>	1.180.360.249
<i>Inhouse Training</i>	955.691.839
<i>Friday Afternoon/Sharing Session</i>	66.572.115
Bea Siswa Scholarship	-
Keanggotaan Membership	5.750.000
JUMLAH Total	2.208.374.203

	Realisasi 2019 2019 Realization (Rp)	Target 2019 2019 Target (Rp)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019 Achievement of Realization against 2019 Target (%)		Realisasi 2018 2018 Realization (Rp)	Realisasi 2019 Terhadap Realisasi 2018 2019 Realization against 2018 Realization (%)
	1	2	(1:2)		3	(3:1)
Biaya Pelatihan dan Pendidikan Cost of Education and Training	2.208.374.203	7.507.000.000	29,42%	●	1.612.253.110	36,97%

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDIT INTERNAL, DAN MANAJEMEN RISIKO

EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT, AND RISK MANAGEMENT

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dari Kementerian BUMN, maka Perusahaan senantiasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas masing-masing demi terealisasinya visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Selain Dewan Komisaris dan Direksi, organ penting Perusahaan lainnya seperti Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Satuan Kerja Manajemen Risiko juga mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan pelatihan dan pengembangan yang telah diikuti Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Satuan Kerja Manajemen Risiko di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pursuant to the Company's Articles of Association and the provisions of the Ministry of SOEs, the Company constantly provides the widest possible opportunity for Board of Commissioners and Board of Directors to participate in a number of training and development activities aimed at improving their competencies and capabilities for the realization of the Company's vision, mission and goals. Besides Board of Commissioners and Board of Directors, other important organs of the Company such as Committees under Board of Commissioners, Corporate Secretary, Internal Audit and Risk Management Unit also participate in a number of training and development activities according to their individual needs.

Further details regarding training and development activities that have been attended by Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary, Internal Audit and Risk Management Unit throughout 2019 can be seen in the table below.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Edy Putra Irawady	Sertifikasi Certification	<i>Certified Risk Professional (CRP) BNSP</i>	Jakarta / 01 November 2019 Jakarta / November 01, 2019	Kim Consult
	Workshop	<i>The 6th International Financial Cooperation Forum</i>	Korea / 10 - 11 Desember 2019 Korea / December 10-11, 2019	<i>Council on International Financial Cooperation (CIFIC)</i>
Tirta Hidayat	Sertifikasi Certification	<i>Certified Risk Professional (CRP) BNSP</i>	Jakarta / November 2019 Jakarta / November 01, 2019	Kim Consult
	Konferensi Conference	<i>Risk Beyond 2019 Conference</i>	Bali / 05 - 06 Desember 2019 Bali / December 05-06, 2019	ERM Akademi Indonesia
Didyk Choeroel	-	-	-	-

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDIT INTERNAL, DAN MANAJEMEN RISIKO
EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT, AND RISK MANAGEMENT

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer

Direksi Board of Directors

Iman Rachman	Seminar	Narasumber pada Seminar Nasional Tax Forum - Digitalisasi Perpajakan, How to Become Best CFO Being a guest speaker at the National Seminar on Tax Forum - Taxation Digitalization, How to Become Best CFO Speaker at the National Seminar on Tax Forum - Taxation Digitalization, How to Become the Best CFO Being a guest speaker at the National Seminar on Tax Forum - Taxation Digitalization, How to Become Best CFO	Surabaya	UNESA Surabaya
Henry Sihotang	Pelatihan Training	BUMN <i>Great Leaders Camp</i>	Bandung / 10-12 Maret 2019 Bandung / March 10-12, 2019	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
Ajar Setiadi	Workshop	Update PSAK 71,72, dan 73	Semarang / 21 - 22 Maret 2019 Semarang / March 21-22, 2019	Nindya Karya
	Pelatihan Training	BUMN <i>Great Leaders Camp</i>	Bogor / 26 - 27 Maret 2019 Bogor / March 26-27, 2019	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
Nasrizal Nazir	Workshop	2019 IFA <i>Crossroads Asia - Pacific</i>	Sydney / 22-24 Oktober 2019 Sydney / October 22-24, 2019	BISBY
Dikdik Permadi Yoffana	Workshop	IFX-RHB <i>Investment Summit 2019</i>	Yogyakarta / 4 - 6 September 2019 Yogyakarta / September 04-06, 2019	RHB Sekuritas Indonesia
	Pelatihan Training	<i>Business English</i>	Jakarta / 27 November 2019 - <i>On Going</i> Jakarta / November 27, 2019 - <i>On Going</i>	<i>English Today</i>
R. Muhammad Irwan	Konferensi Conference	1st ASEAN CPA <i>Conference</i>	Bali / 16 - 17 Oktober 2019 Bali / October 16-17, 2019	IAMI
	Sertifikasi Certification	<i>Professional Recognition Program (PRP) CPMA</i>	Bali / 16 - 17 Oktober 2019 Bali / October 16-17, 2019	IAMI
	Workshop	<i>The 6th International Financial Cooperation Forum</i>	Korea / 10 - 11 Desember 2019 Korea / December 10-11, 2019	<i>Council on International Financial Cooperation (CIFIC)</i>
	Pelatihan Training	<i>Business English</i>	Jakarta/ 03 Desember 2019 - <i>On Going</i> Jakarta / December 03, 2019 - <i>On Going</i>	<i>English Today</i>

Komite Audit Audit Committee

Iko Marita M.	Konferensi Conference	IIA Indonesia National Conference 2019	Solo / 24 - 25 Juli 2019 Solo / July 24-25, 2019	IIA Indonesia
Ahmad Malkan L	Konferensi Conference	IIA Indonesia <i>National Conference</i> 2019	Solo / 24 - 25 Juli 2019 Solo / July 24-25, 2019	IIA Indonesia

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Komite Pemantau Risiko dan GCG Risk Monitoring and GCG Committee				
Hendy Fakhruddin	Sertifikasi Certification	<i>Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA)</i>	Jakarta / 07 – 08 Agustus 2019 Jakarta / August 07-08, 2019	NCSR
Awal Susmanto	Konferensi Conference	IIA Indonesia <i>National Conference</i> 2019	Solo / 24 – 25 Juli 2019 Solo / July 24-25, 2019	IIA Indonesia
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary				
Edi Winanto	Pelatihan Training	<i>Design Thinking</i>	Jakarta / 16 – 17 Juli 2019 Jakarta / July 16-17, 2019	Telkom University
	Pelatihan Training	<i>Discussion Forum Shaping the Future Role & Corporate Secretary</i>	Jakarta / 26 – 27 September 2019 Jakarta / September 26-27, 2019	Pertamina Training & Consulting
	Workshop	<i>Economic & Capital Market Outlook 2020</i>	Jakarta / 29 Oktober 2019 Jakarta / October 29, 2019	Berita Satu Media Holdings
	Workshop	<i>The 6th International Financial Cooperation Forum</i>	Korea / 10 – 11 Desember 2019 Korea / December 10-11, 2019	Council on International Financial Cooperation (CIFIC)
	Pelatihan Training	<i>Business English</i>	27 November 2019 – On Going November 27, 2019 – On Going	English Today
Chandra Satya	Pelatihan Training	<i>Design Thinking</i>	Jakarta / 23 – 24 Juli 2019 Jakarta / July 23-24, 2019	Telkom University
	Pelatihan Training	<i>Business English</i>	Jakarta / 27 November 2019 – On Going Jakarta / November 27, 2019 – On Going	English Today
Satuan Pengawasan Intern Internal Audit				
Qadrisna	Workshop	Update PSAK 71,72, dan 73 Update of PSAK 71, 72, and 73	Semarang / 21 – 22 Maret 2019 Semarang / March 21-22, 2019	Nindya Karya
	Konferensi Conference	IIA Indonesia <i>National Conference</i> 2019	Solo / 24 – 25 Juli 2019 Solo / July 24-25, 2019	IIA Indonesia
	Konferensi Conference	Munas & Konferensi Nasional IV FKSPI tahun 2019 FKSPI IV National Conference & Gathering in 2019	Semarang / 21 – 23 Agustus 2019 Semarang / August 21-23, 2019	FKSPI
	Pelatihan Training	<i>Seminar Nasional, Focus Group Discussion dan Pelatihan Perpajakan BUMN 2019</i> National Seminar, Focus Group Discussion and Training on SOEs Taxation 2019	Surabaya / 11 – 12 November 2019 Surabaya / November 11-12, 2019	Tax Forum BUMN SOEs Tax Forum

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDIT INTERNAL, DAN MANAJEMEN RISIKO
EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT, AND RISK MANAGEMENT

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer

Manajemen Risiko Risk Management

Sarda Yunus	Pelatihan Training	<i>Implementing Governance, Risk and Compliance</i>	Jakarta / 21 – 22 November 2019 Jakarta / November 21-22, 2019	CRMS Indonesia
	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi HRIS Versi 6 Socialization of HRIS 6 th Version	Jakarta / 19 November 2019 Jakarta / November 19, 2019	Data On
	Pelatihan Training	<i>Business English</i>	Jakarta / 27 November 2019 - On Going Jakarta / November 27, 2019 - On Going	English Today
	Sosialisasi Socialization	Sosialisasi <i>Mobile Office</i> <i>Mobile Office Socialization</i>	Jakarta / 13 Desember 2019 Jakarta / December 13, 2019	PT PPA
Johny Hasudungan	Pelatihan Training	<i>Risk Assessment Techniques</i>	Bandung / 01-03 Oktober 2019 Jakarta / December 13, 2019	CRMS Indonesia

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS COMPOSITION

KEPEMILIKAN SAHAM PPA DAN INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR

PPA SHARE OWNERSHIP AND INFORMATION ON MAJOR/CONTROLLING SHAREHOLDERS UP TO THE NAME OF ULTIMATE OWNER

Kepemilikan Saham PPA per 31 Desember 2019

PPA Share Ownership as of December 31, 2019

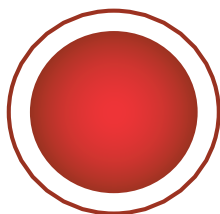
Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp-juta) Issued and Fully Paid-in Capital (Rp-million)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000/lembar saham Par Value per Share = Rp1,000,000 / share			
Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	2.996.688	2.996.688	100,00%

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2019

The Company's Shareholders Composition as of December 31, 2019

Seluruh saham Perusahaan atau sebanyak 100,00% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sehingga, Negara Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama/pengendali sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perusahaan.

All of the Company's shares or 100.00% are owned by the Republic of Indonesia. Therefore, the Republic of Indonesia acts as the major/controlling shareholder as well as being the ultimate owner of the Company.



Seluruh saham PPA atau **100,00%** dimiliki oleh Negara Republik Indonesia

All PPA shares or 100.00% are owned by the Republic of Indonesia

Informasi Tentang Kepemilikan Saham oleh Manajemen Kunci dan Daftar 20 Pemegang Saham Terbesar

Information on Share Ownership by Key Management and List of 20 Top Shareholders

Sejak berdirinya hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Saham dan tidak pernah menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Perusahaan juga tidak mencatatkan saham di bursa efek manapun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kelompok masyarakat yang memiliki jumlah saham Perusahaan maupun daftar 20 pemegang saham terbesar selain daftar pemegang saham seperti yang telah disampaikan di atas.

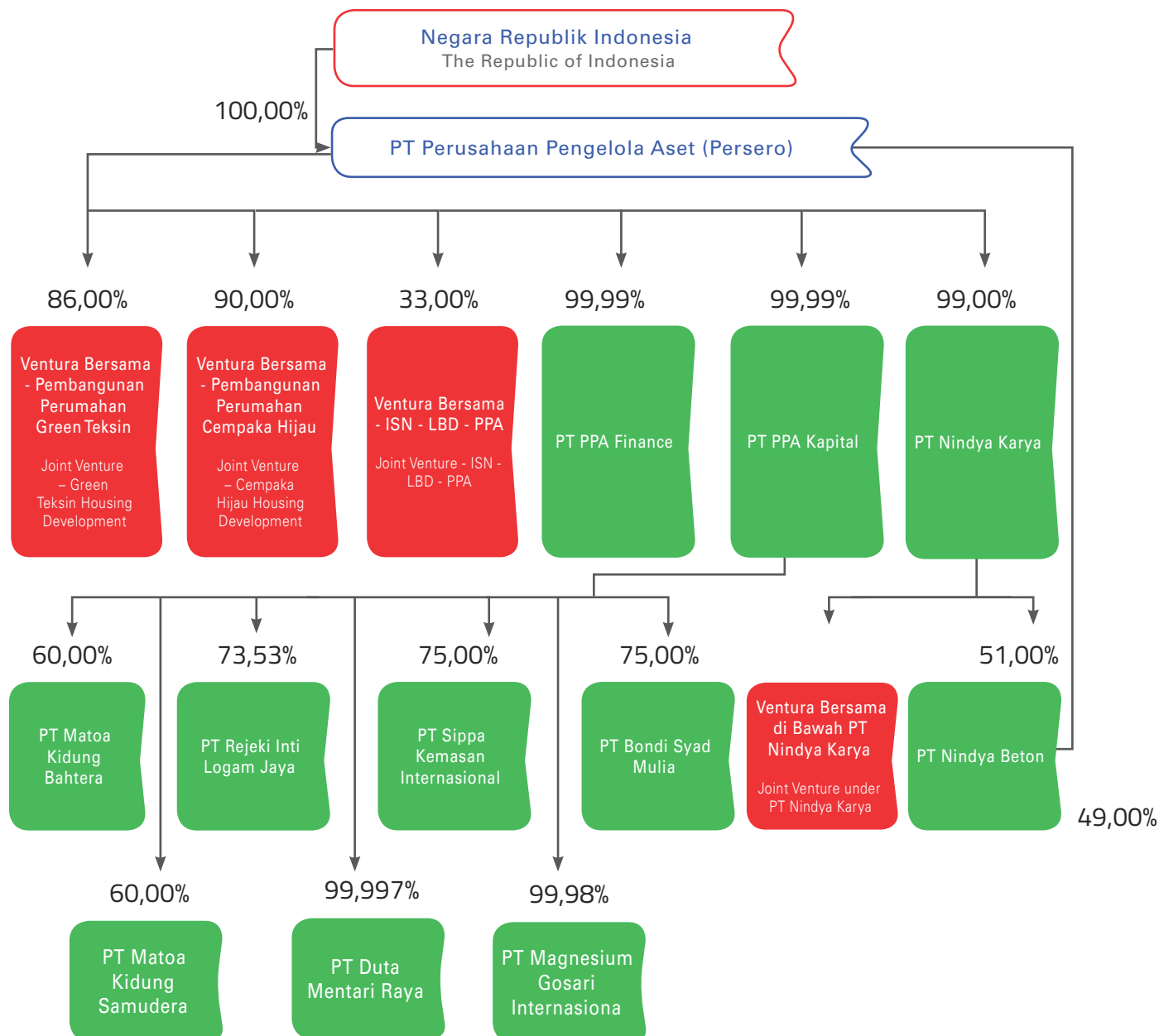
Since its establishment until the end of 2019, the Company has never made a Public Offering of Shares and has never issued shares to be owned by the public. The Company also does not list shares on any stock exchange, so there is no information regarding community groups that own the Company's shares or a list of the 20 top shareholders in addition to the list of shareholders as stated above.

Perusahaan juga tidak pernah melakukan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau Management Stock Option Program (MSOP), sehingga tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

The Company has also never conducted a Share Ownership Program by Management, or the Management Stock Option Program (MSOP), therefore there are no Commissioners and Directors who own Company shares.

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA

GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP



Keterangan: | Note:

: Pemegang Saham Utama/Pengendali sekaligus Entitas Pemilik Akhir | Major/Controlling Shareholders and Ultimate Owner Entity

: Pemegang Saham Pendiri | Founding Shareholders

: Ventura Bersama | Joint Venture

ENTITAS INDUK, ENTITAS ANAK DAN VENTURA BERSAMA

PARENT ENTITY, SUBSIDIARIES, AND JOINT VENTURES

ENTITAS INDUK

Seluruh saham Perusahaan atau sebanyak 100,00% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sehingga, Negara Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama/pengendali sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; maka Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PARENT ENTITY

The entire shares of the Company 100.00% are owned by the Republic of Indonesia. Therefore, the Republic of Indonesia acts as the major/controlling shareholder as well as being the ultimate owner of the Company.

In accordance with Government Regulation No. 41 of 2003 concerning the Delegation of Position, Duties and Authorities of the Minister of Finance to Limited Liability Companies (Persero), Public Companies (PERUM) and Service Agencies (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises, and Law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and the Republic of Indonesia State Gazette; then the Power of Attorney of the Company's Shareholders is the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs).

Negara Republik Indonesia / Kepresidenan

Republic of Indonesia / Presidency

Istana Negara
Jl. Medan Merdeka Utara No.3
RT.2/RW.3, Kel. Gambir
Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10110, Indonesia

National Palace
Jl. Medan Merdeka Utara No.3
RT.2/RW.3, Ex. Gambir
Gambir District, Central Jakarta
DKI Jakarta 10110, Indonesia

Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 17-18
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 3845627
www.setneg.go.id

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Office
Jl. Veteran No. 17-18
Central Jakarta 10110
DKI Jakarta, Indonesia
Tel. +62 21 3845627
www.setneg.go.id

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Ministry of State Owned Enterprises

Kantor Kementerian BUMN
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 29935678
Fax. +62 21 29935740
www.bumn.go.id

Ministry of SOEs Office
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Central Jakarta 10110
DKI Jakarta, Indonesia
Tel. +62 21 29935678
Fax. +62 21 29935740
www.bumn.go.id

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

Entitas Anak Subsidiaries	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Commencement	Modal Dasar (Rp-Juta) Authorized Capital (Rp- Million)
Kepemilikan Langsung Direct Ownership					
PT PPA Finance	Sewa (<i>Leasing</i>); Anjak Piutang (<i>Factoring</i>); dan Pembiayaan Konsumen (<i>Consumer Financing</i>) Leasing; Factoring; and Consumer Financing	Jakarta	2009	2010	400.000
PT PPA Kapital	Jasa pengelolaan investasi dalam bentuk pembelian dan penjualan efek (tidak dalam fungsi sebagai Manajer Investasi); jasa konsultasi manajemen; dan jasa konsultasi keuangan. Investment management services of purchasing and selling securities (not as Investment Manager); management consulting services; and financial consultancy.	Jakarta	2012	2012	100.000
PT Nindya Karya	Konstruksi; EPC (<i>Engineering, Procurement, dan Construction</i>); dan Investasi Construction; EPC (Engineering, Procurement, and Construction); and investment	Jakarta	1961	1973	7.738.000
Kepemilikan Tidak Langsung melalui PT PPA Kapital Indirect Ownership through PT PPA Kapital					
PT Duta Mentari Raya	Pabrikasi Fabrication	Jakarta	2014	2017	66.000
PT Sipra Kemasan Internasional	Pabrikasi Fabrication	Jakarta	2018	2018	55.000
PT Magnesium Gosari Internasional	Pabrikasi Fabrication	Gresik, Jawa Timur Gresik, Java East	2018	2018	400.000
PT Bondi Syad Mulia	Pabrikasi Fabrication	Surabaya, Jawa Timur Surabaya, East Java	1981	1981	200.000
PT Matoa Kidung Samudera	Kapal Isap Timah Tin Suction Ship	Jakarta	2017	2018	50.000
PT Matoa Kidung Bahtera	Kapal Isap Timah Tin Suction Ship	Jakarta	2017	2018	50.000
PT Rejeki Inti Logam Jaya	Pabrikasi Fabrication	Tangerang	1997	1997	2.580
Kepemilikan Tidak Langsung melalui PT Nindya Karya Indirect Ownership through PT Nindya Karya					
PT Nindya Beton	Manufaktur Beton Precast Precast Concrete Manufacturing	Jakarta	2013	2013	400.000

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp-Juta) Issued and Fully Paid-in Capital (Rp-Million)	Jumlah Karyawan Number of Employees	Tahun Penyertaan Modal oleh Perusahaan Year of Equity Participation by the Company	Kepemilikan Perusahaan The Company's Ownership (%)				Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-Million)		Status Operasi Operational Status
				2019		2018		2019	2018	
				Langsung Direct	Tidak Langsung Indirect	Langsung Direct	Tidak Langsung Indirect			
	150.000	21	2009	99,99%	0%	99,99%	0%	1.118.166	963.471	Beroperasi Operating
	100.000	11	2012	99,99%	-	99,99%	-	827.992	419.288	Beroperasi Operating
	5.950.000	979	2012	99,00%	-	99,00%	-	6.074.211	5.691.001	Beroperasi Operating
	33.055	23	2015	99,99%	-	99,99%	-	105.001	114.475	Beroperasi Operating
	5.000	-	2018	99,98%	-	75,00%	-	159.769	170.435	Beroperasi Operating
	100.000	95	2018	51%	-	51,00%	-	317.226	131.234	Beroperasi Operating
	18.042	52	2018	75%	-	75,00%	-	299.284	247.511	Beroperasi Operating
	31.250	-	2019	60%	-	-	-	62.882	58.550	Beroperasi Operating
	31.250	-	2019	60%	-	-	-	59.021	71.462	Beroperasi Operating
	60.000	48	2019	73,53%	-	-	-	162.429	147.865	Beroperasi Operating
	100.000	23	2013	49,00%	51,00%	49,00%	51,00%	187.279	140.486	Beroperasi Operating

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP

VENTURA BERSAMA

JOINT VENTURE

Ventura Bersama Joint Venture	Kegiatan Activity
Ventura Bersama di Bawah Perusahaan Joint Venture under the Company	
Ventura Bersama - Pembangunan Perumahan Green Teksin Joint Venture - Green Teksin Housing Development	Proyek Pembangunan Perumahan Green Teksin Green Teksin Housing Development Project
Ventura Bersama - ISN - LBD - PPA Joint Venture - ISN - LBD - PPA	Proyek Pembangunan Perumahan Bekasi Bekasi Housing Development Project
Ventura Bersama di Bawah PT Nindya Karya Joint Venture under PT Nindya Karya	
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya Joint Venture Nindya - Adhi Karya	Proyek Bendungan Sadawarna Sadawarna Dam Project
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita Joint Venture Nindya - MCC - Wika - Waskita	Proyek Cisumdawu Cisumdawu Project
Ventura Bersama Nindya - Sacna Joint Venture Nindya - Sacna	Proyek Bendungan Meninting Meninting Dam Project
Ventura Bersama Nindya - Surya Joint Venture Nindya - Surya	Proyek Irigasi Lematang Lematang Irrigation Project
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya Joint Venture Nindya - Rudy Jaya	Proyek Kalimati Kalimati Project
Ventura Bersama Nindya - Karya Sarana Joint Venture Nindya - Karya Sarana	Proyek Irigasi Doplang Doplang Irrigation Project
Ventura Bersama Nindya - Jaya Konstruksi Joint Venture Nindya - Jaya Konstruksi	Proyek Tol Trans. Marga Jateng Central Java Trans Marga Toll Project
Ventura Bersama PPA - PT Rumah Cerdas Joint Venture PPA - PT Rumah Cerdas	Proyek Mutiara Java Regency Mutiara Java Regency Project
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya Joint Venture Nindya - Hutama Karya	Proyek Pembangunan Universitas Jember Jember University Development Project
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya Joint Venture Nindya - Hutama Karya	Proyek Tanju Mila Tanju Mila Project
Ventura Bersama Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau Joint Venture Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau	Proyek Pembangunan Jl. Depapre Depapre Road Development Project
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya Joint Venture Nindya - Rudy Karya	Proyek Sukodono Sukodono Project
Ventura Bersama Nindya - Wijaya Karya Joint Venture Nindya - Wijaya Karya	Proyek Bendungan Logung Logung Dam Project
Ventura Bersama Nindya - Waskita Jaya Purnama Joint Venture Nindya - Waskita Jaya Purnama	Proyek Bendungan Bomberay Bomberay Dam Project
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya Joint Venture Nindya - Adhi Karya	Proyek Sei Wampu Sei Wampu Project
Ventura Bersama Nindya - Tamiang Joint Venture Nindya - Tamiang	Proyek Jl. Rianiate Rianiate Road Project
Ventura Bersama Nindya - Inti Joint Venture Nindya - Inti	Proyek Ipal Aceh Aceh Ipal Project
Ventura Bersama Nindya - Wijaya - Waskita Joint Venture Nindya - Wijaya - Waskita	Proyek Tol Solo - Kertosono Solo - Kertosono Toll Road Project
Ventura Bersama Nindya - PP Joint Venture Nindya - PP	Proyek Jembatan Teluk Kendari Kendari Bay Bridge Project

	Kepemilikan Perusahaan The Company's Ownership (%)		Jumlah Investasi (Rp-juta) Total Investment (Rp-million)		Status Operasi Operational Status
	2019	2018	2019	2018	
	86,00%	86,00%	60,289	56.397	Beroperasi Operating
	33,00%	33,00%	45,259	49.172	Beroperasi Operating
	60,00%	-	23,379	-	Beroperasi Operating
	7,50%	7,50%	22,323	17,191	Beroperasi Operating
	73,00%	-	20,65	-	Beroperasi Operating
	70,00%	70,00%	14,619	14,558	Beroperasi Operating
	60,00%	60,00%	12,526	21,81	Beroperasi Operating
	70,00%	70,00%	10,893	3,522	Beroperasi Operating
	60,00%	60,00%	9,282	14,851	Beroperasi Operating
	94,00%	94,00%	8,891	11,592	Beroperasi Operating
	45,00%	45,00%	8,26	2,708	Beroperasi Operating
	60,00%	60,00%	7,537	18,037	Beroperasi Operating
	35,00%	35,00%	7,169	7,269	Beroperasi Operating
	70,00%	70,00%	7,1	8,17	Beroperasi Operating
	40,00%	40,00%	6,882	8,744	Beroperasi Operating
	70,00%	-	6,419	-	Beroperasi Operating
	45,00%	45,00%	5,131	4,189	Beroperasi Operating
	60,00%	60,00%	4,898	4,898	Beroperasi Operating
	60,00%	60,00%	4,279	4,279	Beroperasi Operating
	31,00%	31,00%	3,823	1,185	Beroperasi Operating
	30,00%	30,00%	3,634	12,257	Beroperasi Operating

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP

Ventura Bersama Joint Venture	Kegiatan Activity
Ventura Bersama Nindya - Gerbang Saranabaja Joint Venture Nindya – Gerbang Saranabaja	Proyek Tangki Balck Product RU IV Cilacap Balck Product Tank Project RU IV Cilacap
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa Joint Venture Nindya – Bumi Karsa	Proyek BKT Semarang Semarang BKT Project
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci Joint Venture Nindya – Dewa Ruci	Proyek Pantai Marore Marore Coast Project
Ventura Bersama Nindya – Kencana Joint Venture Nindya – Kencana	Proyek Irigasi Batang Anai Tahap 2 Phase 2 Batang Anai Irrigation Project
Ventura Bersama Nindya – Cipuga Joint Venture Nindya – Cipuga	Proyek Takengon - Uning Takengon – Uning Project
Ventura Bersama Nindya – Brantas Joint Venture Nindya – Brantas	Proyek Bendungan Titab III Titab III Dam Project
Ventura Bersama Nindya - Citra – Kharisma Joint Venture Nindya – Citra – Kharisma	Proyek Jalur Main Line I KA Manggarai-Jatinegara Manggarai-Jatinegara Railway Main Line I Project
Ventura Bersama Nindya – Andesmont Joint Venture Nindya – Andesmont	Proyek Rembele Tahap II Phase II Rembele Project
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja Joint Venture Nindya – Bangun Bejana Baja	Proyek Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bau-Bau Bau-Bau Fuel Terminal (TBBM) Project
Ventura Bersama Nindya – Barata Joint Venture Nindya – Barata	Proyek Bendungan Cieunteung Cieunteung Dam Project
Ventura Bersama Nindya – Brantas Joint Venture Nindya – Brantas	Proyek Sungai Ciliwung Ciliwung River Project
Ventura Bersama Nindya - PP - Utama Karya Joint Venture Nindya – PP – Utama Karya	Proyek Jembatan Holtekam Holtekam Bridge Project
Ventura Bersama Nindya - PP - Cempaka Hijau Joint Venture Nindya – PP – Cempaka Hijau	Proyek Pembangunan Perumahan Cempaka Hijau Cempaka Hijau Housing Development Project
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa Joint Venture Nindya – Bumi Karsa	Proyek Mameh Wandesi Mameh Wandesi Project
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa Joint Venture Nindya – Bumi Karsa	Proyek Tol Manado - Bitung Manado - Bitung Toll Road Project
Ventura Bersama Nindya - Passokorang – Adhijaya Joint Venture Nindya – Passokorang – Adhijaya	Proyek Jembatan Pumbiu Pumbiu Bridge Project
Ventura Bersama Nindya – Sejahtera Joint Venture Nindya – Sejahtera	Proyek Jl. Enrekang Enrekang Road Project
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya Joint Venture Nindya – Utama Karya – Wijaya Karya	Proyek Waduk Bendo Bendo Reservoir Project
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya Joint Venture Nindya – Utama Karya	Proyek Pembangunan Bandara Ahmad Yani Ahmad Yani Airport Development Project
Ventura Bersama Nindya - Indah Pratama Joint Venture Nindya – Indah Pratama	Proyek D.I Prijetan D.I Prijetan Project
Ventura Bersama Nindya – PPA Joint Venture Nindya – PPA	Proyek Cempaka Hijau Cempaka Hijau Project
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 Miliar) Others (each less than Rp1 Billion)	

	Kepemilikan Perusahaan The Company's Ownership (%)		Jumlah Investasi (Rp-juta) Total Investment (Rp-million)		Status Operasi Operational Status
	2019	2018	2019	2018	
	76,00%	-	3,238	-	Beroperasi Operating
	60,00%	60,00%	2,938	4,019	Beroperasi Operating
	60,00%	60,00%	2,91	5,328	Beroperasi Operating
	70,00%	70,00%	2,612	4,315	Beroperasi Operating
	75,00%	75,00%	2,611	6,995	Beroperasi Operating
	45,00%	45,00%	1,933	1,933	Beroperasi Operating
	60,00%	-	1,875	-	Beroperasi Operating
	70,00%	70,00%	1,855	1,855	Beroperasi Operating
	70,00%	-	1,519	-	Beroperasi Operating
	75,00%	75,00%	1,388	647	Beroperasi Operating
	40,00%	40,00%	1,3	1,3	Beroperasi Operating
	15,00%	15,00%	1,124	8,841	Beroperasi Operating
	90,00%	90,00%	1,142	13,294	Beroperasi Operating
	51,00%	51,00%	1,074	3,555	Beroperasi Operating
	70,00%	70,00%	-	5,764	Beroperasi Operating
	50,00%	50,00%	-	3,804	Beroperasi Operating
	70,00%	70,00%	-	3,508	Beroperasi Operating
	33,00%	33,00%	-	3,065	Beroperasi Operating
	28,00%	28,00%	-	1,940	Beroperasi Operating
	70,00%	70,00%	-	1,368	Beroperasi Operating
	14,00%	14,00%	-	1,128	Beroperasi Operating
			1,045	2,598	Beroperasi Beroperasi

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP**PT PPA Finance ("PTPPAF")**

Berdasarkan persetujuan Menteri BUMN melalui surat No. S360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan membentuk entitas anak dengan nama PPAF, berkedudukan di Jakarta dengan kepemilikan saham sebesar 99,999% dan sisanya sebesar 0,001% saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan Perusahaan. PPAF didirikan pada tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Akta No. 03 dibuat di hadapan Lindawati Wiranata, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-00096.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010. Adapun Anggaran Dasar PPAF mengalami perubahan melalui akta No. 3 tanggal 17 November 2015 dibuat di hadapan Ny. Anne Meyanne Alwie, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-0946156.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 18 November 2015.

PPAF didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang pembiayaan, dengan kegiatan usaha yang mencakup:

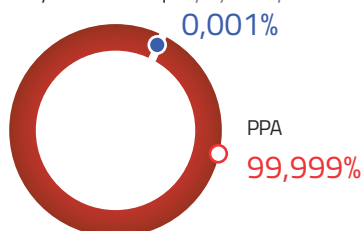
1. Usaha Pembiayaan Investasi dengan skema Sewa Guna Usaha (*leasing*);
2. Usaha Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Anjak Piutang (*factoring*);
3. Usaha Pembiayaan Multiguna dengan skema Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran.

PT PPA Finance ("PTPPAF")

Based on the approval of the Minister of SOEs through letter No. S360/MBU/2009 dated May 27, 2009, the Company established a subsidiary under the name PPAF, domiciled in Jakarta with share ownership of 99.999% and the remaining 0.001% share were owned by the Company's Employee Cooperatives. PPAF was established on December 21, 2009 based on Deed No. 03, made before Lindawati Wiranata, S.H., Notary in West Jakarta and authorized by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-00096.AH.01.01.Tahun 2010 dated January 5, 2010. PPAF's Articles of Association have changed through deed No. 3 dated November 17, 2015 made before Mrs. Anne Meyanne Alwie, S.H., Notary in West Jakarta and authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-0946156.AH.01.02.Tahun 2015 dated November 18, 2015.

PPAF was established with the purposes and objectives of conducting business in the field of financing, with business activities that include:

1. Investment Financing Business with a leasing scheme;
2. Working Capital Financing Business with factoring scheme;
3. Multipurpose Financing Business with Purchases with Installment Payment schemes.

Kepemilikan Saham PTPPAF
Share Ownership of PTPPAFKoperasi Karyawan PT PPA | *Employee Cooperatives PT PPA***Alamat PT PPA Finance ("PTPPAF")**
Address of PT PPA Finance ("PTPPAF")

Sampoerna Strategic Square
North Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930 - Indonesia
Telp / Phone: +62 21 57951419
Faksimili / Facsimile: +62 21 57951420
Surel / Email: customerservice.ppafinance@ptppa.com

Kinerja PTPPAF PTPPAF Performance	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan (Rp-juta) Revenue (Rp-million)	147.423	120.737	26.686	22,10% ●
Beban (Rp-juta) Expenses (Rp-million)	(124.594)	(101.600)	(22.994)	22,63% ●
Laba Bersih (Rp-juta) Net Profit (Rp-million)	17.044	15.097	1.947	12,90% ●
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	1.120.3334	963.471	10.239.863	1.062,81% ●
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	885.400	741.832	143.568	19,35% ●
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	234.933	221.639	13.294	6,00% ●

Manajemen Kunci PTPPAF per 31 Desember 2019

Key Management of PTPPAF as of December 31, 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	-	Direktur Utama President Director	Renny O Rorong
Komisaris Commissioner	Mohammad Roem	Direktur Director	Dicky Henria Nugraha
Komisaris Commissioner	Hendra Iskandar Lubis	Direktur Director	FX Djonny Limena

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP**PT PPA Kapital ("PTPPAK")**

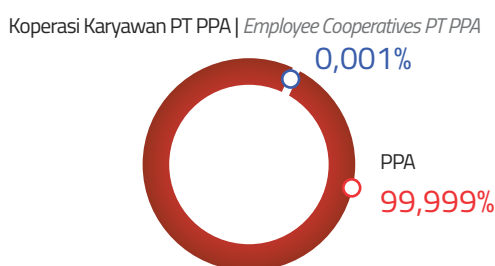
Berdasarkan persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011, Perusahaan membentuk entitas anak dengan nama PT PPAK, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%. Sisanya sebesar 0,001% saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan PPA. PT PPAK didirikan pada tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Akta No. 17 dibuat di hadapan Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-02691.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012.

PT PPAK didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang jasa pengelolaan aset dan pemberian jasa penasehat keuangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT PPAK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi, dan penempatan dana pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

PT PPA KAPITAL ("PTPPAK")

Based on the approval of the Minister of State-Owned Enterprises through letter No. S-372/MBU/2011 dated June 22, 2011, the Company established a subsidiary under the name PT PPAK, domiciled in South Jakarta with share ownership of 99.999%. The remaining 0.001% share is owned by PPA Employee Cooperative. PT PPAK was established on December 17, 2011 based on Deed No. 17, made before Surjadi, S.H., Notary in Central Jakarta and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-02691.AH.01.01.Tahun 2012 dated January 17, 2012.

PT PPAK was established with the purposes and objectives of conducting business in the field of asset management services and providing financial advisory services. To achieve these purposes and objectives, PT PPAK can carry out the following business activities: provide financial advisory services to carry out investment activities, and placement of funds in other companies both at home and abroad.

Kepemilikan Saham PTPPAK
Share Ownership of PTPPAK**Alamat PT PPA Kapital ("PTPPAK")**
Address of PT PPA Kapital ("PTPPAK")

Sampoerna Strategic Square
North Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930 - Indonesia
Telp / Phone: +62 21 2512222
Faksimili / Facsimile: +62 21 57982555
Surel / Email: lengga.ppak@ptppa.com

Kinerja PTPPAK PTPPAK Performance	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Pendapatan (Rp-juta) Revenue (Rp-million)	348.786	54.803	2.939.833	536,44% ●
Beban (Rp-juta) Expenses (Rp-million)	(371.099)	(51.365)	(319.734)	622,47% ●
Laba Bersih (Rp-juta) Net Profit (Rp-million)	(3.317)	30.978	(34.295)	-110,71% ●
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	1.766.147	897.697	868.450	96,74% ●
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	1.650.0156	665.098	15.835.058	2.380,86% ●
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	116.1312	232.598	928.714	399,28% ●

Manajemen Kunci PTPPAK per 31 Desember 2019

Key Management of PTPPAK as of December 31, 2019

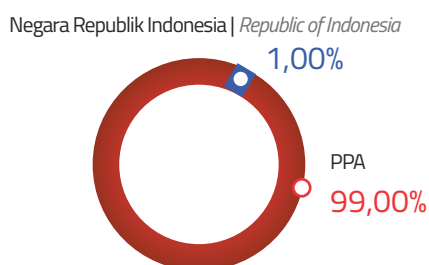
Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	-	Direktur Utama President Director	Lengga Nurullah
Komisaris Commissioner	Widi Hartono		

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP**PT Nindya Karya ("PTNK")**

PTNK melakukan usaha di bidang pelaksanaan pekerjaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, layanan jasa, pekerjaan terintegrasi (EPC), rancang bangun, *building management*, industri fabrikasi, industri agro, ekspor impor, perdagangan umum, jasa penyewaan, jasa keagenan, pengelolaan Kawasan, *system development*, teknologi informasi, pengembang serta Kepariwisata dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kepemilikan saham PT PPA pada PT NK sebesar 99,00%. Sisanya sebesar 1,00% saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

PT NINDYA KARYA ("PTNK")

PTNK conducts business in the field of construction work, planning and supervision of construction, services, integrated work (EPC), design, building management, fabrication industry, agro industry, import export, general trade, rental services, agency services, management of region, system development, information technology, developers as well as Tourism and optimizing the use of Company resources to produce goods and/or services with high quality and strong competitiveness, as well as pursuing profit in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Company. The ownership of PT PPA shares in PT NK is 99.00%. The remaining 1.00% of shares are owned by the Republic of Indonesia.

Kepemilikan Saham PTNK
Share Ownership of PTNK**Alamat PT Nindya Karya**
Address of PT Nindya Karya

Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 22
Jakarta 13630, Indonesia
Telp / Phone: +62 21 8093276
Faksimili / Facsimile: +62 21 8093105
Surel / Email: nindyakarya@nindyakarya.co.id
Situs Web / Website: www.nindyakarya.co.id

Kinerja PTNK PTNK Performance	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan (Rp-juta) Revenue (Rp-million)	5.780.935	6.218.590	(437.655)	-7,04%	●
Beban (Rp-juta) Expenses (Rp-million)	(5.380.431)	(5.526.004)	(145.573)	-2,63%	●
Laba Bersih (Rp-juta) Net Profit (Rp-million)	217.193	272.076	(54.883)	-20,17%	●
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	6.074.211	5.694.348	379.863	6,67%	●
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	4.386.276	4.182.262	204.014	4,88%	●
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	1.687.935	1.512.086	175.849	11,63%	●

Manajemen Kunci PTNK per 31 Desember 2019

Key Management of PTNK as of December 31, 2019

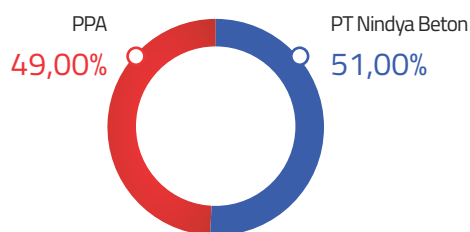
Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Sugiyartanto	Direktur Utama President Director	Haedar Abdul Karim
Komisaris Commissioner	Andar Perdana	Direktur Keuangan & SDM Finance & HC Director	Sri Haryanto
Komisaris Commissioner	Rika Kiswardani	Direktur Produksi & HSE Production & SHE Director	Firmansyah
Komisaris Independen Independent Commissioner	Zahirwan Marza	Direktur Pemasaran & Pengembangan Marketing & Development Director	Moeharmein Zein Chaniago

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP**PT Nindya Beton ("PTNB")**

PTNB melakukan usaha di bidang industri, fabrikasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, layanan jasa, pekerjaan terintegrasi (EPC), rancang bangun, *building management*, agro industri, ekspor impor, perdagangan umum, jasa penyewaan, jasa keagenan, pengelolaan Kawasan, *system development*, teknologi informasi, pengembang serta Kepariwisata untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kepemilikan saham PT PPA pada PT NB masing-masing sebesar 49,00% dan 51,00%.

PT Nindya Beton ("PTNB")

PTNB conducts business in the fields of industry, fabrication, construction work implementation, planning and supervision of construction implementation, services, integrated work (EPC), design, building management, agro industry, import export, general trade, rental services, agency services, management of region, system development, information technology, developers and Tourism to produce goods and/or services with high quality and strong competitiveness, as well as to pursue profit in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Company. The ownership of PT PPA shares in PT NB are 49.00% and 51.00%, respectively.

Kepemilikan Saham PTNB
Share Ownership of PTNB**Alamat PT Nindya Beton ("PTNB")**
Address of PT Nindya Beton ("PTNB")

Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 22
Jakarta 13630, Indonesia
Telp / Phone: +62 21 8009070
Faksimili / Facsimile: +62 21 8009073
Surel / Email: info.nindyabeton@gmail.com
Situs Web / Website: www.nindyabeton.co.id

Kinerja PTNB PTNB Performance	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan (Rp-juta) Revenue (Rp-million)	223.895	199.927	23.968	11,99%	●
Beban (Rp-juta) Expenses (Rp-million)	(223.766)	(189.736)	(34.030)	17,94%	●
Laba Bersih (Rp-juta) Net Profit (Rp-million)	(15.461)	1.344	(16.805)	-1.250,37%	●
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	187.279	140.485	46.794	33,31%	●
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	131.915	69.661	62.254	89,37%	●
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	55.363	70.824	(15.461)	-21,83%	●

Manajemen Kunci PTNB per 31 Desember 2019

Key Management of PTNB as of December 31, 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Bambang Sutrisno	Direktur Utama President Director	I Nengah Agus Suhada
Komisaris Commissioner	Qadrisna	Direktur Keuangan Finance Director	Boedi Djatmiko
		Plt Direktur Operasi Acting Production Director	I Nengah Agus Suhada

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP**PT Duta Mentari Raya ("PTDMR")**

Dalam menjalankan usahanya DMR merupakan pabrik kelapa sawit dimana kegiatan usaha yang utama adalah pada proses pengolahan bahan baku berupa kelapa sawit dalam bentuk Tandani Buah Segar (TBS), yang kemudian akan diproses menjadi produk akhir berupa *Crude Palm Oil* (CPO).

DMR memastikan kualitas atas proses pengolahan dari awal hingga akhir (proses) produksi. DMR mengutamakan TBS yang berasal dari daerah terdekat (kualitas lebih optimal dan biaya transportasi yang minim), dimana dilakukan kontrak dengan para petani plasma.

Sejak bulan Desember 2019, Manajemen DMR menjalankan operasional PKS melalui KSO dengan melalui kerja sama pengoperasian pabrik kepala sawit dengan PT Kuala Gunung. Dengan berjalannya KSO, diharapkan target pengolahan TBS sebanyak 400 – 600 ton/hari selama 22 hari kerja setiap bulannya. Seluruh beban operasional baik bahan baku, SDM, *overhead* dan biaya operasional lain menjadi beban tanggungan mitra KSO.

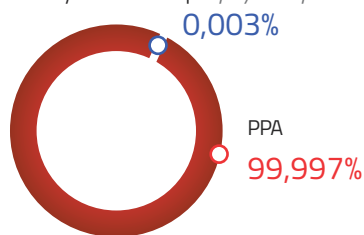
PT Duta Mentari Raya ("PTDMR")

In running its business, DMR is a palm oil mill where its main business activity is the processing of raw materials, i.e. palm oil in the form of Fresh Fruit Bunches (FFB), which will then be processed into final products in the form of Crude Palm Oil (CPO).

DMR ensures the quality of the processing from the beginning to the end of production process. DMR prioritizes FFB originating from nearby areas (having more optimal quality and minimal transportation costs), where contracts are held with plasma farmers.

Since December 2019, DMR Management has been operating PKS through JO or joint operation of the palm oil mill with PT Kuala Gunung. With the JO, it is expected that the FFB processing target will be 400-600 tons/day for 22 working days each month. All operational expenses such as raw materials, human resources, overhead and other operational costs become the expenses of JO partner.

Koperasi Karyawan PT PPA | Employee Cooperatives PT PPA

**Alamat PT Duta Mentari Raya**
Address of PT Duta Mentari Raya

Sampoerna Strategic Square
North Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930, Indonesia
Telp / Phone: +62 21 251 2222
Faksimili / Facsimile: +62 21 5798 2266
Surel / Email: adhary.mahaputra.ppak@ptppa.com

Kinerja PTDMR Kinerja PTDMR	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Pendapatan (Rp-juta) Revenue (Rp-million)	3.774	-	-	-
Beban (Rp-juta) Expenses (Rp-million)	(44.134)	(26.062)	(18.072)	69,34%
Laba Bersih (Rp-juta) Net Profit (Rp-million)	(40.360)	(26.062)	(14.298)	54,86%
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	105.002	114.475	(9.473)	-8,28%
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	162.646	131.759	30.887	23,44%
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	(57.644)	(17.284)	(40.360)	233,51%

Manajemen Kunci PTDMR per 31 Desember 2019

Key Management of PTDMR as of December 31, 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Sunar Dwiantoro	Direktur Utama President Director	Adhary Mahaputra

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP

PT Sippa Kemasan Internasional ("PTSKI")

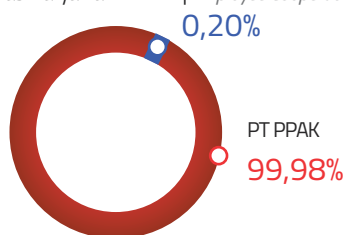
PTSKI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 28 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn., yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.-0045333.AH.01.01 Tahun 2018. Perusahaan dibentuk dengan maksud dan tujuan berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan aktivitas jasa lainnya.

PT Sippa Kemasan Internasional ("PTSKI")

PTSKI was established based on Deed of Establishment No. 38 dated September 28, 2018 made before Notary Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn., which was ratified in the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.-0045333.AH.01.01 of 2018. The Company was established with the purposes and objectives to conduct business in the field of wholesale and retail trade, manufacturing industry, and other service activities.

Kepemilikan Saham PTSKI
Share Ownership of PTSKI

Koperasi Karyawan PT PPA | Employee Cooperatives PT PPA

Alamat PT Sippa Kemasan Internasional ("PTSKI")
Address of PT Sippa Kemasan Internasional ("PTSKI")

North Tower 9th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930, Indonesia
Telp / Phone: +62 21 251 2222
Faksimili / Facsimile: +62 21 5798 2555
Surel / Email: netty.ppafinance@ptppa.com

Kinerja PTSKI PTSKI Performance	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Pendapatan (Rp-juta) Revenue (Rp-million)	-	-	-	-
Beban (Rp-juta) Expenses (Rp-million)	-	-	-	-
Laba Bersih (Rp-juta) Net Profit (Rp-million)	(16.391)	593	(16.984)	-2.864,08%
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	159.769	170.435	(10.666)	-6,26%
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	170.567	164.842	5.725	3,47%
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	(10.798)	5.593	(16.391)	-293,06%

Manajemen Kunci PTSKI per 31 Desember 2019

Key Management of PTSKI as of December 31, 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Isa Muhammad Nur	Presiden Direktur President Director	Netty Windarti

PT Magnesium Gosari Internasional ("PTMGI")

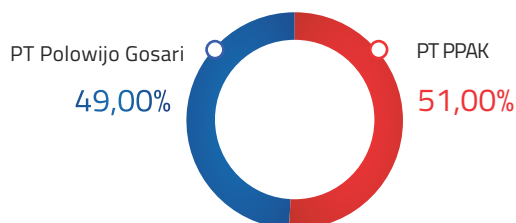
PTMGI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 189 tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Rully Maharany, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-004162.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 3 September 2018. Sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Pasal 3, maksud dan tujuan adalah melakukan usaha di bidang industri pengolahan/manufaktur pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PT Magnesium Gosari International ("PTMGI")

PTMGI was established based on Deed of Establishment No. 189 dated August 29, 2018, made before the Notary Rully Maharany, S.H., M.Kn., Notary in Gresik Regency which was ratified based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-004162.AH.01.01 of 2018 dated September 3, 2018. In accordance with Article 3 of the Company's Establishment Deed, its purposes and objectives are to conduct business in the fertilizer, petrochemical, agrochemical, agrochemical, agro-industry and other chemical industries as well as to optimize the utilization of Company's resources to produce goods/services with high quality and strong competitiveness to obtain or pursue profit in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Company.

Kepemilikan Saham PTMGI

Share Ownership of PTMGI

**Alamat PT Magnesium Gosari Internasional ("PTMGI")**
Address of PT Magnesium Gosari Internasional ("PTMGI")

Jl. Sekapuk KM 32 RT. 01 RW. 01
Sekapuk Ujung Pangkah, Gresik
Jawa Timur kode pos, Indonesia
Telp / Phone: +62 31 3949777
Surel / Email: andianobaharudin@gmail.com

Kinerja PTMGI Kinerja PTMGI	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan (Rp-juta) Revenue (Rp-million)	59.485	900	58.585	6.509,44%	●
Beban (Rp-juta) Expenses (Rp-million)	(50.6912)	(768.900)	261.988	-34,07%	●
Laba Bersih (Rp-juta) Net Profit (Rp-million)	(7.649)	(638)	-7.011	1.098,90%	●
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	312.985	131.234	181.751	138,49%	●
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	221.274	31.873	189.401	594,24%	●
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	91.7115	99.361	817.754	823,01%	●

Manajemen Kunci PTMGI per 31 Desember 2019

Key Management of PTMGI as of December 31, 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	-	Presiden Direktur President Director	Muhammad Amin
Komisaris Commissioner	Deddy Harnoko Sucahyo	Direktur Director	Andriano

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP**PT Bondi Syad Mulia ("PTBSM")**

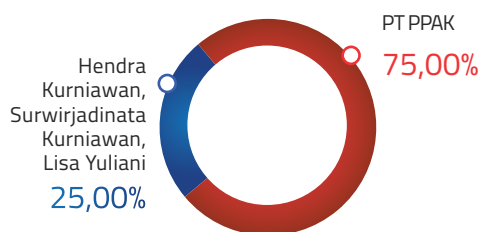
PTBSM didirikan di Jakarta sesuai dengan Akta No. 21 tertanggal 23 Juni 1981 yang dibuat di hadapan Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H., di Jakarta. Pada tanggal 8 Desember 2005 berdasarkan Akta No. 10 oleh Notaris Dharma Budiman S.H., Notaris di Surabaya dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tentang tempat kedudukan Perusahaan yang berubah menjadi di Surabaya. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W-10-0056 HT.01.04-TH.2007 tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007.

Perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta No. 5 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Wiwik Yulianti S.H., M.Kn. sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0058278.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

PT Bondi Syad Mulia ("PTBSM")

PTBSM was established in Jakarta in accordance with Deed No. 21 dated June 23, 1981 made before Notary Irawati Marzuki Arifin, S.H., in Jakarta. On December 8, 2005 based on Deed No. 10 by Notary Dharma Budiman S.H., Notary in Surabaya, the Company's Articles of Association was amended concerning the Company's domicile which was changed to Surabaya. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights No. W-10-0056 HT.01.04-TH.2007 of 2007 dated May 14, 2007.

The latest amendment to articles of association based on Deed No. 5 dated August 22, 2019 made before Notary Wiwik Yulianti S.H., M.Kn. related to changes in the purposes, objectives and business activities of the Company. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0058278.AH.01.02 of 2019 dated August 27, 2019. Based on article 3 of the Articles of Association, the purposes and objectives and business activities of the Company are to conduct business in industry and trade sector.

Kepemilikan Saham PTBSM
Share Ownership of PTBSM**Alamat PT Bondi Syad Mulia ("PTBSM")**
Address of PT Bondi Syad Mulia ("PTBSM")

Jl. Rungkut Industri II No.35
Kali Rungkut, Surabaya
Jawa Timur 60292, Indonesia
Telp / Phone: +62 31 8485858
Faksimili / Facsimile: +62 31 8485858
Surel / Email: info@bondigalva.co.id
Situs / Site: www.bondigalva.co.id

Kinerja PTBSM PTBSM Performance	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan (Rp-juta) Revenue (Rp-million)	137.203	159.719	(22.516)	-14,10%	●
Beban (Rp-juta) Expenses (Rp-million)	(95.583)	(117.466)	21.883	-18,63%	●
Laba Bersih (Rp-juta) Net Profit (Rp-million)	15.541	14.312	1.229	8,59%	●
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	291.774	247.511	44.263	17,88%	●
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	178.344	140.534	37.810	26,90%	●
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	113.430	106.977	6.453	6,03%	●

Manajemen Kunci PTBSM per 31 Desember 2019

Key Management of PTBSM as of December 31, 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Suwirjadinata Kurniawan	Presiden Direktur President Director	Dharma Arifiadi
Komisaris Commissioner	Sugeng Riyanto	Direktur Director	Hendra Kurniawan

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP**PT Matoa Kidung Samudera ("PTMKS")**

PT Matoa Kidung Samudera ("PT MKS") didirikan berdasarkan Akta No.5 tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Stephanie Wilamarta, SH,. Akta tersebut telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU- 0026991.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT MKS, maksud dan tujuan PT MKS adalah berusaha dalam bidang angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT MKS melakukan pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk persewaan angkutan laut berikut operatornya.

PT MKS mulai beroperasi secara komersial pada bulan Agustus 2018. PT MKS berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat di Jl. Cendrawasih 36-37, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berdasarkan Akta Notaris Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 17 pada tanggal 31 Januari 2019, telah dilakukan persetujuan konversi atas surat utang konversi menjadi saham baru sebesar Rp15.625.000.000 tertanggal 23 Januari 2019. Atas hal tersebut Perusahaan memiliki kepemilikan saham sebanyak 18.750 lembar saham atau 60% pada PT MKS.

Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0067570 tanggal 4 Februari 2019

PT Matoa Kidung Samudera ("PTMKS")

PT Matoa Kidung Samudera ("PT MKS") was established based on Deed No.5 dated June 5, 2017 made before Notary Stephanie Wilamarta, SH. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Decree No. AHU- 0026991.AH.01.01 of 2017 dated June 14, 2017.

Based on Article 3 of PT MKS's Articles of Association, the purposes and objectives of PT MKS are to engage in the business of domestic sea transportation for special goods. To achieve these purposes and objectives, PT MKS carries out transportation of goods using ships that are specifically designed to transport certain types of goods. Including sea transport rentals and their operators.

PT MKS started its commercial operations in August 2018. PT MKS is domiciled in Jakarta with its head office on Jl. Cendrawasih 36-37, Kebayoran Lama, South Jakarta. Based on Notarial Deed of Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 17 on January 31, 2019, the conversion agreement has been approved for convertible bonds into new shares amounting to Rp15,625,000,000 dated January 23, 2019. Based on this, the Company has 18,750 shares or 60% ownership in PT MKS.

This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Number: AHU-AH.01.03-0067570 dated February 4, 2019.

Kinerja PTMKS PTMKS Performance	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan (Rp-juta) Revenue (Rp-million)	25.221	7.514	17.707	235,65%	—
Beban (Rp-juta) Expenses (Rp-million)	(25.887)	(12.321)	(13.566)	110,10%	—
Laba Bersih (Rp-juta) Net Profit (Rp-million)	(8.039)	(17.598)	(9.559)	-54,32%	●
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	62.882	58.550	4.332	7,40%	●
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	59.220	62.474	(3.254)	-5,21%	●
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	3.662	(3.924)	7.586	-193,32%	●

Manajemen Kunci PTMKS per 31 Desember 2019

Key Management of PTMKS as of December 31, 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Nasrizal Nazir	Presiden Direktur President Director	Damciwar Ade
Komisaris Commissioner	Antonius R. Anggoro Setyo	Direktur Director	R. Albertus Setyo Legowo

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP**PT Matoa Kidung Bahtera ("PTMKB")**

PT Matoa Kidung Bahtera ("PT MKB") didirikan berdasarkan Akta No.6 tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Stephanie Wilamarta, SH,. Akta tersebut telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU- 0026990.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT MKB, maksud dan tujuan PT MKB adalah berusaha dalam bidang angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT MKB melakukan pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk persewaan angkutan laut berikut operatornya.

PT MKB mulai beroperasi secara komersial pada bulan Desember 2018. PT MKB berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat di Jl. Cendrawasih 36-37, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berdasarkan Akta Notaris Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 18 pada tanggal 31 Januari 2019, telah dilakukan persetujuan konversi atas surat utang konversi menjadi saham baru sebesar Rp15.625.000.000 tertanggal 23 Januari 2019. Atas hal tersebut Perusahaan memiliki kepemilikan saham sebanyak 18.750 lembar saham atau 60% pada PT MKB. Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0067571 tanggal 4 Februari 2019.

PT Matoa Kidung Bahtera ("PTMKB")

PT Matoa Kidung Bahtera ("PT MKB") was established based on Deed No.6 dated June 5, 2017 made before Notary Stephanie Wilamarta, SH. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Decree No. AHU-0026990.AH.01.01 of 2017 dated June 14, 2017.

Pursuant to Article 3 of PT MKB's Articles of Association, the purposes and objectives of PT MKB are to engage in domestic sea transportation for special goods.

To achieve these purposes and objectives, PT MKB carries out transportation of goods by using ships that are specifically designed to transport certain types of goods. Including sea transport rentals and their operators.

PT MKB commenced its commercial operations in December 2018. PT MKB is domiciled in Jakarta with its head office on Jl. Cendrawasih 36-37, Kebayoran Lama, South Jakarta. Based on Notarial Deed of Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 18 dated January 31, 2019, the conversion agreement has been made for convertible bonds into new shares amounting to Rp15,625,000,000 dated January 23, 2019. Based on this, the Company has 18,750 shares or 60% ownership in PT MKB. This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No: AHU-AH.01.03-0067571 dated February 4, 2019.

Kinerja PTMKB PTMKB Performance	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan (Rp-juta) Revenue (Rp-million)	19.378	-	-	-	-
Beban (Rp-juta) Expenses (Rp-million)	(28.671)	-	-	-	-
Laba Bersih (Rp-juta) Net Profit (Rp-million)	(17.165)	(2.613)	(14.552)	556,91%	●
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	59.021	71.462	(12.441)	-17,41%	●
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	47.646	58.547	(10.901)	-18,62%	●
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	11.375	12.914	(1.539)	-11,92%	●

Manajemen Kunci PTMKB per 31 Desember 2019

Key Management of PTMKB as of December 31, 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Nasrizal Nazir	Presiden Direktur President Director	Damciwar Ade
Komisaris Commissioner	Toto Hermawan Liem	Direktur Director	R. Albertus Setyo Legowo

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP**PT Rejeki Inti Logam Jaya (PTRILJ)**

PT Rejeki Intilogam Jaya ("PT RILJ") didirikan berdasarkan akta pendirian No. 24 tanggal 30 Mei 1997 oleh Hasannusi, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-12.741. HT.01.01 TH 97, tanggal 8 Desember 1997. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris Sheila Ersan Sugito, S.H, M.Kn., No. 16, tanggal 30 Januari 2017, mengenai perubahan Susunan Pemegang Saham dan Kepengurusan Perusahaan. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHUAH. 01.03-0050367 tanggal 6 Februari 2017. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT RILJ adalah menjalankan usaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

PT RILJ berkedudukan di Jl. Veteran No. 19 RT 004 RW 06, Kampung Cisereh Desa Kadu Jaya, Curug, Tangerang. Berdasarkan Akta Notaris Adrian Djuaini, SH. nomor 30 pada tanggal 22 Maret 2019, telah dilakukan pengambilalihan seluruh saham Seri B sebanyak 1.500.000 lembar atau 73,53% milik Sudjono Kusnadi Subroto kepada Perusahaan dengan nilai nominal sebesar Rp6.000.000.000. Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0162994.

PT Rejeki Inti Logam Jaya (PTRILJ)

PT Rejeki Intilogam Jaya ("PT RILJ") was established based on the deed of establishment No. 24 dated May 30, 1997 made before Hasannusi, S.H., a notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. C2-12,741.HT.01.01 TH 97, dated December 8, 1997. The Company's articles of association have been amended several times, most recently through Notarial Deed of Sheila Ersan Sugito, S.H, M.Kn., No. 16, dated January 30, 2017, regarding the changes in the composition of Shareholders and Management of the Company. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights in Decree No. AHUAH. 01.03-0050367 dated February 6, 2017. In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the purposes, objectives and business activities of PT RILJ are conducting business in the industry and trade sector.

PT RILJ is domiciled at Jl. Veteran No. 19 RT 004 RW 06, Kampung Cisereh of Kadu Jaya Village, Curug, Tangerang. Based on Notarial Deed of Adrian Djuaini, SH. No. 30 dated March 22, 2019, 1,500,000 or Series B shares or 73.53% owned by Sudjono Kusnadi Subroto have been handed over by the Company with a nominal value of Rp6,000,000,000. This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No: AHU-AH.01.03-0162994.

Kinerja PTRILJ PTRILJ Performance	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan (Rp-juta) Revenue (Rp-million)	109.922	10.917	99.005	906,88%	-
Beban (Rp-juta) Expenses (Rp-million)	(111.134)	(21.732)	(89.402)	411,38%	-
Laba Bersih (Rp-juta) Net Profit (Rp-million)	73.215	(100.154)	173.369	-173,10%	●
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	162.429	147.865	14.564	9,85%	●
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	597.604	661.959	(64.355)	-9,72%	●
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	(435.175)	(514.095)	78.920	-15,35%	●

Manajemen Kunci PTRILJ per 31 Desember 2019

Key Management of PTRILJ as of December 31, 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Nanang Ariseno	Presiden Direktur President Director	Roy. A. Ilham
		Direktur Director	Sudjono Kusrnadi Subroto

INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM SERTA KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

INFORMATION ON THE CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING AS WELL AS THE CHRONICOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE AND LISTING

Sejak berdirinya hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Saham dan tidak pernah menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Perusahaan juga tidak mencatatkan saham di bursa efek manapun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kronologis penerbitan dan pencatatan saham.

Since its establishment until the end of 2019, the Company has never made an Initial Public Offering and has never issued shares to be owned by the public. The Company also does not list shares on any stock exchange, so there is no information related to the chronology of the issuance and listing of shares.

Perusahaan juga tidak pernah menerbitkan efek yang diperdagangkan di bursa efek manapun, sehingga tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perusahaan informasi terkait kronologis penerbitan dan pencatatan efek lainnya.

The Company has never issued any securities that are traded on any stock exchange, so none of Boards of Commissioners and Board of Directors who own shares of the Company.

Namun demikian, di tahun 2019 PPA menerbitkan surat utang jangka menengah, atau *Medium Term Notes* (MTN). PPA telah menerbitkan surat utang jangka menengah, atau MTN dan SBK di tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

However, in 2019 PPA issued Medium-Term Notes (MTN). PPA has issued medium-term note or MTN and Commercial Paper or CP in 2019 with the following details:

<i>Medium Term Notes</i>	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)	Tanggal Terbit Issuance Date	Jangka Waktu Period	Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat dari Pefindo Rating from Pefindo
MTN I PPA Tahun 2019 Seri A PPA MTN I 2019 Series A	300.000	8 November 2019 November 8, 2019	2 tahun 2 years	8 November 2021 November 8, 2021	10,05% p.a	idA (Single A)
MTN I PPA Tahun 2019 Seri B PPA MTN I 2019 Series B	450.000	8 November 2019 November 8, 2019	3 tahun 3 years	8 November 2022 November 8, 2022	10,30% p.a	idA (Single A)
Surat Berharga Komersial Commercial Paper	100.000	27 November 2019 November 27, 2019	1 tahun 1 years	28 November 2020 November 28, 2020	7,50% p.a	idA (Single A)

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS

Nama : **KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**
Alamat : RSM Indonesia, Plaza Asia, Level 10 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 59, Jakarta
Telp. : +62 21 - 51401340
Faks. : +62 21 - 51401350
Situs Web : www.rsm.id
Bentuk Jasa : KAP
Periode Penugasan : 23 Oktober 2019 s.d. 26 Februari 2020
Biaya : Rp594.000.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah)

Nama : **KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**
Address : RSM Indonesia, Plaza Asia, Level 10 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 59, Jakarta
Phone. : +62 21 - 51401340
Fax. : +62 21 - 51401350
Website : www.rsm.id
Type of Service : Public Accounting Firm
Assignment Period : October 23, 2019 until February 26, 2020
Fee : Rp.594,000,000 (five hundred ninety four million Rupiah)

Konsultan Hukum Legal Consultant

Nama : **Ary Zulfikar & Partners**
Alamat : Cibis Nine, Jl. Tahi Bonar Simatupang No.2, RT.3/RW.4, Karet Semanggi, Setia Budi, South Jakarta City, Jakarta 12560
Telp. : +62 21 5770876
Bentuk Jasa : Konsultan Hukum
Biaya : Rp505.000.000 (lima ratus lima juta Rupiah)

Nama : **Ary Zulfikar & Partners**
Address : Cibis Nine, Jl. Tahi Bonar Simatupang No.2, RT.3/RW.4, Karet Semanggi, Setia Budi, South Jakarta City, Jakarta 12560
Phone. : +62 21 5770876
Type of Service : Legal Consultant
Fee : Rp505,000,000 (five hundred and five million Rupiah)

Penilai Appraiser

Nama : **KJPP Herman, Meirizki dan Rekan**
Telp. : +62 21 - 5384495
Faks. : 021 - 5384496
Situs Web : www.kjp-phmr.co.id
Bentuk Jasa : Jasa Penilai Publik
Periode Penugasan : 29 November 2019 sampai dengan 12 Desember 2019
Biaya : Rp950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah)

Name : **KJPP Herman, Meirizki dan Rekan**
Phone. : +62 21 - 5384495
Fax. : 021 - 5384496
Website : www.kjp-phmr.co.id
Type of Service : Public Appraisal Service
Assignment Period : November 29, 2019 until December 12, 2019
Fee : Rp950,000,000 (nine hundred fifty million Rupiah)

INFORMASITENTANGKRONOLOGISPENERBITANDANPENCATATANSAHAMSERTAKRONOLOGISPENERBITANDANPENCATATANEFEKLAINNYA
INFORMATIONONTHECHRONOLOGYOF SHAREISSUANCEANDLISTINGASWELLASTHECHRONICOLOGYOFOTHERSECURITIESISSUANCEANDLISTING

Notaris Notary

Nama	: Muhamat Hatta, SH
Alamat	: Jl. Cideng Timur No. 60C, Jakarta Pusat
Telp.	: +622134830289
Bentuk Jasa	: Notaris
Periode Penugasan	: Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak penandatanganan Surat Penunjukan yang dibuat PT PPA dan disetujui oleh Penyedia Jasa.
Biaya	: Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
Name	: Muhamat Hatta, SH
Address	: Jl. Cideng Timur No. 60C, Central Jakarta
Phone.	: +622134830289
Type of Service	: Notary
Assignment Period	: Within 60 (sixty) working days since the signing of Appointment Letter made by PT PPA and approved by the Service Provider.
Fee	: Rp1,500,000,000 (one billion five hundred million rupiah)

Konsultan Keuangan Financial Consultant

Nama	: PT Dex Solutions Indonesia
Alamat	: Gedung Graha Surveyor Indonesia, Lantai 15, Unit 1503, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta, 12950
Telp.	: +62 21 – 304 900015
Faks.	: 021 – 304 900016
Situs Web	: www.dex-solutions.com
Bentuk Jasa	: Konsultan Keuangan
Periode Penugasan	: 2019
Biaya	: Rp616.000.000,- (enam ratus enam belas juta rupiah).
Name	: PT Dex Solutions Indonesia
Address	: Graha Surveyor Indonesia Building, 15th Floor, Unit 1503, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta, 12950
Phone.	: +62 21 – 304 900015
Faks.	: 021 – 304 900016
Situs Web	: www.dex-solutions.com
Type of Service	: Financial Consultant
Assignment Period	: 2019
Fee	: Rp616,000,000 (six hundred and sixteen million rupiah).

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION



- 25 Oktober 2019 | October 25, 2019
Infobank State Owned Enterprises (SOEs) Award 2019

The Best SOEs 2019 (BUMN Terbaik) kategori BUMN Pembiayaan selama 5 tahun berturut-turut ajang *Infobank State Owned Enterprises (SOEs) Award 2019* oleh Infobank
The Best SOEs 2019 in SOEs Financing category for 5 consecutive years at the Infobank State Owned Enterprises (SOEs) Award 2019 by Infobank

- BUMN dengan Kinerja “Sangat Bagus” atau Excellent tahun 2019
SOEs with “Excellent” Performance in 2019

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN INFORMATION ON COMPANY'S WEBSITE

Dalam menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan, Perusahaan menerapkan peraturan-peraturan terkait yang ada. Peraturan yang diterapkan terkait keterbukaan dalam penyampaian informasi perusahaan adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan keputusan Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-33/PPA/0516 tanggal 25 Mei 2016 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Perusahaan.

Perusahaan memiliki *website* dengan alamat *www.ptppa.com*. Perusahaan selalu berupaya menyempurnakan *website* tersebut secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses oleh para *stakeholders*. *Website* Perusahaan memiliki 2 (dua) versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Website Perusahaan juga memuat informasi mengenai praktik GCG yang telah diterapkan oleh Perusahaan antara lain Struktur Organisasi dan Tim Manajemen (memuat susunan terbaru dari Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, Pemegang Saham Perusahaan, *Core Values* serta *Governance Structure* (memuat dokumen-dokumen GCG seperti Pedoman GCG, *Code of Conduct*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Kebijakan *Whistleblowing System*, dan dokumen kebijakan lainnya).

Website Perusahaan secara garis besar terdiri dari:

In implementing transparency principle in the Company's management, the Company adapts related prevailing Law. The regulations that are implemented related to transparency in information disclosure in the Company are including Law No. 14 of 2008 dated April 30, 2008 concerning Public Information Disclosure and PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Directors Decree No. SK-33/PPA/0516 dated May 25, 2016 concerning Corporate Information Disclosure Policy.

The Company has website addressed at <https://www.ptppa.com>. The Company seeks to enhance the website periodically to be more informative and accessible for the Stakeholders. The Company's website is presented Bilingual in Bahasa and English.

The Company's website also presents information about GCG practice implemented in the Company including Organization Structure and Management Team (current composition of Board of Commissioners and Board of Directors, Shareholders of the Company, Core Values and Governance Structure (including GCG documents, such as GCG Manual, Code of Conduct, Gratification Control Manual, Whistleblowing System Policy Manual, and other policy documents).

Website of the Company generally presents following information:

Informasi Information	Kesesuaian Conformity	Keterangan Description
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu. Shareholders information until individual end shareholders.	✓	Ditampilkan dalam menu "Kinerja" dan dilanjutkan pada sub menu " <i>Annual Report</i> ". Presented in Menu "Performance" proceeds to sub menu "Annual Report".
Informasi mengenai menu Tata Kelola yang memuat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perusahaan. Information about Governance including regulations in the Company.	✓	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Tata Kelola yang Baik". Presented in Menu "Company" proceeds to sub menu "Good Corporate Governance".

Informasi Information	Kesesuaian Conformity	Keterangan Description
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan. Information about General Meetings of Shareholders (GMS) minimum covering agenda discussed in the GMS, summary of GMS minutes, and information about important dates such as GMS announcement date, GMS invitation date, GMS date and date of GMS minutes announcement.	✓	Ditampilkan dalam menu "Kinerja" dan dilanjutkan pada sub menu "Annual Report". Presented in Menu "Performance" proceeds to sub menu "Annual Report".
Laporan tahunan terpisah (5 tahun terakhir). Separated annual report (5 recent years).	✓	Ditampilkan dalam menu "Kinerja" dan dilanjutkan pada sub menu "Annual Report". Presented in Menu "Performance" proceeds to sub menu "Annual Report".
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir). Separated annual financial statements (5 recent years).	✓	Ditampilkan dalam menu "Kinerja" dan dilanjutkan pada sub menu "Annual Report". Presented in Menu "Performance" proceeds to sub menu "Annual Report".
Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan Profile of Board of Commissioners and Board of Directors; and	✓	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Manajemen". Presented in Menu "Company" proceeds to sub menu "Management".
Informasi mengenai Board Manual. Information about Board Manual.	✓	Ditampilkan dalam menu "Perusahaan" dilanjutkan pada sub menu "Tata Kelola yang Baik" kemudian menu "GCG". Presented in Menu "Company" proceeds to sub menu "Good Corporate Governance" and then "GCG".



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Di tengah kondisi yang penuh tantangan, PPA mampu membukukan laba dan memberikan dividen, yang menunjukkan kemampuan PPA untuk tumbuh secara berkelanjutan.

In the midst of challenging conditions, PPA managed to record profit and give dividends, which shows PPA's ability to grow sustainably.





TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI ECONOMY AND INDUSTRY OVERVIEW

Dinamika ketidakpastian perekonomian global yang dipicu oleh perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok masih terus berlanjut di sepanjang tahun 2019. Kondisi tersebut membuat *International Monetary Fund* (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2019 sebesar 0,2% dari 3,2% menjadi hanya 3%. Ini merupakan angka pertumbuhan terendah setelah ekonomi global mengalami ekspansi usai terpapar krisis di tahun 2008.

Kondisi ekonomi global yang melambat ini menyebabkan bank sentral Amerika Serikat, *The Federal Reserve* (*The Fed*) menurunkan suku bunga kebijakan. Sepanjang tahun 2019, *The Fed* menurunkan suku bunga kebijakan *Federal Funds Rate* (FFR) sebanyak 75 bps dari 2,50% menjadi 1,75% untuk mengantisipasi dampak dari perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian AS. Ke depan, prospek ekonomi global akan dipengaruhi oleh kemajuan *trade deal* AS-Tiongkok, pemanfaatan *trade diversion* negara berkembang, efektivitas stimulus fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter, serta kondisi geopolitik. Prospek pemulihan global tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi domestik dan arus masuk modal asing.

Di tengah kinerja perekonomian dunia yang melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan di tahun 2019 masih terjaga dikisaran 5%, yakni sebesar 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2019 ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik meskipun kinerja ekspor menurun. Perkembangan keseluruhan tahun 2019 di capai setelah pada triwulan IV-2019 pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (yoy).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 juta atau USD4.174,9. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah di banding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55%.

The dynamics of global economic uncertainty triggered by the trade war between the United States (US) and China continued throughout 2019. These conditions led the International Monetary Fund (IMF) to cut its forecast for global economic growth for 2019 by 0.2% from 3.2% to only 3%. This is the lowest growth rate since the global economy expanded after being exposed to the crisis in 2008.

The slowing global economic condition caused the US central bank, The Federal Reserve (The Fed) to reduce policy rates. In 2019, the Fed lowered the Federal Funds Rate (FFR) policy rate by 75 bps from 2.50% to 1.75% to anticipate the impact of global economic slowdown on the US economy. Going forward, the outlook for global economy will be influenced by the progress of the US-China trade deal, the utilization of trade diversion in developing countries, the effectiveness of fiscal stimulus and easing monetary policy, and the geopolitical conditions. The prospect of global recovery is a concern because it can affect the prospects for domestic economic growth and foreign capital inflows.

Amid the slowing performance of world economy, Indonesia's economic growth has been able to be maintained. Bank Indonesia (BI) noted, Indonesia's overall economic growth in 2019 was maintained at around 5%, namely at 5.02%, although lower than the 2018 achievement at 5.17%. National economic growth in 2019 was supported by domestic demand that remained to be good despite declining export performance. Overall developments in 2019 were achieved after in the fourth quarter of 2019, the economic growth was recorded at 4.97% (yoy), slowing slightly compared to the previous quarter's growth of 5.02% (yoy).

The Central Statistics Agency (BPS) recorded that Indonesia's Economy in 2019 as measured by Gross Domestic Product (GDP) based on current prices reached Rp15,833.9 trillion and GDP per capita reached Rp59.1 million or USD4,174.9. Indonesia's economy in 2019 grew 5.02%, lower than the 2018's achievement of 5.17%. In terms of production, the highest growth was achieved by Other Services Business at 10.55%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibandingkan triwulan IV-2018 tercatat tumbuh 4,97% (*year-on-year/ yoy*). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,97%. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 di banding triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74% (*kuartal-to-kuartal/ qdq*). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 59,00%, di ikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, dan Pulau Kalimantan 8,05%.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap baik ditopang prospek peningkatan ekspor dan konsumsi rumah tangga. Investasi diproyeksikan juga meningkat didorong pembangunan infrastruktur serta kenaikan keyakinan pelaku usaha sebagai dampak peningkatan ekspor dan kemudahan iklim berusaha sejalan dengan kebijakan Pemerintah termasuk implementasi *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).

In terms of expenditure, the highest growth was achieved by the Nonprofit Consumption Expenditure serving Households Component (PK-LNPRT) by 10.62%.

Indonesia's economy in the 4th quarter of 2019 compared the 4th quarter of 2018 recorded a growth of 4.97% (*year-on-year/yoy*). From the production side, the growth was driven by all business fields, with the highest growth being achieved by Other Service Business at 10.78%. From the expenditure side, the highest growth was achieved by the Household Consumption Expenditure Component (PK-RT) of 4.97%. Indonesia's economy in the 4th quarter of 2019 compared to the 3rd quarter of 2019 experienced a contraction of 1.74% (*quarter-to-quarter/qdq*). From the production side, this was caused by seasonal effects on the Agriculture, Forestry and Fisheries Business which decreased 20.52%. From the expenditure side, this was caused by the Exports of Goods and Services component which contracted by 2.55%.

Spatially, Indonesia's economic structure in 2019 was dominated by provincial groups in Java and Sumatra. Java Island had the largest contribution to GDP, at 59.00%, followed by Sumatra Island at 21.32%, and Kalimantan Island at 8.05%.

Going forward, Indonesia's economic growth is expected to remain favorable supported by the prospect of increased exports and household consumption. Investment is also projected to increase, driven by infrastructure development and an increase in business confidence as a result of increased exports and ease of business climate in line with Government policies including the implementation of *Omnibus Law*. Bank Indonesia will continue to strengthen coordination with the Government and related authorities to maintain economic stability, encourage domestic demand, and increase exports, tourism, and foreign capital inflows, including Foreign Direct Investment (PMA).

KEBIJAKAN STRATEGIS 2019

STRATEGIC POLICY 2019

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian global maupun domestik di sepanjang tahun 2019 yang penuh dengan ketidakpastian, Perusahaan menghadapi kondisi yang lebih menantang untuk dapat mencapai target dan sasaran Perusahaan di tahun 2019. Sebagaimana tahun 2018, pada tahun 2019 Perusahaan tetap menjalankan strategi pertumbuhan terutama melalui kegiatan investasi, di samping tetap melaksanakan tugas R/R BUMN serta pengelolaan aset. Dalam bidang investasi, selain tetap mengembangkan investasi yang telah dilakukan Perusahaan semakin proaktif untuk menginisiasi peluang investasi yang baru, melalui kerja sama dengan perbankan Himbara dalam rangka pengelolaan *Non Performing Loan* (NPL). Di bidang pengelolaan aset, Perusahaan melakukan kerja sama operasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan aset milik Pemerintah baik BUMN maupun BUMD. Sedangkan dalam bidang R/R BUMN, Perusahaan tetap melakukan kegiatan penyelesaian R/R sesuai surat dari pemegang saham.

Di tahun 2019, pengembangan entitas anak juga menjadi perhatian. Perusahaan, tidak hanya melakukan pengembangan entitas anak pada bidang konstruksi dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah, Perusahaan juga mengembangkan entitas anak di sektor keuangan melalui pembiayaan serta investasi.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa, maka Sumber Daya Manusia (SDM) PPA merupakan aset utama Perusahaan. Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM, maka pada 2019 Perusahaan telah menyusun *roadmap* transformasi *human capital management for industry 4.0* untuk periode 2019-2023.

By taking into account both global and domestic economic conditions throughout 2019 that were full of uncertainties, the Company dealt with more challenging conditions to achieve the Company's targets and goals in 2019. As in 2018, in 2019 the Company continued to carry out growth strategies primarily through investment activities, as well as continued to carry out the tasks of SOEs R/R and asset management. In the investment sector, in addition to continuing to expand investments that have been made, the Company is more proactive to initiate new investment opportunities, through cooperation in the management of Non-Performing Loans (NPLs) with Himbara banks. In the asset management, the Company entered into joint operations in the development and management of Government-owned assets, both SOEs and ROEs. Whereas in SOEs R/R, the Company continued to carry out R/R activities in accordance with the letter from shareholders.

In 2019, the development of subsidiaries was also become a concern. The Company did not only endeavor to develop subsidiaries in the construction sector in order to support infrastructure development proclaimed by the Government, the Company also developed subsidiaries in the financial sector through financing and investment.

As a company engaged in the service sector, PPA's Human Capital (HC) is the Company's main asset. To increase the capacity and competency of human capital, in 2019 the Company has compiled the 2019-2023 roadmap for the transformation of human capital management for industry 4.0.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan belum menerapkan PSAK 5 tentang Segmen Operasi. Untuk dapat menggambarkan segmen usaha, Perusahaan menggunakan struktur dan sumber pendapatan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Jasa Konstruksi;
2. Penjualan;
3. Pendapatan Hasil Investasi;
4. Pinjaman yang Diberikan;
5. Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi;
6. Pendapatan Penggantian Biaya.

Terdapat 3 (tiga) sumber pendapatan yang dicatatkan pada tahun 2018, namun tidak lagi dicatatkan di tahun 2019, yaitu pendapatan dari Manufaktur, pendapatan Properti, dan pendapatan Sewa Alat.

Untuk dapat memberikan gambaran awal tentang skala bisnis masing-masing segmen dan kontribusinya terhadap Perusahaan, berikut disampaikan struktur pendapatan Perusahaan yang menggambarkan masing-masing segmen.

Until the end of 2019, the Company has not applied PSAK 5 on Operating Segments. To describe its business segments, the Company uses the structure and source of revenue consisting of:

1. Construction Service Revenues;
2. Sales;
3. Revenues from Investment;
4. Loan Receivables;
5. Advisory Service Revenues;
6. Revenues from Reimbursable Cost.

There are 3 (three) sources of revenues recorded in 2018, but no longer recorded in 2019, namely Manufacturing Revenues, Property Revenues and Revenues from Equipment Rental.

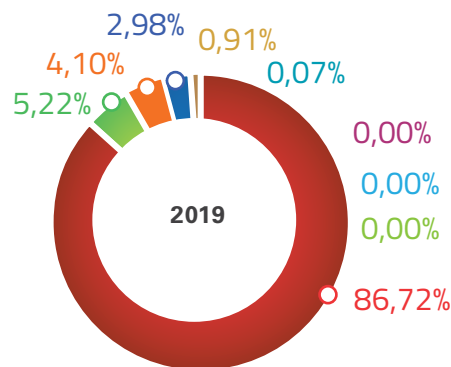
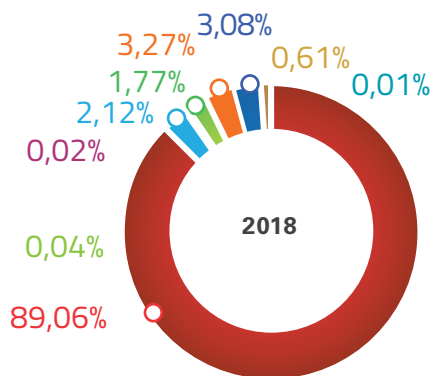
To provide an initial representation of the business scale of each segment and its contribution to the Company, the following is the Company's revenue structure that describes each segment.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Terhadap Pendapatan Konsolidasian
Total and Contribution of Segments to Consolidated Revenues

Sumber Pendapatan Sources of Revenues	2019		2018		Kenaikan (Penurunan) Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-1)	6=(3/1)	
Jasa Konstruksi Construction Service	5.783.502	86,72%	6.077.796	89,06%	(294.294)	-4,84%	●
Penjualan Sales	348.251	5,22%	120.611	1,77%	227.640	188,74%	●
Hasil Investasi Investment Proceeds	273.367	4,10%	223.398	3,27%	49.969	22,37%	●
Pinjaman yang Diberikan Loan Receivables	198.908	2,98%	210.458	3,08%	(11.550)	-5,49%	●
Imbalan Jasa Konsultasi Advisory Service	60.432	0,91%	41.745	0,61%	18.687	44,76%	●

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENTJumlah dan Kontribusi Segmen Terhadap Pendapatan Konsolidasian
Total and Contribution of Segments to Consolidated Revenues

Sumber Pendapatan Sources of Revenues	2019		2018		Kenaikan (Penurunan) Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-1)	6=(3/1)	
Manufaktur Manufacturing	-	-	144.629	2,12%	-	-	
Properti Property	-	-	3.031	0,04%	-	-	
Sewa Alat Equipment Rental	-	-	1.455	0,02%	-	-	
Penggantian Biaya Reimbursable Cost	4.997	0,07%	878	0,01%	4.119	469,13%	●
JUMLAH PENDAPATAN TOTAL REVENUES	6.669.457	100,00%	6.824.001	100,00%	(154.544)	-2,26%	●

Komposisi Pendapatan Segmen Usaha Terhadap Pendapatan Konsolidasian
Composition of Business Segment Revenues Against Consolidated Revenues

- Jasa Konstruksi
Construction Service
- Hasil Investasi
Investment Proceeds
- Imbalan Jasa Konsultasi
Advisory Service
- Sewa Alat
Equipment Rental
- Penjualan
Sales
- Pinjaman yang Diberikan
Loan Receivables
- Penggantian Biaya
Reimbursable Cost
- Properti
Property
- Manufaktur
Manufacturing

Pendapatan usaha yang diperoleh dari Jasa Kontruksi merupakan pendapatan yang dikontribusikan entitas anak, PT Nindya Karya ("NK"). Ditengah segala tantangan yang dihadapi pada tahun 2019 terutama adanya peristiwa politik dalam negeri yang membuat beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan, NK mampu meraih Pendapatan Usaha sebesar Rp5,78 triliun, dimana lebih rendah 4,84% dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,08 triliun, atau hanya mencapai 74,43% dari target 2019 yang sebesar Rp7,77 triliun.

Penurunan capaian pendapatan jasa konstruksi dari NK tidak lepas dari kondisi sektor konstruksi yang juga mengalami perlambatan pada tahun 2019 yang hanya tumbuh 5,76% dibandingkan pada 2018 mencapai 6,09%. Di samping faktor eksternal, perolehan Pendapatan usaha juga terkendala belum selesainya pembebasan lahan serta kondisi cuaca yang berakibat pada penundaan pelaksanaan dan penandatanganan proyek yang terealisasi hanya mencapai 74,4% dari target pada Triwulan IV tahun 2019, serta rendahnya capaian kinerja entitas anak NK, yaitu PT Nindya Beton ("NB"). Kinerja Pendapatan Jasa konstruksi tidak lepas juga dari hasil yang dicapai pada kinerja pemasaran dan kinerja produksi NK yang ditunjukkan pada tabel-tabel di bawah. Di mana secara umum kedua indikator kinerja dan produksi yang direalisasikan pada tahun 2019 lebih rendah dari perolehan 2018 maupun target 2019.

Revenues obtained from the Construction Services represent revenue contributed by a subsidiary, PT Nindya Karya ("NK"). In the midst of all the challenges faced in 2019, especially the national political event that made several infrastructure development projects funded by the State Budget were not running as planned, NK was able to achieve Revenues amounted to Rp5.78 trillion, 4.84% lower than the previous year's achievement of Rp6.08 trillion, or only reached 74.43% of the 2019 target of Rp7.77 trillion.

The decline in construction service revenues from NK cannot be separated from the construction sector condition which also experienced a slowdown in 2019 and only grew 5.76% compared to 2018 reaching 6.09%. In addition to external factors, the acquisition of revenues was also constrained by the unfinished land acquisition and weather conditions which resulted in delays in the implementation and signing of projects that only reached 74.4% of the target in the 4th Quarter of 2019, and the low performance of NK's subsidiary, namely PT Nindya Beton ("NB"). The Construction service revenues performance is also inseparable from the results achieved in NK's marketing and production performance shown in the below tables. In general, both performance and production indicators realized in 2019 were lower than the 2018 acquisition or the 2019 target.

Tabel Kinerja Pemasaran Incl.PPN (Rp Miliar)
Table of Marketing Performance include VAT (Rp Billion)

No	Uraian Description	Per 31 Des 2018 As of Dec 31, 2018	Per 31 Des 2019 As of Dec 31, 2019	RKAP 2019 2019 Budget and Planning	Analisa Horizontal Horizontal Analysis	
1	2	3	4	5	6= 4/3	7 = 4/5
1	Lelang Diikuti Auction Followed	32.937	21.636	47.028	65,69%	46,01%
2	Lelang Dimenangkan Auction Won	9.697	4.269	11.814	44,02%	36,13%
3	Tanpa Lelang / Penunjukan Langsung No Auction / Direct Appointment	5	92	25	1840%	368%
4	Lelang dimenangkan Auction Won	29,44%	19.73%	25,12%	67,01%	78,54%
5	Kontrak Baru New contract	9.702	4.361	11.839	44,94%	36,83%
6	Kontrak Lama Old contract	8.468	9.492	11.135	112,09%	85,25%
7	Pekerjaan Tersedia Job Available	18.170	13.852	22.973	76.24%	60,30%

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENTTabel Kinerja Produksi (Rp Miliar)
Table of Production Performance (Rp Billion)

No	Uraian Description	Per 31 Des 2018 As of Dec 31, 2018	Per 31 Des 2019 As of Dec 31, 2019	RKAP 2019 2019 Budget and Planning	Analisa Horizontal Horizontal Analysis	
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 4/5
1	Nilai Pekerjaan Tersedia (Excl.PPN)	16.518	12.468	20.885	75,48%	59,70%
	a. Sisa Pek. Proyek Lama (Excl.PPN)	7.689	8.629	10.122	112,22%	85,25%
	b. Perolehan Proyek Baru (Excl.PPN)	8.820	3.839	10.762	43,53%	35,67%
	Value of Job Available (Excl.VAT)					
	a. Remaining Old Projects (Excl.VAT)					
	b. Acquisition of New Projects (Excl. VAT)					
2	Pendapatan Usaha	7.474	6.616	9.055	88,52%	73,06%
	a. Non Ventura Bersama	6.169	5.643	7.505	91,49%	75,19%
	b. Ventura Bersama	1.305	972	1.550	74,48%	62,71%
	Revenues					
	a. Non Joint Venture					
	b. Joint Venture					

Sebagaimana tabel diatas, dapat dilihat bahwa Lelang yang diikuti pada 2019 sebesar Rp21,64 triliun, turun 34,31% dibandingkan 2018 sebesar Rp32,94 triliun. Sedangkan Lelang yang dimenangkan pada tahun 2019 sebesar Rp4,27 triliun, mengalami penurunan 55,98% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp9,70 triliun. Adapun sebagai informasi untuk komposisi Lelang yang dimenangkan berdasarkan jenis pekerjaan diperoleh dari 32% dari sektor Irigasi/Pengairan, 26% dari sektor Bangunan/Gedung, 21% dari sektor Proyek Ventura Bersama, 7% dari sektor Pelabuhan/Bandara, 7% dari EPC, Jalan dan Jembatan 6% serta Properti dan lain-lain sebesar 1%. Demikian halnya dengan tabel kinerja produksi dimana pendapatan dari proyek *Non-Joint Operation* (NJO) tahun 2019 sebesar Rp5,64 triliun atau turun 8,5% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp6,17 triliun. Sedangkan pendapatan dari proyek *Joint-Operation* tahun 2019 sebesar Rp972 miliar atau turun 25,5% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1,30 triliun.

As the table above, it can be seen that the auction followed in 2019 was Rp21.64 trillion, a decrease of 34.31% compared to 2018 of Rp32.94 trillion. While the auction won in 2019 was Rp4.27 trillion, a decrease of 55.98% compared to 2018 of Rp9.70 trillion. The composition of the Auction won by type of work was 32% from Irrigation/Watering sector, 26% from Building sector, 21% from Joint Venture Project sector, 7% from Port/Airport sector, 7% from EPC, 6% from Roads and Bridges, and 1% from Property and others. Likewise with the table of production performance where revenues from the Non-Joint Operation (NJO) project in 2019 amounted to Rp5.64 trillion, down by 8.5% compared to 2018 reaching Rp6.17 trillion. While revenues from the Joint-Operation project in 2019 amounted to Rp972 billion, down by 25.5% compared to 2018 reaching Rp1.30 trillion.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Jasa Konstruksi**Construction Service Financial Performance and Profitability**

Profitabilitas Jasa Konstruksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability of Construction Service can be seen in the table below.

Pendapatan Jasa Konstruksi
Construction Service Revenues

	Realisasi 2019 (Rp-juta) 2019 Realization (Rp-million)	Realisasi 2018 (Rp-juta) 2018 Realization (Rp-million)	Target 2019 (Rp-juta) 2019 Target (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Terhadap 2018 (%) Increase (Decrease) against 2018 (%)	Pencapaian Target 2019 (%) 2019 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)	(1/3)
Pendapatan Jasa Konstruksi Construction Service Revenues	5.783.502	6.077.796	7.770.233	-4,84% 	74,43% 

Pendapatan jasa konstruksi untuk tahun 2019 tercatat sebesar Rp5,78 triliun mengalami penurunan 4,84% atau setara dengan Rp294,29 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp6,08 triliun. Realisasi pendapatan jasa konstruksi juga tercatat mencapai 74,43% dari target RKAP 2019 sebesar Rp7,77 triliun. Seperti yang telah disebutkan di atas, menurunnya pendapatan jasa konstruksi di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya dan tidak tercapainya target RKAP 2019 disebabkan penurunan jumlah pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN, sehingga realisasi perolehan lelang proyek-proyek konstruksi oleh entitas anak, NK hanya mencapai 40% dari target perolehan lelang pada RKAP 2019 sebesar Rp12,12 triliun.

Pendapatan jasa konstruksi tahun 2019 utamanya terdiri dari Hasil Kontrak NK *Non-Loan* sebesar Rp5,59 triliun, pendapatan usaha PT Nindya Beton ("NB") dari beton *readymix* sebesar Rp147,47 miliar dan pendapatan usaha NB dari beton *precast* sebesar Rp14,56 miliar.

Construction service revenues for 2019 was recorded at Rp5.78 trillion, decreased by 4.84% or Rp294.29 billion compared to 2018 at Rp6.08 trillion. Realization of construction service revenues reached 74.43% of the 2019 Budget and Planning target of Rp7.77 trillion. As mentioned above, the decline in construction service revenues in 2019 compared to the previous year and the failure to achieve the 2019 Budget and Planning target was driven by a decrease in the amount of infrastructure development funded by the State Budget, so that the realization of construction project auctions acquisition by a subsidiary, NK, only reached 40% of the auctions acquisition target in the 2019 Budget and Planning of Rp12.12 trillion.

Construction service revenues in 2019 consisted mainly of Non-Loan NK Contracts amounted to Rp5.59 trillion, PT Nindya Beton ("NB") revenues from readymix concrete amounted to Rp147.47 billion and NB revenues from precast concrete amounted to Rp14.56 billion.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT**Rencana Pengembangan**

Rencana pengembangan bisnis segmen jasa konstruksi yang akan dilakukan oleh NK pada pembangunan proyek-proyek di tahun 2020 adalah:

1. Pengusahaan jalan tol sebesar-besarnya Rp1,5 triliun.
2. Penyertaan dalam sektor energi sebesar-besarnya Rp245 miliar.
3. Penyertaan pada entitas anak, NB sebesar-besarnya Rp30 miliar.

Anggaran rencana investasi penyertaan langsung sebagaimana tersebut di atas dapat dimanfaatkan penyertaannya untuk peluang bisnis lainnya sesuai dengan *feasibility study* yang akan diusulkan kemudian. Dalam rangka pengembangan NK dan mencari alternatif penguatan struktur modal, NK merencanakan melakukan penerbitan saham perdana/*Initial Public Offering* (IPO) di tahun 2020.

PENDAPATAN DARI AKTIVITAS PENJUALAN**Kinerja Produksi dan Bisnis Penjualan**

Pendapatan usaha dari aktivitas Penjualan pada tahun 2019 adalah pendapatan atas kinerja yang didapatkan dari beberapa entitas anak tidak langsung Perusahaan, yang berada di bawah kepemilikan PT PPA Kapital ("PPAK"). entitas anak yang langsung dimiliki Perusahaan. Rincian atas kegiatan penjualan yang diatribusikan oleh masing-masing entitas anak PPAK adalah sebagai berikut:

1. PT Bondi Syad Mulia ("BSM"), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa *Hot Dip Galvanizing* ("HDG") untuk produk besi dan baja. Perolehan pendapatan didapatkan pengoperasian pabrik Rungkut. Sementara itu Pabrik baru di Gresik telah selesai dibangun, sehingga BSM memiliki 2 (dua) fasilitas produksi dengan kapasitas produksi sebesar 50.000 ton per tahun. Salah satu inisiatif di tengah tantangan kondisi politik dalam negeri tahun 2019 adalah dengan mempertahankan seoptimal mungkin konsumen lama, baik konsumen yang rutin memasukkan barangnya ke BSM maupun konsumen yang mendapatkan proyek khusus tertentu.

Development Plan

The business development plan for the construction service segment that will be carried out by NK on the construction projects in 2020 are:

1. Toll road concessions at a maximum of Rp1.5 trillion.
2. Participation in energy sector at a maximum Rp245 billion.
3. Investments in a subsidiary, NB, at a maximum of Rp30 billion.

The budget for direct investment plan as mentioned above can be utilized for other business opportunities in accordance with the feasibility study that will be proposed later. In order to develop NK and look for alternatives to strengthen capital structure, NK is planning to issue Initial Public Offering (IPO) in 2020.

SALES REVENUES**Sales Production and Business Performance**

Revenues from sales activities in 2019 were revenues originating from the performance of several indirect subsidiaries of the Company, which are under the ownership of PT PPA Kapital ("PPAK"). a subsidiary directly owned by the Company. The details of sales activities attributable to each PPAK subsidiary are as follows:

1. PT Bondi Syad Mulia ("BSM"), a company engaged in Hot Dip Galvanizing ("HDG") services for iron and steel products. Revenues are earned from the operations of Rungkut factory. Meanwhile the new factory in Gresik has been completed, making BSM now has 2 (two) production facilities with production capacity of 50,000 tons per year. One initiative taken amidst the challenges of the domestic political conditions in 2019 was to maintain old customers, both customers who routinely put their goods into BSM and customers who obtain certain special projects.

2. PT Rejeki Intilogam Jaya ("RILJ"), merupakan perusahaan *smelter* aluminium yang memproduksi aluminium ingot yang dipasarkan kepada industri otomotif Indonesia, baik roda dua maupun roda empat. Selain *smelter* aluminium, RILJ juga memiliki fasilitas dan alat produksi untuk menghasilkan aluminium *extrusion* yang memproduksi aluminium profil untuk berbagai macam industri. Fokus usaha RILJ saat ini mengolah *scrap* aluminium menjadi produk *ingot* dan secara paralel dilakukan restrukturisasi hutang dan permodalan sehingga operasional RILJ perlahan mulai bangkit dengan mengandalkan produksi aluminium *ingot*.
3. PT Magnesium Gosari Internasional ("MGI"), merupakan perusahaan yang didirikan dari hasil kerja sama antara PPAK dan PT Polowijo Gosari ("PG") pada tanggal 29 Agustus 2018, bergerak di bidang industri pupuk *Dolomite* dan turunannya. Pada tahun 2019 MGI berupaya untuk mendapatkan izin *e-catalog* yang merupakan pasar baru yang cukup menjanjikan sejak April 2019. Disamping itu pasar swasta pun cukup menjanjikan khususnya sektor kelapa sawit untuk produk *Dolomite*, dimana saat ini tersedia lahan lebih kurang sebesar 12 juta hektar. Terkait kegiatan operasional, hingga saat ini, MGI mengoperasikan Mesin 2 dan Mesin 3 dengan kapasitas produksi 100.000 ton dan 300.000 ton.
4. PT Matoa Kidung Samudera ("MKS") dan PT Matoa Kidung Bahtera ("MKB"), memiliki bidang usaha penambangan timah dilokasi pertambangan PT Timah (Persero) Tbk, dimana kedua entitas anak Perusahaan ini dibayar sesuai dengan jumlah konsentrat pasir timah yang dihasilkannya. Penambangan dimaksud berupa *mining operation offshore* / hisap timah di lautan dengan menggunakan Kapal Isap Produksi. Di tahun 2019 terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh MKS maupun MKB antara lain terkait teknis Kapal Isap Produksi dengan *ladder* sering tertimpa longsor (*overburden*) sehingga memerlukan perbaikan yang memakan waktu (*long downtime*), biaya *sparepart* yang besar dan karakteristik lokasi kerja timah di perairan kepulauan Meranti, Riau yang kurang menguntungkan.
5. PT Duta Mentari Raya ("DMR") memiliki kegiatan usaha proses pengolahan bahan baku berupa kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar (TBS), yang kemudian diproses menjadi produk akhir berupa *Crude Palm Oil* (CPO).
2. PT Rejeki Intilogam Jaya ("RILJ"), an aluminum smelter company that manufactures aluminum ingots which are marketed to Indonesian two-wheeled and four-wheeled automotive industry. besides aluminum smelters, RILJ also has production facilities and equipment to make aluminum extrusion which produces aluminum profile for various industries. RILJ's current business focus is processing aluminum scrap into ingot products and in parallel, debt and capital restructuring is carried out so that RILJ operations slowly begin to rise by relying on aluminum ingot production.
3. PT Magnesium Gosari International ("MGI"), a company founded as a collaboration of PPAK and PT Polowijo Gosari ("PG") on August 29, 2018, engaged in the Dolomite fertilizer industry and its derivatives. In 2019, MGI has been trying to obtain an e-catalog permit which is a promising new market since April 2019. Besides that, the private market is also quite promising, especially in the palm oil sector for Dolomite products, which currently a land area of approximately 12 million hectares is available. Related to operational activities, to date, MGI operates Machine 2 and 3 with a production capacity of 100,000 tons and 300,000 tons.
4. PT Matoa Kidung Samudera ("MKS") and PT Matoa Kidung Bahtera ("MKB"), have tin mining business in the mining location of PT Timah (Persero) Tbk, where both of these subsidiaries are paid according to the amount of tin sand concentrate produced, The mining is in the form of offshore mining operations by using a Production Suction Vessel. In 2019, there were a number of challenges faced by MKS and MKB including technical aspects of Production Suction Vessel with ladders that were often overburdened, thus requiring long downtime repair, high spare part costs and less profitable characteristics of tin work locations in the waters of Meranti Island, Riau.
5. PT Duta Mentari Raya ("DMR") has a business process of processing raw materials of palm oil in the form of fresh fruit bunches (FFB), which are then processed into final products in the form of Crude Palm Oil (CPO).

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Penjualan

Profitabilitas Penjualan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sales Financial Performance and Profitability

Sales Profitability can be seen in the table below.

	Realisasi 2019 (Rp-juta) 2019 Realization Rp-million	Realisasi 2018 (Rp-juta) 2018 Realization (Rp-million)	Target 2019 (Rp-juta) 2019 Target (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Terhadap 2018 (%) Increase (Decrease) against 2018 (%)	Pencapaian Target 2019 (%) 2019 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)	(1/3)
Penjualan Sales	348.251	120.611	1.381.293	188,74% 	25,21% 

Realisasi penjualan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp348,25 miliar, mengalami kenaikan 188,74% atau setara dengan Rp227,64 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp120,61 miliar. Realisasi penjualan juga tercatat mencapai 25,21% dari target RKAP 2019 sebesar Rp1,38 triliun. Tidak tercapainya target RKAP 2019 disebabkan oleh belum beroperasinya Entitas Anak, DMR pada pertengahan 2019.

Realization of sales for 2019 was Rp348.25 billion, an increase of 188.74% or Rp227.64 billion compared to 2018 which amounted to Rp120.61 billion. Such sales realization reached 25.21% of the 2019 Budget and Planning target of Rp1.38 trillion. The failure to achieve the 2019 Budget and Planning target was due to the non-operation of a Subsidiary, DMR in mid-2019.

Pendapatan usaha yang bersumber dari penjualan pada tahun 2019 utamanya terdiri dari penjualan pupuk *dolomit* sebesar Rp128,04 miliar, penjualan aluminium *ingot* sebesar Rp107,22 miliar dan penjualan timah sebesar Rp40,57 miliar.

Sales revenues in 2019 mainly consisted of dolomite fertilizer sales amounted to Rp128.04 billion, aluminum ingot sales amounted to Rp107.22 billion and tin sales amounted to Rp40.57 billion.

Rencana Pengembangan

Untuk meningkatkan pendapatan usaha dari aktivitas penjualan, Perusahaan melalui anak usaha PPAK akan mengembangkan entitas anak *existing* agar mampu meningkatkan kinerja melalui strategi masing-masing entitas dan juga didorong untuk saling bersinergi baik pada *level* kelompok usaha PPA maupun dengan skala yang lebih luas seperti antar BUMN dan anak usaha BUMN juga dengan pihak swasta.

Development Plan

To increase revenues from sales activities, the Company through its subsidiary, PPAK, will develop existing subsidiaries to be able to improve performance through entity's strategies and is also encouraged to form a synergy at the level of PPA business groups and on a broader scale such as between SOEs and subsidiaries of SOEs, as well as the private sector.

Adapun rencana pengembangan yang akan ditempuh untuk entitas anak *existing* antara lain sebagai berikut ini:

The development plan that will be pursued for existing subsidiaries include the following:

1. DMR akan melaksanakan kerja sama pengoperasian pabrik kelapa sawit dengan PT Kuala Gunung untuk menghasilkan arus kas dan mengurangi kerugian yang dialami serta menindaklanjuti proses divestasi DMR kepada para investor strategis dengan target akhir tahun 2020.

1. DMR will carry out a cooperation in the operation of palm oil mills with PT Kuala Gunung to generate cash flow and reduce losses, and follow up DMR divestment process to strategic investors with a target by the end of 2020.

2. MGI melakukan pengembangan proyek Kiserit dengan kapasitas 200.000 ton dengan perkiraan CAPEX dan OPEX awal adalah USD80 juta atau setara Rp1,1 triliun.
 3. BSM akan melakukan perbaikan internal agar dapat menjalankan *operational excellence* serta mengembangkan pangsa pasar untuk dapat mengoptimalkan utilisasi 2 pabrik dengan kapasitas 50.000 ton.
 4. MKS dan MKB berencana untuk restruktur organisasi dan melakukan mengkonversi salah satu Kapal Isap Produksi menjadi Kapal Isap Pasir dengan sedikit modifikasi pada saluran pembuangan pasir timah yang sebelumnya masuk ke penyaring/pengayakan di kapal diubah menjadi saluran pembuangan pasir ke kapal tongkang (modifikasi minor tanpa menghilangkan fungsi Kapal Isap Pasir Timah). Hasil pasir ini akan dijual kepada BUMN Konstruksi untuk keperluan beton *precast*.
 5. RILJ berencana untuk melakukan investasi sejumlah mesin yang dapat menunjang perbaikan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Mesin dan peralatan tersebut di atas diharapkan akan mendukung percepatan proses produksi di *melting furnace* sehingga berdampak positif kepada pencapaian target-target RILJ.
 6. SKI yang tahun 2019 belum beroperasi maka ditargetkan dapat berproduksi komersial pada Februari 2020
2. MGI will develop the Kiserit project with a capacity of 200,000 tons with an initial CAPEX and OPEX estimate of USD80 million or equivalent to Rp1.1 trillion.
 3. BSM will make internal improvements in order to be able to carry out operational excellence as well expanding market share in order to optimize the utilization of 2 factories with capacity of 50,000 tons.
 4. MKS and MKB are planning to restructure the organization and convert one of the Production Suction Vessels to Sand Suction Vessel with minor modifications to the tin sand drainage channel which previously entered the filter/sifting on the vessel to be converted into sand drains to barges (minor modification without eliminating the function of Tin Sand Suction Vessel). The results of sand will be sold to SOEs Construction for the purpose of precast concrete.
 5. RILJ is planning to invest a number of machines that can support the improvement of production process and increase efficiency. The above mentioned machinery and equipment are expected to support the acceleration of production process in the melting furnace that will positively impact the achievement of RILJ targets.
 6. SKI which is not yet operational in 2019 is targeted to commence its commercial production in February 2020.

Selain pertumbuhan organik tersebut, PPAK merencanakan untuk menambah investasi terhadap proyek yang sangat layak dan terukur, PPAK akan berupaya untuk mendapatkan pendanaan secara mandiri untuk kegiatan investasi tersebut. Adapun jumlah pendanaan yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan investasi *bluesky* tahun 2020 adalah sebesar Rp490 miliar.

Melanjutkan model bisnis PPAK sebelumnya, dalam melakukan kegiatan investasi ke depannya PPAK akan lebih fokus pada investasi melalui penyertaan (saham). Atas investasi tersebut Perusahaan diharapkan memperoleh pendapatan berupa dividen, selain adanya potensi menaikkan total aset PPAK secara konsolidasi. Selain itu diharapkan Perusahaan mendapatkan keuntungan pada saat divestasi dari kenaikan harga saham sehubungan dengan perkembangan seluruh entitas anak Perusahaan.

Apart from the organic growth, PPAK plans to add investment to very feasible and measurable projects, and PPAK will try to independently obtain the funding for these investment activities. The amount of funding planned to be used for *bluesky* investment activities in 2020 is Rp490 billion.

Continuing the previous PPAK business model, PPAK will focus more on investment through shares in its future investments. For this investment, the Company is expected to receive income in the form of dividends, in addition to the potential to increase PPAK's total consolidated assets. The Company is also expected to benefit at the time of divestment from an increase in share prices in connection with the development of all of its subsidiaries.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Seluruh calon *investee company* sasaran (atau prospek proyek investasi) dalam pelaksanaannya dapat berkembang (atau berkurang) baik struktur dan jumlahnya, yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dan analisa risiko yang memadai".

In the later implementation, the entire prospective investee company targets (or investment project prospects) can grow (or decrease) in both structure and amount, which is determined based on a feasibility study and adequate risk analysis.

PENDAPATAN DARI HASIL INVESTASI

Kegiatan yang Dilakukan dari Hasil Investasi

Pendapatan dari hasil investasi meliputi pendapatan bunga pinjaman investasi, *capital gain* dan dividen yang diperoleh dari seluruh kegiatan bisnis perusahaan.

Adapun mekanisme bisnis yang dijalankan bisa dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pengelolaan entitas anak.
2. Investasi pada aset Tegal 1, aset Tegal 2, aset Paledang, serta kerja sama dengan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) maupun jual beli piutang seperti yang dilakukan bank BTN.
3. Pemberian fasilitas pembiayaan baik digunakan untuk kepentingan modal kerja, pinjaman investasi maupun *project financing* yang dituangkan dalam perjanjian *Business to Business* seperti dengan PT Polytama Propindo, PT Artha Bangun Pratama, PT Gali Terus Sejahtera, PT Riscon Duta Sarana, PT Inti Adhiyasa, PT Indah Prakasa Sentosa, Tbk, PT Lintas Samudra Sejahtera, PT Widodo Makmur Unggas, PT Tropisindo Sumber Energi, PT SIG Asia, Polowijo Gosari, PT National Utility Helicopters, PT Pusaka Bumi Transportasi, PT Bintang Abadi Sempurna, PT Penta Capital Indonesia, PT Bina Patria Transmitra, PT Wintermar, PT Wisarada Sarana Aviasi, PT Prabu Wahana International, PT Carpediem Mandiri, PT Pratama Persada Airborne, PT Niaga Bumi Energi, PT CDM Swarnadipa, PT Dutacipta Pakarperkasa, PT Bangun Sarana Baja, PT Gasuma Federal Indonesia, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Varia Intra Finance, PT Ade Textile Industries, PT Primarindo Asia Infrastructure, Tbk, dan pemberian fasilitas kepada entitas anak PPA serta beberapa perusahaan BUMN.

Adapun skema atau cara kerja yang dijalankan guna memperoleh pendapatan dari aktivitas investasi berikut tahapan *value creation* nya dapat dilihat pada gambar dan bagan di bawah ini.

REVENUES FROM INVESTMENT

Activities Undertaken in Investment

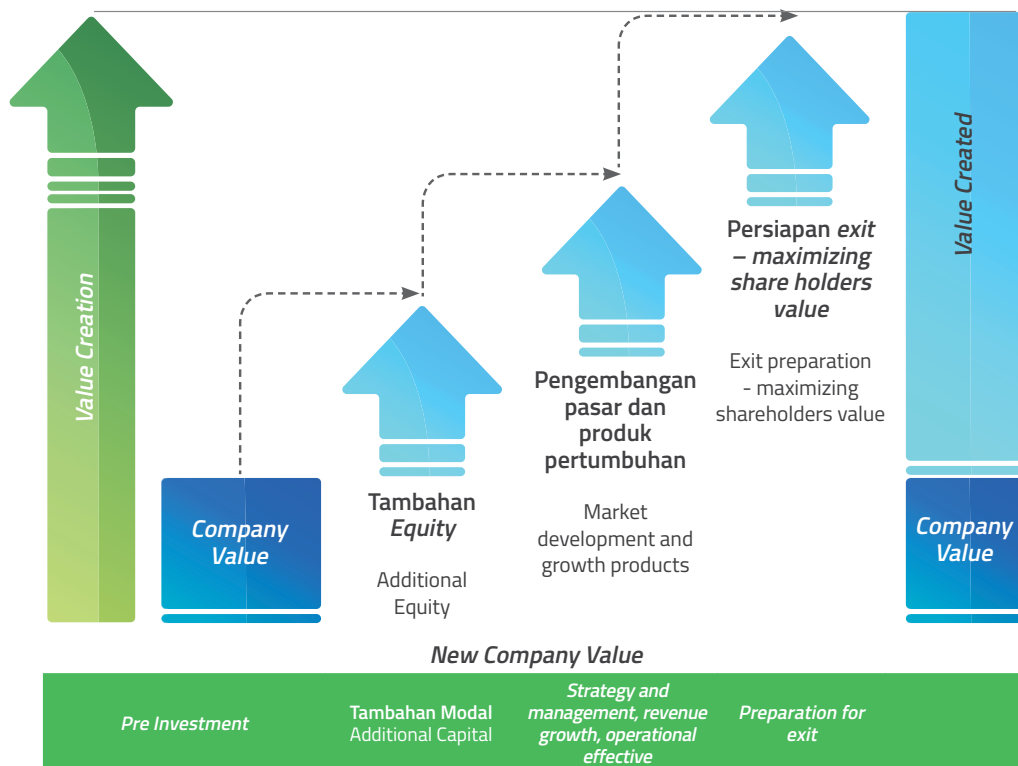
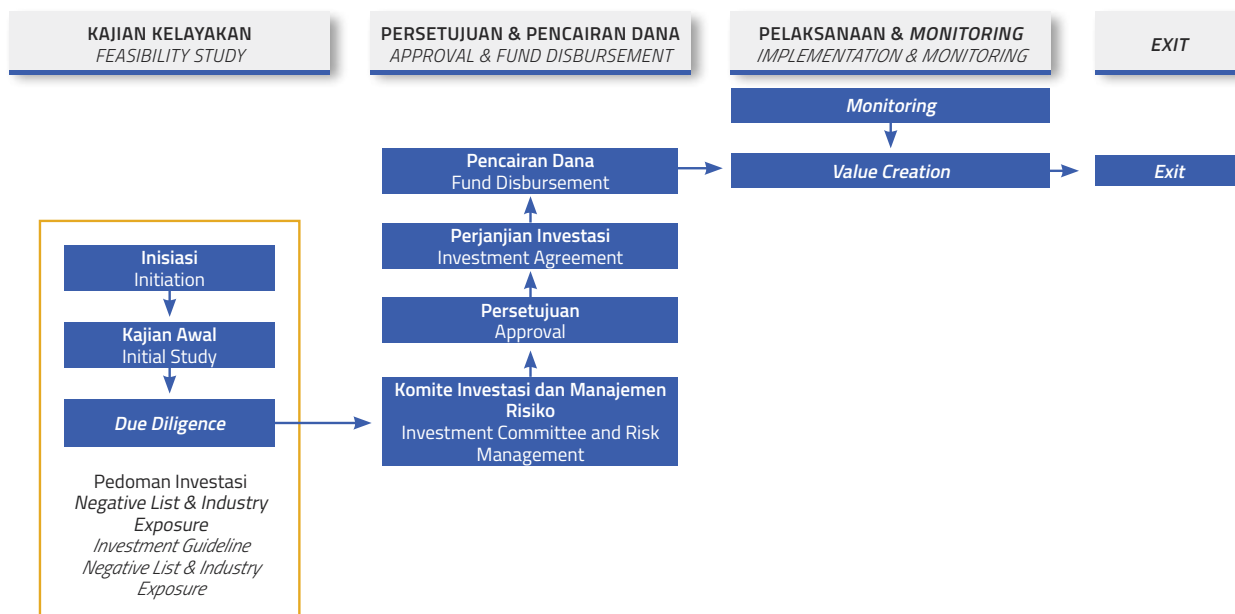
Revenues from investment include investment loan interest income, capital gain and dividends obtained from all business activities of the Company.

The business mechanism carried out can be in the following forms:

1. Management of subsidiaries.
2. Investment in Tegal 1 assets, Tegal 2 assets, Paledang assets, as well as cooperation with PT Sejahtera Eka Graha (SEG) and the sale and purchase of receivables as carried out by Bank BTN.
3. Provision of financing facilities, which is used both for working capital, investment loan and project financing as outlined in the Business to Business agreement with PT Polytama Propindo, PT Artha Bangun Pratama, PT Gali Terus Sejahtera, PT Riscon Duta Sarana, PT Inti Adhiyasa, PT Indah Prakasa Sentosa, Tbk, PT Lintas Samudra Sejahtera, PT Widodo Makmur Unggas, PT Tropisindo Sumber Energi, PT SIG Asia, Polowijo Gosari, PT National Utility Helicopters, PT Pusaka Bumi Transportasi, PT Bintang Abadi Sempurna, PT Penta Capital Indonesia, PT Bina Patria Transmitra, PT Wintermar, PT Wisarada Sarana Aviasi, PT Prabu Wahana International, PT Carpediem Mandiri, PT Pratama Persada Airborne, PT Niaga Bumi Energi, PT CDM Swarnadipa, PT Dutacipta Pakarperkasa, PT Bangun Sarana Baja, PT Gasuma Federal Indonesia, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Varia Intra Finance, PT Ade Textile Industries, PT Primarindo Asia Infrastructure, Tbk, and provision of facilities to PPA's subsidiaries and several SOEs.

The scheme or method conducted in order to obtain revenues from investment activities along with the stages of value creation can be seen in the figure and chart below.



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENTProses Kegiatan Investasi
Investment Process

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Hasil Investasi**Investment Financial Performance and Profitability**

Profitabilitas Hasil Investasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Investment profitability can be seen in the table below

Pendapatan Hasil Investasi
Revenues from Investment

	Realisasi 2019 (Rp-juta) 2019 Realization (Rp-million)	Realisasi 2018 (Rp-juta) 2018 Realization (Rp-million)	Target 2019 (Rp-juta) 2019 Target (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Terhadap 2018 (%) Increase (Decrease) against 2018 (%)	Pencapaian Target 2019 (%) 2019 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)	(1/3)
Pendapatan Hasil Investasi Revenues from Investment	273.367	223.398	331.312	22,37% 	82,51% 

Pendapatan hasil investasi untuk tahun 2019 tercatat Rp273,37 miliar mengalami kenaikan 22,37% atau setara dengan Rp49,97 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp223,39 miliar. Peningkatan pendapatan hasil investasi di tahun 2019, terutama disebabkan terdapatnya kenaikan pada hasil investasi dalam bentuk pendapatan bunga yang naik signifikan, yakni sebesar 152,96% atau setara dengan Rp122,88 miliar, dari Rp80,34 miliar di tahun 2018 menjadi Rp203,22 miliar di tahun 2019. Begitu juga dengan bunga deposito berjangka yang mengalami kenaikan sebesar 16,08% atau setara dengan Rp9,23 miliar, dari Rp57,40 miliar di tahun 2018 menjadi Rp66,63 miliar di tahun 2019.

Realisasi pendapatan hasil investasi tercatat mencapai 82,51% dari target RKAP 2019 sebesar Rp331,31 miliar. Tidak tercapainya target RKAP 2019 disebabkan oleh realisasi hasil dalam bentuk pendapatan bunga dari entitas anak, PT PPA Kapital di tahun 2019 hanya mencapai 2,15% dari target hasil investasi bunga sebesar Rp24,91 miliar serta peningkatan hasil investasi bunga Perusahaan yang berasal dari entitas anak dibandingkan rencana awal investasi pada pihak ketiga.

Pendapatan hasil investasi terutama berasal dari pendapatan bunga pinjaman investasi PT Lintas Samudera Sejahtera sebesar Rp55,13 miliar, pendapatan bunga pinjaman investasi PT Polytama Propindo sebesar Rp31,60 miliar, pendapatan bunga pinjaman investasi PT Polowijo Gosari dan pendapatan dividen tunai dari NK sebesar Rp34,94 miliar.

Revenues from investment for 2019 was recorded at Rp273.37 billion, an increase of 22.37% or Rp49.97 billion compared to 2018 which amounted to Rp223.39 billion. The increase in revenues from investment was mainly due to an increase in investment returns in the form of interest income that rose significantly by 152.96% or Rp122.88 billion, from Rp80.34 billion in 2018 to Rp203.22 billion in 2019. Likewise with time deposit interest which experienced an increase of 16.08% or Rp9.23 billion, from Rp57.40 billion in 2018 to Rp66.63 billion in 2019.

The realization of revenues from investment reached 82.51% of the 2019 Budget and Planning target of Rp331.31 billion. The failure to achieve the 2019 Budget and Planning target was caused by the realization of interest income from a subsidiary, PT PPA Kapital in 2019 only reached 2.15% of the investment interest income target of Rp24.91 billion and an increase in the Company's interest investment that is originating from the subsidiary compared to the initial investment plan for third parties.

Revenues from investment was mainly derived from PT Lintas Samudera Sejahtera's investment loan interest income amounted to Rp55.13 billion, PT Polytama Propindo's investment loan interest income amounted to Rp31.60 billion, PT Polowijo Gosari's investment loan interest income and cash dividend income from NK amounted to Rp34.94 billion.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT**Rencana Pengembangan**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari kegiatan investasi, meningkatkan nilai pada investasi yang telah dilakukan dan melakukan investasi baru pada aset atau perusahaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pertumbuhan aktivitas investasi akan bertumpu pada aktivitas investasi yang dilakukan oleh entitas anak.

Aktivitas investasi akan dilakukan terutama pada bidang yang saat ini sedang digeluti oleh Perusahaan dan entitas anak, baik dalam industri konstruksi dan infrastruktur, aviasi dan pemetaan, pupuk, *energy*, kemasan, logam, *property* dan lain lain. Dengan demikian *driver* pertumbuhan Perusahaan adalah bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas.

Untuk menjaga agar aktivitas investasi tumbuh secara berkesinambungan, PT PPA memiliki kebijakan investasi yaitu jangka waktu kepemilikan saham pada *investee company* secara umum tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Target *return* investasi selama periode 5 tahun secara rata-rata diharapkan mencapai minimal 20% per tahun. Manajemen akan menetapkan jumlah maksimum *investee company* berdasarkan pada kemampuan Perusahaan untuk mengontrol portofolio investasi secara efektif.

Selain model bisnis yang telah dikembangkan dan telah berjalan, Perusahaan akan mengembangkan kapasitasnya dengan berfokus pada penanganan *Non Performing Loan* (NPL) dari perbankan, baik Himbara maupun swasta. Pengembangan ini sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki Perusahaan, yaitu melakukan restrukturisasi dan revitalisasi. Agar strategi ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target, Perusahaan akan memperkuat struktur pendanaan dengan komposisi yang optimal antara pendanaan yang berasal dari perbankan dan pendanaan yang berasal dari pasar modal.

PENDAPATAN DARI PINJAMAN YANG DIBERIKAN**Kegiatan yang Dilakukan dari Pinjaman yang Diberikan**

Kelompok pendapatan yang diperoleh dari pinjaman yang diberikan merupakan sumber pendapatan Perusahaan atas lingkup tugas sebagai agen Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Kementerian BUMN sebesar Rp51,48 miliar, dan pendapatan yang didapat dari kontribusi entitas anak, PT PPA Finance ("PPAF") sebesar Rp147,42 miliar.

Development Plan

In order to increase revenues from investment activities, increase the value of investment made and make new investments in assets or companies that have the potential to be developed. The growth in investment activities will focus on investment activities carried out by subsidiaries.

Investment activities will be mainly made in the businesses that the Company and its subsidiaries are currently engaged in, namely the construction and infrastructure industry, aviation and mapping, fertilizer, energy, packaging, metals, property and others. Therefore, the drivers of the Company's growth are the businesses as mentioned above.

To maintain a sustainable growth of investment activities, PT PPA has an investment policy that the period of share ownership in the investee company is generally at a maximum of 5 (five) years. The investment return target for a 5-year period on average is expected to reach a minimum of 20% per year. The management will determine the maximum number of investee companies based on the Company's ability to control the investment portfolio effectively.

In addition to the business model that has been developed and ongoing, the Company will develop its capacity by focusing on handling Non-Performing Loans (NPLs) from banks, both Himbara and private sector. This development is in accordance with the Company's competitive advantage, i.e. restructuring and revitalizing. In order for this strategy to go according to the plan and target, the Company will strengthen the funding structure with an optimal composition between funding from banks and funding from capital market.

LOAN RECEIVABLES**Activities Undertaken in Loan Receivables**

Revenues obtained from loan receivables is sourced from the scope of duty as an agent for SOEs Restructuring and/or Revitalization in accordance with the assignment given by the Ministry of SOEs amounting to Rp51.48 billion, and the revenues that is derived from the contribution of a subsidiary, PT PPA Finance ("PPAF") amounting to Rp147.42 billion.

Kegiatan R/R BUMN yang dilakukan oleh PT PPA mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset dan perubahannya pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 9 (sembilan) BUMN yang ditangani Perusahaan melalui program R/R. Adapun status penanganan BUMN tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

SOEs R/R activities carried out by PT PPA refer to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2009 concerning Guidelines for SOEs Restructuring and Revitalization by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and amended by the Regulation of Minister of SOEs No. PER-05/MBU/2012 on the Amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2009 concerning Guidelines for SOEs Restructuring and Revitalization by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Until 2019, there were 9 (nine) SOEs being managed by the Company through the R/R program. The status of these SOEs can be seen in the table below

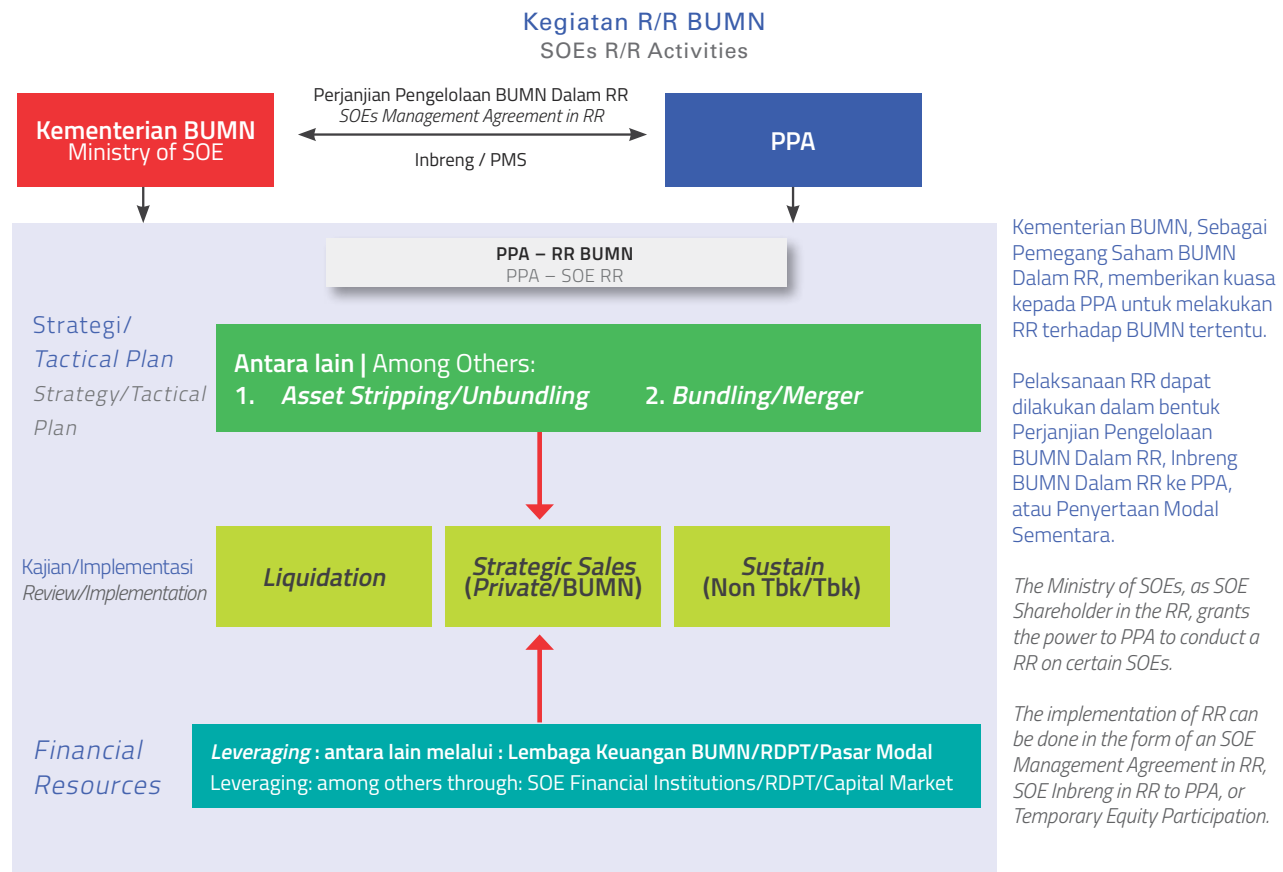
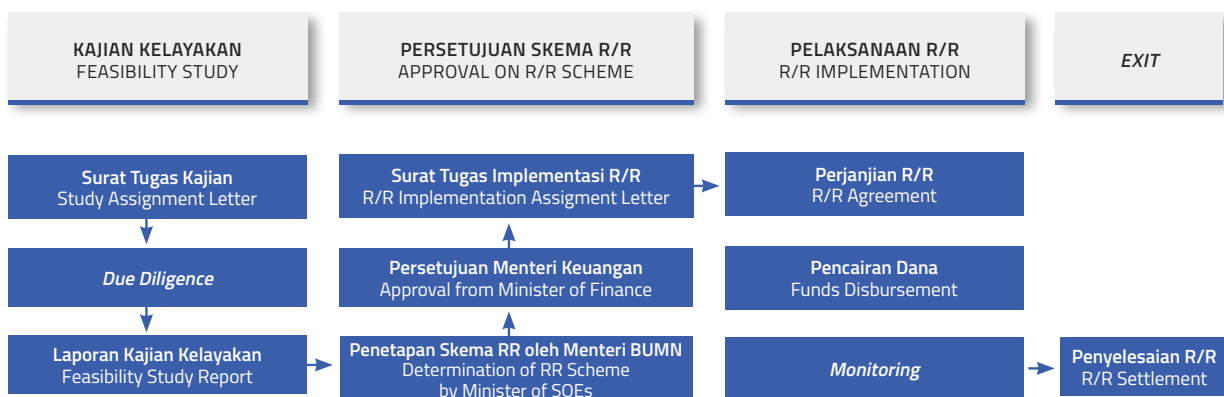
Perkembangan Status Penanganan R/R BUMN
Development of Status of SOEs R/R

BUMN SOEs	Status Penanganan Status
PT Dirgantara Indonesia	<i>Monitoring</i> kinerja, restrukturisasi hutang Performance monitoring, debt restructuring
PT Industri Gelas	Implementasi pemberian pinjaman dan penanganan melalui skema mitra strategis/investor Implementation of lending and handling through strategic partner/investor scheme
PT Industri Kapal Indonesia	<i>Monitoring</i> implementasi pelaksanaan R/R Monitoring the implementation of R/R
PT Industri Sandang Nusantara	<i>Monitoring</i> kinerja, dukungan pelaksanaan kegiatan R/R Performance monitoring, supporting the implementation of R/R activities
PT Kertas Kraft Aceh	Restrukturisasi hutang, <i>monitoring</i> kinerja, mengkaji pengoperasian kembali pabrik kertas dan pendampingan rencana kerja sama dengan investor Debt restructuring, performance monitoring, reviewing paper mill operations and mentoring cooperation plan with investors
PT Kertas Leces	PT Kertas Leces <i>monitoring</i> proses pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator, terutama atas tagihan PT PPA. Monitoring the process of filing for bankruptcy assets carried out by the Curator, especially on PT PPA's invoices.
PT Merpati Nusantara Airlines	<i>Monitoring</i> implementasi keputusan homologasi Monitoring the implementation of homologation decision
PT PAL Indonesia	<i>Monitoring</i> implementasi pelaksanaan R/R Monitoring the implementation of R/R
PT Survei Udara Panas	<i>Monitoring</i> kinerja dan dukungan pelaksanaan kegiatan R/R Performance monitoring and supporting the implementation of R/R activities

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Adapun skema atau cara kerja yang dijalankan guna memperoleh pendapatan dari Kegiatan R/R BUMN dapat dilihat pada gambar dan bagan dibawah ini:

The scheme or method carried out to gain revenues from SOEs R/R activities can be seen in the figure and chart below:

**Proses R/R**
R/R Process

Selain dari R/R, pendapatan dari hasil pinjaman yang diberikan juga dikontribusikan oleh entitas anak, PPAF yakni sebesar Rp147,4 miliar. Dari segi pendanaan, PPAF telah menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) pada periode 31 Desember 2019 senilai Rp60 miliar. Sedangkan total pembiayaan terus meningkat, dimana pada tahun 2015 senilai Rp569 miliar dan di tahun 2019 mencapai Rp993 miliar. PPAF juga berhasil memperoleh penghargaan dari berbagai pihak terkait dengan kinerja yang telah dicapai.

Apart from R/R, revenues from loan receivables was also contributed by a subsidiary, PPAF amounting to Rp147.4 billion. In terms of funding, PPAF has issued Medium Term Notes (MTN) in the period of December 31, 2019 totaling Rp60 billion. Total funding continues to increase, where in 2015 valued at Rp569 billion and in 2019 reached Rp993 billion. PPAF also managed to received awards from a number of parties related to its performance achievements.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Pinjaman yang Diberikan

Loan Receivables Financial Performance and Profitability

Profitabilitas Pinjaman yang Diberikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Loan Receivables Profitability can be seen in the table below.

Pendapatan dari Pinjaman yang Diberikan
Revenues from Loan Receivables

	Realisasi 2019 (Rp-juta) 2019 Realization (Rp-million)	Realisasi 2018 (Rp-juta) 2018 Realization (Rp-million)	Target 2019 (Rp-juta) 2019 Target (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Terhadap 2018 (%) Increase (Decrease) against 2018 (%)	Pencapaian Target 2019 (%) 2019 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)	(1/3)
Pinjaman yang Diberikan Loan Receivables	198.908	210.458	320.786	-5,49% 	62,01% 

Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp198,91 miliar mengalami penurunan 5,49% atau setara dengan Rp11,55 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp210,46 miliar. Hal ini lebih disebabkan karena menurunnya pendapatan bunga yang diperoleh dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) di tahun 2019 hanya tercatat sebesar Rp21,11 miliar, turun 52,73% atau setara dengan Rp23,56 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp44,67 miliar.

Interest income from loan receivables as of December 31, 2019 amounted to Rp198.91 billion, a decrease of 5.49% or Rp11.55 billion compared to 2018 which amounted to Rp210.46 billion. This was due to the decrease in interest income obtained from PT Dirgantara Indonesia (Persero) in 2019 which was only recorded at Rp21.11 billion, down 52.73% or Rp23.56 billion compared to 2018 at Rp44.67 billion.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT**Rencana Pengembangan**

Guna meningkatkan pendapatan dari pinjaman yang diberikan dapat difokuskan pada dua hal yang menjadi kontributornya yakni sebagai berikut:

1. Program R/R

Perusahaan akan memaksimalkan pelaksanaan implementasi program restrukturisasi secara menyeluruh pada masing-masing BUMN yang ditugaskan sesuai dengan kajian awal yang disampaikan atau juga melihat kondisi terkini. Potensi pelaksanaan kegiatan R/R BUMN, secara umum dapat direpresentasikan oleh jumlah BUMN yang mengalami kerugian.

2. Peningkatan Kinerja entitas anak, PT PPA Finance

Strategi yang akan dilakukan pada tahun 2020 untuk mencapai sasaran pada PPAF dapat digambarkan sebagai berikut:

Development Plan

In order to increase loan receivables, the focus will be on the two things as contributors, as follows:

1. R/R Program

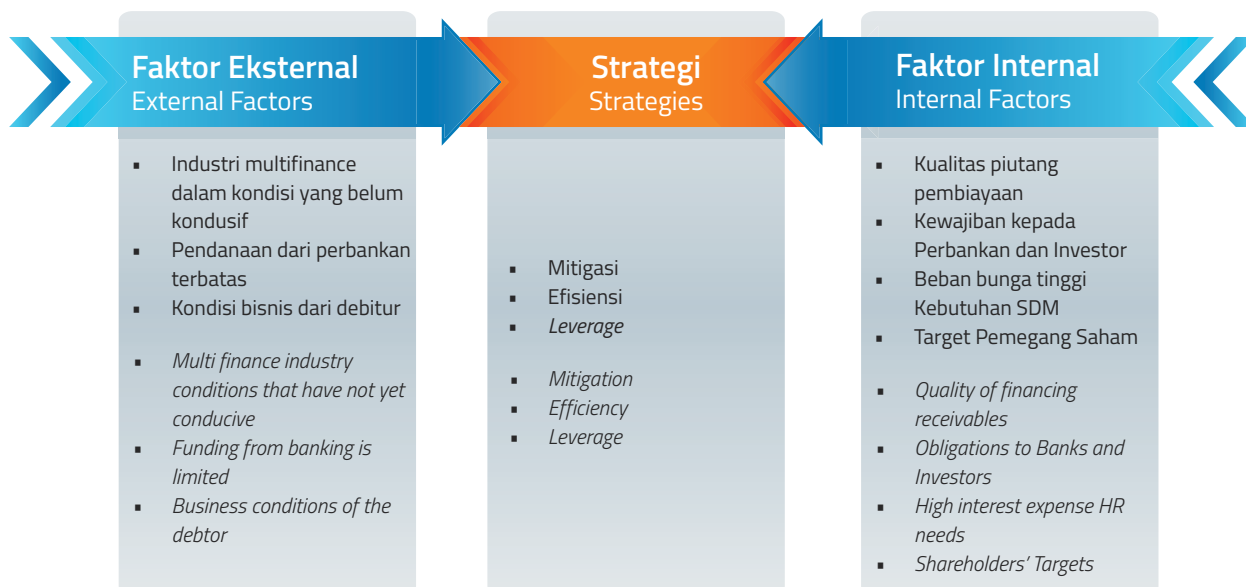
The Company will maximize the implementation of overall restructuring program for each assigned SOEs in accordance with the initial study submitted or also taken into account the latest conditions. The potential of SOEs R/R activities, in general, can be represented by the number of SOEs that have suffered losses.

2. Performance improvement of a subsidiary, PT PPA Finance

The strategy to be carried out in 2020 to achieve PPAF's goals can be described as follows:

Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Strategi Inisiatif

External and Internal Factors Influencing the Initiative Strategy



Dengan mempertimbangkan kondisi faktor eksternal dan kondisi faktor internal, strategi tahun 2020 dibagi menjadi 3 (tiga) strategi utama yaitu mitigasi, efisiensi dan *leverage*. Mitigasi berkaitan dengan bagaimana perusahaan menjaga kualitas aset produktif dari mulai akuisisi sampai dengan pelunasan.

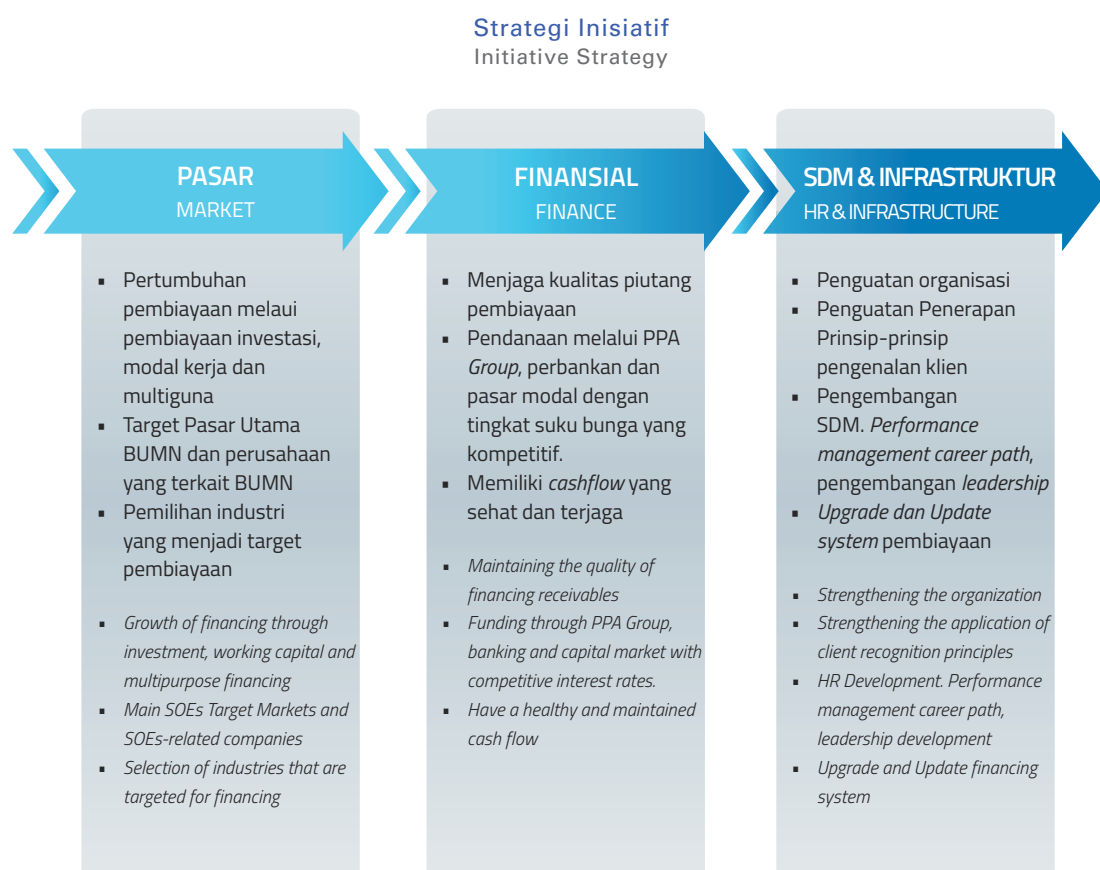
Efisiensi mencakup penggunaan sumber daya yang optimal untuk pelaksanaan setiap kegiatan perusahaan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. Sedangkan *leverage* terkait dengan strategi perusahaan untuk terus tumbuh secara berkelanjutan.

Pada tahun 2020, strategi inisiatif dibagi kedalam 3 aspek yaitu aspek pasar, aspek finansial dan aspek sumber daya manusia dan infrastruktur. Adapun strategi inisiatif tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

With due observance to the conditions of external factors and conditions of internal factors, the 2020 strategy is divided into 3 (three) main strategies namely mitigation, efficiency and leverage. Mitigation relates to how the company maintain the quality of productive assets from the beginning of an acquisition to repayment.

Efficiency includes the optimal use of resources for the implementation of each company's activities in order to achieve the goals and targets set. While leverage is related to the company's strategy to continue to grow sustainably.

In 2020, the initiative strategy was divided into 3 aspects namely market aspect, financial aspect and human resources and infrastructure aspect. The initiative strategy can be described as follows:



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

PENDAPATAN DARI IMBALAN JASA KONSULTASI

Kegiatan yang Dilakukan pada Imbalan Jasa Konsultasi

Program kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan terkait dengan jasa konsultasi adalah kegiatan pemberian jasa konsultasi yang meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Konsultasi bisnis dan keuangan (*Business & Financial Advisory*) kepada BUMN, Entitas Anak BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah, Lembaga/Instansi dan Swasta di antaranya aktivitas *Due Diligence*, pembuatan *Business Plan*, *Merger & Acquisitions*, *Business Valuation & Financial Modeling*, *Feasibility Study*, Penyusunan Standar Operasi & Prosedur ("SOP"), Restrukturisasi Utang, *Sustainability Services* dan *Financial Arranger*.
2. Pengelolaan Aset (*Asset Management*) kepada BUMN, Entitas Anak BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, Lembaga/Instansi dan Swasta diantaranya kegiatan Penjualan dan/atau pendayagunaan aset, Pemberian jasa *Asset Mapping*, Pemberian jasa *Asset Profiling* dan Pemberian jasa *Asset Development*.

Di bidang jasa konsultasi, Perusahaan terus mengembangkan diri dengan memperbanyak kerja sama dengan berbagai pihak sebagaimana direncanakan pada RJPP. Perusahaan telah menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak baik BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah. Sampai saat ini Perusahaan telah memberikan jasa konsultasi ke beberapa BUMN, antara lain PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan entitas anak BUMN seperti PT Pupuk Kujang Cikampek. Adapun pendapatan dari imbalan jasa konsultasi didapat dari pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi tahun 2019 yang diperoleh dari:

1. PT Wisarada Sarana Aviati;
2. PT Ade Textile Industries;
3. PT Gasuma Federal Indonesia;
4. PT Varia Intra Finance;
5. PT Lintas Samudera Sejahtera;
6. PT Pupuk Kujang;
7. PT Bina Patria Transmitta;
8. PT Polytama Propindo;
9. PT Bintang Abadi Sempurna;
10. Lain-lain.

ADVISORY SERVICE REVENUES

Activities Undertaken in Advisory Service

The activity programs carried out by the Company related to advisory service are the activities of providing advisory service which include but are not limited to:

1. Business & Financial Advisory to SOEs, SOEs Subsidiaries, Regional-Owned Enterprises (ROEs), Regional Governments, Institutions/Agencies and Private sector including Due Diligence activities, making Business Plan, Merger & Acquisition, Business Valuation & Financial Modeling, Feasibility Study, Preparation of Operating Standards & Procedures ("SOP"), Debt Restructuring, Sustainability Services and Financial Arranger.
2. Asset Management for SOEs, SOEs Subsidiaries, ROEs, Regional Governments, Institutions and Agencies including Private Sales and/or Utilization of assets, Asset Mapping services, Asset Profiling services and Asset Development services.

In the advisory service, the Company continues to develop itself by increasing cooperation with various parties as planned at RJPP. The Company has explored cooperation with a number of parties, including SOEs, ROEs, Regional Governments and Government Institutions. Until now the Company has provided advisory service to several SOEs, including PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, and SOEs subsidiaries such as PT Pupuk Kujang Cikampek. Advisory service revenues is obtained from the implementation of advisory service activities in 2019 for :

1. PT Wisarada Sarana Aviati;
2. PT Ade Textile Industries;
3. PT Gasuma Federal Indonesia;
4. PT Varia Intra Finance;
5. PT Lintas Samudera Sejahtera;
6. PT Pupuk Kujang;
7. PT Bina Patria Transmitta;
8. PT Polytama Propindo;
9. PT Bintang Abadi Sempurna;
10. Others.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Imbalan Jasa Konsultasi

Profitabilitas Imbalan Jasa Konsultasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Advisory Service Financial Performance and Profitability

Advisory Service Profitability can be seen in the table below.

Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi
Consulting Services Rewards Revenue

	Realisasi 2019 (Rp-juta) 2019 Realization Rp-million)	Realisasi 2018 (Rp-juta) 2018 Realization (Rp-million)	Target 2019 (Rp-juta) 2019 Target (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Terhadap 2018 (%) Increase (Decrease) against 2018 (%)	Pencapaian Target 2019 (%) 2019 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)	(1/3)
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi Advisory Service Revenues	60.432	41.745	7.050	44,76% 	857,19% 

Realisasi pendapatan imbalan jasa konsultasi di tahun 2019 mengalami kenaikan 44,76% atau setara dengan Rp18,68 miliar dari Rp41,75 miliar di tahun 2018 menjadi Rp60,43 miliar. Pendapatan jasa konsultasi utamanya berasal dari PT Wisarada Sarana Aviase sebesar Rp14,11 miliar, PT Ade Textile Industries sebesar Rp9,38 miliar, pendapatan *management fee* PT Gasuma Federal Indonesia sebesar Rp12,80 miliar, dan PT Varia Intra Finance sebesar Rp5,60 miliar, dan imbalan jasa dari PT Lintas Samudera Sejahtera tercatat sebesar Rp1,33 miliar.

The realization of advisory service revenues in 2019 increased by 44.76% or Rp18.68 billion from Rp41.75 billion in 2018 to Rp60.43 billion. Advisory service revenues mainly came from PT Wisarada Sarana Aviase amounted to Rp14.11 billion, and PT Ade Textile Industries amounted to Rp9.38 billion, the management fee of PT Gasuma Federal Indonesia amounted to Rp12.80 billion, and PT Varia Intra Finance amounted to Rp5.60 billion, and service fee from PT Lintas Samudera Sejahtera amounted to Rp1.33 billion.

Rencana Pengembangan

Beberapa rencana pengembangan jasa konsultasi adalah:

1. Konsultasi bisnis & keuangan (*Business & Financial Advisory*) kepada BUMN, Entitas Anak BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, Lembaga/Instansi dan Swasta dengan target potensial *client* BUMN dan perbankan nasional.
2. Pengelolaan Aset (*Asset Management*) kepada BUMN, Entitas Anak BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, Lembaga/Instansi dan Swasta.

Development Plan

Several development plans for advisory service are:

1. Business & Financial Advisory to SOEs, SOEs Subsidiaries, ROEs, Regional Governments, Institutions/Agencies and Private Sector targeting potential SOEs clients and national banks.
2. Asset Management to SOEs, SOEs Subsidiaries, ROEs, Regional Governments, Institutions/Agencies and Private Sector.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

PENDAPATAN DARI PENGGANTIAN BIAYA

Kegiatan yang Dilakukan dari Pendapatan Penggantian Biaya

Penggantian Biaya merupakan pendapatan yang muncul sebagai dampak dari pengelolaan usaha segmen-segmen seperti yang telah dijelaskan di atas.

Pendapatan Penggantian Biaya berasal dari sewa-sewa dan, jasa Teknologi Informasi dari pelanggan Perusahaan yang lebih dulu ditalangi oleh Perusahaan.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Penggantian Biaya

Profitabilitas Penggantian Biaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

REVENUES FROM REIMBURSABLE COSTS

Activities Undertaken in Reimbursable Costs

Reimbursable costs represent revenue that arises as a result of the management of business segments as explained above.

The revenues from reimbursable costs are derived from leases and Information Technology services from Company's customers which are previously bailed out by the Company.

Reimbursable Costs Financial Performance and Profitability

Reimbursable Costs Profitability can be seen in the table below.

Pendapatan dari Penggantian Biaya
Revenues from Reimbursable Costs

	Realisasi 2019 (Rp-juta) 2019 Realization (Rp-million)	Realisasi 2018 (Rp-juta) 2018 Realization (Rp-million)	Target 2019 (Rp-juta) 2019 Target (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Terhadap 2018 (%) Increase (Decrease) against 2018 (%)	Pencapaian Target 2019 (%) 2019 Target Achievement (%)
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)	(1/3)
Pendapatan Penggantian Biaya Revenues from Reimbursable Costs	4.997	878	5.080	469,13% 	98,37% 

Realisasi pendapatan penggantian biaya di tahun 2019 tercatat sebesar Rp4,99 miliar mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 469,13% atau setara dengan Rp4,12 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp878 juta. Peningkatan pendapatan penggantian biaya antara lain berasal dari penggantian biaya entitas anak, PPAF sebesar Rp1,04 miliar, penggantian biaya PT Pratama Persada Airborne sebesar Rp527 juta, penggantian biaya entitas anak, PPAK sebesar Rp593,56 juta, penggantian biaya PT KKA sebesar Rp146,57 juta dan penggantian biaya PT MNA sebesar Rp139,99 juta.

Rencana Pengembangan

Pengembangan bisnis dari Penggantian Biaya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan pelayanan *shared services*;
2. Penggantian biaya lainnya.

The realization of revenues from reimbursable costs in 2019 was recorded at Rp4.99 billion, experiencing a significant increase of 469.13% or Rp4.12 billion compared to 2018 of Rp878 million. The increase in revenues from reimbursable costs is among others originated from the reimbursable cost of a subsidiary, PPAF amounted to Rp1.04 billion, reimbursable costs of PT Pratama Persada Airborne amounted to Rp527 million, reimbursable costs of a subsidiary, PPAK amounted to Rp593.56 million, reimbursable costs of PT KKA amounted to Rp146.57 million and reimbursable costs of PT MNA amounted to Rp139.99 million.

Development Plan

Business Development of Reimbursable Costs is as follows:

1. Revenue from shared services;
2. Other reimbursable costs.

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

STRATEGI PEMASARAN

Sepanjang tahun 2019, Perusahaan meluncurkan berbagai strategi pemasaran untuk meningkatkan *brand awareness* dengan cara menanamkan pemahaman publik akan kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan. Selain itu, Perusahaan secara aktif menjalin hubungan dengan *potential customer* dalam rangka memperluas jangkauan pasar. Sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang pengelolaan aset, Perusahaan selalu berusaha untuk memperluas akses sumber-sumber pendanaan termasuk membangun hubungan kerja sama yang strategis dengan BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah dan Swasta untuk memperlancar kegiatan bisnis yang sudah dan akan dikembangkan oleh Perusahaan.

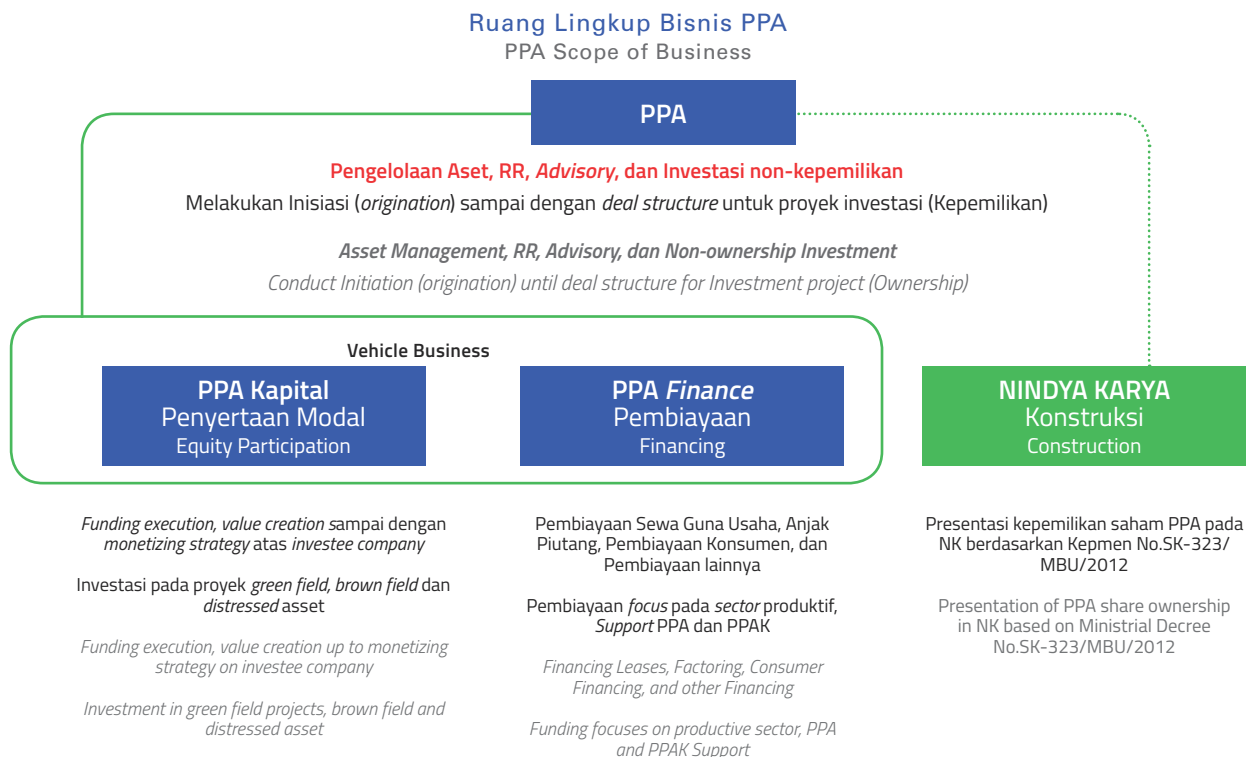
Walaupun segmen pengelolaan aset adalah salah satu lini utama bisnis Perusahaan, namun Perusahaan juga selalu mengutamakan perkembangan segmen-segmen usaha lainnya seperti segmen konsultansi, kegiatan R/R, serta investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperkuat basis usaha Perusahaan di masa mendatang. Adapun ruang lingkup bisnis yang telah dipasarkan adalah sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

MARKETING STRATEGY

Throughout 2019, the Company launched various marketing strategies to increase brand awareness by instilling public understanding on business activities carried out by the Company. In addition, the Company actively established relationships with potential customers to expand market reach. As a business player engaged in asset management, the Company always strives to expand access to funding sources, including building strategic cooperative relationships with SOEs, SOEs, Government and Private Agencies to expedite business activities that have been and will be developed by the Company.

Although the asset management segment is one of the core businesses of the Company, the Company also put forward the development of other business segments such as advisory, R/R, as well as short-term and long-term investments to strengthen the Company's business foundation in the future. The business scope that has been marketed is as shown in the figure below.

In carrying out its activities, the Company has a

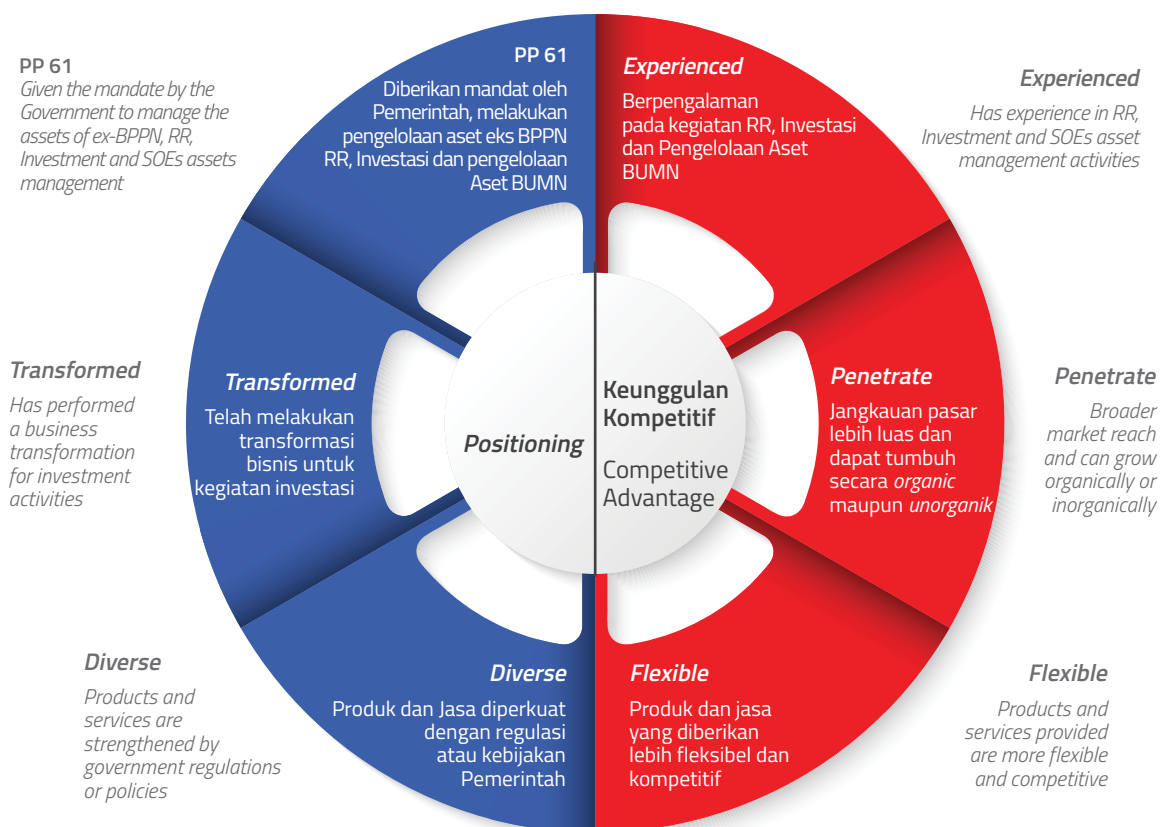


Dalam menjalankan aktivitasnya, Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya, dimana Perusahaan adalah satu-satunya BUMN yang mendapatkan penugasan dari Kementerian BUMN untuk melaksanakan program restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. Dengan kompetensi tersebut akan menjadi keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan klien potensial baik dari pemerintahan, BUMN, BUMD maupun swasta.

competitive advantage compared to its competitors, where the Company is the only SOEs that has been assigned by the Ministry of SOEs to carry out the restructuring and revitalization program of SOEs. This competency will be an advantage that can be utilized to obtain potential clients both from government, SOEs, ROEs and private.

Posisi Dan Keunggulan Kompetitif PPA

PPA Positioning and Competitive Advantage



PANGSA PASAR

Secara umum posisi Perusahaan dalam industri dapat digambarkan dengan menggunakan *industry matrix*. Dalam menyusun *industry matrix* ini, terlebih dahulu ditentukan faktor kunci sukses (*key success factors*) yaitu variabel-variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap posisi perusahaan dibandingkan pesaing dalam suatu industri.

Dalam hal ini yang menjadi faktor sukses kritis adalah i) produk, ii) kualitas, iii) akses pendanaan, iv) *credentials*, v) regulasi dan vi) manajemen (SDM). Faktor kunci kritis selanjutnya digunakan untuk menilai kinerja di bidang investasi, pengelolaan aset dan jasa *advisory*.

Masing-masing faktor tersebut diberikan bobot dengan total 1,00. Selanjutnya masing-masing bobot diberikan peringkat dengan skala sebagai berikut:

- Nilai 1 = Kurang
- Nilai 2 = Dibawah rata-rata
- Nilai 3 = Rata-rata
- Nilai 4 = Diatas rata-rata
- Nilai 5 = Jauh diatas rata-rata

Berdasarkan hasil analisis terbatas, maka diperoleh hasil pemeringkatan *industry matrix* Perusahaan dibandingkan dengan BUMN lain maupun perusahaan anak BUMN yang memiliki bidang usaha yang sejenis atau mendekati adalah sebagai berikut:

MARKET SHARE

In general, the Company's position in the industry can be described using the industry matrix. In compiling this industry matrix, key success factors are determined first, i.e. variables that significantly influence the company's position compared to competitors in an industry.

In this case, the key success factors are i) products, ii) quality, iii) access to funding, iv) *credentials*, v) regulation and vi) management (HR). The critical key factors are then used to assess performance in the fields of investment, asset management and advisory services. Each of these factors is given a total weight of 1.00. Furthermore, each weight is given a rating with the scale as follows:

- Score 1 = Fair
- Score 2 = Below average
- Score 3 = Average
- Value 4 = Above average
- Score 5 = Far above average

Based on the results of a limited analysis, the Company's industry matrix ranking compared to other SOEs and SOEs subsidiaries that have similar or alike lines of business are as follows:

Matrik Industri PT PPA
PT PPA Industrial Matrix

	Bobot Weight	PPA	Bahana	Mandiri Sekuritas	Danareksa
Produk Product	0,2	0,40	0,40	0,36	0,40
Kualitas Quality	0,2	0,95	0,90	0,80	1,00
Akses Pendanaan Access to Funding	0,1	0,34	0,34	0,40	0,34
<i>Credentials</i>	0,2	0,95	0,90	0,90	0,90
Regulasi Regulation	0,1	0,40	0,30	0,30	0,30
Manajemen (SDM) Management (HR)	0,2	0,60	0,60	0,60	0,60
	1,0	3,64	3,44	3,36	3,54

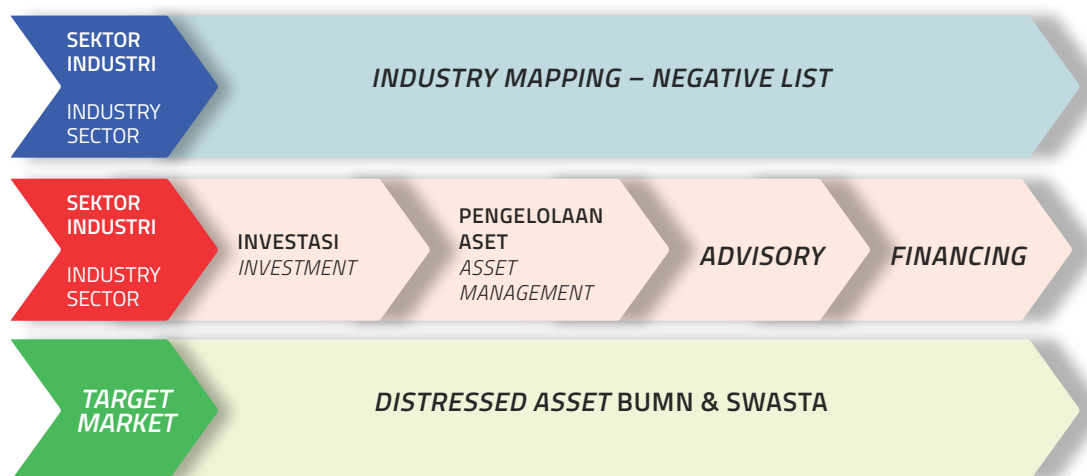
ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECT

Dalam industri jasa *advisory* dan *asset management*, Perusahaan memandang beberapa pelaku usaha dalam bidang jasa konsultan dan sekuritas sebagai kompetitor antara lain seperti PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Dengan tingkat kompetisi yang ketat, Perusahaan memposisikan diri sebagai jasa *advisory* dan *asset management* yang unik. Berbeda dengan kompetitornya, Perusahaan akan memanfaatkan jaringan yang dimiliki berupa akses ke pasar, mitra strategis dan pendanaan, sehingga dapat memberikan solusi yang menyeluruh bagi klien.

Target pasar yang akan dituju oleh Perusahaan adalah *distressed asset* yang dimiliki oleh BUMN dan swasta. Hal tersebut sesuai dengan *core competencies* Perusahaan di bidang restrukturisasi/revitalisasi. Dalam hal ini PT PPA bisa melakukan pengambilalihan *distressed asset*, pemberian *financing* ataupun memberikan jasa *advisory* dan pengelolaan *asset* ataupun kombinasinya.

In the advisory and asset management services industry, the Company observes several business players in the consulting and securities services business as competitors such as PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Danareksa Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas. With a high level of competition, the Company positions itself as a unique advisory and asset management service. Unlike its competitors, the Company will utilize its network in the form of access to market, strategic partners and funding, so as to provide a comprehensive solution for clients.

The market which is targeted by the Company is distressed assets owned by SOEs and private sector. This is in line with the Company's core competencies in restructuring/revitalization. In this case, PT PPA can take over distressed assets, provide financing or provide advisory and asset management services or their combinations.



Posisi Keuangan memberikan gambaran sekilas tentang kekuatan permodalan Perusahaan. Di tahun 2019, Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan sebesar Rp14,42 triliun, dengan komposisi terdiri dari Liabilitas sebesar 62,38% dan Ekuitas sebesar 37,62%.

Financial Position provides a glimpse of the Company's capital strength. In 2019, Total Liabilities and Equity of the Company amounted to Rp14.42 trillion, with a composition consisting of Liabilities of 62.38% and Equity of 37.62%.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan pasar modal yang berlaku.

INFORMATION PRESENTATION STANDARDS AND COMPATIBILITY TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The analysis and discussion of financial performance in this annual report refers to the Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2019 and December 31, 2018 which had been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners. The Company's Consolidated Financial Statements is prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Institute of Accountants and applicable capital market regulations.

KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2019 Dan 31 Desember 2018
Consolidated Statements Of Financial Position As Of December 31, 2019 And December 31, 2018

Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statements	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Aset Asset					
Aset Lancar Current Assets	8.671.359	7.280.098	1.391.261	19,11%	●
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	5.744.073	4.464.403	1.279.670	28,66%	●
Total Aset Total Assets	14.415.432	11.744.501	2.670.931	22,74%	●
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	7.101.679	5.440.230	1.661.449	30,54%	●
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	1.890.210	1.042.228	847.982	81,36%	●
Total Liabilitas Total Liabilities	8.991.889	6.482.458	2.509.430	38,71%	●
Total Ekuitas Total Equity	5.423.544	5.262.043	161.501	3,07%	●
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	14.415.433	11.744.501	2.670.931	22,74%	●

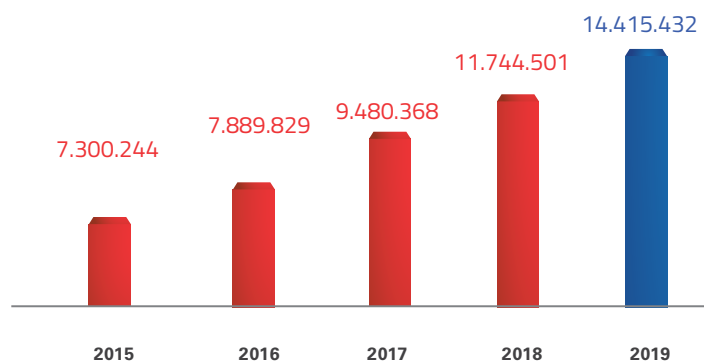
ASET

Total Aset Perusahaan per 31 Desember 2019 mencapai Rp14,42 triliun, mengalami peningkatan 22,74% dibandingkan Total Aset tahun 2018 sebesar Rp11,74 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2015-2019, Total Aset Perusahaan mengalami pertumbuhan 18,54%.

ASSETS

Total Assets of the Company as of December 31, 2019 reached Rp14.42 trillion, an increase of 22.74% compared to Total Assets in 2018 of Rp11.74 trillion. In the 2015-2019 Compound Annual Growth Rate (CAGR), the Company's Total Assets grew 18.54%.

Total Aset 2015-2019 (Rp-juta)
Total Assets 2015-2019 (Rp-million)



Total Aset 2018-2019 (Rp-juta)
Total Assets 2018-2019 (Rp-million)

Aset Assets	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Aset Lancar Current Assets	8.671.359	7.280.098	1.391.261	19,11%	●
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	5.744.073	4.464.403	1.279.670	28,66%	●
Total Aset Total Assets	14.415.432	11.744.501	2.670.931	22,74%	●

Kinerja Aset dipengaruhi oleh Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. Dibandingkan tahun 2018, Total Aset Lancar per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 19,11%, sedangkan Total Aset Tidak Lancar tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 28,66% sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Asset performance is influenced by Current Assets and Non-Current Assets. Compared to 2018, Total Current Assets as at December 31, 2019 increased by 19.11%, while Total Non-Current Assets increased by 28.66% as described below.

Aset Lancar**Current Assets**

Aset Lancar Current Assets	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.107.636	1.365.617	(257.981)	-18,89%	●
Pinjaman Investasi Jangka Pendek Short-term Investment Loans	1.445.630	445.264	1.000.366	224,67%	●
Aset Keuangan Diperdagangkan Held for Trading Financial Assets	70.260	81.220	(10.960)	-13,49%	●
Piutang Usaha Account Receivables	1.477.597	1.176.353	301.244	25,61%	●
Piutang Retensi Retention Receivables	170.121	166.823	3.298	1,98%	●
Piutang Ventura Bersama Konstruksi Joint Venture Construction Receivables	296.623	277.862	18.761	6,75%	●
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Loan Receivables - Bailout Funds	223.046	215.581	7.465	3,46%	●
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Gross Amount Due from Customers	2.418.106	2.218.365	199.741	9,00%	●
Persediaan Inventories	216.340	154.278	62.062	40,23%	●
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka Advances and Prepaid Expenses	102.187	154.751	(52.564)	-33,97%	●
Pajak Dibayar Di Muka Prepaid Taxes	812.576	691.610	120.966	17,49%	●
Cessie Piutang Jangka Pendek Cessie Short-term Receivables	282.099	288.602	(6.503)	-2,25%	●
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	49.138	43.772	5.366	12,26%	●
JUMLAH ASET LANCAR TOTAL CURRENT ASSETS	8.671.359	7.280.098	1.391.261	19,11%	●

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

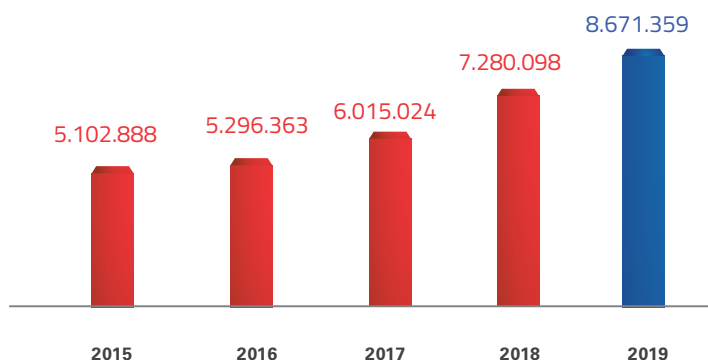
Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp8,67 triliun, meningkat 19,11% atau setara dengan Rp1,39 triliun dibandingkan Jumlah Aset Lancar tahun 2018 sebesar Rp7,28 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan pinjaman investasi jangka pendek yang naik signifikan, seperti yang akan dijelaskan berikutnya.

Total Current Assets as of December 31, 2019 amounted to Rp8.67 trillion, an increase of 19.11% or Rp1.39 trillion compared to total Current Assets in 2018 of Rp7.28 trillion. This increase was mainly due to short-term investment loans that rose significantly, as will be explained later.

Perkembangan Jumlah Aset Lancar Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of the Company's Total Current Assets can be seen in the chart below.

Aset Lancar 2015-2019 (Rp-juta)
Current Assets 2015-2019 (Rp-million)



Kas dan Setara Kas

Realisasi kas dan setara kas Perusahaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1,12 triliun mengalami penurunan 18,89% atau setara dengan Rp257,98 miliar dari tahun 2018 yang sebesar Rp1,37 triliun. Hal ini disebabkan menurunnya jumlah deposito berjangka pada bank pihak ketiga sebesar 51,80% atau setara dengan Rp318,08 miliar dari Rp614,04 miliar di tahun 2018 menjadi Rp295,96 miliar di tahun 2019.

Cash and Cash Equivalents

The realization of the Company's cash and cash equivalents as of December 31, 2019 amounting to Rp1.12 trillion decreased by 18.89% or Rp257.98 billion from 2018 of Rp1.37 trillion. This was due to a decrease in the amount of time deposits at third party banks by 51.80% or Rp318.08 billion from Rp614.04 billion in 2018 to Rp295.96 billion in 2019.

Pinjaman Investasi Jangka Pendek

Pinjaman investasi jangka pendek per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp1,44 triliun mengalami kenaikan 224,67% atau setara dengan Rp1,00 triliun dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp445,26 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena jumlah pokok pinjaman investasi naik signifikan sebesar 222,96% atau setara dengan Rp985,64 miliar dari Rp442,07 miliar di tahun 2018 menjadi Rp1,43 triliun di tahun 2019.

Short-term Investment Loans

Short-term investment loans as of December 31, 2019 were recorded at Rp1.44 trillion, an increase of 224.67% or Rp1.00 trillion compared to 2018 of Rp445.26 billion. This increase was due to the significant increase of the principal amount of investment loans by 222.96% or Rp.985.64 billion from Rp442.07 billion in 2018 to Rp1.43 trillion in 2019.

Aset Keuangan Diperdagangkan

Aset keuangan diperdagangkan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp70,26 miliar mengalami penurunan 13,49% atau setara dengan Rp10,96 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp81,22 miliar. Penurunan aset keuangan diperdagangkan disebabkan pada bulan April 2019, Perusahaan menjual semua sisa saham *trading* sehingga posisi per 30 April 2019, stok saham *trading* Perusahaan nihil. Adapun rincian penjualan pada tanggal 4 April 2019 yaitu saham PT Bank Pan Indonesia Tbk sebanyak 28 lembar dengan harga penjualan Rp35.840 dengan *profit* Rp5.320; dan saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 112 lembar dengan harga penjualan Rp1.475.600 dengan *profit* Rp187.600. Sementara pada tanggal 25 April 2019, Perusahaan menjual saham PT Waskita Beton Precast Tbk sebanyak 750.000 lembar dengan harga penjualan Rp309 juta dengan *profit* Rp28 juta. Total keuntungan dari semua penjualan saham di tahun 2019 sebesar Rp517 juta. Adapun saldo sampai dengan posisi 31 Desember 2019 adalah nihil.

Piutang Usaha

Piutang usaha per 31 Desember 2019 tercatat naik sebesar 25,61% atau setara dengan Rp301,24 miliar dari Rp1,18 triliun di tahun 2018 menjadi Rp1,48 triliun di tahun 2019. Cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pada 2019 adalah sebesar Rp103,9 miliar, turun 2,46% dari saldo tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh adanya pemulihan cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai pada tahun berjalan sebesar Rp25,28 miliar. Di sisi lain Manajemen mencadangkan penyisihan kerugian nilai baru sebesar Rp22,66 miliar pada tahun 2019. Kenaikan ini disebabkan oleh jumlah piutang pihak ketiga yang mengalami kenaikan sebesar 18,77% atau setara dengan Rp185,58 miliar dari Rp988,69 miliar di tahun 2018 menjadi Rp1,17 triliun di tahun 2019.

Held for Trading Financial Assets

Held for Trading Financial Assets were recorded at Rp70.26 billion as of December 31, 2019, experiencing a decrease of 13.49% or Rp10.96 billion compared to 2018 of Rp81.22 billion. The decreased held for trading financial assets occurred because in April 2019, the Company sold all the remaining trading shares so that as of April 30, 2019, its trading shares were zero. The details of the sales on April 4, 2019 were the shares of PT Bank Pan Indonesia Tbk totaling 28 shares with a selling price of Rp35,840 and a profit of Rp5,320; and PT Semen Indonesia (Persero) Tbk totaling 112 shares with a selling price of Rp1,475,600 and a profit of Rp187,600. While on April 25, 2019, the Company sold 750,000 shares of PT Waskita Beton Precast Tbk at a selling price of Rp309 million and a profit of Rp28 million. Total profits from all sales of shares in 2019 amounted to Rp517 million. The balance up to the December 31, 2019 position was zero.

Account Receivables

Account receivables as at December 31, 2019 recorded an increase of 25.61% or Rp301.24 billion from Rp1.18 trillion in 2018 to Rp1.48 trillion in 2019. This increase was due to the number of third party receivables that increased by 18.77% or Rp185.58 billion from Rp988.69 billion in 2018 to Rp1.17 trillion in 2019. Allowance for impairment losses on receivables in 2019 amounted to Rp103.9 billion, down 2.46% from the balance in 2018. This was due to the recovery of allowance for possible losses impairment in the current year of Rp25.28 billion. On the other hand, the Management has set aside an allowance for new losses of Rp22.66 billion in 2019. This increase was due to the amount of third party receivables which increased by 18.77% or Rp185.58 billion, from Rp988.69 billion in 2018 to Rp1.17 trillion in 2019.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**Piutang Retensi**

Piutang retensi merupakan piutang Perusahaan dan entitas anak kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk di tahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

Per 31 Desember 2019, nilai Piutang Retensi bersih setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai tercatat sebesar Rp170,12 miliar, mengalami kenaikan 1,98% atau setara dengan Rp3,30 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp166,82 miliar. Kenaikan piutang retensi disebabkan karenak adanya peningkatan pada piutang retensi pihak berelasi sebesar 5,99% atau setara dengan Rp3,89 miliar dari Rp65,09 miliar di tahun 2018 menjadi Rp68,98 miliar di tahun 2019.

Piutang Ventura Bersama Konstruksi

Piutang ventura bersama konstruksi merupakan piutang kepada ventura bersama atau *joint venture* (JV) untuk pembelian material, biaya bank, *overhead*, dan lain-lain yang dikeluarkan untuk kepentingan ventura bersama.

Per 31 Desember 2019, piutang ventura bersama konstruksi sebesar Rp296,62 miliar mengalami kenaikan 6,75% atau setara dengan Rp18,76 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp277,86 miliar. Kenaikan ini lebih disebabkan adanya peningkatan piutang dari Kerja Sama Operasi (KSO) Nindya – Adhi Karya sebesar 877,82% atau setara dengan Rp36,69 miliar dari Rp4,18 miliar di tahun 2018 menjadi Rp40,87 miliar di tahun 2019.

Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan

Pinjaman yang diberikan - dana talangan, setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, mengalami kenaikan 3,46% atau setara dengan Rp7,46 miliar, dari Rp215,58 miliar di tahun 2018 menjadi Rp223,05 di tahun 2019. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah pokok pinjaman dana talangan sebesar 26,79% atau setara dengan Rp78,70 miliar, dari Rp293,82 miliar di tahun 2018 menjadi Rp372,51 miliar di tahun 2019.

Retention Receivables

Retention receivables are receivables of the Company and subsidiaries to customers to be paid after the completion of a contract or fulfillment of the conditions specified in a contract. Retention receivables are recorded when deducting a certain percentage of each term bill to be held by customers until a condition after the completion of a contract is fulfilled.

As of December 31, 2019, the value of net Retention Receivables after deducting the allowance for impairment losses was recorded at Rp170.12 billion, an increase of 1.98% or Rp3.30 billion compared to 2018 of to Rp166.82 billion. The increase in retention receivables was driven by a 5.99% or Rp3.89 billion increase in related party retention receivables, from Rp65.09 billion in 2018 to Rp68.98 billion in 2019.

Joint Venture Construction Receivables

Joint venture construction receivables are receivables from joint ventures (JV) for the purchase of materials, bank fees, overhead, and others incurred for the benefit of joint ventures.

As of December 31, 2019, joint venture receivables construction amounting to Rp296.62 billion, increased by 6.75% or Rp18.76 billion compared to 2018 of Rp277.86 billion. This increase was caused by an increase in receivables from the Joint Operations (KSO) Nindya - Adhi Karya by 877.82% or Rp36.69 billion, from Rp4.18 billion in 2018 to Rp40.87 billion in 2019.

Loan Receivables - Bailout Funds

Loan Receivables – bailout funds, after deducted by the Allowance for Impairment Losses experienced an increase of 3.46% or Rp7.46 billion, from Rp215.58 billion in 2018 to Rp223.05 in 2019. This increase was driven by a 26.79% or Rp78.70 billion increase in the amount of principal bailout loans, from Rp293.82 billion in 2018 to Rp372.51 billion in 2019.

Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Perusahaan dan entitas anak yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Per 31 Desember 2019, tagihan bruto kepada pemberi kerja tercatat sebesar Rp2,42 triliun mengalami peningkatan 9,00% atau setara dengan Rp199,74 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp2,22 triliun. Kenaikan ini lebih disebabkan oleh meningkatnya jumlah saldo tagihan bruto pada pihak ketiga sebesar 22,39% atau setara dengan Rp370,26 miliar dari Rp1,65 triliun di tahun 2018 menjadi Rp2,02 triliun di tahun 2019.

Persediaan

Persediaan terdiri atas persediaan bahan konstruksi dan persediaan *dolomit*, dimana jumlah persediaan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 40,23% atau setara dengan Rp62,06 miliar, dari Rp154,28 miliar di tahun 2018 menjadi Rp216,34 miliar di tahun 2019. Kenaikan tersebut terjadi karena meningkatnya persediaan bahan konstruksi dan persediaan *dolomit*, masing-masing sebesar 40,41% dan 39,61%.

Berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada 31 Desember 2019, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa atas bahan persediaan tersebut tidak terjadi penurunan nilai, sehingga manajemen tidak membentuk penyisihan persediaan.

Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang muka dan biaya dibayar di muka terdiri atas uang muka pihak ketiga yang merupakan uang muka kepada *supplier* dan subkontraktor. Sementara biaya dibayar di muka merupakan biaya untuk sewa gedung dan asuransi. Per 31 Desember 2019, jumlah uang muka dan biaya dibayar di muka mengalami penurunan 33,97% atau setara dengan Rp52,56 miliar, dari Rp154,75 miliar di tahun 2018 menjadi Rp102,18 miliar di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya uang muka pihak ketiga sebesar 59,69% atau setara dengan Rp82,38 miliar dari yang pada tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp138,02 miliar menjadi Rp55,64 miliar di tahun 2019.

Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar di muka terdiri dari pajak Perusahaan dan pajak entitas anak, dimana jumlah pajak dibayar di muka per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp812,58 miliar, mengalami peningkatan 17,49% atau setara dengan Rp120,97 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp691,61 miliar.

Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represent receivables from the Company and subsidiaries that originate from construction contract works performed, but the works are still in progress. As of December 31, 2019, gross amount due to customers were recorded at Rp2.42 trillion, an increase of 9.00% or Rp199.74 billion compared to 2018 at Rp2.22 trillion. This increase was due to an increase in the gross amount due from third parties by 22.39% or Rp370.26 billion, from Rp1.65 trillion in 2018 to Rp2.02 trillion in 2019.

Inventories

Inventories consist of supplies of construction materials and dolomite inventories, where the amount of supplies as of December 31, 2019 increased by 40.23% or Rp62.06 billion, from Rp154.28 billion in 2018 to Rp216.34 billion in 2019. The increase occurred due to an increase in the supply of construction materials and dolomite supplies, respectively by 40.41% and 39.61%.

Based on a review of the condition of inventories as at December 31, 2019, the Company's management believes that the inventories did not decline in value, so that the management does not set aside allowance for inventory.

Advances and Prepaid Expenses

Advances and prepaid expenses consist of advances for third parties and represent advances to suppliers and subcontractors. While prepaid expenses are costs for building rent and insurance. As of December 31, 2019, the amount of advances and prepaid expenses decreased by 33.97% or Rp52.56 billion, from Rp154.75 billion in 2018 to Rp102.18 billion in 2019. This decrease was due to a 59.69% or Rp82.38 billion decrease in advances for third parties, from the previous year of Rp138.02 billion to Rp55.64 billion in 2019.

Prepaid Taxes

Prepaid taxes consist of taxes of the Company and subsidiaries, in which total prepaid taxes as at December 31, 2019 were recorded at Rp812.58 billion, an increase of 17.49% or Rp120.97 billion compared to 2018 which amounted to Rp691.61 billion.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**Cessie Piutang Jangka Pendek**

Cessie piutang jangka pendek terdiri atas *cessie* piutang PT Batam Islands Marina yang merupakan ex debitur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan *cessie* piutang KPR ex debitur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Per 31 Desember 2019, jumlah *cessie* piutang jangka pendek tercatat sebesar Rp282,10 miliar, mengalami penurunan 2,25% atau setara dengan Rp6,51 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp288,61 miliar. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya *cessie* piutang KPR ex debitur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar 12,46% atau setara dengan Rp5,91 miliar, dari Rp47,45 miliar di tahun 2018 menjadi Rp41,54 miliar di tahun 2019. Selain itu, penyisihan penurunan nilai piutang di tahun 2019 mengalami kenaikan 32,17% atau setara dengan minus Rp0,59 miliar, dari minus Rp1,84 miliar di tahun 2018 menjadi minus Rp2,44 miliar di tahun 2019.

Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya terdiri dari piutang proyek yang merupakan tagihan kepada PT Manunggal Muara Palma (MMP) dari PT Nindya Karya, serta piutang talangan biaya BUMN yang merupakan piutang atas restrukturisasi/revitalisasi BUMN, dan aset lancar lain-lain. Jumlah aset lancar lainnya setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang untuk tahun 2019 tercatat sebesar Rp49,14 miliar, mengalami kenaikan 12,26% atau setara dengan Rp5,37 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp43,77 miliar. Peningkatan terjadi pada piutang talangan biaya BUMN, dan aset lancar lain-lain yang masing-masing naik sebesar 12,02% dan 26,19%.

Cessie Short-term Receivables

Cessie short-term receivables consist of *cessie* receivables of PT Batam Islands Marina as an ex-debtor of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and *cessie* mortgage receivables of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

As of December 31, 2019, total *cessie* short-term receivables was recorded at Rp282.10 billion, a decrease of 2.25% or Rp6.51 billion compared to 2018 at Rp288.61 billion. This decrease was due to a decrease in the ex-debtor mortgage receivables of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by 12.46% or Rp5.91 billion, from Rp47.45 billion in 2018 to Rp41.54 billion in 2019. In addition, the allowance for impairment of receivables in 2019 increased by 32.17% or minus Rp0.59 billion, from minus Rp1.84 billion in 2018 to minus Rp2.44 billion in 2019.

Other Current Assets

Other current assets consist of project receivables which are claims to PT Manunggal Muara Palma (MMP) from PT Nindya Karya, as well as SOEs bailout receivables which are receivables from restructuring/revitalizing of SOEs, and other current assets. Total other current assets, net of allowance for impairment of receivables for 2019, was recorded at Rp49.14 billion, an increase of 12.26% or Rp5.37 billion compared to 2018 at Rp43.77 billion. The increase occurred in SOEs bailout receivables and other current assets, which respectively increased by 12.02% and 26.19%.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Available-for-Sale Financial Assets	40.296	95.989	(55.693)	-58,02%	●
Pinjaman yang Diberikan - R/R Loan Receivables - R/R	1.416.472	1.388.273	28.199	2,03%	●
Pinjaman Investasi Jangka Panjang Long-term Investment Loans	299.854	265.053	34.801	13,13%	●
Properti Investasi Investment Property	865.583	786.809	78.774	10,01%	●
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	42.066	25.569	16.497	64,52%	●
Uang Muka Investasi Investment Advances	-	6.250	-	-	-
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Ventures	321.808	336.085	(14.277)	-4,25%	●
Piutang Lain-lain Other Receivables	238	-	238	-	-
Investasi Jangka Panjang Lainnya Other Long-term Investments	102.940	138.053	(35.113)	-25,43%	●
Aset Tetap Fixed Assets	1.556.796	1.068.044	488.752	45,76%	●
Goodwill	370.257	-	370.257	-	-
Cessie Piutang Jangka Panjang Cessie Long-term Receivables	283.493	-	283.493	-	-
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-current As	444.270	354.278	89.992	25,40%	●
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR TOTAL NON-CURRENT ASSETS	5.744.073	4.464.403	1.279.670	28,66%	●

Jumlah Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp5,74 triliun, meningkat 28,66% atau setara dengan Rp1,28 triliun dibandingkan Jumlah Aset Tidak Lancar tahun 2018 sebesar Rp4,64 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya *Goodwill* dan *Cessie Jangka Panjang* yang belum ada di tahun sebelumnya, serta penambahan nilai aset tetap seperti yang akan dijelaskan berikutnya.

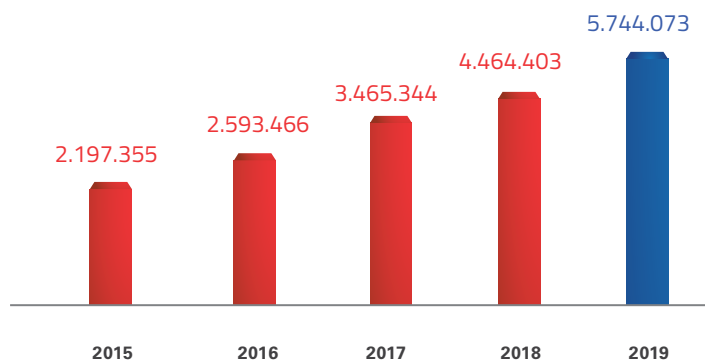
Total Non-current Assets as of December 31, 2019 was Rp5.74 trillion, an increase of 28.66% or Rp1.28 trillion compared to total Non-current Assets in 2018 of Rp4.64 trillion. This increase was mainly because the *Goodwill* and *Cessie long-term* did not exist in the previous year, and the addition of the value of fixed assets as will be explained later.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

Perkembangan Jumlah Aset Tidak Lancar Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of the Company's Non-current Assets can be seen in the chart below.

Aset Tidak Lancar 2015-2019 (Rp-juta)
Non-Current Assets 2015-2019 (Rp-million)



Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri atas saham dan investasi melalui *fund manager* Bahana TCW Investment Management, dengan jumlah nilai wajar di tahun 2019 tercatat sebesar Rp40,29 miliar, mengalami penurunan 58,02% atau setara dengan Rp55,69 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp95,99 miliar. Investasi pada saham di tahun 2019 dan 2018 merupakan investasi pada saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan jumlah sebesar 27.044.608 lembar saham.

Penurunan aset keuangan tersedia untuk dijual lebih disebabkan karena Perusahaan dan PT Bahana TCW Investment Management telah sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Pengelolaan portfolio Efek No. 010/BTIM-PPA/VIII/11 tanggal 25 Agustus 2012 yang terakhir dirubah melalui Addendum Ke tujuh Perjanjian Pengelolaan Portfolio Efek No.021/BTIMPPA/VIII/18 tanggal 24 Agustus 2018. Melalui surat No. S-3656/PPA/DU/0719 tanggal 22 Juli 2019 dan surat No.S-3894/PPA/DU/0719 tanggal 29 Juli 2019, Perusahaan telah memberitahukan perihal penyampaian Instruksi *Partial Redemption* dan *Full Redemption*.

Available-for-Sale Financial Assets

Available-for-sale financial assets consist of shares and investments through fund manager Bahana TCW Investment Management, with a fair value in 2019 recorded at Rp40.29 billion, a decrease of 58.02% or Rp55.69 billion compared to 2018 at Rp95.99 billion. Investment in shares in 2019 and 2018 are investments in shares of PT Waskita Karya (Persero) Tbk with a total of 27,044,608 shares.

The decrease in available-for-sale financial assets was due to the fact that the Company and PT Bahana TCW Investment Management have agreed to terminate the Securities Portfolio Management Agreement No. 010/BTIM-PPA/VIII/11 dated August 25, 2012, which the latest amended through the Seventh Addendum of Securities Portfolio Management Agreement No. 021/BTIMPPA/VIII/18 dated August 24, 2018. Through letter No. S-3656/PPA/DU/0719 dated July 22, 2019 and letter No.S-3894/PPA/DU/ 719 dated July 29, 2019, the Company has notified the submission of Partial Redemption and Full Redemption Instruction.

Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

Pinjaman yang diberikan - R/R terdiri dari pokok pinjaman dan piutang bunga pinjaman dana R/R, yang dikurangi penyisihan penurunan nilai pinjaman dan biaya perolehan yang belum diamortisasi. Jumlah pinjaman yang diberikan - R/R per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp1,42 triliun, mengalami peningkatan 2,03% atau setara dengan Rp28,20 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp1,39 triliun. Peningkatan ini disebabkan karena adanya pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman dan biaya perolehan yang belum diamortisasi dari minus Rp461,75 miliar di tahun 2018 hanya menjadi minus Rp349,12 miliar di tahun 2019.

Pinjaman Investasi Jangka Panjang

Pinjaman investasi jangka panjang per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp299,85 miliar, mengalami peningkatan 13,13% atau setara dengan Rp34,80 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp265,05 miliar. Kenaikan pinjaman investasi jangka panjang terutama disebabkan meningkatnya jumlah pokok pinjaman sebesar 13,70% atau setara dengan Rp37,11 miliar, dari Rp270,81 miliar di tahun 2018 menjadi Rp307,91 miliar. Salah satu faktor meningkatnya jumlah pokok pinjaman di tahun 2019 adalah pemberian pinjaman berupa fasilitas pembiayaan kepada PT Varia Intra Finance berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Fasilitas Pembiayaan No.86 tanggal 29 November 2019 dengan nilai sebesar Rp160,00 miliar dengan tingkat suku biaya pendanaan sebesar 14% per tahun (*gross*) yang jatuh tempo pokok pada tanggal 28 November 2021.

Properti Investasi

Properti investasi per 31 Desember 2019 tercatat Rp865,58 miliar, mengalami peningkatan sebesar 10,01% atau setara dengan Rp78,77 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp786,81 miliar. Akumulasi perubahan nilai wajar properti investasi setelah dievaluasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp313,11 miliar, dimana penambahan nilai wajar dicatat sebesar Rp41,53 miliar. Pada tahun 2019, Perusahaan juga telah melakukan reklasifikasi dari aset tetap dalam rangka penyelesaian properti investasi sebesar Rp37,46 miliar yang merupakan properti investasi atas tanah di Bontosunggu dan Majapahit, Mataram.

Loan Receivables - Restructuring and/or Revitalization

Loan receivables - R/R consist of the principal and interest receivables on R/R fund loans, deducted by allowance for impairment losses on loans and unamortized acquisition costs. Total loan receivables - R/R as at December 31, 2019 was recorded at Rp1.42 trillion, an increase of 2.03% or Rp28.20 billion compared to 2018 at Rp1.39 trillion. This increase was due to a decrease in the amount of allowance for impairment losses on loans and unamortized acquisition costs from minus Rp461.75 billion in 2018 to only minus Rp349.12 billion in 2019.

Long-term Investment Loans

Long-term investment loans as of December 31, 2019 were recorded at Rp299.85 billion, an increase of 13.13% or Rp34.80 billion compared to 2018 at Rp265.05 billion. The increase in long-term investment loans was mainly due to an increase in the principal amount by 13.70% or Rp37.11 billion, from Rp270.81 billion in 2018 to Rp307.91 billion. One of the factors increasing the principal amount in 2019 was the provision of loans in the form of financing facilities to PT Varia Intra Finance based on Financing Facility Loan Agreement No.86 dated November 29, 2019 with a value of Rp160.00 billion and a funding rate of 14% per year (*gross*) which is due on November 28, 2021.

Investment Property

As of December 31, 2019, investment property was recorded at Rp865.58 billion, an increase of 10.01% or Rp78.77 billion compared to 2018 at Rp786.81 billion. The accumulated changes in the fair value of investment property after evaluation as of December 31, 2019 amounted to Rp313.11 billion, wherein the addition of fair value was recorded at Rp41.53 billion. In 2019, the Company has also reclassified fixed assets to settle investment properties totaling Rp37.46 billion, which are investment property for land in Bontosunggu and Majapahit, Mataram.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**Aset Pajak Tangguhan**

Aset pajak tangguhan per 31 Desember 2019 sebesar Rp42,07 miliar mengalami peningkatan 64,52% atau setara dengan Rp16,50 miliar dari tahun 2018 yang sebesar Rp25,57 miliar. Peningkatan aset pajak tangguhan terutama disebabkan karena terdapatnya aset pajak tangguhan PT Rejeki Inti Logam Jaya (RILJ) pada tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp8,164 miliar. PT Rejeki Inti Logam Jaya merupakan entitas anak PT PPA Kapital (PPAK), dimana sejak tahun buku 2019, PPAK telah mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan RILJ.

Uang Muka Investasi

Per 31 Desember 2019, Perusahaan tidak melakukan penyetoran modal atau uang muka baru. Pada tanggal 22 Oktober 2018, Perusahaan melalui entitas anaknya, PT PPA Kapital (PPAK), melakukan penyetoran modal atau uang muka investasi kepada PT Matoa Kidung Samudra (MKS) dan PT Matoa Kidung Bahtera (MKB) dengan jumlah sebesar Rp6,25 miliar. Terhitung sejak tanggal 23 Januari 2019, MKS dan MKB telah diakuisisi oleh PPAK sehingga pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat saldo uang muka investasi.

Investasi pada Ventura Bersama

Investasi pada ventura bersama per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp321,81 miliar mengalami penurunan 4,25% atau setara dengan Rp14,28 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp336,09 miliar. Penurunan nilai investasi pada ventura bersama disebabkan karena menurunnya bagian laba ventura bersama sebesar 37,55%, dari Rp106,82 miliar di tahun 2018 menjadi Rp66,71 miliar di tahun 2019.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets as of December 31, 2019 amounted to Rp42.07 billion, an increase of 64.52% or equivalent to Rp16.50 billion from 2018 which amounted to Rp25.57 billion. The increase in deferred tax assets was mainly due to the presence of deferred tax assets of PT Rejeki Inti Logam Jaya (RILJ) in 2019 which was recorded at Rp8,164 billion. PT Rejeki Inti Logam Jaya is a subsidiary of PT PPA Kapital (PPAK) and since fiscal year 2019, PPAK has consolidated its financial statements with RILJ.

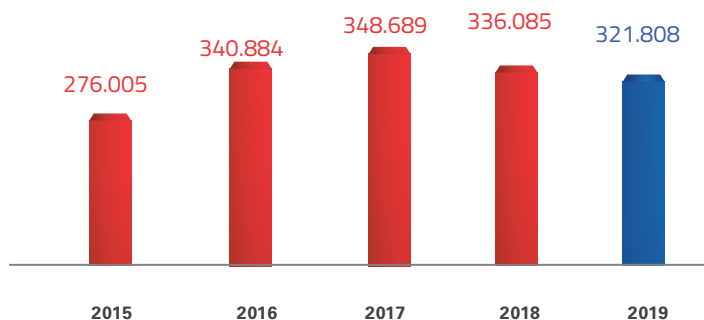
Investment Advances

As of December 31, 2019, the Company did not make capital deposits or new advances. On October 22, 2018, the Company through its subsidiary, PT PPA Kapital (PPAK), made a capital deposit or investment advance to PT Matoa Kidung Samudra (MKS) and PT Matoa Kidung Bahtera (MKB) in the amount of Rp6.25 billion. As of January 23, 2019, MKS and MKB have been acquired by PPAK so that as of December 31, 2019, there was no balance of investment advances.

Investment in Joint Ventures

Investment in joint ventures as of December 31, 2019 was recorded at Rp321.81 billion, decreased by 4.25% or Rp14.28 billion compared to 2018 at Rp336.09 billion. The decline in the value of investment in joint ventures was due to a decrease in the share of profit of joint venture by 37.55%, from Rp106.82 billion in 2018 to Rp66.71 billion in 2019.

Investasi pada Ventura Bersama 2015-2019 (Rp-juta)
Investment in Joint Ventures 2015-2019 (Rp-million)



Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain Perusahaan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp238 miliar, sementara pada tahun 2018 tidak terdapat piutang lain-lain Perusahaan. Piutang lain-lain terutama berasal dari piutang atas pendapatan hasil dana koleksi *cessie* Bank BTN pada bulan Desember 2019.

Investasi Jangka Panjang Lainnya

Investasi jangka panjang lainnya setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai pinjaman dana per 31 Desember 2019 sebesar Rp102,94 miliar mengalami penurunan 25,43% atau setara dengan Rp35,11 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp138,05 miliar. Hal ini disebabkan realisasi konversi atas surat utang konversi PT Mtoa Kidung Samudra dan PT Mtoa Kidung Bahtera menjadi saham. Kedua perusahaan ini telah diakuisisi oleh PT PPA Kapital per 23 Januari 2019.

Aset Tetap

Aset tetap terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan proyek, peralatan kantor, prasarana umum, dan aset dalam penyelesaian. Per 31 Desember 2019, aset tetap bersih (setelah dikurangi akumulasi penyusutan) Perusahaan tercatat sebesar Rp1,56 triliun mengalami peningkatan 45,76% atau setara dengan Rp488,75 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp1,07 triliun. Kenaikan aset tetap disebabkan meningkatnya aset tetap bersih yang berasal dari akuisisi entitas anak pada tahun 2019 sebesar Rp221,74 miliar, serta perolehan aset tetap baru sebesar Rp348,82 miliar yang terutama berasal dari perolehan peralatan proyek sebesar Rp232,53 miliar.

Beban penyusutan sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp32,83 miliar dan Rp21,10 miliar yang dialokasikan ke beban pokok pendapatan serta beban administrasi dan umum. Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2019 dan 2018.

Other Receivables

The Company's other receivables as at December 31, 2019 were recorded at Rp238 billion, while in 2018 there were no other receivables of the Company. Other receivables mainly came from receivables from Bank BTN's *cessie* collection fund revenue in December 2019.

Other Long-Term Investments

Other long-term investments, net of allowance for impairment of fund loans as of December 31, 2019 amounting to Rp102.94 billion, decreased by 25.43% or Rp35.11 billion compared to 2018 of Rp138.05 billion. This was due to the realization of the conversion of convertible debt securities of PT Mtoa Kidung Samudra and PT Mtoa Kidung Bahtera into shares. Both companies have been acquired by PT PPA Kapital as of January 23, 2019.

Fixed Assets

Fixed assets consist of land, buildings, motorized vehicles, project equipment, office equipment, public infrastructure, and assets in progress. As of December 31, 2019, the Company's net fixed assets (net of accumulated depreciation) was recorded at Rp1.56 trillion, experiencing an increase of 45.76% or Rp488.75 billion compared to 2018 at Rp1.07 trillion. The increase in fixed assets was due to an increase in net fixed assets arising from the acquisition of subsidiaries in 2019 amounting to Rp221.74 billion, as well as the acquisition of new fixed assets of Rp348.82 billion, which mainly came from the acquisition of project equipment amounting to Rp232.53 billion.

Depreciation expenses as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp32.83 billion and Rp21.10 billion, which are allocated to cost of revenue as well as administrative and general expenses. Based on the management's review, there were no events or changes in circumstances that indicated a decline in the value of fixed assets, so that the Management did not establish allowance for impairment of fixed assets as of December 31, 2019 and 2018.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION*Goodwill*

Pada 23 Januari 2019, Perusahaan melalui entitas anaknya, yakni PT PPA Kapital (PPAK) telah mengakuisisi PT Matoa Kidung Samudera (MKS) dan PT Matoa Kidung Bahtera (MKB) dengan nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp13,71 miliar dan Rp26,04 miliar. Kemudian pada 22 Maret 2019, PT PPAK juga mengakuisisi PT Rejeki Inti Logam Jaya (RILJ) dengan nilai aset bersih sebesar minus Rp476,83 miliar. Dari akuisisi terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut, diperoleh *goodwill* sebesar Rp370,26 miliar.

Cessie Piutang Jangka Panjang

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan telah mengambil alih piutang yang merupakan *cessie* piutang jangka panjang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Primarindo Asia Infrastructure sebesar Rp23,96 miliar, dan PT Ade Textile Industries sebesar Rp259,53 miliar. Jumlah keseluruhan *cessie* piutang jangka panjang Perusahaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp283,49 miliar.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset tidak lancar lainnya terdiri dari persediaan properti, uang jaminan, dana yang dibatasi penggunaannya, deposito berjangka yang dijamin, aset tak berwujud – *software*, dan lain-lain. Aset tidak lancar lainnya Perusahaan per 31 Desember 2019 tercatat Rp444,27 miliar, mengalami peningkatan 25,40% atau setara dengan Rp89,99 miliar dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp354,28 miliar. Kenaikan aset tidak lancar lainnya disebabkan oleh meningkatnya deposito berjangka yang dijamin sebesar 29,66%, dimana deposito berjangka yang dijamin sebesar Rp390,00 miliar merupakan deposito berjangka Perusahaan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas fasilitas pinjaman Kredit Swadana Lembaga PRK dengan tingkat suku bunga sebesar 7,65% per tahun.

Goodwill

On January 23, 2019, the Company through its subsidiary, PT PPA Kapital (PPAK) acquired PT Matoa Kidung Samudera (MKS) and PT Matoa Kidung Bahtera (MKB) with net asset value of Rp13.71 billion and Rp26.04 billion, respectively. Then on March 22, 2019, PT PPAK also acquired PT Rejeki Inti Logam Jaya (RILJ) with net asset value of minus Rp476.83 billion. From the acquisition of the 3 (three) companies, a goodwill of Rp370.26 billion was obtained.

Cessie Long-term Receivables

On December 20, 2019, the Company took over the receivables which are PT Bank Mandiri (Persero) Tbk's long-term *cessie* from PT Primarindo Asia Infrastructure in the amount of Rp23.96 billion, and PT Ade Textile Industries in the amount of Rp259.53 billion. The total amount of the Company's *cessie* long-term receivables as of December 31, 2019 amounted to Rp283.49 billion.

Other Non-current Assets

Other non-current assets consist of property inventories, security deposits, restricted use funds, guaranteed time deposits, intangible assets - software, and others. The Company's other non-current assets as of December 31, 2019 were recorded at Rp444.27 billion, an increase of 25.40% or Rp89.99 billion compared to 2018 which was recorded at Rp334.28 billion. The increase in other non-current assets was due to an increase in guaranteed time deposits by 29.66%, where the guaranteed time deposits amounting to Rp390.00 billion were the Company's time deposits at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk for the loan facilities of CRD Swadana Credit Institution at an interest rate of 7.65% per annum.

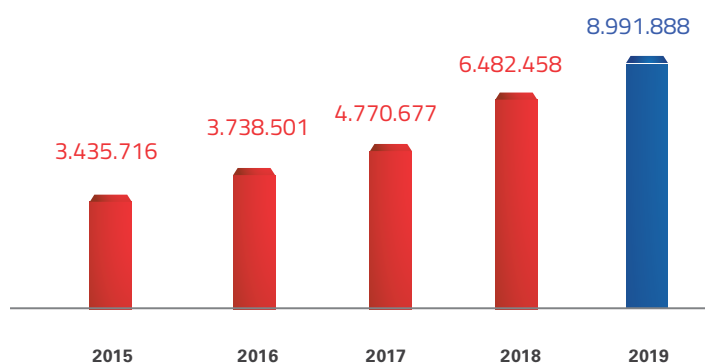
LIABILITAS

Total Liabilitas Perusahaan tahun 2019 mencapai Rp8,99 triliun, **mengalami peningkatan 38,71%** dibandingkan Total Liabilitas tahun 2018 sebesar Rp6,48 triliun.

LIABILITIES

Total Liabilities of the Company in 2019 reached Rp8.99 trillion, an **increase of 38.71%** compared to Total Liabilities in 2018 of Rp6.48 trillion.

Total Liabilitas 2015-2019 (Rp-juta)
Total Liabilities 2015-2019 (Rp-million)



Total Liabilitas 2018-2019 (Rp-juta)
Total Liabilities 2018-2019 (Rp-million)

Liabilitas Liabilities	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	7.101.679	5.440.230	1.661.449	30,54%	●
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.890.210	1.042.228	847.982	81,36%	●
Total Liabilitas Total Liabilities	8.991.889	6.482.458	2.509.431	38,71%	●

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

Kinerja Liabilitas dipengaruhi oleh Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Dibandingkan tahun 2018, Total Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 30,54%, sedangkan Total Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 81,36% sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Liabilities performance is influenced by Current and Non-Current Liabilities. Compared to 2018, Total Current Liabilities as of December 31, 2019 increased by 30.54%, while Total Non-Current Liabilities as of December 31, 2019 increased by 81.36% as described below.

Liabilitas Jangka Pendek

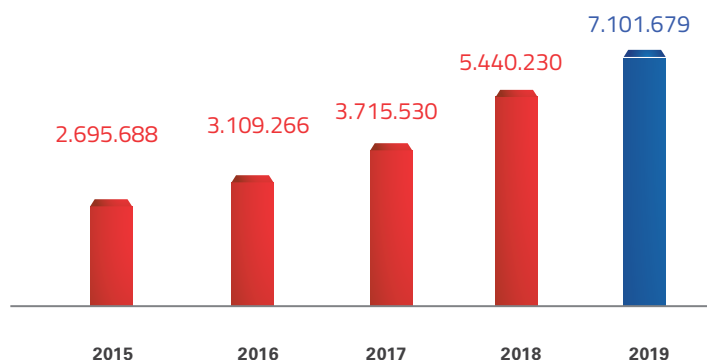
Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Utang Usaha Accounts Payable	1.929.556	2.123.991	(194.435)	-9,15%	●
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Bank and Financial Institution Loans	2.819.958	1.980.829	839.129	42,36%	●
Utang Surat Berharga Komersial Commercial Paper	93.572	-	93.572	-	
Surat Utang Jangka Menengah yang Akan Jatuh Tempo dalam 1 Tahun Current Maturities of Medium Term Notes	300.000	-	300.000	-	
Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam 1 Tahun Current Maturities of Long-term Loans	17.044	101.524	(84.480)	-83,21%	●
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga Gross Amount Due to Third Parties	1.342.936	686.680	656.256	95,57%	●
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek Short-term Advances from Customers	264.130	286.649	(22.519)	-7,86%	●
Utang Pajak Taxes Payable	74.004	50.297	23.707	47,13%	●
Beban Akrua dan Utang Lain-lain Accrued Expenses and Other Payables	260.479	210.260	50.219	23,88%	●
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK TOTAL CURRENT LIABILITY	7.101.679	5.440.230	1.661.449	30,54%	●

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp7,10 triliun, meningkat 30,54% atau setara dengan Rp1,66 triliun dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2018 sebesar Rp5,44 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya pinjaman bank dan lembaga keuangan seperti yang akan dijelaskan berikutnya. Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Total Current Liabilities as at December 31, 2019 was Rp7.10 trillion, an increase of 30.54% or Rp1.66 trillion compared to total Current Liabilities in 2018 of Rp5.44 trillion. This increase was mainly due to an increase in bank and financial institution loans as will be explained later. The development of the Company's Total Current Liabilities can be seen in the chart below.

Liabilitas Jangka Pendek 2015-2019 (Rp-juta)
Current Liabilities 2015-2019 (Rp-million)



Utang Usaha

Utang usaha Perusahaan terdiri atas utang usaha pihak berelasi dan utang usaha pihak ketiga, dimana per 31 Desember 2019 jumlah utang usaha Perusahaan tercatat Rp1,93 triliun mengalami penurunan 9,15% atau setara dengan Rp194,44 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp2,12 triliun. Penurunan utang usaha disebabkan karena menurunnya utang usaha pihak ketiga sebesar 11,94% atau setara dengan Rp242,47 miliar, dari Rp2,03 triliun di tahun 2018 menjadi Rp1,79 triliun di tahun 2019.

Accounts Payable

The Company's accounts payable consist of related party payables and third party payables, where as of December 31, 2019 the Company's accounts payable were recorded at Rp1.93 trillion, decreased by 9.15% or Rp194.44 billion compared to 2018 of Rp2.12 trillion. The decrease in accounts payables was due to the decrease in third party trade payables by 11.94% or Rp242.47 billion, from Rp2.03 trillion in 2018 to Rp1.79 trillion in 2019.

Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

Jumlah pinjaman bank dan lembaga keuangan jangka pendek per 31 Desember 2019 adalah Rp2,82 triliun mengalami peningkatan 42,36% atau setara dengan Rp839,13 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp1,98 triliun. Kenaikan jumlah pinjaman bank dan lembaga keuangan disebabkan oleh meningkatnya jumlah pinjaman bank dan lembaga keuangan jangka pendek dari pihak berelasi sebesar 78,64% yakni dari Rp852,13 miliar di tahun 2018 menjadi Rp1,52 triliun di tahun 2019. Peningkatan pinjaman bank dan lembaga keuangan merupakan bagian dari penguatan struktur modal Perusahaan.

Bank and Financial Institution Loan

Total short-term bank and financial institution loans as of December 31, 2019 amounted to Rp2.82 trillion, an increase of 42.36% or Rp839.13 billion compared to 2018 amounted to Rp1.98 trillion. The increase in total bank and financial institution loans was caused by an increase in total short-term bank and financial institution loans from related parties by 78.64%, from Rp852.13 billion in 2018 to Rp1.52 trillion in 2019. The increased bank and financial institution loans is part of the efforts made to strengthening the Company's capital structure.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**Utang Surat Berharga Komersial**

Pada tanggal 27 November 2019, Perusahaan menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) melalui PT Danareksa Sekuritas sebagai Penata Laksana Penerbitan/ *Arranger* dan menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga penatausahaan dan penyelesaian SBK sebesar Rp100,00 miliar dengan biaya yang dapat diatribusikan sebesar minus Rp6,43 miliar, sehingga jumlah utang SBK tercatat sebesar Rp93,57 miliar.

SBK tersebut memperoleh peringkat idA1 (*single A-one*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Jangka Waktu SBK tersebut adalah 12 bulan dengan jatuh tempo 28 November 2020. Besarnya tingkat diskonto adalah sebesar 7,50%.

Surat Utang Jangka Menengah yang Akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Per 31 Desember 2019, surat utang jangka menengah yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun yaitu Juli 2020 sebesar Rp300,00 miliar yang merupakan surat utang jangka menengah jangka pendek dari entitas anak, PT Nindya Karya. Penerbitan surat utang jangka menengah ini dilakukan untuk pengembangan bisnis dan tambahan modal kerja PT Nindya Karya.

Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Per 31 Desember 2019, saldo pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp17,04 miliar, mengalami penurunan 83,21% atau setara dengan Rp84,48 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp101,52 miliar. Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun tersebut merupakan pinjaman entitas anak dari PT PPAK, yakni PT Duta Mentari Raya (DMR) kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Akta No. 09 tanggal 14 September 2016 perihal Perjanjian Pemberian *Line Facility* Murabahah I sebesar Rp70,00 miliar dan Akta No. 10 tanggal 14 September 2016 perihal Perjanjian Pemberian *Line Facility* Murabahah II sebesar Rp 5,00 miliar. Masing-masing pinjaman tersebut memiliki jangka waktu selama 60 bulan dan 12 bulan.

Commercial Paper

On November 27, 2019, the Company issued Commercial Paper (CP) through PT Danareksa Sekuritas as the Arranger and appointed PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as the administration and settlement agency of CP in the amount of Rp100.00 billion, with attributable costs amounting to minus Rp.6.43 billion, making total CP to be recorded at Rp93.57 billion.

The CP received an idA1 (*single A-one*) rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). The term of CP is 12 months with a maturity of November 28, 2020. The discount rate is 7.50%.

Current Maturities of Medium-term Notes

As of December 31, 2019, the current maturities of medium-term notes, namely July 2020, amounted to Rp300.00 billion, which is a short-term medium-term notes from a subsidiary, PT Nindya Karya. The medium-term notes was issued for business development and additional working capital of PT Nindya Karya.

Current Maturities of Long-term Loans

As of December 31, 2019, the current maturities of long-term loans balance amounted to Rp17.04 billion, a decrease of 83.21% or equivalent to Rp84.48 billion compared to 2018 of Rp101.52 billion. The current maturities of long-term loan is a subsidiary's loan of PT PPAK, namely PT Duta Mentari Raya (DMR) to PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on Deed No. 09 dated September 14, 2016 concerning the Murabahah I Line Facility Agreement amounting to Rp70.00 billion and Deed No. 10 dated September 14, 2016 concerning the Murabahah II Line Facility Agreement amounting to Rp5.00 billion. Each loan has a term of 60 months and 12 months.

Utang Bruto kepada Pihak Ketiga

Utang bruto kepada pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja sub kontraktor yang belum diberitahukan, baik dari sub kontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak. Utang bruto kepada pihak ketiga terdiri atas utang bruto kepada pihak ketiga pada entitas anak PT Nindya Karya, mencakup Wilayah I-V, Divisi EPC, Divisi Properti, Unit Penunjang Produksi, PT Nindya Beton, dan Kantor Pusat.

Per 31 Desember 2019, utang bruto kepada pihak ketiga tercatat sebesar Rp1,34 triliun mengalami kenaikan 95,57% atau setara dengan Rp656,26 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp686,68 miliar. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya utang bruto kepada pihak ketiga PT Nindya Karya Wilayah IV dan V yang masing-masing naik sebesar 309,51% dan 1.788,35%.

Sementara utang bruto kepada pihak ketiga PT Nindya Karya pada Unit Penunjang Produksi dan PT Nindya Beton juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4.901,21% dan 538,37%.

Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

Uang muka pemberi kerja jangka pendek per 31 Desember mengalami penurunan 7,86% atau setara dengan Rp22,52 miliar dari Rp286,65 miliar di tahun 2018 menjadi Rp264,13 miliar di tahun 2019. Penurunan ini lebih disebabkan karena menurunnya uang muka pemberi kerja jangka pendek pada pihak ketiga sebesar 6,71% atau setara dengan Rp18,26 miliar dari Rp272,02 miliar di tahun 2018 menjadi Rp253,76 miliar di tahun 2019.

Utang Pajak

Jumlah utang pajak Perusahaan dan entitas anak per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp74,00 miliar mengalami peningkatan 47,13% atau setara dengan Rp23,71 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp50,30 miliar. Kenaikan utang pajak terutama disebabkan meningkatnya utang pajak Perusahaan terkait PPh Pasal 21 yang naik sebesar 47,13% di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, serta Pajak Pertambahan Nilai entitas anak yang meningkat 192,00% di tahun 2019.

Gross Amount Due to Third Parties

Gross amount due to third parties represents sub-contractor work performance debt that has not been reported, either from sub-contractors or materials that are recognized as an achievement because they have not fulfilled the terms of payment according to the contract. Gross amount due to third parties consists of gross amount due to third parties in PT Nindya Karya's subsidiaries, covering Region I-V, EPC Division, Property Division, Production Support Unit, PT Nindya Beton, and Head Office.

As of December 31, 2019, gross amount due to third parties was recorded at Rp1.34 trillion, experiencing an increase of 95.57% or Rp656.26 billion compared to 2018 which amounted to Rp686.68 billion. This increase was due to an increase in gross amount due to third parties PT Nindya Karya Region IV and V, which respectively rose by 309.51% and 1,788.35%.

While gross amount due to third parties PT Nindya Karya in Production Support Unit and PT Nindya Beton also rose by 4,901.21% and 538.37%, respectively.

Short-term Advances from Customers

Short-term advances from customers as of December 31 decreased by 7.86% or Rp22.52 billion from Rp286.65 billion in 2018 to Rp264.13 billion in 2019. This decrease was mainly due to a decrease in short-term advances from customers to third parties of 6.71% or Rp18.26 billion from Rp272.02 billion in 2018 to Rp253.76 billion in 2019.

Taxes Payable

Total taxes payable of the Company and subsidiaries as of December 31, 2019 was recorded at Rp74.00 billion, experiencing an increase of 47.13% or Rp23.71 billion compared to 2018 at Rp50.30 billion. The increase in taxes payable was mainly due to an increase in the Company's taxes payable related to Article 21 Income which increased by 47.13% in 2019 compared to 2018, and Value Added Tax of subsidiaries which increased by 192.00% in 2019.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

Beban Akrua dan Utang Lain-lain

Beban akrual dan utang lain-lain terdiri dari akrual biaya apresiasi karyawan, akrual biaya tantiem, utang operasional proyek, akrual bunga surat utang jangka menengah, akrual bunga bank, akrual gaji dan upah, akrual beban kantor dan umum, serta utang lain-lain. Utang operasional proyek merupakan utang atas beban ventura bersama yang terjadi atas pinjaman-pinjaman sementara ke proyek-proyek yang dikerjakan samakan. Sementara akrual biaya tantiem dan biaya apresiasi karyawan adalah pencatatan biaya secara akrual berdasarkan anggaran yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Per 31 Desember 2019 beban akrual dan utang lain-lain tercatat Rp260,48 miliar meningkat 23,88% atau setara dengan Rp50,22 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp210,26 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya utang lain-lain sebesar 91,15%, dimana per 31 Desember 2019, entitas anak, RILJ memiliki utang lain-lain sebesar Rp85,84 miliar.

Accruals and Other Payables

Accruals and other payables consist of accrued employee appreciation costs, accrued tantiem costs, project operational payable, accrued medium-term notes interest, accrued bank interest, accrued salary and wages, accrued office and general expense, and other payables. Project operational payable is payable from joint venture expenses incurred on temporary loans to projects that are cooperated. While accrued tantiem and employee appreciation costs are the accrual recording of costs based on a budget approved by the General Meeting of Shareholders (GMS).

As of December 31, 2019 accrued expenses and other payable were recorded at Rp260.48 billion, an increase of 23.88% or Rp50.22 billion compared to 2018 of Rp210.26 billion. This increase was mainly due to an increase in other payable by 91.15%, where as of December 31, 2019, a subsidiary, RILJ had other payable amounted to Rp85.84 billion.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Employee Benefit Liabilities	23.089	22.766	323	1,42%	●
Pinjaman Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans	881.480	223.875	657.605	293,74%	●
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang Long-term Medium Term Notes	807.455	600.000	207.455	34,58%	●
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang Long-term Advances from Customers	176.028	195.587	(19.559)	-10,00%	●
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya Other Non-current Liabilities	2.158	-	2.158	-	
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES	1.890.210	1.042.228	847.982	81,36%	●

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp1,89 triliun, meningkat 81,36% atau setara dengan Rp1,04 triliun dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2018 sebesar Rp1,04 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan pinjaman bank jangka panjang seperti yang akan dijelaskan berikutnya.

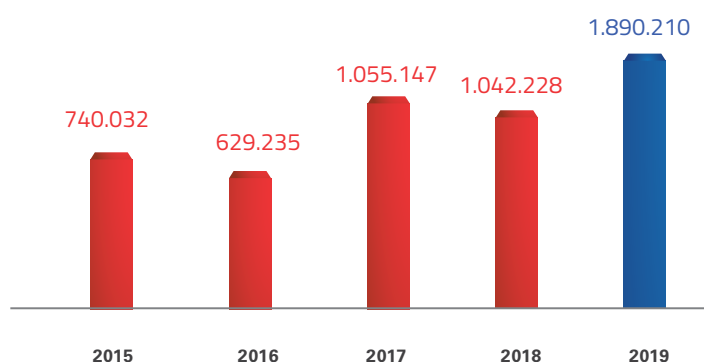
Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Total Non-Current Liabilities as at December 31, 2019 amounted to Rp1.89 trillion, increased by 81.36% or Rp1.04 trillion compared to the Total Non-Current Liabilities in 2018 of Rp1.04 trillion. This increase was mainly driven by long-term bank loans as will be explained next.

The development of the Company's Total Non-Current Liabilities can be seen in the chart below.

Liabilitas Jangka Panjang 2015-2019 (Rp-juta)

Non-Current Liabilities 2015-2019 (Rp-million)



Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan terdiri atas imbalan kerja karyawan Perusahaan, dan entitas anak, yakni PT PPAF, PT PPAK, PT BSM, PT RILJ, PT NK, dan PT NB. Per 31 Desember 2019, jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan tercatat sebesar Rp23,09 miliar mengalami peningkatan 1,42% atau setara dengan Rp323 juta dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp22,77 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya liabilitas imbalan kerja entitas anak PT PPAK, yakni PT BSM dan PT RILJ yang masing-masing naik sebesar 39,85% dan 606,80%.

Employee Benefit Liabilities

Employee Benefit Liabilities consist of employee benefits for the Company and subsidiaries, namely PT PPAF, PT PPAK, PT BSM, PT RILJ, PT NK, and PT NB. As of December 31, 2019, total employee benefit liabilities were recorded at Rp23.09 billion, experiencing an increase of 1.42% or Rp323 million compared to 2018 at Rp22.77 billion. This increase was mainly due to an increase in employee benefit liabilities of subsidiaries of PT PPAK, namely PT BSM and PT RILJ, which respectively increased by 39.85% and 606.80%.

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pinjaman bank jangka panjang per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp881,48 miliar, mengalami peningkatan 293,74% atau setara dengan Rp657,61 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp223,87 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya pinjaman bank jangka panjang pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 593,13% atau setara dengan Rp590,82 miliar dari Rp99,61 miliar di tahun 2018 menjadi Rp690,43 miliar di tahun 2019.

Long-term Bank Loans

Long-term bank loans as of December 31, 2019 were recorded at Rp881.48 billion, an increase of 293.74% or Rp657.61 billion compared to 2018 which amounted to Rp223.87 billion. This increase was mainly caused by an increase in long-term bank loans to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk by 593.13% or Rp590.82 billion from Rp99.61 billion in 2018 to Rp690.43 billion in 2019.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang**

Per 31 Desember 2019, surat utang jangka menengah jangka panjang tercatat sebesar Rp807,46 miliar mengalami peningkatan 34,58% atau setara dengan Rp207,46 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp600,00 miliar.

Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang

Uang muka pemberi kerja jangka panjang merupakan saldo uang muka yang telah diterima dari pemberi pekerjaan (*bouwheer*) yang pembayarannya dipotongkan dengan tagihan atas setiap pekerjaan yang telah diselesaikan. Per 31 Desember 2019, jumlah uang muka pemberi kerja jangka panjang sebesar Rp176,03 miliar, mengalami penurunan 10,00% atau setara dengan Rp19,56 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp195,58 miliar. Hal ini lebih disebabkan karena menurunnya jumlah uang muka pemberi kerja jangka panjang pihak berelasi yakni PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang turun sebesar 63,94% atau setara dengan Rp38,69 miliar dari Rp60,50 miliar di tahun 2018 menjadi Rp21,82 miliar di tahun 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

Per 31 Desember 2019, terdapat liabilitas jangka panjang lainnya yang jumlahnya tercatat sebesar Rp2,16 miliar. Perusahaan tidak memiliki liabilitas jangka panjang lainnya di tahun sebelumnya.

EKUITAS

Total Ekuitas Perusahaan tahun 2019 mencapai Rp5,42 triliun, mengalami **peningkatan 3,07%** dibandingkan Total Ekuitas tahun 2018 sebesar Rp5,26 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2015-2019, **Total Ekuitas Perusahaan mengalami pertumbuhan 8,84%**

Long-term Medium Term Notes

As of December 31, 2019, long-term medium term notes amounted to Rp807.46 billion, an increase of 34.58% or equivalent to Rp207.46 billion compared to 2018 which amounted to Rp600.00 billion.

Long-term Advances from Customers

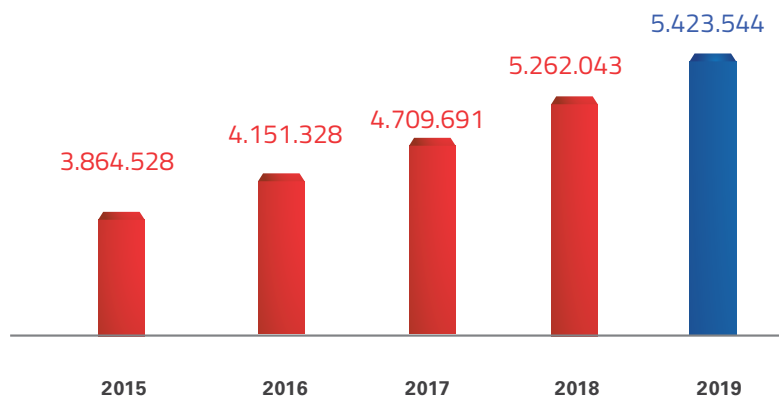
Long-term advances from customers are advances that have been received from the customer (*bouwheer*), the payment of which is deducted from the invoice for each completed work. As of December 31, 2019, the amount of long-term advances for customers was Rp176.03 billion, decreasing by 10.00% or Rp19.56 billion compared to 2018 which amounted to Rp195.58 billion. This was caused by a decrease in the amount of long-term advances from customers of related party, namely PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which fell by 63.94% or Rp38.69 billion, from Rp60.50 billion in 2018 to Rp21.82 billion in 2019.

Other Non-Current Liabilities

As of December 31, 2019, there were other non-current liabilities totaling Rp2.16 billion. The Company has no other non-current liabilities in the previous year.

EQUITY

The Company's Total Equity in 2019 reached Rp5.42 trillion, an **increase of 3.07%** compared to the Total Equity of the year 2018 amounting to Rp5.26 trillion. At the Annual Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2015-2019, **the Company's Total Equity experienced a growth of 8.84 %**

Total Ekuitas 2015-2019 (Rp-juta)
Total Equity 2015-2019 (Rp-million)Ekuitas 2018-2019 (Rp-juta)
Equity 2018-2019 (Rp-million)

Ekuitas Equity	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owner of the parent entity					
Modal Saham Share Capital	2.996.688	2.996.688	-	-	
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	(308.059)	(308.059)	-	-	
Saldo Laba: Retain Earnings:					
Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated	299.350	171.528	127.822	74,52%	●
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	1.993.291	1.780.757	212.534	11,94%	●
Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities – Net	22.152	25.628	(3.476)	-13,56%	●
Surplus Revaluasi Aset Tetap Revaluation Surplus of Fixed Assets	413.255	477.889	(64.634)	-13,52%	●
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Total equity attributable to owner of the parent entity	5.416.677	5.144.431	272.246	5,29%	●
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali Equity attributable to non-controlling interests	6.867	117.612	(110.745)	-94,16%	●
JUMLAH EKUITAS Total Equity	5.423.544	5.262.043	161.501	3,07%	●

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

Dibandingkan tahun 2018, Jumlah Ekuitas dipengaruhi oleh Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,29%, sedangkan Jumlah Ekuitas tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,07% sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Modal Saham

Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal saham Perusahaan adalah sebesar Rp1.000.000 per saham, dimana modal ditempatkan dan disetor penuh untuk tahun 2019 dan 2018, masing-masing adalah 2.996.688 lembar saham sehingga modal saham Perusahaan sebesar Rp2.996.688 juta.

Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor per 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar defisit Rp308,06 juta, setelah pada tahun 2018 terdapat dampak divestasi entitas anak PT Pratama Persada Airborne sebesar Rp2,29 miliar.

Saldo Laba

Saldo Laba terdiri dari saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Per 31 Desember 2019, saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya tercatat sebesar Rp299,35 miliar mengalami peningkatan 74,52% dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp171,53 miliar. Peningkatan ini lebih disebabkan adanya penambahan cadangan umum di tahun 2019 yakni sebesar Rp127,82 miliar. Sedangkan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya tercatat sebesar Rp1,99 triliun mengalami peningkatan 11,94% atau setara dengan Rp212,53 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp1,78 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp324,91 miliar.

Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual – Bersih

Laba (rugi) belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual – bersih per 31 Desember 2019 adalah Rp22,15 miliar, mengalami penurunan sebesar 13,56% atau setara dengan Rp3,47 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp25,63 miliar. Hal ini disebabkan penghasilan komprehensif tahun berjalan yang tercatat minus Rp3,48 miliar.

Compared to 2018, Total Equity was affected by Equity Attributable to Owner of the Parent Entity in 2019 experienced an increase of 5.29%, while Total Equity in 2019 experienced an increase of 3.07% as described below.

Share Capital

The Company is entirely owned by the Republic of Indonesia with a nominal value of the Company's shares amounting to Rp1,000,000 per share, wherein the issued and fully paid-in capital for 2019 and 2018, respectively are 2,996,688 shares, thus the Company's share capital is Rp2,996,688 million.

Additional Paid-in Capital

Additional paid-in capital as of December 31, 2019 and 2018, each amounting to a deficit of Rp308.06 million, after in 2018 there was an impact on the divestment of a subsidiary PT Pratama Persada Airborne amounted to Rp2.29 billion.

Retained Earnings

Retained Earnings consist of appropriated and unappropriated retained earnings.

As of December 31, 2019, the appropriated retained earnings were recorded at Rp299.35 billion, increased by 74.52% compared to 2018 at Rp171.53 billion. This increase was due to the addition of general reserves in 2019 amounting to Rp127.82 billion. While the unappropriated retained earnings were recorded at Rp1.99 trillion, increased by 11.94% or Rp212.53 billion compared to 2018 at Rp1.78 trillion. This increase was due to an increase in profit for the year in the previous year amounting to Rp324.91 billion.

Unrealized Gain (Loss) from Available-For-Sale Securities - Net

Unrealized gain (loss) from available-for-sale securities - net as of December 31, 2019 was Rp22.15 billion, decreased by 13.56% or Rp3.47 billion compared to 2018 which was Rp25.63 billion. This was due to the comprehensive income of the year which recorded at minus Rp3.48 billion.

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp413,26 miliar mengalami penurunan 13,52% atau setara dengan Rp64,63 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp477,89 miliar. Hal ini disebabkan Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap yang tercatat minus Rp64,63 miliar.

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Dengan perubahan pada modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, laba (rugi) belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual – bersih, serta surplus revaluasi aset tetap seperti yang telah dijelaskan di atas, Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2019 sebesar Rp5,42 triliun, meningkat 5,29% atau setara dengan Rp272,25 miliar dibandingkan Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2018 sebesar Rp5,14 triliun.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp6,87 miliar, mengalami penurunan sebesar 94,16% atau setara dengan Rp110,75 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp117,61 miliar. Penurunan ini disebabkan terdapatnya dampak konsolidasian entitas anak di tahun berjalan yang tercatat minus Rp110,32 miliar.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PERIODE TAHUN 2019 DAN 2018

Revaluation Surplus of Fixed Assets

The revaluation surplus of fixed assets as of December 31, 2019 amounting to Rp413.26 billion, decreased by 13.52% or Rp64.63 billion compared to 2018 which amounted to Rp477.89 billion. This was due to the Reclassification of Revaluation Surplus of Fixed Assets which was recorded at minus Rp64.63 billion.

Total Equity Attributable To Owner of the Parent Entity

With changes in share capital, additional paid-in capital, retained earnings, unrealized gain (loss) from available-for-sale securities - net, and revaluation surplus of fixed assets as explained above, Total Equity Attributable to Owner of the Parent Entity in 2019 amounting to Rp5.42 trillion, an increase of 5.29% or Rp272.25 billion compared to Total Equity Attributable to Owner of the Parent Entity in 2018 of Rp5.14 trillion.

Equity Attributable to Non-controlling Interests

Equity attributable to non-controlling interests as of December 31, 2019 was recorded at Rp6.87 billion, a decrease of 94.16% or Rp110.75 billion compared to 2018 at Rp117.61 billion. This decrease was due to the impact of consolidation of subsidiaries in the current year which recorded at minus Rp110.32 billion.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME IN 2018 AND 2019

Jasa Konstruksi berkontribusi 86,72% terhadap Pendapatan Usaha Perusahaan di tahun 2019, sementara Penjualan tercatat **meningkat 188,74%** dibandingkan tahun 2018.

Construction Services contributed 86.72% to the Company's Revenues in 2019, while Sales recorded an **increase of 188.74%** compared to 2018.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Usaha Revenues	6.669.457	6.824.001	(154.544)	-2,26%	●
Beban Usaha Operating Expenses	(6.289.760)	(6.292.565)	2.805	-0,04%	●
Laba Usaha Operating Income	379.697	531.436	(151.739)	-28,55%	●
Pendapatan Bunga Interest income	15.424	15.514	(90)	-0,58%	●
Keuntungan Penjualan Aset Tetap Gain on Sales of Fixed Assets	237	-	237	-	●
Beban Bunga dan Keuangan Interest Expenses and Financial Charges	(89.230)	(76.004)	(13.226)	17,40%	●
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi Increase in Fair Value of Investment Property	-	75.448	(75.448)	-100,00%	●
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(159.199)	(174.168)	14.969	-8,59%	●
Bagian Laba Ventura Bersama Share of Profit of Joint Venture	66.706	106.821	(40.115)	-37,55%	●
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	122.076	(37.387)	159.463	-426,52%	●
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	335.711	441.660	(105.949)	-23,99%	●
Pajak Penghasilan Income Tax					
Manfaat (Beban) Pajak Kini Current Tax Benefit (Expense)	(17.007)	(17.213)	206	-1,20%	●
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Deferred Tax Benefit (Expenses)	8.368	4.353	4.015	92,24%	●
Jumlah Beban Pajak Penghasilan Total Income Tax Expenses	(8.639)	(12.860)	4.221	-32,82%	●
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	327.072	428.800	(101.728)	-23,72%	●
Pendapatan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Items that will not be reclassified to profit or loss					
Surplus Revaluasi Aset Tetap Revaluation Surplus of Fixed Assets	-	79.910	(79.910)	-	●
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefit Liabilities	(6.645)	520	(7.165)	-1.377,88%	●

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive income	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Items that will be reclassified to profit or loss					
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Available for Sale Financial Assets	(3.476)	(18.651)	15.175	-81,36%	●
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	316.951	490.579	(173.628)	-35,39%	●
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Income for the Year Attributable To					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	324.913	426.077	(101.164)	-23,74%	●
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	2.159	2.723	(564)	-20,71%	●
Jumlah Total	327.072	428.800	(101.728)	-23,72%	●
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Total Comprehensive Income for the Year Attributable To					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	314.854	467.878	(153.024)	-32,71%	●
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	2.097	22.701	(20.604)	-90,76%	●
Jumlah Total	316.951	490.579	(173.628)	-35,39%	●
Laba per Saham (dalam Rupiah penuh) Earnings per Share (in full Rupiah)	108.424	142.183	(33.759)	-23,74%	●

Pendapatan Usaha

Seperti yang telah diuraikan pada bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha, Pendapatan Perusahaan diperoleh dari Pendapatan Jasa Konstruksi, Pinjaman yang Diberikan, Pendapatan Hasil Investasi, Pendapatan Manufaktur, Penjualan, Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi, Pendapatan Properti, Pendapatan Sewa Alat, serta Pendapatan Penggantian Biaya.

Revenues

As described in the Operational Review per Business Segment section, the Company's Revenues are derived from Construction Service Revenues, Loan Receivables, Revenues from Investment, Manufacturing Revenues, Sales, Advisory Service Revenues, Property Revenues, Equipment Rental Revenues, and Revenues from Reimbursable Costs.

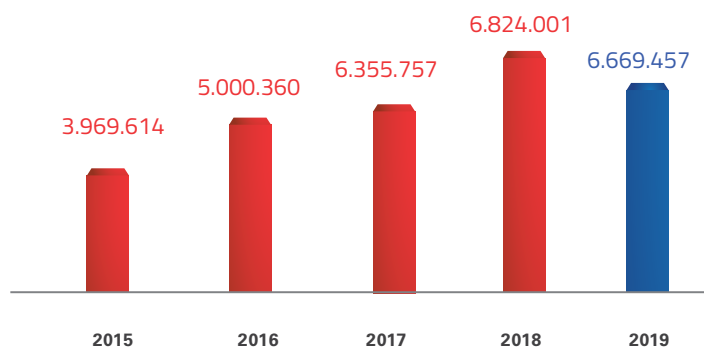
TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATIONPendapatan Usaha Konsolidasian
Consolidated Revenues

Sumber Pendapatan Source of Revenues	2019		2018		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-1)	(6=3/1)
Jasa Konstruksi Construction service	5.783.502	86,72%	6.077.796	89,06%	(294.294)	-4,84% 
Penjualan Sales	348.251	5,22%	120.611	1,77%	227.640	188,74% 
Hasil Investasi Investment	273.367	4,10%	223.398	3,27%	49.969	22,37% 
Pinjaman yang Diberikan Loan Receivables	198.908	2,98%	210.458	3,08%	(11.550)	-5,49% 
Imbalan Jasa Konsultasi Advisory Service	60.432	0,91%	41.745	0,61%	18.687	44,76% 
Manufaktur Manufacturing	-	-	144.629	2,12%	-	-
Properti Property	-	-	3.031	0,04%	-	-
Sewa Alat Equipment Rental	-	-	1.455	0,02%	-	-
Penggantian Biaya Reimbursable Costs	4.997	0,07%	878	0,01%	4.119	469,13% 
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	6.669.457	100,00%	6.824.001	100,00%	(154.544)	-2,26% 

Pendapatan Usaha tahun 2019 sebesar Rp6,67 triliun, turun 2,26% dibandingkan Pendapatan Usaha tahun 2018 sebesar Rp6,82 triliun. Lebih rendahnya pendapatan usaha terutama disebabkan menurunnya pendapatan dari jasa konstruksi sebesar 4,84% atau setara dengan Rp294,29 miliar menjadi Rp5,78 triliun di tahun 2019 dari Rp6,08 triliun di tahun 2018 menjadi Rp5,78 triliun di tahun 2019. Turunnya pendapatan dari jasa konstruksi disebabkan proyek-proyek infrastruktur yang pendanaannya dari APBN sangat berkurang.

Revenues in 2019 amounted to Rp6.67 trillion, decreased by 2.26% compared to revenues in 2018 of Rp6.82 trillion. The lower revenues was mainly due to the decline in construction service revenues by 4.84% or Rp294.29 billion, from Rp6.08 trillion in 2018 to Rp5.78 trillion in 2019. The declining revenues from construction service was driven by a significant reduction of infrastructure projects whose funding is from the state budget.

Perkembangan Jumlah Pendapatan Usaha 2015-2019 (Rp-juta)
Total Revenues 2015-2019 (Rp-million)



Beban Usaha

Rincian Beban Usaha Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Operating Expenses

Details of the Company's Operating Expenses can be seen in the table below.

Beban Usaha Operating Expenses	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Beban Proyek Project Expenses	5.158.970	5.534.321	(375.351)	-6,78%	●
Pegawai Employee	307.175	280.170	27.005	9,64%	●
Beban Bunga Bank Interest Expenses	304.095	149.891	154.204	102,88%	●
Harga Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	318.800	77.148	241.652	313,23%	●
Penyusutan Depreciation	31.577	22.533	9.044	40,14%	●
Keperluan Kantor Office Supplies	41.558	51.519	(9.961)	-19,33%	●
Sewa dan Asuransi Rent and Insurance	39.180	35.788	3.392	9,48%	●
Perjalanan Dinas Business Travel	24.647	21.299	3.348	15,72%	●
Pemasaran dan Penjualan Sales and Marketing	14.239	12.857	1.382	10,75%	●

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

Beban Usaha Operating Expenses	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Jasa Konsultan Consultant Fee	8.543	7.472	1.071	14,33%	●
Investasi Investment	16.544	244	16.300	6.680,33%	●
Imbalan Pasca Kerja - Bersih Post Employment Benefit - Net	5.323	6.039	(716)	-11,86%	●
Penyisihan (Pemulihan) Penurunan Nilai Piutang Impairment (Recovery) of Receivables	(32.864)	65.927	(98.791)	-149,85%	●
Lain-lain (di bawah Rp 1 miliar) Others (below Rp1 billion)	51.973	27.357	24.616	89,98%	●
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	6.289.760	6.292.565	(2.805)	-0,04%	●

Beban usaha tahun 2019 tercatat sebesar Rp6,29 triliun mengalami penurunan 0,04% atau setara dengan Rp2,81 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp6,29 triliun. Penurunan beban usaha disebabkan oleh turunnya beban proyek Entitas Anak Perusahaan pada tahun 2019. Penurunan beban proyek entitas anak ini sejalan dengan penurunan pendapatan jasa konstruksi pada tahun 2019. Beban proyek dari jasa konstruksi tahun 2019 tercatat sebesar Rp5,16 triliun, mengalami penurunan 6,78% atau sebesar Rp 375,35 miliar dari beban proyek tahun 2018 sebesar Rp5,53 triliun. Di sisi lain, beban bunga bank tahun 2019 meningkat 102,88% dibandingkan tahun 2018 sejalan dengan peningkatan saldo pinjaman tahun 2019 serta penerbitan MTN dan SBK pada tahun 2019.

Laba Usaha

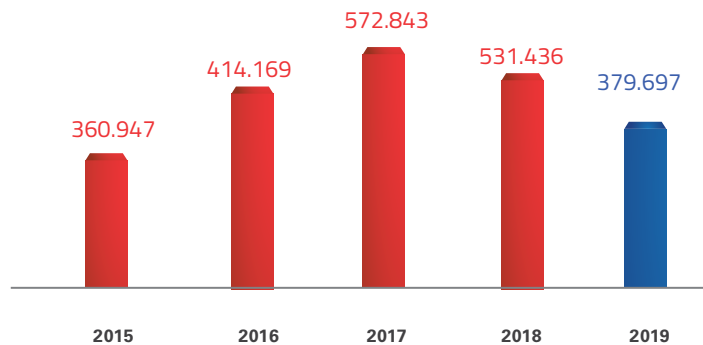
Laba Usaha didapatkan dari akun pendapatan usaha yang diakumulasi dengan beban usaha. Laba Usaha tahun 2019 sebesar Rp379,70 miliar, turun 28,55% atau setara dengan Rp151,74 dibandingkan Laba Usaha tahun 2018 sebesar Rp531,44 miliar. Penurunan Laba usaha tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 adalah karena penurunan pendapatan usaha lebih rendah dari pada penurunan beban usaha.

Operating expenses in 2019 were recorded at Rp6.29 trillion, a decrease of 0.04% or Rp2.81 billion compared to 2018 at Rp6.29 trillion, because the correlation of the decrease in operating expenses was not only due to a decrease in construction service revenues. Project expenses from construction services in 2019 were recorded at Rp5.16 trillion, decreased by 6.78% or Rp375.35 billion from project expenses in 2018 of Rp5.53 trillion. On the other hand, interest expenses in 2019 increased by 102.88% compared to 2018 in line with the increase in loan balance in 2019 and the issuance of MTN and Commercial Paper in 2019.

Operating Income

Operating income is obtained from operating income accounts that are accumulated with operating expenses. Operating income in 2019 was Rp379.70 billion, a decrease of 28.55% or Rp151.74 compared to operating income in 2018 amounting to Rp531.44 billion. The decrease in 2019's operating income compared to 2018 was because the decrease in operating income was lower than the decrease in operating expenses.

Perkembangan Laba Usaha 2015-2019 (Rp-juta)
Operating Income 2015-2019 (Rp-million)



Keuntungan Penjualan Aset Tetap

Pada tahun 2019 Perusahaan membukukan keuntungan penjualan aset tetap sebesar Rp 237 juta, meningkat sebesar 200% karena pada tahun sebelumnya tidak terdapat keuntungan penjualan aset tetap. Di tahun sebelumnya, Perusahaan tidak mencatatkan keuntungan penjualan aset tetap.

Advantages of Sales of Fixed Assets

In 2019, the Company booked the advantages of sales of fixed assets amounted to Rp 237 million, an increase of 200% because in the previous year there were no advantages of sales of fixed assets. In the previous year, the Company did not record any advantages of sales of fixed assets.

Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga tahun 2019 sebesar Rp15,42 miliar mengalami penurunan 0,58% atau setara dengan Rp90 juta dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp15,51 miliar. Pendapatan bunga didapatkan dari kas Perusahaan yang ditempatkan di bank.

Interest Income

Interest income in 2019 was Rp15.42 billion, a decrease of 0.58% or Rp90 million compared to 2018 which was Rp15.51 billion. Interest income is derived from the Company's cash placed at the banks.

Beban Bunga dan Keuangan

Beban bunga dan keuangan tahun 2019 tercatat sebesar Rp89,23 miliar mengalami peningkatan 17,40% atau setara dengan Rp13,23 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp76,00 miliar. Beban bunga dan keuangan didapatkan dari surat berharga yang diterbitkan.

Interest Expenses and Financial Charges

Interest expenses and financial charges in 2019 were recorded at Rp89.23 billion, an increase of 17.40% or Rp13.23 billion compared to 2018 at Rp76.00 billion. Interest expenses and financial charges are obtained from securities issued.

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi

Di tahun 2019, tidak terdapat kenaikan nilai wajar atas properti investasi sebagaimana yang terdapat pada tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp75,45 miliar.

Increase in Fair Value of Investment Property

In 2019, there was no increase in fair value of investment property as recorded in 2018 of Rp75.45 billion.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**Beban Pajak Final**

Beban pajak final tahun 2019 sebesar Rp159,20 miliar, mengalami penurunan 8,59% atau setara dengan Rp14,97 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp174,17 miliar. Penurunan ini disebabkan menurunnya beban pajak final konstruksi sebesar 8,64% atau setara dengan Rp15,01 miliar dari Rp173,96 miliar di tahun 2018 menjadi Rp158,93 miliar di tahun 2019.

Bagian Laba Ventura Bersama

Bagian laba ventura bersama tahun 2019 tercatat sebesar Rp66,71 miliar mengalami penurunan 37,55% atau setara dengan Rp40,12 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp106,82 miliar. Bagian laba ventura bersama didapatkan dari entitas ventura bersama atau Kerja Sama Operasi (KSO) PT Nindya Karya.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Jumlah pendapatan (beban) lain-lain tahun 2019, sebesar Rp122,08 miliar mengalami kenaikan 526,52% atau setara dengan Rp159.46 miliar dibandingkan tahun 2018 yang tercatat minus Rp37,39 miliar.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak tahun 2019 sebesar Rp335,71 miliar, turun 23,99% atau setara dengan Rp105,95 miliar dibandingkan Laba Sebelum Pajak tahun 2018 sebesar Rp441,66 miliar. Penurunan tersebut terutama karena penurunan laba usaha yang dibukukan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

Final Tax Expenses

Final tax expenses in 2019 amounted to Rp159.20 billion, decreased by 8.59% or Rp14.97 billion compared to 2018 which amounted to Rp174.17 billion. This decrease was due to the decrease in construction final tax expenses by 8.64% or Rp15.01 billion, from Rp173.96 billion in 2018 to Rp158.93 billion in 2019.

Share of Profit of Joint Venture

Share of profit of joint venture in 2019 was recorded at Rp66.71 billion, a decrease of 37.55% or Rp40.12 billion compared to 2018 which at Rp106.82 billion. Share of profit of joint venture is obtained from joint venture entity or joint operation (KSO) of PT Nindya Karya.

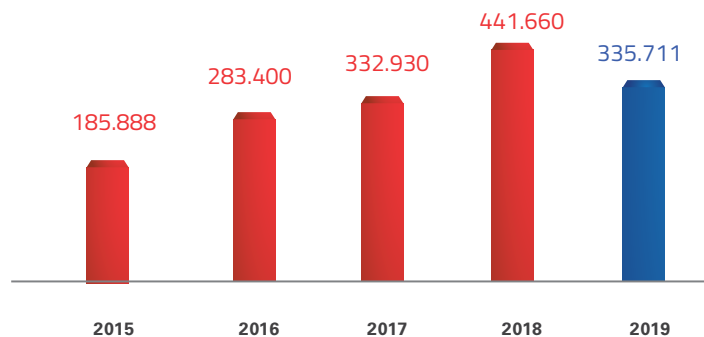
Other Income (Expenses)

Total other income (expenses) in 2019 amounting to Rp122.08 billion, increased by 526.52% or Rp159.46 billion compared to 2018, which was recorded at minus Rp37.39 billion.

Income before tax

Income Before Tax in 2019 was Rp335.71 billion, decreased by 23.99% or Rp105.95 billion compared to Income Before Tax in 2018 of Rp441.66 billion. The decrease was mainly due to the decrease in 2019's operating income compared to 2018.

Perkembangan Laba Sebelum Pajak 2015-2019 (Rp-juta)
income Before Tax 2015-2019 (Rp-million)



Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan tahun 2019, pajak penghasilan Perusahaan tercatat sebesar Rp8,64 miliar mengalami penurunan 32,82% atau setara dengan Rp4,22 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp 12,86 miliar. Penurunan ini terutama meningkatnya manfaat pajak tangguhan sebesar 92,24% atau setara dengan Rp4,02 miliar dari Rp4,35 miliar di tahun 2018 menjadi Rp8,37 miliar di tahun 2019.

Income Tax

Income Tax is the combined amount of current tax and deferred tax. In 2019, the Company's income tax amounted to Rp8.64 billion, decreased by 32.82% or Rp4.22 billion compared to 2018 which amounted to Rp 12.86 billion. This decrease was primarily due to an increase in deferred tax benefits by 92.24% or Rp4.02 billion, from Rp4.35 billion in 2018 to Rp8.37 billion in 2019.

Laba Tahun Berjalan

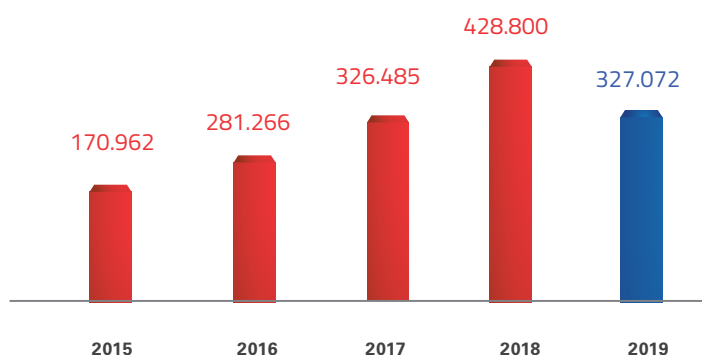
Laba Tahun Berjalan adalah laba bersih Perusahaan yang didapatkan dari akun laba sebelum pajak yang diakumulasi dengan pajak penghasilan. Laba Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp327,07 miliar, turun 23,72% atau setara dengan Rp101,73 miliar dibandingkan Laba Tahun Berjalan tahun 2018 sebesar Rp428,80 miliar.

Income for the Year

Income for the year is the Company's net income derived from the income before tax account which is accumulated with income tax. Income for the Year 2019 was Rp327.07 billion, a decrease of 23.72% or Rp101.73 billion compared to Income for the Year 2018 of Rp428.80 billion.

Perkembangan Laba Tahun Berjalan 2015-2019 (Rp-juta)

Income for the Year 2015-2019 (Rp-million)



Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2019 sebesar minus Rp10,12 miliar mengalami penurunan 116,38% atau setara dengan Rp71,90 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp61,78 miliar. Penurunan ini disebabkan tidak terdapatnya surplus revaluasi aset tetap di tahun 2019 dan adanya kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasti sebesar Rp6,65 miliar.

Other Comprehensive Income

Other Comprehensive Income at December 31, 2019 amounted to minus Rp10.12 billion, decreased by 116.38% or Rp71.90 billion compared to 2018 of Rp61.78 billion. This decrease was due to the absence of revaluation surplus of fixed assets in 2019 and the existence of actuarial loss on defined benefit liabilities of Rp6.65 billion.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan**

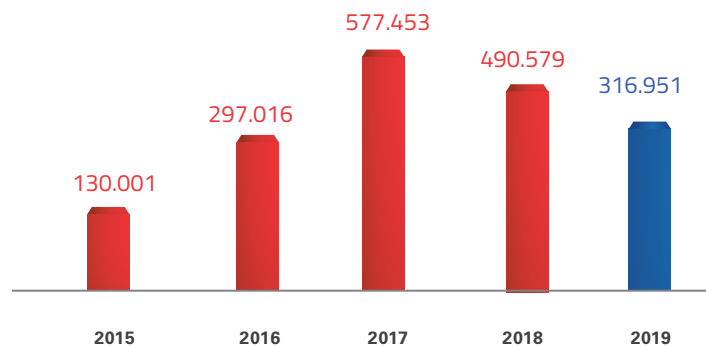
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan didapatkan dari akun laba tahun berjalan yang diakumulasikan dengan penghasilan komprehensif lain. Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp316,95 miliar, turun 35,39% atau setara dengan Rp173,63 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp490,58 miliar.

Total Other Comprehensive Income for the Year

Total Comprehensive Income for the Year is obtained from the income for the year account which is accumulated with other comprehensive income. Total Other Comprehensive Income for the Year 2019 was Rp316.95 billion, a decrease of 35.39% or Rp173.63 billion compared to 2018 amounting to Rp490.58 billion.

Perkembangan Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan 2015-2019 (Rp-juta)

Total Other Comprehensive Income for the Year 2015-2019 (Rp-million)

**Penghasilan Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk**

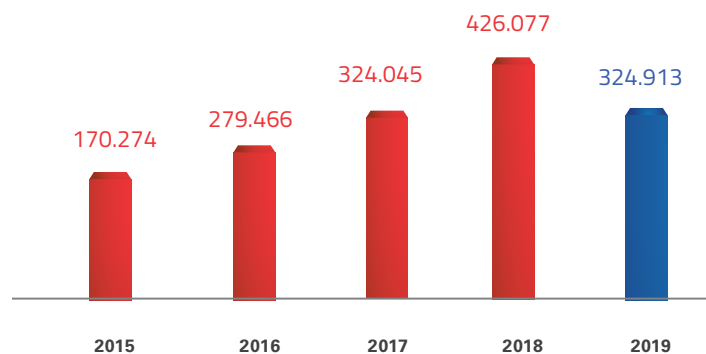
Penghasilan berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp324,91 miliar mengalami penurunan sebesar 23,74% atau setara dengan Rp101,16 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp426,08 miliar.

Income for the Year Attributable To Owner of the Parent Entity

Income for the year attributable to owner of the parent entity as of December 31, 2019 was recorded at Rp324.91 billion, a decrease of 23.74% or Rp101.16 billion compared to 2018 which amounted to Rp426.08 billion.

Perkembangan Penghasilan Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 2015-2019 (Rp-juta)

Income for the Year Attributable to Owner of Parent Entity 2015-2019 (Rp-million)



Penghasilan Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

Penghasilan tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2,16 miliar mengalami penurunan sebesar 20,71% atau setara dengan Rp564 juta dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp2,72 miliar.

Income for the Year Attributable to Non-controlling Interests

Income for the year attributable to non-controlling interests as of December 31, 2019 was Rp2.16 billion, a decrease of 20.71% or Rp564 million compared to 2018 which amounted to Rp2.72 billion.

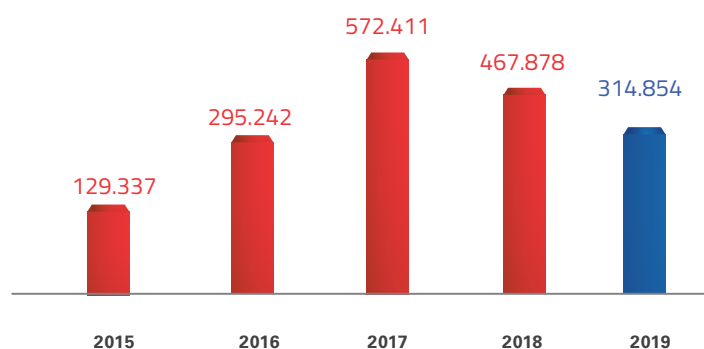
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp314,85 miliar mengalami penurunan 32,71% atau setara dengan Rp153,02 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp467,88 miliar.

Comprehensive Income for the Year Attributable to Owner of the Parent Entity

Comprehensive income for the year attributable to owner of the parent entity as of December 31, 2019 was recorded at Rp314.85 billion, a 32.71% decrease or Rp153.02 billion compared to 2018 which amounted to Rp467.88 billion.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 2015-2019 (Rp-juta)
Comprehensive Income for the Year Attributable to Owner of the Parent Entity

**Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali**

Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pengendali sebesar Rp2,10 miliar mengalami penurunan sebesar 90,76% atau setara dengan Rp20,60 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp22,70 miliar.

Comprehensive Income for the Year Attributable to Non-controlling Interests

Comprehensive income for the year attributable to controlling interests amounted to Rp.10.10 billion, decreased by 90.76% or Rp20.60 billion compared to 2018 of Rp22.70 billion.

Laba per Saham

Laba per saham dihitung dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang dibagi dengan jumlah lembar saham dalam modal saham Perusahaan.

Earnings per Share

Earnings per share is calculated from income for the year attributable to owner of the parent entity divided by the number of shares in the Company's share capital.

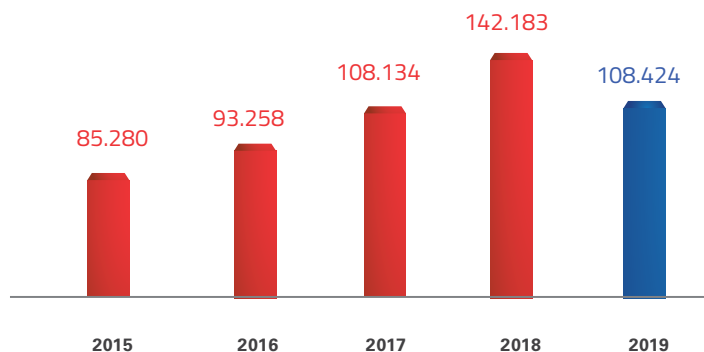
TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

Laba per Saham Earnings per Share	2019	2018	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp) Income for the Year Attributable to Owner of the Parent Entity (Rp)	324.914.807.035	426.076.501.124	(101.161.694.089)	-23,74%	●
Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (sheets)	2.996.688	2.996.688	-	-	
Laba per Saham (Rp) Earnings per Share (Rp)	108.424	142.183	(33.759)	-23,74%	●

Laba per Saham per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp108.424 per lembar saham, turun 23,74% atau setara dengan Rp33.759 dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp142.183 per lembar saham.

Earnings per Share as of December 31, 2019 were recorded at Rp108,424 per share, a decrease of 23.74% or Rp33,759 compared to 2018 which was recorded at Rp142,183 per share.

Laba per Saham 2015-2019
Earnings per Share 2015-2019



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Arus kas menggambarkan pemasukan dan pengeluaran kas Perusahaan dalam periode tertentu.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

Cash flows represent the Company's cash income and expenditure for a certain period.

Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flows	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	(380.193)	(24.606)	(355.587)	-1,445,12%	●
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investment Activities	(1.489.847)	(1.205.286)	(284.561)	-23,61%	●
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	1.612.059	916.612	695.447	75,87%	●
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	(257.981)	(313.280)	55.299	-17,65%	●
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	1.365.617	1.694.156	(328.539)	-19,39%	●
Kas Airborne (Pelepasan Saham Airborne) Airborne Cash (Airborne Shares Disposal)	-	(16.926)	-	-	
Penambahan dari Akuisisi Additional Cash of Acquisition	-	1.667	-	-	
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	1.107.636	1.365.617	(257.981)	-18,89%	●

Arus Kas Perusahaan terdiri dari kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi, kas bersih digunakan aktivitas investasi, dan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan. Kinerja arus kas Perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

The Company's Cash Flows consist of net cash used for operating activities, net cash used for investing activities, and net cash provided by financing activities. The Company's cash flows performance can be explained as follows.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2018-2019 (Rp-juta)
Cash Flows from Operating Activities 2018-2019 (Rp-million)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	6.324.749	5.930.344	394.405	6,65%	●
Penyaluran Pembiayaan Konsumen Disbursement of Financing	(497.110)	(566.485)	69.375	-12,25%	●
Penerimaan Restitusi Pajak Cash Receipts from Tax Refund	22.147	18.656	3.491	18,71%	●
Penerimaan Bunga atas Pinjaman yang Diberikan Proceeds from Loan Receivables Interest	52.793	70.923	(18.130)	-25,56%	●
Penerimaan Penggantian Biaya Reimbursable Cost of Assets	1.196	1.558	(362)	-23,23%	●

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATIONArus Kas dari Aktivitas Operasi 2018-2019 (Rp-juta)
Cash Flows from Operating Activities 2018-2019 (Rp-million)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pembayaran Beban Usaha Payment of Operating Expenses	(5.973.411)	(4.944.868)	(1.028.543)	20,80%	●
Pembayaran Beban Bunga Payment of Interest Expenses	(363.107)	(228.358)	(134.749)	59,01%	●
Pembayaran Pajak Payment of Taxes	(226.249)	(226.442)	193	-0,09%	●
Penerimaan Hasil Investasi Proceeds of Investment	245.873	165.248	80.625	48,79%	●
Pencairan Surat Berharga Diperdagangkan Receipts from Trading Securities	8.442	638	7.804	1.223,20%	●
Penambahan Aset Lancar Lainnya Additional of Other Current Assets	-	(290.918)	290.918	-	
Penerimaan Lainnya Other Income	24.484	45.098	(20.614)	-45,71%	●
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES	(380.193)	(24.606)	355.587	1.445,12%	●

Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi tahun 2019 sebesar Rp380,19 miliar, meningkat 1.445,12% atau setara dengan Rp355,58 miliar dibandingkan Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi tahun 2018 sebesar Rp24,61 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan peningkatan pembayaran beban usaha dibandingkan tahun sebelumnya.

Net Cash used in Operating Activities in 2019 amounted to Rp380.19 billion, an increase of 1,445.12% or Rp355.58 billion compared to Net Cash used in Operating Activities in 2018 of Rp24.61 billion. This increase was mainly due to an increase in the payment of operating expenses compared to the previous year.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2018-2019 (Rp-juta)
Cash Flows from Investing Activities 2018-2019 (Rp-million)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	(231.067)	(478.776)	247.709	-51,74%	●
Perolehan Properti Investasi Acquisition of Investment Property	(641)	(106.653)	106.012	-99,40%	●

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2018-2019 (Rp-juta)
Cash Flows from Investing Activities 2018-2019 (Rp-million)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Hasil Penjualan Aset Tetap Proceeds from Sales of Fixed Assets	1.525	1.087	438	40,29%	●
Penerimaan dari Divestasi Proceeds from Divestment	-	11.000	(11.000)	-	
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Ventures	-	(53.148)	53.148	-	
Pencairan (Penempatan) Surat Berharga Tersedia untuk Dijual Disbursement (Placement) of Available for Sale Securities	(13.519)	17.779	(31.298)	-176,04%	●
Penempatan Investasi pada Entitas Anak Investment in Subsidiaries	-	(37.000)	37.000	-	
Penempatan Uang Muka Investasi Advances of Investment	-	(6.250)	6.250	-	
Hasil Investasi Ventura Bersama Proceeds from Investment in Joint Ventures	44.306	-	44.306	-	
Penambahan Investasi Lainnya Additional Investments	(1.290.451)	(553.325)	(737.126)	133,22%	●
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI NET CASH IN INVESTING ACTIVITIES	(1.489.847)	(1.205.286)	-284.561	23,61%	●

Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2019 sebesar Rp1,49 triliun, meningkat 23,61% atau setara dengan Rp284,56 miliar dibandingkan Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2018 sebesar Rp1,21 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan pada Penambahan Investasi Lainnya sebesar 133,22%.

Net Cash Used in Investing Activities in 2019 amounted to Rp1.49 trillion, an increase of 23.61% or Rp284.56 billion compared to Net Cash used in Investing Activities in 2018 of Rp1.21 trillion. This increase was mainly due to an increase in Additional Other Investments amounted to 133.22%.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2018-2019 (Rp-juta)
Cash Flows from Financing Activities 2018-2019 (Rp-million)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Penerimaan Pinjaman Receipts from Loan	13.066.442	13.202.721	(136.279)	-1,03%	●

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATIONArus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2018-2019 (Rp-juta)
Cash Flows from Financing Activities 2018-2019 (Rp-million)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)	2018 (Rp-juta) 2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pembayaran Pinjaman Payment for Loans	(12.011.774)	(12.311.859)	300.085	-2,44%	●
Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Receipts from Securities Issuance	841.027	-	841.027	-	
Pembayaran Penerbitan Surat Berharga Payment for Securities Issuance	(240.000)	-	(240.000)	-	
Pembayaran Dividen Dividend Payment	(43.636)	(20.175)	(23.461)	116,29%	
Penerimaan Dividen Dividend Receipt	-	20.925	(20.925)	-	●
Penerimaan Utang dari Pihak Berelasi Receipts from Related Parties	-	25.000	(25.000)	-	
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN NET CASH PROVIDED BY (USED IN) FINANCING ACTIVITIES	1.612.059	916.612	695.447	75,87%	●

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan tahun 2019 sebesar Rp1,61 triliun, meningkat 75,87% atau setara dengan Rp695,45 miliar dibandingkan Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan tahun 2018 sebesar Rp916,61 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan penerimaan penerbitan Surat Berharga, dalam bentuk Surat Berharga Komersial ("SBK") dan *Medium Term Notes* (MTN) yang dilakukan Perusahaan di akhir tahun 2019.

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS SERTA KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

Dengan akumulasi pada Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, serta Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan seperti yang telah diuraikan di atas, saldo Kas dan Setara Kas posisi 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1,11 triliun mengalami penurunan 18,89% setara dengan sebesar Rp257,98 miliar dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1,36 triliun.

Net Cash Provided by Financing Activities in 2019 amounted to Rp1.61 trillion, an increase of 75.87% or Rp.695.45 billion compared to Net Cash Provided by Financing Activities in 2018 of Rp916.61 billion. This increase was mainly due to receipts from securities issuance of Securities, in the form of Commercial Paper ("CP") and Medium Term Notes (MTN) conducted by the Company at the end of 2019.

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT AND CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

With the accumulation of Cash Flows from Operating Activities, Cash Flows from Investing Activities, and Cash Flows from Financing Activities as described above, the balance of Cash and Cash Equivalents as at December 31, 2019 was Rp1.11 trillion, a decrease of 18.89% or Rp257.98 billion compared to the position on December 31, 2018, which was Rp1.36 trillion.

Rasio-rasio Kinerja Keuangan

Financial Performance Ratio

Rasio Ratio	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	5,69%	7,79%	-2,10	-26,92%	●
Margin Laba Sebelum Pajak Income Before Tax Margin	5,03%	6,47%	-1,44	-22,20%	●
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	4,90%	6,28%	-1,38	-21,91%	●
Tingkat Pengembalian Aset Return on Assets	2,27%	3,65%	-1,38%	-37,84%	●
Tingkat Pengembalian Modal Return on Equity	6,03%	8,15%	-2,12	-26,00%	●
Rasio Pertumbuhan Growth Ratio					
Pendapatan Usaha Revenues	-2,26%	7,37%	-9,63%	-130,73%	●
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	-23,72%	31,34%	-55,06	-175,70%	●
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	-35,39%	-15,04%	-20,35	135,32%	●
Aset Assets	22,74%	23,88%	-1,14	-4,77%	●
Liabilitas Liabilities	38,71%	35,88%	2,83	7,89%	●
Ekuitas Equity	3,07%	11,73%	-8,66	-73,83%	●

Dibandingkan tahun 2018, rasio-rasio keuangan Perusahaan tahun 2019 tercatat lebih rendah. Turunnya pendapatan Perusahaan yang terutama disebabkan pendapatan dari jasa konstruksi berdampak terhadap rasio-rasio keuangan Perusahaan.

Compared to 2018, the Company's financial ratios in 2019 were lower. The decline in revenues which was mainly due to construction service revenues had an impact on the Company's financial ratios.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATIONKEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN
TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dapat diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.

Rasio Likuiditas: Mengukur Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

RASIO LANCAR = ASET LANCAR : LIABILITAS JANGKA PENDEK

ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY

ABILITY TO PAY DEBT

The Company's ability to meet its obligations can be measured using a solvency ratio and a liquidity ratio. The solvency ratio is a ratio that measures the ability of the Company to pay all of its debts, both short and long term. While the liquidity ratio is a ratio to measure the ability of the Company to pay short-term debts.

Liquidity Ratio: Measuring Ability to Pay Short-Term Debts

CURRENT RATIO = CURRENT ASSETS: CURRENT LIABILITIES

	2019	2018	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas (Rp-juta) Cash and Cash Equivalents (Rp-million)	1.107.636	1.365.617	(257.981)	-18,89%	●
Efek/Aset keuangan diperdagangkan (Rp-juta) Securities/Financial Assets Traded (Rp-million)	70.260	81.220	(10.960)	-13,49%	●
Aset Lancar (Rp-juta) Current Assets (Rp-million)	8.671.359	7.280.098	1.391.261	19,11%	●
Liabilitas Jangka Pendek (Rp-juta) Current Liabilities (Rp-million)	7.101.679	5.440.230	1.661.449	30,54%	●
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
- Rasio Lancar (%) - Current Ratio (%)	122,10%	133,82%	(11,72)	-8,76%	●
- Rasio Kas (%) - Cash Ratio (%)	16,59%	26,60%	(10,01)	-37,63%	●

Kemampuan membayar utang jangka pendek Perusahaan dicerminkan dengan rasio likuiditas dimana tingkat likuiditas dapat dilihat dari rasio lancar dan rasio kas. Dari rasio-rasio likuiditas, tingkat likuiditas Perusahaan pada tahun 2019 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio lancar mengalami penurunan dari 133,82% di tahun 2018 menjadi 122,10% di tahun 2019, sedangkan rasio kas mengalami penurunan dari 26,60% di tahun 2018 menjadi 16,59% di tahun 2019. Namun demikian, Perusahaan tetap dalam kondisi likuid sehingga masih dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya.

The Company's ability to pay short-term debt is reflected by the liquidity ratio where the level of liquidity can be seen from the current ratio and cash ratio. From the liquidity ratio, the Company's liquidity level in 2019 has decreased compared to the previous year. The current ratio decreased from 133.82% in 2018 to 122.10% in 2019, while the cash ratio decreased from 26.60% in 2018 to 16.59% in 2019. However, the Company remained in a liquid condition hence still able to meet its short-term obligations using its current assets.

Rasio Solvabilitas: Mengukur Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Solvency Ratio: Measuring Ability to Pay Short-Term and Long-term Debt

$$DEBT TO EQUITY RATIO = \frac{\text{TOTAL DEBT INTEREST BEARING}}{\text{TOTAL EKUITAS}}$$

$$DEBT TO EQUITY RATIO = \frac{\text{TOTAL DEBT INTEREST BEARING}}{\text{TOTAL EQUITY}}$$

	2019	2018	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	
Total Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)	14.415.432	11.744.501	2.670.931	22,74%	●
Total Debt Interest Bearing (Rp-juta) Total Debt Interest Bearing (Rp-million)	4.919.508	2.906.228	2.013.280	69,27%	●
Total Ekuitas (Rp-juta) Total Equity (Rp-million)	5.423.544	5.262.043	161.501	3,07%	●
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
- Rasio Utang terhadap Modal, atau <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) (%) - Debt to Equity Ratio (DER) (%)	90,71%	55,23%	35,48%	64,24%	●
- Rasio Utang terhadap Aset, atau <i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) (%) - Debt to Asset Ratio (DAR) (%)	34,13%	24,75%	9,38%	37,09%	●

Kemampuan membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek Perusahaan terlihat dari rasio solvabilitas yang terdiri dari rasio Utang terhadap Modal, atau *Debt to Equity Ratio* (DER), serta rasio Utang terhadap Aset, atau *Debt to Asset Ratio* (DAR). Rasio Utang terhadap Modal Perusahaan tahun 2019 sebesar 90,71%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 55,23%. Sedangkan rasio Utang terhadap Aset Perusahaan tahun 2019 sebesar 34,13%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 24,75%.

The Company's ability to pay long-term and short-term debt can be seen from the solvency ratio which consists of Debt to Equity Ratio (DER) and Debt to Asset Ratio (DAR). The debt to capital ratio of the Company in 2019 was 90.71%, an increase compared to 2018 which was 55.23%. While the Debt to Asset ratio of the Company in 2019 was 34.13%, an increase compared to 2018 of 24.75%.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

Adanya penerbitan surat utang melalui *Medium Term Notes* (MTN) berdampak terhadap peningkatan liabilitas Perusahaan. Penerbitan surat utang ini sejalan dengan strategi untuk memperkuat permodalan jangka panjang Perusahaan.

The issuance of debt securities through Medium Term Notes (MTN) has an impact on increasing the Company's liabilities. The issuance of debt securities is in line with the strategy to strengthen the Company's long-term capital.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung Lama Penagihan Rata-rata atau *Collection Period* serta Rasio Perputaran Piutang. Semakin kecil nilai *Collection Period* menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat.

RECEIVABLE COLLECTIBILITY

The Company's ability to collect receivables can be determined by calculating the Average Collection Period or Receivable Turnover Ratio. The smaller the value of Collection Period shows faster ability of the Company to collect receivables.

$$\text{Rasio Perputaran Piutang} = \frac{\text{Piutang Usaha} \mid \text{Accounts Receivable}}{\text{Pendapatan Usaha} \mid \text{Operating Revenues}} \times 365 \text{ hari} \mid \text{days}$$

$$\text{Receivables Turnover Ratio} = \frac{\text{Accounts Receivable}}{\text{Operating Revenues}} \times 365 \text{ days}$$

Di bawah ini disampaikan tabel tingkat kolektibilitas piutang tahun 2018 dan 2019.

Below is the table of accounts receivable collectibility in 2018 and 2019.

Rasio Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectibility Ratio

	2019	2018	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	
Piutang Usaha (Rp-juta) Accounts Receivable (Rp-million)	1.477.597	1.176.353	301.244	25,61%	●
Pendapatan Usaha (Rp-juta) Revenues (Rp-million)	6.669.457	6.824.001	(154.544)	-2,26%	●
Lama Penagihan Rata-rata (hari) Average Collection Period (days)	80,86	62,92	17,94	28,51%	●
Rasio Perputaran Piutang (kali) Receivables Turnover Ratio (times)	4,51	5,80	(1,29)	-22,24%	●

Collection Period tahun 2019 sebesar 80,86 hari, mengalami kenaikan dibandingkan dengan *Collection Period* tahun 2018 sebesar 48 hari. Sedangkan Rasio Perputaran Piutang mengalami penurunan, dari 5,80 kali di tahun 2018 menjadi 4,51 kali di tahun 2019. Adanya peningkatan piutang usaha sebesar 25,61% memberikan dampak terhadap tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan. Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) sebagai berikut:

The 2019 Collection Period was 80.86 days, an increase compared to the 2018 Collection Period of 48 days. While the Receivables Turnover Ratio has decreased, from 5.80 times in 2018 to 4.51 times in 2019. The increase in accounts receivable by 25.61% had an impact on the Company's collectibility level. The amount of accounts receivable by age (days) is as follows:

Umur Piutang Usaha
Accounts Receivable Age

	2019 (Rp-million)	2018 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
< 12 Bulan < 12 months	549.237	530.758	18.479	3,48%	●
> 12 - 24 Bulan > 12 - 24 months	279.662	187.609	92.053	49,07%	●
> 24 Bulan > 24 months	752.580	564.492	188.088	33,32%	●
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Allowance for Receivables Impairment Losses	(103.883)	(106.506)	2.623	-2,46%	●
JUMLAH PIUTANG USAHA TOTAL ACCOUNTS RECEIVABLE	1.477.597	1.176.353	301.244	25,61%	●

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

The management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible receivables.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

STRUKTUR PERMODALAN PERUSAHAAN

COMPANY'S CAPITAL STRUCTURE

Komposisi struktur modal Perusahaan tahun 2019 terlihat pada tabel di bawah ini.

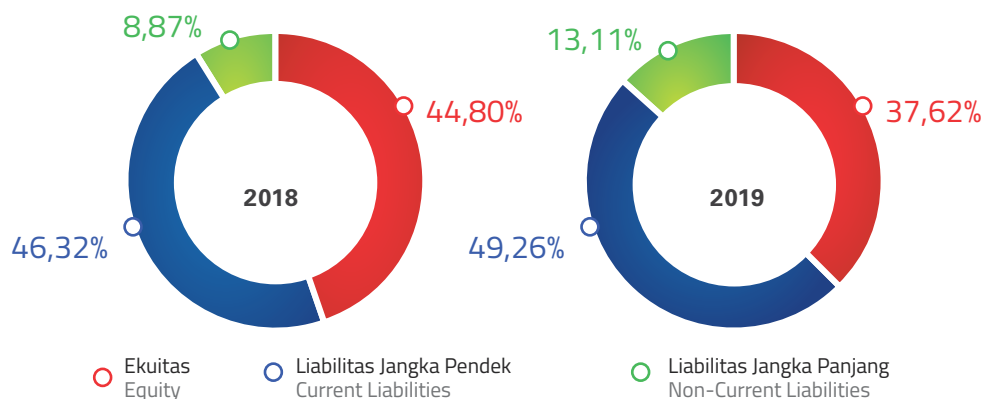
The composition of the Company's capital structure in 2019 can be seen in the table below.

Struktur Modal Perusahaan dan Perubahannya
The Company's Capital Structure and Changes

	2019		2018		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Liabilitas Liabilities							
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	7.101.679	49,26%	5.440.230	46,32%	1.661.449	30,54%	●
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.890.210	13,11%	1.042.228	8,87%	847.982	81,36%	●
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	8.991.888	62,38%	6.482.458	55,20%	2.509.430	38,71%	●

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATIONStruktur Modal Perusahaan dan Perubahannya
The Company's Capital Structure and Changes

	2019		2018		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Jumlah Ekuitas Total Equity	5.423.544	37,62%	5.262.043	44,80%	161.501	3,07%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	14.415.432	100,00%	11.744.501	100,00%	2.670.931	22,74%

Komposisi Struktur Modal Perusahaan
The Company's Capital Structure Composition

Terdapat perubahan signifikan pada liabilitas jangka panjang Perusahaan yang meningkat hingga 81,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan penerbitan surat utang *Medium Term Notes* (MTN) yang dilakukan di akhir tahun 2019.

There was a significant change in the Company's non-current liabilities which increased to 81.36% compared to the previous year. This increase was mainly due to the issuance of Medium Term Notes (MTN) conducted at the end of 2019.

Kebijakan Manajemen Perusahaan atas Struktur Modal dan Dasar Kebijakan

Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung dengan membagi utang neto dengan jumlah ekuitas. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas.

The Company Management' Policy on Capital Structure and Basis of Policy

The Company monitors the capital based on debt to adjusted capital ratio. This ratio is calculated as the following: net debt is divided with total equity. Net debt is comprised of deduction of total debts (as stated in the financial position statements) with cash and cash equivalents.

Tujuan Perusahaan dan entitas anak dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal secara efektif.

Dalam rangka pengembangan usaha tahun 2019, Perusahaan melakukan kebijakan struktur modal dengan penambahan liabilitas sebesar 38,71% atau setara dengan Rp2,51 triliun yang terutama berasal dari peningkatan pinjaman bank dan lembaga keuangan.

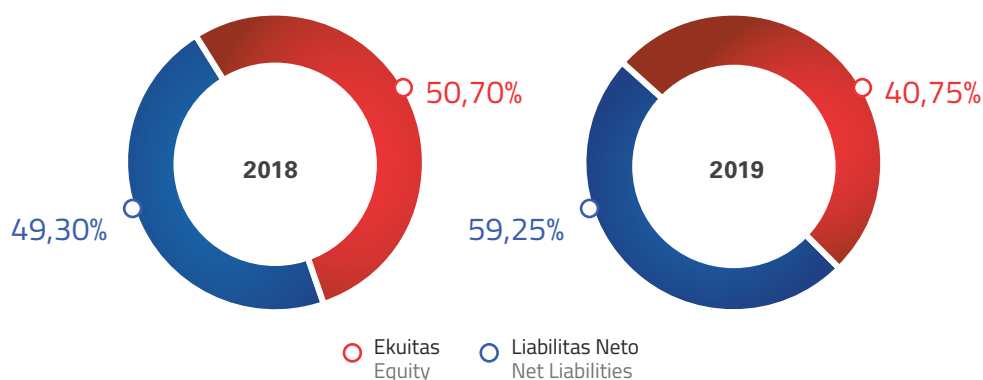
The objectives of the Company and subsidiaries in managing capital is to protect the Company's ability to maintain business continuity, therefore the entity can continue to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to manage the optimal capital structure to minimize the cost of capital effectively.

In regards to business development in 2019, the Company implemented capital structure policy through additional liabilities of 38.71% or Rp2.51 trillion, which was mainly derived from additional bank and financial institution loans.

Manajemen Struktur Modal Perusahaan The Company's Capital Structure Management

	2019	2018	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	
Total Liabilitas (Rp-juta) Total Liabilities (Rp-million)	8.991.888	6.482.458	2.509.430	38,71%	●
dikurangi: minus:					
Kas dan Setara Kas (Rp-juta) Cash and Cash Equivalents (Rp-million)	1.107.636	1.365.617	(257.981)	-18,89%	●
Liabilitas Neto (Rp-juta) Net Liabilities (Rp-million)	7.884.252	5.116.841	2.767.411	54,08%	●
Total Ekuitas (Rp-juta) Total Equity (Rp-million)	5.423.544	5.262.043	161.501	3,07%	●
Rasio Liabilitas Neto terhadap Modal (kali) Net Debt to Equity Ratio (times)	1,45	0,97	0,48	49,48%	●

Komposisi Struktur Modal Perusahaan The Company's Capital Structure Composition



TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATIONIKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI
BARANG MODAL

Perusahaan memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal yang memiliki pengaruh terhadap pendapatan Perusahaan dengan uraian sebagai berikut.

PERJANJIAN RESTRUKTURISASI DAN DANA TALANGAN BUMN KEPADA PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
SOEs RESTRUCTURING AND BAILOUT FUNDS AGREEMENT TO PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Pihak 1:
Perusahaan

Pihak 2:
PT Merpati Nusantara Airlines

Tujuan Ikatan:
Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Merpati Nusantara Airlines berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan. Saldo pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp662,17 miliar.

Sumber Dana:
Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:
Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:
Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

1st Party:
Company

2nd Party :
PT Merpati Nusantara Airlines

Commitment Purpose:
SOEs restructuring and bailout funds to PT Merpati Nusantara Airlines based on an SOEs Ministerial Decree, in the form of loans provided by the Company. The loan balance as at December 31, 2019 was Rp662.17 billion.

Source of funds:
Company capital structure.

Currency Used:
Rupiah.

Foreign Currency Risk Protection:
Transactions are carried out in Rupiah, thus foreign currency risk protection is not applied.

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL
GOODS INVESTMENT

The Company has material commitment for investment in capital goods that has an influence on the Company's revenues, with the following description.

PERJANJIAN RESTRUKTURISASI DAN DANA TALANGAN BUMN KEPADA PT PAL INDONESIA (PERSERO)
SOEs RESTRUCTURING AND BAILOUT FUNDS AGREEMENT TO PT PAL INDONESIA (PERSERO)

Pihak 1:
Perusahaan

Pihak 2:
PT PAL Indonesia (Persero)

Tujuan Ikatan:
Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT PAL Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan. Saldo pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp215,34 miliar.

Sumber Dana:
Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:
Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:
Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

1st Party:
Company

2nd Party :
PT PAL Indonesia (Persero)

Commitment Purpose:
SOEs restructuring and bailout funds to PT PAL Indonesia (Persero) based on an SOEs Ministerial Decree, in the form of loans provided by the Company. The loan balance as at December 31, 2019 was Rp215.34 billion.

Source of funds:
Company capital structure.

Currency Used:
Rupiah.

Foreign Currency Risk Protection:
Transactions are carried out in Rupiah, thus foreign currency risk protection is not applied.

**PERJANJIAN RESTRUKTURISASI DAN DANA TALANGAN
BUMN KEPADA PT KERTAS KRAFT ACEH (PERSERO)**
*SOEs RESTRUCTURING AND BAILOUT FUNDS AGREEMENT TO
PT KERTAS KRAFT ACEH (PERSERO)*

Pihak 1:
Perusahaan

Pihak 2:
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Tujuan Ikatan:
Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Kertas Kraft Aceh (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan. Saldo pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp141,61 miliar.

Sumber Dana:
Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:
Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:
Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

1st Party:
Company

2nd Party :
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Commitment Purpose:
SOEs restructuring and bailout funds to PT Kertas Kraft Aceh (Persero) based on an SOEs Ministerial Decree, in the form of loans provided by the Company. The loan balance as at December 31, 2019 amounted to Rp141.61 billion.

Source of funds:
Company capital structure.

Currency Used:
Rupiah.

Foreign Currency Risk Protection:
Transactions are carried out in Rupiah, thus foreign currency risk protection is not applied.

**PERJANJIAN RESTRUKTURISASI DAN DANA TALANGAN
BUMN KEPADA PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**
*SOEs RESTRUCTURING AND BAILOUT FUNDS AGREEMENT TO
PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)*

Pihak 1:
Perusahaan

Pihak 2:
PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Tujuan Ikatan:
Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan. Saldo pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp605,00 miliar.

Sumber Dana:
Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:
Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:
Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

1st Party:
Company

2nd Party :
PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Commitment Purpose:
SOEs restructuring and bailout funds to PT Dirgantara Indonesia (Persero) based on an SOEs Ministerial Decree, in the form of loans provided by the Company. The loan balance as at December 31, 2019 amounted to Rp605.00 billion.

Source of funds:
Company capital structure.

Currency Used:
Rupiah.

Foreign Currency Risk Protection:
Transactions are carried out in Rupiah, thus foreign currency risk protection is not applied.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**PERJANJIAN RESTRUKTURISASI DAN DANA TALANGAN
BUMN KEPADA PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA
(PERSERO)***SOEs RESTRUCTURING AND BAILOUT FUNDS AGREEMENT TO
PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)***Pihak 1:**
Perusahaan**Pihak 2:**
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)**Tujuan Ikatan:**

Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan. Saldo pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp28,64 miliar.

Sumber Dana:
Struktur permodalan Perusahaan.**Mata Uang yang Digunakan:**
Rupiah.**Proteksi Risiko Mata Uang Asing:**

Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

1st Party:
Company**2nd Party :**
PT Merpati Nusantara Airlines**Commitment Purpose:**

SOEs restructuring and bailout funds to PT Merpati Nusantara Airlines based on an SOEs Ministerial Decree, in the form of loans provided by the Company. The loan balance as at December 31, 2019 was Rp662.17 billion.

Source of funds:
Company capital structure.**Currency Used:**
Rupiah.**Foreign Currency Risk Protection:**

Transactions are carried out in Rupiah, thus foreign currency risk protection is not applied.

**PERJANJIAN RESTRUKTURISASI DAN DANA TALANGAN
BUMN KEPADA PT IGLAS (PERSERO)***SOEs RESTRUCTURING AND BAILOUT FUNDS AGREEMENT TO
PT IGLAS (PERSERO)***Pihak 1:**
Perusahaan**Pihak 2:**
PT Iglas (Persero)**Tujuan Ikatan:**

Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Iglas (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan. Saldo pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp89,08 miliar.

Sumber Dana:
Struktur permodalan Perusahaan.**Mata Uang yang Digunakan:**
Rupiah.**Proteksi Risiko Mata Uang Asing:**

Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

1st Party:
Company**2nd Party :**
PT Iglas (Persero)**Commitment Purpose:**

SOEs restructuring and bailout funds to PT Iglas (Persero) based on an SOEs Ministerial Decree, in the form of loans provided by the Company. The loan balance as at December 31, 2019 was Rp89,08 billion.

Source of funds:
Company capital structure.**Currency Used:**
Rupiah.**Foreign Currency Risk Protection:**

Transactions are carried out in Rupiah, thus foreign currency risk protection is not applied.

**PERJANJIAN RESTRUKTURISASI DAN DANA TALANGAN
BUMN KEPADA PT SURVAI UDARA PENAS (PERSERO)**
*SOEs RESTRUCTURING AND BAILOUT FUNDS AGREEMENT TO
PT SURVAI UDARA PENAS (PERSERO)*

Pihak 1:
Perusahaan

Pihak 2:
PT Survai Udara Penas (Persero)

Tujuan Ikatan:
Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Survai Udara Penas (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman investasi dan pinjaman dana talangan yang diberikan Perusahaan.

Sumber Dana:
Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:
Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:
Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

1st Party:
Company

2nd Party :
PT Survai Udara Penas (Persero)

Commitment Purpose:
SOEs restructuring and bailout funds to PT Survai Air Penas (Persero) based on an SOEs Ministerial Decree, in the form of investment loans and bailout loans provided by the Company.

Source of funds:
Company capital structure.

Currency Used:
Rupiah.

Foreign Currency Risk Protection:
Transactions are carried out in Rupiah, thus foreign currency risk protection is not applied.

**PERJANJIAN RESTRUKTURISASI DAN DANA TALANGAN
BUMN KEPADA PT KERTAS LECES (PERSERO)**
*SOEs RESTRUCTURING AND BAILOUT FUNDS AGREEMENT TO
PT KERTAS LECES (PERSERO)*

Pihak 1:
Perusahaan

Pihak 2:
PT Kertas Leces (Persero)

Tujuan Ikatan:
Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Kertas Leces (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan.

Sumber Dana:
Struktur permodalan Perusahaan.

Mata Uang yang Digunakan:
Rupiah.

Proteksi Risiko Mata Uang Asing:
Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.

1st Party:
Company

2nd Party :
PT Kertas Leces (Persero)

Commitment Purpose:
SOEs restructuring and bailout funds to PT Kertas Leces (Persero) based on an SOEs Ministerial Decree, in the form of loans provided by the Company.

Source of funds:
Company capital structure.

Currency Used:
Rupiah.

Foreign Currency Risk Protection:
Transactions are carried out in Rupiah, thus foreign currency risk protection is not applied.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**PERJANJIAN RESTRUKTURISASI DAN DANA TALANGAN BUMN KEPADA PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)**
*SOEs RESTRUCTURING AND BAILOUT FUNDS AGREEMENT TO PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)***Pihak 1:**
Perusahaan**Pihak 2:**
PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)**Tujuan Ikatan:**
Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan.**Sumber Dana:**
Struktur permodalan Perusahaan.**Mata Uang yang Digunakan:**
Rupiah.**Proteksi Risiko Mata Uang Asing:**
Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.**1st Party:**
Company**2nd Party :**
PT DOK and Shipping Surabaya (Persero)**Commitment Purpose:**
SOEs restructuring and bailout funds to PT DOK and Surabaya Shipping (Persero) based on an SOEs Ministerial Decree, in the form of loans provided by the Company.**Source of funds:**
Company capital structure.**Currency Used:**
Rupiah.**Foreign Currency Risk Protection:**
Transactions are carried out in Rupiah, thus foreign currency risk protection is not applied.**PERJANJIAN RESTRUKTURISASI DAN DANA TALANGAN BUMN KEPADA PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (PERSERO)**
*SOEs RESTRUCTURING AND BAILOUT FUNDS AGREEMENT TO PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (PERSERO)***Pihak 1:**
Perusahaan**Pihak 2:**
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)**Tujuan Ikatan:**
Restrukturisasi dan Dana Talangan BUMN kepada PT Industri Sandang Nusantara (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN, berupa pinjaman yang diberikan Perusahaan.**Sumber Dana:**
Struktur permodalan Perusahaan.**Mata Uang yang Digunakan:**
Rupiah.**Proteksi Risiko Mata Uang Asing:**
Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan demikian tidak diterapkan proteksi risiko mata uang asing.**1st Party:**
Company**2nd Party :**
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)**Commitment Purpose:**
SOEs restructuring and bailout funds to PT Industri Sandang Nusantara (Persero) based on an SOEs Ministerial Decree, in the form of loans provided by the Company.**Source of funds:**
Company capital structure.**Currency Used:**
Rupiah.**Foreign Currency Risk Protection:**
Transactions are carried out in Rupiah, thus foreign currency risk protection is not applied.**REALISASI INVESTASI BARANG MODAL**

Berikut disampaikan realisasi investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan di sepanjang tahun 2019.

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

The following is the realization of capital goods investment by the Company throughout 2019.

Investasi Barang Modal Capital Goods Investment	Tujuan Purpose	Nilai (Rp-juta) Value (Rp-million)
Tanah Land	Pendukung operasional Perusahaan Operational support of the Company	203.003
Bangunan Building	Pendukung operasional Perusahaan Operational support of the Company	87.182
Kendaraan Bermotor Motorized Vehicle	Pendukung operasional Perusahaan Operational support of the Company	2.522

Investasi Barang Modal Capital Goods Investment	Tujuan Purpose	Nilai (Rp-juta) Value (Rp-million)
Peralatan Proyek Project Equipment	Pendukung operasional Perusahaan Operational support of the Company	111.752
Peralatan Kantor Office Equipment	Pendukung operasional Perusahaan Operational support of the Company	5.482
Aset Dalam Proses Assets in Process	Pendukung operasional Perusahaan Operational support of the Company	190.517
Penyertaan Equity Participation	Pendukung operasional Perusahaan Operational support of the Company	43.869
Properti Investasi Investment Property	Pendukung operasional Perusahaan Operational support of the Company	2.484
Lainnya Others	Pendukung operasional Perusahaan Operational support of the Company	976
JUMLAH TOTAL		647.787

Realisasi investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan di tahun 2019 sebesar Rp647,79 miliar, yang seluruhnya digunakan untuk penambahan aset tetap untuk mendukung operasional Perusahaan. Perbandingan realisasi investasi barang modal dibandingkan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The realization of capital goods investment made by the Company in 2019 amounted to Rp647.79 billion, in which entirely was used for additional fixed assets to support the Company's operations. The realization of capital goods investment compared to the previous year can be seen in the table below.

	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	647.787	740.738	(92.951)	-12,55% 

Dampak Nilai Mata Uang Asing Bagi Kinerja Perusahaan

Perusahaan memiliki transaksi menggunakan mata uang asing USD baik sebagai kreditur maupun debitur. Sebagai kreditur, sepanjang 2019, Perusahaan memberikan fasilitas kerjasama Investasi dalam bentuk Project Financing kepada PT Ade Textile Industries ("PT Adetex") dan PT Primarindo Asia Infrastructure, Tbk ("PT PAI") dengan total nilai lebih dari USD20 juta atau hampir setara IDR283,5 Miliar. Guna mendanai fasilitas dengan PT Adetex dan PT PAI tersebut, perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri dengan plafond USD30 juta.

Impact of Foreign Currency Value for Company Performance

The Company enters into transactions using USD foreign currency as both creditor and debtor. As a creditor, throughout 2019, the Company provided investment cooperation facilities in the form of Project Financing to PT Ade Textile Industries ("PT Adetex") and PT Primarindo Asia Infrastructure, Tbk ("PT PAI") with a total value of more than USD20 million or almost equivalent to Rp283.5 billion. To fund the facilities with PT Adetex and PT PAI, the Company obtained a credit facility from Bank Mandiri with an allotment of USD30 million.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

Dengan skema pemberian dan pengembalian pinjaman PT Adetex dan PT PAI dalam mata uang USD maka perusahaan terhindar dari resiko selisih nilai mata uang bagi kinerja Perusahaan.

With the loan and repayment scheme of PT Adetex and PT PAI in USD, the Company is protected from the risk of currency differences for the Company's performance.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN KINERJA PERUSAHAAN

Pada segmen usaha Jasa Konstruksi yang didapatkan dari entitas anak, PT Nindya Karya, proyek-proyek yang dibangun oleh NK memiliki bahan baku material dengan harga yang berfluktuatif; baik disebabkan oleh ketersediaan stok barang, maupun situasi dan kondisi ekonomi politik yang berpengaruh terhadap stabilitas rantai pasokan bisnis di sektor konstruksi.

IMPACT OF PRICE CHANGES FOR THE COMPANY'S INCOME AND PERFORMANCE

In the Construction Services business segment obtained from a subsidiary, PT Nindya Karya, projects built by NK have raw materials with fluctuating prices; both due to the availability of stocks, as well as the situation and political economic conditions that affect the stability of business supply chain in the construction sector.

Kondisi perekonomian global dan nasional yang kurang menggembirakan di tahun 2019, serta peristiwa Pemilihan Umum Indonesia, menyebabkan tertundanya berbagai proyek konstruksi baik yang diadakan Pemerintah maupun swasta. Di samping itu, volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi global turut memengaruhi fluktuasi perubahan harga bahan baku material, yang memiliki dampak bagi beban usaha Perusahaan, khususnya pada beban konstruksi.

The less favorable global and national economic conditions in 2019, and Indonesian General Election, have caused delays in various government and private construction projects. In addition, the volatility of Rupiah exchange rate against foreign currencies as a result of the uncertainty of global economy also influenced the fluctuation in changes in prices of raw materials, which have an impact on the Company's operating expenses, particularly on construction expenses.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2019 DAN PROYEKSI TAHUN 2020**2019 TARGET ACHIEVEMENT AND 2020 PROJECTION**

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019, Target Tahun 2019, dan Proyeksi Tahun 2020

Table of Comparison of 2019 Realization, 2019 Target, and 2020 Projection

	Realisasi 2019 (Rp-juta) 2019 Realization (Rp-million)	Target 2019 (Rp-juta) 2019 Target (Rp-million)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019 (%) Realization of Achievement against 2019 Target (%)	Proyeksi 2020 (Rp-juta) 2020 Projection (Rp-million)	Proyeksi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%) 2020 Projection against 2019 Realization (%)	Proyeksi 2020 Terhadap Target 2019 (%) 2020 Projection against 2019 Target (%)
	1	2	(1:2)	3	(3:1)	(3:2)

BISNIS (PENDAPATAN PER ENTITAS USAHA)
BUSINESS (REVENUE PER BUSINESS ENTITY)

PT PPA (Induk) (Rp-juta)	540.637	401.846	134,54%	781.520	144,56%	194,48%
PT PPA (Holding) (Rp-million)						
Entitas Anak Subsidiaries						
▪ PT Nindya Karya (Rp-juta)						
▪ PT Nindya Karya (Rp-million)	5.783.502	7.770.233	74,43%	7.341.547	126,94%	94,48%

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019, Target Tahun 2019, dan Proyeksi Tahun 2020
Table of Comparison of 2019 Realization, 2019 Target, and 2020 Projection

	Realisasi 2019 (Rp-juta) 2019 Realization (Rp-million)	Target 2019 (Rp-juta) 2019 Target (Rp-million)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019 (%) Realization of Achievement against 2019 Target (%)	Proyeksi 2020 (Rp-juta) 2020 Projection (Rp-million)	Proyeksi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%) 2020 Projection against 2019 Realization (%)	Proyeksi 2020 Terhadap Target 2019 (%) 2020 Projection against 2019 Target (%)
	1	2	(1:2)	3	(3:1)	(3:2)
- PT PPA Finance (Rp-juta) - PT PPA Finance (Rp-million)	147.423	263.503	55,95%	279.963	189,90%	106,25%
- PT PPA Kapital (Rp-juta) - PT PPA Capital (Rp-million)	348.786	1.399.333	24,93%	2.461.297	705,68%	175,89%
OPERASI OPERATIONS						
Revenue per Employee (Rp-juta) Revenue per Employee (Rp-million)	3.072	3.926	78,25%	4.263	138,77%	108,58%
Return On Asset (%)	2,27%	3,22%	70,50%	2,64%	116,30%	81,99%
BOPO (%)	94,3%	91%	103,63%	89%	94,38%	97,80%
Skor GCG GCG Score	88,53	88	100,60%	90	101,66%	102,27%
Tingkat Kesehatan Soundness Level	90	92	97,83%	93,25	103,61%	101,36%
PEMASARAN JASA KONSTRUKSI (LELANG DAN NILAI PEKERJAAN PT NINDYA KARYA) CONSTRUCTION MARKETING SERVICES (AUCTION AND CONTRACT VALUE OF PT NINDYA KARYA)						
Lelang Diikuti (Rp-miliar) Auction Followed (Rp-billion)	21.636	47.028	46,01%	52.000	240,34%	110,57%
Lelang Dimenangkan (Rp-miliar) Auction Obtained (Rp-billion)	4.269	11.814	36,14%	13.266	310,75%	112,29%
Tanpa Lelang / Penunjukan Langsung (Rp-miliar) No Auction / Direct Appointment (Rp-billion)	92	25	368,00%	195	211,96%	780,00%
% Lelang dimenangkan (%) % Auction won (%)	19,73%	25,12%	78,54%	25,51%	129,30%	101,55%
Nilai Pekerjaan Tersedia Contract Value Available						
- Sisa Pekerjaan Proyek Lama (Rp-miliar) - Remaining Old Projects (Rp-billion)	8.629	10.122	85,25%	13.462	156,01%	133,00%
- Perolehan Proyek Baru (Rp-miliar) - Obtaining New Projects (Rp-billion)	3.839	10.762	35,67%	9.295	242,12%	86,37%

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATIONTabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019, Target Tahun 2019, dan Proyeksi Tahun 2020
Table of Comparison of 2019 Realization, 2019 Target, and 2020 Projection

	Realisasi 2019 (Rp-juta) 2019 Realization (Rp-million)	Target 2019 (Rp-juta) 2019 Target (Rp-million)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019 (%) Realization of Achievement against 2019 Target (%)	Proyeksi 2020 (Rp-juta) 2020 Projection (Rp-million)	Proyeksi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%) 2020 Projection against 2019 Realization (%)	Proyeksi 2020 Terhadap Target 2019 (%) 2020 Projection against 2019 Target (%)
	1	2	(1:2)	3	(3:1)	(3:2)
Jumlah Nilai Pekerjaan Tersedia (Rp-miliar) Total Contract Value Available (Rp-billion)	12.468	20.885	59,70%	22.757	182,52%	108,96%
SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN CAPITAL						
Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees (persons)	176	200	88,00%	200	113,64%	100,00%
Biaya Pelatihan dan Pendidikan Cost of Education and Training	2.208	7.508	29,41%	8.800	398,55%	117,20%
LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME						
Pendapatan Usaha (Rp-juta) Revenues (Rp-million)	6.669.457	9.815.755	67,95%	10.657.914	159,80%	108,58%
Beban Usaha (Rp-juta) Operating Expenses (Rp-million)	(6.289.760)	(8.895.707)	70,71%	(9.468.742)	150,54%	106,44%
Laba Usaha (Rp-juta) Operating Income (Rp-million)	379.697	920.048	41,27%	1.189.172	313,19%	129,25%
Pendapatan (Beban) Lain-lain (Rp-juta) Other Income (Expenses) (Rp-million)	(43.986)	(328.604)	13,39%	(556.302)	1.264,73%	169,29%
Laba Sebelum Pajak (Rp-juta) Income Before Tax (Rp-million)	335.711	591.445	56,76%	632.870	188,52%	107,00%
Laba Bersih (Rp-juta) Net Income (Rp-million)	327.072	520.000	62,90%	531.988	162,65%	102,31%
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain (Rp-juta) Other Comprehensive Income (Expense) (Rp-million)	(10.121)	-	-	-	-	-
Laba Komprehensif (Rp-juta) Comprehensive Income (Rp-million)	316.951	520.000	60,95%	531.988	167,85%	102,31%
POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION						
Aset Lancar (Rp-juta) Current Assets (Rp-million)	8.671.359	7.431.942	116,68%	10.343.533	119,28%	139,18%
Aset Tidak Lancar (Rp-juta) Non-current Assets (Rp-million)	5.744.073	8.694.188	66,07%	9.845.188	171,40%	113,24%
Total Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)	14.415.432	16.126.130	89,39%	20.188.721	140,05%	125,19%

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019, Target Tahun 2019, dan Proyeksi Tahun 2020
Table of Comparison of 2019 Realization, 2019 Target, and 2020 Projection

	Realisasi 2019 (Rp-juta) 2019 Realization (Rp-million)	Target 2019 (Rp-juta) 2019 Target (Rp-million)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019 (%) Realization of Achievement against 2019 Target (%)	Proyeksi 2020 (Rp-juta) 2020 Projection (Rp-million)	Proyeksi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%) 2020 Projection against 2019 Realization (%)	Proyeksi 2020 Terhadap Target 2019 (%) 2020 Projection against 2019 Target (%)
	1	2	(1:2)	3	(3:1)	(3:2)
Liabilitas Jangka Pendek (Rp-juta) Current Liabilities (Rp-million)	7.101.679	3.846.824	184,61% 	4.967.622	69,95% 	129,14% 
Liabilitas Jangka Panjang (Rp-juta) Non-current Liabilities (Rp- million)	1.890.210	6.630.976	28,51% 	9.709.661	513,68% 	146,43% 
Total Liabilitas (Rp-juta) Total Liabilities (Rp-million)	8.991.888	10.477.800	85,82% 	14.677.283	163,23% 	140,08% 
Total Ekuitas (Rp-juta) Total Equity (Rp-million)	5.423.544	5.648.331	96,02% 	5.511.438	101,62% 	97,58% 

PENCAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET TAHUN 2019

Pencapaian Target Bisnis Tahun 2019

Target bisnis Perusahaan tercermin dari pendapatan usaha per entitas, yaitu pendapatan dari Perusahaan sebagai entitas induk, dan pendapatan dari entitas anak, PT Nindya Karya dan kelompok usahanya, PT PPA Finance dan kelompok usahanya, serta PT PPA Kapital dan kelompok usahanya. Pencapaian target pendapatan di level Perusahaan terbukukan 134,54% terhadap target, sedangkan ke-3 entitas anak Perusahaan belum mencapai target yang ditetapkan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha dalam bab ini, kondisi ekonomi politik yang kurang menggembirakan memberikan dampak yang besar terhadap kinerja PT Nindya Karya yang berkontribusi terhadap segmen Jasa Konstruksi, yang hanya mencapai 74,43% terhadap target pendapatan yang telah dianggarkan.

Hal ini tidak lepas pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat khususnya pada sektor konstruksi dari posisi tahun lalu 6,09% menjadi 5,76% yang notabene menjadi kontributor terbesar Perusahaan (hampir 80%) melalui PT Nindya Karya. Perlambatan pada sektor konstruksi disebabkan pembangunan infrastruktur yang kurang

ACHIEVEMENT OF REALIZATION OF 2019 TARGET

Achievement of 2019 Business Target

The Company's business targets are reflected in revenue per business entity, i.e. revenues from the Company as the parent entity and revenues from from the subsidiaries, PT Nindya Karya and its business group, PT PPA Finance and its business group, and PT PPA Kapital and its business group. The achievement of revenue target at the Company level was recorded at 134.54% of the target, while the 3 subsidiaries have not yet reached the target set. As explained in the Operational Review per Business Segment section in this chapter, the less favorable political economy has a large impact on the performance of PT Nindya Karya, which contributed to the Construction Services segment and only reached 74.43% of the budgeted revenue target.

This cannot be separated from the slowing economic growth, especially in the construction sector from previous year's position of 6.09% to 5.76%, which incidentally became the Company's biggest contributor (almost 80%) through PT Nindya Karya. The slowdown in construction sector was caused by the lack of enthusiasm

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

bergairah akibat kondisi politik dalam negeri yang sedang diramaikan oleh Pemilihan Umum. Meskipun secara aset PT Nindya Karya mampu membukukan kinerja lebih baik dari target, namun posisi laba bersih hanya mencapai 64% dari target.

Hal kurang menggembirakan juga diperoleh dari anak usaha lainnya seperti PPAK dimana secara konsolidasi membukukan kinerja negatif. Kinerja PPAK secara konsol menjadi negatif dikontribusikan baik oleh entitas anak maupun pencapaian PPAK sebagai induk yang tidak sesuai harapan. Demikian halnya PPAF yang meskipun mampu memperoleh laba bersih sebesar Rp17,0 miliar namun jika dibandingkan target hanya mencapai lebih kurang 50%. Selain faktor eksternal dimana pertumbuhan ekonomi menurun dari periode sebelumnya, tidak tercapainya kinerja PPAF juga dikontribusikan oleh tidak terealisasinya rencana untuk mengakuisisi perusahaan pembiayaan lain.

Di tengah kinerja entitas anak yang belum memperoleh hasil yang diharapkan, Perusahaan mampu membukukan laba bersih yang lebih tinggi dari apa yang dicapai pada tahun sebelumnya. Capaian ini didapat dari munculnya beberapa inisiatif baru yang dijalankan oleh manajemen diantaranya melakukan pembelian beberapa NPL produktif dari perbankan, kerja sama pengelolaan aset BUMN dan BUMD, menekan biaya bunga dengan memperoleh pendanaan yang lebih murah melalui penerbitan MTN dan SBK serta meningkatkan produktivitas karyawan.

Pencapaian Target Operasi Tahun 2019

Pencapaian bisnis di atas berdampak terhadap pencapaian target operasi Perusahaan. Parameter *Revenues per employee* sebagai salah satu unsur cerminan pendapatan mencatat pencapaian sebesar 78,25%, sedangkan rasio *Return On Asset* (ROA) juga tidak sebesar yang diharapkan, yaitu 70,50% dari target. Dalam menjalankan Perusahaan, manajemen senantiasa konsisten untuk berpedoman kepada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini direfleksikan dengan memasukkan indikator kinerja yang memastikan proses pengoperasian perusahaan secara efektif dan efisien. Beberapa indikator yang digunakan agar hal tersebut dapat berjalan diantaranya parameter BOPO, Skor GCG dan Tingkat Kesehatan Perusahaan.

in infrastructure development due to domestic political conditions which were being enlivened by the General Elections. Although in terms of assets PT Nindya Karya managed to record better performance than the target, the net income position was only 64% of the target.

Less encouraging outcome were also seen in other subsidiaries such as PPAK, which consolidated a negative performance. PPAK consolidated performance was negatively contributed by both the performance of its subsidiaries and PPAK as the parent entity that was not in line with expectations. Likewise, PPAF, although managed obtain a net income of Rp17.0 billion, compared to the target, it only reached around 50%. In addition to external factors in which the economic growth experienced a decline from previous period, PPAF's performance was also contributed to the unrealized plan to acquire other financing companies.

In the midst of subsidiaries' performance that have not yet obtained the expected outcome, the Company was able to book a higher net income than the previous year's achievement. This achievement was obtained from the emergence of several new initiatives carried out by the management including purchasing some productive NPLs from banks, collaborating on asset management of SOEs and ROE, reducing interest costs by obtaining cheaper funding through the issuance of MTN and CP and increasing employee productivity.

Achievement of 2019 Operational Target

The business achievements above have impacted the achievement of the Company's operational targets. The revenues per employee parameter as one of the reflection of revenues recorded an achievement of 78.25%, while the Return On Asset (ROA) ratio was not as expected, which was 70.50% of the target. In running the Company, the management is always consistent to be guided by the principles of Good Corporate Governance (GCG). This is reflected by including performance indicators that ensure the Company's operating processes are carrying out effectively and efficiently. Some indicators used include BOPO parameter, GCG Score and Company's Soundness Index.

Capaian parameter BOPO dan Tingkat Kesehatan pada tahun 2019 memang masih belum mencapai target yang dibebankan, dimana untuk BOPO lebih tinggi 3,6% dari target dan Tingkat Kesehatan lebih rendah 2,2% dari target. Parameter BOPO mengalami peningkatan lebih disebabkan penerimaan pendapatan secara konsol yang lebih kecil dari target sedangkan beban operasional tetap, demikian halnya untuk Tingkat Kesehatan yang capaian komponen ukurannya belum mendapat hasil yang memuaskan seperti BOPO, *Current Ratio* maupun Rasio kas. Namun demikian untuk parameter Skor GCG pada tahun 2019 ini dapat memenuhi target yang dibebankan dengan capaian skor 88,53 dari target 88 atau sebesar 100,60%.

Pencapaian Target Pemasaran Tahun 2019

Target pemasaran dikonsolidasikan dari nilai pemasaran entitas anak, PT Nindya Karya, yang berkontribusi terhadap kinerja segmen Jasa Konstruksi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kondisi perekonomian yang kurang menggembirakan, dan peristiwa politik di tahun 2019, menyebabkan penurunan pekerjaan konstruksi baik dari Pemerintah maupun swasta. Hal ini terlihat dari Nilai Lelang yang Diikuti, yang hanya 46,01% terhadap target yang diharapkan dan memberikan dampak terhadap Perolehan Kontrak Baru yang hanya mencapai 35,67%.

Pencapaian Target Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tahun 2019

Di tahun 2019 realisasi jumlah karyawan adalah sebanyak 176 karyawan atau 88,00% dari target tahun 2019. Adapun untuk tahun 2020 ditargetkan penambahan karyawan sehingga berjumlah total 200 karyawan atau dengan peningkatan sebesar 113,64%.

Untuk biaya pelatihan dan pendidikan tahun 2019 direalisasikan sebesar Rp2,2 miliar atau mencapai 29,41% dari target tahun 2019 sebesar Rp7,5 miliar. Pada tahun 2020 ditargetkan biaya pelatihan dan pendidikan sebesar Rp8,8 miliar atau meningkat sebesar 117,20% bila dibandingkan dengan target tahun 2019.

The achievement of BOPO parameter and Soundness Index in 2019 was indeed still not reaching the target set, where for BOPO was 3.6% higher than the target and Soundness Index was 2.2% lower than the target. The increase of BOPO parameter was due to smaller consolidated revenues than the target while operating expenses remained the same, as is the case for Soundness Index, in which the achievement outcome has not yet received satisfactory results such as BOPO, Current Ratio or Cash Ratio. However, GCG Score parameter in 2019 managed to fulfill the set target with an achievement score of 88.53 from the target of 88 or 100.60%.

Achievement of 2019 Marketing Target

The marketing target is consolidated from the marketing value of subsidiary, PT Nindya Karya, which contributes to the performance of Construction Services segment. As explained earlier, the economic conditions that were less encouraging, and political events in 2019, caused a decline in construction work from both the Government and the private sector. This can be seen from the value of the auction that was followed, which was only 46.01% of the expected target and had an impact on the acquisition of new contracts which only reached 35.67%.

Achievement of 2019 Human Capital Management Target

In 2019, the realization of the number of employees was 176 employees or 88.00% of the 2019 target. As for 2020, the number of employees is targeted to increase to a total of 200 employees or an increase of 113.64%.

The cost of training and education in 2019 was realized at Rp2.2 billion or reaching 29.41% of the 2019 target of Rp7.5 billion. In 2020, it is targeted that training and education costs will be Rp8.8 billion, an increase of 117.20% when compared to the 2019 target.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**Pencapaian Target Keuangan Tahun 2019: Kinerja Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian****1. Pendapatan Usaha**

Perusahaan memperoleh Pendapatan Usaha pada tahun 2019 sebesar Rp6.669.457 juta atau 67,95% dari target RKAP tahun 2019 sebesar Rp9.815.755 juta. Hal ini terutama disebabkan karena realisasi pendapatan jasa konstruksi hanya mencapai 74% dari target RKAP tahun 2019 sebesar Rp7.770.233 juta serta target pendapatan entitas anak, yakni PT PPAK hanya mencapai 25% dari target RKAP tahun 2019 sebesar Rp1.399.333 juta.

2. Beban Usaha

Realisasi Beban Usaha Perusahaan pada tahun 2019 sebesar Rp6.289.760 juta atau 70,71% dari target RKAP tahun 2019 sebesar Rp8.895.707 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh realisasi beban proyek PT NK hanya mencapai 75% dari target RKAP 2019 sebesar Rp6.876.657 juta dan realisasi Harga Pokok Produksi PT PPAK yang hanya mencapai 31% dari target RKAP 2019 sebesar Rp1.040.158 juta.

3. Laba Bersih

Perusahaan memperoleh Laba Bersih pada tahun 2019 sebesar Rp327.072 juta atau 62,90% dari target RKAP tahun 2019 sebesar Rp520.000 juta. Jika dibandingkan dengan capaian Laba Bersih pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 428.800 juta, terdapat penurunan sebesar 24%. Penurunan tersebut berasal dari penurunan laba bersih entitas anak Perusahaan yaitu PT NK dan PT PPAK masing-masing sebesar 21% dan 111% dibandingkan dengan pencapaian Laba Bersih masing-masing perusahaan pada tahun 2018.

Pencapaian Target Keuangan Tahun 2019 - Kinerja Posisi Keuangan Konsolidasian**1. Jumlah Aset**

Realisasi Jumlah Aset Perusahaan tahun 2019 sebesar Rp14.415.432 juta atau 89,39% dari target RKAP tahun 2019 sebesar Rp16.126.130 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh realisasi pinjaman investasi jangka panjang dan aset tetap yang hanya mencapai 13% dan 58% dari target RKAP 2019 sebesar Rp2.304.593 juta dan Rp2.705.105 juta.

Achievement of 2019 Financial Target: Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income Performance**1. Revenues**

The Company's revenues in 2019 amounting to Rp6,669,457 million or 67.95% of the 2019 Budget and Planning target of Rp9,815,755 million. This was mainly due to the realization of construction service revenues reaching only 74% of the 2019 Budget and Planning target of Rp7,770,233 million and the revenue target of subsidiary, namely PT PPAK only reaching 25% of the 2019 Budget and Planning target of Rp1,399,333 million.

2. Operating Expenses

The realization of the Company's Operating Expenses in 2019 was Rp6,289,760 million or 70.71% of the 2019 Budget and Planning target of Rp8,895,707 million. This was mainly due to the realization of PT NK's project expenses reaching only 75% of the 2019 Budget and Planning target of Rp6,876,657 million and the realization of PT PPAK Cost of Production which only reached 31% of the 2019 Budget and Planning target of Rp1,040,158 million.

3. Net Income

The Company obtained a Rp327,072 million Net Income in 2019 or 62.90% of the 2019 Budget and Planning target of Rp520,000 million. When compared with the achievement of 2018 Net Income of Rp428,800 million, there was a decrease of 24%. The decrease was derived from the decrease in net income of subsidiaries, namely PT NK and PT PPAK by 21% and 111% respectively compared to the achievement of 2018 Net Income of each company.

Achievement of 2019 Financial Target - Consolidated Financial Position Performance**1. Total Assets**

Realization of the Company's Total Assets in 2019 was Rp14,415,432 million or 89.39% of the 2019 Budget and Planning target of Rp16,126,130 million. This was mainly due to the realization of long-term investment loans and fixed assets which only reached 13% and 58% of the 2019 Budget and Planning target of Rp2,304,593 million and Rp2,705,105 million.

2. Jumlah Liabilitas

Realisasi Jumlah Liabilitas Perusahaan tahun 2019 sebesar Rp8.991.888 juta atau 85,82% dari target RKAP tahun 2019 sebesar Rp10.477.800 juta. Hal ini terutama oleh realisasi pinjaman bank jangka panjang yang hanya mencapai 20% dari target RKAP tahun 2019 sebesar Rp4.387.331 juta.

3. Jumlah Ekuitas

Realisasi Jumlah Ekuitas Perusahaan tahun 2019 sebesar Rp5.423.544 juta atau 96,02% dari target RKAP tahun 2019 sebesar Rp5.648.331 juta. Jika dibandingkan dengan jumlah Ekuitas tahun 2018 sebesar Rp5.262.043 juta terdapat peningkatan sebesar 3%.

2. Total Liabilities

Realization of the Company's Total Liabilities in 2019 was Rp8,991,888 million or 85.82% of the 2019 Budget and Planning target of Rp10,477,800 million. This was mainly due to the realization of long-term bank loans which only reached 20% of the 2019 Budget and Planning target of Rp4,387,331 million.

3. Total Equity

Realization of the Company's Total Equity in 2019 was Rp5,423,544 million or 96.02% of the 2019 Budget and Planning target of Rp5,648,331 million. When compared with total Equity in 2018 of Rp5,262,043 million, there was an increase of 3%.

PROYEKSI TAHUN 2020

Perusahaan telah merumuskan proyeksi tahun 2020 yang tertuang dalam RKAP tahun buku 2020 yang telah disepakati berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham No. S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020. Berikut penjelasan tentang proyeksi kinerja Perusahaan untuk tahun 2020.

Proyeksi Bisnis Tahun 2020

Melihat kondisi *market* dan situasi politik dalam negeri yang semakin kondusif, perusahaan cukup optimis bahwa peluang bisnis akan semakin terbuka lebar. Hal ini sejalan dengan beberapa asumsi makro ekonomi dunia maupun Indonesia pada khususnya yang disampaikan oleh beberapa lembaga termasuk Kementerian terkait yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan hal tersebut ditambah dengan peningkatan kompetensi secara internal dan strategi serta program kerja yang telah dicanangkan maka perusahaan secara realistis yakin bahwa capaian kinerja tahun ini akan lebih baik dari sebelumnya.

Keyakinan akan kondisi bisnis yang semakin cerah dapat dilihat dari proyeksi bisnis pendapatan usaha per entitas, dimana baik pendapatan dari Perusahaan sebagai entitas induk, maupun pendapatan dari entitas anak, PT Nindya Karya, PT PPA Finance, dan PT PPA Kapital dapat tumbuh dengan baik, masing-masing sebesar 144,56%, 126,94%, 189,90%, dan 705,68% terhadap realisasi tahun 2019.

2020 PROJECTION

The Company has formulated projections for 2020 as stated in the Budget and Planning of fiscal year 2020 which has been agreed based on Shareholders' Aspiration No. S-574/MBU/08/2019 dated August 30, 2019 concerning the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of the 2020 Corporate Work Plan and Budget. The following is an explanation of the Company's performance projections for 2020.

2020 Business Projection

With due observance to the market condition and the domestic political situation which is increasingly conducive, the Company is quite optimistic that business opportunities will be open more widely. This is in line with several macroeconomic assumptions of the world and Indonesia in particular that were conveyed by several institutions including the relevant Ministries, which showed a positive trend. Based on these and coupled with an increase in internal competencies as well as strategies and work programs that have been launched, the Company is realistically confident that this year's performance achievement will be better than previous achievement.

The confidence for brighter business conditions can be seen from the business projection of revenues per entity, where both revenues from the Company as a parent entity, as well as revenues from subsidiaries, PT Nindya Karya, PT PPA Finance, and PT PPA Kapital will be able to grow well, respectively of 144.56%, 126.94%, 189.90% and 705.68% of the realization in 2019.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**Proyeksi Operasi Tahun 2020**

Optimisme pertumbuhan bisnis Perusahaan akan memberikan peningkatan beberapa indikator kinerja yang ditetapkan pada RKAP 2020. Pertumbuhan cukup signifikan juga untuk indikator *Revenues per employee* meningkat 38,77% dari capaian realisasi tahun 2019. Pertumbuhan tersebut selain diperoleh dari kontribusi dari entitas anak serta adanya tambahan bisnis model yang berinisiatif menjadi *Asset Management Company* (AMC) di Indonesia dan mempertajam peran Perusahaan dalam menjadi agen restrukturisasi dan revitalisasi yang tidak hanya untuk perusahaan BUMN namun juga BUMD dan swasta nasional.

Target Perusahaan untuk komponen operasional pada tahun 2020 dicanangkan dapat lebih baik dari capaian tahun 2019. Indikator BOPO yang digunakan untuk melihat tingkat efisiensi Perusahaan diharapkan berada pada level 89%, dimana hal tersebut bukan berarti mengabaikan proses *excellence*. Hal lain untuk skor GCG yang meningkatkan menjadi 90 atau sebesar 101,7% dari realisasi tahun 2019 untuk memastikan meskipun proses operasional berjalan efisien namun kualitas dan kehati-hatian tetap perlu dijaga dan tingkatkan. Demikian juga untuk Tingkat Kesehatan perusahaan yang diharapkan mampu mencapai tingkat "SEHAT AA" dengan nilai 93,25 atau meningkat 103,6% dari capaiannya tahun 2019.

Proyeksi Pemasaran Tahun 2020

Proyeksi pemasaran dikonsolidasikan dari nilai pemasaran entitas anak, PT Nindya Karya, yang berkontribusi terhadap kinerja segmen Jasa Konstruksi. Di tahun 2020 nilai lelang yang diikuti PT Nindya Karya diharapkan dapat tumbuh hingga 240,34% terhadap realisasi tahun 2019. Optimisme ini terutama didapatkan dari proyek-proyek konstruksi oleh Pemerintah yang tertunda di tahun 2019 dapat dilaksanakan di tahun 2020. Perolehan Proyek Baru diproyeksikan dapat mencapai 242,12% sejalan dengan optimisme pasar konstruksi nasional untuk dapat tumbuh di tahun 2020.

2020 Operational Projection

The optimism of the Company's business growth will provide an increase in several performance indicators set in the Budget and Planning 2020. Significant growth is also for the Revenues per employee indicator that will increase by 38.77% from the achievement of 2019 realization. This growth is derived from the contribution from subsidiaries and additional business model which took the initiative to become an Asset Management Company (AMC) in Indonesia and sharpening the Company's role as a restructuring and revitalizing agent that is not only for state-owned enterprises but also local-owned enterprises and national private companies.

The Company's target for the operational components in 2020 is planned to be better than the achievement in 2019. BOPO indicator used to identify the Company's level of efficiency is expected to be at the level of 89%, which does not mean ignoring the process of excellence. GCG score is increased to 90 or equal to 101.7% of the realization in 2019 to ensure that although operational processes run efficiently, quality and prudence still need to be maintained and improved. Likewise, the Company's soundness index is expected to reach the level of "HEALTHY AA" with a score of 93.25 or an increase of 103.6% from its achievement in 2019.

2020 Marketing Projection

Marketing projection is consolidated from the marketing value of subsidiary, PT Nindya Karya, which contributes to the performance of the Construction Services segment. In 2020, the value of auction followed by PT Nindya Karya is expected to grow up to 240.34% of the realization in 2019. This optimism is mainly obtained from the delayed construction projects of the Government in 2019, can be implemented in 2020. The acquisition of New Projects is projected to reach 242.12%, in line with the optimism of the national construction market to grow in 2020.

Proyeksi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tahun 2020

Untuk mendukung pengembangan karyawan dalam bentuk pelatihan dan program *management trainee* dianggarkan dana sebesar Rp8,8 miliar. Besarnya anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan pelatihan karyawan sesuai dengan aktivitas bisnis yang dikembangkan oleh Perusahaan serta dalam rangka mendukung program kegiatan *Corporate University* BUMN, Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dan Program Millennial BUMN.

Proyeksi Keuangan Tahun 2020-Kinerja Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**Pendapatan Usaha**

Target perolehan Pendapatan Usaha pada tahun 2020 sebesar Rp10.657.914 juta atau 159,80% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp6.669.457 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan target pendapatan usaha tahun 2020 dari entitas anak, PT PPA Kapital dan PT Nindya Karya masing-masing sebesar 705,68% dan 126,94% dari realisasi tahun 2019.

Beban Usaha

Target Beban Usaha Perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp9.468.742 juta atau 150,54% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp6.289.760 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan target beban usaha tahun 2020 dari entitas anak, PT PPA Kapital dan PT Nindya Karya masing-masing sebesar 392,98% dan 127,21% dari realisasi tahun 2019.

Laba Bersih

Target perolehan Laba Bersih Perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp531.988 juta atau 162,65% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp327.072 juta. Kenaikan target tersebut berasal dari kenaikan target laba bersih entitas anak Perusahaan yaitu PT Nindya Karya dan PT PPA Kapital masing-masing sebesar 23,79% dan 3.881,52% dibandingkan dengan pencapaian Laba Bersih masing-masing perusahaan pada tahun 2019.

2020 Human Capital Management Projection

To support employee development in the form of training and management trainee programs, Rp8.8 billion is budgeted. The amount of this budget is to meet employee training needs in accordance with business activities developed by the Company and in order to support the activities of SOEs Corporate University Program, the Certified Student Internship Program and the SOEs Millennial Program.

2020 Financial Projection – Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income Performance**Revenues**

The target of Revenues in 2020 is Rp10,657,914 million or 159.80% of the 2019 realization of Rp6,669,457 million. This is mainly due to an increase in the 2020 revenues target of subsidiaries, PT PPA Kapital and PT Nindya Karya, respectively by 705.68% and 126.94% of the 2019 realization.

Operating Expenses

The Company's Operating Expenses target for 2020 is Rp9,468,742 million or 150.54% of the realization in 2019 of Rp6,289,760 million. This is mainly due to an increase in the 2020 operating expenses target of subsidiaries, PT PPA Kapital and PT Nindya Karya, respectively by 392.98% and 127.21% of the realization in 2019.

Net Income

The target of the Company's Net Income in 2020 is Rp531,988 million or 162.65% of the 2019 realization of Rp327,072 million. The increase in target is originating from an increase in the net income target of subsidiaries, PT Nindya Karya and PT PPA Kapital respectively by 23.79% and 3,881.52% compared to the achievement of Net Income of each company in 2019.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**Proyeksi Keuangan Tahun 2020-Kinerja Posisi
Keuangan Konsolidasian****1. Jumlah Aset**

Target Jumlah Aset Perusahaan tahun 2020 sebesar Rp20.188.721 juta atau 140,05% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp14.415.432 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan target pinjaman investasi jangka panjang, investasi jangka panjang lainnya dan aset tetap masing-masing sebesar 570,23%, 1.599,30% dan 161,36% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp299.854 juta, Rp102.940 juta dan Rp1.556.796 juta.

2. Jumlah Liabilitas

Target Jumlah Liabilitas Perusahaan tahun 2020 sebesar Rp14.677.283 juta atau 163,23% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp8.991.888 juta. Hal ini terutama oleh target penerbitan obligasi PT PPA tahun 2020 sebesar Rp1.000.000 juta, penerbitan MTN Entitas Anak, PT Nindya Karya dan PT PPA Finance masing-masing sebesar Rp500.000 juta dan Rp300.000 juta serta peningkatan pinjaman bank jangka panjang yang mencapai Rp5.052.801 juta.

3. Jumlah Ekuitas

Target Jumlah Ekuitas Perusahaan tahun 2020 sebesar Rp5.511.438 juta atau 101,62% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp5.423.544 juta. Hal ini disebabkan oleh target perolehan laba bersih tahun 2020 sebesar Rp531.988 juta. Di sisi lain, efek penerapan PSAK 71,72,73 diestimasikan mengurangi total ekuitas Perusahaan sebesar Rp557.567 juta.

**INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI
SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN**

Berikut disampaikan informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2019 hingga tanggal laporan akuntan 28 Februari 2020.

- Pada periode setelah pelaporan keuangan, Perusahaan telah mencairkan fasilitas *Tranche B* kepada PT Adetex pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Hutang No. 44 Tanggal 20 Desember 2019 dengan plafond *Tranche B* sebesar USD3.900.000 dengan jumlah pencairan sebesar USD1,480,374.44. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk pembiayaan Modal Kerja dan pembelian mesin.

**2020 Financial Projection - Consolidated Financial
Position Performance****1. Total Assets**

The target the Company's total assets in 2020 is Rp20,188,721 million or 140.05% of the 2019 realization of Rp14,415,432 million. This is mainly due to an increase in the target of long-term investment loans, other long-term investments and fixed assets by 570.23%, 1,599.30% and 161.36% of the 2019 realization of Rp299,854 million, Rp102,940 million and Rp1,556,796 million.

2. Total Liabilities

The target of the Company's Total Liabilities in 2020 is Rp14,677,283 million or 163.23% of the 2019 realization of Rp8,991,888 million. This is mainly due to the target of PT PPA bond issuance in 2020 of Rp1,000,000 million, issuance of MTN of Subsidiaries, PT Nindya Karya and PT PPA Finance of Rp500,000 million and Rp300,000 million and an increase in long-term bank loans of Rp5,052,801 million.

3. Total Equity

The target of the Company's Total Equity in 2020 is Rp5,511,438 million or 101.62% of the 2019 realization of Rp5,423,544 million. This is due to the net income target for 2020 amounting to Rp531,988 million. On the other hand, the effect of the adoption of PSAK 71.72.73 is estimated to reduce the Company's total equity by Rp557,567 million.

**INFORMATION AND MATERIAL FACTS OCCURRING
AFTER THE DATE OF ACCOUNTANT REPORT**

The following is material information and facts that occurred between the end of reporting period on December 31, 2019 until the date of accountant report on February 28, 2020.

- In the period after financial reporting,
The Company has disbursed the *Tranche B* facility to PT Adetex on January 31, 2020 based on the Debt Restructuring Agreement No. 44 On December 20, 2019 with an allotment of *Tranche B* of USD3,900,000 and total disbursement of USD1,480,374.44. The purpose of this facility is to finance working capital and purchase machinery.

- Pada periode setelah pelaporan keuangan, Perusahaan telah mencairkan fasilitas *Tranche B* kepada PT Primarindo Asia Infrastructure pada tanggal 30 Januari 2020 berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Hutang No. 43 Tanggal 20 Desember 2019 dengan *plafond Tranche B* sebesar USD1.279.953 dengan jumlah pencairan sebesar USD182.951. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk Pembiayaan Modal Kerja.

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi sejak periode tanggal laporan akuntan hingga disahkannya laporan tahunan ini.

KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, dividen dapat dibayarkan Perusahaan melaksanakan pembayaran dividen setiap tahun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan PMK No. 05/ PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari dividen, pembayaran dividen dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dividen ditetapkan oleh Pemegang saham, jumlah dividen yang ditetapkan adalah sebesar persentase tertentu dari laba bersih (setelah pajak) Perusahaan yang diatribusikan kepada Pemegang saham.

Pembagian Dividen Tahun 2019 dan Historikalnya

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2019 yang diselenggarakan tanggal 3 Mei 2019, pemegang saham memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp42.608 juta.

Realisasi pembagian dividen saham di tahun 2019 untuk dividen tahun buku 2018 sebagai berikut:

- In the period after financial reporting, The Company has disbursed the *Tranche B* facility to PT Primarindo Asia Infrastructure on January 30, 2020 based on Debt Restructuring Agreement No. 43 On December 20, 2019 with a *Tranche B* allotment of USD 1,279,953 and a total disbursement of USD 182,951. The purpose of this facility is to finance Working Capital.

There were no material information and facts that occurred since the period of accountant report date until the approval of this annual report.

DIVIDEND POLICY AND PAYMENT

Basis of Dividend Distribution Policy

Pursuant to the Company's Articles of Association, the Company carries out dividend payment annually based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS), in accordance with PMK No. 05/PMK.02/2013 concerning Procedures for Depositing Non-Tax State Revenues from dividends. Dividends payment is made no later than 1 (one) month after the dividends are determined by the Shareholders, in which the amount of dividends determined is a certain percentage of the Company's net income (after tax) attributable to shareholders.

Distribution of Dividends in 2019 and its History

Based on the resolution of the 2019 Annual GMS held on May 3, 2019, the shareholders decided to distribute cash dividends amounting to Rp42,608 million.

The realization of the distribution of share dividends in 2019 for dividends of the 2018 fiscal year is as follows:

Dividen kas yang dibagikan (jumlah dividen yang didistribusikan) (Rp) Cash dividends distributed (amount of dividends distributed) (Rp)	42.608 juta
Rasio pembayaran dividen (persentase laba bersih tahun sebelumnya yang dibagikan sebagai dividen) (%) Dividends payment ratio (percentage of net income of the previous year distributed as dividends) (%)	10,00%
Nilai dividen per lembar saham (Rp) Value of dividends per share (Rp)	14.218

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

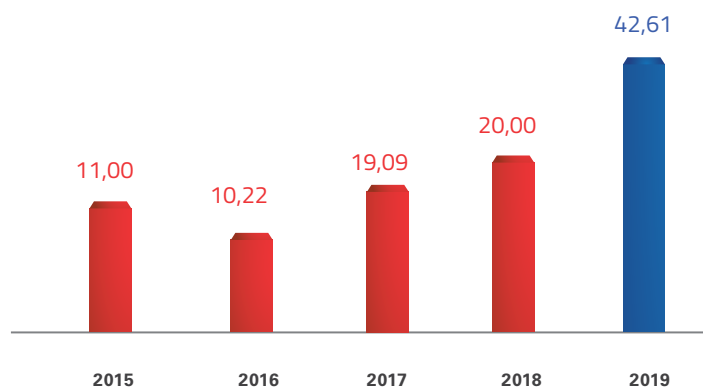
Tanggal pengumuman Announcement Date	3 Mei 2019 May 3, 2019
Tanggal pembayaran Payment Date	28 Mei 2019 May 28, 2019

Pembagian dan pembayaran Dividen tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dividend distribution and payment for 2015 to 2019 can be seen in the table below.

Tahun Pembagian Distribution Year	Tahun Buku Dividen Dividend Year	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-miliar) Cash Dividends Distributed (Rp-billion)	Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividends per Share (Rp/share)	Rasio Pembagian Dividen (%) Dividends Payment Ratio (%)
2019	2018	3 Mei 2019 May 3, 2019	28 Mei 2019 May 28, 2019	42,61	14.218	10,00%
2018	2017	20 Mei 2018 May 20, 2018	31 Mei 2018 May 31, 2018	20,00	6.674	6,13%
2017	2016	18 Mei 2017 May 18, 2017	16 Juni 2017 June 16, 2017	19,09	6.370	6,79%
2016	2015	31 Mei 2016 May 31, 2016	30 Juni 2016 June 30, 2016	10,22	3.409	5,98%
2015	2014	19 Mei 2015 May 19, 2015	19 Juni 2015 June 19, 2015	11,00	5.509	9,64%

Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-miliar)
Cash Dividend Distributed (Rp-billion)



KONTRIBUSI BAGI NEGARA

Sebagai Perusahaan yang patuh terhadap semua peraturan yang berlaku, Perusahaan telah melakukan pemenuhan terkait kewajiban dalam membayar pajak yang merupakan salah satu bentuk kontribusi Perusahaan kepada negara. Berikut rincian kewajiban Perusahaan terkait kewajiban perpajakan di tahun 2019.

CONTRIBUTIONS TO THE COUNTRY

As a company that complies with all applicable regulations, the Company has fulfilled its obligations in paying taxes which is a form of the Company's contribution to the country. The following details are the Company's obligations related to tax in 2019.

Jenis Pajak (Rp-juta) Type of Tax (Rp-Million)	Jumlah Amount
PPh Badan (Pasal 25 dan 29) Corporate Income Tax (Articles 25 and 29)	4.664
PPh Pasal 21-Karyawan Income Tax Article 21-Employees	28.622
PPh Pasal 21-Pihak Luar Income Tax Article 21-External Parties	20.109
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	27.407
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	52.598
PPh 26 Income Tax 26	10
PPh Pasal 4 (2) Income Tax Article 4 (2)	171.298
PPN VAT	703.692
Pajak Lain Other Taxes	692
Pajak Daerah Local Tax	2.075
JUMLAH PAJAK YANG DIBAYARKAN TOTAL TAX PAID	1.011.167

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KARYAWAN (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak pernah melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau *Management Stock Option Program* (MSOP), dan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, atau *Employees Stock Option Program* (ESOP).

INFORMASI TENTANG PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dari efek yang diterbitkan Perusahaan.

INFORMATION ON EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOK OPTION PLAN (ESOP/MSOP)

Until the end of 2019, the Company has never executed a Management Stock Option Plan (MSOP) and an Employee Stock Option Program (ESOP).

INFORMATION ON THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Until the end of 2019, the Company has not issued bonds, sharia bonds, convertible bonds, or other securities. Therefore, there is no information related to the realization of the use of proceeds from the public offering of securities issued by the Company.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL**

Berikut disampaikan informasi material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal yang terjadi di tahun 2019, khususnya yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

Informasi Material Mengenai Investasi

Pada kegiatan Investasi, strategi yang dilaksanakan oleh Perusahaan antara lain adalah implementasi strategi anorganik yaitu akuisisi perusahaan melalui penyertaan modal/pembelian kepemilikan (saham) baik secara penuh maupun parsial dengan target maksimal 4 (empat) perusahaan setiap tahunnya. Selain itu menyesuaikan layanan jasa dengan kebutuhan pelanggan melalui pengayaan produk/jasa seperti pre-IPO *financing*, *bridge financing*, investasi melalui penyertaan modal maksimal dengan jangka waktu 8 tahun, dan pengelolaan NPL perbankan. Pertumbuhan kegiatan investasi tahun 2019 cukup signifikan yaitu dari Rp3,1 triliun pada awal 2019 menjadi Rp5,7 triliun pada akhir 2019.

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Tidak terdapat informasi material mengenai ekspansi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2019.

Informasi Material Mengenai Divestasi

Tidak terdapat informasi material mengenai divestasi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2019.

Informasi Material Mengenai Penggabungan Usaha

Tidak terdapat informasi material mengenai penggabungan usaha yang dilakukan Perusahaan di tahun 2019.

Informasi Material Mengenai Akuisisi

1. Berdasarkan Akta Notaris Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 17 pada tanggal 31 Januari 2019, telah dilakukan persetujuan konversi atas surat utang konversi menjadi saham baru sebesar Rp15.625 tertanggal 23 Januari 2019. Atas hal tersebut PT

MATERIAL INFORMATION ON EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

The following is material information on Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring that occurred in 2019, specifically the ones that affecting the financial performance of the Company.

Material Information on Investment

In investment activities, the strategies carried out by the Company include the implementation of inorganic strategies, i.e. the acquisition of companies through equity participation/purchase of ownership (shares) both fully and partially with a maximum target of 4 (four) companies each year. Besides adjusting services to customer needs through enrichment of products/services such as pre-IPO *financing*, *bridge financing*, investment through maximum equity participation with a period of 8 years, and management of banking NPLs. The growth in investment activities in 2019 is quite significant, from Rp3.1 trillion in early 2019 to Rp5.7 trillion at the end of 2019.

Material Information on Expansion

There is no material information regarding the expansion carried out by the Company in 2019.

Material Information on Divestment

There is no material information regarding the divestment carried out by the Company in 2019.

Material Information on Merger

There is no material information regarding the merger carried out by the Company in 2019.

Material Information on Acquisition

1. Based on Notarial Deed of Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 17 on January 31, 2019, the conversion agreement has been carried out for convertible bonds into new shares amounting to Rp15,625 dated January 23, 2019. On this matter, PT PPA Kapital has

PPA Kapital memiliki kepemilikan saham sebanyak 18.750 lembar saham atau 60% pada PT Matoa Kidung Samudera. Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0067570 tanggal 4 Februari 2019.

a shareholding of 18,750 shares or 60% in PT Matoa Kidung Samudera. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No: AHUAH. 01.03-0067570 on February 4, 2019.

2. Berdasarkan Akta Notaris Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 18 pada tanggal 31 Januari 2019, telah dilakukan persetujuan konversi atas surat utang konversi menjadi saham baru sebesar Rp15.625 tertanggal 23 Januari 2019. Atas hal tersebut PT PPA Kapital memiliki kepemilikan saham sebanyak 18.750 lembar saham atau 60% pada PT Matoa Kidung Bahtera. Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0067571 tanggal 4 Februari 2019.
3. Berdasarkan Akta Notaris Adrian Djuaini, S.H., No. 30 tanggal 22 Maret 2019, telah dilakukan pengalihan saham PT Rejeki Intilogam Jaya milik Sudjono Kusnadi Subroto sebanyak 1.500.000 lembar saham yang setara dengan 73,53%. Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0162989 tanggal 22 Maret 2019.

2. Based on Notarial Deed of Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 18 on January 31, 2019, the conversion agreement has been carried out for convertible bonds into new shares amounting to Rp15,625 dated January 23, 2019. For this reason, PT PPA Kapital has a shareholding of 18,750 shares or 60% in PT Matoa Kidung Bahtera. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No: AHUAH. 01.03-0067571 on February 4, 2019.

3. Based on Notarial Deed Adrian Djuaini, S.H., No. 30 dated March 22, 2019, a share transfer of PT Rejeki Intilogam Jaya owned by Sudjono Kusnadi Subroto in the amount of 1,500,000 shares or equivalent to 73.53% has been carried out. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No: AHU-AH.01.03-0162989 dated March 22, 2019.

Informasi Material Mengenai Restrukturisasi Utang/Modal

Tidak terdapat informasi material mengenai restrukturisasi utang/modal yang dilakukan Perusahaan di tahun 2019.

Material Information on Debt/Capital Restructuring

There is no material information regarding debt/capital restructuring conducted by the Company in 2019.

INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI, TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI, SERTA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

INFORMATION ON AFFILIATED TRANSACTIONS, RELATED PARTY TRANSACTIONS, AND TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST

Ketentuan Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dalam Laporan Keuangan tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Perusahaan mendefinisikan Pihak-pihak Berelasi sebagai orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki relasi dengan Perusahaan jika mereka:

Terms of Related Party

The Company applies the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 7 "Disclosure of Related Parties" in the 2019 Financial Statements which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners. The Company defines Related Parties as people or immediate family members who have a relationship with the Company if they:

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

- Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan.
- Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan.
- Merupakan personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan.

- Has joint control or control over the Company.
- Has significant influence over the Company.
- Is a key management personnel of the Company or the parent entity of the Company.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

1. Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
2. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan;
6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
7. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
8. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

A party is considered to be related to the Company if:

1. The entity and the Company are members of the same business group (meaning that the parent, subsidiary and subsequent subsidiary are related to each other);
2. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group, of which the other entity is a member);
3. The two entities are joint ventures of the same third party;
4. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
5. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits from the Company or an entity that is related to the Company. If the Company is an entity that carries out the program, the sponsoring entity is also related to the Company;
6. Entities that are controlled or jointly controlled by people identified in letter (a); or
7. The person identified in letter (a) (i) has significant influence over the entity or is an entity's key management personnel (or the parent entity of the entity); or
8. The entity, or a member of a group in which the entity is part of the group, provides the services of key management personnel to the reporting entity or to the parent entity of the Company.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the government. Government refers to the government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Nama Pihak Berelasi yang Melakukan Transaksi, Sifat Hubungan Berelasi dan Tujuan Transaksi

Berikut tabel yang menginformasikan nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan dan sifat transaksi yang dilakukan.

Government-related entities may be entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or the Regional Government which is a Shareholder of the entity, or entities controlled by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as the shareholder's proxy.

Names of Related Parties Conducting Transactions, the Nature of Related Relations and Purpose of Transactions

The following table informs the name of parties conducting the transaction, the nature of relationship and the nature of transaction.

Nama Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Cash and Cash Equivalents, Bank and Financial Institution Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Cash and Cash Equivalents, Bank and Financial Institution Loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Cash and Cash Equivalents, Bank and Financial Institution Loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Cash and Cash Equivalents, Bank and Financial Institution Loans
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Aset Keuangan Diperdagangkan Held for Trading Financial Assets
PT Survai Udara Penas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Aset Keuangan Diperdagangkan Held for Trading Financial Assets
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Aset Keuangan Diperdagangkan Held for Trading Financial Assets
PT Istaka Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Aset Keuangan Diperdagangkan Held for Trading Financial Assets
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi Bailout Funds, Loan Receivables Restructuring/Revitalization
PT Kertas Leces (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Loan Receivables – Bailout Funds

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

Nama Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Loan Receivables – Bailout Funds
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Loan Receivables – Bailout Funds
PT Survai Udara Penas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Loan Receivables – Bailout Funds
PT Artha Bangun Pratama	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Loan Receivables – Bailout Funds
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Loan Receivables – Bailout Funds
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi Loan Receivables – Bailout Funds, Loan Receivables – Restructuring/Revitalization
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi Loan Receivables – Bailout Funds, Loan Receivables – Restructuring/Revitalization
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi Loan Receivables – Restructuring/Revitalization
PT Iglas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi Loan Receivables – Restructuring/Revitalization
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi Loan Receivables – Restructuring/Revitalization
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Bank and Financial Institution Loans
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Bank and Financial Institution Loans
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers, Short-term Advances
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Piutang Usaha, Piutang Retensi Accounts Receivable, Retention Receivables
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers
PT DOK & Perkapalan Surabaya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Piutang Usaha Accounts Receivable
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Piutang Retensi, Tagihan Bruto Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers, Short-term Advances
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Tagihan Bruto Gross Amount Due from Customers

Nama Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Tagihan Bruto Gross Amount Due from Customers
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Loan Receivables – Bailout Funds
PT Berdikari (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan Loan Receivables – Bailout Funds
PT Pertani (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI Controlled by RI Government	Pinjaman Investasi Jangka Pendek Short-term Investment Loans

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Explanation on Fairness of Transactions

The fairness of all transactions conducted by the Company with Related Parties has been disclosed in the financial statements, and is in accordance with PSAK 7 standard on "Disclosure of Related Parties". All transactions with related parties are carried out at normal prices, terms and conditions as those done with third parties and have been disclosed in the Company's consolidated financial statements.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, transaksi Perusahaan dengan Pihak Berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis Perusahaan, serta prinsip saling membutuhkan antara Perusahaan dengan Pihak Berelasi.

Reason for the Transaction

Like transactions with third parties, the Company's transactions with Related Parties are carried out in line with the needs of the Company's operational and business development, as well as the principle of reciprocal business between the Company and Related Parties.

Realisasi Saldo dan Transaksi Transaksi Pihak Berelasi

Realization of Balance and Transaction of Related Parties

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi pada Periode Tahun Buku 2019 dan 2018

Realization of Balance and Transaction of Related Parties in the Fiscal Year 2019 and 2018

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Balance of Related Parties in Assets	2019 Rp-juta 2019 Rp-million	2018 Rp-juta 2018 Rp-million	Persentase dari Jumlah Aset % Percentage of Total Assets %	
			2019	2018
Kas dan Setara Kas Cash and cash equivalents	798.828	735.265	5,54%	6,26%
Piutang Usaha Accounts Receivable	386.413	294.170	2,68%	2,50%
Piutang Retensi Retention Receivables	-	-	-	-
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Loan Receivables - Bailout Funds	223.046	215.581	1,55%	1,84%

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATIONRealisasi Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi pada Periode Tahun Buku 2019 dan 2018
Realization of Balance and Transaction of Related Parties in the Fiscal Year 2019 and 2018

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Balance of Related Parties in Assets	2019 Rp-juta 2019 Rp-million	2018 Rp-juta 2018 Rp-million	Persentase dari Jumlah Aset % Percentage of Total Assets %	
			2019	2018
Tagihan Bruto Gross Amount Due from Customers	-	-	-	-
Pinjaman yang Diberikan - R/R Loan Receivables - R/R	1.416.472	1.388.273	9,83%	11,82%
Total Aset dari Pihak-pihak Berelasi Total Assets of Related Parties	2.824.759	2.633.289	19,60%	22,42%
TOTAL ASET TOTAL ASSETS	14.415.432	11.744.501		

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas Balance of Related Parties in Liabilities	2019 Rp-juta 2019 Rp-million	2018 Rp-juta 2018 Rp-million	Persentase dari Jumlah Liabilitas % Percentage of Total Assets %	
			2019	2018
Utang Usaha Accounts Payable	140.455	92.420	1,56%	0,79%
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Bank and Financial Institution Loans	2.403.718	1.286.784	26,73%	10,96%
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek Short-term Advances from Customers	10.372	14.630	0,12%	0,12%
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang Long-term Advances from Customers	35.965	60.501	0,40%	0,42%
Total Liabilitas dari Pihak-pihak Berelasi Total Liabilities from Related Parties	2.590.510	1.233.097	28,81%	19,02%
TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITY	8.991.888	6.482.458		

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Usaha Related Party Transactions in Revenues	2019 Rp-juta 2019 Rp-million	2018 Rp-juta 2018 Rp-million	Persentase dari Jumlah Pendapatan % Percentage of Total Assets %	
			2019	2018
Penjualan Usaha dari Pihak Berelasi Sales from Related Parties	198.908	125.391	2,98%	1,84%
Total Pendapatan Usaha dari Pihak-pihak Berelasi Total Revenues from Related Parties	198.908	125.391	2,98%	1,84%
TOTAL PENDAPATAN USAHA TOTAL REVENUES	6.669.457	6.824.001		

Kebijakan Perusahaan Terkait dengan Mekanisme Review atas Transaksi

Mekanisme *review* Perusahaan atas transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi dilakukan melalui proses audit khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, dimana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi di sepanjang tahun 2019.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

Tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Perusahaan di sepanjang tahun 2019.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut adalah perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, serta penjelasan dampak atau pengaruh perubahan standar dan interpretasi standar tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Company Policy on Transaction Review Mechanism

The Company's review mechanism for transactions with Related Parties is carried out through an audit process, especially an audit that has been carried out by public accountant and published, where this mechanism is contained in PSAK 7 concerning "Disclosure of Related Parties".

Compliance with Regulations and Related Terms

Compliance with relevant regulations and provisions, namely Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, is carried out through the disclosure of PSAK 7 concerning "Related Party Disclosures" in the 2019 Company's financial statements audited by Amir Abadi Jusuf Public Accounting Firm, Aryanto, Mawar & Partners.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

There is no financial information containing extraordinary and rare events throughout 2019.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS AFFECTING THE COMPANY

There were no changes in laws and regulations that affected the Company throughout 2019.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The following are changes to the standards and interpretations of standards that have been issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) and are effective for the fiscal year beginning on or after January 1, 2019, and an explanation of the impact or influence of changes in standards and interpretations of standards mentioned to the Company's financial statements.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA
FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION**PSAK 22 (Penyesuaian 2018): "Kombinasi Bisnis"****PSAK 22 (Adjustment 2018): "Business Combinations"**

Dampak Terhadap Perusahaan : Implementasi dari penerapan PSAK 22 (Penyesuaian 2018) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.
Impact on the Company: The implementation of PSAK 22 (Adjustment 2018) has no significant impact on the amount reported in the current period or the previous year.

PSAK 24 (Amendemen 2018): "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"**PSAK 24 (Amendment 2018): "Employee Benefits regarding Amendments, Excursions or Completion of Programs"**

Dampak Terhadap Perusahaan : Implementasi dari penerapan PSAK 24 (Penyesuaian 2018) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.
Impact on the Company: The implementation of PSAK 24 (Adjustment 2018) has no significant impact on the amount reported in the current period or the previous year.

PSAK 26 (Penyesuaian 2018): "Biaya Pinjaman"**PSAK 26 (Adjustment 2018): "Borrowing Costs"**

Dampak Terhadap Perusahaan : Implementasi dari penerapan PSAK 26 (Penyesuaian 2018) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.
Impact on the Company: The implementation of PSAK 26 (Adjustment 2018) has no significant impact on the amount reported in the current period or the previous year.

PSAK 46 (Penyesuaian 2018): "Pajak Penghasilan"**PSAK 46 (Adjustment 2018): "Income Tax"**

Dampak Terhadap Perusahaan : Implementasi dari penerapan PSAK 46 (Penyesuaian 2018) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.
Impact on the Company: The implementation of PSAK 46 (Adjustment 2018) has no significant impact on the amount reported in the current period or the previous year.

PSAK 66 (Penyesuaian 2018): "Pengaturan Bersama"**PSAK 66 (Adjustment 2018): "Joint Arrangements"**

Dampak Terhadap Perusahaan : Implementasi dari penerapan PSAK 66 (Penyesuaian 2018) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.
Impact on the Company: The implementation of PSAK 66 (Adjustment 2018) has no significant impact on the amount reported in the current period or the previous year.

ISAK 33: "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"**ISAK 33: "Foreign Exchange Transactions and Upfront Rewards"**

Dampak Terhadap Perusahaan : Implementasi dari penerapan ISAK 33 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.
Impact on the Company: The implementation of ISAK 33 (Adjustment 2018) has no significant impact on the amount reported in the current period or the previous year.

ISAK 34: "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"**ISAK 34: "Uncertainty in the Treatment of Income Taxes"**

Dampak Terhadap Perusahaan : Implementasi dari penerapan ISAK 34 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.
Impact on the Company: The implementation of ISAK 34 (Adjustment 2018) has no significant impact on the amount reported in the current period or the previous year.

Atas penerapan standar akuntansi di atas, Perusahaan tidak melakukan perubahan kebijakan akuntansi di tahun 2019.

On the adoption of the accounting standards above, the Company has not made any changes in accounting policies in 2019.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

COMPANY SOUNDNESS INDEX

Dalam melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan, PPA mengacu pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, dimana Tingkat Kesehatan Perusahaan diukur melalui beberapa indikator, yakni aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Berikut disampaikan Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2019, dibandingkan target RKAP 2019.

In measuring the Company's Soundness Index, PPA refers to the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Soundness Level Assessment of State-Owned Enterprises, where the Company's Soundness Index is measured through several indicators, i.e. financial aspect, operational aspect, and administrative aspect. The following is the Company's Soundness Index for 2019, compared to the 2019 Budget and Planning target.

	Indikator Indicators	RKAP 2019 2019 Budget and Planning	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
Keuangan Bobot 40% Finance Weighted 40%	ASPEK KEUANGAN FINANCIAL ASPECT					
	<i>Yield on Investment (YOI)</i>	8,0%	10	7	10,8%	10
	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional Operating Cost to Operating Income	91%	10	6	94,3%	4
	Total Modal Sendiri terhadap Total Aset Total Equity to Total Assets	35%	10	10	37,6%	10
	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>) Current Ratio	193%	5	5	122,1%	4
	Rasio Kas Cash Ratio	26%	5	4	17%	3
Operasional Bobot 45% Operational Weighted 45%	ASPEK OPERASIONAL OPERATIONAL ASPECT					
	Penugasan Pemerintah/ Penugasan Khusus/R/R Khusus Government Assignment/ Special Assignment/ Special R/R	100%	15	15	100%	15
	<i>Number of new services/products</i>	5	15	15	19	15
	Jumlah Perusahaan diakuisisi/dilepas Number of Companies Acquired/ Released	2 Perusahaan 2 Companies	10	10	3 Perusahaan 3 Companies	10
	Karyawan mengikuti pelatihan Employees Attending Trainings	75%	5	5	91%	5

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
COMPANY SOUNDNESS INDEX

Indikator Indicators		RKAP 2019 2019 Budget and Planning	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
Administrasi Bobot 15% Administrative Weighted 15%	ASPEK ADMINISTRASI ADMINISTRATIVE ASPECT					
	Penyampaian Laporan Perhitungan Calculation Report Submission	Tepat waktu On time	3	3	Tepat waktu On time	3
	Penyampaian Rancangan RKAP Budget and Planning Draft Submission	Tepat waktu On time	3	3	Tepat waktu On time	3
	Penyampaian Laporan Periodik Periodic Report Submission	Tepat waktu On time	3	3	Tepat waktu On time	3
	Efektivitas Penyaluran Program Kemitraan Effectiveness of Partnership Program Disbursement	>90%	3	3	87,99%	2
	Tingkat Kolektibilitas Program Kemitraan Collectability of Partnership Program	>70%	3	3	98,82%	3
TOTAL TINGKAT KESEHATAN TOTAL SOUNDNESS INDEX			100	92		90

Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2019 mendapatkan jumlah skor sebesar 90 dari target 92, maka Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan BUMN "Sehat" dengan klasifikasi kesehatan "AA".

The Company's soundness index for 2019 obtained a total score of 90 from the target of 92, hence the Company can be categorized as a "healthy" SOEs with a "AA" soundness classification.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY



Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Kondisi makro ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan domestik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap bisnis Perusahaan di tahun 2019. Di dalam negeri, kondisi ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh Pemilihan Umum yang dilakukan untuk eksekutif dan legislatif secara bersamaan. Hal tersebut membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap Perusahaan, khususnya pada entitas anak usaha yang bergerak dalam industri konstruksi yang banyak mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

Potential Issues with Significant Impact on the Company's Business Continuity in the Last Fiscal Year

Macroeconomic conditions that were affected by global and domestic economic conditions directly or indirectly had an impact on the Company's business in 2019. Domestically, macroeconomic conditions were strongly influenced by general election held for the executive and legislative simultaneously. This has had a significant influence on the Company, especially in subsidiary engaged in the construction industry, which is mostly working on government projects. In addition to this, the Company also faced various obstacles that have the potential to impact on the Company's business continuity.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Di bidang R/R BUMN, Perusahaan memiliki beberapa kendala, antara lain sebagai berikut:

1. Beberapa BUMN yang akan disehatkan telah berhenti beroperasi.
2. Pada umumnya BUMN yang akan disehatkan dalam kondisi *non-bankable* dan adanya keterbatasan pendanaan Perusahaan untuk menjembatani program R/R (dana talangan).
3. Beberapa BUMN yang disehatkan masuk dalam kondisi kepailitan atau Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta munculnya beberapa isu perburuhan.

Di bidang investasi, sumber pendanaan menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan sebuah investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendapatkan pendanaan yang lebih murah dengan jangka waktu yang lebih panjang, Perusahaan berupaya untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal antara lain dengan menerbitkan MTN.

Di bidang *advisory*, pelaku usaha jasa konsultansi yang telah lebih dahulu berdiri merupakan tantangan bagi Perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar. Sedangkan di bidang jasa pengelolaan aset eks BPPN, jumlah dan nilai aset yang diserahkan ke Perusahaan semakin menurun seiring dengan pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan dengan baik oleh Perusahaan. Meskipun pengelolaan aset eks BPPN menurun, namun Perusahaan bekerjasama dengan BUMN dan BUMD dalam rangka pengelolaan aset milik BUMN dan BUMD.

Assessment Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan, dan Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment

Penilaian manajemen atas hal-hal yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perusahaan seperti yang telah diuraikan di atas didasarkan pada evaluasi kinerja Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam penyusunan RKAP tahun buku 2020 dengan analisis SWOT terhadap kinerja Perusahaan di sepanjang tahun 2020. Di samping itu, Perusahaan memiliki alat ukur Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang

In the field of SOEs R/R, the Company has several obstacles, including the following:

1. Some SOEs that are going to be revitalized have stopped operating.
2. In general, SOEs that will be revitalized are in non-bankable condition and the existence of limited funding from the Company to bridge the R/R program (bailout funds).
3. Some SOEs that are revitalized are included in bankruptcy conditions or postponement of debt payment obligations (PKPU), as well as the emergence of several labor issues.

In the field of investment, the source of funding is one important factor that can determine the success of an investment. In connection with this, in order to obtain cheaper funding with a longer period of time, the Company seeks to obtain funding from the capital market, among others by issuing MTN.

In the field of advisory, consulting service business players who have already been established are a challenge for the Company to expand its market reach. Whereas in the field of ex IBRA's asset management services, the amount and value of assets handed over to the Company has decreased along with the implementation of tasks that have been completed well by the Company. Although the management of ex-IBRA's assets has declined, the Company cooperates with SOEs and ROEs in the framework of managing the assets of SOEs and ROEs.

Management's Assessment of Potential Issues with Significant Impact on the Company's Business Continuity, and the Assumptions Used by Management in Conducting Assessment

Management's assessment of issues that are affecting the Company's business continuity as described above is based on the Company's performance evaluation, as stated in the preparation of the 2020 fiscal year Budget and Planning with SWOT analysis on the Company's performance throughout 2020. In addition, the Company has tool to measure the Company's soundness index based on SOEs Ministerial Decree No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Soundness Level

Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam melakukan penilaian tersebut, manajemen menggunakan asumsi pencapaian realisasi terhadap target tahun 2019 sebagaimana telah dijelaskan pada bab ini; termasuk pencapaian target dalam Tingkat Kesehatan Perusahaan.

Perusahaan optimis bahwa kelangsungan seluruh segmen usaha akan berjalan dengan baik seiring dengan strategi jangka panjang yang tertuang dalam Rencana jangka Panjang Perusahaan Tahun 2019-2023 yang bertujuan untuk menjadikan PPA sebagai perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi. Rencana jangka Panjang yang berlangsung selama 5 (lima) tahun tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: konsolidasi (2019), *Rapid Growth* (2020-2022) dan *Sustainable* (2023). Sejauh ini, manajemen menilai bahwa Perusahaan telah berhasil melakukan transformasi sesuai Rencana jangka Panjang 2015-2019. Oleh karena itu, kelangsungan usaha di masa yang akan datang diyakini akan menjadi lebih baik lagi dengan semakin meningkatnya kinerja Perusahaan karena tingkat *brand awareness* yang semakin meningkat sehingga mampu mendapatkan kepercayaan dari *existing customer* dan *potential customer* serta didukung dengan manajemen risiko yang baik.

Assessment of State-Owned Enterprises as described above. In carrying out this assessment, the management use the assumptions of realization achievement of 2019 target as explained in this chapter; including the achievement of Company's Soundness Index target.

The Company is optimistic that the continuity of its entire business segments will run well in line with the long-term strategy set out in the Company's 2019-2023 Long-Term Plan, with the goals of making PPA as a leading investment company and trusted partner in corporate restructuring. The long-term plan that lasts for 5 (five) years consists of 3 (three) stages, namely: Consolidation (2019), Rapid Growth (2020-2022) and Sustainable (2023). Up to date, the management believes that the Company has succeeded in carrying out the transformation according to the 2015-2019 Long-term Plan. Therefore, business continuity in the future is believed to be even better with the increasing performance of the Company due to the increasing level of brand awareness, hence able to gain the trust of existing customers and potential customers and is supported by good risk management.

PROSPEK USAHA TAHUN 2020 DAN RENCANA STRATEGIS 2020 BUSINESS OUTLOOK AND STRATEGIC PLANNING

Perusahaan telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal ("APS") No. S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal, yang mengarahkan Perusahaan agar mengikuti asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, sebagai berikut:

The Company has prepared the Corporate Work Budget and Planning for 2020 based on the Aspiration of Shareholders/Capital Owners ("APS") No. S-574/MBU/08/2019 dated August 30, 2019 concerning the Aspirations of Shareholders/Capital Owners, which directed the Company to follow the macroeconomic assumptions used in the preparation of the State Budget (APBN) of 2020, as follows:

No	Asumsi Eksternal External Assumptions	RKAP 2020 2020 Budget and Planning
1	Pertumbuhan Ekonomi Economic growth	5,3%
2	Inflasi Inflation	3,1%
3	Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Treasury Bills (SPN) Interest Rate	5,4%
4	Nilai Tukar Rupiah Rupiah exchange rate	Rp14.400/USD
5	Harga minyak mentah Indonesia (ICP) Indonesian crude oil prices (ICP)	USD63 per barrel
6	Lifting minyak per hari Lifting oil per day	755 ribu barrel 755 thousands barrel
7	Lifting gas (setara minyak) per hari Lifting gas (oil equivalent) per day	1.191 ribu barrel 1,191 thousands barrel
8	Suku Bunga Pinjaman Bank/ Surat Utang Bank Loans/Securities Interest Rate	9 – 11%

Sasaran kinerja di dalam aspirasi pemegang saham terdiri dari sasaran keuangan berupa *absolute target*, *main target* dan *specific target*, dan sasaran non keuangan. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, Perusahaan telah menyusun sasaran keuangan yang berupa nilai absolut target pada RKAP tahun 2020 secara Konsolidasian, yakni sebagai berikut:

Performance target in the shareholders' aspiration consist of financial target in the form of absolute target, main target and specific target, and non-financial target. Based on the assumptions above, the Company has compiled financial target in the form of the absolute target value in the 2020 Budget and Planning on a Consolidated basis, which is as follows:

No	Target RKAP 2020 2020 Budget and Planning Target	Nilai (Rp juta) Value (Rp million)
1	Total Aset Total Assets	20.188.721
2	Laba Bersih Tahun Berjalan Total Income for the Year	531.988
3	Total Ekuitas Total Equity	5.511.438
4	Belanja Modal (<i>Capital Expenditure</i>) <i>Capital Expenditure</i>	1.108.490
5	Dividen Dividend	47.000

Untuk mencapai sasaran keuangan yang berupa nilai absolut target tersebut, Perusahaan bersama entitas anak telah menyusun berbagai strategi usaha dan kebijakan perusahaan yang sejalan dengan program kerja atau program kegiatan baik yang akan dilaksanakan di level Perusahaan maupun oleh entitas anak.

Untuk mendukung pencapaian target sasaran keuangan dan peningkatan kinerja pada tahun 2020, Perusahaan merencanakan untuk tetap fokus pada beberapa program kerja atau kegiatan sebagai berikut:

1. Investasi

Perusahaan merencanakan untuk melakukan kegiatan investasi sesuai dengan ketersediaan dana dan strategi investasi pada beberapa bidang industri antara lain: pertanian, kimia dan farmasi, listrik, gas dan air, transportasi, gudang dan komunikasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran dan lain-lain. Strategi yang akan dilakukan dalam bidang Investasi antara lain: investasi melalui kerja sama, *trading* dan pengelolaan dan/atau pembelian *distressed asset* terutama melalui perbankan, dari Bank BUMN atau Himpunan Bank milik Negara ("Himbara"). Dalam program kerja investasi di bidang properti, Perusahaan dapat melakukan investasi langsung berupa pengembangan aset/ lahan milik Perusahaan bekerja sama dengan pihak kontraktor maupun *developer*, ataupun melalui pemberian pinjaman pada perusahaan properti.

2. Restrukturisasi dan Revitalisasi

Dalam RKAP 2020 Perusahaan masih melanjutkan kegiatan R/R berdasarkan penugasan dari Menteri BUMN. Pelaksanaan restrukturisasi dan revitalisasi dapat disertai dengan pemberian bantuan dalam bentuk pendanaan maupun investasi kepada BUMN yang dilakukan *restrukturisasi dan revitalisasi*.

3. Advisory

Memberikan jasa konsultasi bisnis dan pengelolaan aset bagi BUMN, BUMD, Lembaga Pemerintah, dan Non BUMN/UMD. Jasa konsultasi tersebut diantaranya dapat berupa *asset mapping*, *asset disposal*, *asset development*, *business plan*, *merger & acquisitions*, *business valuation & financial modeling*, *feasibility study*, Penyusunan Standar Operasi & Prosedur ("SOP"), *restrukturisasi utang*, *sustainability services dan financial arranger*.

To achieve the financial target in the form of absolute target value, the Company and its subsidiaries have prepared a number of business strategies and company policies that are in line with work programs or activities programs both to be implemented at the Company level and by the subsidiaries.

To support the achievement of financial target and to increase performance in 2020, the Company is planning to remain focused on the following work programs or activities:

1. Investment

The Company plans to carry out investment activities in accordance with the availability of funds and investment strategies in several industrial sectors including: agriculture, chemical and pharmaceutical, electricity, gas and water, transportation, warehouse and communication, housing, industrial estates and offices and others. Strategies to be carried out in the investment sector include: investment through cooperation, trading and management and/ or purchasing distressed assets, especially through banks, from state-owned banks or state-owned bank associations ("Himbara In investment work programs in the property sector, the Company can conduct direct investment") in the form of developing assets/ land owned by the Company in cooperation with contractors and developers, or through lending to property companies.

2. Restructuring and Revitalization

In the 2020 Budget and Planning, the Company is still continuing its R/R activities based on the assignment from the Minister of SOEs. The restructuring and revitalization can be accompanied by the provision of assistance in the form of funding and investment to SOEs that are being restructured and revitalized.

3. Advisory

Providing business advisory service and asset management for SOEs, ROEs, Government Institutions, and Non SOEs/ROEs. This advisory service includes asset mapping, asset disposal, asset development, business plan, merger & acquisition, business valuation & financial modeling, feasibility study, Standard Operating & Procedures ("SOP"), debt restructuring, sustainability services and financial arranger.

PROSPEK USAHA TAHUN 2020 DAN RENCANA STRATEGIS
2020 BUSINESS OUTLOOK AND STRATEGIC PLANNING4. *Financing*

Memberikan pembiayaan yang meliputi pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan talangan (*bridge financing*), dan pembiayaan akuisisi (*buy out financing*).

Untuk mendukung terlaksananya program kerja atau kegiatan tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas secara optimal, Perusahaan merencanakan memperoleh pendanaan jangka pendek dan/atau jangka panjang baik melalui perbankan dan/atau *strategic investor* dan/atau penerbitan surat utang (MTN dan/atau Obligasi dan/atau Surat Utang lainnya), sebesar Rp5,2 triliun. Sedangkan untuk kegiatan yang belum dapat diestimasikan secara spesifik, diperkirakan kebutuhan tambahan pendanaan jangka pendek dan/atau jangka panjang melalui perbankan dan/atau *strategic investor* dan/atau penerbitan surat utang (MTN dan/atau Obligasi dan/atau Surat Utang lainnya) sebesar Rp4,8 triliun.

Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan jangka pendek dan/atau jangka panjang melalui perbankan dan/atau *strategic investor* dan/atau penerbitan surat utang (MTN dan/atau Obligasi dan/atau Surat Utang lainnya) yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp10,0 triliun.

4. Financing

Providing financing which includes working capital financing, project financing, bridge financing, and acquisition financing (*buy out financing*).

To optimally support the implementation of work programs or activities in 2020 as mentioned above, the Company plans to obtain short-term and/or long-term funding through both banking and/or strategic investors and/or issuance of debt securities (MTN and/or Bonds and/or Other Debt Securities), amounting to Rp5.2 trillion. Whereas for activities that cannot be specifically estimated, it is projected that the need for additional short-term and/or long-term funding through banking and/or strategic investors and/or issuance of debt securities (MTN and/or Bonds and/or other Debt Securities) is Rp4.8 trillion.

Therefore, the total short-term and/or long-term funding needs through banking and/or strategic investors and/or the issuance of debt securities (MTN and/or Bonds and/or other Debt Securities) issued by the Company in 2020 is estimated at Rp10.0 trillion.

PETA JALAN USAHA: RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG BUSINESS ROAD MAP: LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN

Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2019-2023, Perusahaan menargetkan untuk mampu menjadi *National Asset Management Company* melalui kegiatan pengelolaan aset, restrukturisasi korporasi termasuk RR BUMN, *advisory* dan kegiatan investasi lainnya. Pertumbuhan Perusahaan secara konsolidasian pada periode 2015-2018 menunjukkan bahwa kegiatan dalam bidang investasi, R/R BUMN, pengelolaan aset eks BPPN dan jasa *advisory* telah berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam RJPP 2015-2019.

Untuk mewujudkan mimpi menjadi *National Asset Management Company*, Perusahaan menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti penerapan Teknologi *Mobile Office*, penyusunan *roadmap HC for industry 4.0* dan penerapan PSAK 71,72 dan 73 yang sejalan dengan visi perusahaan. Kegiatan investasi dan pengelolaan aset akan berfokus pada pengelolaan NPL dari bank Himbara dan perbankan swasta lainnya yang dilakukan melalui entitas anak. Kegiatan investasi dan pengelolaan aset tersebut diproyeksikan untuk tahun-tahun berikutnya akan berkembang pesat tanpa meninggalkan amanah untuk melakukan R/R BUMN.

Berkenaan dengan pelaksanaan aktivitas R/R BUMN, Perusahaan mengupayakan penyehatan BUMN dilakukan dengan menggunakan skema dikelola sebagai entitas anak melalui mekanisme *inbreng*, sehingga pelaksanaan penyehatan BUMN diharapkan akan lebih optimal. Saat ini, kajian usulan penyehatan BUMN melalui mekanisme *inbreng* sedang dalam proses mendapatkan persetujuan dari regulator. Mengingat belum dapat dipastikannya persetujuan tersebut, maka dalam RJPP 2019-2023 belum memasukkan proyeksi keuangan dari BUMN yang akan di-*inbreng*-kan kepada Perusahaan.

Dengan arah dan strategi pertumbuhan yang ditetapkan, pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Perusahaan menargetkan besaran rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 33% dengan rata-rata pertumbuhan aset 3%. Selain itu, kepemilikan saham Perusahaan pada PT Nindya Karya akan dialihkan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN pada tahun 2022.

In the Company's Long Term Plan (RJPP) for the period of 2019-2023, the Company is targeting to be able to become a *National Asset Management Company* through asset management activities, corporate restructuring including SOEs RR, *advisory* and other investment activities. The consolidated growth of the Company in the period of 2015-2018 shows that the activities in investment, R/R of SOEs, ex IBRA asset management and *advisory* services have been running well in accordance with the targets set in the 2015-2019 RJPP.

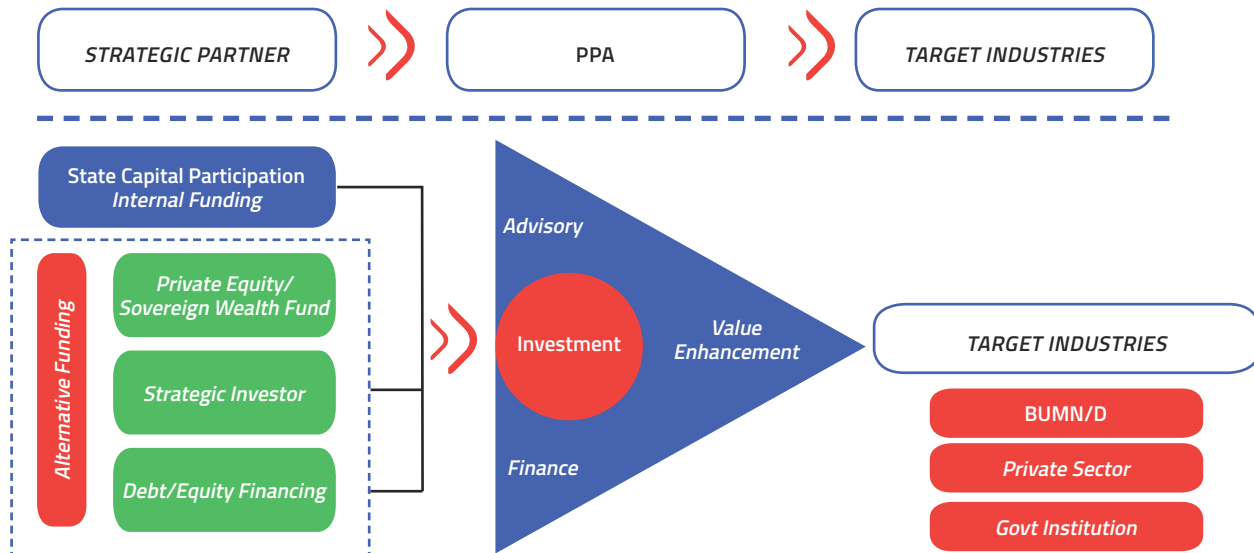
To realize the dream of becoming a *National Asset Management Company*, the Company prepares supporting infrastructure, such as the application of *Mobile Office Technology*, the preparation of *HC for industry 4.0 roadmap* and the adoption of PSAK 71.72 and 73 which is in line with the Company's vision. Investment and asset management activities will focus on managing NPLs from Himbara banks and other private banks, which are carried out through subsidiaries. The investment and asset management activities are projected to develop rapidly for the following years without leaving the mandate for SOEs R/R.

With regard to the implementation of SOEs R/R activities, the Company strives to restructure SOEs using a managed scheme as a subsidiary through an *inbreng* mechanism, so that SOEs restructuring is expected to be more optimal. At present, a study on the proposal to restructure SOEs through the *Inbreng* mechanism is in the process of obtaining approval from the regulator. Considering that the agreement cannot be ascertained, it has not included financial projections from SOEs that will be under *inbreng* scheme by the Company in the 2019-2023 RJPP.

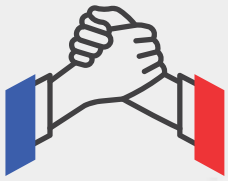
With the established direction and growth strategy, in the period of 2019 to 2023, the Company is targeting an average net income growth of 33% with an average asset growth of 3%. In addition, the Company's share ownership in PT Nindya Karya will be transferred to the Government of Indonesia through the Ministry of SOEs in 2022.

PETA JALAN USAHA: RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG
BUSINESS ROAD MAP: LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN

Network Access of Market Strategic Partners and Capital



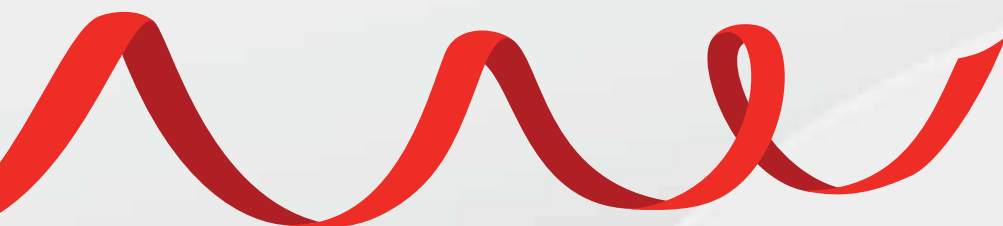




TATA KELOLA **PERUSAHAAN** CORPORATE GOVERNANCE

Pengelolaan bisnis yang diikuti penguatan organisasi serta hubungan dengan pemangku kepentingan akan memberikan landasan yang kuat bagi PPA untuk membangun korporasi yang sehat.

Business management that is followed by organizational strengthening and stakeholder relations will provide a strong foundation for PPA to build a sound corporation.





PEMAHAMAN MENDASAR TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

BASIC UNDERSTANDING OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pada konsep pembangunan berkelanjutan, atau *sustainability development*, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa-masa mendatang. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Secara definitif, GCG merupakan serangkaian sistem yang mengatur dan mengendalikan entitas usaha yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah untuk seluruh pemangku kepentingan. Terdapat 2 (dua) hal penekanan, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kewajiban entitas usaha untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja entitas usaha, kepemilikan, dan pemangku kepentingan. Kehadiran GCG diharapkan mampu memberikan fondasi atas pengelolaan entitas usaha yang akuntabel.

Penerapan GCG dapat didorong dari 2 (dua) sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) "memaksa" perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, prinsip-prinsip penerapan GCG mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya lingkungan bisnis pada dunia usaha, dengan mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika. Di lingkup PT Perusahaan Pengelola Aset

In the concept of sustainability development, Good Corporate Governance (GCG) is one of the main pillars that are expected to establish the foundation of a healthy investment climate. Furthermore, GCG has become one of the fundamental factors for investors in assessing company's sustainable performance into the future. The implementation of GCG encourages the creation of healthy competition and conducive business climate. Therefore, GCG implementation by companies in Indonesia is very important to support sustainable economic growth and stability.

By definition, GCG is a set of systems that regulates and controls business entities, which are expected to create added value for all stakeholders. There are 2 (two) points of emphasis, i.e. the importance of shareholders' right to obtain information correctly and on time, and the obligation of business entities to perform disclosures accurately, timely, transparently regarding all information on the performance of business entities, ownership, and stakeholders. The presence of GCG is expected to be able establish a foundation for accountable business entities management.

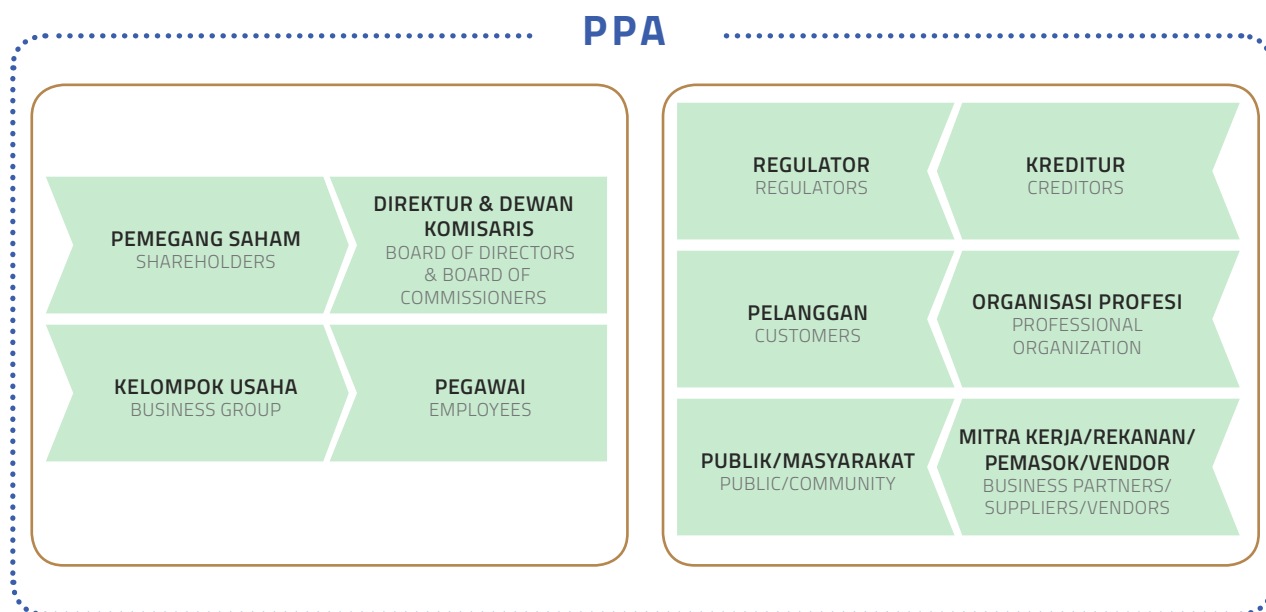
GCG implementation can be driven from 2 (two) sides, namely ethics and regulations. Ethical driven comes from the awareness of individual business people to carry out business practices that emphasize the company's survival, stakeholders' interests, and avoid methods to pursue temporary profit. On the other hand, regulatory driven "forces" companies to comply with applicable laws and regulations.

At present, the principles of GCG implementation have evolved along with the business environment development in the business world, covering a system of oversight and control that supports work ethics and responsible decision making, supports integrity in financial reporting, proper risk management, and relations of stakeholders and company that are based on ethics. Within the scope of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) or "Company", an assessment is carried

Aset (Persero) atau “Perusahaan”, penilaian dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

out on the implementation of GCG to ensure the comprehensive realization of GCG principles.

Hubungan PPA dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan PPA's Relations with Shareholders and Stakeholders



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

DASAR-DASAR DAN KOMITMEN PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA

Tujuan Penerapan GCG

Untuk mendukung pencapaian strategi dan tujuan yang sejalan dengan visi misi yang ditetapkan, Perusahaan berkomitmen menerapkan dan mengembangkan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Membangun mekanisme *Check and Balances* antar organ Perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja Perusahaan dan komunikasi antar organ Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta citra dan reputasi Perusahaan, sehingga mampu mendorong peningkatan hubungan bisnis dan kinerja Perusahaan;
4. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
5. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan;
6. Mendorong agar organ Perusahaan dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan khususnya di sekitar Perusahaan;

BASICS AND COMMITMENT ON GOVERNANCE PRINCIPLES IMPLEMENTATION

Objectives of GCG Implementation

In order to support achievement of the stipulated vision and mission, the Company is committed to implement and develop Good Governance for the objectives, as follows:

1. To support achievement of the Company's sustainability through management based on transparency, accountability, responsibility, independency as well as fairness and equality;
2. To build Check and Balances mechanism between Corporate structure and other Stakeholders, to encourage the Company's performance achievement and communication between Corporate Structures and other Stakeholders.
3. To increase trusts of the stakeholders as well as corporate image and reputation to encourage improvement of the Company's business relation and performance;
4. To optimize Shareholders' value by improving transparency, accountability, trusted, responsibility and fairness principles so that the Company has strong competitiveness;
5. To support professional, transparent and efficient management of the Company and empower function and improve independency of the Company's structure;
6. To support the Company's structure to take decision and action based on high moral value and compliance to prevailing Law as well as social awareness and responsibility of the Company to the Stakeholders as well as environmental conservation particularly in the Company's operational area;

7. Memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional yang dapat dicapai melalui R/R BUMN, pengelolaan aset eks BPPN dan aset BUMN, serta kegiatan investasi; dan
8. Membantu meningkatkan iklim investasi nasional melalui program/kegiatan yang dilaksanakan.

Perusahaan berkomitmen menerapkan praktik-praktik GCG untuk memaksimalkan nilai perusahaan (*corporate value*), mendorong pengelolaan Perusahaan lebih profesional yang dilakukan secara berkesinambungan dan lebih dari sekedar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan Pemegang Saham maupun kepentingan *Stakeholders* lainnya.

Komitmen tersebut telah menjadi budaya dalam berperilaku yang diaktualisasikan dengan senantiasa konsisten melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian yang dilaksanakan oleh penilai independen dan melakukan pengkajian secara berkala, juga dengan melakukan pemutakhiran data yang diperlukan atas kebijakan GCG yang berlaku, agar tetap sesuai dengan kondisi terkini.

Untuk mewujudkan tujuan penerapan GCG seperti yang telah disebutkan di atas, Perusahaan berupaya menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

7. To contribute for national economy that is achieved through SOEs R/R, Ex-IBRA and SOEs assets management and investment activities; and
8. To support national investment climate improvement through the implemented program/ activity

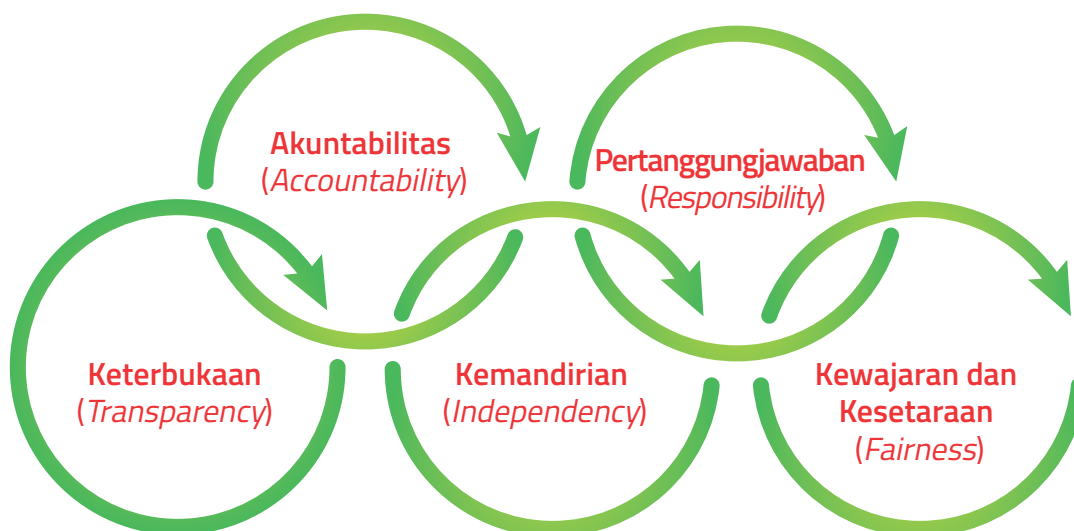
The Company is committed to implement GCG practices to optimize corporate value, encourage more professional management of the Company that is done continuously and beyond compliance with the law and regulation, while also maintaining balance between interests of the Shareholders and other Stakeholders.

The commitment has become a culture in behaving that is actualized by always consistently performing follow-up on the assessment result recommendation that is conducted by independent assessor and doing regular review, as well as updating the data required on prevailing GCG policy to always be relevant with current condition.

To realize the objectives of GCG implementation as mentioned above, the Company endeavors to apply 5 (five) basic principles of GCG, namely: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, as released in the General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Policy Committee Governance (KNKG).

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

Asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Principles of Good Corporate Governance



Bentuk komitmen nyata Perusahaan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

The manifestations of the Company's commitment to the implementation of GCG principles are as follows:

PRINSIP TRANSPARANSI TRANSPARENCY PRINCIPLE

Pendekatan

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Perusahaan menyediakan informasi terkait kegiatan usahanya kepada *stakeholders* melalui penyediaan informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala antara lain melalui *website* Perusahaan, penerbitan Laporan Tahunan dan Laporan Triwulan serta laporan lainnya sesuai keperluan. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Approach

Transparency in decision-making process, and transparency in disclosing material and relevant information about the company.

Implementation in the Company

The Company disclose information related to its business activities to stakeholders through the provision of Corporate information that is relevant, adequate, and reliable in a timely and periodical manner, including through the Company's website, the publication of Annual Reports and Quarterly Reports and other reports as needed. The Company discloses important information in the Annual Report and Financial Statements in accordance with statutory regulations.

PRINSIP AKUNTABILITAS
ACCOUNTABILITY PRINCIPLE

Pendekatan

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Perusahaan memiliki mekanisme yang kuat dalam proses penerapan GCG. Mekanisme tersebut dirancang dalam bentuk kebijakan, pedoman, prosedur dan hubungan yang jelas antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Perusahaan senantiasa mengkaji dan menyempurnakan *soft-structure* GCG secara berkala guna memastikan penerapan GCG sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun peraturan yang berlaku. Perusahaan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Code*), Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Kerja/Piagam (*Charter*) untuk organ Perusahaan, baik Direksi maupun Dewan Komisaris serta organ-organ Penunjang Dewan Komisaris Perusahaan. Dengan demikian, penerapan prinsip GCG akan memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang, jika sudah menjadi budaya yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Approach

Clarity of function, implementation and accountability of the organs to carry out the management of the Company effectively.

Implementation in the Company

The Company has a strong mechanism in the process of implementing GCG. The mechanism is designed in the form of policies, guidelines, procedures and clear relationship between Board of Commissioners and Board of Directors in making decisions in accordance with their duties, functions and responsibilities. The Company constantly reviews and updates the GCG soft-structure periodically, to ensure the implementation of GCG is in line with the needs of business processes and applicable regulations. The Company has a Good Corporate Governance Code, Code of Conduct, Charter for the Company's organs, both Board of Directors and Board of Commissioners, and the Supporting organs of the Company's Board of Commissioners. Therefore, the implementation of GCG principles will have a significant impact in the long run if has become a culture that is manifested in daily behavior.

PRINSIP RESPONSIBILITAS
RESPONSIBILITY PRINCIPLE

Pendekatan

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Perusahaan dalam memenuhi kesesuaian pengelolaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, dilakukan melalui pelaksanaan audit terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik setiap tahunnya.

Approach

Conformity in the Company's management with the law and regulation as well as sound corporate principles.

Implementation in the Company

The Company's effort to fulfill the conformity of management with applicable laws and regulations and sound corporate principles is carried out through auditing compliance with laws and regulations and internal control conducted by Public Accounting Firm annually.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

PRINSIP INDEPENDENSI INDEPENDENCY PRINCIPLE

Pendekatan

Kadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Penerapan di lingkup Perusahaan

1. Penerapan Independensi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris harus bertindak secara independen. Independensi merupakan aspek yang perlu diperhatikan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan perusahaan.

Pemenuhan independensi Dewan Komisaris diukur berdasarkan kriteria antara lain bahwa anggota Dewan Komisaris:

- Bukan merupakan anggota Manajemen Perusahaan;
- Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
- Bukan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan;
- Bukan pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota Perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan komisaris;
- Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan komisaris;
- Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama.

2. Penerapan independensi Direksi

Direksi dalam menjalankan segala tindakan kepengurusan Perusahaan atau hubungan dengan pihak lain harus bersifat independen tanpa campur tangan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, antar anggota Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Approach

The condition where the Company is managed professionally without any conflict of interest and influence/pressure from any party that may violate the law and sound corporate principles.

Implementation in the Company

1. Independency of Board of Commissioners

Each member of Board of Commissioners must act independently. Independency is an aspect that needs to be considered to minimize the possibility of conflicts of interest. Board of Commissioners carries out the duties solely for the benefit of the Company and is not affected by parties having different interests from the interests of the Company.

The fulfillment of Board of Commissioners' independence is measured based on the criteria that a member of Board of Commissioners is:

- Not a member of Company Management;
- Free from business relationships and other relationships that can influence decision making;
- Not a major Shareholder of the Company or employee who deals directly with the major Shareholders of the Company;
- Not an employee or had worked as an executive at the Company or a member of affiliation, at least 3 (three) years before becoming a member of Board of Commissioners;
- Not a professional main advisor or consultant for the Company or affiliated companies, or employee who deals directly with service providers, at least 3 (three) years before becoming a member of Board of Commissioners;
- Not a main supplier or customer of the Company or affiliated company or employee of/or who has direct or indirect contact with the main supplier or customer.

2. Independency of Board of Directors

Board of Directors in carrying out all Corporate management actions or relations with other parties must be independent without interference from any party that is contrary to the laws and regulations and the Articles of Association of the Company, which can materially interfere with the objectivity and independence of Board of Directors' duties that are performed solely for the interests of the Company. In accordance with the Company's Articles of Association, between members of Board of Directors as well as between members of Board of Directors and members of Board of Commissioners shall not have family relations up to the third degree, either in a straight-up or sideways line, including relationships arising from marriage.

PRINSIP KEWAJARAN DAN KESETARAAN
FAIRNESS AND EQUALITY PRINCIPLE

Pendekatan

Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan *Stakeholders* baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta asas kesetaraan dalam menjalankan bisnis.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan anggota Direksi, Pemegang Saham telah mempertimbangkan pemenuhan aspek keberagaman usia, pendidikan, pengalaman kerja dan jenis kelamin. Dengan keberagaman tersebut diharapkan Dewan Komisaris dan Direksi dapat melakukan tugasnya secara lebih efektif dalam mencapai target dan kinerja Perusahaan.

Approach

Fair and equal treatment in fulfilling rights of the stakeholders, both the shareholders and other stakeholders occurred based on agreement and law as well as fairness principle in running the business.

Implementation in the Company

In determining the composition of Board of Commissioners and members of Board of Directors, the Shareholders have considered the fulfillment of age, education, work experience and gender diversity aspect. With this diversity, it is hoped that Board of Commissioners and Board of Directors can carry out their duties more effectively in achieving the Company's targets and performance.

Dasar Hukum dan Dasar Kebijakan

Perusahaan memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan prinsip GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal dan kebijakan yang menjadi landasan bagi Perusahaan dalam penerapan prinsip GCG, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, di antaranya adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Legal Framework and Policies

The Company has full commitment and consistently enforcing GCG principles implementation by referring to formal regulation and policies as framework of the Company in GCG principles implementation, as follows:

1. Law of Republic of Indonesia, among others:
 - a. Law of Republic of Indonesia No. 1 of 1970 concerning Work Safety.
 - b. Law of Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
 - c. Law of Republic of Indonesia No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
 - d. Law of Republic of Indonesia No. 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism.
 - e. Law of Republic of Indonesia No. 20 of 2001 as Amendment on Law of Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning Corruption Crime Eradication.
 - f. Law of Republic of Indonesia No. 15 of 2002 concerning Money Laundering Crime as Amended under Law of Republic of Indonesia No. 25 of 2003 as Amendment on Law Number 15 of 2002 concerning Money Laundering Crime.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

g. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. h. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. i. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. j. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. k. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. l. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. m. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. n. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. o. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	g. Law of Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprise h. Law of Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure. i. Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System. j. Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. k. Law of Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure. l. Law of Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction. m. Law of Republic of Indonesia No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. n. Law of Republic of Indonesia No. 36 of 2009 concerning Health. o. Law of Republic of Indonesia No. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency.
2. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.	2. Government Regulation Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Keputusannya, di antaranya adalah: a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara. c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.	3. Minister of State-Owned Enterprise Regulation, among others: a. Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/2006 concerning Audit Committee for State-Owned Enterprise. b. Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Board of Commissioners Members Appointment and Procedure in State-Owned Enterprise. c. Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Structure of Board of Commissioners/ Supervisory Board in State-Owned Enterprise. d. Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Board of Directors Members Appointment and Dismissal Requirements and Procedure in State-Owned Enterprise.

- e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
 - f. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
 - g. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
4. Pedoman Internal
Anggaran Dasar Perusahaan
 5. Pedoman Kebijakan Lainnya
Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2006
- e. Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprise with the latest Amendment under No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprise.
 - f. Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board Remuneration Procedure in State-Owned Enterprise with the latest amendment through the Minister of SOEs Regulation No. PER-06/MBU/06/2018 as the Third Amendment on Minister of SOEs Regulation Number PER04/MBU/2014 concerning Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board Remuneration Procedure in State-Owned Enterprise.
 - g. Decree of Secretary of Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation for the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.
4. Internal Guidelines
Articles of Association of the Company
 5. Other Policy Guidelines
General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy in 2006

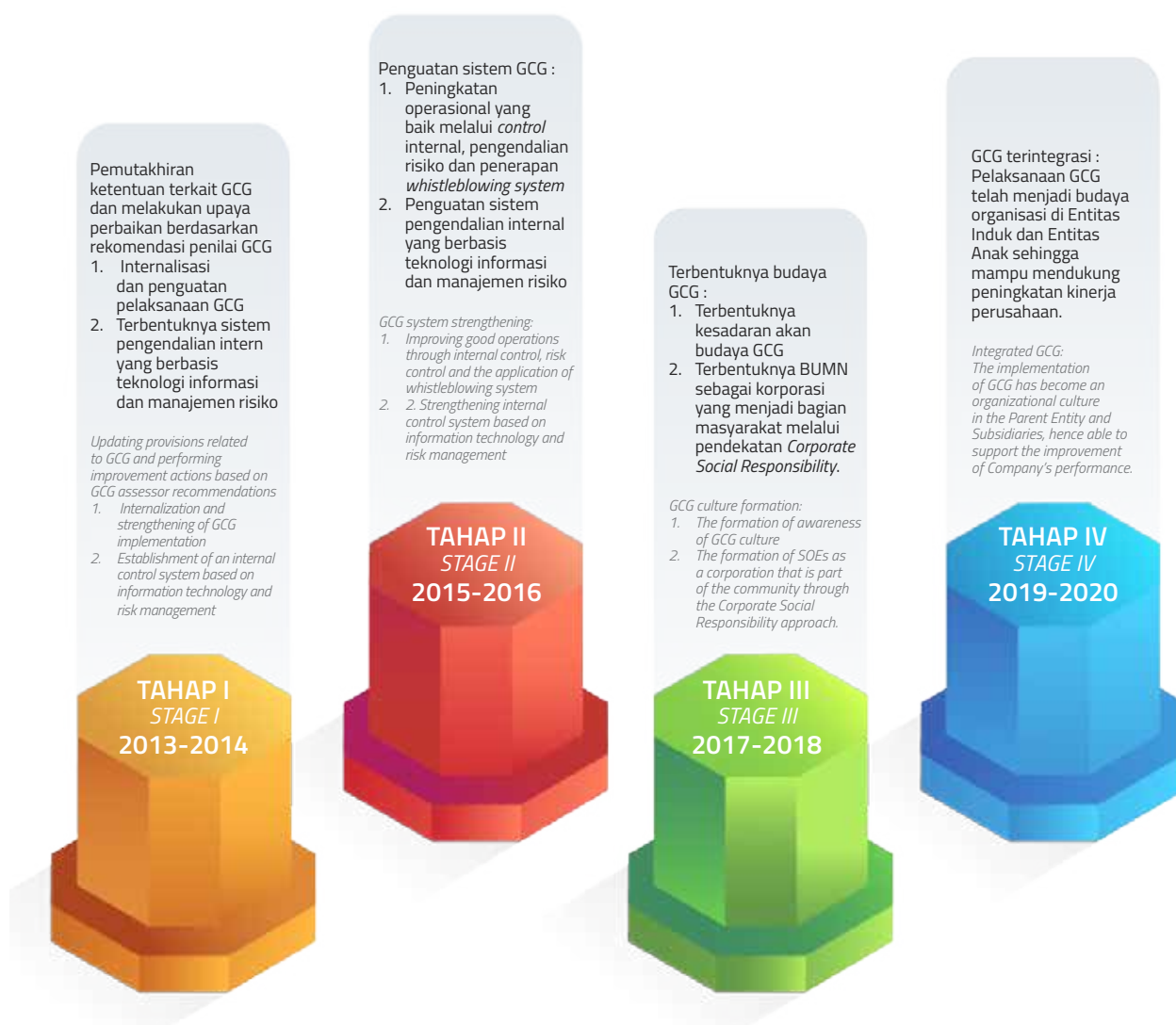
PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai panduan dari penerapan GCG, Perusahaan mengacu pada GCG *Roadmap* yang disusun untuk periode 2013 - 2020. Tahapan *Roadmap* GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

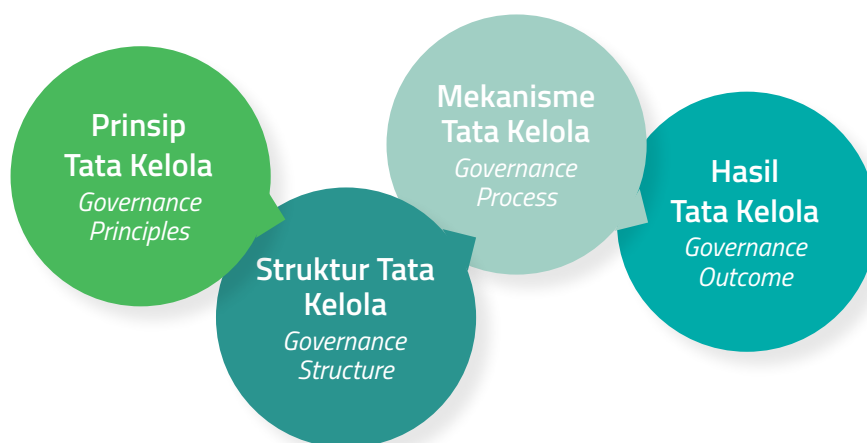
DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As a guideline of GCG implementation, the Company refers to the GCG *Roadmap* prepared for the period of 2013 - 2020. The stages of the Company's GCG *Roadmap* are as follows:



STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola atau *Governance Principles* di lingkup Perusahaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, serta Mekanisme atau Proses Tata Kelola atau *Governance Process*. Ke-2 aspek ini berkesinambungan satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola atau *Governance Outcome* sesuai dengan yang diharapkan.



Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan Mekanisme Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

GOVERNANCE STRUCTURE AND PROCESS

The implementation of Governance Principles within the scope of the Company as explained earlier consists of 2 (two) main aspects, namely the Governance Structure and Governance Process. These two aspects are continuous with one another, which in the end will reflect the results of Governance Outcome as expected.

The Governance Structure is organs or devices that are owned by the Company, both organ or device that was formed due to compliance with applicable laws and regulations, as well as an organ or device that was formed due to internal needs in order to improve GCG implementation. While the Governance Process is a series of processes, practices, rules, and institutions that affect the overall management of the Company. The Governance Process includes rules and legislation that apply to the Company, Permanent Procedures, Charter, documents, to rules that govern the relationship between organs or devices.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA**Struktur Tata Kelola Perusahaan**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Implementasi GCG Perusahaan mengacu pada optimalisasi peran dan hubungan antara Organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam perkembangannya, ketiga organ tersebut membutuhkan dukungan dari infrastruktur tambahan tata kelola Perusahaan baik berupa sistem/mekanisme (*soft structure*) maupun unit kerja (*hard structure*). Pelaksanaan GCG Perusahaan tentunya mengacu pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Corporate Governance Structure

According to Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Chapter I on General Regulation Article 1, the Company's structure consists of General Meetings of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners.

1. General Meetings of Shareholders, or later stated as GMS is the Company's Structure with distinctive authority that is neither delegated to Board of Directors or Board of Commissioners in limit as set forth in the Law and/or Articles of Association.
2. Board of Directors is part of the Company's structure with full authority and responsibility on the Company's management for the Company's interest, according to purposes and objectives of the Company and represents the Company on and off the court according to provisions in the Articles of Association.
3. Board of Commissioners is part of the Company's Structure with duty to perform general and/or specific supervision according to Articles of Association and provide advice to Board of Directors.

GCG implementation in the Company refers to optimization of role and relationship among the Company's Structures including General Meetings of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors. In the actual condition, those three structures require support from Corporate Governance additional infrastructures both system/mechanism (*soft structure*) and working unit (*hard structure*). GCG implementation in the Company also refers to provisions in the Law, Articles of Association and other regulations based on the principle that each structure has independency in carrying out the duty, function and responsibility for the Company's interest.

The GMS, Board of Directors and Board of Commissioners respect each others' duty, responsibility and authority according to the Law and Articles of Association of the Company.

Dalam menjalankan tugas pengurusan Perusahaan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja, Fungsi Manajemen Risiko, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perusahaan.

Sedangkan dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite-Komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan adalah:

1. Komite Audit

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal, serta dalam mengkaji dan memberikan persetujuan semua informasi dan usulan yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya, seperti Laporan Keuangan, Laporan Manajemen, Laporan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Laporan Tahunan Perusahaan.

2. Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap implementasi GCG dan manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan.

In carrying out the Company's managerial duty, the Board of Directors is assisted by Corporate Secretary, Internal Audit, Corporate Strategic Planning and Performance Management, Risk Management Function, Investment and Risk Management Committee, as well as other working units who performs the Company's managerial function.

While in carrying out the supervisory duty, the Board of Commissioners may establish committee with one member or more appointed from Board of Commissioners members and being responsible to Board of Commissioners. Board of Commissioners has established Committees, as follows:

1. Audit Committee

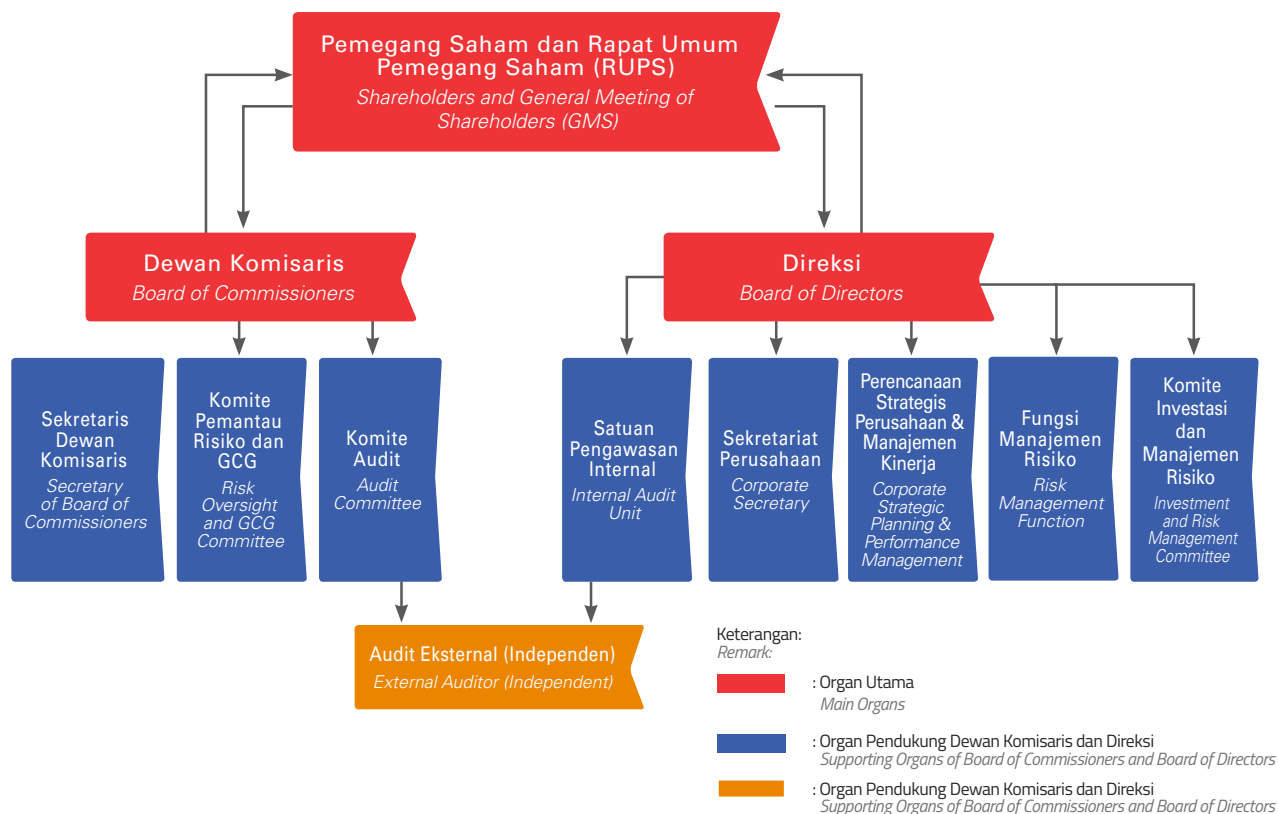
Committee that is established by Board of Commissioners to help Board of Commissioners in fulfilling its duty and obligation to review effectiveness of internal control system, external and internal auditor's duty implementation, as well as to review and grant approval on every information and recommendation that is prepared and proposed by other parties such as Financial Statements, State Capital Participation Realization Report and Annual Report of the Company.

2. Risk Oversight and GCG Committee

Committee that is established by Board of Commissioners to help Board of Commissioners' duty and function to regularly oversee and recommend improvement on GCG and risk management implementation that are carried out and developed by the Company.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

Struktur Tata Kelola PPA
PPA Governance Structure



Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme Tata Kelola merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar struktur pemerintahan, melainkan dibutuhkan adanya peraturan yang jelas dalam bentuk mekanisme. Mekanisme tata kelola dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Corporate Governance Mechanism

Governance mechanism is a GCG implementation mechanism that is reflected in a strong system. This is important as the GCG implementation will be not sufficient if only relying on governance structure pillar but also requiring clear regulation as a mechanism. Governance mechanism can be defined as a clear rule of the game, procedure and relationship between the decision-maker with controlling (supervisor) of the policy.

Mekanisme Tata Kelola PPA PPA Governance Process



Perusahaan telah menyusun, menerapkan dan memperbaharui Kebijakan, Aturan dan Prosedur Tetap, meliputi antara lain:

The Company has compiled, applied and updated its Policies, Rules and Permanent Procedures, including among others:

No	Nomor Surat Keputusan Decree Number	Perihal Subject
1	SK-2/PPA/0119	Kebijakan Investasi Investment policy
2	SK-3/PPA/0119	Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) Whistle Blowing System Policy
3	SK-6/PPA/0119	Kebijakan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas anak dan Cucu Perusahaan Determination of the Income of Directors and Commissioners of the Company's subsidiaries and subsidiaries of subsidiary Policy
4	SE-1/PPA/0519	Larangan Menerima Gratifikasi Terkait Hari Raya Prohibition of Receiving Gratuities on Holidays
5	SE-2/PPA/0719	Service Level Agreement dan Sasaran Mutu Service Level Agreement and Quality Targets
6	SE-3/PPA/0719	Pelaksana Tugas Pengganti Kepala Divisi yang Berhalangan Substitute of Head of Division whom is Unable to Perform Duties
7	SE-4/PPA/0719	Standard Operating Procedure (SOP) Kegiatan Investasi Standard Operating Procedure (SOP) for Investment Activities
8	SK-49/PPA/0819	Kebijakan Penerbitan dan Pengamanan Dokumen Document Issuance and Security Policy
9	SE-7/PPA/0819	Pedoman Investasi Investment Guidelines
10	SK-50/PPA/0819	Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko Establishment of Investment and Risk Management Committee
11	SK-52/PPA/0919	Perubahan atas SK Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko Revision of Establishment of Investment and Risk Management Committee
12	SK-53/PPA/0919	Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset
13	SK-54/PPA/0919	Penetapan Jabatan Karyawan Pada Satuan Kerja Determination of Employee Positions at Work Units
14	SK-55/PPA/0919	Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas serta Wewenang Anggota Direksi Determination of Position and Job Description and Authority of Members of Board of Directors

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

No	Nomor Surat Keputusan Decree Number	Perihal Subject
15	SK-57/PPA/0919	Tupoksi Uraian Jabatan pada PT PPA Job Description of PT PPA
16	SK-71/PPA/1119	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Policy
17	SK-72/PPA/1119	Kebijakan Penanganan Entitas anak Subsidiary Management Policy
18	SK-73/PPA/1119	Perubahan Keputusan Direksi Nomor. No SK-17/PPA/0315 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN Amendment to Board of Directors Decree No. SK-17/PPA/0315 concerning SOEs Restructuring and Revitalization Policies
19	SE-8/PPA/1219	Pedoman Investasi Investment Guidelines
20	SK-76/PPA/1219	Perubahan Keputusan Direksi Nomor SK-2/PPA/0119 tentang Kebijakan Investasi Amendment to Board of Directors Decree No. SK-2/PPA/0119 concerning Investment Policy

Upaya Sosialisasi Keberadaan Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Kepada Pemangku Kepentingan

Perusahaan telah melakukan sosialisasi keberadaan struktur dan mekanisme tata kelola kepada pemangku kepentingan antara lain melalui pertemuan *Leaders Meeting* yang diadakan setiap pekan dan dalam kesempatan *Town Hall meeting* yang diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dihadiri oleh jajaran manajemen dan seluruh karyawan.

HASIL TATA KELOLA: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perusahaan secara berkala melakukan pengukuran atas penerapan prinsip GCG. Melalui proses pengukuran tersebut, Perusahaan memiliki tujuan untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan prinsip GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
2. Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan prinsip GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
3. Memantau konsistensi penerapan prinsip GCG di lingkungan organisasi Perusahaan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.

Socialization of Governance Structure and Process to Stakeholders

The Company has conducted socialization on the existence of governance structure and process to stakeholders, among others through Leaders Meetings held every week and in Town Hall meetings held every 3 (three) months and attended by management and all employees.

GOVERNANCE OUTCOME: EVALUATION, MONITORING, AND IMPROVEMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Company performs assessment on GCG principles implementation. Through the assessment process, the Company has the objectives to:

1. Assess and evaluate GCG principles implementation through elaboration of GCG implementation condition and comparison with the stipulated assessment indicators and parameters.
2. Provide illustration on result of assessment through scoring on GCG principles implementation, altogether with the proposed improvement recommendation, to reduce the gap between practical level with the assessment indicators and parameters.
3. Monitor the consistency of the application of GCG principles in the Company's organizational environment, as well as to obtain input for the improvement and development of GCG policies.

4. Mendorong pengelolaan Perusahaan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.

4. Encourage more professional, transparent and efficient management of the Company and empower the function and increase independency of the Company's Organs.

Dasar Penilaian dan Metode

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Perusahaan melakukan pengukuran terhadap GCG sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan/*assessment* GCG dilakukan secara berkala oleh Perusahaan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh *assessor* eksternal, dengan diselingi oleh *self assessment* yang dilakukan oleh *assessor* internal Perusahaan setiap tahun berikutnya.
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada *point* pertama, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 yang terdiri dari 6 (enam) aspek, 43 indikator penerapan Tata Kelola Perusahaan dan 153 parameter pengujian.

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan
Perusahaan secara umum memiliki komitmen yang baik untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan, antara lain didukung dengan adanya Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Perusahaan telah mengeluarkan kebijakan dan panduan tambahan di antaranya seperti Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran, Pedoman

Assessment Basis and Methods

Based on Article 44 paragraph (1) Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, the Company measured GCG as follows:

1. Corporate Governance/GCG assessment is carried out regularly by the Company every 2 (two) years by external assessor, interspersed with self-assessment carried out by the Company's internal assessor every subsequent year.
2. Evaluation (*review*), which is a program to describe the follow-up of GCG implementation in the Company conducted the following year after the assessment as referred to in the first point, which includes evaluating the results of assessment and follow up on recommendations for improvement.

The measurement method of GCG implementation in the Company refers to a copy of the Decree of Secretary of Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation for the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. This assessment and evaluation method are carried out using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with a predetermined weight as stipulated in the Copy of the Decree of Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 that consists of 6 (six) aspects, 43 indicators of Corporate Governance implementation and 153 testing parameters

1. Commitment on Sustainable Governance Implementation
The Company generally has good commitment to implement GCG continuously, namely supported by availability of Code of Corporate Governance and Code of Conduct. The Company has issued additional policies and guidelines, such as Board Manual for Board of Directors and Board of Commissioners, Whistleblowing System Management Policy, Gratification Guideline, Goods

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

Gratifikasi, Pedoman Pengadaan barang dan jasa, Kebijakan PKBL, dan Kebijakan pendukung lainnya. Sebagai perwujudan atas komitmen pelaksanaan GCG, Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengungkapan informasi, pertanggungjawaban terhadap penegakkan peraturan, akuntabilitas pembagian tanggung jawab, kemandirian profesional tanpa benturan kepentingan, dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan di lingkungan Perusahaan serta melakukan pengelolaan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
Perusahaan berupaya secara konsisten untuk memastikan hak-hak Pemilik/Pemegang Saham terpenuhi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan kebijakan Perusahaan. Pemenuhan hak-hak Pemilik/Pemegang Saham dilakukan antara lain melalui pemberian informasi terkini atas kondisi Perusahaan, pengambilan keputusan dalam RUPS serta Dewan Komisaris beserta perangkat pendukungnya (Komite dan Sekretaris) menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas bisnis dan operasional.
3. Aspek Dewan Komisaris
Fungsi pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan Perusahaan yang efisien dan efektif sesuai dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Latar belakang anggota Dewan Komisaris dengan kompetensi dan kualifikasi (latar belakang teknis dan regulator) yang sesuai dengan bidang usaha Perusahaan cukup memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, antara lain melalui pemberian masukan kepada Manajemen Perusahaan
4. Aspek Direksi
Direksi Perusahaan sebagai fungsi pelaksana/pengurus bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Komitmen Direksi beserta jajaran Manajemen terhadap penerapan GCG dirasakan cukup baik, dengan menciptakan budaya dan etika Perusahaan, struktur, proses dan kinerja Perusahaan.
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Perusahaan senantiasa berupaya mewujudkan kemudahan akses atas informasi dan data perusahaan dengan menyediakan media-media informasi seperti intranet dan *website*.

and Services Procurement Guideline, Partnership and Environmental Guidance Program Policy and other supporting policies. As manifestation of the GCG implementation commitment, the Company always implements transparency principle in information disclosure, accountability on law enforcement, accountability of responsibility division, professional independency without conflict of interest, and fairness in fulfillment of stakeholders' rights in the Company as well as management of Whistleblowing System and State Apparatus Wealth Report submission.

2. Shareholders and GMS/Capital Owners Aspect
The Company attempts to consistently ensures rights of the Capital Owner/Shareholders are fulfilled as regulated in the Company's Articles of Association and Corporate Policy. Fulfillment of the Capital Owner/Shareholders's rights are done namely through provision of up-to-date information on the Company's condition, decision-making in the GMS and Board of Commissioners as well as the supporting organs (the Committees and Secretary) to perform supervisory function over the business and operational activities.
3. Board of Commissioners Aspect
Supervisory function is done with purpose to ensure more efficient and effective management of the Company according to interests of all stakeholders. Background of the Board of Commissioners members with competency and qualification (technical and regulatory background) based on the Company's business line are sufficient to provide added-value for the Company, namely through recommendation submission to the Company's Management.
4. Board of Directors Aspect
Board of Directors holds the executive/manager function who is in charge in daily activities to achieve the Company's vision and mission. Commitment of the Board of Directors altogether with the Management on the GCG implementation is seen appropriate by creating corporate culture and ethics, structure, process and performance.
5. Information Disclosure and Transparency Aspect
The Company attempts to establish corporate information and data access convenience by providing information media such as intranet and *website*.

6. Aspek lainnya

Perusahaan memastikan aspek-aspek penyusunan Laporan Tahunan yang sesuai dengan ketentuan.

6. Other Aspect

The Company ensures the Annual Report preparation aspects based on regulation.

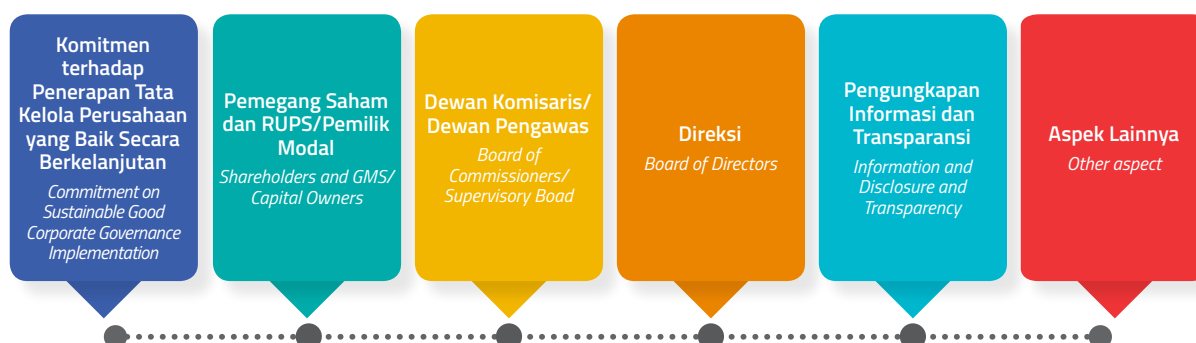
Pengukuran dilakukan melalui penelusuran kelengkapan dokumen pedoman/peraturan/kebijakan terkait Mekanisme Tata Kelola seperti yang telah dijelaskan di atas, serta wawancara kepada pihak-pihak terkait di internal Perusahaan.

Measurement is carried out through examining the completeness of guideline/regulatory/policy documents related to the Governance Process as described above, as well as interviews with related parties within the Company.

6 Aspek Assessment GCG

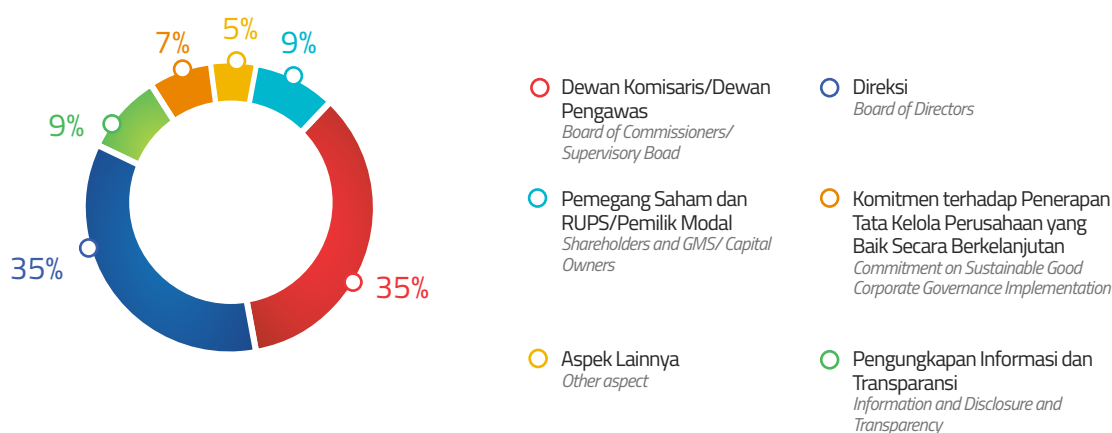
6 Aspects of GCG Assessment

(Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)
 (Decree of the Secretary of Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012)



Komposisi Bobot Penilaian per Aspek

Composition of Assessment Weight per Aspect



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018: Hasil, Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya di Tahun 2019

Sesuai dengan ketentuan dalam PER-01/MBU/2011 dimana penilaian terhadap penerapan GCG di Perusahaan agar dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun, dan dilakukan evaluasi untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di antara tahun dilakukannya penilaian sebagaimana tersebut di atas, maka di tahun 2018, telah dilakukan kegiatan *Assessment* terhadap penerapan GCG Perusahaan.

GCG Assessment for Fiscal Year 2018: Results, Recommendations and Follow-Up in 2019

In accordance with the provisions in PER-01/MBU/2011, an assessment of GCG implementation in the Company should be carried out regularly every 2 (two) years, and an evaluation is carried out to describe the follow-up of the implementation of GCG between the years of the assessment as mentioned above, then in 2018, an Assessment has been carried out on the implementation of the Company's GCG for the fiscal year 2018.

Jenis Penilaian Assessment Type	: Self Assessment (Evaluasi) Self Assessment (Evaluation)
Assessor/Penilai Assessor	: Tim Self Assessment Penerapan GCG (internal) sesuai Surat Keputusan Direksi No. M-1/PPA/DU/0119 tanggal 7 Januari 2019 GCG Self Assessment Team (internal) in accordance with Board of Directors Decree No. M-1/PPA/DU/0119 dated January 7, 2019
Periode Pengukuran Measurement Period	: 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 January 1, 2018 to December 31, 2018
Waktu Pengukuran Measurement Time	: Januari s.d. Februari 2019 January to February 2019
Waktu Terbit Laporan Time of Report Publishing	: 22 Februari 2019 February 22, 2019

Berdasarkan *Self Assessment* penerapan GCG tahun buku 2018, nilai yang diperoleh Perusahaan adalah sebesar 88,13 dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100 yang setara dengan 88,13% atau mencapai kualifikasi "Sangat Baik". Perolehan skor tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil *Assessment* untuk penerapan GCG tahun 2017 sebesar 88,04%. Penjabaran pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut.

Based on GCG Self Assessment for the fiscal year 2018, the score obtained by the Company is 88.13 out of the maximum total score of 100 which is equivalent to 88.13% or achieving "Very Good" qualification. The score has increased compared to the results of GCG Assessment in 2017 of 88.04%. The details of this score achievement are as follows.

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2018 Achievement in the Fiscal Year 2018		
		Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement (%)	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG Qualification of GCG Implementation Quality
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation	7,00	6,550	93,57	"Sangat Baik" "Very Good"
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,481	94,23	"Sangat Baik" "Very Good"

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2018 Achievement in the Fiscal Year 2018		
		Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement (%)	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG Qualification of GCG Implementation Quality
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	32,291	92,26	"Sangat Baik" "Very Good"
Direksi Board of Directors	35,00	31,869	91,05	"Sangat Baik" "Very Good"
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	6,441	71,57	"Cukup Baik" "Sufficient"
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	2,500	50,00	-
SKOR KESELURUHAN TOTAL SCORE	100,00	88,13	88,13	"SANGAT BAIK" "VERY GOOD"

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
 Annotation: 0-50 : Very Poor | 50-60 : Poor | 60-75 : Sufficient | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

Dari hasil *Self Assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2018, terdapat rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan atau *Area of Improvement* (Aol) sebagai rencana aksi perbaikan di tahun 2019.

From the Self Assessment results of GCG implementation for the fiscal year 2018, there are recommendations for Area of Improvement (Aol) as action plan for improvement in 2019.

Rekomendasi *Self Assessment* GCG Tahun 2018 dan Tindak Lanjutnya GCG Self Assessment Recommendations for 2018 and Follow Up

No.	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Recommendations of GCG Assessment of Fiscal Year 2018	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2019 Follow-up until the End of 2019		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow-Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
I DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BOARD OF COMMISSIONERS/SUPERVISORY BOARD				
1	Meminta kepada manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; dan/atau menyusun <i>internal control report</i> untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pemberian arahan Dewan Komisaris untuk penguatan sistem pengendalian intern perusahaan Request the management to evaluate the effectiveness of internal control at the entity level; and/or compile an internal control report to be used as a reference in giving direction to the Board of Commissioners for the Company's internal control system strengthening	v	2019	Dalam rapat dengan SPI sudah disampaikan dan akan dimintakan kembali secara tertulis pada kesempatan pertama yang hasil evaluasi akan menjadi dasar rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka penguatan SPI. Has been conveyed in a meeting with SPI, and will be requested once more in writing at the first opportunity, in which the evaluation results will be the basis of recommendation to Board of Commissioners in the context of SPI strengthening.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPARekomendasi *Self Assessment* GCG Tahun 2018 dan Tindak Lanjutnya
GCG Self Assessment Recommendations for 2018 and Follow Up

No.	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Recommendations of GCG Assessment of Fiscal Year 2018	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2019 Follow-up until the End of 2019		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow-Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
2	Menyusun kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap: kebijakan manajemen risiko perusahaan; sistem teknologi informasi; pengembangan karir; akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku umum; pengadaan barang dan jasa; mutu dan pelayanan; serta kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga Prepare the Board of Commissioners' policies regarding supervisory and advisory on: company's risk management policies; information technology system; career development; accounting and preparation of financial statements in accordance with generally accepted standards; procurement of goods and services; quality and service; and compliance of Board of Directors in carrying out applicable laws and agreements with third parties	v	2020	Sedang dilakukan telaahan dan evaluasi serta <i>benchmarking</i> terkait rancangan kebijakan Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pemberian nasihat. Studies, evaluations and benchmarking related to the draft of Board of Commissioners' policy in supervisory and advisory are ongoing.
3	Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaah hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal Conduct an assessment of the effectiveness of external audit implementation through: (1) monitoring the suitability of audit progress completion with the work plan; (2) review the suitability of audit implementation with the standards of public accountant profession; and (3) review the external audit results and the quality of external audit recommendations	v	2019	Pemantauan atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal antara lain rapat progres audit dengan KAP termasuk <i>closing meeting</i> serta melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil audit. Penilaian terhadap hasil kerja KAP dilakukan bersama manajemen, dan melaporkan hasilnya kepada RUPS. Monitoring the effectiveness of external audit including progress audit meetings with KAP including closing meeting, as well as evaluating and examining audit results. The evaluation on work results of KAP is carried out with the management, and the result is reported to the GMS.
4	Menyusun kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan entitas anak/perusahaan patungan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Prepare the Board of Commissioners' policies regarding supervisory and advisory on management policies of subsidiaries/joint ventures and the implementation of these policies.	v	2020	Sedang dilakukan telaahan dan evaluasi serta <i>benchmarking</i> terkait rancangan kebijakan Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pemberian nasihat. Studies, evaluations and benchmarking related to the draft of Board of Commissioners' policy in supervisory and advisory are ongoing.
5	Menetapkan secara tertulis atas pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris entitas anak/perusahaan patungan tidak melebihi 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris entitas anak/perusahaan patungan Establish in writing the appointment of Board of Directors and Board of Commissioners of a subsidiary/joint venture company, not exceeding 15 calendar days from the date of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners of a subsidiary/joint venture company	v	2019	Sudah ditindaklanjuti dalam persetujuan surat terkait sesuai usulan Direksi yang masuk pada bulan Oktober 2019. Has been followed up in the approval of relevant letters according to the Board of Directors' proposal submitted in October 2019.

Rekomendasi *Self Assessment* GCG Tahun 2018 dan Tindak Lanjutnya
GCG Self Assessment Recommendations for 2018 and Follow Up

No.	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Recommendations of GCG Assessment of Fiscal Year 2018	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2019 Follow-up until the End of 2019		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow-Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
6	Melakukan penilaian kinerja Direksi juga mendasarkan kepada telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing Assessing the performance of Board of Directors based on a review of the criteria, targets and key performance indicators covered by the Board of Directors' Management Contract individually with the realization of each achievement	v	2020-2021	Kontrak Manajemen Direksi yang disahkan Pemegang Saham belum mencakup indikator kinerja utama secara individu. Secara internal akan dikaji metode pengukuran yang tepat terkait hal ini untuk diterapkan. Board of Directors' Management Contracts that have been authorized by Shareholders do not yet include individual key performance indicators. Internally, an appropriate measurement method will be reviewed in this regard to be applied.
7	Menindaklanjuti <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment/review</i> GCG yang menjadi kewenangannya Following up the area of improvement on the results of GCG assessment/review within its authority	v	2019	Terdapat tindaklanjut atas <i>area of improvement</i> Dewan Komisaris There is a follow up on the area of improvement of Board of Commissioners
8	Merevisi Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris, dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai: etika rapat; tata penyusunan risalah rapat; pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; dan pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi Revise the Guidelines/rules of conduct of Board of Commissioners' Meeting, adding among others the provisions regarding: meeting ethics; procedures for preparing minutes of meetings; implementation of evaluation of follow-up to the results of previous meeting; and discussion/analysis of Board of Directors proposal and direction/decision of the GMS related to the Board of Directors proposal	v	2020	Sedang dilakukan telaahan dan evaluasi serta <i>benchmarking</i> terkait rancangan kebijakan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan rapat-rapat. Studies, evaluation and benchmarking related to the draft of Board of Commissioners' policy in the implementation of meetings are ongoing.
9	Mencantumkan pula: (1) pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada); (2) jalannya rapat (dinamika rapat); (3) keputusan rapat dalam dokumentasi hasil rapat Dewan Komisaris Also include: (1) dissenting comments from what was decided at the Board of Commissioners' Meeting (if any); (2) the meeting dynamics; (3) meeting decisions in the documentation of the results of Board of Commissioners meeting	v	2019	Sepanjang 2018, tidak terdapat <i>dissenting comment</i> , dinamika rapat disajikan dalam transkrip rapat, dan dalam rapat Dewan Komisaris tersebut tidak terdapat keputusan, namun saran/nasihat yang harus diperhatikan Direksi. Ringkasan kesimpulan Rapat akan disampaikan pada bagian akhir Risalah Rapat. Throughout 2018, there were no dissenting comments, the meeting dynamics were presented in the meeting transcript, and in the Board of Commissioners meeting there were no decisions, but there were suggestions/advice that must be considered by Board of Directors. A summary of Meeting's conclusions will be presented at the end of the Meeting Minutes.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

Rekomendasi *Self Assessment* GCG Tahun 2018 dan Tindak Lanjutnya
GCG Self Assessment Recommendations for 2018 and Follow Up

No.	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2018 Recommendations of GCG Assessment of Fiscal Year 2018	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2019 Follow-up until the End of 2019		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow-Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
10	Menunjuk Anggota Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit Appoint Independent Commissioner as the Audit Committee Chairman	v	2019-2020	Ketua Komite Audit dipertimbangkan berasal dari Komisaris yang memiliki keahlian lebih di bidang akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Ketua Komite Audit saat ini sesuai ketentuan dianggap sebagai Komisaris Independen, dan akan diusulkan penetapannya kepada Pemegang Saham. The Audit Committee Chairman is considered to come from Commissioners who have more expertise in accounting and internal control of the company. The current Audit Committee Chairman is in accordance with the provisions considered as an Independent Commissioner, and the appointment will be proposed to the Shareholders.
11	Meminta kepada Komite Dewan Komisaris untuk memasukkan kegiatan <i>self assessment</i> kinerja Komite Audit dan Komite Lainnya dalam membuat program kerja tahunan yang disetujui/ditetapkan oleh Dewan Komisaris Requesting the Board of Commissioners' Committee to include the self-assessment activity of performance of Audit Committee and Other Committees in making an annual work program approved/determined by the Board of Commissioners	v	2020	Kegiatan <i>self assessment</i> kinerja Komite Dewan Komisaris untuk tahun 2019 dilakukan setelah berakhirnya tahun. Self-assessment of the performance of Board of Commissioners' Committee for 2019 will be carried out after the end of the year.
12	Meminta kepada Komite Dewan Komisaris agar dalam laporan triwulanan dan tahunannya juga memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunannya, serta rekomendasi dari hasil kegiatannya Requesting the Board of Commissioners' Committee that its quarterly and annual reports also include a comparison of the realization of activities with its annual work program, as well as recommendations on the results of activities	v	2019	Rekomendasi hasil kegiatan telah disampaikan dalam bagian saran/nasihat kepada Direksi, dan telah disampaikan kepada Komite untuk secara berkala melaporkan realisasi kegiatan. Recommendations on the results of activities have been submitted in the advice/suggestion section to the Board of Directors, and have been submitted to the Committee to periodically report on the realization of activities.

v = telah ditindaklanjuti | x = dalam proses tindak lanjut | v = has followed-up | x = in the follow-up process

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019

Pelaksanaan *Assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2019, dilakukan dengan *Assessment* oleh pihak independen, PT Adikarya Gemilang Solusindo. Hasil *Assessment* untuk tahun buku 2019 menunjukkan hasil dengan predikat "SANGAT BAIK" dengan capaian skor sebesar 88,53.

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019

GCG assessment for the fiscal year 2019 was carried out with an assessment by an independent party, PT Adikarya Gemilang Solusindo. The 2019 assessment showed the results of "VERY GOOD" predicate and an achievement score of 88.53.

Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2019
Assessment of the GCG Implementation Fiscal Year 2019

Jenis Penilaian Assessment Type	:	<i>Assessment</i> (Penilaian) Assessment (Assessment)
<i>Assessor</i> /Penilai Assessor	:	PT Adikarya Gemilang Solusindo
Periode Penerapan Measurement Period	:	1 Januari - 31 Desember 2019 January 1 – December 31, 2019
Tahun Buku Fiscal Year	:	2019
Waktu Pengukuran Measurement Time	:	Desember 2019 – Januari 2020 December 2019 – January 2019
Waktu Terbit Laporan Time of Report Publishing	:	4 Februari 2020 February 4, 2020

Rincian hasil *Assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

Details of GCG assessment results for the fiscal year 2019 are as follows:

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2019 Achievement in the Fiscal Year 2019		
		Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement (%)	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG Qualification of GCG Implementation Quality
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation	7,00	6,63	94,66%	"Sangat Baik" "Very Good"
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,68	96,39%	"Sangat Baik" "Very Good"
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	32,74	93,53%	"Sangat Baik" "Very Good"
Direksi Board of Directors	35,00	32,41	92,59%	"Sangat Baik" "Very Good"
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	7,46	82,91%	"Baik" "Good"
Sub Jumlah Sub Total		87,90		

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2019 Achievement in the Fiscal Year 2019		
		Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement (%)	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG Qualification of GCG Implementation Quality
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	0,63	12,50%	-
SKOR KESELURUHAN TOTAL SCORE	100,00	88,53	88,53%	"SANGAT BAIK" "VERY GOOD"

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
 Annotation: 0-50 : Very Poor | 50-60 : Poor | 60-75 : Sufficient | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

Dari hasil *Assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2019, terdapat 10 rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan atau *Area of Improvement* (Aol) untuk dibuat rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait guna meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices* yang terus berkembang, sebagai berikut.

From the results of GCG assessment for the fiscal year 2019, there are 10 recommendations for areas that need improvement or Area of Improvement (Aol), to be further followed-up by making corrective/improvement action plan, which should be based on the commitment of all relevant parties to improve the implementation of GCG practices that refer on best practices that continue to develop, as follows.

No	Hasil Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2019 Recommendations of GCG Assessment for the Fiscal Year 2018	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya Included in the recommendations of previous GCG assessment	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya) Follow-up Plan (If It is a Recommendation of Previous GCG Assessment)
I DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BOARD OF COMMISSIONERS/SUPERVISORY BOARD			
1	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas namun substansi kebijakan/pedoman Dewan Komisaris belum sepenuhnya memuat: bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidental, standar waktu penyampaian dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi. Board of Commissioners/Supervisory Board has established a decision-making mechanism for Board of Commissioners/Supervisory Board, but the substance of the policies/guidelines of Board of Commissioners does not yet fully contain: the form of information submitted either periodically or incidentally, the standard time for its delivery and the delivery mechanism for such information by Board of Directors.	x	Segera dibuat kebijakan terkait rekomendasi. Policy regarding the recommendation will be prepared immediately.
2	Saluran pelaporan WBS atau pengaduan dari <i>Stakeholders</i> (pelanggan, pemasok, kreditor, dan karyawan) sebaiknya disampaikan kepada organ di bawah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. WBS reporting channel or complaints from stakeholders (customers, suppliers, creditors, and employees) should be submitted to organs under Board of Commissioners/Supervisory Board.	x	Segera dikoordinasikan dengan manajemen terkait rekomendasi WBS kepada Dewan Komisaris Will be coordinated immediately with related management regarding WBS recommendations to Board of Commissioners.

No	Hasil Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2019 Recommendations of GCG Assessment for the Fiscal Year 2018	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya Included in the recommendations of previous GCG assessment	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya) Follow-up Plan (If It Is a Recommendation of Previous GCG Assessment)
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum menyampaikan arahan secara rinci tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi. Board of Commissioners/Supervisory Board has not submitted detailed directives on increasing the effectiveness of internal control system to Board of Directors.	x	Akan disusun surat evaluasi terperinci dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern kepada Direksi A detailed evaluation letter will be prepared in the context of strengthening internal control system to Board of Directors.
4	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum menyampaikan arahan secara rinci tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK). Board of Commissioners/Supervisory Board has not submitted detailed directives on accounting policies and preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK).	x	Akan disusun surat evaluasi terperinci dalam rangka penguatan kebijakan akuntansi dan pelaporan kepada Direksi A detailed evaluation letter will be prepared in the context of strengthening accounting policies and reporting to Board of Directors.
5	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. Board of Commissioners/Supervisory Board has not yet assessed Board of Directors' performance based on the review of criteria, targets and key performance indicators included in the Board of Directors' Management Contract individually with the realization of each achievement.	x	Akan disusun bersama kesepakatan KPI individual Direksi dengan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Will be arranged with individual KPI Directors' agreement with Board of Commissioners and/or Shareholders
6	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas belum mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Board of Commissioners/Supervisory Board has not evaluated the performance achievements of each member of Board of Commissioners and is stated in the minutes of Board of Commissioners/Supervisory Board Meeting.	x	Akan disusun bersama kesepakatan KPI individual Dewan Komisaris secara internal atau dengan Pemegang Saham Will be arranged with individual KPI Directors' agreement with Board of Commissioners and/or Shareholders.
7	Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris, belum sepenuhnya mengatur: (1) Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, (2) Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi. Board of Commissioners Meeting guidelines/rules have not yet fully regulated: (1) Evaluation of the follow-up to previous meeting results, (2) Discussion/review of Board of Directors' proposals and directives/decisions of the GMS related to Board of Directors' proposals.	v	Sedang dilakukan telaahan dan evaluasi serta <i>benchmarking</i> terkait rancangan kebijakan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan rapat-rapat. Studies, evaluations and benchmarking related to Board of Commissioners' draft policies in the conduct of meetings are in process.
8	Telah terdapat surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris namun belum terdapat penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Rapat. There has been a power of attorney prepared by a member of Board of Commissioners who was unable to attend Board of Commissioners' meeting but there has been no explanation of the absence at the meeting, which was set forth in the Minutes of Meeting.	x	

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

No	Hasil Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2019 Recommendations of GCG Assessment for the Fiscal Year 2018	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya Included in the recommendations of previous GCG assessment	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Sebelumnya) Follow-up Plan (If It Is a Recommendation of Previous GCG Assessment)
9	Sekretaris Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya, namun bahan-bahan rapat belum disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat, dalam risalah rapat Dewan Komisaris belum mencantumkan pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada), setiap anggota Dewan Komisaris belum menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut, validasi risalah rapat belum sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan dalam hal ini Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Dewan Komisaris maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat selesai dilaksanakan. Secretary of Board of Commissioners has held meeting of Board of Commissioners and meeting between Board of Commissioners and Shareholders, Directors and other related parties, but meeting materials have not been provided and delivered to the meeting participants no later than 3 (three) days before the meeting, the minutes of Board of Commissioners' meeting have not yet stated dissenting comments from what was decided at Board of Commissioners' Meeting (if any), each member of Board of Commissioners has not yet received a copy of the minutes of Board of Commissioners' Meeting regardless of whether the person was present or not present at the Meeting, the validation of minutes of meeting is not in accordance with the rules set forth, in this case Minutes of Meeting must be completed and circulated throughout Board of Commissioners at the latest 7 (seven) days after the Meeting is finished.	v	Sepanjang 2019, tidak terdapat <i>dissenting comment</i> dalam rapat Dewan Komisaris. Bahan rapat sudah dimintakan jauh-jauh hari kepada manajemen. Risalah rapat tersedia setiap saat untuk dibaca anggota Dewan Komisaris pada <i>cloud shared</i> folder. Proses penyelesaian risalah rapat akan diupayakan maksimal 7 hari kerja. Throughout 2019, there were no dissenting comments at Board of Commissioners' meeting. Meeting materials have been requested in advance to the management. Minutes of meetings are available at any time to be read by members of Board of Commissioners on the shared cloud folder. The process of resolving the minutes of meetings will be sought a maximum of 7 working days.
10	Komite Dewan Komisaris telah memiliki piagam/<i>charter</i> dan program kerja tahunan. Program kerja tahunan Komite Audit dan Komite lainnya belum memuat tentang <i>self assessment</i> kinerja Komite Audit dan Komite lainnya. Board of Commissioners' Committee already has the charter and annual work program. The annual work program of Audit Committee and other Committees does not yet contain a self-assessment of the performance of Audit Committee and other Committees.	v	Kegiatan <i>self assessment</i> kinerja Komite Dewan Komisaris untuk tahun 2019 dilakukan setelah berakhirnya tahun dan disusun revisi program kerja komite Dewan Komisaris. Self-assessment of the performance of Committees of Board of Commissioners for 2019 was carried out after the end of the year and revised work program for Board of Commissioners was prepared.

v = Terdapat dalam rekomendasi *assessment* penerapan GCG sebelumnya | x = Tidak terdapat dalam rekomendasi *assessment* penerapan GCG sebelumnya
v = Included in the recommendations of previous GCG assessment | x = Not included in the recommendations of previous GCG assessment

Perkembangan Assessment Penerapan GCG

Sejak tahun 2013, Perusahaan telah melakukan asesmen GCG untuk mengukur keberhasilan implementasi GCG dalam kinerja Perusahaan, di antaranya adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi, penyelesaian pelaksanaan tugas Komite-komite dan unit kerja yang mempraktikkan fungsi Kepatuhan terhadap tata kelola, pengawasan internal, pelaksanaan manajemen risiko, pelaksanaan keterbukaan pada kondisi finansial maupun non-finansial perusahaan, dan lain-lain.

Development of GCG Assessment

Since 2013, the Company has conducted GCG assessment to measure the success of GCG implementation in Company performance, including the level of success in carrying out the duties of Board of Commissioners and Board of Directors, the completion of duties of Committees and work units that practice the Compliance function on governance, the internal supervision, the implementation of risk management, the implementation of disclosure on the company's financial and non-financial conditions, and others.

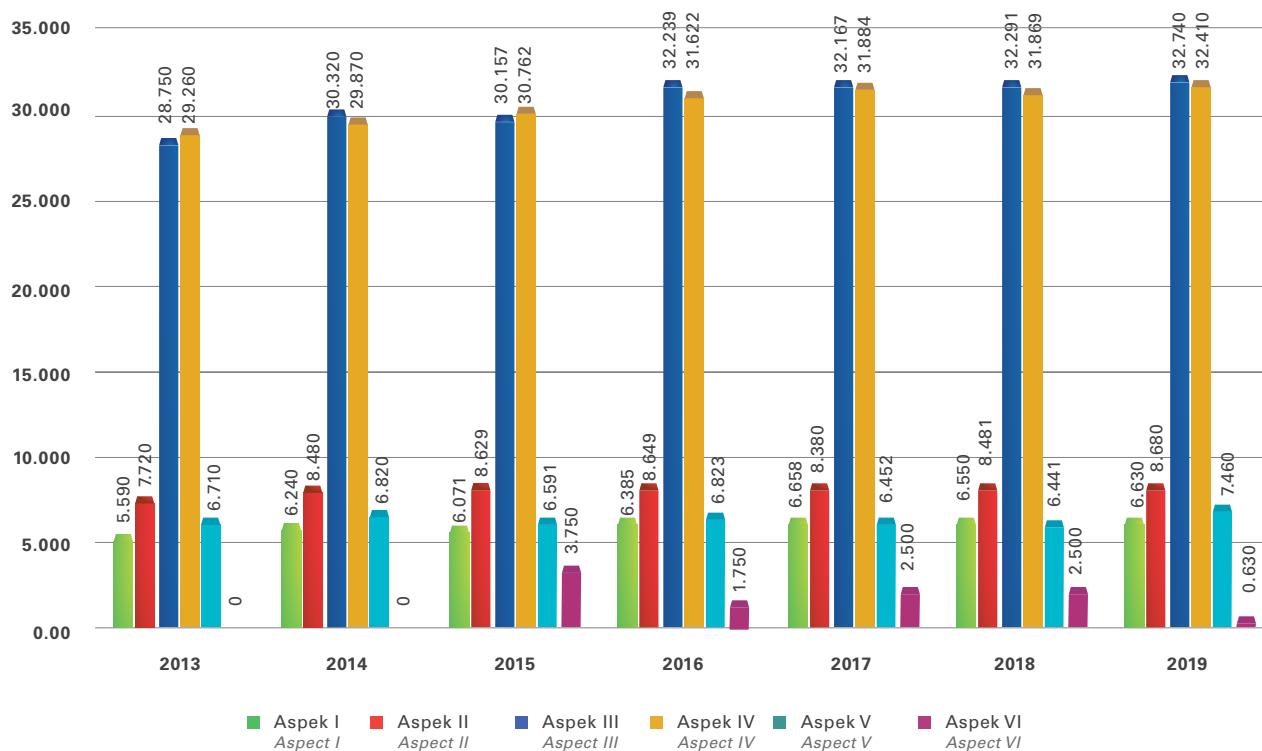
Pencapaian Hasil Assessment Penerapan GCG
 Achievement of GCG Assessment Results

Tahun Year	Jenis Penilaian Type of Assessment	Penilai Assessor	Skor Assessment GCG Skor Assessment GCG							Kategori Category
			Aspek I Aspect I	Aspek II Aspect II	Aspek III Aspect III	Aspek IV Aspect IV	Aspek V Aspect V	Aspek VI Aspect VI	Skor Akhir Final Score	
2019	Assessment	PT Adikarya Gemilang Solusindo (Independen)	6,63	8,68	32,74	32,41	7,46	0,63	88,53	"Sangat Baik" "Very Good"
2018	Self Assessment	Tim Internal Internal Team	6,550	8,481	32,291	31,869	6,441	2,500	88,13	"Sangat Baik" "Very Good"
2017	Assessment	PT Icon Global Solusi (Independen)	6,6577	8,3798	32,1671	31,8844	6,4522	2,5000	88,04	"Sangat Baik" "Very Good"
2016	Self Assessment	Tim Internal Internal Team	6,385	8,649	32,239	31,622	6,823	1,750	87,47	"Sangat Baik" "Very Good"
2015	Assessment	PT Sinergi Daya Prima (Independen)	6,071	8,629	30,157	30,762	6,591	3,750	85,96	"Sangat Baik" "Very Good"
2014	Self Assessment	Tim Internal Internal Team	6,24	8,48	30,32	29,87	6,82	-	81,73	"Baik" "Good"
2013	Assessment	PT Kharisma Insani Manajemen (Independen)	5,59	7,72	28,75	29,26	6,71	-	78,03	"Baik" "Good"

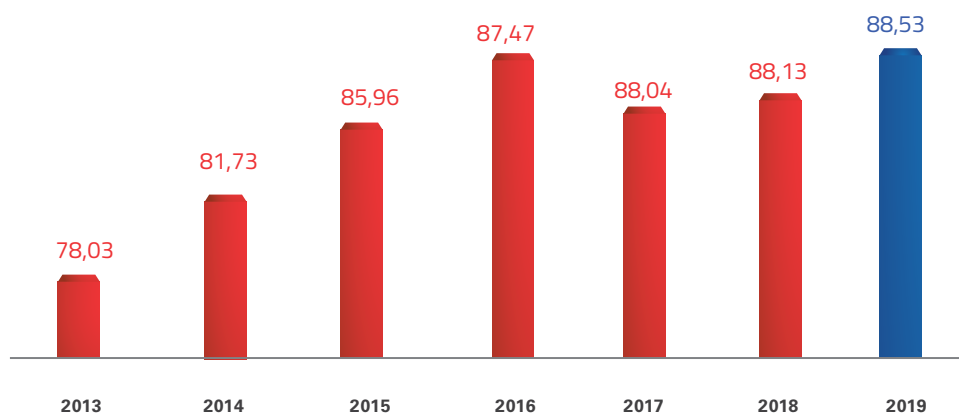
Keterangan: Aspek I: Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan | Aspek II: Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
 Aspek III: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas | Aspek IV: Direksi | Aspek V: Pengungkapan Informasi dan Transparansi | Aspek VI: Aspek Lainnya
 Remarks: Aspect I: Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation | Aspect II: Shareholders and GMS/Capital Owners | Aspect III: Board of Commissioners/Supervisory Board | Aspect IV: Board of Directors | Aspect V: Information Disclosure and Transparency | Aspect VI: Other Aspect

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

Pencapaian Hasil *Assessment* Penerapan GCG per Aspek 2013- 2019
Achievement of GCG Assessment Results per Aspect 2013-2019



Pencapaian Hasil *Assessment* Penerapan GCG Skor Akhir 2013- 2019
Achievement of GCG Assessment Results – Final Score 2013-2019



TATA KELOLA HUBUNGAN PPA DAN ENTITAS ANAK (GROUP GOVERNANCE)

Seluruh kebijakan GCG di lingkup PPA Grup juga berlaku untuk Entitas Anak, dimana pengukuran implementasi GCG menjadi salah satu indikator kinerja Entitas Anak. Tujuan Perusahaan membentuk Entitas Anak adalah untuk menyinergikan kegiatan induk dan seluruh Entitas Anak agar mendapatkan lompatan kinerja yang lebih baik. Dengan demikian dalam hubungan kerja pengelolaan antara Perusahaan dan Entitas Anak menyalurkan Anggaran Dasar, RJPP dan RKAP.

Meskipun demikian, tiap Entitas Anak dalam PPA Grup adalah entitas hukum terpisah dan mandiri dalam menjalankan kebijakan bisnis berdasarkan Anggaran Dasar, RJPP, dan RKAP masing-masing. Karena merupakan badan usaha yang mandiri, maka kewenangan dan kebijakan pengurusan tiap Entitas Anak berada pada Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Entitas Anak. Perusahaan dapat memberikan arahan kepada Entitas Anak melalui pintu kepemilikan saham yang dilakukan melalui mekanisme RUPS, sehingga tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG.

Untuk memastikan bahwa tata kelola hubungan Perusahaan dan Entitas Anak terjadi dalam kerangka GCG, maka Perusahaan mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya:

1. Surat Keputusan Direksi No. SK-61/PPA/0916 tanggal 22 September 2016 tentang Kebijakan Penanganan Entitas Anak di mana di dalamnya mengatur mengenai pemberian persetujuan Perusahaan atas kegiatan Entitas Anak, baik yang terkait penyusunan dan persetujuan RKAP maupun pengkajian aksi korporasi Entitas Anak, kemudian juga mengatur mengenai pengangkatan dan penempatan wakil Perusahaan pada Entitas Anak, serta mekanisme pengawasan Entitas Anak, dimana Entitas Anak diwajibkan memberikan laporan baik bulanan, triwulanan, semester maupun laporan tahunan. Dengan demikian kontrol atas pengelolaan Entitas Anak dapat berjalan efektif.

PARENT AND SUBSIDIARY GOVERNANCE (GROUP GOVERNANCE)

All of the Company's GCG policies are also applied for the subsidiaries, where assessment on GCG implementation also becomes one of performance indicators for subsidiaries. Purpose of the Company to establish Subsidiaries is to synergize activity of the parent company and all Subsidiaries to pursue a greater performance leap. Therefore, in the Company and Subsidiaries management working relation also aligns the Articles of Association, Company's long term plan and Work plan and budget.

However, every Subsidiary in PPA Group is a separated and autonomous legal entity in implementing business policy based on each Articles of Association, Company's long term plan and Work plan and budget. As an autonomous enterprise, management authority and policy of each Subsidiary are held by Board of Directors and Board of Commissioners in each Subsidiary. The Company is eligible to provide direction to the Subsidiaries through shares ownership channel that is carried out in GMS mechanism, therefore, will always comply with provisions of the law and GCG principles.

To ensure that the Company and Subsidiaries management governance takes place in GCG framework, the Company has issued several policies, as follows:

1. Board of Directors Decree No. 61/PPA/0916 dated September 22, 2016 concerning Subsidiaries Management Policy that also includes mechanism of the Company's approval on the subsidiaries' activity, both related to Work plan and budget preparation and approval, as well as reviewing corporate action of the Subsidiaries, and also regulates appointment and assignment of the Company's representatives in the subsidiaries, and Subsidiaries monitoring mechanism, where the Subsidiaries are obliged to submit monthly, quarter, semester and annual reports. Therefore, control on the Subsidiaries management can be implemented effectively.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PPA
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN PPA

2. Surat Keputusan Direksi SK-69/PPA/1118 tanggal 9 November 2018 tentang Kebijakan Penunjukan Pengurus Entitas Anak dan Cucu Perusahaan. Dalam keputusan ini, Perusahaan mengatur ketentuan penunjukan pengurus Entitas Anak baik langsung maupun tidak langsung, sehingga terdapat kepastian dan ketetapan dalam mekanisme penunjukan pengurus dengan landasan *merit system*.

2. Board of Directors Decree No. 69/PPA/1118 dated November 9, 2018 concerning Management Appointment Policy in Subsidiaries and Sub-Subsidiaries. In this decree, the Company regulates provisions of management appointment in Subsidiaries and Sub-Subsidiaries, to generate assurance and determination in the management appointment mechanism based on merit system.

Berlandaskan regulasi internal tersebut, Perusahaan telah menjalankan tata kelola hubungan antara Perusahaan dan Entitas Anak dengan landasan prinsip-prinsip GCG, baik dalam mekanisme pengawasan jalannya Entitas Anak, penempatan Direksi dan Komisaris Entitas Anak serta mekanisme penempatan pejabat lainnya pada Entitas Anak.

Based on the internal regulation, the Company has implemented governance mechanism between the Company and Subsidiaries based on GCG principles, both in the monitoring mechanism over the Subsidiaries operations, Director and Commissioner assignment in Subsidiaries as well as other Executives assignment mechanism in the Subsidiaries.

KEPATUHAN TERHADAP PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BUMN

Pelaksanaan seluruh aspek GCG di lingkup Perusahaan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, serta *best practices* yang berlaku di dunia usaha. Regulator, dalam hal ini Negara Republik Indonesia serta regulator industri telah memberikan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi yang wajar sebagai hal yang dapat menjadi fondasi bagi pelaku usaha.

Perusahaan tidak memiliki status sebagai emiten maupun perusahaan terbuka, dengan demikian Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan *roadmap* dan pedoman GCG yang diberlakukan di pasar modal dan pasar keuangan. Namun demikian, sebagai BUMN, Perusahaan meletakkan penerapan seluruh aspek GCG dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011.

COMPLIANCE WITH SOEs CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

The implementation of all aspects of GCG within the scope of the Company is guided by Minister of Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 on Amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011, as well as best practices that apply in the business world. Regulators, in this case the Republic of Indonesia and industry regulators have emphasized transparency, accountability, and delivery of reasonable information as matters that can be a foundation for business people.

The Company does not have the status of an issuer or publicly listed company, therefore it has no obligation to implement the GCG roadmap and guidelines that are enforced on capital market and financial market. However, as an SOEs, the Company applies all aspects of GCG based on Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 on Amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai organ Perusahaan merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu organ utama Perusahaan, RUPS diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Pemegang Saham Perusahaan dan Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemegang Saham Perusahaan terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham Publik. Pemegang Saham Pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham Pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan.

Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019, Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki seluruh saham Perusahaan atau sebesar 100,00%. Negara Republik Indonesia sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perusahaan.

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

General Meeting of Shareholders (GMS) is a Corporate Structure with authority that is not granted to Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association. GMS as a Corporate Structure is a forum for Shareholders to make important decisions relating to capital invested in the Company, taking into account the provisions of the Articles of Association as well as laws and regulations.

As one of the Company's main structure, and according to Law no. 19 year 2003 regarding State-Owned Enterprises, Law no. 40 year 2007 regarding Limited Liability Companies, and Regulation of the Minister of SOEs no: PER-01/ MBU/2011 regarding Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise, as amended with Regulation of the Minister of SOEs no: PER-09/MBU/2012 regarding Amendment to Regulation of the Minister of SOEs no: PER-01/ MBU/2011 regarding Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Shareholders and Information on Major/ Controlling Shareholders

Shareholders are individuals or legal entities that legally own shares of the Company. Shareholders as capital owners have the rights and responsibilities in accordance with statutory regulations and the Company's Articles of Association. The Company's Shareholders consist of Major/Controlling Shareholders and Public Shareholders. The Controlling Shareholder must at all times meet the requirements of fit and proper. The fit and proper test can be carried out at any time if the Controlling Shareholder is reasonably suspected to no longer fulfill the fit and proper requirements based on the results of analysis, audit, and or complaints.

As of December 31, 2018 and December 31, 2019, the Company's Major/Controlling Shareholder is the Republic of Indonesia which owned the entire shares of the Company or amounted to 100.00%. The Republic of Indonesia is at the same time the Company's ultimate owner entity.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTUREPemegang Saham PPA (Hingga Entitas Pemilik Akhir) per 31 Desember 2019
PPA Shareholders (Up to the Ultimate Owner Entity) as of December 31, 2019

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

In accordance with Government Regulation No. 41 of 2003 concerning the Delegation of Position, Duties and Authority of the Minister of Finance to Limited Liability Company (Persero), Public Company (PERUM) and Service Company (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises, and Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises and the State Gazette of the Republic of Indonesia; The Proxy of Shareholders of the Company is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs).

Hak Pemegang Saham

Dalam paradigma penerapan GCG, kapasitas Pemegang Saham tidak hanya sebatas pada aspek permodalan semata, Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibekali beberapa hak sebagai wujud timbal-balik kepentingan. Ruang lingkup hak Pemegang Saham terdiri atas penerimaan manfaat permodalan, pengawasan atas jalannya kegiatan operasional yang dilakukan oleh Direksi serta hak-hak lainnya.

Ketentuan pemberian hak-hak utama Pemegang Saham Perusahaan dijelaskan dalam Pasal 52 Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdiri dari:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan dari hasil likuidasi.
3. Menjalankan hak-hak lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Rights of Shareholders

In the paradigm of GCG implementation, the capacity of Shareholders is not limited only to capital aspect, Shareholders as regulated in law no. 40 year 2007 regarding Limited Liability Companies are provisioned with rights as a form of reciprocal interest. Scope of right of Shareholders consists of capital benefit acceptance, supervision of the course of operational activities carried out by the Board of Directors, and other rights.

Provision of principal rights of Shareholders is explained in Article 52 of law no. 40 year 2007 regarding limited liability Companies consists of:

1. Attend and vote in GMS.
2. Receive dividend payment and the remaining wealth from liquidation.
3. Exercise other rights as disclosed in Limited Liability Company Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and Articles of Association.

Akses informasi kepada Pemegang Saham

Perusahaan memberikan jaminan terhadap akses informasi yang setara kepada seluruh Pemegang Saham. Akses yang dimiliki oleh Perusahaan agar mudah dijangkau oleh Pemegang Saham Perusahaan antara lain:

1. Laporan Keuangan Tahunan *Audited*;
2. Laporan Tahunan Perusahaan;
3. Laporan Manajemen Perusahaan yang disampaikan setiap triwulan; dan
4. Publikasi laporan kegiatan Perusahaan melalui media massa dan *website* Perusahaan.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Kepemilikan saham Perusahaan 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kebijakan hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Tata Aturannya tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Jenis RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

Information Access for Shareholders

Information access for shareholders provides guarantee on equal information access to all Shareholders. The Company's access to be reachable by the Shareholders includes:

1. Audited Annual Financial Statements;
2. Annual Report;
3. Quarterly Management Report; and
4. Publication of Corporate Activity Report through Mass Media and website of the Company.

Shareholders Relation Policy

The Company's shares ownership is 100% held by Government of Republic of Indonesia through Ministry of State-Owned Enterprise, the relationship policy between the Company and Shareholders is regulated under Article 14 law number 19 of 2003 on State-Owned Enterprise and the provisions as disclosed in Minister of SOEs Regulation number PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise.

Type of GMS

Pursuant to the Company's Articles of Association and Law no. 40 year 2007 on Limited Liability Companies, GMS consists of Annual GMS and Other GMS.

Jenis-jenis RUPS Jenis-jenis RUPS



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Dalam RUPS Tahunan dibahas laporan Direksi mengenai perhitungan tahunan, Laporan Tahunan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, rencana penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan, permintaan penunjukan Akuntan Publik serta hal lainnya demi kepentingan Perusahaan.

Sedangkan RUPS Lainnya dapat berbentuk:

1. RUPS Luar Biasa
2. RUPS Sirkuler

Baik RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya memiliki wewenang tertinggi dalam struktur tata kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Manajemen Perusahaan.

Wewenang RUPS

Wewenang RUPS yang dimaksud, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi Perusahaan;
2. Menetapkan pembatasan kewenangan Direksi berdasarkan jumlah dan/atau jangka waktu atas kegiatan-kegiatan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
3. Berdasarkan usulan/permintaan Direksi, RUPS dapat menyetujui pengalihan lebih dari 50% kekayaan bersih Perusahaan sebagai jaminan hutang;
4. Mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar;
5. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
6. Menyetujui laporan tahunan dan penggunaan laba bersih Perusahaan dalam RUPST;
7. Menyetujui RKAP serta RJPP; dan
8. Menetapkan Auditor Eksternal dengan mempertimbangkan pendapat Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris

Kewenangan tersebut harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

In the Annual GMS, Board of Directors' report concerning annual calculations, the Annual Report on the condition and the course of the Company, the plan to use profit and the amount of dividends paid, the request for appointment of Public Accountant and other matters for the benefit of the Company are discussed.

Whereas other RUPS may take the form of:

1. Extraordinary GMS
2. Circular GMS

Both the Annual GMS and Other GMS have the highest authority in the corporate governance structure as well as being the main forum for Shareholders to exercise their rights and authority over the Company's Management.

GMS Authority

GMS Authority is, among others, as follows:

1. To appoint and dismiss Board of Directors and Board of Commissioners members. Board of Commissioners and Board of Directors members who are appointed in the GMS shall be appointed from fit and proper candidates for the Company.
2. To determine the limit of Board of Directors' authority based on the number and/or period of certain activities as stated in the Articles of Association
3. To approve for transfer of more than 50% of the Company's net assets as collateral as per Board of Directors' suggestions/demands;
4. To reduce the limit on Board of Directors' actions as regulated in the Articles of Association or to determine other limit on Board of Directors outside the stipulations in the Articles of Association;
5. To determine the division of duties and authority of Board of Directors members;
6. Approval for the annual report and the utilization of Company's net profit in the Annual General Meeting Shareholder;
7. To give approval for the Company's budget plan and the Company's long term plan; and
8. To determine the external auditor by considering opinion from the Audit Committee submitted to the Board of Commissioners

The authorities shall be implemented fairly and transparently by concerning necessary aspects to maintain the Company's long-term business interest.

Ketentuan Penyelenggaraan RUPS, Pemberitahuan RUPS dan Catatan yang Termuat dalam Surat Pemanggilan RUPST/RUPSLB

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, ketentuan RUPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat diadakan di manapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat;
4. Direksi menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan didahului pemanggilan RUPS;
5. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan: a) seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah; atau b) Dewan Komisaris;
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya;
7. Surat tercatat yang dimaksud disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
8. Alasan permintaan penyelenggaraan RUPS, antara lain namun tidak terbatas pada: a) Direksi tidak melaksanakan RUPST sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau c) dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perusahaan;
9. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;

GMS Implementation, GMS Announcement and Attached notes in the AGMS/EGMS Invitation

Pursuant to the Company's Articles of Association, GMS' provisions are as follows:

1. All GMS are convened on the location of the Company or on which the Company's operations within the territory of the Republic of Indonesia;
2. If in the GMS all shareholders attend and/or are represented, and all shareholders approved for the GMS convention, then the GMS can be convened at any place within the territory of the Republic of Indonesia;
3. GMS shall make a resolution if it has been approved unanimously;
4. The Board of Directors convenes AGMS and EGMS by conducting summons first for GMS;
5. GMS can be convened upon the request from: a) one or more shareholders who represent, at the least, 1/10 (one tenths) of total outstanding shares of the Company with valid voting rights; or b) Board of Commissioners;
6. Such request for held GMS is proposes to the Board of Directors with a registered letter stating the reason;
7. The registered letter is submitted to the shareholders and forwarded to the Board of Commissioners;
8. The reasons for the request for holding GMS are, but not limited to the following: a) the Board of Directors does not convene a Annual GMS pursuant to the prevailing regulations; b) the tenure of members of Board of Directors and/or Board of Commissioners will expire; or c) in the event the Board of Directors is absent or there is a dissenting opinion or conflict of interest among the Company's Board of Directors;
9. The Board of Directors is obliged to announce summons for GMS within the period of 15 (fifteen) days since the date of the request for GMS convention is received, at the latest;
10. In the event the Board of Directors does not make the summons, then:
 - a. the requested for GMS convention by the shareholders is request to the Board of Commissioners; or
 - b. the Board of Commissioners makes the summons;

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
12. RUPS yang diselenggarakan Direksi hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Direksi dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi;
13. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Dewan Komisaris;
14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu masing-masing 15 hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan;
15. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
16. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
17. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;
18. Perusahaan wajib memberikan salinan bahan RUPS kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta; dan;
19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu dan isi dalam media penyampaian yang dimaksud, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
11. The Board of Commissioners is obliged to announce summons for GMS within the period of 15 (fifteen) days since the date of the request for GMS convention is received, at the latest;
12. GMS convened by the Board of Directors shall discuss only the issues related to the agenda of the Board of Directors and other agenda deemed significant by the Board of Directors;
13. GMS convened by the Board of Commissioners shall discuss only the issues related to the agenda of the Board of Commissioners.
14. In the event that neither the Board of Directors nor the Board of Commissioners does not make the summons for GMS within period of 15 (fifteen) days since the date of the request for GMS convention is received, the shareholders demanding the convention of GMS may make the summons after decree approval from the head of the District Court whose legal area covers the location of the Company;
15. GMS' summons is conducted within the period of 14 (fourteen) days prior to the convention date of GMS, excluding the date of summons and the date of GMS;
16. Summons for GMS is announced through registered letter and/or advertisement in newspaper;
17. In the announcement, the date, place and agenda of the GMS shall be disclosed, and that the material to be discussed in the GMS is available at the Company's office since the summons date of GMS until the date of GMS convention;
18. The Company is obliged to provide the copy of GMS' material; to the Shareholders freely upon demand; and
19. In the event that the summons are not made in accordance with the provisions of time limit and contents in the above-mentioned media or that the summons are not made in accordance with the prevailing requirements, GMS is able to make valid resolutions if all shareholders with valid voting rights attend or are represented in the GMS and the resolution is made unanimously.

Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2019 dan Tindak Lanjut Hasil RUPS oleh Manajemen

Di sepanjang tahun 2019, Perusahaan menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS, yaitu:

- Penyelenggaraan RUPS Tahunan pada tanggal 7 Januari 2019 tentang Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018;
- Penyelenggaraan RUPS pada tanggal 1 April 2019 tentang Pengukuhan Pemberhentian Sdr. Andi Saddawero sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen serta Pengangkatan Sdr. Dikdik Permadi Yoffana sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen;
- Penyelenggaraan RUPS Tahunan pada tanggal 3 Mei 2019 tentang Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018;
- Penyelenggaraan RUPS pada tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengukuhan Pemberhentian Sdr. Henry Sihotang sebagai Direktur Utama dan Sdr. Ajar Setiadi sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja serta Pengangkatan Sdr. Iman Rachman sebagai Direktur Utama dan Sdr. R. Muhammad Irwan sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja;
- Penyelenggaraan RUPS pada tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengukuhan Pemberhentian Sdr. Lydia Slivanna Djaman sebagai Komisaris.

GMS in 2019 and Follow up on the GMS Results by Management

Throughout 2019, the Company held 4 (four) GMS, namely:

- Annual GMS on January 7, 2019 concerning Ratification of the Annual Calculation and the Use of Net Profit for Fiscal Year 2018;
- GMS on April 1, 2019 concerning the Inauguration of the Dismissal of Andi Saddawero as Business Advisory and Asset Management and the Appointment of Dikdik Permadi Yoffana as Business Advisory and Asset Management Director;
- Annual GMS on May 3, 2019 concerning Ratification of the Annual Calculation and Use of Net Profit for Fiscal Year 2018.
- GMS on July 23, 2019 concerning the Inauguration of the Dismissal of Henry Sihotang as President Director and Ajar Setiadi as Finance and Support Director and Appointment of Iman Rachman as President Director and R. Muhammad Irwan as Finance and Support Director;
- GMS on July 23, 2019 concerning the Inauguration of the Dismissal of Lydia Slivanna Djaman as Commissioner.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Berikut disampaikan penyelenggaraan masing-masing RUPS. Following is the explanation regarding each GMS.

RUPS Tahunan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019
Annual GMS on Ratification of 2019 Corporate Work Plan and Budget

HARI/TANGGAL DAY/DATE	: SENIN, 7 JANUARI 2019 MONDAY, JANUARY 7, 2019
Waktu Time	: Pk. 09.30 s.d 10.30 WIB 9:30 a.m. to 10:30 a.m. WIB
Tempat Venue	: Ruang Rapat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Lt. 7 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Jakarta 10110 Meeting Room of the Ministry of State-Owned Enterprises, 7th floor
Kehadiran Attendee	: Kuasa Pemegang Saham Negara Republik Indonesia: ▪ Aloysius Kiik Ro (Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN) ▪ Berdasarkan Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-243/MBU/12/2018 tanggal 26 Desember 2018. Dewan Komisaris: ▪ Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) ▪ Lydia Silvanna Djaman (Komisaris) ▪ Didyk Choiroel (Komisaris) ▪ Tirta Hidayat (Komisaris) Direksi: ▪ Henry Sihotang (Direktur Utama) ▪ Andi Saddawero (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) ▪ Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) ▪ Ajar Setiadi (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) Proxy of Shareholder the Government of the Republic of Indonesia: ▪ Aloysius Kiik Ro (Deputy for the Restructuring and Business Development of the Ministry of SOEs) Board of Commissioners: ▪ Edy Putra Irawady (President Commissioner) ▪ Lydia Silvanna Djaman (Commissioner) ▪ Didyk Choiroel (Commissioner) ▪ Tirta Hidayat (Commissioner) Board of Directors: ▪ Henry Sihotang (President Director) ▪ Andi Saddawero (Business Advisory and Asset Management Director) ▪ Nasrizal Nazir (Investment Director) ▪ Ajar Setiadi (Finance and Support Director)

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

All decisions in the GMS were made by deliberation. The GMS resolutions along with its implementation and follow-up by the Company Management until the end of 2019 are as follows:

MATA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT MEETING AGENDA, RESOLUTION, AND FOLLOW UP ON RESOLUTION

Agenda Mata Acara 1:

Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2019.

Keputusan Mata Acara 1:

a. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Keuangan:

1. Perhitungan Laba (Rugi)

Laba Bersih Konsolidasian PT PPA (Persero Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp520.000 Juta dengan rincian sebagai berikut:

▪ Pendapatan Usaha	: Rp 9.815.755 Juta
▪ Beban Usaha	: Rp (8.895.707) Juta
▪ Laba/(Rugi) Usaha	: Rp 920.048 Juta
▪ Pendapatan (Beban) Lain-Lain	: Rp (328.603) Juta
▪ Laba (Rugi) Sebelum Pajak	: Rp 591.445 Juta
▪ Pajak-Pajak	: Rp (71.445) Juta
▪ Laba/(Rugi) Bersih	: Rp 520.000 Juta

2. Proyeksi Neraca

Neraca Konsolidasian Perusahaan per 31 Desember 2019 ditargetkan ditutup dengan Total Aset sebesar Rp16.126.130 Juta dengan rincian sebagai berikut:

Aset:

▪ Aset Lancar	: Rp 7.431.942 Juta
▪ Aset Tidak Lancar	: Rp 8.694.188 Juta
▪ Total Aset	: Rp 16.126.130 Juta

Liabilitas:

▪ Liabilitas Jangka Pendek	: Rp 3.846.824 Juta
▪ Liabilitas Jangka Panjang	: Rp 6.630.976 Juta
▪ Total Liabilitas	: Rp 10.477.800 Juta

Ekuitas:

▪ Ekuitas	: Rp 5.648.330 Juta
▪ Total Liabilitas dan Ekuitas	: Rp 16.126.130 juta

3. Arus Kas

Arus Kas Konsolidasian Perusahaan Tahun 2019 dianggarkan sebagai berikut:

▪ Arus Kas dari Aktivitas Operasi	: Rp 34.251 Juta
▪ Arus Kas dari Aktivitas Investasi	: Rp (4.896.097) Juta
▪ Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	: Rp 4.588.007 Juta
▪ Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	: Rp (273.839) Juta
▪ Kas dan Setara Kas Awal Tahun	: Rp 1.164.385 Juta
▪ Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	: Rp 890.546 Juta

b. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) tahun 2019 sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan bersama Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Nomor RIS-51/D7.MBU.3/12/2018 tanggal 12 Desember 2018.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Agenda 1:**

Approval and Ratification of the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the 2019 Partnership and Community Development Program Work Plan (RKA PKBL).

Resolution of Agenda 1:

Approve and ratify the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), with the following points:

Finance:

1. Profit (Loss) Calculation

Consolidated Net Income of PT PPA (Persero) in 2019 is targeted at Rp520,000 Million with details as follows:

▪ Revenues	: Rp 9,815,755 Million
▪ Operating Expenses	: Rp (8,895,707) Million
▪ Operating Income	: Rp 920,048 Million
▪ Other Income (Expenses)	: Rp (328,603) Million
▪ Income Before Tax	: Rp 591,445 Million
▪ Tax	: Rp (71,445) Million
▪ Net Income	: Rp 520,000 Million

2. Balance Projection

PT PPA (Persero) Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2019 is targeted to be closed with total assets of Rp16,126,130 Million with the following details:

Assets:

▪ Current Assets	: Rp 7,431,942 Million
▪ Non-current Assets	: Rp 8,694,188 Million
▪ Total Assets	: Rp 16,126,130 Million

Liabilities:

▪ Current Liabilities	: Rp 3,846,824 Million
▪ Non-current Liabilities	: Rp 6,630,976 Million
▪ Total Liabilities	: Rp 10,477,800 Million

Equity:

▪ Equity	: Rp 5,648,330 Million
▪ Total Liabilities and Equity	: Rp 16,126,130 Million

3. Cash Flows

PPA (Persero) Consolidated Cash Flows in 2019 is budgeted as follows:

▪ Cash Flows from Operating Activities	: Rp 34,251 Million
▪ Cash Flows from Investing Activities	: Rp (4,896,097) Million
▪ Cash Flows from Financing Activities	: Rp 4,588,007 Million
▪ Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents	: Rp (273,839) Million
▪ Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	: Rp 1,164,385 Million
▪ Cash and Cash Equivalents at End of Year	: Rp 890,546 Million

- b. Approve and ratify the 2019 Partnership and Community Development Program Work Plan (RKA PKBL) in accordance with the Minutes of Discussion Meeting with the Deputy Assistant of Social and Environmental Responsibility Number RIS-51/D7.MBU.3/12/2018 dated December 12, 2018.

Agenda Mata Acara 2:

Penetapan Indikator Aspek Operasional Perusahaan Tahun 2019.

Keputusan Mata Acara 2:

Menetapkan Indikator Aspek Operasional Perusahaan Tahun 2019 sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

Agenda 2:

Establishment of indicators for the Company's operational aspects in 2019

Resolution of Agenda 2:

Establish indicators for the Company's operational aspects in 2019 as proposed in the GMS and become an integral part of this GMS resolution.

Agenda Mata Acara 3:

Persetujuan dan Pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2019 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan Pemegang Saham.

Keputusan Mata Acara 3:

Menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2019 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan Pemegang Saham sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

Agenda 3:

Approval and Ratification of Key Performance Indicators (KPI) as set out in the 2019 Management Contract between Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and the Shareholders.

Resolution of Agenda 3:

Approve and ratify Key Performance Indicators (KPI) as set out in the 2019 Management Contract between Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and the Shareholders as proposed in the GMS and become an integral part of this GMS resolution.

Agenda Mata Acara 4:

Persetujuan dan pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2019.

Keputusan Mata Acara 4:

Menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2019 sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

Agenda 4:

Approval and ratification of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) in 2019.

Resolution of Agenda 4:

Approve and ratify the 2019 Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) as proposed in the GMS and became an integral part of this GMS resolution.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018**

Annual GMS on Approval of Annual Report and Ratification of Annual Calculation and Use of Net Profit for Fiscal Year 2018

HARI/TANGGAL DAY/DATE	: JUMAT, 3 MEI 2019 FRIDAY, MAY 3, 2019
Waktu Time	: Pk. 14.00 s.d Selesai WIB 02:00 p.m. WIB until Finished
Tempat Venue	: Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat Hotel Novotel Bogor, West Java
Kehadiran Attendee	: Kuasa Pemegang Saham Negara Republik Indonesia: ▪ Aloysius Kiik Ro (Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN) ▪ Hambra (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN) Dewan Komisaris: ▪ Tirta Hidayat (Komisaris) ▪ Didyk Choiroel (Komisaris) Direksi: ▪ Henry Sihotang (Direktur Utama) ▪ Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) ▪ Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) ▪ Ajar Setiadi (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) Proxy of Shareholder of the Republic of Indonesia: ▪ Aloysius Kiik Ro (Deputy for the Restructuring and Business Development Sector of the Ministry of SOEs) ▪ Hambra (Deputy for Business Infrastructure at the Ministry of SOEs) Board of Commissioners: ▪ Tirta Hidayat (Commissioner) ▪ Didyk Choiroel (Commissioner) Board of Directors: ▪ Henry Sihotang (President Director) ▪ Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director) ▪ Nasrizal Nazir (Investment Director) ▪ Ajar Setiadi (Finance and Support Director)

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

All decisions in the GMS were made by deliberation. The GMS resolutions along with its implementation and follow-up by the Company Management until the end of 2019 are as follows:

MATA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT MEETING AGENDA, RESOLUTION, AND FOLLOW UP ON RESOLUTION

Agenda Mata Acara 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.

Keputusan Mata Acara 1:

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai laporannya No. 00172/2.1030/AU.1/10/0499-4/1/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan pokok tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perusahaan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Agenda 1:

Approval of the Annual Report and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Fiscal Year 2018 and the Board of Commissioners Supervisory Report of the Fiscal Year 2018.

Resolution of Agenda 1:

Approve the 2018 Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report and endorse the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2018 which had been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) according to its report no. 00172/2.1030/AU.1/10/0499-4/1/III/2019 dated March 15, 2019 with the opinion "unqualified", as well as granting full discharge and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company upon the management and supervision actions that have been carried out in the Fiscal Year ending in December 31, 2018, as long as these actions do not constitute the main criminal offenses and are reflected in the Company's report books with the following points:

a. Neraca | Balance

No	Uraian Description	Jumlah (Rp Juta) Amount (Rp Million)
A	Aset Assets	
1	Aset Lancar Current Assets	Rp7.280.098
2	Aset Tidak Lancar Non-current Assets	Rp4.464.403
	Jumlah Aset Total Assets	Rp11.744.501
B	Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	
1	Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	Rp5.440.230
2	Liabilitas Jangka Panjang Non-current liabilities	Rp1.042.228
3	Hak Minoritas Minority Rights	Rp117.612
4	Ekuitas Equity	Rp5.262.043

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

b. Perhitungan Laba/Rugi | Profit/Loss Calculation

No	Uraian Description	Jumlah (Rp Juta) Amount (Rp Million)
a	Pendapatan Usaha Bersih Net Revenues	Rp6.824.001
b	Beban Usaha Operating Expenses	Rp(6.292.565)
c	Laba / (Rugi) Usaha Operating Income	Rp531.436
d	Pendapatan / (Beban) Lain-lain Other Income/Expenses	Rp(89.776)
e	Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	Rp441.660
f	Beban Pajak Tax Expenses	Rp(12.860)
g	Hak Minoritas Minority Rights	Rp2.723
	Laba Bersih Net Income	Rp428.800

Agenda Mata Acara 2:

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Tahun Buku 2018

Keputusan Mata Acara 2:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai laporannya Nomor 00070/2.1030/AU.2/12/0499-4/1/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Agenda 2:

Approval and Ratification of the Company's Partnership and Community Development Program Report for Fiscal Year 2018

Resolution of Agenda 2:

Approve and ratify the PKBL Annual Report 2018, including the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program which has been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) according to its report no. 00070/2.1030/AU.2/12/0499-4/1/II/2019 dated February 22, 2019 with the opinion "unqualified", as well as granting full discharge and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company upon the management and supervision actions regarding PKBL of the Fiscal Year 2018, as long as these actions are not criminal offenses and are reflected in the report, with the following points:

a. Neraca Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | Partnership and Community Development Program Balance Sheet

Aktiva Assets	
Aktiva Lancar Current Assets	Rp18.880.968.257
Aktiva Tidak Lancar Non-current Assets	Rp -
Passiva Liabilities	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	Rp1.733.334
Aktiva Bersih Net Assets	Rp18.879.234.913
JUMLAH AKTIVA/PASSIVA TOTAL ASSETS/LIABILITIES	Rp18.880.968.247

b. Laporan Aktivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | Partnership and Community Development Program Activity Report

Uraian Description		Jumlah Amount
Penerimaan Pendapatan dan Penyisihan Income Receipt and Allowance		
1. Penerimaan Receipt		
▪ Alokasi Penyisihan Laba Allowance Allocation		Rp1.589.693.236
2. Pendapatan Income:		
a. Pendapatan dari Jasa Adm. Pinjaman Income from Loan Administrative Services		Rp225.703.689
b. Pendapatan dari Bunga (Jasa Giro) Interest Income (Current Account Services)		Rp150.109.154
c. Pendapatan Lain-lain Other Income		
Jumlah Pendapatan (2) Total Income (2)		Rp375.812.843
3. Penyisihan Allowance:		
a. Alokasi BUMN Peduli Allocation of SOEs Care		Rp –
b. Aktiva Bersih Terkait Berakhir Pemenuhan Program Net Assets Related to Program Completion		Rp –
c. Aktiva Bersih Terikat Berakhir Waktu Binding Net Asset Expires		Rp –
Jumlah Penyisihan (3) Total Allowance (3)		Rp –
Jumlah Penerimaan, Pendapatan & Penyisihan Total Allowance (3)		Rp1.965.506.079
Penyaluran Beban dan Pengeluaran Total Distribution (4) Distribution of Costs and Expenses		
4. Penyaluran Distribution		
a. Dana Pembinaan Kemitraan Partnership Development Fund		Rp107.000.000
b. Penyaluran Bina Lingkungan Distribution of Community Development		Rp1.593.549.315
Jumlah Penyaluran (4) Total Distribution (4)		Rp1.700.549.315
5. Beban dan Pengeluaran Total Distribution (4)		
a. Beban Pembinaan Development Costs		Rp –
b. Beban Administrasi Umum General Administrative Expenses		Rp1.039.656
c. Beban Penyusutan Aktiva Tetap Depreciation of Fixed Assets Costs		Rp –
d. Beban Penyisihan Piutang Allowance for Receivables		Rp110.326.339
e. Beban Pajak Allowance for Receivables		Rp –
f. Beban dan Pengeluaran Lainnya Other Costs and Expenses		Rp –

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Uraian Description	Jumlah Amount
Jumlah Beban dan Pengeluaran (5) Total Costs and Expenses (5)	Rp111.365.995
Jumlah Penyaluran, Beban dan Pengeluaran Total Distribution, Costs and Expenses	Rp1.811.915.310
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat Increase (Decrease) of Unbinding Net Assets	Rp153.590.769
6. Penyisihan BUMN Peduli Increase (Decrease) of Unbinding Net Assets	
a. Aktiva Bersih Terkait Penyisihan BUMN Peduli Net Assets Related to Allowance for SOEs Care	Rp –
b. Aktiva Bersih Terikat Terbebaskan Binding Net Assets Exempt	Rp –
Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Increase/(decrease) in Binding Net Assets	Rp -
Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih Increase/(decrease) in Net Assets	Rp153.590.769
7. Aktiva Bersih Pada Awal Periode Net Assets at Beginning of Period	Rp18.725.644.145
8. Aktiva Bersih Pada Akhir Periode Net Assets at End of Period	Rp18.879.234.913

Agenda Mata Acara 3:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2018

Keputusan Mata Acara 3:

Menetapkan penggunaan laba bersih (laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun Buku 2018 sebesar Rp426.076.501.124,- dengan alokasi sebagai berikut:

- Dividen Tunai sebesar Rp42.607.650.113,- atau 10,00%
- Cadangan sebesar Rp127.822.950.337,- atau 30,00%
- Laba Ditahan sebesar Rp255.645.900.674,- atau 60,00%

Apabila terjadi perbedaan PPh yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan PPh yang dipakai dalam perhitungan pembagian laba bersih Tahun Buku 2018 ini, maka Direksi diminta untuk melakukan koreksi sesuai dengan SAK dan melaporkan perhitungan tersebut kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda 3:

Determination of the Use of the Company's Consolidated Net Income for Fiscal Year 2018

Resolution of Agenda 3:

Determine the use of net income (income attributable to owners of the parent entity) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) for Fiscal Year 2018 amounting to Rp426,076,501,124, with the following allocations:

- Cash Dividend of Rp42,607,650,113 or 10.00%
- Reserves of Rp127,822,950,337 or 30.00%
- Retained Earnings of Rp255,645,900,674 or 60.00%

If there is a difference in Income Tax determined by the Tax Service Office and the Income Tax used in the calculation of net income distribution for this Fiscal Year 2018, the Board of Directors is required to make corrections in accordance with Indonesian GAAP and report the calculation to the Shareholders in accordance with applicable regulations.

Agenda Mata Acara 4:

Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2019 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2018.

Keputusan Mata Acara 4:

Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2018, akan ditetapkan secara tersendiri.

Agenda 4:

Determination of Salary/Honorarium along with facilities and other benefits for Board of Directors and Board of Commissioners of the Fiscal Year 2019 and bonuses for Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of Fiscal Year 2018.

Resolution of Agenda 4:

Salary/Honorarium determination along with facilities and other benefits for Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2019 and bonuses for Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of Fiscal Year 2018, will be determined separately.

Agenda Mata Acara 5:

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Tahun Buku 2019.

Keputusan Mata Acara 5:

- Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Tahun Buku 2019.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 5:

Appoint a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year 2019.

Resolution of Agenda 5:

- Re-appoint Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) as auditor that will audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program Financial Year 2019.
 - To grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the appropriate amount of audit services and other appointment requirements for the said Public Accounting Firm.
-

Agenda Mata Acara 6:

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018.

Keputusan Mata Acara 6:

Menyetujui Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018.

Agenda 6:

Accountability for Realization of the Use of Additional State Capital Participation 2015 Funds for the period of 1st Quarter to 4th Quarter of 2018.

Resolution of Agenda 6:

Approve the Accountability for Realization of the Use of Additional 2015 State Capital Participation Funds for the period of 1st Quarter to 4th Quarter of 2018.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Informasi Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2018 dan Tindak Lanjut Hasil RUPS oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2019**

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan menyelenggarakan 2 kali RUPS, yaitu:

- Penyelenggaraan RUPS pada tanggal 16 Januari 2018 tentang Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Sdr. Nasrizal Nazir sebagai Direktur Investasi.
- Penyelenggaraan RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 Januari 2018.
- Penyelenggaraan RUPS pada tanggal 12 April 2018 tentang Pengukuhan Pemberhentian Sdr. Taufik Sukasah dan Sdr. Dedi Rudaedi sebagai Komisaris serta Pengangkatan Sdr. Didyk Choiroel dan Lydia Silvanna Djaman sebagai Komisaris dan mengalihkan penugasan Sdr. Tirta Hidayat yang semula Komisaris menjadi Komisaris Independen.
- Penyelenggaraan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 2 Mei 2018.

Berikut disampaikan penyelenggaraan masing-masing RUPS.

RUPS TAHUNAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN BUKU 2018

HARI/TANGGAL DAY/DATE	: RABU, 24 JANUARI 2018 FRIDAY, JANUARY 24, 2018
Waktu Time	: Pk. 11.00 s.d selesai 11:00 a.m. until finish
Tempat Venue	: Ruang Rapat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Lt. 11 Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 – Jakarta 10110 Meeting Room of the Ministry of State-Owned Enterprises, 11th floor

Information on GMS Held in 2018 and Follow-Up of GMS Results by Management Until the End of 2019

In 2018, the Company held 2 GMS, namely:

- GMS on January 16, 2018 concerning Changes to Nomenclature, Job Transfer and Appointment of Nasrizal Nazir as Investment Director.
- Annual GMS on Approval of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) for Fiscal Year 2018 on January 26, 2018.
- GMS on April 12, 2018 concerning the Inauguration of Honorably Dismissal of Taufik Sukasah and Dedi Rudaedi as Commissioner and Appointment of Didyk Choiroel and Lydia Silvanna Djaman as Commissioner and job transfer of Tirta Hidayat to be an Independent Commissioner from previously a Commissioner.
- GMS on Approval of Annual Report for Fiscal Year 2017 on May 2, 2018.

Following is the details of each GMS.

ANNUAL GMS ON APPROVAL OF CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET (RKAP) FOR FISCAL YEAR 2018

Kehadiran Attendee	: Kuasa Pemegang Saham Negara Republik Indonesia:
	- Chairiah - Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi BUMN dan RPPKNN selaku Kuasa Menteri berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-43/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018
	Dewan Komisaris:
	- Edy Putra Irawady - Taufik Sukasah - Dedi Rudaedi - Tirta Hidayat
	Direksi:
	- Henry Sihotang - Andi Saddawero - Nasrizal Nazir - Ajar Setiadi
	Proxy of Shareholder of the Government of the Republic of Indonesia:
	- Chairiah - Assistant Deputy for the Restructuring of SOEs and the PPKNN as Proxy of Minister under Power of Attorney no: SKU-43/MBU/01/2018 dated January 22, 2018
	Board of Commissioners:
	- Edy Putra Irawady - Taufik Sukasah - Dedi Rudaedi - Tirta Hidayat
	Board of Directors:
	- Henry Sihotang - Andi Saddawero - Nasrizal Nazir - Ajar Setiadi

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

All decisions in the GMS were made by deliberation. The GMS resolutions along with its implementation and follow-up by the Company Management until the end of 2019 are as follows:

MATA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT MEETING AGENDA, RESOLUTION, AND FOLLOW-UP ON RESOLUTION

Keputusan Mata Acara 1 :

1. Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018.
2. Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) tahun 2018 sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan bersama Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan No. RIS-79/D7.MBU.3/01/2018 tanggal 23 Januari 2018.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi. Seluruh laporan Perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah memuat RKAP dan RKA-PKBL tahun buku 2018.

Resolution of Agenda 1 :

1. The meeting approved and ratified the 2018 Corporate Work Plan and Budget.
2. The meeting approved and ratified the Work Plan and Budget of the Partnership and Community Development Program (RKA PKBL) in 2018 as the Minutes of Discussion Meeting with the Deputy Assistant of Social and Environmental Responsibility No. RIS-79/D7.MBU.3/01/2018 dated January 23, 2018.

Follow-up on Resolution:

Has been realized. All of the Company's reports which ended on December 31, 2018 have contained Budget and Planning and RKA-PKBL for fiscal year 2018.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTUREMATA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT
MEETING AGENDA, RESOLUTION, AND FOLLOW-UP ON RESOLUTION**Keputusan Mata Acara 2:**

Rapat menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi dimana skor tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018 adalah 93.50.

Resolution of Agenda 2:

The meeting established Operational Aspect Indicators for assessing Company's Soundness Index in 2018.

Follow-up on Resolution:

Has been realized, and the Company's Soundness Index for 2018 is 93.50.

Keputusan Mata Acara 3:

Rapat menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi. KPI Direksi untuk tahun buku 2018 telah mengacu kepada KPI yang ditetapkan dalam RUPS dengan pencapaian 104.84.

Resolution of Agenda 3:

The meeting approved and ratified the Key Performance Indicators (KPI) contained in the 2018 Management Contract between the Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders.

Follow-up on Resolution:

Has been realized. Board of Directors' KPI for the 2018 fiscal year has referred to the KPI stipulated in the GMS with an achievement of 104.84.

Keputusan Mata Acara 4:

Rapat menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2018.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi. KPI Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 telah mengacu kepada KPI yang ditetapkan dalam RUPS dengan pencapaian 126.89.

Resolution of Agenda 4:

The meeting approved and ratified the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) in 2018

Follow-up on Resolution:

Has been realized. Board of Commissioners' KPI for the 2018 fiscal year has referred to the KPI stipulated in the GMS with an achievement of 126.89.

RUPS TAHUNAN PERSETUJUAN LAPORAN
TAHUNAN TAHUN BUKU 2017ANNUAL GMS ON APPROVAL OF ANNUAL REPORT
OF FISCAL YEAR 2017

HARI/TANGGAL : RABU, 2 MEI 2018
DAY/DATE : TUESDAY, MAY 2, 2018

Waktu : Pk 14.00 s.d 15.30 WIB
Time : 2:00 p.m. to 3:30 p.m. WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 7, Gedung Kementerian BUMN
Venue : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat
7th Floor Meeting Room, Ministry of SOEs Building

Kehadiran Attendee	: Kuasa Pemegang Saham Negara Republik Indonesia: ▪ Aloysius Kiik Ro ▪ Chairiah Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-125/MBU/04/2018 tanggal 24 April 2018 dengan hak substitusi kepada Sdr. Aloysius Kiik Ro, Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha dan kepada Sdri. Chairiah, Asisten Deputy Restrukturisasi BUMN dan PPKNM. Dewan Komisaris: ▪ Edy Putra Irawady ▪ Tirta Hidayat ▪ Didyk Choeroel ▪ Lydia Silvanna Djaman Direksi: ▪ Henry Sihotang ▪ Andi Saddawero ▪ Ajar Setiadi ▪ Nasrizal Nazir Proxy of Shareholder of the Government of the Republic of Indonesia: ▪ Aloysius Kiik Ro ▪ Chairiah SOEs Minister's Power of Attorney No. SKU-125/MBU/04/2018 dated April 24, 2018 with substitution rights to Aloysius Kiik Ro, Deputy for Business Restructuring and Development and to Chairiah, Assistant Deputy for Restructuring of SOEs and PPKNM. Board of Commissioners: ▪ Edy Putra Irawady ▪ Tirta Hidayat ▪ Didyk Choeroel ▪ Lydia Silvanna Djaman Board of Directors: ▪ Henry Sihotang ▪ Andi Saddawero ▪ Ajar Setiadi ▪ Nasrizal Nazir

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

All decisions in the GMS were made by deliberation. The GMS resolutions along with its implementation and follow-up by the Company Management until the end of 2019 are as follows:

MATA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT MEETING AGENDA, RESOLUTION, AND FOLLOW-UP ON RESOLUTION

Keputusan Mata Acara 1 :

Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan selama Tahun Buku 2017 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 telah diterima oleh Pemegang Saham.

Resolution of Agenda 1 :

Approval of the Company's Annual Report on the conditions and course of of the Company during the Fiscal Year 2017 and the Board of Commissioners Supervisory Report during the Fiscal Year 2017

Follow-up on Resolution:

Has been realized. The Board of Commissioners' Supervisory Report for Fiscal Year 2017 has been accepted by the Shareholders.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**MATA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT**
MEETING AGENDA, RESOLUTION, AND FOLLOW-UP ON RESOLUTION**Keputusan Mata Acara 2:**

Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus Pembebasan tanggung Jawab Sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perusahaan yang telah dijalankan Tahun Buku 2017.

1. Menyetujui pengesahan:
 - a. Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporan No. R/029.AGA/sat.3/2018 tanggal 20 Februari 2018 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
 - b. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporannya No. R/025.AGA/sat.3/2018 tanggal 20 Februari 2018, dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan PKBL serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi. Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2017 telah diterima oleh Pemegang Saham dan disahkan oleh RUPS.

Resolution of Agenda 2:

Ratification of the Company's Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2017, as well as Full Release of Responsibility to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who are in charge of supervisory and management actions of the Company that has been carried out for Fiscal Year 2017.

1. Approve the ratification of:
 - a. The Company's 2017 Financial Statements audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners according to report No. R/029.AGA/sat.3/2018 dated February 20, 2018 with unqualified opinion.
 - b. The 2017 Partnership and Community Development Program Financial Statements audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners according to report No. R/025.AGA/sat.3/2018 dated February 20, 2018, with unqualified opinion.
2. Grant full discharge and release of responsibility (*volledig acquit et decharge*) to members of Board of Directors for the management actions of the Company and members of Board of Commissioners for the supervisory actions, as well as to the management and supervision of the Partnership and Community Development Program that has been carried out during the fiscal year 2017, insofar as these actions are recorded in the Company's Financial Statements and PKBL Financial Statements and they are not in conflict with the rules and regulations..

Follow-up on Resolution:

Has been realized. The Company's Financial Statements and PKBL Financial Statements for Fiscal Year 2017 have been accepted by the Shareholders and approved by the GMS.

Keputusan Mata Acara 3:

Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2017.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi. Laba bersih untuk tahun buku 2017 telah digunakan sesuai keputusan.

Resolution of Agenda 3:

Approval of the determination to use the Company's Net Income for Fiscal Year 2017.

Follow-up to on Resolution:

Has been realized. Net income for fiscal year 2017 has been used in accordance with the decision.

MATA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT
MEETING AGENDA, RESOLUTION, AND FOLLOW-UP ON RESOLUTION

Keputusan Mata Acara 4:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2017.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi. Dividen telah disetor kepada Negara pada tanggal 31 Mei.

Resolution of Agenda 4:

Determination of using the Company's Net Income for Fiscal Year 2017.

Follow-up on Resolution:

Has been realized. Dividends have been paid to the State on May 31

Keputusan Mata Acara 5:

Tantiem atas kinerja tahun buku 2017 dan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 ditetapkan kemudian secara tersendiri.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi. Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 serta remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2018 telah dibayarkan sesuai dengan keputusan.

Resolution of Agenda 5:

Tantiem for the fiscal year 2017 performance and remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners in 2018 is to be determined later separately.

Follow-up on Resolution:

Has been realized. Tantiem of Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2017 and remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners for 2018 have been paid in accordance with the decision.

Keputusan Mata Acara 6:

Penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan akan ditetapkan secara tersendiri setelah Dewan Komisaris menyampaikan usulan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2018.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Tidak ada pergantian KAP, masih menunjuk KAP yang sama yaitu Amir Abadi Jusuf dan Rekan.

Resolution of Agenda 6:

The appointment of a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements of Partnership and Community Development Program will be determined separately after the Board of Commissioners submits the proposal to the General Meeting of Shareholders. The appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for fiscal year 2018.

Follow-up on Resolution:

There was no replacement, the same Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf and Partners was re-appointed

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTUREMATA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT
MEETING AGENDA, RESOLUTION, AND FOLLOW-UP ON RESOLUTION**Keputusan Mata Acara 7:**

Persetujuan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Sudah terealisasi. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat.

Resolution of Agenda 7:

Approval of the Accountability of the Realization of Additional State Capital Participation 2015 Funds Usage for the Period of 1st Quarter to 4th Quarter of 2017

Follow-up on Resolution:

Has been realized. The Accountability Report of the Realization of Additional State Capital Participation 2015 Funds Usage for the period of 1st Quarter to 4th Quarter of 2017 has been approved by the Shareholders at the Meeting.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Perusahaan untuk melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Peraturan

Perusahaan menerapkan GCG yang berkelanjutan, dalam penetapan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris mengacu pada pedoman dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pasal 6 yang mewajibkan Dewan Komisaris melaksanakan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesenjangan.
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 108 hingga 121 yang mengatur seluruh aspek mengenai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.
3. Anggaran Dasar Perusahaan.

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is a Company Organ with collective duty and responsibility to perform general and/or specific supervisions in line with the Company's Articles of Association and provide advise to the Board of Directors as well as ensure the Company to perform GCG in all organization lines or level. The Board of Commissioners has clear authority and responsibility according to each function, as mandated in the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Regulatory Framework

The Company implements sustainable GCG, in stipulating the duty, authority and obligation, the Board of Commissioners refers to manual and policy, as follows:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprise in Article 6 that obliges the Board of Commissioners to implement GCG principles, such as Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness and Equality.
2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company in Articles 108 until 121 that regulates all aspects about Board of Commissioners in Limited Liability Company.
3. Articles of Association.

Board Manual: Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris Perusahaan telah memiliki panduan yang tertuang dalam *Board Manual*. *Board Manual* tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang dan dimutakhirkan secara berkala. Landasan hukum yang menjadi acuan *Board Manual* sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Anggaran Dasar Perusahaan;
4. Pedoman GCG Perusahaan.

Board Manual mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris, diantaranya:

1. Dewan Komisaris, meliputi:
 - Ketentuan Umum jabatan Anggota Dewan Komisaris.
 - Tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
 - Kewajiban Dewan Komisaris.
 - Tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - Pembagian Tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
 - Prinsip-Prinsip Pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
 - Etika jabatan Dewan Komisaris.
 - Rapat Dewan Komisaris.
 - Organ Pendukung Dewan Komisaris.
2. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi, meliputi:
 - Pertemuan Formal.
 - Pertemuan Informal.
 - Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Program Pengenalan Perusahaan.
 - Pelaporan Berkala.

Board Manual: Guidelines and Work Order of Board of Commissioners

In carrying out supervisory duty, the Board of Commissioners has a guideline as disclosed in Board Manual. The Board Manual is prepared based on prevailing law and regulation and always be reviewed and updated periodically. Legal framework as Board Manual's reference is as follows:

1. Law number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law number 40 of 2007 on Limited Liability Company;
3. Articles of Association;
4. GCG Code.

Board Manual regulates various aspects with regard to the Board of Commissioners, among others:

1. Board of Commissioners, including:
 - General provision of Board of Commissioners position.
 - Board of Commissioners duty and authority.
 - Board of Commissioners obligation
 - Board of Commissioners responsibility.
 - Board of Commissioners duty and authority division.
 - Board of Commissioners decision-making principles.
 - Board of Commissioners ethics.
 - Board of Commissioners Meeting.
 - Board of Commissioners Supporting Structure
2. Board of Commissioners and Board of Directors working Relation, including:
 - Formal Meeting.
 - Non-Formal Meeting.
 - General Meetings of Shareholders Implementation.
 - Company's Orientation Program.
 - Periodic Report.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Proses Pengangkatan Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris Perusahaan diangkat berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham Pengendali. Calon Anggota Dewan Komisaris harus melalui beberapa tahapan seleksi sebelum diusulkan Pemegang Saham dalam RUPS.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris Tahun 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-160/MBU/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 jo. SK-87/MBU/04/2018 tanggal 12 April 2018, Pemegang Saham memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris menjadi 4 jabatan yang terdiri dari seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris Independen, dan dua orang Komisaris. Selanjutnya dengan keputusan memberhentikan Lydia Silvanna Djaman dari jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-160/MBU/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Dengan demikian, terdapat perubahan jumlah keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan, dari 4 (empat) orang menjadi 3 (tiga) orang, sedangkan satu jabatan lowong masih menunggu keputusan RUPS dan untuk masa jangka waktu tersebut pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dilaksanakan dengan komposisi keanggotaan yang ada.

Board of Commissioners Appointment Process

Board of Commissioners is appointed based on a mechanism stipulated by Controlling Shareholders. The Board of Commissioners Member shall pass several selection stages before nominated by the Shareholders in General Meeting of Shareholders.

Terms of Tenure

The tenure of Board of Commissioners members is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. Board of Commissioners members can be dismissed at any time based on a GMS resolution by stating the reasons.

Number, Composition and Structure of Board of Commissioners in 2019

Based on the Decree of Minister of SOEs as the GMS of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-160/MBU/07/2019 dated July 23, 2019 jo. SK-87/MBU/04/2018 dated April 12, 2018, the Shareholders decided to change the composition of Board of Commissioners to 4 positions consisting of one President Commissioner, one Independent Commissioner, and two Commissioners. Furthermore, decided dismiss Lydia Silvanna Djaman from the position as a Commissioner of the Company in accordance with the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-160/MBU/07/2019 dated July 23, 2019 concerning Dismissal of Board of Commissioners Members of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Accordingly, there was a change in the number of the Company's Board of Commissioners members, from 4 (four) persons to 3 (three) persons, while one vacant position was still awaiting the GMS resolution and Board of Commissioners' duties implementation for this period was carried out with the existing membership composition.

Berikut disampaikan kronologi susunan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2019 dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019.

The following is a chronology of Board of Commissioners composition throughout 2019 and Board of Commissioners composition at December 31, 2019.

Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2019
Chronology of Changes in Board of Commissioners Composition throughout 2019

Periode 1 Januari - 22 Mei 2019 Period of January 1 – May 22, 2019	Periode 22 Mei - 31 Desember 2019 Period of May 22 – December 31, 2019	Keterangan Remarks
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) Edy Putra Irawady (President Commissioner)	Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) Edy Putra Irawady (President Commissioner)	-
Didyk Choirel (Komisaris) Didyk Choirel (Commissioner)	Didyk Choirel (Komisaris) Didyk Choirel (Commissioner)	-
Lydia Silvanna Djaman (Komisaris) Lydia Silvanna Djaman (Commissioner)		Lydia Silvanna Djaman tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 22 Mei 2019 dengan alasan yang bersangkutan telah diangkat sebagai Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 22 Mei 2019. Lydia Silvanna Djaman no longer served as Commissioner since May 22, 2019 due to the appointment as a Commissioner of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk in accordance with the Resolution of Annual GMS of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dated May 22, 2019.
Tirta Hidayat (Komisaris Independen) Tirta Hidayat (Independent Commissioner)	Tirta Hidayat (Komisaris Independen) Tirta Hidayat (Independent Commissioner)	-

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURESusunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019
Board of Commissioners Composition as at December 31, 2019

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Edy Putra Irawady	Komisaris Utama President Commissioner	- Periode Kedua (2016-2021): Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK- 78/MBU/04/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset - Periode Pertama (2011-2016): Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. KEP-92/MBU/2011 tanggal 14 April 2011; kemudian diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-430/MBU/2012 tanggal 3 Desember 2012. - Second Period (2016-2021): Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-78/MBU/04/2016 dated April 14, 2016 concerning Dismissal and Appointment of President Commissioner of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset - First Period (2011-2016): Appointed as Commissioner based on Decree of the Minister of SOEs as GMS No. KEP-92/MBU/2011 dated April 14, 2011; then appointed as President Commissioner based on Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-430/MBU/2012 dated December 3, 2012.	14 April 2016 - RUPS Tahun 2021 April 14, 2016 – 2021 GMS	Ke-2 2 nd
Didyk Choiroel	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-87/MBU/04/2018 tanggal 12 April 2018 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-87/MBU/04/2018 dated April 12, 2018	12 April 2018 - RUPS Tahun 2023 April 12, 2018 – 2023 GMS June 5, 2017 – 2022 GMS	Ke-1 1 st
Tirta Hidayat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-104/MBU/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-104/MBU/06/2017 dated June 5, 2017	5 Juni 2017 - RUPS Tahun 2022 June 5, 2017 – 2022 GMS	Ke-1 1 st

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The profiles of all members of Board of Commissioners can be seen in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Penilaian Kelayakan dan Keputusan Dewan Komisaris

Seluruh calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib lulus dalam uji kelayakan dan keputusan yang dilakukan oleh Pemegang Saham sebelum diangkat menjadi Dewan Komisaris Perusahaan. Berikut Tabel Status Uji Kelayakan dan Keputusan Dewan komisaris yang menjabat pada 2018:

Board Of Commissioners Fit And Proper Test

All of Board of Commissioners members shall pass Fit and Proper Test by Shareholders prior being appointed as a member of Board of Commissioners in the Company. Board of Commissioners Fit and Proper Test Status in 2019 is as follows:

Uji Kelayakan dan Keputusan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Fit and Proper Test

Nama Name	Status	Pelaksana <i>Fit & Proper Test</i> Fit & Proper Test Provider
Edy Putra Irawady	Lulus 2016 Passed in 2016	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
Tirta Hidayat	Lulus 2017 Passed in 2017	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
Didyk Choirael	Lulus 2018 Passed in 2018	Kementerian BUMN Ministry of SOEs

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Pemegang Saham.

All members of Board of Commissioners have been declared to have passed the Fit and Proper Test by the Shareholders.

Ketentuan Pengangkatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan melalui proses yang transparan.

1. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
2. Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

Terms of Board of Commissioners Appointment

Board of Commissioners Members are appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders by concerning prevailing law and through a transparent process.

1. Not serving as Board of Commissioners member in the Company for 2 (two) consecutive periods;
2. Healthy physically and mentally, not suffering any disease that may constraint duty implementation as Board of Commissioners member proven with health certificate from Public Hospital.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Ketentuan Pemberhentian Dewan Komisaris**

Berdasarkan *Board Manual* Perusahaan, anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Adapun alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, yaitu:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar,
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri.

Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana maksud diatas berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015, bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Menteri selaku RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri selaku RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, misalnya, tetapi tidak terbatas pada:

1. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
2. Memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

Ketentuan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

Terms of Board Of Commissioners Dismissal

Based on the Board Manual, Board of Commissioners member can be dismissed any time under General Meeting of Shareholders resolutions. Reason of the Board of Commissioners member dismissal is among others :

1. Not being capable to perform the duty appropriately;
2. Not complying with provisions of the law and/or Articles of Association,
3. Involved in action that caused loss to the Company and/or Country;
4. Implement any action that violates ethics and/or appropriateness that shall be respected as Board of Commissioners member;
5. Declared guilty under permanent legal force Court Sentence;
6. Submitted resignation.

Besides reason of Board of Commissioners members dismissal mentioned above, referring to Minister of SOEs Regulation number PER-02/MBU/02/2015, the Board of Commissioners member can be dismissed by the Minister as GMS based on other reasons that are considered appropriate by the Minister as GMS on behalf of the SOEs' interest and objectives, such as but not limited to:

1. Restructuring the Company;
2. Entering retirement age of Civil State Apparatus, for the Board of Commissioners/Supervisory Board assigned by Technical Ministry or other Government Institutions.

Terms of Board Of Commissioners Resignation

A member of Board of Commissioners is eligible to resign from his/her position by submitting written notification with regard to the intention to the Company with copy sent to the Shareholders, other Board of Commissioners and Board of Directors members, maximum 30 days prior the resigned date. If the resignation letter states effective resignation date is less than 30 days since the later is received, the letter is considered not mentioning the effective resignation date.

Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, yang dilandasi oleh suatu mekanisme hubungan kerja yang baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.
5. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
6. Hubungan kerja antara organ-organ di bawah Dewan Komisaris dengan organ-organ di bawah Direksi diatur berdasarkan kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan meningkatkan kesehatan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen bersama untuk melakukan tugas masing-masing sehingga dapat tercapai kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang, yang tercermin pada:

If until the date requested by respective Board of Commissioners member or within 30 days since the acceptance of resignation letter is received, in the case of not mentioning effective resignation date, there is no General Meeting of Shareholders resolutions, the Board of Commissioners member is automatically resigned on the requested date as mentioned above or after passing 30 days since the date of resignation letter accepted without requiring GMS approval.

Board of Commissioners and Board of Directors Working Relation

Board of Commissioners and Board of Directors working relation is based on basic principles, as follows:

1. Board of Commissioners respects duty and authority of the Board of Directors in managing the Company as regulated in the law and Articles of Association.
2. Board of Directors respects the duty and authority of the Board of Commissioners to supervise and provide advise the Company's managerial policy as regulated in the law and Articles of Association.
3. Every working relation between the Board of Commissioners and Board of Directors is a formal institutional relation based on standardized working relation mechanism or accountable correspondence.
4. Board of Commissioners has a right to acquire corporate information accurately, completely and on time.
5. Board of Directors is responsible on accuracy, completeness and punctuality of Company's information submission to the Board of Commissioners.
6. Working relation among structures under the Board of Commissioners with structures under the Board of Directors is based on agreement between Board of Commissioners and Board of Directors.
7. Working relation between Board of Commissioners and Board of Directors is check and balances relation with final purpose to develop and improve the Company's soundness index. The Board of Commissioners and Board of Directors have a shared commitment to carry out each duty and achieve the Company's long-term business sustainability as reflected from:

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

a. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal dan manajemen risiko. b. Tercapainya imbal hasil (<i>return</i>) yang optimal bagi Pemegang Saham. c. Terlindunginya kepentingan <i>stakeholders</i> secara wajar. d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi Perusahaan. e. Terpenuhinya pelaksanaan GCG di Perusahaan secara konsisten.	a. Good implementation of internal control and risk management. b. Optimum return for Shareholders. c. Fair protection on Stakeholders' interest. d. Implementation of fair leadership succession for the management's continuity in all organization lines of the Company. e. Fulfillment of GCG implementation in the Company consistently

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris tetap berpegang teguh pada tanggung jawabnya, dan semua fungsi ini dikoordinasikan oleh Komisaris Utama. Ketentuan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertanggungjawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Duty and Responsibility of Board of Commissioners

In carrying out its function, the Board of Commissioners upholds its responsibility and the entire functions are coordinated by President Commissioner.

Terms of the implementation of Board of Commissioners' duties and responsibilities are:

1. The Board of Commissioners is responsible for the implementation of supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the Company's interest in accordance with purpose and objective of the Company;
2. Every member of the Board of Commissioners is responsible personally for the Company's loss if the concerned is guilty or negligent in carrying out his/her duties;
3. In the event of the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members, responsibility as mentioned in point 2) prevails is carried out jointly and severally for each member of the Board of Commissioners;
4. Members of the Board of Commissioners cannot be accounted for on loss as mentioned on point 2 if they can prove that he/she:
 - a. Has carried out supervision with good will and prudence for the Company's interest and in accordance with purpose and objective of the Company;
 - b. Does not have personal interest, both directly and indirectly on management action of the Board of Directors that causes loss; and
 - c. Has advised the Board of Directors to prevent the occurrence or continuity of the loss.

Adapun tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
- Menyusun Program kerja Tahunan dan dimasukkan dalam RKAP.
- Membentuk Komite Audit.
- Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan Direksi.
- Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai RJPP dan RKAP.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dan Arahan RUPS dalam Pengesahan RKAP serta RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
- Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.
- Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
- Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

While the Board of Commissioners' responsibilities include:

- Provide advice to the Board of Directors in running the Company's management.
- Prepare Annual Work Program that is included in the Budget and Planning.
- Establish Audit Committee.
- Observe, review and sign the Corporate Long-Term Plan (RJPP) and the Corporate Work Plan & Budget (RKAP) as prepared by the Board of Directors.
- Provide recommendation and suggestion to the General Meetings of Shareholders with regard to RJPP and Budget and Planning.
- Supervise the implementation of GMS Resolutions and Directives on Budget and Planning legalization and GMS on Annual Report Approval.
- Follow the Company's activity progress; provide opinion and recommendation to the GMS concerning every issue that is considered necessary for the Company's management.
- Report immediately to the GMS if there is any indication of the Company's performance decrease.
- Observe and review periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the Annual Report.
- Submit supervisory duty report as done in recent fiscal year to the GMS.
- Provide explanation, opinion and suggestion to the GMS regarding the Annual Report, if requested.
- Submit Public Accountant Recommendation to the GMS.
- Perform other obligations in the event of the supervisory and advisory duties as long not violating the Law, Articles of Association and/or GMS resolutions.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Pembagian Lingkup Tugas Antar Anggota Dewan Komisaris**

Berdasarkan Berita Acara Dewan Komisaris Nomor: BA-01/PPA/KOM/0719 tanggal 29 Juli 2019, Dewan Komisaris membagi lingkup tugas fungsi pengawasan sebagai berikut:

EDY PUTRA IRAWADY**Komisaris Utama | (President Commissioner)****DIDYK CHOIROEL****Komisaris | (Commissioner)****Division of Scope of Duties Between Board of Commissioners Members**

Based on the Official Report of Board of Commissioners No: BA-01/PPA/KOM/0719 dated July 29, 2019, the Board of Commissioners divides the scope of supervisory functions as follows:

- Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan.
- Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi.
- Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
- Provide advice to the Board of Directors in running the Company's management.
- Observe and review and sign the Corporate Long-Term Plan and the Corporate Work and Budget Plan as prepared by the Board of Directors.
- Provide recommendation and suggestion to the General Meetings of Shareholders with regard to the Corporate Long-term Plan (RJPP) and the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) concerning reason of the Board of Commissioners in signing the RJPP and Budget and Planning
- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
- Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai laporan tahunan apabila diminta.
- Membentuk Komite Audit.
- Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
- Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Observe and review periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and Sign the Annual Report.
- Provide explanation, opinion and suggestion to the GMS regarding the Annual Report, if requested.
- Establish Audit Committee.
- Submit Public Accountant Recommendation to the GMS.
- Perform other obligations in the event of the supervisory and advisory duties as long not violating the law, Articles of Association and/or GMS resolutions.

TIRTA HIDAYAT
Komisaris Independen
(Independent Commissioner)



- Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada rapat umum pemegang saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
- Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
- Menyusun Program Kerja Tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan dan Arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Pengesahan RKAP serta RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan.
- Follow the Company's activity progress; provide opinion and recommendation to the general meetings of shareholders concerning every issue that is considered necessary for the Company's management.
- Report immediately to the General Meetings of Shareholders if there is any indication of the Company's performance decrease.
- Prepare Annual Work Program to be included in the Company's Work plan and budget
- Submit supervisory duty report as done in recent fiscal year to the General Meetings of Shareholders.
- Supervise implementation of General Meetings of Shareholders (GMS) Resolutions and Directives on Budget and Planning legalization and GMS on Annual Report Approval.

Di samping itu, berdasarkan surat keputusan yang sama, diantara anggota Dewan Komisaris dilakukan pembagian tugas pemantauan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris, sebagai berikut.

In addition, based on the same decree, the duties to monitor the achievement of Board of Commissioners' *Key Performance Indicators* (KPI) are divided among members of Board of Commissioners as follows.

No	KPI Dewan Komisaris Board of Commissioners KPI	Target	Person in Charge
1.	Aspek Pengawasan dan Pengarahan Supervisory and Advisory Aspect		
	<i>Review/analisis kinerja bulanan perusahaan</i> Review/analysis of the company's monthly performance	12x	Didyk Choirael
	Pemberian nasihat/saran kepada Direksi Advice/recommendation to the Board of Directors	12x	Edy Putra Irawady
	<i>Monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal</i> Monitoring follow-up on internal/external audit results/findings	6x	Didyk Choirael
	<i>Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil asesmen GCG</i> Monitoring follow-up on GCG assessment recommendations	2x	Tirta Hidayat
	<i>Monitoring Aset kelolaan atau perusahaan yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi oleh Perusahaan melalui kunjungan berkala</i> Monitoring of Assets under management of companies that are restructured and/or revitalized by the Company through periodic visit	3x	Didyk Choirael

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

No	KPI Dewan Komisaris Board of Commissioners KPI	Target	Person in Charge
2	Aspek Pelaporan Reporting Aspect		
	Penyusunan dan penyampaian Program kerja Tahunan Preparation and submission of the Annual work program	1x	Tirta Hidayat
	Penyampaian laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham/RUPS Submission of reports/opinions/suggestions to the Shareholders/GMS	7x	Tirta Hidayat
	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Submission of Supervisory Duty Report	4x	Tirta Hidayat
3	Aspek Dinamis dan Lain-Lain Dynamic and Other Aspects		
	Peningkatan kompetensi (masing-masing anggota Dewan Komisaris) Competency development (every member of Board of Commissioners)	1x	Edy Putra Irawady
	Penyusunan dan penyampaian rekomendasi atas RKAP/RJPP Preparation and submission of recommendations on Budget and Planning/RJPP	1x	Edy Putra Irawady

Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan *Board Manual*, Dewan Komisaris memiliki wewenang yang meliputi:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

Board of Commissioners Authorities

Based on the Board Manual, the Board of Commissioners is authorized to:

1. Peruse books, letters and other documents, examine the Company's cash for verification needs and other securities and inspect the Company's assets;
2. Enter into the Company's environment, building and offices;
3. Ask explanation from the Board of Directors and/or other executive official regarding all issues in the Company's management;
4. Understand all explanation and action that have been and will be carry out by the Board of Directors;
5. Ask the Board of Directors and/or other executive officials under the Board of Directors, with acknowledgement from the Board of Directors, to attend Board of Commissioners' meetings;
6. Appoint and dismiss the Secretary to the Board of Commissioners, if considered necessary;
7. Temporarily dismiss members of Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
8. Establish committees other than Audit Committee, if deemed necessary, by taking into account the Company's capacity;
9. Employ expert service for certain matters and within certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;
10. Perform the Company's management function in a certain condition and for certain period in accordance with the provisions in Articles of Association;

11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

11. Attend Board of Directors meetings and provide opinion on the matters discussed;
12. Conduct other supervisory authority as long as the authority does not violate the laws and regulations, Articles of Association and/or Resolutions of GMS;

Program Pengenalan Bagi Dewan Komisaris

Perusahaan memiliki kebijakan Program Pengenalan Dewan Komisaris yang diatur dalam *Board Manual*. Program pengenalan Dewan Komisaris ini diperuntukkan bagi Dewan Komisaris yang baru menjabat. Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Perusahaan ke depan, panduan kerja serta memberikan pengetahuan lebih kepada Dewan Komisaris baru terkait organisasi dan operasional Perusahaan. Dalam program pengenalan Dewan Komisaris ini pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan adalah Sekretaris Perusahaan.

Board Of Commissioners Orientation Program

The Company has a Board of Commissioners Orientation Policy as regulated in Board Manual. The Board of Commissioners orientation program is dedicated for Board of Commissioner who is newly appointed. This program aims to provide illustration on business activity, future corporate plan, working guideline as well as more knowledge to the new Board of Commissioners member related to the Company's organization and operations. In the Board of Commissioners orientation program, the person in charge is Corporate Secretary.

Materi yang disampaikan dalam Berita Acara Penyelenggaraan Pengenalan Perusahaan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Pemberian Anggaran Dasar, *Board Manual*, Pedoman GCG, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman WBS, Kode Etik Perusahaan, SK Direksi tentang pedoman dan penerapan GCG, Laporan Hasil Penilaian Penerapan GCG Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-Komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris;
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

The material presented in Minutes of Meeting of Company's Orientation Program to the Board of Directors that is signed directly by Corporate Secretary and Board of Commissioners, as follows:

1. Articles of Association, Board Manual, GCG Code, Risk Management Manual, WBS Manual, Code of Conducts, Board of Directors Decree on GCG Code and implementation, GCG Assessment report and Annual Report;
2. Illustration about the Company related to purpose, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plan, competitive position, risk and other strategic issues;
3. Implementation of GCG principles by the Company;
4. Explanation related to delegated authority, internal and external audits, internal control system and policy as well as duty and role of Audit Committee and other Committees established by the Board of Commissioners;
5. Explanation on Board of Commissioners and Board of Directors' duty and responsibility.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya.

Sepanjang tahun 2019, Pemegang Saham tidak melakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru. Dengan demikian program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru tidak dilaksanakan.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Program pengembangan kompetensi dimaksudkan sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung-jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan dan memberikan nasihat strategis kepada Direksi untuk kemajuan Perusahaan.

Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2019

- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris dan Realisasinya
Dalam rangka memenuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan sebagai acuan untuk pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris pada 2019, maka Dewan Komisaris telah menyusun RKA tahun 2019. RKA Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari usulan RKAP Perusahaan Tahun 2019 yang disampaikan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham sesuai surat Dewan Komisaris No. S-57/PPA/KOM/1018 tanggal 05 Oktober 2018 perihal Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2019.

RKA Dewan Komisaris telah disetujui oleh pemegang saham pada RUPS tertanggal 7 Januari 2019. RKA Dewan Komisaris memuat pembagian tugas Dewan Komisaris, prognosa program kerja Dewan Komisaris pada 2018, program kerja Dewan Komisaris pada 2019, anggaran biaya Dewan Komisaris serta program kerja Komite Dewan Komisaris.

The provided orientation program includes presentation, meeting or visit to the Company's facility or other programs.

Throughout 2019, the Shareholders did not appoint new member of Board of Commissioners. Thus the orientation program for new member of Board of Commissioners was not held.

Board of Commissioners Training and Competency Development

The competency development program is intended as a form of program to increase the insight and knowledge of Board of Commissioners in order to increase the ability to carry out its duties, functions and responsibilities in supervising the management of the Company and providing strategic advice to Board of Directors for the progress of the Company.

Regarding the list of training and competency development activities attended by the Board of Commissioners throughout 2019 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report.

Brief Description on Board of Commissioners' Duty Implementation in 2019

- Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA) and the realization
In order to meet the Company's Articles of Association and as a reference for carrying out Board of Commissioners' duties in 2019, the Board of Commissioners has prepared the 2019 RKA. The Board of Commissioners' RKA has been submitted to Shareholders as an inseparable part of the Company's 2019 Budget and Planning proposal submitted to Minister of SOEs as shareholder in accordance with the Board of Commissioners letter No. S-57/PPA/KOM/1018 dated October 5, 2018 concerning the Submission of Board of Commissioners' Work Plan and Budget for Fiscal Year 2019.

The Board of Commissioners' RKA has been approved by the shareholders at the GMS on January 7, 2019. The Board of Commissioners' RKA contains the division of duties of Board of Commissioners, Board of Commissioners' work program in 2018, Board of Commissioners' work program in 2019, Board of Commissioners' budget and Board of Commissioners' work program.

Dewan Komisaris telah melaporkan tugas pengawasan setiap bulan sebagaimana diatur dalam RUPS RKAP tahun 2019. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris sesuai dengan RKA Dewan Komisaris pada 2019 meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam rangka Pengawasan. Sesuai Anggaran Dasar, Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemberian persetujuan aksi korporasi, tanggapan/rekomendasi atas usulan aksi korporasi, serta saran dan nasihat dalam pengelolaan perusahaan.
3. Penyampaian rekomendasi/ usulan kepada Menteri BUMN selaku RUPS atau Deputi Kementerian BUMN dalam rangka permohonan persetujuan RUPS.
4. Penyampaian tanggapan laporan manajemen berkala. Pelaporan berkala wajib ditandatangani oleh Dewan Komisaris disertai dengan alasan atau tanggapan/ evaluasi/ rekomendasi terhadap penjelasan persetujuan penandatanganan pelaporan yang telah disampaikan Direksi.
5. Penyampaian rekomendasi keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan.
6. Penyampaian rekomendasi keputusan RUPS Persetujuan RKAP.
7. Penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku RUPS.
8. *Monitoring* tindak lanjut hasil rekomendasi / temuan konsultan/ auditor internal/ eksternal.

The Board of Commissioners has reported its supervisory duties every month as stipulated in the 2019 Budget and Planning GMS. Supervision activities carried out by the Board of Commissioners in accordance with the Board of Commissioners' RKA in 2019 include:

1. Holding the Board of Commissioners' Meetings for Supervisory. In accordance with the Articles of Association, the Board of Commissioners holds a meeting at least once a month and in that meeting the Board of Commissioners may invite the Board of Directors.
2. Granting approval of corporate actions, responses/recommendations on proposed corporate actions, as well as advice and suggestions regarding the management of the company.
3. Submitting recommendations/proposals to the Minister of SOEs as the GMS or the Deputy of Ministry of SOEs in the context of requesting GMS approval.
4. Submitting responses upon periodic management report. The periodic report must be signed by the Board of Commissioners accompanied by reasons or responses/ evaluations/recommendations on the explanation of the approval of reporting signatures that have been submitted by the Board of Directors.
5. Submitting recommendations upon the GMS resolution on the ratification of Annual Report.
6. Submitting recommendations upon the GMS Resolution on RUPS approval.
7. Submitting supervisory report of Board of Commissioners to the Minister of SOEs as the GMS.
8. Monitoring follow-up on the results of recommendations/findings of consultants/ internal/external auditors.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

- Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Tahun 2019
Fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris juga dilakukan melalui kunjungan kerja. Berikut disampaikan kunjungan kerja yang dilakukan di tahun 2019.
- Board of Commissioners' Work Visit in 2019
The supervisory function by Board of Commissioners is also carried out through work visits. The following is work visit carried out in 2019.

No	Aktivitas Activity	Tanggal Date
1	Kunjungan Dewan Komisaris ke PT Matoa Kidung Sejahtera dan PT Matoa Kidung Bahtera - Batam Board of Commissioners' visit to PT Matoa Kidung Sejahtera and PT Matoa Kidung Bahtera - Batam	18 – 20 Januari 2019 January 18-20, 2019
2	Kunjungan Dewan Komisaris ke Teluk Lamong Proyek PT Nindya Karya – Surabaya. Board of Commissioners' Visit to Lamong Bay Project of PT Nindya Karya Project - Surabaya	15 – 17 Oktober 2019 October 15-17, 2019
3	Kunjungan Dewan Komisaris ke Pabrik PT Magnesium Gosari Internasional – Surabaya. Board of Commissioners' Visit to PT Magnesium Gosari Internasional Factory - Surabaya	15 – 17 Oktober 2019 October 15-17, 2019

- Keputusan, Tanggapan dan Persetujuan Dewan Komisaris
Di sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah memberikan keputusan yang bersifat pengawasan atas pengelolaan usaha Perusahaan.
- Board of Commissioners Decree, Opinion and Approval
Throughout 2019, the Board of Commissioners has provided resolutions related to supervisory and advisory aspect on the Company's business management.

Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2019
Board of Commissioners' Decree in 2019

No	Nomor Keputusan Number of Decree	Perihal Subject
1.	No. 1/KEP.KOM/PPA/II/2019 Number: 1/KEP.KOM/PPA/II/2019	Penunjukan Pelaksanaan Tugas Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Appointment of Assignment of Acting Business Advisory and Asset Management of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.
2.	No. 2/KEP.KOM/PPA/V/2019 Number: 2/KEP.KOM/PPA/V/ 2019	Penunjukan Pelaksanaan Tugas Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Appointment of Assignment of Acting President Director and Acting Finance and Support Director of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

Selain pengawasan dan arahan yang bersifat rutin, selama 2019 Dewan Komisaris juga telah memberikan persetujuan dan tanggapan yang perlu menjadi perhatian Direksi.

In addition to routine supervision and direction, in 2019 the Board of Commissioners also provided approval and responses that needed the attention of the Board of Directors.

Tanggapan dan Persetujuan Dewan Komisaris Tahun 2019
Tanggapan dan Persetujuan Dewan Komisaris Tahun 2019

No	Tanggal Date	Perihal Subject
	27 Februari 2019 February 27, 2019	Progres Audit Laporan Keuangan PT PPA Konsolidasian Tahun Buku 2018 Audit Progress of PT PPA Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2018
	27 Februari 2019 February 27, 2019	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT PPA Tahun Buku 2018 (Unaudited). Board of Commissioners' response to PT PPA 2018 Management Report (Unaudited).

Tanggapan dan Persetujuan Dewan Komisaris Tahun 2019

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ■■■■■■ 2019 Annual Report

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURETanggapan dan Persetujuan Dewan Komisaris Tahun 2019
Tanggapan dan Persetujuan Dewan Komisaris Tahun 2019

No	Tanggal Date	Perihal Subject
	28 Agustus 2019 August 28, 2019	Penguatan Peran Fungsi Satuan Intern ("SPI") PT PPA Strengthening the role of PT PPA's Internal Unit ("SPI") function
	11 September 2019 September 11, 2019	Persetujuan dan Rekomendasi Usulan Penerbitan Utang termasuk Pelaksanaan Audit Interim Approval and Recommendation of Debt Issuance Proposal including Interim Audit Implementation
	13 September 2019 September 13, 2019	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PT PPA Tahun 2019 Board of Commissioners' response to the Proposed Changes in PT PPA's 2019 Work Plan and Budget
	30 September 2019 September 30, 2019	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") PT PPA Tahun 2019-2023 Board of Commissioners' Response to the Proposed Changes to PT PPA's 2019-2023 Long-Term Plan ("RJPP")
	14 Oktober 2019 October 14, 2019	Tanggapan Permohonan Persetujuan Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PPA Finance dan PT PPA Kapital Response to Request for Approval to Changes of Board of Directors and Board of Commissioners Members of PT PPA Finance and PT PPA Kapital
	16 Oktober 2019 October 16, 2019	Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik untuk Audit Umum atas Laporan Keuangan Determination of Public Accounting Firm Honorarium for General Audit of Financial Statements
	18 Oktober 2019 October 18, 2019	Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 Submission of the Board of Commissioners' Work Plan and Budgets for Fiscal Year 2020
	06 November 2019 November 6, 2019	Pendapat dan Saran atas RKAP PT PPA Tahun Buku 2020 Opinions and Suggestions for PT PPA's Budget and Planning for Fiscal Year 2020
	11 November 2019 November 11, 2019	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen TW III Tahun 2019 Board of Commissioners' Response to Management Report of 3rd Quarter of 2019
	05 Desember 2019 December 5, 2019	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Pemberian Tambahan Pinjaman untuk PT Industri gelas (Persero) sebesar Rp10 miliar Board of Commissioners' response to the Proposed Provision of Loans for PT Industri Gelas (Persero) in the amount of Rp10 billion
	05 Desember 2019 December 5, 2019	Rekomendasi Keputusan RUPS Persetujuan/Pengesahan RKAP serta Usulan Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan dan Rekomendasi Persetujuan Penerbitan Surat Utang Obligasi Berseri PT PPA Tahun Buku 2020 Recommendations for GMS Resolution on Budget and Planning Approval/Ratification and Proposed Soundness Index Assessment Indicators and Recommendations for Approval of the Issuance of PT PPA Series Bonds of Fiscal Year 2020
	09 Desember 2019 December 9, 2019	Penunjukan Penilai GCG Independen Tahun Buku 2019 Appointment of Independent GCG Assessor for Fiscal Year 2019

Penilaian Kinerja Organ dan Komite Pendukung di Bawah Dewan Komisaris

Penilaian kinerja organ dan komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu kepada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/IX/2015 tentang Indikator Metode Evaluasi Kinerja Tahunan Komite Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam RKA tahunan, saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Dewan Komisaris serta tingkat kehadiran rapat.

Hasil penilaian sebagai berikut.

1. Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat kesekretariatan dan komite Dewan Komisaris, penguasaan penugasan dan penyelesaian administrasi korespondensi, keleluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perusahaan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perusahaan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris mencapai 99,38% dengan kriteria Sangat Baik.

2. Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan/atau gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat komite dan/atau kesekretariatan Dewan Komisaris, penguasaan penugasan dan penyelesaian evaluasi audit/ bisnis laporan keuangan/ kajian aksi korporasi, keleluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Sekretaris dan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perusahaan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perusahaan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Komite Audit Dewan Komisaris mencapai 99,20% dengan kriteria Sangat Baik.

Performance Assessment of Supporting Organs and Committees Under Board of Commissioners

The performance assessment of organs and committees under the Board of Commissioners is carried out by referring to the Decree of Board of Commissioners No. PER-01/KOM/PPA/IX/2015 concerning Indicators of the Annual Performance Assessment Method of Committees of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. The performance assessment of Board of Commissioners' Committees is based on the realization and completion of the work program that has been included in the annual RKA, suggestions, recommendations and input provided by the Board of Commissioners' Committee as well as meeting attendance.

The assessment results are as follows.

1. Performance Assessment of Secretary of Board of Commissioners

Assessment is done through recapitulation and attendance at internal and joint meetings of Board of Commissioners, meetings of secretariat and committees of Board of Commissioners, mastery of assignment and administrative correspondence completion, work time flexibility, solid coordination with Board of Commissioners Committee, compliance and loyalty to the development of the Company, as well as the contribution of other activities in order to assist the supervisory duty by Board of Commissioners. The performance achievement of Secretary of Board of Commissioners was realized at 99.38% with Very Good criteria.

2. Performance Assessment of Audit Committee

Assessment is done through recapitulation and attendance at internal and/or joint meetings of Board of Commissioners, meetings of committee and/or secretariat of Board of Commissioners, mastery of assignments and completion of evaluation on audit/business, financial statements, corporate action review, work time flexibility, solid coordination with Secretary and Committees of Board of Commissioners, compliance and loyalty to the development of the Company, as well as the contribution of other activities in order to assist the supervisory duty of Board of Commissioners. The Board of Commissioners' Audit Committee achievement performance was realized at 99.20% with Very Good criteria.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

3. Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan/atau gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat komite dan/atau kesekretariatan Dewan Komisaris, penguasaan penugasan dan penyelesaian evaluasi GCG/ risiko/ kepatuhan laporan manajemen/ kajian aksi korporasi, keleluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Sekretaris dan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/ kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perusahaan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perusahaan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG Dewan Komisaris mencapai 98,40% dengan kriteria Sangat Baik.

3. Performance Assessment of Risk Oversight and GCG Committee

Assessment is done through recapitulation and attendance at internal and/or joint meetings of Board of Commissioners, meetings of committees and/or secretariat of Board of Commissioners, mastery of assignment and completion of evaluation on GCG/ risks/compliance of management reports/review of corporate actions, work time flexibility, solid coordination with Secretary and Committees of Board of Commissioners, compliance and loyalty to the development of the Company, as well as the contribution of other activities in order to assist the supervisory duty by Board of Commissioners. The Board of Commissioners' Risk Oversight and GCG Committee performance achievement was realized at 98.40% with Very Good criteria.

KOMISARIS INDEPENDEN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen serta menjaga "*fairness*". Komisaris Independen diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas termasuk pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Referring to SOEs Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, Independent Commissioners are members of Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and/or family relations with other members of Board of Commissioners others, members of Board of Directors and/or controlling shareholders or relations with the SOEs concerned, which can affect their ability to act independently.

The existence of Independent Commissioner is intended to create a more objective and independent climate as well as to maintain fairness. Independent Commissioners are expected to be able to provide a balance between the interests of majority shareholders and protection of the interests of minority shareholders including public shareholders and other stakeholders.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Di akhir tahun 2019, Perusahaan memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, atau 33,33% dari keseluruhan jumlah Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan demikian, komposisi ini telah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.

Composition and Membership of Independent Commissioners in the Company's Board of Commissioners Composition

In accordance with SOEs Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/2011, the composition of Independent Commissioner is at least 20% of the total members of Board of Commissioners. At the end of 2019, the Company has 1 (one) Independent Commissioner, or 33.33% of the total Board of Commissioners of 3 (three) persons. Therefore, this composition is in accordance with the provisions and/or regulations in force.

Komisaris Independen per 31 Desember 2019
Independent Commissioner as of December 31, 2019

Komisaris Independen Independent Commissioner	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure
Tirta Hidayat	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-104/MBU/06/2017 tertanggal 5 Juni 2017 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-104/MBU/06/2017 dated June 5, 2017	5 Juni 2017 - RUPS Tahun 2022, Periode ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan) June 5, 2017 – 2022 GMS, 1st Period (previously never served in the Company's Board of Commissioners)

Komposisi Komisaris Independen Perusahaan terhadap jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebesar 33,33%, dan telah memenuhi Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan, yakni paling kurang 20% dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris.

The composition of the Company's Independent Commissioner to the total number of members of Board of Commissioners is 33.33%, and has fulfilled the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the number of members of the Company's Board of Commissioners, which is at least 20% of the total number of the Board of Commissioners.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Kriteria Penentuan dan Pemenuhan Independensi Komisaris Independen**

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut disampaikan kriteria dan pemenuhan independensi Komisaris Independen Perusahaan.

Criteria for Determination and Fulfillment of Independency of Independent Commissioner

Independent Commissioners in the Company are intended to always ensure that the supervision mechanism runs effectively and in accordance with statutory regulations. Following are the criteria and fulfillment of independency of the Company's Independent Commissioners.

Kriteria Independensi Independency Criteria	Tirta Hidayat
Merupakan anggota Manajemen Perusahaan Is a member of Company Management	x
Terikat dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Has business affiliation and other affiliations that may influence decision making.	x
Sebagai pemegang Saham mayoritas Perusahaan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan. As the majority shareholder of the Company or an employee who is directly related to the majority shareholder of the Company.	x
Sebagai pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota Perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. As an employee or working as executive at the Company or a member of an affiliated Company, at least 3 (three) years prior appointed as a member of Board of Commissioners.	x
Sebagai penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. As a professional main advisor or consultant who is material for the Company or affiliated company, or employee who is directly engaged with service providers, at least 3 (three) years prior appointed as a member of Board of Commissioners.	x
Sebagai pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama. As a main supplier or customer of the Company or an affiliated company or employee from/or directly or indirectly engaged with main supplier or customer.	x

v = ada | x = tidak ada | v = yes | x = no

Surat Pernyataan Independen

Independensi Komisaris

Statement of Independency of Independent Commissioner

 **PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**
State-owned Asset Management Company

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tirta Hidayat
No. Identitas : 3171040903500001
Jabatan : Komisaris Independen PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

dengan ini menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini:

- Tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri.
- Tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan Tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana.
- Tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial.
- Tidak terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- Tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak.
- Tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit, berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya.
- Tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan.
- Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2019

Yang memberi pernyataan,




Nama : Tirta Hidayat
Jabatan : Komisaris Independen

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan Perusahaan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, anggaran dan *master plan*, Rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penanganan risiko usaha sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan serta memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha. Setiap anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is Company's Organ with collective duty and responsibility to perform the Company's management as well as perform GCG in all organization levels or lines.

Board of Directors is responsible in preparing and implementing business strategy and policy, budget and master plan, Corporate Long-Term Plan (RJPP) and Corporate Work Plan and Budget (RKAP), business risk mitigation according to the Company's Vision and Mission as well as ensure achievement of business target and goals. Every Board of Directors member is eligible to perform the duty and decision-making based on the division of duty and authority.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Board Manual: Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi**

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris dan Direksi berpedoman pada *Board Manual*. *Board Manual* tersebut berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten untuk menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar prinsip GCG untuk mencapai visi misi Perusahaan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari Pemegang Saham serta praktik terbaik GCG.

Tujuan *Board Manual* adalah untuk mempermudah Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Berbagai hal yang diatur dalam *Board Manual* di antaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan wewenang Direksi
3. Kewajiban Direksi
4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
5. Etika jabatan
6. Pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan oleh Direksi
7. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Direksi
8. Rapat Direksi
9. Organ Penunjang Direksi:
 - Divisi Satuan Pengawasan Intern
 - Sekretaris Perusahaan
10. Hubungan dengan Entitas Anak
11. Benturan kepentingan

Di samping itu, Direksi dalam melaksanakan tugasnya juga mengacu pada Pedoman Kerja Direksi yang telah ditetapkan dalam keputusan Direksi No. SK-58/PPA/1215 tanggal 10 Desember 2015 yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Rapat Direksi
3. Keputusan di Luar Rapat Direksi
4. Komunikasi Hasil keputusan Direksi
5. Ketentuan Lain-Lain
6. Ketentuan Penutup

Board Manual: Guidelines and Work Order of Board of Directors

In carrying out the duties, Board of Commissioners and Board of Directors refer to Board Manual. The Board Manual discloses guideline on the Board of Commissioners and Board of Directors working procedure and explains the activity stages in a well-structured, systematic, easy to be understood and practicable ways consistently as reference for the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their duties according to GCG principle standard to achieve the Company's vision mission.

Board Manual is drafted based on corporate law principle, Articles of Association, prevailing law, Shareholders aspiration and GCG best practice.

The purpose of Board Manual is to ease Board of Commissioners and Board of Directors in understanding regulation related to Board of Commissioners and Board of Directors working mechanism. Provisions that are regulated in the Board Manual are among others:

1. General Provision on Board of Directors Member Position.
2. Board of Directors duty and authority.
3. Board of Directors obligation.
4. Board of Directors members duty and authority division.
5. Position Ethics.
6. Implementation of Company's managerial duties by the Board of Directors.
7. Board of Directors decision making principles.
8. Board of Directors Meeting.
9. Board of Directors Supporting Structure:
 - Internal Audit Division
 - Corporate Secretary
10. Relationship with Subsidiaries
11. Conflict of Interest

In addition, in carrying out the duties, the Board of Directors also refers to Board Manual for Board of Directors as stipulated in Board of Directors Decree no. SK-58/PPA/1215 dated December 10, 2015 disclosing provisions, as follows:

1. General Provision.
2. Board of Directors Meeting.
3. Decisions taken outside Board of Directors Meeting
4. Communication of Board of Directors Resolutions.
5. Other Provisions.
6. Closing Provisions

Suksepsi: Nominasi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui RUPS sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan Direksi dilakukan jika persyaratan formal, lainnya dan materiil sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tentang suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam bab ini.

Ketentuan Masa Jabatan

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Direksi Tahun 2019

Komposisi Direksi Perusahaan harus sedemikian rupa disesuaikan dengan besarnya kegiatan kompleksitas bisnis Perusahaan dan struktur organisasi sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan Perusahaan.

Di tahun 2019 Pemegang Saham memutuskan untuk melakukan pergantian susunan Direksi, sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 April 2019, Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Andi Saddawero, diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya yang telah usai. Dikdik Permadi Yoffana diangkat sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen yang baru. Pergantian ini sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-76/MBU/04/2019 tertanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset,

Succession: Nomination, Appointment and Dismissal of Board of Directors

The appointment and dismissal of Board of Directors members is carried out through the GMS in accordance with applicable laws and regulations as well as the articles of association and Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Board of Directors Members of State-Owned Enterprises. Appointment of Directors is carried out if formal, other and material requirements are in accordance with existing provisions.

Further details about the succession of Board of Directors can be seen in the Nomination and Remuneration Functions section of this chapter.

Terms of Tenure

In accordance with the Company's Articles of Association, the tenure of Board of Directors members is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.

Number, Composition and Structure of Board of Directors in 2019

The composition of the Company's Board of Directors must be adjusted in accordance with the magnitude of the Company's business complexity activities and organizational structure so as to enable effective, precise and prompt decision making in order to achieve the Company's goals.

In 2019, the Shareholders decided to change the Board of Directors composition, as follows:

- On April 1, 2019, Business Advisory and Asset Management Director Andi Saddawero, was honorably dismissed due to the end of his tenure. Permadi Dikdik Yoffana was appointed as the new Business Advisory and Asset Management Director. This change was in accordance with the Decree of Minister of SOEs as the GMS of PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-76/MBU/04/2019 dated April 1, 2019 concerning Dismissal and Appointment of Board of Directors Members of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset,

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

- Pada tanggal 23 Juli 2019, Direktur Utama Henry Sihotang, dan Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Ajar Setiadi, diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya yang telah usai. Iman Rachman diangkat sebagai Direktur Utama yang baru, sedangkan R. Muhammad Irwan diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja yang baru. Pergantian ini sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-159/MBU/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.
- On July 23, 2019, President Director Henry Sihotang, and Finance and Support Director Ajar Setiadi, were honorably dismissed due to the end of their term. Iman Rachman was appointed as the new President Director, while R. Muhammad Irwan was appointed as the new Finance and Support Director. This change was in accordance with the Decree of Minister of SOEs as the GMS of Limited Liability Company (Persero) PT. Perusahaan Pengelola Aset No. SK-159/MBU/07/2019 dated July 23, 2019 concerning Dismissal and Appointment of Board of Directors Members of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

Berikut disampaikan kronologi susunan Direksi di sepanjang tahun 2019 dan susunan Direksi per 31 Desember 2019.

The following is a chronology of Board of Directors composition throughout 2019 and Board of Directors composition as at December 31, 2019.

Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2019

Chronology of Changes in Board of Directors Composition in 2019

Periode 1 Januari - 1 April 2019 Period of January 1 – April 1, 2019	Periode 1 April - 22 Mei 2019 Period of April 1 – May 22, 2019	Periode 22 Mei - 23 Juli 2019 Period of May 22 – July 23, 2019	Periode 23 Juli - 31 Desember 2019 Period of July 23 – December 31, 2019	Keterangan Remark
Henry Sihotang (Direktur Utama) Henry Sihotang (President Director)	Henry Sihotang (Direktur Utama) Henry Sihotang (President Director)			Henry Sihotang tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 23 Juli 2019 karena masa jabatannya yang telah usai. Henry Sihotang no longer served as President Director since July 23, 2019 because his term had ended.
Andi Saddawero (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) (Business Advisory and Asset Management Director)				Andi Saddawero tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 1 April 2019 karena masa jabatannya yang telah usai. Andi Saddawero no longer served as Director since April 1, 2019 because his term of office has ended.

Periode 1 Januari - 1 April 2019 Period of January 1 – April 1, 2019	Periode 1 April - 22 Mei 2019 Period of April 1 – May 22, 2019	Periode 22 Mei - 23 Juli 2019 Period of May 22 – July 23, 2019	Periode 23 Juli - 31 Desember 2019 Period of July 23 – December 31, 2019	Keterangan Remark
Ajar Setiadi (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) Ajar Setiadi (Finance and Support Director)	Ajar Setiadi (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) Ajar Setiadi (Finance and Support Director)			Ajar Setiadi tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 23 Juli 2019 karena masa jabatannya yang telah usai. Ajar Setiadi no longer served as Director since July 23, 2019 because his term of office has ended.
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) Nasrizal Nazir (Investment Director)	Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) Nasrizal Nazir (Investment Director)	Nasrizal Nazir (Direktur Investasi dan Plt. Direktur Utama) Nasrizal Nazir (Investment Director and Acting President Director)	Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) Nasrizal Nazir (Investment Director)	-
	Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director)	Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen dan Plt. Direktur Keuangan & Dukungan Kerja) Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director and Acting Finance and Support Director)	Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director)	Dikdik Permadi Yoffana menjabat sejak 1 April 2019 Dikdik Permadi Yoffana has served as Director since April 1, 2019
			Iman Rachman (Direktur Utama) Iman Rachman (President Director)	Iman Rachman menjabat sejak 23 Juli 2019 Iman Rachman has served as President Director since July 23, 2019
			R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) R. Muhammad Irwan (Finance and Support Director)	R. Muhammad Irwan menjabat sejak 23 Juli 2019 R. Muhammad Irwan has served as Director since July 23, 2019

Susunan Direksi per 31 Desember 2019

Board of Directors Composition as of December 31, 2019

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Iman Rachman	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-159/MBU/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-159/MBU/07/2019 dated July 23, 2019	23 Juli 2019 - RUPS Tahun 2024 July 23, 2019 – 2024 GMS	Ke-1 1 st

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURESusunan Direksi per 31 Desember 2019
Board of Directors Composition as of December 31, 2019

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Nasrizal Nazir	Direktur Investasi Investment Director	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-14/MBU/01/2018 tertanggal 16 Januari 2018 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-14/MBU/01/2018 dated January 16, 2018	16 Januari 2018 - RUPS Tahun 2023 January 16, 2018 – 2023 GMS	Ke-1 1 st
Dikdik Permadi Yoffana	Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen Advisory and Asset Management Director	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-76/MBU/01/2019 tertanggal 1 April 2019 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-76/MBU/01/2019 dated April 1, 2019	1 April 2019 - RUPS Tahun 2024 April 1, 2019 – 2024 GMS	Ke-1 1 st
R. Muhammad Irwan	Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Finance and Support Director	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-159/MBU/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-159/MBU/07/2019 dated July 23, 2019	23 Juli 2019 - RUPS Tahun 2024 July 23, 2019 – 2024 GMS	Ke-1 1 st

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profiles of all Board of Directors can be seen in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan

Direksi dalam menjalankan segala tindakan kepengurusan Perusahaan atau hubungan dengan pihak lain harus bersifat independen tanpa campur tangan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, antar anggota Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus keatas maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Statement of Independency and Conflict of Interest Potential

In carrying out every managerial activity in the Company or relationship with other parties, the Board of Directors shall be independent without intervention from any party or violating the law and Articles of Association of the Company that has material potential to interfere objectiveness and independency of the Board of Directors' duties that are implemented solely for the Company's interest. Pursuant to the Company's Articles of Association, among the Board of Directors members and between the Board of Directors and Board of Commissioners members are prohibited to have family affiliations until third degree both vertically and horizontally including relationship by marriage.

Tugas Direksi

Berdasarkan Pedoman kerja Direksi disebutkan bahwa Direksi bertugas untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan, dimana anggota Direksi tetap harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Board of Directors Duties

Pursuant to Board Manual for Board of Directors, duties of the Board of Directors are to carry out all actions related to management of the Company for the interest of the Company and to represent the Company, both in and out of the court on all matters and events with limitations as regulated in the laws and regulations, Articles of Association and/or Resolutions of General Meeting of Shareholders.

In conducting its duties, the Board of Directors shall devote its energy, thought, attention, and dedication entirely to duties, responsibilities, and achievement of objectives of the Company in which all members of the Board of Directors shall comply with the Company's Articles of Association and the laws and regulations, and shall implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, and fairness.

Each member of Board of Directors shall implement its duties responsibly and good faith for the interest and business of the Company by complying with the prevailing laws and regulations.

Every Board of Directors member is personally responsible if the concerned is guilty or negligent in carrying out its duties for interest and business of the Company, unless the concerned can prove that:

1. The loss is not caused by his/her negligence;
2. He/she has carry out the management with good faith and prudence for the Company's interest and in accordance with purpose and objective of the Company;
3. Not having conflict of interest, both directly and indirectly on management action which cause loss; and
4. Has taken actions to prevent the occurrence or continuity of the loss.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURETugas dan Wewenang Direksi
Board of Directors Duties and Authorities

I DIREKTUR UTAMA	PRESIDENT DIRECTOR
1. Menetapkan arah dan strategi Perusahaan bersama-sama dengan Direksi untuk memastikan pencapaian visi dan misi Perusahaan; 2. Merencanakan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan sesuai dengan visi dan misi Perusahaan; 3. Menetapkan peraturan dan kebijakan Perusahaan; 4. Mengkomunikasikan rencana jangka panjang, jangka pendek, arah serta strategi Perusahaan kepada seluruh jajaran; 5. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target Perusahaan; 6. Menciptakan peluang bisnis bagi Perusahaan; 7. Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan Sekretariat Perusahaan termasuk kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Satuan Pengawasan Intern dan Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi; 8. Bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance); 9. Bertanggung jawab terhadap implementasi asesmen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU); 10. Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai pencapaian target dan kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris; 11. Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan; 12. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan dan monitoring kinerja entitas anak.	1. Determine the Company's directions and strategies together with Board of Directors to ensure the achievement of the Company's vision and mission; 2. Plan, determine and evaluate the Company's long-term and short-term plan in accordance with the Company's vision and mission; 3. Establish Company regulations and policies; 4. Communicating the Company's long-term, short-term plan, directions and strategies to all levels; 5. Coordinating, directing and overseeing the activity implementation and target achievement of the Company; 6. Creating business opportunities for the Company; 7. Develop, determine and evaluate long-term and short-term plan for the activities of Corporate Secretariat including the activities of Partnership and Community Development Program, Internal Audit Unit and Corporate Strategic Planning and Performance Management in accordance with the direction and strategy of the Company determined by the Board of Directors; 8. Responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance; 9. Responsible for the implementation of Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU); 10. Approve and submit reports on the Company's target achievement and performance to the Shareholders and Board of Commissioners; 11. Ensuring the implementation of coaching and development of human capital in accordance with the direction and strategy of the Company; 12. Representing the Company in fostering and monitoring the performance of subsidiaries.
II DIREKTUR INVESTASI	INVESTMENT DIRECTOR
1. Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan investasi, jasa konsultasi dan pengelolaan aset sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi; 2. Menyetujui dan mengusulkan kebijakan terkait dengan kegiatan investasi, jasa konsultasi dan pengelolaan aset; 3. Mengkomunikasikan strategi pelaksanaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan di lingkungan Direktorat Investasi kepada seluruh jajarannya; 4. Menciptakan dan berdasarkan persetujuan Direktur Utama mengeksekusi peluang investasi, jasa konsultasi dan pengelolaan aset sesuai dengan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan; 5. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Investasi; 6. Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan Direktorat Investasi kepada Direktur Utama dan/atau Direksi; 7. Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Direktorat Investasi sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan; 8. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja entitas anak.	1. Develop, determine and evaluate long-term and short-term plan for investment activities, advisory services and asset management in accordance with the direction and strategy of the Company determined by the Board of Directors; 2. Approve and propose policies related to investment, advisory services and asset management activities; 3. Communicating the implementation strategy of long-term and short-term plan that have been determined in the Investment Directorate to all levels; 4. Create and, based on the approval of President Director, execute opportunities related to investment, asset management, and advisory services in accordance with the established Company strategies; 5. Coordinate, direct, supervise and evaluate the implementation of activities within the Investment Directorate; 6. Approve and submit reports on the activities of Investment Directorate to President Director and/or Board of Directors; 7. Ensuring the implementation of coaching and development of human capital at the Investment Directorate in accordance with the direction and strategy of the Company; 8. Representing the Company in fostering the performance of subsidiaries.

Tugas dan Wewenang Direksi
Board of Directors Duties and Authorities

III DIREKTUR KONSULTASI BISNIS DAN ASET MANAJEMEN	BUSINESS ADVISORY AND ASSET MANAGEMENT DIRECTOR
1. Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset, jasa konsultasi dan investasi sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi; 2. Menyetujui dan mengusulkan kebijakan terkait dengan kegiatan restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset, jasa konsultasi dan investasi; 3. Mengkomunikasikan strategi pelaksanaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan di lingkungan Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen kepada seluruh jajarannya 4. Menciptakan dan berdasarkan persetujuan Direktur Utama mengeksekusi peluang restrukturisasi/ revitalisasi BUMN, pengelolaan aset jasa konsultasi dan investasi sesuai dengan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan; 5. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen dalam rangka mendukung pencapaian target Perusahaan; 6. Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen kepada Direktur Utama dan/atau Direksi; 7. Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan; 8. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja entitas anak.	1. Develop, determine and evaluate long-term and short-term plan for SOEs restructuring/revitalization, asset management, advisory and investment services activities in accordance with the direction and strategy of the Company determined by the Board of Directors; 2. Approve and propose policies related to SOEs restructuring/ revitalization, asset management, advisory and investment services activities; 3. Communicating the implementation strategy of long-term and short-term plan that have been determined in the Business Advisory and Asset Management Directorate to all levels 4. Creating, and based on the approval of President Director, execute opportunities related to SOEs restructuring/ revitalization, management of consultancy services and investment services in accordance with the established corporate strategy; 5. Coordinate, direct, supervise and evaluate the implementation of activities within the Business Advisory and Asset Management Directorate in order to support the achievement of the Company's targets; 6. Approve and submit reports on the activities of the Business Advisory and Asset Management Directorate to President Director and/or Board of Directors; 7. Ensuring the implementation of coaching and development of human capital the Business Advisory and Asset Management Directorate in accordance with the direction and strategy of the Company; 8. Representing the Company in fostering the performance of subsidiaries.
IV DIREKTUR KEUANGAN DAN DUKUNGAN KERJA	FINANCE AND SUPPORT DIRECTOR
1. Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan pengelolaan dana Perusahaan, sistem keuangan dan akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia dan umum, pengadaan barang dan jasa, penyediaan sarana dan prasarana operasional kantor, teknologi informasi dan operasi bisnis, manajemen risiko dan hukum sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi; 2. Menyetujui dan mengusulkan kebijakan tentang pengelolaan dana Perusahaan, sistem keuangan dan akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia dan umum, pengadaan barang dan jasa, penyediaan sarana dan prasarana operasional kantor, teknologi informasi dan operasi bisnis, manajemen risiko dan hukum; 3. Mengkomunikasikan strategi pelaksanaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan di lingkungan Direktorat Keuangan dan Dukungan Kerja kepada seluruh jajarannya 4. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Keuangan dan Dukungan Kerja dalam rangka mendukung pencapaian target Perusahaan; 5. Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan Direktorat Keuangan dan Dukungan Kerja kepada Direktur Utama dan/atau Direksi; 6. Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Direktorat Keuangan dan Dukungan Kerja sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan; 7. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja entitas anak.	1. Develop, establish and evaluate long-term and short-term plan for the management of the Company's funds, financial and accounting systems, human capital management and general affairs, procurement of goods and services, provision of office operational facilities and infrastructure, information technology and business operations, risk management and legal in accordance with the direction and strategy of the Company determined by the Board of Directors; 2. Approve and propose policies regarding the management of the Company's funds, financial and accounting systems, human capital management and general affairs, procurement of goods and services, provision of office operational facilities and infrastructure, information technology and business operations, risk management and legal; 3. Communicating the implementation strategy of long-term and short-term plan that have been determined in the Finance and Support Directorate to all levels 4. Coordinate, supervise and evaluate the implementation of activities within the Finance and Support Directorate in order to support the achievement of the Company's targets; 5. Approve and submit reports on the activities of Finance and Support Directorate to President Director and/or Board of Directors; 6. Ensuring the implementation of coaching and development of human capital at the Finance and Support Directorate in accordance with the direction and strategy of the Company; 7. Representing the Company in fostering the performance of subsidiaries.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Pendelegasian Wewenang**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perusahaan, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.

Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

Pembagian Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan, Direksi telah melakukan pembagian tugas berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-55/PPA/0919 tertanggal 11 September 2019 tentang Penetapan Jabatan dan Pembagian Tugas serta Wewenang Anggota Direksi.

Delegation of Authority

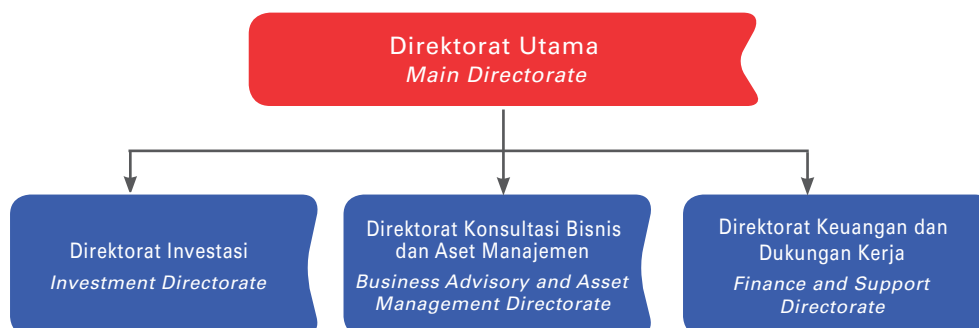
In order to implement management policy of the Company, if does not stated otherwise by the Board of Directors, the President Director is entitled and authorized to act and on behalf of the Board of Directors as well as to represent the Company with provision that all of the said actions of the President Director have been approved by the Board of Directors meeting.

In the event of the President Director is absent or unavailable due to any reason whatsoever, then the Board of Director member with the longest tenure is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carries out duties of the President Director. If the President Director or Board of Director member with the longest tenure is absent or unavailable due to any reason whatsoever, then one of Director appointed by the President Director is authorized to act on behalf of the Board of Directors.

In the event of a member of the Board of Directors aside from the President Director is absent due to any reason whatsoever, of which it is not necessary to be proven to third party, then other members of the Board of Directors appoint a member of the Board of Directors to carry out duties of the absent Board of Directors.

Distribution of Duties and Responsibilities of Board of Directors

In carrying out its management function, the Board of Directors has carried out the division of duties based on the Decree of Board of Directors No. SK-55/PPA/0919 dated September 11, 2019 concerning the Determination of Position and Division of Duties and Authorities of Board of Directors.



Pembagian tugas Direksi Perusahaan yang masing-masing membawahi 4 (empat) fungsi direktorat, adalah sebagai berikut:

The division of duties of the Company's Directors, each of which oversees 4 (four) directorate functions, is as follows:

IMAN RACHMAN

Direktur Utama | (President Director)



- Merencanakan, menetapkan, mengarahkan, mengkomunikasikan, mengevaluasi arah dan strategi Perusahaan serta memimpin jalannya Perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Perusahaan.
- Mewakili Perusahaan dalam pembinaan dan *monitoring* kinerja Entitas Anak.
- Planning, determining, directing, communicating, evaluating directives and strategies of the Company, as well as leading the course of the Company in order to achieve the vision and mission of the Company.
- Represent the Company in subsidiaries development and performance monitoring.

NASRIZAL NAZIR

Direktur Investasi | (Investment Director)



- Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengkomunikasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Investasi, Jasa Konsultansi dan Pengelolaan Aset sesuai dengan target dan strategi Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan.
- Mewakili Perusahaan dalam pembinaan dan *monitoring* kinerja Entitas Anak.
- Planning, determining, approving, communication, directing, and evaluating the implementation of investment activity, advisory, and asset management in accordance with targets and strategies of the Company in order to achieve the vision and mission of the Company.
- Represent the Company in subsidiaries development and performance monitoring.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**DIKDIK PERMADI YOFFANA****Direktur Konsultasi Bisnis
dan Aset Manajemen****(Business Advisory and Asset Management Director)**

- Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengkomunikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan restrukturisasi/revitalisasi BUMN, Pengelolaan Aset, Jasa Konsultansi dan Investasi sesuai dengan target dan strategi Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan.
- Mewakili Perusahaan dalam pembinaan dan *monitoring* kinerja Entitas Anak.
- Planning, determining, approving, communicating, and evaluating the implementation of restructuring/revitalizing SOEs, Asset Management, Advisory and Investment in accordance with targets and strategies of the Company in order to achieve the vision and mission of the Company.
- Represent the Company in subsidiaries development and performance monitoring.

R. MUHAMMAD IRWAN**Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja****(Finance and Support Directorate)**

- Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengkomunikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana Perusahaan, Sistem Keuangan dan Akuntansi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum, Teknologi Informasi dan Operasi Bisnis, Pengadaan Barang dan Jasa, serta penyediaan sarana dan prasarana operasional kantor sesuai dengan target dan strategi Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan.
- Mewakili Perusahaan dalam pembinaan dan *monitoring* kinerja Entitas Anak.
- Planning, determining, approving, communicating, and evaluating the implementation of the Company's fund management, accounting and financial systems, management of human resources, information technology, goods and services procurement, and provision of facilities and infrastructures for office operations in accordance with targets and strategies of the Company in order to achieve the vision and mission of the Company.
- Represent the Company in subsidiaries development and performance monitoring.

Program Pengenalan Perusahaan untuk Direksi

Program pengenalan perusahaan diberikan untuk anggota Direksi yang baru diangkat. Penanggung jawab program pengenalan perusahaan adalah Sekretaris Perusahaan. Materi yang disampaikan dalam Berita Acara Penyelenggaraan Pengenalan Perusahaan kepada Direksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

Board of Directors Orientation Program

The Company's orientation program is provided for newly-appointed Board of Directors member. The division in charge for the Corporate Orientation Program is the Corporate Secretary and Legal division. The material as disclosed in Minutes of Corporate Orientation Program for the Board of Directors as signed by Corporate Secretary is as follows:

1. Pemberian Anggaran Dasar, *Board Manual*, Pedoman GCG, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman WBS, kode Etik Perusahaan, SK Direksi tentang pedoman dan penerapan GCG, laporan hasil penilaian penerapan GCG Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan;
 2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
 3. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
 4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern.
 5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris dan Direksi.
 6. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya.
1. Articles of Association, Board Manual, GCG Code, Risk Management Manual, WBS Manual, Code of Conducts, Board of Directors Decree on GCG Code and Implementation, GCG Assessment Report and Annual Report;
 2. Explanation about the Company related to purpose, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term plan, competitive position, risk and other strategic issues;
 3. Implementation of GCG principles by the Company;
 4. Explanation related to delegated authority, internal and external audits, internal control system and policy;
 5. Explanation about duty and responsibility of Board of Commissioners and Board of Directors;
 6. The orientation program may be given as prentation, meeting or visit to the Company's facilities or other programs.

Pada tahun 2019 Perusahaan melaksanakan 3 program pengenalan perusahaan untuk Direksi baru yaitu pada tanggal 2 April 2019 yang ditujukan kepada Dikdik Permadi Yoffana selaku Direksi Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen dan pada tanggal 23 Juli 2019 yang ditujukan kepada R. Muhammad Irwan selaku Direksi Keuangan dan Dukungan Kerja serta untuk Iman Rachman selaku Direktur Utama.

In 2019, the Company held 3 orienation programs for new Directors, i.e. on April 2, 2019 for Dikdik Permadi Yoffana as Business Advisory and Asset Management Director and on July 23, 2019 for R. Muhammad Irwan as Finance and Support Director and for Iman Rachman as President Director.

Pengembangan Kompetensi Direksi

Board Manual Perusahaan telah mengatur mengenai pelaksanaan Program Orientasi dan Pelatihan bagi Direksi. Direksi diwajibkan untuk melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guna meningkatkan pengetahuan, keahlian dan profesionalisme, oleh karenanya Perusahaan memfasilitasi anggota Direksi untuk mengikuti program-program pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Direksi. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Board of Directors Competency Development

Board Manual has regulated implementation of Orientation and Training Program for Board of Directors. The Board of Directors is regulated to participate in competency development program activity to develop knowledge, expertise and professionalism, therefore, the Company facilitates the Board of Directors members to participate in training as well as competency and skill development programs for the Board of Directors. Concerning the list of training and competency development activities undertaken by the Board of Directors throughout 2019 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Sekilas Tentang Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2019**

Sepanjang tahun 2019 pelaksanaan tugas Direksi diluar pelaksanaan tugas rutin dan yang bersifat teknis, dapat dilihat pada keputusan yang dikeluarkan. Berikut adalah rincian Surat Keputusan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

Brief Report on Board of Directors Duties and Responsibilities in 2019

Throughout 2019, the implementation of the Board of Directors' duties other than regular and technical tasks can be seen in the decree issued. Following are details of the Decree related to the Board of Directors' duties implementation.

Keputusan Direksi Tahun 2019
Board of Directors Decree in 2019

No	Nomor Surat Keputusan Decree Number	Perihal Subject
1	SK-2/PPA/0119	Kebijakan Investasi <i>Investment policy</i>
2	SK-3/PPA/0119	Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) <i>Whistle Blowing System Policy</i>
3	SK-6/PPA/0119	Kebijakan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas anak dan Cucu Perusahaan <i>Determination of the Income of Directors and Commissioners of the Company's subsidiaries and subsidiaries of subsidiary Policy</i>
4	SE-1/PPA/0519	Larangan Menerima Gratifikasi Terkait Hari Raya <i>Prohibition of Receiving Gratuities on Holidays</i>
5	SE-2/PPA/0719	<i>Service Level Agreement</i> dan Sasaran Mutu <i>Service Level Agreement and Quality Targets</i>
6	SE-3/PPA/0719	Pelaksana Tugas Pengganti Kepala Divisi yang Berhalangan <i>Substitute of Head of Division whom is Unable to Perform Duties</i>
7	SE-4/PPA/0719	<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Kegiatan Investasi <i>Standard Operating Procedure (SOP) for Investment Activities</i>
8	SK-49/PPA/0819	Kebijakan Penerbitan dan Pengamanan Dokumen <i>Document Issuance and Security Policy</i>
9	SE-7/PPA/0819	Pedoman Investasi <i>Investment Guidelines</i>
10	SK-50/PPA/0819	Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko <i>Establishment of Investment and Risk Management Committee</i>
10	SK-52/PPA/0919	Perubahan atas SK Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko <i>Revision of Establishment of Investment and Risk Management Committee</i>
11	SK-53/PPA/0919	Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset <i>Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset</i>
12	SK-54/PPA/0919	Penetapan Jabatan Karyawan Pada Satuan Kerja <i>Determination of Employee Positions at Work Units</i>
13	SK-55/PPA/0919	Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas serta Wewenang Anggota Direksi <i>Determination of Position and Job Description and Authority of Members of Board of Directors</i>
14	SK-57/PPA/0919	Tupoksi Uraian Jabatan pada PT PPA <i>Job Description of PT PPA</i>
15	SK-71/PPA/1119	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa <i>Goods and Services Procurement Policy</i>
16	SK-72/PPA/1119	Kebijakan Penanganan Entitas anak <i>Subsidiary Management Policy</i>

Keputusan Direksi Tahun 2019
Board of Directors Decree in 2019

No	Nomor Surat Keputusan Decree Number	Perihal Subject
17	SK-73/PPA/1119	Perubahan Keputusan Direksi Nomor. No SK-17/PPA/0315 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN <i>Amendment to Board of Directors Decree No. SK-17/PPA/0315 concerning SOEs Restructuring and Revitalization Policies</i>
18	SE-8/PPA/1219	Pedoman Investasi <i>Investment Guidelines</i>
19	SK-76/PPA/1219	Perubahan Keputusan Direksi Nomor SK-2/PPA/0119 tentang Kebijakan Investasi <i>Amendment to Board of Directors Decree No. SK-2/PPA/0119 concerning Investment Policy</i>

Penilaian Kinerja Komite dan Organ di Bawah Direksi

Pada tahun 2019 Direksi membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko sesuai SK nomor SK-52/PPA/0919 tanggal 9 September 2019 dengan tugas dan tanggung jawab Komite sebagai berikut:

- melakukan evaluasi dan memberikan saran/rekomendasi kepada Direksi Perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan Investasi atas:
 - usulan kegiatan Investasi yang diajukan oleh Direktorat Investasi ("D-Investasi") dan Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen ("D-KBAM");
 - usulan penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, antara lain pelampauan limit/batasan transaksi yang diatur dalam Pedoman
- Investasi, penyimpangan ketentuan yang diatur dalam kebijakan Perusahaan, penyimpangan atas ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian transaksi (perjanjian pinjaman/ penerbitan surat utang, dll); melakukan pembahasan dan memberikan saran/masukan atas usulan kegiatan Investasi dari Entitas Anak;
- memberikan masukan/saran atas Kebijakan Investasi dan Kebijakan Manajemen Risiko;
- memberikan masukan/saran atas Pedoman Investasi antara lain tingkat pengembalian minimal Investasi, batas Investasi per sektor industri, dan *negative list* Investasi.

Meski demikian, dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, Direksi memiliki organ-organ pendukung yaitu Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja, Fungsi Manajemen Risiko serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko.

Performance Assessment of Committees and Organs Under Board of Directors

In 2019, the Board of Directors established the Investment and Risk Management Committee in accordance with Decree number SK-52/PPA/0919 dated September 9, 2019 with the Committee's duties and responsibilities of as follows:

- evaluating and providing advice/recommendations to the Company's Board of Directors in the context of making investment decisions on:
 - Investment activity proposals submitted by the Investment Directorate ("D-Investment") and the Business Advisory and Asset Management Directorate ("D-KBAM");
 - proposals for establishing policies and/or business decisions that deviate from normal procedures, including exceeding transaction limits set out in the Guidelines
- Investment, deviation from the provisions stipulated in the Company's policies, deviation from the terms and conditions stipulated in the transaction agreement (loan agreement/issuance of debt securities, etc.); discuss and provide advice/input on the proposed investment activities of Subsidiaries;
- provide input/advice on Investment Policy and Risk Management Policy;
- provide input/advice on Investment Guidelines, including minimum investment returns, Investment limits per industry sector, and negative investment lists.

However, in carrying out the Company's operational activities, the Board of Directors has supporting organs namely the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit, the Corporate Strategic Planning and Performance Management, the Risk Management Function and the Investment and Risk Management Committee.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI****KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI**

Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perusahaan telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, serta pengalaman kerja. Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integrasi, kompetensi dan reputasi yang baik. Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, dalam penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perusahaan termasuk memperhatikan unsur keberagaman sebagaimana pada tabel berikut:

**TRANSPARENCY OF INFORMATION ON
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD
OF DIRECTORS****COMPOSITION DIVERSITY OF BOARD OF
COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS**

In order to realize the transparent, accountable and reliable process and mechanism for Board of Commissioners and Board of Directors members selection and replacement, the Company has followed the requirements and procedures set out through SOEs Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 dated February 17, 2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Board of Commissioners and Supervisory Board Members of State-Owned Enterprises, and SOEs Ministerial Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 dated February 17, 2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Board of Directors Members of State-Owned Enterprises.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors has fulfilled the diversity element, which is a combination of independency, expertise/education, and work experience. All members of Board of Commissioners and Board of Directors have good integrity, competency and reputation. Based on Shareholders' policy, the determination of Board of Commissioners and Board of Directors composition has been carried out by considering the needs and complexity of the Company, including taking into account the diversity element as shown in the following table:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Composition Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS						
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Indonesia	Laki-laki Male	62	Sarjana bidang Hukum dari Universitas Indonesia (1981), dan Master of Arts in International Graduate Transaction (M.A.I.T) dari George Mason University, Virginia, Amerika Serikat (1993). Bachelor of Law from the University of Indonesia (1981), and Master of Arts in International Graduate Transaction (M.A.I.T) from George Mason University, Virginia, United States (1993).	Berkarir di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (November 2017-sekarang), sebelumnya menjabat sebagai Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri (2012-2017); Deputy Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan (2005-2012); Plt. Asisten Deputy III Menko Perekonomian Urusan Pemanfaatan SDA Pertanian dan Peternakan (2002-2004); Asisten Deputy Menko Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan (2001-2005); Pelaksana Harian Asisten Deputy Menko Perekonomian Urusan Pemanfaatan SDA Pertanian dan Peternakan (2002-2004); dan Asisten Deputy Menko Ekuin Urusan Industri Olahan (2000-2001). Pursued career at the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia. Also served as Special Staff to the Coordinating Minister for Economic Affairs (November 2017-present), previously serving as Deputy for Commerce and Industry Coordination (2012-2017); Deputy for Industry and Trade Coordination (2005-2012); Acting Assistant III Deputy Coordinating Minister for Economic Affairs Utilization of Agricultural and Animal Resources Natural Resources (2002-2004); Assistant Deputy Coordinating Minister for Economic Affairs for Maritime Affairs and Fisheries (2001-2005); Daily Assistant to the Coordinating Minister for Economic Affairs for Utilization of Agricultural and Animal Resources Natural Resources (2002-2004); and Assistant Deputy of the Coordinating Minister for the Economy for Processed Industrial Affairs (2000-2001).	Memiliki keahlian di bidang Hukum dan Ekonomi Makro. Having expertise in the field of Law and Macro Economics.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTUREKeberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Composition Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Kewarga- negeraan Nationality	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Didyk Choeroel (Komisaris) (Commissioner)	Indonesia	Laki-laki Male	48	Diploma III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1993), Sarjana (S1) bidang Ilmu Administrasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram (1998), Pasca Sarjana (S2) bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta (2001) dan Pasca Sarjana (S2), bidang Administrasi Publik dari Universitas Gajah Mada (2005). Diploma III from the State College of Accountancy (1993), Bachelor of Administrative Sciences from Mataram College of Administrative Sciences (1998), Master of Management from the Jakarta School of Economics (2001) and Master of Public Administration from Gajah Mada University (2005).	Berkarir di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2018-sekarang), Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan (2016-2018), Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau (2014-2016), Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Perbendaharaan (2010-2014), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar (2008-2010). Pursued his career at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Served as Director of State Treasury Management Directorate General of Treasury of Ministry of Finance (2018-present), Director of Budget Implementation Directorate General of Treasury (2016-2018), Head of Regional Office of Directorate General of Treasury of Riau Islands Province (2014-2016), Head of Organization and Administration Section Directorate General of Treasury (2010-2014), Head of Blitar State Treasury Service Office (2008-2010).	Memiliki keahlian di bidang keuangan dan administrasi negara Having expertise in the field of finance and state administration

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Composition Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Kewarga- negara Nationality	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Tirta Hidayat (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Indonesia	Laki-laki Male	61	Sarjana Ekonomi bidang Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia (1985), Master of Science bidang Ekonomi Regional (Regional Science), Cornell University, New York, Amerika Serikat (1987), dan Doctor of Philosophy (PhD) bidang Ekonomi Regional (Regional Science), Cornell University, New York, Amerika Serikat (1991). Bachelor of Economics in Economic Development Studies from the University of Indonesia (1985), Master of Science in Regional Economics (Regional Science), Cornell University, New York, United States (1987), and Doctor of Philosophy (PhD) in Regional Economics (Regional Science), Cornell University, New York, United States (1991).	Menjabat sebagai Ketua Tim Asistensi Koordinator untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2019-sekarang); Asisten Koordinator untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2017-2019); Deputi Ekonomi, Infrastruktur, dan Kelautan (2007-2017), Kepala Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (2000-2002); serta menjabat di Bappenas (1993-2000) sebagai Kepala Biro. Served as Chair of Coordinating Assistance Team for the Coordinating Minister for Economic Affairs (2019-present); Assistant Coordinator for the Coordinating Minister for Economic Affairs (2017-2019); Deputy for Economy, Infrastructure and Maritime Affairs (2007-2017), Head of Research and Development of the Ministry of Manpower and Transmigration (2000-2002); and served in Bappenas (1993-2000) as Head of Bureau.	Memiliki keahlian di bidang ekonomi, keuangan dan manajemen risiko. Having expertise in the fields of economics, finance and risk management.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Iman Rachman (Direktur Utama) (President Director)	Indonesia	Laki-laki Male	47	Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat (1995), dan Master of Business Administration in Finance di Leeds University Business School, Leeds, West Yorkshire, Inggris (1997). Bachelor of Economics from Padjadjaran University, Bandung, West Java (1995), and Master of Business Administration in Finance at Leeds University Business School, Leeds, West Yorkshire, England (1997).	Sebelum menduduki jabatannya di PT PPA, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2019), Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2018), Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas (2003-2016), dan Manager di PT Danareksa Sekuritas (1998-2003). Prior to his position at PT PPA, he served as Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2019), Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2018), Investment Banking Director of PT Mandiri Sekuritas (2003-2016), and Manager of PT Danareksa Sekuritas (1998-2003).	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi dan manajemen bisnis. Having expertise in finance, investment and business management.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTUREKeberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Composition Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Kewarga- negeraan Nationality	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) (Investment Director)	Indonesia	Laki-laki Male	55	Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989), serta Master of Business Administration Bidang Finance dari University of Wisconsin, Milwaukee, USA (1996). Bachelor of Economics at Gadjah Mada University, Yogyakarta (1989), and Master of Business Administration in Finance at the University of Wisconsin, Milwaukee, USA (1996).	Sebelumnya beliau menjabat sebagai <i>Chief Financial Officer</i> di PT Polyrama Propindo (2016-2017); Direktur Pembiayaan, <i>Risk Management/Finance</i> di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2013-2016); <i>Associate Director Corporate Planning/Finance</i> PT Wintermar Offshore Marine Tbk (2011-2013); <i>Vice President</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2011); <i>Assistant Vice President Corporate Banking</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2005); dan Kepala Tim Pembiayaan Proyek di Bank Pembangunan Indonesia Cabang Makassar, Sulawesi Selatan (1996-1999). Previously he served as Chief Financial Officer at PT Polyrama Propindo (2016-2017); Director of Financing, Risk Management/Finance at PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2013-2016); Associate Director of Corporate Planning/Finance of PT Wintermar Offshore Marine Tbk (2011-2013); Vice President of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2011); Assistant Vice President Corporate Banking at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2005); and Head of Project Financing Team at Bank Pembangunan Indonesia of Makassar Branch, South Sulawesi (1996-1999).	Memiliki keahlian di bidang Keuangan dan Investasi Having expertise in the field of Finance and Investment

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Composition Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Kewarga- negara Nationality	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) (Business Advisory and Asset Management Director)	Indonesia	Laki-laki Male	47	Sarjana Ekonomi bidang manajemen dari Universitas Padjajaran, Bandung (1995), dan Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Jakarta (2019). Bachelor of Economics in Management from Padjadjaran University, Bandung (1995), and Master in Management at the Faculty of Economics, Gajah Mada University, Jakarta (2019).	Sebelumnya beliau menjabat sebagai Executive Vice President Business Advisory & Asset Management di PT PPA (2017-2019), Senior President Business Advisory & Asset Management di PT PPA (2015-2017), Vice President Business Advisory & Asset Management di PT PPA (2013-2015), Assistant Vice President Business Advisory & Asset Management di PT PPA (2009-2013), Senior Manager Restrukturisasi/Revitalisasi dan Pengelolaan Aset di PT PPA (2004-2009), Senior Officer di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2004), dan Relationship Manager di Bank Nusa Internasional (1995-1999). Previously he served as Executive Vice President of Business Advisory & Asset Management at PT PPA (2017-2019), Senior President Business Advisory & Asset Management at PT PPA (2015-2017), Vice President of Business Advisory & Asset Management at PT PPA (2013-2015), Assistant Vice President of Business Advisory & Asset Management at PT PPA (2009-2013), Senior Manager of Restructuring/Revitalization and Asset Management at PT PPA (2004-2009), Senior Officer at the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999-2004), and Relationship Manager at Bank Nusa Internasional (1995-1999).	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, dan restrukturisasi perusahaan. Having expertise in the field of finance, investment and corporate restructuring.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Composition Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Kewarga- negeraan Nationality	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) (Finance and Support Director)	Indonesia	Laki-laki Male	48	Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002), dan Magister Manajemen di Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta (2017). Bachelor of Law from the University of Indonesia (1994), Master of from the University of Indonesia Law Faculty (2002), and Master of Management from Prasetiya Mulya University, Jakarta (2017).	Sebelum menduduki jabatannya di PT PPA, beliau menjabat sebagai Managing Director, Operation, Finance & Accounting, IT, and HR PT Danareksa Sekuritas (2018-2019), sebagai Senior Vice President, Portfolio Management and Advisory PT Danareksa (Persero) (2018), Director, Operation, Finance & Accounting, IT, Risk Management, Legal di PT CIMB Securities Indonesia (2014-2017), Managing Director, Legal, Compliance, Human Resource and Corporate Secretary PT Maybank Kim Eng Securities (2013-2014), Executive Vice President, Legal, Compliance and Corporate Secretary di PT Mandiri Sekuritas (2009-2013); Vice President Legal, Corporate Communication and General Affairs di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2004-2009), dan Legal Officer di PT Kliring Deposit Efek Indonesia (1994-1996). Prior to his position at PT PPA, he served as Managing Director, Operations, Finance & Accounting, IT, and HR of PT Danareksa Sekuritas (2018-2019), as Senior Vice President, Portfolio Management and Advisory of PT Danareksa (Persero) (2018), Director, Operation, Finance & Accounting, IT, Risk Management, Legal at PT CIMB Securities Indonesia (2014-2017), Managing Director, Legal, Compliance, Human Resources and Corporate Secretary of PT Maybank Kim Eng Securities (2013-2014), Executive Vice President, Legal, Compliance and Corporate Secretary at PT Mandiri Sekuritas (2009-2013); Vice President of Legal, Corporate Communication and General Affairs at PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2004-2009), and Legal Officer at PT Kliring Deposit Efek Indonesia (1994-1996).	Memiliki keahlian di bidang hukum dan keuangan. Having expertise in the field of law and finance.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham melalui RUPS. Pertanggungjawaban ini menjadi dasar dalam menentukan diterima atau tidaknya hasil kinerja oleh pemegang saham; serta besaran tantiem dan insentif kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengawasan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan setiap tahun. Penilaian realisasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolegal oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan penilaian realisasi kinerja pengawasan bersifat kolegal berdasarkan RKA dalam KPI secara tahunan dan mandiri.

Perusahaan telah memiliki kebijakan Penilaian kinerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam Kontrak Manajemen *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris yang mengacu pada:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Berita Acara Pembagian Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris tahun 2019.

Kontrak Manajemen *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris tahun 2019 telah disetujui oleh RUPS tanggal 7 Januari 2019 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2019.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolegal oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Dewan komisaris juga melakukan penilaian independen terhadap pencapaian indikator penilaian kinerja.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Board of Commissioners and Board of Directors are accountable for their performance to shareholders through the GMS. This accountability is the basis in determining whether or not performance are accepted by shareholders; and the amount of tantiem and performance incentives for Board of Commissioners and Board of Directors.

Performance Assessment of Board of Commissioners

The Board of Commissioners strives to improve its supervisory performance based on the results of annual evaluation and assessment. The performance assessment of Board of Commissioners is done collegially by Shareholders at the GMS. In addition, the Board of Commissioners also evaluates the realization of collegial supervisory performance based on RKA in KPI on an annual and independent basis.

The Company has a policy on performance assessment of Board of Commissioners listed in the Management Contract of Board of Commissioners' Key Performance Indicator which refers to:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. The Company's Articles of Association;
3. Minutes of Division of Duties of Board of Commissioners Members in 2019.

The Board of Commissioners' Key Performance Indicators Management Contract for 2019 has been approved by the GMS on January 7, 2019 and is an inseparable part of the Minutes of the 2019 Budget and Planning Ratification GMS.

The performance assessment of Board of Commissioners is done collegially by Shareholders at the GMS. The Board of Commissioners also carries out an independent assessment of the achievement of performance assessment indicators.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2019**
Board of Commissioners Key Performance Indicators (KPI) for 2019

No.	Indikator Kerja Performance Indicators	Satuan Unit	Nilai Output Output Score			Nilai KPI KPI Score		
			Target	Realisasi Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Bobot Weight	Skor (Maks) Score (Max)	Skor (Min) Score (Min)
I	Aspek Pengawasan dan Pengarahan Supervisory and Advisory Aspect	Skor Score	(%)			50,0	57,0	49,5
1	<i>Review / analisis kinerja perusahaan</i> Review/analysis on the Company's performance	Kali Times	12	12	100,0	10,0	10,0	10,0
2	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings							
a	Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Number of Internal Meetings of Board of Commissioners	Kali Times	12	12	100,0	5,0	5,0	5,0
b	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Number of Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors	Kali Times	12	14	116,7	5,0	5,8	5,0
c	Kehadiran Attendance	%	100,0	89,1	89,1	5,0	4,5	4,5
3	Pemberian nasihat / saran kepada Direksi Advise/recommendation to Board of Directors	Kali Times	9	15	166,7	10,0	16,7	10,0
4	<i>Monitoring tindak lanjut hasil / temuan audit internal / eksternal</i> Monitoring on follow-up of internal/ external audit results/findings	Kali Times	4	4	100,0	5,0	5,0	5,0
5	<i>Monitoring tindak lanjut rekomendasi assessment GCG</i> Monitoring on follow-up of GCG Assessment recommendations	Kali Times	2	2	100,0	5,0	5,0	5,0
6	Kegiatan kunjungan lapangan (<i>site visit</i>) dalam rangka <i>monitoring</i> kegiatan usaha PT PPA Site visit activity in the context of monitoring business activities of PT PPA	Kali Times	3	3	100,0	5,0	5,0	5,0
II	Aspek Pelaporan Reporting Aspect	Skor Score				35,0	43,6	35,0
1	Penyusunan dan penyampaian Program Kerja Tahunan Preparation and submission of Annual Work Program	Kali Times	1	1	100,0	5,0	5,0	5,0
2	Penyampaian Rekomendasi atas RKAP Submission of recommendation upon Budget and Planning	Kali Times	1	1	100,0	5,0	5,0	5,0

Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2019
Board of Commissioners Key Performance Indicators (KPI) for 2019

No.	Indikator Kerja Performance Indicators	Satuan Unit	Nilai Output Output Score			Nilai KPI KPI Score		
			Target	Realisasi Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Bobot Weight	Skor (Maks) Score (Max)	Skor (Min) Score (Min)
3	Penyampaian laporan/pendapat / saran kepada Pemegang Saham/ RUPS Submission of report/opinion/ recommendation to the Shareholders/GMS	Kali Times	7	11	157,1	15,0	23,6	15,0
4	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Submission of Supervisory Duty Report	Kali Times	4	4	100,0	10,0	10,0	10,0
III	Aspek Dinamis/ Lain-lain Dynamic and Other Aspects					15,0	15,4	15,0
1	Peningkatan kompetensi (masing- masing anggota Dewan Komisaris) Competency development (every Board of Commissioners member)	Kali Times	1	1	100,0	5,0	5,0	5,0
3	Skor hasil asesmen GCG untuk aspek Dewan Komisaris GCG assessment score for Board of Commissioners aspect	%	90,0	93,5	103,9	10,0	10,4	10,0
TOTAL SKOR KPI TOTAL KPI SCORE						100,0	115,9	99,5

Sampai dengan akhir Tahun 2019, capaian KPI Dewan Komisaris PT PPA dengan menggunakan skala maksimal tercapai sebesar 115,9% atau bila menggunakan metode skala minimal tercapai 99,5% (sangat baik) terhadap target tahunan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019 sebanyak 26 kali rapat yang terdiri dari Rapat Rutin Internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali, dan Rapat Rutin Gabungan dengan Direksi 12 kali, serta Rapat Khusus Gabungan dengan Direksi sebanyak 2 kali dalam rangka pembahasan RJPP Tahun 2019-2023 & RKAP Tahun 2020.
2. Pemberian persetujuan aksi korporasi, tanggapan/rekomendasi atas usulan aksi korporasi, serta saran dan nasihat dalam pengurusan perusahaan terutama terkait percepatan proses audit laporan keuangan, penghapusbukuan dan pemindahtanganan barang inventaris kantor, pengusulan wakil Perusahaan pada Entitas Anak, pemberian apresiasi kinerja kepada karyawan, perubahan struktur organisasi

Until the end of 2019, the KPI achievement of KPI of Board of Commissioners of PT PPA by using a maximum scale reached 115.9% or when using the minimum scale method reached 99.5% (very good) against the annual target with the following explanation:

1. 26 Board of Commissioners meetings held throughout 2019, which consisted of 12 Board of Commissioners' Internal Routine Meetings, 12 Joint Meetings with Board of Directors, and 2 Joint Meetings with Board of Directors for the 2019-2023 RJPP & 2020 Budget and Planning discussion.
2. Granting approval for corporate actions, responses/recommendations on proposed corporate actions, as well as advice and suggestion in the management of the company, especially related to the acceleration of audit process of financial statements, book-writing and alienation of office inventory, proposing the Company's representatives to Subsidiaries, giving performance appreciation to employees, changes in the organizational structure one level below

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

satu level di bawah Direksi, penguatan peran SPI dan pengangkatan kepala SPI, penunjukan Kantor Akuntan Publik/"KAP" sebagai auditor independen Tahun Buku/"TB" 2019, dan penetapan asesor implementasi *Good Corporate Governance/ "GCG"* TB 2019.

3. Penyampaian rekomendasi/ usulan kepada Menteri BUMN selaku RUPS atau Deputy Kementerian BUMN dalam rangka permohonan persetujuan RUPS terutama terkait penyampaian usulan bakal calon Direksi dalam rangka mengisi jabatan Direksi yang akan habis masa jabatannya, pergantian Direksi dan/atau Komisaris Entitas Anak, permohonan persetujuan program RR BUMN oleh Perusahaan.
4. Penyampaian tanggapan laporan manajemen berkala telah disampaikan untuk periode pelaporan *unaudited* tahun 2018, *audited* tahun 2018, triwulan I tahun 2019, triwulan II tahun 2019, triwulan III tahun 2019. Selain itu, juga disampaikan tanggapan atas rancangan RJPP 2019-2023.
5. Penyampaian rekomendasi keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan meliputi usulan pembagian laba tahun buku 2018, penetapan penghasilan Direksi Komisaris tahun buku 2019, penunjukan KAP untuk audit tahun buku 2019.
6. Penyampaian rekomendasi keputusan RUPS Persetujuan RKAP 2020 meliputi tanggapan dan persetujuan atas rancangan RKAP tahun buku 2020, termasuk RKA Dewan Komisaris dan RKA PKBL tahun buku 2020 serta usulan KPI tahun buku 2020, usulan indikator aspek operasional tingkat kesehatan tahun buku 2020. Selain itu, juga disampaikan tanggapan atas rencana penerbitan obligasi berseri tahun buku 2020.
7. Penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku RUPS meliputi periode tahunan tahun 2018, triwulan I tahun 2019, triwulan II tahun 2019, dan triwulan III tahun 2019.
8. *Monitoring* tindak lanjut hasil rekomendasi/temuan audit auditor internal/eksternal telah dilaksanakan melalui rapat-rapat rutin bulan komite dengan agenda antara lain pemantauan hasil/temuan dari SPI, KAP, Assessor GCG dan rekomendasi lainnya dari konsultan/auditor independen.

Board of Directors, strengthening the role of SPI and appointment of head of SPI, appointment of Public Accounting Firm/"KAP" as independent auditor for Fiscal Year 2019, and appointment of assessors for Good Corporate Governance/"GCG" implementation in 2019.

3. Submission of recommendations/proposals to the Minister of SOEs as the GMS or Deputy Ministry of SOEs in the context of requesting GMS approval, especially related to the submission of proposals for prospective Directors in order to fill the Directors' term which will expire, replacement of Directors and/or Commissioners of Subsidiaries, approval of SOEs RR program by the Company.
4. Submission of responses upon periodic management report for the reporting period of unaudited 2018, audited 2018, first quarter of 2019, second quarter of 2019, third quarter of 2019. In addition, responses to the 2019-2023 RJPP draft were also submitted.
5. Submission of recommendations for GMS on Annual Report ratification includes proposal for distribution of profit for the 2018 fiscal year, determination of Board of Directors' income for the 2019 fiscal year, appointment of a Public Accounting Firm for the 2019 fiscal year audit.
6. Submission of recommendations for GMS on 2020 Budget and Planning Approval includes responses to and approval of the 2020 Budget and Planning draft for the 2020 fiscal year, including Board of Commissioners' RKA and PKBL RKA for the 2020 fiscal year, and the proposed KPI for the 2020 fiscal year, the proposed indicator of operational aspects for the 2020 fiscal year. In addition, responses to the plan to issue bonds in 2020 fiscal year was also conveyed.
7. Submission of Board of Commissioners' supervisory duty report to the Minister of SOEs as GMS covering the annual period of 2018, the first quarter of 2019, the second quarter of 2019, and the third quarter of 2019.
8. Monitoring the follow-up internal/external auditor audit recommendations/findings has been carried out through routine monthly committee meetings with the agenda including monitoring the results/findings of SPI, KAP, GCG Assessor and other recommendations from independent consultants/auditors.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara kolegal maupun individual oleh Pemegang Saham. Penilaian kinerja oleh pemegang saham dilakukan dalam RUPS Tahunan tentang Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite of de charge*) kepada Direksi Perusahaan atas segala hasil pengurusan dan pengelolaan perusahaan yang telah dilakukan.

Indikator penilaian kinerja Direksi meliputi aspek sebagai berikut:

1. Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Kontrak Manajemen tahun 2019;
2. Pencapaian Kinerja Operasional dan Keuangan tahun 2019;
3. Pelaksanaan implementasi GCG tahun 2019.

Key Performance Indicator (KPI) Direksi Tahun 2019**Performance Assessment of Board of Directors**

The performance assessment of Board of Directors is carried out collegially and individually by the Shareholders. The performance assessment by the shareholders is carried out in the Annual General Meeting of Shareholders on the Accountability Report of Financial Statements. The GMS grants full discharge and release of responsibility (*volledig acquite of de charge*) to Company's Board of Directors for all the results of the management of the company that has been carried out. Board of Directors performance assessment indicators include the following aspects:

1. Key Management Indicators (KPI) Achievement for the 2019 Management Contract;
2. Operational and Financial Performance Achievement in 2019;
3. GCG implementation in 2019.

Board of Directors' Key Performance Indicator (KPI) in 2019**Tabel KPI Direksi tahun 2019**

Board of Directors KPI in 2019

No	Keterangan Description	2019		Realisasi 2019 2019 Realization	Skor Score
		Bobot Weight	Target Target		
1	KEUANGAN DAN PASAR FINANCE AND MARKET				
1.1	Return on Asset (ROA)	6	3,22%	2,3%	4,25
1.2	BOPO	5	91%	94,3%	4,82
1.3	YOI	5	8%	10,8%	6,00
1.4	Revenues per Employee (Rp Jt) / (Rp Million)	6	3.926	3.896	5,95
	JUMLAH TOTAL	22			21,02
2	FOKUS PELANGGAN CUSTOMER FOCUS				
2.1	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	10	3 (Index 1-5)	4,31	10,50
2.2	Jumlah Pengaduan Pelanggan (Jumlah) Number of Customer Complaints (Complaints)	10	≤ 5	1	10,50
	JUMLAH TOTAL	20			21,00

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURETabel KPI Direksi tahun 2019
Board of Directors KPI in 2019

No	Keterangan Description	2019		Realisasi 2019 2019 Realization	Skor Score
		Bobot Weight	Target Target		
3	EFEKTIVITAS PRODUK & PROSES PRODUCT & PROCESS EFFECTIVENESS				
3.1	Number of New Services/Product	10	5 Proyek 5 Projects	19	10,50
3.2	Realisasi Capex Aset Tetap Realization of Capex of Fixed Assets	8	> 15%	67%	8,40
	JUMLAH TOTAL	18			18,90
4	FOKUS TENAGA KERJA EMPLOYEE FOCUS				
4.1	Indeks Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction Index	8	3	3,87	8,40
4.2	Karyawan mengikuti pelatihan Employees Attending Training	7	75%	91%	7,35
	JUMLAH TOTAL	15			15,75
5	KEPEMIMPINAN, TATAKELOLA & TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN LEADERSHIP, GOVERNANCE & SOCIAL RESPONSIBILITY				
5.1	Skor GCG (skor) GCG Score (score)	5	88	88,53	5,03
5.2	Ketepatan Penyampaian Laporan Berkala elektronik BUMN Timeliness of SOEs Electronic Periodic Report Submission	5	100%	100%	5,00
5.3	Efektivitas Penyaluran PK & BL PK & BL Distribution Effectiveness	5	100%	89,93%	4,50
	JUMLAH TOTAL	15			14,53
6	Agent of development				
6.1	Sinergi Antar BUMN SOEs Synergy	4	> 2,5%	11%	4,20
6.2	Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR Government Assignments/ Special/RR Assignments	6	100 %	100%	6,00
	JUMLAH TOTAL	10			10,20
	BOBOT TOTAL TOTAL WEIGHT	100			101,40

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

Salah satu perangkat penilaian yang diterapkan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang mandat dari Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham BUMN adalah penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

Penilaian KPKU berdasarkan surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN, yang menyatakan bahwa evaluasi BUMN menggunakan kriteria KPKU sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN, yang mengadopsi dan mengadaptasi "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*."

Pelaksanaan penilaian atas implementasi KPKU oleh tim evaluator mengacu pada surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-272/S.MBU/09/2014 tanggal 18 September 2014 yang menyebutkan bahwa tim evaluator minimal terdiri dari 5 (lima) orang Evaluator yang telah memiliki sertifikat Evaluator KPKU serta dapat terdiri dari seluruhnya berasal dari eksternal BUMN atau kombinasi dengan melibatkan minimal 1(satu) orang dari internal BUMN.

Proses Evaluasi ini melalui 2 (dua) tahapan besar yaitu tahap "*Ondesk Review*" yaitu penilaian diatas kertas berbasis pada respon KPKU tahun sebelumnya dan informasi pendukung ADLI (*Approach, Deployment, Learning, dan Integration*). Tahap berikutnya adalah "*Site Visit*" untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi serta pejabat eksekutif lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta verifikasi berbagai data dan informasi.

Laporan atas pemenuhan persyaratan pada suatu subkategori dinilai dengan mempertimbangkan:

1. Persyaratan subkategori tersebut.
2. Faktor-faktor bisnis utama yang dilaporkan dalam profil perusahaan.
3. Kesempurnaan sistem yang diterapkan di perusahaan.
4. Keluasan cakupan penerapan sistem.
5. Konsistensi peningkatan kualitas proses dan kinerja sebagaimana diatur dalam sistem pemberian skor.

SUPERIOR PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA (KPKU)

One of the assesstment tools implemented by the Ministry of SOEs as the mandate holder of the Republic of Indonesia as SOEs shareholder is the assessment based on Superior Performance Assessment Criteria (KPKU).

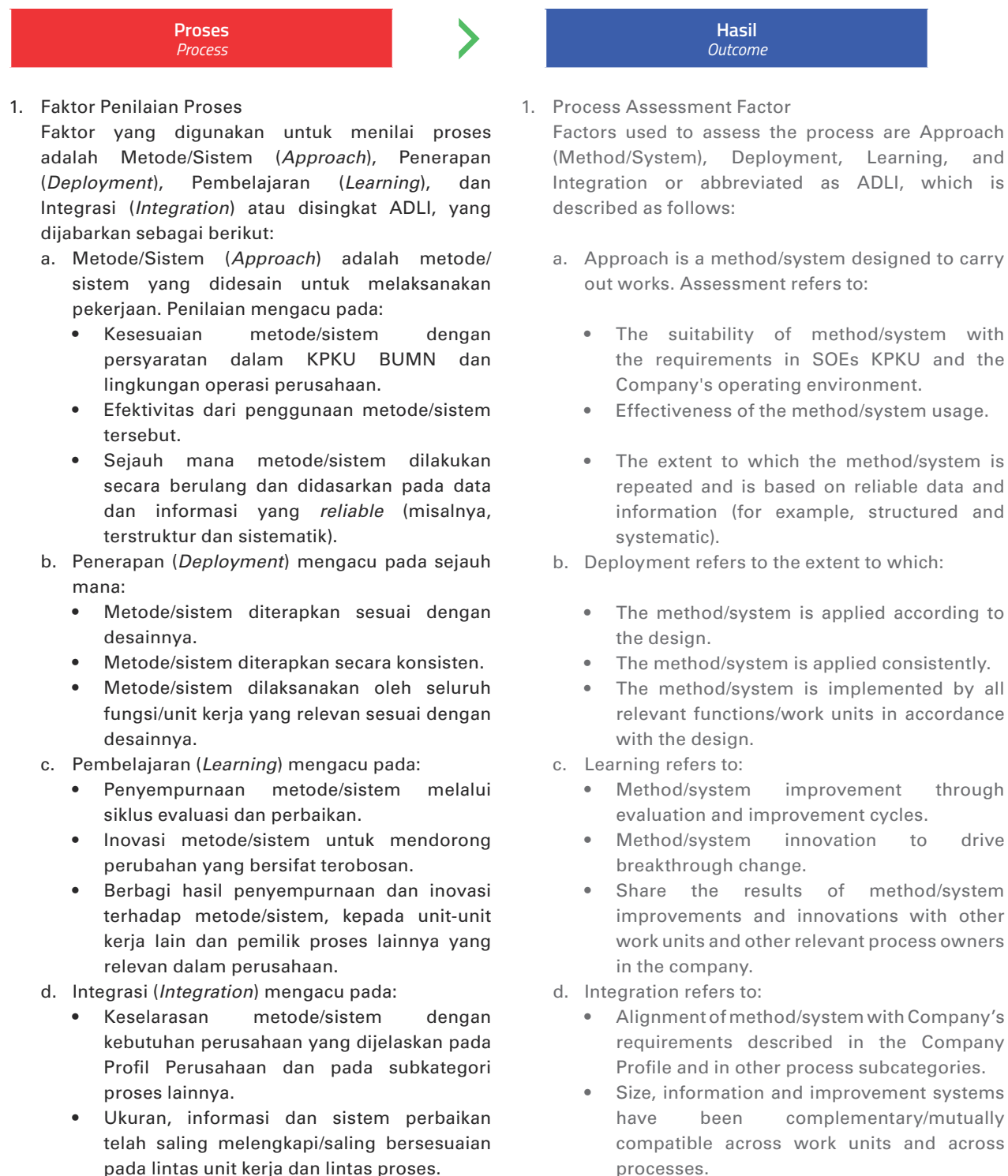
The KPKU assessment is based on the letter of Secretary of Ministry of SOEs No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013 concerning Submission of Guidelines for Determination of Key Performance Indicators (KPI) and Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) of SOEs, which states that SOEs evaluation is using KPKU criteria as determined by the Ministry of SOEs through the Letter of Secretary of Ministry of SOEs No. S-153/S.MBU/2012 dated July 19, 2012 concerning Performance Reporting Based on SOEs Superior Performance Assessment Criteria Approach, which adopted and adapted the "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*".

The KPKU assessment by an evaluator team refers to the letter of Secretary of Ministry of SOEs No. S-272/S.MBU/09/2014 dated September 18, 2014 which states that the evaluator team consists of at least 5 (five) evaluators who have KPKU Evaluator certificates and all may consist of external SOEs or a combination involving at least 1 (one) person from internal SOEs.

This evaluation process is through 2 (two) major stages, namely the "Ondesk Review" stage, which is an assessment on paper based on the KPKU's response from the previous year and supporting information of ADLI (Approach, Deployment, Learning, and Integration). The next stage is the "Site Visit" for interviews and clarification of the KPKU's response to Board of Directors and other executive officials appointed by the company as well as verification of various data and information.

Report on compliance with requirements in a subcategory is assessed by taking into account:

1. Requirements of the subcategory.
2. Main business factors reported in the company profile.
3. The perfection of system implemented in the company.
4. Extensive scope of system implementation.
5. Consistency in improving process quality and performance as stipulated in the scoring system.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTUREDasar Faktor Penilaian KPKU
Basic Factors of KPKU Assessment

- Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, diharmonisasikan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran perusahaan.

Subkategori pada faktor Proses yang terdiri dari ADLI tersebut dilakukan klarifikasi, saling dihubungkan untuk menekankan bahwa deskripsi *Approach* harus selalu menunjukkan penerapan yang konsisten dengan persyaratan spesifik suatu subkategori dan perusahaan. Seiring dengan semakin matangnya proses, maka deskripsinya juga harus menunjukkan bagaimana siklus pembelajaran (termasuk inovasi) dan juga integrasi dengan proses kerja lainnya dan dengan unit kerja lainnya.

2. Faktor Penilaian Hasil

Faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level*, *Trend*, *Comparison* dan *Integration* (LeTCl), yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Level* mengacu pada tingkat pencapaian kinerja saat ini.
- b. *Trend* mengacu pada tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik minimum dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan keluasan tingkat penerapan dari hasil-hasil kinerja.
- c. *Comparison* mengacu pada perbandingan kinerja perusahaan relatif terhadap perbandingan yang sesuai misalnya, pesaing atau perusahaan dalam industri sejenis, dan perbandingan kinerja perusahaan relatif terhadap *benchmarks* atau pemimpin industrinya, atau dengan perusahaan kelas dunia.
- d. *Integration* mengacu pada ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama, yang dijelaskan dalam profil perusahaan dan subkategori serta hasil-hasil yang meliputi indikator yang valid tentang kinerja mendatang kemudian hasil-hasil diharmonisasikan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran perusahaan.

- Work programs, processes, outcome, analysis, learning, and actions are harmonized across processes and across work units to support the achievement of Company's goals.

Subcategories on the process factor which consists of ADLI are clarified, interconnected to emphasize that the Approach description must always show consistent application with the specific requirements of a subcategory and company. As the process matures, the description must also show how the learning cycle (including innovation) and also integration with other work processes and with other work units.

2. Outcome Assessment Factor

Factors used to evaluate Company's outcome are Level, Trend, Comparison and Integration (LeTCl), which are described as follows:

- a. Level refers to the level of achievement of current performance.
- b. Trend refers to the level of performance improvement or ability to maintain good performance at a minimum in the last 3 (three) years and the extent of application of performance outcome.
- c. Comparison refers to a comparison of Company's performance relative to appropriate comparison, for example, competitors or companies in similar industries, and comparison of Company's performance relative to benchmarks or industry leaders, or with world-class companies.
- d. Integration refers to the measurement of outcome related to the performance requirements of customers, products, markets, processes and main work programs, which are explained in the Company profile and subcategories and the outcome covering valid indicators of future performance, in which afterward the outcome are harmonized across processes and cross-units to support Company's goals.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Subkategori pada faktor hasil tersebut diklarifikasi dengan data yang menunjukkan level kinerja, *trend* dan perbandingan yang relevan untuk ukuran dan indikator utama kinerja perusahaan serta terintegrasi dengan persyaratan utama perusahaan. Subkategori pada faktor hasil juga diklarifikasi dengan data tentang luasnya cakupan hasil-hasil kinerja yang dilaporkan. Secara langsung hal ini terkait dengan penerapan dan pembelajaran perusahaan; jika proses perbaikan disebarkan secara luas maka harusnya ada hasilnya yang sesuai.

Selain kedua faktor penting dalam evaluasi dan umpan balik yaitu proses dan hasil, terdapat pertimbangan yang krusial dan sangat penting dalam evaluasi dan umpan balik yang dilaporkan yaitu faktor-faktor bisnis utama yang harus diidentifikasi dalam profil perusahaan, persyaratan pelanggan utama, lingkungan kompetitif, kebutuhan tenaga kerja, tujuan strategis utama dan program kerja.

Penetapan Skor

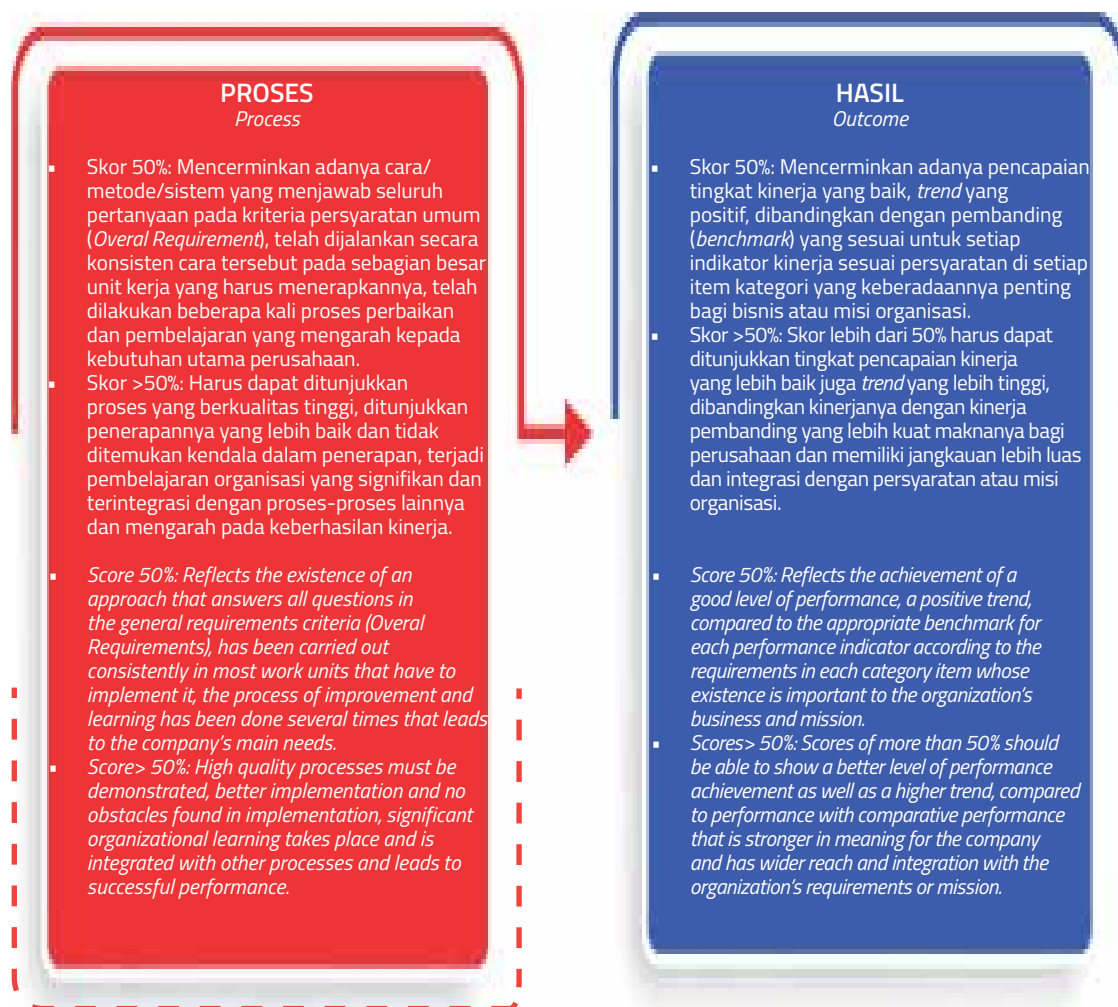
Penetapan skor secara umum dilakukan berdasarkan agregat pandangan holistik dari ke-4 faktor dimensi penilaian ADLI untuk "Proses" atau LeTCL untuk "Hasil". Dalam menetapkan asumsi kisaran rentang nilai awal disarankan untuk tidak memudahkan dengan cara membandingkan atau merata-ratakan hasil penilaian dari masing-masing dimensi penilaian A, D, L pada penilaian PROSES dan I atau Le, T, C dan I pada penilaian HASIL.

Subcategories on this outcome factor are clarified with data showing the level of performance, trends and relevant comparisons for the size and key indicators of company performance and integrated with the company's main requirements. Subcategories on outcome factor are also clarified with data on the scope of reported performance outcome. This directly relates to the application and learning of the company; if the improvement process is widely distributed then there should be an appropriate result.

In addition to the two important factors in evaluation and feedback, namely process and outcome, there are critical and very important considerations in the evaluation and feedback reported, namely the main business factors that must be identified in the company profile, key customer requirements, competitive environment, labor requirements work, main strategic goals and work programs.

Scoring

Scoring is generally done based on an aggregate holistic view of the 4 factor dimensions of ADLI assessment for "Process" or LeTCL for "Outcome". In setting assumptions for the range of initial score, it is recommended not to make it easy by comparing or averaging the assessment results from each of the dimensions of assessment A, D, L in the PROCESS assessment and I or Le, T, C and I in the OUTCOME assessment.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Hasil Evaluasi dan Penilaian KPKU

Perusahaan telah melaksanakan evaluasi kinerja Perusahaan berdasarkan pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN. Evaluasi ini mengacu pada standar Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui posisi Perusahaan dalam mencapai visi Perusahaan yaitu menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi. KPKU diadopsi dan diadaptasi dari *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence* (MBCFPE), mengingat MBCFPE telah terbukti sebagai sistem pengelolaan kinerja Perusahaan paling komprehensif yang dapat membuat sebuah Perusahaan menjadi unggul. Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) merupakan landasan dan referensi dalam pengelolaan BUMN menuju pencapaian kinerja unggul. KPKU juga dapat dijadikan sebagai alat untuk pelaksanaan *self-assessment* pengelolaan BUMN dan pemberian umpan balik kepada masing-masing BUMN.

Selain itu, KPKU memiliki 3 (tiga) peran penting dalam memperkuat daya saing BUMN:

1. Membantu memperbaiki kapabilitas dan kinerja BUMN, baik finansial maupun non finansial.
2. Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi mengenai praktik-praktik terbaik.
3. Berfungsi sebagai alat kerja untuk memahami dan mengelola kinerja dan untuk memandu perencanaan serta pembelajaran organisasi.

Adapun kriteria penilaian kinerja unggul BUMN terdiri atas 7 (tujuh) kategori, yaitu:

1. Kepemimpinan
2. Strategis
3. Pelanggan
4. Pengukuran, Analisis, dan Manajemen Pengetahuan
5. Tenaga Kerja
6. Operasional
7. Hasil

KPKU Evaluation and Assessment Results

The Company has conducted the Company's performance evaluation based on the SOEs Superior Performance Assessment Criteria (KPKU). This evaluation refers to the SOEs Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) standard issued by the Ministry of SOEs No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013. The evaluation is carried out to find out the Company's position in achieving its vision of becoming a leading investment company and a trusted partner in corporate restructuring. KPKU was adopted and adapted from Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCFPE), considering that MBCFPE has proven to be the most comprehensive Company performance management system that can lead to the creation of an excellent company. The Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) is the foundation and reference in SOEs management towards achieving superior performance. The KPKU can also be used as a tool for implementing SOEs management selfassessment and providing feedback to each SOEs.

In addition, KPKU has 3 (three) important roles in strengthening SOEs competitiveness:

1. Assist to improve the capabilities and performance of financial and non-financial SOEs.
2. Facilitating communication and sharing information about best practices.
3. Functioning as a working tool to understand and manage performance and to guide organizational planning and learning.

The SOEs superior performance assessment criteria consist of 7 (seven) categories, namely:

1. Leadership
2. Strategic
3. Customers
4. Measurement, Analysis, and Knowledge Management
5. Labor
6. Operational
7. Outcome

Evaluasi kinerja ini berdasarkan pada 2 (dua) dimensi penilaian; proses dan hasil. Faktor-faktor penilaian untuk masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penilaian Proses

Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah Metode/Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI.

- a. "Metode/Sistem (*Approach*)" adalah metode/sistem yang didesain untuk melaksanakan pekerjaan. Penilaian mengacu pada: (1) Kesesuaian metode/sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan lingkungan operasi Perusahaan, (2) Efektivitas dari penggunaan metode/sistem tersebut, (3) Sejauh mana metode/sistem dilakukan secara berulang (*repeatable*) dan didasarkan pada data dan informasi yang *reliable* (misalnya, terstruktur dan sistematis).
- b. "Penerapan (*Deployment*)" mengacu pada sejauh mana: (1) metode/Sistem diterapkan sesuai dengan desainnya, (2) Metode/Sistem diterapkan secara konsisten, (3) Metode/Sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/unit kerja yang relevan sesuai dengan desainnya.
- c. "Pembelajaran (*Learning*)" mengacu pada: (1) Penyempurnaan Metode/sistem melalui siklus evaluasi dan perbaikan (*improvement*), (2) Inovasi metode/sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan (*breakthrough*), (3) Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi terhadap metode/sistem kepada unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang relevan dalam Perusahaan.
- d. "Integrasi (*Integration*)" mengacu pada: (1) Keselarasan sistem/metode dengan kebutuhan Perusahaan. (2) Ukuran, informasi dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses. (3) Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, diharmonisasikan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran Perusahaan.

This performance evaluation is based on 2 (two) dimensions of assessment; process and outcome. The assessment factors for each of these dimensions are as follows:

1. Process Assessment Factor

Factors used to assess the process are Approach (Method/System), Deployment, Learning, and Integration or abbreviated as ADLI.

- a. Approach is a method/system designed to carry out works. Assessment refers to: (1) The suitability of method/system with the requirements in SOEs KPKU and the Company's operating environment, (2) Effectiveness of the method/system usage, (3) The extent to which the method/system is repeated and is based on reliable data and information (for example, structured and systematic).
- b. "Deployment" refers to the extent to which: (1) The method/system is applied according to the design, (2) The method/system is applied consistently, (3) The method/system is implemented by all relevant functions/work units in accordance with the design.
- c. "Learning" refers to: (1) Method/system improvement through evaluation and improvement cycles, (2) Method/system innovation to drive breakthrough change, (3) Share the results of method/system improvements and innovations with other work units and other relevant process owners in the company.
- d. "Integration" refers to: (1) Alignment of method/system with Company's requirements described in the Company Profile and in other process subcategories, (2) Size, information and improvement systems have been complementary/mutually compatible across work units and across processes, (3) Work programs, processes, outcome, analysis, learning, and actions are harmonized across processes and across work units to support the achievement of Company's goals.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

2. Faktor Penilaian hasil-hasil faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil Perusahaan adalah *Level, Trend, Comparison* dan *Integration* (LETCl).
 - a. *"Level"* mengacu pada: tingkat pencapaian kinerja saat ini dibandingkan dengan target tahun ini maupun realisasi pencapaian tahun sebelumnya.
 - b. *"Trend"* mengacu pada: (1) Tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik (yakni kecuraman data *trend*) dari waktu ke waktu (minimum dalam 3 (tiga) tahun terakhir), (2) Keluasan (tingkat penerapan) dari hasil-hasil kinerja.
 - c. *"Comparison"* mengacu pada: (1) Pembanding kinerja Perusahaan relatif terhadap pembanding yang sesuai misalnya, pesaing atau Perusahaan dalam industri sejenis, (2) Pembandingan kinerja Perusahaan relatif terhadap *benchmarks* atau pemimpin industrinya, atau dengan Perusahaan kelas dunia.
 - d. *"Integration"* mengacu pada: (1) Ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama. (2) Hasil-hasil yang meliputi indikator yang tentang kinerja mendatang; (3) Hasil-hasil diharmonisaikan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran Perusahaan.
2. Outcome Assessment Factor Factors used to evaluate Company's outcome are Level, Trend, Comparison and Integration (LeTCl).
 - a. *"Level"* refers to the level of achievement of current performance compared to this year's target or the realization of previous year's achievement.
 - b. *"Trend"* refers to: (1) the level of performance improvement or ability to maintain good performance at a minimum in the last 3 (three) years, (2) the extent of application of performance outcome.
 - c. *"Comparison"* refers to: (1) a comparison of Company's performance relative to appropriate comparison, for example, competitors or companies in similar industries, (2) comparison of Company's performance relative to benchmarks or industry leaders, or with world-class companies.
 - d. *"Integration"* refers to: (1) the measurement of outcome related to the performance requirements of customers, products, markets, processes and main work programs, (2) the outcome covering valid indicators of future performance, (3) the outcome are harmonized across processes and cross-units to support Company's goals.

Di tahun 2019, PPA melakukan asesmen Kinerja Perusahaan sesuai Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN tahun 2017. Penilaian sebagai Evaluasi atas Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul ini dilaksanakan berdasarkan Surat Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN No. S-08/D7.MBU/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 dan Surat Ketua Umum Forum Ekselen BUMN No. S-068.ASS. KPKU.II.2019. Perusahaan menggunakan *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence* yang di adapt & di adobt oleh Kementerian BUMN sebagai KPKU versi tahun 2017-2018. Pelaksanakan penilaian sebagai evaluasi atas implementasi KPKU yang dilaksanakan pada 25 - 29 Maret 2019, memperoleh skor 511,25.

Di tahun 2019, PPA melakukan asesmen Kinerja Perusahaan sesuai Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN tahun 2017. Penilaian sebagai Evaluasi atas Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul ini dilaksanakan berdasarkan Surat Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN No. S-08/D7.MBU/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 dan Surat Ketua Umum Forum Ekselen BUMN No. S-068.ASS. KPKU.II.2019. Perusahaan menggunakan *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence* yang di adapt & di adobt oleh Kementerian BUMN sebagai KPKU versi tahun 2017-2018. Pelaksanakan penilaian sebagai evaluasi atas implementasi KPKU yang dilaksanakan pada 25 - 29 Maret 2019, memperoleh skor 511,25.

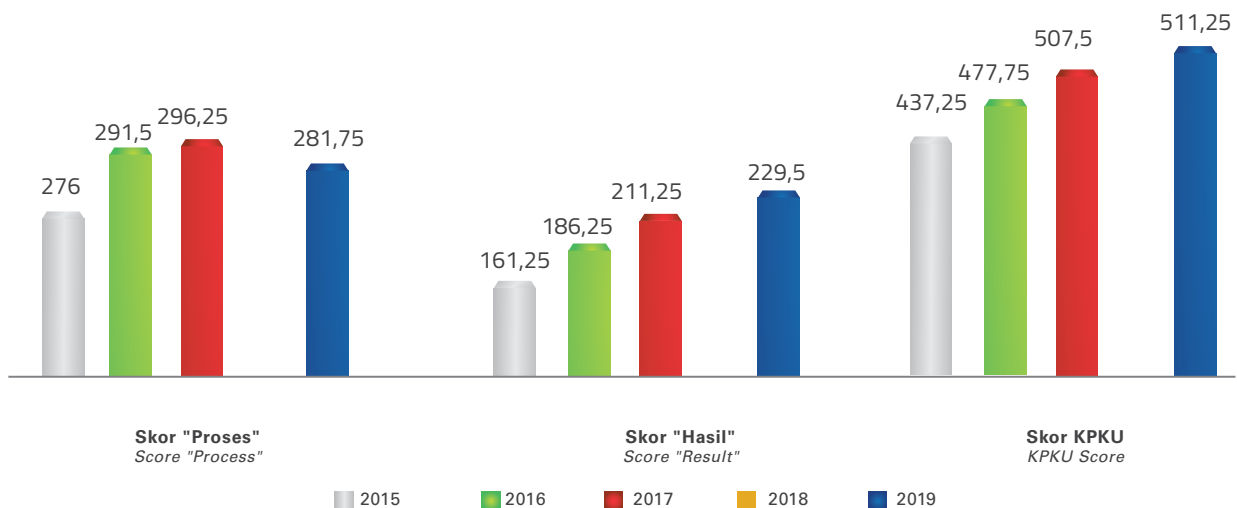
Hasil Resume Skor KPKU 2015-2019

KPKU Score Results 2015-2019

	Kategori / Sub Kategori Category/Subcategory	Skor Maksimal Maximum Score	Skor Pencapaian Achievement Score				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Kepemimpinan Leadership						
	1.1 Kepemimpinan Senior Senior Leadership	70,00	38,50	38,50	38,50	-	35,00
	1.2 Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Governance and Community Responsibility	50,00	27,50	27,50	30,00	-	27,50
2	Perencanaan Strategis Strategic Planning						
	2.1 Pengembangan Strategi Strategy Development	40,00	22,00	22,00	24,75	-	22,50
	2.2 Implementasi Strategi Strategy Implementation	45,00	22,50	22,50	20,00	-	20,00
3	Fokus Pelanggan Customer Focus						
	3.1 Suara Pelanggan Customer Voice	45,00	20,25	20,25	22,00	-	20,00
	3.2 Keterikatan Pelanggan Customer Engagement	40,00	20,00	20,00	24,75	-	24,75
4	Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan Measurement, Analysis and Knowledge Management						
	4.1 Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan Measurement, Analysis and Improvement of Company Performance	45,00	18,00	24,75	22,50	-	22,50
	4.2 Pengelolaan Informasi, Pengetahuan dan Teknologi Informasi Management of Information, Knowledge and Information Technology	45,00	22,50	24,75	22,50	-	22,50
5	Fokus Tenaga Kerja Employee Focus						
	5.1 Lingkungan Tenaga Kerja Employee Environment	40,00	22,00	22,00	22,00	-	22,00
	5.2 Keterikatan Tenaga Kerja Employee Engagement	45,00	20,25	22,50	22,50	-	22,50
6	Fokus Operasi Operations Focus						
	6.1 Sistem Kerja Work System	45,00	22,50	24,75	24,75	-	22,50
	6.2 Proses Kerja Work Process	40,00	20,00	22,00	22,00	-	20,00
	Skor Proses Process Score	550,00	276,00	291,50	296,25	-	281,75

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTUREHasil Resume Skor KPKU 2015-2019
KPKU Score Results 2015-2019

	Kategori / Sub Kategori Category/Subcategory	Skor Maksimal Maximum Score	Skor Pencapaian Achievement Score				
			2015	2016	2017	2018	2019
7	Hasil-Hasil Outcome						
7.1	Hasil-hasil Produk dan Proses Product and Process Outcome	110,00	33,00	33,00	49,50	-	60,00
7.2	Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan Customer Focus Outcome/Performance	85,00	25,50	34,00	42,50	-	40,00
7.3	Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja Employee Focus Outcome/Performance	85,00	29,75	38,25	38,25	-	40,00
7.4	Hasil-hasil Kepemimpinan dan Tata Kelola Leadership and Governance Outcome	80,00	28,00	36,00	36,00	-	40,00
7.5	Hasil-hasil Keuangan dan Pasar Financial and Market Outcome	90,00	45,00	45,00	45,00	-	49,50
	Skor Hasil Outcome Score	450,00	161,25	186,25	211,25	-	229,50
	JUMLAH TOTAL	1.000,00	437,25	477,75	507,50	-	511,25

Hasil Evaluasi dan Penilaian KPKU Perusahaan 2015-2019
2015-2019 KPKU Company's Evaluation and Assessment Results

Dari laporan tersebut Tim Evaluator KPKU mengeluarkan umpan balik yang menghasilkan peluang perbaikan (*Opportunity for Improvements*) dan kekuatan (*Strengths*) Perusahaan untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan *improvement* baik proses maupun *improvement* hasil-hasil bisnis Perusahaan di tahun selanjutnya sehingga sangat diharapkan untuk skor KPKU di tahun mendatang dapat meningkat lagi. Berikut *Opportunity for Improvements* (OFI) atau peluang perbaikan atas implementasi KPKU di tahun 2019.

From the report, KPKU Evaluator Team issued feedback that resulted in the Company's Opportunity for Improvements and Strengths of to be used as a basis for making improvements both in the process and business outcome of the Company in the following year, hence the KPKU score in the coming year is expected to increase. Followings are Opportunity for Improvements (OFI) on KPKU implementation in 2019.

Key Themes Strengths sesuai hasil Penilaian KPKU Tahun Buku 2018 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Key Themes Strengths according to the results of KPKU Assessment for Fiscal Year 2018 are as the table below:

No.	Key Themes Strengths
1.	Perusahaan telah menunjukkan praktik nilai inti <i>Focus on Success</i>, melalui berbagai pendekatan sistematis yang mengkapitalisasi kompetensi inti perusahaan dan keunggulan bidang sumberdaya terutama di bidang <i>finance</i>. Pengalaman menangani klien perusahaan-perusahaan yang tidak sehat hingga menjadi sehat dan memerhatikan peluang-peluang usaha dalam area bisnis penyehatan perusahaan serta aspirasi pemegang saham, dan masukan-masukan dari suara pelanggan melalui proses mendengarkan suara pelanggan dan calon pelanggan, telah dijadikan masukan utama dalam penentuan sasaran strategis, strategi dan, dan inisiatif strategis melalui proses penyusunan rencana strategis perusahaan RJPP dan RKAP untuk kemudian dijadikan patokan dalam penyusunan KPI / Kontrak Manajemen Direksi dan <i>senior leaders</i> lainnya, yang didukung dengan penerapan sistem GCG. RJPP 2018 – 2022 menetapkan sasaran strategis Perusahaan yaitu pertumbuhan total aset 3 kali lipat (dari Rp10.9 T menjadi Rp30,4 T) dalam 5 tahun, dan pertumbuhan pendapatan tumbuh sekira 4,5 kali lipat (dari Rp7.7. T menjadi Rp37.4 T) dalam 5 tahun kedepan, dan Laba perusahaan tumbuh 5 kali lipat (dari Rp410 M menjadi Rp2.1 T). The company has demonstrated the practice of core value of Focus on Success, through various systematic approaches that capitalize on the company's core competencies and excellence in the field of resources, especially finance. The experience of handling clients of companies that are not healthy to be healthy and observing business opportunities in the company's health business area and the aspirations of shareholders, and input from the voice of customers through the process of listening to the voice of customers and prospective customers, has been used as the main input in determining strategic goals, strategies and, and strategic initiatives through the process of RJPP and Budget and Planning corporate strategic plans to then be used as a benchmark in the preparation of KPI/Management Contracts for Board of Directors and other senior leaders, supported by the implementation of GCG system. RJPP 2018 - 2022 determines the Company's strategic goals which are 3 times growth of total assets (from Rp10.9 T to Rp30.4 T) in 5 years, and 4.5 times of revenue growth (from Rp7.7. T to Rp37.4 T) in the next 5 years, and 5 times of company's income (from Rp. 410 M to Rp. 2.1 T).
2.	Perusahaan telah menunjukkan praktik tata nilai <i>valuing employees</i> melalui implementasi sistem-sistem terkait pengelolaan sumber daya manusia seperti sistem manajemen kinerja, sistem pengembangan karir, sistem kompensasi dan <i>benefit</i> sehingga tenaga kerja Perusahaan <i>engaged</i> dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengeksekusi strategi dan program kerja perusahaan, proses pengelolaan IT perusahaan. Hal ini terbukti dari pencapaian produktivitas tenaga kerja yang meningkat 1,8 kali dalam 3 tahun terakhir (2016 s.d. 2018). The company has demonstrated the practice of core value of valuing employees through the implementation of systems related to human capital management such as performance management systems, career development systems, compensation and benefit systems so that the Company's employees are engaged in carrying out their duties and responsibilities in executing the company's work strategies and programs, corporate IT management process. This is evident from the achievement of employee productivity which increased 1.8 times in the last 3 years (2016 to 2018).

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

No.	Key Themes Strenghts
3.	<i>Senior leaders</i> Perusahaan berkomunikasi dengan dan terlibat langsung dalam membangun keterikatan dengan semua tenaga kerjanya melalui <i>Town Hall meeting</i> dengan frekuensi 3-4 kali per tahun, dengan berpedoman pada Prosedur Kegiatan <i>Sharing Session</i>. Sistem ini telah di terapkan secara konsisten dan pada tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dan secara umum dirasakan bermanfaat oleh karyawan Perusahaan. Sistem ini juga di <i>review</i> setahun sekali, dan telah terintegrasi dengan kebutuhan perusahaan terkait pemenuhan persyaratan <i>engagement</i> tenaga kerja (P.1a.4). Sistem ini terbukti efektif, antara lain sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 7.3.a.(3).2 Indeks Keterikatan (<i>Engagement</i>) Tenaga Kerja yang mencapai <i>level Good</i>. Hal ini memperkuat Nilai inti KPU di Perusahaan yaitu Pengharkatan Manusia (<i>Valuing People</i>). The Company's senior leaders communicate with and are directly involved in building engagement with all employees through the Town Hall meeting with a frequency of 3-4 times per year, guided by the Sharing Session Activity Procedure. This system has been applied consistently and in 2018 has been applied 3 times and is generally felt beneficial by the Company's employees. This system is also reviewed once a year, and has been integrated with the company's needs related to the fulfillment of employee engagement requirements (P.1a.4). This system has proven to be effective, as shown in Graph 7.3.a.(3).2 Employment Engagement Index that reached Good level. This strengthens the KPU's core value in the Company, which is Valuing People.
4.	Perusahaan menyusun program kerja dengan berpedoman pada Kebijakan Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan dan SOP penyusunan RKAP dengan tahapan sebagai berikut: 1) pembentukan Tim RKAP; 2) Tim mengkompulasi usulan RKAP dari berbagai Bagian; 3) Tim Membahas usulan tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan usulan RKAP sesuai kebutuhan; 4) Tim mengkopilasi RKAP dan menyampaikannya kepada Direksi untuk disetujui. Sistem ini telah dilaksanakan secara konsisten dan terbukti efektif. Contohnya, telah dihasilkan dokumen RKAP 2018 dan Dokumen RKAP 2019 yang memenuhi persyaratannya. Sistem ini telah terintegrasi dengan kebutuhan perusahaan yaitu dengan visi dan kompetensi inti PPA (P.1.a.2). RKAP tersebut telah dilaksanakan dan target-target berhasil dilampaui antara lain target Pendapatan (7.5.a.1.1), Target Laba/Rugi Operasi (7.5.a.1.2), dan Target Laba/Rugi Bersih (7.5.a.1.4). Hal ini memperkuat praktik/terwujudnya tata nilai Fokus pada Kesuksesan di lingkungan Perusahaan. The Company prepares a work program based on the Compilation of Work Plan and Corporate Budget Policies and SOP for the preparation of Budget and Planning with the following stages: 1) Formation of the Budget and Planning Team; 2) The team compiles the proposed Budget and Planning from various Sections; 3) The team discusses the proposal and provides recommendations for improving the Budget and Planning proposal as needed; 4) The team compiles the Budget and Planning and submits it to the Board of Directors for approval. This system has been consistently implemented and proven effective. For example, 2018 Budget and Planning documents and 2019 Budget and Planning documents have been produced that meet the requirements. This system has been integrated with the company's needs, namely with PPA's vision and core competencies (P.1.a.2). The Budget and Planning has been implemented and the targets have successfully exceeded between the operating income/loss (7.5.a.1.2), and the net income/loss target (7.5.a.1.4). This demonstrates/realizes the value of Focus on Success in the Company's environment.
5.	Perusahaan telah secara sistematis mendengarkan, berinteraksi dan mengamati pelanggan untuk mendapatkan informasi yang dapat ditindaklanjuti, dengan cara pendekatan melalui survei pelanggan, <i>website</i>/sosial media dan pelaksanaan program kegiatan eksternal sebagai contoh terbukti adanya partisipasi dalam kegiatan <i>Indonesia Business Development Expo</i> yang dilaksanakan setiap tahun dan telah diatur dalam SE-9/PPA/1217 tentang Prosedur Komunikasi Perusahaan dan SK-2/PPA/0118 tentang Kebijakan Penanganan Pelanggan, kemudian data hasil survei pelanggan dan sosial media tersebut dievaluasi dan dilaporkan dalam bentuk memo kepada Direksi untuk perbaikan, sehingga Perusahaan dapat memberikan pelayanan jasa/produk yang diharapkan atau dipersyaratkan oleh Pelanggan saat ini dan di masa yang akan datang, sebagai bentuk Keunggulan yang Fokus pada Pelanggan. The company has systematically listened, interacted and observed customers to obtain information that can be followed up, by approaching through customer surveys, website/social media and external activity programs as an example of proven participation in the Indonesia Business Development Expo activities that are carried out annually and have regulated in SE-9/PPA/1217 regarding Corporate Communication Procedures and SK-2/PPA/0118 regarding Customer Handling Policy, then the customer survey and social media survey data are evaluated and reported in the form of a memo to the Board of Directors for improvement, so that the Company can provide services/products that are expected or required by customers at present and future time, as a form of excellence that is focus on customer.

No.	Key Themes Strenghts
6.	Perusahaan telah melaksanakan proses menyeleksi, mengumpulkan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan data dan informasi untuk menelusuri kinerja operasional harian dan kinerja organisasional keseluruhan yang diatur oleh SE Nomor: SE-001/PPA/2017 tentang SOP Kegiatan <i>Strategic Planning</i> and <i>Monitoring</i> yang mencakup kinerja triwulanan aspek keuangan, <i>market</i> dan <i>people</i> yang dikelola oleh Divisi <i>Corporate Strategic Planning and Monitoring</i> (CSPM). Mulai dari meminta data yang akan dijadikan target evaluasi perencanaan strategis ke masing-masing unit bisnis, menganalisa dan laporan evaluasi perencanaan strategis yang akan dipresentasikan ke Direksi. Divisi Keuangan dan Akuntansi paling lambat 15 hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir sesuai SE-44/PPA/0917 membuat laporan kinerja bulanan dan meng-<i>upload</i>-nya ke dalam aplikasi <i>Dashboard</i> kinerja keuangan yang dapat diakses oleh Dewan Komisaris, Direksi dan <i>General Manager</i>. Sedangkan data kinerja <i>market</i> dilaporkan setiap 3 bulan dan dikirimkan ke Divisi CSPM. Selanjutnya Divisi CSPM melakukan pengolahan data untuk disampaikan kepada Direksi. Sehingga manajemen Perusahaan mampu memenuhi kebutuhan data dan informasi untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional, serta mendukung terwujudnya tata nilai <i>Management by Facts</i>. The company has carried out the process of selecting, collecting, harmonizing, and integrating data and information to track daily operational performance and overall organizational performance regulated by SE Number: SE-001/PPA/2017 concerning SOP for Strategic Planning and Monitoring Activities which includes quarterly financial, market and people aspects managed by the Corporate Strategic Planning and Monitoring (CSPM) Division. Starting from requesting data that will be the target of strategic planning evaluation to each business unit, analyzing and evaluating the strategic planning report that will be presented to the Board of Directors. The Finance and Accounting Division is no later than 15 working days after the relevant month ends according to SE-44/PPA/0917 to make monthly performance report and upload them to the Dashboard Financial Performance application that can be accessed by Board of Commissioners, Board of Directors and General Manager. While market performance data are reported every 3 months and sent to the CSPM Division. Furthermore, CSPM Division conducts data processing to be submitted to the Directors. So that the Company's management is able to meet the needs of data and information for decision making in operational activities, and to support the realization of the value Management by Facts.
7.	Perusahaan telah menerapkan memiliki metode untuk mendukung tenaga kerja melalui layanan, pemberian manfaat, dan kebijakan dengan cara (1) Mengikutsertakan karyawan perusahaan dalam Asuransi kesehatan dan Kematian melalui PT Asuransi Jiwa <i>Inhealth Indonesia</i>, untuk semua karyawan tetap dan PKWT. (2) Mengikutsertakan karyawan Perusahaan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI, untuk semua karyawan tetap. (3) Pemberian fasilitas pinjaman karyawan melalui PT PPA <i>Finance</i>, untuk semua karyawan tetap. Terbukti pada grafik 7.3.a.(4).5 Persentase Kepesertaan Karyawan Dalam DPLK menunjukkan level yang membaik. Hal ini menunjukkan PPA memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan karyawan. The Company has applied the following methods to support the workforce through services, benefits, and policies (1) Involving Company employees in health and life insurance through PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, for all permanent and contracted employees. (2) Involving Company employees in BRI Financial Institution Pension Funds, for all permanent employees. (3) Providing employee loan facilities through PT PPA Finance, for all permanent employees. As evidenced in graph 7.3.a. (4).5 Percentage of Employee Participation in DPLK indicates an improved level. This shows that PPA is concerned about the health and welfare of employees.
8.	Perusahaan telah memastikan kehandalan sistem informasi dengan memberikan dukungan dalam menjawab perkembangan kebutuhan bisnis dengan cara pengembangan aplikasi dan sistem informasi secara sistematis antara lain : (1) Implementasi <i>Dashboard</i> Kinerja Keuangan dengan melakukan penambahan <i>Dashboard Project</i>, perkembangan Aset Perusahaan dan Kinerja sampai pada <i>level</i> Divisi. (2) Implementasi beberapa aplikasi yang digunakan untuk memperlancar pekerjaan sehari-hari yang merupakan aplikasi <i>self service</i> yang <i>mobile</i> juga telah dilakukan yaitu aplikasi <i>Meeting Room</i>, <i>Carpool</i> serta <i>Helper</i>. 3) Tim <i>Digital Marketing</i> untuk proyek properti di Tegal (Green Teksin), Paledang (Cempaka Hijau) maupun di Ciomas (Riscon). Penggunaan teknologi <i>Virtual Reality</i> dengan perangkat HTC Vive juga telah diterapkan pada setiap pameran. Mekanisme ini efektif terbukti dari Grafik 7.1.b.(1).7 tentang Tingkat Kegagalan Produk/Layanan yang menunjukkan kinerja unggul dalam 3 tahun terakhir. Sehingga dapat mendorong terwujudnya tata nilai penyampaian nilai dan hasil di lingkungan Perusahaan. The Company has ensured the reliability of information system by providing support in responding to the development of business needs by systematically developing applications and information systems including: (1) Implementing the Financial Performance Dashboard by adding Project Dashboards, developing Company Assets and Performance to the Division level. (2) Implementation of several applications used to facilitate daily work which is mobile self-service application has also been carried out, namely the Meeting Room, Carpool and Helper applications. 3) Digital Marketing Team for property projects in Tegal (Green Teksin), Paledang (Cempaka Hijau) and in Ciomas (Riscon). The use of Virtual Reality technology with the HTC Vive device has also been applied at every exhibition. This mechanism is effectively proven from Graph 7.1.b.(1).7 concerning Product/Service Failure Rate which shows superior performance in the last 3 years. So that it can encourage the realization of the value system of delivering values and results within the Company.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Key Themes Opportunity For Improvement sesuai hasil Penilaian KPKU Tahun Buku 2018 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Key Themes Opportunity For Improvement in accordance with the KPKU Assessment results of fiscal year 2018 is as the table below:

No.	Key Themes Opportunity For Improvement
1.	Perusahaan masih mengalami kendala dalam proses pengelolaan perusahaan ini berdasarkan perspektif kesisteman, dalam hal pengelolaan proses kerja Perusahaan. Walaupun sudah dipandu dengan kebijakan perusahaan yaitu SK-62/PPA/1214 tentang Kebijakan Penyusunan Ketentuan Kegiatan Perusahaan, namun masih terdapat <i>gap</i> yang signifikan dalam <i>deployment</i> sistem ini sehingga banyak kegiatan-kegiatan perusahaan yang belum ditopang dengan keberadaan sistem yang handal dan terkendali (Kebijakan, SOP, Petunjuk Teknis), misalnya proses penjabaran/komunikasi visi dan tata nilai perusahaan, proses detail penyusunan strategi perusahaan maupun strategi bisnis, proses pengelolaan keluhan pelanggan, proses melekatkan pembelajaran organisasi ke dalam operasional harian, proses perencanaan suksesi pimpinan perusahaan, proses manajemen inovasi dan lain-lain. Ketiadaan sistem-sistem tersebut dapat berdampak pada penurunan daya saing perusahaan dan kegagalan perusahaan dalam mewujudkan visinya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. The company is still experiencing problems in the process of managing the company based on systemic perspective, in terms of the Company's work process management. Even though has been guided by a company policy, SK-62/PPA/1214 regarding the Policy for the Preparation of Company Activities, but there are still significant gaps in the deployment of this system so that many company activities have not been supported by the existence of reliable and controlled system (Policy, SOP, Technical Guidance), for example the process of elaboration/communication of corporate vision and values, the detailed process of corporate strategy and business strategy, the process of managing customer complaints, the process of embedding organizational learning into daily operations, the process of succession planning for the leadership of the company, the process of innovation management and others. The absence of such systems can have an impact on the decline in corporate competitiveness and failure to realize its vision according to predetermined schedule.
2.	Walaupun sudah dilakukan kegiatan komunikasi budaya perusahaan (SEEIT), baik melalui penerbitan Artefak (buku saku, poster, dan lain-lain), namun pendekatan belum sistematis. Misalnya, tidak ditemukan adanya <i>roadmap</i> rencana internalisasi, target-target, <i>action plan</i>, keterlibatan pimpinan senior dalam hal internalisasi tata nilai perusahaan maupun internalisasi visi perusahaan, tidak ditemukan pula adanya <i>systematic monitoring</i> terhadap eksekusi dari program ini. Hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya visi perusahaan, dan menghambat terwujudnya tata nilai kepemimpinan yang visioner. Although corporate culture communication (SEEIT) activities have been carried out, both through publishing Artifacts (pocket books, posters, etc.), the approach has not been systematic. For example, there was no roadmap for the internalization plan, targets, action plans, involvement of senior leaders in terms of internalizing corporate values or internalizing the company's vision, nor was there a systematic monitoring of the execution of this program. This can result in not achieving the company's vision, and hampering the realization of visionary leadership values.
3.	Walaupun telah terdapat sistem penyusunan RJPP untuk mengembangkan strategi perusahaan, namun sistem tersebut belum sistematis. Misalnya, tidak ada langkah-langkah analisis yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana strategis; tidak ada panduan bagaimana formulasi strategi untuk menjawab berbagai tantangan strategis Perusahaan, tidak ada proses penentuan sistem kerja dan kompetensi inti dan lain-lain. Hal ini dapat mengakibatkan RJPP yang dihasilkan tidak mampu menjawab dinamika lingkungan strategis serta tidak mendukung tata nilai Fokus pada Kesuksesan. Although there has been an RJPP preparation system for developing company strategies, the system has not been systematic. For example, no analytical steps are needed in the process of preparing a strategic plan; there is no guidance on how to formulate strategies to respond to the Company's various strategic challenges, there is no process of determining work systems and core competencies and others. This can result in RJPP being unable to answer the dynamics of strategic environment and not supporting the value of Focus on Success.
4.	Walaupun Perusahaan telah memiliki kebijakan penanganan pelanggan (sesuai SK-3/PPA/0118) yang salah satu substansinya adalah mengelola keluhan pelanggan, namun kebijakan tersebut belum dilengkapi dengan SOP ataupun petunjuk teknis, sehingga pengelolaan pelanggan belum dapat dilaksanakan secara sistematis. Hal ini dapat mengakibatkan kegagalan dalam melayani pelanggan serta menghambat terwujudnya tata nilai keunggulan yang Fokus pada Pelanggan. Although the Company has a customer handling policy (in accordance with SK-3/PPA/0118), one of which is managing customer complaints, but the policy has not been equipped with SOPs or technical guidelines, so that customer management cannot be carried out systematically. This can lead to failure in serving customers as well as hampering the realization of value system of excellence that focus on Customer.

No.	Key Themes Opportunity For Improvement
5.	Perusahaan tidak memiliki metode sistematis untuk menggunakan pengetahuan dan sumber daya perusahaan guna melekatkan pembelajaran organisasi ke dalam operasional perusahaan. Tidak ditemukan adanya Kebijakan, SOP, ataupun Petunjuk Teknis mengenai mekanisme penggunaan pengetahuan dan sumber daya perusahaan guna melekatkan pembelajaran organisasi ke dalam operasional perusahaan. Sehingga Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mempercepat <i>transfer of knowledge</i> dari karyawan <i>senior</i> kepada karyawan <i>junior</i>nya ataupun dari karyawan dengan keahlian spesifik kepada karyawan lainnya yang dibutuhkan dalam mendukung transformasi Perusahaan menjadi perusahaan Investasi. The company does not have a systematic method to use company knowledge and resources to embed organizational learning into company operations. There are no policies, SOPs, or Technical Guidelines found on the mechanism of using company knowledge and resources to embed organizational learning into company operations. So that the Company will experience difficulties in accelerating the transfer of knowledge from senior employees to junior employees or from employees with specific skills to other employees needed to support the company's transformation into an investment company.
6.	Walaupun telah ditetapkan Diagram Suksesi pada SOP Pengembangan Karir berdasarkan SK nomor SK-35/PPA/0314, namun <i>Senior Leaders</i> Perusahaan belum memiliki pendekatan sistematis untuk berpartisipasi dalam perencanaan suksesi dan pengembangan para pemimpin organisasi ke depan. Misalnya, tidak didefinisikan peran <i>senior leaders</i> Perusahaan dalam pengembangan para pemimpin Perusahaan ke depan. Tidak ditemukan petunjuk teknis yang secara spesifik memandu proses perencanaan suksesi / kaderisasi pimpinan. Sehingga kemungkinan Perusahaan akan kesulitan dalam menghasilkan pimpinan-pimpinan yang unggul untuk menjawab tantangan strategis perusahaan dan mewujudkan visi perusahaan, serta menghambat terwujudnya tata nilai Kepemimpinan yang Visioner. Even though the Succession Diagram has been established in the Career Development SOP based on Decree number SK-35/PPA/0314, the Company's Senior Leaders do not yet have a systematic approach to participate in succession planning and development of organizational leaders going forward. For example, the role of the Company's senior leaders is not defined in the future development of Company leaders. No technical instructions were found that specifically guided the leadership succession/regeneration planning process. So that the Company might be difficult in producing superior leaders to answer the company's strategic challenges and realize the company's vision, and hamper the realization of the Visionary Leadership value.
7.	Walaupun Perusahaan telah melaksanakan mekanisme mengejar peluang – peluang untuk inovasi melalui cara antara lain (1) Pembentukan <i>Tim Product Development</i>. (2) Penggunaan hasil riset pasar/industri untuk mengidentifikasi peluang atau mengevaluasi proyek. (3) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung bisnis Perusahaan. Namun belum efektif dapat mengukur dan mengumpulkan peluang dan inovasi yang sudah ada hal ini terlihat dari Grafik 7.1.b.(1). 1 Inovasi Produk (Pengembangan Produk/Jasa) yang tidak ada media pengumpulan datanya serta menunjukkan <i>trend yang Unfavourable</i>. Hal ini dapat mengakibatkan Perusahaan secara organisasi kurang lincah dalam menghadapi perubahan eksternal dalam mencapai visi perusahaan, serta menghambat terwujudnya tata nilai manajemen inovasi. Although the Company has implemented a mechanism to pursue opportunities for innovation through (1) Forming a Product Development Team. (2) Use of market/industry research results to identify opportunities or evaluate projects. (3) Utilizing technology in supporting the Company's business. However, it has not been effective in measuring and gathering opportunities and innovations that already exist, as can be seen from Graph 7.1.b. (1). 1 Product Innovation (Product/Service Development) for which there is no data collection media and shows trends that are unfavorable. This can cause the Company as an organization to be less agile in dealing with external changes in achieving the company's vision, as well as hampering the realization of the value of innovation management.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**PENILAIAN PENERAPAN GCG UNTUK ASPEK
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Melalui penilaian atas penerapan GCG yang berdasar pada alat uji keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 pada 6 Juni 2012, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki porsi tersendiri terkait sejauh mana Dewan Komisaris memenuhi standar penerapan GCG.

Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2019, dilakukan dengan *Assessment* oleh pihak independen, PT Adikarya Gemilang Solusindo. Hasil *Assessment* untuk tahun buku 2019 menunjukkan hasil dengan predikat "SANGAT BAIK" dengan capaian skor sebesar 88,53. Khusus untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing memperoleh skor 32,74 dan 32,41 dengan kategori "Sangat Baik" untuk kedua aspek tersebut.

**GCG ASSESSMENT FOR BOARD OF
COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
ASPECT**

Through assessment on GCG implementation based on the parameter as in Minister of SOEs Secretary Decree Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, the Board of Commissioners has a distinctive portion related how far the Board of Commissioners fulfills GCG implementation standards.

The GCG assessment the 2019 fiscal year was carried out with an assessment by independent party, PT Adikarya Gemilang Solusindo. The assessment for the 2019 fiscal year showed results with "VERY GOOD" predicate with an achievement score of 88.53. Specifically for Board of Commissioners and Board of Directors aspects, each scored 32.74 and 32.41 in "Very Good" category for both aspects.

Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2019
GCG Assessment for Measurement Year 2019

Jenis Penilaian Assessment Type	: <i>Assessment</i> (Penilaian) Assessment
<i>Assessor</i> /Penilai Assessor	: PT ADIKARYA GEMILANG SOLUSINDO ("AGS")
Periode Penerapan Implementation Period	: 1 Januari - 31 Desember 2019 January 1 - December 31, 2019
Tahun Buku Fiscal Year	: 2019
Waktu Pengukuran Measurement Time	: Desember 2019 – Januari 2020 December 2019 - January 2020
Waktu Terbit Laporan Report Issuance Time	: 4 Februari 2020 February 4, 2020

Rincian hasil *Assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

Details of the assessment results of the Company's GCG implementation for the 2019 fiscal year are as follows:

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2019 Achievement in Fiscal Year 2019		
		Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement (%)	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG Qualification of GCG Implementation Quality
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation	7,00	6,63	94,66%	"Sangat Baik" "Very Good"
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,68	96,39%	"Sangat Baik" "Very Good"
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BOARD OF COMMISSIONERS/SUPERVISORY BOARD	35,00	32,74	93,53%	"SANGAT BAIK" "VERY GOOD"
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	35,00	32,41	92,59%	"SANGAT BAIK" "VERY GOOD"
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	7,46	82,91%	"Baik" "Good"
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	0,63	12,50%	-
Skor Keseluruhan Total Score	100,00	88,53	88,53%	"Sangat Baik" "Very Good"

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Annotation: 0-50 : Very Poor | 50-60 : Poor | 60-75 : Sufficient | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

Tentang rekomendasi terhadap aspek Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan/penyempurnaan atau *Area of Improvement* (AoI) dapat dilihat pada bagian "Hasil Tata Kelola: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik" dalam bab ini.

Regarding recommendations on Board of Commissioners and Board of Directors aspect that need improvement or Area of Improvement (AoI) can be seen in "Governance Results: Evaluation, Monitoring, and Improvement of Good Corporate Governance Implementation" section in this chapter.

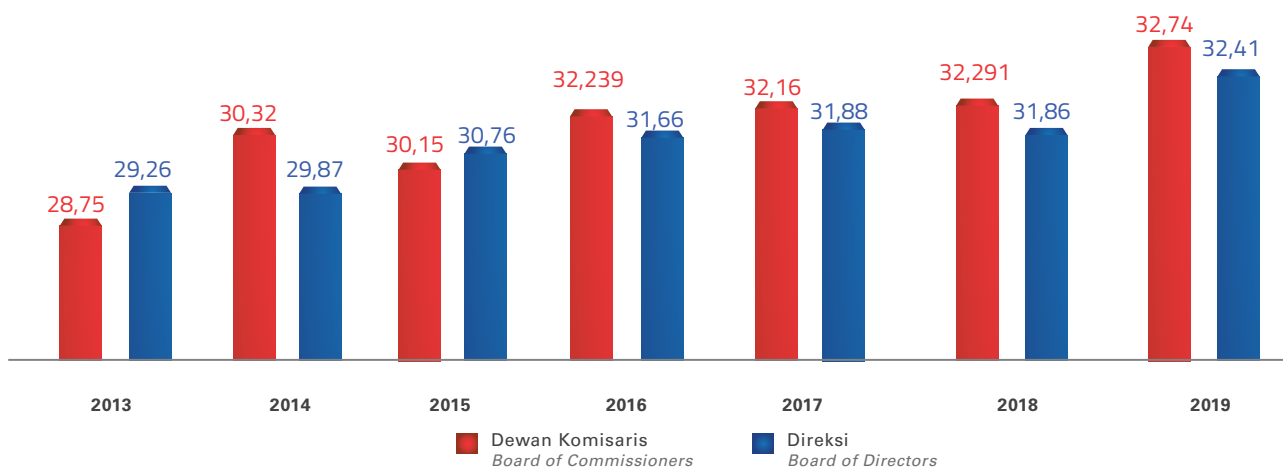
STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Perkembangan penilaian *assessment* penerapan GCG khusus untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di bawah ini.

The progress of the assessment of GCG implementation assessment specifically for aspects of the Board of Commissioners and Directors can be seen below this.

Pencapaian Hasil *Assessment* Penerapan GCG
Achievement of GCG Assessment Results

Tahun Year	Jenis Penilaian Type of Assessment	Penilai Assessor	Skor <i>Assessment</i> GCG GCG Assessment Score		
			Aspek Dewan Komisaris Board of Commissioners Aspect	Aspek Direksi Board of Directors Aspect	Kategori Category
2019	<i>Assessment</i>	PT Adikarya Gemilang Solusindo	32,74	32,41	"Sangat Baik" "Very Good"
2018	<i>Self Assessment</i>	Tim Internal Internal Team	32,291	31,869	"Sangat Baik" "Very Good"
2017	<i>Assessment</i>	PT Icon Global Solusi (Independen) (Independent)	32,1671	31,8844	"Sangat Baik" "Very Good"
2016	<i>Self Assessment</i>	Tim Internal Internal Team	32,239	31,622	"Sangat Baik" "Very Good"
2015	<i>Assessment</i>	PT Sinergi Daya Prima (Independen) (Independent)	30,157	30,762	"Sangat Baik" "Very Good"
2014	<i>Self Assessment</i>	Tim Internal Internal Team	30,32	29,87	"Sangat Baik" "Very Good"
2013	<i>Assessment</i>	PT Kharisma Insani Manajemen (Independen) (Independent)	28,75	29,26	"Baik" "Good"

Pencapaian Hasil *Assessment* Penerapan GCG Aspek Dewan Komisaris dan Direksi 2013-2019
Achievement of GCG Assessment Results of Board of Commissioners and Board of Directors 2013-2019

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS
AND BOARD OF DIRECTORS**

Penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris di Perusahaan mengacu kepada Keputusan RUPS/Menteri dan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku.

Income for Board of Directors and Board of Commissioners in the Company refer to the GMS/Ministerial Decree and applicable SOEs Ministerial Regulation.

Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan PER-02/MBU/06/2016, PER-01/MBU/06/2017, PER-06/MBU/06/2018 dan PER-01/MBU/05/2019 serta Surat Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha atas nama Menteri BUMN Nomor S-496/MBU/D6/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 Hal : Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2019.

Income for Board of Directors and Board of Commissioners in 2019 referred to SOEs Ministerial Regulation number PER04/MBU/2014 concerning Guidelines to Determine Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended by PER-02/MBU/06/2016, PER-01/MBU/06/2017, PER-06/MBU/06/2018 and PER-01/MBU/05/2019 and Letter of Deputy for Restructuring and Business Development on behalf of the Minister of SOEs number S-496/MBU/D6/05/2019 dated May 31, 2019 concerning Determination of Income of Board of Directors and Board of Commissioners of PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in 2019.

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun, Perusahaan menganggarkan rencana kenaikan penghasilan bagi Direksi Dan Dewan Komisaris yang besarnya disesuaikan dengan pertumbuhan Perusahaan, besarnya target yang ditetapkan serta perkembangan *salary* bagi CEO di *market*.

1. Berdasarkan pencapaian kinerja dan KPI tahunan, kemampuan keuangan Perusahaan serta kewajaran besarnya penghasilan pada industri / perusahaan sejenis di *market* Direksi mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan kepada RUPS.
2. Berdasarkan usulan Direksi dan pertimbangan Dewan Komisaris selanjutnya Dewan Komisaris mengusulkan besaran penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan dalam RUPS Laporan Tahunan.
3. RUPS/Menteri menetapkan penghasilan bagi Direksi Dan Dewan Komisaris.

Procedure of Proposal Until Determination of Board of Commissioners and Directors Remuneration

In the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) every year, the Company budgeted a plan to increase income for Board of Directors and Board of Commissioners, the amount of which is adjusted to the Company's growth, the amount of the target set and salary development for CEOs in the market.

1. Based on the achievement of performance and annual KPI, the Company's financial capability and the fairness of amount of income in similar industries/companies in the market, the Board of Directors proposes to the Board of Commissioners to then proposes to the GMS.
2. Based on Board of Directors 'proposal and Board of Commissioners' further consideration, the Board of Commissioners proposes the amount of income for Directors and Commissioners to the GMS/Minister to be determined in the GMS on Annual Report.
3. GMS/Minister determines income for Board of Directors and Board of Commissioners.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Jenis Penghasilan Direksi Dan Dewan Komisaris**

Jenis penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan PER-02/MBU/06/2016, PER-01/MBU/06/2017, PER-06/MBU/06/2018 dan PER-01/MBU/05/2019 serta Surat Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha atas nama Menteri BUMN Nomor S-496/MBU/D6/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 terdiri dari :

Penghasilan Direksi :

- a. Gaji yang besarnya ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
- b. Tunjangan:
 - Tunjangan hari raya sebesar 1 kali Gaji per tahun.
 - Tunjangan perumahan sebesar 40% dari Gaji maksimal Rp. 27.500.000,-.
 - Asuransi purna jabatan besarnya premi per tahun 25% kali Gaji setahun.
- c. Fasilitas:
 - Fasilitas kendaraan berupa 1 unit Toyota Alpard 2500cc beserta biaya perbaikan dan operasional kendaraan.
 - Fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan rawat inap, penggantian rawat jalan dan *medical check up*.
 - Fasilitas bantuan hukum berupa pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum.
- d. Tantiem/insentif kinerja yang besarnya ditetapkan RUPS/Menteri.
- e. Lain-lain:
 - Hak cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja.
 - Biaya operasional untuk biaya komunikasi, pakaian dinas, keanggotaan perkumpulan profesi, *club membership* dan biaya representasi yang besarnya sesuai dengan anggaran dalam RKAP.
 - Pajak atas Gaji dan Tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja menjadi beban penerima.
 - Diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Types of Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration

Types of Board of Directors and Board of Commissioners remuneration in 2019 refer to SOEs Ministerial Regulation number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines to Determine Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended by PER-02/MBU/06/2016, PER-01/MBU/06/2017, PER-06/MBU/06/2018 and PER-01/MBU/05/2019 and Letter of Deputy for Restructuring and Business Development on behalf of the Minister of SOEs number S-496/MBU/D6/05/2019 dated May 31, 2019, which consists of:

Board of Directors' income:

- a. Salary, with the amount determined by the GMS/Minister.
- b. Allowance:
 - Religious holiday allowance of 1 times annual Salary.
 - Housing allowance of 40% of salary at a maximum of Rp27,500,000.
 - Full-time insurance premium per year of 25% times of annual Salary.
- c. Facilities :
 - Vehicle facilities in the form of 1 unit of Toyota Alpard 2500cc along with vehicle repair and operational costs.
 - Health facilities in the form of inpatient health insurance, outpatient reimbursement and medical check-up.
 - Legal aid facilities in the form of legal services/legal consultant office financing.
- d. Tantiem/performance incentives, in which the amount is determined by the GMS/Minister.
- e. Others:
 - Annual leave entitlement of 12 working days.
 - Operational costs for communication, official clothing, membership of professional associations, club membership and representation fees, in which the amount is in accordance with the budget in the Budget and Planning.
 - Taxes on Salaries and Benefits are borne by the Company, while taxes on tantiem/performance incentives are borne by the recipient.
 - Included in BPJS Employment and BPJS Health programs.

Penghasilan Dewan Komisaris:

- a. Honorarium yang besarnya sesuai dengan komposisi faktor jabatan
- b. Tunjangan
 - Tunjangan hari raya sebesar 1 kali Honorarium per tahun.
 - Tunjangan transportasi sebesar 20% dari Honorarium.
 - Asuransi purna jabatan besarnya premi per tahun 25% kali Honorarium setahun.
- c. Fasilitas
 - Fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan rawat inap, penggantian rawat jalan dan *medical check up*.
 - Fasilitas bantuan hukum berupa pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum.
- d. Tantiem/insentif kinerja besarnya sesuai dengan komposisi faktor jabatan
- e. Lain-lain:
 - Biaya operasional untuk pakaian dinas dalam perkumpulan profesi yang besarnya sesuai dengan anggaran dalam RKAP.
 - Pajak atas Honorarium dan Tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja menjadi beban penerima.

Komposisi faktor jabatan

Besarnya Penghasilan Direksi Dan Dewan Komisaris atas Gaji/Honorarium mengikuti komposisi faktor jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS/Menteri atau Peraturan Menteri BUMN yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Gaji Direktur Utama ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
2. Gaji Direktur yang membawahi bidang sumber daya manusia sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
3. Gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama.
4. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama.
5. Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.

Board of Commissioners' Income:

- a. Honorarium, in which the amount is in accordance with the composition of position factor
- b. Allowance
 - Religious Holiday allowance of 1 times annual Honorarium.
 - Transportation allowance of 20% of Honorarium.
 - Full-time insurance premiums per year of 25% times annual Honorarium.
- c. Facilities
 - Health facilities in the form of inpatient health insurance, outpatient reimbursement and medical check-ups.
 - Legal aid facilities in the form of legal services/legal consultant office financing.
- d. Tantiem/performance incentives, in which the amount is in accordance with the composition of occupational factor
- e. Others:
 - Operational costs for official clothing in professional associations, in which the amount is in accordance with the budget in the Budget and Planning.
 - Taxes on Honorarium and Allowances are borne and become the Company's expense, while taxes on Tantiem/Performance Incentives are borne by the recipient.

Position Factor Composition

The amount of Board of Directors and Board of Commissioners' Income on Salary/Honorarium following the composition of position factor in accordance with the GMS/Ministerial Decree or prevailing SOEs Ministerial Regulation is as follows:

1. Salary of President Director is determined by the GMS/Minister.
2. Salary of Director in charge of human capital is 90% of the salary of President Director.
3. Salary of other Board of Directors Members is 85% of the Salary of President Director.
4. Honorarium of President Commissioner is 45% of the Salary of President Director.
5. Honorarium for Board of Commissioners members is 90% of the Honorarium of President Commissioner.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Besarnya Penghasilan Direksi Dan Dewan Komisaris atas Tantiem/Insentif Kinerja mengikuti komposisi faktor jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS/Menteri atau Peraturan Menteri BUMN yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Total Tantiem/Insentif Kinerja ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
2. Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 100%.
3. Tantiem/Insentif Kinerja Direktur yang membawahi bidang sumber daya manusia sebesar 90% dari Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama.
4. Tantiem/Insentif Kinerja Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama.
5. Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama sebesar 45% dari Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama.
6. Tantiem/Insentif Kinerja anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama.

The amount of Board of Directors and Board of Commissioners' Income on Tantiem/Performance Incentives following the composition of occupational factor in accordance with the GMS/Ministerial Decree or prevailing SOEs Ministerial Regulation is as follows:

1. Total Tantiem/Performance Incentives is determined by the GMS/Minister.
2. Tantiem/Performance Incentives of President Director is 100%.
3. Tantiem/Performance Incentives of Director in charge of human capital is 90% of Tantiem/Performance Incentives of President Director.
4. Tantiem/Performance Incentives of other Board of Directors members is 85% of tantiem/performance incentives of President Director.
5. Tantiem/Performance Incentives of President Commissioner is 45% of Tantiem/Performance Incentives of President Director.
6. Tantiem/Performance Incentives of Board of Commissioners members is 90% of Tantiem/Performance Incentives of President Commissioner.

Realisasi Penghasilan Direksi Dan Dewan Komisaris Tahun 2019

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	JUMLAH AMOUNT
Gaji Salary	6.527.319.726
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	1.193.449.656
THR Religious Holiday Allowance	594.000.000
Tunjangan Pakaian Clothing Allowance	80.000.000
Tunjangan Pakaian Clothing Allowance	1.782.000.000
Kesehatan Rawat Jalan Outpatient Health	422.505.706
Asuransi Rawat Inap + BPJS Kesehatan Inpatient Insurance + BPJS Health	198.451.880
BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment	310.399.104
Uang Saku dan Transport Perjalanan Dinas Pocket Travel and Transportation Services	306.338.900
Operasional Kendaraan Vehicle Operations	598.998.855

Realization of Directors and Board of Commissioners' Income in 2019

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	JUMLAH AMOUNT
Honorarium Honorarium	2.895.750.000
Tunjangan Transport Transport Allowance	579.150.000
THR Religious Holiday Allowance	274.725.000
Tunjangan Pakaian Clothing Allowance	80.000.000
Tunjangan Pakaian Clothing Allowance	805.950.000
Kesehatan Rawat Jalan Outpatient Health	56.881.800
Asuransi Rawat Inap + BPJS Kesehatan Inpatient Insurance + BPJS Health	165.378.900
BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment	122.458.272
Uang Saku dan Transport Perjalanan Dinas Pocket Travel and Transportation Services	65.677.900

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	JUMLAH AMOUNT
Tantiem (Netto) Tahun Sebelumnya Tantiem (Net) of Previous Year	6.189.160.149
Pajak Penghasilan Income Tax	7.653.278.259
JUMLAH DIREKSI TOTAL BOARD OF DIRECTORS	25.855.902.235

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha atas nama Menteri BUMN No. S-496/MBU/D6/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 Hal : Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Gaji Direktur Utama tahun 2019 naik sebesar 10%.
2. Total Tantiem/Insentif Kinerja tahun 2018 bagi Direksi Dan Dewan Komisaris sebesar Rp12.859.000.000,-

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Internal Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara berkala melaksanakan rapat baik rapat internal maupun Rapat Gabungan dengan Direksi. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, pelaksanaan rapat Dewan Komisaris diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis. Seorang anggota Dewan komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	JUMLAH AMOUNT
Tantiem (Netto) Tahun Sebelumnya Tantiem (Net) of Previous Year	2.899.555.496
Pajak Penghasilan Income Tax	2.695.940.600
JUMLAH DEWAN KOMISARIS TOTAL BOARD OF COMMISSIONERS	10.641.467.968

Pursuant to the Letter of Deputy for Restructuring and Business Development on behalf of the Minister of SOEs No. S-496/MBU/D6/05/2019 dated May 31, 2019 concerning Determination of Income of Board of Directors and Board of Commissioners of PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in 2019 are as follows:

1. Salary of President Director in 2019 increased by 10%.
2. Total Tantiem/Performance Incentives for 2018 for Board of Directors and Board of Commissioners amounted to Rp12,859,000,000.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Board of Commissioners Internal Meetings

Board of Commissioners holds meetings regularly both internal and joint meetings (management meetings) with the Board of Directors. According to the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners meeting implementation shall be held minimum 1 (once) in a month. The Board of Commissioners written meeting invitation is sent by the President Commissioner or other Board of Commissioners members appointed by the President Commissioner and delivered maximum 3 (three) days prior the meeting schedule or faster, under urgent matters, by not calculating date of the meeting invitation and implementation.

The Board of Commissioners meeting is chaired by President Commissioner, if the President Commissioner is absent, the Board of Commissioners meeting will be chaired by other Board of Commissioners member appointed by the President Commissioner. A Board of Commissioner member may be represented in the meeting only by other Board of Commissioner member under a written attorney letter. A Board of Commissioners member is only eligible to represent one Board of Commissioners member.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Risalah rapat Dewan Komisaris yang asli disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan didokumentasikan, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir menandatangani surat kuasa dalam rangka pemenuhan GCG untuk kepastian pengambilan keputusan dalam setiap rapat.

Di tahun 2019, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

Minutes of meeting shall be made for every Board of Commissioners meeting. The minutes is signed by meeting chairman and all Board of Commissioners members who attending the meeting. Original copy of the Board of Commissioners Minutes of Meeting is submitted to the Board of Directors to be archived and documented, and the Board of Commissioners keeps the copy. The Board of Commissioners Members who did not attend the meeting signed attorney letter with regards to GCG in terms of decision-making assurance in every meeting.

In 2019, the Board of Commissioners held 12 Internal Meetings of Board of Commissioners. The following is the agenda and minutes of meetings, attendance, and attendance recapitulation of Board of Commissioners in these meetings.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal Dewan Komisaris

Recapitulation of Commissioner Attendance at the Board of Commissioners Internal Meeting

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Wajib Rapat Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) Edy Putra Irawady (President Commissioner)	12	11	91,67%
Tirta Hidayat (Komisaris Independen) Tirta Hidayat (Independent Commissioner)	12	11	91,67%
Lydia Silvanna Djaman (Komisaris)* Lydia Silvanna Djaman (Commissioner)*	5	5	100,00%
Didyk Choiroel (Komisaris) Didyk Choiroel (Commissioner)	12	10	83,33%
Rata-rata Average			90,24%

*) Lydia Silvanna Djaman tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 23 Juli 2019 | *) Lydia Silvanna Djaman no longer served as Commissioner since July 23, 2019.

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris

Minutes of Internal Meeting of the Board of Commissioners and the Presence of the Board of Commissioners

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #01
INTERNAL MEETING #01

Tanggal dan Tempat Rapat : 28 Januari 2019; Ruang Rapat Hotel Borobudur Jakarta.
Meeting Date and Venue : January 28, 2019; Meeting Room of Borobudur Hotel, Jakarta.

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.INT-01/PPA/KOM/0119
Number of Meeting Minutes

Kehadiran Attendance : Agenda Rapat:
1. Evaluasi Tindak lanjut Hasil Rapat Bulan Sebelumnya;
2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d Desember Tahun 2018;
3. Progress Assesmen GCG Perusahaan;
4. Lain-lain: Hasil Wawancara Talent Pool Calon Direksi.

Peserta Rapat:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Lydia S. Djaman
4. Didyk Choiroel
5. Sekdekom dan Komite.

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Evaluation on Follow-up to the Results of Previous Month's Meeting;
2. Performance Evaluation and Cash Flows until December 2018;
3. Progress of Company's GCG Assessment;
4. Others: Results of Talent Pool Candidates for Directors.

Meeting participants:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Lydia S. Djaman
4. Didyk Choiroel
5. Secretary of Board of Commissioners and Committees.

Commissioners who were absent:
-

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #02
BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #02

Tanggal dan Tempat Rapat : 27 Februari 2019; Ruang Rapat Komisaris PT PPA lantai 9
Meeting Date and Venue : February 27, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.INT- 02/PPA/KOM/0219
Number of Meeting Minutes

Kehadiran Attendance : Agenda Rapat:
1. Evaluasi Tindak lanjut Hasil Rapat Bulan Sebelumnya;
2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas Bulan Januari Tahun 2019;
3. Program Sinergi BUMN Tahun 2019;
4. Pembahasan atas Laporan Tahunan PT PPA Tahun Buku 2018;
5. Evaluasi Kinerja Direksi dan Pengusulan Remunerasi.
6. Lain-lain: Progres RJPP PT PPA, Kebijakan Pengelolaan SDM, Pengelolaan Manajemen Risiko

Peserta Rapat:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Lydia S. Djaman
4. Didyk Choiroel
5. Sekdekom dan Komite.

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Month's Meeting;
2. Performance Evaluation and Cash Flow in January 2019;
3. SOEs Synergy Program in 2019;
4. Discussion on PT PPA Annual Report of 2018 Fiscal Year;
5. Evaluate Board of Directors' Performance and Propose Remuneration.
6. Others: Progress of PT PPA RJPP, HC Management Policy, Risk Management

Meeting Participants:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Lydia S. Djaman
4. Didyk Choiroel
5. Secretary of Board of Commissioners and Committees.

Commissioners who were absent:
-

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris

Minutes of Internal Meeting of the Board of Commissioners and the Presence of the Board of Commissioners

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #03
BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #03

Tanggal dan Tempat Rapat : 26 Maret 2019; Ruang Rapat Komisaris PT PPA lantai 9
Meeting Date and Venue : March 26, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.INT- 03/PPA/KOM/0319
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Kehadiran : 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Bulan Februari Tahun 2019;
3. Hasil *Self Assessment* GCG Tahun 2018;
4. Pengelolaan Kegiatan Usaha PT PPA Kapital dan PT PPA Finance;
5. Pembahasan atas Laporan Tahunan PT PPA Tahun Buku 2018.

Peserta Rapat:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Lydia S. Djaman
4. Didyk Choeroel
5. Sekdekom dan Komite.

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting
2. Performance Evaluation and Cash Flow until February 2019;
3. 2018 GCG Self Assessment Results;
4. Management of Business Activities of PT PPA Kapital and PT PPA Finance;
5. Discussion on PT PPA Annual Report of Fiscal Year 2018.

Meeting Participants:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Lydia S. Djaman
4. Didyk Choeroel
5. Secretary of Board of Commissioners and Committees.

Commissioners who were absent:
-

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #04
BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #04

Tanggal dan Tempat Rapat : 30 April 2019; Ruang Rapat Komisaris PT PPA lantai 9
Meeting Date and Venue : April 30, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.INT- 04/PPA/KOM/0419
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Kehadiran : 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan I Tahun 2019;
3. Evaluasi Kinerja Direksi dan Pengusulan Remunerasi;
4. Pelaksanaan Business Plan PMN Tahun 2015 per Tw I/2019;
5. Lain-lain: Persiapan RUPS Audit 2019, Evaluasi Kinerja KAP Audit TB 2018

Peserta Rapat:
1. Tirta Hidayat
2. Lydia S. Djaman
3. Didyk Choeroel
4. Sekdekom dan Komite.

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:
Edy Putra Irawady – Komisaris Utama, tidak dapat hadir karena pada waktu yang bersamaan menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kuasa diserahkan kepada Bapak Tirta Hidayat.

Meeting Agenda:
1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting
2. Performance Evaluation and Cash Flow until 1st Quarter of 2019;
3. Evaluate Board of Directors' Performance and Propose Remuneration;
4. Implementation of the 2015 State Capital Participation Business Plan per Q1/2019;
5. Others: Preparation for the 2019 GMS Audit, Evaluation of KAP Performance of 2018 Audit

Meeting Participants:
1. Tirta Hidayat
2. Lydia S. Djaman
3. Didyk Choeroel
4. Secretary of Board of Commissioners and Committees.

Commissioners who were absent: Edy Putra Irawady - President Commissioner, was unable to attend because at the same time attending a meeting with the Coordinating Minister for Economic Affairs, the power of attorney was given to Tirta Hidayat.

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris

Minutes of Internal Meeting of the Board of Commissioners and the Presence of the Board of Commissioners

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #05

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #05

Tanggal dan Tempat Rapat : 21 Mei 2019; Thamrin Nine Ballroom Chubb Square, Thamrin Nine, lantai GF
Meeting Date and Venue : May 21, 2019; Thamrin Nine Ballroom Chubb Square, Thamrin Nine, GF floor

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.INT- 05/PPA/KOM/0519
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. April Tahun 2019;
3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa serta Kebijakan Mutu dan Pelayanan;
4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang GCG dan Manajemen Risiko.
5. Lain-lain: Peningkatan Peran SPI dan Pergantian Kepala SPI, serta Kebijakan terkait Direksi yang Habis Jabatan

Peserta Rapat:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Lydia S. Djaman
4. Didyk Choiroel
5. Sekdekom dan Komite.

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:
Didyk Choiroel - Komisaris, tidak dapat hadir karena pada waktu yang bersamaan menghadiri rapat bersama Menteri Keuangan, kuasa diserahkan kepada Bapak Tirta Hidayat.

Meeting Agenda:
1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting
2. Performance Evaluation and Cash Flow until April 2019;
3. Evaluation of the Implementation of Goods and Services Procurement Policy as well as Quality and Service Policy;
4. Evaluate the Implementation of GCG and Risk Management Policy.
5. Others: Increasing the Role of SPI and Replacement of Head of SPI, and Policies related to Directors whose tenure end.

Meeting Participants:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Lydia S. Djaman
4. Didyk Choiroel
5. Secretary of Board of Commissioners and Committees.

Commissioners who were absent:
Didyk Choiroel - Commissioner, was unable to attend because at the same time attending a meeting with the Minister of Finance, the power of attorney was given to Tirta Hidayat.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #06

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #06

Tanggal dan Tempat Rapat : 18 Juni 2019; Ruang Rapat Komisaris PT PPA lantai 9
Meeting Date and Venue : June 18, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.INT- 06/PPA/KOM/0619
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. April Tahun 2019;
3. Perkembangan Program Investasi Lainnya RKAP Tahun 2019;
4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
5. Lain-lain: Penguatan Peran SPI dan Penempatan Kepala SPI.

Peserta Rapat:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Didyk Choiroel
4. Sekdekom dan Komite.

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting
2. Performance Evaluation and Cash Flow until April 2019;
3. Development of Other Investment Program of Budget and Planning 2019;
4. Evaluation of the Implementation of Accounting Policies and Preparation of Financial Statements
5. Others: Strengthening the Role of SPI and Placement of Head of SPI.

Meeting Participants:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Didyk Choiroel
4. Secretary of Board of Commissioners and Committees.

Commissioners who were absent:
-

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris

Minutes of Internal Meeting of the Board of Commissioners and the Presence of the Board of Commissioners

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #07

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #07

Tanggal dan Tempat Rapat : 29 Juli 2019; Ruang Rapat Komisaris PT PPA lantai 9
Meeting Date and Venue : July 29, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.INT- 07/PPA/KOM/0719
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan II Tahun 2019;
3. Pengelolaan Kegiatan Usaha PT Nindya Karya;
4. Pelaksanaan Business Plan PMN Tahun 2015 per Tw II/2019
5. Lain-lain: (1) Penguatan Peran Fungsi SPI, (2) Proses Audit BPK RI, (3) Fokus Pembahasan Rapat Gabungan Hari ini, (4) Pembagian Kerja Anggota Dewan Komisaris.

Peserta Rapat:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Didyk Choeroel
4. Sekdekom dan Komite.

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:
-

Meeting agenda:
1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting
2. Performance Evaluation and Cash Flow until 2nd Quarter of 2019;
3. Management of PT Nindya Karya's Business Activities;
4. Implementation of the 2015 State Capital Participation Business Plan per Q2/2019
5. Others: (1) Strengthening the Role of SPI Function, (2) BPK RI Audit Process, (3) Focus of Discussion on Today's Joint Meeting, (4) Division of Duties of Members of Board of Commissioners.

Meeting participants:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Didyk Choeroel
4. Secretary of Board of Commissioners and Committees.

Commissioners who were absent:
-

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #08

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #08

Tanggal dan Tempat Rapat : 27 Agustus 2019; Ruang Rapat Komisaris PT PPA lantai 9
Meeting Date and Venue : August 27, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.INT- 08/PPA/KOM/0819
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Juli Tahun 2017;
3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Karir dan Suksesi Manajemen;
4. Lain-lain: BA Pembagian Kerja Anggota Dewan Komisaris

Peserta Rapat:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Didyk Choeroel
4. Sekdekom dan Komite.

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting
2. Performance Evaluation and Cash Flow until July 2017;
3. Evaluate the Implementation of Career and Management Succession Policy;
4. Others: BA Division of Duties of Members of Board of Commissioners

Meeting Participants:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Didyk Choeroel
4. Secretary of Board of Commissioners and Committees.

Commissioners who were absent:
-

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris

Minutes of Internal Meeting of the Board of Commissioners and the Presence of the Board of Commissioners

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #09

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #09

Tanggal dan Tempat Rapat : 30 September 2019; Ruang Rapat Komisaris PT PPA lantai 9
Meeting Date and Venue : September 30, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.INT- 09/PPA/KOM/0919
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Agustus Tahun 2019;
3. Pengelolaan Kegiatan Usaha PT PPA Finance dan PT PPA Kapital;
4. Aspirasi Pemegang Saham untuk RKAP 2019;
5. Lain-lain: Rencana Rapat Konsinyering Pendalaman RKAP Tahun 2020

Peserta Rapat:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Didyk Choeroel
4. Sekdekom dan Komite.

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting
2. Performance Evaluation and Cash Flow until August 2019;
3. Management of Business Activities of PT PPA Finance and PT PPA Kapital;
4. Shareholders' aspirations for the 2019 Budget and Planning;
5. Others: Consignment Meeting Plan

Meeting Participants:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Didyk Choeroel
4. Secretary of Board of Commissioners and Committees.

Commissioners who were absent:
-

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #10

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #10

Tanggal dan Tempat Rapat : 29 Oktober 2019; Ruang Rapat Komisaris PT PPA lantai 9
Meeting Date and Venue : October 29, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.INT- 10/PPA/KOM/0919
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Juli Tahun 2019;
3. Pelaksanaan *Business Plan* PMN Tahun 2015 per Tw III/2019;;
4. Pembahasan RKAP PT PPA Tahun Buku 2020

Peserta Rapat:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Sekdekom dan Komite.

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:
Didyk Choeroel - Komisaris tidak dapat hadir karena pada waktu yang bersamaan menghadiri rapat bersama Menteri Keuangan, kuasa diserahkan kepada Bapak Tirta Hidayat

Meeting Agenda:
1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting
2. Performance Evaluation and Cash Flow until July 2019;
3. Implementation of the 2015 State Capital Participation Business Plan per Q3/2019;
4. Discussion on PT PPA's Budget and Planning for fiscal year 2020

Meeting Participants:
1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Secretary of Board of Commissioners and Committees.

Commissioners who were absent:
Didyk Choeroel – Commissioner, was unable to attend because at the same time attending a meeting with the Minister of Finance, the power of attorney was given to Tirta Hidayat

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan Komisaris

Minutes of Internal Meeting of the Board of Commissioners and the Presence of the Board of Commissioners

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #11

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #11

Tanggal dan Tempat Rapat : 28 November 2019; Ruang Rapat Komisaris PT PPA lantai 9
Meeting Date and Venue : November 28, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.INT- 11/PPA/KOM/0919
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Oktober Tahun 2019;
3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang GCG dan Manajemen Risiko;
4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi;
5. Lain-lain: (1) Update Progres Penerbitan Surat Utang PT PPA, (2) Perubahan Charter SPI, (3) RJPP PT PPA Tahun 2020-2024.

Peserta Rapat:

1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Didyk Choeroel
4. Sekdekom dan Komite.

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:

-

Meeting Agenda:

1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting
2. Performance Evaluation and Cash Flow until October 2019;
3. Evaluate the Implementation of GCG and Risk Management Policy;
4. Evaluate the Implementation of Information Technology Policy;
5. Others: (1) Update on Progress of PT PPA Debt Issuance, (2) Changes to the SPI Charter, (3) PT PPA RJPP 2020-2024.

Meeting Participants:

1. Edy Putra Irawady
2. Tirta Hidayat
3. Didyk Choeroel
4. Secretary of Board of Commissioners and Committees.

Commissioners who were absent:

-

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS #12

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #12

Tanggal dan Tempat Rapat : 26 Desember 2019; Ruang Rapat Komisaris PT PPA lantai 9
Meeting Date and Venue : December 26, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.INT- 12/PPA/KOM/0919
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya;
2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. November Tahun 2019;
3. Evaluasi Program Investasi Lainnya dalam RKAP Tahun 2019;
4. Agenda RUPS RKAP Tahun Buku 2020;
5. Lain-lain.

Peserta Rapat:

1. Edy Putra Irawady
2. Didyk Choeroel
3. Sekdekom dan Komite.

Dewan Komisaris yang Tidak Hadir:

Tirta Hidayat - Komisaris tidak dapat hadir karena pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan yang tidak dapat diwakilkan, kuasa diserahkan kepada Bapak Didyk Choeroel.

Meeting Agenda:

1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting
2. Performance Evaluation and Cash Flow until November 2019;
3. Evaluation of Other Investment Programs in the 2019 Budget and Planning;
4. Budget and Planning AGMS for fiscal year 2020;
5. Others.

Meeting Participants:

1. Edy Putra Irawady
2. Didyk Choeroel
3. Secretary of Board of Commissioners and Committees.

Commissioners who were absent:

Tirta Hidayat - Commissioner, was unable to attend because at the same time there was an activity that could not be represented, the power of attorney was given to Didyk Choeroel.

Rapat Gabungan: Rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi

Selain rapat internal, Dewan Komisaris juga dapat melakukan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat. Rapat gabungan dapat juga dilakukan atas usulan Direksi.

Di tahun 2019, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 14 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Joint Meeting: Board of Commissioners Meeting by Inviting Board of Directors

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners can also convene joint meetings by inviting the Board of Directors as a form of coordination in order to discuss the Board of Directors' periodic reports and discuss business conditions and prospects as well as national policies that impact on the Company's performance and provide responses, notes and advice as outlined in the Minutes Meeting. Joint meetings can also be held at Board of Directors' request.

In 2019, joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors were held 14 times. The following is the agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of attendance of Board of Commissioners and Board of Directors in the meeting.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan
Recapitulation of Commissioners and Directors Attendance at the Joint Meeting

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS			
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) Edy Putra Irawady (President Commissioner)	14	13	92,86%
Didyk Choeroel (Komisaris) Didyk Choeroel (Commissioner)	14	12	85,71%
Tirta Hidayat (Komisaris Independen) Tirta Hidayat (Independent Commissioner)	14	12	85,71%
Lydia Silvanna Djaman (Komisaris)* Lydia Silvanna Djaman (Commissioner)*	6	5	83,33%
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS			
Iman Rachman (Direktur Utama)** Iman Rachman (President Director)**	7	7	100,00%
Henry Sihotang (Direktur Utama)** Henry Sihotang (President Director)**	6	6	100,00%
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) Nasrizal Nazir (Investment Director)	14	14	100,00%
Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen)*** Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director)***	10	10	100,00%

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan
Recapitulation of Commissioners and Directors Attendance at the Joint Meeting

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Andi Saddawero (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen)*** Andi Saddawero (Business Advisory and Asset Management Director)***	2	2	100,00%
R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja)**** R. Muhammad Irwan (Finance and Support Director)****	7	7	100,00%
Ajar Setiadi (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja)**** Ajar Setiadi (Finance and Support Director)****	6	5	83,33%
RATA-RATA AVERAGE			93,00%

*) Lydia Silvanna Djaman tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 22 Mei 2019.

**) Iman Rachman menggantikan Henry Sihotang sebagai Direktur Utama pada 23 Juli 2019.

***) Dikdik Permadi Yoffana menggantikan Andi Saddawero sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen pada 1 April 2019.

****) R. Muhammad Irwan menggantikan Ajar Setiadi sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja pada 23 Juli 2019.

*) Lydia Silvanna Djaman no longer served as Commissioner since May 22, 2019.

**) Iman Rachman replaced Henry Sihotang as President Director on July 23, 2019.

***) Dikdik Permadi Yoffana replaced Andi Saddawero as Business Advisory and Asset Management on April 1, 2019.

****) R. Muhammad Irwan replaced Ajar Setiadi as Finance and Support Director on July 23, 2019.

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Serta Kehadiran
Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat GabunganMinutes of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors,
and Commissioners and Directors Attendance at the Joint Meeting

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #01 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #01		RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #02 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #02	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 28 Januari 2019; Ruang Rapat Hotel Borobudur Jakarta. January 28, 2019; Meeting Room of Borobudur Hotel, Jakarta.	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 13 Februari 2019; Ruang Rapat Ambon - Ceram, Lantai 19, Hotel Borobudur - Jakarta. February 13, 2019; Ambon - Ceram Meeting Room, 19th Floor, Hotel Borobudur - Jakarta.

**Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Serta Kehadiran
Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan**
Minutes of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors,
and Commissioners and Directors Attendance at the Joint Meeting

Nomor Risalah Rapat : No. RIS.GAB-01/PPA/KOM/0119 Number of Meeting Minutes	Nomor Risalah Rapat : No. RIS.GAB-02/PPA/KOM/0219 Number of Meeting Minutes
Kehadiran Attendance : Agenda Rapat: 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja Dan Arus Kas s.d. Desember 2018; 3. Progress Asesmen GCG Perusahaan; 4. Lain-Lain: Progress Holding Perusahaan. Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Didyk Choioel (Komisaris) 3. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) 4. Lydia Silvanna Djaman (Komisaris) 5. Henry Sihotang (Direktur Utama) 6. Andi Saddawero (Direktur) 7. Ajar Setiadi (Direktur) 8. Nasrizal Nazir (Direktur) 9. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 10. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: - Meeting Agenda: 1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting 2. Performance Evaluation and Cash Flow until November 2019; 3. Performance Evaluation and Cash Flow until December 2018; 4. Progress of Company's GCG Assessment; 5. Others: Progress of Holding PT PPA (Persero) Meeting Agenda: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Didyk Choioel (Commissioner) 3. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) 4. Lydia Silvanna Djaman (Commissioner) 5. Henry Sihotang (President Director) 6. Andi Saddawero (Director) 7. Ajar Setiadi (Director) 8. Nasrizal Nazir (Director) 9. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 10. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners who were absent: -	Kehadiran Attendance : Agenda Rapat: 1. Pembahasan RJPP PT PPA 2019-2023 (Persero); 2. Lain-Lain: Transformasi Bisnis PT PPA Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Didyk Choioel (Komisaris) 3. Henry Sihotang (Direktur Utama) 4. Andi Saddawero (Direktur) 5. Ajar Setiadi (Direktur) 6. Nasrizal Nazir (Direktur) 7. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 8. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: 1. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) – menghadiri kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan. 2. Lydia S. Djaman (Komisaris) – menghadiri rapat bersama Menteri Hukum Sekretaris Negara, sesuai anggaran dasar rapat kuorum dengan kehadiran dua anggota komisaris dan disertai dengan surat kuasa kepada masing-masing anggota yang hadir. Meeting Agenda: 1. Discussion of PT PPA (Persero)'s 2019-2023 RJPP; 2. Others: PT PPA's Business Transformation Meeting participants: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Didyk Choioel (Commissioner) 3. Henry Sihotang (President Director) 4. Andi Saddawero (Director) 5. Ajar Setiadi (Director) 6. Nasrizal Nazir (Director) 7. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 8. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent: 1. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) – attended other activity that cannot be represented. 2. Lydia S. Djaman (Commissioner) – attended a meeting with the Minister of Law of Secretary of State, according to the articles of association of the quorum meeting with the presence of two commissioners and accompanied by a power of attorney to each member present.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Serta Kehadiran
Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat GabunganMinutes of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors,
and Commissioners and Directors Attendance at the Joint Meeting

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #03 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #03		RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #04 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #04	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 27 Februari 2019; Ruang <i>Converance Room</i> Lantai 9 PT PPA February 27, 2019; Conference Room 9th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 26 Maret 2019; Ruang <i>Converance Room</i> Lantai 9 PT PPA March 26, 2019; Conference Room 9th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: No. RIS.GAB-03/PPA/KOM/0219	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: No. RIS.GAB-04/PPA/KOM/0319
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; 2. Evaluasi kinerja dan arus kas bulan Januari tahun 2019; 3. Program sinergi bumh tahun 2019; 4. Pembahasan atas laporan tahunan PT PPA tahun buku 2018; 5. Evaluasi kinerja direksi dan pengusulan remunerasi. Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Didyk Choirel (Komisaris) 3. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) 4. Lydia Silvanna Djaman (Komisaris) 5. Henry Sihotang (Direktur Utama) 6. Ajar Setiadi (Direktur) 7. Nasrizal Nazir (Direktur) 8. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 9. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: Meeting Agenda: 1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting; 2. Evaluation of performance and cash flow in January 2019; 3. SOEs synergy program in 2019; 4. Discussion of PTPPA's annual report for fiscal year 2018; 5. Evaluate the performance of Board of Directors and propose remuneration. Meeting Participants: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Didyk Choirel (Commissioner) 3. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) 4. Lydia Silvanna Djaman (Commissioner) 5. Henry Sihotang (President Director) 6. Ajar Setiadi (Director) 7. Nasrizal Nazir (Director) 8. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 9. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent:	: Agenda Rapat: 1. Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; 2. Evaluasi kinerja dan arus kas s.d. Bulan Februari tahun 2019; 3. Hasil self assessment GCG tahun 2018; 4. Pengelolaan kegiatan usaha PT PPA Kapital dan PT PPA Finance; 5. Pembahasan atas laporan tahunan PT PPA tahun buku 2018. Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Didyk Choirel (Komisaris) 3. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) 4. Lydia Silvanna Djaman (Komisaris) 5. Henry Sihotang (Direktur Utama) 6. Nasrizal Nazir (Direktur) 7. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 8. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: Ajar Setiadi (Direktur) Meeting Agenda: 1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting; 2. Performance evaluation and cash flow until February 2019; 3. The results of GCG self-assessment in 2018; 4. Management of business activities of PT PPA Kapital and PT PPA Finance; 5. Discussion on PT PPA's annual report for fiscal year 2018. Meeting Participants: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Didyk Choirel (Commissioner) 3. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) 4. Lydia Silvanna Djaman (Commissioner) 5. Henry Sihotang (President Director) 6. Nasrizal Nazir (Director) 7. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 8. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent:	

**Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Serta Kehadiran
Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan**
Minutes of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors,
and Commissioners and Directors Attendance at the Joint Meeting

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #05 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #05		RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #06 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #06	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 30 April 2019; Ruang <i>Converance Room</i> Lantai 9 PT PPA April 30, 2019; Conference Room 9th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 21 Mei 2019; <i>Thamrin Nine Ballroom Clubb Square</i> , Thamrin Nine Lantai GF May 21, 2019; Thamrin Nine Ballroom Chubb Square, Thamrin Nine GF Floor
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS.GAB-05/PPA/KOM/0419	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS.GAB-06/PPA/KOM/0519
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Triwulan I Tahun 2019; 3. Evaluasi Kinerja Direksi dan Pengusulan Remunerasi; 4. Pelaksanaan Business Plan PMN Tahun 2015 Per TW I/2019; 5. Lain-Lain: Realisasi KPI dan Tingkat Kesehatan, Rencana Audit Khusus BPK, Kebijakan Rekrutmen dan Pelatihan Pegawai Peserta Rapat: 1. Didyk Choirel (Komisaris) 2. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) 3. Lydia Silvanna Djaman (Komisaris) 4. Henry Sihotang (Direktur Utama) 5. Ajar Setiadi (Direktur) 6. Nasrizal Nazir (Direktur) 7. Dikdik Permadi Yoffana (Direktur) 8. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 9. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) – Komisaris pada waktu yang bersamaan menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kuasa diserahkan kepada Bapak Tirta Hidayat Meeting Agenda: 1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting 2. Performance Evaluation and Cash Flow until 1st Quarter of 2019; 3. Evaluate Board of Directors' Performance and Propose Remuneration; 4. Implementation of the 2015 State Capital Participation Business Plan Per Q1/2019; 5. Others: Realization of KPI and Soundness Index, BPK Special Audit Plan, Employee Recruitment and Training Policy Meeting Participants: 1. Didyk Choirel (Commissioner) 2. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) 3. Lydia Silvanna Djaman (Commissioner) 4. Henry Sihotang (President Director) 5. Ajar Setiadi (Director) 6. Nasrizal Nazir (Director) 7. Dikdik Permadi Yoffana (Director) 8. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 9. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent: Edy Putra Irawady (President Commissioner) – Commissioner, at the same time attending a meeting with the Coordinating Minister for the Economy, the power of attorney was given to Tirta Hidayat	: Agenda Rapat: 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi kinerja dan arus kas s.d. April tahun 2019; 3. Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan barang dan jasa serta kebijakan mutu dan pelayanan; 4. Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang GCG dan manajemen risiko. 5. Lain-lain: kebijakan terkait direksi yang habis masa jabatan. Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) 3. Lydia Silvanna Djaman (Komisaris) 4. Henry Sihotang (Direktur Utama) 5. Ajar Setiadi (Direktur) 6. Nasrizal Nazir (Direktur) 7. Dikdik Permadi Yoffana (Direktur) 8. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 9. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: Didyk Choirel (Komisaris) - pada waktu yang bersamaan menghadiri rapat bersama Menteri Keuangan, kuasa diserahkan kepada Bapak Tirta Hidayat. Meeting Agenda: 1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting 2. Performance evaluation and cash flow until April 2019; 3. Evaluate the implementation of procurement of goods and services policies as well as quality and service policies; 4. Evaluate the implementation of GCG and risk management policies. 5. Other: policies related to Board of Directors whose tenure end. Meeting Participants: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) 3. Lydia Silvanna Djaman (Commissioner) 4. Henry Sihotang (President Director) 5. Ajar Setiadi (Director) 6. Nasrizal Nazir (Director) 7. Dikdik Permadi Yoffana (Director) 8. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 9. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent: Didyk Choirel (Commissioner) – at the same time attending a meeting with the Minister of Finance, the power of attorney was given to Tirta Hidayat.	

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Serta Kehadiran
Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat GabunganMinutes of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors,
and Commissioners and Directors Attendance at the Joint Meeting

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #07 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #07		RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #08 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #08	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 18 Juni 2019; Ruang <i>Converance Room</i> Lantai 9 PT PPA June 18, 2019; Conference Room 9th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 29 Juli 2019; Ruang <i>Converance Room</i> Lantai 9 PT PPA July 29, 2019; Conference Room 9th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS.GAB-07/PPA/KOM/0619	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS.GAB-08/PPA/KOM/0719
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Evaluasi kinerja dan arus kas s.d. Mei tahun 2019; 3. Perkembangan program investasi lainnya RKAP tahun 2019; 4. Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) 3. Didyk Choiroel (Komisaris) 4. Nasrizal Nazir (Direktur) 5. Dikdik Permadi Yoffana (Direktur) 6. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 7. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: - Meeting Agenda: 1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting 2. Performance evaluation and cash flow until May 2019; 3. Development of other investment programs in 2019 Budget and Planning; 4. Evaluate the implementation of accounting policies and prepare financial reports Meeting Participants: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) 3. Didyk Choiroel (Commissioner) 4. Nasrizal Nazir (Director) 5. Dikdik Permadi Yoffana (Director) 6. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 7. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; 2. Evaluasi kinerja dan arus kas s.d. Triwulan II tahun 2019; 3. Pengelolaan kegiatan usaha PT Nindya Karya; 4. Pelaksanaan business plan PMN tahun 2015 per TW II/2019; 5. Lain-lain: (1) perubahan struktur organisasi, (2) mekanisme rapat gabungan. Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) 3. Didyk Choiroel (Komisaris) 4. Iman Rachman (Direktur Utama) 5. Nasrizal Nazir (Direktur) 6. Dikdik Permadi Yoffana (Direktur) 7. R. Muhammad Irwan (Direktur) 8. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 9. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: - Meeting Agenda: 1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting; 2. Performance evaluation and cash flow until 2nd Quarter of 2019; 3. Management of PT Nindya Karya's business activities; 4. Implementation of the 2015 State Capital Participation business plan per QII/2019; 5. Others: (1) changes in organizational structure, (2) joint meeting mechanism. Meeting Participants: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) 3. Didyk Choiroel (Commissioner) 4. Iman Rachman (President Director) 5. Nasrizal Nazir (Director) 6. Dikdik Permadi Yoffana (Director) 7. R. Muhammad Irwan (Director) 8. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 9. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent: -

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Serta Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Minutes of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors, and Commissioners and Directors Attendance at the Joint Meeting

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #09 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #09		RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #10 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #10	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 27 agustus 2019; Ruang <i>Converance Room</i> Lantai 9 PT PPA August 27, 2019; Conference Room 9th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 30 September 2019; Ruang <i>Converance Room</i> Lantai 9 PT PPA September 30, 2019; Conference Room 9th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS.GAB-09/PPA/KOM/0819	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS.GAB-10/PPA/KOM/0919
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; 2. Evaluasi kinerja dan arus kas s.d. Juli tahun 2017; 3. Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang karir dan suksesi manajemen; 4. Lain-lain: (1) rencana rapat khusus Direksi & Dewan Komisaris, (2) rencana penerbitan surat utang MTN, SBK dan obligasi tahun 2019, (3) rancangan RJPP PT PPA tahun 2019-2023. Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) 3. Didyk Choiroel (Komisaris) 4. Iman Rachman (Direktur Utama) 5. Nasrizal Nazir (Direktur) 6. Dikdik Permadi Yoffana (Direktur) 7. R. Muhammad Irwan (Direktur) 8. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 9. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: - Meeting Agenda: 1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting; 2. Performance evaluation and cash flow until July 2017; 3. Evaluate the implementation of career and management succession policy; 4. Others: (1) plan for special meetings of Board of Directors & Board of Commissioners, (2) plan for the issuance of MTN, CP and bonds in 2019, (3) PT PPA RJPP draft for 2019-2023. Meeting Participants: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) 3. Didyk Choiroel (Commissioner) 4. Iman Rachman (President Director) 5. Nasrizal Nazir (Director) 6. Dikdik Permadi Yoffana (Director) 7. R. Muhammad Irwan (Director) 8. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 9. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; 2. Evaluasi kinerja dan arus kas s.d. Juli tahun 2019; 3. Pengelolaan kegiatan usaha PT PPA Finance dan PT PPA Kapital; 4. Aspirasi pemegang saham untuk RKAP 2019; 5. Lain-lain: (1) GCG entitas anak, (2) progres MTN, SBK dan obligasi. Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) 3. Didyk Choiroel (Komisaris) 4. Iman Rachman (Direktur Utama) 5. Nasrizal Nazir (Direktur) 6. Dikdik Permadi Yoffana (Direktur) 7. R. Muhammad Irwan (Direktur) 8. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 9. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: - Meeting Agenda: 1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting; 2. Performance evaluation and cash flow until July 2019; 3. Management of business activities of PT PPA Finance and PT PPA Kapital; 4. Shareholder aspirations for the 2019 Budget and Planning; 5. Others: (1) GCG of subsidiaries, (2) progress of MTN, CP and bonds. Meeting Participants: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) 3. Didyk Choiroel (Commissioner) 4. Iman Rachman (President Director) 5. Nasrizal Nazir (Director) 6. Dikdik Permadi Yoffana (Director) 7. R. Muhammad Irwan (Director) 8. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 9. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Serta Kehadiran
Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat GabunganMinutes of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors,
and Commissioners and Directors Attendance at the Joint Meeting

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #11 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #11		RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #12 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #12	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 11-12 Oktober 2019; Ruang Rapat Hotel Sheraton Bandung October 11-12, 2019; Meeting Room of Sheraton Hotel Bandung	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 29 Oktober 2019; Ruang <i>Converance Room</i> Lantai 9 PT PPA October 29, 2019; Conference Room 9th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS.GAB-11/PPA/KOM/1019	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS.GAB-12/PPA/KOM/1019
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan RKAP Perusahaan 2020 Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) 3. Didyk Choiroel (Komisaris) 4. Iman Rachman (Direktur Utama) 5. Nasrizal Nazir (Direktur) 6. Dikdik Permadi Yoffana (Direktur) 7. R. Muhammad Irwan (Direktur) 8. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 9. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on PT PPA (Persero) 2020 Budget and Planning Meeting Participants: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) 3. Didyk Choiroel (Commissioner) 4. Iman Rachman (President Director) 5. Nasrizal Nazir (Director) 6. Dikdik Permadi Yoffana (Director) 7. R. Muhammad Irwan (Director) 8. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 9. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent: -	: Agenda Rapat: 1. Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; 2. Evaluasi kinerja dan arus kas s.d. Triwulan III Tahun 2019; 3. Pelaksanaan <i>Business Plan</i> PMN tahun 2015 per TW III/2019; 4. Pembahasan RKAP PT PPA tahun buku 2020. 5. Lain-lain: (1) progres penerbitan MTN dan SBK PT PPA, (2) peningkatan kualitas SDM PT PPA. Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) 3. Iman Rachman (Direktur Utama) 4. Nasrizal Nazir (Direktur) 5. Dikdik Permadi Yoffana (Direktur) 6. R. Muhammad Irwan (Direktur) 7. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 8. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: Didyk Choiroel - pada waktu yang bersamaan menghadiri rapat bersama Menteri Keuangan, kuasa diserahkan kepada Bapak Tirta Hidayat. Meeting Agenda: 1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting; 2. Performance evaluation and cash flow until 3rd Quarter of 2019; 3. Implementation of the 2015 State Capital Participation Business Plan per QIII/2019; 4. Discussion on PT PPA's Budget and Planning for fiscal year 2020. 5. Others: (1) progress of PT PPA's MTN and CP issuance, (2) improvement of PT PPA's HC quality.. Meeting Participants: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) 3. Iman Rachman (President Director) 4. Nasrizal Nazir (Director) 5. Dikdik Permadi Yoffana (Director) 6. R. Muhammad Irwan (Director) 7. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 8. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent: Didyk Choiroel - at the same time attending a meeting with the Minister of Finance, the power of attorney was given to Tirta Hidayat.	

**Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Serta Kehadiran
Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan**
Minutes of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors,
and Commissioners and Directors Attendance at the Joint Meeting

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #13 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #13		RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI #14 BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING #14	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 28 November 2019; Ruang <i>Converance Room</i> Lantai 9 PT PPA November 28, 2019; Conference Room 9th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 26 Desember 2019; Ruang <i>Converance Room</i> Lantai 9 PT PPA December 26, 2019; Conference Room 9th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS.GAB-13/PPA/KOM/1119	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS.GAB-14/PPA/KOM/1219
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; 2. Evaluasi kinerja dan arus kas s.d. Oktober tahun 2019; 3. Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang GCG dan manajemen risiko; 4. Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang teknologi informasi; 5. Lain-lain: (1) update progres penerbitan surat utang PT PPA, (2) perubahan charter SPI. Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Tirta Hidayat (Komisaris Independen) 3. Didyk Choiroel (Komisaris) 4. Iman Rachman (Direktur Utama) 5. Nasrizal Nazir (Direktur) 6. Dikdik Permadi Yoffana (Direktur) 7. R. Muhammad Irwan (Direktur) 8. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 9. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: - Meeting Agenda: 1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting; 2. Performance evaluation and cash flow until October 2019; 3. Evaluate the implementation of GCG and risk management policies; 4. Evaluate of the implementation of information technology policies; 5. Others: (1) update on progress of PT PPA's debt securities issuance, (2) changes in SPI charter. Meeting Participants: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Tirta Hidayat (Independent Commissioner) 3. Didyk Choiroel (Commissioner) 4. Iman Rachman (President Director) 5. Nasrizal Nazir (Director) 6. Dikdik Permadi Yoffana (Director) 7. R. Muhammad Irwan (Director) 8. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 9. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent: -	: Agenda Rapat: 1. Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; 2. Evaluasi kinerja dan arus kas s.d. November tahun 2019; 3. Evaluasi program investasi lainnya dalam RKAP tahun 2019; 4. Agenda RUPS RKAP tahun buku 2020; Peserta Rapat: 1. Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) 2. Didyk Choiroel (Komisaris) 3. Iman Rachman (Direktur Utama) 4. Nasrizal Nazir (Direktur) 5. Dikdik Permadi Yoffana (Direktur) 6. R. Muhammad Irwan (Direktur) 7. Marta Kurniawan (Sekretaris Komisaris) 8. Edi Winanto (Sekretaris Perusahaan) Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir: Tirta Hidayat - pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan yang tidak dapat diwakilkan, kuasa diserahkan kepada Bapak Didyk Choiroel. Meeting Agenda: 1. Evaluation of Follow-Up to the Results of Previous Meeting; 2. Performance evaluation and cash flow until November 2019; 3. Evaluation of other investment programs in the 2019 Budget and Planning; 4. Budget and Planning AGMS for fiscal year 2020; Meeting Participants: 1. Edy Putra Irawady (President Commissioner) 2. Didyk Choiroel (Commissioner) 3. Iman Rachman (President Director) 4. Nasrizal Nazir (Director) 5. Dikdik Permadi Yoffana (Director) 6. R. Muhammad Irwan (Director) 7. Marta Kurniawan (Secretary of Board of Commissioners) 8. Edi Winanto (Corporate Secretary) Commissioners and Directors who were absent: Tirta Hidayat - at the same time there was an activity that could not be represented, the power of attorney was given to Didyk Choiroel.	

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Rapat Direksi

Sesuai Keputusan Direksi No. SK-58/PPA/1215 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Kerja Direksi, Rapat Direksi dilaksanakan dengan ketentuan antara lain:

1. Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
2. Rapat Direksi harus diselenggarakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali sebulan

Di sepanjang tahun 2019, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 62 (enam puluh dua) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Board of Directors Meeting

In accordance with Board of Directors Decree No. SK-58/PPA/1215 dated December 10, 2015 concerning the Board of Directors' Manual, Board of Directors' Meetings are held with the following provisions:

1. Board of Directors' meetings can be held at any time if:
 - a. deemed necessary by one or more Directors;
 - b. at the written request of one or more members of Board of Commissioners; or
 - c. at the written request of 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with voting rights
2. Board of Directors' meetings must be held regularly, that is, at least once a month

Throughout 2019, the Board of Directors convened 62 (sixty-two) meetings. The following is the agenda and minutes of meeting, attendance, and recapitulation of attendance of Directors at these meetings.

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Recapitulation of Directors Attendance at Board of Directors Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Iman Rachman (Direktur Utama)* Iman Rachman (President Director)*	31	31	100%
Henry Sihotang (Direktur Utama)* Henry Sihotang (President Director)*	31	31	100%
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) Nasrizal Nazir (Investment Director)	62	61	98,38%
Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen)** Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director)**	43	41	95,34%
Andi Saddawero (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen)** Andi Saddawero (Business Advisory and Asset Management Director)**	18	18	100%
R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja)*** R. Muhammad Irwan (Finance and Support Director)***	31	31	100%
Ajar Setiadi (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja)*** Ajar Setiadi (Finance and Support Director)***	30	30	100%
RATA-RATA AVERAGE			98,78%

*) Iman Rachman menggantikan Henry Sihotang sebagai Direktur Utama pada 23 Juli 2019.

**) Dikdik Permadi Yoffana menggantikan Andi Saddawero sebagai Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen pada 1 April 2019.

*) Iman Rachman replaced Henry Sihotang as President Director on July 23, 2019.

**) Dikdik Permadi Yoffana replaced Andi Saddawero as Business Advisory and Asset Management Director on April 1, 2019.

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #01 BOARD OF DIRECTORS MEETING #01		RAPAT DIREKSI #02 BOARD OF DIRECTORS MEETING #02	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 8 Januari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 January 8, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 10 Januari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 January 10, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-01/PPA/BOD/0119	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-02/PPA/BOD/0119
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Rencana Kerja Sama dengan PT Trimulia Nusantara Energi 2. Proses Seleksi Kepala Divisi Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Cooperation Plan with PT Trimulia Nusantara Energi 2. Division Head Selection Process Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Perubahan Syarat Kredit PT Jaya Samudera Karunia Grup; 2. Pendanaan untuk PT Polowijo Gosari dan PT Magnesium Gosari Internasional; 3. <i>Update</i> Perkembangan PT Magnesium Gosari Internasional. Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Change of Credit Terms of PT Jaya Samudera Karunia Group; 2. Funding for PT Polowijo Gosari and PT Magnesium Gosari Internasional; 3. Update on Development of PT Magnesium Gosari International. Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #03 BOARD OF DIRECTORS MEETING #03		RAPAT DIREKSI #04 BOARD OF DIRECTORS MEETING #04	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 15 Januari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 January 15, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 22 Januari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 January 22, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-03/PPA/BOD/0119	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-04/PPA/BOD/0119
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Rencana Pengoperasian Kembali PKS PT Duta Mentari Raya Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. PT Duta Mentari Raya's PKS Re-Operation Plan Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. PT Prabu Wahana International (Permohonan Persetujuan Perubahan Tipe Pesawat dan Rencana Penarikan Pinjaman) 2. PT Merpati Nusantara Airlines (Permohonan Persetujuan Perpanjangan Perjanjian RR) Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. PT Prabu Wahana International (Request for Approval of Changing Aircraft Type and Loan Withdrawal Plan) 2. PT Merpati Nusantara Airlines (Request for Agreement on Extension of RR Agreement) Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #05 BOARD OF DIRECTORS MEETING #05		RAPAT DIREKSI #06 BOARD OF DIRECTORS MEETING #06	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 23 Januari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 January 23, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 24 Januari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 January 24, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-05/PPA/BOD/0119	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-06/PPA/BOD/0119
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Perubahan Peraturan Menteri BUM 01/05 2. Pembahasan PT Batam Island Marina (BIM) 3. Pembahasan PT Inti Stania Prima (ISP) Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Amendment to Minister of SOEs Regulation 01/05 2. Discussion on PT Batam Island Marina (BIM) 3. Discussion on PT Inti Stania Prima (ISP) Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Perkembangan PT Inti Stania Prima (ISP) 2. Perkembangan PT Duta Mentari Raya (DMR) 3. Pembahasan Alternatif Strategi Pengoperasian PT Sippa Kemasan Internasional (SKI) Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Agenda Rapat: 1. Development of PT Inti Stania Prima (ISP) 2. Development of PT Duta Mentari Raya (DMR) 3. Discussion on Alternative Operational Strategies of PT Sippa Kemasan Internasional (SKI) Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #07 BOARD OF DIRECTORS MEETING #07		RAPAT DIREKSI #08 BOARD OF DIRECTORS MEETING #08	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 6 Februari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 February 6, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 12 Februari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 February 12, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-07/PPA/BOD/0219	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-08/PPA/BOD/0219
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Perkembangan PT Rejeki Intilogam Jaya (RILJ) 2. Perkembangan PT Batam Island Marina (BIM) Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Progress of PT Rejeki Intilogam Jaya (RILJ) 2. Progress of PT Batam Island Marina (BIM) Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan Kepersonaliaan Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on Personnel Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #09 BOARD OF DIRECTORS MEETING #09		RAPAT DIREKSI #10 BOARD OF DIRECTORS MEETING #10	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 15 Februari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 February 15, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 15 Februari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 February 15, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-09/PPA/BOD/0219	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-10/PPA/BOD/0219
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Koordinasi - <i>Confidential</i> 2. Pembahasan PT Industri Gelas (Iglas) 3. Pembahasan PT Dutacipta Pakarperkasa (DCP) 4. Pembahasan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Coordination - Confidential 2. Discussion on PT Industri Gelas (Iglas) 3. Discussion on PT Dutacipta Pakarperkasa (DCP) 4. Discussion on PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Penerimaan Fasilitas Pinjaman Bank Mega Tbk Rp500 Miliar Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Receipt of Bank Mega Tbk Loan Facility of Rp 500 Billion Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #11 BOARD OF DIRECTORS MEETING #11		RAPAT DIREKSI #12 BOARD OF DIRECTORS MEETING #12	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 15 Februari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 February 15, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 22 Februari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 February 22, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-11/PPA/BOD/0219	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-12/PPA/BOD/0219
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Koordinasi - <i>Confidential</i> SDM Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Coordination - Confidential Human Capital Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Koordinasi - <i>Confidential</i> SDM Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Coordination - Confidential Human Capital Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #13 BOARD OF DIRECTORS MEETING #13		RAPAT DIREKSI #14 BOARD OF DIRECTORS MEETING #14	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 26 Februari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 February 26, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 27 Februari 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 February 27, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-13/PPA/BOD/0219	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-14/PPA/BOD/0219
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Paparan <i>Outing</i> 2. Paparan Hasil Asesmen GCG 3. Paparan JNE 4. Paparan Pilar Energi Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Exposure of Outing 2. Exposure of GCG Assessment Results 3. Exposure of JNE 4. Exposure of Energy Pillar Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Penerimaan Fasilitas Pinjaman Bank Woori Saudara Tbk Rp140 Miliar Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Receiving Loan Facility of Bank Woori Saudara Tbk in the amount of Rp140 Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #15 BOARD OF DIRECTORS MEETING #15		RAPAT DIREKSI #16 BOARD OF DIRECTORS MEETING #16	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 6 Maret 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 March 6, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 8 Maret 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 March 8, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-15/PPA/BOD/0319	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-16/PPA/BOD/0319
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Persetujuan Penjualan Sebagai Jaminan PT Inti Adhiyaksa 2. Persetujuan Prinsip atas Nama PT Interact Corpindo 3. Presentasi Permohonan Pinjaman Operasional PPAK Tahun 2019 Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Approval of Sales as a Guarantee of PT Inti Adhiyaksa 2. Approval in Principle on behalf of PT Interact Corpindo 3. Presentation of PPAK Operational Loan Application for 2019 Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan PT Batam Island Marina (BIM) Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on PT Batam Island Marina (BIM) Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #17 BOARD OF DIRECTORS MEETING #17		RAPAT DIREKSI #18 BOARD OF DIRECTORS MEETING #18	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 20 Maret 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 March 20, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 29 Maret 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 March 29, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-17/PPA/BOD/0319	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-18/PPA/BOD/0319
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Kepersonaliaan Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Agenda Rapat: 1. Kepersonaliaan Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Personnel Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan Merek Dagang PT Polowijo Gosari Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on the Trademark of PT Polowijo Gosari Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Andi Saddawero 3. Ajar Setiadi 4. Nasrizal Nazir Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #19 BOARD OF DIRECTORS MEETING #19		RAPAT DIREKSI #20 BOARD OF DIRECTORS MEETING #20	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 4 April 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 April 4, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 15 April 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 April 15, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-19/PPA/BOD/0419	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-20/PPA/BOD/0419
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Kepegawaian Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Personnel Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Kepersonaliaan Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Personnel Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Directors who were absent: -
RAPAT DIREKSI #21 BOARD OF DIRECTORS MEETING #21		RAPAT DIREKSI #22 BOARD OF DIRECTORS MEETING #22	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 16 April 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 April 16, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 22 April 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 April 22, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-21/PPA/BOD/0419	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-22/PPA/BOD/0419

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

Kehadiran : Agenda Rapat: Attendance : 1. Kepersonaliaan Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Personnel Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Directors who were absent: -	Kehadiran : Agenda Rapat: Attendance : 1. Proposal Kerja sama Pengembangan Aset Properti Hotel dan <i>Office Tower</i> Sidoarjo dengan PT GIN Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Proposal of Cooperation in the Property Asset Development of Hotel and Sidoarjo Tower Office with PT GIN Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Directors who were absent: -
RAPAT DIREKSI #23 BOARD OF DIRECTORS MEETING #23 Tanggal dan : 30 April 2019; Ruang Rapat Direksi PT Tempat Rapat PPA Lantai 12 Meeting Date and April 30, 2019; Board of Directors Venue Meeting Room 12th Floor of PT PPA	RAPAT DIREKSI #24 BOARD OF DIRECTORS MEETING #24 Tanggal dan : 30 April 2019; Ruang Rapat Direksi PT Tempat Rapat PPA Lantai 12 Meeting Date and April 30, 2019; Board of Directors Venue Meeting Room 12th Floor of PT PPA

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

Nomor Risalah Rapat : MOM-23/PPA/BOD/0419 Number of Meeting Minutes	Nomor Risalah Rapat : MOM-24/PPA/BOD/0419 Number of Meeting Minutes
Kehadiran : Agenda Rapat: Attendance 1. Rapat Panel <i>Interview</i> Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Interview Panel Meeting Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Directors who were absent: -	Kehadiran : Agenda Rapat: Attendance 1. PT Industri Gelas : Penyelesaian Pesangon Karyawan PT Iglas Tahap 2 2. PT Kertas Kraft Aceh : Permohonan Biaya Operasional PT KKA 3. Pendanaan Tambahan <i>Project-Project</i> PT PPAirbone Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. PT Industri Gelas: Settlement of Phase 2 Employee Severance Benefits of PT Iglas 2. PT Kertas Kraft Aceh: Request for Operational Expenses of PT KKA 3. Additional Funding for PT PPAirbone Projects Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Directors who were absent: -

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #25 BOARD OF DIRECTORS MEETING #25		RAPAT DIREKSI #26 BOARD OF DIRECTORS MEETING #26	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 7 Mei 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 May 7, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 14 Mei 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 May 14, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-25/PPA/BOD/0519	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-26/PPA/BOD/0519
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Permintaan Data guna Penyusunan Buku Pemetaan Anak dan Cucu BUMN Tahun 2019 2. PT Libra Dwi Kartika – <i>Project Financing</i> untuk Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Batubara 3. Pembagian Dividen PT PPA Finance Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Date Request for Compiling 2019 Mapping Books of SOE's Subsidiaries and Subsidiaries of Subsidiary 2. PT Libra Dwi Kartika – Project Financing for Coal Port Facility Development 3. Distribution of PT PPA Finance Dividends Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Kepersonaliaan Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Personnel Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #27

BOARD OF DIRECTORS MEETING #27

Tanggal dan Tempat Rapat : 15 Mei 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12
Meeting Date and Venue : May 15, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : MOM-27/PPA/BOD/0519
Number of Meeting Minutes

RAPAT DIREKSI #28

BOARD OF DIRECTORS MEETING #28

Tanggal dan Tempat Rapat : 18 Juni 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12
Meeting Date and Venue : June 18, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : MOM-28/PPA/BOD/0619
Number of Meeting Minutes

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

Kehadiran : Agenda Rapat: Attendance : 1. Kepersonaliaan Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Personnel Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Directors who were absent: -	Kehadiran : Agenda Rapat: Attendance : 1. Skema kerja sama Program Pengambilalihan dan/atau Pengelolaan Aset Kredit LPS 2. Pembiayaan Jangka Pendek (<i>Bridging Loan</i>) untuk keperluan <i>Pre Initial Public Offering</i> PT Kusuma Kartika Internusa 3. Pembahasan PT KLAAl (<i>Catering Project</i>) 4. Pembahasan PT KPMOG (<i>Compressor Rental Project</i>) 5. Pembahasan PT Carpediem Mandiri, PT Merpati Maintenance Facility & PT Merpati Nusantara Airlines 6. Pembahasan PT Ventura Tirta Prakasya(Persero) Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Cooperation scheme for the Takeover and/or Management of LPS Credit Assets 2. Short-term Financing (Bridging Loan) for PT Kusuma Kartika Internusa's Pre-Initial Public Offering 3. Discussion on PT KLAAl (Catering Project) 4. Discussion on PT KPMOG (Compressor Rental Project) 5. Discussion on PT Carpediem Mandiri, PT Merpati Maintenance Facility & PT Merpati Nusantara Airlines 6. Discussion on PT Ventura Tirta Prakasya (Persero) Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Directors who were absent: -
RAPAT DIREKSI #29 BOARD OF DIRECTORS MEETING #29 Tanggal dan Tempat Rapat : 4 Juli 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 Meeting Date and Venue : July 4, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA Nomor Risalah Rapat : MOM-29/PPA/BOD/0719 Number of Meeting Minutes	RAPAT DIREKSI #30 BOARD OF DIRECTORS MEETING #30 Tanggal dan Tempat Rapat : 19 Juli 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 Meeting Date and Venue : July 19, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA Nomor Risalah Rapat : MOM-30/PPA/BOD/0719 Number of Meeting Minutes

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan PT Sipra Kemasan Internasional (SKI) 2. Rencana Akuisisi PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP) 3. Pembahasan PT Dirgantara Indonesia 4. Pembahasan PT Wirajaya Packindo Indonesia Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion of PT Sipra International Packaging (SKI) 2. Acquisition Plan of PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP) 3. Discussion on PT Dirgantara Indonesia 4. Discussion of PT Wirajaya Packindo Indonesia Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan PT Industri Gelas (Iglas) 2. Pembahasan PT Dutacipta Pakarperkasa (DCP). 3. Pembahasan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Peserta Rapat: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on PT Industri Gelas (Iglas) 2. Discussion on PT Dutacipta Pakarperkasa (DCP). 3. Discussion on PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Meeting participants: 1. Henry Sihotang 2. Ajar Setiadi 3. Nasrizal Nazir 4. Dikdik Permadi Yoffana Directors who were absent: -
RAPAT DIREKSI #31 BOARD OF DIRECTORS MEETING #31		RAPAT DIREKSI #32 BOARD OF DIRECTORS MEETING #32	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 30 Juli 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 July 30, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 8 Agustus 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 August 8, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-30/PPA/BOD/0719	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-32/PPA/BOD/0819

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

Kehadiran : Agenda Rapat: Attendance : 1. <i>Holding</i> PPA 2. Pembahasan Struktur Organisasi dan Komite PPA 3. Susunan Pengurusan Anak Usaha 4. Posisi <i>Vacant</i> di PPA 5. Gedung EMI 6. Asuransi D&O <i>Profesional Indemnity</i> 7. Strategi Penyelesaian Tagihan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PT Batam Island Marina (BIM) 8. Persetujuan Perluasan Tujuan Penggunaan Dana Fasilitas Pinjaman untuk <i>Cash Collateral</i> Penerbitan Bank Garansi PT DuTa Cipta Pakarperkasa (DCP) 9. Restrukturisasi PT Industri Gelas (Iglas) 10. Lain-lain Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Holding PPA 2. Discussion on PPA Organizational Structure and Committee 3. Structure of Management of Subsidiaries 4. Vacant position in PPA 5. EMI Building 6. Indemnity Professional D&O Insurance 7. Strategy for Settlement of Invoice of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) to PT Batam Island Marina (BIM) 8. Approval for Expansion of the Purpose of Using Loan Facility Funds for Cash Collateral Bank Guarantees Issuance of PT DuTa Cipta Pakarperkasa (DCP) 9. Restructuring of PT Industri Gelas (Iglas) 10. Others Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	Kehadiran : Agenda Rapat: Attendance : 1. Pembahasan Struktur Entitas Anak 2. Rencana Divestasi Aset Tegal kepada Waskita Realty 3. Rencana Pengambilalihan PT Polyrama Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on the Structure of Subsidiaries 2. Tegal Asset Divestment Plan to Waskita Realty 3. Takeover Plan of PT Polyrama Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #33 BOARD OF DIRECTORS MEETING #33		RAPAT DIREKSI #34 BOARD OF DIRECTORS MEETING #34	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 8 Agustus 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 August 8, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 21 Agustus 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 August 21, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-33/PPA/BOD/0819	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-34/PPA/BOD/0819
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan Pengurus Anak dan Cucu Perusahaan Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on the Management of Subsidiaries and Subsidiaries of Subsidiary Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. SDM 2. Pembahasan <i>Membership</i> Bimasena Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. HC 2. Discussion of Bimasena Membership Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #35 BOARD OF DIRECTORS MEETING #35		RAPAT DIREKSI #36 BOARD OF DIRECTORS MEETING #36	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 26 Agustus 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 August 26, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 6 September 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 September 6, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-35/PPA/BOD/0819	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-36/PPA/BOD/0919
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan Perubahan RJPP 2. Pembahasan Kajian MTN 3. Pembahasan Materi BOC BOD 4. <i>Refinancing</i> PT Polyrama Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on Changes in RJPP 2. Discussion on MTN Study 3. Discussion on BOC BOD Materials 4. Refinancing of PT Polyrama Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. <i>Refinancing</i> PT Polyrama 2. Pembahasan Kendaraan Dinas 3. Presentasi PT PPA Finance Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Refinancing of PT Polyrama 2. Discussion of Official Vehicles 3. Presentation of PT PPA Finance Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #37 BOARD OF DIRECTORS MEETING #37		RAPAT DIREKSI #38 BOARD OF DIRECTORS MEETING #38	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 11 September 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 September 11, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 12 September 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 September 12, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-37/PPA/BOD/0919	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-38/PPA/BOD/0919
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan Penunjukan Lawyer untuk Dukungan kepada PT Artha Bangun Pratama (ABP) 2. Agenda Penjualan Aset Jaminan, Gaji Karyawan dan Tim RR PT Merpati Nusantara Airlines 3. <i>Update</i> Program Penjualan <i>Cessie</i> PT Batam Island Marina (BIM) dan Rencana Lelang Aset Bali PT Batam Island Marina Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on the Appointment of Lawyer to Support PT Artha Bangun Pratama (ABP) 2. Sales of Collateral Assets, Employee Salaries and RR Team of PT Merpati Nusantara Airlines 3. Update of PT Batam Island Marina (BIM) <i>Cessie</i> Sales Program and PT Batam Island Marina Bali Asset Auction Plan Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan PT Batam Island Marina (BIM) 2. Pembahasan Pengelolaan Entitas Anak 3. Lain-lain Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on PT Batam Island Marina (BIM) 2. Discussion on Management of Subsidiaries 3. Others Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #39 BOARD OF DIRECTORS MEETING #39		RAPAT DIREKSI #40 BOARD OF DIRECTORS MEETING #40	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 24 September 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 September 24, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 27 September 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 September 27, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-39/PPA/BOD/0919	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-40/PPA/BOD/0919
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan <i>Cashflow</i> PPA 2 2. Pembahasan Materi BOC BOD 3. Pembahasan PT Survai Udara Panas 4. Pembahasan PT Carpediem 5. PT Pilar Bahtera Energi 6. PT Widodo Makmur Unggas Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on PPA 2 Cashflow 2. Discussion on BOC BOD Material 3. Discussion on PT Survai Udara Panas 4. Discussion on PT Carpediem 5. PT Pilar Bahtera Energi 6. PT Widodo Makmur Unggas Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan Materi BOC BOD 2. Pembahasan PT Artha Bangun Pratama (ABP) 3. Usulan Calon Direktur Utama & Komisaris Utama PT PPA <i>Finance</i> , dan Komisaris Utama PT PPA Kapital Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion of BOC BOD Material 2. Discussion of PT Artha Bangun Pratama (ABP) 3. Proposed Candidates for President Director & President Commissioner of PT PPA Finance, and President Commissioner of PT PPA Kapital Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #41 BOARD OF DIRECTORS MEETING #41		RAPAT DIREKSI #42 BOARD OF DIRECTORS MEETING #42	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 3 Oktober 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 October 3, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 9 Oktober 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 October 9, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-41/PPA/BOD/1019	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-42/PPA/BOD/1019
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Laporan Perkembangan PT PPA <i>Finance</i> 2. Pengaturan Biaya Representasi Direksi Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. PT PPA Finance Progress Report 2. Arrangement of Directors Representation Fees Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Presentasi dari Konsultan SKHA <i>Consulting</i> 2. Pembahasan RKAP 3. Lanjutan Pembahasan Pemberian Pinjaman <i>Refinancing</i> kepada PT Polytama 4. Pembahasan <i>Draft</i> Internal Audit <i>Charter</i> 5. Lain-lain Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Presentation from Consultant, SKHA Consulting 2. Discussion on Budget and Planning 3. Continued Discussion on the Provision of Refinancing Loans to PT Polytama 4. Discussion on the Draft of Internal Audit Charter 5. Others Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #43 BOARD OF DIRECTORS MEETING #43		RAPAT DIREKSI #44 BOARD OF DIRECTORS MEETING #44	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 14 Oktober 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 October 14, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 23 Oktober 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 October 23, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-43/PPA/BOD/1019	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-44/PPA/BOD/1019
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan Tingkat Kupon dan <i>Yeild</i> MTN PT PPA setelah diterbitkannya peringkat <i>idA</i> terhadap PT PPA oleh Pefindo Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: Dikdik Permadi Yoffana alasan ketidakhadiran perjalanan dinas Meeting agenda: 1. Discussion of PT PPA's Coupon and Yeild Level of MTN after the issuance of idA rating to PT PPA by Pefindo Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: Permadi Yoffana Dikdik, reason of absence due to business trip	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Presentasi Progres Penanganan NPF 2. Progres Kerja sama PT PPA <i>Finance</i> dengan BKL 3. Transaksi <i>Super energy</i> 4. Presentasi <i>Covenant</i> MT 5. Presentasi Sistem Informasi Manajemen oleh Grup IT 6. Pembahasan PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP) dan PT Batam Island Marina (BIM) 7. Lain-lain (SDM) Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Dikdik Permadi Yoffana 3. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: Nasrizal Nazir alasan ketidakhadiran perjalanan dinas Meeting agenda: 1. Presentation of NPF Management Progress 2. Progress of Cooperation between PT PPA Finance and BKL 3. Super energy transactions 4. MT Covenant Presentation 5. Presentation of Management Information Systems by IT Group 6. Discussion of PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP) and PT Batam Island Marina (BIM) 7. Others (HC) Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Dikdik Permadi Yoffana 3. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: Nasrizal Nazir, reason for absence due to business trip

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #45 BOARD OF DIRECTORS MEETING #45		RAPAT DIREKSI #46 BOARD OF DIRECTORS MEETING #46	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 30 Oktober 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 October 30, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 31 Oktober 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 October 31, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-45/PPA/BOD/1019	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-46/PPA/BOD/1019
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Penetapan <i>Pricing</i> MTN (dihadiri PT Danareksa Sekuritas) 2. Pembahasan <i>Covenant</i> info Memo 3. Pembahasan Transaksi PT Gasuna Federal Indonesia (Super Energi Grup) 4. Pembahasan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Determination of MTN Pricing (attended by PT Danareksa Sekuritas) 2. Discussion on Covenant info Memo 3. Discussion on the Transaction of PT Gasuna Federal Indonesia (Super Energy Group) 4. Discussion on PT Kertas Kraft Aceh (KKA) Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. <i>Conference Call</i> dengan PT Danareksa Sekuritas untuk penetapan Alokasi MTN Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Conference Call with PT Danareksa Sekuritas for determining the Allocation of MTN Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #47 BOARD OF DIRECTORS MEETING #47		RAPAT DIREKSI #48 BOARD OF DIRECTORS MEETING #48	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 31 Oktober 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 October 31, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 30 Oktober 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 October 30, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-47/PPA/BOD/1019	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-48/PPA/BOD/1019
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pengelolaan Entitas Anak : PT PPA Kapital Pembahasan KSO PT Duta Mentari Raya 2. Pengelolaan Entitas Anak : PT PPA Kapital Pembahasan PT Sippa Kemasan Internasional (SKI) 3. Perkembangan PT Gasuna Federal Indonesia 4. Pengelolaan Entitas Anak : PT PPA Finance (Pembiayaan kapal Roro) 5. Pembahasan SDM Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Management of Subsidiary: PT PPA Kapital, Discussion of KSO PT Duta Mentari Raya 2. Management of Subsidiary: PT PPA Kapital, Discussion of PT Sippa Kemasan Internasional (SKI) 3. Development of PT Gasuna Federal Indonesia 4. Management of Subsidiary: PT PPA Finance (Roro ship financing) 5. Discussion on HC Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Divisi <i>Treasury</i> – Penerimaan Pinjaman Kredit Modal Kerja R/C Terbatas dan KMK Umum dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten (Bank BJB) Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Treasury Division - Receiving Limited R/C Working Capital Credit Loans and General KMK and Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten (Bank BJB) Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #49 BOARD OF DIRECTORS MEETING #49		RAPAT DIREKSI #50 BOARD OF DIRECTORS MEETING #50	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 5 November 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 November 5, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 7 November 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 November 7, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-49/PPA/BOD/1119	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-50/PPA/BOD/1119
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan RJPP 2. Pembahasan PT Dirgantara Indonesia (DI) Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion of RJPP 2. Discussion of PT Dirgantara Indonesia (DI) Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pricing SBK bersama PT Danareksa Sekuritas Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. CP Pricing with PT Danareksa Sekuritas Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -
RAPAT DIREKSI #51 BOARD OF DIRECTORS MEETING #51		RAPAT DIREKSI #52 BOARD OF DIRECTORS MEETING #52	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 19 November 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 November 19, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 25 November 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 November 25, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-51/PPA/BOD/1119	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-52/PPA/BOD/1119

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

Kehadiran Attendance : Agenda Rapat: 1. Presentasi Konsultan SDM – SRW&Co 2. Pembahasan PT Polytama 3. Pembahasan PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) DPC – MNC 4. Pembahasan Revisi Pedoman Inventasi 5. Pembahasan Cetak Kalender dan Kartu Tahun Baru 6. Pembahasan tentang PT Super Exim Sari (SES) 7. Pembahasan PT Nusantara Turbin Propulsi 8. Pembahasan PT Kagum Lokasi Emas 9. Pembahasan Potensi Kerja sama Penanganan Aset NPL pada Bank Harda International Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Presentation of HR Consultant – SRW & Co 2. Discussion of PT Polytama 3. Discussion of PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) DPC – MNC 4. Discussion on Inventory Guidelines Revision 5. Discussion on New Year's Calendar and Card Printing 6. Discussion on PT Super Exim Sari (SES) 7. Discussion on PT Nusantara Turbin Propulsi 8. Discussion on PT Kagum Lokasi Emas 9. Discussion on Potential Collaboration in Handling Non-Performing Loans at Harda International Bank Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance : Agenda Rapat: 1. Pembahasan Kerja sama Penanganan NPL Bank Mandiri (PT Polytama, STS, PT Adetex dan PT Primarindo) 2. Pembahasan Penanganan NPL Hakim Grup 3. Pembahasan Persetujuan Proposal Perdamaian PKPU PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP) 4. Pembahasan PT CDM Swarnadipa 5. Pembahasan PT Modern Data Solusi 6. Lain-lain Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on Bank Mandiri NPL Handling Cooperation (PT Polytama, STS, PT Adetex and PT Primarindo) 2. Discussion on Hakim Group NPL Handling 3. Discussion on PKPU Peace Proposal Approval of PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP) 4. Discussion of PT CDM Swarnadipa 5. Discussion of PT Modern Data Solusi 6. Others Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #53 RAPAT DIREKSI #53		RAPAT DIREKSI #54 RAPAT DIREKSI #54	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 26 November 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 November 26, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 27 November 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 November 27, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-53/PPA/BOD/1119	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-54/PPA/BOD/1119
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Presentasi dari Konsultan PT Dex Solutions Indonesia Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Presentation from Consultant, PT Dex Solutions Indonesia Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Presentasi PT PPA <i>Finance</i> 2. Pembahasan Kerja sama Transporter PT Polowijo Gosari 3. Pembahasan COP 4. Lain-lain Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Presentation of PT PPA Finance 2. Discussion on Transporter Cooperation of PT Polowijo Gosari 3. Discussion of COP 4. Others Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #55 RAPAT DIREKSI #55		RAPAT DIREKSI #56 RAPAT DIREKSI #56	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 2 Desember 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 December 2, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 17 Desember 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 December 17, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-55/PPA/BOD/1219	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-56/PPA/BOD/1219
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan PT Bumiraya Investindo (Grup Usaha Golden Plantation,Tbk) Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion of PT Bumiraya Investindo (Golden Plantation Tbk Business Group) Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan Pengurusan Anak Usaha : PT PPA <i>Finance</i> 2. Penunjukan Konsultan AMU 3. Pembahasan <i>Indemnity</i> PT Adetex dan PT Primarindo 4. Pembahasan Kewajiban PT Duta Mentari Raya (DMR) kepada PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) 5. Pembahasan PT GFI, PT SEAL dan PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP) 6. Pembahasan Arsynergy dan Andhika Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Discussion on Management of Subsidiary: PT PPA Finance 2. Appointment of AMU Consultant 3. Discussion on Indemnity of PT Adetex and PT Primarindo 4. Discussion of PT Duta Mentari Raya (DMR)'s Obligations to PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) 5. Discussion of PT GFI, PT SEAL and PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP) 6. Discussion of Arsynergy and Andhika Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #57 BOARD OF DIRECTORS MEETING #57		RAPAT DIREKSI #58 BOARD OF DIRECTORS MEETING #58	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 2 Desember 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 December 2, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 2 Desember 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 December 2, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-57/PPA/BOD/1219	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-58/PPA/BOD/1219
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Penerimaan Fasilitas Pinjaman PT Bank Mandiri (Persero), Tbk IDR Rp250 Miliar Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Receipt of Loan Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk IDR 250 Billion Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Penerimaan Fasilitas Pinjaman PT Bank Mandiri (Persero), Tbk USD 30.000.000,- atau senilai <i>equivalent</i> USD 1 sebesar (Rp14.000) Rp420 Miliar Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Receipt of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk's Loan Facility of USD 30,000,000 or equivalent to USD 1 in the amount of (Rp14,000) Rp420 Billion Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #59 BOARD OF DIRECTORS MEETING #59		RAPAT DIREKSI #60 BOARD OF DIRECTORS MEETING #60	
Tanggal dan Tempat Rapat	: 17 Desember 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12	Tanggal dan Tempat Rapat	: 17 Desember 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12
Meeting Date and Venue	: December 17, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA	Meeting Date and Venue	: December 17, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat	: MOM-55/PPA/BOD/1219	Nomor Risalah Rapat	: MOM-60/PPA/BOD/1219
Number of Meeting Minutes		Number of Meeting Minutes	
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Notaris Adrians untuk PT Adetex	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Notaris Adrians untuk PT Primarindo
	Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan		Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan
	Direksi yang Tidak Hadir: -		Direksi yang Tidak Hadir: -
	Meeting agenda: 1. Notary Adrians for PT Adetex		Meeting agenda: 1. Notary Adrians for PT Primarindo
	Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan		Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan
	Directors who were absent: -		Directors who were absent: -

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERisalah dan Kehadiran Rapat Direksi
Minutes and Attendance of Board of Directors Meetings

RAPAT DIREKSI #61 BOARD OF DIRECTORS MEETING #61		RAPAT DIREKSI #62 BOARD OF DIRECTORS MEETING #62	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 27 Desember 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 December 27, 2019; Board of Directors Meeting Room 1st Floor of PT PPA	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 30 Desember 2019; Ruang Rapat Direksi PT PPA Lantai 12 December 30, 2019; Board of Directors Meeting Room 12th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-61/PPA/BOD/1219	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: MOM-62/PPA/BOD/1219
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan SDM tentang Rekrutmen Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi dan Kepala Divisi Hukum Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: Dikdik Permadi Yoffana alasan ketidakhadiran ibadah umroh Meeting agenda: 1. Discussion of HC on the Recruitment of Head of Finance & Accounting Division and Head of Legal Division Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: Permadi Yoffana Dikdik, reason for the absence was due to the pilgrimage	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Penerimaan Perpanjangan Fasilitas Kredit KMKE dari LPEI (Exim Bank) IDR sebesar Rp250 Miliar. Peserta Rapat: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Direksi yang Tidak Hadir: - Meeting agenda: 1. Reception of KMKE Credit Facility Extension from LPEI (Exim Bank) in the amount of Rp250 Billion. Meeting participants: 1. Iman Rachman 2. Nasrizal Nazir 3. Dikdik Permadi Yoffana 4. R. Muhammad Irwan Directors who were absent: -

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi tidak diperbolehkan merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku terkait penerapan GCG. Rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The entire Board of Commissioners and Directors are not allowed to hold concurrent positions that are prohibited by applicable laws and regulations related to the implementation of GCG. Concurrent positions of the Board of Commissioners and Directors of the Company can be seen in the table below:

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2019

Concurrent Positions of Board of Commissioners and Board of Directors as at December 31, 2019

Nama dan Jabatan Name and Position	Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain Position in Other Companies/Institutions
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) Edy Putra Irawady (President Commissioner)	Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2019-sekarang) Expert Team of the Coordinating Minister for Economic Affairs (2019-present)
Didyk Choirael (Komisaris) Didyk Choirael (Commissioner)	Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2018-sekarang) Director of State Treasury Management Directorate General of Treasury of Ministry of Finance (2018-present)
Tirta Hidayat (Komisaris Independen) Tirta Hidayat (Independent Commissioner)	Ketua Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2019-sekarang) Chairman of the Coordinating Minister for Economic Affairs Assistance Team (2019-present)
Direksi Board of Directors	
Iman Rachman (Direktur Utama) Iman Rachman (President Director)	-
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) Nasrizal Nazir (Investment Director)	Direktur Pembina PT Nindya Karya Supervising Director of PT Nindya Karya
Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director)	Direktur Pembina PT PPA Kapital Supervising Director of PT PPA Kapital
R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) R. Muhammad Irwan (Finance and Support Director)	Direktur Pembina PT PPA Finance Supervising Director of PT PPA Finance

Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku terkait penerapan GCG.

The Board of Commissioners does not have concurrent positions that are prohibited by applicable laws and regulations related to the implementation of GCG.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, Pasal 15 ayat 17, anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- Anggota direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau;
- Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Concurrent Position Policy of Board of Commissioners
In accordance with the Company's articles of association, Article 15 paragraph 17, members of Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

- Members of Board of Directors of a State-Owned Enterprise, a Regional-Owned Enterprise and a Private-Owned Business Entity or other position that may cause a conflict of interest and/or;
- Other positions in accordance with statutory provisions

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi**

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, Pasal 10 ayat 15, anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- Anggota direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
- Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Concurrent Position Policy of Board of Directors

In accordance with the Company's articles of association, Article 10 paragraph 15, members of Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as:

- Members of Board of Directors of a State-Owned Enterprises, a Regional-Owned Enterprise and a Private-Owned Enterprise or other positions that may cause a conflict of interest;
- Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
- Other positions in accordance with statutory provisions.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan mewajibkan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain dalam daftar khusus yang harus diperbarui setiap tahunnya.

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The company requires the Board of Commissioners and Board of Directors to disclose their share ownership, both in the Company and in other companies on a special list that must be updated annually.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2019

Share Ownership of Board of Commissioners and Board of Directors as at December 31, 2019

	Kepemilikan Saham Share Ownership		
	Perusahaan The Company	Entitas Anak dan Afiliasi Subsidiaries and Affiliations	Perusahaan Lain (Lebih dari 5%) Other Companies (more than 5%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) Edy Putra Irawady (President Commissioner)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Didyk Choiroel (Komisaris) Didyk Choiroel (Commissioner)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Tirta Hidayat (Komisaris Independen) Tirta Hidayat (Independent Commissioner)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Direksi Board of Directors			
Iman Rachman (Direktur Utama) Iman Rachman (President Director)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) Nasrizal Nazir (Investment Director)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) R. Muhammad Irwan (Finance and Support Director)	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Perusahaan dan Entitas Anak tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Perusahaan dan Entitas Anak juga tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Oleh karena itu, manajemen tidak memiliki saham baik saham Perusahaan maupun Entitas Anak.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki seluruh saham Perusahaan atau sebesar 100,00%. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.

Pengungkapan hubungan afiliasi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Bentuk hubungan keuangan termasuk diantaranya hutang-piutang, kerja sama bisnis, dsbnya; sementara bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya.

The Company and Subsidiaries do not trade their shares to the public. The Company and Subsidiaries also do not have a shareholding program by management. Therefore, management does not own shares of either the shares of the Company or its Subsidiaries..

DISCLOSURE OF AFFILIATION OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR/CONTROLLING SHAREHOLDERS

Information on Major/Controlling Shareholders to the Name of Ultimate Owner

As previously explained, the Major/Controlling Shareholder of the Company are the Republic of Indonesia which owns all of the Company's shares or 100.00%. In accordance with Government Regulation No. 41 of 2003 concerning the Delegation of Position, Duties and Authority of the Minister of Finance to Limited Liability Company (Persero), Public Company (PERUM) and Service Company (PERJAN) to the State Minister for State-Owned Enterprises, and Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises and the Republic of Indonesia State Gazette; The Company's Shareholders' Authority is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs).

Disclosure of Affiliation of Board of Directors, Board of Commissioners, and Major/Controlling Shareholders

Controlling Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors uphold mutual respect on the implementation of duties, responsibilities and authorities in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association. The Company's Board of Commissioners and Board of Directors have the Board Manual which include, among others, their respective responsibilities, obligations, authority and rights.

Disclosure of affiliation includes family relationships and financial relationships. The form of financial relationships is debt, business cooperation, etc.; while the form of family relationship is special relationships mainly due to blood related relations such as husband/wife/children/parents/siblings/ brother/sister-in-law, and so on.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTUREPengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/
Pengendali per 31 Desember 2019Disclosure of Affiliation of Board of Commissioners, Board of Directors and Major/
Controlling Shareholders as of December 31, 2019

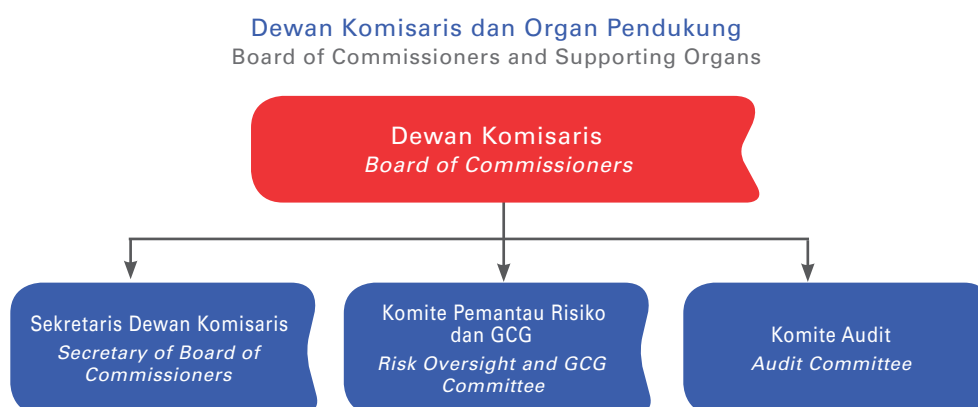
	Hubungan Afiliasi Share Ownership		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan) Government of the Republic of Indonesia (Major-Controlling Shareholders of the Company)
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Edy Putra Irawady (Komisaris Utama) Edy Putra Irawady (President Commissioner)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Didyk Choeroel (Komisaris) Didyk Choeroel (Commissioner)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Tirta Hidayat (Komisaris Independen) Tirta Hidayat (Independent Commissioner)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Direksi Board of Directors			
Iman Rachman (Direktur Utama) Iman Rachman (President Director)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Nasrizal Nazir (Direktur Investasi) Nasrizal Nazir (Investment Director)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dikdik Permadi Yoffana (Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen) Dikdik Permadi Yoffana (Business Advisory and Asset Management Director)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
R. Muhammad Irwan (Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja) R. Muhammad Irwan (Finance and Support Director)	Nihil None	Nihil None	Nihil None

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian saran serta rekomendasi, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) organ, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Komite Pemantau Risiko dan GCG. Di samping itu, Dewan Komisaris menjalankan fungsi remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

SUPPORTING ORGANS OF BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its supervisory duties and responsibilities, providing advice and recommendations, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) organs, namely the Secretary of Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Risk Oversight and GCG Committee. In addition, the Board of Commissioners performs the remuneration function for Board of Commissioners and Board of Directors.



SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur administrasi dan pelaksanaan tata kelola yang baik dan benar untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif guna melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan. Pengangkatan Sekretaris Dewan komisaris sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duty and responsibility, the Board of Commissioners is assisted by a Secretary of Board of Commissioners. Secretary of Board of Commissioners is appointed and being responsible to the Board of Commissioners. Responsibility of Secretary of Board of Commissioners includes managing administration and governance implementation appropriately and correctly to help the Board of Commissioners in carrying out effective supervisory function to implement secretariat duties. The appointment of Secretary of Board of Commissioners refers to Law number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprise, and Minister of State-Owned Enterprise Regulation number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Structure under Board of Commissioners/ Supervisory Board in SOEs.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sekretaris Dewan Komisaris sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris, di antaranya:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan Perusahaan;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekertaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KEP.KOM/PPA/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan. Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Bapak Marta Kurniawan.

Requirements for Secretary of Board of Commissioners

Requirements that shall be fulfilled by Secretary of Board of Commissioners as Supporting Structure of the Board of Commissioners are among others:

1. Understanding the Company's managerial, supervisory and development system;
2. Having good integrity;
3. Understanding secretariat function;
4. Having good communication and coordination skills.

Terms of Tenure

The tenure of Secretary of Board of Commissioners/Supervisory Board is determined by the Board of Commissioners/Supervisory Board for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without reducing the right of Board of Commissioners/Supervisory Board to dismiss him/her at any time.

Secretary of Board of Commissioners Official

Based on the Decree of Board of Commissioners No. 03/KEP.KOM/PPA/IV/2017 dated April 3, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Secretary of Board of Commissioners of PT PPA (Persero). The Secretary of Board of Commissioners is held by Marta Kurniawan.

MARTA KURNIAWAN

Sekretaris Dewan Komisaris | Secretary of Board of Commissioners

Periode Jabatan: 3 April 2017 - 3 April 2022, Periode Ke-1

Position Period: April 3, 2017 - April 3, 2022, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 34 tahun

Kelahiran Palembang, 10 Maret 1985

Domisili

Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan

SE, Ekonomi Akuntansi, Universitas Indonesia (2009); Amd, Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2006)

Pengalaman Kerja

Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Ia1 (2015-2020), Kementerian BUMN

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

- Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional Tahun 2014
- Sertifikasi Manajemen Risiko Profesional (CRMP) Tahun 2019

Personal Data

Indonesian citizen

34 years old

Born in Palembang, March 10, 2020

Domicile

Depok City, West Java, Indonesia

Education

Bachelor of Economics, Accounting Economics, University of Indonesia (2009); Diploma, Accounting, State College of Accountancy (2006)

Work Experience

Head of Energy, Logistics, Regional and Tourism Business Subdivision Ia1 (2015-2020), Ministry of SOEs

Valid Professional Education and/or Certification

- National Procurement Expert Certification 2014
- Professional Risk Management Certification (CRMP) 2019



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris**

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Secara rinci fungsi Sekretaris Dewan Komisaris antara lain:

1. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat Dewan Komisaris dan gabungan Direksi & Dewan Komisaris, maupun dokumen penting lainnya.
4. Menyusun Rancangan Rencana kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Secretary of Board of Commissioners Duty and Function

Secretary of Board of Commissioners is in charge to help the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function. Detail explanation of Secretary of Board of Commissioners' functions is as follows:

1. Preparing Board of Commissioners meeting including the briefing sheet.
2. Preparing Board of Commissioners minutes of meeting according to the Company's Articles of Association.
3. Administering Board of Commissioners' documents including incoming and outgoing letters, minutes of meeting of Board of Commissioners meeting and Management meeting and other important documents.
4. Preparing Board of Commissioners' work and budget Plan.
5. Preparing Board of Commissioners report drafts.
6. Implementing other duties assigned by the Board of Commissioners

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris mengikuti program peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

Secretary of Board of Commissioners Competency Development

Throughout 2019, the Secretary of Board of Commissioners participated in the competency development program, as follows:

Nama Name	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organized by
PPE <i>Certified Risk Management Professional</i>	Sertifikasi Certification	<i>Risk Management for Enterprise, Operational & Technic, Financial, Legal, Supply Chain. Business Continuity Management.</i>	PPM Manajemen, 19-23 Agustus 2019 PPM Manajemen, August 19-23, 2019	PPM Manajemen

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Besaran dan jenis penghasilan yang diperoleh Sekretaris Dewan Komisaris adalah meliputi Honorarium sebesar 15% dari gaji Direktur Utama, tunjangan transport maksimal 20% dari honorarium dan tunjangan komunikasi maksimal 5% dari honorarium serta diberikan fasilitas kepegawaian dan insentif kinerja tahunan. Fasilitas kepegawaian dan insentif kinerja tahunan diberikan dengan pertimbangan kemampuan Perusahaan dan kewajiban anggaran.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham.
2. Mengadministrasikan undangan rapat Dewan Komisaris, menyiapkan bahan rapat (*briefing sheet*) dan menyusun konsep risalah rapat Dewan Komisaris.
3. Membuat konsep surat-surat keluar dan laporan kegiatan penugasan bersama-sama Komite.
4. Mendokumentasikan surat-surat Dewan Komisaris, mengadministrasikan surat masuk, surat keluar, keputusan dan peraturan Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris, bersama-sama Komite.
6. Menyusun rancangan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris triwulanan, dan tahunan, bersama-sama Komite.
7. Mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
8. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
9. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

Remuneration for Secretary of Board of Commissioners

The remuneration for Secretary of Board of Commissioners is stipulated by the Board of Commissioners by considering the Company's condition according to Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs under Board of Commissioners/Supervisory Board in SOEs. Amount and type of remuneration for the Secretary of Board of Commissioners include Honorarium that is paid 15% of President Director's salary, transportation allowance maximum 20% of honorarium and communication allowance that is maximum 5% of honorarium, and also receive employment facilities and annual performance incentives. Employment facilities and annual performance incentives is granted by considering the Company's condition and budget fairness.

Secretary of Board of Commissioners Activity Report

In 2019, Secretary of Board of Commissioners has implemented duties, as follows:

1. Acted as liaison officer between Board of Commissioners and Board of Directors, and Shareholders.
2. Administered Board of Commissioners meeting invitation, prepared briefing sheet and Board of Commissioners minutes of meeting draft.
3. Drafted concepts for outgoing letters and activity report of joint assignment with the Committees.
4. Documented Board of Commissioners letters, administered incoming and outgoing letters as well as Board of Commissioners resolutions and regulation.
5. Prepared Board of Commissioners Work Plan and Budget Draft, together with the Committees.
6. Prepared Board of Commissioners Quarterly and Annual Supervisory Report draft, together with the Committees.
7. Collected material and information relevant with Board of Commissioners duty implementation.
8. Coordinated with Corporate Secretary regarding issues related to the Board of Commissioners and Board of Directors.
9. Performed other secretariat duties.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris**

Realisasi pencapaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris mencapai 99,38% dengan kriteria Sangat Baik.

KOMITE AUDIT

Komite Audit membantu Dewan Komisaris mengawasi fungsi Direksi dalam mengelola Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik. Ruang lingkup kerja Komite Audit yaitu membantu Dewan Komisaris mengawasi hal-hal terkait informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Pembentukan Komite Audit diwajibkan sesuai dengan amanat Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan ditekankan pembentukannya berdasarkan Penjelasan Pasal 121 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Melalui Komite ini, diharapkan Dewan Komisaris lebih terbantu dalam pelaksanaan pengawasan Perusahaan secara umum untuk seluruh lingkup pengawasan sepanjang belum dibentuknya Komite Dewan Komisaris yang lain.

Pedoman Kerja Komite Audit

Perusahaan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja berupa Piagam Komite Audit yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Piagam Komite Audit Perusahaan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris tanggal 19 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. PER-02/KOM/PPA/XI/2014 tentang Piagam (*Charter*) Komite Audit dan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Piagam (*Charter*) Komite Audit Edisi 2014.

Performance Assessment by Board of Commissioners

The performance achievement of the Secretary of Board of Commissioners was realized at 99.38% with Very Good criteria.

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee helps the Board of Commissioners to oversee the Board of Directors' function in managing the Company according to good corporate governance principles. Scope of work of Audit Committee includes supporting the Board of Commissioners in supervising issues related to financial information, internal control system, effectiveness of audit by external and internal auditors, and compliance with prevailing law and regulation.

Audit Committee establishment is required according to mandate in Article 70 paragraph 1 Law No. 19 of 2003 concerning SOEs and emphasizing the establishment according to Explanation of Article 121 paragraph 1 Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. Through this Committee, the Board of Commissioners is expected to have greater support in implementing the Company's supervisory activity generally over the entire supervisory scope as long other Committees under the Board of Commissioners have not yet established.

Audit Committee Charter

The Company has Work Guideline and Mechanism in form of Audit Committee Charter that is continuously improved and updated based on progress/amendment on prevailing legal framework as well as up-to-date condition. The Audit Committee Charter is prepared according to prevailing law and regulation and has been stipulated by the Board of Commissioners on December 19, 2014 according to Board of Commissioners Decree No. PER-02/KOM/PPA/XI/2014 concerning Audit Committee Charter and Risk Oversight and GCG Committee Charter of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Audit Committee Charter 2014 Edition.

Dalam Piagam Komite Audit diatur struktur dan persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat Komite Audit, serta kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas atau aktivitas Komite Audit. Kode Etik Komite Audit mencakup integritas, objektif dan independen, kerahasiaan, serta kompetensi.

Persyaratan Komite Audit

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan profesional dalam bidang akuntansi, manajemen operasional, sistem pengendalian internal, dan pemahaman mengenai prosedur audit secara umum.
2. Tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *Conflict of Interest* ataupun dampak negatif;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif terutama dalam hal melihat berbagai permasalahan dan dapat memberikan saran-saran yang konstruktif; dan
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Pengangkatan anggota Komite Audit melalui proses penilaian sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut:

1. Komite Audit Perusahaan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Audit. Profil Anggota Komite Audit dapat dilihat dalam Bagian Profil Komite Audit.
2. Proses rekrutmen Anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama.
3. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Audit. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat untuk menentukan calon anggota Komite Audit terpilih. Selanjutnya, penetapan dan pengangkatan calon anggota Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.

The Audit Committee Charter governs membership structure and requirements, terms of office, duty and responsibility, authority, Audit Committee Meetings, reporting obligation, implementation of Audit Committee duty or activity. Audit Committee Ethical Codes include integrity, objective and independent, confidentiality and competency.

Audit Committee Requirements

Audit Committee members shall fulfill the requirements, as follows:

1. Having professional capability in accounting, operational management, internal control system, and understanding on audit procedure generally.
2. Not having any personal interest or affiliation that may cause Conflict of Interest or any negative impact;
3. Having good communication skill, particularly in analyzing several issues and being capable to provide constructive suggestions; and
4. Being capable to allocate sufficient time to complete the duties.

Audit Committee Appointment and Dismissal

According to the Audit Committee Charter, Audit Committee appointment and dismissal is done by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders. Appointment of Audit Committee members shall pass fit and proper test process based on prevailing law in order to ensure capability to implement the role appropriately. Education and career experience qualifications are as follows:

1. Audit Committee in the Company has sufficient education and career experience qualifications to support implementation of duties as Audit Committee.
2. Audit Committee Members recruitment process is done by Board of Commissioners by considering competency, expertise and integrity as well as team work capability.
3. Board of Commissioners conducted interview to further observe the Audit Committee member candidate. Next, the Board of Commissioners holds meeting to determine the appointed Audit Committee member candidate. Furthermore, stipulation and appointment of of Audit Committee member candidate is done under Board of Commissioners Decree.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

4. Seluruh Anggota Komite Audit Perusahaan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.
5. Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Audit Perusahaan dinyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sebagai ketua Komite Audit Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan berakhir.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Audit Perusahaan, masa jabatan Komite Audit Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun dengan periodisasi pertama maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode kedua paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan berakhir.

4. Every Audit Committee Member has integrity, competency and good financial reputation.
5. According to the Company's Audit Committee Charter, the terms of Audit Committee member who is not appointed from the Company's Board of Commissioners members is maximum 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years terms, by not reducing rights of the Board of Commissioners to dismiss anytime.

Dismissal of Audit Committee members can be done if membership terms of the respective member has been ended and dismissed under the Board of Commissioners Decree, dismissed because considered not fulfilling expected performance and/or being not competent in carrying out the duties. However, for the Company's Board of Commissioners Member who serves as Chairman of Audit Committee, the terms will be ended automatically if the term as Board of Commissioners member in the Company has been ended.

Terms of Tenure

According to the Company's Audit Committee Charter, the terms of Audit Committee member who is not appointed from the Company's Board of Commissioners members is maximum 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years terms, by not reducing rights of the Board of Commissioners to dismiss anytime.

Dismissal of Audit Committee members can be done if membership terms of the respective member has been ended and dismissed under the Board of Commissioners Decree, dismissed because considered not fulfilling expected performance and/or being not competent in carrying out the duties. However, for the Company's Board of Commissioners Member who serves as Chairman of Audit Committee, the terms will be ended automatically if the term as Board of Commissioners member in the Company has been ended.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Audit Tahun 2019

Di sepanjang tahun 2019, tidak terdapat perubahan komposisi dan susunan Keanggotaan Komite Audit yang terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang anggota komite berasal dari anggota Dewan Komisaris sekaligus menjadi Ketua Komite Audit, dan 2 (dua) orang anggota komite berasal dari luar manajemen dengan keahlian yang saling melengkapi dalam pelaksanaan tugas Komite Audit. Berikut komposisi dan susunana Komite Audit per 31 Desember 2019.

Number, Composition and Structure of Audit Committee in 2019

Throughout 2019, there was no change in the composition and structure of Audit Committee Membership consisting of 3 (three) persons, a member of the committee is originating from the Board of Commissioners member and being the Chairman of Audit Committee, and 2 (two) members of the committee are originating from outside management with complementary expertise in the implementation the Audit Committee's duties. The following is the composition and structure of Audit Committee as of December 31, 2019.

Susunan Komite Audit 1 Januari - 31 Desember 2019
Audit Committee Composition January 1 - December 31, 2019

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Didyk Choirael	Ketua Komite Audit/ Komisaris Chairman of Audit Committee/Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/KEP.KOM/PPA/V/2018 tanggal 01 Mei 2018 Decree of Board of Commissioners No. 02/KEP.KOM/PPA/V/2018 dated May 1, 2018	12 April 2018 - habis masa periode jabatan Dewan Komisaris April 12, 2018 – the end of Board of Commissioners' tenure	
Iko Marita M.	Anggota Komite Audit/Pihak Independen Audit Committee Members/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KEP.KOM/PPA/IV/2018 tanggal 10 April 2018 Decree of Board of Commissioners No. 01/KEP.KOM/PPA/IV/2018 dated April 10, 2018	01 Mei 2018 - 01 Mei 2020 May 1, 2018 – May 1, 2020	Ke-2 2 nd
Ahmad Malkan Lubis	Anggota Komite Audit/Pihak Independen Audit Committee Members/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KEP.KOM/PPA/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 Decree of Board of Commissioners No. 06/KEP.KOM/PPA/VI/2017 dated June 05, 2017	22 Mei 2017 - 22 Mei 2022 May 22, 2017 – May 22, 2022	Ke-1 1 st

Profil masing-masing anggota Komite Audit dapat dilihat di bawah ini.

The profile of each Audit Committee member can be seen below.

DIDYK CHOIROEL**Ketua Komite Audit/Komisaris | Audit Committee Chairman/Commissioner**

Profil Ketua Komite Audit, Didyk Choirael, dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Profile of Audit Committee Chairman, Didyk Choirael, can be seen in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**IKO MARITA M.****Anggota Komite Audit/Pihak Independen****Audit Committee Member/Independent Party**

Periode Jabatan: 01 Mei 2018 - 01 Mei 2020, Periode Ke-2

Position Period: May 01, 2018 – May 01, 2020, 2nd Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 53 tahun

Kelahiran Malang, 24 Mei 1966

Domisili

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan

S1 Akuntansi, Ekonomi, Universitas Brawijaya, 1989

Keahlian

Tenaga Ahli Aspek Teknis

Pengalaman Kerja

Staff Dewan Komisaris, Perusahaan. Sekretaris Dewan Komisaris, Perusahaan. Anggota Sekretariat Tim Pemberesan dan Anggota Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan, BPPN. Kepala Divisi Kebijakan Perusahaan dan Administrasi, PT Bank Niaga.

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

-

Personal Data

Indonesian citizen

53 years old

Born in Malang, May 24, 1966

Domicile

Bogor, West Java, Indonesia

Education

Bachelor of Accounting, Economics, Brawijaya University, 1989

Expertise

Technical Aspect Expert

Work Experience

Staff of Board of Commissioners, the Company. Secretary of Board of Commissioners, the Company. Secretariat Member of Procurement Team and Secretariat Member of Financial Sector Policy Committee, IBRA. Head of Corporate and Administrative Policy Division, PT Bank Niaga.

Valid Professional Education and/or Certification

-



AHMAD MALKAN LUBIS

Anggota Komite Audit/Pihak Independen

Audit Committee Member/Independent Party

Periode Jabatan: 22 Mei 2017 – 22 Mei 2022, Periode Ke-1
Position Period: May 22, 2017 – May 22, 2022, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 66 tahun
Kelahiran Medan tanggal 15 Maret 1953

Domisili

Depok, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan

- Bachelor, Ekonomi, University of the District of Columbia, Amerika Serikat, 1986.
- Master of Art, Ekonomi, Virginia Polytechnic Institute and State University, Amerika Serikat, 1988.
- Doctor of Philosophy, Ekonomi, University of Maryland, Amerika Serikat, 1993.

Keahlian

Tenaga Ahli Aspek Administrasi dan Keuangan

Pengalaman Kerja

Anggota Tim Sistem Investasi Online Single Submission (OSS), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretaris Tim Nasional Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS). Penasehat, ASEAN Connectivity Through Trade and Investment (ACTI). Penasehat, *Support for Economic Analysis Development in Indonesia* (SEADI). Penasehat, Trade & Investment Climate Program to the Indonesia National Single Window (INSW), Bank Dunia.

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

-

Personal Data

Indonesian citizen
66 years old
Born in Medan on March 15, 1953

Domicile

Depok, West Java, Indonesia

Education

- Bachelor, Economics, University of the District of Columbia, United States, 1986.
- Master of Art, Economics, Virginia Polytechnic Institute and State University, United States, 1988.
- Doctor of Philosophy, Economics, University of Maryland, United States, 1993.

Expertise

Administration and Financial Aspect Expert

Work Experience

Member of Single Submission Online Investment System (OSS) Team, Coordinating Ministry for Economic Affairs. Secretary of National Logistics System National Team (US SISLOGN). Advisor, ASEAN Connectivity Through Trade and Investment (ACTI). Advisor, Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI). Advisory, Trade & Investment Climate Program to the Indonesia National Single Window (INSW), World Bank.

Valid Professional Education and/or Certification

-



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Independensi Komite Audit**

Komite Audit diketuai oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris dan dua anggota profesional lainnya berasal dari luar Perusahaan serta mempunyai latar belakang keuangan dan latar belakang yang sesuai dengan bidang industri Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bekerja secara profesional dan independen.

Anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, kompetensi, dan independensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna menguatkan/mendukung penerapan ketentuan tentang independensi Komite Audit tersebut di atas, telah dibuat Surat Pernyataan Independensi Komite Audit pada saat pengangkatan tahun 2018 yang dijabarkan aspek independensi sebagai berikut:

Audit Committee Independency

Audit Committee is chaired by one Member of Board of Commissioners and two professionals from external Company having Financial and Engineering background in accordance with the Company's industry. In performing their duties, the Audit Committee works professionally and independently.

Members of Audit Committee have fulfilled the requirements in terms of quantity, composition, criteria, competency, and independency in accordance with the prevailing laws and regulations.

In order to strengthen/support the implementation of provisions on Audit Committee's independence as mentioned above, a Statement of Independency of Audit Committee at the time of appointment in 2018 is prepared that outlines the independency aspect as follows:

Aspek Independensi Independency Aspect	Didyk Choeroel	Iko Marita M.	Ahmad Malkan Lubis
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having financial affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	x	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Perusahaan afiliasi Having managerial affiliation in the Company, subsidiaries or affiliated companies	x	x	x
Memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Having shares ownership in the Company	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Having family affiliation with Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Audit Committee members	x	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah Serving in a leadership position at a political party or local Government officials	x	x	x

v = ada | x = tidak ada | v = yes | x = no

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak secara independen.

All of the Audit Committee Members do not have any financial, managerial, shares ownership and/ or family affiliations with the Board of Commissioners and Board of Directors that may influence their independency.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya yaitu agar pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*) yang disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris No. PER-02/KOM/PPA/ XI/2014 tentang Piagam (*Charter*) Komite Audit Edisi 2014 tertanggal 19 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit dan Auditor Eksternal.
3. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta penerapannya.
4. Menganalisis, menilai, membuat rekomendasi dan menyampaikan informasi mengenai hal yang ditelaah, sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan baik dari pihak eksternal maupun internal Perusahaan.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
7. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan sebelum tahun buku berjalan.

Audit Committee Duty and Responsibility

Pursuant to provisions in Minister of State-Owned Enterprise Regulation number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Structure under Board of Commissioners/Supervisory Board in SOEs, the main function of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners to fulfill its supervisory function, namely to ensure that the Company is effectively and efficiently managed. In the implementation of their duties and the reporting, the Audit Committee is independent and directly answers to the Board of Commissioners. In performing their duties, the Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners which is a manifestation of their supervisory accountability on the management of the Company within the context of GCG principles implementation.

Duties and responsibilities of Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter validated by virtue of Board of Commissioners' Decree no. PER-02/KOM/PPA/XI/2014/Audit Committee Charter 2014 Edition dated December 19, 2014, are as follows

1. Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system as well as the implementation of the internal and external auditors' duties.
2. Evaluating the results of the audit conducted by the Internal Audit unit and External Auditors.
3. Provide recommendations related to the improvement of management control system along with its implementation.
4. Analyze, evaluate, make recommendations and deliver information on the audited and reviewed matters in line with their duties and responsibilities.
5. Maintain the confidentiality of Company's documents, data and information from both external parties and internally within the Company.
6. Report the results of Audit Committee's duties implementation to the Board of Commissioners.
7. Prepare and submit an annual work program to the Board of Commissioners to be approved before beginning of the fiscal year.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Audit**

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris, lingkup tugas masing-masing Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Division of Duties and Responsibilities in Audit Committee Membership

Based on the Decision of Board of Commissioners' Meeting, the scope of duties of each Audit Committee Member are as follows:

Didyk Choירוel

KETUA KOMITE AUDIT/KOMISARIS INDEPENDEN | AUDIT COMMITTEE CHAIRMAN/COMMISSIONER

Bertanggung jawab untuk menangani bidang Umum | Responsible for handling General affairs

Iko Marita M.

ANGGOTA KOMITE AUDIT | AUDIT COMMITTEE MEMBER

Bertanggung jawab untuk menangani bidang Teknis | Responsible for handling Technical affairs

Ahmad Malkan Lubis

ANGGOTA KOMITE AUDIT | AUDIT COMMITTEE MEMBER

Bertanggung jawab untuk menangani bidang Administrasi Dan Keuangan | Responsible for handling Administration and Finance affairs

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Komite Audit, Perusahaan memberikan kesempatan kepada anggota Komite Audit mengikuti pelatihan dan seminar. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Audit Committee Competency Development

To support the implementation of duties and functions as Audit Committee, the Company provides opportunities to members of Audit Committee to attend training and seminars. Regarding the list of training and competency development activities that the Audit Committee participated in throughout 2019 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala mengacu pada Piagam Komite Audit. Pertemuan dengan auditor eksternal minimal sebulan sekali pada saat ada jadwal pemeriksaan audit. Dalam pelaksanaan rapat Komite Audit dapat mengundang Manajemen Perusahaan melalui Divisi SPI untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Di tahun 2019, Komite Audit melakukan Rapat sebanyak 17 kali. Berikut risalah dan rekapitulasi kehadiran rapat-rapat Komite Audit sebagaimana terlampir di bawah ini.

Audit Committee Meeting

Audit Committee holds meeting regularly referring to Audit Committee Charter. The meeting with external auditor is held minimum once a month during the audit schedule. In the Audit Committee meeting implementation, the Committee may invite the Company's Management through Internal Audit Division to provide necessary information.

In 2019, the Audit Committee held 17 meetings. The following are the minutes and recapitulation of attendance of Audit Committee meetings as attached below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat
Recapitulation of Audit Committee Attendance at Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Didyk Choiroel (Ketua Komite Audit) Didyk Choiroel (Audit Committee Chairman)	6	6	100,00%
Iko Marita M. (Anggota) Iko Marita M. (Member)	17	17	100,00%
Ahmad Malkan Lubis (Anggota) Ahmad Malkan Lubis (Member)	17	15	88,24%
RATA-RATA AVERAGE			95,00%

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Risalah Rapat Komite Audit dan Kehadiran Komite Audit****Minutes of Audit Committee Meeting and Attendance****RAPAT KOMITE AUDIT #01**
AUDIT COMMITTEE MEETING #01

Tanggal dan Tempat Rapat : 15 Januari 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : January 15, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-01A/PPA/KA/0119
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan RJPP Tahun 2019-2023; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion on RJPP 2019-2023; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis

Audit Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE AUDIT #02
AUDIT COMMITTEE MEETING #02

Tanggal dan Tempat Rapat : 31 Januari 2019; Gedung Prijadi II Lt.3, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Meeting Date and Venue : January 31, 2019; Prijadi II Building, 3rd Floor, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Nomor Risalah Rapat : RIS-01B/PPA/KA/0119
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan Progress Closing Audit Laporan Keuangan Konsolidasi PT PPA Tahun Buku 2018; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Didyk Choioel
2. Tirta Hidayat
3. Iko Marita Mustokoweni
4. Ahmad Malkan Lubis

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion of Progress of PT PPA's Consolidated Financial Statements Audit Closing for Fiscal Year 2018; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Didyk Choioel
2. Tirta Hidayat
3. Iko Marita Mustokoweni
4. Ahmad Malkan Lubis

Audit Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE AUDIT #03 AUDIT COMMITTEE MEETING #03		RAPAT KOMITE AUDIT #04 AUDIT COMMITTEE MEETING #04	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 8 Februari 2019; Hotel Ibis Style February 8, 2019; Ibis Style hotel	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 5 Maret 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA March 5, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS-02/PPA/KA/0219	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS-01B/PPA/KA/0119
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan Progres Closing Audit Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2018; dan 2. Lain-lain Peserta Rapat: 1. Didyk Choiroel 2. Tirta Hidayat 3. Iko Marita Mustokoweni 4. Ahmad Malkan Lubis Komite Audit yang Tidak Hadir: - Meeting Agenda: 1. Discussion of Progress of PT PPA's Consolidated Financial Statements Audit Closing for Fiscal Year 2018; and 2. Others Meeting Participants: 1. Didyk Choiroel 2. Tirta Hidayat 3. Iko Marita Mustokoweni 4. Ahmad Malkan Lubis Audit Committee who were absent: -	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Hasil Assessmen GCG internal PT PPA Tahun Buku 2018; dan 2. Lain-lain Peserta Rapat: 1. Iko Marita Mustokoweni 2. Awal Susmanto Komite Audit yang Tidak Hadir: Ahmad Malkan Lubis Meeting Agenda: 1. Results of PT PPA's internal GCG Assessment in Fiscal Year 2018; and 2. Others Meeting Participants: 1. Iko Marita Mustokoweni 2. Awal Susmanto Audit Committee who were absent: Ahmad Malkan Lubis

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**RAPAT KOMITE AUDIT #05**
AUDIT COMMITTEE MEETING #05

Tanggal dan Tempat Rapat : 9 April 2019; Gedung Prijadi II Lt.3, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Meeting Date and Venue April 9, 2019; Prijadi II Building, 3rd Floor, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Nomor Risalah Rapat : RIS-01/PPA/KA/0419
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance 1. Pembahasan RKA DSPI Tahun 2019; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Didyk Choeroel
2. Iko Marita Mustokoweni
3. Ahmad Malkan Lubis

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion of the 2019 SPI RKA; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Didyk Choeroel
2. Iko Marita Mustokoweni
3. Ahmad Malkan Lubis

Audit Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE AUDIT #06
AUDIT COMMITTEE MEETING #06

Tanggal dan Tempat Rapat : 21 Mei 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue May 21, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-04/PPA/KA/0519
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance 1. Pembahasan Hasil Assessmen GCG internal PT PPA Tahun Buku 2018; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:
Ahmad Malkan Lubis

Meeting Agenda:
1. Discussion on Results of PT PPA's internal GCG Assessment in Fiscal Year 2018; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Hendy M. Fakhruddin

Audit Committee who were absent:
Ahmad Malkan Lubis

RAPAT KOMITE AUDIT #07
AUDIT COMMITTEE MEETING #07

Tanggal dan Tempat Rapat : 19 Juni 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : June 19, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-05/PPA/KA/0619
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan Profil Investasi; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion of Investment Profile; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis

Audit Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE AUDIT #08
AUDIT COMMITTEE MEETING #08

Tanggal dan Tempat Rapat : 2 Juli 2019; Gedung Prijadi II Lt.3, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Meeting Date and Venue : July 2, 2019; Prijadi II Building, 3rd Floor, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Nomor Risalah Rapat : RIS-06/PPA/KA/0719
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan Tentang TUPOKSI Divisi Satuan Pengawasan Intern; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Didyk Choiroel
2. Iko Marita Mustokoweni
3. Ahmad Malkan Lubis
4. Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion on Job Description of Internal Audit Unit Division; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Didyk Choiroel
2. Iko Marita Mustokoweni
3. Ahmad Malkan Lubis
4. Hendy M. Fakhruddin

Audit Committee who were absent:
-

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**RAPAT KOMITE AUDIT #09**
AUDIT COMMITTEE MEETING #09

Tanggal dan Tempat Rapat : 29 Juli 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : July 29, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-07/PPA/KA/0719
Number of Meeting Minutes : RIS-08/PPA/KA/0719

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan Data Profil Investasi dan Perencanaan Ketersediaan Sistem yang Terintegrasi (Core System PPA, Bigdata).
2. Piagam SPI; dan
3. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion of Investment Profile Data and Planning for Availability of Integrated Systems (Core System PPA, Bigdata).
2. SPI Charter; and
3. Others

Meeting Participants:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis

Audit Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE AUDIT #10
AUDIT COMMITTEE MEETING #10

Tanggal dan Tempat Rapat : 08 Agustus 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : August 08, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-09/PPA/KA/0819
Number of Meeting Minutes :

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan Kebijakan SPI; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis
3. Awal Susmanto

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion on SPI Policy; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis
3. Awal Susmanto

Audit Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE AUDIT #11
AUDIT COMMITTEE MEETING #11

Tanggal dan Tempat Rapat : 20 Agustus 2019; Gedung Prijadi II Lt.3, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Meeting Date and Venue : August 20, 2019; Prijadi II Building, 3rd Floor, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Nomor Risalah Rapat : RIS-10/PPA/KA/0819
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan Data Profil Investasi Pembahasan Penguatan Fungsi SPI; dan
2. Piagam Audit Internal
3. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Didyk Choiroel
2. Iko Marita Mustokoweni

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion on Investment Profile Data, Discussion on Strengthening the Function of SPI; and
2. Internal Audit Charter
3. Others

Meeting Participants:
1. Didyk Choiroel
2. Iko Marita Mustokoweni

Audit Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE AUDIT #12
AUDIT COMMITTEE MEETING #12

Tanggal dan Tempat Rapat : 10 September 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : September 10, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-11/PPA/KA/0919
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan Revisi Perubahan RKAP.
2. Pembahasan Revisi Perubahan RJPP.
3. Diskusi masalah MTN/Obligasi; dan
4. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis
3. Awal Susmanto

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion on Revised Budget and Planning Amendment.
2. Discussion on Revised RJPP Amendment.
3. Discussion on MTN/Bond issues; and
4. Others

Meeting Participants:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis
3. Awal Susmanto

Audit Committee who were absent:
-

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**RAPAT KOMITE AUDIT #13**
AUDIT COMMITTEE MEETING #13

Tanggal dan Tempat Rapat : 19 September 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : September 19, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-12/PPA/KA/0919
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan PSAK 71,72 dan 73,
2. Pembahasan Carter SPI dan Hasil Audit Tegal
3. Realisasi Kegiatan Rist Manajemen PT PPA sd. Triwulan II dan Pembahasan Pengadaan Penilai Independen Assesment GCG Tahun buku 2019; dan
4. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis
3. Hendy M. Fakhruddin
4. Awal Susmanto

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion of PSAK 71.72 and 73,
2. Discussion of SPI Charter and Tegal Audit Results
3. Realization of PT PPA Management Rist Activities up to 2nd Quarter and Discussion of Procurement of Independent Assessor in GCG Assessment for Fiscal Year 2019; and
4. Others

Meeting Participants:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis
3. Hendy M. Fakhruddin
4. Awal Susmanto

Audit Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE AUDIT #14
AUDIT COMMITTEE MEETING #14

Tanggal dan Tempat Rapat : 29 Oktober 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : October 29, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-13/PPA/KA/1019
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan RKAP Tahun Buku 2020.
2. Pembahasan Tangkom Iglas ; dan
3. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis
3. Hendy M. Fakhruddin

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion on Budget and Planning for Fiscal Year 2020.
2. Discussion on Board of Commissioners response for PT Iglas; and
3. Others

Meeting Participants:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis
3. Hendy M. Fakhruddin

Audit Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE AUDIT #15
AUDIT COMMITTEE MEETING #15

Tanggal dan Tempat Rapat : 26 November 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : November 26, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-14/PPA/KA/1119
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance 1. Pembahasan Mengenai Program Training PT PPA.
2. Pembahasan Rapat BOC dan BOD.
3. Pembahasan Sistem Data Debitur PT PPA di core system; dan
4. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis
3. Hendy M. Fakhruddin
4. Awal Susmanto

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion on PT PPA Training Program.
2. Discussion on BOC and BOD Meetings.
3. Discussion on PT PPA Debtor Data System in the core system; and
4. Others

Meeting Participants:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis
3. Hendy M. Fakhruddin
4. Awal Susmanto

Audit Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE AUDIT #16
AUDIT COMMITTEE MEETING #16

Tanggal dan Tempat Rapat : 17 Desember 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : December 17, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-15/PPA/KA/1219
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance 1. Pembahasan Mapping Bisnis dan Portofolio PT PPA
2. Perkembangan Keuangan sd. November dan Realisasi target RKAP; dan
3. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Didyk Choirel
2. Iko Marita Mustokoweni
3. Ahmad Malkan Lubis
4. Marta Kurniawan

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion on PT PPA's Business Mapping and Portfolio
2. Financial Progress until November and Realization of the Budget and Planning target; and
3. Others

Meeting Participants:
1. Didyk Choirel
2. Iko Marita Mustokoweni
3. Ahmad Malkan Lubis
4. Marta Kurniawan

Audit Committee who were absent:
-

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERAPAT KOMITE AUDIT #17
AUDIT COMMITTEE MEETING #17

Tanggal dan Tempat Rapat : 18 Desember 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : December 18, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-16/PPA/KA/1219
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan Rist Assessment
Questionnaire; lain-lain
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis

Komite Audit yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion on Rist Assessment
Questionnaire; etc
2. Others

Meeting Participants:
1. Iko Marita Mustokoweni
2. Ahmad Malkan Lubis

Audit Committee who were absent:
-

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit Tahun 2019

Komite Audit telah merealisasikan Program kerja komite Audit sepanjang 2019. Komite Audit menyerahkan triwulanan dan tahunan kepada komisaris Utama. Pada tahun buku 2019, Komite Audit telah melakukan kegiatan termasuk pembahasan dengan pihak terkait mengenai hal-hal berikut :

Audit Committee Activity Report in 2019

The Audit Committee has realized the Audit Committee's work program throughout 2019. The Audit committee reports quarterly and annually to the President Commissioner. In fiscal year 2019, the Audit Committee carried out activities including discussions with related parties regarding the following matters:

No	Kegiatan Activity	Keterangan Description
1	Menyiapkan bahan evaluasi oleh Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan. Preparing evaluation material by Board of Commissioners on the Company's Performance.	- Menyiapkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan I, II, dan III Tahun 2019 ; - Menyiapkan tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT PPA Triwulan I, II, dan III Tahun 2019. - Surat Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Pemegang Saham. - Preparing Board of Commissioners Supervisory Duty Report for 1st, 2nd and 3rd Quarter of 2019. - Preparing Board of Commissioners opinion on Management Report for 1st, 2nd and 3rd Quarter of 2019. - Board of Commissioners Letters has been submitted to the Shareholders.

No	Kegiatan Activity	Keterangan Description
2	Laporan PMN Tahun 2015 Government Capital Proceeds Report in 2015.	Melakukan evaluasi atas Realisasi Penggunaan PMN Tahun 2015 periode Triwulan I, II, dan III Tahun 2019. Evaluate Realization of Government Capital Proceeds in 2015 for 1 st , 2 nd and 3 rd Quarter of 2019 period.
3	Kegiatan berhubungan dengan Kantor Akuntan Publik Activities related to Public Accounting Firm.	▪ Mengikuti proses <i>closing</i> Audit PT PPA Konsolidasian Tahun Buku 2018 oleh KAP RSM Indonesia ▪ Melakukan pemantauan atas progress audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2018 oleh KAP RSM Indonesia, dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris termasuk menyiapkan konsep surat permintaan informasi mengenai alasan keterlambatan penyelesaian audit dan tindak lanjutnya dari Dewan Komisaris kepada Direksi. ▪ Melakukan evaluasi atas hasil Audit Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2018 oleh KAP RSM Indonesia dan memberikan masukan untuk perbaikannya. ▪ Menyiapkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kantor Akuntan Publik RSM Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ("KAP RSM Indonesia") atas Hasil Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2018 dan Usulan Penunjukkan untuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan PKBL PT PPA Tahun Buku 2019 kepada RUPS. ▪ Menyiapkan proses penunjukkan KAP RSM Indonesia untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2019 oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Keputusan RUPS tentang Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan, Pengesahan Perhitungan Tahunan, dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018. ▪ Menghadiri <i>Kick-off Meeting</i> yang menandai dimulainya proses audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2019 oleh KAP RSM Indonesia. ▪ Mengisi kuesioner KAP tentang <i>Risk / Fraud Assessment</i> ▪ Participated in the closing process of Audit of PT PPA Consolidated Fiscal Year 2018 by KAP RSM Indonesia. ▪ Monitored the progress of 2018 Consolidated Financial Statements audit by KAP RSM Indonesia, and reported them to the Board of Commissioners, including preparing a draft request for information regarding reasons for delays in completing the audit and the follow-up from the Board of Commissioners to the Board of Directors. ▪ Evaluate the results of 2018 PT PPA Consolidated Audit by KAP RSM Indonesia and provide input for improvement. ▪ Preparing Evaluation Report of Public Accounting Firm RSM Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Partners ("KAP RSM Indonesia") on Audit of PT PPA Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2018 and Proposed Appointment for Consolidated Financial Statements and PT PPA PKBL Fiscal Year 2019 to the GMS. ▪ Preparing the process for appointment of KAP RSM Indonesia to audit PT PPA's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2019 by the Board of Commissioners, in accordance with the GMS Decree on Approval of Annual Financial Statements, Ratification of Annual Calculations, and Use of Net Income for Fiscal Year 2018. ▪ Attended the Kick-off Meeting which marked the start of audit process of PT PPA's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2019 by KAP RSM Indonesia. ▪ Completed KAP questionnaires about Risk/Fraud Assessment.
4	Laporan Tahunan PT PPA Tahun buku 2018 PT PPA's Annual Report Fiscal Year 2018	▪ Menyusun konsep Laporan Tahunan PT PPA untuk Tahun Buku 2018, bagian Komite Audit. ▪ Melakukan evaluasi atas buku Laporan Tahunan PT PPA Tahun 2018 dan memberikan rekomendasi perbaikannya melalui Sekretariat Perusahaan. ▪ Menyusun konsep Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan PT PPA untuk Tahun Buku 2018. Surat Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Pemegang Saham. ▪ Prepared concept of PT PPA Annual Report for Fiscal Year 2018, in Audit Committee section. ▪ Evaluated PT PPA Annual Report for Fiscal Year 2018 and provide improvement recommendations through Corporate Secretary ▪ Prepared Board of Commissioners Opinion and Recommendation draft on PT PPA Annual Report for Fiscal Year 2018. Board of Commissioners Letters have been submitted to the Shareholders.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

No	Kegiatan Activity	Keterangan Description
5	Kegiatan yang berhubungan dengan Divisi Audit Internal /Divisi Satuan Pengawas Internal ("DAI/ DSPI") : ▪ Pembahasan RKA ; dan ▪ Pembahasan kegiatan audit (laporan kegiatan triwulanan DIA/DSPI dan penelaahan atas hasil audit yang dilakukan oleh DIA/DSPI Activities related to Internal Audit Unit Division ("SPI"): ▪ RKA discussion; and ▪ Audit activity discussion (SPI quarterly activity report and review on result of audit done by SPI).	▪ Melaksanakan pembahasan atas Rencana Kerja dan Anggaran ("RKA") Divisi DIA / DSPI Tahun 2019 pada tanggal 9 April 2019, dan memberikan persetujuan yang dituangkan dalam minuta rapat. ▪ Melakukan evaluasi, pembahasan, dan memberikan masukan atas pembaharuan / revisi <i>charter</i> (piagam) SPI. ▪ Melakukan pembahasan dengan Direksi dan menyiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai penguatan SPI. ▪ Melakukan kajian atas hasil audit / review DSPI yaitu : ▪ Audit atas Kegiatan Investasi pada Proyek Perumahan Green Teksin – Tegal. ▪ Audit atas tentang kegiatan investasi PT PPA pada PT Carpediem Mandiri. ▪ Audit atas tentang kegiatan investasi PT PPA pada PT Prabu Wahana International. ▪ Audit atas tentang kegiatan investasi PT PPA pada PT Wisarada Sarana Aviati. ▪ Audit atas Kegiatan Investasi pada Divisi Investasi I Direktorat Investasi PT PPA. ▪ Self Assessment Divisi Satuan Pengawasan Intern PT PPA. ▪ Audit atas Kegiatan Pembeian Piutang PT Bank Tabungan Negara (Persero) ("BTN") pada PT Batam Island Marina ("BIM"). ▪ Carried out discussion on the DSPI 2019 Work Plan and Budget ("RKA") on April 9, 2019, and provided approval as outlined in the minutes of meeting. ▪ Evaluated, discussed, and provided input on the revision of SPI charter. ▪ Held discussion with the Board of Directors and prepared Board of Commissioners letter to the Board of Directors regarding SPI strengthening. ▪ Reviewed DSPI audit/review results, namely: ▪ Audit of Investment Activities in Green Teksin Housing Project - Tegal. ▪ Audit of PT PPA's investment activities in PT Carpediem Mandiri. ▪ Audit of PT PPA's investment activities in PT Prabu Wahana International. ▪ Audit of PT PPA's investment activities in PT Wisarada Sarana Aviati. ▪ Audit of Investment Activities in the Investment Division I of Investment Directorate of PT PPA. ▪ Self Assessment of PT PPA (Persero) Internal Audit Unit Division. ▪ Audit of Accounts Receivable of PT Bank Tabungan Negara (Persero) ("BTN") in PT Batam Island Marina ("BIM").
6	Kegiatan yang berhubungan dengan Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") 2019 – 2023. Activities related to Preparation of the Company's Long-Term Plan ("RJPP") 2019 – 2023.	▪ Melakukan pembahasan teknis dengan manajemen PT PPA (PIC) mengenai isi buku RJPP 2019 – 2023. ▪ Mengikuti pembahasan (konsinyering) mengenai RJPP PT PPA Tahun 2019 – 2023 bersama Dewan Komisaris dengan Direksi dan PIC dari manajemen PT PPA. ▪ Menyusun konsep Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RJPP PT PPA Tahun 2019 – 2023. ▪ Melakukan pembahasan dengan manajemen / PIC terkait usulan Direksi untuk mengubah RJPP Konsolidasian Tahun 2019 – 2023 ; ▪ Menyiapkan konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan perubahan RJPP Konsolidasian Tahun 2019 – 2023. ▪ Conducted technical discussion with PT PPA (PIC) management regarding the contents of RJPP book 2019 - 2023. ▪ Participated in discussion (consignment) about PT PPA RJPP 2019-2023 with Board of Commissioners, Board of Directors and PIC from PT PPA management. ▪ Compiled the concept of Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on PT PPA's RJPP 2019 - 2023. ▪ Conducted discussion with management/PIC related to the Board of Directors' proposal to amend the Consolidated RJPP 2019 - 2023; ▪ Prepared a draft of Board of Commissioners' response to the proposed changes in the Consolidated RJPP 2019 - 2023.

No	Kegiatan Activity	Keterangan Description
7	Kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP"). Activities related to Preparation of the Company's Work Plan and Budget ("RKAP").	- Melakukan pembahasan dengan manajemen / <i>Person In Charge</i> ("PIC") terkait usulan Direksi untuk mengubah RKAP Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2019; - Menyiapkan konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan perubahan RKAP Konsolidasian Tahun Buku 2019. - Melakukan pembahasan dengan manajemen / <i>Person In Charge</i> ("PIC") terkait usulan Direksi tentang RKAP Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2020. - Menyiapkan konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan RKAP Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2020. - Discussed with management/Person In Charge ("PIC") related to Board of Directors' proposal to change PT PPA Consolidated Budget and Planning for Fiscal Year 2019; - Prepared a draft of Board of Commissioners' response to the proposed changes to the Consolidated Budget and Planning for Fiscal Year 2019. - Discussed with management/Person In Charge ("PIC") related to Board of Directors' proposal regarding PT PPA Consolidated Budget and Planning for Fiscal Year 2020. - Prepared a draft of Board of Commissioners' response to the proposed PT PPA Consolidated Budget and Planning for Fiscal Year 2020.
8	Kegiatan yang berkaitan dengan Investasi PT PPA . Activities related to PT PPA's Investment.	- Menyiapkan <i>frame work</i> profil investasi dan mengkomunikasikannya dengan PIC terkait pada masing-masing Divisi dari Direktorat KBAM dan Direktorat Investasi. - Bekerjasama dengan Group IT dan Sekretariat Perusahaan agar profil investasi yang telah dilengkapi oleh masing-masing PIC dapat disiapkan program yang nantinya dapat digunakan lebih lanjut dalam menyusun laporan-laporan terkait kegiatan investasi. - Prepared an investment profile framework and communicate it with relevant PIC in each Division of KBAM Directorate and Investment Directorate. - Collaborated with IT Group and Corporate Secretariat so that the investment profile that has been completed by each PIC can be prepared by a program which can later be used to prepare reports related to investment activities.
9	Kegiatan yang berkaitan dengan R/R BUMN. Activities related to Restructuring and/or Revitalization ("RR") of SOEs.	- Melakukan pembahasan dengan PIC, Unit Legal, Unit Manajemen Risiko dan Sekretariat Perusahaan, serta menyiapkan kajian dan konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Direksi tentang penambahan dana talangan untuk PT IGLAS. - Menyusun laporan terintegrasi mengenai RR BUMN dan menyampaikan progresnya di dalam rapat internal Dewan Komisaris. - Conducted discussion with the PIC, Legal Unit, Risk Management Unit and Corporate Secretariat, as well as prepared a review and draft of Board of Commissioners' response to Board of Directors' proposal regarding the transfer of bailout funds to PT IGLAS. - Prepared an integrated report on the SOEs RR and submitted progress in an internal meeting of Board of Commissioners.
10	Kegiatan yang berhubungan dengan Penerbitan SBK, MTN dan Obligasi PT PPA. Activities related to the Issuance of PT PPA's CP, MTN, and Bonds.	- Melakukan pembahasan dengan PIC yang menangani penerbitan SBK, MTN dan Obligasi PT PPA, serta menyiapkan draft tanggapan Dewan Komisaris mengenai hal tersebut. - Mengikuti acara <i>investor gathering</i> sehubungan dengan penerbitan surat utang PT PPA. - Discussed with the PIC that handles the issuance of PT PPA's CP, MTN and bonds, and prepared a draft of Board of Commissioners' response regarding this matter. - Participated in the investor gathering event in connection with the issuance of PT PPA debt securities.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

No	Kegiatan Activity	Keterangan Description
11	Kegiatan yang berhubungan dengan Kebijakan Akuntansi dan Pelaksanaannya. Activities related to Accounting Policies and Implementation.	- Melakukan pembahasan dengan Divisi Akuntansi dan Keuangan mengenai rencana penerapan PSAK 71, 72 dan 73 serta potensi dampaknya terhadap Laporan Keuangan PT PPA Indok, Entitas Anak dan Konsolidasian. - Melaporkan hasil pembahasan mengenai hal tersebut di atas di dalam Rapat Internal Dewan Komisaris untuk selanjutnya dibahas di dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, agar dapat diantisipasi dampaknya. - Discussed with the Accounting and Finance Division about the plan to adopt of PSAK 71, 72 and 73 and their potential impact on the Financial Statements of PT PPA Holding, Subsidiaries and Consolidation. - Reported the results of discussion at the Internal Meeting of Board of Commissioners to be further discussed at the Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors, so that the impact can be anticipated.
12	Kegiatan untuk mendukung Komite Pemantau Risiko & GCG ("KPR&GCG"). Activities to support the Risk Oversight & GCG Committee ("KPR & GCG").	Bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko & GCG melakukan pembahasan dengan Divisi Satuan Pengawas Internal melakukan pembahasan mengenai hasil asesmen internal GCG PT PPA Tahun 2018. Together with the Risk Oversight & GCG Committee, held discussion about the results of 2018 PT PPA GCG internal assessment.
13	Kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia ("SDM") PT PPA Activities related to the development of PT PPA's Human Capital ("SDM")	Melakukan pembahasan dengan Kepala Divisi SDM PT PPA mengenai program training PT PPA. Conducted discussion with PT PPA's HC Division Head regarding PT PPA's training program.
14	Kegiatan lainnya Other Activities	- Menyiapkan persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap dan Non Aktiva (Barang Inventaris Kantor) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2019 yang disampaikan Direksi. - Menyusun konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan perubahan organisasi PT PPA untuk jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi - Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PPA untuk Tahun Buku 2018. - Mengikuti dan terlibat secara aktif dalam Rapat Kerja PT PPA (Induk dan Entitas Anak) tentang Rencana Pemenuhan Target-target RKAP PT PPA Konsolidasian Tahun 2019. - Prepared the Board of Commissioners' approval on the proposed Write-off and Transfer of Fixed Assets and Non-Assets (Office Inventory Goods) of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in 2019 submitted by the Directors. - Prepared a draft of Board of Commissioners' response to the proposed changes on PT PPA organization for position of 1 (one) level below the Board of Directors - Attended PT PPA's Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2018. - Participated and be actively involved in the Work Meetings of PT PPA (Parent and Subsidiary Entities) regarding Plan to Achieve the 2019 PT PPA Consolidated Budget and Planning Targets.

Kebijakan Remunerasi Komite Audit

Mengacu pada Piagam Komite Audit, penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penghasilan anggota Komite Audit berupa honorarium dengan jumlah maksimal 15-20% dari gaji Direktur Utama dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lainnya selain honorarium tersebut.

Audit Committee Remuneration Policy

Referring to Audit Committee Charter, remuneration for Audit Committee is determined by the Board of Commissioners by considering the Company's capability. Remuneration of Audit Committee members is paid as honorarium with maximum amount 15-20% from President Director's Salary with terms and condition that the tax will be paid by the Company and not allowed to receive other remuneration than the honorarium,

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Performance Assessment by Board of Commissioners

No.	Indikator Indicator	Realisasi Realization	Bobot Weight	Skor Score
1	Tingkat Kehadiran Tingkat kehadiran, baik pada rapat Komite maupun rapat internal Dewan Komisaris (%) Attendance rate, both at Committee meetings and Board of Commissioners internal meetings (%)	90,00	8%	7,20
2	Penguasaan materi yang dibahas Mastery of the material discussed	SB	8%	8,00
3	Penyediaan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Provision of time and effort in fulfilling duties and responsibilities as a member of Committee	SB	8%	8,00
4	Partisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke aset kelolaan maupun perusahaan yang dalam proses RR oleh PPA Participation in activities outside the office such as visit to managed assets and companies that are in the RR process by PPA	SB	6%	6,00
5	Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat -rapat Quality and advice given at meetings	SB	10%	10,00
6	Penerapan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite Application of knowledge and experience to increase the effectiveness of Committee	SB	8%	8,00
7	Kerja sama yang efektif dengan rekan sesama Komite, anggota Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, dan dengan Mitra Kerja yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Effective collaboration with fellow Committees, members of Board of Commissioners' Supporting Organs, and with Business Partners that are directly or indirectly related.	SB	8%	8,00
8	Kemampuan mendorong terciptanya rasa saling percaya dan saling menghormati di antara sesama anggota Komite Ability to encourage mutual trust and respect among Committee members	SB	8%	8,00
9	Kemampuan, secara aktif, melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta selalu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang relevan. Ability to actively carry out continuous learning to increase knowledge and abilities, and always keep abreast of relevant industry and markets.	SB	8%	8,00
10	Kemampuan memahami dan memberikan input yang berkualitas terkait Visi, Misi dan Rencana Strategis Perusahaan yang dituangkan dalam RKAP dan RJPP maupun dokumen perencanaan lainnya. Ability to understand and provide high quality input related to the Vision, Mission and Strategic Plan of the Company as outlined in the Budget and Planning and RJPP and other planning documents.	SB	10%	10,00
11	Kemampuan memenuhi ketentuan dalam standar etika, integritas yang tinggi, menjaga kerahasiaan Perusahaan, dan berkeinginan untuk memperbaiki manajemen PPA, serta berkemampuan untuk mewakili dan menjaga citra Perusahaan. Ability to meet the requirements in ethical standards, high integrity, maintain Company confidentiality, and are willing to improve PPA management, and have the ability to represent and maintain the Company's image.	SB	10%	10,00
12	Kontribusi dalam pembuatan risalah rapat komite, laporan triwulan, laporan tahunan, dan penyajian laporan kepada Dewan Komisaris secara lengkap dan tepat waktu. Contribution in making minutes of committee meetings, quarterly reports, annual reports, and preparing reports to the Board of Commissioners in a complete and timely manner.	SB	8%	8,00
TOTAL			100%	99,20

Keterangan: SB (Sangat Baik) atau bernilai penuh. | Note: SB (Very Good) or full score.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG berfungsi sebagai organ yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pemantauan atas implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) dan GCG di Perusahaan. Komite Pemantau Risiko dan GCG bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dan GCG dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai Peraturan Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/VI/2011 tentang Komite Pemantau Risiko dan GCG PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan GCG merupakan komitmen dan inisiatif Dewan Komisaris dalam mendukung terbentuknya perusahaan yang *well-managed* dan *well-governed*. Melalui Komite ini, diharapkan Dewan Komisaris mampu mendorong dan mendukung implementasi Manajemen Risiko secara terintegrasi (ERM) dan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh proses bisnis dan aktivitas di Perusahaan Anak.

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan telah dilengkapi Pedoman Kerja dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG berdasarkan Peraturan Dewan Komisaris Nomor PER-03/KOM/PPA/XI/2014 tentang Piagam (*Charter*) Komite Audit dan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG yang disahkan oleh Dewan Komisaris tertanggal 19 Desember 2014.

Piagam tersebut antara lain mencakup keanggotaan, tugas dan fungsi, masa jabatan, persyaratan keanggotaan, program kerja dan penganggaran, rapat-rapat Komite, pelaporan, akses dan kerahasiaan informasi, evaluasi kinerja Komite dan penghasilan anggota Komite Pemantauan Risiko dan GCG.

Piagam Komite ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan, peraturan atau regulasi terkait lain yang berlaku dan relevan dengan kondisi Perusahaan saat ini.

RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE

Risk Oversight and GCG Committee is functioned as supporting organs under Board of Commissioners in the implementation of supervisory duty over the Enterprise Risk Management (ERM) and GCG implementation in the Company. The Risk Oversight and GCG Committee are responsible directly to Board of Commissioners. Risk Oversight and GCG Committee is established by the Board of Commissioners according to Board of Commissioners Regulation No. PER-01/KOM/PPA/VI/2011 concerning Risk Oversight and GCG Committee in PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

The establishment of Risk Oversight and GCG Committee manifests the commitment and initiative of Board of Commissioners in supporting the establishment of a well-managed and well-governed company. Through this committee, the Board of Commissioners is expected to be able to support and encourage implementation of Integrated Risk Management (ERM) and internalization of good corporate governance principles in all business process and activities at subsidiaries.

Risk Oversight and GCG Committee Charter

In carrying out the functions and roles, the Company's Risk Oversight and GCG Committee Charter has been equipped with working Manual as in Risk Oversight and GCG Committee Charter referring to Board of Commissioners Decree number PER-03/KOM/PPA/XI/2014 concerning Audit Committee Charter and Risk Oversight and GCG Charter as legalized by the Board of Commissioners on December 19, 2014.

The Risk Oversight and GCG Committee Charter covers membership, duty and function, terms of office, membership requirements, working program and budgeting, committee's meeting, reporting, information access and confidentiality, performance evaluation and remuneration for the Risk Oversight and GCG Committee members.

Charter of the Committee is regularly reviewed to ensure that scope of the guideline is always in line with the requirements, regulation or other related and relevant provisions with the Company's current condition.

Persyaratan Komite Pemantau Risiko dan GCG

Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan profesional dalam bidang hukum, manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan.
2. Tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *Conflict of Interest* ataupun dampak negatif;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif terutama dalam hal melihat berbagai permasalahan dan dapat memberikan saran-saran yang konstruktif; dan
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG

Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG, pengangkatan dan pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG melalui proses penilaian sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Pemantau Risiko dan GCG. Profil Anggota Komite dapat dilihat dalam Bagian Profil Komite Pemantau Risiko dan GCG.
2. Proses rekrutmen Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama.
3. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat untuk menentukan calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG terpilih. Selanjutnya, penetapan dan pengangkatan calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
4. Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Risk Oversight and GCG Committee Requirements

Risk Oversight and GCG Committee members shall fulfill requirements, as follows:

1. Having professional capability in legal, risk management and corporate governance aspects.
2. Not having any personal interest or affiliation that may cause Conflict of Interest or negative impact;
3. Being capable to communicate effectively, particularly in analyzing various issues and capable to provide constructive suggestions; and
4. Being capable to allocate sufficient time to complete the duties.

Appointment and Dismissal of Risk Oversight and GCG Committee

According to the Risk Oversight and GCG Committee Charter, Risk Oversight and GCG Committee appointment and dismissal is done by the Board of Commissioners and reported to the GMS. Appointment of Risk Oversight and GCG Committee members shall pass fit and proper test process based on prevailing law in order to ensure capability to implement the role appropriately. Education and career experience qualifications are as follows:

1. Risk Oversight and GCG Committee in the Company has sufficient education and career experience qualifications to support implementation of duties as Risk Oversight and GCG Committee. Profile of the Committee members is presented on Risk Oversight and GCG Committee Profile section.
2. Risk Oversight and GCG Committee Members recruitment process is done by Board of Commissioners by considering competency, expertise and integrity as well as team work capability.
3. Board of Commissioners conducted interview to further observe the Risk Oversight and GCG Committee member candidate. Next, the Board of Commissioners holds meeting to determine the appointed Risk Oversight and GCG Committee member candidate. Furthermore, stipulation and appointment of Risk Oversight and GCG Committee member candidate is done under Board of Commissioners Decree.
4. Every Risk Oversight and GCG Committee member has integrity, competency and good financial Reputation.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan dinyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite PR dan GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan berakhir.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan, masa jabatan Komite Pemantau Risiko dan GCG Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun dengan periodisasi pertama maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode kedua paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan berakhir.

According to the Company's Risk Oversight and GCG Committee Charter, the terms of Risk Oversight and GCG Committee member who is not appointed from the Company's Board of Commissioners members is maximum 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years terms, by not reducing rights of the Board of Commissioners to dismiss anytime.

Dismissal of Risk Oversight and GCG Committee members can be done if membership terms of the respective member has been ended and dismissed under the Board of Commissioners Decree, dismissed because considered not fulfilling expected performance and/or being not competent in carrying out the duties. However, for the Company's Board of Commissioners Member who serves as Chairman of Risk Oversight and GCG Committee, the terms will be ended automatically if the terms as Board of Commissioners member in the Company have ended.

Terms of Tenure

According to the Company's Risk Oversight and GCG Committee Charter, the terms of Risk Oversight and GCG Committee member who is not appointed from the Company's Board of Commissioners members is maximum 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years terms, by not reducing rights of the Board of Commissioners to dismiss anytime.

Dismissal of Risk Oversight and GCG Committee members can be done if membership terms of the respective member has been ended and dismissed under the Board of Commissioners Decree, dismissed because considered not fulfilling expected performance and/or being not competent in carrying out the duties. However, for the Company's Board of Commissioners Member who serves as Chairman of Risk Oversight and GCG Committee, the terms will be ended automatically if the terms as Board of Commissioners member in the Company have ended.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Pemantau Risiko dan GCG Tahun 2019

Di sepanjang tahun 2019 tidak terdapat perubahan komposisi dan susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan GCG terdiri dari tiga orang, seorang anggota komite berasal dari anggota Dewan Komisaris sekaligus menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG, dan dua orang anggota komite berasal dari luar manajemen dengan keahlian yang saling melengkapi dalam pelaksanaan tugas Komite Audit. Berikut komposisi dan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan GCG per 31 Desember 2019.

Susunan Komite Pemantau Risiko dan GCG secara kronologis di sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Number, Composition and Structure of Risk Oversight and GCG Committees in 2019

Throughout 2019, there were no changes to the composition and structure of the Risk Oversight and GCG Committee Membership, consisted of three persons, one committee member came from the Board of Commissioners as well as become the Chairman of Risk Oversight and GCG Committee, and two committee members came from outside management with complementary expertise in carrying out the Risk Oversight and GCG Committee's duties.

The Composition of Risk Oversight and GCG Committee chronologically throughout 2019 is as follows:

**Susunan Komite Pemantau Risiko dan GCG
1 Januari - 31 Desember 2019**

Composition of Risk Oversight and GCG Committee
January 1 - December 31, 2019

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Tirta Hidayat	Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris Independen Risk Oversight and GCG Committee Chairman/ Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.08/KEP.KOM/PPA/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 Decree of Board of Commissioners No.08/KEP.KOM/PPA/VII/2017 dated July 3, 2017	03 Juli 2017- habis masa periode jabatan Dewan Komisaris July 3, 2017- the end of tenure as Board of Commissioners	
Hendy M. Fakhruddin	Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG/Pihak Independen Risk Oversight and GCG Committee Member/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP.KOM/PPA/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 Decree of Board of Commissioners No. 08/KEP.KOM/PPA/VII/2017 dated July 3, 2017	03 Juli 2017 – 03 Juli 2020 July 3, 2017 - July 3, 2020	Ke-2 2 nd
Awal Susmanto	Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG/Pihak Independen Risk Oversight and GCG Committee Member/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP.KOM/PPA /XI/2017 tanggal 30 November 2017 Decree of Board of Commissioners No. 09/KEP.KOM/PPA/XI/2017 dated November 30, 2017	1 Desember 2017 – 1 Desember 2020 December 1, 2017 - December 1 2020	Ke-1 1 st

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Profil masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat dilihat di bawah ini.

The profile of each member of Risk Oversight and GCG Committee can be seen below.

TIRTA HIDAYAT**Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris Independen**
Risk Oversight and GCG Committee Chairman/ Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG Bapak Tirta Hidayat dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

The profile of Risk Oversight and GCG Committee Chairman Tirta Hidayat can be seen in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report

HENDY M. FAKHRUDDIN**Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris**
Risk Oversight and GCG Committee Member/ Commissioner

Periode Jabatan: 03 Juni 2017 – 03 Juni 2020, Periode Ke-2
Service Period: June 03, 2017 – June 03, 2020, 2nd Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 51 tahun
Kelahiran Samarinda, 5 September 1969

Domisili

Serpong, Tangerang Selatan, Indonesia

Pendidikan

S2 Magister Management, UBINUS Jakarta, lulus tahun 2002, S2 Magister Hukum, FH Universitas Trisakti Jakarta, lulus tahun 2016

Keahlian

Tenaga Ahli Aspek *Governance, Risk, Compliance*

Pengalaman Kerja

Konsultan GCG, Pengajar Universitas, Komite Perusahaan

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

Assessor of competency – BNSP, Certified Securities Analyst (CSA) LSPPM – BNSP, Certified Risk Professional (CRP) LSPPM – BNSP, International Certified on GRCP – OCEG

Personal Data

Indonesian citizen
51 years old
Born in Samarinda, September 5, 1969

Domicile

Serpong, South Tangerang, Indonesia

Education

Master of Management, UBINUS Jakarta, graduated in 2002, Master of Law, Faculty of Law, Trisakti University Jakarta, graduated in 2016

Expertise

Governance, Risk, Compliance

Work Experience

GCG Consultant, University Lecturer, Company Committee

Valid Professional Education and/or Certification

Assessor of competency - BNSP, Certified Securities Analyst (CSA) LSPPM - BNSP, Certified Risk Professional (CRP) LSPPM – BNSP, International Certified on GRCP - OCEG



AWAL SUSMANTO

Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG/Pihak Independen Risk Oversight and GCG Committee Member/ Independent Party

Periode Jabatan: 30 November 2017– 30 November 2020, Periode Ke-2
Service Period: November 30, 2017 – November 30, 2020, 2nd Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 36 tahun
Kelahiran Kebumen, 11 Juli 1984

Domisili

Serang, Banten, Indonesia

Pendidikan

D IV, STAN Bintaro, lulus tahun 2010

Keahlian

Tenaga Ahli Aspek Teknis

Pengalaman Kerja

Sekretariat (2005-2013) Kementerian BUMN, Inspektorat (2013-Sekarang) Kementerian BUMN, Komite Audit (2012-Juli 2017) PT PELNI, Komite Kebijakan Risiko (Agustus-Nonember 2017) PT PELNI.

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

Sertifikasi CRMP, PPM tahun 2019, Auditor Muda, BPKP tahun 2018, Infografis, GCG, RM tahun 2017

Personal Data

Indonesian citizen
36 years old
Born in Kebumen, July 11, 1984

Domicile

Serang, Banten, Indonesia

Education

Diploma IV, STAN Bintaro, graduated in 2010

Expertise

Technical Aspect Expert

Work Experience

Secretariat (2005-2013) of Ministry of SOEs, Inspectorate (2013-Present) of Ministry of SOEs, Audit Committee (2012-July 2017) of PT PELNI, Risk Policy Committee (August-November 2017) of PT PELNI.

Valid Professional Education and/or Certification

CRMP certification, PPM 2019, Junior Auditor, BPKP 2018, Infographics, GCG, RM 2017



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG**

Komite Pemantau Risiko dan GCG diketuai oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris dan dua anggota profesional lainnya berasal dari luar Perusahaan serta mempunyai latar belakang Keuangan dan latar belakang yang sesuai dengan bidang industri Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko dan GCG bekerja secara profesional dan independen.

Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, kompetensi, dan independensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna menguatkan/mendukung penerapan ketentuan tentang independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG tersebut di atas, telah dibuat Surat Pernyataan Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG pada saat pengangkatan pada tahun 2017 yang dijabarkan aspek independensi sebagai berikut:

Aspek Independensi Independency Aspect	Tirta Hidayat	Hendy M. Fakhrudin	Awal Susmanto
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having financial affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	x	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak Perusahaan maupun Entitas Afiliasi Having managerial affiliation in the Company, subsidiaries or affiliated companies	x	x	x
Memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Having shares ownership in the Company	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Having family affiliation with Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Audit Committee members	x	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah Serving in a leadership position at a political party or local Government officials	x	x	x

v = ada | x = tidak ada | v = yes | x = no

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak secara independen.

Risk Oversight and GCG Committee Independency

Risk Oversight and GCG Committee is chaired by one Member of Board of Commissioners and two professionals from external Company who have Financial and Engineering background in accordance with the Company's industry. In performing their duties, the Risk Oversight and GCG Committee work professionally and independently.

Members of Risk Oversight and GCG Committee have fulfilled the requirements in terms of quantity, composition, criteria, competency, and independency in accordance with the prevailing laws and regulations.

In order to strengthen/support the implementation of provisions on Risk Oversight and GCG Committee's independence as mentioned above, a Statement of Independency of Risk Oversight and GCG Committee is prepared that outlines the aspects of independency as follows:

The entire members of Risk Oversight and GCG Committee do not have any financial, managerial, shares ownership and/or family affiliations with Board of Commissioners and Board of Directors, which may influence their independency.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, fungsi utama Komite Pemantau Risiko dan GCG adalah membantu Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Pemantau Risiko dan GCG bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko dan GCG kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG yang disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris No. PER-02/KOM/PPA/XI/2014 Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Edisi 2014 tertanggal 19 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko secara Terintegrasi pada seluruh proses bisnis (ERM).
2. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) termasuk penerapan GCG pada Perusahaan Anak.
3. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
4. Menganalisis, menilai, membuat rekomendasi dan menyampaikan informasi mengenai hal yang ditelaah, sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan baik dari pihak eksternal maupun internal Perusahaan.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan GCG kepada Dewan Komisaris.
7. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan sebelum tahun buku berjalan.

Risk Oversight and GCG Committee Duty and Responsibility

According to provisions in Minister of State-Owned Enterprise Regulation no. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Structure under Board of Commissioners/Supervisory Board in SOEs, main function of the Risk Oversight and GCG Committee is to help the Board of Commissioners in Integrated Risk management and Good Corporate Governance implementation effectively and efficiently. In the duty implementation and reporting, the Risk Oversight and GCG Committee are independent and responsible directly to the Board of Commissioners. In carrying out its duties, Risk Oversight and GCG Committee is responsible to the Board of Commissioners. Accountability report from Risk Oversight and GCG Committee to Board of Commissioners is manifestation of supervisory accountability on the Company's management with regard to GCG principles implementation.

Duty and responsibility of Risk Oversight and GCG Committee are stipulated in Risk Oversight and GCG Committee Charter as legalized through Board of Commissioners Decree No. PER-02/KOM/PPA/XI/2014 Risk Oversight and GCG Committee Charter Edition 2014 dated December 19, 2014, as follows:

1. To help the Board of Commissioners in ensuring Integrated/enterprise Risk Management (ERM) implementation in entire business process.
2. To support Board of Commissioners in ensuring Good Corporate Governance (GCG) implementation including GCG implementation in Subsidiaries.
3. To provide recommendation related to Integrated Risk Management and Good Corporate Governance implementation.
4. To analyze, evaluate, prepare recommendation and submit information about reviewed issues according to duty and authority.
5. To protect confidentiality of Corporate Document, Data and Information both from external and internal parties of the Company.
6. To submit Risk Oversight and GCG Committee duty implementation report to the Board of Commissioners.
7. To prepare and submit annual working program to the Board of Commissioners to be legalized before current fiscal year.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan GCG**

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris, lingkup tugas masing-masing Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG adalah sebagai berikut:

Distribution of Duties and Responsibilities in Risk Oversight and GCG Committee Membership

Based on the Decision of Board of Commissioners' Meeting, the scope of duties of each Member of Risk Oversight and GCG Committee are as follows:

Tirta Hidayat

KETUA KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG/KOMISARIS INDEPENDEN
OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE CHAIRMAN/ INDEPENDENT COMMISSIONER

Bertanggung jawab untuk menangani bidang Koordinasi Umum | Responsible for handling General Coordination

Hendy M. Fakhruddin

ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG | RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEMBER

Bertanggung jawab untuk menangani bidang *Governance, Risk, dan Compliance*
Responsible for handling Governance, Risk, dan Compliance affairs

Awal Susmanto

ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG | RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEMBER

Bertanggung jawab untuk menangani bidang Teknis | Responsible for handling Technical Affairs

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko dan GCG

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Komite Pemantau Risiko dan GCG, Perusahaan memberikan kesempatan kepada anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG mengikuti pelatihan dan seminar. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Pemantau Risiko dan GCG di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Risk Oversight and GCG Committee Competency Development

To support implementation of duty and function as Risk Oversight and GCG Committee, the Company provides opportunity to Risk Oversight and GCG Committee members to participate in training and seminar. Concerning the list of training and competency development activities attended by Risk Oversight and GCG Committee throughout 2019, can be seen in the Company Profile chapter of this annual report.

Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG mengadakan rapat secara berkala mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG. Dalam pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat mengundang Manajemen Perusahaan melalui Divisi Manajemen Risiko untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Di tahun 2019, Komite Pemantau Risiko dan GCG melakukan Rapat sebanyak 12 kali. Berikut risalah dan rekapitulasi kehadiran rapat-rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG sebagaimana terlampir di bawah ini.

Risk Oversight and GCG Committee Meetings

Risk Oversight and GCG Committee holds regular meetings referring to the Risk Oversight and GCG Committee Charter. In the implementation of Risk Oversight and GCG Committee meetings, the Company Management may invite the Management through the Risk Management Division to provide the necessary information.

In 2019, the Risk Oversight and GCG Committee held 12 meetings. The following is the minutes and recapitulation of attendance of Risk Oversight and GCG Committee meetings as attached below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko dan GCG pada Rapat
Recapitulation of Risk Oversight and GCG Committee Attendance at Meetings

Komite Pemantau Risiko dan GCG Risk Oversight and GCG Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Tirta Hidayat (Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG) Tirta Hidayat (Risk Oversight and GCG Committee Chairman)	1	1	100,00%
Hendy M. Fakhruddin (Anggota) Hendy M. Fakhruddin (Member)	12	9	75,00%
Awal Susmanto (Anggota) Awal Susmanto (Member)	12	10	83,33%
RATA-RATA AVERAGE			80,00%

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG dan Kehadiran Komite Pemantau Risiko dan GCG****Minutes of Risk Oversight and GCG Committee Meeting and Attendance****RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #01**
RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEETING #01

Tanggal dan Tempat Rapat : 14 Januari 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : January 14, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-01/PPA/KPR&GCG/0119
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan Laporan Manajemen Risiko Tahun 2018; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion of the 2018 Risk Management Report; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto

Risk Oversight and GCG Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #02
RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEETING #02

Tanggal dan Tempat Rapat : 15 Januari 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : January 15, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-01A/PPA/KPR&GCG/0119
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan RJPP 2019-2023; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto
3. Iko Marita Mustokoweni
4. Ahmad Malkan Lubis

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion on RJPP 2019-2023; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto
3. Iko Marita Mustokoweni
4. Ahmad Malkan Lubis

Risk Oversight and GCG Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #03 RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEETING #03		RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #04 RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEETING #04	
Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 8 Februari 2019; Hotel Ibis Style 8 Februari 2019; Hotel Ibis Style	Tanggal dan Tempat Rapat Meeting Date and Venue	: 5 Maret 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA March 5, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA
Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS-02/PPA/KPR&GCG/ 0219	Nomor Risalah Rapat Number of Meeting Minutes	: RIS-02A/PPA/KPR&GCG/0219
Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan Progres Closing Audit Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2018; dan 2. Lain-lain Peserta Rapat: 1. Didyk Choiroel 2. Tirta Hidayat 3. Hendy M. Fakhruddin 4. Iko Marita Mustokoweni Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir: Awal Susmanto Meeting Agenda: 1. Discussion on Progress of Closing Audit of PT PPA's Financial Statements of Fiscal Year 2018; and 2. Others Meeting Participants: 1. Didyk Choiroel 2. Tirta Hidayat 3. Hendy M. Fakhruddin 4. Iko Marita Mustokoweni Risk Oversight and GCG Committee who were absent: Awal Susmanto	Kehadiran Attendance	: Agenda Rapat: 1. Pembahasan GCG; dan 2. Lain-lain Peserta Rapat: 1. Iko Marita Mustokoweni 2. Awal Susmanto Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir: Hendy M. Fakhruddin Meeting Agenda: 1. Discussion on GCG; and 2. Others Meeting Participants: 1. Iko Marita Mustokoweni 2. Awal Susmanto Risk Oversight and GCG Committee who were absent: Hendy M. Fakhruddin

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #05**
RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEETING #05

Tanggal dan Tempat Rapat : 12 Maret 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : March 12, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-03/PPA/KPR&GCG/ 0319
Number of Meeting Minutes

Kehadiran Attendance : Agenda Rapat:
1. Pembahasan Tindaklanjut Area of Improvement Hasil Assesment GCG Tahun 2018 Aspek Dewan Komisaris; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion on the Follow-up to Area of Improvement in 2018 GCG Assessment of Board of Commissioners aspect; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto

Risk Oversight and GCG Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #06
RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEETING #06

Tanggal dan Tempat Rapat : 21 Mei 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : May 21, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-04/PPA/KPR&GCG/0519
Number of Meeting Minutes

Kehadiran Attendance : Agenda Rapat:
1. Pembahasan GCG; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:
Ahmad Malkan Lubis

Meeting Agenda:
1. Discussion on GCG; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto

Risk Oversight and GCG Committee who were absent:
Ahmad Malkan Lubis

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #07 RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEETING #07

Tanggal dan Tempat Rapat : 2 Juli 2019; Gedung Prijadi II Lt.3, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Meeting Date and Venue : July 2, 2019; Prijadi II Building, 3rd floor, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Nomor Risalah Rapat : RIS-06/PPA/KPR&GCG/0719
Number of Meeting Minutes

Kehadiran Attendance : Agenda Rapat:
1. Pembahasan Tentang TUPOKSI Divisi Satuan Pengawasan Intern; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Iko Marita Mustokoweni
3. Ahmad Malkan Lubis

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:
Awal Susmanto

Meeting Agenda:
1. Discussion on Job Description of Internal Audit Unit Division; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Iko Marita Mustokoweni
3. Ahmad Malkan Lubis

Risk Oversight and GCG Committee who were absent:
Awal Susmanto

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #08 RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEETING #08

Tanggal dan Tempat Rapat : 8 Agustus 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : August 8, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-07/PPA/KPR&GCG/ 0919
Number of Meeting Minutes

Kehadiran Attendance : Agenda Rapat:
1. Pembahasan Kebijakan SPI; dan
2. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Awal Susmanto
2. Iko Marita Mustokoweni
3. Ahmad Malkan Lubis

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:
Hendy M. Fakhruddin

Meeting Agenda:
1. Discussion on SPI Policy; and
2. Others

Meeting Participants:
1. Awal Susmanto
2. Iko Marita Mustokoweni
3. Ahmad Malkan Lubis

Risk Oversight and GCG Committee who were absent:
Hendy M. Fakhruddin

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURERAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #09
RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEETING #09

Tanggal dan Tempat Rapat : 10 September 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : September 10, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-08/PPA/KPR&GCG/ 0919
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance 1. Pembahasan Revisi Perubahan RKAP.
2. Pembahasan Revisi Perubahan RJPP.
3. Diskusi masalah MTN/Obligasi; dan
4. Lain-lain

Peserta Rapat:

1. Awal Susmanto
2. Iko Marita Mustokoweni
3. Ahmad Malkan Lubis

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:
Hendy M. Fakhruddin

Meeting Agenda:

1. Discussion on Revised Budget and Planning Amendment.
2. Discussion on Revised RJPP Amendment.
3. Discussion on MTN/Bond issues; and
4. Others

Meeting Participants:

1. Awal Susmanto
2. Iko Marita Mustokoweni
3. Ahmad Malkan Lubis

Risk Oversight and GCG Committee who were absent:
Hendy M. Fakhruddin

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #10
RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEETING #10

Tanggal dan Tempat Rapat : 19 September 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : September 19, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-09/PPA/KPR&GCG/0919
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance 1. Pembahasan PSAK 71,72 dan 73,
2. Pembahasan *Carter* SPI dan Hasil Audit Tegal
3. Realisasi Kegiatan Rist Manajemen PT PPA sd. Triwulan II dan Pembahasan Pengadaan Penilai Independen Assesment GCG Tahun buku 2019; dan
4. Lain-lain

Peserta Rapat:

1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto
3. Iko Marita Mustokoweni
4. Ahmad Malkan Lubis

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:

1. Discussion on PSAK 71.72 and 73,
2. Discussion on SPI Charter and Tegal Audit Results
3. Realization of PT PPA Management Rist Activities up to 2nd Quarter and Discussion on Procurement of Independent Assessor in GCG Assessment for Fiscal Year 2019; and
4. Others

Meeting Participants:

1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto
3. Iko Marita Mustokoweni
4. Ahmad Malkan Lubis

Risk Oversight and GCG Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #11
RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEETING #11

Tanggal dan Tempat Rapat : 29 Oktober 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : October 29, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-11/PPA/KPR&GCG/ 1019
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Pembahasan RKAP Tahun Buku 2020.
2. Pembahasan Tangkom Iglas ; dan
3. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto
3. Iko Marita Mustokoweni
4. Ahmad Malkan Lubis

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Discussion on Budget and Planning for Fiscal Year 2020.
2. Discussion on Tangkom Iglas; and
3. Others

Meeting Participants:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto
3. Iko Marita Mustokoweni
4. Ahmad Malkan Lubis

Risk Oversight and GCG Committee who were absent:
-

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG #12
RISK OVERSIGHT AND GCG COMMITTEE MEETING #12

Tanggal dan Tempat Rapat : 26 November 2019; Ruang Rapat Dewan Komisaris Lantai 9 PT PPA
Meeting Date and Venue : November 26, 2019; Board of Commissioners Meeting Room 9th Floor of PT PPA

Nomor Risalah Rapat : RIS-12/PPA/KPR&GCG/1119
Number of Meeting Minutes

Kehadiran : Agenda Rapat:
Attendance : 1. Persiapan *Assessment* GCG Tahun 2019
2. *Monitoring* Hasil Evaluasi Tahun 2019; dan
3. Lain-lain

Peserta Rapat:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto

Komite Pemantau Risiko dan GCG yang Tidak Hadir:
-

Meeting Agenda:
1. Preparation for the 2019 GCG Assessment
2. Monitoring Evaluation Results in 2019; and
3. Others

Meeting Participants:
1. Hendy M. Fakhruddin
2. Awal Susmanto

Risk Oversight and GCG Committee who were absent:
-

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko dan GCG Tahun 2019

Sesuai dengan ruang lingkup penugasan yang diberikan Dewan Komisaris, KPRGCG telah menjalankan program kerja yang mencakup area penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dan Manajemen Risiko Terintegrasi (*enterprise risk management*) di lingkungan PPA Grup.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Bekerjasama dengan pihak Sekretaris Perusahaan, SPI, dan Divisi Pengadaan PT PPA untuk menyelenggarakan pengadaan *Independent Assessment Consultant* termasuk persetujuan rekomendasi parameter dan kriteria asesmen GCG berbasis SK-16 tahun 2012.

Risk Oversight and GCG Committee Activity Report in 2019

In accordance with the scope of work given by the Board of Commissioners, KPRGCG has carried out work programs covering the area of Corporate Governance implementation and enterprise risk management within PPA Group.

The activities that have been carried out include:

- In collaboration with Corporate Secretary, SPI and Procurement Division of PT PPA, held the procurement of Independent Assessment Consultant including approval of recommendation of assessment parameter and criteria based on SK-16 of 2012.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

- b. Memantau pelaksanaan Asesmen GCG secara independen oleh AGS Consulting bagi PPA (Persero) dan pelaksanaan asesmen bagi PT PPA Finance dan PT PPA Kapital. Asesmen bagi entitas anak merupakan asesmen pertama kali dalam upaya penerapan penilaian GCG Grup PPA.
- c. Mengikuti Sosialisasi *Good Corporate Governance* bagi PT PPA dan PT PPA Finance serta PT PPA Kapital dengan narasumber AGS Consulting.
- d. Menyiapkan bahan evaluasi oleh Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan dalam bentuk konsep :
 - 1) Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018, serta untuk Triwulan I, II, dan III Tahun 2019;
 - 2) Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2018, serta untuk Triwulan I, II, dan III Tahun 2019.
 Surat Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Pemegang Saham.
- e. Kegiatan yang berhubungan dengan Laporan PMN Tahun 2015, Komite Audit mengevaluasi Laporan dimaksud yang disiapkan oleh Direksi sebelum ditandatangani oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Tahun 2018, serta untuk Triwulan I, II, dan III Tahun 2019.
- f. Kegiatan yang berhubungan dengan revisi RKAP PT PPA Konsolidasian Tahun 2019 :
 - 1) Melakukan pembahasan dengan manajemen / *Person In Charge* ("PIC") terkait usulan Direksi untuk mengubah RKAP Konsolidasian Tahun Buku 2019 ;
 - 2) Menyiapkan konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan perubahan RKAP Konsolidasian Tahun Buku 2019.
- g. Kegiatan yang berhubungan dengan revisi RKAP PT PPA Konsolidasian Tahun 2020 :
 - 1) Melakukan pembahasan dengan manajemen / *Person In Charge* ("PIC") terkait usulan Direksi atas RKAP Konsolidasian Tahun Buku 2020 ;
 - 2) Menyiapkan konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan RKAP Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2020.
- h. Kegiatan yang berhubungan dengan RJPP PT PPA Konsolidasian Tahun 2019 – 2023 :
 - 1) Melakukan pembahasan teknis dengan manajemen PT PPA (PIC) mengenai isi buku RJPP 2019 – 2023;
- b. Monitored the implementation of GCG Assessment independently by AGS Consulting for PPA (Persero) and the implementation of assessment for PT PPA Finance and PT PPA Kapital. The assessment for subsidiary was for the first time an effort has been made to apply the PPA Group GCG assessment.
- c. Participated in Good Corporate Governance Socialization for PT PPA (Persero), PT PPA Finance and PT PPA Kapital with speakers from AGS Consulting.
- d. Prepared evaluation materials by the Board of Commissioners on the Company's performance in the form of draft of:
 - 1) Board of Commissioners' Supervisory Report for 2018, as well as for the First, Second and Third Quarter of 2019;
 - 2) Board of Commissioners' response to the 2018 Company Management Report, as well as for the First, Second and Third Quarter of 2019.
 Board of Commissioners' letter has been submitted to the Shareholders.
- e. Activities related to the 2015 Government Capital Proceeds Report, the Audit Committee evaluated the Report prepared by the Board of Directors before being signed by the Board of Commissioners for 2018, as well as for the First, Second and Third Quarter of 2019.
- f. Activities related to the revision of PT PPA 2019 Consolidated Budget and Planning:
 - 1) Discussed with management/Person In Charge ("PIC") related to Board of Directors' proposal to amend the Consolidated Budget and Planning for Fiscal Year 2019;
 - 2) Prepared the draft of Board of Commissioners' response to the proposed changes to the 2019 Fiscal Year Consolidated Budget and Planning.
- g. Activities related to the revision of PT PPA 2020 Consolidated Budget and Planning:
 - 1) Discussed with management/Person In Charge ("PIC") related to Board of Directors' proposal for the Consolidated Budget and Planning for Fiscal Year 2020;
 - 2) Prepared the draft of Board of Commissioners' response to the proposed PT PPA Consolidated Budget and Planning for Fiscal Year 2020.
- h. Activities related to PT PPA Consolidated RJPP 2019 - 2023:
 - 1) Held technical discussion with PT PPA management (PIC) regarding the contents of the RJPP book 2019 - 2023;

- 2) Mengikuti pembahasan (konsinyering) mengenai RJPP PT PPA Tahun 2019 – 2023 bersama Dewan Komisaris dengan Direksi dan PIC dari manajemen PT PPA.
- 3) Menyusun konsep Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RJPP PT PPA Tahun 2019 – 2023.
- 4) Melakukan pembahasan dengan manajemen / PIC terkait usulan Direksi untuk mengubah RJPP Konsolidasian Tahun 2019 – 2023 ;
- 5) Menyiapkan konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan perubahan RJPP Konsolidasian Tahun 2019 - 2023
- i. Berhubungan dengan penerbitan Surat Utang (SBK, MTN, dan Obligasi):
 - 1) Melakukan pembahasan dengan PIC yang menangani penerbitan SBK, MTN dan Obligasi PT PPA, melakukan analisis atas usulan Direksi, serta membantu menyusun konsep tanggapan Dewan Komisaris mengenai hal tersebut;
 - 2) Mengikuti acara *investor gathering* sehubungan dengan penerbitan surat utang PT PPA.
- j. Kegiatan yang berhubungan dengan R/R BUMN:
 - 1) Melakukan pembahasan dengan PIC, Unit Legal, Unit Manajemen Risiko dan Sekretariat Perusahaan, serta menyiapkan kajian dan konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Direksi tentang penambahan dana talangan untuk PT IGLAS.
 - 2) Menyusun laporan terintegrasi mengenai RR BUMN dan menyampaikan progresnya di dalam rapat internal Dewan Komisaris.
 - 3) Melaksanakan Sertifikasi Manajemen Risiko – *Certified Risk Professional* (CRP) bagi anggota Dewan Komisaris yaitu Edy Putra Irawadi dan Tirta Hidayat dan telah dinyatakan Kompeten dari LSP Pasar Modal pada Minggu pertama bulan November 2019. 2 anggota Dewan Komisaris telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Masa berlaku sertifikasi tersebut adalah 3 (tiga) tahun.
 - 4) Mengikuti acara The 6th International Financial Cooperation Forum pada 9 – 11 Desember 2019 di Seoul, Korea. Acara diselenggarakan oleh Council International Financial Cooperation (CICF).
- 2) Participated in the discussion (consignment) regarding PT PPA RJPP 2019-2023 with Board of Commissioners, Board of Directors and PIC of PT PPA management.
- 3) Prepared the draft of Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on PT PPA's RJPP 2019-2023.
- 4) Discussed with management/PIC related to Board of Directors' proposal to amend the Consolidated RJPP 2019-2023;
- 5) Prepared the draft of Board of Commissioners' response to the proposed change in the Consolidated RJPP 2019 - 2023
- i. Related with the issuance of Debt Securities (CP, Medium Term Notes and Bonds):
 - 1) Held discussion with PIC that handle the issuance of PT PPA's CP, MTN and Bonds, analyzed the proposals of Board of Directors, and helped to draft Board of Commissioners' response to the matter;
 - 2) Participated in the investor gathering event in connection with the issuance of PT PPA debt securities.
- j. Activities related to SOEs R/R:
 - 1) Held discussion with the PIC, Legal Unit, Risk Management Unit and Corporate Secretariat, as well as prepared a review and draft of Board of Commissioners' response to Board of Directors' proposal regarding the transfer of bailout funds to PT IGLAS.
 - 2) Prepared an integrated report on RR SOEs and submitted progress in an internal meeting of Board of Commissioners.
 - 3) Carried out Certified Risk Professional (CRP) Certification for members of Board of Commissioners, Edy Putra Irawadi and Tirta Hidayat, which have been declared Competent from the Capital Market LSP on the first Sunday in November 2019. 2 members of Board of Commissioners have obtained Risk Management Certification from the National Professional Certification Board (BNSP). The validity period of certification is 3 (three) years.
 - 4) Attended the 6th International Financial Cooperation Forum on December 9-11 2019 in Seoul, Korea. The event was organized by the Council International Financial Corporation (CICF).

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

5) Mengikuti Konferensi Risk Beyond 2019 tanggal 5 dan 6 Desember 2019 tentang Governance – Risk Management – Compliance (GRC) bagi anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan oleh ERMA (Enterprise Risk Management Academy). 6) Mengikuti Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA) dan dinyatakan telah kompeten untuk area assurance tentang Sustainability Reporting. 7) Mengikuti Seminar yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors Indonesia. 8) Mengikuti secara aktif Rapat Internal Dewan Komisaris selama tahun 2019. k. Kegiatan Lainnya : 1) Menyiapkan persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap dan Non Aktiva (Barang Inventaris Kantor) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2019 yang disampaikan Direksi. 2) Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PPA untuk Tahun Buku 2018, dan RKAP PT PPA Tahun 2019. 3) Mengikuti dan terlibat secara aktif dalam Rapat Kerja PT PPA (Induk dan Entitas Anak) tentang Rencana Pemenuhan Target-target RKAP PT PPA Konsolidasian Tahun 2019.	5) Attended the Risk Beyond 2019 Conference on December 5 and 6, 2019 on Governance - Risk Management - Compliance (GRC) for members of Board of Commissioners organized by ERMA (Enterprise Risk Management Academy). 6) Attended the Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA) and has been declared competent for the assurance area on Sustainability Reporting. 7) Attended the Seminar organized by the Institute of Internal Auditors Indonesia. 8) Participated actively in Board of Commissioners' Internal Meeting in 2019. k. Other Activities: 1) Prepared Board of Commissioners' approval for the proposed write-off and transfer of Fixed Assets and Non-Assets (Office Inventory Goods) of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in 2019 submitted by the Directors. 2) Attended PT PPA Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2018, and PT PPA Budget and Planning 2019. 3) Participated and be actively involved in the Work Meeting of PT PPA (Parent and Subsidiaries) regarding the Plan to Achieve the 2019 PT PPA Consolidated Budget and Planning Targets.

Kebijakan Remunerasi Komite Pemantau Risiko dan GCG

Sesuai yang tercantum pada Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG, penghasilan anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penghasilan Komite Pemantau Risiko dan GCG berupa honorarium dengan jumlah 15-20% dari gaji Direktur Utama dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lainnya selain honorarium tersebut.

Risk Oversight and GCG Committee Remuneration Policy

As disclosed in the Risk Oversight and GCG Committee Charter, remuneration of Risk Oversight and GCG Committee is stipulated by Board of Commissioners by considering the Company's capability. Remuneration of Risk Oversight and GCG Committee members is paid as honorarium with maximum amount 15-20% from President Director's Salary with terms and condition that the tax will be paid by the Company and not allowed to receive other remuneration than the honorarium.

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Performance Assessment by Board of Commissioners

No.	Indikator Indicator	Realisasi Realization	Bobot Weight	Skor Score
1	Tingkat Kehadiran Tingkat kehadiran, baik pada rapat Komite maupun rapat internal Dewan Komisaris (%) Attendance rate, both at Committee meetings and Board of Commissioners internal meetings (%)	80%	8%	6,80
2	Penguasaan materi yang dibahas Mastery of the material discussed	SB	8%	8,00
3	Penyediaan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Provision of time and effort in fulfilling duties and responsibilities as a member of Committee	SB	8%	7,60
4	Partisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke aset kelolaan maupun perusahaan yang dalam proses RR oleh PPA Participation in activities outside the office such as visit to managed assets and companies that are in the RR process by PPA	SB	6%	6,00
5	Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat -rapat Quality and advice given at meetings	SB	10%	10,00
6	Penerapan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite Application of knowledge and experience to increase the effectiveness of Committee	SB	8%	8,00
7	Kerja sama yang efektif dengan rekan sesama Komite, anggota Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, dan dengan Mitra Kerja yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Effective collaboration with fellow Committees, members of Board of Commissioners' Supporting Organs, and with Business Partners that are directly or indirectly related.	SB	8%	8,00
8	Kemampuan mendorong terciptanya rasa saling percaya dan saling menghormati di antara sesama anggota Komite Ability to encourage mutual trust and respect among Committee members	SB	8%	8,00
9	Kemampuan, secara aktif, melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta selalu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang relevan. Ability to actively carry out continuous learning to increase knowledge and abilities, and always keep abreast of relevant industry and markets.	SB	8%	8,00
10	Kemampuan memahami dan memberikan input yang berkualitas terkait Visi, Misi dan Rencana Strategis Perusahaan yang dituangkan dalam RKAP dan RJPP maupun dokumen perencanaan lainnya. Ability to understand and provide high quality input related to the Vision, Mission and Strategic Plan of the Company as outlined in the Budget and Planning and RJPP and other planning documents.	SB	10%	10,00
11	Kemampuan memenuhi ketentuan dalam standar etika, integritas yang tinggi, menjaga kerahasiaan Perusahaan, dan berkeinginan untuk memperbalki manajemen PPA, serta berkemampuan untuk mewakili dan menjaga citra Perusahaan. Ability to meet the requirements in ethical standards, high integrity, maintain Company confidentiality, and are willing to improve PPA management, and have the ability to represent and maintain the Company's image.	SB	10%	10,00
12	Kontribusi dalam pembuatan risalah rapat komite, laporan triwulan, laporan tahunan, dan penyusunan laporan kepada Dewan Komisaris secara lengkap dan tepat waktu. Contribution in making minutes of committee meetings, quarterly reports, annual reports, and preparing reports to the Board of Commissioners in a complete and timely manner.	SB	8%	8,00
TOTAL			100%	98,40

Keterangan: SB (Sangat Baik) atau bernilai penuh. | Note: SB (Very Good) or full score.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTIONS

Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi di lingkup Perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan persetujuan pemegang saham melalui RUPS.

The Board of Commissioners did not establish a Nomination and Remuneration Committee. The implementation of Nomination and Remuneration function in the Company is carried out by the Board of Commissioners with the approval of shareholders through GMS.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, bahwa jumlah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) Komite, yaitu Komite Audit dan Komite lainnya jika diperlukan. Implementasi saat ini di Perusahaan telah terbentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG. Mempertimbangkan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan jumlah maksimal Komite yang ditetapkan, maka untuk perbantuan pengawasan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris melalui penugasan lainnya kepada Komite Audit dan/atau dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan GCG.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Perusahaan, khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi Perusahaan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan transparansi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan dimasukkan dalam fungsi Komite Audit.

According to Minister of SOEs Regulation No. PER12/MBU/2012 concerning Supporting Structure under Board of Commissioners/Supervisory Board in SOEs, number of Committees that is eligible to be established by Board of Commissioners is 2 (two) Committees that are Audit Committee and another committee, if necessary. Current implementation in the Company, Audit Committee and Risk Oversight and GCG Committee have been established. Considering the Company has fulfilled provisions on maximum number of committee establishment, to support supervisory on nomination and Remuneration function implementation, the function is carried out by all Board of Commissioners members through other assignment to Audit Committee and/or supported by Risk Oversight and GCG Committee.

Nomination and Remuneration Function holds the duty to help the Board of Commissioners in implementing supervisory duty in the Company, particularly to ensure that the Company's nomination and remuneration system/policy have been prepared based on fairness and transparency principles as well comply with prevailing law and regulation. The Nomination and Remuneration function in the Company is included in the Audit Committee's function.

Pelaksanaan Tugas Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan Tugas Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari Komite Audit yang secara khusus mengelola kebijakan nominasi dan remunerasi. Tim tersebut dibentuk dalam rangka memenuhi implementasi GCG namun tetap memperhatikan ketentuan berdasarkan Surat Menteri BUMN yang mengamanatkan hanya 1 (satu) Komite yang wajib dan 1 (satu) Komite tambahan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai bagian tak terpisahkan dalam Komite Audit, Fungsi Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun kriteria seleksi pejabat yang pantas/ layak untuk dinominasikan menjadi tenaga eksekutif Perusahaan.
2. Menyusun prosedur nominasi bagi para Pejabat di Perusahaan.
3. Membuat sistem penilaian bagi para Pejabat Perusahaan.
4. Melakukan evaluasi terhadap proses penyetaraan sistem remunerasi/insentif bagi Pejabat dan pegawai Perusahaan.

Program Kerja

Fungsi Nominasi dan Remunerasi memiliki program kerja yang merupakan bagian dari program kerja Komite Audit terkait nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

1. Menelaah dan memantau implementasi nominasi dan remunerasi;
2. Menelaah dan memantau proses rekrutmen dan pengembangan karir;
3. Menelaah rumusan dalam menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif dan tantiem yang bersifat variable untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Komite Audit telah melaksanakan penugasan program kerja bidang nominasi dan remunerasi selama 2019, di antaranya:

1. Meninjau kebijakan SDM dan pelaksanaannya,
2. Meninjau usulan remunerasi Direksi,

Implementation of Nomination and Remuneration Duty

Implementation of Nomination and Remuneration Duty is part of Audit Committee who particularly manages the nomination and remuneration policies. The team is established to fulfill GCG implementation but also complies with provisions according to Minister of SOEs Letter that mandated only 1 (one) mandatory Committee and 1 (one) additional Committee are allowed.

Duty and Responsibility

As integrated part of Audit Committee, the Nomination and Remuneration Function holds the duty and responsibility as follows:

1. Preparing selection criteria for the Executive that is eligible to be nominated as Executive in the Company.
2. Preparing nomination procedure for Executive in the Company.
3. Preparing assessment system for Executive in the Company.
4. Evaluating remuneration/incentive system adjustment process for Executive and Employee in the Company.

Work Program

Nomination and Remuneration Function has work program as part of Audit Committee work program related to nomination and remuneration, as follows:

1. Review and supervise implementation of nomination and remuneration;
2. Review and supervise recruitment and career development process;
3. Review formulation to determine remuneration policy in form of salary and honorarium, fixed allowance and facilities as well as variable incentives and bonus for Board of Commissioners and Board of Directors.

Activity Report

Audit Committee has carried out work program assignment in nomination and remuneration in 2019, as follows:

1. Reviewing HC policy and its implementation,
2. Reviewing Board of Directors remuneration proposal,

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

3. Membahas Surat keputusan Dewan Komisaris tentang Penilaian kinerja Direksi,
4. Membahas Surat keputusan Dewan Komisaris tentang kebijakan Dewan Komisaris dalam Pemilihan calon Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak Patungan Perusahaan.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat Komite Audit sebagai penanggung jawab pelaksana fungsi nominasi dan remunerasi. Informasi lebih jelas terkait pelaksanaan rapat Komite Audit dan frekuensi kehadiran anggota Komite dapat dilihat pada bagian Komite Audit.

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam mewujudkan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, calon anggota Direksi Perusahaan telah melalui beberapa rangkaian proses sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham.

Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*); serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 mengatur bahwa sumber Bakal Calon Direksi BUMN dapat berasal dari:

1. Direksi BUMN
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
3. Talenta BUMN yang terdiri atas:
 - a. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa
 - b. Direksi anak usaha dari BUMN/perusahaan patungan BUMN
4. Talenta Kementerian BUMN
5. Sumber Lain yang terdiri dari:
 - a. Pejabat BUMN lain
 - b. Sumber lainnya

3. Discussing Board of Commissioners Decree on Board of Directors performance assessment,
4. Discussing Board of Commissioners Decree on Board of Commissioners policy in Board of Directors and Board of Commissioners candidate's nomination in the Company's Subsidiary Joint Ventures.

The discussion is done in the Audit Committee meeting as person-in-charge of the nomination and remuneration function implementation. Detail information about implementation of Audit Committee meeting and attendance of the Committee members are presented in Audit Committee section.

Board of Directors Succession Policy

In order to realize a transparent, accountable and responsible Board of Directors member appointment and succession, Board of Directors member candidate in the Company has passed several processes before proposed to the Shareholders.

The Board of Directors' succession policy refers to SOEs Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendment to SOEs Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance; and SOEs Ministerial Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 on the Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Directors of State-Owned Enterprises.

Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 stipulates that prospective candidates for Director of SOEs may be originated from:

1. SOEs Board of Directors
2. SOEs Board of Commissioners/Supervisory Board
3. SOEs Talents consisting of:
 - a. Official 1 (one) level below Board of Directors or officials who have special achievements
 - b. Directors of subsidiaries of SOE/SOEs joint ventures
4. Ministry of SOEs Talents
5. Other Sources consisting of:
 - a. Another SOEs officials
 - b. Other Sources

Direksi diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham. Proses pencalonan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Board of Directors are appointed by shareholders through the GMS from candidates nominated by Shareholders. The nomination process is carried out in accordance with applicable laws and regulations, and the nomination is binding for the GMS.

Untuk memastikan integritas dan profesionalitas di bidangnya, seluruh calon Direksi menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan uji kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 dan mekanisme penilaiannya tercantum dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-09a/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi BUMN, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

To ensure integrity and professionalism in their fields, all candidates for Board of Directors undergo a fit and proper test carried out in accordance with applicable laws and regulations. The implementation of fit and proper test for candidates for Directors referring to Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 and the evaluation mechanism is contained in the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-09A/MBU/2002 concerning Fit and Proper Test of Prospective Candidates of SOEs Board of Directors, as well as other laws and regulations.

Berikut disampaikan bagan pengusulan hingga penetapan Direksi di lingkup Perusahaan.

The following is a chart describing the proposal until the determination of Directors within the Company.

Skema dan Mekanisme Suksesi Direksi: Pengusulan Hingga Penetapan Scheme and Mechanism of Directors' Succession: Proposal to Determination

Pengajuan dan Penjaringan Bakal Calon Direksi Submission and Selection of Prospective Candidates for Directors

Pengajuan nama-nama calon Direksi didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari personal yang pernah menjabat Direksi BUMN namun tidak lagi menjabat, Dewan Komisaris, Talenta BUMN, Talenta Kementerian BUMN dan sumber lain. Penjaringan nama-nama Direksi dilakukan oleh Kementerian BUMN.

Submission of names of candidates for Directors is based on prospective candidates consisting of individuals who have served as SOE's Board of Directors but no longer in office, Board of Commissioners, SOEs Talents, Ministry of SOEs Talents and other sources. The selection of the names of candidates for Directors is carried out by the Ministry of SOEs.



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)**
Fit and Proper Test (UKK)

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan lain dan lulus UKK. UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.

Prospective candidate who will be selected to be a candidate for Director, is someone who has been declared to have met the Formal Requirements and other Requirements and passed the UKK. UKK for prospective candidates is carried out by professional institution appointed by the Minister.

**Usulan Pengangkatan**
Proposed Appointment

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai UKK dapat diangkat menjadi Direksi Perusahaan.

For candidate who has obtained recommendation from the UKK assessment team, can be appointed as Director of the Company.

**Penetapan**
Determination

Penetapan dilakukan melalui mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya.

The determination is made through the GMS mechanism as stipulated in the Financial Services Authority Regulations and other related regulations.

Di samping persyaratan formal dan material, Bakal Calon Direksi diwajibkan memenuhi persyaratan lainnya, yaitu:

- Bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.
- Bukan merupakan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bukan merupakan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.
- Tidak sedang menjabat sebagai Direksi selama 2 (dua) periode pada BUMN yang sama.

In addition to formal and material requirements, Prospective Candidates for Directors are required to meet other requirements, as follows:

- • Not a member and/or administrator of a political party and/or a candidate for legislative member and/or legislative member.
- • Not a state official who is prohibited based on statutory regulations.
- • Not a candidate for head/deputy regional head and/or head/deputy regional head.
- • Not currently serving as Director for 2 (two) periods in the same SOEs.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Direksi memiliki organisasi yang menjalankan fungsi bisnis serta pengawasan internal. Fungsi bisnis dijalankan oleh Direktur Utama dan Direksi lainnya beserta organ perangkat di bawahnya. Sedangkan fungsi pengawasan internal terhadap berbagai aspek didukung oleh Satuan Pengawasan Internal, Sekretariat Perusahaan, Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja, Fungsi Manajemen Risiko, serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko.

SUPPORTING ORGANS OF BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has an organizational structure that carries out business and internal control function. The business function is carried out by the President Director and other Directors along with the organs under them. Whereas the internal control function on various aspects is supported by the Internal Audit Unit, the Corporate Secretary, Corporate Strategic Planning and Performance Management, Risk Management Function, and Investment and Risk Management Committee.



SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peran dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan dan hubungan investor dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola Perusahaan serta nilai-nilai Perusahaan.

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary has the role to facilitate communication among Company's organs, being responsible in policy formulation, planning as well as ensuring effectiveness and transparency of the corporate communication, institutional relation and investor relation by always concerning corporate governance principles and corporate values.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Perusahaan menyadari pentingnya peran Sekretaris Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar Organ Perusahaan, hubungan antar Perusahaan dengan *Stakeholders* serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung peranan tersebut, Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-57/PPA/0919 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-59/PPA/0916 tanggal 16 September 2016, Perusahaan telah menunjuk Edi Winanto sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan.

The Company realizes importance of Corporate Secretary's role in supporting smooth relation among the Company's organs, relationship between the Company and Stakeholders, as well as compliance with prevailing law and regulation. In order to support this role, the Company has determined Corporate Secretary as an Executive who is responsible directly to the President Director.

Function and role of Corporate Secretary is explained in Board of Directors Decree No. SK-57/PPA/0809 concerning Main Duty and Function of Work Unit in PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Party in charge of Corporate Secretary Appointment and Dismissal

The Corporate Secretary is directly responsible to the President Director and is appointed and dismissed based on the Decree of President Director based on the Company's internal mechanism with the Board of Commissioners' approval.

Corporate Secretary Official

Based on Board of Directors Decree No. SK-59/PPA/0916 dated September 16, 2016, the Company has appointed Edi Winanto as the Head of Corporate Secretariat Division.



EDI WINANTO

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Head of Corporate Secretariat Division

Menjabat sejak 16 September 2016
Served since September 16, 2016

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 56 tahun
Kelahiran Batang, 28 Desember 1963

Domisili

Jakarta Timur, Provinsi Jakarta, Indonesia

Bergabung di Perusahaan

15 Maret 2004

Pendidikan

Sarjana (S1) Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (1989) dan Magister (S2) Hukum dari Universitas Gadjah Mada (2005).

Pengalaman Kerja

Kepala Grup Hukum di BPPN (1998-2004); Kepala Divisi Hukum PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2016); Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2016-sekarang)

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

Perhimpunan Advokat Indonesia sejak 2008

Personal Data

Indonesian citizen
56 years old
Born in Batang, December 28, 1963

Domicile

East Jakarta, DKI Jakarta Province, Indonesia

Joined the Company

March 15, 2004

Education

Bachelor of Law from the Sultan Agung Islamic University (1989) and Master of Law from Gadjah Mada University (2005).

Work Experience

Head of Legal Group at IBRA (1998-2004); Head of Legal Division of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2016); Head of Corporate Secretariat Division of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2016-present)

Valid Professional Education and/or Certification

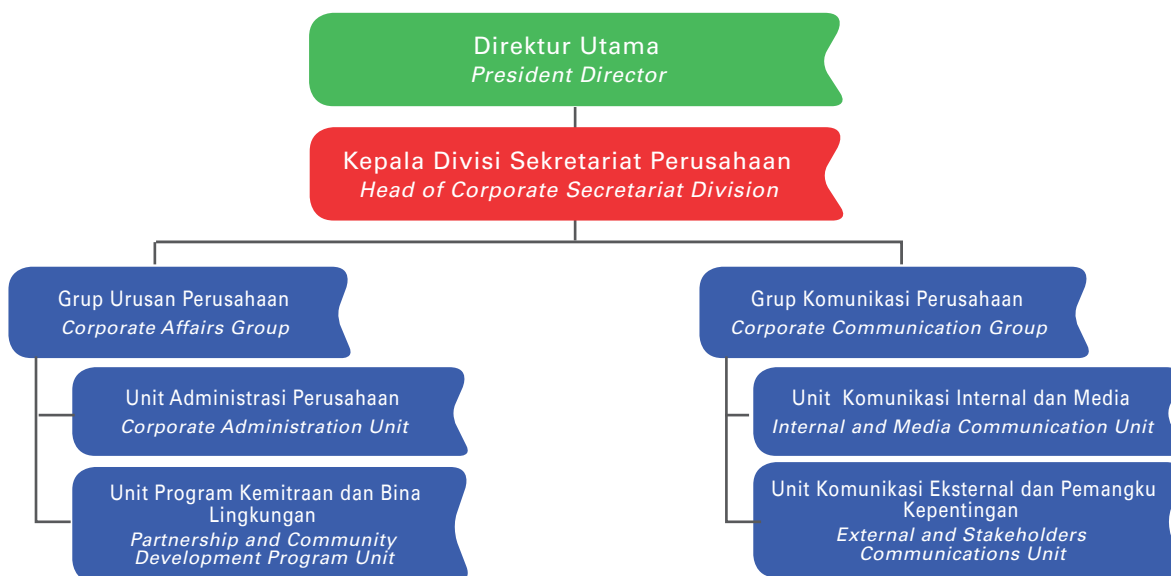
Indonesian Advocates Association since 2008

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Keorganisasian Divisi Sekretariat Perusahaan**

Agar dapat menggambarkan cakupan fungsi Sekretaris Perusahaan, berikut disampaikan struktur organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan per 31 Desember 2019.

Organizational Structure of Corporate Secretariat Division

In order to describe the scope of functions of Corporate Secretary, the following is the organizational structure of Corporate Secretariat Division as of December 31, 2019.

Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan
Organizational Structure of Corporate Secretariat Division

Secara struktural, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membawahi Grup. Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. SK-53/PPA/0919 tanggal 11 September 2019 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Structurally, the Head of Corporate Secretariat Division is at 1 (one) level below Director in charge of the Group. The organizational structure of Corporate Secretary is determined in accordance with Board of Directors Decree No. SK-53/PPA/0919 dated September 11, 2019 concerning the Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Hingga akhir tahun 2019, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Sekretariat Perusahaan sebanyak 12 orang.

As of the end of 2019, there were 12 employees in the Corporate Secretariat Division.

Jabatan Position	Jumlah (orang) Amount (person)
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Head of Corporate Secretariat Division	1
Kepala Grup Urusan Perusahaan Head of Corporate Affairs Group	1
Kepala Grup Komunikasi Perusahaan Head of Corporate Communication Group	1
Kepala Unit Administrasi Perusahaan Head of Corporate Administration Unit	1
Kepala Unit Komunikasi Perusahaan Head of Corporate Communication Unit	1
Staf Staff	8
JUMLAH TOTAL	13

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu bila diminta.
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*).
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar khusus, dan risalah rapat Direksi serta risalah rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
5. Mengkoordinasikan kegiatan PKBL.

Secara khusus, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas untuk mewujudkan keterbukaan informasi oleh Direksi, serta komunikasi dan hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan.

Duty and Responsibility

Duty and responsibility of Corporate Secretary are as follows:

1. Ensure that the Company complies with the regulations on disclosure provisions in line with the implementation of GCG principles.
2. Provide information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or as requested.
3. Serve as a liaison officer.
4. Administer as well as keep corporate documents, including but not limited to Shareholder Register, Special list, and the Minutes of Meetings of Board of Directors, Board of Commissioners, and GMS.
5. Coordinate partnership program and community development activities.

Specifically, the Corporate Secretary has the duty to realize information disclosure by the Board of Directors, as well as the Company's communication and relations with stakeholders.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTUREPeran dan Fungsi Sekretaris Perusahaan
Role and Function of Corporate SecretaryPERAN
ROLEKeterbukaan Informasi Perusahaan
*Disclosure of Corporate Information*Komunikasi dan Hubungan Perusahaan
dengan Pemangku Kepentingan
*Corporate Communication and Relations with
Stakeholders*FUNGSI
FUNCTION

Dalam hal keterbukaan informasi, Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Triwulanan/Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

In terms of information disclosure, the Board of Directors is required to disclose important information in Quarterly/Annual Report and Financial Statements of the Company to the Shareholders, and related Government Institution according to prevailing law on time, accurately, clearly and objectively.

Selain pengungkapan informasi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, Direksi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya, antara lain mengenai:

Besides information disclosure as required under the prevailing Law in Annual Report and Financial Statements, the Board of Directors shall take initiative to disclose other important issues that are useful in decision-making process of Shareholders and other Stakeholders, among others:

1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan;
2. Penilaian terhadap Perusahaan oleh eksternal auditor, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
3. Riwayat hidup anggota Dewan komisaris, Direksi dan pimpinan senior Perusahaan, serta gaji dan tunjangan mereka;
4. Sistem pemberian honorarium untuk eksternal auditor Perusahaan;
5. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;

1. Goals, objectives and strategy of the Company's business;
2. Assessment of the Company by external auditors, credit rating agencies and other agencies;
3. Curriculum vitae of members of Board of Commissioners, Board of Directors and key executives of the Company, as well as their salaries and allowances;
4. Honorarium provision system for the Company's external auditors.
5. Payroll system and the provision of allowances to members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
6. Material risk factors that can be anticipated, including the management's assessment on the business climate and risk factors;

7. Informasi material mengenai karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan;
8. Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan;
9. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung; dan
10. Pelaksanaan pedoman GCG.

Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan materialitas masalah yang dihadapi. Seluruh Organ Perusahaan memastikan bahwa semua informasi dan/atau suatu produk Perusahaan dirahasiakan sampai pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan kepada masyarakat.

Untuk komunikasi dan hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Tata kelola Perusahaan yang baik milik Perusahaan, antara Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan dan saling menghormati berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan milik Perusahaan meliputi:

1. Karyawan
2. Instansi Pemerintah terkait
3. BUMN lain
4. Kreditur
5. Rekanan
6. Masyarakat
7. Pemangku kepentingan lain yang mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan

Program Pengembangan Kompetensi

Perusahaan mengikutsertakan personel Sekretaris Perusahaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi, untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Sekretariat Perusahaan sepanjang tahun 2019 sampai dengan jabatan Kepala Grup adalah sebagai berikut:

7. Material information regarding the Company's employees and Stakeholders;
8. Material claims filed by and/or against the Company and the case in judicial or arbitration institutions involving the Company;
9. Conflict of interests that is ongoing or may occur; and
10. Code of GCG.

The Board of Directors and Board of Commissioners actively disclose the implementation of GCG and materiality of the problems encountered. The Company's Organ ensures that all information and/or a product of the Company are confidential until they are announced to the public.

As for Corporate Communication and Relations with Stakeholders, as mandated in the Code of Corporate Governance of the Company, between the Company and the Stakeholders should build a relationship that is in accordance with the principles of fairness and equality and mutual respect based on the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.

The Stakeholders as referred to in the Code of Corporate Governance of the Company include:

1. Employees
2. Related Government Institutions
3. Other SOEs
4. Creditors
5. Partners
6. Community
7. Other stakeholders that have legal relationship with the Company

Competency Development Program

The Company enrolls the Corporate Secretary personnel in competency development activities, to support the implementation of Corporate Secretary's duties. Concerning the list of training and competency development activities attended by the Head of Corporate Secretariat Division in 2019, can be seen in the chapter on Company Profile of this annual report. In addition, the competency development program attended by employees of Corporate Secretariat throughout 2019 until the position of Head of Group was as follows:

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organized by
Edi Winanto	<i>Inhouse Training</i>	<i>Design Thinking Batch 1</i>	Jakarta / 16 - 17 Juli 2019 Jakarta / July 16-17, 2019	Telkom University
	<i>Public Training</i>	<i>Discussion Forum Shaping the Future Role & Corporate Secretary</i>	Jakarta / 26 - 27 September 2019 Jakarta / September 26-27, 2019	Pertamina Training & Consulting
	<i>Public Training</i>	<i>Economic & Capital Market Outlook 2020</i>	Jakarta / 29 Oktober 2019 Jakarta / October 29, 2019	Berita Satu Media Holdings
	<i>Public Training</i>	<i>The 6th International Financial Cooperation Forum</i>	Korea / 10 - 11 Desember 2019 Korea / December 10-11, 2019	Council on International Financial Cooperation (CIFIC)
	<i>Inhouse Training</i>	<i>Business English</i>	Jakarta / 27 November 2019 - <i>On Going</i> Jakarta / November 27, 2019 - <i>On Going</i>	English Today
Chandra Satya	<i>Inhouse Training</i>	<i>Design Thinking Batch 2</i>	Jakarta / 23 - 24 Juli 2019 Jakarta / July 23-24, 2019	Telkom University
	<i>Inhouse Training</i>	<i>Business English</i>	Jakarta / 27 November 2019 - <i>On Going</i> Jakarta / November 27, 2019 - <i>On Going</i>	English Today
Agus Widjaja	<i>Public Training</i>	<i>Executive Program in Strategic Communication</i>	Jakarta/ 01 - 02 Juli 2019 Jakarta / July 01-02, 2019	EGA Briefing
	<i>Inhouse Training</i>	<i>Design Thinking Batch 1</i>	Jakarta/ 16 - 17 Juli 2019 Jakarta / July 16-17, 2019	Telkom University
	<i>Public Training</i>	<i>Discussion Forum Shaping the Future Role & Corporate Secretary</i>	Jakarta/ 26 - 27 September 2019 Jakarta / September 26-27, 2019	Pertamina Training & Consulting
	<i>Public Training</i>	<i>Economic & Capital Market Outlook 2020</i>	Jakarta/ 29 Oktober 2019 Jakarta / October 29, 2019	Berita Satu Media Holdings
	<i>Inhouse Training</i>	<i>Business English</i>	Jakarta/ 27 November 2019 - <i>On Going</i> Jakarta / November 27, 2019 - <i>On Going</i>	English Today
	<i>Public Training</i>	Konvensi Nasional Humas 2019 Konvensi Nasional Humas 2019	Jogjakarta / 16 - 17 Desember 2019 Jogjakarta / December 16-17, 2019	Perhumas

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organized by
Johana Alva	Public Training	Kongres & Munas FH BUMN SOEs Congress & National Conference	Bandung / 13 - 14 Maret 2019 Bandung / March 13-14, 2019	Perhumas
	Public Training	Economic & Capital Market Outlook 2020	Jakarta / 29 Oktober 2019 Jakarta / October 29, 2019	Berita Satu Media Holdings
	Public Training	Konvensi Nasional Humas 2019 National Public Relations Convention 2019	Jogjakarta / 16 - 17 Desember 2019 Jogjakarta / December 16-17, 2019	Perhumas
Prayogo Witjaksono	Inhouse Training	Sosialisasi HRIS Versi 6 Socialization of HRIS Version 6	Jakarta / 19 November 2019 Jakarta / 19 November 2019	Data On
	Inhouse Training	Sosialisasi Mobile Office Socialization of Mobile Office	Jakarta / 13 Desember 2019 Jakarta / 13 Desember 2019	Internal PT PPA Internal PT PPA
Agung Yulianto	Inhouse Training	Inhouse Training "Amazing Slide Presentation" Batch 1	Jakarta / 21 - 22 Januari 2019 Jakarta / January 21-22, 2019	Kreasi Presentasi
	Public Training	Workshop PKBL Tahun 2019 PKBL Workshop in 2019	Bandung / 14 - 15 Maret 2019 Bandung / March 14-15, 2019	Kementerian BUMN
	Public Training	Designing Effective Community Development Program	Jakarta / 27 - 28 Juni 2019 Jakarta / June 27-28, 2019	PPA FE UI
	Public Training	Paket Lanjutan Pengantar Akuntansi Keuangan & Komputer Akuntansi Akuntansi Keuangan Menengah Advanced Introduction to Financial Accounting & Computer Intermediate Financial Accounting	Depok / 21 September - 21 Desember 2019 Depok / September 21 - December 21, 2019	CECP Trisakti
Amanda Felicia	Inhouse Training	Design Sprint + Innovation Class	Jakarta / 23 - 25 April 2019 Jakarta / April 23-25, 2019	Telkom University
	Public Training	Memahami A to Z GCG Understanding A to Z GCG	Jakarta / 04 - 05 Juli 2019 Jakarta / July 04-05, 2019	Dinamika Pasifika Solusindo
	Public Training	Workshop BUMN di tengah pusaran milenial dan disrupsi digital SOEs Workshop in the midst of millennial whirls and digital disruption	Jakarta / 26 September 2019 Jakarta / September 26, 2019	Iconomics
	Inhouse Training	Public Speaking and Communication Skills Batch 1	Jakarta / 02 - 03 Oktober 2019 Jakarta / October 02-03, 2019	Tantowi Yahya Public Speaking School

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organized by
Lani Pujiastuti	<i>Public Training</i>	<i>Economic & Capital Market Outlook 2020</i>	Jakarta / 29 Oktober 2019 Jakarta / October 29, 2019	Berita Satu Media Holdings
	<i>Inhouse Training</i>	Sosialisasi HRIS Versi 6 Socialization of HRIS Version 6	Jakarta / 19 November 2019 Jakarta / November 19, 2019	Data On
	<i>Public Training</i>	<i>Corporate Innovation</i>	Jakarta / 04 - 05 Desember 2019 Jakarta / December 04-05, 2019	Sprinthink
	<i>Public Training</i>	<i>Millennial Fest 2.0</i>	Jakarta / 14 Desember 2019 Jakarta / December 14, 2019	Milenialfest.id
	<i>Public Training</i>	Konvensi Nasional Humas 2019 National Public Relations Convention 2019	Jogjakarta / 16 - 17 Desember 2019 Jogjakarta / December 16-17, 2019	Perhumas
	<i>Public Training</i>	Audit Komunikasi Communication Audit	Jakarta / 19 Desember 2019 Jakarta / December 19, 2019	Kementerian BUMN
Indira Shinta Dewi	<i>Public Training</i>	<i>Economic & Capital Market Outlook 2020</i>	Jakarta / 29 Oktober 2019 Jakarta / October 29, 2019	Berita Satu Media Holdings
Nova Arhansyah	<i>Public Training</i>	Penerapan OSS pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Implementation of OSS for Electronically Integrated Business Licensing Services	Jakarta / 21 - 22 Februari 2019 Jakarta / February 21-22, 2019	Lembaga Pusat Studi Informasi
	<i>Public Training</i>	Basic Corporate Secretary bagi Staf Corsec dan Sekretaris Direksi/ Dewan Komisaris Basic Corporate Secretary for Corsec Staff and Secretary of Board of Directors/Board of Commissioners	Jakarta / 05 - 06 September 2019 Jakarta / September 05-06, 2019	Warta Ekonomi Academy
	<i>Inhouse Training</i>	Sosialisasi HRIS Versi 6 Socialization of HRIS Version 6	Jakarta / 19 November 2019 Jakarta / November 19, 2019	Data On
	<i>Inhouse Training</i>	Sosialisasi Mobile Office Socialization of Mobile Office	Jakarta / 13 Desember 2019 Jakarta / December 13, 2019	Internal PT PPA

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organized by
Nathania Siwalette	<i>Inhouse Training</i>	<i>Inhouse Training "Amazing Slide Presentation" Batch 2</i>	Jakarta / 23 - 24 Januari 2019 Jakarta / January 23-24, 2019	Kreasi Presentasi
	<i>Public Training</i>	Workshop PKBL Tahun 2019 PKBL Workshop in 2019	Bandung / 14 - 15 Maret 2019 Bandung / March 14-15, 2019	Kementerian BUMN
Gina Agustina	<i>Inhouse Training</i>	<i>Inhouse Training "Amazing Slide Presentation" Batch 2</i>	Jakarta / 23 - 24 Januari 2019 Jakarta / January 23-24, 2019	Kreasi Presentasi
	<i>Public Training</i>	<i>The Perfect Secretary & Personal Asisstant</i>	Jakarta / 24 - 25 Januari 2019 Jakarta / January 24-25, 2019	Indonesia Secretary Training (IST) Center
	<i>Inhouse Training</i>	<i>Inhouse Training "Amazing Slide Infographic" Batch 1</i>	Jakarta / 29 - 30 Januari 2019 Jakarta / January 29-30, 2019	Kreasi Presentasi
	<i>Inhouse Training</i>	Orientasi dan Sosialisasi Karyawan 2019 Employee Orientation and Socialization 2019	Sukabumi / 12 - 13 Juli 2019 Sukabumi / July 12-13, 2019	Duta Bangsa
	<i>Public Training</i>	Brevet AB + e-SPT	Jakarta / 13 Jul - 14 Desember 2019 Jakarta / July 13 - December 14, 2019	PPA FE UI
	<i>Inhouse Training</i>	Sosialisasi HRIS Versi 6 Socialization of HRIS Version 6	Jakarta / 19 November 2019 Jakarta / November 19, 2019	Data On

Program Kerja dan Realisasi Kegiatan Sekretariat Perusahaan Tahun 2019

Di awal tahun 2019, Divisi Sekretariat Perusahaan menyusun dan merumuskan Rencana Kerja. Berikut disampaikan program kerja yang tertuang dalam RKA Divisi Sekretariat Perusahaan serta kegiatan yang dilakukan di sepanjang 2019.

Corporate Secretary Work Program and Realization of Activities in 2019

In early 2019, the Corporate Secretariat Division compiled and formulated a Work Plan. Following are the work programs outlined in the RKA of Corporate Secretariat Division and the activities carried out throughout 2019.

No	Kegiatan Activities	RKAP 2019 2019 Budget and Planning	Realisasi 2019 2019 Realization
1	Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan Organizing and coordinating Board of Directors Meeting that is held at least once every month	12	69

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

No	Kegiatan Activities	RKAP 2019 2019 Budget and Planning	Realisasi 2019 2019 Realization
2	Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Dewan Komisaris & Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan Organizing and coordinating Board of Commissioners & Board of Directors meetings that is held at least once every month	12	12
3	Membuat Risalah Rapat Direksi Preparing Board of Directors Minutes of Meeting	12	69 Risalah Rapat Direksi dengan status final 69 Minutes of Board of Directors' Meeting with final status
4	Mengelola Dokumen Perusahaan: Penatausahaan dokumen setiap kali dokumen diterima Managing Corporate Documents: Administration of document for every received document	Seluruh dokumen Perusahaan yang diterbitkan oleh seluruh satuan kerja All Corporate documents issued by all work units	Penatausahaan seluruh dokumen Perusahaan Administration of all Corporate documents
5	Menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi Performing GMS implementation and documentation and Board of Directors Meeting Function	2 keputusan RUPS dan 12 Risalah Rapat Direksi 2 GMS Resolutions and 12 Minutes of Board of Directors Meetings	2 keputusan RUPS dan 69 Risalah Rapat Direksi 2 GMS resolutions and 69 Minutes of Board of Directors Meeting
6	Membuat Laporan Manajemen: a. Triwulan b. Tahunan Preparing Management Report: a. Quarterly Report b. Annual Report	a. 3 Laporan Manajemen Triwulan b. 1 Laporan Manajemen Tahunan a. 3 Quarterly Management Reports b. 1 Annual Management Report	a. Laporan Manajemen Triwulan I, II, III b. 1 Laporan Manajemen Tahunan a. 1 st , 2 nd , 3 rd Quarterly Management Reports b. 1 Annual Management Report
7	Membuat Laporan Tahunan Preparation of Annual Report	Penyusunan Laporan Tahunan Annual Report Preparation	Laporan Tahunan tahun 2018 2018 Annual Report
8	Melaksanakan Program Pengenalan Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baru setiap ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru Conducting Company's Orientation Program for new Board of Commissioners and Board of Directors Members for every new Board of Directors and Board of Commissioners member	Setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru Every new member of Board of Directors and Board of Commissioners	Pada 23 Juli 2019 telah dilaksanakan program pengenalan terhadap 2 anggota Direksi baru On July 23, 2019 an orientation program was held for 2 new Directors
9	Menyalurkan dana Program Kemitraan Partnership Program Proceeds Disbursement	Penyaluran diatas 80% dari dana tersedia Distribution exceeded 80% of available funds	Realisasi penyaluran dana PK sebesar 95,65% Realization of distribution of PK funds amounting to 95.65%
10	<i>Monitoring</i> kolektibilitas Pinjaman Program kemitraan Monitoring Collectability of Partnership Program Loans	Kolektibilitas Pinjaman diatas 80% dari dana yang disalurkan Loan collectibility exceeded 80% of disbursed funds	Realisasi kolektibilitas penyaluran pinjaman sebesar 97,15% Realization of loan collectability is 97.15%
11	Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan Community Development Program Funds Disbursement	Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan diatas 80% dari dana tersedia Disbursement of Community Development Program funds above 80% of available funds	Realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan sebesar 99,90% Realization of Community Development fund distribution is 99.90%

No	Kegiatan Activities	RKAP 2019 2019 Budget and Planning	Realisasi 2019 2019 Realization
12	<i>Media Monitoring</i>	Rutin dilakukan harian Daily	Rutin dilakukan harian Daily
13	<i>News Analysis</i>	Rutin dilakukan bulanan Monthly	Rutin dilakukan bulanan Monthly
14	Publikasi Berita PPA PPA News Publication	Rutin dilakukan menyesuaikan kegiatan Perusahaan Done regularly adjusted to Company's activities	Rutin dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan Perusahaan Done regularly adjusted to Company's activities
15	Transparansi Informasi: <i>website</i> Perusahaan & Portal BUMN Information Transparency: Corporate website & SOEs Portal	<i>Update dan Maintenance Data</i> Data Update and Maintenance	<i>Update dan Maintenance Data</i> Data Update and Maintenance
16	Transparansi Informasi: pengelolaan <i>email corpsec@ptppa.com</i> Information Transparency: management of email corpsec@ptppa.com	Rutin dilakukan harian Daily	Rutin dilakukan harian Daily
17	Dukungan pada kegiatan acara peringatan hari besar nasional Support for national holiday event	Disesuaikan dengan program acara Pemerintah Adjusted with Government's programs	Pelaksanaan: Upacara HUT RI ke-74 Upacara Kesaktian Pancasila Upacara Hari Pahlawan Implementation: The 74th Indonesian Independence Day Ceremony Pancasila Worship Ceremony Heroes' Day Ceremony
18	<i>Company Visit</i>	Disesuaikan dengan kegiatan Perusahaan Adjusted with Company's activities	Pada tahun 2018 Perusahaan bersama tim dari Kementerian BUMN mengadakan kunjungan kerja ke beberapa kota di Indonesia In 2018, the Company and a team from the Ministry of SOEs held work visits to several cities in Indonesia
19	Infrastruktur <i>Branding</i> Branding Infrastructure	Pelaksanaan distribusi kalender 2018 Perusahaan kepada <i>stakeholder</i> eksternal dan media. Distribution of the 2018 Company's calendar to external stakeholders and media	Selesai Done
20	Dukungan kegiatan Perusahaan Support for Corporate Activities	Disesuaikan dengan kebutuhan Adjusted with Requirements	Rutin dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan Perusahaan Regularly carried out in accordance with Company's activities
21	Protokol Direksi Board of Directors Protocol	Pendampingan Direksi pada acara formal/informal Perusahaan Assistance for Board of Directors in formal/informal corporate events	Dilaksanakan sesuai kebutuhan termasuk pendampingan dalam <i>company visit</i> Done as required including assistance in company visits

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan**

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan strategi maupun rencana kerja terkait penyampaian informasi kepada publik. Di samping itu, dalam pelaksanaan internalisasi GCG, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan secara berkesinambungan dalam upaya membudayakan penerapan GCG di seluruh lingkungan Perusahaan.

AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh Kepala Divisi atau General Manager yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SPI merupakan mitra strategis (*strategic partner*) yang profesional dan terpercaya bagi Insan Perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian (*control*), melalui auditor yang kompeten dan independen untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Satuan Pengawasan Intern

Merujuk pada Ketentuan pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kepala Divisi SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pejabat Satuan Pengawasan Intern

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-38/PPA/0719 tanggal 1 Juli 2019, Perusahaan telah menunjuk Sdri. Qadrisna sebagai Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris untuk pengangkatan Sdri. Qadrisna sebagai Kepala SPI melalui surat No. S-44/PPA/KOM/0619 tanggal 19 Juni 2019.

Corporate Secretary Performance Assessment

Corporate Secretary has implemented strategy and work plan related to public information disclosure. In the GCG internalization implementation, the Corporate Secretary has conducted various activities continuously to internalize GCG implementation in the entire Company's circumstances.

INTERNAL AUDIT/INTERNAL AUDIT UNIT

Internal Audit Unit (SPI) is an independent work unit led by the Head of Division or General Manager who reports directly to the President Director. Internal Audit Unit is a professional and trusted strategic partner for Company's People in overseeing governance, risk management and control, through competent and independent auditors to achieve the Company's goals.

Party in Charge of Internal Audit Unit Official Appointment and Dismissal

Referring to the Provision of article 28 and article 29 of the Regulation of Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 jo. PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance, Head of Internal Audit Division is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism upon approval from the Board of Commissioners.

Internal Audit Unit Official

Pursuant to the Board of Directors Decree No. SK-38/PPA/0719 dated July 1, 2019, the Company has appointed Qadrisna as Head of Internal Audit Division, after obtaining approval from the Board of Commissioners for the appointment of Qadrisna as Head of SPI through letter No. S-44/PPA/KOM/0619 dated June 19, 2019.



QADRIANA

**Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Division**

Menjabat sejak 1 Juli 2019
Served since July 1, 2019

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 56 tahun
Kelahiran Bukittinggi, 15 November 1963

Domisili

Jakarta Timur, Provinsi Jakarta, Indonesia

Bergabung di Perusahaan

17 Mei 2004

Pendidikan

University/D4 – State College of Accountancy (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara / STAN), Ministry of Finance, Jakarta 1991

Pengalaman Kerja

- Head of Finance and Accounting Division, PT PPA, April 2015 – Juni 2019
- Head of Internal Audit, PT PPA, Juni 2012 – April 2015
- Group Head of Internal Audit Division, PT PPA, Oktober 2009 – Mei 2012
- Unit Head of Internal Audit Division, PT PPA, Mei 2004 – September 2009
- Group Head Layanan Administrasi Aset Manajemen Investasi BPPN, 2003 – Februari 2004

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

- Registered Professional Accountant No. 11.D10096
- Chartered Accountant (CA)
- Auditor Ahli

Personal Data

Indonesian citizen
56 years old
Born in Bukittinggi, November 15, 1963

Domicile

East Jakarta, Jakarta Province, Indonesia

Joined the Company

May 17, 2004

Education

University/Diploma 4 – State College of Accountancy (STAN), Ministry of Finance, Jakarta 1991

Work Experience

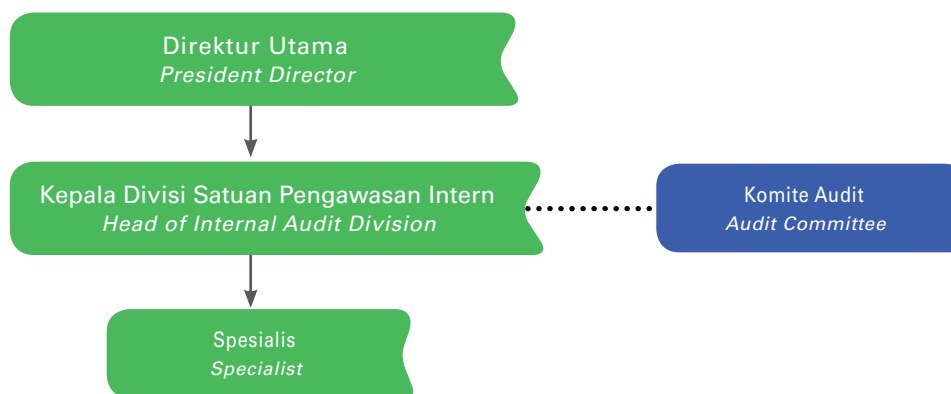
- Head of Finance and Accounting Division, PT PPA (Persero), April 2015 – June 2019
- Head of Internal Audit, PT PPA (Persero), June 2012 – April 2015
- Group Head of Internal Audit Division, PT PPA (Persero), October 2009 – May 2012
- Unit Head of Internal Audit Division, PT PPA (Persero), May 2004 – September 2009
- Group Head of Investment Management Asset Administration Services IBRA, 2003 – February 2004

Valid Professional Education and/or Certification

- Registered Professional Accountant No. 11.D10096
- Chartered Accountant (CA)
- Expert Auditor

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Keorganisasian Divisi Satuan Pengawasan Intern**

Struktur Organisasi SPI ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Nomor SK-53/PPA/0919 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), agar dapat menggambarkan cakupan fungsi Satuan Pengawasan Intern dan koordinasi antar organ, berikut disampaikan struktur organisasi Divisi satuan Pengawasan Intern per 31 Desember 2019.



Sesuai jenjangnya, setiap Auditor mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan penugasan audit internal mengacu pada panduan profesi dan rencana kegiatan yang telah disusun.

Hingga akhir tahun 2019, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Satuan Pengawasan Intern sebanyak 5 orang.

Internal Audit Division Organization

SPI Organizational Structure is stipulated in the Company's Board of Directors Decree Number SK-53/PPA/0919 regarding the Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). In order to describe the scope of functions of Internal Audit Unit and coordination between organs, the following is organizational structure of Internal Audit Division as of December 31, 2019.

Based on the level, every Auditor has duty, authority and responsibility to perform internal audit assignment referring to designated professional guideline and activity plan.

As of the end of 2019, there were 5 employees in the Internal Audit Unit.

Jabatan Position	Jumlah (orang) Amount (person)
Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Division	1
Kepala Grup / Spesialis Madya Group Head/Associate Specialist	-
Kepala Unit / Spesialis Unit Head/Specialist	1
Junior Spesialis Junior Specialist	3
Staf Staff	-
JUMLAH TOTAL	5

Piagam Audit Internal

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi Perusahaan, serta memberikan landasan dan pedoman bagi SPI yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern, maka ditetapkan Piagam Audit Internal. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal Perusahaan sebagai wujud komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam upaya menciptakan pengawasan yang baik dalam perusahaan agar tercipta efektivitas tata kelola, pengendalian risiko dan pengendalian intern terhadap Perusahaan. Piagam Audit Internal menjelaskan mengenai Visi, Misi, Ruang Lingkup, Struktur dan Kedudukan, Tanggung jawab, Wewenang dan Kode Etik, serta Hubungan Kerja dari Audit Internal.

Piagam Audit Internal merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga perlu ditinjau secara berkala. Pada akhir tahun 2019 dilakukan perubahan atas Piagam Audit Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Nomor SK-1/KEP.KOM/PPA/I/2020 dan SK-9/PPA/0120 tentang Piagam Audit Internal, sehingga Piagam Audit Internal yang ditetapkan tanggal 22 Juni 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Persyaratan Menjadi Auditor Internal

Perusahaan telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai untuk menjadi auditor Perusahaan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan audit, Piagam Internal Audit mengharuskan auditor memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu:

1. Memiliki integritas serta perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas yang dijalankan.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal Perusahaan.
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal.

Internal Audit Charter

In order to safeguard and secure business activities in accordance with the Company's vision and mission, as well as to provide a foundation and guidelines for the Internal Audit Unit which is part of the Internal Control System, an Internal Audit Charter is formulated. The Internal Audit Charter is a Corporate formal document as a form of commitment from Board of Directors and Board of Commissioners in an effort to create good oversight in the Company, with the aims of creating effective governance, risk control and internal control over the Company. The Internal Audit Charter describes the Vision, Mission, Scope, Structure and Position, Responsibilities, Authority and Code of Conduct, and Work Relationship of the Internal Audit.

Internal Audit Charter is a dynamic document, hence needs to be reviewed regularly. At the end of 2019, an amendment was made to the Internal Audit Charter determined by the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company No. SK-1/KEP.KOM/PPA/I/2020 and SK-9/PPA/0120 concerning the Internal Audit Charter, so that the Internal Audit Charter established on June 22, 2017 was declared to be no longer valid.

Requirements as Internal Auditor

The Company has determined mandatory requirements for an employee to be appointed as the Company's auditor. To support success of the audit implementation, Internal Audit Charter requires the auditor to fulfill specific qualifications, as follows:

1. Having integrity as well as objective and professional attitudes in implementing the duties.
2. Having technical knowledge and/or experience in audit and other disciplines that are relevant with their scope of duties, including related laws and regulations
3. Having knowledge regarding laws and regulations that are relevant to the task at hand.
4. Having good interaction and effective communication skills both verbal and written.
5. Required to comply with professional standards issued by the internal audit association.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

6. Mematuhi kode etik Auditor Internal. 7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau penetapan, atau putusan pengadilan, atau kewajiban profesi. 8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal. 9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesi secara terus-menerus.	6. Required to comply with the Internal Auditor's code of conduct. 7. Protect the confidentiality of information and/or data related to implementation of internal audit's duty and responsibility except regulated under the law, Court Sentence or professional obligation. 8. Understand risk management, audit and good corporate governance principles. 9. Willing to develop knowledge, expertise and professional capability continuously.

Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi menunjukkan kualitas auditor yang memadai dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya. Daftar karyawan SPI yang telah mengikuti program sertifikasi adalah sebagai berikut.

1. Auditor Ahli, CA
2. Auditor Ahli, CMA, CRMP, Ahli PBJ Pemerintah
3. Auditor Ahli, CPMA, ACPA, CRMO
4. Auditor Ahli
5. Auditor Ahli, CRMP, CA

Professional Certification

Professional certificate indicates sufficient quality of auditors in supporting their duty and responsibility. The list of SPI employees who have participated in the certification program is as follows.

1. Expert Auditor, CA
2. Expert Auditor, CMA, CRMP, Government PBJ Expert
3. Expert Auditor, CPMA, ACPA, CRMO
4. Expert Auditor
5. Expert Auditor, CRMP, CA

No	Nama Sertifikasi Profesi Name of Professional Certification	Lembaga Penerbit Issued by
1.	Auditor Ahli Expert Auditor	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Financial and Development Supervisory
2.	Chartered Accountant (CA)	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Institute of Accountants (IAI)
3.	Certified Management Accountant (CMA)	The Institute of Certified Management Accountant (ICMA)
4.	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)
5.	Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Ahli PBJ Pemerintah) Government Goods/Services Procurement Expert Certification (Government PBJ Expert)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Government Goods/Services Procurement Policy Agency (LKPP)
6.	Certified Professional Management Accountant (CPMA)	Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMII) Indonesian Institute of Management Accountants (IAMII)
7.	Associate Certified Public Accountant (ACPA)	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI)
8.	Certified Risk Management Officer (CRMO)	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Divisi Satuan Pengawasan Intern

Divisi SPI berperan melaksanakan fungsi *assurance* dan konsultansi (*consulting*) yang independen dan objektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Divisi SPI sesuai Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja rencana audit internal berbasis risiko sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
2. Menyampaikan rencana audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dilakukan *review* dan persetujuan.
3. Menguji, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian perusahaan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
4. Melakukan audit/*review* serta penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, manajemen risiko, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
5. Melakukan audit/*review* dengan tujuan tertentu pada satuan kerja dan/atau kegiatan, sesuai dengan rencana audit internal tahunan.
6. Memberikan informasi yang objektif serta memberikan rekomendasi atau saran perbaikan yang diperlukan tentang kegiatan yang diaudit kepada *stakeholder* terkait.
7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada pihak terkait.
8. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan rencana aksi atas rekomendasi yang telah diberikan.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
10. Melakukan kegiatan konsultasi (*consulting*) atas dasar permintaan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.
11. Melakukan tugas lain yang dipandang perlu oleh Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama Perusahaan dan Dewan Komisaris melalui Ketua Komite Audit.

Duty, Responsibility and Authority of Internal Audit Division

Internal Audit Division is in charge to perform independent and objective assurance and consulting functions to the management to encourage added-value creation and improve the Company's business operations. According to the Internal Audit Charter, duty and responsibility of Internal Audit Division are including:

1. Prepare and carry out a risk-based internal audit plan work program at least once a year.
2. Submitting the Internal Audit Plan to President Director and Board of Commissioners through Audit Committee for further review and approval.
3. Examining, evaluating, and reporting the implementation of governance, risk management, control of the Company in accordance with the Company's policy.
4. Performing audit/*review* as well as evaluating efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, risk management, human capital, marketing, information technology, and other activities.
5. Performing audit/*review* with a specific purpose in the work unit and/or activities, in accordance with the annual internal audit plan.
6. Providing objective information and recommendations for improvements as required on the activity being audited to related stakeholder.
7. Drafting audit reports and submitting them to the relevant parties.
8. Monitoring, analyzing and reporting the implementation of corrective follow-up actions on the recommendations given.
9. Create programs to evaluate the quality of internal audit activities conducted.
10. Conducting consulting activities based on the management's request in order to achieve company's goals without taking over management responsibilities.
11. Performing other duties as deemed necessary by the Company's President Director and/or Board of Commissioners through Audit Committee.
12. Submitting the quarterly activity reports on the implementation of tasks to the Company's President Director and Board of Commissioners through Audit Committee.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Baik dalam penugasan audit maupun konsultasi, Auditor Internal hanya bertanggung jawab pada rekomendasi dan/atau masukan serta opini dan/atau kesimpulan yang dihasilkan dari prosedur yang dilakukan secara memadai dari penugasan tersebut.

Either in audit and consulting assignments, the Internal Audit Division is only responsible for the recommendation and/or input as well as the opinions and/or conclusions resulted from the procedure performed adequately from the assignment.

Pengembangan Kompetensi Auditor Internal Tahun 2019**Internal Auditor Competency Development in 2019**

Perusahaan memiliki program pengembangan kompetensi baik secara internal maupun yang diadakan oleh lembaga eksternal. Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal dilakukan melalui pelatihan formal dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya.

The Company has competency development programs both internally and organized by external institutions. Competency development in external institutions is done through formal training in the form of courses or seminars/workshops.

Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Satuan Pengawasan Intern di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh auditor internal sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Concerning the list of training and competency development activities that were attended by the Head of Internal Audit Unit throughout 2019, can be seen in the Company Profile chapter of this annual report. In addition, the competency development programs attended by internal auditors throughout 2019 are as follows:

No.	Nama Training/Event Name of Training/Event	Penyelenggara Training Organizer	Tempat dan Waktu Venue and Time
1.	<i>Prepare Yourself for PSAK Update 71,72,73</i>	PT Nindya Karya bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) PT Nindya Karya in collaboration with the Indonesian Institute of Accountants (IAI)	Semarang, 21-22 Maret 2019 Semarang, March 21-22, 2019
2.	<i>Critical Thinking for Internal Auditor</i>	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia	Jakarta, 10-11 April 2019 Jakarta, April 10-11, 2019
3.	<i>Tools and Techniques II: Lead Auditor</i>	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia	Jakarta, 10-12 Juli 2019 Jakarta, July 10-12, 2019
4.	<i>IIA Indonesia National Conference 2019</i>	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia	Solo, 24-25 Juli 2019 Solo, July 24-25, 2019
5.	Musyawarah Nasional dan Konferensi Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern 2019	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) Communication Forum of Internal Audit Unit (FKSPI)	Semarang, 21-23 Agustus 2019 Semarang, August 21-August 23, 2019
6.	<i>Update atas Governance, Risk and Control – Sharing Session FKSPI ASGARAS JASKEU PLUS</i>	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) Communication Forum of Internal Audit Unit (FKSPI)	Jakarta, 4 September 2019 Jakarta, September 4, 2019
7.	Seminar Nasional dan Pelatihan Perpajakan BUMN 2019 SOEs Taxation National Seminar and Training 2019	Tax Forum BUMN	Surabaya, 11-13 November 2019 Surabaya, November 11-13, 2019
8.	<i>Recognition of Prior Learning (RPL) for Register Negara Akuntan (RNA)</i>	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI)	Jakarta, 2-5 Desember 2019 Jakarta, December 2-5, 2019

Realisasi Kegiatan Satuan Pengawasan Intern Tahun 2019

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan SPI yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") tahun 2019, SPI merencanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan *assurance* sebanyak 10 (sepuluh) penugasan.
2. Layanan *consulting* sesuai dengan permintaan unit-unit kerja dan/atau arahan Direktur Utama.
3. Pemantauan terhadap tindak lanjut unit-unit kerja atas rekomendasi dalam laporan audit/*review*/konsultasi SPI yang dilakukan secara periodik.
4. Manajemen internal audit yang meliputi administrasi penugasan, pemutakhiran rencana, serta pelaporan kegiatan.
5. Kegiatan lain yang meliputi: *counterpart* auditor eksternal (BPK RI, KAP, dan lain-lain) sesuai dengan penugasan auditor eksternal tersebut, rapat dengan Komite Audit dan Direktur Utama sesuai kebutuhan, serta *monitoring* tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal.

Dari 10 (sepuluh) penugasan *assurance* yang direncanakan, selama tahun 2019 SPI telah melakukan penugasan *assurance* sebanyak 10 (sepuluh) penugasan dari RKAP 2019, sebanyak 3 (tiga) penugasan non-RKAP 2019, dan sebanyak 3 (tiga) penugasan yang merupakan penyelesaian penugasan pada RKAP 2018. Dengan demikian, total penugasan *assurance* yang dilaksanakan SPI selama tahun 2019 adalah sebanyak 16 (enam belas) penugasan atau mencapai 160% dari RKAP 2019.

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN KINERJA

Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja dibentuk dengan tujuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perumusan strategis Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), mengevaluasi implementasi program-program strategis, melakukan analisa dan kajian perkembangan usaha untuk mencapai target perusahaan serta manajemen kinerja perusahaan dan entitas anak.

Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-23/PPA/0418 tanggal 4 April 2018 tentang Penerimaan dan Pengangkatan Sdri. Pramuwati sebagai Karyawan Tetap.

Realization of Internal Audit Unit Activities in 2019

In accordance with the SPI Annual Work Plan which is part of the 2019 Corporate Work Plan and Budget ("RKAP"), SPI plans the following activities:

1. Assurance services for 10 (ten) assignments.
2. Consulting services in accordance with requests of work units and/or directives of President Director.
3. Monitoring the follow-up of work units on recommendations in the SPI audit/*review*/consultation report that is conducted periodically.
4. Internal audit management which includes assignment administration, plan updates, and activity reporting.
5. Other activities which include: counterpart of external auditor (BPK RI, KAP, etc.) in accordance with the assignment of external auditor, meetings with Audit Committee and President Director as needed, and monitoring follow-up on the recommendations of external auditor.

Of the 10 (ten) assurance assignments planned, in 2019 the SPI has carried out 10 (ten) assurance assignments from 2019 Budget and Planning, 3 (three) non-Budget and Planning 2019 assignments, and 3 (three) assignments which constituted the assignment completion in the 2018 Budget and Planning. Thus, the total assurance assignments carried out by the Internal Audit Unit in 2019 were 16 (sixteen) assignments or reached 160% of the 2019 Budget and Planning.

CORPORATE STRATEGIC PLANNING AND PERFORMANCE MANAGEMENT DIVISION

Corporate Strategic Planning and Performance Management Division was formed with the aim of planning, coordinating and evaluating the strategic formulation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), evaluating the implementation of strategic programs, analyzing and reviewing business developments to achieve the Company's targets and managing the performance of the company and its subsidiaries.

The Head of Corporate Strategic Planning and Performance Management Division was appointed based on Board of Directors Decree No. SK-23/PPA/0418 dated April 4, 2018 concerning Acceptance and Appointment of Pramuwati as Permanent Employee.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Profil Pejabat Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja Profile of Corporate Strategic Planning and Performance Management Division Official



PRAMUWATI

**Kepala Divisi Perencanaan Strategis
Perusahaan dan Manajemen Kinerja**
**Head of Corporate Strategic Planning and
Performance Management Division**

Menjabat sejak 9 April 2018
Served since April 9, 2018

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 45 tahun
Kelahiran Semarang, 26 April 1974

Domisili

Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di Perusahaan

9 April 2018

Pendidikan

Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Diponegoro (1997)

Pengalaman Kerja

- Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja, 2018-sekarang, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
- Vice President Large Commercial, 2017-2018, PT Bank Mandiri, Tbk (Persero)
- Regional Risk Head Kanwil IV, 2016-2017, PT Bank Mandiri, Tbk (Persero)
- Vice President Corporate Risk Group, 2013-2016, PT Bank Mandiri, Tbk (Persero)

Personal Data

Indonesian citizen
45 years old
Born in Semarang, April 26, 1974

Domicile

East Jakarta, DKI Jakarta Province, Indonesia

Joined the Company

April 9, 2018

Education

Bachelor of Accounting Economics, Diponegoro University (1997)

Work Experience

- Head of Corporate Strategic Planning and Performance Management Division, 2018-present, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
- Vice President of Large Commercial, 2017-2018, PT Bank Mandiri Tbk (Persero)
- Regional Risk Head Regional Office IV, 2016-2017, PT Bank Mandiri Tbk (Persero)
- Vice President of Corporate Risk Group, 2013-2016, PT Bank Mandiri Tbk (Persero)

Seluruh kegiatan di Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja dilaksanakan oleh 4 orang dengan posisi jabatan sebagai berikut:

All activities in the Corporate Strategic Planning and Performance Management Division are carried out by 4 persons with the following positions:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Amount (person)
Kepala Divisi Head of Division	1
Kepala Unit Head of Unit	1
<i>Senior Officer</i>	2
JUMLAH TOTAL	4

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja

Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perumusan strategis Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), mengevaluasi implementasi program-program strategis, melakukan analisa dan kajian perkembangan usaha untuk mencapai target Perusahaan serta manajemen kinerja Perusahaan dan entitas anak.

Duty and Responsibility of Corporate Strategic Planning and Performance Management Division

The Corporate Strategic Planning and Performance Management Division has duties and responsibilities in planning, coordinating and evaluating the strategic formulation of the Corporate Long-Term Plan (RJPP), evaluating the implementation of strategic programs, analyzing and evaluating business development to achieve the Company's targets and performance management of the Company and subsidiaries.

Pelaksanaan Tugas Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja Tahun 2019

Di sepanjang tahun 2019 Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja telah melaksanakan tugas beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun RJPP Perusahaan 2019-2023;
2. Menyusun *roadmap* Perusahaan 2019-2023;
3. Berfungsi sebagai PMO dalam rangka pembentukan *Holding* PPA;
4. Koordinator penyusunan KPKU tahun 2018;
5. Melakukan supervisi terhadap entitas anak PPA;
6. Melakukan *monitoring* pencapaian kinerja Perusahaan dan anak usaha Perusahaan baik secara bulanan maupun triwulanan.

Corporate Strategic Planning and Performance Management Division Duty Implementation in 2019

Throughout 2019, the Corporate Strategic Planning and Performance Management Division has carried out the following duties:

1. Prepared the Company's RJPP 2019-2023;
2. Prepared the Company's *roadmap* 2019-2023;
3. Functioning as a PMO in the context of PPA Holding establishment;
4. As the coordinator of the preparation of 2018 KPKU;
5. Supervising PPA subsidiaries;
6. Monitoring the performance achievement of the Company and subsidiaries, both monthly and quarterly.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Penilaian kinerja oleh Direksi**

Penilaian kinerja oleh Direksi dilakukan atas dasar KPI yang telah ditetapkan.

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Direksi membentuk Divisi Manajemen Risiko dalam rangka mengkordinasikan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko secara korporasi. Pembentukan Divisi Manajemen Risiko yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK-53/PPA/0919 tanggal 11 September 2019.

Pedoman Manajemen Risiko

Perusahaan telah melengkapi penerapan manajemen risiko melalui penetapan pedoman manajemen risiko, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-49/PPA/0915 tanggal 17 September 2015. Pedoman Manajemen Risiko tersebut mengatur tentang sistem manajemen risiko di Perusahaan yang mengacu pada standar ISO 31000 : 2009 "*Risk Management-Principles and Guideline*" dan menjadi pedoman bagi seluruh insan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Divisi Manajemen Risiko

Kepala Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Dukungan kerja serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi melalui mekanisme internal Perusahaan.

Pejabat Divisi Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-31/PPA/0415 tanggal 27 April 2015, Perusahaan telah menunjuk Sarda Yunus sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko.

Performance Assessment by Board of Directors

Performance assessment by Board of Directors is carried out on the basis of established KPIs.

RISK MANAGEMENT DIVISION

The Board of Directors established the Risk Management Division in order to coordinate and facilitate the implementation of risk management in a corporate manner. The establishment of an independent Risk Management Division that reports directly to the Finance and Support Director is determined through Board of Directors Decree No. SK-53/PPA/0919 dated September 11, 2019.

Risk Management Manual

The Company has completed the application of risk management through the establishment of risk management manual, which has been validated through Board of Directors Decree No. SK-49/PPA/0915 dated September 17, 2015. The Risk Management Manual regulates the risk management systems in the Company which refer to ISO 31000:2009 standard "Risk Management-Principles and Guidelines" and serve as a guideline for all Company's people in carrying out risk management activities.

Party in Charge of Risk Management Division Official Appointment and Dismissal

The Head of Risk Management Division is responsible to the Finance and Support Director and is appointed and dismissed based on the Board of Directors' Decree through the Company's internal mechanism.

Risk Management Division Official

Pursuant to Board of Directors Decree No. SK-31/PPA/0415 dated April 27, 2015, the Company has appointed SardaYunus as Head of Risk Management Division.



SARDA YUNUS

Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division

Menjabat sejak 1 Mei 2015
Served since May 1, 2015

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun
Kelahiran K. Binjai, 16 November 1971

Domisili

Kota Tangerang, Banten, Indonesia

Bergabung di Perusahaan

1 Juni 2004

Pendidikan

Sarjana Teknik, Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, 1995

Pengalaman Kerja

- Kepala Divisi Manajemen Risiko (2015 s/d saat ini)
- Kepala Grup Manajemen Risiko (2009-2015)
- Kepala Unit Divisi Manajemen Risiko (2005-2009)
- Staf Divisi Manajemen risiko (2004-2005) pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- Kepala Tim Manajemen Risiko pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2004).
- Auditor internal pada PT Bank Niaga Tbk (1997-1999).

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

Pemegang sertifikasi *Certified Risk Management Professional (CRMP)* yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko sejak tahun 2014

Personal Data

Indonesian citizen
49 years old
Born in K. Binjai, November 16, 1971

Domicile

Tangerang City, Banten, Indonesia

Joined the Company

June 1, 2004

Education

Bachelor of Engineering, Petroleum Engineering, Bandung Institute of Technology, 1995

Work Experience

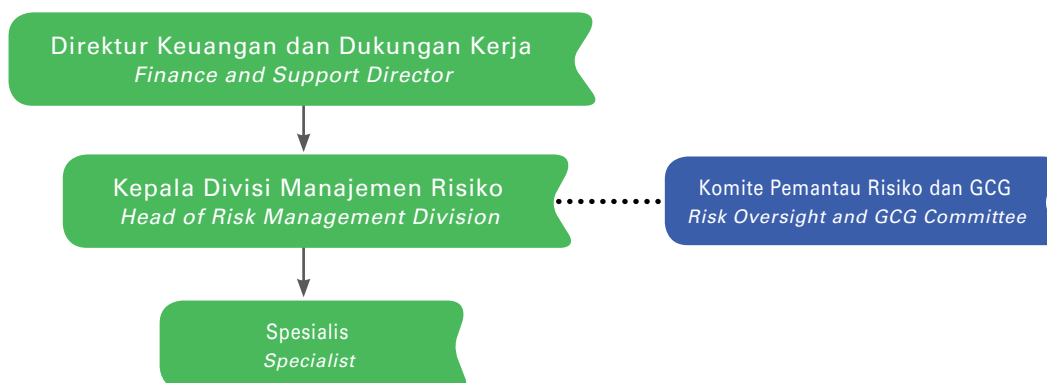
- Head of Risk Management Division (2015-present)
- Risk Management Group Head (2009-2015)
- Risk Management Unit Head (2005-2009)
- Risk Management Division Staff (2004-2005) at PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- Head of Risk Management Team at the Indonesian Bank Restructuring Agency (1999-2004).
- Internal auditor at PT Bank Niaga Tbk (1997-1999).

Valid Professional Education and/or Certification

Holder of the Certified Risk Management Professional (CRMP) certification issued by the Professional Risk Management Certification Institute since 2014

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Keorganisasian Divisi Manajemen Risiko**

Agar dapat menggambarkan cakupan fungsi Divisi Manajemen Risiko dan koordinasi antar organ, berikut disampaikan struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko per 31 Desember 2019.

**Risk Management Division Organization**

In order to illustrate the scope of functions of the Risk Management Division and coordination between organs, the following is the organizational structure of Risk Management Division as of December 31, 2019.

Hingga akhir tahun 2019, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Manajemen Risiko sebanyak 5 orang.

Until the end of 2019, there are 5 employees in the Risk Management Division.

Jabatan Position	Jumlah (orang) Amount (person)
Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	1
Spesialis (setara Kepala <i>Group</i>) Specialist (equivalent to Group Head)	2
Spesialis <i>Junior</i> Junior Specialist	2
JUMLAH TOTAL	5

Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko

Dalam rangka terus meningkatkan mutu dan kompetensi pengelolaan risiko, Perusahaan melakukan program pengembangan kompetensi manajemen risiko secara sistematis dan berjenjang. Daftar sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Divisi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

Jenis dan Level Sertifikasi Type and Level of Certification	Jumlah Karyawan Divisi yang Memiliki Number of Employees as Holder	Komposisi Terhadap Jumlah Karyawan Divisi Composition Against Total Employees of Division
<i>Certified Risk Management Profesional ("CRMP")</i>	2	40%
<i>Certified Risk Management Officer ("CRMO")</i>	1	20%
JUMLAH TOTAL	3	60%

Jumlah karyawan Divisi Manajemen Risiko yang memiliki sertifikasi profesi manajemen risiko sebanyak 3 orang, atau 60% dari jumlah keseluruhan karyawan Divisi Manajemen Risiko yang sebanyak 5 orang. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan level sertifikasi karyawan Divisi Manajemen Risiko, yang diharapkan mampu memberikan imbas positif terhadap proses pengelolaan risiko di lingkup Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko dalam mendorong terlaksananya pengelolaan risiko secara efektif sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko adalah:

1. Menyusun/mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kegiatan utama Perusahaan.
2. Melakukan evaluasi efektivitas penerapan Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di Perusahaan.
3. Memfasilitasi penyusunan laporan Profil Risiko pada satuan kerja Pemilik Risiko (*Risk Owner*).
4. Melakukan pelaporan Profil Risiko Perusahaan sebagai *early warning* signal kepada Direksi.
5. Memberikan layanan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan.
6. Melaksanakan *review* kecukupan kajian risiko atas kegiatan Perusahaan yang bersifat strategis dan/atau melibatkan aspek finansial dengan nilai tertentu.

Risk Management Professional Certification

In order to continuously improve the quality and competency of risk management, the Company undertakes a systematic and tiered risk management competency development. The list of professional certifications owned by the Risk Management Division employees is as follows.

The number of employees of Risk Management Division who have the certification of risk management profession is 3 people, or 60% of the total number of employees of the Risk Management Division which is 5 people. The company is committed to continuously increasing the level of certification of employees in the Risk Management Division, which is expected to be able to provide a positive impact on the risk management process within the Company.

Duty and Responsibility of Risk Management Division

Duty and responsibility of Risk Management Division in supporting risk management implementation effectively refers to the Risk Management Policy, as follows:

1. To design/develop Risk Management policy and other policies related to the Company's main activities.
2. To evaluate effectiveness of policy and Standard Operating Procedure (SOP) that are applied in the Company.
3. To facilitate preparation of Risk Profile report at Risk Owner working unit.
4. To submit the Company's Risk Profile report as early warning signal to the Board of Directors.
5. To provide advisory service on Risk Management implementation in the Company.
6. To review sufficiently of risk review on the Company's activity that is strategic and/or involving financial aspect with specific amount.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Program Pengembangan Kompetensi

Perusahaan memiliki program pengembangan kompetensi baik secara internal maupun yang diadakan oleh lembaga eksternal. Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal dilakukan melalui pelatihan formal dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya.

Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Manajemen Risiko di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Divisi Manajemen Risiko sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Competency Development Program

The Company has competency development program both internally and conducted by external institutions. Competency development in external institutions is done through formal training in the form of courses or seminars/workshops.

Concerning the list of training and competency development activities that were attended by Head of Risk Management Division throughout 2019, can be seen in the Company Profile chapter of this annual report. In addition, the competency development programs attended by Risk Management Division employees throughout 2019 are as follows:

Nama Name	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organized by
Johny Hasudungan Marpaung	<i>Training</i>	<i>Risk Assessment Techniques IEC/ISO 31010</i>	Bandung, 1-4 Oktober 2019 Bandung, October 1-4, 2019	CRMS Indonesia
Edo Nugraha	<i>Training & Ujian Sertifikasi Training and Certification Test</i>	<i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i>	Jakarta, 23-26 Juli 2019 Jakarta, July 23-26, 2019	PPM Manajemen
	<i>Inhouse Training</i>	<i>Public Speaking & Communication Skill</i>	Jakarta, 9-10 Oktober 2019 Jakarta, October 9-10, 2019	Tantowi Yahya Public Speaking School
Martina Trisiskawaty	<i>Inhouse Training</i>	<i>Amazing Slide Presentation</i>	Jakarta, 21-22 Januari 2019 Jakarta, January 21-22, 2019	Kreasi Presentasi
	<i>Inhouse Training</i>	<i>Amazing Slide Infographic</i>	Jakarta, 29-30 Januari 2019 Jakarta, January 29-30, 2019	Kreasi Presentasi
	<i>Training</i>	<i>Designing Standard Operating Procedure</i>	Jakarta, 3-4 Juli 2019 Jakarta, July 3-4, 2019	PPM Manajemen PPM Manajemen
	<i>Training</i>	<i>ERM Fundamental ISO 31000:2018</i>	Bandung, 2-5 September 2019 Bandung, September 2-5, 2019	CRMS Indonesia
Devina Ardelia	<i>Inhouse Training</i>	<i>Amazing Slide Presentation</i>	Jakarta, 23-24 Januari 2019 Jakarta, January 23-24, 2019	Kreasi Presentasi

Nama Name	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organized by
	<i>Inhouse Training</i>	<i>Amazing Slide Infographic</i>	Jakarta, 29-30 April 2019 Jakarta, April 29-30, 2019	Kreasi Presentasi
	Training	<i>Legal & Compliance Risk Management</i>	Bandung, 19-21 Juni Bandung, June 19- 21, 2019	CRMS Indonesia

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Tahun 2019

Selama tahun 2019, Divisi Manajemen Risiko berhasil melaksanakan seluruh program kerja yang ditetapkan. Kegiatan/program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dan revisi atas 11 Kebijakan
2. Melakukan penyusunan 1 SOP
3. Melakukan *review* dan memberi masukan atas 4 Kebijakan yang disusun oleh satuan kerja diluar Divisi Manajemen Risiko.
4. Melakukan evaluasi atas 3 Kebijakan dalam rangka menilai kesesuaian Kebijakan yang berlaku dengan perkembangan kegiatan Perusahaan.
5. Melakukan *review* risiko atas 206 dokumen usulan kegiatan Perusahaan.
6. Memfasilitasi penyusunan Profil Risiko pada *risk owner* dan menyusun Laporan Profil Risiko Perusahaan secara triwulanan.
7. Memberi masukan dan/atau pendapat terkait manajemen risiko kepada satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan.
8. Menjadi anggota Tim Evaluasi untuk 2 pengadaan barang dan 15 pengadaan jasa.

Risk Management Division Duty Implementation in 2019

In 2019, the Risk Management Division successfully performed all the work programs that have been set. Activities/work programs that have been carried out in 2019 are as follows:

1. Conducting and revising 11 Policies
2. Compiling 1 SOP
3. Reviewing and providing input on 4 Policies compiled by work units outside the Risk Management Division.
4. Evaluating 3 Policies to assess the suitability of prevailing Policies and developments in the Company's activities.
5. Conducting a risk review of 206 documents proposed by the Company.
6. Facilitating the preparation of Risk Profile to the risk owner and preparing the Company Risk Profile Report on a quarterly basis.
7. Provide input and/or opinions related to risk management to work unit in the implementation of Company activities.
8. Become a member of Evaluation Team for 2 procurement of goods and 15 procurement of services.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

AUDIT INDEPENDEN/AKUNTAN PUBLIK

Audit independen eksternal adalah kegiatan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik independen yang memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku dan memiliki tujuan untuk menyatakan pendapat, dalam semua hal yang material, apakah laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Anggota *Holding* sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Auditor Eksternal tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan terhadap SAK di Indonesia.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

1. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian *intern*, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
4. Audit mengandung risiko *inherent* bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.

INDEPENDENT AUDIT/PUBLIC ACCOUNTANT

External independent audit is an audit activity carried out by an independent Public Accounting Firm that meets the requirements of applicable legislation with the purpose of expressing an opinion, in all material respects, whether the consolidated financial statements of the Company and Holding Members are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

External auditor may not have conflict of interest with the Company to guarantee the independence and quality of the audit results. External Auditor is responsible for presenting an opinion on the conformity of the Company's Financial Statements with Indonesian GAAP.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

The Management is responsible for the presentation of the Company's financial statements and complies with Indonesian SAK as stipulated by the Indonesian Institute of Accountants (IAI)

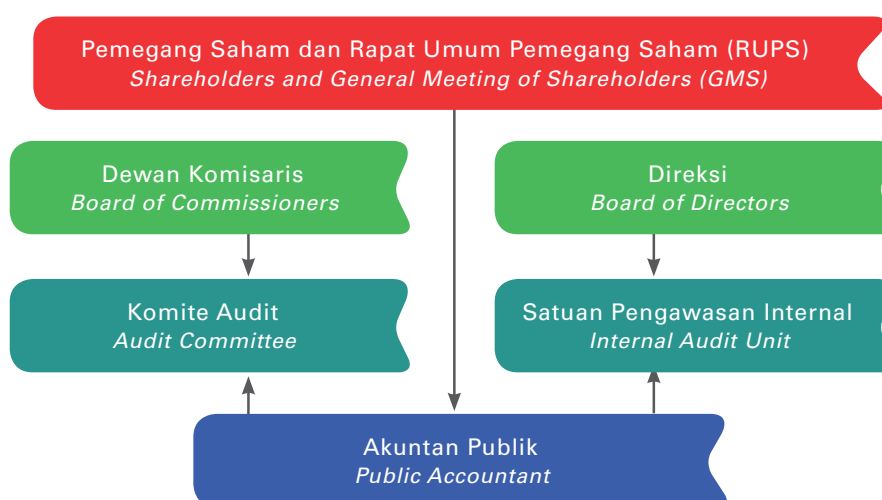
External Audit Procedures and Audit Standards

1. Audit of the Company's financial statements is conducted in accordance with the professional standards of Public Accountant covering all audit procedures deemed necessary in accordance with the circumstances.
2. Audit includes testing and evaluation of internal control systems, as well as examinations, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Audit will also include assessment of accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as assessment of the overall presentation of financial statements in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI.
3. As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts a question and answer to the management regarding the management statement presented in the financial statements.
4. Audit contains an inherent risk that if there are material mistakes and irregularities. If there is such thing, KAP will convey to the management.

5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait.
 6. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.
5. The management approves the KAP's examination paper on the Company to be reviewed by the relevant institution or authority.
 6. Audit is performed based on the Professional Standards of Certified Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there are financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, the audit is performed based on the State Audit Standards (SPKN) issued by the Financial Supervisory Board (BPK) of the Republic of Indonesia.

Hubungan auditor eksternal dengan organ internal Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The relationship of external auditor with the Company's internal organs can be seen in the chart below.



Pemegang saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan Auditor Eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan.

Shareholders through the GMS have the authority to appoint External Auditor who will conduct an audit of the Company's financial statements.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.

Public Accountant Appointment Mechanism

Stages of KAP appointment mechanism:

1. Board of Commissioners through Audit Committee shall process the appointment of external Auditor candidates by requesting Board of Directors' assistance in the appointment process in accordance with the provisions of procurement of goods/services.
2. Board of Commissioners may re-appoint the external auditor based on the evaluation result on the external auditor's performance to audit the financial statements.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/ imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan perusahaan.
4. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

3. Board of Commissioners submits the reasons for such nomination to the GMS and the amount of fee/reward for the proposed external auditor. The proposal to the GMS may be submitted through a separate letter as a part of Board of Commissioners' letter of response to the annual performance of the Company.
4. Board of Commissioners evaluates the external auditor's performance through the Audit Committee in accordance with prevailing rules and standards

For the appointment process of external auditor candidate and/or the re-appointment of external auditor conducted by the GMS, Board of Commissioners shall simply authorize the GMS to determine the auditor.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik

Mechanism of Public Accountant Appointment and Determination

Penetapan Akuntan Publik oleh RUPS

Determination of Public Accountant by the GMS



Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi kepada RUPS

Board of Commissioners submits the recommendation letter to the GMS



Dewan Komisaris melakukan telaah atas rekomendasi Komite Audit, melakukan pembahasan dengan organ Dewan Komisaris dan calon auditor eksternal/Akuntan Publik.

Board of Commissioners conducts review on Audit Committee's recommendation, conducts discussion with Board of Commissioners' bodies and prospective external auditor/Public Accountant



Tindak lanjut Komite Audit:

Audit Committee's Follow-Up:

- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dan eksternal
 - Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris
 - Evaluate the implementation of internal and external audits
 - Submit reports to the Board of Commissioners



Penyampaian arahan dan penugasan dari Dewan Komisaris kepada Komite Audit

Direction and assignment by the Board of Commissioners to Audit Committee

Akuntan Publik Tahun 2019

Berdasarkan surat Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja No.S-5442/PPA/D-KDK tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak/Cucu Perusahaan serta Pelaksanaan PKBL PT PPA dan PT Nindya Karya Tahun Buku 2019 oleh KAP RSM Indonesia. Perusahaan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dan Akuntan Publik Benny Andria untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2019. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Public Accountant in 2019

Based on the letter of Finance and Support Director No. S-5442/PPA/D-KDK dated October 21, 2019 concerning the Implementation of General Audit of PT PPA (Persero) Consolidated Financial Statements and the Company's Subsidiaries/Subsidiaries of Subsidiary as well as the Implementation of PKBL of PT PPA (Persero) and PT Nindya Karya in the 2019 Fiscal Year by KAP RSM Indonesia. The Company has appointed Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners (RSM Indonesia) and Public Accountant Benny Andria to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019. To guarantee the independence and quality of the audit results, the appointed External Auditor must not have a conflict of interest with the Company.

Akuntan Publik Tahun 2019

Public Accountant in 2019

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners (RSM Indonesia)
Akuntan Accountant	:	Benny Andria
Tahun Audit Audit Year	:	Tahun Buku 2019 Fiscal Year 2019
Periode Penugasan Assignment Period	:	23 Oktober 2019 s.d. 26 Februari 2020 October 23, 2019 until February 26, 2020
Jasa Services	:	1. Audit atas Laporan Keuangan; 2. Audit Laporan Keuangan PKBL; 3. Audit Kepatuhan; 4. Audit Hasil Evaluasi Kinerja. 1. Audit of Financial Statements; 2. Audit of PKBL Financial Statements; 3. Compliance Audit; 4. Performance Evaluation Audit.
Jasa Lainnya Other Services	:	-
Biaya Cost	:	Rp594.000.000

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE**Pengawasan atas Auditor Eksternal**

Penunjukan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dilakukan melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit *fee* atas dasar kewajaran. Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Kantor Akuntan Publik untuk membahas seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit, melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, serta memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

Komite Audit berkoordinasi dengan Divisi SPI Perusahaan melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja, baik dari segi keuangan maupun operasional. Perusahaan berupaya menindaklanjuti setiap temuan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga secara efektif mampu menekan temuan-temuan di tahun berikutnya.

Daftar Akuntan Publik dan Biaya

Untuk menjaga profesionalitas dan independensi, pemilihan Auditor Eksternal yang dilakukan setiap tahun wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur bahwa 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik (*Partner*) maksimal 3 (tiga) Tahun Buku berturut-turut.

Guna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan 6 (enam) tahun terakhir dan biaya yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan Perusahaan sejak Perusahaan.

Supervision on External Auditor

Appointment of KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners (RSM Indonesia) was done through a process according to prevailing regulation. The appointment has been reviewed and supervised by Audit Committee including in terms of audit fee stipulation based on fairness consideration. Audit Committee perform monitoring throughout the external audit process implementation through regular meetings with the Public Accountant Firm to discuss all findings and progress during the audit done by Public Accountant Firm, to help ensuring there is no constraint in the audit process, perform evaluation on quality of the audit process, as well as ensure audit implementation has complied with prevailing regulation and standards.

Effectiveness of Audit Implementation by Public Accountant

Audit Committee coordinates with Internal Auditor Division in the Company to review the effectiveness of external audit implementation to ensure that all of the findings can be followed-up according to the designated authority and improve performance, both in terms of financial and operational performances. The Company attempts to follow up every finding from the audit done by Public Accountant Firm and effectively capable to reduce findings in the upcoming years.

List of Public Accountants and Fees

To maintain professionalism and independency, the annual selection of External Auditor must meet the provisions of the Minister of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 concerning Public Accountant Services which stipulates that 1 (one) Public Accounting Firm (KAP) may only audit a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years and with Public Accountant (*Partner*) of a maximum of 3 (three) consecutive fiscal years.

In order to provide transparency, the following is a list of Public Accountant Firms and Accountants for the last 6 (six) years, and the fee incurred in the audit of the Company's financial statements.

Daftar Akuntan Publik 2014-2019
List of Public Accountant 2014-2019

AUDIT EKSTERNAL TAHUN BUKU 2019
EXTERNAL AUDIT FOR FISCAL YEAR 2019

Kantor Akuntan Publik:
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan
(RSM Indonesia)

Akuntan Publik:
Benny Andria

No. Izin:
AP.0181

Lingkup Audit:

- Audit atas Laporan Keuangan;
- Audit Laporan Keuangan PKBL;
- Audit Kepatuhan;
- Audit Hasil Evaluasi Kinerja.

Opini:
Wajar Tanpa Pengecualian

Biaya:
Rp594.000.000

Public Accounting Firm:
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners
(RSM Indonesia)

Public Accountant:
Benny Andria

License Number:
AP.0181

Audit Scope:

- Audit of Financial Statements;
- Audit of PKBL Financial Statements;
- Compliance Audit;
- Performance Evaluation Audit.

Opinion:
Unqualified

Fee:
Rp594,000,000

AUDIT EKSTERNAL TAHUN BUKU 2018
EXTERNAL AUDIT FOR FISCAL YEAR 2018

Kantor Akuntan Publik:
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
(RSM Indonesia)

Akuntan Publik:
Saptoto Agustomo

No. Izin:
AP.0499

Lingkup Audit:

- Audit atas Laporan Keuangan
- Audit Laporan Keuangan PKBL
- Audit Kepatuhan
- Audit Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan

Opini:
Wajar Tanpa Pengecualian

Biaya:
Rp500.000.000

Public Accounting Firm:
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
(RSM Indonesia)

Public Accountant:
Saptoto Agustomo

License Number:
AP.0499

Audit Scope:

- Audit of Financial Statements
- Audit of PKBL Financial Statements
- Compliance Audit
- Performance Evaluation Audit

Opinion:
Unqualified

Fee:
Rp500,000,000

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTUREDaftar Akuntan Publik 2014-2019
List of Public Accountant 2014-2019AUDIT EKSTERNAL TAHUN BUKU 2017
EXTERNAL AUDIT FOR FISCAL YEAR 2017**Kantor Akuntan Publik:**
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**Akuntan Publik:**
Saptoto Agustomo**No. Izin:**
AP.0499**Lingkup Audit:**

- Audit atas Laporan Keuangan
- Audit Laporan Keuangan PKBL
- Audit Kepatuhan
- Audit Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan

Opini:
Wajar Tanpa Pengecualian**Biaya:**
Rp528.000.000**Public Accounting Firm:**
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**Public Accountant:**
Saptoto Agustomo**License Number:**
AP.0499**Audit Scope:**

- Audit of Financial Statements
- Audit of PKBL Financial Statements
- Compliance Audit
- Performance Evaluation Audit

Opinion:
Unqualified**Fee:**
Rp528,000,000AUDIT EKSTERNAL TAHUN BUKU 2016
EXTERNAL AUDIT FOR FISCAL YEAR 2016**Kantor Akuntan Publik:**
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto**Akuntan Publik:**
Saptoto Agustomo**No. Izin:**
AP.0499**Lingkup Audit:**

- Audit atas Laporan Keuangan
- Audit Laporan Keuangan PKBL
- Audit Kepatuhan
- Audit Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan

Opini:
Wajar Tanpa Pengecualian**Biaya:**
Rp522.500.000**Public Accounting Firm:**
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto**Public Accountant:**
Saptoto Agustomo**License Number:**
AP.0499**Audit Scope:**

- Audit of Financial Statements
- Audit of PKBL Financial Statements
- Compliance Audit
- Performance Evaluation Audit

Opinion:
Unqualified**Fee:**
Rp522,500,000

Daftar Akuntan Publik 2014-2019
List of Public Accountant 2014-2019

AUDIT EKSTERNAL TAHUN BUKU 2015
EXTERNAL AUDIT FOR FISCAL YEAR 2015

Kantor Akuntan Publik:
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Akuntan Publik:
Saptoto Agustomo

No. Izin:
AP.0499

Lingkup Audit:

- Audit atas Laporan Keuangan
- Audit Laporan Keuangan PKBL
- Audit Kepatuhan
- Audit Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan

Opini:
Wajar Tanpa Pengecualian

Biaya:
Rp709.500.000

Public Accounting Firm:
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Public Accountant:
Saptoto Agustomo

License Number:
AP.0499

Audit Scope:

- Audit of Financial Statements
- Audit of PKBL Financial Statements
- Compliance Audit
- Performance Evaluation Audit

Opinion:
Unqualified

Fee:
Rp709,500,000

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif merupakan salah satu aspek penting bagi Perusahaan untuk mengelola secara efektif, efisien dan konsisten berbagai risiko yang dihadapi sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Perusahaan senantiasa menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur untuk mendukung kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan efektivitas strategi manajemen risiko agar tetap sejalan dengan perkembangan bisnis yang semakin kompleks.

Pedoman dan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan

Sebagai salah satu bentuk mandat dan komitmen Perusahaan dalam penerapan manajemen risiko secara luas dan terintegrasi, serta dalam rangka menunjang kepastian pencapaian tujuan/rencana jangka panjang, Perusahaan telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-62/PPA/1109 tanggal 16 November 2009.

Pada tahun 2015, Perusahaan telah melakukan pembaharuan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-49/PPA/0915 tanggal 17 September 2015. Kebijakan Manajemen Risiko tersebut mengatur tentang sistem manajemen risiko di Perusahaan yang mengacu pada standar ISO 31000 : 2009 "*Risk Management-Principles and Guideline*" dan menjadi pedoman bagi seluruh insan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko.

Sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko, penerapan manajemen risiko di Perusahaan dilakukan pada:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Penyusunan dan persetujuan usulan kegiatan/transaksi.
3. Pembuatan laporan risiko.
4. Penyusunan Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP)

In performing business activity, the Company realizes that risk is inseparable part in every operational activity that may influence the Company's business and performance result. Implementation of comprehensive risk management becomes an important aspect for the Company to manage various risk profile effectively, efficiently and consistently as well as manifestation of Good Corporate Governance (GCG) implementation.

The Company always prepares, evaluates and improves policy and procedure to support business activity in achieving effectiveness of risk management strategy to be in line with more complex business development.

Guidelines and Policies of Corporate Risk Management

As a mandate and commitment of the Company in general and integrated Risk Management implementation, as well as in order to support assurance of Corporate Plan/goals achievement, the Company has designed Risk Management policy as stipulated in Board of Directors Decree No. SK-62/PPA/1109 dated November 16, 2009.

In 2015, the Company has renewed the Risk Management Policy based on the Board of Directors Decree No. SK-49/PPA/0915 dated September 17, 2015. Such policy regulates the Company's risk management system which refers to ISO 31000:2009 standard "*Risk Management-Principles and Guidelines*" which becomes the guidelines for all employees of the Company in implementing risk management activities.

In line with the Risk Management Policy, the implementation of risk management in the Company is based on:

1. Preparation of Corporate work and Budget Plan.
2. Preparation and approval for the proposal of activities/transactions.
3. Drafting of risk report.
4. Preparation of Policies and Standard Operating Procedure (SOP).

Tujuan dari penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan adalah:

1. Memberikan perlindungan dan kesinambungan kegiatan Perusahaan dari kemungkinan timbulnya kejadian yang dapat mengganggu tercapainya tujuan Perusahaan yang diakibatkan dari berbagai aktivitas bisnisnya serta menjaga tingkat risiko pada level yang dapat diterima oleh Perusahaan.
2. Menyediakan *early warning signal* bagi pengambilan keputusan dengan pengendalian risiko yang baik.
3. Membantu manajemen dalam menganalisis pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan guna memberikan nilai tambah (*operational excellence*).
4. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Perusahaan sesuai dengan filosofi manajemen risiko yaitu manajemen risiko bersifat melekat pada setiap Karyawan dan Direksi Perusahaan dan harus diintegrasikan ke dalam proses kerja.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Komite Pemantau Risiko dan GCG yang diketuai oleh salah satu anggota Dewan Komisaris
4. Divisi Manajemen Risiko
5. *Risk Owner* (seluruh satuan kerja bisnis dan *support*)
6. Divisi Satuan Pengawasan Intern

Keberadaan Divisi Manajemen Risiko

Untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko yang independen. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK-40/PPA/0718 tanggal 9 Juli 2018, Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

The Purpose of risk management implementation for the Company are as follows:

1. Provide protection for and sustain the Company's activities from the possibility of events that may arise to disrupt the realization of the Company's goals due to its business activities, as well as maintaining risk level at an acceptable rate for the Company.
2. Provide early warning signal for decision-making process with proper risk control.
3. Assist the management in analyzing the implementation of the Company's business activities so as to give added values (*operational excellence*).
4. Ensure the Company's compliance with the prevailing laws and regulation.

Risk Management Governance Structure

Implementation of risk management is conducted by all work units according to the Company's risk management philosophy, meaning that risk management is inherent in every employee and Board of Directors of the Company and should be integrated into the Company's work process.

Risk Management governance structure in the Company is as follows:

1. Board of Commissioners
2. Board of Directors
3. Risk Oversight and Good Corporate Governance Committee, chaired by one of Board of Commissioners members.
4. Risk Management Division.
5. Risk Owner (all business and support units).
6. Internal Audit Division

The Existence of Risk Management Division

To coordinate and facilitate risk management implementation, the Company has established an independent Risk Management Division that is responsible directly to President Director as stipulated in Board of Directors Decree No. SK-40/PPA/0718 dated July 9, 2018.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha, Perusahaan melakukan perubahan struktur organisasi dan menempatkan Divisi Manajemen Risiko dalam Direktorat Keuangan dan Dukungan Kerja dan bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK-53/PPA/0919 tanggal 11 September 2019.

Strategi Manajemen Risiko

Dalam mendukung kegiatan usaha Perusahaan, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Menyusun dan memastikan tersedianya Kebijakan dan SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan dan penerapan manajemen risiko.
2. Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perusahaan, antara lain dengan cara:
 - Melakukan kajian risiko atas sasaran strategis Perusahaan pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - Menerapkan pelaksanaan kajian risiko atas setiap usulan kegiatan/proyek yang akan dilakukan oleh Perusahaan;
3. Melakukan asesmen risiko secara berkala dan menyusun laporan profil risiko Perusahaan.
4. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan budaya risiko di Perusahaan.

Selain itu, Direksi mengkomunikasikan secara berkelanjutan kepada seluruh insan Perusahaan tentang pentingnya penerapan manajemen risiko yang efektif dalam rangka memastikan pencapaian tujuan Perusahaan.

Furthermore, in order to improve the efficiency and effectiveness of business activities, the Company has changed the organizational structure and placed the Risk Management Division in the Finance and Support Directorate and is responsible to the Finance and Support Directorate as stipulated in the Company's Board of Directors Decree No. SK-53/PPA/0919 dated September 11, 2019.

Risk Management Strategy

In supporting the Company's business activity, risk management implementation is done through following strategies:

1. Preparing and ensuring availability of policy and SOP as guideline in the Company's business activity and risk management implementation.
2. Integrating risk management process into the Company's business process namely through:
 - Conducting risk review on the Company's strategic goals during preparation of the Company's Budget Plan,
 - Implementing risk review for every activity/project proposal that will be carried out by the Company.
3. Conducting risk assessment periodically and preparing the Company's risk profile report.
4. Conducting socialization and facilitating risk management in on going basis to increase risk awareness in the Company.

In addition, the Board of Directors communicates the importance of effective risk management implementation to all Company's people continuously to ensure the achievement of Company's goals.

Sistem Manajemen Risiko PPA

Perusahaan mengembangkan sistem manajemen risiko yang sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Perusahaan serta sesuai dengan standar manajemen risiko yang berlaku umum.

Secara umum sistem manajemen risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip manajemen risiko merupakan landasan dalam pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan, dimana prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Manajemen risiko merupakan bagian terpadu dari semua kegiatan organisasi.
- b. Manajemen risiko harus dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh sehingga memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan.
- c. Manajemen risiko harus disesuaikan dengan penggunaannya (*customized*).
- d. Manajemen risiko bersifat inklusif.
- e. Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan.
- f. Manajemen risiko didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia.
- g. Manajemen risiko harus mempertimbangkan faktor budaya dan manusia.
- h. Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan secara berkelanjutan.

2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

a. Mandat dan Komitmen.

Dalam rangka melaksanakan manajemen risiko secara efektif, manajemen melakukan hal-hal sebagai berikut:

- i. Mensosialisasikan/mengkomunikasikan akan pentingnya manajemen risiko bagi Perusahaan dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko.
- ii. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- iii. Memastikan bahwa sasaran manajemen risiko selaras dengan strategi dan sasaran Perusahaan.
- iv. Memastikan bahwa tersedia alokasi sumber daya yang cukup untuk kegiatan manajemen risiko

PPA Risk Management System

The company develops a risk management system in line with the objectives to be achieved by the Company and in accordance with generally accepted risk management standards.

In general, the risk management system includes the followings:

1. Risk Management Principles

Risk management principles are the foundation of risk management implementation in the Company, that include:

- a. Risk management is an integral part of all organizational activities.
- b. Risk management must be carried out in a structured and comprehensive manner so as to provide consistent and comparable results.
- c. Risk management must be adjusted according to its users (*customized*).
- d. Risk management is inclusive.
- e. Risk management is dynamic, repetitive and responsive to change.
- f. Risk management is based on the best available information.
- g. Risk management must consider cultural and human factors.
- h. Risk management must facilitate continuous improvement.

2. Risk Management Framework

a. Mandate and Commitment.

In order to carry out risk management effectively, the management executes the followings:

- i. Socialize/communicate the importance of risk management for the Company and establish a Risk Management Policy.
- ii. Ensuring compliance with laws and regulations.
- iii. Ensuring that risk management objectives are aligned with the Company's strategies and objectives.
- iv. Ensuring that sufficient resources are allocated for risk management activities

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

- b. Perencanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko. Hal-hal yang diperhatikan dalam merencanakan kerangka kerja manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- i. Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang secara jelas menyatakan komitmen Manajemen terhadap penerapan manajemen risiko dan sasaran yang ingin dicapai dengan penerapan Manajemen Risiko.
- ii. Mengintegrasikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari seluruh praktik manajemen serta proses bisnis Perusahaan. Proses Manajemen Risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis dan proses manajemen perubahan.
- iii. Pengembangan proses Manajemen Risiko dan memastikan kecukupan tindakan pengendalian risiko.
- iv. Pemenuhan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan manajemen risiko baik sumber daya manusia, proses dan prosedur, sistem dan sumber daya lain yang diperlukan untuk setiap tahapan penerapan manajemen risiko.
- v. Penyusunan mekanisme pelaporan dan komunikasi dalam pelaksanaan manajemen risiko.

- c. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko, manajemen memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dan proses manajemen risiko pada setiap kegiatan Perusahaan.
- ii. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iii. Mendokumentasikan seluruh proses pengambilan keputusan.
- iv. Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para *stakeholder* terkait.

- b. Risk Management Framework Planning.

The matters that need to be considered in planning a risk management framework are as follows:

- i. Preparing the Risk Management Policy that clearly states the management's commitment to the application of risk management and the objectives to be achieved by implementing Risk Management.
- ii. Integrating risk management processes to be part of all management practices and Company's business processes. The Risk Management Process must be part of the business policy development process, strategic planning, business plan preparation and change management processes.
- iii. Developing Risk Management process and ensuring the adequacy of risk control measures.
- iv. Fulfillment of adequate resources for the implementation of risk management both human resources, processes and procedures, systems and other resources needed for each stage of risk management implementation.

- v. Preparation of reporting and communication mechanisms in the implementation of risk management.

- c. Risk Management Application

In implementing risk management, the management pays attention to the following matters:

- i. Implement Risk Management Policies and risk management processes in each of the Company's activities.
- ii. Comply with all applicable laws and regulations.
- iii. Document the entire decision making process.
- iv. Conduct communication and consultation with relevant stakeholders.

- d. Pemantauan dan Peninjauan Ulang
Untuk memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan secara efektif dan mendukung kinerja Perusahaan, maka manajemen:
 - i. Menetapkan ukuran kinerja.
 - ii. Melakukan *review* atas kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan perkembangan kegiatan Perusahaan.
 - iii. Melakukan tindak lanjut atas hasil kaji ulang.
- e. Perbaikan Kerangka Kerja Secara Berkelanjutan
Diperlukan sebagai bagian dari proses peningkatan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan manajemen risiko dan implementasi manajemen risiko.

- d. Monitoring and Review
To ensure that risk management is implemented effectively and supports the Company's performance, the management:
 - i. Establish performance measures.
 - ii. Review the suitability of Risk Management Policy with the development of the Company's activities.
 - iii. Follow up on the review results.
- e. Continual Improvement of Framework
Needed as part of the process of improving the risk management framework, risk management policies and risk management implementation.

Reviu atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Reviu atas efektivitas sistem manajemen risiko dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan antara lain perubahan struktur organisasi, penerbitan ketentuan perundang-undangan baru yang terkait dengan kegiatan Perusahaan, penetapan strategi baru atau perubahan strategi Perusahaan.

Selain itu, evaluasi atas efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan penilaian risiko secara berkala atas kegiatan utama Perusahaan melalui *pendekatan Risk & Control Self Assessment* (RCSA).
2. *Review* atas Kebijakan dan SOP untuk memastikan bahwa Perusahaan senantiasa memiliki Kebijakan dan SOP terkini sesuai dengan perkembangan kegiatan Perusahaan.
3. Rapat berkala antara Divisi Manajemen Risiko dengan Komite Pemantau Risiko dan GCG.

Review on Risk Management System Effectiveness

Review of the effectiveness of risk management system is performed periodically by considering changes to the organizational structure, the issuance of new laws and regulations related to the Company's activities, the establishment of a new strategy or changes in the Company's strategy.

In addition, evaluation on the effectiveness of risk management is also carried out through:

1. The implementation of periodic risk assessment on the main activities of the Company through Risk & Control Self-Assessment (RCSA) approach.
2. Review Policies and Standard Operating Procedure (SOP) to ensure that the Company has the latest policies and SOPs at all times in accordance with the Company's progress.
3. Regular meetings between the Risk Management Division and Risk Oversight and GCG Committee.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, maka Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan berjalan dengan cukup efektif dan terus dikembangkan sesuai *road map* Manajemen Risiko. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Kesadaran pemilik risiko untuk melakukan asesmen risiko (*self assessment*).
2. Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya melakukan kajian risiko dalam kegiatan operasional perusahaan.
3. Para pemangku kepentingan di bidang Manajemen Risiko dinilai cukup mampu melakukan kajian risiko secara efektif.
4. Ketersediaan sumber daya.
5. Risiko-risiko yang teridentifikasi dari seluruh unit kerja, dievaluasi dan diukur berdasarkan nilai kemungkinan dan dampak, sehingga diperoleh prioritas risiko yang harus dikendalikan.

Profil Risiko dan Mitigasi Risiko

Sejalan dengan komitmen Direksi untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien maka pada setiap jenjang organisasi Perusahaan harus menerapkan manajemen risiko dengan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program kerja/proyek bagi kelangsungan Perusahaan.

Dalam rangka melindungi dan memberi nilai tambah serta menjadi bagian dari pengambilan keputusan, penerapan manajemen risiko di Perusahaan antara lain dilakukan pada aktivitas sebagai berikut:

1. Penyusunan dan persetujuan usulan kegiatan/proyek
Dalam menyusun suatu usulan kegiatan/proyek, satuan kerja pengusul harus melakukan kajian risiko yaitu identifikasi dan analisis risiko yang dapat timbul dari kegiatan yang diusulkan serta mitigasi atas risiko tersebut. Selanjutnya Divisi Manajemen Risiko akan melakukan *review* atas kecukupan kajian risiko yang dilakukan oleh satuan kerja pengusul sebagai masukan/pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Based on result of the assessment mentioned above, Risk Management System in the Company has been implemented effectively and continuously developed based on the Risk Management Road Map. This is proven from:

1. Awareness of the risk owner to perform risk assessment (self-assessment).
2. Risk awareness culture has been embedded in the risk owner, marked by the efforts to perform risk review in the Company's operational activity.
3. The stakeholders in Risk Management aspect are evaluated capable to perform risk review effectively.
4. Resources availability.
5. Risks that have been identified from all work units are evaluated and measured based on level of possibility and impact to obtain risk priority to be mitigated.

Risk Profile and Risk Mitigation

In line with the Board of Directors' commitment to implement risk management effectively and efficiently, every level of the Company's organization shall implement risk management by considering priority and benefit of each working program/project for the Company's business sustainability.

In order to protect and provide added-value and being part of decision-making process, risk management implementation in the Company is namely carried out in activities, as follows:

1. Preparation and approval of the proposed activities/projects
In developing a proposed activity/project, the proposing work unit must perform a risk assessment, which is the identification and analysis of risks that may arise from the proposed activities as well as mitigation of such risks. Furthermore, the Risk Management Division will conduct a review of the adequacy of the risk assessment performed by the proposing work unit as advice/considerations for the management in making decisions.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Secara berkala setiap satuan kerja/*risk owner* melakukan identifikasi dan penilaian risiko dalam rangka menyusun profil risiko dari satuan kerjanya. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko oleh *risk owner* akan difasilitasi oleh Divisi Manajemen Risiko. Dalam pelaksanaan penilaian risiko tersebut, Perusahaan menggunakan pendekatan RCSA.

Identifikasi risiko untuk tahun 2019 dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam pencapaian RKAP 2019. Berdasarkan kajian yang dilakukan selama periode tahun 2019, risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dibagi menjadi risiko strategis, risiko kredit, risiko bisnis, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko reputasi.

RISIKO STRATEGIS #01
STRATEGIC RISK #01

Potensi Penyebab:

Pemilihan target investasi yang tidak tepat sehingga Perusahaan tidak dapat melakukan pengembangan bisnis sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Upaya Pengelolaan Risiko:

Melakukan uji tuntas dan kajian kelayakan yang cukup (antara lain aspek komersial, aspek hukum) atas target investasi dalam penyusunan rencana bisnis dan membuat keputusan investasi.

Potential Cause:

Failure to choose the right asset as an investment target, so that the Company was unable to develop the business in accordance with the established plan.

Mitigation Plan:

Conducted adequate due diligence and feasibility studies (including commercial aspects, legal aspects) on assets that became the investment target in developing business plans and making investment decisions.

2. Risk Identification and Assessment

Periodically, each work unit/*risk owner* conducts identification and risk assessment in order to develop risk profile of its work unit. The implementation of the identification and assessment of risks by risk owners will be facilitated by the Risk Management Division. In the risk assessment, the Company uses the Risk & Control Self Assessment (RCSA) approach.

Risk identification for 2019 was done according to purpose and objectives in the 2019 Budget and Planning achievement. Based on the review done in 2019 period, key risks that were experienced by the Company are classified into strategic risk, credit risk, business risk, market risk, liquidity risk and reputation risk.

RISIKO STRATEGIS #02
STRATEGIC RISK #02

Potensi Penyebab:

Ketidaktepatan pengambilan strategi dalam menentukan opsi R/R BUMN.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Uji Tuntas baik dari aspek keuangan, aspek hukum, aspek operasional dan aspek lainnya untuk mendapat gambaran menyeluruh dari BUMN terkait, termasuk permasalahan yang dihadapi BUMN.
- Analisa industri untuk mendukung analisa prospek bisnis BUMN ke depan termasuk analisa atas prediksi kondisi perekonomian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penetapan opsi R/R BUMN dan rencana bisnis.
- Membentuk Tim *Task Force* dalam rangka penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

Potential Cause:

Inaccuracy in determining strategy in making SOEs R/R option.

Mitigation Plan:

- Due Diligence from the financial aspects, legal aspects, operational aspects and other aspects to obtain an overall view of the relevant SOEs, including problems faced by SOEs.
 - Analysis of the industry to support the analysis of State-Owned Enterprises business prospects including prediction on the analysis of economic conditions for a certain period in the establishment of the SOEs R/R options and business plans.
 - Forming a Task Force Team in order to resolve troubled financing.
-

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT**RISIKO STRATEGIS #03**
STRATEGIC RISK #03**Potensi Penyebab:**

Tidak tercapainya target kinerja sebagian Entitas Anak.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Pemantauan kinerja Entitas Anak melalui Laporan Perkembangan Proyek yang dibiayai Entitas Anak.
- Pertemuan dengan Entitas Anak secara triwulanan dan sewaktu-waktu bila diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja.
- Memberi masukan kepada Entitas Anak untuk melakukan pengawasan atas proyek-proyek yang dibiayai.
- Entitas Anak dapat menempatkan wakilnya di dalam proyek-proyek yang dibiayai.

Potential Cause:

Failure to achieve performance target of some Subsidiaries.

Mitigation Plan:

- Subsidiaries' performance monitoring through Progress Report of projects financed by the Subsidiaries.
- Meeting with Subsidiaries quarterly or any time needed to evaluate performance.
- Provide recommendation to Subsidiaries to monitor the financed projects.
- Subsidiaries are allowed to assign representative in the financed projects.

RISIKO STRATEGIS #04
STRATEGIC RISK #04**Potensi Penyebab:**

Alokasi investasi pada perusahaan dan sektor industri tertentu yang dipilih sebagai target investasi mengalami perlambatan atau jenuh.

Upaya Pengelolaan Risiko:

Dalam melakukan alokasi investasi memperhatikan tema investasi yang sedang berkembang di pasar dengan mencermati *outlook* ekonomi *global* dan ekonomi Indonesia.

Potential Cause:

The allocation of investments in certain industries and companies that were selected as investment targets experienced a slowdown or matured.

Mitigation Plan:

Investment allocation should consider current investment theme in the market by observing global and national economic outlook.

RISIKO KREDIT #01
CREDIT RISK #01**Potensi Penyebab:**

Tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan R/R BUMN kepada beberapa BUMN ("Debitur") yang antara lain dipengaruhi oleh:

- Operasional Debitur terganggu atau tidak efisien.
- Beban utang terlalu besar.
- *Revenue* lebih rendah dari biaya usaha.
- Kondisi fasilitas produksi yang relatif kurang baik.
- Komitmen yang rendah dari beberapa manajemen Debitur untuk memenuhi kewajibannya ke Perusahaan.
- Ketidadaan pembiayaan untuk modal kerja dan revitalisasi alat produksi pada beberapa Debitur.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Pelaksanaan kajian kelayakan R/R BUMN terhadap seluruh aspek yang mempengaruhi kinerja usaha dan kemampuan Debitur untuk mengembalikan dana yang diterima dari Perusahaan.
- Penetapan persyaratan jaminan/agunan.
- Pemantauan atas pemenuhan persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan antara Perusahaan dan Debitur.
- Memantau pencapaian target kinerja Debitur dan mengusulkan langkah antisipasi untuk meningkatkan kinerja.
- Melakukan upaya penagihan yang efektif agar pembayaran kewajiban Debitur dapat dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.
- Melakukan langkah-langkah dalam rangka mengupayakan agar program R/R BUMN dapat diselesaikan tepat waktu sesuai perencanaan.

Potential Cause:

Default of loans payment in SOEs R/R implementation for some State-Owned Enterprises ("Debitors") that was among others influenced by:

- Disruption or less-efficiency of the Debitor's operations.
- Excessive loans.
- Revenues were lower than operating expenses.
- Deficient condition of the production facilities.
- Low commitment of some Debitor's management to fulfill liabilities to the Company.
- Unavailability of financing for working capital and production tools revitalization in some Debtors.

Mitigation Plan:

- Implementation of SOEs R/R feasibility studies for all aspects that influence business performance and Debitor's capability to repay loans from the Company.
- Stipulation of collateral/guarantee requirements.
- Monitoring over fulfillment of terms and condition that have been stipulated between the Company and Debtors.
- Supervise achievement of Debitor's performance target and propose anticipatory plan to improve performance.
- Perform effective collection activity to ensure the Debitor's liabilities payment can be done regularly based on the designated payment schedule.
- Perform Initiatives to ensure the SOEs R/R program can be completed on time according to the planning.

RISIKO KREDIT #02
CREDIT RISK #02**Potensi Penyebab:**

Kerugian atau kehilangan dana yang diinvestasikan pada pembiayaan proyek tertentu.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Melakukan *due diligence* dan kajian kelayakan investasi yang memadai sebelum mengambil keputusan investasi.
- Penetapan persyaratan jaminan/agunan
- Menerapkan mekanisme *escrow account* (rekening *joint signature*) untuk menampung dana pembayaran proyek.
- Pemantauan dan evaluasi atas kinerja debitur/proyek untuk memastikan terpenuhinya persyaratan/ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya.
- Membentuk Tim *Task Force* dalam rangka penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

Potential Cause:

Loss of profit or funds invested in certain projects.

Mitigation Plan:

- Conduct due diligence and adequate investment feasibility studies before making investment decisions.
- Determination of guarantee/collateral requirements
- Implement an escrow account mechanism (joint signature account) to accommodate project payment funds.
- Monitoring and evaluation of the performance of the debtor/project to ensure compliance with the terms/conditions stipulated in the credit agreement and/or other agreements
- Forming a Task Force Team in order to resolve troubled financing.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT**RISIKO BISNIS**
BUSINESS RISK**Potensi Penyebab:**

Tidak tercapainya target pendapatan dari kegiatan *advisory*.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Menyediakan *marketing tool/sales kit*.
- Menjalankan aktivitas inisiasi/ *marketing* kepada *prospective clients*.
- Mengembangkan kemampuan personil (*soft skill & hard skill*).
- Memelihara hubungan baik dengan *existing customer/client* untuk mengupayakan perolehan *repeat order*.

Potential Cause:

Achievement of revenues from advisory business below the target.

Mitigation Plan:

- Provide marketing tool/sales kit.
- Conduct initiation/marketing activity to prospective clients.
- Develop competencies of personnel (soft skill & hard skill).
- Maintain good relationship with existing customer/ client to acquire repeat order.

RISIKO PASAR
MARKET RISK**Potensi Penyebab:**

Terjadi penurunan nilai atau kerugian atas portofolio saham dan surat utang akibat pergerakan harga saham/surat utang yang merugikan (*adverse movement*).

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Pemantauan secara berkesinambungan terhadap antara lain pergerakan indikator ekonomi, *outlook* industri, kondisi politik dan sosial, pergerakan bursa *global* dan *regional* yang akan mempengaruhi nilai saham dan diikuti dengan langkah-langkah antisipasi atas hasil pemantauan tersebut.
- Penyebaran transaksi saham pada beberapa sektor industri dan pemilihan saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik.
- Transaksi pada saham dilakukan pada saham yang likuid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar.
- Pembagian tenor surat utang (obligasi) dengan memperhatikan penyebaran durasi obligasi yang telah dimiliki oleh Perusahaan.
- Pelaksanaan evaluasi secara berkala atas kinerja portofolio saham dan surat utang untuk memastikan bahwa perkembangannya masih sesuai dengan batasan, strategi dan target yang ditetapkan yang dapat diikuti dengan rekomposisi dan realokasi portofolio.

Potential Cause:

Impairment of value or losses on share and debt securities portfolio due to adverse movement of the shares/bonds.

Mitigation Plan:

- Continuous monitoring on, among others, the movement of economic indicators, industry outlook, political and social conditions that will affect share value, followed by anticipatory measures on the monitoring results.
- Distribute of share transactions in several industries and the selection of stocks that have good fundamentals and performance.
- Transactions in shares performed in liquid shares that have a large market capitalization.
- The division of tenor of debt securities (bonds) by taking into account the spread of the duration of the bonds already held by the Company.
- Regular evaluation on the performance of share and bonds portfolio to ensure that the development was in line with the limit, strategy, and target set, which can be followed by recomposition and reallocation of portfolio.

RISIKO LIKUIDITAS #01 LIQUIDITY RISK #01

Potensi Penyebab:

Perusahaan tidak memiliki dana yang cukup dan/atau tidak mampu mendapatkan pendanaan dari pihak lain dalam rangka membiayai kegiatan usahanya.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Penetapan skala prioritas investasi yang akan dibiayai dengan mempertimbangkan antara lain tingkat imbal hasil, risiko, dan nilai strategis proyek yang akan dibiayai.
- Membangun hubungan dan jaringan yang baik dengan berbagai pihak serta mendayagunakan sumber daya Perusahaan dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak lain (bank/investor strategis).

Potential Cause:

The Company does not have sufficient funds and/or are unable to obtain funding from other parties in order to finance its business activities.

Mitigation Plan:

- Priority scale set-up for investment to be financed by considering, among others, the returns, risks, and strategic value of projects to be financed.
- Create a good relationship and network with various stakeholders, and leveraged the Company's resources in order to obtain funding from other parties (bank/ strategic investors).

RISIKO LIKUIDITAS #02 LIQUIDITY RISK #02

Potensi Penyebab:

Keterbatasan dana untuk kesinambungan pelaksanaan program R/R BUMN karena:

- Keterlambatan/tidak diperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas penggunaan dana PMN untuk program R/R
- Sebagian besar BUMN yang telah di R/R tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Perusahaan

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Melakukan restrukturisasi dan penagihan kepada BUMN yang di R/R sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Perusahaan.
- Melakukan kajian mengenai potensi optimalisasi aset milik beberapa BUMN yang di R/R sehingga diharapkan BUMN tersebut memiliki sumber pendapatan untuk membiayai operasionalnya maupun memenuhi kewajiban pembayaran kepada Perusahaan.
- Melakukan peninjauan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi aset milik beberapa BUMN dalam program R/R).

Potential Cause:

Limited funds for the continuity of SOEs R/R program due to:

- Delay/not obtaining approval from the Minister of Finance for the use of State Capital Participation funds for R/R program
- Most SOEs that have been in R/R do not fulfill payment obligations to the Company

Mitigation Plan:

- Conducting restructuring and billing to SOEs that are in R/R so that they have the ability to meet payment obligations to the Company.
- Conduct a study of the potential optimization of assets belonging to several SOEs that are in R/R so that the SOEs is expected to have a source of income to finance its operations and fulfill payment obligations to the Company.
- Explore cooperation with third parties in order to optimize assets owned by several SOEs in the R/R program.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT**RISIKO REPUTASI**
REPUTATION RISK**Potensi Penyebab:**

Perusahaan tidak mampu mengelola ekspektasi *stakeholder* dalam melakukan kegiatan R/R BUMN.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Menyusun strategi *public relation* yang tepat dan memadai.
- Pemenuhan atas hal-hal atau rencana kerja yang telah disepakati dengan para pihak.
- Berkoordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam rangka memenuhi aspek GCG.
- Pemantauan secara rutin atas publikasi yang bernuansa negatif tentang Perusahaan.

Potential Cause:

The Company failed to manage stakeholders' expectation in SOEs R/R activity.

Mitigation Plan:

- Effective and adequate public relation strategy formulation.
- Fulfillment of aspects or work plan as agreed by all parties.
- Coordination with related party/agency in fulfilling GCG aspect.
- Regular monitoring on negative publication about the Company.

Upaya Peningkatan Budaya Risiko

Faktor penting untuk mendukung efektivitas implementasi manajemen risiko Perusahaan adalah adanya budaya risiko yang kuat (*strong risk culture*) di dalam suatu organisasi. Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan budaya risiko di Perusahaan dilakukan melalui:

1. Direksi secara berkesinambungan mengkomunikasikan dan mendorong agar seluruh satuan kerja (*risk owner*) untuk terus mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) dan meningkatkan *quality risk management* serta kepatuhan terhadap kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan.
2. Penyusunan Kebijakan, prosedur persetujuan kegiatan (*approval procedure*) dan SOP didasarkan pada pertimbangan manajemen risiko.
3. Divisi Manajemen Risiko secara aktif memberikan dukungan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko di Perusahaan.
4. Mengikuti pelatihan, seminar serta sertifikasi di bidang manajemen risiko dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi manajemen risiko.

Risk Culture Improvement Program

Important factor to support effectiveness of risk management implementation in the Company is strong risk culture in an organization. Initiatives to strengthen risk culture in the Company are done through following activities:

1. Board of Directors communicates and encourages all work units (*risk owner*) continuously to develop risk culture and improve risk management quality and compliance with the Company's policy and prevailing law in the Company's activity implementation.
2. Formulation of policy, activity approval procedure and SOP refer to risk management consideration.
3. Risk Management Division actively supports and facilitates risk management implementation in the Company.
4. Participate in risk management training, seminar and certification to develop risk management knowledge and competency.

KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan investasi, Perusahaan membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-50/PPA/0819 tanggal 27 Agustus 2019.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko antara lain berperan untuk:

1. Memastikan terpenuhinya aspek tata kelola yang baik dalam pelaksanaan investasi.
2. Memastikan bahwa usulan kegiatan investasi telah memenuhi ketentuan, target dan batasan-batasan yang diatur dalam Kebijakan Investasi dan Pedoman Investasi (*investment guideline*).
3. Memastikan usulan investasi telah didukung dengan kajian manajemen risiko yang cukup serta kecukupan perlindungan Perusahaan dari aspek hukum.
4. Melindungi dan memberi nilai tambah dalam pelaksanaan kegiatan investasi dengan memberikan *assurance* dalam proses pengambilan keputusan investasi

Pelaksanaan tugas atau peran Komite Investasi dan Manajemen Risiko dilakukan melalui:

1. Pembahasan bersama atas rencana pelaksanaan investasi antara Komite Investasi dan Manajemen Risiko dengan satuan kerja pengusul dan memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan kajian kelayakan investasi serta penyusunan dokumen usulan investasi.
2. Pelaksanaan evaluasi atas dokumen usulan investasi serta memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi Direksi dalam mengambil keputusan investasi. Hal-hal yang dievaluasi antara lain meliputi kesesuaian usulan investasi dengan Kebijakan Investasi dan Pedoman Investasi, aspek risiko, aspek hukum dan aspek pendanaan.

INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

In order to support the implementation of investment activities, the Company established an Investment and Risk Management Committee based on Board of Directors Decree No. SK-50/PPA/0819 dated August 27, 2019.

The Investment and Risk Management Committee, among others, has the role to:

1. Ensure that good governance aspects are fulfilled in the implementation of investments.
2. Ensure that proposed investment activities meet the provisions, targets and limits set forth in the Investment Policy and Investment Guidelines.
3. Ensure that investment proposals are supported by adequate risk management studies and the adequacy of Company's protection from legal aspect.
4. Protect and provide added value in the implementation of investment activities by providing assurance in the investment decision making process

Duties or roles of the Investment and Risk Management Committee is carried out through:

1. Joint discussion on investment implementation plan between the Investment Committee and Risk Management with the proposing work unit and providing input in conducting investment feasibility studies and preparing investment proposal documents.
2. Evaluation of investment proposal documents and provide recommendations as a consideration for Board of Directors in making investment decisions. Matters that are evaluated include the suitability of investment proposals with Investment Policies and Investment Guidelines, risk aspect, legal aspect and funding aspect.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT**Pejabat Komite Investasi dan Manajemen Risiko**
Investment and Risk Management Committee Official**Sarda Yunus****Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko Menjabat sejak 11 September 2019**

Investment and Risk Management Committee Chairman Served since September 11, 2019

Profil mengenai Sarda Yunus dapat dilihat di bagian Pejabat Divisi Manajemen Risiko
Profile of Sarda Yunus can be seen in the Risk Management Division Official**Pelaksanaan Tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko Tahun 2019**

Pada tahun 2019, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan 75 (tujuh puluh lima) rapat untuk membahas rencana investasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan investasi.
2. Komite Investasi dan manajemen risiko telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (Memo Evaluasi Risiko) atas 57 dokumen usulan kegiatan baik usulan investasi maupun usulan atas kegiatan penanganan investasi.

Evaluasi Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Evaluasi kinerja Komite di lihat dari pelaksanaan review dan rekomendasi (Memo Evaluasi Risiko) yang diberikan atas 57 memo usulan kegiatan.

Investment and Risk Management Committee Duties Implementation in 2019

In 2019, Investment and Risk Management Committee carried out the following duties:

1. Investment and Risk Management Committee has held 75 (seventy-five) meetings to discuss investment plans and matters related to investment implementation.
2. Investment and risk management committee has conducted evaluation and provided recommendation (Risk Evaluation Memo) for 57 proposed activity documents, both investment proposals and investment management activity proposals.

Performance Assessment of Investment and Risk Management Committee

The Committee's performance assessment is seen from the implementation of review and recommendation (Risk Evaluation Memo), which was provided for 57 memos of proposed activities.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sesuai dengan pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Pembentukan Sistem Pengendalian Internal juga dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Perusahaan sebagai Perusahaan yang tunduk dan patuh terhadap prinsip penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Upaya pengendalian internal ini secara khusus diterapkan dalam aspek-aspek penting seperti aspek operasional, keuangan, SDM, dan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Selain itu, sistem pengendalian internal juga dimaksudkan untuk menekan potensi risiko usaha maupun praktik penyimpangan etika bisnis yang berdampak negatif pada kinerja Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal yang dijalankan Perusahaan merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh karyawan, baik pada jajaran pimpinan sampai dengan staf. Hal tersebut dilakukan untuk membangun komitmen yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah mengacu pada prinsip-prinsip *Internal Control-Integrated Framework* yang ditetapkan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
2. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Perusahaan.
3. Konsistensi penerapan kebijakan/ketentuan baik internal maupun eksternal.
4. Akurasi dan keandalan akuntansi.

Pursuant to Article 26 Minister of State-Owned Enterprise Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in SOEs, the Board of Directors shall stipulate an effective internal control system to secure investment and assets of the Company.

The establishment of Internal Control System is also intended to actualize the Company's commitment as a Company that complies and obeys Good Corporate Governance implementation principle. The internal control initiative is particularly implemented in key aspects such as operational, financial, HR aspects as well as compliance with the laws and regulations.

In addition, the internal control system is also intended to reduce business risk potential as well as violation against business ethics with negative impact on the Company's performance.

Internal Control system that is implemented in the Company refers to an integrated process in every action and activity that are done continuously by all employees, from executive and staff levels. These are done to establish an intact commitment to achieve organizational goals. Internal Control System in the Company has referred to Internal Control principles – Integrated Framework applied by COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission).

Objectives of Internal Control System Implementation

Implementation of Internal Control System in the Company has the following objectives:

1. To secure investment and assets of the Company.
2. Effectiveness and efficiency of goals achievement in the Program and Activity implemented by the Company.
3. Consistency of internal and external policy/regulation implementation.
4. Accounting accuracy and reliability.

Pedoman dan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor SK-35/PPA/0713. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) merupakan suatu proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) terdiri atas unsur:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Penerapan unsur Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perusahaan.

Semua pihak di Perusahaan bertanggungjawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif. SPI sesuai dengan Piagam Audit Internal memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan seluruh proses pengendalian pada Perusahaan berjalan secara efektif. SPI juga bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Direksi serta Komite Audit atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan pada Perusahaan, yang disertai dengan rekomendasi untuk memperbaiki proses pengendalian.

Kesesuaian Kebijakan Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

Pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dilakukan secara terus-menerus oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Company's Internal Control System Guidelines and Policies

The policy of Internal Control System is stipulated through the Decree of Board of Directors No. SK-35/PPA/0713. Internal Control System Policy is an integral process of actions and activities carried out continuously by the leaders and all employees, to provide adequate confidence in the achievement of organizational goals through effective and efficient activities, financial reporting reliability, security of company's assets and compliance with applicable laws and regulations.

Internal Control System consists of the following elements:

1. Controlling Environment
2. Risk Assessment
3. Controlling Activity
4. Information and Communication
5. Monitoring

The application of elements of Internal Control System is carried out as one and becomes an integral part of the Company's activities.

All parties in the Company are responsible for the implementation of a reliable and effective Internal Control System. SPI in accordance with the Internal Audit Charter has the responsibility to ensure that all controlling processes in the Company are running effectively. SPI is also responsible to submit reports to Board of Directors and Audit Committee on the adequacy and effectiveness of Internal Control System that is applied in the Company, which is accompanied by recommendations to improve the controlling process.

Conformity Between Internal Control Policy with COSO Framework

Understanding on the Company's Internal Control System is done continuously by the management and all employees to provide sufficient assurance on the organizational goals achievement.

Secara umum, sistem pengendalian internal bukanlah suatu aktivitas yang ditambahkan dalam proses manajemen, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses tersebut. Lima komponen yang menunjang efektivitas pengendalian internal sesuai dengan kerangka COSO yang di terapkan perusahaan yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian, diterapkan melalui:
Seluruh tingkatan manajemen dalam Perusahaan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) di lingkungan kerja Perusahaan melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran pengawasan intern yang efektif
2. Penilaian Risiko
Penilaian risiko dilakukan oleh Perusahaan dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko/potensi risiko yang timbul dari kegiatan Perusahaan untuk merumuskan mitigasi/langkah penanganan, dan memantau penerapan kontrol atas risiko/potensi risiko dimaksud.
3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengelola risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit Perusahaan.
4. Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Perusahaan.
5. Pemantauan (*Monitoring*)
Pemantauan adalah suatu proses penilaian terhadap kualitas Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*), termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

In general, internal control system is not an additional activity in the management process, but an integrated part of the process. Five components that support effectiveness of internal control based on COSO framework applied in the Company are as follows:

1. Controlling Environment, implemented through:
All of management level in the Company shall create and maintain control environment that encourages positive and conducive behavior for the Internal Control System implementation in the Company's working circumstances, through:
 - a. Integrity and ethical values enforcement.
 - b. Commitment on competency.
 - c. Conducive leadership.
 - d. Establishment of organization structure based on needs.
 - e. Effective delegation of authority and responsibility.
 - f. Preparation and implementation of sound policy on human resources development.
 - g. Establishment of effective internal audit role.
2. Risk Assessment
Risk assessment is implemented by the Company by identifying and analyzing risk/risk potential occurred from the Company's activity to formulate mitigation/handling plan, and to oversee implementation of control over the certain risk/risk potential.
3. Controlling Activity
Controlling activity includes policy and procedure that are designed to mitigate risk with potential to disrupt the Company's goals achievement in every level and unit in the Company.
4. Information and Communication
Information and communication system, a report presentation process, as well as obedience and compliance with prevailing Law by the Company.
5. Monitoring
Monitoring refers to an evaluation process over the Internal Control System quality, including internal audit function in every level and unit in the Company's organization structure, to be implemented optimally.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Pemantauan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

Mekanisme Kerja Pengendalian Internal

Dalam pelaksanaan operasional proses bisnis, Perusahaan senantiasa menerapkan pengendalian internal salah satunya melalui pembuatan prosedur proses bisnis sebagai pedoman untuk setiap rangkaian bisnis yang ada serta melakukan asesmen secara berkala atas penerapannya utamanya melakukan perbaikan desain pengendalian internal guna mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis terkini.

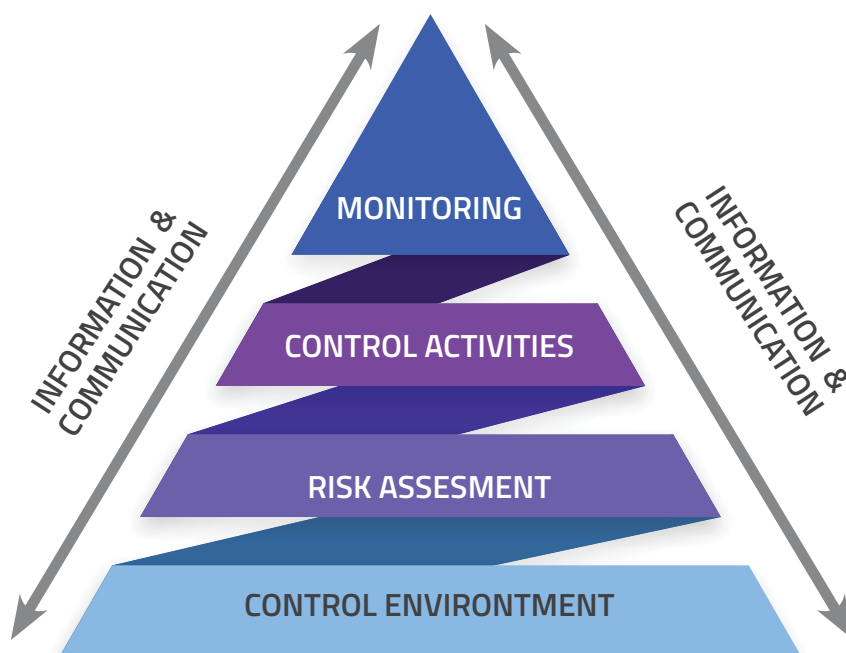
Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan respon dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Komponen pengendalian internal tersebut berlaku dalam audit setiap unit bisnis.

Monitoring on the Internal Control System is done through continuous monitoring, separated evaluation, follow-up on the audit results and other reviews.

Internal Control Work Mechanism

In the business process operational implementation, the Company always implements internal control, namely through formulation of business process procedure as manual for every existing business process as well as perform assessment periodically on the implementation, primarily performing internal control design improvement to anticipate current change in the business circumstances.

The monitoring activity may include the use of information and communication with external party such as customer care and response from the regulatory bodies that may provide guidance on the issues or aspects that require improvement. The internal control component is applied in the audit activity in every business unit.

COSO INTERNAL CONTROL MODE

Pengendalian atas Pelaksanaan Operasional dan Pelaporan Keuangan

Penerapan pengendalian keuangan dan operasional dilakukan secara berjenjang meliputi seluruh elemen yang terdapat di Perusahaan. Pengendalian Keuangan dan Operasional yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah dengan melakukan pengawasan dan penasehatan terkait proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG. Sedangkan Direksi menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, antara lain terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dan manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, integritas yang tinggi, nilai etika serta kompetensi karyawan.

Divisi SPI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham yang bertanggung jawab di dalam melaksanakan audit internal di Perusahaan, Divisi SPI melakukan upaya peningkatan pengendalian internal (*internal control*) dalam pelaporan keuangan berbagai kegiatan operasional Perusahaan. Pengendalian internal di lingkungan Perusahaan senantiasa dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan usaha Perusahaan.

Controlling on Operational Activity and Financial Reporting

Implementation of financial and operational controlling is done in stages including all elements in the Company. Financial and Operational controlling that are done by the Board of Commissioners is by conducting supervision and advisory related to sufficiency and fairness process in the financial statements preparation and risk management by considering prudent principle and supported by Audit Committee and Risk Oversight and GCG Committee. Meanwhile, the Board of Directors implements internal control system through consistent corporate policy and procedure implementation as well as compliance with prevailing regulation, namely related to the Company's business activity and risk management, strategic plan, division of duty, delegation of authority and adequate accounting policy.

The Board of Directors applies an effective internal control system to secure investment and assets of the Company. Internal control environment in the Company is carried out with discipline and order, high integrity, ethical values and competency of the employees.

Internal Audit Division is part of the Internal Control System that is established to support President Director in fulfilling obligation to the Shareholders with responsibility in internal audit implementation in the Company; the Internal Auditor Division performs internal control improvement initiative in the financial reporting of various operational activities in the Company. Internal control in the Company is always evaluated to follow the Company's business development.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM**Tinjauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal**

Sebagai upaya peningkatan sistem pengendalian internal yang efektif, Perusahaan senantiasa mendorong manajemen untuk melakukan tinjauan serta evaluasi atas sistem pengendalian yang ada. Divisi SPI memiliki peran yang penting dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan. Pengendalian internal merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur di setiap kegiatan pada unit kerja sehingga apabila terjadi penyimpangan maka dapat diketahui secara dini dan dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan.

Reviu atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan

Pengendalian internal dalam pelaporan keuangan adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen Perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan pelaporan keuangan dan penyajian laporan keuangan yang ditujukan untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Reviu pengendalian internal atas operasional Perusahaan dan Pelaporan Keuangan Perusahaan telah dilakukan oleh Divisi SPI dengan mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional yaitu COSO–*Internal Control Framework*. Menurut *framework* COSO tersebut terdapat 5 (lima) komponen yang dievaluasi sebagaimana disebutkan di atas yaitu: Lingkungan Pengendalian Intern, Kajian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.

Sesuai dengan Rencana Pemeriksaan Tahun 2019, Divisi SPI telah melakukan audit operasional di seluruh Unit Kerja dan beberapa entitas anak, evaluasi atas penerapan manajemen risiko Perusahaan, dan Audit atas Permintaan/Audit Khusus sebagaimana telah dijelaskan dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Tahun 2019.

Internal Control System Review and Evaluation

As an initiative to improve effective internal control system, the Company always encourages the management to review and evaluate existing controlling system. The Internal Auditor Division has an important role in evaluating sufficiency and effectiveness of the internal control that is implemented by the Company's management. Internal Control is an integrated part in the system and procedure at every activity in working units, therefore, if there is any violation, the violation can be early acknowledged to conduct improvement action by the related working units.

Review on Internal Control System in Financial Reporting

In the financial reporting, Internal Control refers to a process that is designed and implemented by management of the Company to generate sufficient assurance on the financial reporting and financial statements preparation reliability that is intended for external purpose according to prevailing accounting principle.

Internal control review over the Company's operations and financial reporting has been conducted by SPI by referring to international-standard framework, COSO – Internal Control Framework. According to the COSO framework, there are 5 (five) components that are evaluated as mentioned above, such as: Internal Control Environment, Risk Assessment, Controlling Activity, Information and Communication System, and Monitoring.

According to 2019 Audit Plan, the Internal Audit Division has conducted operational audit in the entire Work Units and some Subsidiaries, evaluation on risk management implementation in the Company, and Audit on Special Request/Audit as explained in this Annual Report at the discussion of Internal Audit Division 2019 Activity Report.

Hasil audit atas efektivitas sistem pengendalian internal dituangkan dalam Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal.

Dari hasil audit terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, Manajemen Perusahaan menilai aspek pengendalian internal perusahaan cukup memadai.

Results of audit on internal control system effectiveness is disclosed in Independent Auditor Report on Compliance with the Law and Internal Control.

Based on results of audit on internal control system effectiveness, the Company's Management considers that internal control aspect in the Company is fairly sufficient.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat (*community development*) dan lingkungan sehingga Perusahaan juga dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Saat ini, Perusahaan tengah berupaya untuk memenuhi ISO 26000, dengan mengikutsertakan dan menyadari keterkaitan antara tujuh area tanggung jawab sosial. Ketujuh area CSR tersebut adalah Tata Kelola, Hak Asasi Manusia (HAM), Praktik Ketenagakerjaan, Lingkungan, Praktik Bisnis yang Adil, Isu Konsumen, serta Pengembangan dan Pelibatan Komunitas.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi sebuah wadah bagi Perusahaan dalam membangun hubungan yang tumbuh bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi proyek dan konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perusahaan membaginya ke dalam 7 (tujuh) aspek, sesuai ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial.

The Company is committed to carry out Corporate Social Responsibility (CSR) activities that place more emphasis on the sustainability of community development and the environment, so that the Company can also continue to develop in a sustainable manner. At present, the Company is trying to fulfill ISO 26000, by including and being aware of the links between the seven areas of social responsibility. The seven CSR areas are Governance, Human Rights (HAM), Employment Practices, Environment, Fair Business Practices, Consumer Issues, and Community Development and Engagement.

Corporate Social Responsibility becomes a forum for the Company to build relationships that grow together with stakeholders, both from internal such as management and employees and from external parties such as the communities surrounding the project site and consumers. Regarding CSR implementation, the Company divides it into 7 (seven) aspects, in accordance with ISO 26000 on Social Responsibility Guidelines.



Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perusahaan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini, atau dalam Laporan Keberlanjutan yang disusun pada buku terpisah.

Further description regarding the implementation of CSR by the Company can be seen in Corporate Social Responsibility chapter of this Annual Report, or in the Sustainability Report compiled in a separate book.

PERKARA PENTING

LITIGATION

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2019 dibanding tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Legal Cases

Legal cases faced by the Company in 2019 compared to 2018 are as follows.

Permasalahan Hukum Legal Cases	2019		2018	
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal
Perusahaan The Company				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Finished and has permanent legal force	-	-	1	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	7	-	4	-
JUMLAH SUBTOTAL	7	-	5	-
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Finished and has permanent legal force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	-	-	-	-
JUMLAH SUBTOTAL	-	-	-	-
Entitas Anak Subsidiaries				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Finished and has permanent legal force	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	6	-	3	-
JUMLAH SUBTOTAL	6	1	3	-
Jumlah Keseluruhan Total	13	1	8	-

PERKARA PENTING
LITIGATION

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2019 atau telah dinyatakan selesai di tahun 2019 adalah sebagai berikut.

The details of legal cases faced by the Company in 2019 or which have been declared finished in 2019 are as follows.

PERKARA #01
CASE #01**Pihak yang Berperkara:**

1. CV Delima Jaya
2. PT PPA (turut tergugat II)

Pokok Perkara:

PERDATA No. 104/Pdt.G/2016 PN Bgr.

Status Perkara:

Putusan banding No. 523/PDT/2018/PT BDG tgl. 20 Desember 2018, amarnya:

- menerima permohonan banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tgl. 4 Oktober 2017, No. 104/Pdt/2016/PN Bgr;

KPKNL ajukan Kasasi di MA tgl. 08 Maret 2019.

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan:

-

Tindak Lanjut:

Monitor perkara

Litigation party:

1. CV Delima Jaya
2. PT PPA (co-defendant II)

Case Principle:

CIVIL No. 104/Pdt.G/2016 PN Bgr.

Case Status:

Decision on appeal No. 523/PDT/2018/PT BDG dated December 20, 2018:

- accept appeal;
- reinforce the decision of District Court dated October 4, 2017, No. 104/Pdt/2016/PN Bgr;

KPKNL filed an appeal at the Supreme Court on March 8, 2019.

Risks Faced by the Company and the Nominal Value of Claims/Lawsuits:

-

Follow-up:

Monitoring the case

PERKARA #02
CASE #02**Pihak yang Berperkara:**

1. Anthony Handoko
2. PT PPA (tergugat I)

Pokok Perkara:

PERDATA No. 279/Pdt.G/PN.Jkt Sel

Status Perkara:

Putusan tgl. 07 Des 2017, amar putusannya:

- Mengabulkan gugatan dari Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah SHM No. 1065/Kemanggisan

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan:

-

Tindak Lanjut:

Monitor perkara

Litigation party:

1. Anthony Handoko
2. PT PPA (defendant I)

Case Principle:

CIVIL No. 279/Pdt.G/PN.Jkt Sel

Case Status:

Putusan tgl. 07 Des 2017, amar putusannya:

- Grant the plaintiff's claim in full;
- Declare the Defendants have committed an illegal act.
- Declare the Plaintiff is the legal owner of SHM land plot No. 1065/Kemanggisan

Risks Faced by the Company and the Nominal Value of Claims/Lawsuits:

-

Follow-up:

Monitoring the case

PERKARA #03
CASE #03

Pihak yang Berperkara:

1. Syafruddin A. Temenggung
2. PT PPA (turut tergugat II)

Pokok Perkara:

PERDATA No. 637/Pdt.G/2018 PN Jkt Pst

Status Perkara:

Tgl. 24 Juli 2018, telah ada putusan akhir dari PN Jakarta Pusat, yang amarnya:

- mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Note:

- Gugatan tidak diterima dikarenakan eksepsi kompetensi absolut dari Kemenkeu dikabulkan

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan:

-

Tindak Lanjut:

-

Litigation party:

1. Syafruddin A. Temenggung
2. PT PPA (co-defendant II)

Principal Case:

CIVIL No. 637/Pdt.G/2018 PN Jkt Pst

Case Status:

On July 24, 2018, there was a final decision from Central Jakarta District Court:

- granted Defendant I's exception in part;
- declared the Plaintiff's claim cannot be accepted;

Note:

- The lawsuit was not accepted because the absolute competence exception from the Ministry of Finance was granted

Risks Faced by the Company and the Nominal Value of Claims / Lawsuits:

-

Follow-up:

-

PERKARA #04
CASE #04

Pihak yang Berperkara:

1. PT Batam Island Marina (dalam pailit)
2. PT PPA (selaku kreditor)

Pokok Perkara:

KEPAILITAN No. 16/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn

Status Perkara:

PT BIM dinyatakan pailit tgl. 24 Feb 2019.

Kurator:

- Deni Amsari Purba, SH, LLM
- Hakim Pengawas:
- Masrul, SH, MH.

Tagihan PPA: Rp. 305.334.176.892,-

- PPA telah ajukan permohonan lelang atas aset BIM yang terletak di Desa Kubutambahan, Singaraja, Kab. Buleleng, Bali.

- Rencana lelang di tanggal 31 Juli 2019 dibatalkan oleh PPA.

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan:

-

Tindak Lanjut:

-

Litigation party:

1. PT Batam Island Marina (in bankruptcy)
2. PT PPA (as a creditor)

Principal Case:

Bankruptcy No. 16/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn

Case Status:

PT BIM was declared bankrupt on February 24, 2019.

Curator:

- Deni Amsari Purba, SH, LLM
- Supervisor Judge:
- Masrul, SH, MH.

PPA Invoice: Rp305,334,176,892

- PPA has submitted an auction request for BIM's assets located in Kubutambah Village, Singaraja, Buleleng Regency, Bali.
- The auction plan for July 31, 2019 was canceled by PPA.

Risks Faced by the Company and the Nominal Value of Claims / Lawsuits:

-

Follow-up:

-

PERKARA PENTING
LITIGATIONPERKARA #05
CASE #05**Pihak yang Berperkara:**

1. PT Kertas Leces (Persero)
2. PT PPA (selaku kreditor)

Pokok Perkara:

1. KEPAILITAN No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamiaan/2018/PN Niaga Jo, No. 05/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN Sby
2. Keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit

Status Perkara:

1. PT Kertas Leces (KL) dinyatakan pailit pada tanggal 25 september 2018.
 - Tim Kurator KL: Anggi Gitaharani; Rayi Baskara dan Febry Arisandi, SH.
 - Hakim Pengawas: BP. Sarwedi, SH

Tagihan PPA: Rp104.706.182.222,-

- Tim kurator telah menjual persediaan kertas pabrik kl di leces. namun tidak laku.
- Tim kurator akan melakukan lelang atas mesin-mesin, persediaan dll pada tanggal 02 agustus 2019 di KPKNL jemmer, jawa timur.

Litigation party:

1. PT Kertas Leces (Persero)
2. PT PPA (as a creditor)

Principal Case:

1. Bankruptcy No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamiaan/2018/PN Niaga Jo, No. 05/Pdt.Sus/PKPU/2014/ PN Sby
2. Objection on the List of Bankruptcy Property Distribution

Case Status:

1. PT Kertas Leces (KL) was declared bankrupt on September 25, 2018.
 - KL Curator Team: Anggi Gitaharani; Rayi Baskara and Febry Arisandi, SH.
 - Supervisor Judge: BP. Sarwedi, SH

PPA Invoice: Rp.104,706,182,222

- The curator team has sold kl paper mill supplies in leces but did not succeeded.
- The curator team will auction the machineries, supplies, others on August 2, 2019 at KPKNL Jember, East Java.

PERKARA #06
CASE #06**Pihak yang Berperkara:**

1. PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP)
2. PT PPA (selaku kreditor)

Pokok Perkara:

PKPU No. 41/Pdt.Sus-PKPU/2019 PN Niaga Surabaya, Jawa Timur

Status Perkara:

Perpanjangan PKPU tetap selama 45 hari.

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan:

-

Tindak Lanjut:

-

Litigation party:

1. PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP)
2. PT PPA (as a creditor)

Principal Case:

PKPU No. 41/Pdt.Sus-PKPU/2019 PN Niaga Surabaya, East Java

Case Status:

PKPU extension remains for 45 days.

Risks Faced by the Company and the Nominal Value of Claims / Lawsuits:

-

Follow-up:

-

PERKARA #05 PERKARA #05

2. Penjualan oleh kreditor separatis (PPA):
 - Tgl. 11 desember 2018, telah dilaksanakan lelang atas jaminan milik KL, HGB NO. 227/kramat pela, terletak di Jalan Radio IV no. 5, Jakarta Selatan melalui pejabat lelang KPKNL jakarta V. telah laku terjual Rp11.495.000.000,-
 - Pemenang lelang : PT PPA Kapital.
 - Terkait daftar pembagian harta pailit tertanggal 26 april 2019 ("daftar pembagian"), yang dibuat oleh tim kurator diajukan perlawanan atau keberatan oleh ppa selaku pelawan.
 - » dalam daftar pembagian, PPA memperoleh Rp1.291.375.490,-
 - » putusan keberatan tgl. 29-08-2019: atas keberatan dari PPA dinyatakan ditolak.
 - PPA melalui kuasa hukum AZP *legal consultant* mengajukan kasasi di Mahkamah Agung tgl. 06 sept 2019.

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan:

-

Tindak Lanjut:

Monitoring putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI.

2. Sales by separatist creditor (PPA):
 - On December 11, 2018, an auction was held on KL's HGB NO. 227/kramat pela, located at Jalan Radio IV no. 5, South Jakarta through the auction official KPKNL jakarta V, has been sold at the amount of Rp11,495,000,000.
 - The auction winner: PT PPA Kapital.
 - Regarding the list of bankruptcy assets distribution dated April 26, 2019 ("distribution list"), which was made by the curator team, there was a resistance or objection by PPA as the contender.
 - » In the distribution list, PPA received Rp1,291,375,490
 - » Verdict on objection dated 08-29-2019: objection from PPA was declared rejected.
 - PPA through the legal counsel AZP legal consultant filed an appeal in the Supreme Court on Sept 06, 2019.

Risks Faced by the Company and the Nominal Value of Claims / Lawsuits:

-

Follow-up:

Monitoring the cassation decision in the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

PERKARA #07 CASE #07

Pihak yang Berperkara:

1. PT Petro Energy
2. PT PPA (selaku kreditor)

Pokok Perkara:

PKPU No. 202/Pdt.Sus-PKPU/2019 PN Niaga Jakarta Pusat

Status Perkara:

Putusan tgl. 16 Januari 2020, Perpanjangan PKPU Tetap selama 43 (empat puluh tiga) hari.

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan:

-

Tindak Lanjut:

-

Litigation party:

1. PT Petro Energy
2. PT PPA (as a creditor)

Principal Case:

PKPU No. 202/Pdt.Sus-PKPU/2019 PN Niaga, Central Jakarta

Case Status:

Verdict on January 16, 2020, Permanent PKPU Extension for 43 (forty-three) days.

Risks Faced by the Company and the Nominal Value of Claims / Lawsuits:

-

Follow-up:

-

PERKARA PENTING
LITIGATION**Perkara yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Selama tahun 2019 tidak terdapat perkara yang dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Cases Faced by Members of Board of Commissioners and Board of Directors

In 2019, there were no cases faced by current Members of Board of Commissioners and Board of Directors.

Pengungkapan Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Selama tahun 2019, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan sebagai induk, kepada entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas terkait.

Disclosure of Administrative Sanctions by Related Authorities

In 2019, there were no material administrative sanctions that affected the Company's business continuity and there were also no administrative sanctions imposed on the Company as the parent entity, subsidiaries, members of Board of Directors or members of Board of Commissioners by the relevant authorities.

Perusahaan Entities	Sanksi Administratif Administrative Sanctions
PERUSAHAAN COMPANY	
Perusahaan The Company	tidak ada none
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	tidak ada none
ENTITAS ANAK SUBSIDIARIES	
PT PPA Finance	tidak ada none
PT PPA Kapital	tidak ada none
PT Nindya Karya	tidak ada none
PT Duta Mentari Raya	tidak ada none
PT Sipra Kemasan Internasional	tidak ada none
PT Magnesium Gosari Internasional	tidak ada none
PT Bondi Syad Mulia	tidak ada none
PT Nindya Beton	tidak ada none

Perkara Penting di Luar Aspek Hukum

Di sepanjang tahun 2019, Perusahaan tidak terdapat perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan sebagai organisasi, entitas anak, Dewan Komisaris maupun Direksi.

Important Cases Outside the Legal Aspect

Throughout 2019, the Company did not have any important case outside the legal aspect that involved the Company as an organization, subsidiaries, Board of Commissioners or Board of Directors.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

CORPORATE INFORMATION AND DATA ACCESS

Dalam rangka memudahkan komunikasi dan akses para pemangku kepentingan termasuk informasi terbaru mengenai laporan kondisi keuangan, non-keuangan, dan data Perusahaan lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban transparansi serta akuntabilitas perusahaan, Perusahaan senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengelolaan media komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga sebagaimana diatur dalam pada Pedoman Kebijakan Perusahaan.

Beberapa akses Informasi yang disediakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komunikasi Eksternal

- **Website**
Salah satu media utama yang digunakan oleh Perusahaan dalam menyajikan informasi adalah melalui *website* Perusahaan <http://www.ptppa.com> yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Informasi yang tersedia antara lain:
 1. Struktur grup Perusahaan;
 2. Profil Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.
 3. Pemegang saham;
 4. Informasi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
 5. Informasi mengenai tata kelola perusahaan;
 6. Informasi pelaksanaan RUPS.
- **Surat Elektronik**
Perusahaan secara terbuka menyiapkan jalur komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui surat elektronik untuk mengakomodir berbagai pertanyaan terkait dengan Perusahaan dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan pada email: corpsec@ptppa.com.

In order to ease communication and access for the stakeholders including up-to-date information about financial and non-financial condition report, and other corporate data related to accountability and transparency of the Company, the Company always updates information dissemination supporting media and infrastructures.

Corporate Secretary is in charge in coordinating management of communication media both electronic and printed media, therefore, integrity and credibility of the Company's information to public can be maintained as regulated in the Corporate Policy Manual.

Some information access provided by the Company is as follows:

External Communication

- **Website**
One of primary media used by the Company in presenting the information is through the Company's website at <http://www.ptppa.com> both in Indonesian (Bahasa) and English. The information includes:
 1. Corporate group structure;
 2. Profile of Board of Commissioners and Board of Directors.
 3. Shareholders;
 4. Information about Annual Report and Financial Statements.
 5. Information about corporate governance.
 6. Information about GMS implementation.
- **E-mail**
The Company has prepared communication with the stakeholders transparently through electronic mail to accommodate various inquiries related to the Company by contacting Corporate Secretary at email: corpsec@ptppa.com.

- **Hubungan dengan Media Massa**
Perusahaan memuat informasi penting yang perlu diketahui oleh publik sebagai bentuk transparansi bagi para pemangku kepentingan dalam surat kabar berperedaran nasional. Selain itu Perusahaan juga selalu menjaga hubungan baik dengan media massa untuk memberikan pembaruan informasi penting Perusahaan dengan melakukan kunjungan media dan melalui *workshop*. Selama tahun 2019, Perusahaan telah melakukan beberapa kunjungan baik ke kantor media cetak maupun media elektronik.
- **Mass Media**
The Company publishes important information for the public in newspapers with national circulation as means of transparency to the stakeholders. In addition, the Company also maintains good relationship with the media to update important information about the Company through media visit and workshop. Throughout 2018, the Company had visited various media offices, both printed and electronic media.
- **Siaran Pers**
Perusahaan secara aktif mempublikasikan setiap kejadian atau kegiatan penting dalam bentuk siaran pers yang disampaikan melalui media dan *website* Perusahaan. Sepanjang tahun 2019, Perusahaan menerbitkan 14 siaran pers.
- **Press Release**
The Company actively publishes every important event or activity in press release through press release published in media, website of the Company and the regulators. Throughout 2019, the Company published 1 press releases.

Nomor Number	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Title of Press Release
PR-01/PPA/CS/0419	1 April 2019 April 1, 2019	Menteri BUMN Angkat Direktur Bisnis PT PPA Minister of SOEs Appointed Business Director of PT PPA
PR-02/PPA/CS/0419	21 April 2019 April 21, 2019	Komitmen PT PPA Membangun Negeri di Kabupaten Kepulauan Mentawai PT PPA's Commitment to Build the Nation in the Mentawai Islands District
Siaran Pers Bersama	24 Mei 2019 May 24, 2019	Tiga BUMN Tebar Berkah di Ranah Minang Three SOEs Spread Blessings in Minangah
PR-03/PPA/CS/0519	30 Mei 2019 May 30, 2019	Mudik Gratis Bersama PT PPA Ke Lampung, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta Free homecoming with PT PPA to Lampung, Central Java, and Yogyakarta Special Region
PR-04/PPA/CS/0619	2 Juni 2019 June 2, 2019	PT PPA Sediakan 1.500 Paket Pangan Murah Idul Fitri 1440H di Jawa Timur PT PPA Provided 1,500 Eid Al-Fitr 1440H Cheap Food Packages in East Java
PR-05/PPA/CS/0719	23 Juli 2019 July 23, 2019	Menteri BUMN Lengkapi Formasi Direksi PT PPA Minister of SOEs Completed the Formation of Board of Directors of PT PPA
PR-06/PPA/CS/0819	5 Agustus 2019 August 5, 2019	PT PPA Telah Menyalurkan Rp78 Miliar Dana Program Kemitraan PT PPA Has Disbursed Rp78 Billion in Partnership Program Funds
PR-07/PPA/CS/0919	26 September 2019 September 26, 2019	3 BUMN Bersinergi Bangun Sekolah di Sulawesi Tengah Pascagempa dan Tsunami 3 SOEs Work Together to Build Schools in Central Sulawesi in Post-Earthquake and Tsunami
PR-08/PPA/CS/1019	18 Oktober 2019 October 18, 2019	Pemprov Jawa Barat Menggandeng PT PPA dan Bank BJB dalam Rangka Pengembangan dan Revitalisasi BUMN di Jawa Barat West Java Provincial Government Joined PT PPA and BJB Bank in the Framework of SOEs Development and Revitalization in West Java
PR-09/PPA/CS/1019	24 Oktober 2019 October 24, 2019	Menuju <i>National Asset Management Company</i> Towards the National Asset Management Company

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
CORPORATE INFORMATION AND DATA ACCESS

Nomor Number	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Title of Press Release
PR-10/PPA/CS/1119	14 November 2019 November 14, 2019	PPA Akan Perkuat Investasi dan Pengelolaan NPL Himbara di Tahun 2020 PPA Will Strengthen Investment and Management of Himbara NPL in 2020
PR-11/PPA/CS/1119	21 November 2019 November 21, 2019	PT PPA Tanam Ratusan Mangrove di Pesisir Utara Jakarta PT PPA Planted Hundreds of Mangroves in North Coast of Jakarta
PR-12/PPA/CS/1219	3 Desember 2019 December 3, 2019	PT PPA Dipercaya Bank Indonesia Terbitkan SBK PT PPA is Trusted by Bank Indonesia to Issue SBK
PR-13/PPA/CS/1219	13 Desember 2019 December 13, 2019	Perkuat Jaringan Internasional, PT PPA Jalin Kerja sama dengan Korea Asset Manajemen Corporation (KAMCO) Strengthening International Networks, PT PPA Collaborates with Korea Asset Management Corporation (KAMCO)

- Laporan Tahunan**
 Perusahaan menyediakan sarana informasi melalui Laporan Tahunan atau *Annual Report* yang disusun setiap tahun. *Annual Report* disampaikan kepada pemegang saham, *regulator* serta seluruh *stakeholders* lainnya.
- Annual Report**
 The Company provides information channel through Annual Report that is published every year. The Annual Report is distributed to the shareholders, regulator and other stakeholders.

Tahun Year	Tema Theme
2013	<i>Striving in the Face of Challenges</i>
2014	<i>Challenging The Boundaries Creating The Future</i>
2015	<i>Strengthening the Foundation Penetrating tht Market</i>
2016	<i>Creating and Sustaining Value: Uncovering the Hidden Potentials</i>
2017	<i>Optimizing Strengths Into Excellence, Enhancing Capacity for Growth</i>
2018	<i>Repositioning For the Future Growth</i>
2019	<i>Strengthening the Strength</i>

- Laporan Keberlanjutan**
 Perusahaan juga menyediakan sarana informasi mengenai kegiatan sosial dan kemasyarakatan Perusahaan secara menyeluruh melalui Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report*.
- Sustainability Report**
 The Company also provides information channel about the Company's social and community activities comprehensively in Sustainability Report.

Tahun Year	Tema Theme
2014	<i>Building Commitment Towards Sustainability</i>
2015	<i>Creating Shared Value. Sustaining Our Future</i>
2016	<i>Creating and Sustaining Value for a Better Future</i>
2017	<i>Sustaining Growth with Strong Values of Responsibilities</i>
2018	<i>Achieving Excellence for Sustainable Growth</i>
2019	<i>Continue to Grow Incresing Benefits</i>

- **Laporan Manajemen**

Perusahaan telah menyampaikan informasi-informasi yang relevan dengan menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Pemegang Saham.

- **Management Report**

In terms of report submission to the Shareholders, the Company has reported relevant information to the Shareholders by submitting Quarter and Annual Management Report to the Shareholders.

Komunikasi Internal

Perusahaan menyediakan sarana komunikasi yang menjadi sarana diskusi bagi karyawan dengan manajemen yang secara berkala dilakukan, baik secara korporasi maupun per masing-masing unit kerja.

- ***Town Hall Meeting***

Perusahaan menyelenggarakan pertemuan secara berkala yang melibatkan interaksi langsung antara manajemen dengan seluruh karyawan Perusahaan, untuk membahas pencapaian target Perusahaan serta membahas isu-isu terkini Perusahaan.

- ***Meet and Greet***

Perusahaan menyelenggarakan *talkshow* yang dihadiri oleh seluruh karyawan Perusahaan dengan mengundang narasumber dari berbagai instansi negara maupun lainnya untuk menjadi pembicara dan memaparkan hal-hal yang bersifat inspiratif. *Meet and Greet* ditutup dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan karyawan Perusahaan dengan maksud untuk menciptakan *talkshow* yang interaktif.

- **Peringatan Hari Besar Nasional**

Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara senantiasa menghargai jasa para pahlawan dengan cara melaksanakan Upacara, seperti Upacara memperingati Hari Pahlawan, Upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Upacara memperingati Hari Kartini dan lainnya. Adapun yang menjadi petugas pelaksana adalah dari karyawan Perusahaan.

Internal Communication

The Company provides communication channel as discussion forum between employees and management periodically either at corporate or working unit level.

- **Town Hall Meetings**

The Company organizes regular meeting which involves direct interaction between the Company's Management and all employees to discuss the Company's target achievement and current issues experienced by the Company.

- **Meet and Greet**

The Company organizes talks attended by all employees of the Company by inviting people from various Government's institution or other organizations as speakers and presents inspirational topics. The Meet and Greet is closed with question & answer session between the speakers and employees with purpose to create an interactive talk.

- **National Holiday Celebration**

As a State-Owned Enterprise, the Company respects the national Holiday and dedication of the National Heroes through various ceremonies such as National Heroes Day Ceremony, Independence Day Ceremony, Kartini Day Ceremony and other ceremonies. The ceremony officers are appointed from the Company's employees.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
CORPORATE INFORMATION AND DATA ACCESS**Media Sosial**

Perusahaan menyampaikan informasi mengenai kegiatan Perusahaan kepada masyarakat melalui media sosial yaitu *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter*.

**Social Media**

The Company disseminates information about the Company's activity to public via social media such as Facebook, Instagram and Twitter.



PT PPA (Persero)



PTPPAPersero

PT Perusahaan
Pengelola Aset (Persero)
Komunikasi Langsung

Adapun permintaan komunikasi secara langsung dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan dengan alamat di bawah ini.

PT PPA

Gedung Sampoerna Strategic Square North Tower 9th – 12 Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930
Telepon: +62 21 5798 2222
Faksmili: +62 21 577 2443
E-mail: corpsec@ptppa.com

Dalam menyampaikan/mengeluarkan informasi secara umum, Perusahaan telah mengikuti prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-33/PPA/0516 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Perusahaan. Pada tahun 2019, tidak terjadi kejadian/kasus atau temuan Divisi SPI terkait pelanggaran seperti kebocoran informasi yang bersifat rahasia.

Direct Communication

Communication inquiry can be delivered directly to Corporate Secretary at following address:

PT PPA (Persero)

Sampoerna Strategic Square Building North Tower 9th – 12th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930
Phone: +62 21 5798 2222
Fax: +62 21 577 2443
E-mail: corpsec@ptppa.com

In submitting/issuing information publicly, the Company has followed the procedure as stipulated in the Board of Directors Decree No. SK-33/PPA/0516 concerning Corporate Information Disclosure Policy. In 2019, there was no event/case or finding from Internal Audit Division related to violation, such as confidential information leak.

Ragam Media Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan**Variety of Media to Shareholders and Stakeholders**

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

Below is a table describing the variety of communication media used by the Company to convey data and information related to operational activities, business processes, and performance achievements of the Company.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Bentuk-bentuk Media Media forms
Regulator Regulators	Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Manajemen Financial Reports, Annual Reports, Management Reports
Pemegang Saham Shareholders	Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Manajemen Financial Reports, Annual Reports, Management Reports
Investor Investors	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports
Lembaga Publik Public Institutions	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports
Konsumen Consumers	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports
Karyawan Employees	Buletin Internal, Intranet Internal Bulletin, Intranet
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similar Companies	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports
Mitra Kerja dan Rekanan Partners	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports
Organisasi Profesi Professional Organizations	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports
Masyarakat/Ummum General Public	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports

Situs Web Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.

The Company's website is not included in the various media above, because it is open, unlimited and accessible to anyone.

TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI

TECHNOLOGY AND INFORMATION GOVERNANCE



Teknologi Informasi (TI) memegang peranan penting dalam memastikan keberlangsungan usaha Perusahaan untuk menjamin pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang cepat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

Information Technology (IT) has an important role in ensuring the Company's business continuity to ensure prompt, effective and continuous decision-making and formulation process.

Melalui penerapan teknologi informasi (TI) yang tepat, akan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi Perusahaan. Karena itu, Perusahaan yakin bahwa dengan mendayagunakan teknologi secara efisien, tepat waktu, dan *cost effective*, dapat menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas, andal, dan aman. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi sarana penunjang keberlanjutan usaha sekaligus pendukung efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan kepada konsumen.

Tujuan pengembangan TI di Perusahaan antara lain untuk mendukung pengelolaan Perusahaan secara strategis; menyediakan dan mengembangkan proses bisnis yang efisien dan efektif dengan senantiasa memperhatikan keselarasan dengan tujuan perusahaan; memastikan pelaksanaan proses manajemen risiko TI yang kuat dan komprehensif; memastikan penyediaan layanan berkualitas berbasis teknologi informasi yang andal dan inovatif; mendukung sekaligus menjadi faktor pendorong untuk pengembangan usaha Perusahaan.

Menyikapi pesatnya dinamika industri dan teknologi, Perusahaan senantiasa mengembangkan sistem teknologi informasi Perusahaan secara terarah dan terukur guna mendukung strategi bisnis Perusahaan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan dan pengembangan TI di Perusahaan mengacu pada suatu sistem tata kelola yang dimuat dalam *Master Plan* Teknologi Informasi periode 2015 - 2019, yang dikembangkan secara bersinergi antar sesama BUMN.

Effective Information Technology (IT) implementation will provide significant competitive advantage for the Company. Therefore, the Company believes by utilizing technology efficiently, timely and cost effective, will create high-quality, reliable and safety products and services. In addition, use of technology will also support business sustainability as well as efficient operational activity and quality of services delivered to the customers.

The purpose of IT development in the Company among others to support Company's management strategically; provide and develop efficient and effective business process by always considering suitability with the Company's objectives; ensure robust and comprehensive IT risk management process; ensure provision of high-quality service based on reliable and innovative information technology; support as well as driving factor for the Company's business development.

Responding to industrial and technology dynamics, the Company always develop information technology system in the Company in well-directed and measured ways to support the Company's business strategy. This also becomes one of the ways to implement Good Corporate Governance (GCG) principles. In its practice, IT application and development in the Company adapts a governance system as disclosed in Information Technology Master Plan for 2015 - 2019 period, developed as synergy among SOEs.

Implementasi Pengembangan Teknologi Informasi**Information
Implementation****Technology****Development**

Hadir sebagai kebutuhan yang fundamental dalam menjalankan kegiatan operasional, Perusahaan mengoptimalkan pemanfaatan TI di seluruh lini organisasi sehingga pergerakan bisnis dapat berjalan cepat dan tepat. Dalam pengembangan TI, Perusahaan juga mempertimbangkan kepentingan dan manfaat jangka panjang sesuai dengan kebutuhan segmen bisnis perusahaan di lapangan sekaligus rencana kerja Perusahaan ke depan.

Sebagai bagian dari upaya perkembangan berkelanjutan tersebut, Grup TI Perusahaan menyusun program kerja berdasarkan RKAP 2018 dan *Master Plan* TI untuk tahun 2015 – 2019. Landasan lain yang digunakan adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK-18/ PPA/0315 tanggal 24 Maret 2015 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi serta *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, sepanjang 2019 pengembangan layanan TI diperuntukkan bagi seluruh insan Perusahaan. Implementasi *Core System* merupakan salah satu implementasi aplikasi yang cukup signifikan mendukung unit bisnis dalam pengelolaan kewajiban debitur sampai dengan penagihannya.

Pada tahun 2019 telah berhasil diimplementasikan PPA *Mobile* yang merupakan suatu *platform* aplikasi berbasis IOS dan *Android* untuk menyatukan beberapa aplikasi yang sebelumnya berdiri sendiri yaitu aplikasi *Meeting Room* (untuk *booking* ruang *meeting*), *Carpool* (untuk *booking* kendaraan dinas) serta *Helper* (untuk permintaan bantuan *Office Boy/Cleaning Service*) sehingga dapat diakses dari satu aplikasi saja yaitu PPA *Mobile*.

Aplikasi lain yang telah masuk ke PPA *Mobile* adalah Aplikasi Disposisi Surat dan HRIS untuk administrasi SDM. Aplikasi HRIS versi juga telah diperbaharui ke versi 6 dengan antar muka yang lebih memudahkan *user* dan telah dilengkapi akses secara *mobile*.

Infrastruktur *Data Center* PPA terus dikembangkan pada tahun 2019 dengan penambahan *Storage Area Network* (SAN) yang dilengkapi *redundant fibre switch* sehingga mempertangguh infrastruktur *server Production* PPA.

As a fundamental requirement in running operational activities; the Company optimizes IT applications in entire organization line so that business operations can run faster and more accurate. In IT development, the Company also considers long-term interest and benefit based on requirements of the Company's business segments in the field as well as the Company's future working plan.

As part of sustainable development plan, IT Group has designed working program based on 2018 Company's budget plan and Information Technology Master plan for 2015-2019. Another prevailing framework is Board of Directors Decree No. SK-18/PPA/0315 dated March 24, 2015 concerning Information and Communication Technology Governance Policy and Standard Operating Procedure (SOP).

During its development throughout 2019, the IT service development is dedicated for people all over the Company. Core System Implementation is one of application that is quite significant to support business units in managing debtor obligations until billing.

In 2019, PPA *Mobile* was successfully implemented, i.e. an IOS and Android-based application platform to merge several applications that were previously independent, namely Meeting Room application (for meeting room booking), Carpool (for official vehicles booking) and Helper (for requests for Office assistance/ Cleaning Service), hence can be accessed from just one application, PPA *Mobile*.

Another application that has entered to PPA *Mobile* is the Letter Disposition and HRIS Application for HC administration. The HRIS application version has also been updated to version 6 with an interface that makes it easier for users and has been equipped with mobile access.

PPA *Data Center* Infrastructure continues to be developed in 2019 with the addition of a Storage Area Network (SAN), equipped with redundant fiber switches so as to strengthen PPA Production server infrastructure.

TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI
TECHNOLOGY AND INFORMATION GOVERNANCE

Begitu juga dengan *Cloud* PPA terus dikembangkan pada tahun 2019 untuk mendukung unit bisnis yang *mobile* sehingga data dapat diakses kapan saja dan dimana saja serta dengan penambahan *redundant backup Network Attached Storage* (NAS) di sisi DRC sehingga menjamin keamanan dan ketersediaan data.

Dalam rangka menyongsong era industri 4.0 dan kegiatan karyawan PPA yang semakin *mobile* maka konsep *mobile office* mulai diterapkan. Implementasi *Office 365* yang didukung dengan peremajaan infrastruktur *wifi* dan perangkat pendukungnya di seluruh lantai kerja PPA sehingga karyawan dapat bekerja secara *anytime, anywhere, any device*.

Pada tahun 2019 diputuskan untuk dilakukan *Collocation Data Center*, sehingga akan lebih memudahkan PPA dikemudian hari apabila terjadi pengurangan atau *re-layout* ruang kerja.

Pengembangan dari aspek aplikasi juga terus dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan.

Pengembangan rutin lainnya telah terlaksana dengan baik, meliputi pengelolaan layanan Prima – *Helpdesk* IT, operasional *data center* dan *disaster recovery center*, pengelolaan infrastruktur jaringan dan komunikasi, penyediaan sarana dan prasarana kerja karyawan baru, serta pengelolaan situs *website* perusahaan (<http://www.ptppa.com>) dan intranet perusahaan (PPAWorld).

Satu hal yang tidak kalah penting adalah pengembangan sumber daya manusia. Sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan pengembangan berupa *training* maupun *workshop* untuk pengembangan *technical skill* maupun *soft skill* sumber daya manusia di unit Teknologi Informasi.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Menjawab persaingan usaha yang terus meningkat dan semakin kompetitif, penerapan tata kelola yang baik juga diwujudkan Perusahaan dalam pengembangan TI. Pada praktiknya, Perusahaan senantiasa melakukan pemantauan berkala serta pemenuhan kepatuhan terhadap aturan-aturan sebagaimana yang termuat dalam Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN

Likewise, PPA Cloud continues to be developed in 2019 to support mobile business units so that data can be accessed anytime and anywhere and with the addition of redundant backup Network Attached Storage (NAS) on DRC side so as to guarantee data security and availability.

To welcome the industrial era 4.0 and the activities of PPA employees who are increasingly mobile, the concept of mobile office has begun to be applied. The Office 365 implementation is supported by the rejuvenation of wifi infrastructure and supporting devices throughout PPA working floors so that employees can work anytime, anywhere, any device.

In 2019, it was decided to execute Collocation Data Center, so that it would be easier for PPA in the future in the case of reduction or relay layout of workspace.

The development for applications is done optimally and continuously in order to support the Company's business growth.

Other regular developments are also well-executed including Service Excellence service – IT Helpdesk, data center and disaster recovery center operation, network and communication infrastructures management, provision of working facilities and infrastructures for new employees as well as the management of corporate website (<http://www.ptppa.com>) and intranet (PPAWorld).

One thing that is no less important is the development of human capital. Throughout 2019, development has been carried out in the form of training and workshop for the development of technical skills and soft skills of human capital in the Information Technology unit.

Information Technology Governance

In answering a fiercer and more competitive business competition, good governance implementation is also carried out by the Company on IT development. In its practice, the Company always performs periodic monitoring and compliance with regulations as disclosed in SOEs IT Management Formulation Manual according to Ministerial Regulation PER-2/MBU/2013 concerning

sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara yang diterbitkan tanggal 18 Februari 2013.

Demi pelaksanaan sesuai dengan rencana, Perusahaan menyusun *Masterplan* Teknologi Informasi sebagai *blue print* pengembangan TI Perusahaan selama tahun 2015-2019. Formulasi *masterplan* tersebut diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) guna menentukan strategi bisnis Perusahaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang solid, Perusahaan berharap dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan di masa mendatang.

Struktur Organisasi dan Fungsi TI

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Perusahaan berada di bawah Divisi Teknologi Informasi dan Operasi Bisnis, Direktorat Keuangan dan Dukungan Kerja. Tugas pokok Grup TI berdasarkan No. SK-57/PPA/0919 pasal 236 adalah menyediakan dan mengoptimalkan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi, sistem aplikasi dan pengelolaan data.

Dalam melaksanakan tugasnya, Grup TI menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan optimalisasi dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem aplikasi dan pengelolaan data;
2. Pelaksanaan penyediaan dan optimalisasi dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
3. Pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem aplikasi serta melakukan penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Penyediaan dan pelaksanaan pengamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi termasuk melalui proses pengamanan dan duplikasi (*back up*) data secara berkala dan penyediaan sarana untuk penanggulangan kondisi bencana (*disaster recovery plan*).

Guideline on Information Technology Management Blueprint at State-Owned Enterprise issued on February 18, 2013.

To ensure implementation is as scheduled, the Company has prepared Information Technology Masterplan as IT Development Blue Print for 2015-2019. The masterplan formulation is aligned with Long- term Corporate Plan (RJPP) to determine the Company's business strategy towards sustainable growth. With a solid Information and Communication Technology support, the Company wishes to provide added-value to Stakeholders in the future.

IT Organizational Structure and Function

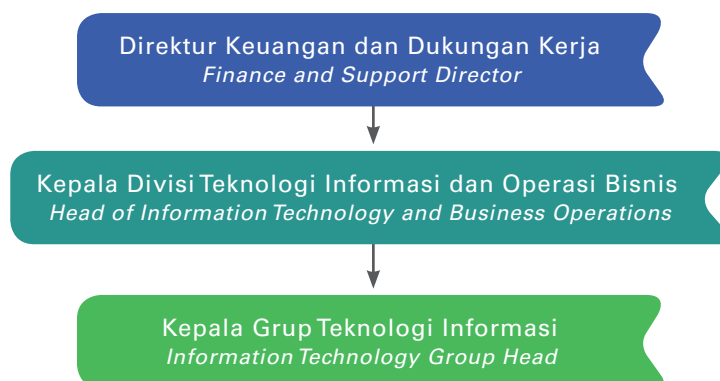
Information and Communication Technology (ICT) Management in the Company is under Information Technology & Business Operations Division, Finance & Support Directorate. According to SK-39/PPA/0809 Article 236, the main duty of the Information Technology Group is to provide and optimize support from information and technology infrastructure, application system and data management.

In performing its duties, the IT Group exercises the following functions:

1. Preparing policies related to provision and optimization of information and communication technology, application system and data management;
2. Implementation of information and communication technology infrastructure support provision and optimization;
3. Implementation of application system provision and development as well as information technology and communication research and development;
4. Provision and implementation of information and communication technology infrastructure security through data security and duplication (*back up*) process periodically and alleviation of disaster recovery plan mechanism.

TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI
TECHNOLOGY AND INFORMATION GOVERNANCE

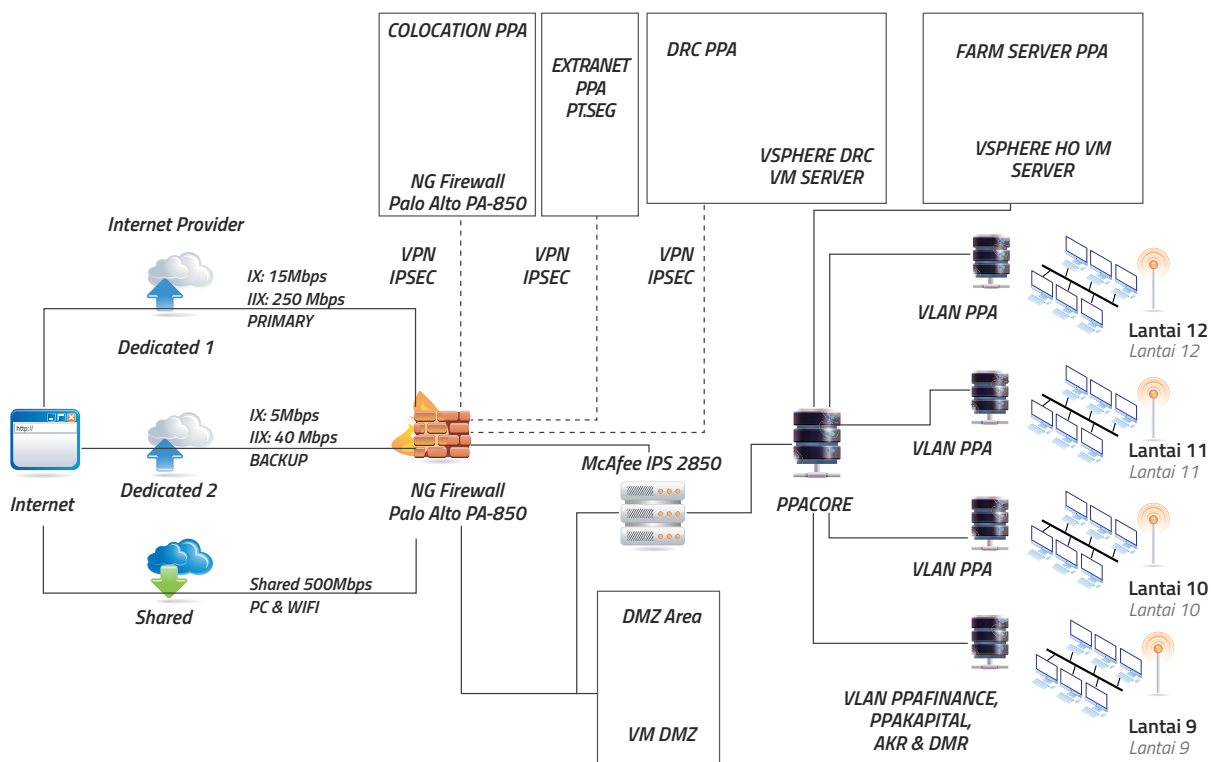
Struktur Organisasi Grup TI selengkapnya adalah sebagai berikut:
Information Technology Group Organization Structure is illustrated below:



Arsitektur Infrastruktur TIK Perusahaan

Corporate ICT Infrastructure Architecture

Infrastruktur TIK Perusahaan 2019 adalah sebagai berikut:
The Corporate ICT Infrastructure in 2019 is as follows:



Kondisi infrastruktur TIK PPA 2019 adalah:

1. PT PPA memiliki sebuah *data center* yang terletak di lantai 10 gedung Sampoerna Strategic Square dan menjadi sumber utama pengelolaan informasi bagi PT PPA.
2. PT PPA juga memiliki sebuah *collocation* 1 rak 42U di *data center* PT NAPINFO yang terletak di Gedung Annex (akan dipindahkan ke Gedung Cyber-1) yang akan berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi bagi PT PPA menggantikan *data center* di gedung Sampoerna.
3. Perangkat jaringan PT PPA memakai standar topologi jaringan *Cisco Campus Network* dengan *Virtual Trunking Protocol* yang mendistribusi segmentasi jaringan (vlan) berdasarkan struktur organisasi di PT PPA. Segmentasi ini menjaga sistem keamanan agar lebih maksimal.
4. Perangkat keamanan jaringan PT PPA menggunakan dua jenis perangkat yaitu *Intrusion Prevention System* (IPS) dan *Next Generation Firewall* yang berfungsi melindungi jaringan komputer internal dari serangan *cyber*, melindungi *Virtual Private Network* (VPN) dengan enkripsi data ke jaringan DRC dan *partner* serta meningkatkan kualitas IP telekomunikasi dengan *Quality of Services* (QoS) yang dapat memprioritaskan data *VoIP*.
5. *Bandwith* total jaringan internet adalah 810 Mbps terdiri dari 20 Mbps *dedicated* internasional dan 290 Mbps *dedicated* lokal serta 500 Mbps *shared Internet* untuk akses lokal dan internasional.
6. *Server* yang dimiliki PT PPA saat ini sebagian besar berumur lebih dari 5 tahun (9 unit), namun ada 3 unit *server* baru yg berumur dibawah 5 tahun dengan spesifikasi tinggi. Untuk operasional aplikasi inti, menggunakan *server* yg berumur kurang dari 5 tahun, sedangkan yang berumur diatas 5 tahun hanya digunakan untuk aplikasi penunjang, *backup* dan pengembangan.
7. *Domain Controller* menggunakan *Microsoft Windows Server 2016* dimana performansi jaringan, keamanan jaringan, dan kemudahan pemeliharaan masih terjaga dengan baik.
8. *Microsoft Office 365 Business Premium* digunakan untuk mendukung kerja secara kolaborasi di PT PPA dengan memanfaatkan *Microsoft Teams*, *OneDrive*, dan *Sharepoints*.
9. Sistem *Email* menggunakan *hybrid Microsoft Exchange 2016* dan *Exchange Office 365* yang mendukung *smart device* dengan keamanan yang cukup baik

The Company's ICT infrastructure condition in 2019:

1. PT PPA has a data center located on the 10th floor of Sampoerna Strategic Square building and used as main source of information management for the Company.
2. PT PPA also has a collocation of 1 42U rack in PT NAPINFO datacenter located in Annex Building (will be moved to Cyber-1 Building) which will function as an information management center for PT PPA replacing the data center in Sampoerna building.
3. Network service of PT PPA has applied Cisco Campus Network, network topology standard with Virtual Trunking Protocol that distributes network segmentation (VLAN) that is designed based on organization structure in PT PPA. This segmentation guarantees more optimum security system.
4. PT PPA's network security uses two devices, which are Intrusion Prevention System (IPS) and Next Generation Firewall with function to protect internal computer network from cyber attack, protect Virtual Private Network (VPN) with data encryption to DRC network and partner as well as improve quality of IP telecommunication using Quality of Service (QoS) that prioritizes VoIP data.
5. Total internet network bandwidth is 810 Mbps consisting of 20 Mbps dedicated internationally and 290 Mbps dedicated locally and 500 Mbps shared Internet for local and international access.
6. Most of the servers owned by PT PPA are more than 5 years old (9 units), but there are 3 new server units under 5 years old with high specifications. For core application operations, are using servers that are less than 5 years old, while those over 5 years old are only used for supporting, backup and development applications.
7. Domain Controller uses Microsoft Windows Server 2016 where network performance, network security and maintenance accessibility are well-maintained.
8. Microsoft Office 365 Business Premium is used to support collaborative work at PT PPA by utilizing Microsoft Teams, OneDrive, and Sharepoints.
9. e-Mail system uses Microsoft Exchange 2016 and Exchange Office 365 that support smart device with sufficient security.

TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI
TECHNOLOGY AND INFORMATION GOVERNANCE

10. Implementasi *wireless connection (wifi)* menggunakan ekosistem *Unifi* dari *Ubiquiti* yang menerapkan teknologi terbaru yang mengintegrasikan satu *hotspot* dengan *hotspot* lain (SID : single id) dan memungkinkan koneksi *devices* tidak terputus selama berada di area kantor PPA serta penggunaan dua gelombang 2,4 Ghz dan 5 Ghz dengan protokol terbaru AC untuk kualitas sinyal *wifi* yang lebih baik.
11. Sistem komunikasi menggunakan teknologi *Unified Communication* yang mengintegrasikan *voice over IP*, *video telephony*, *video conferencing*, *fax* dan *email*.
12. Teknologi virtualisasi server menggunakan *VMWARE 5.5* yang sudah dilengkapi dengan fitur teknologi *backup Veeam*.
13. PT PPA memiliki DRC yang berlokasi di Jatiluhur. *Disaster Recovery Center* dibutuhkan sebagai tempat penyimpanan *backup* sistem PT PPA dan juga sebagai tempat pemulihan pada saat terjadi kondisi *disaster* sebagai bagian dari *Business Continuity Plan*.
10. Implementation of wireless connection (WiFi) uses up-to-date technology that integrates one hotspot with another (SID: Single ID) and allows uninterrupted device connections while in PPA office area as well as the use of two 2.4 GHz and 5 GHz waves with the latest AC protocol for better wifi signal quality.
11. Communication system uses Unified Communication technology that integrates voice over IP, video telephony, video conferencing, fax and e-mail.
12. Server virtualization technology uses VMWARE 5.5 supported with Veeam Backup technology feature.
13. PT PPA has Disaster Recovery Center (DRC) located in Jatiluhur. The DRC is required as a back-up system storage location and also recovery center during disaster condition as well as part of Business Continuity Plan.

Pengembangan infrastruktur TI dilakukan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan.

The development of IT infrastructure is performed to support and meet the Company's business needs.

Portofolio Layanan TIK Perusahaan

Corporate ICT Service Portfolio

Portofolio Layanan TIK Perusahaan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The Company's ICT Service portfolio in 2019 is as follows:

Jenis Layanan Type of Service	Kegiatan Activity
SUPPORT	
<i>Unified Communication & Work Facility</i>	Menyediakan layanan <i>email</i> , <i>mobile devices</i> , <i>video conference</i> , <i>Unified communication</i> , <i>virtual private network</i> , <i>dealing room</i> dan fasilitas kerja karyawan yang mendukung kegiatan Perusahaan Providing email services, mobile devices, video conference, Unified communication, virtual private networks, dealing room and working facilities for employees to support the Company's activities
<i>Data Center dan DRC</i> Data Center and DRC	Menyediakan dan mengoperasikan <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i> yang mampu menjaga ketersediaan dan kehandalan informasi PT PPA Providing and operating data center and disaster recovery center to maintain the availability and reliability of PT PPA's information
Aplikasi Pendukung Kegiatan Activity Supporting Application	Menyediakan aplikasi-aplikasi kesekretariatan yang terintegrasi dengan proyek <i>Paperless Office</i> serta aplikasi pelaporan kegiatan Perusahaan untuk menunjang <i>green environment</i> Providing secretarial applications that are integrated with Paperless Office project and corporate activity reporting to support green environment

Jenis Layanan Type of Service	Kegiatan Activity
Pusat Layanan TIK ICT Service Center	Menyediakan layanan TIK terintegrasi dan dapat memberikan solusi tepat waktu untuk seluruh permasalahan terkait pemanfaatan TIK dengan menyediakan <i>Single Point of Contact</i> (SPOC), termasuk dukungan operasional TIK entitas anak Providing integrated ICT services and offering on time solutions for entire issues related to ICT utilization by providing Single Point of Contact (SPOC), including ICT operational support at subsidiaries
<i>Platform PPA Mobile</i>	Menyediakan layanan <i>Helpdesk</i> , <i>Helper</i> , <i>Carpool</i> , <i>Meeting Room</i> , Disposisi Surat dan HRIS dalam <i>platform Android</i> dan <i>IOS</i> Providing Helpdesk, Helper, Carpool, Meeting Room, Letter Disposition and HRIS services on Android and IOS platforms
<i>Mobile Office</i>	Menggunakan <i>Office 365</i> untuk menunjang kegiatan <i>mobile</i> unit bisnis PPA Use Office 365 to support mobile activities of PPA's business units
KEY OPERATIONAL	
Aplikasi <i>Document Management</i> Document Management Application	Memiliki aplikasi pengelolaan dokumen elektronik untuk menciptakan, <i>review</i> , persetujuan, dan publikasi dokumen dan kemudahan pengaksesan terhadap informasi Availability of electronic document management application to create, review, approve, and publish documents and easy information access
<i>Corporate Communication</i>	Memiliki <i>website</i> Perusahaan yang menjadi sarana penyampaian informasi mengenai Perusahaan, intranet sebagai sarana komunikasi internal karyawan Perusahaan. Availability of Company's website as corporate information publication channel, intranet as internal communication channel for employees
Aplikasi Keuangan Financial Application	Menyediakan aplikasi keuangan (PUM, SPM, kas kecil, penagihan), Sistem Informasi Investasi (saham dan obligasi) dan <i>treasury</i> yang bermuara ke dalam aplikasi ERP (<i>Oracle E-business Suites</i>) Providing financial applications (PUM, SPM, petty cash, billing), Investment Information Systems (stocks and bonds) and treasury leading to ERP application (Oracle E-business Suites)
<i>Core System PPA</i>	Pengelolaan kewajiban debitur dan kreditur sampai dengan penagihan dan sudah terintegrasi dengan sistem keuangan <i>Oracle PPA</i> Management of debtor and creditor obligations up to billing and has been integrated with PPA Oracle financial system
Sistem <i>Audit Management</i> Audit System Management	Pengelolaan <i>item-item focus audit</i> atas unit kerja yang ada di PPA Management of audit focus items for work units in PPA
<i>Human Resources Management</i>	Pengelolaan HRIS PPA yang mendukung <i>paperless</i> dan akses secara <i>mobile</i> . Management of PPA HRIS that supports paperless and mobile access
<i>Collocation Data Center</i>	Penggunaan <i>Collocation</i> dalam pengelolaan <i>Data Center</i> PPA untuk meningkatkan dukungan layanan data dan informasi kepada seluruh karyawan PPA. Selain itu <i>Collocation</i> juga mengoptimalkan penggunaan ruang dan daya listrik. Use of Collocation in managing PPA Data Center to improve data and information service support for all PPA employees. In addition, collocation also streamlines the use of space and electric power
STRATEGIC	
Pengelolaan Aset Asset Management	Memiliki aplikasi pengelolaan aset yang terintegrasi untuk aset properti, hak tagih, saham, dan surat berharga Availability of integrated asset management application for property assets, claim rights, shares and securities
Restrukturisasi dan Revitalisasi Restructuring and Revitalization	Implementasi <i>Microsoft Project</i> dan pelaporan ringkasan eksekutif untuk setiap BUMN di PPAWORLD untuk mendukung pelaksanaan dan monitoring kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN Implementation of Microsoft Project and executive summary reporting for every SOEs in PPAWORLD to support the implementation and monitoring of SOEs restructuring and revitalization activities

TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI
TECHNOLOGY AND INFORMATION GOVERNANCE

Jenis Layanan Type of Service	Kegiatan Activity
Laporan Kinerja Performance Report	Memiliki sistem pelaporan kinerja perusahaan melalui <i>Dashboard</i> untuk mempermudah manajemen dalam melakukan monitoring kinerja perusahaan Availability of Company's performance reporting system through the Dashboard to facilitate the management in monitoring Company's performance
IT Shared Services dan Due Dilligence TIK IT Shared Services and ICT Due Dilligence TIK	Menyediakan layanan <i>shared services</i> untuk entitas anak dan layanan <i>Due Dilligence</i> TIK dalam rangka kegiatan <i>business advisory</i> . Providing shared services for subsidiaries and ICT Due Diligence services related to business advisory activities
Forum antar BUMN dan Kementerian BUMN SOEs and Ministry of SOEs Forum	Terlibat aktif dalam Forum teknologi Informasi (FORTI) BUMN dan mengkoordinir pengisian Portal BUMN Actively involved in the BUMN Information Technology Forum (FORTI) and coordinating the filling of the BUMN Portal

Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Informasi Tahun 2019

Implementation of Information Technology Activities in 2019

IT Shared Services 2019

Pada tahun 2019, Perusahaan yang menggunakan jasa layanan IT *Shared Services* adalah:

1. PT PPA Finance
2. PT PPA Kapital
3. PT Sejahtera Eka Graha
4. PT Pratama Persada Airborne

IT Shared Services in 2019

In 2019, Companies who hired IT Shared Services are:

1. PT PPA Finance
2. PT PPA Kapital
3. PT Sejahtera Eka Graha
4. PT Pratama Persada Airborne

Sementara layanan yang diberikan TI Perusahaan untuk layanan *shared services*, dapat dilihat melalui tabel berikut

While the services provided by the Company's IT services for shared services, can be seen through the following table

	Layanan Data Center Data Center Service	Layanan IT Helpdesk IT Helpdesk Service	Layanan E-mail E-mail Service	Layanan PABX (telepon) PABX (Phone) Service	Layanan Aplikasi Kesekretariatan Secretarial Application Service	Instalasi Ruang Data Center Data Center Room Installation	Instalasi LAN (Workstation dan Wifi) LAN (Workstation and Wifi) Installation	Layanan Aplikasi Payroll Payroll Application Service	Layanan Pengawasan CCTV CCTV Surveillance Service
PT PPA FINANCE	v	v	v	v	v	-	-	-	-
PT PPA KAPITAL	v	v	v	v	v	-	-	-	-
PT SEJAHTERA EKA GRAHA	v	v	v	v	v	v	v	v	v
PT PRATAMA PERSADA AIRBORNE	v	v	v	v	-	-	-	-	-



Pada bulan November 2019 telah dilakukan survei kepuasan pengguna layanan IT terhadap *shared service* yang mencakup aspek:

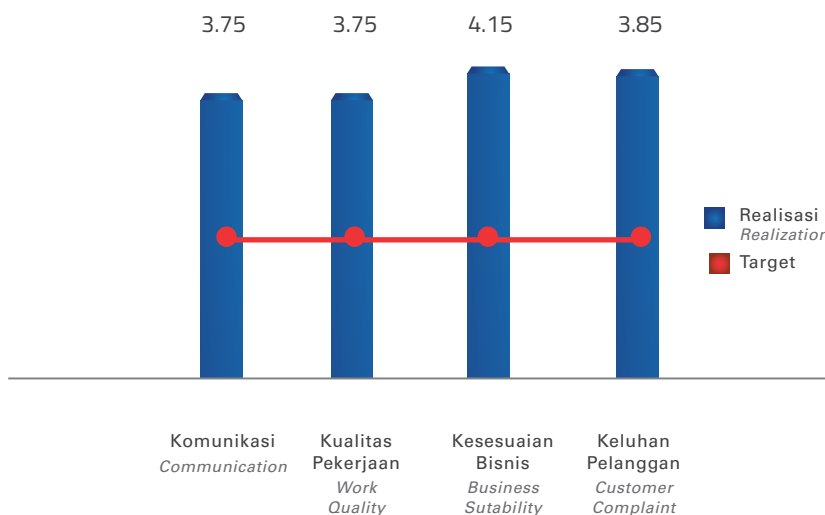
1. Komunikasi
2. Kualitas Pekerjaan
3. Kualitas Bisnis
4. Keluhan Pelanggan

Hasil dari survei tersebut adalah:

In November 2019, an IT service user satisfaction survey was conducted on shared services which included aspects of:

1. Communication
2. Work Quality
3. Business Quality
4. Customer Complaint

The results of the survey are:



TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI
TECHNOLOGY AND INFORMATION GOVERNANCE**Kegiatan TI untuk Mendukung Unit Bisnis**

Dalam mendukung kegiatan unit bisnis, Grup TI terlibat aktif dalam beberapa kegiatan yaitu :

- **Core System**

Pengembangan *Core System* yang dimulai pada akhir tahun 2018, telah berhasil diimplementasikan dan *live* digunakan pertama kali pada bulan Juni 2019. Implementasi *Core System* dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan tugas di unit Operasi Bisnis untuk mendukung kegiatan satuan kerja bisnis baik di Direktorat Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen maupun Direktorat Investasi yang meliputi proses pencatatan debitur, perhitungan angka kewajiban, *monitoring* pembayaran dan *billing*.

Pada tahun 2019 juga telah disepakati bahwa mulai tahun 2020 proses penyampaian *invoice* dan *monitoring* pembayaran akan melalui satuan kerja Keuangan, di mana sebelumnya berada di unit Bisnis.

Agar tidak terdapat *re-entry* oleh satuan kerja Akuntansi maka pada telah diimplementasikan *interface* dari *Core System* ke *Oracle Financials*. Proses *interface* melibatkan satuan kerja lain dalam diskusi dan pengetesannya.

Dalam pelaksanaannya telah dilakukan beberapa kali sosialisasi kepada satuan kerja Bisnis maupun satuan kerja Keuangan dan Akuntansi mengenai penggunaan *Core System* dan telah dibuat *Helpdesk* Operasi Bisnis yang dapat diakses dari PPAWORLD agar segala keluhan dan permintaan dapat dimonitor.

- **Mobile Office**

Untuk menjawab tantangan untuk menjadi perusahaan yang *agile* dengan adanya perubahan :

1. Bisnis PPA yang berkembang membuat karyawannya semakin *mobile* dan memerlukan akses terhadap data dan informasi dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Banyaknya *project* kerja sama, penempatan karyawan diluar dan pembentukan *holding* membuat pengelolaan TI PT PPA harus dapat mengakomodir kebutuhan untuk melakukan kolaborasi dalam pekerjaannya.

IT Activities to Support Business Units

In supporting business unit activities, IT Group is actively involved in several activities, namely:

- **Core System**

Core System Development, which began at the end of 2018, has been successfully implemented and is live to be used for the first time in June 2019. Core System implementation is carried out to facilitate the implementation of functions and tasks in the Business Operations unit to support the activities of business units in both the Business Advisory and Asset Management Directorate and Investment Directorate, which includes the debtor recording process, calculation of liability figures, payment monitoring and billing.

In 2019, it was also agreed that starting in 2020 the process of sending invoices and monitoring payments will go through the Finance work unit, which was previously in the Business unit.

In order to avoid re-entry by the Accounting work unit, an interface from Core System to Oracle Financials has been implemented. The interface process involves other work units in the discussion and testing.

In its implementation, socialization has been carried out several times to the Business as well as Finance and Accounting work units regarding the use of the Core System and Business Operations Helpdesk has been made, which can be accessed from PPAWORLD so that all complaints and requests can be monitored.

- **Mobile Office**

To answer the challenge of becoming an agile company with changes:

1. PPA's growing business makes employees more mobile and requires access to data and information more quickly and easily. The large number of collaborative projects, the placement of employees outside and the formation of a holding makes PT PPA's IT management must be able to accommodate the need for work collaboration.

2. Adanya cara kerja yang berubah, kini dengan perkembangan teknologi karyawan dapat langsung bekerja dari luar kantor dengan *gadget* pribadinya atau sering disebut dengan *Bring Your Own Device* (BYOD).
3. Adanya kebutuhan untuk dengan mudah menyiapkan infrastruktur apabila terjadi pemindahan lokasi kantor PPA atau perampingan kantor PPA.
4. Adanya kebutuhan peremajaan aplikasi *Microsoft Office*.
5. Adanya kebutuhan peremajaan jaringan komputer.
6. Adanya kebutuhan pemindahan *Data Center* ke Penyedia *Data Center Collocation*.

Maka berdasarkan kajian yang telah dilakukan PPA pemenuhan *Mobile Office* dapat dilakukan dengan cara:

- Memilih teknologi pengolahan dokumen (*software* kerja) yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pola kerja yang baru.
- Memilih infrastruktur yang mendukung pola kerja yang baru.
- Melakukan evaluasi dan mengelola *Data Center*.

Pemilihan teknologi pengolahan dokumen berdasarkan kajian *Mobile Office* yang sudah dilakukan adalah melakukan pengadaan *Microsoft Office 365* untuk menggantikan *Microsoft Office Standard Edition*.

Infrastruktur jaringan yang akan digunakan untuk mendukung *Mobile Office* adalah jaringan komputer berbasis *wireless* yang harus lebih ditingkatkan lagi dengan melakukan peremajaan dan penambahan perangkat *WiFi Ubiquity* seri *UniFi* dengan tujuan antara lain untuk menghilangkan *blankspot* Wifi di kantor.

Sedangkan infrastruktur *Data Center* telah dipilih opsi untuk menggunakan layanan *collocation* di *Data Center* gedung Cyber. Dengan dilakukannya *collocation* maka akan dapat dilakukan penghematan dan performa jaringan yang dapat ditingkatkan jika lokasi *collocation* adalah di pusat Indonesia *Internet Exchange* (IIX).

2. Changes in way of working. With the development of technology, employees can directly work from outside the office with their personal gadgets or often referred to as Bring Your Own Device (BYOD).
3. A need to easily prepare infrastructure in the event of PPA office relocation or downsizing.
4. A need for rejuvenation of Microsoft Office applications
5. A need for rejuvenation of computer network
6. A need to move Datacenter to Colocation Data Center Provider

Based on the analysis that have been carried out by PPA, the fulfillment of Mobile Office can be done by:

- Choosing document processing technology (work software) that is suitable with technological developments and new working patterns
- Choosing infrastructure that supports new working patterns
- Evaluate and manage Data Center

The selection of document processing technology based on Mobile Office analysis that has been carried out is to procure Microsoft Office 365 to replace Microsoft Office Standard Edition.

The network infrastructure that will be used to support Mobile Office is wireless-based computer network that must be further improved by upgrading and adding UniFi series Ubiquity WiFi devices with the aim of, among others, eliminating Wifi blankspots in the office.

While the option regarding Data Center infrastructure that has been chosen is to use collocation service in Cyber Data Center building. With collocation, savings and net work performance can be improved if the collocation location is at the center of the Indonesia Internet Exchange (IIX).

TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI
TECHNOLOGY AND INFORMATION GOVERNANCE

Diharapkan dengan telah diimplementasikannya *Mobile Office* maka karyawan dapat bekerja dimanapun, kapanpun dengan perangkat apapun (*anywhere, anytime and any device*), sehingga PT PPA akan lebih *agile* dalam rangka pencapaian target sesuai RKAP maupun RJPP.

Pembuatan *Smart Meeting Room* 3 di PPA untuk membantu bisnis unit dalam melakukan *meeting* dengan menggunakan teknologi dan *gadget* terkini sehingga *meeting* dapat berjalan lancar dan dapat meningkatkan relasi yang baik dengan pihak luar.

Pembuatan video udara dengan menggunakan *Drone* untuk proyek yang telah berjalan maupun proyek yang berpotensi untuk dikerjakan. Lokasi antara lain di kota Ciomas (Bukit Hijau Ciomas), Cikampek (Pupuk Kujang) dan Tegal (Green Teksin).

- **PPA Mobile**
Revolusi industri 4.0 ditandai dengan perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara dunia fisik, *digital*, dan biologis.

Banyak perusahaan telah memulai perjalanan transformasi *digital* untuk mencoba cara *digital* baru dalam berbisnis. Ini berarti, data dimanfaatkan secara lebih cerdas untuk menghadirkan tingkat efisiensi, kelincuhan (*agility*) dan produktivitas yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Teknologi, dari ponsel hingga *cloud*, kini telah menjadi bagian integral dari setiap bisnis di semua jenis industri. Perusahaan yang gagal menentukan strategi *digital* yang efisien dan memaksimalkan dampak digitalisasi, berisiko tertinggal oleh perusahaan/pesaing lainnya.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan transformasi *digital* dan peningkatan kinerja organisasi maka telah berhasil diimplementasikan PPA *Mobile* yang berbasis *Android* dan *iOS*.

PPA *Mobile* memiliki kekuatan sebagai berikut :

- a. Performa lebih cepat dibandingkan *web base application*.
- b. *User interface* yang nyaman dan mudah.
- c. Kualitas keamanan yang handal.

It is expected that with the implementation of *Mobile Office*, employees can work anywhere, anytime and any device, so that PT PPA will be more agile in order to achieve targets according to Budget and Planning or RJPP.

Making *Smart Meeting Room* 3 at PPA to assist business units in conducting meetings using the latest technology and gadgets so that meetings can run smoothly and can improve good relations with external parties.

Making aerial video using *Drone* for projects that have been running or projects that have the potential to be collaborated. The locations are in the cities of Ciomas (Bukit Hijau Ciomas), Cikampek (Pupuk Kujang) and Tegal (Green Teksin).

- **PPA Mobile**
The industrial revolution 4.0 is characterized by a blend of technologies that blur the boundaries between the physical, digital and biological worlds.

Many companies have embarked on a journey of digital transformation to try new digital ways of doing business. This means that data is used more intelligently to bring about levels of efficiency, agility and productivity that have never been achieved before.

Technology, from mobile to cloud, has now become an integral part of every business in all types of industries. Companies that fail to determine an efficient digital strategy and maximize the impact of digitalization, has the risk of being left behind by other companies/competitors.

To achieve a success in carrying out digital transformation and improving organizational performance, PPA *Mobile* based on *Android* and *iOS* has been successfully implemented.

PPA *Mobile* has the following strengths:

- a. Faster performance than web base application.
- b. Comfortable and easy user interface.
- c. Reliable safety quality.

- d. Pengguna memiliki akses penuh ke perangkat *mobile*, seperti kamera, *gesture*, *notification*, *speaker*, dan fitur lainnya.
- e. Kemudahan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun.
- f. Kemudahan untuk menambah modul baru.

Tujuan PPA *Mobile* adalah untuk :

- a. peningkatan kinerja organisasi sebagai bagian dari penguatan sistem Manajemen Bisnis PT PPA yang bertujuan untuk menyiapkan sistem Teknologi Informasi serta perangkat pendukungnya yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan hubungan kerja PT PPA dengan para *stakeholder* maupun pengguna jasa.
- b. membangun kesadaran merek dan pengakuan, dengan membangun Sebuah *Mobile Application Platform* untuk PT PPA yang diharapkan akan dapat memberikan kontribusi untuk kesadaran merek dan dalam rangka pembangunan pengakuan. Kesadaran merek akan terbangun dari kualitas produk bisnis perusahaan yang tentunya dapat diinformasikan melalui *Mobile Application Platform* baik secara *verbal* ataupun *visual*. Kemudian pengakuan akan mulai terbentuk seiring dengan banyaknya *user* yang *download* dan menggunakan PPA *Mobile*.
- c. membangun suatu wadah/*platform* bagi aplikasi-aplikasi PPA baik yang saat ini sudah berjalan dan yang dalam proses pengembangan. Aplikasi yang sudah berjalan antara lain adalah Layanan *Helpdesk*, *Carpool*, *Helper*, *Paperless* (Disposisi Surat), *Meeting Room*, HRIS.
- **Dashboard Kinerja Keuangan**
Dashboard untuk *monitoring* kinerja keuangan yang bertujuan untuk mempermudah manajemen untuk melihat dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan yang meliputi:
 - a. *Cash Management*
 - b. KPI Kinerja Kunci
 - c. KPI Tingkat Kesehatan
 - d. Laba Rugi Konsolidasi
 - e. Pendapatan dan Beban

Selama ini telah digunakan oleh manajemen PPA. Pengembangan *dashboard* pada tahun 2019 adalah pembuatan sampai dengan pendapatan dan biaya per divisi/direktorat.

- d. Users have full access to mobile devices, such as cameras, gestures, notifications, speakers, and other features.
- e. Ease of accessing information anytime, anywhere.
- f. Ease of adding new modules.

The purpose of PPA *Mobile* is to:

- a. Improve organizational performance as part of PT PPA's Business Management system strengthening which aims to prepare an Information Technology system and its supporting devices that suit the needs, conditions and working relationships of PT PPA with its stakeholders and service users.
- b. Build brand awareness and recognition, by building a Mobile Application Platform for PT PPA which is expected to be able to contribute to brand awareness and building recognition. Brand awareness will be built from the quality of the Company's business products, which of course can be informed via the Mobile Application Platform both verbally or visually. Then the recognition will begin to be created along with the number of users who download and use PPA *Mobile*.
- c. Establish a platform for both existing and ongoing PPA applications that are in the process of development. Applications that are already running include the Helpdesk Service, Carpool, Helper, Paperless (Letter Disposition), Meeting Room, HRIS.
- **Financial Performance Dashboard**
Dashboard for monitoring financial performance that aims to make it easier for the management to see wherever and whenever, so as to accelerate decision making which includes:
 - a. Cash management
 - b. KPI of Key Performance
 - c. KPI of Soundness Index
 - d. Consolidated Profit and Loss
 - e. Revenues and Expenses

So far, it has been used by PPA management. Dashboard development in 2019 is until the development of revenues and expenses per division/directorate.

TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI
TECHNOLOGY AND INFORMATION GOVERNANCE

Aplikasi *Dashboard* PPA dapat dilihat melalui IPAD, *mobile device* maupun PC kerja, dan saat ini yang telah memiliki akses adalah Direksi, Komisaris, Divisi *Finance & Accounting*. Selanjutnya akan dikembangkan *Dashboard* yang dapat memenuhi kebutuhan *level* kepala Divisi.

- *Server Collocation*

Sejalan dengan implementasi *Mobile Office*, bisnis PT PPA yang semakin maka kemudahan dan kecepatan dalam mengakses data dan informasi dari berbagai macam *device* dimanapun dan kapanpun, serta kebutuhan untuk dapat berkolaborasi harus didukung dengan perangkat dan teknologi yang sesuai agar perusahaan dapat lincah (*agile*) dalam menjalankan tugasnya.

Untuk dapat *agile* maka salah satu opsi yang dipilih adalah memindahkan data *center* ke penyedia layanan *collocation* di Gedung Cyber atau sejenis sehingga kualitas *data center*, performa jaringan dan penghematan dapat ditingkatkan. Dengan pindahnya *data center* maka PPA akan lebih *agile* lagi dalam infrastruktur IT karena dapat berpindah gedung atau lokasi kerja tanpa beban infrastruktur *data center*. Hal ini bisa terwujud karena saat ini PPA telah berhasil mereduksi jumlah rak dalam *data center* dari 13 rak di tahun 2009 menjadi 1 rak di tahun 2019 sehingga perhitungan ekonomis untuk pindah ke *collocation* menjadi memungkinkan dan menguntungkan.

- Kegiatan Rutin Grup TI Perusahaan 2019
Kegiatan rutin Grup TI Perusahaan antara lain menindaklanjuti permasalahan dan keluhan karyawan antara lain keluhan dalam penggunaan TI, operasional *data center* dan *disaster recovery center*, *Rehearsal Disaster Recovery Center*, memonitor kualitas jaringan data dan telepon, pengisian portal BUMN, penyediaan sarana dan prasarana kerja karyawan baru, koordinasi kegiatan *scanning*, mengelola *website* perusahaan (<http://www.ptppa.com>) dan intranet perusahaan (PPAWorld).
- Pada November 2019 telah dilakukan survei kepuasan pengguna layanan TI internal yang mencakup aspek
 - a. Waktu Pelayanan
 - b. *Response Staff*
 - c. Kualitas Layanan
 - d. Layanan Komplain

PPA *Dashboard* application can be seen through IPAD, mobile devices and work PCs, and currently those who have access are Directors, Commissioners, Finance & Accounting Division. Next, *Dashboard* that can meet the needs of the level of Division Head will be developed.

- Collocation server

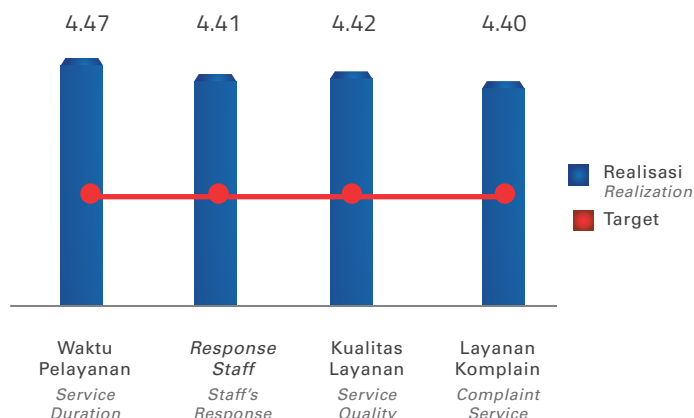
In line with the implementation of *Mobile Office*, PT PPA's increasing business requires the ease and speed in accessing data and information from a variety of devices wherever and whenever, and the need for collaboration must be supported with appropriate devices and technologies so that the Company can be more agile in carrying out its assignment.

To be agile, one of the options chosen is to move the data center to a colocation service provider in Cyber Building or similar, so that the quality of data center, network performance and savings can be improved. By moving the data center, PPA will be even more agile in IT infrastructure due to the easiness to move its building or work location without the burden of data center infrastructure. This can be realized because currently PPA has succeeded in reducing the number of shelves in data center from 13 shelves in 2009 to 1 shelf in 2019, hence the economic calculation to move to colocation is possible and profitable.

- Routine Activities of Company's IT Group in 2019
Routine activities of Company's IT Group include following up on employee's problems and complaints including complaints in the use of IT, data center operations and disaster recovery center, Rehearsal Disaster Recovery Center, monitoring the quality of data and telephone networks, filling SOEs portal, providing work facilities and infrastructure for new employees, coordinating scanning activities, managing the Company's website (<http://www.ptppa.com>) and intranet (PPAWorld).
- In November 2019, an internal IT service user satisfaction survey was conducted covering the aspects of:
 - a. Service Duration
 - b. Staff's Response
 - c. Service Quality
 - d. Complaint Services

Hasil dari survei tersebut adalah:

The results of the survey are:



Strategi dan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

Secara keseluruhan rencana kerja Grup TI telah dipenuhi. Sedangkan untuk evaluasi *roadmap* proyek TI yang dibuat di awal tahun 2015 dan yang akan terus dilakukan sampai dengan 2019 sesuai dengan dokumen *Master Plan* Teknologi Informasi, memo M-6/PPA/SSD/0215 adalah sebagai berikut:

Information Technology Development Strategy and Plan

Overall, IT Group's work plans have been met. As for the evaluation of IT project roadmap that was made in early 2015 and which will continue until 2019 according to the Information Technology Master Plan document, memo M-6/PPA/SSD/0215, is as follows:

No	PROYEK PROJECT	Keterangan Tahun 2019 Information in 2019
1	Pengembangan aplikasi <i>business intelligence</i> Development of business intelligence applications	<i>Dashboard</i> perkembangan aset dan kinerja sampai pada level divisi. Asset development and performance dashboard to the division level
2	Pengembangan IT <i>advisory</i> IT advisory development	Pada tahun 2019 membantu dalam pembuatan SOP untuk proses mendapatkan proyek LPS In 2019, assisted in making SOPs for the process of obtaining LPS projects
3	Pengembangan <i>private cloud</i> PT PPA (<i>interface channeling</i>) Development of PT PPA private cloud (<i>interface channeling</i>)	<i>Private Cloud</i> PPA telah diimplementasikan untuk <i>cloud file sharing</i> dan <i>backup</i> . Selanjutnya akan terus dikembangkan. PPA Private Cloud has been implemented for cloud file sharing and backup. Furthermore, it will continue to be developed
4	Pengembangan <i>unified communication</i> menuju <i>multimedia integration</i> (termasuk peremajaan perangkat <i>handset</i> dan <i>server</i>) Development of unified communication towards multimedia integration (including the rejuvenation of handset and server devices)	Pengembangan <i>Unified Communication</i> dengan layanan <i>Cloud Video Conference third party Zoom</i> untuk interkoneksi dengan berbagai media dan peremajaan perangkat. Development of Unified Communication with Zoom's third party Cloud Video Conference service for interconnection with various media and device rejuvenation

TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI
TECHNOLOGY AND INFORMATION GOVERNANCE

No	PROYEK PROJECT	Keterangan Tahun 2019 Information in 2019
5	Impelementasi <i>Shared Services</i> Implementation of Shared Services	<i>Shared service</i> telah dilakukan di tahun 2019 untuk <i>Airborne</i> di gedung EMI Shared services have been conducted in 2019 for Airborne in EMI building
6	Pengembangan <i>unified communication</i> menuju <i>multimedia integration</i> (termasuk peremajaan perangkat <i>handset</i> dan <i>server</i>) Development of unified communication towards multimedia integration (including the rejuvenation of handset and server devices)	Telah diimplementasikan <i>Microsoft Teams</i> sebagai <i>multimedia integration</i> sekaligus <i>collaboration tools</i> . Microsoft Teams has been implemented as a multimedia integration as well as collaboration tools

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Perusahaan Corporate Information Technology Development Road Map

KODE CODE	PROYEK PROJECT	Prioritas Utama Main Priority	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pengembangan <i>funding management system</i> Development of funding management system						
B	Pengembangan aplikasi <i>business intelligence</i> Development of business intelligence application						
C	Pengembangan HRIS (<i>career path, performance management, development, e-learning</i>) HRIS development (career path, performance management, development, e-learning)	v					
D	Pengembangan <i>marketing management system (branding, digital marketing, sales plan)</i> Development of marketing management system (branding, digital marketing, sales plan)	v					
E	Pengembangan CRM CRM Development	v					
F	Pengembangan aplikasi <i>investment</i> Development of investment applications	v					
G	Pengembangan ERP <i>Oracle E-business suites</i> (konsolidasi entitas anak dan FA) Development of ERP Oracle E-business suites (consolidated subsidiary and FA)	v					
H	Pengembangan IT <i>advisory</i> IT advisory development	v					
I	Pengembangan <i>private cloud</i> Perusahaan (<i>interface channeling</i>) Development of corporate private cloud (interface channeling)						

KODE CODE	PROYEK PROJECT	Prioritas Utama Main Priority	2015	2016	2017	2018	2019
J	Pembangunan infrastruktur TI (peremajaan infrastruktur, iots, data center tier 2 dan fibre optic) Development of IT infrastructure (infrastructure rejuvenation, iots, data center tier 2 and fiber optic)						
K	Pengembangan <i>security management system</i> (termasuk <i>encryption appliance</i> , peremajaan perangkat <i>security</i>) Development of security management system (including encryption appliance, security device rejuvenation)	v					
L	Pengembangan <i>unified communication</i> menuju <i>multimedia integration</i> (termasuk peremajaan perangkat <i>handset</i> dan <i>server</i>) Development of unified communication towards multimedia integration (including the rejuvenation of handset and server devices)						
M	Impelementasi <i>Shared Services</i> Implementation of Shared Services	v					
N	<i>Knowledge Management</i>	v					

KODE ETIK

CODE OF CONDUCT

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan komitmen penerapan GCG Perusahaan yang mengandung hal-hal yang wajib dilaksanakan dan hal-hal yang wajib dihindari bagi insan Perusahaan dalam etika bisnis dan etika kerja, baik dalam melaksanakan aktivitas operasional Perusahaan maupun kehidupan sehari-hari. Sebagai upaya dalam menegakkan kode etik berbisnis, Perusahaan tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Selain itu *Code of Conduct* juga mengatur tentang tata cara berperilaku Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika.

Code of Conduct is a Good Corporate Governance implementation commitment in the Company containing mandatory aspects that shall be implemented and activities that shall be avoided for the Company's People in the business and work ethics, both in doing operational activity in the Company and daily activities. As an initiative to enforce the business ethical codes, the Company complies to Law and regulation that are related to business. In addition, Code of Conduct also regulates rule of conducts for the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of the Company to the Stakeholders based on sound and ethical corporate principles.

VISI, MISI DAN NILAI

Perusahaan telah menetapkan kode etik sesuai dengan visi dan misi Perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai dalam berinteraksi dengan pihak dalam dan pihak luar. Kode etik Perusahaan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di dalam Perusahaan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan pegawai yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh pegawai.

Seluruh pegawai diharapkan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Perusahaan dan menerapkan kode etik dalam kegiatan sehari-hari. Perusahaan secara berkala mengadakan acara untuk mengingatkan dan menekankan penerapan kode etik bagi para pegawai.

VISION, MISSION AND VALUES

The Company has established the code of conduct in accordance with the Company's vision and mission which serves as a guidance of behaviour for all employees in interacting with internal and external parties. The Company's code of conduct is introduced to all levels in the Company and written in the employee recruitment contract that must be understood and signed by all employees.

All employees are expected to behave according to the Company's values and implement the code of conduct in their daily activities. The Company regularly holds events to remind and emphasize the application of code of conduct for employees.

Visi

Menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi.

Vision

To be a leading investment company and trusted partner in corporate restructuring.

Misi

- Memberikan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan investasi, restrukturisasi, pengelolaan aset dan *advisory*.
- Menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- Menerapkan manajemen yang terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
- Memberikan kontribusi kepada pembangunan lingkungan dan masyarakat.

Mission

- Provide sustainable growth for all stakeholders through investment, restructuring, asset management and advisory activities.
- Develop excellent, professional and high-integrity human resources.
- Implement a transparent management according to good corporate governance principles, risk management and compliance in an integrated manner.
- Contribute to environment and community development.

Budaya dan Nilai Perusahaan

"SEEIT"

Stewardship: Melaksanakan amanah para *stakeholder* dan meninggalkan *legacy*.

Entrepreneurship: Selalu mencari peluang untuk mengembangkan bisnis.

Excellence: Memberikan hasil yang terbaik dalam setiap tugas.

Integrity: Selalu menerapkan standar etika yang tinggi dan memenuhi komitmen setiap tugas.

Teamwork: Komitmen untuk selalu bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Corporate Culture and Values

"SEEIT"

Stewardship: To carry out the stakeholders' mandate and leave a legacy.

Entrepreneurship: Always finding business development opportunities.

Excellence: Provide the best results in every task.

Integrity: Always implementing high ethical standards and consistently fulfilling every commitment.

Teamwork: Commitment to always work together and achieve mutual objectives

PENETAPAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Perusahaan menyusun Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct-CoC*) yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Januari 2017.

Kode Etik Perusahaan menjadi pedoman dan panduan bagi:

1. Insan Perusahaan.
2. Pihak Eksternal yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.
3. Perusahaan dan seluruh entitas Anak Perusahaan.
4. Mitra Kerja yang bekerja sama dengan Perusahaan.

CODE OF CONDUCT ESTABLISHMENT

The Company formulated Code of Conduct (CoC) signed by Board of Directors and Board of Commissioners on January 31, 2017.

The Company's Code of Conduct becomes guideline and reference for:

1. Company's People
2. External Party who acts on behalf of the Company
3. Company and all Subsidiaries
4. Working Partners who Cooperates with the Company

KODE ETIK
CODE OF CONDUCT**Komitmen CoC dan Pemberlakuan Kode Etik kepada Seluruh Level Organisasi**

Komitmen dalam berperilaku dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan menjadi perhatian utama Perusahaan dan menjadi bagian dari etika bisnis dan etika kerja Perusahaan dalam menciptakan nilai tambah (*value creation*) tidak saja bagi Perusahaan tetapi juga bagi para pemangku kepentingan. Perusahaan menyusun dan mengembangkan CoC dengan standar yang tinggi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan termasuk kriteria kepuasannya. Penerapan CoC yang dilakukan oleh Perusahaan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen, dan ketentuan mendukung terciptanya budaya perusahaan yang menjunjung tinggi moral dan integritas dalam menjalankan roda bisnis Perusahaan.

"CoC berlaku bagi seluruh insan Perusahaan di setiap jenjang organisasi Perusahaan"

Pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan diwajibkan menandatangani pernyataan komitmen kepatuhan terhadap CoC.

Pokok-pokok Isi dan Keberlakuan CoC

Untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar diperlukan suatu pedoman yang bertujuan untuk membentuk dan mengatur kesesuaian tingkah laku dengan tujuan mencapai penerapan GCG yang konsisten dan menjadi standar minimal yang harus dipatuhi oleh insan Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan demi mencapai Visi dan Misi Perusahaan. CoC Perusahaan memuat hal-hal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- Latar belakang.
- Maksud, Tujuan dan Manfaat *Code of Conduct*.
- Landasan Penyusunan *Code of Conduct*.
- Visi dan Misi Perusahaan.
- Definisi dan Istilah.

Bab II Etika Usaha

- Etika Perusahaan dengan Karyawan.
- Etika Perusahaan dengan Pemerintah.
- Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham.
- Etika Perusahaan dengan Pelanggan.

CoC Commitment and Enforcement of Code of Conduct to All Organizational Levels

Commitment in behaving and interacting with the stakeholders becomes main concern of the Company and part of the Company's business and work ethics in value creation, not only for the Company but also for the stakeholders. The Company formulates and develops Code of Conduct with the highest standard and concerns interests of the stakeholders, including their satisfaction criteria. Code of Conduct implementation in the Company in continuous and sustainable manner in form of attitude, conducts, commitment and provision supports establishment of corporate culture that upholds moral and integrity in running the Company's business.

"Code of Conduct prevails for all Company's people in every organization level in the Company"

Employees, Board of Directors and Board of Commissioners are obliged to sign Code of Conduct compliance commitment declaration.

CoC Contents and Implementation

To perform a good and correct management of the Company, a manual is required to shape and manage conformity between conducts with purpose to achieve consistent Good Corporate Governance implementation as minimum standard to be fulfilled by the Company's people in doing their jobs to achieve Vision and Mission of the Company. The Company's Code of Conduct contains the followings:

Chapter I Introduction

- Background.
- Purpose, Objectives and Benefit of Code of Conduct.
- Code of Conduct Preparation Framework.
- Vision and Mission of the Company.
- Definition and Glossary.

Chapter II Business Ethics

- Ethics Between the Company and Employees.
- Ethics Between the Company and Government.
- Ethics Between the Company and Shareholders.
- Ethics Between the Company and Customers.

- e. Etika Perusahaan dengan Mitra Usaha.
- f. Etika Perusahaan dengan Pesaing.
- g. Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investor.
- h. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa.
- i. Etika Perusahaan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar.
- j. Etika Perusahaan dengan Media Massa.
- k. Etika Perusahaan dengan Entitas Anak.

Bab III Komitmen, Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perusahaan

- a. Komitmen Insan Perusahaan.
- b. Etika Kerja Insan Perusahaan.
 - 1. Etika Kerja Sesama Insan Perusahaan.
 - 2. Etika Kerja Jajaran Manajemen dan Karyawan.
- c. Tata Perilaku Insan Perusahaan.
 - 1. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya.
 - 2. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan.
 - 3. Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Cinderamata, Jamuan, Hiburan dan Donasi.
 - 4. Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan.
 - 5. Kesempatan yang Sama untuk mendapatkan Pekerjaan dan Promosi.
 - 6. Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset*.
 - 7. Perlindungan Harta Perusahaan.
 - 8. Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan.
 - 9. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok.
 - 10. Aktivitas Politik.

Bab IV Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku

- a. Komitmen Penegakan *Code of Conduct*.
- b. Sosialisasi dan Internalisasi.
- c. Pelanggaran.
- d. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran.
- e. Sanksi atas Pelanggaran.

Bab V Penutup

Lampiran Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)

- e. Ethics Between the Company and Business Partners.
- f. Ethics Between the Company and Competitors.
- g. Ethics Between the Company and Creditors/Investors.
- h. Ethics Between the Company and Goods/Services Suppliers.
- i. Ethics Between the Company and Society and Surrounding Environment.
- j. Ethics Between the Company and Mass Media.
- k. Ethics Between the Company and Subsidiaries.

Chapter III Commitment, Work Ethics and Code of Conduct for Company's People

- a. Commitment of Company's People.
- b. Work Ethics of Company's People.
 - 1. Work Ethics Among Company's People.
 - 2. Work Ethics of Management and Employees.
- c. Code of Conducts for Company's People.
 - 1. Compliance with Law, Regulation and other provisions.
 - 2. Conflict of Interest and Abuse of Position.
 - 3. Gift/Souvenir, Reception, Entertainment and Donation Giving and Acceptance.
 - 4. Occupational Health, Safety and Environment Conservation.
 - 5. Fair Career and Promotion Opportunity
 - 6. Protection on Corporate Information and Intangible Asset.
 - 7. Protection on Corporate Assets.
 - 8. Corporate Data Administration and Report Preparation.
 - 9. Dishonor Attitude, Narcotics, Illegal Drugs and Smoking.
 - 10. Social and Political Activities.

Chapter IV Code of Conduct Enforcement

- a. Code of Conduct Enforcement Commitment.
- b. Socialization and Internalization.
- c. Violation.
- d. Violation Reporting Mechanism.
- e. Violation Punishment

Chapter V Closing

Appendix of Code of Conduct

KODE ETIK
CODE OF CONDUCT**Sosialisasi dan Upaya Penegakan Pedoman Perilaku**

CoC diungkapkan dan/atau disosialisasikan kepada semua insan Perusahaan melalui berbagai media yang dimiliki Perusahaan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh insan Perusahaan setiap saat.

Media sosialisasi CoC antara lain melalui:

- Website
- Peraturan Perusahaan
- Surat Elektronik
- Pernyataan Komitmen yang ditandatangani bersama
- Iklan di Koran
- Sosial Media

Pada tahun 2019, upaya penegakan Pedoman Perilaku dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Insan Perusahaan yang diperbaharui setiap tahun.
2. Sosialisasi melalui media internal dan eksternal Perusahaan.
3. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
4. Pelaporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kerja sama Program Pengendalian Gratifikasi dengan KPK.

Setiap Insan Perusahaan telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen penerapan CoC dalam operasional Perusahaan. Persentase penandatanganan komitmen CoC oleh Insan Perusahaan adalah sebanyak 100%.

Code of Conduct Socialization and Enforcement

CoC is disclosed and/or disseminated to all Company's People through various media of the Company, including information technology that is accessible by the Company's people anytime.

Code of Conduct socialization media is as follows:

- Website
- Corporate Regulation
- Electronic Mail
- Signed Commitment Declaration
- Advertising at Newspaper
- Social Media

In 2018, Code of Conduct enforcement initiative was done through various ways, such as:

1. Integrity Pact signing by all Company's people that is renewed every year.
2. Socialization via internal and external media of the Company.
3. State Officials Wealth Report (LHKPN).
4. Gratification Report to KPK and Gratification Controlling Program Partnership with KPK.

Everyone in the Company has signed integrity pact as manifestation of Code of Conduct implementation commitment in the Company's operations. Percentage of the CoC Code commitment signing by the Company's people is 100%.

Form Komitmen CoC CoC Commitment Form

Lampiran Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)

**Pernyataan Kepatuhan
Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Nomor Induk Pegawai :
Jabatan :
Bagian/ Unit Kerja :

Menyatakan bahwa, saya

- 1) Telah menerima Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- 2) Telah memahami isi dan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- 3) Bersedia mematuhi isi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- 4) Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- 5) Segera mengkonsultasikan dan/ atau melaporkan pada pihak-pihak berwenang yang telah ditunjuk apabila menemui permasalahan dan/ atau potensi/ indikasi pelanggaran terhadap pedoman Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari manapun

Jakarta,

Yang memberi pernyataan _____ Mengetahui, _____

Nama Karyawan _____ Atasan yang memberikan pernyataan _____

Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

1. Setiap Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap CoC akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
2. Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi.
3. Dewan komisaris dan/atau Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/ atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan.
4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
5. Sanksi bagi mitra kerja atau *stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran adalah sesuai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Sanction to Code of Conduct Violation

1. Each employee of the Company proven to violate the Code of Conduct will be imposed with sanctions that are in line with prevailing rules and regulations in the Company.
2. Sanctions for the employees conducting the violation are determined by the Board of Directors.
3. Board of Commissioners and/or Board of Directors determine whether to impose disciplinary sanction, training and/or other action as well as prevention measures to be implemented.
4. Sanctions for members of Board of Directors and Board of Commissioners conducting the violation are determined by the Shareholders.
5. If other stakeholders conduct the violation, sanctions will be imposed according to the provisions stipulated in the contract. If the violation is related to criminal act, the matter shall be handed over to the authorized parties.

KODE ETIK
CODE OF CONDUCT**Penegakan Kode Etik dan Sanksi**

Bagi Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atas Kode Etik, Perusahaan dapat memberikan sanksi dengan tingkat pelanggaran dan jenis sanksi yang berbeda.

Tingkat Pelanggaran Level of Violation	Jenis Sanksi Type of Sanction
Hukuman Disiplin Ringan Low Discipline Punishment	Surat Peringatan Pertama First Warning Letter
Hukuman Disiplin Sedang Medium Discipline Punishment	Surat Peringatan Kedua Second Warning Letter
	Surat Peringatan Ketiga Third Warning Letter
Hukuman Disiplin Berat Heavy Discipline Punishment	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Employment Termination (PHK)

Code of Conduct Enforcement and Sanctions

For Company's People who are proven to have violated the Code of Conduct, the Company may impose sanctions with different levels of violation and types of sanction.

Laporan dan Penindakan tahun 2019

Sebagai realisasi penegakan Kode Etik Perusahaan, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama tahun 2019 dan perbandingannya dengan tahun 2018.

2019 Report and Enforcement

As a realization of the Company's Code of Conduct enforcement, the details of sanctions imposed related to the enforcement of Code of Conduct in 2019 and comparison with 2018 are as follows.

Sanksi Sanction	2019	2018
Hukuman Disiplin Ringan Low Discipline Punishment	-	-
Hukuman Disiplin Sedang Medium Discipline Punishment	-	-
Hukuman Disiplin Berat Heavy Discipline Punishment	-	-
JUMLAH TOTAL	-	-

Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan CoC

Perusahaan telah melakukan survei pemahaman atas CoC sebagai evaluasi terhadap efektivitas pemahaman dan pelaksanaan CoC yang dilakukan pada tahun 2019 sekaligus sebagai tindak lanjut atas hasil asesmen penerapan GCG tahun 2018.

Evaluasi terhadap CoC

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, CoC dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai prinsip GCG dan perkembangan lingkungan usaha. Evaluasi terakhir yang dilakukan Perusahaan terhadap CoC pada tanggal 31 Januari 2017.

Evaluation on CoC Implementation Effectiveness

The Company has conducted a survey on the effectiveness of Code of Conduct understanding as an evaluation on effectiveness of CoC understanding and implementation that had been done in 2019 as well as follow-up on GCG assessment results in 2018.

CoC Evaluation

As a dynamic guideline, Code of Conduct is reviewed regularly and continuously according to Good Corporate Governance principles and up-to-date business environment. The latest CoC evaluation done by the Company was on January 31, 2017.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

GRATIFICATION CONTROL



1. LATAR BELAKANG

Perusahaan senantiasa terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan serta pertumbuhan usaha jangka panjang.

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis Perusahaan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal dalam berbagai bentuk kerja sama. Interaksi antara para pihak, baik internal maupun eksternal dalam Perusahaan ini perlu dijaga agar senantiasa terjalin secara harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip GCG.

Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktik kegiatan kerja sehari-hari adalah adanya Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, maka perlu diatur hal-hal terkait Gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan.

1. BACKGROUND

The Company continues to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently and continuously in order to increase the Company's value and long-term business growth.

In running the Company's business activities, generally it is inseparable from the relations and interactions between the parties, both internal and external, in various forms of cooperation. Interaction between the parties, both internal and external within the Company needs to be maintained in order to be intertwined well-suitedly, harmoniously and continuously by not ignoring the ethics and principles of GCG.

With due regard to business relations, what often happens in daily work activities is the existence of Gratification from one party to another party. Therefore, to maintain business relations with stakeholders, it is necessary to regulate matters related to Gratification its reporting method or mechanism within the Company.

Perusahaan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap pengendalian Gratifikasi yang melibatkan Insan Perusahaan dalam kegiatan Perusahaan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara Insan Perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan. Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Perusahaan karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Perusahaan.

The Company is fully aware of the importance of implementing a strict attitude towards Gratification control that is involving Company's People in the activities of the Company, because Gratification under certain conditions can violate the Corruption Eradication Act. To deal with this, a Gratification Control Guideline was prepared which refers to the applicable laws and regulations and is in line with the Code of Corporate Governance and the Code of Conduct as well as the values that apply in the Company.

This guideline was created to regulate Gratification handling of Company's People and parties related to the Company's business activities. Gratification handling is very important for the Company because the Gratification can be a crime of bribery if not reported in accordance with the applicable laws and regulations. This can have a legal impact as well as negative image for the Company.

2. LANDASAN PENYUSUNAN

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

2. 2. REFERENCE OF PREPARATION

- a. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 70, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4297);
- b. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756);
- c. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia 2002 Number 137, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4250)

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL

- d. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- e. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012.
- f. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
- g. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi, yang ditujukan di antaranya kepada Direksi BUMN.
- d. Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 140 of 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3874), as amended by Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 134, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150).
- e. Minister of SOEs Regulation Number: Per-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by Minister of SOEs Regulation Number: Per-09/MBU/2012.
- f. Decree of Secretary of Ministry of SOEs Number: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Evaluation and Assessment of Good Corporate Governance Implementation in SOEs.
- g. Corruption Eradication Commission Letter No. B.143/01-13/01/2013 dated January 21, 2013 concerning Appeal Regarding Gratification, addressed among them to the Board of Directors of SOEs.

3. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

- a. Sebagai Pedoman bagi Insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Perusahaan.
- b. Sebagai Pedoman bagi Insan Perusahaan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik.
- c. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. PURPOSE, OBJECTIVES AND BENEFITS

- a. As a Guideline for Company's People to understand, prevent and overcome Gratification in the Company.
- b. As a Guideline for Company's People to take a firm attitude towards Gratification in the Company to realize good corporate management.
- c. Realizing the management of a company that is free from all forms of corruption, collusion and nepotism (KKN).

PEDOMAN PERUSAHAAN TERKAIT KETERLIBATAN DALAM AKTIVITAS POLITIK CORPORATE GUIDELINES RELATED TO ENGAGEMENT IN POLITICAL ACTIVITIES

Perusahaan memiliki kebijakan tidak akan ada kontribusi yang berasal dari dana perusahaan, barang-barang dan fasilitas milik perusahaan, yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat manapun, kecuali sebatas yang dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan independensi Perusahaan sebagai BUMN yang memiliki integritas dalam pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan pelarangan pemberian dana juga berguna untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai peruntukan yang ditetapkan.

Perusahaan tidak melarang seluruh karyawan untuk terlibat dalam politik. Namun demikian, Perusahaan melarang karyawan yang terlibat dalam politik menggunakan atribut Perusahaan.

The Company has a policy that no contributions will be origination from the Company's funds, goods and facilities belonging to the Company, which are intended to support any political party or candidate, except to the extent that is justified according to applicable laws and regulations.

This aims to create the Company's independence as an SOEs that has integrity in management in accordance with applicable regulations. Provisions on the prohibition of funding are also useful to avoid conflict of interest in decision making and to realize transparent and accountable budget management in accordance with the intended designation.

The Company does not prohibit all employees from engaging in politics. However, the Company prohibits employees that are involved in politics to use attributes of the Company.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI ANTI CORRUPTION POLICY

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, KKN serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees constantly uphold fair competition, the value of sportsmanship and professionalism, as well as GCG principles. The Company is also committed to creating a healthy business climate, avoiding actions, behaviors or conducts that can lead to conflict of interest, corruption, collusion and nepotism (KKN) and always prioritizing the interests of the Company above the interest of personal, family, or group. The Company also pays attention to anti-corruption policies as written in Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption Crimes.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan akuntabel serta memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA") telah menyusun Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, *Guideline* Pengadaan Jasa Konsultan dan *Guideline* Pengadaan Barang dan Jasa Operasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012.

Mempertimbangkan perkembangan terkini dari kegiatan pengadaan barang/jasa, perubahan struktur organisasi, dan masukan dari satuan kerja terkait, maka perlu dilakukan revisi (yang merupakan revisi ketujuh) dan penggabungan atas Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan *Guideline* tersebut di atas menjadi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (selanjutnya disebut "Kebijakan").

Tujuan penyusunan Kebijakan ini adalah:

- Sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- Sebagai dasar penyusunan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih rinci dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) yang disusun oleh satuan kerja yang menangani kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Ruang lingkup Kebijakan ini meliputi:

- a. Prinsip, etika dan pakta integritas dalam pengadaan barang/jasa.
- b. Jenis pengadaan, pengguna, pelaksana pengadaan, tim evaluasi, serta penyedia barang/jasa.
- c. Metode pengadaan barang/jasa, harga perkiraan sendiri, dan metode evaluasi penetapan pemenang.
- d. Sanggahan dan pengadaan gagal.
- e. Kontrak, serah terima dan pembayaran barang/jasa.
- f. Administrasi dan pelaporan.

Kebijakan ini tidak berlaku untuk pengadaan/penunjukan jasa Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan PPA mengingat pengadaan/penunjukan Kantor Akuntan Publik yang dimaksud mengacu pada Anggaran Dasar PPA.

In order to support the implementation of efficient, effective, open, competitive, transparent, accountable goods and services procurement activities that meet good corporate governance principles, PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") has compiled Policy on Procurement of Goods and Services, Guidelines for Procurement of Consultant Services and Guidelines for Procurement of Operational Goods and Services based on the Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises as amended by Minister of SOEs Regulation No. PER-15/MBU/2012.

Considering the latest developments in goods/service procurement activities, changes in organizational structure, and input from related work units, a revision is required (which is the seventh revision) as well as the combination of the Policy and Guidelines of Goods and Services Procurement above into the Policy of Procurement Goods and Services (hereinafter referred to as "Policy").

The objectives of this Policy formulation are:

- As a guideline for all work units in carrying out the procurement of goods and services.
- As a basis for preparing the provisions for procurement of goods and services in more detail in the form of Standard Operating Procedures (SOP) compiled by work units that handle the procurement of goods and services.

The scope of this Policy includes:

- a. Principles, ethics and integrity pact in the procurement of goods/services.
- b. Types of procurement, users, executors of procurement, evaluation teams, and providers of goods/services.
- c. Method of procurement of goods/services, self-estimated prices, and evaluation methods of determining the winner.
- d. Disclaimer and failed procurement.
- e. Contracts, handover and payment of goods/services.
- f. Administration and reporting.

This policy does not apply to the procurement/appointment of Public Accounting Firm service that will audit PPA financial statements, bearing in mind that the procurement/appointment of Public Accounting Firm refers to PPA's Articles of Association.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) STATE OFFICIAL WEALTH REPORT (LHKPN)

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD.

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Basic Principles of State Official Wealth Report

As an SOEs owned by the Government of Indonesia, the Company is required to comply with binding legislations. One form of legislation that is based on the spirit of corruption eradication and internal irregularities is the obligation of State Official Wealth Report (LHKPN).

LHKPN is a list of all assets or wealth of State Official as set forth in LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in KPK Decision No. KEP 07/KPK/02/2005 on the Procedure for Registration, Examination and Announcement of State Officials Wealth Report. Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission confirms the authority of KPK to execute measures or efforts to prevent corruption, among others through registration and examination of LHKPN. In addition, Law No. 28 of 1999 on State Officials that are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism, mandates that every state official shall report and announce their assets before and after taking office and willing to be examined before and after taking office. Law no. 28 of 1999 Article 2 (7) and its elucidation, describes that other officials with strategic functions in relation to the state administration including Board of Commissioners, Board of Directors and other structural executives at State-Owned Enterprises (SOEs) and Regional-Owned Enterprises (ROE).

The examination of LHKPN submitted to KPK aims at materializing the State Officials who adhere to the general principles of state administration free from corruption, collusion and nepotism practices, and other disgraceful acts. Each State Officials are required to report their wealth through the LHKPN form provided by KPK to be filled honestly, correctly and completely, so that the Commission can analyze, evaluate and assess all amount, types and values of reported assets in a true, correct, prompt, accurate and responsible manner.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
STATE OFFICIAL WEALTH REPORT (LHKPN)**Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan**

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, dan perubahannya.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

Kebijakan LHKPN Perusahaan

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, PT PPA diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuan memperkuat peranan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi. Untuk itu, PPA telah menyusun ketentuan terkait LHKPN melalui Keputusan Direksi Nomor SK-31/PPA/0719 tentang Penetapan Pejabat Wajib Lap, Koordinator Pengelolaan dan Administrator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Tujuan penyusunan Kebijakan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan pelaporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi LHKPN secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat dengan jabatan Kepala Divisi/*General Manager* dan jabatan fungsional setingkat Kepala Divisi/*General Manager*, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi entitas anak. Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator Pengelola LHKPN adalah Kepala Divisi/*General Manager Human Capital*.

Legal and Regulatory Framework In Applying LHKPN in the Company

In applying LHKPN, the Company weighs some legal and regulatory framework as the cornerstone of LHKPN implementation within the Company environment. The legal framework are:

1. Law No. 28 of 1999 on State Officials that are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism.
2. Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission.
3. Minister of SOEs Regulation No. PER-01/BUMN/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance on SOEs, and its amendment.
4. Decree of the Secretary of Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Proper GCG Implementation.

The Company's LHKPN Policy

In order to carry out its obligations and responsibilities to the state, PT PPA is required to compile and report assets to the Corruption Eradication Commission with the aim of strengthening the role of the State Official Wealth Report (LHKPN) as one of the instruments of corruption prevention. For this reason, PPA has compiled provisions related to LHKPN through Decree of Board of Directors Number SK-31/PPA/0719 concerning Determination of Report Mandatory Officials, Coordinator of Management Administrator of State Official Wealth Report. The purpose of this Policy is as a guideline for all parties involved in the reporting of assets to LHKPN Corruption Eradication Commission in an effective, efficient and accountable manner.

Officials who are required to submit LHKPN are Board of Commissioners, Board of Directors Members, Executives with the position of Head of Division/*General Manager* and functional positions that are at the same level as Head of Division/*General Manager*, Board of Commissioners and Board of Directors Members of subsidiaries. The official appointed as LHKPN Management Coordinator is the Head/*General Manager* of Human Capital Division.

Penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada KPK pada saat pengangkatan pertama kali menjabat, pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Karyawan. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama / pengangkatan kembali / berakhirnya jabatan sebagai Karyawan.

Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dan disampaikan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

LHKPN disampaikan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau mengisi formulir LHKPN *format excel* untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau pos) dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Pengumuman LHKPN dilaksanakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK. Dalam hal Wajib LHKPN tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat diberikan sanksi administratif kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan sebagai berikut:

LHKPN must be submitted to KPK at the time of first appointment, re-appointment after the end of the tenure or retirement, or the end of tenure or retirement as an employee. Submission of LHKPN as referred to is submitted within a period of no later than 3 (three) months from the time of first appointment/re-appointment/end of tenure as an Employee.

LHKPN submission during an official's active term of office is done periodically every 1 (one) year on Assets obtained from January 1 to December 31, and submitted to KPK no later than March 31 of the following year.

LHKPN is submitted via e-LHKPN application at www.elhkpn.kpk.go.id; or fill out the excel format LHKPN form to be sent via e-mail elhkpn@kpk.go.id or submitted to the Directorate of LHKPN Registration and Examination (either directly at KPK office or by mail) in the form of an excel file that has been stored in data storage media. LHKPN form can be downloaded through www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

The LHKPN Announcement is carried out no later than 2 (two) months after LHKPN Mandatory Reporter submits LHKPN to KPK. In the case of LHKPN Mandatory Reporter does not submit LHKPN or not fulfill their obligations, administrative sanctions may be given to the LHKPN Mandatory Reporter concerned as follows:

Jabatan Position	Sanksi Administratif Administrative Sanction
Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Members	Penundaan Pembayaran Tantiem/Insentif Kinerja Atau Penundaan Pembayaran Santunan Purna Jabatan Postponement of Payment of Performance Bonus/Incentives or Postponement of Payment of Retirement Benefits
Kepala Divisi/ General Manager Dan Jabatan Fungsional Setingkatnya Head of Division/General Manager/ Functional Positions of the same level	Penundaan Pembayaran Apresiasi/Insentif Kinerja Tahun Berjalan Dan Penundaan Promosi Pangkat/Golongan Postponement Of Payment Of Appreciation/Performance Incentive For Current Year And Postponement Of Grade/Group Promotion
Dewan Komisaris & Anggota Direksi Entitas Anak Board Of Commissioners And Board Of Directors Members Of Subsidiaries	Penundaan Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja Penundaan Pengangkatan Kembali Sebagai Dewan Komisaris/Anggota Direksi Kembali Postponement Of Granting Of Tantiem/Performance Incentives Postponement Of Re-Appointment As Commissioner/Director

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
STATE OFFICIAL WEALTH REPORT (LHKPN)**Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2019****Transparency of Company's Official LHKPN in 2019**

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan wajib lapor di tahun 2019.

Below is the transparency of LHKPN submission of Company's officials that are obliged to report in 2019.

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2019

Disclosure of LHKPN Submission of Company's Officials in 2019

Pejabat Wajib LHKPN LHKPN Mandatory Officials	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Reports	Telah Melaporkan Report Submitted	
		Jumlah Amount	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	3	100,00%
Direksi Board of Directors	4	4	100,00%
Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak Board of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries	7	7	100,00%
Kepala Divisi (BOD-1) Head of Division (BOD-1)	11	11	100,00%
JUMLAH TOTAL	25	25	100,00%

WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen Perusahaan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan CoC dan budaya kerja. Oleh karena itu, Perusahaan menetapkan kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai salah satu bagian yang menjadi acuan perilaku dan budaya kerja Perusahaan. Kebijakan WBS Perusahaan senantiasa dilakukan pemutakhiran untuk meningkatkan efektivitas penerapannya.

Dasar Kebijakan WBS

Perusahaan telah menyusun pedoman pelaporan pelanggaran dan penanganannya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi: SK-3/PPA/0119 tanggal 14 Januari 2019 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*-WBS), menggantikan Surat keputusan Direksi No. SK-27/PPA/0613 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Tujuan

Tujuan penyusunan WBS adalah sebagai pedoman dalam menerapkan dan mengelola pelaporan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan, sehingga tercipta hal-hal sebagai berikut:

- Terciptanya iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perusahaan.
- Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
- Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
- Mengurangi biaya dalam menangani akibat dan terjadinya pelanggaran.
- Meningkatkan reputasi Perusahaan.

Lingkup Pelaporan Pelanggaran

Jenis dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan antara lain:

- a. Korupsi;
- b. Kecurangan;
- c. Gratifikasi;
- d. Benturan kepentingan

In order to improve the effectiveness of Good Corporate Governance implementation, the Company's management is committed to run the Company professionally based on corporate conducts according to the Company's Code of Conduct and corporate culture. Therefore, the Company has implemented Whistleblowing System (WBS) as part of the Company's conducts guideline and corporate culture. The WBS policy in the Company is always be updated to improve its implementation effectiveness.

WBS Policy Framework

The Company has prepared whistleblowing system manual and mechanism that is stipulated according to Board of Directors Decree: SK-3/PPA/0119 dated January 14, 2019 concerning Whistleblowing System (WBS) Policy, replacing Board of Directors Decree No. SK-27/PPA/0613 concerning Whistleblowing System Policy.

Objectives

Objectives of WBS preparation is to be used as a guideline to determine and manage fraud indication report in the Company to encourage following conditions:

- Establishment of conducive climate and encourage reporting on issues with financial and non-financial loss potentials, including issues that may harm the Company's reputation.
- Availability of early warning system on any possibility of issue due to particular violation or fraud.
- Availability of opportunity to handle fraud indication through internal mechanism first before spreading into public fraud issue.
- To reduce cost in dealing with fraud impact and case.
- To improve corporate reputation.

Scope of Violation Report

Type of violation that is eligible to be reported is including:

- a. Corruption;
- b. Fraud;
- c. Gratification;
- d. Conflict of Interest;

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

- e. Pelanggaran hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan bisnis Perusahaan.
- f. Pelanggaran peraturan/kebijakan/prosedur internal yang dapat merugikan Perusahaan.
- g. Ketidapatutan dalam etika bisnis dan etika kerja yang berlaku secara umum.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pihak yang mengelola Laporan pelanggaran di Perusahaan adalah Fungsi Penerima Laporan yang berasal dari Divisi SPI. Fungsi Penerima Laporan melakukan analisis laporan untuk pengumpulan bukti dan informasi. Hasil analisis tersebut disampaikan kepada pihak atau fungsi yang berwenang sesuai dengan peraturan Perusahaan untuk penetapan dan pemberian sanksi.

Berikut adalah Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Perusahaan:

- Ketua: Kepala Divisi Pengawasan Intern.
- Anggota: Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Kepala Divisi SDM dan Umum serta Kepala Divisi Manajemen Risiko.
- Sekretaris: Personil dari Divisi SPI yang ditunjuk oleh Kepala Divisi SPI untuk melaksanakan tugas-tugas administratif.

Saluran Laporan Pelanggaran

Pihak yang berhak melakukan pelaporan adalah setiap pihak terkait dengan Perusahaan atau pihak ketiga di luar Perusahaan yang merasa dirugikan atau hanya ingin melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran dapat dilakukan oleh pelapor melalui:

E-mail : whistleblowing@ptppa.com, atau
Surat : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
 u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran,
 Gedung Sampoerna Strategic Square,
 North Tower, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman
 kav. 45 – 46, Jakarta – 12930
Website : www.ptppa.co.id

- e. Action against the law or other regulation that is relevant with the Company's business;
- f. Violation against internal regulation/policy/procedure with loss potential to the Company;
- g. Inappropriateness in generally applied business and work ethics.

Complaint Management Team

The violation report management in the Company is the Report Receiver Function from SPI Division. The Report Receiver function carries out a report analysis for the collection of evidence and information. The results of analysis are submitted to the authorized party or function in accordance with Company regulations to determine and impose sanctions.

Following is the Company's Violation Report Management Team:

- Chairman: Head of Internal Audit Division.
- Members: Head of Corporate Secretariat Division, Head of Human Capital and General Affaris Division and Head of Risk Management Division.
- Secretary: Personnel from SPI Division who are appointed by Head of SPI Division to carry out administrative tasks.

Violation Report Channel

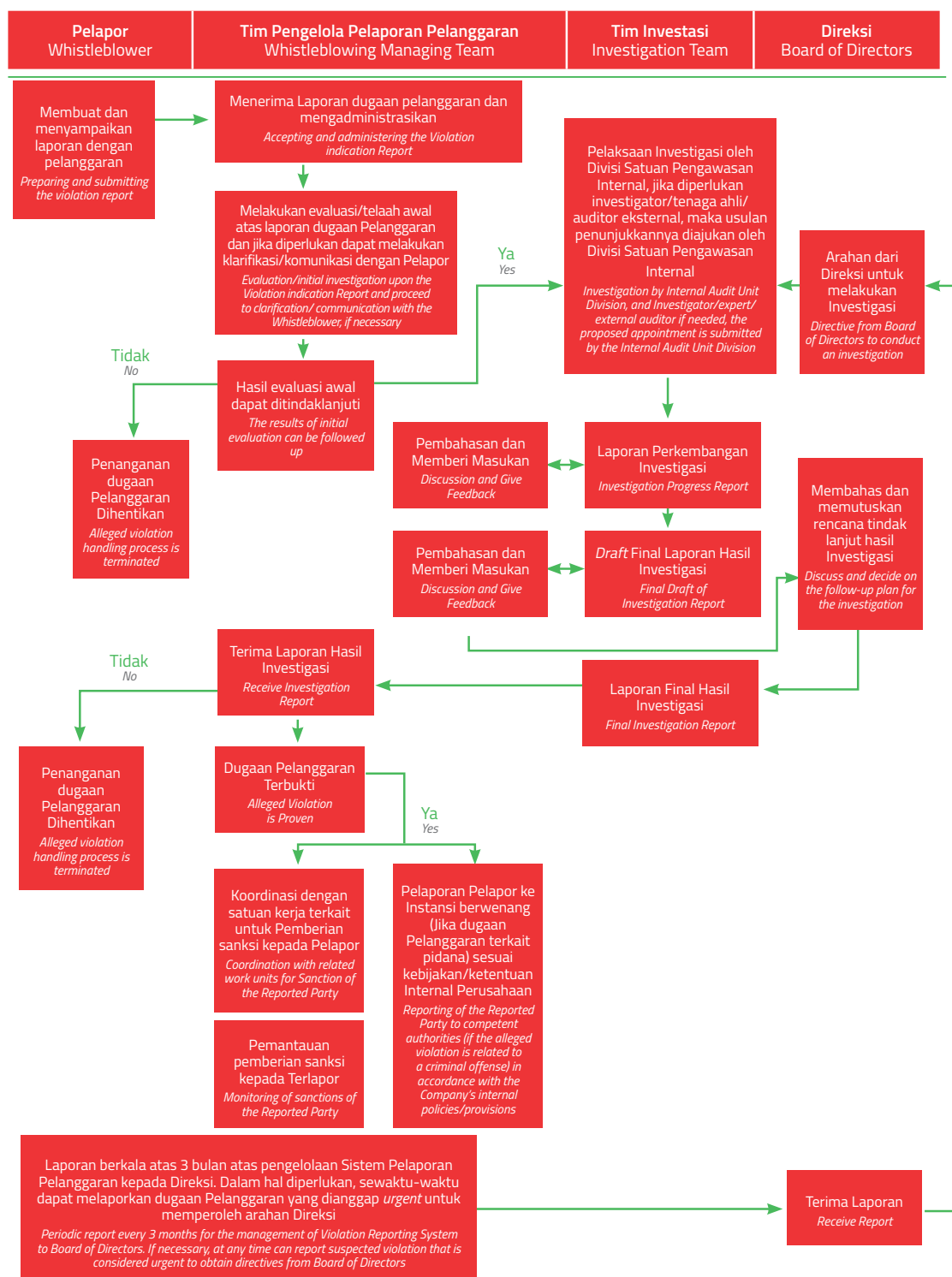
The parties who are eligible to submit reports is every party related to the Company or third parties outside the Company who recognize any loss or has intention to report fraud indication. The violation indication report may be submitted by the whistleblower through:

E-mail : whistleblowing@ptppa.com, or
Mailing : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) u.p
Address Whistleblowing Managing Team Sampoerna
 Strategic Square, North Tower, 9th Floor,
 Jl. Jend. Sudirman kav. 45 - 46, Jakarta - 12930

Website: www.ptppa.co.id

Violation Reporting Mechanisms and Flow

The reporting flow through WBS is as follows:



WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM**Perlindungan Bagi Pelapor**

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan terhadap pelapor meliputi:

- a. Jaminan kerahasiaan terhadap identitas pelapor.
- b. Perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yang terjadi di Perusahaan sebagai akibat dari adanya laporan dugaan pelanggaran oleh insan Perusahaan antara lain:
 - Pemecatan yang tidak adil.
 - Penundaan kenaikan atau penurunan jabatan/pangkat.
 - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk.
 - Catatan yang merugikan dalam personal *file record*.
- c. Jaminan bagi *stakeholders* bahwa Perusahaan tetap akan memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berhubungan dengan Perusahaan.

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

1. Setiap laporan WBS yang masuk akan dicatat dan didaftarkan pada registrasi khusus yang dibuat oleh Tim WBS, kemudian dievaluasi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan selanjutnya dibuat rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk melakukan pendalaman.
2. Jika laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat minimal pelaporan dalam sistem WBS Perusahaan, Tim WBS dapat menyatakan tidak akan melanjutkannya ke tahap investigasi, dan menutup masalah yang dilaporkan tersebut.
3. Jika laporan dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan investigasi, maka Tim WBS menyampaikan perkembangannya kepada Direksi.
4. Setelah selesai investigasi, apabila terbukti maka Tim WBS akan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait untuk memberikan sanksi, jika terkait dengan adanya tindak pidana, maka tim WBS akan menyerahkan kepada instansi yang berwenang.
5. Hal-hal yang terkait dengan pelanggaran yang dianggap *urgent* maka akan dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.

Protection to Whistleblower

For any report that is proven correct, the Company will provide protection to the whistleblower. The whistleblower protection includes:

- a. Confidentiality guarantee on the Whistleblower's identity.
- b. Protection to any harm in the Company as consequence of the violation indication report committed by the Company's People, such as:
 - Unfair termination.
 - Promotion delay or demotion.
 - Any means of abuse or discrimination.
 - Disadvantageous records in personal file record.
- c. Guarantee to the stakeholders that the Company will keep granting equal rights and opportunity to engage with the Company.

If based on the investigation result the defendant is proven committing the violation, punishment will be granted based on prevailing regulations.

Report Handling

1. Every incoming WBS report will be recorded and registered in special registry prepared by the WBS Team, to be later evaluated based on collected evidence and further prepare recommendation whether to perform further thorough investigation.
2. If the violation indication report failed to fulfill minimum reporting requirements in the Company's WBS system, the WBS team will declare not to proceed to investigation stage, and close the reported issue.
3. If the violation indication report is followed-up with investigation, the WBS Team will submit the progress to the Board of Directors.
4. After the investigation is completed, if proven, the WBS Team will coordinate with related work unit to grant punishment, if it is related to criminal acts, the WBS Team will forward to authorized agencies.
5. Any issue related to urgent violation will be reported to the Board of Directors to obtain further direction.

Jumlah Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Per 31 Desember 2019, jumlah pengaduan yang masuk melalui sistem *Whistleblowing System* sebanyak 1 (satu) pelaporan dugaan pelanggaran dan berdasarkan verifikasi yang masuk ke tahap tindak lanjut sebanyak 1 laporan. Berikut laporan yang masuk ke tahap tindak lanjut sepanjang tahun 2019 dan 2018.

Number of Violation Report and Follow Up

As of 31 December 2019, the number of complaints that came through the Whistleblowing System was 1 (one) report of alleged violations and based on verification that entered into the follow-up stage was 1 report. The following are reports that entered into the follow-up stage throughout 2019 and 2018.

No	Status	Jumlah Aduan dan Tindak Lanjut Tahun 2019 Number of Complaints and Follow-Up in 2019	Jumlah Aduan dan Tindak Lanjut Tahun 2018 Number of Complaints and Follow-Up in 2018
Proses Klarifikasi & Pemenuhan Persyaratan Clarification & Fulfillment of Requirements Process			
1	Proses klarifikasi Clarification process	1	-
2	Pemenuhan Persyaratan Fulfillment of Requirements		
	a. Memenuhi syarat (untuk diinvestigasi) Eligible (to be investigated)	-	-
	b. Tidak Memenuhi Syarat Not eligible	1	-
	Jumlah Aduan Number of Complaints	1	-
Proses Investigasi & Putusan Investigation & Verdict Process			
1	Dalam proses Investigasi In the process of investigation	-	-
2	Telah menjadi putusan Has become a verdict		
	a. Memenuhi syarat (untuk diinvestigasi) Eligible (to be investigated)	-	-
	b. Tidak Memenuhi Syarat Not eligible	1	-
	Jumlah Total	1	2

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim WBS terhadap pengaduan tersebut di atas, tidak ditemukan unsur pelanggaran seperti yang dilaporkan.

Based on the results of investigation by WBS Team for the aforementioned complaints, no violation was found as reported.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM**Monitoring dan Evaluasi**

Untuk menjamin efektivitas penerapan WBS perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal penancangan sistem WBS dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis Perusahaan maupun peraturan perundangan yang berlaku. *Monitoring* dan evaluasi dapat dilakukan oleh Direksi melalui Divisi SPI atau menggunakan pihak luar yang independen. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan Sistem WBS maupun melakukan pemantauan atas rekomendasi asesmen penerapan GCG. Hasil *monitoring* dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direksi.

Monitoring and Evaluation

To ensure effectiveness of WBS implementation, monitoring and evaluation are needed to be done. These will be conducted to meet the objectives that has been stipulated at beginning of WBS system initiation and also to ensure that the achievement conforms with the Company's business demand and prevailing Law. Monitoring and evaluation can be done by the Board of Directors through Internal Audit Division or hiring external independent party. The monitoring and evaluation will be done to generate WBS system improvement recommendation or to oversee recommendation from the GCG assessment. Result of monitoring and evaluation are disclosed in form of report to the Board of Directors.

TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*

TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Selama Tahun 2019 tidak ada laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

Report on Company Activities Polluting the Environment

In 2019, there were no reports on the Company's activities that pollute the environment.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Selama tahun 2019 Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Adapun kontribusi pajak dari perusahaan, adalah sebagai berikut.

Disclosure on Fulfillment of Tax Obligations

In 2019, the Company has fulfilled all tax obligations. The tax contributions from the Company are as follows.

Uraian Description	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	2018 (Rp-juta) (Rp-million)
Perusahaan Company		
Pajak Pertambahan Nilai Value-Added Tax	22,134	24,317
Pajak Penghasilan Pasal 22 Income Tax Article 22	97	229
Pajak Penghasilan Pasal 23 Income Tax Article 23	63,605	41,640
Pajak Penghasilan Pasal 25 Income Tax Article 25	4,796	9,192
Entitas Anak Subsidiary		
Pajak Pertambahan Nilai Value-Added Tax	715,654	614,094
Pajak Penghasilan Pasal 22 Income Tax Article 22	11	-
Pajak Penghasilan Pasal 23 Income Tax Article 23	3,816	464
Pajak Penghasilan Pasal 25 Income Tax Article 25	820	138
Pajak Penghasilan Pasal 28a Income Tax Article 28a	1,641	585
Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 Income Tax 2 Paragraph 2	2	951
JUMLAH TOTAL	812,576	691,610

Sampai dengan akhir tahun 2019, PPA tidak memiliki persoalan terkait pajak yang harus disampaikan

Until the end of 2019, PPA has no tax related issues that must be conveyed.

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE
TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES**Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**

Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan

Selama Tahun 2019 tidak ada kasus terkait dengan buruh dan karyawan.

Unconformity of Presentation of Annual Report and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

The entire presentation of information in this Annual Report, particularly related to financial performance and other matters, refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2019 and December 31, 2018 which have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners. The presentation and disclosure of the Company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) as well as prevailing laws and regulations.

Cases Related to Workers and Employees

Throughout 2019, there was no case found related to workers and employees.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan belum menerapkan PSAK 5 tentang Segmen Operasi. Untuk dapat menggambarkan segmen usaha, Perusahaan menggunakan struktur dan sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Jasa Konstruksi, Penjualan, Pendapatan Hasil Investasi, Pinjaman yang Diberikan, Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi, dan Pendapatan Penggantian Biaya.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

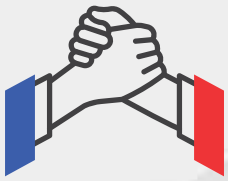
Laporan Tahunan *digital* Perusahaan baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

Disclosure of Operating Segment in Financial Statements

Until the end of 2019, the Company has not applied PSAK 5 on Operating Segments. To be able to describe business segments, the Company uses the structure and source of revenues consisting of Construction Service Revenues, Sales, Revenues from Investment, Loan Receivables, Advisory Service Revenues, and Revenues from Reimbursement Cost.

Conformity of Annual Report Book and Digital Annual Report

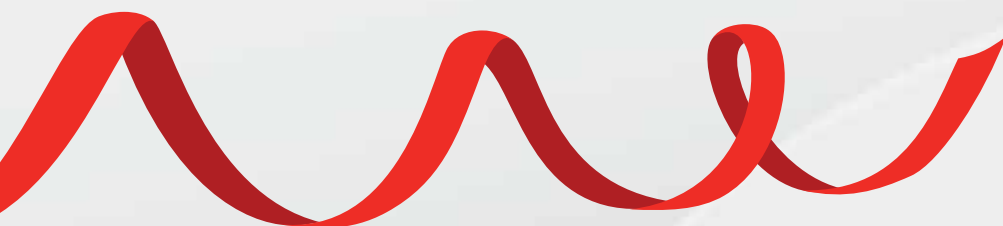
The digital Annual Report of the Company that are submitted to shareholders, stakeholders or uploaded on the Company's official website is in conformity with the Annual Report that are printed and published the Company.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pembangunan yang berkelanjutan mempersyaratkan dunia usaha untuk membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. PPA telah berupaya melakukannya, dan terus menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Sustainable development requires the business world to build harmonious relationships with all stakeholders. PPA has endeavored to do so, and continues to create added value for stakeholders.







Konsep Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainability Development* yang telah berkembang di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara *people*, *profit* dan *planet*. Konsep ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan. *Sustainability Development* menekankan pada 3 (tiga) fondasi penting, yaitu *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

The Sustainable Development concept that has been developed in various countries emerged as part of the desire of many parties to balance between people, profit and planet. This concept can only be realized through strong commitment from all parties, especially the business entities who undeniable relying on profit orientation and tend to ignore the long-term impact of the activities being carried out. Sustainability Development emphasizes on 3 (three) important foundations, namely economic growth, environmental protection, and social equity.

In Indonesia, regulators have encouraged this harmonization effort through Corporate Social Responsibility (CSR), which requires business entities to have policies and programs related to their commitment to build sustainable relationships with stakeholders.

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN POLICY AND GOVERNANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

KOMITMEN PADA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Dalam melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development*, Perusahaan menggunakan pendekatan 5P bagi terwujudnya keseimbangan manusia (*people*), bumi (*planet*), kesejahteraan (*prosperity*), melalui kerja sama yang kuat (*partnership*) untuk menciptakan kedamaian (*peace*). Konsep 5P ini mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*). Dengan demikian diharapkan keberadaan Perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas yaitu pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat sekitar serta Negara.

Kebijakan tersebut mendasari Perusahaan untuk mengimplementasikan CSR di dalam Perusahaan. Perusahaan juga meyakini bahwa kesinambungan usaha tidak hanya diperoleh melalui pencapaian target finansial semata, tetapi juga sangat ditunjang oleh investasi non-finansial yang dibangun melalui kontribusi Perusahaan pada pengembangan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup serta hal-hal yang bersifat responsif terhadap bencana alam dan musibah besar lainnya yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, ke depannya tercipta respon yang konstruktif dan timbal balik di antara *stakeholders* kepada Perusahaan, sehingga memberikan dampak pada peningkatan nilai (*value*) bagi kepuasan seluruh *stakeholders* dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Perusahaan menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang kondisi kesejahteraannya terjamin, akan mempengaruhi kelangsungan bisnis Perusahaan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tanggung jawab terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan, Perusahaan melaksanakan secara konsisten kegiatan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang menyentuh langsung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik kebutuhan pengembangan usaha melalui Program Kemitraan, maupun kebutuhan langsung melalui Program Bina Lingkungan.

KOMITMEN PADA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

In implementing Sustainable Development concept, the Company adapts 5P approach to establish balance among people, planet, prosperity, through strong partnership to create peace. The 5P concept supports the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). Therefore, the Company's existence is expected not only to bring benefit for the Shareholders but also broader Stakeholders including the employees, customers, suppliers, surrounding community, and also the country.

These policies encourage the Company to implement CSR. However, the Company also believes that business sustainability will not only be achieved through the achievement of financial target but also supported by non-financial investment that is developed through the Company's contribution on community development in the field of education, health, environmental management as well as other aspects as responses to natural disaster and other major calamities occurred within the society. Therefore, in the future, constructive response and mutual benefit between the stakeholders and Company will be created and contribute to increase values for satisfaction of all stakeholders and provide benefit for wider society.

The Company realizes that the existence of society with guaranteed welfare condition, will affect the Company's business sustainability. Therefore, to actualize responsibility on social and community development, the Company has consistently conducted CSR activities in form of Partnership and Community Development Program (PKBL) that directly engage with public welfare improvement initiatives, including business development needs through Partnership Program, or direct needs through Community Development Program.

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
POLICY AND GOVERNANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Visi dan Misi pelaksanaan PKBL Perusahaan merujuk pada visi dan misi kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai berikut:

VISI

Sebagai Unit khusus yang mendukung Perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menciptakan kemandirian yang berkelanjutan.

MISI

Unit PKBL Perusahaan berperan aktif dalam:

1. Meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri;
2. Memberdayakan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial masyarakat; dan
3. Meningkatkan dan memberikan citra positif bagi Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam perannya bersama Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fondasi utama dalam mewujudkan visi dan misi di atas adalah melibatkan pemangku kepentingan pada agenda dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilakukan Perusahaan. Pelibatan yang dimaksud adalah menempatkan pemangku kepentingan sebagai mitra yang memiliki harapan serta kepentingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan. Untuk itu, memotret dan mewujudkan harapan dan kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting bagi Perusahaan untuk dapat menciptakan keseimbangan dalam keseluruhan mata rantai usaha dan kegiatan yang dilakukan Perusahaan.

Vision and Mission of the Company's PKBL program refer to the following vision and mission of the Partnership and Community Development Program (PKBL) activities:

VISION

As a special unit that supports the Company in improving the community's social welfare and creating sustainable independence

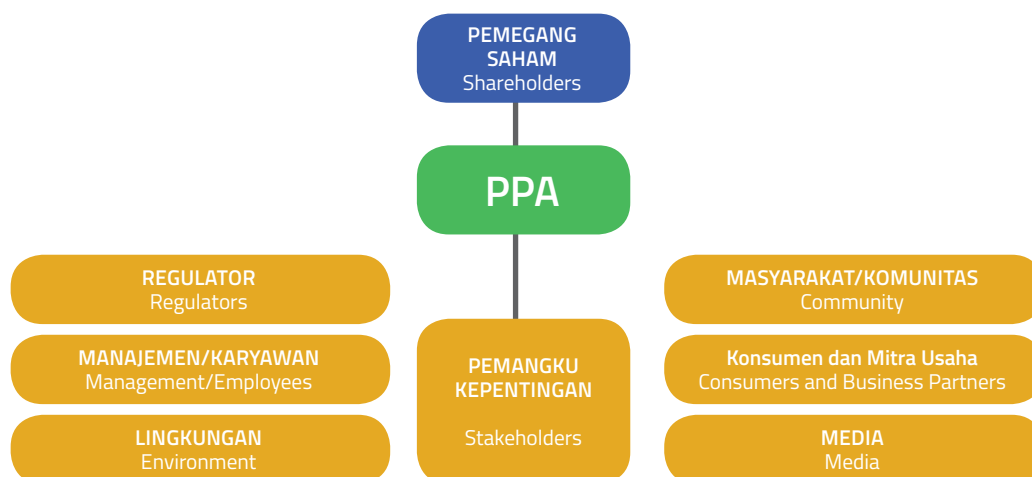
MISSION

CSR/PKBL Unit in the Company takes active role to:

1. Improve the capacity of small business to be resilient and independent.
2. Empower, improve and enhance the social condition of the community; and
3. Improve and create positive image for the Company as one of the State Owned Enterprises, in cooperation with the Government, to improve the public welfare.

The main foundation to realize the above vision and mission is to involve stakeholders in each of the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs. The intended engagement is to place stakeholders as partners who have expectations and interests in the activities carried out by the Company. To that end, capturing and realizing the hopes and interests of all stakeholders is an important part for the Company to be able to create a balance in the overall business chain and activities carried out by the Company.

Keseimbangan dalam Rantai Usaha PPA yang Berkelanjutan Balance in PPA Sustainable Business



Pemangku Kepentingan yang Terdampak atau Berpengaruh dalam Kegiatan Perusahaan

Pemangku Kepentingan didefinisikan sebagai entitas atau individu yang dengan sewajarnya diperkirakan secara signifikan dapat terpengaruh oleh kegiatan, produk, dan jasa Perusahaan, dan kemudian tindakannya diharapkan dapat memengaruhi kemampuan Perusahaan untuk berhasil menerapkan strategi dan mencapai tujuan.

Keberadaan, kegiatan dan keberlanjutan suatu Perusahaan dapat memengaruhi dan dapat dipengaruhi pemangku kepentingan, oleh sebab itu pembinaan hubungan serta pelibatan pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Perusahaan membina hubungan dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari: pemegang saham, karyawan, pemasok, konsumen, pemerintah, masyarakat dan lingkungan hidup; dengan senantiasa berupaya memenuhi harapan yang wajar dari semua pemangku kepentingan. Ketaatan pada peraturan pemerintah dan undang-undang juga merupakan upaya memenuhi harapan yang wajar dari para pemangku kepentingan.

Perusahaan secara aktif melakukan dialog dan menyediakan informasi secara teratur, antara lain melalui penerbitan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Berkala kepada publik. Perusahaan menerima masukan dari pemangku kepentingan sebagai umpan balik dari dialog dan pelaporan serta menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menyusun strategi dan kebijakan serta dalam operasionalisasinya.

Stakeholders Affected or Influence in the Company's Activities

Stakeholders are defined as entities or individuals who are fairly expected to be significantly affected by the Company's activities, products, and services, and their actions are further expected to affect the Company's capability to successfully implement its strategy and achieve its targets.

The existence, activities and sustainability of a company may influence and can be influenced by stakeholders, therefore relationship building and stakeholder engagement are very important. The Company develops relationships with stakeholders including: shareholders, employees, suppliers, customers, government, society and the environment; by always striving to meet the reasonable expectations of all stakeholders. Compliance with government regulations and laws also becomes an effort to meet the reasonable expectations of stakeholders.

The Company also actively engages in dialogue and provides information regularly, which is through the publication of Annual Reports, Sustainability Reports and Periodic Reports to the public. The Company receives inquiry from the stakeholders as feedback from dialogue and reporting and makes it a consideration in formulating strategies and policies and in the operationalization.

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
POLICY AND GOVERNANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Isu-isu Penting Important Issues	Harapan Pemangku Kepentingan kepada Perusahaan Stakeholders Expectations to The Company
Pemegang Saham & Pemodal Shareholders & Investors	- Pertumbuhan laba - Pertumbuhan harga saham - dividen - Profits growth - Stock Price Growth - Dividend	- Tata kelola perusahaan yang baik - Ketersediaan informasi mengenai Perusahaan - Good Corporate Governance - Availability of corporate information
Pemasok Suppliers	- Kontrak jangka panjang - Pembayaran yang cepat - Peningkatan pembelian - Long-term contracts - Fast payment - Increased purchases	- Proses pemilihan pemasok (<i>tender</i>) yang <i>fair</i> - Perlakuan yang wajar dan adil - Ketepatan pemenuhan kewajiban kontraktual - Ketersediaan panduan bagi pemasok - Fair suppliers selection (<i>tender</i>) Process - Fair and equal treatment - Accuracy of contractual obligation fulfillment - Availability of guideline for suppliers
Karyawan & Serikat Pekerja Employee & Workers Union	- Gaji dan upah - Keamanan pekerjaan - Kepuasan kerja - Motivasi - Salary and wages - Job security - Job satisfaction - Motivation	- Kepatuhan pada peraturan Pemerintah mengenai ketenagakerjaan - Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan - Kesejahteraan karyawan - Compliance with Government's regulation on employment - Employee's involvement in decision-making - Employee welfare
Konsumen Consumers	- Jaminan mutu - Kestabilan harga - Ketersediaan barang/jasa - Pelayanan konsumen - Quality assurance - Price stability - Availability of goods/services - Customer service	- Proses <i>tender</i> yang <i>fair</i> - Pemenuhan hak pelanggan - Kepuasan pelanggan - Fair tender process - Fulfillment of customer's rights - Customer satisfaction
Pemerintah Government	- Legalitas operasi - Penerimaan pajak - Penyediaan lapangan kerja - Operations legality - Tax revenue - Provision of employment	- Kepatuhan kepada undang-undang dan peraturan pemerintah - Ketersediaan informasi yang relevan dengan kepentingan pemerintah - Compliance with the Law and Government Regulation - Availability of information that are relevant with interest of the Government
Masyarakat Society	- Dampak ekonomi - Peluang pekerjaan lokal - Economic impact - Local job opportunities	- Peningkatan kesejahteraan melalui kesempatan kerja dan kesempatan sebagai pemasok - Program pengembangan masyarakat - Ketersediaan informasi yang relevan dengan kepentingan masyarakat - Welfare improvement through working opportunity and opportunity to be suppliers - Community development program - Availability of information that are relevant with public interests
Lingkungan Environment	Pencemaran lingkungan Environmental pollution	Keseimbangan ekosistem melalui pemeliharaan lingkungan, pelestarian alam dan perlindungan keanekaragaman hayati Ecosystem balance through environment preservation, environment conservation and bio diversity protection

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
POLICY AND GOVERNANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

5. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai berikut:
 - a. Pasal 2: salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
 - b. Pasal 88: BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
6. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
8. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
10. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
11. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
12. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
13. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
15. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
5. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprise, as follows:
 - a. Article 2: one of the purpose and objective of SOEs establishment is to actively provide guideline and assistance to marginal economy entrepreneurs, cooperatives and the society.
 - b. Article 88: SOEs may allocate a portion of its net income for small enterprise/cooperative development as well as community development in the SOEs neighborhood
6. Law No. 40 of 2007 on Limited Company.
7. Law No. 25 of 2007 on Investment.
8. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management
9. Law No. 36 of 2009 concerning Health.
10. Law No. 13 of 2011 concerning Management of the Poor
11. Law No. 24 of 2011 on the Social Insurance Provider
12. Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Company.
13. Government Regulation No. 50 of 2012 on Occupational Safety and Health Management System Implementation
14. Regulation of the Minister of Manpower No. 05/MEN/1996 on Occupational Safety and Health Management System (OSHMS)
15. Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program and Community Development Program in State-Owned Enterprise as amended through Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 on the Second Amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program and Community Development Program in State-Owned Enterprise.

Gambaran tentang kewajiban yang diemban Perusahaan dalam implementasi TJSL adalah sebagai berikut.

The description about the Company's obligations in implementing TJSL is as follows.

FAKTOR PEMBENTUK FORMING FACTOR

Sebagai entitas usaha yang berdomisili di Indonesia

As a business entity that is domiciled in Indonesia

Sebagai entitas usaha dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir sekaligus Pemegang Saham Pengendali

As a business entity with the Government of Indonesia as the ultimate owner and controlling shareholder

KEWAJIBAN DAN KEPATUHAN OBLIGATION AND COMPLIANCE

Perusahaan wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas yang berdomisili di Indonesia, seperti ketenagakerjaan, K3, perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap peraturan pasar modal, dsbnya.

The Company must comply with the laws and regulations relating to Limited Liability Companies domiciled in Indonesia, such as employment, OHS, consumer protection, compliance with capital market regulations, etc.

Meskipun statusnya bukan lagi BUMN, Perusahaan diperlakukan selayaknya BUMN dan wajib menerapkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Even though the status is no longer an SOEs, the Company is treated as an SOEs and must implement the Partnership and Community Development Program (PKBL).

Perusahaan melaksanakan kewajiban TJSL melalui kegiatan PKBL dan tidak melaksanakan secara khusus program CSR.

The Company carries out its TJSL obligations through PKBL activities and does not specifically implement CSR programs.

Organisasi, Penanggung Jawab dan Pengelola

Pelaksanaan kegiatan TJSL di Perusahaan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Unit PKBL. Kepala PKBL Perusahaan dirangkap jabatannya oleh Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Berikut ini adalah struktur organisasi PKBL.

Organization, Person in Charge and Manager

TJSL activities implementation in the Company is part of PKBL Unit's duties and responsibilities. The Company's Head of PKBL is concurrently held by the Head of Corporate Secretariat Division and reports directly to the President Director. The following is PKBL's organizational structure.



KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
POLICY AND GOVERNANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Lingkup tugas dan tanggung jawab Unit PKBL adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan rencana kerja, kebijakan dan SOP PKBL dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Perusahaan;
2. Menyusun rencana, mengimplementasikan, dan mengawasi kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
3. Melaksanakan kegiatan akuntansi PKBL sampai dengan pelaporan interim dan tahunan;
4. Menyusun Laporan PKBL secara berkala dan Laporan Tahunan PKBL termasuk pemutakhiran portal PKBL sesuai ketentuan.

PKBL Unit's scope of duties and responsibilities are as follows:

1. Provide input for PKBL work plans, policies and SOPs in order to support the Company's goals achievement;
2. Set plans, implementing, and supervising the Partnership and Community Development Program activities;
3. Carry out PKBL accounting activities up to interim and annual reporting;
4. Periodically compile PKBL Reports and PKBL Annual Reports including updating the PKBL portal in accordance with the provisions.

Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Terhadap program dan kegiatan TJSL di sepanjang tahun 2019, berikut disampaikan pembiayaan dan anggaran yang ditetapkan Perusahaan di awal tahun 2019 dan realisasinya di akhir tahun 2019.

Cost and Budget of Corporate Social Responsibility

Following are the budget of TJSL's activities that has been determined by the Company at the beginning of 2019 and the realization at the end of 2019.

	Realisasi 2019 (Rp-juta) Realization in 2019 (Rp-Million)	Target 2019 (Rp-juta) Target in 2019 (Rp-Million)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019 (%) Realization Against Target Achievement in 2019 (%)		Realisasi 2018 (Rp-juta) Realization in 2018 (Rp-Million)	Realisasi 2019 Terhadap Realisasi 2018 Realization Against Target in 2019 (%)	
	1	2	(1:2)		3	(1:3)	
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Partnership and Community Development Program	11.158	12.862	86,75%	●	12.700	-12,14%	●
Program Kemitraan Partnership Program	9.158	10.862	84,31%	●	11.107	-17,55%	●
Program Bina Lingkungan Community Development Program	2.000	2.000	100,00%	—	1.593	25,55%	●
Pengembangan Kompetensi SDM HC Competency Development	2.208	7.507	29,41%	●	1.612	36,97%	●

Sebagian besar dana tanggung jawab sosial Perusahaan digunakan untuk kegiatan CSR pada aspek Sosial Kemasyarakatan dan kegiatan kepedulian terhadap Lingkungan Hidup melalui program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sementara untuk aspek Ketenagakerjaan dan K3, serta aspek tanggung jawab terhadap Produk/Jasa Serta Konsumen dan Pemasok, mengikat pada biaya operasional Perusahaan.

Most of the Company's social responsibility funds are used for activities in the social aspect and environmental awareness through the Partnership and Community Development program. While for Employment and OSH, as well as aspects of responsibility for Products/Services and Consumers and Suppliers, they are binding on the Company's operational costs.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN HUMAN RIGHTS



Komitmen dan Kebijakan pada Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi mulai dari hak-hak dasar seseorang hingga hak sosial, hukum dan ekonomi. Hak-hak ini berkaitan dengan internal maupun eksternal Perusahaan. Dalam mengimplementasikan CSR, Peseroan diwajibkan untuk menghormati sekaligus menjunjung tinggi hak-hak asasi seseorang. Dengan mengimplementasikan HAM sebagai panduan prinsip keberlanjutan, diharapkan keberadaan Perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan dan Perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas, mudah memperoleh akses terhadap modal, mampu mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis, mempermudah pengelolaan manajemen risiko serta terjadi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Commitment and Policy in Human Rights

Human Rights includes every aspects starting from basic rights to social, legal and economic rights. These rights are related to the internal and external aspects of the Company. In implementing CSR, the Company is required to respect and uphold one's human rights. By implementing human rights as a guideline for sustainability principles, it is expected that the Company's existence can grow in sustainable basis and the Company will obtain a positive image from the broader community, easy capital access, capability to maintain high-quality human resources, improving decision making on critical issues, simplifying management risk management and labor absorption as well as improvement of social and economic quality of the local community.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN HUMAN RIGHTS**Pemangku Kepentingan dan Lingkup Dampak
Tanggung Jawab Sosial Hak Asasi Manusia**

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM di lingkup operasi dan bisnisnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait pelaksanaan HAM di lingkungan Perusahaan di antaranya meliputi penegakkan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh pegawai, kebebasan berserikat, pelaksanaan sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai, komitmen atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta hal terkait lainnya.

Sasaran, Rencana dan Target

Dalam pemenuhan HAM pada lingkup operasi dan bisnisnya, Perusahaan menekankan pentingnya hak-hak karyawan, terutama hak terkait HAM seperti kehidupan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta pemenuhan hak dasar hidup seperti kelahiran. Perusahaan telah memiliki sejumlah Prosedur Tetap yang mengatur berbagai pemenuhan HAM karyawan, dan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan penerapan Prosedur Tetap sejalan dengan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks. Selain itu, Perusahaan menekankan perihal tanggung jawab sosial terkait HAM pada sasaran dengan melaksanakan seluruh kebijakan yang terkait dengan ruang lingkup HAM tersebut.

Penerapan Inisiatif Hak Asasi Manusia

Komitmen dan kebijakan Perusahaan atas HAM berbasiskan pada *Universal Declaration of Human Rights*, termasuk juga kovenan internasional pada hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan kultural serta Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip Dasar dan Hak-hak dalam Bekerja, dengan penerapan dan pengelolaan yang baik terhadap praktik ketenagakerjaan serta hak asasi manusia sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selama tahun 2019 tidak terdapat pengaduan terkait pelanggaran praktik ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia termasuk insiden diskriminasi yang diajukan pegawai kepada Perusahaan.

**Stakeholders and Scope of Impact of Social
Responsibility in Human Rights**

The Company is committed to always upholding human rights within its operations and business. The scope of social responsibility related to the implementation of human rights in the Company's environment includes upholding the principle of diversity and equality for all employees, freedom of association, implementation of remuneration system and employee welfare, commitment to the Collective Labor Agreement (PKB) and other related matters.

Objectives, Plans and Targets

In fulfilling human rights within the scope of its operations and business, the Company emphasizes the importance of employee's rights, especially those related to human rights such as decent living, the right to association and assembly, as well as the fulfillment of life basic rights such as birth. The Company has a number of Permanent Procedures that regulate various fulfillment of employee's human rights, and will continue to evaluate and develop the application of those Permanent Procedures in line with the increasingly complex needs of human life. In addition, the Company accentuates the social responsibility related to human rights with the objectives of implementing all policies within the scope of human rights.

Initiatives in Human Rights

The Company's commitments and policies on human rights are based on the Universal Declaration of Human Rights, including the international covenant on civil rights, political, economic, social and cultural rights and the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, with application and good management of labor practices and human rights in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.

During 2019, there were no complaints related to violations of labor practices and human rights including discrimination incidents submitted to the Company by the employees.

Beberapa implementasi dalam tanggung jawab sosial yang terkait aspek HAM antara lain:

1. Sebagai penerapan prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama baik pria maupun wanita untuk bergabung bersama Perusahaan.
2. Selama tahun 2019 tidak terjadi insiden pelanggaran maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat di lingkungan Perusahaan. Hal ini merupakan bukti penerapan Perusahaan terhadap Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sekaligus mematuhi konvensi *International Labour Organization* (ILO) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.
3. Pegawai tidak tetap, hak-haknya dilindungi berdasarkan kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku serta kebijakan Peraturan Perusahaan.

Kesetaraan peluang dalam bekerja di Perusahaan merupakan penerapan-penerapan prinsip hak asasi manusia di tempat kerja di mana hak semua orang yang bekerja dengan Perusahaan dihargai sebagaimana mestinya. Kondisi ini diperlukan agar bisnis dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sekaligus terpenuhinya hak-hak asasi manusia.

Kesetaraan di tempat kerja diwujudkan dengan keberagaman dan inklusi untuk semua orang, dengan menghormati dan menghargai ragam perbedaan termasuk suku, gender, usia, asal bangsa, diskriminasi orientasi seksual, pendidikan dan agama. Sebaliknya inklusi keberagaman di tempat kerja memberikan bermacam-macam perspektif, pengalaman kerja, gaya hidup dan budaya. Bagi Perusahaan keberagaman dalam organisasi diperlukan untuk berkembang, keberagaman pikiran dan hati maupun bakat merupakan modal untuk membuka peluang bisnis.

Some implementations of social responsibility related to human rights aspect are including:

1. Implementation of the principle of equality and human rights, the Company provides equal opportunities for both male and female to join the Company.
2. There was no violation or complaint related to freedom of association in the Company throughout 2019. This is the evidence of the Company's applying Law Number 13 of 2003 concerning Labor, Law Number 21 of 2000 concerning Trade Union/Labor Union while complying with the International Labor Organization (ILO) convention on Freedom of Association and Protection of the Right to Assembly.
3. Non-permanent employees, their rights are protected under a Specific Time Work Agreement contract which refers to the applicable legal provisions and the Company's policies.

Equality of opportunity to work in the Company becomes the actualization of human rights principle at the workplace where the rights of all people who work with the Company are respected accordingly. This condition is needed, so that businesses can grow and develop well while fulfilling human rights.

Equality in the workplace is realized by diversity and inclusion for all people, by appreciating and respecting various differences including ethnicity, gender, age, national origin, disability sexual orientation, education and religion. Conversely, the inclusion of diversity in the workplace provides a variety of perspectives, work experience, lifestyle and culture. For the Company, diversity in organization is needed to develop, diversity of mind and heart and talent is the capital to open business opportunities.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN FAIR OPERATIONS

Komitmen dan Kebijakan pada Aspek Operasi yang Adil

Tanggung jawab sosial dalam kacamata Perusahaan bersifat menyeluruh, dari hulu sampai hilir. Oleh karenanya praktik CSR Perusahaan tidak hanya dijalankan di luar praktik operasi Perusahaan, namun juga menyatu dengan praktik operasional Perusahaan. Merujuk pada ketentuan dasar pelaksanaan CSR pada ISO 26000 praktik operasi yang adil mencakup anti korupsi, keterlibatan yang bertanggungjawab dalam politik, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok (*supply chain*) dan penghargaan atas *property rights*.

Pemangku Kepentingan dan Lingkup Dampak Tanggung Jawab atas Operasi yang Adil

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan Perusahaan yang transparan, wajar, dan setara. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

1. Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Perusahaan yang transparan dan akuntabel.
2. Karyawan yang berkepentingan terhadap Prosedur Tetap yang wajar, adil, dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan.
4. Konsumen dengan kepentingan atas mutu produk dan layanan.
5. Regulator yang memiliki kepentingan atas industri yang stabil.

Commitment and Policies on Fair Operations Aspect

The Company views social responsibility comprehensively, from upstream to downstream. Therefore, CSR practice in the Company is not only implemented outside the Company's operational practice, but also integrated with the Company's operational practice. Referring to CSR implementation basic framework in ISO 26000, fair operations practice includes anti-corruption, fair competition, promoting social responsibility in supply chain and acknowledgement on property rights.

Stakeholders and Scope of Impact of Social Responsibility in Fair Operations

Fair operations mainly emphasize the importance of transparent, fair and equal management of a company. Fulfilling the fair operations aspect involves various stakeholders' interests, including:

1. Shareholders and their interests in a transparent and accountable company management.
2. Employees with their interest in the Permanent Procedures that are reasonable, fair, and accountable work mechanisms.
3. Business partners and suppliers and their interest in the partnership process that relies on transparency and fairness.
4. Consumers and their interest in responsible service management.
5. Regulators who have an interest in a stable industry.

Sasaran, Rencana dan Target

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan Inisiatif Operasi yang Adil

Komitmen Anti Korupsi dan Anti Fraud

Perusahaan memiliki komitmen tinggi untuk berpartisipasi pada upaya pemberantasan tindak kejahatan korupsi dan penyalahgunaan wewenang (*fraud*) sebagai bagian dari komitmen terhadap peningkatan kualitas implementasi prinsip-prinsip GCG. Bagi Perusahaan, setiap tindakan yang menyangkut integritas, etika dan perilaku tidak pantas, terutama *fraud* dan korupsi merupakan pelanggaran berat yang harus ditindak dengan tegas dan dicegah melalui pemahaman mendalam pada setiap jajaran.

Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi seperti yang dinyatakan dalam Pedoman Perilaku dan Etika serta Peraturan Perusahaan. Semua karyawan Perusahaan harus memiliki komitmen untuk mematuhi dan mengikuti pedoman perilaku dalam melaksanakan tugas. Memperkuat upaya pencegahan, Perusahaan menerapkan sanksi tegas dan tanpa kompromi pada setiap kejadian yang mengindikasikan korupsi, penipuan atau pelanggaran perilaku lainnya.

Objectives, Plans and Targets

Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees always uphold fair competition, value of sportsmanship and professionalism, as well as GCG principles. The Company is also committed to create a healthy business climate, avoiding actions or behaviors that can cause conflicts of interest, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and always prioritize the Company's interests above personal, family or group interests.

The Company also always pays attention to anti-corruption policies as written in Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication.

Fair Operations Initiatives

Anti Corruption and Fraud Commitment

The Company has high commitment to participate in corruption crime eradication and abuse of authority (fraud) as part of commitment to improve GCG principles implementation quality. The Company views that every action related to integrity, ethics and inappropriate action, particularly fraud and corruption as heavy violation that shall be punished firmly and prevented through deep understanding in every level.

The Company has anti-corruption policy as declared in the Code of Conduct and Corporate Regulation. All employees of the Company shall have a commitment to comply and obey the code of conduct in carrying out their works. To strengthen the preventive initiative, the Company has implemented firm sanction and zero compromise for any case with corruption, fraud or other conducts of violation.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA OPERASI YANG ADIL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN FAIR OPERATIONS

Untuk memastikan implementasi kebijakan anti korupsi dan penyalahgunaan wewenang, Perusahaan menjalankan dua inisiatif utama, yakni implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian internal, serta implementasi kebijakan penindakan. Kebijakan pengawasan dan pengendalian internal, dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal. Sementara implementasi kebijakan penindakan dilakukan melalui Sistem *Whistleblowing* yang pada dasarnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Perusahaan telah menetapkan *whistleblowing system* untuk mengumpulkan informasi pelanggaran, terutama yang menyangkut hukum dan peraturan, serta untuk menangani tindakan kesalahan melalui sistem perbaikan diri. *Whistleblowing* adalah mekanisme pelaporan internal untuk mencegah dan menghindarkan terjadinya pelanggaran atau *fraud*.

Melalui sistem ini, pelapor dapat menyampaikan dugaan terjadinya kesalahan dan berkomunikasi dengan tim *whistleblower*, dengan kerahasiaan identitas pelapor tetap terjaga. Di dalam mekanisme ini terdapat tahapan penyelidikan pada setiap kasus yang memiliki bukti-bukti kuat sebagai dasar pengenaan tindakan *indisipliner*, termasuk sanksi pemberhentian hubungan kerja sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi.

Berkat implementasi mekanisme pencegahan dan penindakan yang dijalankan secara konsisten tersebut, sepanjang tahun operasional 2019, tidak ada laporan penyalahgunaan wewenang maupun korupsi yang ditemukan di seluruh level operasional perusahaan.

Selain itu, Perusahaan memiliki perangkat kebijakan lainnya, antara lain:

Pakta Integritas

Dewan Komisaris, Direksi beserta seluruh karyawan Perusahaan telah berkomitmen dan menandatangani pakta integritas untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan dan tata tertib perusahaan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta integritas juga berlaku bagi seluruh *supplier* yang bekerja sama dengan Perusahaan. Tujuan dari pakta integritas tersebut adalah untuk mendorong keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel dalam lingkungan bisnis Perusahaan.

To ensure the implementation of anti-corruption and abuse of authority policies, the Company has executed two main initiatives, namely the implementation of supervision and internal control policies, as well as the implementation of enforcement policies. The supervision and internal control policies are carried out by the Internal Audit Unit. Meanwhile, the implementation of enforcement policy is carried out through the Whistleblowing System which basically involves all stakeholders.

The Company has established a whistleblowing system to collect violation information, especially concerning laws and regulations, as well as to deal with mistakes through a system of self-improvement. Whistleblowing is an internal reporting mechanism to prevent and avoid violations or fraud.

Through this system, the whistleblower may submit the case of fraud and communicate with the whistleblower team, with the confidentiality of the reporter's identity maintained. In this mechanism, there are stages of investigation in each case that have strong evidence as the basis for imposing disciplinary action, including sanctions for terminating employment relation according to the level of occurred violation.

Thanks to the consistent implementation of the preventive and enforcement mechanism, throughout the 2019 operational year, there were no reports of abuse of authority or corruption found at all operational levels of the Company.

In addition, the Company has other policy tools, including:

Integrity Pact

Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of the Company have been committed to sign integrity pact to perform all duties, functions, responsibility, authority and roles according to the law and regulation, the Company's regulation and Code of Conduct as well as willingness not to commit any corruption, collusion and nepotism. The integrity pact also prevails for all suppliers who cooperate with the Company. The purpose of the integrity pact is to encourage transparency and honesty, as well as to encourage high-quality, effective, efficient and accountable duty implementation in the Company's business circumstances.

Kebijakan Anti Gratifikasi

Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pimpinan Senior Perusahaan.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat akan kepatuhan insannya dalam menjaga citra Perusahaan. Insan Perusahaan dilarang untuk mencemarkan nama baik Perusahaan melalui tindakan-tindakan yang merugikan citra Perusahaan. Seluruh insan Perusahaan dilarang menerima gratifikasi yang memberikan keuntungan pribadi, diri sendiri dan keluarganya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, serta yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Komunikasi dan Pelatihan Anti Korupsi

Untuk menjamin kesamaan persepsi, kesamaan tekad dan efektivitas gerakan pencegahan tindak korupsi, Perusahaan juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bertema *antifraud/antikorupsi*. Pendidikan dan pelatihan khusus menyangkut korupsi dilakukan melalui kegiatan *Workshop* dan *Training*, selain itu juga dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai perwujudan transparansi dan perilaku anti suap melalui pengungkapan harta kekayaan (LHKPN) dan Pengendalian Gratifikasi dengan peserta Dewan Komisaris dan Direksi.

Anti Gratification Policy

The Company has a policy on state apparatus wealth reporting compliance for Board of Commissioners, Board of Directors and Senior Executive in the Company.

State Official Wealth Report (LHKPN)

The Company has a firm commitment on compliance of its employees in maintaining the Company's reputation. Employees in the Company are prohibited to defame reputation of the Company through activities that may cause loss to the Company. All of the Company's employee are prohibited to take any gratification with personal benefit or benefit for their families, either received domestically or overseas, and committed using electronic or without electronic devices.

Anti-Corruption Communication and Training

To guarantee an alignment of perception, common determination and effectiveness of corruption prevention movement, the Company also organizes anti-fraud/anti-corruption trainings. Specific education and training related to corruption is also done through Workshop and Training activities. Besides that, socialization activity on the establishment of transparency and anti-bribery behavior is also done through the State Official Wealth Report (LHKPN) and Gratification Control with Board of Commissioners and Board of Directors as participants.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENT



Komitmen dan Kebijakan pada Aspek Lingkungan Hidup

Perusahaan menyadari bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan memberikan dampak bagi lingkungan. Untuk itu Perusahaan secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak saja terhadap karyawan tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan. Kebijakan Perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dimulai dari internal Perusahaan, yaitu dengan menerapkan berbagai kebijakan yang berwawasan lingkungan.

Perusahaan memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap kegiatan Perusahaan telah memiliki dokumen lingkungan sebagai acuan untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan dari setiap kegiatan operasional.

Commitment and Policies in Environment Aspect

The Company realizes that its business activities have an impact on the environment. Therefore, the Company proactively develops a culture of environmental responsibility not only for employees but also for the public in general. This is carried out to reduce the environmental impact of the Company's activities. The Company's policy in maintaining and preserving the environment starts from the Company's internal, namely by implementing various eco-friendly policies.

The Company has a commitment to the environment. Referring to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Conservation and Management, every activity of the Company shall maintain sustainability of environmental function. Therefore, every activity of the Company has environmental document as a guidance to manage environmental impact generated from every operational activity of the Company.

Perusahaan juga merealisasikan program penghematan energi dan air sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air. Tujuan pelaksanaan program CSR terhadap lingkungan hidup adalah membangun dan menjaga pelestarian ekosistem alam, sekaligus memberi kontribusi nyata untuk lingkungan hidup.

Pemangku Kepentingan dan Lingkup Dampak Tanggung Jawab atas Lingkungan

Perusahaan menyadari aktivitas bisnis yang dilakukan memberikan dampak bagi lingkungan. Untuk itu Perusahaan secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak saja terhadap karyawan tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan. Kebijakan Perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dimulai dari internal Perusahaan, yaitu dengan menerapkan berbagai kebijakan yang berwawasan lingkungan.

Perusahaan memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap kegiatan Perusahaan telah memiliki dokumen lingkungan sebagai acuan untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan dari setiap kegiatan operasional. Perusahaan juga merealisasikan program penghematan energi dan air sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air. Tujuan pelaksanaan program CSR terhadap lingkungan hidup adalah membangun dan menjaga pelestarian ekosistem alam, sekaligus memberi kontribusi nyata untuk lingkungan hidup.

The Company also realizes energy and water efficiency program as mandated in the Republic of Indonesia Presidential Instruction Number 13 of 2011 concerning Energy and Water Efficiency. The purpose of CSR in environmental program is to develop and maintain natural ecosystem conservation, at the same time making real contribution to the environment.

Stakeholders and Scope of Impact of Social Responsibility in Environment

The Company realizes that its business activities have an impact on the environment. For this reason, the Company proactively fosters a responsible culture to the environmental which not only for employees but also for the general public. Thus, the Company's environmental impact can be reduced. The Company's policies in environmental maintenance and preservation starts from internal, namely by implementing various policies that are environmentally friendly.

The Company has a commitment to the environment. Referring to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Conservation and Management, every activity of the Company shall maintain sustainability of environmental function. Therefore, every activity of the Company has environmental document as a guidance to manage environmental impact generated from every operational activity of the Company. The Company also realizes energy and water efficiency program as mandated in the Republic of Indonesia Presidential Instruction Number 13 of 2011 concerning Energy and Water Efficiency. The purpose of CSR in environmental program is to develop and maintain natural ecosystem conservation, at the same time making real contribution to the environment.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENT

Sasaran, Rencana dan Target

Rencana kegiatan CSR yang terkait dengan lingkungan hidup melekat pada kegiatan operasional terkait maupun direncanakan secara khusus dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan CSR yang melekat pada kegiatan operasional seperti konsumsi energi, penggunaan kendaraan operasional, penghematan kertas, pemeliharaan Mekanikal Elektrikal (ME) dan lainnya ditetapkan melalui anggaran kegiatan terkait. Sedangkan rencana yang terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan ditetapkan dengan menggunakan anggaran khusus.

Objectives, Plans and Targets

CSR activity plan related to the environment is embedded in operational activities and is specifically planned for social community activities. CSR activities that are attached to operational activities such as energy consumption, use of operational vehicles, paper savings, Mechanical Electrical maintenance (ME) and others are determined through the related activity budget. However, plans related to social activities are determined using a special budget.

Rencana Kegiatan
Activity Plans

No	Strategi Strategy	Tujuan Purpose	Rencana Aksi Action Plan	Waktu Pelaksanaan Implementation Date
1	Implementasi Pengelolaan Emisi Udara Implementation of Air Emission Management	Pemenuhan baku mutu lingkungan dalam seluruh emisi gas buang yang dikeluarkan kendaraan dinas Fulfillment of environmental standard in the entire waste gas emission generated by operational vehicles	Pemantauan dan pengukuran rutin serta pengendalian proses agar baku mutu terpenuhi Periodic process monitoring and measurement and controlling to fulfill the quality standard	Program keberlanjutan setiap tahun Annual Program
2	Implementasi Penghijauan Greening Program Implementation	Melakukan penanaman pohon Tree planting	Penanaman pohon Tree planting	Program keberlanjutan Continuous Program
3	Implementasi Efisiensi Energi Implementation of Energy Efficiency	Penghematan listrik untuk pemakaian sendiri Electricity Efficiency for Internal Use	Melaksanakan program-program efisiensi energi Energy Efficiency Program Implementation	Program keberlanjutan setiap tahun Annual Program

Penerapan Inisiatif Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan yang dilakukan sebagai wujud komitmen dalam menjaga lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Edukasi Pemeliharaan Lingkungan
Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan pemberian fasilitas tempat sampah.
2. Efisiensi Penggunaan Material Kertas (*Paperless*)
Mengurangi konsumsi kertas dengan beberapa inisiatif, seperti pemakaian kertas bolak balik, menghentikan penggunaan kertas untuk dokumen pembukaan tender, membiasakan mengirim dokumen melalui *email*, sehingga hanya mencetak halaman yang diperlukan, serta pemakaian kembali kertas bekas. Penghematan penggunaan kertas terus diupayakan yaitu melalui dukungan Teknologi Informasi sehingga transaksi yang berbasis kertas diganti dengan tanpa kertas (*paperless*).

Environmental Initiatives

Activities that have been carried out as the manifestation of commitment in protecting the environment are as follows:

1. Environmental Conservation Education
Perform education to the society to always maintain the cleanliness of environment by donating waste bin facility.
2. Paper Material Use Efficiency (*Paperless*)
Reduce paper consumption through several initiatives, such as using both sides of paper, stop using paper for tender opening documents, introducing the habit to deliver documents via e-mail, and only print the necessary pages, and reusing used paper. Paper use efficiency is continuously attempted through Information Technology support so that paper-based transaction can be altered with paperless transaction.

3. **Pengaturan Penggunaan Kendaraan Operasional**
Melakukan kontrol yang ketat pada penggunaan bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor serta pelaksanaan pemeliharaan kendaraan operasional secara teratur sehingga membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan penghematan bahan bakar.
4. **Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal (ME)**
Membantu mengurangi penggunaan energi dan listrik serta memperpanjang usia pemakaian peralatan ME yang dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dampak dari limbah peralatan ME.
5. **Efisiensi Konsumsi Energi Listrik**
Hemat listrik dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, mematikan komputer dan peralatan elektronik lain jika akan ditinggal atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, misalnya saat makan siang atau menghadiri rapat atau pulang kantor. Selain itu, sedapat mungkin mematikan lampu-lampu untuk ruangan yang telah cukup mendapatkan penerangan alamiah dari sinar matahari.
6. **Pencapaian Udara Bersih dan Udara Sehat**
Mengurangi polusi udara dengan cara menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan (oktan tinggi) untuk kendaraan operasional kantor, rutin melakukan uji emisi dan peremajaan kendaraan operasional.
7. **Pengelolaan Limbah**
Untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan, Perusahaan melakukan berbagai upaya, termasuk diantaranya uji emisi dan penggunaan BBM dengan kualitas yang baik bagi kendaraan dinas dan operasional yang lebih ramah lingkungan. Untuk limbah beracun yang didapat dalam operasional sehari-hari, yaitu oli bekas dari kendaraan operasional, Perusahaan menyerahkannya kepada pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. **Operational Vehicle Use Arrangement**
Implementation of tight controlling on oil fuel consumption for office operational vehicle and implementation of operational vehicle maintenance regularly that will support reducing environmental pollution and oil fuel efficiency.
4. **Electrical Mechanical (EM) Maintenance**
To support reducing energy and electricity use, as well as to extend the EM equipment usage period to help reducing environmental pollution as the impact of EM equipment.
5. **Electricity Energy Consumption Efficiency**
Electricity efficiency is implemented through various methods, namely, turning off other electronic devices when away or unused for a while, such as during the lunch break or attending meeting or end of office hours. In addition, always tries to switch-off the lamps for rooms with natural sun lighting
6. **Clean and Healthy Air Achievement**
To reduce air pollution by using more eco-friendly (high octane) fuels for office operational vehicles, periodically do emission test and operational vehicle renewal.
7. **Waste Treatment**
To reduce impact from environmental pollution, the Company performs various efforts, including emission test and using good quality and eco-friendly Oil Fuel for official and operational vehicles. In terms of hazardous waste generated from daily operations, such as used lubricants from operational vehicles, the Company cooperates with third party with license from Ministry of Environment.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENT

8. Program Lingkungan Hidup yang Berhubungan dengan Kegiatan Operasional Perusahaan

Dalam rangka menjaga keselarasan dan keselamatan bumi, Perusahaan berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Selama tahun 2019 partisipasi aktif tanggung jawab Perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup diwujudkan dalam program sebagai berikut:

1. Komitmen Perusahaan dalam melakukan hemat energi yaitu melalui kebijakan mematikan lampu-lampu di seluruh area kerja yang telah cukup mendapatkan penerangan alamiah dari sinar matahari pada saat istirahat dan waktu pulang kantor.
2. Komitmen Perusahaan dalam pengurangan penggunaan material berbahan plastik yaitu dengan menyediakan dispenser dan gelas berbahan non-plastik di setiap area kerja dan menghentikan penyediaan minuman dalam kemasan plastik.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Untuk merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, Perusahaan membuka segala bentuk pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, khususnya terkait aktivitas yang dilakukan Perusahaan jika ditemukan terkait dengan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Pengaduan bisa disampaikan melalui *website* Perusahaan, dengan alamat www.ptppa.com.

Pada tahun 2019, Perusahaan tidak menerima laporan pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan; termasuk juga tidak ada denda atas ketidakpatuhan Perusahaan terhadap undang-undang atau peraturan tentang lingkungan.

8. Environmental Programs Related to the Company's Operational Activities

In order to maintain the earth's harmony and safety, the Company actively participates in protecting the environment. During 2019, the Company's active participation in responsibilities towards environmental management was manifested in program as follows:

1. The Company's commitment to save energy through turn off lights policy in all work areas that have enough natural sunlight during breaks and when working hours have finished.
2. The Company's commitment to reduce using plastic materials by providing dispensers and non-plastic cups in each working area and stop providing beverages in plastic containers.

Environmental Issue Complaint Mechanism

To realize the implementation of responsibility to environment, the Company provides complaint mechanism related to environmental issue, particularly related to the Company's activity, if issue related to environment pollution or hazard is found. The complaint may be submitted through guest book at the Company's website at www.ptppa.com.

In 2019, the Company did not receive any complaint related to environmental issue; including no penalty charged due to the Company's incompliance with the environmental law or regulation.

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Lingkungan Hidup

Perusahaan tidak memiliki operasi yang langsung berdampak terhadap lingkungan, dengan demikian tidak terdapat apresiasi dari pihak lain maupun sertifikasi terkait lingkungan hidup.

Award and Certification in Environment

The Company does not have operations that directly affect the environment, thus there is no appreciation from other parties or certification related to environment.

Dampak Kuantitatif atas Pengelolaan Aspek Lingkungan Hidup

Terhadap pengelolaan lingkungan yang dilakukan, Perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya seperti yang terlihat di bawah ini.

Quantitative Impacts on Managing Environmental Aspect

With regard to environmental management, the Company incurred costs as shown below.

Perihal Subject	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	Anggaran 2019 (Rp-juta) Budget 2019 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%) Increase (Decrease) 2018-2019 (%)		Penyerapan Anggaran 2019 (%) Budget Absorption 2019 (%)	
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)		(1/3)	
Penanaman Mangrove di Muara Angke, Jakarta dan Penghijauan di Desa Cinangka, Kab. Serang, Banten Mangrove Planting in Muara Angke, Jakarta and Greening in Cinangka Village, Serang District, Banten	61	-	100	-	-	61%	

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY



Komitmen dan Kebijakan pada Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan mengambil langkah strategis dengan terus meningkatkan pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan dunia industri yang terus berkembang. Perusahaan memandang bahwa sumber daya manusia (SDM) bukan sekedar aset Perusahaan namun sekaligus mitra strategis yang berperan penting dalam optimalisasi pertumbuhan usaha.

Commitment and Policies of Employment, Occupational Health and Safety

The Company takes strategic action by continuously improve human capital development to fulfill growing demand in the industry sector. The Company views that Human Capital (HC) is not only asset of the Company but also Strategic Partner with important role in optimizing business growth.

Untuk itu, Perusahaan memberikan perhatian dan komitmen tinggi dalam hal Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini dapat dilihat dari pemantauan efektivitas secara berkala dan melakukan perubahan-perubahan baik untuk kebijakan, program maupun pemberian *benefit* untuk memastikan hal tersebut terjamin pelaksanaannya dengan baik agar karyawan dapat berkontribusi dengan optimal dan menjaga eksistensi Perusahaan.

Perusahaan senantiasa memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan baik dalam pengembangan kompetensi, penerimaan karyawan, penilaian kinerja, remunerasi maupun jenjang karir, serta menyediakan pemenuhan hak lainnya seperti gaji pokok, tunjangan, jaminan kesehatan dan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan menjamin tidak terjadi diskriminasi di lingkungan Perusahaan sehingga tercipta perlakuan yang adil, jujur, dan transparan di kalangan karyawan, sehingga semua karyawan bisa bekerja dengan baik dan maksimal sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

**Pemangku Kepentingan dan Lingkup Dampak
Tanggung Jawab atas Ketenagakerjaan, Kesehatan
dan Keselamatan Kerja**

Pemangku kepentingan yang memiliki dampak atas tanggung jawab pada aspek Ketenagakerjaan dan K3 adalah karyawan Perusahaan. Lingkup dampak meliputi kesejahteraan, pemenuhan hak-hak, pemantauan K3, serta pengelolaan kompetensi pribadi.

Sistem rekrutmen dan promosi di lingkup Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua Warga Negara Republik Indonesia untuk dapat diterima menjadi karyawan Perusahaan. Demikian juga halnya dalam pengembangan karir, sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlaku di internal Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.

Therefore, the Company gives high concern and commitment in Occupational Health, Safety and Employment aspect. This is seen from periodic effectiveness monitoring and several updates either in terms of policy, program or benefit to ensure smooth implementation and encourage the employees to contribute optimally and maintain the Company's existence.

The Company consistently provides equal opportunities to all employees in terms of competency either to be involved in the competency development programs or to have career path. The Company also fulfills other rights of all employees, e.g. basic salary, allowances, health benefit, etc. These things ascertain that there are no discriminatory practices in the Company

The Company guarantees that there is no discrimination in the Company so that fair, honest, and transparent treatment may be created among employees in order to support them in executing their work properly and optimally according to their respective positions and tasks to support the achievement of the Company's vision and mission.

Stakeholders and Scope of Impact of Social Responsibility in Employment, Occupational Health and Safety

Stakeholders who were impacted by responsibilities in OHS aspect are the Company's employees. The scope of impact includes welfare, rights fulfillment, OHS monitoring in project implementation, and management of personal competencies.

The Company's recruitment system provides equal opportunities for all citizens of the Republic of Indonesia to be accepted as employees of the Company. Likewise, in career development, the Company's internal Human Capital (HC) development system provides equal opportunities for every employee to be promoted to a higher position.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY**Sasaran, Rencana dan Target**

Sasaran dan rencana kegiatan tanggung jawab sosial terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja adalah melaksanakan pengelolaan SDM dengan menerapkan sistem kesetaraan kesempatan dalam pelaksanaan program rekrutmen, kesempatan kerja dan program-program pengembangan pegawai serta implementasi hubungan industrial. Perusahaan juga merencanakan reviu terhadap ketentuan remunerasi pegawai agar selalu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kompetitif pada industri yang sama. Rencana kerja ketenagakerjaan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019.

Penerapan Inisiatif Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja**Kesetaraan Kesempatan**

Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Perusahaan senantiasa memastikan prinsip kesetaraan bagi setiap Insan Perusahaan, baik pria maupun wanita dalam pengembangan potensi dan karir di seluruh lingkungan Perusahaan. Perusahaan tidak mentolerir tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip pengelolaan Sumber Daya Manusia di Perusahaan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, kejujuran, adil tanpa membedakan suku, agama, ras, keterbatasan fisik, dan jenis kelamin.

Kesempatan Bekerja Bagi Masyarakat Setempat

Perusahaan mengundang seluruh putra putri daerah terbaik, berkualitas, memiliki komitmen, integritas, dan moralitas tinggi serta sanggup bekerja keras untuk bergabung dan tumbuh bersama keluarga besar Perusahaan. Secara umum, kebijakan terkait kesempatan bekerja bagi warga setempat berlaku pada area aset kelolaan dan entitas anak Perusahaan. Lebih dari itu, Perusahaan percaya kearifan lokal para putra putri daerah menjadi aset penting dan daya tarik unik untuk kelangsungan usaha bagi Perusahaan.

Grup Pengelolaan SDM

Kebijakan pengelolaan SDM Perusahaan diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-35/PPA/0614 tentang Kebijakan Manajemen Karir Karyawan.

Objectives, Plans and Targets

The social responsibility in employment, occupational health and safety has target and plan in carry out human capital management by implementing an equal opportunity system in recruitment programs, employment opportunities and employee development programs as well as the implementation of industrial relations. The Company also plans a review on employee remuneration provisions to always comply with applicable laws and regulations in the same industry. Employment work plans are outlined in the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

Initiatives in Employment, Human Capital Development and Occupational Health and Safety**Equality of Opportunity**

The Company's policy of HC management consistently ensures the equality principle for each employees of the Company, both male and female, to develop their potential and career within the Company's organization. The Company does not tolerate discrimination in any form. HC management in the Company is carried out pursuant to the principles of transparency, honesty and fairness without prejudice to ethnicity, religion, race, physical disability and gender.

Work Opportunity for Local Community

The Company invites for the best young local community members having the quality, commitment, integrity and high morale, and willingness to work hard to join and grow with the Company. In general, policies related to work opportunity for local community members are applicable on the managed-asset area and subsidiaries of the Company. Furthermore, the Company believes in the potential of local people will become a significant asset and distinctive characteristics for the Company's business sustainability.

Human Capital Division

HC management policy in the Company is regulated based on Board of Directors Decree SK-35/PPA/0614 concerning Employee Career Management Policy.

Grup Pengelolaan SDM merancang rencana pengembangan SDM Perusahaan yang sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2019-2023 serta kebijakan terkait kepegawaian yang sejalan dengan RJPP tersebut. Hal ini dilakukan guna adanya sinergitas antara tujuan Perusahaan dengan SDM yang dibutuhkan.

Tugas pokok Grup Pengelolaan SDM adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pengembangan dan pengelolaan SDM, dengan fungsinya sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan kepegawaian;
2. Menyusun dan melaksanakan sistem pengembangan dan pembinaan SDM;
3. Memenuhi kebutuhan SDM yang bersumber dari internal dan eksternal Perusahaan
4. Melaksanakan sosialisasi ketentuan kepegawaian dan komunikasi internal terkait bidang kepegawaian;
5. Melakukan penatausahaan kegiatan dan administrasi kepegawaian; dan
6. Melakukan pembayaran remunerasi dan manfaat (*benefit*) karyawan (termasuk pembayaran dan pelaporan PPh 21, iuran dana pensiun serta program Jaminan Sosial).

Selama 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan Perusahaan melalui Grup Pengelolaan SDM terkait kebijakan kepegawaian dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan sebagaimana tercantum dalam RJPP tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Penugasan karyawan;
2. Persetujuan perubahan jabatan dan mutasi karyawan;
3. Proses penjurangan bakal calon anggota Direksi Entitas Anak;
4. Penyusunan Sistem Operasional dan Prosedur (SOP);
5. Penyusunan *Man Power Planning* dan *Training Plan*;
6. Persetujuan Promosi dan Penetapan Jabatan Karyawan dalam Satuan Kerja;
7. Persetujuan pengesahan laporan Ketenagakerjaan; dan;
8. Persetujuan pengesahan Peraturan Perusahaan Tahun 2018-2020.

Human Capital Division designed HC development plan in the Company that is in line with Long-term Corporate Plan (RJPP) 2019-2023 and policies related to employment that is in line with the RJPP. This is done to build synergy between the Company's objectives with HC requirements.

The main duty of Human Capital Division is to carry out HC policy preparation, development and management, with functions, as follows:

1. Compile Employee affairs policies;
2. Human Capital development and coaching system preparation and implementation;
3. Fulfillment of HC requirements from the Company's internal and external talents;
4. Implementation of employment regulation socialization and internal communication related to employment sector;
5. Employment activity and administration; and
6. Implementation of employee remuneration and benefit payments (including Article Tax 21 payment and reporting, pension fund payment and Social Insurance Program).

Throughout 2019, activities that are carried out by the Company through Human Capital Division related to employment policy to achieve the Company's vision and mission as disclosed in Long-term Corporate Plan 2019-2023 are as follows:

1. Employee assignment;
2. Approval to employee position change and mutation;
3. Board of Directors member candidate nomination process in Subsidiaries;
4. Standard Operating and Procedure System (SOP) Formulation;
5. Preparation of Man Power Planning and Training Plan;
6. Employee Promotion Approval and Appointment in Work Unit;
7. Approval to Mandatory Manpower Report; and
8. Approval to Company Regulation 2018-2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Grup Pengelolaan SDM juga mengorganisasi kegiatan karyawan berupa kegiatan keagamaan dan kegiatan olahraga dan seni serta upacara hari besar nasional.

Human Capital Division also organizes employee activity such as religious, sport activities and art as well national day ceremonies.

Rekrutmen Karyawan dan Tingkat Perputaran Karyawan

Grup Pengelolaan SDM mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi karyawan baru. Di tahun 2019 Perusahaan melakukan rekrutmen karyawan baru sebanyak 22 orang yang telah diseleksi sesuai dengan Prosedur Tetap Perusahaan terkait rekrutmen karyawan.

Employee Recruitment and Turn Over

Human Capital Division coordinates new employees recruitment and selection. In 2019, the Company recruited 22 new employees that had been selected in accordance with the Company's Permanent Procedures related to employee recruitment.

Tingkat perputaran atau *turnover* karyawan dapat menunjukkan produktivitas dari kinerja Perusahaan. Selain itu, tingkat *turnover* karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Employee's turnover ratio can indicate the Company's productivity performance. In addition, the employee's turnover rate also reflects the Company's culture and work system that can be an indicator of the Company's ability to create a conducive working environment.

Tingkat *turnover* dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Turnover rate is calculated based on the following formula:

$$\text{TINGKAT } \textit{TURNOVER} \text{ KARYAWAN} \\ \text{EMPLOYEE TURNOVER RATE} = \frac{\text{JUMLAH KARYAWAN KELUAR} \\ \text{NUMBER OF EMPLOYEE LEAVING}}{[(\text{JUMLAH KARYAWAN AWAL TAHUN} + \text{JUMLAH KARYAWAN AKHIR TAHUN}) \times 1/2]} \\ \text{[NUMBER OF EMPLOYEES AT BEGINNING OF THE YEAR} + \text{NUMBER OF EMPLOYEES AT END OF THE YEAR)} \times 1/2]$$

Pada tahun 2019, jumlah karyawan yang keluar dari Perusahaan sebanyak 11 orang dengan tingkat *turnover* sebesar 6,3%.

In 2019, the number of employees leaving the Company was 11 persons with turnover rate of 6.3%.

Jumlah dan Penyebab Karyawan Keluar dari Perusahaan serta Tingkat Perputaran Karyawan
Number and Causes of Employee Leaving the Company and Employee Turnover rate

Penyebab Cause	2019	2018
Karyawan Baru New Employee	22 orang 22 person	11 orang 11 person
Karyawan yang memasuki masa usia pensiun normal Employees who entered normal retirement age	3 orang 3 person	3 orang 3 person
Karyawan yang berakhir hubungan kerjanya karena mengundurkan diri Employees whose employment are terminated after resignation	11 orang 11 person	16 orang 16 person
Karyawan yang berakhir hubungan kerjanya karena berakhir masa tugas Employees whose employment are terminated after end of fixedterm employment contract	4 orang 4 person	5 orang 5 person
Jumlah karyawan yang keluar Number of employees leaving the Company	11 orang 11 person	16 orang 16 person
Total karyawan di akhir tahun Number of employees at end of the year	176	171
Persentase <i>turnover</i> Turnover percentage	6,3%	9,0%

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mengembangkan kompetensi karyawan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja, Perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan berbagai bidang baik di internal maupun eksternal. Berikut ini pelaksanaan *training* yang telah dilakukan pada tahun 2019:

Human Capital Training and Development

In order to develop competency of employees and to motivate employees to improve their performance, the Company provides various educations and trainings, both internally and externally. Training implementation in 2019 is as follows:

Public Training

No.	Direktorat Directorate	Jumlah Subjek Number of Subjects	Jumlah Peserta Number of Participants	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	Direksi, Komisaris, Sekdekom, dan Komite Board of Directors, Board of Commissioners, Secretary of Board of Commissioners and Committees	11	12	411.452.533
2	Utama Main	32	19	259.073.841
3	Konsultasi Bisnis & Aset Manajemen Business Advisory & Asset Management Directorate	2	2	15.517.804
4	Investasi Investment	12	11	95.257.286
5	Keuangan & Dukungan Kerja Finance & Support Directorate	53	46	399.058.785
JUMLAH Total		110	90	1.180.360.249

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY*Inhouse Training*

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta Number of Participants	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	<i>Amazing Slide Presentation Batch 1</i>	21 - 22 Januari 2019 January 21 – 22, 2019	15	34.421.817
2	<i>Amazing Slide Presentation Batch 2</i>	23 - 24 Januari 2019 January 23 – 24, 2019	15	34.421.817
3	<i>Amazing Slide Infographic Batch 1</i>	29 - 30 Januari 2019 January 29 – 30, 2019	13	39.421.817
4	<i>Design Sprint + Innovation Class</i>	23 - 25 April 2019 April 23 – 25, 2019	7	28.000.000
5	<i>Amazing Slide Infographic Batch 2</i>	29 - 30 April 2019 April 29 – 30, 2019	10	38.337.660
6	Sosialisasi Core Sistem Operasi Bisnis Socialization of Core Business Operating Systems	29 April 2019 April 29, 2019	20	640.000
7	<i>How Millennials are Dealing and Rebuilding the Company's Vision</i>	30 April 2019 April 30, 2019	7	2.100.000
8	UAT Core Sistem Operasi Bisnis UAT Core Business Operating System	9 Mei 2019 May 9, 2019	45	2.010.000
9	<i>Advance Excel</i>	6 Juli 2019 July 6, 2019	20	30.962.200
10	Orientasi dan Sosialisasi Karyawan 2019 Employee Orientation and Socialization 2019	12 - 13 Juli 2019 July 12 – 13, 2019	20	85.500.000
11	<i>Design Thinking Batch 1</i>	16 - 17 Juli 2019 July 16 – 17, 2019	15	55.055.000
12	Sosialisasi <i>Smart Meeting Room</i> <i>Smart Meeting Room Socialization</i>	17 Juli 2019 July 17, 2019	22	1.100.000
13	<i>Design Thinking Batch 2</i>	23 - 24 Juli 2019 July 23 – 24, 2019	16	55.055.000
14	Dasar Perkreditan dan Investasi Basis of Credit and Investment	1 - 2 Agustus 2019 August 1 - 2, 2019	17	7.908.000
15	<i>Design Thinking Batch 3</i>	26 - 27 September 2019 September 26 – 27, 2019	16	65.835.000
16	<i>Public Speaking and Communication Skills Batch 1</i>	2 - 3 Oktober 2019 October 2 – 3, 2019	20	81.500.000
17	<i>Public Speaking and Communication Skills Batch 2</i>	9 - 10 Oktober 2019 October 9 – 10, 2019	20	81.500.000
18	Sosialisasi HRIS Versi 6 HRIS Version 6 Socialization	19 November 2019 November 19, 2019	82	8.169.260
19	<i>English Club</i>	8 November 2019 - <i>On Going</i> November 8, 2019 – On Going	15	49.277.998
20	<i>Business English</i>	27 November 2019 - <i>On Going</i> November 27, 2019 - On Going	28	240.240.000
21	Sosialisasi <i>Mobile Office</i> <i>Mobile Office Socialization</i>	13 Desember 2019 December 13, 2019	48	4.132.500

Inhouse Training

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Tanggal Pelaksanaan Date	Jumlah Peserta Number of Participants	Biaya (Rp) Budget (Rp)
22	<i>Financial Analysis & Reporting</i>	16 - 17 Desember 2019 December 16 - 17, 2019	13	10.103.770
23	Motivasi Akhir Tahun End of Year Motivation	19 Desember 2019 December 19, 2019	176	640.000.000
JUMLAH Total				955.691.839

Sharing Session / Friday Afternoon

No.	Topik Topic	Tanggal Pelaksanaan Date	Narasumber Resource Person	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	<i>Be Passionate with your Hobby</i>	10 Mei 2019 May 10, 2019	Ajar Setiadi	3.712.500
2	Yuk Nabung Saham Let's Save Stocks	14 Juni 2019 June 14, 2019	Marco Poetra Kawet	2.680.000
3	<i>Advisory for IPO Preparation</i>	9 Agustus 2019 August 9, 2019	Iman Rachman	32.714.710
4	<i>Lean Thinking Management Skills</i>	30 Agustus 2019 August 30, 2019	Lengga Nurullah	5.207.000
5	<i>Organization Strategy to Combat Bribery</i>	12 September 2019 September 12, 2019	Roni Maulana	12.784.500
6	<i>Integrated Governance, Risk and Compliance</i>	25 Oktober 2019 October 25, 2019	Hendy Fakhruddin	9.473.405
JUMLAH Total				66.572.115

Keanggotaan
Membership

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jenis Keanggotaan Membership Type	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	Wahyu Widodo	IAI	300.000
2	Wahyu Widodo	IAPI	300.000
3	Novy Sutedy	IAPI	300.000
4	Bayu Triastoto	IIA	850.000
5	Qadrisna	FKSPI	4.000.000
JUMLAH Total			5.750.000

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Realisasi anggaran pelatihan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp2.208.374.203, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Realization of training budget in 2019 amounted to Rp2,208,374,203, as shown in the table below.

No.	Topik Topic	Biaya (Rp) Budget (Rp)
1	Public Training	1.180.360.249
2	Inhouse Training	955.691.839
3	Friday Afternoon/Sharing Session	66.572.115
4	Bea Siswa Scholarship	
5	Keanggotaan Membership	5.750.000
JUMLAH Total		2.208.374.203

Layanan Sumber Daya Manusia

Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan layanan SDM yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik antar unit kerja serta antara manajemen dengan karyawan tentang kebijakan-kebijakan terkait karyawan. Bentuk layanan tersebut adalah:

1. Sosialisasi dan orientasi kepada karyawan baru;
2. Pengumuman kelahiran anak karyawan, berita duka, karyawan baru, karyawan mutasi/perubahan data kepegawaian dan karyawan berakhir hubungan kerja;
3. Penyampaian informasi kepada karyawan yang akan pensiun;
4. Penyampaian pengumuman pembaharuan pelaporan wajib LHKPN; dan
5. Penyampaian pengumuman terkait layanan asuransi kesehatan, jiwa dan kecelakaan serta pelaporan perpajakan.
6. *Leaders Meeting* secara rutin sepekan sekali dengan peserta para *General Manager* untuk saling berbagi informasi termasuk kajian-kajian sebagai masukan kepada Direksi dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan strategis Perusahaan.

Human Capital Services

The Company conducts activities of HC services in order to establish good communication among work units as well as between the management and employees with regard to employee-related policies. These services include:

1. Introducing new employees and orientation for new employees;
2. Announcement of employees' childbirth, obituary, new employees, employee transfer/changes of employment data and the termination of employment;
3. Preparation of employees who will retire;
4. Reporting of new State Official Wealth Report (LHKPN) mandatory reports;
5. Announcement related to services of health, life, and accident insurances as well as tax reporting; and
6. Regular leader meeting held once a month attended by General Managers/Division Heads to routinely share/update various matters including making reviews as input for the Board of Directors to consider in making strategic decision for the Company.

Penatausahaan Kegiatan dan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan antara lain:

1. Administrasi dan pelaporan absensi dan cuti;
2. Administrasi karyawan baru, karyawan mutasi, karyawan dalam masa percobaan, promosi dan penetapan jabatan karyawan pada satuan kerja, perubahan/perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu serta karyawan yang berakhir hubungan kerja;
3. Administrasi permohonan pinjaman karyawan;
4. Administrasi permohonan surat keterangan bekerja karyawan untuk keperluan imigrasi, pengurusan visa, bank dan lain-lain;
5. Pemberian bunga/bingkisan bagi karyawan yang melahirkan, rawat inap, menikah dan berduka cita;
6. Administrasi permohonan praktik kerja dan penelitian; dan
7. Administrasi kegiatan karyawan berupa kegiatan olahraga dan seni serta kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar agama.

Remunerasi dan Pemenuhan Hak Karyawan

Strategi Remunerasi diperlukan guna meningkatkan pengembangan SDM serta meningkatkan keterikatan karyawan terhadap Perusahaan dimana salah satunya adalah remunerasi berbasis kompetensi. Kompetensi karyawan akan mendukung laju perkembangan Perusahaan, karena setiap karyawan akan bekerja secara maksimal dalam memuluskan langkah bisnis Perusahaan. Kompetensi karyawan ini akan dimulai dari asesmen terkait kinerja karyawan dalam bekerja melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sistem dan strategi Remunerasi ini juga akan dilakukan evaluasi secara berkala guna penyesuaian dengan keadaan pasar dan kemampuan keuangan Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan struktur kepangkatan dan gaji karyawan yang berlaku, komponen remunerasi karyawan adalah sebagai berikut:

Employment Activity and Administration

Employment administration activity includes:

1. Administration and reporting of attendance and leave;
2. Administration of new employees, transferred employees, employees in probation period, promotions, and arrange employee positions in work unit, changes/extension of fixed-term employment agreement and employees terminating the employment relations;
3. Administration of employee loan application through PT PPA Finance;
4. Administration of employee reference letter for the purposes of immigration, visa, bank, etc.;
5. Flowers/gifts for employees who gave birth, hospitalized, married, and in mourning;
6. Administration of application for internship and research; and
7. Administration for employee activities, i.e. Sport and Art Activities as well as Religious Activities and Religious Holidays.

Remuneration and Fulfillment of Employee Rights

Remuneration strategies are required to improve Human Capital development and increase the employees' engagement to the Company in which one of them is competency-based remuneration. Employee competencies will support the Company's growth rate as each employee will give their best work to pave the way for the Company's business measures. These employee competencies will start from the performance assessment of employees in carrying out their tasks based on the current rules and regulations.

The remuneration strategy and system will be reviewed on a regular basis to adjust to the market condition and the Company's financial capability. Pursuant to the Company Regulation, level and salary structure, components of employee remuneration are as follows:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

1. Gaji Gaji karyawan yang diterima secara bulanan akan mengalami peninjauan berdasarkan: a. Pertimbangan dampak inflasi yang berpengaruh terhadap nilai riil gaji karyawan (<i>Cost of Living Adjustment</i>); b. Kinerja karyawan bersangkutan selama bekerja (<i>merit system</i>); dan c. Besaran kenaikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan Perusahaan.	1. Salary Monthly salary for employees will be reviewed based on: a. Consideration on inflation rate with impact on real value of employee's salary (<i>Cost of Living Adjustment</i>); b. Performance of employees during the working period (<i>merit system</i>); and c. Amount of the increase is adjusted with the Company's financial capability.
2. Tunjangan Hari Raya (THR) Perusahaan memberikan THR sebesar satu kali upah. THR ini dibayarkan kepada karyawan yang telah menjalani masa kerja tiga bulan atau lebih di Perusahaan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.	2. Religious Holiday Allowance (THR) The Company provides Religious Holiday Allowance in the amount of one month salary. The Religious Holiday Allowance is paid to employees who have passed three months or more working period in the Company according to applicable employment regulation.
3. Tunjangan Cuti Besar Perusahaan memberikan tunjangan cuti besar kepada karyawan sebesar dua kali upah setelah memiliki masa kerja 6 (enam) tahun berturut-turut dan kelipatannya atau pada tahun ke-7, 13, 19, dan seterusnya. Karyawan yang mendapatkan tunjangan cuti besar tidak berhak lagi atas tunjangan cuti tahunan.	3. Long Leave Allowance The Company provides long leave allowance for employees in the amount of two months salary after passing 6 (six) consecutive years working period and multiple periods or during the 7th, 13th, 19th and next multiple years. Employees who are eligible for long leave allowance are no longer entitled to annual leave allowance.
4. Tunjangan Jabatan, Komunikasi, BBM, Pengemudi dan Utilitas Tunjangan ini diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan/kepangkatan tertentu dalam Perusahaan.	4. Position, Communication, Fuel, Driver and Utility Allowance These allowances are provided for employees with specific position/grade in the Company.
5. Jaminan Sosial Perusahaan juga memberikan sejumlah jaminan kepada karyawan melalui Jaminan Sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu: a. BPJS Ketenagakerjaan; b. Jaminan Kematian; c. Jaminan Kecelakaan Kerja; d. Jaminan Hari Tua; e. Jaminan Pensiun; dan f. BPJS Kesehatan.	5. Social Insurance The Company provides range of insurances to employees through Social Insurance according to prevailing regulations, including: a. Social insurance for workers (BPJS Employment). b. Life Insurance; c. Occupational Accident Insurance; d. Retirement Insurance; e. Pension Benefit; and f. Social health insurance (BPJS Health).

6. Apresiasi/Insentif Kinerja

Perusahaan memberikan apresiasi berupa insentif kinerja kepada karyawan yang didasarkan pada tolak ukur pencapaian RKAP, penilaian kinerja dan masa kerja karyawan.

7. Fasilitas Kesehatan dan Asuransi

Fasilitas ini diberikan Perusahaan kepada karyawan yang terdiri dari fasilitas kesehatan rawat jalan, pertanggunggunaan asuransi rawat inap, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja.

6. Performance Appreciation/Incentive

The Company provides appreciation as performance incentive to employees based on Company's budget plan achievement, performance assessment and working period indicators.

7. Health and Insurance Facilities

These facilities are provided for employees and comprise of outpatient facilities, inpatient insurance, life insurance and occupational accident insurance.

Internalisasi Budaya Perusahaan

Perusahaan memahami bahwa budaya korporasi yang kuat membuat karyawan bangga untuk mewakili Perusahaan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan. Budaya Perusahaan menanamkan nilai-nilai melalui SEEIT (*Stewardship, Entrepreneurship, Excellent, Integrity and Teamwork*).

Corporate Culture Internalization

The Company understands that strong corporate culture will empower the pride of employees to represent the Company in their interaction with the stakeholders. Corporate Culture is embedded through the values of SEEIT (*Stewardship, Entrepreneurship, Excellent, Integrity and Teamwork*).

Seluruh nilai-nilai dan budaya Perusahaan tersebut senantiasa dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dalam berbagai kesempatan, baik itu dalam bentuk pelatihan formal maupun informal, *sharing session*, motivasi, bimbingan, penilaian kinerja karyawan, dan acara-acara kebersamaan karyawan di lingkungan Perusahaan.

All values and culture of the Company are constantly communicated to all employees at any opportunity, such as through formal and informal trainings, sharing session, motivation, mentorship, employee performance evaluation, and other gathering activities of employees in the Company's environment.

Perusahaan menjadikan pengelolaan manusia sebagai salah satu aspek keberlanjutan perusahaan. Sepanjang tahun 2019, Perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk para karyawan agar mendapatkan kenyamanan dalam bekerja, mulai dari lingkungan kerja yang nyaman dan aman melalui berbagai Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("K3"), survei kepuasan karyawan secara berkala, hingga kegiatan-kegiatan kebersamaan karyawan seperti perayaan hari besar keagamaan, perayaan ulang tahun Perusahaan dan *outing* karyawan. Hal demikian dilaksanakan untuk menjadikan karyawan merasa menjadi bagian dari keluarga besar Perusahaan.

The Company's management of human capital is regarded as one of its sustainability aspects. Throughout 2019, the Company has carried out various programs aiming at improving comfort for all employees during their duties, starting from creating comfortable and safe work environment through the implementation of Occupational Health and Safety ("OHS") program, conducting periodic customer satisfaction survey, and organizing activities to foster the spirit of togetherness among employees, such as celebrating religious holidays, celebrating the Company's birthday, and conducting outing activities. The goal of such activities is to strengthen the sense of belongingness in all employees as part of big family of the Company.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY**Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Perusahaan berkomitmen untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan dengan senantiasa berupaya untuk menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang terakreditasi sesuai standar nasional dan internasional. Untuk itu, Perusahaan melakukan berbagai aktivitas K3 secara berkala dengan terus menerus memperhatikan dan menjaga kesehatan karyawan, serta melengkapi karyawan dengan prosedur dan peralatan kerja yang memadai sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan di tempat kerja. Perusahaan juga menjalankan pelatihan rutin untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari kecelakaan kerja.

Adapun prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja yang tercantum dalam Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan, keselamatan kerja, kesehatan dan pelestarian lingkungan secara konsisten.
3. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.
4. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengonsumsi obat-obat terlarang, dan lain-lain sesuai ketentuan Perusahaan.
5. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat.
6. Melaksanakan program kepedulian akan pelestarian lingkungan yang diimplementasikan melalui kegiatan Program Bina Lingkungan Perusahaan.

Occupational Health and Safety

The Company is committed to always maintaining the health and safety of all employees by implementing occupational health and safety standards that are nationally and internationally accredited. To that end, the Company performs various OHS activities periodically by always being considerable of and maintaining employees' health and by equipping employees with adequate work procedure and equipment in line with health and safety standards at workplace. The Company also carries out routine training activity to create healthy work environment that is free from work accident.

Occupational health and safety principles stipulated in the Company's Code of Conduct are as follows:

1. Adhere to each law and regulation and/or standard of security and occupational health and safety.
2. Master and understand the condition of work environment and implement security system, work safety, health and environmental preservation in a consistent manner.
3. Prioritize prevention act to avoid accident.
4. Avoid all activities that may bring harm to oneself or others, such as drinking alcoholic beverages, consuming drugs, etc. pursuant to the Company's regulations.
5. Carry out countermeasure activities against accidents that occurred in accordance with the prevailing standards and procedures, and ensuring that the Company always has a disaster recovery plan.
6. Care for environmental preservation and conduct activities to preserve the environment through the Company's Community Development Program.

Pembentukan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Perusahaan melakukan penunjukan 4 karyawan sebagai *emergency contact person* dan 8 karyawan yang bertindak sebagai *floor warden*. Dimana tugas dari *emergency contact person* yaitu untuk penanganan bencana/darurat di Gedung Kantor PPA atau dilingkungan sekitar gedung PPA pada saat jam kerja. Dan tugas-tugas *floor warden* antara lain sebagai berikut:

1. Saat keadaan darurat, memandu semua karyawan di lantainya, evakuasi melalui tangga darurat ke tempat aman (*assembly area*);
2. Memberitahukan kepada seluruh karyawan mengenai lokasi jalan keluar/jalur evakuasi;
3. Jika ada perintah evakuasi, menjamin seluruh karyawan meninggalkan gedung dengan menggunakan tangga darurat dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan;
4. Memastikan tidak ada penghalang apapun pada tangga darurat;
5. Memprioritaskan bantuan kepada wanita hamil, orang lansia, penyandang disabilitas, dan orang yang dalam keadaan sakit.

Pelatihan dan Sosialisasi K3 untuk Karyawan

Perusahaan secara berkala mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti pelatihan K3 bersertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 2019 telah diadakan masing-masing satu kali sosialisasi dan simulasi bencana serta kebakaran yang diikuti oleh seluruh karyawan sebagai bagian dari pelatihan K3 yang rutin dilakukan oleh Perusahaan bersama dengan pengelola gedung.

Peralatan Perlindungan Pribadi

Penyediaan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai dengan kondisi dan risiko K3 di masing-masing unit usaha telah menjadi salah satu upaya Perusahaan dalam memastikan lingkungan kerja yang aman bagi setiap insan Perusahaan yang bekerja di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan memastikan ketersediaan jenis dan jumlah peralatan perlindungan pribadi pada setiap unit kerja Perusahaan dan mewajibkan seluruh karyawan yang bekerja di area kerja yang memiliki potensi dan risiko bahaya mengenakan peralatan perlindungan pribadi selama menjalani pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku.

Formation of OHSC (Occupational Health and Safety Committee)

The Company appointed 4 employees as emergency contact person and 8 employees who acted as floor warden. The task of an emergency contact person is to handle disasters/emergencies in PPA Office Building and its surrounding environment during working hours. And floor warden's tasks include the following:

1. During an emergency, guide all employees on designated floor, evacuate via the emergency stairs to a safe area (*assembly area*);
2. Notifying all employees about escape/evacuation routes;
3. If there is an evacuation order, guarantee that all employees leave the building using the emergency stairs and gather at the designated location;
4. Ensure that there are no obstacles whatsoever on the emergency stairs;
5. Prioritizing assistance to pregnant women, elderly, people with disabilities, and people who are sick.

OHS Training and Socialization for Employees

Each year, the Company is involving employees at the certified OHS training organized by the Ministry of Manpower and Transmigration. During 2019, the Company organized one disaster simulation, which was attended by all employees as a part of regular OHS training conducted by the Company in cooperation with the building management.

Personal Protection Equipment

The provision of personal protection equipment that is in accordance with the OHS condition and risks applicable at every business unit is a part of the Company's efforts to ensure safe work environment for all employee working within the Company's environment.

The Company ensures the availability of type and quantity of personal protection equipment at every business unit and obliges all employees working in an area or project with high risk for accident to wear personal protection equipment during their work in line with the standards applicable nationally and internationally.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY**Perlindungan Kesehatan Karyawan**

Perlindungan karyawan atas kecelakaan kerja diwujudkan dengan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu:

1. BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.
2. BPJS Kesehatan, yang mencakup Rawat Jalan, dan Rawat Inap. Selain itu, Perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan bagi karyawan yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap.

Selain hal tersebut di atas, Perusahaan juga memberikan fasilitas kesehatan rawat jalan, pertanggung jawaban asuransi rawat inap, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja dari Penyedia jasa Asuransi lainnya.

Kecelakaan Kerja serta Layanan Medis

Perusahaan telah menetapkan program keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk mencapai kecelakaan nihil pada setiap operasi. Program tersebut mencakup pelatihan, penyuluhan yang berkesinambungan, penyediaan sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja, melakukan pengawasan dan inspeksi secara rutin. Pada tahun 2019 tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan kerja Perusahaan.

Seluruh karyawan tetap Perusahaan juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala (*medical check-up*) secara rutin. Untuk mengantisipasi penyakit yang berbahaya maupun yang menular, karyawan Perusahaan mendapatkan vaksinasi secara gratis.

Survei Kepuasan Karyawan

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan harapan utama para karyawan, Perusahaan melakukan survei kepuasan karyawan. Hasil survei tersebut memastikan seberapa baik Perusahaan memenuhi persyaratan dan harapan pekerja untuk pengembangan karir, kesejahteraan, serta keamanan dan keselamatan lingkungan pekerja.

Survei kepuasan karyawan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pada tahun 2019, survei kepuasan karyawan memperoleh nilai sebesar 3,8 (skala 1-5) di atas target tahun 2019 sebesar 3.0.

Employee Health Protection

Protection for employees against work accident is actualized by involving all employees in the program of Social Security Management Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – BPJS), namely:

1. BPJS Employment, covering Work Accident Insurance (JKK), Death Insurance (JKM), Old-Age Insurance (JHT) and Retirement Insurance.
2. BPJS Health, covering Outpatient and Inpatient Facilities. In addition, the Company also involves its employees who have been registered as permanent employees in financial institution pension funds (DPLK).

Aside from the above matters, the Company also provides outpatient facility and inpatient insurance, life insurance and work accident insurance from other Insurance Service Companies.

Work Accident and Medical Service

The Company has stipulated occupational health and safety program with the purpose to achieve zero accident in every operation. The program includes continuous training, counseling, provision of occupational safety facilities and infrastructures, periodic monitoring and inspection. In 2019, there was no work accident in the Company's working environment.

The Company also provides regular medical check-up for all permanent employees. To anticipate hazardous and infectious disease, the Company's employees also get free vaccinations.

Employee Satisfaction Survey

To ensure fulfillment of employee's requirements and main expectations, the Company performs employee satisfaction survey. The survey result ensures how well the Company fulfills its employee's requirements and expectation for career development, welfare as well as occupational health and safety.

Employee satisfaction survey is carried out once in every year. In 2019, employee satisfaction survey achieved a score of 3.8 (scale of 1-5), that is above target which is 3.0.

Hubungan Industrial

Perusahaan membangun hubungan industrial yang berlandaskan pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Segala sesuatu yang terkait hubungan antara karyawan dan Perusahaan diatur dalam Peraturan Perusahaan yang diperbarui setiap dua tahun sekali dan dibagikan kepada seluruh karyawan.

Perusahaan melakukan komunikasi dengan karyawan untuk meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan langkah-langkah antara lain:

1. Melibatkan karyawan dalam pembahasan ketentuan Perusahaan.
2. Kebersamaan dalam penanganan dalam penyelesaian permasalahan karyawan.
3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan karyawan seperti ibadah, sosial dan kegiatan olahraga karyawan.

Dengan terjalin baiknya komunikasi antara Perusahaan dan karyawan maka diharapkan akan terjalin sinergi kinerja yang optimal sehingga akan memudahkan dalam pencapaian tujuan Perusahaan. Pada 2019, tidak tercatat adanya pelanggaran dalam hak kebebasan berserikat di Perusahaan.

Serikat Pekerja

Perusahaan memberikan kebebasan secara penuh kepada karyawan untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

Hingga akhir tahun 2019 karyawan Perusahaan belum membentuk Serikat Pekerja.

Mekanisme Pengaduan Terkait Permasalahan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan Perusahaan, apabila terjadi ketidakpuasan dari karyawan atas hubungan kerja dan syarat-syarat kerja, akan diselesaikan secara musyawarah dengan atasan langsung minimal dengan jabatan Kepala Grup. Apabila belum dapat diselesaikan, diteruskan kepada atasannya yang lebih tinggi sampai dengan tingkat Direktur. Apabila masih belum dapat diselesaikan, diteruskan kepada Direktur yang membawahi Bidang Sumber Daya Manusia dan apabila ketidakpuasan tersebut berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan secara keseluruhan maka akan diserahkan kepada keputusan Direksi.

Industrial Relations

The Company builds industrial relations based on prevailing employment regulation. Every issue related to employee and Company relations is regulated as disclosed in Company Regulation that is updated every two years and distributed to all employees.

The Company engages in communication with employees to improve good industrial relationship through following initiatives:

1. Involving employees in discussing company regulation.
2. Participation in handling employee's issues.
3. Implementation of employee activity such as religious, social and sport activities.

With good communication between the Company and employees, performance synergy is expected to be developed optimally and support the Company's to achieve its target. In 2019, the Company reported no violation in terms of freedom to associate in the Company.

Workers Union

The Company gives employees the freedom to be in organization and form workers unions as mandated in applicable regulations.

Until the end of 2019, the Company's employees have not yet formed a Workers Union.

Employment, Occupational Health and Safety Complaint Mechanism

As stipulated in the Company's Regulations, should an employee is not satisfied with work relationship or requirements, it will be settled through a discussion to reach consensus with their direct supervisor or Group Head. If consensus is not reached, the complaint or issue shall be forwarded to the higher level until Board of Directors level. If the complaint or issue is not settled, then it shall be forwarded to the Director managing Human Capital. Should the complaint or issue afflict the overall Company's performance; Board of Directors shall make the decision in regard to the complaint or issue.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Apabila secara internal hal tersebut belum juga dapat diselesaikan, maka akan ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkup operasional, Perusahaan juga senantiasa mengacu terhadap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun instansi terkait lainnya.

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan tidak memiliki penghargaan maupun sertifikasi terkait ketenagakerjaan dan K3.

Dampak Kuantitatif atas Penerapan Inisiatif Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Terhadap pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dilakukan, Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp134,99 miliar atau mencapai 92% dari target tahun 2019 sebesar Rp146,89 miliar. Secara khusus, Perusahaan merealisasikan investasi terkait pengembangan kompetensi SDM tahun 2019 sebesar Rp2,21 miliar, meningkat 36,97% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1,61 miliar.

If the Company is not capable of settling the complaint or issue internally, decision shall be made pursuant to the prevailing laws and regulations.

In overcoming various operational issues, the Company always refers to the laws and regulations of the government, the Ministry of Manpower and Transmigration and other related institutions.

Awards and Certification in Employment, Occupational Health and Safety

The Company does not yet have awards or certifications related to employment and OHS.

Quantitative Impacts on Initiatives in Employment, Occupational Health and Safety

In the management of Employment, Occupational Health and Safety that has been carried out, the Company spent Rp134.99 billion or reached 92% of the 2019 target of Rp146.89 billion. Specifically, the Company realized investment related to human capital competency development in 2019 amounting to Rp2.21 billion, an increase of 36.97% compared to 2018 of Rp1.61 billion.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN PEMASOK
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN RESPONSIBILITY TO PRODUCT/SERVICES, CONSUMERS AND SUPPLIERS

- c. Kompetitif, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan/ atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa yang berminat;
- e. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi syarat dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- c. Competitive, means the procurement of goods and/or services must be open to all suppliers that meet the requirements and done through fair competition between suppliers that are equal and meet certain conditions/criteria based on clear and transparent provisions and procedures;
- d. Transparent, means that all provisions and information regarding the procurement of goods and/or services, including technical requirements for procurement administration, evaluation procedures, evaluation results, determination of prospective suppliers of goods and/or services, are open to participants who are interested in providing goods and/or services;
- e. Fair, means giving the same treatment to all prospective suppliers of goods and/or services that fulfill the requirements and does not lead to benefit certain parties by any means and/or reasons;
- f. Accountable, means that it must achieve the target and can be accounted for to prevent from potential misuse and deviation.

Pemangku Kepentingan dan Lingkup Dampak Tanggung Jawab atas Produk/Jasa serta Konsumen dan Pemasok

Pemangku kepentingan yang memiliki dampak atas tanggung jawab pada aspek ini adalah konsumen dan pemasok. Perusahaan berupaya melakukan pemenuhan tanggung jawabnya terkait mutu kualitas produk/jasa.

Stakeholders and Scope of Impact of Responsibility to Product/Services, Consumers and Suppliers

Stakeholders impacted by responsibility in this aspect are consumers and suppliers. The Company seeks to fulfill its responsibilities related to the product/service quality.

Konsumen dan pemasok memiliki hak-hak yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Di samping kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, komitmen PPA atas tanggung jawab terhadap konsumen dan pemasok merupakan bagian dari perwujudan pertumbuhan yang berkelanjutan

Consumers and suppliers have rights that are regulated by laws and regulations. In addition to compliance with laws and regulations, PPA's commitment to its responsibility to consumers and suppliers is part of the sustainable growth realization

Sasaran, Rencana dan Target

Perusahaan menetapkan rencana kerja untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyelesaikan pengaduan pelanggan dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan. Perusahaan menargetkan bahwa penyelesaian pengaduan tidak boleh melebihi *Service Level Agreement* (SLA). Di samping itu, Perusahaan juga menargetkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi.

Pada aspek pemasok, Perusahaan menargetkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah menerapkan prinsip Efisien, Efektif, Kompetitif, Transparan, Adil, dan Akuntabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan tingkat kepuasan pemasok akan terjaga dengan baik dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

Objectives, Plans and Targets

The Company has implemented work plan to increase customer satisfaction by solving customer complaint and conducting customer satisfaction survey. The Company has targeted the complaint settlement shall not exceed *Service Level Agreement* (SLA). In addition, the Company also targets high customer satisfaction level.

On the supplier aspect, the Company has targets that the entire process of goods and services procurement has applied the principles of Efficient, Effective, Competitive, Transparent, Fair, and Accountable. By applying these principles, it is expected that supplier satisfaction level will be maintained properly and have an impact on the Company's overall performance.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN PEMASOK
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN RESPONSIBILITY TO PRODUCT/SERVICES, CONSUMERS AND SUPPLIERS**Penerapan Inisiatif pada Aspek Tanggung Jawab Terhadap Produk/Jasa Serta Konsumen dan Pemasok****Pemenuhan Hak-hak Konsumen**

Realisasi kegiatan CSR terhadap pelanggan dilaksanakan melalui penyediaan sarana komunikasi dengan pelanggan yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media. Selain itu, Perusahaan menyediakan *contact person* yang diperlukan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan.

Sepanjang tahun 2019, Perusahaan tidak pernah menerima sanksi denda atau sanksi hukum yang terkait dengan peraturan pengadaan jasa maupun informasi atau komunikasi pemasaran. Di samping itu sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap konsumen, Perusahaan melakukan usaha-usaha pemenuhan hak-hak pelanggan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja jasa, antara lain dengan:

- Memberikan pelayanan dengan kualitas prima dan bermutu.
- Memberikan solusi inovatif dan bertanggung jawab kepada pelanggan.
- Menyediakan informasi yang akurat.
- Menjalin hubungan kerja yang wajar.
- Meminimalkan risiko penggunaan jasa Perusahaan.

Membangun Hubungan dengan Pemasok

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial terkait dengan Pemasok diantaranya dilakukan melalui hal-hal berikut ini.

- Seluruh kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Pengadaan barang dan/atau jasa, seluruhnya dilakukan melalui media elektronik (*e-Procurement*).
- *E-Procurement* menggunakan metode *e-Bidding* meliputi pemilihan langsung, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas.
- Melaksanakan survei kepuasan pemasok yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pemasok dalam bekerja sama dengan Perusahaan.

Tingkat kepuasan pemasok tahun 2019 untuk pengadaan barang sebesar 9,73 (skala 1-10) sedangkan untuk pengadaan jasa sebesar 9,03 (skala 1-10) yang menunjukkan bahwa kerja sama antara Perusahaan dengan pemasok telah berjalan dengan baik dan lancar.

Initiatives in Responsibility to Product/Services, Consumers and Suppliers Aspect**Fulfillment of Consumer Rights**

The realization of CSR activity to customers is carried out by providing communication channel for the customers by using various media. In addition, the Company also provides contact person to be in charge in direct communication with customers.

Throughout 2019, the Company has never received any penalty or legal punishment related to service procurement and information or marketing communication regulations. Moreover, as a form of Company's responsibility to customers, the Company has fulfilled customer's rights to obtain information about service performance, namely through:

- Providing excellent service and quality.
- Providing innovative solution and responsible to customers.
- Providing accurate information.
- Engaging fair working relation.
- Minimize risk of the Company's service use.

Building Relationship with Suppliers

Social Responsibility activity related to Suppliers are implemented through the following activities:

- All of goods and/or services procurement activities are conducted based on Goods and Services Procurement Policy.
- Goods and/or services procurements are entirely done via electronic media (*e-Procurement*).
- *E-Procurement* applies *e-Bidding* method including direct appointment, general tender, and limited tender.
- Carry out supplier satisfaction survey with the purpose to evaluate supplier satisfaction level in cooperating with the Company.

In 2019, supplier satisfaction level for goods procurement is 9.73 (scale 1-10) while for services procurement is 9.03 (scale 1-10) which shows that the cooperation between the Company and suppliers has been going well and smoothly.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

Komitmen dan Kebijakan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Dalam pelaksanaan CSR, Perusahaan mengacu pada ketentuan dalam berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara, terutama pasal 2 dan 88 yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat (1) huruf e
Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
 - b. Pasal 88 ayat (1)
BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
2. Pada Bab V Pasal 74 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") mengatur mengenai Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
3. Selain itu dasar kegiatan CSR Perusahaan tahun 2019 dilakukan dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PERMEN-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("PERMEN-09") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PERMEN-03/MBU/12/2016 ("PERMEN-03") dan Peraturan Menteri BUMN No. PERMEN-02/MBU/7/2017 ("PERMEN-02").

Commitment and Policy in Social and Community Development

In the CSR implementation, the Company refers to provisions in several prevailing laws and regulations, among others:

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprise, particularly Article 2 and 88 declaring the following provisions:
 - a. Article 2 point (1) letter e
One of the purpose and objective of SOEs establishment is to actively provide guideline and assistance to marginal economy entrepreneurs, cooperatives and the society.
 - b. Article 88 point (1)
SOEs may allocate part of its net income for small enterprise/cooperative development as well as community development in SOE's neighborhood.
2. Chapter V Article 74 Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("UUPT") that regulates Social and Environmental Responsibility where the Company that conducts business activities in sector and/or related to natural resources shall carry out Social and Environmental Responsibility.
3. In addition, the framework of the Company's CSR activities in 2019 was still referring to Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program and Community Development Program in State-Owned Enterprise as amended through Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 and Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/7/2017.



Pemangku Kepentingan dan Lingkup Dampak Tanggung Jawab atas Sosial Kemasyarakatan

Dalam rangka menjaga keselarasan kehidupan masyarakat dan lingkungan di atas bumi, Perusahaan turut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial atas sosial kemasyarakatan yang tersebar di beberapa wilayah nusantara maupun di sekitar lokasi operasi perusahaan. Hingga tahun 2019 Partisipasi aktif tanggung jawab Perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain:

- **Program Pengembangan dan Pendampingan Petani Kopi**
Perusahaan memiliki proyek investasi pembangkit listrik tenaga hidro di Desa Suka Sari Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Dengan melihat potensi Desa tersebut Perusahaan membuat program berupa Pengembangan dan Pendampingan Petani Kopi bekerja sama dengan Kampus Institut Pertanian Bogor. Salah satu dampak dari pelaksanaan program tersebut menghasilkan produk kopi Desa Suka Sari yang dilengkapi dengan perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sehingga sudah dapat dijual dalam skala lokal.

Stakeholders and Scope of Impact of Responsibility in Social Community Development

In order to maintain the balance of people and environment on earth, the Company actively participates in carrying out social responsibility for social community activities that are spread in several regions of the archipelago as well as in the surrounding area of the Company's operations. Throughout 2019, the Company's active participation in environmental management is as follows:

- **Development and Assistance Program for Coffee Farmers**
The Company has an investment project of mini hydro power plant in Suka Sari Village, Kabawetan District, Kepahiang Regency, Bengkulu Province. By seeing the village's potential, the Company made a program of Coffee Farmer Development and Assistance in collaboration with Bogor Institute of Agriculture. One of the program's impacts is the production of Suka Sari Village coffee products, which is complemented by a Home Industry Food licensing (PIRT), so that can be sold locally.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

- Program Pemberdayaan Masyarakat Pedalaman Mentawai

Sejalan dengan program Pemerintah untuk membantu pembangunan di daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar (3T), Perusahaan telah menyalurkan bantuan Program Bina Lingkungan berupa Sarana Listrik Panel Surya dan Sarana Air Bersih di Dusun Buttui, Desa Madobak dan Dusun Salapak, Desa Salapak di mana ketersediaan infrastruktur umum di wilayah pedalaman masih sangat minim. Perusahaan juga memberikan bantuan dalam bidang pendidikan berupa Program Beasiswa untuk Anak Mentawai di Tingkat perguruan Tinggi, dan pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan sosial ekonomi kemasyarakatan berupa Peternakan Bebek Percontohan sebagai alternatif penambahan sumber gizi dan pendapatan rumah tangga.

- Mentawai Indigenous People Empowerment Program

In line with the Government's Program to support development in Border, Marginal and Outer (3T) area, the Company has distributed Community Development Program assistance in the form of Solar Panel Power Plant and Clean Water Facilities in Buttui, Madobak Village and Salapak, Salapak Village, where the public infrastructure availability in remote areas is still very minimal. The Company also provided education assistance in the form of Scholarship Program for Mentawai Children at the College level, construction of girls' dormitory and infrastructure facilities to improve social economy in the form of Pilot Duck Farming as an alternative to supplementing nutrition and household income.

Sasaran, Rencana dan Target

Rencana kegiatan tanggung jawab sosial terhadap Pengembangan sosial kemasyarakatan pada tahun 2019 dibagi ke dalam 2 (dua) jenis program yaitu Program Kemitraan dengan biaya sebesar sebesar Rp9,2 miliar dan Program Bina Lingkungan yang dipecah menjadi 7 (tujuh) kelompok kegiatan yaitu bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pelestarian alam, bantuan sarana dan/atau prasarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan sosial kemasyarakatan dan pengentasan kemiskinan dengan biaya sebesar Rp2 miliar. Kedepan, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran kegiatan CSR seiring dengan peningkatan pendapatan Perusahaan.

Penerapan Inisiatif pada Aspek Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Program Kemitraan

Program Kemitraan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dengan menyalurkan Program Kemitraan (dana bergulir) dalam bentuk pinjaman kepada usaha kecil dengan bunga yang rendah. Tujuan dari pemberian pinjaman tersebut untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri.

Objectives, Plans and Targets

Activity plan of social responsibility in social community development in 2019 is classified into 2 (two) types of program, i.e. Partnership Program with total budget of Rp9.2 billion and Community Development Program that is divided into 7 (seven) activity groups such as natural disaster relief, educational and/or training assistance, health assistance, nature conservation assistance, public facilities and/or infrastructure assistance, worship place donation, social community and poverty alleviation donation with total budget of Rp2 billion. In the future, the Company is committed to continuously increase CSR activity budget in line with the increasing revenues of the Company.

Initiatives in Social Community Development Aspect

Partnership Program

The Partnership Program has the commitment to improve the welfare of marginal society by distributing Partnership Program (revolving proceeds) in the form of loans for small enterprise with affordable interest rate. The purpose of loans disbursement is to increase capability of small enterprises to be resilient and independent.

Perusahaan bekerja sama dengan PT Bahana Artha Ventura (BAV) untuk membantu dalam menyalurkan dana Program Kemitraan langsung kepada Mitra Binaan melalui Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Kerja sama ini dimaksudkan agar penyaluran dana Program Kemitraan dapat tersebar di seluruh Indonesia dengan target tepat sasaran.

Selama tahun 2019 Perusahaan dapat menyalurkan dana pinjaman ke berbagai provinsi di Indonesia sebesar Rp9 miliar. Sebanyak 71 Mitra Binaan baru tergabung dalam Program Kemitraan dengan jenis usaha Perdagangan, Jasa, Industri, Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

The Company's partnership program has cooperated with PT Bahana Artha Ventura (BAV) to support the Partnership Program budget directly to the Fostered Partners via Regional Venture Capital Company (PMVD). The partnership aims to ensure the Partnership Program loans disbursement to be distributed evenly across Indonesia region and with the right target.

Until 2019, the Company disbursed loans to more than 60 fostered partners across Indonesia amounted Rp70 billion. As for 2019, the Company distributed loan funds of Rp9 billion. Total of 71 new Fostered Partners joined the Partnership Program with various business such as Trading, Services, Manufacturing, Agriculture, Plantation and Livestock.

Realisasi Dana Pinjaman Program Kemitraan Tahun 2019 (Rp-juta) Realization of 2019 Partnership Program Loan Funds (Rp-million)

Keterangan Description	Dana Realisasi Realization Funds
PT Sarana Sumbar Ventura	2.000.000.000
PT Sarana Lampung Ventura	2.000.000.000
PT Sarana Surakarta Ventura	2.000.000.000
PT Sarana Jatim Ventura	3.000.000.000
JUMLAH Total	9.000.000.000

Selain memberikan pinjaman, Program Kemitraan juga melakukan pembinaan terhadap Mitra Binaan melalui Pendidikan/Pelatihan serta Pemasaran/ Promosi. Tujuan dari Pembinaan tersebut agar Mitra Binaan bukan hanya mendapatkan pinjaman namun nilai tambah bagi sumber daya manusianya.

Besides disbursing loans, the Company's Partnership Program also develops the Fostered Partners through Education/Training and Marketing/Promotion. The purpose of the development is to encourage the Company's partners not only to acquire loans but also add value for their human resources.

Saldo *Outstanding* Piutang Program Kemitraan (Rp-juta) Partnership Program Outstanding Receivables Balance (Rp-million)

Keterangan Description	Per 31 Desember 2019 As of December 31, 2019	Per 31 Desember 2018 As of December 31, 2018
<i>Outstanding</i> Piutang	17.733	18.526

Untuk meningkatkan kualitas piutang, Perusahaan juga memantau pembayaran angsuran masing-masing Mitra Binaan. Selama tahun 2019 Mitra Binaan tertib dan tepat waktu dalam pengembalian pinjaman dengan tingkat kolektibilitas lancar. Hal ini terbukti dari rasio tingkat kolektibilitas mencapai 87.99% dengan 333 Mitra Binaan.

To improve receivables quality, the Company also monitors installment payment of every Fostered Partner. Throughout 2019, the Company's Fostered Partners have been complied and paid the loans on time with pass collectability level. This is proven from collectability ratio that achieved 87.99% with 333 Partners.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

Tahun Year	Kolektibilitas Collectability
2014	99,41%
2015	99,38%
2016	99,29%
2017	99,74%
2018	97,15%
2019	87,99%

Untuk tahun 2019 terdapat penurunan kolektibilitas yang cukup signifikan dari 97.15% menjadi 87.99% disebabkan terdapat keterlambatan pembayaran cicilan bulanan dari lembaga penyalur PT Sarana Sulut Ventura, yaitu untuk satu bulan pembayaran.

In 2019, there was a significant decrease in collectability from 97.15% to 87.99% due to late monthly installment payment from the channeling agency PT Sarana Sulut Ventura, that was for one month of payment.

Program Bina Lingkungan

Community Development Program

Realisasi Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2019 (Rp-juta)
Realization of Community Development Program in 2019 (Rp-million)

Nama Program Program Name	Dana Realisasi Realization Funds
Bantuan korban Bencana Alam Natural Disaster Relief	322.050.000
Bantuan Pendidikan Educational Assistance	366.449.017
Bantuan Peningkatan kesehatan Health Improvement Assistance	11.483.012
Bantuan Pelestarian Lingkungan Environmental Conservation Support	60.670.103
Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Facilities and Infrastructures Development Support	476.541.200
Bantuan Sarana Ibadah Worship Facilities Donation	239.970.000
Bantuan Sosial Kemasyarakatan kemiskinan Social Community Donation for Poverty	522.836.668
JUMLAH Total	2.000.000.000

a. Bantuan Korban Bencana Alam

Perusahaan terus berupaya untuk membantu di setiap situasi tanggap dan pasca bencana yang terjadi di negeri ini, berikut beberapa kegiatan penyaluran bantuan di beberapa daerah yang terdampak bencana di tahun 2019, yaitu:

- Bantuan Pasca Bencana Alam Banjir di Sulawesi Selatan;
- Bantuan Pembangunan Sekolah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Sulawesi Tengah;
- Bantuan Tanggap Bencana Alam Banjir di Jawa Barat;
- Bantuan Tanggap Bencana Alam Kabut Asap dan Kebakaran Hutan di Riau dan Kalimantan Tengah;
- Bantuan Tanggap Bencana Alam Gempa Bumi di Maluku.

b. Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan

Pada tahun 2019 Perusahaan melanjutkan Program Pendidikan, yaitu Program Beasiswa Sarjana untuk Anak Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dimulai sejak triwulan III tahun 2018. Sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Perusahaan juga membantu pembangunan Asrama Pendidikan Putri, sebagai tempat tinggal siswi yang bersekolah di Muara Siberut, Siberut Selatan.

a. Natural Disaster Relief

The Company attempts to help in every emergency response and post-disaster activity in the country. Some of donation disbursement activities in disaster affected area in 2019 are as follows:

- Donation for Post-Flood in South Sulawesi
- Donation for School Construction of Post Earthquake Disaster in Central Sulawesi;
- Donation for Flood Emergency Response in West Java;
- Donation for Smoke Hazard and Forest Fire in Riau and Central Borneo;
- Donation for Earthquake Emergency Response in Maluku.

b. Educational and/or Training Assistance

In 2019 the Company continued its Education Program, that is the Undergraduate Scholarship Program for Children of Mentawai, West Sumatra Province, which has began in the third quarter of 2018. As a form of support for organizing educational activities in Mentawai Islands District, the Company also assisted the construction of Girl Education Dormitory, as the only place for students who attend school in Muara Siberut, South Siberut.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

Perusahaan melanjutkan Program Beasiswa Siswa SMK di Plampang, Yogyakarta, yang telah memasuki masa exit program pada Semester I Tahun 2019, program Beasiswa yang bekerja sama dengan Mahasiswa LPDP ini telah berlangsung sejak Tahun 2016. Selain program beasiswa multi tahun, Perusahaan juga berpartisipasi dalam beberapa pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan lainnya, berikut daftar program Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan yang telah diselenggarakan Perusahaan pada tahun 2019:

- Beasiswa SMK Plampang - LPDP Yogyakarta Januari – Juni 2019;
- Beasiswa Sarjana Anak Mentawai, Provinsi Sumatra Barat;
- Bantuan Penyelenggaraan Seminar Pendidikan: Paradigma Kompetisi VS Kolaborasi bekerja sama dengan Yayasan Aksi Peduli Bangsa di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat;
- Bantuan Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga *Outsourcing* yang tidak mampu di wilayah Jabodetabek;
- Bantuan Penyelenggaraan *Workshop Manual Brew* untuk siswa SMK, mahasiswa dan masyarakat pra sejahtera di Kota Tangerang, Banten;
- Bantuan Penyelenggaraan IBK's Day (Insan Berkemampuan Khusus – Day), yang merupakan sebuah kampanye kepedulian pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus di Provinsi DKI Jakarta.

- c. **Bantuan Peningkatan Kesehatan**
Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kesehatan, Perusahaan berpartisipasi dalam Bantuan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengobatan Gratis oleh Tunas *School* di Kota Tangerang dan Bantuan Peningkatan Kesehatan untuk Keluarga *Outsourcing* yang tidak mampu di wilayah Jabodetabek.

- d. **Bantuan Pelestarian Alam**
Sebagai bentuk kontribusi dalam melestarikan alam di sekitar wilayah bisnis, pada bulan November, bertepatan dengan Hari Pohon Sedunia, Perusahaan bersama karyawan melaksanakan Penanaman 300 bibit tanaman mangrove di kawasan Kapuk, Jakarta.

The Company continued the Vocational Student Scholarship Program in Plampang, Yogyakarta, which has entered the program exit period in Semester I of 2019, in which this Scholarship program is in collaboration with LPDP Students and has been ongoing since 2016. In addition to the multi-year scholarship program, the Company also participated in several other education and training programs implementations. Herewith is a list of Educational and/or Training assistance programs that have been held by the Company in 2019:

- SMK Plampang Scholarship - LPDP Yogyakarta January - June 2019;
- Mentawai Children Scholarship, West Sumatra Province;
- Assistance in Organizing Educational Seminars: Competition VS Collaboration Paradigm in collaboration with Yayasan Neduli Nation in the City of Padang, West Sumatra Province;
- Educational Scholarship Assistance for poor family of Outsourcing Employee in the Greater Jakarta Area;
- Assistance in Organizing the Manual Brew Workshop for Vocational school students, college students and underprivileged communities in the City of Tangerang, Banten;
- Assistance in Organizing IBK's Day (People with Special Needs - Day), which is an education awareness campaign for children with special needs in DKI Jakarta Province.

- c. **Health Improvement Assistance**
In the Health Improvement Program, the Company participates in Providing Free Counseling and Medical Treatment by Tunas School in Tangerang City and Health Improvement Assistance for poor family of Outsourcing Employee in the Greater Jakarta Area.

- d. **Nature Conservation**
As a form of contribution in preserving nature around the business area, in November, to coincide with World Tree Day, the Company and its employees carried out the Planting of 300 mangrove seedlings in Kapuk area, Jakarta.

- e. **Bantuan Sarana dan/atau Prasarana Umum**
Pada tahun 2019, Perusahaan dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan tahunan BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Sumatra Barat. Pada kesempatan tersebut, Perusahaan berkontribusi memberikan bantuan sarana prasarana untuk Panti Asuhan dan Pondok Pesantren di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sumatra Barat. Perusahaan juga memberikan bantuan sarana prasarana umum berupa alat pertanian untuk warga, dalam rangka perayaan ulang tahun Perusahaan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra utara. Selain memberikan bantuan Program Pendidikan di Mentawai, Perusahaan bersama Yayasan Aksi Peduli Bangsa merintis Program Peternakan Umum untuk Masyarakat setempat, yang diharapkan menjadi salah satu wadah pemberdayaan dan alternatif sumber penghasilan serta makanan untuk masyarakat, dan lain-lain.
- f. **Bantuan Sarana Ibadah**
Perusahaan memberikan kontribusi dalam pembangunan sarana/prasarana ibadah yang berada di lingkungan Perusahaan, antara lain:
- Bantuan Sarana Prasarana Musholla Al Haq Perumahan Bukit Hijau Ciomas, Bogor, Jawa Barat;
 - Bantuan Perbaikan Masjid Jami' Al Amin di Bintaro, Jakarta;
 - Bantuan Sarana Prasarana di Yayasan Bina Matahari Bangsa bekerja sama dengan Gerakan Pemusa GPIB Bukit Moria, Jakarta;
 - Bantuan Pembangunan Masjid Maghfirah di Bogor, Jawa Barat dan lain-lain.
- g. **Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Pengentasan Kemiskinan**
Pada Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Pengentasan Kemiskinan, Perusahaan merealisasikan bantuan bina lingkungan dengan mengacu pada penugasan Kementerian BUMN maupun atas inisiasi diantaranya:
- Pemberian santunan untuk anak yatim dhuafa di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sumatra Barat dalam rangka kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri;
- e. **Public Facilities and/or Infrastructures Donation**
In 2019, the Company was entrusted to hold the SOEs Present for the Country annual activities in West Sumatra Province. On this occasion, the Company contributed to provide infrastructure facilities for Orphanages and Islamic Boarding Schools in several cities and districts in West Sumatra Province. The Company also provided assistance in public infrastructure such agricultural equipment for the community, in the context of celebrating the Company's anniversary in Karo District, North Sumatra Province. In addition to providing assistance in the Education Program in Mentawai, the Company, together with Aksi Peduli Bangsa Foundation, pioneered the Public Animal Husbandry Program for local community, which is expected to be one of the empowerment and alternative source of livelihood and food for the community, and others.
- f. **Worship Place Donation**
The Company contributes to the worship place construction around the Company's environment, including:
- Donation for Al Haq Musholla Infrastructure in Bukit Hijau Ciomas Residence, Bogor, West Java;
 - Donation in Repairing Jami 'Al Amin Mosque in Bintaro, Jakarta;
 - Donation for Bina Matahari Bangsa Foundation in collaboration with GPIB Bukit Moria Pemusa Movement, Jakarta;
 - Donation for the construction of Maghfirah Mosque in Bogor, West Java and others.
- g. **Social Community and Poverty Alleviation Donation**
In Social Community and Poverty Alleviation Donation, the Company realized community development by referring to the Ministry of SOE's assignment and the Company's initiation including:
- Donation for dhuafa orphans in several cities and regencies in West Sumatra Province in the context of SOEs Present for the Country activities;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

- Penyelenggaraan Pangan Murah dalam rangka kegiatan HUT BUMN Bersama di Ciamis, Jawa Barat;
- Pemberian santunan untuk anak yatim dan dhuafa dalam Program PPA Berbagi Berkah Ramadhan di wilayah Jabodetabek;
- Bakti sosial di Yayasan Difabel Agape Ministry dalam rangka Hari Paskah, Jakarta;
- Bantuan hewan qurban dalam rangka Idul Adha di Jakarta dan Maluku;
- Penyelenggaraan Pangan Murah Idul Fitri di Kota Malang, Jawa Timur;
- Bakti sosial di Yayasan Imago Dei bekerja sama dengan Persekutuan Doa Filadelfia dalam rangka Hari Raya Nata, Jakarta;
- Bakti sosial di Yayasan Felicia Angel Kids – Panti Asuhan Holy Angel dalam rangka Hari Raya Natal, Jakarta dan lain-lain.
- Organizing Cheap Groceries at SOEs Joint Anniversary in Ciamis, West Java;
- Donation for orphans and dhuafa in PPA Ramadhan Blessings Program in the Greater Jakarta Area;
- Social service at Difabel Agape Ministry Foundation for Easter Day, Jakarta;
- Sacrificed Animal Donation for Eid al-Adha in Jakarta and Maluku;
- Cheap Groceries for Eid Fitri in Malang, East Java;
- Social services at Imago Dei Foundation in collaboration with Philadelphia Prayer Fellowship on Christmast Day, Jakarta;
- Social service at Felicia Angel Kids Foundation - Holy Angel Orphanage for Christmas, Jakarta and others.

Dampak Kuantitatif atas Pengelolaan Aspek Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Berikut disampaikan rekapitulasi dana yang telah disalurkan oleh Perusahaan dalam rangka pengembangan sosial kemasyarakatan.

Quantitative Impacts on Community Development Management

Following is the recapitulation of the Company's funds distributed in the context of social community development.

Perihal Description	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	2018 (Rp-juta) (Rp-million)	Anggaran 2019 (Rp-juta) Budget 2019 (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%) Increase (Decrease) 2018-2019 (%)		Penyerapan Anggaran 2019 Budget Absorption 2019 (%)	
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2)		(1/3)	
Program Kemitraan Partnership Program (PP)	9.158	11.107	10.862	-17,55%	●	84,31%	●
Program Bina Lingkungan Community Development Program	2.000	1.593	2.000	25,55%	●	100,00%	●

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
COMPANY FINANCIAL STATEMENTS



LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS



**PT PERUSAHAAN PENGELOLA
ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
31 Desember 2019 dan 2018**

***PT PERUSAHAAN PENGELOLA
ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018***

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
Daftar Isi
**Halaman/
Page**
Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi
Directors' Statement Letter
Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report
**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018**
***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
Desember 31, 2019 and 2018***

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

1

Consolidated Statements of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian

3

*Consolidated Statements of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income*

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

4

Consolidated Statements of Changes in Equity

Laporan Arus Kas Konsolidasian

5

Consolidated Statements of Cash Flows

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

6

Notes to the Consolidated Financial Statements
Informasi Tambahan
Additional Information

Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)

I

Statements of Financial Position (Parent Entity)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain (Entitas Induk)

II

*Statements of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income (Parent Entity)*

Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)

III

Statements of Changes in Equity (Parent Entity)

Laporan Arus Kas (Entitas Induk)

IV

Statements of Cash Flows (Parent Entity)

Informasi Tambahan (Entitas Induk)

V

Additional Information (Parent Entity)


PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

State-owned Asset Management Company

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

1. Nama / Name Alamat kantor / Office Address Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID Card Nomor Telpon / Phone Number Jabatan / Position	: Iman Rachman : Sampoerna Strategic Square North Tower 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 : Jl. Taman Wijaya Kusuma III/3.A RT.005/RW.002 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. : 021-57982222 : Direktur Utama / President Director
2. Nama / Name Alamat kantor / Office Address Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID Card Nomor Telpon / Phone Number Jabatan / Position	: R. Muhammad Irwan : Sampoerna Strategic Square North Tower 10th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 : Jl. Mangga No.38 RT.002/RW.003 Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. : 021-57982222 : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja / Director of Finance & Support

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;	<i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;</i>
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	<i>The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;	<i>All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;</i>
4. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	<i>The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;</i>
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.	<i>We are responsible for internal control system within the company and its subsidiaries.</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

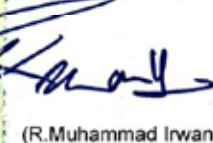
This statement letter has been made truthfully.

Jakarta, 28 Februari 2020 / Jakarta, February 28, 2020

 Direktur Utama/
President Director

 Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja/
Director of Finance & Support


(Iman Rachman)


(R. Muhammad Irwan)

Sampoerna Strategic Square, North Tower 9th - 12th fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930
Telp. [62-21] 5798 2222 (hunting) - Fax. [62-21] 5798 2233 - Website : www.ptppa.com



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/Number : 00092/2.1030/AU.1/10/0181-1/1/II/2020

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia
Financial Services Authority (OJK)



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2019 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2019, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2019 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal, disampaikan secara terpisah kepada manajemen masing-masing dalam laporan kami No. R/055.AAT/bna/2020 dan No. R/056.AAT/bna/2020 tanggal 28 Februari 2020.

has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We also have tested on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls. The compliance with certain laws and regulations and internal controls are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express a conclusion on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls based on our audit. Testing of the compliance with certain laws and regulations and internal controls that we performed were in accordance with State Financial Auditing Standards established by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia and Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

The compliance to certain regulations and internal controls, are submitted separately to the management, in our reports No. R/055.AAT/bna/2020 and No. R/056.AAT/bna/2020 dated February 28, 2020, respectively.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Benny Andria

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181/
Public Accountant License Number: AP.0181

Jakarta, 28 Februari/ February 28, 2020

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK****LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES****CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**As of December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018*) Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3	1,107,636	1,365,617	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	4			Short-term Investment Loans
Pihak Berelasi		32,449	22,069	Related Parties
Pihak Ketiga		1,413,181	423,195	Third Parties
Aset Keuangan Diperdagangkan	5			Held for Trading Financial Assets
Pihak Berelasi		70,260	79,632	Related Parties
Pihak Ketiga		--	1,588	Third Parties
Piutang Usaha	6			Accounts Receivable
Pihak Berelasi		386,413	269,725	Related Parties
Pihak Ketiga		1,091,184	906,628	Third Parties
Piutang Retensi	7			Retention Receivables
Pihak Berelasi		68,983	65,087	Related Parties
Pihak Ketiga		101,138	101,736	Third Parties
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	8	296,623	277,862	Joint Venture Construction Receivables
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan				Loans Receivable-Bailout
Pihak Berelasi	9	223,046	215,581	Related Parties
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	10			Gross Amount Due from Customers
Pihak Berelasi		394,037	564,551	Related Parties
Pihak Ketiga		2,024,069	1,653,814	Third Parties
Persediaan	11	216,340	154,278	Inventories
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	12	102,187	154,751	Advances and Prepaid Expenses
Pajak Dibayar Di Muka	13	812,576	691,610	Prepaid Taxes
Cessie Piutang Jangka Pendek	23	282,099	288,602	Cessie Receivables
Aset Lancar Lainnya	14	49,138	43,772	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar		8,671,359	7,280,098	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	15	40,296	95,989	Available for Sale Financial Assets
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau	16			Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization
Pihak Berelasi		1,416,472	1,388,273	Related Parties
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	19	299,854	265,053	Long-term Investment Loans
Properti Investasi	17	865,583	786,809	Investment Property
Aset Pajak Tangguhan	13	42,066	25,569	Deferred Tax Assets
Uang Muka Investasi		--	6,250	Advance on Investment
Investasi pada Ventura Bersama	18	321,808	336,085	Investment in Joint Ventures
Piutang Lain-lain		238	--	Other Receivables
Investasi Jangka Panjang Lainnya	20	102,940	138,053	Other Long-Term Investments
Aset Tetap	21	1,556,796	1,068,044	Property, Plant & Equipment
Goodwill	22	370,257	--	Goodwill
Cessie Piutang Jangka Panjang	23	283,493	--	Cessie Receivables
Aset Tidak Lancar Lainnya	14	444,270	354,278	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		5,744,073	4,464,403	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		14,415,432	11,744,501	TOTAL ASSETS

*) Reklasifikasi, Catatan 42

*) Reclassification, Note 42

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK****LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES****CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	24			Accounts Payable
Pihak Berelasi		140,455	92,420	Related Parties
Pihak Ketiga		1,789,101	2,031,571	Third Parties
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	25			Bank and Financial Institution Loans
Pihak Berelasi		1,522,238	852,130	Related Parties
Pihak Ketiga		1,297,720	1,128,699	Third Parties
Utang Surat Berharga Komersial	31	93,572	--	Commercial Debt Securities
Surat Utang Jangka Menengah yang Akan Jatuh Tempo				Current Maturities of
Dalam Satu Tahun	32	300,000	--	Medium Term Notes
Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo				Current Maturities of
Dalam Satu Tahun				Long Term Loan
Pihak Berelasi		--	83,555	Related Parties
Pihak Ketiga		17,044	17,969	Third Parties
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	26	1,342,936	686,680	Gross Amount Due to Third Parties
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek	27			Short-Term Advances from Customers
Pihak Berelasi		10,372	14,630	Related Parties
Pihak Ketiga		253,758	272,019	Third Parties
Utang Pajak	13	74,004	50,297	Taxes Payable
Beban Akruak dan Utang Lain-lain	28	260,479	210,260	Accruals and Other Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		7,101,679	5,440,230	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	29	23,089	22,766	Employee Benefit Liabilities
Pinjaman Bank Jangka Panjang	25			Long-Term Bank Loans
Pihak Berelasi		881,480	190,362	Related Parties
Pihak Ketiga		--	33,513	Third Parties
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	32	807,455	600,000	Long-Term Medium Term Notes
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang	30			Long-Term Advances from Customers
Pihak Berelasi		35,965	60,501	Related Parties
Pihak Ketiga		140,063	135,086	Third Parties
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya		2,158	--	Other Long Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1,890,210	1,042,228	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		8,991,888	6,482,458	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik				Equity Attributable to Owner
Entitas Induk				of the Parent
Modal Saham-Nilai Nominal Rp 1.000.000	33			Share Capital - Rp 1,000,000 par value
per saham - Modal Dasar 5.000.000 saham				per share - Authorized Capital 5,000,000 shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				Issued and Fully Paid
2019 dan 2018, masing-masing				As of 2019 and 2018
2.996.688 saham		2,996,688	2,996,688	2,996,688, respectively
Tambahan Modal Disetor		(308,059)	(308,059)	Additional Paid in Capital
Saldo Laba:				Retained Earnings:
Telah Ditentukan Penggunaannya		299,350	171,528	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		1,993,291	1,780,757	Unappropriated
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas				Difference in Value of Restructuring Transaction
Sepengendali				Between Entities under Common Control
Labas (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk				Unrealized Gain (Loss) on Available
Dijual - Bersih		22,152	25,628	for Sale Securities - Net
Surplus Revaluasi Aset Tetap		413,255	477,889	Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada				Total Equity Attributable to Owner of
Pemilik Entitas Induk		5,416,677	5,144,431	the Parent
Kepentingan Non Pengendali		6,867	117,612	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		5,423,544	5,262,043	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		14,415,432	11,744,501	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan*The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK****LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES****THE CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**For the Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
PENDAPATAN USAHA	34	6,669,457	6,824,001	REVENUES
BEBAN USAHA	35	(6,289,760)	(6,292,565)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA		379,697	531,436	OPERATING INCOME
Pendapatan Bunga		15,424	15,514	Interest Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap		237	--	Gain on Sale of Property, Plant, and Equipment
Beban Bunga dan Keuangan		(89,230)	(76,004)	Interest Expense and Financial Charge
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi		--	75,448	Increase in Fair Value of Investment Property
Beban Pajak Final	38	(159,199)	(174,168)	Final Tax Expense
Bagian Laba Ventura Bersama	36	66,706	106,821	Share of the Profit of Joint Ventures
Penghasilan (Beban) Lain-lain		122,076	(37,387)	Other Income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK		335,711	441,660	INCOME BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAXES
Manfaat (Beban) Pajak Kini	13.c	(17,007)	(17,213)	Current Tax Benefit (Expenses)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	13.d	8,368	4,353	Deferred Tax Benefit (Expenses)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		(8,639)	(12,860)	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		327,072	428,800	INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		--	79,910	Item that will not be reclassified to profit or loss
Surplus Revaluasi Aset Tetap		--	79,910	Property, Plant and Equipment Revaluation Surplus
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas		--	79,910	Actuarial Gain (Loss) from Defined
Imbalan Pasti		(6,645)	520	Benefit Liabilities
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(3,476)	(18,651)	Item that will be reclassified to profit or loss
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual		(3,476)	(18,651)	Available for Sale Financial Assets
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		316,951	490,579	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Pemilik Entitas Induk		324,913	426,077	Owners of The Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali		2,159	2,723	Non-Controlling Interests
JUMLAH		327,072	428,800	TOTAL
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Pemilik Entitas Induk		314,854	467,878	Owners of The Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali		2,097	22,701	Non-Controlling Interest
JUMLAH		316,951	490,579	TOTAL
LABA PER SAHAM (dalam angka penuh)	37	108,424	142,183	EARNINGS PER SHARE (in full amount)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhanThe accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**
For the Years Ended
31 Desember 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Owner of the Parent						Kepentingan Non- Pengendali/ Non-Controlling Interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital	Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/ on Available for Sale Financial Assets	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment	Saldo Laba/Retained Earnings *) Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated			
Saldo Per 31 Desember 2017	2,996,688	(305,768)	44,279	417,957	141,353	1,404,335	4,698,844	10,847	4,709,691
Dampak Konsolidasi Entitas Anak di Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	--	84,239	--	84,239
Dampak Divestasi Entitas Anak di Tahun Berjalan	--	(2,291)	--	--	--	--	(2,291)	--	(2,291)
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	426,077	426,077	2,723	428,800
Cadangan umum	--	--	--	--	30,175	(30,175)	--	--	--
Dividen	--	--	--	--	--	(20,000)	(20,000)	(175)	(20,175)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	(18,651)	59,932	--	520	41,801	19,978	61,779
Saldo Per 31 Desember 2018	2,996,688	(308,059)	25,628	477,889	171,528	1,780,757	5,144,431	117,612	5,262,043
Dampak Konsolidasi Entitas Anak di Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	--	(110,315)	--	(110,315)
Dividen	--	--	--	--	--	(42,608)	(42,608)	(2,529)	(45,137)
Cadangan umum	--	--	--	--	127,822	(127,822)	--	--	--
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	324,913	324,913	2,159	327,072
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	(3,476)	--	--	(6,583)	(10,059)	(60)	(10,119)
Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap	--	--	--	(64,634)	--	64,634	--	--	--
Saldo Per 31 Desember 2019	2,996,688	(308,059)	22,152	413,255	299,350	1,993,291	5,416,677	6,867	5,423,544

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK****LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES****CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari Pelanggan		6,324,749	5,930,344
Penyaluran Pembiayaan Konsumen		(497,110)	(566,485)
Penerimaan Restitusi Pajak		22,147	18,656
Penerimaan Bunga atas Pinjaman yang Diberikan		52,793	70,923
Penerimaan Penggantian Biaya		1,196	1,558
Pembayaran Beban Usaha		(5,973,411)	(4,944,868)
Pembayaran Beban Bunga		(363,107)	(228,358)
Pembayaran Pajak		(226,249)	(226,442)
Penerimaan Hasil Investasi		245,873	165,248
Pencairan Surat Berharga Diperdagangkan		8,442	638
Penambahan Aset Lancar Lainnya		--	(290,918)
Penerimaan Lainnya		24,484	45,098
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(380,193)	(24,606)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan Aset Tetap		(231,067)	(478,776)
Perolehan Properti Investasi		(641)	(106,653)
Hasil Penjualan Aset Tetap		1,525	1,087
Penerimaan dari Divestasi		--	11,000
Investasi pada Ventura Bersama		--	(53,148)
Pencairan (Penempatan) Surat Berharga Tersedia untuk Dijual		(13,519)	17,779
Penempatan Investasi pada Entitas Anak		--	(37,000)
Penempatan Uang Muka Investasi		--	(6,250)
Hasil Investasi Ventura bersama		44,306	--
Penambahan Investasi Lainnya		(1,290,451)	(553,325)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(1,489,847)	(1,205,286)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Pinjaman		13,066,442	13,202,721
Pembayaran Pinjaman		(12,011,774)	(12,311,859)
Penerimaan Penerbitan Surat Berharga		841,027	--
Pembayaran Penerbitan Surat Berharga		(240,000)	--
Pembayaran Dividen		(43,636)	(20,175)
Penerimaan Dividen		--	20,925
Penerimaan Utang Dari Pihak Bereleasi		--	25,000
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan		1,612,059	916,612
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(257,981)	(313,280)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		1,365,617	1,694,156
KAS AIRBONE (PELEPASAN SAHAM AIRBONE)		--	(16,926)
PENAMBAHAN DARI AKUISISI		--	1,667
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		1,107,636	1,365,617

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash Receipts from Customers
Disbursement for Financing
Cash Receipts from Tax Refund
Proceeds from Loan Receivables Interest
Reimbursable Cost of Assets
Payment of Operating Expenses
Payment of Interest Expenses
Tax Paid
Proceeds from Investment
Receipt from Trading Securities
Additional of Other Current Assets
Other Income

Net Cash Used in Operating Activities**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**

Acquisitions of Property, Plant and Equipment
Acquisition of Investment Properties
Proceeds from Disposal of Property, Plant and Equipment
Proceeds from Divestment
Placement from Investment in Joint Venture
Disbursement (Placement) Securities Available for Sale
Placement of Investment in Subsidiary
Placement of Advance of Investment
Proceeds from Investment in Joint Venture
Additional Other term Investments

Net Cash Used in Investing Activities**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**

Receipts from Loan
Payment for Loan
Receipts From Securities
Payment for Securities
Dividend Payment
Dividend Receipt
Receipts from Related Parties

Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities**NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS****CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR****AIRBONE CASH (DIVESTMENT AIRBONE SHARE)****ADDITIONAL FROM ACQUISITION****CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 27 Februari 2004 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2004, Tambahan No. 4541. Akta pendirian Perusahaan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 2004 telah diubah dengan diterbitkannya PP No. 61 tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2004 yang menetapkan, antara lain perluasan maksud dan tujuan Perusahaan dan ruang lingkup kegiatan Perusahaan.

Berdasarkan Akta No. 27 dari Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 menyatakan persetujuan penambahan modal Perusahaan sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dengan demikian modal ditempatkan yang semula sebesar Rp1.996.688 menjadi sebesar Rp2.996.688. Perubahan ini telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0029777 tanggal 8 Maret 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

1. General

1.a. Establishment and General Information

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("the Company") was established under Notarial Deed No. 7 dated February 27, 2004 of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Decree No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 dated March 9, 2004 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated May 14, 2004, Supplement 4541. The deed of establishment was made based on Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 10 Year 2004 dated February 27, 2004 on the Establishment of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in Asset Management Area. Several clauses in the PP No. 10 Year 2004 have been amended by the issuance of PP No. 61 Year 2008 dated September 4, 2008 on the Amendment to Government Regulation No. 10 Year 2004 which stipulates, among others expanded the purposes and objectives of the Company and its scope of activities.

Based on Notarial deed no. 27 of Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta, dated February 15, 2016, declared approval of the capital increase of the Company Rp1,000,000 (full amount) from the State Budget for Fiscal Year 2015, thus the original issued capital amounted Rp1,996,688 amounted to Rp2,996,688. This change has been noted by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Law Administration No. AHU-AH.01.03-0029777 dated March 8, 2016 concerning Acceptance of Notification of Amendments to the Company's Articles of the Company.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are to undertake and support the Government's policies and programs in economics sector and national development programs in general. To achieve its purposes and objectives the Company conducting several business activities which comprise of:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

1. Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Pendapatan pengelolaan Aset eks BPPN sudah berakhir sejak 31 Desember 2017 karena mulai tahun 2018 tidak terdapat lagi Perjanjian Pengelolaan Aset dengan Kementerian Keuangan (Perjanjian Pengelolaan Aset sudah berakhir sejak tahun 2018);
2. Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara ("BUMN");
3. Kegiatan investasi; dan
4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

Perusahaan berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 9 sampai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta.

1.b. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas-entitas anak pada 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation	Jumlah Aset 31 Desember 2019/ Total Assets December 31 2019 Rp	Jumlah Pendapatan Tahun 2019 Total Revenues For 2019 Rp
PT PPA Finance ("PT PPAF")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2009	1,120,334	147,423
PT PPA Kapital ("PT PPAK")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2012	827,992	36,181
PT Nindya Karya ("PT NK")	Jakarta	Konstruksi/Construction	99.000	1961	5,972,492	5,598,005
PT Nindya Beton *) ("PT NB")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	100.000	2013	187,279	223,895
PT Duta Mentari Raya **) ("PT DMR")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.997	2014	105,002	3,774
PT Magnesium Gosari International ("PT MGI")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	90.000	2018	313,763	59,485
PT Bondi Syad Mulia**) ("PT BSM")	Surabaya	Pabrikasi/Manufacturing	75.000	1981	291,774	2,996
PT SIPPA Kemasan International **) ("PT SKI")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.980	2018	159,769	—
PT Matoa Kidung Samudera**) ("PT MKS")	Jakarta	Kapal Isap Timah	60.000	2017	63,017	25,222
PT Matoa Kidung Bahtera**) ("PT MKB")	Jakarta	Kapal Isap Timah	60.000	2017	59,094	19,378
PT Rejeki Inti Logamjaya**) ("PT RILJ")	Tangerang	Pabrik Ingot	73.530	1997	162,429	109,922

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT NK/Indirectly Ownership through PT NK

**) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPAK/Indirectly Ownership through PT PPAK

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation	Jumlah Aset 31 Desember 2018/ Total Assets December 31, 2018 Rp	Jumlah Pendapatan Tahun 2018/ Total Revenues For 2018 Rp
PT PPA Finance (PT PPAF)	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2009	963,471	120,738
PT PPA Kapital (PT PPAK)	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2012	419,288	5,189
PT Nindya Karya (PT NK)	Jakarta	Konstruksi/Construction	99.000	1961	5,691,001	6,226,911
PT Nindya Beton *) ("PT NB")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	100.000	2013	140,486	199,927
PT Duta Mentari Raya **) ("PT DMR")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.997	2014	114,475	—
PT Magnesium Gosari International **) ("PT MGI")	Gresik	Pabrikasi/Manufacturing	90.000	2018	131,234	900
PT Bondi Syad Mulia**) ("PT BSM")	Surabaya	Pabrikasi/Manufacturing	75.000	1981	247,512	159,719
PT SIPPA Kemasan International **) ("PT SKI")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.980	2018	170,435	—

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT NK/Indirectly Ownership through PT NK

**) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPAK/Indirectly Ownership through PT PPAK

Perusahaan dan Entitas Anak selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Grup".

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES****NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

1. State's asset management which originated from Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) after the termination and dissolution the task of IBRA, for and on behalf of the Minister of Finance. Revenue from Asset Management ex-IBRA assets has ended since December 31, 2017 when starting in 2018 there are no more Asset Management Agreements with the Ministry of Finance (Asset Management Agreements have expired since 2018);
2. Restructuring and/or revitalization of State-Owned Enterprises ("SOE's");
3. Investment activities; and
4. SOE's asset management activities.

The Company is located at the Sampoerna Strategic Square, North Tower Floor 9th to 12th, Jalan Jenderal Sudirman Lot 45-46, Jakarta.

1.b. Subsidiaries Structure

The Company has control the Subsidiaries at December 31, 2019 and 2018 as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation	Jumlah Aset 31 Desember 2018/ Total Assets December 31, 2018 Rp	Jumlah Pendapatan Tahun 2018/ Total Revenues For 2018 Rp
PT PPA Finance (PT PPAF)	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2009	963,471	120,738
PT PPA Kapital (PT PPAK)	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2012	419,288	5,189
PT Nindya Karya (PT NK)	Jakarta	Konstruksi/Construction	99.000	1961	5,691,001	6,226,911
PT Nindya Beton *) ("PT NB")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	100.000	2013	140,486	199,927
PT Duta Mentari Raya **) ("PT DMR")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.997	2014	114,475	—
PT Magnesium Gosari International **) ("PT MGI")	Gresik	Pabrikasi/Manufacturing	90.000	2018	131,234	900
PT Bondi Syad Mulia**) ("PT BSM")	Surabaya	Pabrikasi/Manufacturing	75.000	1981	247,512	159,719
PT SIPPA Kemasan International **) ("PT SKI")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.980	2018	170,435	—

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT NK/Indirectly Ownership through PT NK

**) Kepemilikan tidak langsung melalui PT PPAK/Indirectly Ownership through PT PPAK

The Company and Subsidiaries hereinafter referred as "the Group".

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- **PT PPAF**
Berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara BUMN No. S-360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan membentuk PT PPAF dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%.
- **PT PPAK**
Berdasarkan persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011, dan memo M-10/PPA/ID/0317 saham Perusahaan pada PPAK sebesar 99,999%.
- **PT NK**
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, Perusahaan melakukan penyertaan modal pada PT NK sebesar Rp499.997 atau merupakan 99% dari modal disetor dan ditempatkan.
- **PT NB**
PT NK dan Perusahaan mendirikan Akta Perseroan Terbatas PT NB No. 33 tanggal 19 Februari 2013 dari Khairina S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10206.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
- **PT DMR**
Berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 15 pada tanggal 5 September 2016, PT DMR melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp66.000 dan peningkatan modal disetor menjadi Rp33.055 melalui konversi utang dari PT PPAK. Akta ini telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor. AHU-0016192.AH.01.02 Tahun 2016 Tanggal 7 September 2016. Sehingga kepemilikan PT PPAK menjadi 99,997%.
- **PT MGI**
PT MGI didirikan oleh Perusahaan dan PT Polowijo Gosari ("Polowijo"), berdasarkan Akta Pendirian No. 189 tanggal 29 Agustus 2018 yang di buat di hadapan Notaris Rully Maharany, S.H., M.Kn., berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Akta ini telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- **PT PPAF**
Based on the letter of approval from the Minister of SOE's No. S-360/MBU/2009 dated May 27, 2009, the Company established PT PPAF, with share's ownership of 99.999%.
- **PT PPAK**
Based on the approval of the Minister of SOE's through letter No. S-372/MBU/2011 dated June 22, 2011, and memo of M-10/PPA/ID/0317 the Company's shares in PPAK amounted to 99.999%.
- **PT NK**
Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 69 Year 2012, the Company made an equity investment in PT NK for Rp499,997 or 99% of the issued and paid up capital.
- **PT NB**
In 2013, PT NK and the Company establishes PT NB No. 33 based on The Limited Company Deed of PT NB dated February 19, 2013 of Khairina, S.H., Notary in Jakarta which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia through Decision of The Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number AHU-10206.AH.01.01 Year 2013 regarding Authorization of the Company's Legal Entity.
- **PT DMR**
Based on Notarial Deed of Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 15 dated September 5, 2016, PT DMR increased its authorized capital to Rp66,000 and increase the paid-up capital to Rp33,055 through the conversion of debt of PT PPAK. The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0016192.AH.01.02 2016 dated September 7, 2016. Therefore PT PPAK's ownership became 99,997%.
- **PT MGI**
PT MGI was established by the Company and PT Polowijo Gosari ("Polowijo"), based on the Deed of Establishment No. 189 dated 29 August 2018 made before the Notary Rully Maharany, S.H., M.Kn., domiciled in Gresik, East Java. This deed was approved by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Surat Keputusan Nomor. AHU-0041562.AH.01.01 tahun 2018, tanggal 30 September 2018.

Perusahaan melakukan penyeteroran modal sebanyak 45.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp45.000 dan PT Polowijo Gosari menyetorkan sebanyak 5.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000, dengan komposisi kepemilikan Perusahaan sebesar 90% dan PT Polowijo Gosari sebesar 10%.

• **PT BSM**

Berdasarkan Akta Notaris Wiwik Yulianti, S.H., M.Kn., No. 7 pada tanggal 10 September 2018, PT PPAK menyetujui untuk membeli saham PT BSM sebanyak 44.220 lembar dengan nilai Rp100.000 (nilai penuh) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp4.420 sehingga kepemilikan PT PPAK pada PT BSM sebesar 75%.

Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-01.03-0244714 Tanggal 20 September 2018.

• **PT SKI**

Berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 24 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., PT PPAK menyetujui untuk membeli saham 3.250 lembar saham senilai Rp3.250 sehingga kepemilikan saham PT PPAK pada PT SKI sebesar 65%. Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0045333.AH.01.01 Tanggal 25 September 2018.

• **PT MKS**

Berdasarkan Akta Notaris Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 17 pada tanggal 31 Januari 2019, telah dilakukan persetujuan konversi atas surat utang konversi menjadi saham baru sebesar Rp15.625 tertanggal 23 Januari 2019. Atas hal tersebut PT PPAK memiliki kepemilikan saham sebanyak 18.750 lembar saham atau 60% pada PT MKS. Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0067570 tanggal 4 Februari 2019.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Number. AHU-0041562.AH.01.01 in 2018, September 30, 2018.

The Company made a capital deposit of 45,000 shares with a nominal value of Rp45,000 and PT Polowijo Gosari deposited 5,000 shares with a nominal value of Rp5,000, with the composition of the Company's ownership of 90% and PT Polowijo Gosari amounting to 10%.

• **PT BSM**

Based on Notarial Deed Wiwik Yulianti, S.H., M.Kn., No. 7 dated September 10, 2018, PT PPAK agreed to buy 44,220 shares of PT BSM with a value of Rp100,000 (full amount) per share or a total of Rp4,420 so that PT PPAK's ownership in PT BSM was 75%.

This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Number: AHU-01.03-0244714 September 20, 2018.

• **PT SKI**

Based on the Deed of Establishment No. 22 dated September 24, 2018 made before Notarial Deed Lenny Janis Ishak, S.H., PT PPAK agreed to buy 3,250 shares worth Rp3,250 so that the Company's share ownership in PT SKI was 65%. This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree Number: AHU-0045333.AH.01.01 dated September 25, 2018.

• **PT MKS**

Based on Notarial Deed of Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 17 dated January 31, 2019, the conversion agreement has been carried out for convertible bonds into new shares amounting to Rp15,625 dated January 23, 2019. Based on this, PT PPAK has 18,750 shares or 60% ownership in PT MKS. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Number: AHU-AH.01.03-0067570 dated February 4, 2019.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

• **PT MKB**

Berdasarkan Akta Notaris Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 18 pada tanggal 31 Januari 2019, telah dilakukan persetujuan konversi atas surat utang konversi menjadi saham baru sebesar Rp15.625 tertanggal 23 Januari 2019. Atas hal tersebut PT PPAK memiliki kepemilikan saham sebanyak 18.750 lembar saham atau 60% pada PT MKB. Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0067571 tanggal 4 Februari 2019.

• **PT RILJ**

Berdasarkan Akta Notaris Adrian Djuaini, S.H., No. 30 tanggal 22 Maret 2019, telah dilakukan pengalihan saham PT RILJ milik Sudjono Kusnadi Subroto sebanyak 1.500.000 lembar saham yang setara dengan 73,53%. Akta ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0162989 tanggal 22 Maret 2019.

1.c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham, No. SK-159/MBU/07/2019 tanggal 23 Juli 2019, No. SK-76/MBU/04/2019 tanggal 1 April 2019, No. SK-87/MBU/04/2018 tanggal 12 April 2018, No. SK-104/MBU/06/2017 tanggal 5 Juni 2017, No. SK-78/MBU/04/2016 tanggal 14 April 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

Direksi:

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

2019

Edy Putra Irawady
Didyk Choirael
Tirta Hidayat

Iman Rachman
Nasrizal Nazir
Dikdik Permadi Yoffana
R. Muhammad Irwan

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors:

President Director
Director
Director
Director

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

• **PT MKB**

Based on Notarial Deed of Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 18 dated January 31, 2019, the conversion agreement has been carried out for convertible bonds into new shares amounting to Rp15,625 dated January 23, 2019. Based on this, PT PPAK has 18,750 shares or 60% ownership in PT MKB. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Number: AHU-AH.01.03-0067571 dated February 4, 2019.

• **PT RILJ**

Based on Notarial deed Adrian Djuaini, S.H., No. 30 dated March 22, 2019, the transfer of shares of PT RILJ owned by Sudjono Kusnadi Subroto was 1,500,000 shares equivalent to 73.53%. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Number: AHU-AH.01.03-0162989 dated March 22, 2019.

1.c. The Board of Commissioners, Directors and Employees

Based on the Minister of SOE's Decree as a General Meeting of Shareholders, No. SK-159/MBU/07/2019 tanggal 23 Juli 2019, No. SK-104/MBU/06/2017 dated June 5, 2017, No. SK-76/MBU/04/2019 dated April 1, 2019, No. SK-87/MBU/04/2018 dated April 12, 2018, No. SK-78/MBU/04/2016 dated April 14, 2016, the composition of Board of Commissioners and Directors as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2018	
Dewan Komisaris:		Board of Commissioners
Komisaris Utama	Edy Putra Irawady	President Commissioner
Komisaris	Lidya Silvanna Djaman	Commissioner
Komisaris	Didyk Choiroel	Commissioner
Komisaris	Tirta Hidayat	Commissioner
Direksi:		Directors:
Direktur	Henry Sihotang	President Director
Direktur	Andi Saddawero	Director
Direktur	Nasrizal Nazir	Director
Direktur	Ajar Setiadi	Director

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan masing-masing memiliki sejumlah 170 dan 171 karyawan tetap (tidak diaudit).

As of December 31, 2019 and 2018, the Company has a total of 170 and 171 permanent employees (unaudited).

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Grup yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

2.a. Dasar Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

2.b. Kepatuhan Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

2. Significant Accounting Policies

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparation the Group's financial statements, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

2.b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif ada Tahun Berjalan

Berikut adalah perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): "Kombinasi Bisnis"
- PSAK 24 (Amendemen 2018): "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): "Biaya Pinjaman"
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): "Pajak Penghasilan"
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): "Pengaturan Bersama"
- ISAK 33: "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK 34: "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are amendments of standards and interpretation of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the period starting on or after January 1, 2019:

- PSAK 22 (Improvement 2018): "Business Combination" PSAK 69: "Agriculture"
- PSAK 24 (Amendment 2018): "Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement"
- PSAK 26 (Improvement 2018): "Borrowing Cost"
- PSAK 46 (Improvement 2018): "Income Taxes"
- PSAK 66 (Improvement 2018): "Joint Arrangement"
- ISAK 33: "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"
- ISAK 34: "Uncertainty over Income Tax Treatments"

The Implementation of the standards above had no significant effect on the amounts reported for the current year or prior financial year.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1.b.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e., the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the *investee*).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Perusahaan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries that are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date when the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control is over.

The Company prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation.

The Group attributes the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- (a) *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- (b) *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) *Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that result in the loss of control;*
- (d) *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- (e) *Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah di mana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

2.e. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e., transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration received or paid is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

2.e. Business Combination

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Component of non-controlling interests are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

2.f. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

2.f. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and all subsidiaries is Rupiah.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	2019 Rp
1 USD	13,901

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

2.g. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut,

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, ie middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2019 and 2018 as follows:

	2018 Rp
1 USD	14,481

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.g. Related Parties Transactions and Balances

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

2.h.Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

sponsoring employers are also related to the reporting entity;

- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by government. Government refers to government, government agencies and similar agency whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.h.Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measure all financial assets and financial liabilities at its fair value.

In the case of a financial asset or financial liability not measured at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability are classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- (ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 - (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
 - (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

- (i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired or held primarily for the purpose of selling or repurchasing in the near future, or as part of a portfolio of certain financial instruments that are jointly managed and there is evidence of current profit taking patterns in the current short term, or are derivatives, except designated and effective derivatives as hedging instruments.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- (ii) Loans and Receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:
- (a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;
 - (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or
 - (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

(iii) Held-to-Maturity (HTM) Investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets
Available for sales of financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gain losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

(i) Financial liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Financial liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang

dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

loss. Financial liabilities is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual

pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

(ii) Other Financial Liabilities

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognize separately as asset or liability any rights and obligation created or retained in the transfer.

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- It becoming probable that the borrower will be in enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial asset has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified is the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition was designated by the Group as at fair value

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke dalam nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar.

Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value.

Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that will be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, Perusahaan dapat memiliki beberapa instrumen keuangan yang tidak mengacu atau berlaku di pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, seperti Pinjaman yang Diberikan, Pinjaman Dana Talangan, Talangan Biaya Pengelolaan Aset dan Surat Utang.

Pinjaman yang Diberikan

Dalam melaksanakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN dengan skema pemberian pinjaman dana dari Perusahaan, maka pinjaman yang diberikan tersebut dicatat sebagai Piutang Perusahaan. Pinjaman yang Diberikan diakui pada saat pencairannya sebesar pokok pinjaman dan disajikan sebesar jumlah sisa tagihan Perusahaan yang belum dilunasi dikurangi dengan Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses observable market data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

In the framework of the implementation of restructuring and/or revitalization of SOEs, the Company may have some financial instruments that do not refer to or apply in the market and its fair value can not be measured reliably, such as Loans Receivable, Fund Advance Loans Receivable, Advances on Asset Management and Promissory Notes.

Loans Receivable

In implementing the Restructuring and/or Revitalization of SOEs with a scheme of lending funds from the Company, then the loans are recorded as accounts receivable of the Company. Loans Receivable is recognized at the time of drawdown of the loan principal and stated at the amount of outstanding bills of the Company which have not been paid deducted by the Allowance for Impairment of Loans.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pinjaman Dana Talangan

Perusahaan dapat memberikan pinjaman kepada pihak ketiga berupa dana talangan. Pemberian Pinjaman Dana Talangan ini diakui dan dicatat sebagai Piutang Perusahaan. Perlakuan pencatatan Pinjaman Dana Talangan sama dengan perlakuan atas Pinjaman yang Diberikan.

Perusahaan diminta oleh BUMN pemilik aset untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan aset yang diserahkan kepada Perusahaan dan biaya tersebut adalah beban BUMN yang bersangkutan. Dalam hal ini, Perusahaan hanya memberikan talangan atas pembayaran biaya pengelolaan aset sedangkan transaksi dengan pihak ketiga dan dokumen pembayaran atas biaya tersebut (perjanjian pemberian jasa dan/atau kontrak dengan pihak ketiga, *purchase order*, tagihan, kwitansi, faktur) seluruhnya dapat atas nama BUMN yang bersangkutan.

Perusahaan mengakui nilai wajar instrumen keuangan tersebut di atas sesuai dengan harga transaksinya, yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima.

2.i. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.j. Anjak Piutang

Anjak piutang *with recourse* diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh dan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah dikurangi pendapatan anjak piutang ditangguhkan. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien diakui sebagai pendapatan anjak piutang ditangguhkan dan diamortisasi selama periode kontrak menggunakan suku bunga efektif.

2.k. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Fund Advance Loans Receivable

The Company can provide loans to third parties in the form of fund advance. Fund Advance Loans Receivable is recognized and recorded as accounts receivable of the Company. The treatment of recording Fund Advance Loans Receivable is similar to the treatment of Loans Receivable.

The Company is requested by SOEs owner of assets to make advance payments for the expenses required in order to manage the transferred-assets given to the Company and these expenses are burden of SOEs' concerned. In this case, the Company only provides advances for the payment of asset management expenses, while transactions with third parties and all documents of the expenses payment (service delivery agreement and/or contract with third parties, purchase orders, invoices, receipts, invoices) could be on behalf of SOE's concerned.

The Company recognizes the fair value of financial instruments mentioned above in accordance with the transaction price, i.e. the fair value given or received payment.

2.i. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalent are cash on hand, cash in bank (demand deposit) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.j. Factoring

Factoring with recourse is recognized as the amount of receivables acquired and is stated at net realizable value, net of deferred income factoring. The difference between the factoring receivables and the amount of payments made to the client is recognized as deferred factoring income and will be amortized over the period of respective factoring agreements using the effective interest rate.

2.k. Intangible Assets

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat 10-20 tahun.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya.

2.l. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

2.m.Tagihan Bruto Kepada Pemberi Jasa

Tagihan bruto kepada pemberi jasa merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

2.n. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite. Intangible assets are amortized by using straight line method based on estimated useful lives of 10-20 years.

Amortization is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value.

2.l. Retention Receivables

Retention receivable represents receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable's claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

2.m.Gross Amount due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statement of financial position date.

2.n.Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.o. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.p. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.o. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are the costs which have been paid but will be charged in the future over the periods benefits using straight-line method.

2.p. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group decides to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- d. Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.q. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- a. Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner-occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;
- b. Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;
- c. End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and
- d. Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.

An investment property is derecognizes on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.q. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, property, plant and equipment, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Depreciation of property, plant and equipment starts when it is available for use and it is computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Kelompok	Tahun/Years	Group
Bangunan	20	Building
Kendaraan Bermotor	3 - 8	Vehicle
Peralatan Proyek	2 - 8	Project Equipment
Peralatan Kantor	2 - 8	Office Equipment

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self-constructed Property, Plant and Equipment are presented as part of the Property, Plant and Equipment under "Asset in Progress" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective Property, Plant and Equipment items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of Property, Plant and Equipment is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Company made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

Grup memilih menggunakan model revaluasi untuk aset tanah yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

The Group choose to use revaluation model for an item of Property, Plant and Equipment whose fair value can be measured reliably, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated impairment losses.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan

If asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

2.r. Aset Lain-lain

Persediaan properti berupa tanah dan bangunan dicatat berdasarkan nilai perolehan yaitu beban-beban yang dikeluarkan serta beban bunga yang menjadi beban atas kredit yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

2.s. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss.

If asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. However, the decrease is recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

2.r. Other Assets

Property inventory in form of land and building are recorded based on the acquisition cost that are incurred and interest expenses that are used for such activities.

2.s. Impairment of Non Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if it is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.t. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Grup sebagai Lessor

Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

Grup menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontingen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

An impairment loss which is recognized in prior period for an asset other than *goodwill* is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

2.t. Lease

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Group as Lessor

Group recognizes assets under a finance lease as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principal payments and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on Group's net investment in the finance lease as lessor.

Group presents assets subject to operating leases in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, be recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2.u. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai *venturer* bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2.v. Utang Bruto kepada Pihak Ketiga

Utang bruto kepada pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja sub kontraktor yang belum diberita-acarakan, baik dari sub kontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

Utang bruto pihak ketiga disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi rugi yang diakui.

2.w. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran pertama, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pendapatan Pengelolaan Aset

Pendapatan pengelolaan aset diakui pada periode terjadinya yang terdiri dari:

- Pendapatan Pengelolaan Aset eks BPPN berupa imbalan pengelolaan aset, imbalan kinerja dan pendapatan yang berkaitan dengan biaya pengelolaan aset yang dapat diperoleh kembali.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2.u. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classifies joint arrangement as joint venture.

Joint venture represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

2.v. Gross Amount Due to Third Parties

Gross amount due to third parties represents uncertificated subcontractor working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress since it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract.

Gross amount due to the third parties is presented as the differences between costs occurred added by gain or deducted by realized loss.

2.w. Revenues and Expenses Recognition

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT).

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Revenue from Asset Management

Revenue of Asset Management is recognized in the period when it is occurred consist of:

- *Revenue from Asset Management ex-IBRA assets which is made up of asset management fees, success fees and revenues related with reimbursable costs;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Pendapatan pengelolaan Aset eks BPPN sudah berakhir sejak 31 Desember 2017 karena mulai tahun 2018 tidak terdapat lagi Perjanjian Pengelolaan Aset dengan Kementerian Keuangan (Perjanjian Pengelolaan Aset sudah berakhir sejak tahun 2018)
- Pendapatan Pengelolaan Aset BUMN berupa jasa pengelolaan rutin dan jasa keberhasilan.

Pendapatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

Pendapatan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN berupa pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan jasa restrukturisasi dan/atau revitalisasi diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Jasa Konstruksi

Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak, dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- Revenue from Asset Management ex-IBRA assets has ended since December 31, 2017 when starting in 2018 there are no more Asset Management Agreements with the Ministry of Finance (Asset Management Agreements have expired since 2018)
- Revenue from Asset Management SOEs' assets which are routine management fees and success fees.

Revenue from Restructuring and/or Revitalization

Revenues of SOEs' restructuring and/or revitalization which comprise loan interest income and income from restructuring and/or revitalization are recognized as incurred on an accrual basis.

Construction Services

Contract revenue and contract costs associated with the construction contract is recognized as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method). Construction percentage of completion is determined based on survey of work performed.

When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss shall be recognized as an expense immediately.

Contract revenue comprised of the initial amount of revenue agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will results in revenue and it is capable of being reliably measured.

Contract cost comprised of costs that relate directly to the specific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract, and such other costs as are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract.

Rental Revenue

Rental revenue from operating leases are recognized as revenue on a straight line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in negotiating and rental arrangements are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan periode waktu terjadinya dengan tingkat bunga yang sesuai atau suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari transaksi sewa pembiayaan diakui apabila kemungkinan besar Entitas Anak akan memperoleh manfaat ekonomis sehubungan dengan transaksi tersebut dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

Penjualan Barang

Penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Grup atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dengan dasar akrual).

2.x. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Advances received from rental are recorded in unearned revenue account and will be recognized as revenue on a regular basis over the rental periods.

Interest Income

Interest income is recognized based on timely basis, with an appropriate interest rate or the effective interest rate.

Interest income from finance leases is recognized when it is probable the Subsidiary will obtain economic benefits related with these transactions and the revenues could be measured reliably.

Sale of Goods

Sales of goods are recognized upon the transfer of ownership of the goods to the customer, either upon delivery of the goods, or in the case of goods stored in the Group' warehouse at the request of the customer, when issued invoices.

Expenses

Expenses are recognized as incurred (on an accrual basis).

2.x. Borrowing Cost

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2.y. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2.y. Income Taxes

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *Deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *The same taxable entity; or*
 - ii. *Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.z. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (UU 13/2003).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
- b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

2.z. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (Law 13/2003).

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Grup mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.aa.Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Group recognizes an expense and a liability for contribution payable to a defined contribution plan, when an employee has rendered service to the entity during a period.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
- When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.aa.Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements

The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgement estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period.

The main assumption of the future and the other major source of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the year, disclosed below.

Group bases its estimates on assumptions and parameters that are available at the time the financial statements are prepared. And assumptions about the future development of the situation, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting
Estimasi Umur Manfaat

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material oleh perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Perusahaan dan entitas anak melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap apabila peralatan tersebut sudah usang seiring dengan perkembangan teknologi. Jumlah tercatat aset tetap dan aset takberwujud disajikan pada Catatan 22 dan 14.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktuari dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 30.

Nilai Wajar Properti Investasi dan Aset Tetap Tanah

Nilai wajar properti investasi dan tanah bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya Grup. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Accounting Estimates and Assumptions
Estimated Useful Lives

Group intangible assets based on factors such as the condition of technical and technological developments in the future. Future operating results will be materially affected by the estimation changes caused by changes in factors mentioned above.

Group performs periodic review over the useful life of the equipment based on factors such as changes in technology and the potential benefits arising from the use of such equipment. This condition can cause a decrease or elimination of the The Company and subsidiaries property, plant and equipment if the equipment is obsolete due to technological developments The carrying amount of Property, Plant and Equipment and intangible assets are disclosed in Notes 22 and 14.

Post-Employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The determination of Group's post-employment benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Management believe that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense. Detailed information has been disclosed on Note 30.

Fair Value of Investment Property and Land

The Group's fair value of investment property and land depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculation of such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Group's assumptions may materially affect the

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

material nilai wajar dari properti investasi. Jumlah tercatat properti investasi disajikan pada Catatan 17.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.

Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

2.ab.Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusi, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar masing-masing sebesar 2.996.688 lembar untuk periode 31 Desember 2019 dan 2018.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

valuation of its investment property. The carrying amount has been disclosed on Note 17.

Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

Judgement in Applying the Accounting Policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Financial Assets and Liabilities

Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with Group's accounting policies.

2.ab.Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares. The numbers of weighted average shares outstanding are 2,996,688 shares as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

3. Kas dan Setara Kas

3. Cash and Cash Equivalents

	2019 Rp	2018 Rp	
Kas	894	930	Cash on Hand
Bank			Cash in Banks
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	137,354	181,363	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	110,483	84,893	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	27,572	18,395	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	465	1,196	Other (each below Rp 1,000)
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	327	194	Other (each below Rp 1,000)
Jumlah Pihak Berelasi	276,201	286,041	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	4,217	88	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2,551	3,494	PT Bank Central Asia Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	4,999	11,801	Other (each below Rp 1,000)
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	185	--	Other (each below Rp 1,000)
Jumlah Bank - Pihak Ketiga	11,952	15,383	Total Banks - Third Parties
Jumlah Bank	288,153	301,424	Total Cash in Banks
Deposito Berjangka			Time Deposits
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	444,662	371,486	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	77,965	77,737	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah Pihak Berelasi	522,627	449,223	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	195,540	389,536	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	97,133	--	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	2,900	43,101	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk	--	107,093	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	--	73,911	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	389	399	Other (each below Rp 1,000)
Jumlah Pihak Ketiga	295,962	614,040	Total Third Parties
Jumlah Deposito Berjangka	818,589	1,063,263	Total Time Deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas	1,107,636	1,365,617	Total Cash and Cash Equivalents
 Tingkat Suku Bunga Deposito per Tahun	6.5%-8%	6% - 8.75%	 Interest Rate on Time Deposit per Annum
Jangka Waktu	1 - 3 bulan/months	1 - 3 bulan/months	Maturity Period

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

4. Pinjaman Investasi Jangka Pendek

4. Short-term Investment Loans

	2019 Rp	2018 Rp
Pinjaman Investasi yang Diberikan - Pokok Pinjaman		
Pihak Berelasi		
PT Artha Bangun Pratama	26,506	17,668
PT Energy Management Indonesia (Persero)	5,713	4,251
Pihak Berelasi	32,219	21,919
Pihak Ketiga		
PT Lintas Samudra Sejahtera	443,475	--
PT Gasuma Federal Indonesia	311,895	--
PT Polyrama Propindo	270,000	180,000
PT Widodo Makmur Unggas	50,000	--
PT Carpediem Mandiri	42,658	42,658
PT Bintang Abadi Sempurna	35,730	--
PT Inti Adhiyasa	33,746	--
PT Gali Terus Sejahtera	31,175	--
PT Duta Cipta Pakar Perkasa	26,706	45,305
PT Varuna Tirta Prakasya	24,473	--
PT Pratama Persada Airbone	23,050	--
PT Bina Patria Transmirta	16,748	--
PT Indah Prakasa Sentosa	16,184	--
PT CDM Swarnadipa	14,351	--
PT Wintermar	13,779	--
PT Bangun Sarana Baja	9,997	10,580
PT SIG Asia	9,564	13,481
PT Polowijo Gosari	4,539	122,626
PT Ricon Duta Sarana	9,000	--
PT Prabu Wahana International	8,419	--
PT Rejeki Inti Logam Jaya	--	5,498
Pihak Ketiga	1,395,489	420,147
Jumlah Pinjaman Investasi yang Diberikan - Pokok Pinjaman	1,427,708	442,066
Pinjaman Investasi yang Diberikan - Bunga Pinjaman		
Pihak Berelasi		
PT Artha Bangun Pratama	206	140
PT Energy Management Indonesia (Persero)	24	10
Pihak Berelasi	230	150
Pihak Ketiga		
PT Lintas Samudra Sejahtera	13,042	--
PT Duta Cipta Pakar Perkasa	1,092	--
PT Polyrama Propindo	848	657
PT Inti Adhiyasa	821	--
PT Pratama Persada Airbone	696	--
PT Gasuma Federal Indonesia	585	--
PT Ricon Duta Sarana	198	--
PT Widodo Makmur Unggas	191	--
PT Bintang Abadi Sempurna	138	--
PT Varuna Tirta Prakasya	104	--
PT Indah Prakasa Sentosa	68	--
PT Bina Patria Transmirta	64	--
PT Rejeki Inti Logam Jaya	56	25
PT Wintermar	58	--
PT Bangun Sarana Baja	49	397
PT SIG Asia	47	59
PT Polowijo Gosari	18	1,642
Pihak Ketiga	18,075	2,780
Jumlah Pinjaman Investasi yang Diberikan - Bunga Pinjaman	18,305	2,930
Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman		
PT Gali Terus Sejahtera	(803)	--
Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman	(803)	--
Provisi Pihak Ketiga		
PT Primarindo Asia Infrastructure	420	--
PT Wintermar	--	265
PT National Utility Helicopters	--	3
Jumlah Pinjaman Investasi yang Diberikan - Provisi- Pihak Ketiga	420	268
Jumlah Pinjaman Investasi yang Diberikan	1,445,630	445,264

Short Term Investment - Principal
Related Parties
PT Artha Bangun Pratama
PT Energy Management Indonesia (Persero)
Related Parties
Third Parties
PT Lintas Samudra Sejahtera
PT Gasuma Federal Indonesia
PT Polyrama Propindo
PT Widodo Makmur Unggas
PT Carpediem Mandiri
PT Bintang Abadi Sempurna
PT Inti Adhiyasa
PT Gali Terus Sejahtera
PT Duta Cipta Pakar Perkasa
PT Varuna Tirta Prakasya
PT Pratama Persada Airbone
PT Bina Patria Transmirta
PT Indah Prakasa Sentosa
PT CDM Swarnadipa
PT Wintermar
PT Bangun Sarana Baja
PT SIG Asia
PT Polowijo Gosari
PT Ricon Duta Sarana
PT Prabu Wahana International
PT Rejeki Inti Logam Jaya
Third Parties
Total Short Term Investment - Principal
Short Term Investment - Interest
Related Parties
PT Artha Bangun Pratama
PT Energy Management Indonesia (Persero)
Related Parties
Third Parties
PT Lintas Samudra Sejahtera
PT Duta Cipta Pakar Perkasa
PT Polyrama Propindo
PT Inti Adhiyasa
PT Pratama Persada Airbone
PT Gasuma Federal Indonesia
PT Ricon Duta Sarana
PT Widodo Makmur Unggas
PT Bintang Abadi Sempurna
PT Varuna Tirta Prakasya
PT Indah Prakasa Sentosa
PT Bina Patria Transmirta
PT Rejeki Inti Logam Jaya
PT Wintermar
PT Bangun Sarana Baja
PT SIG Asia
PT Polowijo Gosari
Third Parties
Total Short Term Investment - Interest
Allowance for Impairment Short Term Investment
PT Gali Terus Sejahtera
Total Allowance for Impairment Short Term Investment
Third Parties Provision
PT Primarindo Asia Infrastructure
PT Wintermar
PT National Utility Helicopters
Total Short Term Investments-Provision
Total Short Term Investment

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

a. PT Artha Bangun Pratama

Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Artha Bangun Pratama berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman No.PP-06/PPA/1214 tanggal 15 Desember 2014. Pada tanggal 8 September 2015 dilakukan perubahan perjanjian dengan No.PP-06/PPA/0915. Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman modal kerja jangka pendek dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp15.949. Pada tanggal 14 Desember 2015 dilakukan perubahan perjanjian secara menyeluruh dengan nomor perjanjian No.PP-22/PPA/1215.

Kemudian pada tanggal 7 September 2016 dilakukan addendum atas Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek dengan No.PP-17/PPA/0916. Pada tanggal 14 Desember 2016 dilakukan lagi addendum II atas Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Jangka Pendek dengan No.PP-21/PPA/1216. Pada tahun 2016, PT Artha Bangun Pratama masih memiliki sisa pinjaman sebesar Rp10.564 dengan tingkat suku bunga 15% per tahun (tidak termasuk pajak) dan biaya provisi sebesar 0,25% dari total jumlah maksimum pinjaman yang diberikan.

Berdasarkan perjanjian No-PP/19/PPA/1116 tanggal 3 November 2016, PT Artha Bangun Pratama mendapat fasilitas pinjaman baru sebesar Rp1.112 dengan tingkat suku bunga 15% per tahun (tidak termasuk pajak) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Total pencairan fasilitas pinjaman baru sebesar Rp485. Pemberian pinjaman bertujuan untuk pembayaran biaya jasa konsultan pembuatan studi kelayakan rencana pengembangan aset PT Artha Bangun Pratama dan menetapkan *Owner Estimate* serta untuk mendapatkan mitra strategis terbaik.

Pada tanggal 15 November 2018 dilakukan addendum atas penambahan *plafond tranche A* dan Pinjaman Jangka Pendek dengan PP-20/PPA/1118, kemudian pada tanggal 12 Desember 2018 dilakukan kembali addendum dengan PP-21/PPA/1218 atas perpanjangan jangka waktu sampai dengan 31 Maret 2019 dan penambahan *plafond* fasilitas pinjaman jangka pendek.

Pada tanggal 8 Oktober 2019 dilakukan addendum III atas penambahan plafon pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman No. PP-25/PPA/1019 dengan penambahan plafon pinjaman sebesar Rp70 dan perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 2 November 2020.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

a. PT Artha Bangun Pratama

The Company provided loans to PT Artha Bangun Pratama based on Loan Agreement No.PP-06/PPA/1214 on December 15, 2014. On September 8, 2015 The Company amended the agreement with No.PP-06/PPA/0915. The Company provided working capital loan facility with a maximum amount of short-term loan facility amounting to Rp15,949. On December 14, 2015, the Company amended the agreement through Agreement Number No.PP-22/PPA/1215.

Then on September 7, 2016, an addendum was made to Changes in Short Term Loan Agreement No.PP-17/PPA/0916. On December 14, 2016, addendum II was made on Changes in Short Term Loan Agreement No.PP-21/PPA/1216. In 2016, PT Artha Bangun Pratama still has outstanding loans amounting to Rp10,564 with an interest rate of 15% per year (excluding tax) and the fee provision amounting to 0.25% of the maximum total principal amount.

Based on Agreement No-PP / 19 / PPA / 1116 dated November 3, 2016, PT Artha Bangun Pratama got a new credit facility amounted to Rp1,112 with rate of 15% per year (tax excluded) with period of 12 (twelve) months. Total disbursement of new loan facility is Rp485. The loan lending is aimed to pay consulting service fees for feasibility study of PT Artha Bangun Pratama asset development and establish Owner Estimate as well as to get the best strategic partner.

On November 15, 2018 an addendum was made on the additional loan facility of tranche A and of short-term Loans with PP-20/PPA/1118, then on December 12, 2018 an addendum was made with PP-21/PPA/1218 for extension until March 31, 2019 of the period and additional ceiling short-term loan facility.

On October 8, 2019 an addendum was conducted on the additional loan facility based on loan agreement No.PP-25/PPA/1019 with the additional with amount of principal maximum of Rp70 and the extension of maturity date on November 2, 2020.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp17.668
Total pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar
Rp11.180. Penerimaan atas pembayaran di
tahun berjalan Rp2.342. Saldo pada
31 Desember 2019 sebesar Rp26.506.

b. PT Energi Management Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No 46 tanggal
29 September 2017, Perusahaan memberikan
Fasilitas Pinjaman Modal Kerja baru kepada
PT Energi Management Indonesia dengan total
jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman
sebesar Rp5.000, dengan jangka waktu
pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

Berdasarkan Perjanjian kerjasama pendanaan
Proyek No 78 tanggal 27 Desember 2017,
Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman
Modal kerja kepada PT Energi Management
Indonesia dengan total jumlah pokok maksimum
fasilitas pinjaman sebesar Rp4.500 Bunga kredit
sebesar 10% pertahun dengan jangka waktu
Pinjaman dimulai dari 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya
Perjanjian. Bagi hasil atas setiap proyek yang
dibiayai sebesar 2% dari Nilai proyek.

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2018,
dilakukan perpanjangan perjanjian tertuang
dalam Addendum I No. 83 atas fasilitas
pinjaman berupa pinjaman modal kerja
revolving maksimal sebesar Rp10.000 dengan
jangka waktu 24 bulan sejak ditandatanganinya
perjanjian, serta kenaikan bunga pinjaman
sebesar 0,5% dari perjanjian awal.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di
cover oleh HT II senilai Rp 1,1 Miliar atas SHGB
No. 00034 berupa sebidang tanah seluas 9.156
m² berikut bangunan pabrik, HT III senilai
Rp3.000 atas SHGB No. 00034 berupa
sebidang tanah seluas 9.156 m² berikut
bangunan pabrik dan Fidusia Piutang senilai
Rp5.900.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp4.251.
Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019
sebesar Rp5.931. Penerimaan atas
pembayaran di tahun berjalan sebesar
Rp4.470. Saldo pada 31 Desember 2019
sebesar Rp5.713.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance at the beginning of the year is
Rp17,668. Total loan disbursement of loans in
2019 amounting to Rp11,180. Receipt of loan
payment in the current year amounting to
Rp2,342. The balance as of December 31, 2019
is Rp26,506.

b. PT Energi Management Indonesia

Based on the Loan Agreement No. 46 dated
September 29, 2017, the Company provided a
new Working Capital Loan Facility to PT Energy
Management Indonesia with a total principal
amount of the maximum loan facility of Rp5,000,
with a loan term of 12 (twelve) month from the
date of signing the Agreement.

Based on the Project No. 78 collaboration
agreement dated December 27, 2017, the
Company provides a Working Capital Loan
Facility to PT Energy Management Indonesia
with a maximum total principal amount of a loan
facility of Rp4,500. Credit interest is 10% per
year with a loan period of 12 (twelve) months
starting from the date of signing the Agreement.
Sharing the results of each project financed at
2% of the Project Value.

Then on December 19, 2018, made agreements
that are contained in the Addendum I No. 83 for
a loan facility in the form of a revolving working
capital loan of a maximum of Rp10,000 with a
term of 24 months from the signing of the
agreement, as well as a loan interest increase of
0.5% from the initial agreement

Collateral value for loan obligations covered by
HT II in the amount of Rp 1.1 Billion for SHGB
No. 00034 in the form of a plot of land covering
an area of 9,156 sqm following a factory building,
HT III valued at Rp3.000 on SHGB No. 00034 in
the form of a plot of land covering an area of
9,156 sqm including factory buildings and
Fiduciary Receivables valued at Rp5,900.

The balance at the beginning of the year is
Rp4,251. Total disbursement of loan in 2019
amounting to Rp5,931. Receipt of loan payment
in 2019 is Rp4,470. Balance at December 31,
2019 amounting to Rp5,713.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

c. PT Lintas Samudera Sejahtera

Berdasarkan perjanjian kerjasama No.34 pendanaan proyek pengadaan kapal FSU dengan PT Lintas Samudera Sejahtera tanggal 24 Januari 2019, Perusahaan berdasarkan surat nomor S-4903/PPA/DI/1118 tanggal 15 November 2018 memberikan fasilitas pembiayaan proyek pengadaan kapal FSU atas nama PT Lintas Samudera Sejahtera (PT LSS) dengan total pembiayaan setinggi-tingginya Rp480.500. Fasilitas pendanaan dari Perusahaan terdiri Fasilitas Pendanaan *Tranche A* diberikan dalam jumlah pokok pendanaan setinggi-tingginya sebesar Rp375.000. Pendanaan *Tranche B* diberikan dalam jumlah pokok pendanaan setinggi-tingginya sebesar Rp97.500. Pendanaan *Tranche C* diberikan dalam bentuk *Interest During Construction (IDC)* dengan total jumlah pokok pendanaan setinggi-tingginya sebesar Rp8.000.

Khusus terhadap fasilitas pendanaan *Tranche A* dan Fasilitas pendanaan *Tranche B*, PT LSS setuju untuk membayar Commitment Fee sebesar 0,75% dari Rp472.500 yaitu sebesar Rp3.544 yang dibayarkan dalam dua kali angsuran. PT LSS setuju untuk membayar *Upfront Fee* kepada Perusahaan sebesar Rp2.000 yang dibayarkan dengan cara pelunasan sekaligus, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2019.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover berupa Hipotek Kapal senilai Rp486.731, Piutang usaha senilai Rp170.697, Saham senilai Rp12.500 sehingga Total Nilai Jaminan sebesar Rp669.928.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp444.703. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp1.228. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp443.475.

d. PT Gasuma Federal Indonesia

PT Gasuma Federal Indonesia ("PT GFI") merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas yang kegiatan utamanya adalah memproses dan mengelola gas suar menjadi Kondensat, *Liquid Petroleum Gas (LPG)* dan Lean Gas yang berasal dari lapangan Mudi dan Sukowati.

Pada 6 Desember 2019, Perusahaan telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Kepada PT GFI No. 32 dengan plafond Rp320.000. Sifat fasilitas

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

c. PT Lintas Samudera Sejahtera

Based on the cooperation agreement No.34 funding the FSU vessel procurement project with PT Lintas Samudera Sejahtera on January 24, 2019, The Company based on letter number S-4903 / PPA / DI / 1118 dated November 15 2018 provided financing facilities for FSU ship procurement projects on behalf of PT Lintas Samudera Sejahtera (PT LSS) with a total financing of a maximum of Rp480,500. Funding facilities from the Company consist of a *Tranche A Funding Facility* given in the highest principal amount of Rp375,000, *Tranche B Funding* given in the maximum principal amount of Rp97,500 *Tranche C Funding* given in the form of *Interest During Construction (IDC)* with a total funding principal amounting to a maximum of Rp8,000.

Especially for *Tranche A funding facilities* and *Tranche B funding facilities*, PT LSS agreed to pay a *Commitment Fee* of 0.75% of Rp472,500 which amounted to Rp.3,544, which was paid in two installment. PT LSS agrees to pay an *Upfront Fee* of Rp2,000 to the Company, which is paid in full at the latest, no later than March 31, 2019.

Collateral Value for loan obligations covered in the form of *Ship Mortgage* amounted to Rp486,731, *Trade Receivables* amounted to Rp170,697, *Shares* amounted to Rp12,500 with *Total Collateral Value* amounted to Rp669,928.

The balance at the beginning of the year is Nil. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp444,703. Receipt of loan payment in 2019 is Rp1,228. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp443,475.

d. PT Gasuma Federal Indonesia

PT Gasuma Federal Indonesia ("PT GFI") is a company engaged in the field of oil and gas whose main activities are processing and managing flare gas into Condensate, *Liquid Petroleum Gas (LPG)* and Lean Gas originating from the Mudi and Sukowati fields.

On December 6, 2019, the Company signed the Deed of Agreement on the Provision of Working Capital Loan Facility to PT GFI No. 32 with a ceiling of Rp320,000. The nature of the loan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

pinjaman bersifat *non revolving*. Tujuan penggunaan dana fasilitas pinjaman adalah untuk pelunasan pinjaman PT GFI kepada United Orient Capital Pte, Ltd dan *Refinancing* pembelian mesin dan/atau peralatan baru milik PT GFI diluar mesin dan/atau peralatan yang di jaminkan kepada United Orient Capital Pte, Ltd. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 1 tahun dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2020.

Atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut, PT GFI diwajibkan membayar biaya *Management Fee* sebesar 4% dari jumlah *plafond*, yang dibayarkan sekaligus sebelum penarikan pinjaman dilakukan; bunga pinjaman sebesar 13,5% per tahun; dan denda sebesar 2% per tahun diatas tingkat suku bunga yang berlaku, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban. Jaminan yang diberikan PT GFI yaitu fidusia atas seluruh bangunan pabrik dan peralatan pengolahan *flare gas (plant)* milik PT GFI di Sukowati-Tuban dan jaminan yang lainnya yang diminta oleh Perusahaan berupa saham PT Super Capital Indonesia (SCI) di PT Super Energi Tbk (SURE) sebanyak 225.000.000 saham.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp311.895. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp311.895.

e. PT Polytama Propindo

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No PP-22/PPA/1216 tanggal 22 Desember 2016, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Jangka Pendek kepada PT Polytama Propindo dengan jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp100.000 dan jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian.

Berdasarkan *Offering Letter (OL)* tanggal 13 Desember 2017 Nomor S-4700/PPA/ID/1217 jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan 21 Desember 2018, dan berdasarkan OL Nomor S-5429/PPA/DI/1218 jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan 21 Desember 2019. Berdasarkan *Addendum IV* Perjanjian Pinjaman No.PP-35/PPA/129, jangka waktu pinjaman dan perpanjangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

facility is non revolving. The purpose of using the loan facility fund is to repay the loan of PT GFI to United Orient Capital Pte, Ltd and Refinancing the purchase of new machinery and / or equipment owned by PT GFI outside the machinery and / or equipment guaranteed to United Orient Capital Pte, Ltd. The term of the loan facility is 1 year and the due date is December 5 (December 2020).

For this loan facility, PT GFI is required to pay a Management Fee fee of 4% of the Ceiling amount, which is paid at once before the loan is withdrawn; loan interest of 13.5% per annum; and a fine of 2% per annum above the prevailing interest rate, in the event of late payment of obligations. Collateral given by PT GFI is fiduciary for all factory buildings and gas flare processing equipment (plant) owned by PT GFI in Sukowati-Tuban and other guarantees requested by the Company in the form of PT Super Capital Indonesia (SCI) shares in PT Super Energi Tbk (SURE) as many as 225,000,000 shares.

The balance at the beginning of the year is Nil. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp311,895. Receipt of loan payment in 2019 is Nil. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp311,895.

e. PT Polytama Propindo

Based on the Loan Agreement No. PP-22 / PPA / 1216 dated December 22, 2016, the Company provides Short Term Working Capital Facility to PT Polytama Propindo with amount of principal maximum of Rp100,000 the loan period is 12 months starting from the date of the Agreement was signed.

Based on Offering Letter (OL) dated December 13, 2017 Number S-4700 / PPA / ID / 1217 the term of the loan is extended to December 21, 2018, and based on OL Number S-5429/PPA/DI/1218 the loan period is extended to December 21, 2019. Based on Addendum IV Loan Agreement No.P-35 / PPA / 129, the term of the loan and extension until 31 December 2020.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No.PP-15/PPA/0817 tanggal 28 Agustus 2017, Perusahaan menambah Plafond Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Jangka Pendek dan Pinjaman Investasi sebesar Rp80.000 yang jatuh tempo pada 27 Agustus 2018. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 dilakukan addendum Perjanjian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian No.PP-10/PPA/0718. Terdapat penambahan plafond Fasilitas Pinjaman Modal Kerja II yang semula Rp80.000 menjadi Rp100.000 yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja operasional.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. PP-02/PPA/0119 tanggal 16 Januari 2019, Perusahaan memberikan tambahan *plafond* pinjaman modal kerja III kepada PT Polytama Propindo dengan *plafond* pinjaman sebesar Rp 100.000 dan jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian. Atas fasilitas pinjaman ini PT Polytama Propindo dikenakan bunga pinjaman sebesar 12,25% per tahun (*gross*), biaya provisi sebesar 0,5% dari *plafond* pinjaman, biaya administrasi penarikan sebesar Rp3 dan biaya bagi hasil sebesar USD8 dari total produksi *polypropylene* yang dibiayai oleh Perusahaan.

Jaminan berupa fidusia persediaan barang dan piutang dengan total per 31 Desember 2019 sebesar Rp330.000.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp180.000. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp1.228.700. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp1.138.700. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp270.000.

f. PT Widodo Makmur Unggas

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pembelian Surat Utang PT Widodo Makmur Unggas ("PT WMU") No. 09 tanggal 4 November 2019, PT WMU telah mengajukan kepada Perusahaan permohonan pembiayaan proyek pembangunan peternakan ayam terinteragasi. Tujuan penggunaan dana untuk tujuan investasi pembangunan peternakan ayam terinteragasi milik PT WMU yang berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Besarnya kupon yang dikenakan sebesar 12,50% dan *monitoring fee* sebesar Rp125 dibayarkan setiap bulan. Jaminan yang diberikan PT WMU kepada Perusahaan yaitu jaminan pembayaran, fidusia piutang usaha,

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on Loan Agreement No.PP-15/PPA/0817 dated August 28, 2017, the Company added a maximum of the Short-Term Working Capital Loan and Investment Loan amounting to Rp80,000 which will mature on August 27, 2018. On July 25, 2018, an addendum was made to the Agreement Loan with Agreement Number No.PP-10/PPA/0718. There is an additional ceiling of the Working Capital Loan Facility II, from Rp80,000 to Rp100,000 which is used to finance operational working.

Based on Loan Agreement No.PP-02/PPA/0119 dated January 16, 2019, the Company granted an additional maximum working capital loan III facility to PT Polytama Propindo amounting to Rp 100,000 and the term of the loan facility is 12 (twelve) months from the date of signing the Agreement. For this loan facility, PT Polytama is subject to a loan interest of 12.25% per annum (*gross*), a provision fee of 0.5% of the loan ceiling, a withdrawal administration fee of Rp3 and a profit sharing fee of USD8 of total *polypropylene* production financed by Company.

Collateral in the form of fiduciary inventory of goods and receivables with a total as of December 31, 2019 of Rp330,000.

The balance at the beginning of the year is Rp180,000. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp1,228,700. Receipt of loan payment in 2019 is Rp1,138,700. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp270,000.

f. PT Widodo Makmur Unggas

Based on the Deed of Investment Cooperation Agreement in the Form of Purchase of PT Widodo Makmur Poultry ("PT WMU") No. 09 dated 4 November 2019, PT WMU has submitted to the Company an application for financing an integrated chicken farm development project. The purpose of using the funds for investment purposes is the construction of integrated chicken farms owned by PT WMU located in the Provinces of West Java, Central Java, and the Special Province of Yogyakarta. The coupon amount is 12.50% and a *monitoring fee* of Rp125 is paid every month. The guarantees given by PT WMU to the Company are payment guarantees, fiduciary accounts receivable, fiduciary inventory,

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

fidusia persediaan, *corporate guarantee* (termasuk di dalamnya *Cash Deficit Guarantee*) dari PT Widodo Makmur Perkasa (dahulunya Perusahaan *Holding*).

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp50.000. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp50.000.

g. PT Carpediem Mandiri

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 145 tanggal 22 September 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman (*Project Financing*) kepada PT Carpediem Mandiri dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp39.000. Bunga kredit sebesar 8% pertahun dengan jangka waktu pinjaman adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian.

Berdasarkan surat No S-4910/PPA/BAAMD/1217 tanggal 28 Desember 2017, telah dilakukan kesepakatan untuk memperpanjang Perjanjian Pinjaman selama 6 bulan sejak tanggal 28 Desember 2017 dengan menerapkan *Management Fee* setara 16,3% pertahun. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 dilakukan addendum I atas Perjanjian Pinjaman dengan No. 70, dengan melakukan perpanjangan Perjanjian Pinjaman sampai dengan tanggal 28 Desember 2018.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp42.658. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp42.658.

h. Bintang Abadi Sempurna

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman *Invoice Financing* kepada PT Bintang Abadi Sempurna No. 99 tanggal 20 Agustus 2019, dibuat di hadapan Desman S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman dengan total jumlah pokok *plafond* sebesar Rp50.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 13% per tahun (*gross*), biaya *monitoring* 7% per tahun (*gross*) dan biaya provisi sebesar 0,5% dari jumlah dana yang dicairkan dalam setiap penarikan. Jatuh tempo pada 19 Agustus 2020. Tujuan penggunaannya adalah untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja untuk pengadaan batubara kepada PT PLN Batubara.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

corporate guarantee (including Cash Deficit Guarantee) from PT Widodo Makmur Perkasa (formerly Holding company).

The balance at the beginning of the year is Nil. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp50,000. Receipt of loan payment in 2019 is Nil. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp50,000.

g. PT Carpediem Mandiri

Under the Loan Agreement No. 145 dated September 22, 2017, the Company provided a Loan Facility (Project Financing) to PT Carpediem Mandiri with a total principal amount of a maximum loan facility of Rp39,000. Credit interest is 8% per year with a loan period of 3 (three) months from the date of signing the Agreement.

Based on letter No. S-4910/PPA/BAAMD/1217 dated December 28, 2017, an agreement has been made to extend the Loan Agreement for 6 months from December 28, 2017 by applying Management Fee equal to 16.3% per year. Then on August 20, 2018, addendum I was made on the Loan Agreement with No. 70, by extending the Loan Agreement until December 28, 2018.

The balance at the beginning of the year is Rp42,658 Total disbursement of loan in 2019 amounting to Nil. Receipt of loan payment in 2019 is Nil. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp42,658.

h. Bintang Abadi Sempurna

Based on investment cooperation Agreement in the form of loan lending Financing to PT Bintang Abadi Sempurna No. 99 dated August 20, 2019, made in front of Desman S.H., M. Hum., M.M., notary in North Jakarta administrative city, The company provides loan facilities with a total number of basic ceiling of Rp50,000 with interest rate of 13% p.a. (gross), monitoring fee of 7% p.a. (gross) and provision fee of 0.5% of the amount of funds disbursed in each Withdrawal. It is due on August 19, 2020. The purpose of its use is to finance the working capital needs for coal procurement to PT PLN Batubara

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, diserahkan jaminan berupa (1) Dana di joint signature account atas nama PPA dan BAS yang dibuka pada kantor cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang ditunjuk oleh PT PPA yang dibuka secara bertahap sesuai jumlah penarikan dana Fasilitas Pinjaman dengan nilai serendah-rendahnya 30% dari outstanding pokok Fasilitas Pinjaman. Dana Deposito tersebut diblokir untuk kepentingan pembayaran seluruh kewajiban Debitur kepada PT PPA; (2) Fidusia atas piutang Debitur kepada PLNBB berdasarkan Proyek PLNBB dengan nilai serendah-rendahnya 125% dari plafond Fasilitas Pinjaman.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp67.313. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp31.583. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp35.730.

i. PT Inti Adhiyasa

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No.6 tanggal 29 Mei 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada PT Inti Adhiyasa berupa pembiayaan pembangunan rumah sederhana untuk proyek perumahan kota Kaharupan Purwakarta dengan saldo maksimum pinjaman senilai Rp50.000. Bunga kredit sebesar 10% pertahun dengan jangka waktu pinjaman adalah 24 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

Pada tanggal 30 Mei 2018 telah dilakukan Addendum Perjanjian Pinjaman No. PP-08. Addendum perjanjian tersebut membagi fasilitas awal menjadi 3 *Tranche* yang terdiri dari *Tranche A* bertujuan untuk pembangunan rumah sebesar Rp9.816; *Tranche B* untuk cadangan operasional sebesar Rp 3.000; dan *Tranche C* sebesar Rp37.183 berasal dari kewajiban pokok, bunga dan biaya tertunggak per 30 April 2018 yang dikenakan bunga sebesar 15% gross.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

As collateral for repayment of all debts, collateral in the form of (1) Funds in a joint signature account in the name of PPA and BAS is opened at a branch office of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Loan Facility funds with a value as low as 30% of the outstanding principal of the Loan Facility. These Deposit Funds are blocked for the purpose of paying all Debtor obligations to PT PPA; (2) Fiduciary on Debtor receivables from PLNBB based on the PLNBB Project with a value as low as 125% of the Loan Facility.

The balance at the beginning of the year is Nil. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp67,313. Receipt of loan payment in 2019 is Rp31,583. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp35,730.

i. PT Inti Adhiyasa

Based on the Loan Agreement No.6 dated May 29, 2017, the Company provides Loan Facility (Project Finance) to PT Inti Adhiyasa to finance the construction of a simple house for a Kaharupan Purwakarta residential project amounted to Rp50,000. Loan interest is 10% with the maturity period of 24 (twenty four) months starting from the date of signing the Loan Agreement.

On May 30, 2018, the Loan Agreement No. Addendum was made. PP-08. The Addendum to the agreement divided the initial facilities into 3 tranche consisting of *Tranche A* aimed at housing construction of Rp9,816; *Tranche B* for operational reserves of Rp3,000; and *Tranche C* amounting to Rp37,183 originating from principal obligations, interest and arrears as of April 30, 2018, which bears interest at 15% gross.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover berupa Tanah seluas $\pm 4,7$ Hektar dengan bukti kepemilikan SHGB atas nama PT Inti Adhiyasa yang diatasnya telah berdiri perumahan lama dan sebagian besar telah terjual, Tanah seluas $\pm 5,2$ Hektar berikut dengan bangunan yang berdiri diatasnya atas nama PT Inti Adhiyasa, Tanah seluas 2.8 Hektar berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan SPH yang telah dilakukan proses pengukuran dan telah memperoleh peta bidang, Tanah seluas 6,1 Hektar dengan bukti kepemilikan SPH dan belum dilakukan proses pengukuran. Total Nilai Jaminan sebesar Rp38.800.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp36.524 kemudian dikarenakan dengan jatuh tempo yang satu tahun, maka dipindahkan ke investasi jangka pendek. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp1.715. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp4.493. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp33.746.

j. PT Gali Terus Sejahtera

Pemberian Pinjaman kepada PT Gali Terus Sejahtera berupa Surat Utang dengan plafond sebesar Rp5.100. Fasilitas Surat Utang tersebut dikenakan suku bunga 13% per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 36 Bulan sejak di tanda tangannya perjanjian.

Pinjaman Investasi dengan maksimal plafond sebesar Rp30.000. Fasilitas Pinjaman Investasi tersebut dikenakan suku bunga 13% per tahun (termasuk pajak) dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 30 bulan sejak di tanda tangannya perjanjian sampai dengan 8 Mei 2020. Bunga akan dibayarkan secara Triwulan. Kedua fasilitas tersebut akan digunakan untuk pembiayaan Pembelian modal barang untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Jasa Proyek Rental Fasilitas Produksi Lapangan Gas Rayu Utara.

Nilai Jaminan kewajiban PT Gali Terus Sejahtera dilindungi oleh jaminan berupa Fidusia Mesin dan alat, Jaminan Perusahaan Kelsri, Jaminan Pribadi, HT No. 0785/2018 dan HT No. 3619/2019. Total cover Jaminan sebesar Rp35.193.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Collateral value for the loan obligation covered in the form of ± 4.7 hectares of land with proof of ownership of SHGB in the name of PT Inti Adhiyasa, on which old housing has been established and most of it has been sold, land of ± 5.2 hectares, along with the building that stands on top of the name of PT Inti Adhiyasa, land with an area of 2.8 hectares along with the building that stands on it with proof of ownership of SPH that has been carried out the measurement process and has obtained a map of the area, land of 6.1 hectares with proof of ownership of SPH and has not been measured. The total guarantee value is IDR 38,800.

The balance at the beginning of the year is Rp36,524 then due to the maturity of one year, then transferred to short-term investments. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp1,715. Receipt of loan payment in 2019 is Rp4,493. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp33,746.

j. PT Gali Terus Sejahtera

Lending in the form of Debt Securities to PT Gali Terus Sejahtera with plafond of Rp5,100 plafond. Facilities the Debt subject to interest rates of 13% p. a with loan facility for a period of 36 months since in the signing of the agreement.

Loan investment with maximum plafond of Rp30,000 this Investment loan facility subject to a 13% interest rate p. a. (tax included) and period of loan facility for up to 30 months since in the signing of the agreement until 8 May 2020. Interest will be paid in Quarterly. Both facilities will be used for financing the purchase of capital goods to meet the needs of Procurement Services Projects production facility Rental Gas field North of Persuasion.

The value of PT Gali Terus Sejahtera's liability guarantee is covered by a guarantee in the form of machinery and equipment fiduciary, Kelsri company guarantee, personal guarantee, HT No. 0785/2018 and HT No. 3619/2019. The total guarantee cover is Rp35,193.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp26.517. Kemudian dikarenakan dengan jatuh tempo yang satu tahun, maka dipindahkan ke investasi jangka pendek. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp5.176. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp518. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp31.175.

k. PT Duta Cipta Pakar Perkasa

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 73 tanggal 10 November 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja kepada PT Duta Cipta Pakar Perkasa dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp81.000. Bunga kredit sebesar 16% pertahun dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian.

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2018, dilakukan perpanjangan perjanjian yang tertuang dalam Addendum II dengan No. PP25/PPA/1218 atas perubahan tanggal jatuh tempo pinjaman yang telah diberikan oleh Perusahaan.

Pada tanggal 15 Oktober 2019, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan putusan (sela) mengabulkan permohonan karyawan PT Duta Cipta Pakar Perkasa masuk dalam PKPU sementara.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover oleh PT Duta Cipta Pakar Perkasa berupa HT Peringkat 2 – 8 atas jaminan Bank Mandiri, jaminan Fidusia dan persediaan, dan HT Peringkat satu. Nilai yang tercover dari jaminan tersebut sebesar Rp 224.677.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp45.305. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp18.599. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp26.706.

l. PT Varuna Tirta Prakasya

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) No. 14 Tanggal 2 Desember 2019 dengan memberikan fasilitas pinjaman Modal Kerja dengan jumlah plafond Rp45.000. Sifat fasilitas pinjaman bersifat revolving. Tujuan penggunaan dana fasilitas pinjaman hanya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sehubungan dengan pekerjaan proyek yang diterima dari pemberi kerja. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 12 bulan dan tanggal

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance at the beginning of the year is Rp26,517. Then due to the maturity of one year, then transferred to short-term investments. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp5,176. Receipt of loan payment in 2019 is Rp518. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp31,175.

k. PT Duta Cipta Pakar Perkasa

Based on Loan Agreement No. 73 dated November 10, 2017, the Company provides a Working Capital Loan Facility to PT Duta Cipta Pakar Perkasa with a maximum total principal amount of a loan facility of Rp81,000. Credit interest is 16% per year with a loan period of 12 (twelve) months from the date of signing the Agreement.

Then on December 28, 2018, there is an agreement extension contained in the Addendum II with No. PP-25/PPA/1218 for changes in the maturity date of the loan given by the Company.

On October 15, 2019, the District Court of Surabaya released a temporary decision granting the demands of PT Duta Cipta Pakar Perkasa entered in a state of suspension payment.

Collateral value for loan obligations covered by PT Duta Cipta Pakar Perkasa in the form of HT Rating 2-8 on Bank Mandiri guarantees, Fiduciary guarantees and inventories, and HT Rank one. The value covered by the guarantee is Rp224,677 Million.

The balance at the beginning of the year is Rp45,305. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Nil. Receipt of loan payment in 2019 is Rp18,599. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp26,706.

l. PT Varuna Tirta Prakasya

Based on the Deed of Loan Agreement of Working capital to PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) No. 14 dated 2 December 2019 by providing working Capital loan facility with the number of the plafond of Rp45.000. The nature of the loan facility is revolving. The purpose of using the loan facility funds only to meet the needs of working capital in relation to project work received from employers. The loan facility period is 12 months and the due date is on December 1, 2020. For interest rates charged at

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2020. Untuk tingkat suku bunga yang dikenakan sebesar 17% (tujuh belas persen) per tahun, provisi sebesar 0,5% persen dari setiap jumlah dana fasilitas pinjaman yang dicairkan, dan denda sebesar 6%. Jaminan yang diberikan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yaitu hak tanggungan atas 2 bidang tanah dan bangunan dan aset atau kekayaan lainnya yang telah dan akan dimiliki PT Varuna Tirta Prakasya.

Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp24.473. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp24.473.

m. PT Pratama Persada Airbone

Pada tanggal 22 Juni 2017 dilakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman *Standby Loan* dengan No. PP-130/PPA/0617. Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman berupa Pinjaman *Standby Loan* dengan plafond sebesar Rp20.000 dengan tingkat suku bunga 13% per tahun (*gross*) dan biaya provisi sebesar 0,25% dari *plafond* fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 21 Maret 2019. Tujuan penggunaan fasilitas pinjaman adalah untuk modal kerja dalam mengerjakan Proyek.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi *Standby Loan* No. PP-50/PPA/1217 pada tanggal 12 Desember 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman berupa Pinjaman Investasi *Standby Loan* dengan total jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp23.891 dengan tingkat suku bunga 15,3% per tahun (*gross*) dan biaya provisi sebesar 0,5% dari fasilitas pinjaman. Jatuh tempo pada 11 Desember 2022. Tujuan penggunaan fasilitas pinjaman adalah untuk membayar harga pembelian LIDAR Tipe ALS100. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan addendum atas Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi *Standby Loan* dengan No. PP-13/PPA/0818. Para pihak sepakat untuk mengubah ketentuan mengenai definisi Perjanjian/Kontrak Proyek, Proyek, dan Tanggal Jatuh Tempo.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman *Standby Loan* yang di cover oleh PT Pratama Persada Airbone berupa SHT Tanah, Fidusia alat, Gadaai Saham total nilai jaminan sebesar Rp32.752.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

17% (seventeen percent) per year, provision of 0.5% percent of each loan facility funds are disbursed, and a fine of 6%. The guarantee provided by PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) is the right to the responsibility of 2 areas of land and buildings and assets or other wealth that has been and will be owned by PT Varuna Tirta Prakasya.

Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp24,473. Receipt of loan payment in 2019 is Nil. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp24,473.

m. PT Pratama Persada Airbone

On June 22, 2017 a Standby Loan Loan Agreement was made with No. PP-130 / PPA / 0617. The Company provides a Loan Facility in the form of a Standby Loan with the plafond of Rp20,000 with an interest rate of 13% per year (*gross*) and a provision fee of 0.25% of the loan facility that will mature on March 21, 2019. The purpose of using the loan facility is for working capital for Project.

Based on the Investment Loan Agreement Standby Loan No. PP-50 / PPA / 1217 on December 12, 2017, the Company provides a Loan Facility in the form of an Investment Loan Standby Loan with a total loan principal amounting to a maximum of Rp 23,891 with an interest rate of 15.3% per year (*gross*) and provision fees of 0.5% of loan facilities. Due on December 11, 2022. The purpose of using the loan facility is to pay the purchase price of LIDAR Type ALS100. Then on the August 10, 2018 an addendum was made on the Amendment to the Investment Loan Standby Loan Agreement with No. PP-13 / PPA / 0818. The parties agreed to amend the provisions regarding the definition of the Project Agreement / Contract, Project, and Maturity Date.

Collateral Value for Standby Loan loan obligations covered by PT Pratama Persada Airbone in the form of Land SHT, Fiduciary Equipment, Pledge of Shares, total collateral value of Rp32,752.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp30.050. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp7.000. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp23.050.

n. PT Bina Patria Transmitta

Pada tanggal 16 Oktober 2018 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama investasi Dalam Bentuk Pemberian Fasilitas Pinjaman Kepada PT Bina Patria Transmitta dengan No. PP-07/PPA/1018. Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman berupa pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja dengan plafond sebesar Rp24.500 dengan tingkat suku bunga 13% per tahun (gross) dan biaya provisi sebesar 1% dari *plafond*, jatuh tempo pada 15 Oktober 2020, terdiri dari Fasilitas Pinjaman *Tranche A* yang diberikan dalam bentuk Pembiayaan Investasi dengan *plafond* sebesar Rp12.000, tujuan penggunaannya yaitu untuk *refinancing* pinjaman investasi dan pembiayaan kebutuhan capital; dan Fasilitas Pinjaman *Tranche B* diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan *plafond* sebesar Rp12.500, digunakan untuk pembiayaan modal.

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, diserahkan jaminan berupa dua bidang tanah berikut bangunan dan segala turutannya yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp12.760, jaminan fidusia atas mesin dan alat berat sesuai nilai pasar berdasarkan hasil penilaian dari KJPP, dan jaminan fidusia tagihan/piutang dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp17.500.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp12.000. Kemudian dikarenakan dengan jatuh tempo yang satu tahun, maka dipindahkan ke investasi jangka pendek. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp30.737. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp25.990. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp16.748.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance at the beginning of the year is Nil. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp30,050. Receipt of loan payment in 2019 is Rp7,000. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp23,050.

n. PT Bina Patria Transmitta

On October 16, 2018 an Investment Cooperation Agreement was Formed in the Form of Providing Loan Facilities to PT Bina Patria Transmitta with No. PP-07 / PPA / 1018. The Company provides loan facilities in the form of investment loans and working capital loans with the plafond of Rp24,500 with an interest rate of 13% per year (gross) and a provision fee of 1% of the ceiling, due on October 15 2020, which is Consisting of *Tranche A* Loan Facility in the form of Investment Financing with a ceiling of Rp12,000, the purpose of which is to refinancing investment loans and financing capital requirements; and the *Tranche B* Loan Facility is provided in the form of working capital financing with a ceiling of Rp12,500, which is used for financial working capital.

As a guarantee of repayment of all debts, the collateral in the form of two units of land and buildings and all of the pledges that will be burdened with the First Rank Mortgage amounting to Rp12,760, fiduciary guarantees for machinery and heavy equipment according to market value based on the results of the assessment of KJPP, and collateral fiduciary bills or receivables with a guarantee value of at least Rp17,500.

The balance at the beginning of the year is Rp12,000. Then due to the maturity of one year, then reclassified to short-term investments. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp30,737. Receipt of loan payment in 2019 is Rp25,990. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp16,748.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

o. Indah Prakasa Sentosa

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pemberian Fasilitas Pembiayaan untuk Proyek Distribusi Bahan Bakar Minyak pada tanggal 11 Januari 2019 untuk *plafond* pinjaman senilai Rp20.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Adapun rincian atas fasilitas tersebut dibagi menjadi kedalam 2 *Tranche* dengan tujuan *Tranche A* - Pembiayaan untuk *refinancing* Pembiayaan modal kerja Inprase Group di Bank Central Asia (BCA) dan *Tranche B* - Pembiayaan modal kerja Pembelian Bahan Bakar Minyak dalam rangka pemenuhan pesanan dari konsumen.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover berupa SHGB No 1537 (luas 3280 m2) dan SHGB No 1538 (luas 2960 m2) di Jl Raya Serang-Cilegon Km 17,3, Kab. Serang atas nama PT Indah Prakasa Sentosa, berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa Kantor Cabang dan garasi armada truk milik PT Indah Prakasa Sentosa. HT atas kedua SHGB tersebut telah diikat dengan nilai pengikatan sebesar Rp 18 Miliar atas nilai pasar berdasarkan penilaian KJPP. Berdasarkan Laporan Penilai Independen KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan, per 27 Maret 2018, Gadai Saham PT Indah Prakasa Sentosa, yang dimiliki oleh PT Surya Prakasa Sentosa dan atau Eddy P. Winata, yang diikat minimum senilai Rp2.312, dimana sebesar Rp12.000 merupakan pengikatan eksisting, dan Rp11.500 Milyar Gadai Saham akan ditambahkan untuk penambahan Fasilitas. dan *Personal Guarantee* atas nama Eddy Purwanto Winata.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp51.354. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp35.171. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp16.184.

p. PT CDM Swarnadipa

Pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja dengan Perusahaan berupa pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dengan fasilitas sebesar Rp14.600. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas pembiayaan *Tranche A* sebesar Rp7.300 dan fasilitas pembiayaan *Tranche B* sebesar Rp7.300. Tujuan penggunaan pinjaman *Tranche A* adalah untuk pembiayaan investasi dan untuk pembelian mesin sedangkan *Tranche B* untuk pembiayaan modal kerja seperti pembelian batu dari tambang, biaya produksi operasional dan lainnya.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

o. Indah Prakasa Sentosa

The Company has signed investment Cooperation Agreement of financing Facility for oil fuel distribution project on January 11, 2019 for the loan of Rp20,000 with a period of 12 months. The details of the facility are divided into 2 *Tranche* with the purpose of *Tranche A* financing for refinancing working capital financing of Inprase Group at Bank Central Asia (BCA) and *Tranche B* working capital financing of oil fuel purchases to fulfill the consumer's order.

Collateral value for loan obligations covered in the form of SHGB No. 1537 (area of 3280 m2) and SHGB No. 1538 (area of 2960 m2) on Jl Raya Serang-Cilegon Km 17.3, Kab. Serang on behalf of PT Indah Prakasa Sentosa, in the form of land and buildings that stand above it in the form of Branch Offices and garage trucks owned by PT Indah Prakasa Sentosa. HT of the two SHGBs has been bound with a binding value of Rp18,000 for market value based on the assessment of KJPP Budi, Edy, Saptono & Partners, as of March 27, 2018, PT Indah Prakasa Sentosa's Share Pawn, owned by PT Surya Prakasa Sentosa and or Eddy P. Winata, which is bound at a minimum value of Rp12,000 and Personal Guarantee on behalf of Eddy Purwanto Winata.

The balance at the beginning of the year is Nil. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp51,354. Receipt of loan payment in 2019 is Rp35,171. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp16,184.

p. PT CDM Swarnadipa

On February 20, 2019 a Working Capital Loan Loan Agreement with the Company was conducted in the form of investment financing and working capital financing with a facility of Rp14,600. The facility consists of a *Tranche A* financing facility of Rp7,300 and a *Tranche B* financing facility of Rp7,300. The purpose of using a *Tranche A* loan is financing for investment and to purchase machinery while *Tranche B* is for financing working capital such as the purchase of stones from the mine, operational and other production costs.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pemberian pinjaman dengan tingkat suku bunga 14,5% pertahun dengan pembayaran bunga setiap bulan. Perusahaan juga berhak atas hak bonus, yaitu dana yang wajib dibayarkan kepada Perusahaan yang berasal dari margin penjualan batu split dengan pembayaran dan formula sesuai kesepakatan.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp14.544. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp193. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp14.351.

q. PT Wintermar

Berdasarkan kerjasama antara Perusahaan dengan PT Wintermar berupa pinjaman modal kerja dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman setinggi-tingginya Rp26.500 dengan sifat pinjaman *non revolving*. Tujuan penggunaan dana tersebut adalah untuk pembiayaan kebutuhan pelaksanaan *docking* atas 18 (delapan belas) unit kapal, kegiatan operasional terkait dengan proses *docking*, dan pembiayaan kegiatan operasional PT Wintermar khusus untuk biaya-biaya yang terkait dengan *bunker supply* dan perawatan rutin atas kapal-kapal yang dimiliki oleh Wintermar.

Jangka waktu pinjaman tersebut adalah 24 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian tanggal 28 Desember 2018. Tingkat suku bunga atas pinjaman tersebut adalah 14% per tahun (*gross*) dan dibayar setiap bulan.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover oleh PT Wintermar berupa Hipotek Kapal dengan nilai Rp34.450, Fidusia atas piutang sebesar Rp34.450, dan Pemberian *Corporate Guarantee* dari perusahaan induk. Jaminan-jaminan tersebut memenuhi *collateral coverage* 260% dari plafond pinjaman PT Wintermar.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp18.956. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp5.177. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp13.779.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Loans is given with an interest rate of 14.5% per year with monthly interest payments every month. The Company is also entitled to bonus rights, ie. funds that must be paid to the Company originating from the margin of rock split sales with payments and formulas as agreed.

The balance at the beginning of the year is Nil. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp14,544. Receipt of loan payment in 2019 is Rp193. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp14,351.

q. PT Wintermar

Based on the agreement between the Company and PT Wintermar for working capital loans with a maximum principal amount of Rp26,500 with the nature of non-revolving loans. The purpose of the use of these funds is to finance the need for carrying out docking of 18 (eighteen) units of ships, operational activities related to the docking process, and financing of PT Wintermar's operational activities specifically for costs related to bunker supply and routine maintenance of vessels owned by Wintermar.

The term of the loan is 24 months from the signing of the agreement dated December 28, 2018. The interest rate for the loan is 14% p.a. (gross) and paid monthly.

Collateral value for loan obligations covered by PT Wintermar in the form of Ship Mortgage with a value of 34,450 Million, Fiduciary for receivables of Rp. 34,450 Million, and Providing corporate guarantees from the parent company. These guarantees meet 260% collateral coverage of PT Wintermar's loan plafond.

The balance at the beginning of the year is Nil. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp18,956. Receipt of loan payment in 2019 is Rp5,177. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp13,779.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

r. PT Bangun Sarana Baja

Pada tanggal 05 April 2018 dilakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja dengan No.PP-3/PPA/0418. Total jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp50.000 yang akan jatuh tempo pada 31 Maret 2020. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pinjaman adalah untuk modal kerja atas proyek-proyek yang dikerjakan PT Bangun Sarana Baja dengan *plafond* sebesar Rp40.000 dengan tingkat suku bunga 11,5% per tahun (*gross*) dan pembukaan Bank Garamsi atas SPB dari PLN dan proyek lainnya dengan *plafond* sebesar Rp10.000 dengan tingkat suku bunga 16% per tahun (*gross*).

Kemudian pada tanggal 25 April 2018 dilakukan addendum atas Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja dengan No. PP-05/PPA/0418. Perusahaan menyetujui pelepasan sebagian jaminan yaitu 75% saham dalam PT BSM yang dijadikan jaminan berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Berdasarkan Akta Perubahan II terkait Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja PT Bangun Sarana Baja No. 24 Tanggal 27 Maret 2019 bahwa melalui Surat Nomor 054/BSB-ADM/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp10.580. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp4.972. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp5.555. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp9.997.

s. PT SIG Asia

Pada tanggal 9 Februari 2017 telah ditandatangani Perjanjian Nomor PP-05/PPA/0217 antara Perusahaan dan PT SIG Asia berupa pembiayaan kebutuhan modal kerja operasional untuk produksi, pengolahan dan perdagangan hasil olahan tuna dengan saldo maksimum pinjaman senilai Rp15.000. Bunga kredit sebesar 10,5% pertahun dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.

Kemudian dilakukan kembali penandatanganan addendum dengan Nomor PP-22/PPA/1218 pada tanggal 21 Desember 2018 antara Perusahaan dengan PT SIG berupa perpanjangan jangka waktu pinjaman dan penjadwalan pembayaran pokok fasilitas pinjaman.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

r. PT Bangun Sarana Baja

On April 5, 2018 a Working Capital Loan Agreement with No.PP-3 / PPA / 0418 was made. The total principal amount of the loan facility is Rp50,000 which will mature on March 31, 2020 The purpose of the use of the Loan Facility is for working capital for projects carried out by PT Bangun Sarana Baja with the *plafond* of Rp40,000 with an interest rate of 11.5% per year (*gross*) and the opening of Bank Guarantee on SPB from PLN and other projects with a ceiling of Rp10,000 with an interest rate of 16% per year (*gross*).

Then on April 25, 2018 an addendum was made to Amend the Working Capital Loan Agreement No. PP-05 / PPA / 0418. The Company approved the partial release of collateral, i.e. 75% of the shares in PT BSM which are used as collateral based on a Loan Agreement.

Based on the 2nd Deeds of Change regarding the Working Capital loan agreement of PT Bangun Sarana Baja No. 24 dated March 27, 2019 that through letter number 054/BSB-ADM/III/2019 dated 6 March 2019 concerning Renewal Application of capital working loan facility.

The balance at the beginning of the year is Rp10,580. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp4,972. Receipt of loan payment in 2019 is Rp5,555. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp9,997.

s. PT SIG Asia

On February 9, 2017 there was signed an Agreement No. PP-05 / PPA / 0217 between the Company and PT SIG Asia to financing the operational working capital requirements for production, processing and trade of processed tuna with maximum loan balance amounting to Rp15,000. Loan interest is 10.5% with the maturity period of 12 (twelve) months starting from the date of signing the loan agreement.

Then a signatory to the addendum with Number PP-22/PPA/1218 on December 21, 2018 between the Company and PT SIG will be carried out for the extension of the loan term and scheduling the principal payment of the loan facility.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp13.481. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp3.917. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp9.564.

t. PT Polowijo Gosari

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No PP-9/PPA/0517 tanggal 29 Mei 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada PT Polowijo Gosari berupa pembiayaan kontrak pengadaan pupuk majemuk dan pupuk berbasis dolomit dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp50.000. Bunga kredit sebesar 10% pertahun dengan jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian.

Pada tanggal 30 Mei 2018, dilakukan *Addendum* antara Perusahaan dengan PT Polowijo Gosari tentang perubahan tanggal jatuh tempo fasilitas pinjaman dan penambahan *plafond* pinjaman sebesar Rp93.000 dengan ketentuan PT Polowijo wajib melakukan pelunasan atas pencairan selambatnya 180 hari kalender terhitung sejak penarikan, jika PT Polowijo tidak melakukan pelunasan, maka dana atas *plafond* pinjaman yang belum digunakan tidak dapat dicairkan. Fasilitas Pinjaman ini digunakan sebagai sarana untuk pembiayaan Bahan baku dan Biaya *Transporter* atas kontrak pengadaan Pupuk Majemuk/tunggal dan pupuk Dolomit.

Pada tanggal 3 Agustus 2018 berdasarkan Perjanjian Pinjaman No.PP-12/PPA/0818 Perusahaan dan PT Polowijo dilakukan penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman Modal Kerja *non-revolving* dengan *plafond* maksimal Rp53.000, Tujuan fasilitas tersebut adalah sebagai modal kerja operasional pekerjaan Pembangunan Lanjutan *Container Yard* Teluk Lamong Surabaya. Jangka waktu fasilitas adalah 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani perjanjian dengan suku bunga 12% per tahun dan Biaya administrasi setiap kali melakukan penarikan serta Biaya Monitoring sebesar 4,07% dari *plafond* Fasilitas Pinjaman.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance at the beginning of the year is Rp13,481. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Nil. Receipt of loan payment in 2019 is Rp3,917. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp9,564.

t. PT Polowijo Gosari

Based on the Loan Agreement No PP-9 / PPA / 0517 dated May 29, 2017, the Company provided a Loan Facility to PT Polowijo Gosari in the form of contract financing for the procurement of compound fertilizer and dolomite-based fertilizer with a total principal amount of a maximum loan facility of Rp50,000. Credit interest is 10% per year with a loan period of 12 (twelve) months from the date of signing the agreement.

On May 31, 2018, addendum was made between the Company and PT Polowijo Gosari concerning changes in the maturity date of the loan facility and the addition of a loan ceiling of Rp93,000 provided that PT Polowijo was obliged to repay no later than 180 calendar days from withdrawal, if PT Polowijo do not pay off, the funds for the loan ceiling that have not been used cannot be disbursed. This loan facility is used as a means for financing raw materials and transporter fees on the contract of procuring Compound / Single Fertilizers and Dolomite Fertilizers.

On August 3, 2018 based on the Loan Agreement No.PP-12 / PPA / 0818 the Company and PT Polowijo signed a non-revolving Working Capital loan facility agreement with a maximum ceiling of Rp53,000, the purpose of the facility was as operational working capital for Advanced Construction Container work Lamong Bay Yard Surabaya. The term of the facility is 12 (twelve) months from the signing of the agreement with an interest rate of 12% per annum and an administrative fee for each withdrawal as well as a Monitoring Fee of 4.07% from the loan facility limit.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Akta *Addendum II* Perjanjian Pinjaman kepada PT Polowijo Gosari No. PP-01/PPA/0119 Tanggal 11 Januari 2019 berisi tentang perubahan ketentuan mengenai Jumlah Pokok Fasilitas Pinjaman Modal Kerja sebesar Rp57.000 dengan total jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp150.000. Tujuan penggunaan dana fasilitas pinjaman untuk pembiayaan bahan baku dan biaya transporter atas kontrak pengadaan pupuk majemuk/ tunggal dan pembiayaan biaya transporter atas kontrak pengadaan pupuk berbasis dolomit. Jangka waktu fasilitas pinjaman terhitung sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan 28 Mei 2019. Provisi yang harus dibayar sebesar 0,5% dari total penambahan plafond Fasilitas Pinjaman atau seluruhnya sejumlah Rp285. Jaminan yang diberikan yaitu berupa tanah dan bangunan.

Berdasarkan Akta *Addendum III* Perjanjian Pinjaman kepada PT Polowijo Gosari No. PP-11/PPA/0519 Tanggal 27 Mei 2019 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Modal Kerja PT Polowijo Gosari. Jangka waktu fasilitas pinjaman terhitung sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 28 Mei 2020. Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman sebesar 16% per tahun. Jaminan yang diberikan yaitu berupa tanah dan bangunan.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp122.626. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp134.642. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp252.729 Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp4.539.

u. PT Riscon Duta Sarana

Pada tanggal 22 Juli 2016 PT Riscon Duta Sarana dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual beli Surat Utang Konversi No SU-03/PPA/0716 dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp10.000, tingkat suku bunga 5% per tahun dan IRR 35% pada saat pelunasan atau konversi surat utang dilaksanakan.

Surat Utang tersebut memiliki jangka waktu selama 24 bulan sejak tanggal efektif dan dapat dikonversi menjadi saham pada PT Riscon Duta Sarana sewaktu-waktu setelah 90 hari sejak tanggal penerbitan pertama kali surat utang. Surat Utang tersebut telah berlaku efektif pada tanggal 3 Agustus 2016.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on the deed of *Addendum II* loan agreement to PT Polowijo Gosari No. PP-01/PPA/0119 dated January 11, 2019 regarding changes in the provisions on the amount of working capital loan facility of Rp57,000 with total principal amount of loan facility of maximum Rp150,000. Purpose of use of loan facilities for raw material financing and transporter costs of compound/single fertilizer procurement contracts and transporter cost financing for dolomite-based fertilizer procurement contracts. The loan facility period from 28 May 2017 until 28 May 2019. The provision payable by 0.5% of the total expansion of the loan facility or the full amount of Rp285. The guarantees are land and building.

Based on the deed of *Addendum III* loan agreement to PT Polowijo Gosari No. PP-11/PPA/0519 on 27 May 2019 contains the extended term of working capital loan facility of PT Polowijo Gosari. The loan facility period is calculated from 29 May 2017 until 28 May 2020. The interest rate of the loan facility is 16% per year. The guarantees are land and building.

The balance at the beginning of the year is Rp122,626. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp134,642. Receipt of loan payment in 2019 is Rp252,729 Balance at December 31, 2019 amounting to Rp4,539.

u. PT Riscon Duta Sarana

On July 22, 2016 PT Riscon Duta Sarana and PPA signed the sale and purchase of Convertible Bonds number SU-03 / PPA / 0716 with a maximum total principal amount Rp10,000, with an interest rate of 5% pa and an IRR of 35% at the time of redemption or conversion of debentures held.

Bonds with the maturity period is 24 months from the effective date and can be converted into shares of PT Riscon Duta Sarana any time after 90 days from the date of first issuance of debt securities. Bonds has been effective on August 3, 2016.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Nilai Jaminan PT Riscon Duta Sarana berupa Tanah, 8 Kavling ruko, 2 Unit ruko, dan 8 Unit Rumah. Total Nilai Jaminan sebesar Rp9.900.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp 10.000 kemudian dikarenakan dengan jatuh tempo yang satu tahun, maka dipindahkan ke investasi jangka pendek. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp1.000 Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp9.000.

v. PT Prabu Wahana International

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 40 tanggal 13 Januari 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman (Project Financing) kepada PT Prabu Wahana International dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp24.500 yang akan digunakan untuk pembiayaan penyewaan pesawat di wilayah provinsi Papua dan Kalimantan Utara. Bunga kredit sebesar 15% pertahun, Management Fee sebesar 3,5% perbulan dan Monitoring Fee sebesar 2,25% perbulan dengan jangka waktu pinjaman adalah 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

Pada tanggal 28 Agustus 2017, dilakukan addendum I atas Perjanjian Pinjaman dengan No. 36, dengan melakukan penghapusan Management Fee, merubah Monitoring Fee menjadi sebesar 1,75% perbulan. Pada tanggal 25 Oktober 2018, dilakukan addendum II atas Perjanjian Pinjaman dengan No. 88, dengan melakukan penurunan Monitoring Fee menjadi sebesar 0,75% perbulan.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover berupa gadai 100% saham PT Prabu Wahana International sebesar Rp2.000.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp4.794 kemudian dikarenakan dengan jatuh tempo yang satu tahun, maka dipindahkan ke investasi jangka pendek. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp3.625. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp8.419.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The value of PT Riscon Duta Sarana's collateral in the form of land, 8 shop houses, 2 shop units, and 8 housing units worth Rp9,900.

The balance at the beginning of the year is Rp10,000 then due to the maturity of one year, then transferred to short-term investments. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Nil. Receipt of loan payment in 2019 is Rp1,000. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp9,000.

v. PT Prabu Wahana International

Based on the loan agreement No. 40 dated January 13, 2017, the company provides loan facility (Project Financing) to PT Prabu Wahana International with total principal amount maximum of Rp24,500 loan facility that will be used to lease financing in the region of Papua Province and North Borneo. The credit interest rate of 15% per year, Management Fee of 3.5% and monthly Monitoring Fee of 2.25% on average with the period of the loan is 48 (forty-eight) months counted from the date of signing of the agreement.

On 28 August 2017, addendum I on the loan agreement No. 36, by doing the Elimination of Management Fee, change Monitoring Fee to 1.75% per month. On October 25, 2018, addendum II over the loan agreement with the No. 88, by doing the Monitoring Fee decreased to 0.75% per month.

Collateral value for the loan obligation covered in the form of a 100% pledge of PT Prabu's shares in the amount of Rp 2,000.

The balance at the beginning of the year is Rp4,794. Then due to the maturity of one year, then transferred to short-term investments. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp3,625 Receipt of loan payment in 2019 is Nil. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp8,419.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

5. Aset Keuangan Diperdagangkan

5. Held for Trading Financial Assets

	2019 Rp	2018 Rp	
Aset Keuangan Diperdagangkan:			Held for Trading Financial Assets
Pihak Berelasi			Related Parties
Secured Promissory Notes PT Boma Bisma Indra (Persero)	67,829	67,829	Secured Promissory Notes PT Boma Bisma Indra (Persero)
Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero)	2,431	2,431	Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero)
Saham	—	9,372	Shares
Jumlah Pihak Berelasi	70,260	79,632	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Saham	—	1,588	Shares
Jumlah Pihak Ketiga	—	1,588	Total Third Parties
Jumlah	70,260	81,220	Total

a. Saham

Pada Bulan April 2019 Perusahaan menjual semua sisa saham trading sehingga posisi per 30 April 2019 stok saham trading Perusahaan sudah nihil. Adapun rincian penjualan pada tanggal 4 April 2019 yaitu saham PT Bank Pan Indonesia Tbk sebanyak 28 lembar dengan harga penjualan Rp35.840 (nilai penuh) profit Rp5.320 (nilai penuh) saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 112 lembar dengan harga penjualan Rp1.475.600 (nilai penuh) dengan profit Rp187.600 (nilai penuh).

Pada tanggal 25 April 2019, Perusahaan menjual saham PT Waskita Beton Precast Tbk sebanyak 750.000 lembar dengan harga penjualan Rp309 dengan profit Rp28. Total keuntungan dari semua penjualan saham di tahun 2019 sebesar Rp517. Saldo sampai dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Nihil.

b. Secured Promissory Notes

PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI)

Pada tanggal 7 Februari dan 15 April 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI (Sertifikat SPN V dan VI), masing-masing sebesar Rp2.519, Rp3.005, dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari dan 8 Juli 2014. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimiliki oleh PT BBI.

Pada tanggal 2 dan 28 September 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI (Sertifikat SPN IV) masing-masing sebesar Rp7.194 dan Rp1.469, dengan tingkat suku bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2014 dan tidak diperpanjang. PT BBI tidak sanggup membayar SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimiliki oleh PT BBI.

a. Shares

In April 2019 PT PPA sold all the remaining trading stocks so that the position per 30 April 2019 stock Trading stock of PT PPA was nil. The sales details on April 4, 2019 namely the PT Bank Pan Indonesia Tbk share as many as 28 sheets with the selling price of Rp35,840 (full amount) profit Rp5,320 (full amount), shares PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as many as 112 sheets with the sales price of Rp1,475,600 (full amount) profit Rp187,600 (full amount).

On April 25, 2019, The Company sold PT Waskita Beton Precast Tbk shares as much as 750,000 pieces with a sales price of Rp309 with a profit of Rp28. Total profit of all stock sales in the year 2019 of Rp517. Balance at December 31, 2019 amounting to Nil.

b. Secured Promissory Notes

PT Boma Bisma Indra (Persero) (PT BBI)

On February 7 and April 15, 2014, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT BBI SPN (Certificate V and VI) amounting to Rp2,519, Rp3,005, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on February 8 and July 8, 2014 and was not extended. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.

On September 2 and 28, 2013, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT BBI (SPN Certificate IV) amounting to Rp7,194 and Rp1,469 respectively, with interest rate of 12% per annum and mature on January 31, 2014 and was not extended. PT BBI was unable to pay the SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 11, 24 Oktober, 15 November, 2, 13 dan 20 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI (Sertifikat SPN V) masing-masing sebesar Rp3.170, Rp5.056, Rp814, Rp2.607, Rp4.187 dan Rp1.233 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2015. Belum ada pembayaran sampai dengan penerbitan laporan keuangan.

Pada tanggal 11, 24 Oktober, 15 November, 2, 13 dan 20 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI (Sertifikat SPN VI) masing-masing sebesar Rp903, Rp1.895, Rp3.003, Rp1.237, Rp786 dan Rp259 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2014 dan tidak diperpanjang. Pada tanggal 30 April 2014, PT BBI telah melakukan pelunasan SPN VI sebesar Rp3.318. PT BBI tidak sanggup membayar sisa SPN tersebut sehingga pembayaran akan dilakukan dengan penjualan aset yang dimiliki oleh PT BBI.

Pada tanggal 7 Februari dan 15 April 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan PT BBI (Sertifikat SPN V dan VI), masing-masing sebesar Rp2.519, Rp3.005, dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari dan 8 Juli 2014.

Seluruh kewajiban SPN telah jatuh tempo, namun seiring dengan keterbatasan kemampuan keuangan PT BBI belum dapat melakukan pelunasan kewajiban. Terkait dengan hal tersebut Perusahaan telah melakukan beberapa upaya restrukturisasi SPN PT BBI diantaranya

- a) Penandatanganan Perjanjian Pendahuluan No. PJ-02/PPA/1215 dengan PT BBI yang merupakan dasar atas pelaksanaan utang pada tanggal 31 Desember 2015. PT BBI kepada Perusahaan. Perjanjian pendahuluan ini merupakan bentuk komitmen dari PT BBI untuk melakukan restrukturisasi utang kepada Perusahaan dan menjalankan serta merealisasikan hasil kesepakatan antara pihak.
- b) Pembahasan penyelesaian SPN dengan skema *Debt to Equity Swap* ("DES"), pada tanggal 5 Oktober 2017, Skema DES tersebut juga telah mengakomodir Rencana Bisnis PT BBI (RJPP).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On October 11, 24, November 15, December 2, 13 and 20, 2013, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT BBI (SPN Certificate V) amounting to Rp3,170, Rp5,056, Rp814, Rp2,607, Rp4,187 and Rp1,233, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on February 8, 2015. There is no payment until the issuance of the financial statement.

On October 11, 24, on November 15, on December 2, 13 and 20, 2013, the Company signed an Agreement of SPN Issuance with PT BBI (SPN Certificate VI) amounting to Rp903, Rp1,895, Rp3,003, Rp1,237, Rp786 and Rp259, respectively, with interest rate of 14% per annum and mature on June 8, 2014 was not extended. On April 30, 2014, PT BBI has paid the SPN VI amounting to Rp3,318. PT BBI was unable to pay the remaining SPN so that payments will be made by the sale of asset PT BBI's assets.

On February 7 and April 15, 2014, the Company entered into an SPN Issuance Agreement with PT BBI (SPN V and VI Certificates), amounting to Rp2,519, Rp3,005, with an interest rate of 14% per annum and will mature on February 8 and July 8, 2014.

All SPN obligations have matured, but in line with the limited financial capacity of PT BBI has not been able to pay off obligations. Regarding this matter, the Company has made several restructuring efforts for PT BBI SPN including

- a) Signing of Preliminary Agreement No. PJ-02 / PPA / 1215 with PT BBI which is the basis for the implementation of the debt as of December 31, 2015. PT BBI to the Company. This preliminary agreement is a form of commitment from PT BBI to carry out debt restructuring to the Company and carry out and realize the results of the agreement between the parties.
- b) Discussion on the completion of SPN under the Debt to Equity Swap ("DES") scheme, on October 5, 2017, the DES Scheme also accommodated PT BBI's business plan (RJPP).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kedua skema sebelumnya belum dapat dijalankan karena adanya kendala-kendala teknis. Untuk itu Perusahaan kembali merumuskan skema penyelesaian SPN PT BBI yang mungkin dilakukan. Pada tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi No. PP-84/PPA/1218. Selama tahun 2019 pembayaran kewajiban PT BBI berstatus lancar, dengan total pembayaran sebesar Rp1.800 sesuai Perjanjian Restrukturisasi Hutang.

PT Istaka Karya (Persero)

Pada tanggal 30 September 2013 dan 23 Desember 2013 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN I dan II dengan PT Istaka Karya (Persero), masing-masing sebesar Rp13.500 dan Rp3.000 dengan tingkat suku bunga 12% (gross) per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015.

Tanggal 25 Maret 2015 Perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan SPN dengan plafond sebesar Rp60.000 yang akan jatuh tempo 24 Maret 2017.

Pada tanggal 23 Maret 2017 dilakukan Perjanjian Perubahan dan Penuangan Kembali Seluruh Ketentuan Perjanjian Penerbitan SPN PT Istaka Karya (Persero) dengan sesuai akta No.27. Perusahaan setuju membeli SPN dari PT Istaka Karya secara bertahap yang disesuaikan dengan jadwal kebutuhan masing-masing proyek dengan nilai pokok plafond sebesar Rp 100.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun (bersih) yang akan jatuh tempo pada 24 Maret 2019. Dana hasil penerbitan SPN akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja PT Istaka Karya.

Tanggal 22 Maret 2019, telah dilakukan Perjanjian Perubahan I (Pertama) Terhadap Perjanjian Perubahan dan Penuangan Kembali Seluruh Ketentuan Perjanjian Penerbitan Secured Promissory Notes PT Istaka Karya (Persero), yang akan jatuh tempo 24 Maret 2021.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp2.431. Total saldo pencairan SPN di tahun 2019 sebesar nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun 2018 sebesar nihil. Saldo pada 31 Desember 2018 sebesar Rp2.431.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The two previous schemes cannot yet be implemented due to technical constraints. For this reason, the Company has re-formulated a possible BBN SPN settlement scheme. On December 21, 2018 based on Restructuring Agreement No. PP-84 / PPA / 1218. During 2019 the payment of PT BBI's obligations was current, with a total payment of Rp1,800 in accordance with the Debt Restructuring Agreement.

PT Istaka Karya (Persero)

On September 30, 2013 and December 23, 2013, The Company signed an Agreement of SPN I and II issuance with PT Istaka Karya (Persero), amounting to Rp13,500 and Rp3,000, respectively with interest rate of 12% per annum and mature on March 30, 2015.

On 25 March 2015 the Company signed an SPN Issuance Agreement with a ceiling of Rp60,000 which will mature on March 24, 2017.

On March 23, 2017, the Agreement on Amendment and Resettlement of all Provisions of PT Istaka Karya (Persero) SPN Agreement was in accordance with deed No.27. The company agreed to buy SPN from PT Istaka Karya in stages adjusted to the schedule of the needs of each project with a ceiling value of Rp100,000 with an interest rate of 12% per year (nett) which will mature on March 24, 2019. Funds from the issuance of SPN will be used to finance PT Istaka Karya's working capital.

On March 22, 2019, the Amendment Agreement I (First) was made to the Amendment and Repositioning Agreement of All Provisions of the PT Istaka Karya (Persero), which will mature on March 24, 2021.

Beginning balance of the year amounting Rp2,431. Total disbursements of SPN in 2019 amounting to Nil. Receipt of SPN payment in 2019 amounting to nil. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp2,431.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

6. Piutang Usaha

6. Accounts Receivable

	2019 Rp	2018 Rp	
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
Piutang Jasa Konstruksi	110,548	170,383	Construction Services Receivable
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	142,348	74,017	Financial Lease Receivables - Net
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	15,064	584	Consumer Finance Receivables - Net
Piutang Hasil Investasi Surat Berharga	189	--	Investment Income on Securities Receivables
Piutang Bunga dan Monitoring	105,792	22,220	Monitoring and Interest Receivables
Talangan Biaya Pengelolaan Aset Beban Debitur	5,808	6,813	Asset Management Fee Bailouts
Piutang Advisory	27,466	13,057	Advisory Receivable
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	--	7,096	Factoring Receivables - Net
Jumlah Pihak Berelasi	407,215	294,170	Total Related Parties
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(20,802)	(24,445)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	386,413	269,725	Total Related Parties - Net
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	788,707	586,999	Financial Lease Receivables - Net
Piutang Jasa Konstruksi	231,352	202,451	Construction Services Receivables
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	135,614	144,067	Factoring Receivables - Net
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	12,247	33,222	Consumer Finance Receivables - Net
Bunga Deposito Berjangka	1,471	2,726	Interest on Time Deposits
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	4,875	19,225	Others (belows Rp 1,000 each)
Jumlah Pihak Ketiga	1,174,266	988,690	Total Third Parties
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(83,082)	(82,061)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	1,091,184	906,628	Total Third Parties - Net
Jumlah - Bersih	1,477,597	1,176,353	Total - Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of receivables are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal Tahun	(106,506)	(86,846)	Balance at Beginning of The Year
Penambahan di Tahun Berjalan	(22,656)	(20,676)	Addition in Current Year
Pemulihan / Penghapusan di Tahun Berjalan	25,278	1,016	Recovery / Write off in Current Year
Saldo Akhir Periode	(103,884)	(106,506)	Balance at Ending of The Period

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai dia atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible receivable.

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) sebagai berikut:

Total accounts receivable by aging (day) are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
< 12 Bulan	549,237	530,758	< 12 Months
> 12 - 24 Bulan	279,662	187,609	> 12 - 24 Months
> 24 Bulan	752,580	564,492	> 24 Months
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(103,883)	(106,506)	Allowance for Impairment Losses of Receivables
Jumlah	1,477,597	1,176,353	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

7. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

Rincian saldo piutang retensi pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi		
PT Angkasa Pura II (Persero)	26,854	43,274
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	8,749	7,065
Ventura Bersama Nindya - Surya	7,758	5,924
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	6,334	6,334
PT Angkasa Pura I (Persero)	4,769	--
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	4,356	--
Perum Perumnas (Persero)	3,485	3,066
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2,563	2,563
PT Magnesium Gosari Internasional	2,562	--
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	1,387	1,072
PT Hutama Karya (Persero)	1,846	50
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	883	659
Jumlah	71,546	70,007
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(2,563)	(4,920)
Jumlah Pihak Berelasi	68,983	65,087
Pihak Ketiga		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	53,644	59,099
Pemerintah Kabupaten Sikka	31,407	21,154
PT Sinergi Solusi Utama	10,377	10,377
Pemerintah Kabupaten Dhamasraya	1,302	--
PT Maju Santosa Cemerlang	1,228	1,228
Bank Indonesia	228	8,083
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	--	1,775
PT Megah Jaya Prima Lestari	--	1,003
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	2,973	4,361
Jumlah	123,105	124,348
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(21,967)	(22,612)
Jumlah Pihak Ketiga	101,138	101,736
Jumlah Piutang Retensi - Bersih	170,121	166,823

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Saldo Awal Tahun	(27,532)	(19,249)
Penambahan Tahun Berjalan	--	(8,283)
Pemulihan Tahun Berjalan	3,002	--
Saldo Akhir Tahun	(24,530)	(27,532)

7. Retention Receivables

Retention receivable represents receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable's claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

The details of retention receivables to the related parties and third parties are as follows:

Related Parties
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
JV Nindya - Surya
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)
Perum Perumnas (Persero)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Magnesium Gosari Internasional
JV Nindya - Dewa Ruci
PT Hutama Karya (Persero)
Others (each below Rp 1 Billion)
Total
Less: Allowance for Impairment of Losses Receivables
Total Related Parties
Third Parties
The Ministry of Public Work and Public Housing
Sikka District Government
PT Sinergi Solusi Utama
Dhamasraya District Government
PT Maju Santosa Cemerlang
Bank of Indonesia
Central Sulawesi Province Government
PT Megah Jaya Prima Lestari
Others (each below Rp 1 Billion)
Total
Less: Allowance for Impairment of Receivables
Total Third Parties
Total Retention Receivables - Net

The movements in allowance for impairment losses of retention receivables are as follows:

Beginning Balance of The Year
Addition in The Current Year
Recovery in The Current Year
Ending Balance of the Year

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Jumlah piutang retensi berdasarkan umur (hari)
sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
< 12 Bulan	163,265	95,033
> 12 - 24 Bulan	13,939	55,603
> 24 Bulan	17,447	43,719
Jumlah	194,651	194,355
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(24,530)	(27,532)
Jumlah - Bersih	170,121	166,823

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah
penyisihan kerugian penurunan nilai diatas
adalah memadai untuk menutup kemungkinan
kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya
piutang.

Total retention receivable by aging (day) are as
follows:

< 12 Months
> 12 - 24 Months
> 24 Months
Total
Allowance for Impairment Losses of Receivables
Total - Net

Management believes that the allowance for
impairment losses is adequate to cover
possible losses that may arise from
uncollectible receivable.

8. Piutang Ventura Bersama Konstruksi**8. Joint Venture Construction Receivables**

	2019 Rp	2018 Rp
Nindya - Adhi Karya	40,873	4,180
Nindya - Bumi Karsa	39,205	43,988
Nindya - Sacna	34,649	13,979
Nindya - Pembangunan Perumahan	31,763	27,011
Nindya - Hutama Karya	27,945	3,933
Nindya - Waskita - Jaya Purnama	19,884	5,998
Nindya - MCC - Wika - Waskita	18,795	7,515
Nindya - Sarana	14,415	1,823
Nindya - Dewa Ruci	13,177	13,857
Nindya - Gerbang Sarana Baja	8,684	-
Nindya - Pembangunan Perumahan - Hutama Karya	7,709	10,224
Nindya - Cipuga	6,892	19,998
Nindya - Sejahtera	6,630	13,613
Nindya - Citra - Kharisma	5,706	-
Nindya - Catur Perkasa	4,613	6,146
Nindya - Brantas	4,531	5,141
Nindya - Surya	3,275	2,753
Nindya - Inti	2,783	2,633
Nindya - Kencana	2,333	1,705
Nindya - Barata	612	8,960
Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	89	2,173
Nindya - Rudy Jaya	38	49,815
Nindya - PPA	25	1,000
Nindya - Lampiri	8	7,697
Nindya - Lestari	-	10,120
Nindya - Minarta	-	8,085
Nindya - Passokkorang - Adhijaya	-	4,227
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	1,991	1,287
Jumlah	296,623	277,862

Merupakan piutang kepada ventura bersama
(JV) untuk pembelian material, biaya bank,
overhead, dan lain-lain yang dikeluarkan untuk
kepentingan ventura bersama.

Nindya - Adhi Karya
Nindya - Bumi Karsa
Nindya - Sacna
Nindya - Pembangunan Perumahan
Nindya - Hutama Karya
Nindya - Waskita - Jaya Purnama
Nindya - MCC - Wika - Waskita
Nindya - Sarana
Nindya - Dewa Ruci
Nindya - Gerbang Sarana Baja
Nindya - Pembangunan Perumahan - Hutama Karya
Nindya - Cipuga
Nindya - Sejahtera
Nindya - Citra - Kharisma
Nindya - Catur Perkasa
Nindya - Brantas
Nindya - Surya
Nindya - Inti
Nindya - Kencana
Nindya - Barata
Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya
Nindya - Rudy Jaya
Nindya - PPA
Nindya - Lampiri
Nindya - Lestari
Nindya - Minarta
Nindya - Passokkorang - Adhijaya
Others (Each Below Rp 1 Billion)
Total

Represents receivable from the Joint Venture
(JV) to purchase the material, bank fees,
overhead, and others for the joint venture
purposes.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**9. Pinjaman yang Diberikan – Dana Talangan
Kepada Pihak-Pihak Berelasi**

	2019 Rp	2018 Rp
Pokok Pinjaman Dana Talangan		
PT Survai Udara Penas (Persero)	123,057	10,000
PT Istaka Karya (Persero)	62,069	62,094
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	52,126	135,836
PT Iglas (Persero)	49,962	47,385
PT Kertas Leces (Persero)	38,500	38,500
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	26,000	--
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	20,800	--
Jumlah Pokok Pinjaman Dana Talangan	372,514	293,815
Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan		
PT Survai Udara Penas (Persero)	1,583	40
PT Kertas Leces (Persero)	1,534	1,534
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	1,016	--
PT Istaka Karya (Persero)	905	--
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	18	--
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	--	343
Jumlah Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan	5,056	1,917
Jumlah Pinjaman Dana Talangan	377,570	295,732
Dikurangi:		
Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman		
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	(49,617)	(49,617)
PT Survai Udara Penas (Persero)	(74,373)	--
PT Kertas Leces (Persero)	(30,534)	(30,534)
Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman	(154,524)	(80,151)
Jumlah Pengurangan	(154,524)	(80,151)
Jumlah Pinjaman Dana Talangan - Bersih	223,046	215,581

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai
pinjaman adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Saldo Awal Tahun	(80,151)	(96,654)
Reklasifikasi	(74,373)	--
Pemulihan di Tahun Berjalan	--	16,503
Saldo Akhir Periode	(154,524)	(80,151)

9. Loans Receivables - Bailouts Related Parties

Principal Bailout Loans
PT Survai Udara Penas (Persero)
PT Istaka Karya (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Iglas (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
Total Principal Bailout Loans
Interest Receivable on Bailout Loans
PT Survai Udara Penas (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
PT Istaka Karya (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
Total Receivable on Bailout Loans Interest
Total Bailout Loans
Less:
Allowance for Impairment of Loans Receivable
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Survai Udara Penas (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)
Total Allowance for Impairment of Loans
Total Deduction
Total Bailout Loans - Net

The movements in allowance for impairment
losses of loans are as follows:

10. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

10. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode presentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (progress) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian saldo tagihan bruto kepada pemberi kerja adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi		
PT Angkasa Pura II (Persero)	153,841	193,853
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	88,134	41,122
PT Angkasa Pura I (Persero)	69,743	117,771
PT Pertamina (Persero)	42,273	11,708
PT Pelindo III (Persero)	23,241	--
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	7,134	7,134
PT Bhanda Graha Reksa (Persero)	5,000	--
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	4,671	67,295
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	--	73,419
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	30,388
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	--	12,728
PT Utama Karya Infrastruktur	--	4,094
Ventura Bersama Nindya - PT PPA	--	2,394
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	--	1,731
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	--	914
Jumlah Pihak Berelasi	394,037	564,551
Pihak Ketiga		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1,558,609	1,234,374
Pemerintah Kabupaten Sikka	131,699	170,768
Kementerian Pemuda dan Olahraga	74,361	10,026
Universitas Islam Negeri Raden Fatah	67,272	36,659
Bank Indonesia	59,513	25,658
RSUD Wates	50,527	22,433
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	41,692	53,903
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	9,824	--
Kementerian Perhubungan	3,032	67,038
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	1,117	--
Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	--	11,311
Pemerintah Kabupaten Jembrana	--	3,670
PT Siloam International Hospital Tbk	--	3,188
PT Maleo	--	2,079
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	26,423	12,707
Jumlah Pihak Ketiga	2,024,069	1,653,814
Total Tagihan Bruto	2,418,106	2,218,365

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Gross amount due from customer is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing statement of financial position date.

The details of gross amount due from customer are as follows:

Related Parties
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Pertamina (Persero)
PT Pelindo III (Persero)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Bhanda Graha Reksa (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)
PT Utama Karya Infrastruktur
Joint Venture Nindya - PT PPA
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Others (Each below Rp 1 Billion)
Total Related Parties
Third Parties
The Ministry of Public Work and Public Housing
Sikka District Government
The Ministry of Youth and Sports
Raden Fatah State Islamic University
Bank Indonesia
RSUD Wates
West Coast District Government
Dharmasraya District Government
The Ministry of Transportation
Public Works and Spatial Planning Office Banjarbaru
The Ministry of Research Technology and Higher Education
Jembrana District Government
PT Siloam International Hospital Tbk
PT Maleo
Others (Each below Rp 1 Billion)
Total Third Parties
Total Gross Amount Due from Customers

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

11. Persediaan

11. Inventories

	2019 Rp	2018 Rp	
Persediaan Bahan Konstruksi	167,785	119,499	Construction Raw Material
Persediaan Dolomit	48,555	34,779	Dolomit Inventory
Jumlah	216,340	154,278	Total

Berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada 31 Desember 2019, Manajemen berkeyakinan bahwa atas bahan persediaan tersebut tidak terjadi penurunan nilai, serta persediaan using sehingga manajemen tidak membentuk penyisihan persediaan.

Based on review of the inventories condition on December 31, 2019, Management believes that the inventories are not impaired, as well as obsolete inventories, therefore Management does not do the impairment allowance of inventories.

12. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

12. Advances and Prepaid Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	
Uang Muka Pihak Ketiga	55,635	138,017	Advance to Third Parties
Biaya Dibayar di Muka	46,552	16,734	Prepaid Expenses
Jumlah	102,187	154,751	Total

Uang muka pihak ketiga merupakan uang muka kepada supplier dan subkontraktor. Biaya dibayar di muka merupakan biaya untuk sewa gedung dan asuransi.

Advance to third parties represents prepayment to suppliers and subcontractor. Prepaid expenses are for rent and insurance.

13. Perpajakan

13. Taxation

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	2019 Rp	2018 Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>Company</u>
Pajak Pertambahan Nilai	22,134	24,317	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 22	97	229	Income Tax Article 22
Pajak Penghasilan Pasal 23	63,605	41,640	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	4,796	9,192	Income Tax Article 25
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Pertambahan Nilai	715,654	614,094	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 22	11	--	Income Tax Article 22
Pajak Penghasilan Pasal 23	3,816	464	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	820	138	Income Tax Article 25
Pajak Penghasilan Pasal 28a	1,641	585	Income Tax Article 28a
Pajak Penghasilan 4 Ayat 2	2	951	Income Tax Article 4 (2)
Jumlah	812,576	691,610	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT NK telah menerima surat ketetapan lebih bayar pajak dengan rincian sebagai berikut:

PT NK has received tax assessment letter with the detail are as follows:

No. / No.	Jenis Surat / Tax Letter	Nomor Surat / Tax Letters No.	Tanggal Surat / Date Issued	Periode / Period	Jumlah Total
1	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00011/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	15 Januari 2019 / January 15, 2019	Oktober 2017	34,086
2	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00011/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	15 Januari 2019 / January 15, 2019	November 2017	
3	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00012/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	15 Januari 2019 / January 15, 2019	November 2017	33,291
4	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00012/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	15 Januari 2019 / January 15, 2019	November 2017	
5	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00013/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	15 Januari 2019 / January 15, 2019	Desember 2017	15,873
6	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00013/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	15 Januari 2019 / January 15, 2019	Desember 2017	
7	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00108/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 April 2019 / April 16, 2019	Januari 2018	29,172
8	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00108/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 April 2019 / April 16, 2019	Januari 2018	
9	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00109/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 April 2019 / April 16, 2019	Februari 2018	18,877
10	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00109/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 April 2019 / April 16, 2019	Februari 2018	
11	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00110/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 April 2019 / April 16, 2019	Maret 2018	21,381
12	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00110/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 April 2019 / April 16, 2019	March, 2018	
13	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00111/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 April 2019 / April 16, 2019	April 2018	16,974
14	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00111/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 April 2019 / April 16, 2019	April 2018	
15	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00174/ WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 Juli 2019 / July 16, 2019	Mei 18	21,639
16	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00174/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 Juli 2019 / July 16, 2019	May 2018	
17	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00175/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 Juli 2019 / July 16, 2019	Juni 2018	15,774
18	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00175/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 Juli 2019 / July 16, 2019	June 2018	
19	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00176/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 Juli 2019 / July 16, 2019	July 2018	14,383
20	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00176/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 Juli 2019 / July 16, 2019	July 2018	
21	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00177/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 Juli 2019 / July 16, 2019	Agustus 2018	13,456
22	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00177/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	16 Juli 2019 / July 16, 2019	August 2018	
23	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00307/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	10 September 2019 / September 10, 2019	September 2018	21,364
24	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00307/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	10 September 2019 / September 10, 2019	September 2018	
25	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00308/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	10 September 2019 / September 10, 2019	Oktober 2018	27,950
26	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00308/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	10 September 2019 / September 10, 2019	October 2018	
27	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00309/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	10 September 2019 / September 10, 2019	November 2018	20,985
28	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00309/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	10 September 2019 / September 10, 2019	November 2018	
29	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PEMB-00310/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	10 September 2019 / September 10, 2019	Desember 2018	17,206
30	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	PRIN-00310/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019	10 September 2019 / September 10, 2019	December 2018	
					322,409

b. Utang Pajak

	2019 Rp	2018 Rp
Perusahaan		
PPh Pasal 4(2)	8	4,147
PPh Pasal 21	2,860	6
PPh Pasal 22	6	943
PPh Pasal 23	962	40
Entitas Anak		
PPh Pasal 4(2)	4,083	5,362
PPh Pasal 21	2,773	4,922
PPh Pasal 22	1,863	3,101
PPh Pasal 23	2,193	2,215
PPh Pasal 25	--	150
PPh Badan	3,765	10,407
Pajak Pertambahan Nilai	55,491	19,004
Jumlah	74,004	50,297

b. Taxes Payable

Company
Income Article 4(2)
Income Article 21
Income Article 22
Income Article 23
Subsidiaries
Income Article 4(2)
Income Article 21
Income Article 22
Income Article 23
Income Article 25
Corporate Income Tax
Value Added Tax
Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

c. Pajak Penghasilan Badan

c. Income Taxes

	2019 Rp	2018 Rp
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian	335,711	441,660
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak	(190,844)	(243,459)
Bagian Laba yang Telah Diperhitungkan Pajak Penghasilan Final	(68,761)	(260,703)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan	76,106	(62,502)
Beda Temporer:		
Provisi Pinjaman yang Diberikan	--	--
Apresiasi Karyawan	13,420	1,318
Penyisihan Penurunan Nilai	(118,573)	(25,445)
Beban Imbalan Pasca Kerja - Bersih	(1,545)	(710)
Tantiem	4,912	--
Penyusutan Aset Tetap	(131)	66
Amortisasi Aset Tak Berwujud	381	(134)
Beda Tetap:		
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi	(11,012)	(98,025)
Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan	24,206	68,975
Jumlah Koreksi Fiskal	(88,342)	(53,955)
Laba Kena Pajak Sebelum Kompensasi Rugi Fiskal	(12,236)	(116,457)
Rugi Fiskal Awal Periode	--	--
Kompensasi Rugi Fiskal:		
Tahun 2018	(32,628)	--
Tahun 2017	--	(59,629)
Laba Fiskal (Akumulasi Rugi Fiskal)	(44,864)	(176,086)
Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan (25%)	--	--
Beban Pajak Kini - Entitas Anak:		
PT PPAF	7,332	7,819
PT BSM	6,210	7,199
PT Nindya Karya	3,465	2195
Beban Pajak Kini - Entitas Anak	17,007	17,213
Jumlah Beban Pajak Kini - Konsolidasian	17,007	17,213

Income Before Tax Based on Consolidated Statement of
Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Income Before Tax of Subsidiaries
Portion of Income Accounted for
Final Income Tax
Income (Loss) Before Corporate Income Tax

Temporary Differences:
Provision for Loans Receivable
Employees' Appreciation
Allowance for Impairment Loss
Employee Benefits Expense - Net
Tantiems
Fixed Assets Depreciation
Intangible Assets Amortization

Permanent Differences:
Increase in Fair Value of Investment Property
Non Deductible Expenses
Total Tax Correction

Taxable Income Before Tax Losses Compensation
Tax Loss at Beginning of Period
Fiscal Tax Losses Compensation:
Year 2018
Year 2017
Taxable Income (Accumulated Tax Losses)

Corporate Income Tax Expense on Current Year (25%)

Current Tax Expenses - Subsidiaries:
PT PPAF
PT BSM
PT NK
Current Tax Expenses - Subsidiaries
Total Current Tax Expense - Consolidation

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

d. Pajak Tangguhan

	2017	Dampak Konsolidasian (Divestasi) Entitas Anak di Tahun Berjalan	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income	2018	Dampak Konsolidasian Entitas Anak/ Impact Consolidation on Subsidiaries	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan									
<u>Perusahaan</u>									
Rugi Fiskal Tidak Bisa Terputihkan	5,688	--	(781)	--	4,907	--	2,058	--	6,965
Liabilitas Imbalan Kerja	723	--	(100)	--	623	--	(388)	--	235
Aktual Tantiem	2,683	--	--	--	2,683	--	1,228	--	3,911
Aktual Apresiasi Karyawan	5,883	--	702	--	6,585	--	3,355	--	9,940
Aset Telap	97	--	(13)	--	84	--	(39)	--	45
Aset Takterwujud	(33)	--	315	--	282	--	(261)	--	21
Pinjaman Yang Diberikan	(149)	--	--	--	(149)	--	--	--	(149)
Sub Jumlah	14,892	--	123	--	15,015	--	5,953	--	20,968
<u>PT PPA Finance</u>									
Aktual Tantiem dan Apresiasi Karyawan	328	--	(164)	--	164	--	137	--	301
Piutang Usaha	1,484	--	3,060	--	4,544	--	1,539	--	6,083
Liabilitas Imbalan Kerja	144	--	(80)	(36)	28	--	(28)	--	--
Sub Jumlah	1,956	--	2,816	(36)	4,736	--	1,648	--	6,384
<u>PT PPA Kapital</u>									
Rugi Fiskal	1,248	--	--	--	1,248	--	1,208	--	2,456
Liabilitas Imbalan Kerja	101	--	96	(55)	142	--	--	(7)	135
Sub Jumlah	1,349	--	96	(55)	1,390	--	1,208	(7)	2,591
<u>PT Bondi Syad Mulla</u>									
Liabilitas Imbalan Kerja	--	733	127	(24)	836	--	132	129	1,097
Aktual Tantiem dan Apresiasi Karyawan	--	--	175	--	175	--	2	--	177
Aset Telap	--	--	28	--	28	--	17	--	45
Sub Jumlah	--	733	330	(24)	1,039	--	151	129	1,319
<u>PT Duta Mentari Raya</u>									
Rugi Fiskal	992	--	--	--	992	--	--	--	992
Sub Jumlah	992	--	--	--	992	--	--	--	992
<u>PT Rejeki Inti Logam Jaya</u>									
Rugi Fiskal	--	--	--	--	--	7,865	157	142	8,164
Sub Jumlah	--	--	--	--	--	7,865	157	142	8,164
<u>PT Nindya Beton</u>									
Imbalan Pasca Kerja	--	--	--	--	--	--	83	--	83
Aset Telap	1,408	--	988	--	2,397	--	(832)	--	1,565
Sub Jumlah	1,408	--	988	--	2,397	--	(749)	--	1,648
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	20,597	733	4,353	(115)	25,569	7,865	8,368	264	42,066

d. Deferred Tax

Deferred Tax Assets

<u>Company</u>	
Unrecoverable Tax Losses	6,965
Employee Benefit Liabilities	235
Accrued Tantiem	3,911
Accrued Employees Appreciation	9,940
Property, Plant and Equipment	45
Intangible Assets	21
Loans Receivable	(149)
Sub Total	20,968

PT PPA Finance

Accrued Tantiem and Employees Appreciation	301
Accounts Receivable	6,083
Employee Benefit Liabilities	--
Sub Total	6,384

PT PPA Kapital

Fiscal Losses	2,456
Employee Benefit Liabilities	135
Sub Total	2,591

PT Bondi Syad Mulla

Employee Benefit Liabilities	1,097
Accrued Tantiem and Employee Appreciation	177
Property, Plant & Equipment	45
Sub Total	1,319

PT Duta Mentari Raya

Fiscal Loss	992
Sub Total	992

PT Rejeki Inti Logam Jaya

Fiscal Losses	8,164
Sub Total	8,164

PT Nindya Beton

Employee Benefit Liabilities	83
Property, Plant & Equipment	1,565
Sub Total	1,648
Total Deferred Tax Assets	42,066

e. Pemeriksaan Pajak dan Sengketa Pajak

PT NK

Pemeriksaan Pajak Tahun 2015

Pada tanggal 20 April 2017, PT NK menerima SKPLB tahun pajak 2015, dimana Kantor Pajak menyetujui untuk mengembalikan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2015 sebesar Rp8.548. Pada tanggal 18 Mei 2017, PT NK menerima pembayaran kembali atas kelebihan bayar pajak tersebut sebesar Rp8.438 setelah memperhitungkan kompensasi utang pajak Rp111.

Pemeriksaan Pajak Tahun 2016

Pada tanggal 24 April 2018, PT NK menerima SKPLB tahun pajak 2016, dimana Kantor Pajak menyetujui untuk mengembalikan lebih bayar pajak

e. Tax Examination and Tax Disputes

PT NK

Tax Audit 2015

On April 20, 2017, PT NK received SKPLB fiscal year 2015 wherein the Tax office approved the refund of the Company's overpayment of corporate income tax for fiscal year 2015 amounting to Rp8,548. On May 18, 2017, PT NK received the refund for overpayment amounting Rp8,438 after calculating tax payable amounting to Rp111.

Tax Audit 2016

On April 24, 2018, PT NK received SKPLB fiscal year 2016 wherein the Tax office approved the refund of PT NK 's overpayment of corporate income

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

penghasilan badan tahun pajak 2016 sebesar Rp18.663. Pada tanggal 28 Mei 2018, PT NK menerima pembayaran kembali atas kelebihan bayar pajak tersebut.

Pemeriksaan Pajak Tahun 2017

Pemeriksaan pajak tahun 2017 dilaksanakan karena adanya kelebihan pembayaran pajak PT NK sebagaimana tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017, dengan status SPT Lebih Bayar sebesar Rp22.067. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00300/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2018 dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Badan dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

Laba kena pajak dan beban pajak tahun 2017 yang tercatat tidak berbeda material dengan yang dilaporkan dalam SPT 2017.

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, kerugian pajak dapat dilakukan ke depan untuk jangka waktu maksimal lima tahun.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

tax for fiscal year 2016 amounting to Rp18,663. On May 28, 2018, PT NK received the refund for the overpayment.

Tax Audit 2017

In 2017, tax audit conducted for the overpaid taxes as stated in PT NK's Annual Income Tax in 2017, with the status of SPT overpayment amounting to Rp22,067. Examination carried out in accordance with Surat Perintah Pemeriksaan No: PRIN-00300/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2018 of the Tax Office and is currently still in the process of examination.

Reported taxable income and tax expense for the year 2017 immaterially varied from SPT 2017 submitted by the Company to the tax office

Under Indonesia taxation laws, tax losses may be carried forward for a maximum period of five years.

14. Aset Lain-lain

14. Other Assets

	2019 Rp	2018 Rp	
<u>Aset Lancar Lainnya</u>			<u>Other Current Assets</u>
Piutang Proyek	22,254	22,807	Project Receivable
Piutang Talangan Biaya BUMN	12,743	11,376	SOEs' Bailout Loans Receivable
Lain-lain	21,933	17,381	Others
Sub Total	56,930	51,564	Sub Total
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(7,792)	(7,792)	Less: Allowance for Impairment of Receivables
Jumlah	49,138	43,772	Total
<u>Aset Tidak Lancar Lainnya</u>			<u>Other Non-Current Assets</u>
Persediaan Properti	6,092	6,092	Property Inventory
Uang Jaminan	6,648	5,968	Deposit Guarantee
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	29,043	33,510	Restricted Bank
Deposito Berjangka yang Dijaminkan	390,786	301,386	Time Deposits Pledged as Collateral
Aset Takberwujud - Software	5,364	3,131	Intangible Assets - Software
Lain-lain	6,337	4,191	Others
Jumlah	444,270	354,278	Total

a. Piutang proyek merupakan tagihan kepada PT Manunggal Muara Palma ("MMP") dari PT NK. Proyek ini bernilai Rp94.272 dan USD2,911,798.84 (termasuk PPN). Proyek dihentikan sebab MMP tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI). Dalam Putusan BANI, PT NK telah memenangkan dan MMP diharuskan membayar sejumlah Rp93.801 ditambah dengan Rp576 atas beban perkara yang ditalangi terlebih dahulu oleh PT NK.

a. Project receivable on project is billed to PT Manunggal Muara Palma (MMP) from PT NK. This project worth Rp94,272 and USD2,911,798.84 (include VAT). The project was suspended because MMP could not fulfill the payment obligations in accordance with the agreements that have been made by Badan Arbitrase Nasional (BANI). In BANI's decision the PT NK has won and MMP is required to pay Rp93,801 plus Rp576 on caseload who bailed in advance by the PT NK.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT NK telah mengajukan permohonan Lelang Sita Eksekusi kepada Pengadilan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang telah disita tersebut tanggal 1 Agustus 2013 sebagaimana surat Pengacara Novian & Partners No. 0729/NP.VIII/BK/2013 tanggal 21 Agustus 2013. Pengadilan Negara Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan lelang eksekusi tanggal 6 November 2013. Tanggal 18 November 2014, pelaksanaan lelang dengan harga limit Rp21.000 terhadap barang-barang pabrik kelapa sawit Kuansing tidak dihadiri oleh peminat lelang dan Ketua Pengadilan Negeri Rengat menyampaikan apabila PT NK menghendaki lelang lanjutan, maka PT NK harus melakukan appraisal ulang yang terkini terhadap peralatan/mesin di pabrik PKS.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perusahaan sudah melakukan penurunan nilai sebesar Rp39.239. Saldo piutang pada 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Nihil.

- b. Piutang talangan biaya BUMN merupakan piutang atas restrukturisasi/revitalisasi BUMN.
- c. Deposito berjangka yang dijamin sebesar Rp390.000 merupakan deposito berjangka Perusahaan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas fasilitas pinjaman Kredit Swadana Lembaga PRK dengan tingkat suku bunga sebesar 7,65% per tahun (Catatan 25).
- d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Pada tanggal 31 Desember 2019, dana yang dibatasi penggunaannya merupakan rekening di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dibatasi penggunaannya oleh pihak berwenang terkait Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Catatan 40).

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai aset lain-lain adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Saldo Awal Tahun	(7,792)	(4,167)
Penambahan di Tahun Berjalan	--	(3,625)
Saldo Akhir Tahun	<u>(7,792)</u>	<u>(7,792)</u>

15. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

	2019 Rp	2018 Rp
Saham	40,296	45,435
Investasi melalui Fund Manager		
Bahana TCW Investment Management	--	50,554
Nilai Wajar	<u>40,296</u>	<u>95,989</u>

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT NK has filed a petition about Seizure Execution Auction to the Court against the moving goods and non moving goods that has been seized in August 1, 2013 as well as Letter of Lawyer Novian & Partners No. 0729/NP.VIII-/BK/2013 dated August 21, 2013 South Jakarta District Court has issued a determination of execution date auction, November 06, 2013. On November 18, 2014, the auction with the price limit of Rp21,000 toward project construction of the palm oil Kuansing's goods was not attended by any auction enthusiast and The Chairman of Rengat District Court had conveyed that PT NK wanted to hold an advanced auction, so PT NK should do re-appraisal toward the tools/engines in PKS factory.

Until December 31, 2019, the Company has done an impairment amount to Rp39,239 Receivable balance as of December 31, 2019 and 2018, nil respectively.

- b. SOE's Fund advance loans receivable represent receivable to SOE's restructuring/revitalization.
- c. Time deposit pledged as collateral amounting to Rp390,000 represents the Company's time deposit at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk on the loan facility of Kredit Swadana PRK with an interest rate of 7.65% per annum (Note 25).
- d. Restricted Bank
As of December 31, 2019, restricted funds represent account owned by the Company in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk which is restricted in its use by the authorities related to Sabang Loading Dock Construction Projects in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Note 40).

The movements in allowance for impairment losses of other assets are as follows:

Balance at Beginning of The Year
Addition in Current Year
Balance at Ending of The Year

15. Available for Sale Financial Assets

Shares
Investments through Fund Managers
Bahana TCW Investment Management
Fair Value

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Investasi pada saham di tahun 2019 dan 2018 merupakan investasi pada saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dalam kelompok LQ 45 dengan jumlah lembar saham dan nilai wajar sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Jumlah Lembar	27,044,608	27,044,608	Number of Share
Nilai Wajar	1,485	1,680	Fair Value

Kenaikan (penurunan) nilai yang belum direalisasi untuk Aset Keuangan Tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saham	22,152	27,290	Shares
Investasi melalui <i>Fund Manager</i>			Investments through <i>Fund Managers</i>
Bahana TCW Investment Management	--	(1,662)	Bahana TCW Investment Management
Nilai Wajar	22,152	25,628	Fair Value

Perusahaan dan PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM") telah sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Pengelolaan portfolio Efek No.010/BTIM-PPA/VIII/11 tanggal 25 Agustus 2012 yang terakhir diubah melalui Addendum Ketujuh Perjanjian Pengelolaan Portfolio Efek No.021/BTIM-PPA/VIII/18 tanggal 24 Agustus 2018. Melalui surat No.S-3656/PPA/DU/0719 tanggal 22 Juli 2019 dan surat No.S-3894/PPA/DU/0719 tanggal 29 Juli 2019, Perusahaan telah memberitahukan perihal penyampaian Instruksi Partial Redemption dan Full Redemption.

Jumlah seluruh dana yang diserahkan kepada Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Sebesar Rp32.000 atas Instruksi Partial Redemption sesuai NAB tanggal 19 Juli 2019 dan diterima efektif di Rekening Perusahaan tanggal 23 Juli 2019.
2. Sebesar Rp11.192 atas Instruksi Full Redemption sesuai NAB tanggal 26 Juli 2019 dan diterima efektif di Rekening Perusahaan tanggal 31 Juli 2019.
3. Sebesar Rp2 atas sisa nilai kas yang menjadi hak Perusahaan, yang diterima efektif di rekening Perusahaan tanggal 2 Agustus 2019.

Dengan pengakhiran Perjanjian Pengelolaan Efek tersebut, BTIM telah mengirimkan surat kepada Bank Kustodian mengenai Pengakhiran Perjanjian Pengelolaan Efek untuk rekening atas nama PT PPA S/A Bahana TCW.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Investments in shares in 2019 and 2018 are investments in shares of PT Waskita Karya (Persero) Tbk which are in the LQ 45 group with the following number of shares and fair value, as follows:

Unrealized Gain (loss) on Available for Sale Financial Assets are as follows:

The Company and PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM") have agreed to terminate the Securities portfolio management agreement No.010 / BTIM-PPA / VIII / 11 dated 25 August 2012 which was last amended through the Seventh Addendum of the Securities Portfolio Management Agreement No. 021 / BTIM -PPA / VIII / 18 dated 24 August 2018. Through letter No.S-3656 / PPA / DU / 0719 dated July 22, 2019 and letter No.S-3894 / PPA / DU / 0719 dated July 29, 2019, the Company has notified about Submission of Partial Redemption and Full Redemption Instructions.

The total amount of funds submitted to the Company is as follows:

1. In the amount of IDR 32,000 for Partial Redemption Instructions according to NAV on July 19, 2019 and received effectively in the Company Account on July 23, 2019.
2. In the amount of Rp. 11,192 for Full Redemption Instructions according to NAV on July 26, 2019 and received effectively in the Company Account on July 31, 2019.
3. In the amount of Rp2 for the remaining cash value that is the right of the Company, which will be effectively received in the Company's account on August 2, 2019

By terminating the Securities Management Agreement, BTIM has sent a letter to the Custodian Bank regarding the Termination of the Securities Management Agreement for an account in the name of PT PPA S / A Bahana TCW.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Mutasi penghasilan komprehensif lainnya atas aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Movement of other comprehensive income related to available for sale assets as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	25,628	44,279	Beginning Balance
Perubahan Kenaikan (Penurunan) Nilai yang belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual	(2,477)	(18,083)	Change in Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities
Penyesuaian Reklasifikasi Efek Tersedia untuk Dijual	(999)	(568)	Reclassification Adjustment Available for Sale Securities
Jumlah	22,152	25,628	Total

16. Pinjaman yang Diberikan – Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi kepada Pihak-pihak Berelasi

16. Loans Receivable – Restructuring and/or Revitalization Related Parties

	2019 Rp	2018 Rp	
Pokok Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi			Restructuring/Revitalization
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	605,000	605,000	PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	662,174	634,757	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Penataran Angkatan Laut (Persero)	215,345	220,246	PT Penataran Angkatan Laut (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	141,612	141,612	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Iglas (Persero)	89,085	89,085	PT Iglas (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	28,638	28,638	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Survai Udara Penas (Persero)	--	106,789	PT Survai Udara Penas (Persero)
Jumlah Pokok Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	1,741,854	1,826,127	Total Principal Loan Restructuring/Revitalization
Piutang Bunga Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi			Interest Receivables on Restructuring/Revitalization Loans
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	10,075	11,259	PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Iglas (Persero)	12,359	12,359	PT Iglas (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	1,901	276	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Penataran Angkatan Laut (Persero)	--	--	PT Penataran Angkatan Laut (Persero)
Jumlah Piutang Bunga Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	24,335	23,894	Total Interest Receivables on Restructuring/Revitalization Loans
Jumlah Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	1,766,189	1,850,021	Total Restructuring/Revitalization Loans
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman			Allowance for Impairment of Loans
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	(221,669)	(221,669)	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	(127,451)	(141,612)	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Iglas (Persero)	--	(23,497)	PT Iglas (Persero)
PT Survai Udara Penas (Persero)	--	(74,373)	PT Survai Udara Penas (Persero)
Jumlah Penyisihan Penurunan Nilai Pokok Pinjaman	(349,120)	(461,151)	Total Allowance for Impairment of Principal Loans
Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi			Unamortized Cost
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	(228)	(228)	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Iglas (Persero)	(161)	(161)	PT Iglas (Persero)
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	(208)	(208)	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
Jumlah Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi	(597)	(597)	Total Unamortized Cost
Jumlah Pengurangan	(349,717)	(461,748)	Total Deduction
Jumlah Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi - Bersih	1,416,472	1,388,273	Total Loans Restructuring/Revitalization Receivable - Net

Perikatan dan Perjanjian terkait Pinjaman yang diberikan restrukturisasi dan/atau revitalisasi kepada pihak-pihak berelasi diungkapkan Catatan 40.

Commitments and agreements related to loans receivable-restructuring and/or revitalization related parties are disclosed in Note 40.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

17. Properti Investasi

17. Investment Property

2019						
	1 Januari/ January 1	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah dan Bangunan	511,952	3,055	--	37,463	552,470	Lands and Buildings
Jumlah Biaya Perolehan	<u>511,952</u>	<u>3,055</u>	<u>--</u>	<u>37,463</u>	<u>552,470</u>	Acquisition Cost
Akumulasi Perubahan						Accumulated Changes
Nilai Wajar	274,857	41,528	--	(3,272)	313,113	Fair Value
Nilai Tercatat	<u>786,809</u>				<u>865,583</u>	Carrying Value
2018						
	1 Januari / January 1	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah dan Bangunan	273,592	106,653	--	131,707	511,952	Lands and Buildings
Jumlah Biaya Perolehan	<u>273,592</u>	<u>106,653</u>	<u>--</u>	<u>131,707</u>	<u>511,952</u>	Acquisition Cost
Akumulasi Perubahan						Accumulated Changes
Nilai Wajar	122,309	152,548	--	--	274,857	Fair Value
Nilai Tercatat	<u>395,901</u>				<u>786,809</u>	Carrying Value

Perusahaan

Tanah dan Bangunan Eks PT EMI (Persero)

SHGB Nomor 1393 Tanggal 6 Oktober 2010 terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta dengan luas 985 m². Diatas tanah ini berdiri bangunan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 2862/IMB/PG/1977 Tanggal 16 Juni 1977.

Asset Settlement dari PT MNA (Persero)

Pada tahun 2016, Perusahaan memperoleh aset tanah Syamsudin Noor dan Tompo Balang dengan nilai sebesar Rp11.080 milik PT MNA, diserahkan kepada Perusahaan sebagai kompensasi pembayaran atas sebagian Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan.

Pada tahun 2017, Perusahaan memperoleh Aset tanah Maros dengan total nilai sebesar Rp57.675 milik PT MNA, diserahkan kepada Perusahaan sebagai kompensasi pembayaran atas sebagian Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan.

The Company

Land and Building Ex PT EMI (Persero)

SHGB Number 1393 Date October 6, 2010 located at Melawai Village, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta with an area of 985sqm. The building stands on land in accordance with the Building Permit Number: 2862/IMB/PG/1977 on June 16, 1977.

Asset Settlement from PT MNA (Persero)

In 2016, the Company acquired land at Syamsudin Noor and Tompo Balang amounting to Rp11,080 which owned by PT MNA, handed over to the Company as compensation payment for partial loan given by the Company.

In 2017, the Company acquired land assets Maros amounting to Rp57,675 which owned by PT MNA, handed over to the Company as compensation payment for partial loan given by the Company, otherwise.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Asset Settlement PT Kertas Leces (Persero)

Aset yang dinilai milik Perusahaan berupa Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan total luas LT/LB +/- 1.314/816 m disertai sarana pelengkap yang terletak di Jalan Cimanuk No.29-31, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Nilai Wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan serta KJPP Herman Meirizki & Rekan laporan tertanggal 31 Desember 2019.

Akumulasi kenaikan nilai wajar properti investasi setelah direvaluasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp185.679. Kenaikan nilai wajar dicatat sebesar Rp11.013.

PT SKI

Pada bulan September 2018, PT SKI memenangkan lelang penjualan aset PT Super Makmur (dalam likuidasi) dari kurator. Aset yang dibeli tersebut terdiri dari tanah, bangunan dan mesin-mesin. Nilai Wajar tanah dan bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp103.904. Terhadap tanah dan bangunan yang dibeli tersebut dicatat sebagai Properti Investasi karena saat ini belum dapat ditentukan penggunaannya, apakah akan dijual, disewakan atau akan digunakan untuk kegiatan operasional PT SKI.

PT NK

Properti Investasi merupakan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Bajak V Medan (tanah) dengan luas tanah 9.363 m²; Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian Sidoarjo (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 10.440 m²; Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar (tanah) dengan luas tanah 4.572 m²; Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 5.828 m²; Jl. Majapahit Nomor 36, Kel. Ampenan, Kec. Ampenan kota Mataram (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 5.977 m²; Jl. Bontosunggu nomor 22 Makassar dengan luas tanah 1.559 m²; dan Jl. Cendana III, Taman Sakti, Ampenan dengan luas tanah 1.057 m²; Jl. Bridgend Sudiarto No.496 Kel Pedurungan Lor, Kec Pedurungan kota Semarang (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 3.768 m².

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Asset Settlement of PT Kertas Leces (Persero)

Assets rated by the Company in the form of Land and Residential Buildings with total area of Land/Building of 1,314/816 m and complementary facilities located at Jalan Cimanuk No.29-31, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, East Java Province.

The fair value of investment properties as of December 31, 2019 is estimating based on market value method based on valuation report of KJPP Jimmy Prasetyo & Partners and KJPP Herman Meirizki & Partners dated on December 31, 2019.

Increase from accumulated fair value of investment property was revalued on December 31, 2019, amounted to Rp185,679. Increasing of fair value is recorded on other income amounted to Rp11,013.

PT SKI

In September 2018, PT SKI won the auction of PT Super Makmur's asset (under liquidation) from the receiver. The assets purchased consist of land, buildings and machineries. The fair value of land and buildings as of December 31, 2018 is Rp103,904. The land and buildings purchased are recorded as Investment property because currently their use cannot be determined, whether to sell, rent or will be used for PT SKI operations.

PT NK

Investment Properties are the land and building located at Bajak V Street Medan (land) with area of 9,363 sqm; Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian, Sidoarjo (land and building) with area of 10,440 sqm; Poros Dusun Patene Street Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar (land) with area of 4,572 sqm; Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (land and building) with area of 5,828 sqm; Jl Majapahit Number 36, Kel. Ampenan, Kec. Ampenan city of Mataram (land and buildings) with a land area of 5,977 sqm; Jl. Bontosunggu number 22 Makassar with a land area of 1,559 sqm; and Jl. Cendana III, Taman Sakti, Ampenan with a land area of 1,057 sqm; Jl. Bridgend Sudiarto No.496 Kel Pedurungan Lor, Kec Pedurungan, city of Semarang (land and buildings) with a land area of 3,768 sqm.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Nilai Wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan laporan tertanggal 31 Desember 2019.

Akumulasi kenaikan nilai wajar properti investasi setelah direvaluasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.007. Kenaikan nilai wajar dicatat sebesar Rp30.515.

Akumulasi kenaikan nilai wajar properti investasi setelah direvaluasi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp114.575. Kenaikan nilai wajar dicatat sebesar Rp35.430.

Pada Tahun 2019, Perusahaan telah melakukan reklasifikasi dari aset tetap dalam rangka penyelesaian properti investasi sebesar Rp37.965 yang merupakan properti investasi atas tanah di Bontosunggu dan Majapahit Mataram (Catatan 21).

Pengukuran nilai wajar tingkat 1 dari properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019 menggunakan hierarki nilai wajar Tingkat 1.

Hierarki nilai wajar Tingkat 1 dari properti investasi atas tanah dan bangunan yang disewakan dihitung berdasarkan hasil penilaian pendekatan berikut ini:

- Pendekatan Biaya
Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah estimasi biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru. Biaya pengganti baru disesuaikan dengan estimasi penyusutan dengan mempertimbangkan tingkat umur ekonomis, kemunduran fisik dan keusangan.
- Pendekatan Pendapatan
Input yang paling signifikan dalam pendekatan ini adalah asumsi-asumsi digunakan dalam perhitungan tingkat kapitalisasi seperti tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The fair value of investment properties as of December 31, 2019 is estimating based on market value method based on valuation report of KJPP Jimmy Prasetyo & Partners dated on December 31, 2019.

Increase from accumulated fair value of investment property was revalued on December 31, 2019, amounted to Rp145,007. Increasing of fair value is recorded on other income amounted to Rp30,515.

Increase from accumulated fair value of investment property was revalued on December 31, 2018, amounted to Rp114.575. Increasing of fair value is recorded on other income amounted to Rp35.430.

In 2019, the Company reclassified from assets in settlement to investment properties amounting Rp37,965 which were investment properties of the land in Bontosunggu and Majapahit, Mataram (Note 21).

Fair value measurement of investment properties as of December 31, 2019 used hierarchy Level 1.

The Level 1 fair value hierarchy of investment properties for land and buildings that are rented is calculated using following approaches:

- *Cost Approach*
The most significant input in this valuation approach is the estimated cost of the new reproduction or replacement. The replacement costs are adjusted for depreciation estimation by considering the rate of economic age, physical deterioration and obsolescence.
- *Income Approach*
The most significant input in this valuation approach is the assumptions that used in capitalized rate for disconto and growth rate.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

18. Investasi pada Ventura Bersama

18. Investments in Joint Venture

Nama Ventura Bersama / Name of Joint Venture	Proyek / Project	Persentase/ Percentage	2019	2018
Ventura Bersama - Pembangunan Perumahan Green Teksin	Proyek Pembangunan Perumahan Green Teksin	86%	60,289	56,397
Ventura Bersama - ISN - LBD - PPA	Proyek Pembangunan Perumahan Bekasi	33%	45,259	49,172
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Proyek Bendungan Sadawarna	60%	23,379	--
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	Proyek Cisumdawu	7.5%	22,323	17,191
Ventura Bersama Nindya - Sacna	Proyek Bendungan Meninting	73%	20,650	--
Ventura Bersama Nindya - Surya	Proyek Irigasi Lematang	70%	14,619	14,558
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya	Proyek Kalimati	60%	12,526	21,810
Ventura Bersama Nindya - Karya Sarana	Proyek Irigasi Doplang	70%	10,893	3,522
Ventura Bersama Nindya - Jaya Konstruksi	Proyek Tol Trans. Marga Jateng	60%	9,282	14,851
Ventura Bersama PPA - PT Rumah Cerdas	Proyek Mutiara Java Regency	94%	8,891	11,592
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya	Proyek Pembangunan Universitas Jember	45%	8,260	2,708
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya	Proyek Tanju Mila	60%	7,537	18,037
Ventura Bersama Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau	Proyek Pembangunan Jl. Depapre	35%	7,169	7,269
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya	Proyek Sukodono	70%	7,100	8,170
Ventura Bersama Nindya - Wijaya Karya	Proyek Bendungan Logung	40%	6,882	8,744
Ventura Bersama Nindya - Waskita Jaya Purnama	Proyek Bendungan Bomberay	70%	6,419	--
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Proyek Sei Wampu	45%	5,131	4,189
Ventura Bersama Nindya - Tamiang	Proyek Jl. Rianiate	60%	4,898	4,898
Ventura Bersama Nindya - Inti	Proyek Ipai Aceh	60%	4,279	4,279
Ventura Bersama Nindya - Wijaya - Waskita	Proyek Tol Solo - Kertosono	31%	3,823	1,185
Ventura Bersama Nindya - PP	Proyek Jembatan Teluk Kendari	30%	3,634	12,257
Ventura Bersama Nindya - Gerbang Saranabaja	Proyek Tangki Balck Product RU IV Cilacap	76%	3,238	--
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa	Proyek BKT Semarang	60%	2,938	4,019
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	Proyek Pantai Marore	60%	2,910	5,328
Ventura Bersama Nindya - Kencana	Proyek Irigasi Batang Anai Tahap 2	70%	2,612	4,315
Ventura Bersama Nindya - Cipuga	Proyek Takengon - Uning	75%	2,611	6,995
Ventura Bersama Nindya - Brantas	Proyek Bendungan Titab III	45%	1,933	1,933
Ventura Bersama Nindya - Citra - Kharisma	Proyek Jalur Main Line I KA Manggarai-Jatinegara	60%	1,875	--
Ventura Bersama Nindya - Andesmont	Proyek Rembele Tahap II	70%	1,855	1,855
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja	Proyek Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bau-Bau	70%	1,519	--
Ventura Bersama Nindya - Barata	Proyek Bendungan Cieunteung	75%	1,388	647
Ventura Bersama Nindya - Brantas	Proyek Sungai Ciliwung	40%	1,300	1,300
Ventura Bersama Nindya - PP - Utama Karya	Proyek Jembatan Holtekam	15%	1,124	8,841
Ventura Bersama Nindya - PP - Cempaka Hijau	Proyek Pembangunan Perumahan Cempaka Hijau	90%	1,142	13,294
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa	Proyek Mameh Wandesi	51%	1,074	3,555
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa	Proyek Tol Manado - Bitung	70%	--	5,764
Ventura Bersama Nindya - Passokorang - Adhijaya	Proyek Jembatan Pumbiu	50%	--	3,804
Ventura Bersama Nindya - Sejahtera	Proyek Jl. Enrekang	70%	--	3,508
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya	Proyek Waduk Bendo	33%	--	3,065
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya	Proyek Pembangunan Bandara Ahmad Yani	28%	--	1,940
Ventura Bersama Nindya - Indah Pratama	Proyek D.I Prijetan	70%	--	1,368
Ventura Bersama Nindya - PPA	Proyek Cempaka Hijau	14%	--	1,128
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)			1,045	2,598
			321,808	336,085

Merupakan investasi pada ventura bersama dengan rincian sebagai berikut:

An investment in joint venture with the following details:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2019 Rp	2018 Rp	
Aset Lancar	1,963,783	3,627,801	Current Asset
Aset Tidak Lancar	135,791	18,773	Non-Current Asset
Liabilitas Jangka Pendek	983,183	2,610,948	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	359,444	204,297	Non-Current Liabilities
Pendapatan Usaha	2,112,734	5,103,792	Revenue
Laba Bersih Tahun Berjalan	250,780	514,319	Net Income
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	Other Comprehensive Income of The Year
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	250,780	514,319	Comprehensive Income of The Year

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investment in joint ventures are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai Tercatat Awal Tahun	336,085	348,689	Carrying Amount at Beginning of Year
Mutasi Investasi - Bersih	(80,983)	(119,425)	Investment Movements - Net
Bagian Laba Ventura Bersama	66,706	106,821	Share in Profit of Joint Ventures
Nilai Tercatat Akhir Tahun	<u>321,808</u>	<u>336,085</u>	Carrying Amount at the end of Year

19. Pinjaman Investasi Jangka Panjang

19. Long Term Investment Loans

	2019 Rp	2018 Rp	
Pokok Pinjaman Investasi Jangka Panjang			Long Term Investment Loan
PT Varia Intra Finance	160,000	--	PT Varia Intra Finance
PT National Utility Helicopters	62,641	4,712	PT National Utility Helicopters
PT Niaga Bumi Energi	33,883	24,763	PT Niaga Bumi Energi
PT Pratama Persada Airbone	22,665	56,941	PT Pratama Persada Airbone
PT Pusaka Bumi Transportasi	10,706	--	PT Pusaka Bumi Transportasi
PT Tropisindo Sumber Energi	9,438	13,437	PT Tropisindo Sumber Energi
PT Wirasada Sarana Aviati	8,580	2,200	PT Wirasada Sarana Aviati
PT Inti Adhiyasa	--	36,524	PT Inti Adhiyasa
PT Matoa Kidung Bahtera	--	28,870	PT Matoa Kidung Bahtera
PT Gali Terus Sejahtera	--	26,517	PT Gali Terus Sejahtera
PT Matoa Kidung Samudera	--	26,250	PT Matoa Kidung Samudera
PT Polytama Propindo	--	12,800	PT Polytama Propindo
PT Bina Patria Transmirta	--	12,000	PT Bina Patria Transmirta
PT Survei Udara Penas	--	11,000	PT Survei Udara Penas
PT Ricon Duta Sarana	--	10,000	PT Ricon Duta Sarana
PT Prabu Wahana International	--	4,794	PT Prabu Wahana International
Total Pokok Pinjaman	<u>307,913</u>	<u>270,808</u>	Total Long Term Investment Loan
Bunga Pinjaman Investasi Jangka Panjang			Long Term Investment Interest Loan
PT Bina Patria Transmirta	684	48	PT Bina Patria Transmirta
PT Niaga Bumi Energi	525	--	PT Niaga Bumi Energi
PT National Utility Helicopters	113	--	PT National Utility Helicopters
PT Prabu Wahana International	17	286	PT Prabu Wahana International
PT Gali Terus Sejahtera	--	3,258	PT Gali Terus Sejahtera
PT Pratama Persada Airbone	--	2,292	PT Pratama Persada Airbone
PT Survei Udara Penas	--	1,497	PT Survei Udara Penas
PT Tropisindo Sumber Energi	--	461	PT Tropisindo Sumber Energi
PT Matoa Kidung Bahtera	--	119	PT Matoa Kidung Bahtera
PT Matoa Kidung Samudera	--	117	PT Matoa Kidung Samudera
PT Polytama Propindo	--	43	PT Polytama Propindo
PT National Utility Helicopters	--	14	PT National Utility Helicopters
PT Wirasada Sarana Aviati	37	9	PT Wirasada Sarana Aviati
Total Bunga Pinjaman	<u>1,376</u>	<u>8,144</u>	Total Long Term Investment Interest Loan
dikurangi			Less
Penyisihan Pokok Pinjaman			Allowance for Impairment Long Term Investment Loan
PT Tropisindo Sumber Energi	(9,438)	(13,438)	PT Tropisindo Sumber Energi
Penyisihan Bunga Pinjaman			Allowance for Impairment Long Term Interest Investment Loan
PT Tropisindo Sumber Energi	--	(461)	PT Tropisindo Sumber Energi
	<u>(9,438)</u>	<u>(13,899)</u>	
Provisi Pihak Ketiga			Third Parties-Provision
PT National Utility Helicopters	3	--	PT National Utility Helicopters
Jumlah Pinjaman Investasi yang diberikan-Provisi-Pihak Ketiga	3	--	Total Short Term Investments-Provision
Jumlah Pinjaman Investasi-Bersih	<u>299,854</u>	<u>265,053</u>	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

a. PT Varia Intra Finance

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Fasilitas Pembiayaan kepada PT Varia Intra Finance pada tanggal 29 November 2019 No.86 tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memfasilitasi pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja perusahaan. Total pendanaan modal dengan plafond maksimal sebesar Rp160.000 tingkat suku biaya pendanaan sebesar 14% per tahun (gross) yang jatuh tempo pokok pada 28 November tahun 2021.

Jaminan berupa fidusia piutang sebesar Rp208.000 dari 10.955 debitur, *corporate guarantee* atas nama PT Alter Abadi Tbk dan *personal guarantee* atas nama Rachman Hakim.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp160.000. Penerimaan atas pembayaran ditahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp160.000.

b. PT National Utility Helicopters

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. PP-103/PPA/1117 pada tanggal 21 November 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Jangka Pendek dengan total jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp25.000 dengan tingkat suku bunga 17,5% per tahun (gross), biaya provisi sebesar 0,75% dari fasilitas pinjaman, dan biaya administrasi penarikan sebesar Rp3 untuk setiap penarikan pinjaman. Pinjaman ini jatuh tempo pada 25 Maret 2019. Tujuan penggunaan fasilitas pinjaman *Tranche A* khusus untuk penyelesaian kewajiban penerima pinjaman kepada Cessna Finance Corporation, fasilitas pinjaman *Tranche B* khusus untuk penyelesaian kewajiban penerima pinjaman kepada Broker Asuransi, dan fasilitas *Tranche C* khusus untuk penyelesaian kewajiban Penerima Pinjaman dengan kreditur terdahulu.

Pada tanggal 8 Maret 2019, Perusahaan dan PT National Utility Helicopters melakukan penandatanganan Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman melalui Akta Notaris Desman SH, M.Hum, MM., No.18 tanggal 8 Maret 2019. NUH memperoleh tambahan plafond pinjaman setinggi-tingginya Rp37.500 dengan tingkat suku bunga 17% per tahun (gross), biaya provisi sebesar 1,5% dari plafond pinjaman dan biaya administrasi penarikan sebesar Rp3 untuk setiap penarikan pinjaman.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

a. PT Varia Intra Finance

Based on the Financing Facility Loan Facility Agreement to PT Varia Intra Finance on 29 November 2019 No.86, the purpose of this agreement is to facilitate financing for the company's working capital needs. Total capital funding with a maximum limit of Rp 160,000 at a funding rate of 14% per year (gross), which will mature on November 28, 2021.

A guarantee in the form of fiduciary receivables of Rp. 208.000 from 10.955 debtor, *corporate guarantee* under PT Alter Abadi, Tbk and a *personal guarantee* under the name of Rachman Hakim.

The balance at the beginning of 2019 is Nil. The total outstanding loan disbursement in 2019 is Rp160,000. Receipt of payments in the current year is Nil. The balance as at 31 December 2019 was Rp160,000.

b. PT National Utility Helicopters

Under the Loan Agreement No. PP-103/PPA/1117 on November 21, 2017, the Company provides a Short Term Working Capital Loan Facility with a total principal amount of a maximum loan facility of Rp25,000 with an interest rate of 17.5% per year (gross), provision fees of 0.75% of loan facilities that must be paid, and withdrawal administration fees of Rp3 for each loan withdrawal. This loan due on March 25, 2019. The purpose of using a special *Tranche A* loan facility is to settle loan recipient obligations to Cessna Finance Corporation, special *Tranche B* loan facilities to settle loan obligations to Insurance Brokers, and special *Tranche C* facilities for settling obligations of Borrowers with previous creditors.

On March 8, 2019, the Company and PT National Utility Helicopters signed the Comprehensive Amendment to the Loan Agreement through Notarial Deed Desman SH, M.Hum, MM., No. 18 dated March 8, 2019. NUH obtained an additional loan limit of Rp37,500 with an interest rate of 17% per year (gross), a provision fee of 1.5% of the loan ceiling and a withdrawal administration fee of Rp3 for each loan withdrawal.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tujuan penambahan *plafond* pinjaman ini terdiri dari Tranche II khusus Pembelian *sparepart* dan *equipments* guna memenuhi kebutuhan maintenance Helikopter Fasilitas pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp5.000, Tranche III khusus pembayaran sewa atas 1 (satu) unit helikopter yang akan digunakan dalam melaksanakan Kontrak dengan Grup Sinarmas setinggi-tingginya sebesar Rp9.000, Tranche IV khusus Pelunasan pinjaman/utang Penerima Pinjaman kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk setinggi-tingginya sebesar Rp23.500.

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan dan PT National Utility Helicopters melakukan penandatanganan Addendum I Perubahan secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman melalui Akta Notaris Desman SH, M.Hum, MM., No. 113. PT National Utility Helicopters memperoleh tambahan *plafond* pinjaman sebesar Rp98.000 dengan tingkat suku bunga 17% per tahun (*gross*), biaya provisi sebesar 1,8% dari *plafond* pinjaman dan biaya administrasi penarikan sebesar Rp5 untuk setiap penarikan pinjaman.

Penambahan *plafond* pinjaman ini bertujuan untuk Tranche V khusus untuk *refinancing* pembiayaan pembelian helikopter Bell 412 EP (PK-USO) kepada Indika Capital Partner setinggi-tingginya sebesar Rp45.535, Tranche VI khusus untuk *refinancing* pembiayaan pembelian helikopter EC 130 B4 (PK-URR) kepada Indika Capital Partner setinggi-tingginya sebesar Rp19.820, Tranche VII khusus untuk *refinancing* pembiayaan *down payment* pembelian helikopter AW 119 Kx (PK-USF) setinggi-tingginya sebesar Rp14.250, Tranche VIII khusus untuk pembayaran *outstanding* kewajiban PT National Utility Helicopters kepada Asuransi BGIB setinggi-tingginya sebesar Rp7.125, Tranche IX khusus untuk pembelian *sparepart* dan *equipments* guna memenuhi kebutuhan maintenance helikopter kepada Indika Capital Partner setinggi-tingginya sebesar Rp11.270.

Jaminan berupa mesin helikopter, aset tanah dan bangunan serta gadai saham dengan nilai total sebesar Rp180.532. Jaminan tersebut telah memenuhi collateral coverage dikarenakan telah melebihi 130% dari total *outstanding* pinjaman PT National Utility Helicopters kepada Perusahaan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The purpose of adding this loan limit which consists of Tranche II specifically Purchasing spare parts and equipment to meet the maintenance needs of Helicopters Loan facilities at the maximum of Rp5,000, Tranche III specifically paying rent for 1 (one) helicopter unit that will be used in carrying out Contracts with the Sinarmas Group a maximum of Rp9,000, Tranche IV specifically repayment of loans / debt of the Recipient of the Loan to PT Bank Muamalat Indonesia Tbk amounted to Rp23,500.

On December 20, 2019, the Company and PT National Utility Helicopters signed the 1st Amendment to Overall Loan Agreement through Notarial Deed Desman SH, M.Hum, MM., No. 113. PT National Utility Helicopters received an additional loan limit of Rp98,000 with an interest rate of 17% per year (*gross*), a provision fee of 1.8% of the loan ceiling and an administration fee of withdrawal of Rp5 for each loan withdrawal.

The addition of this loan ceiling is aimed at Tranche V specifically for refinancing the purchase of Bell 412 EP (PK-USO) helicopters to Indika Capital Partners as high as Rp45,535, Tranche VI specifically for refinancing financing for the purchase of EC 130 B4 (PK-URR) helicopters to Indika Capital Partner as high as Rp19,820, Tranche VII specifically for refinancing down payment financing for the purchase of AW 119 Kx (PK-USF) helicopters as high as Rp14,250, Tranche VIII specifically for paying outstanding liabilities of PT National Utility Helicopters to BGIB Insurance as high as BGIB Insurance - the height of Rp7,125, Tranche IX specifically for the purchase of spare parts and equipment to meet the needs of helicopter maintenance to Indika Capital Partners amounted to maximum Rp11,270.

A guarantee in the form helicopter machines, land and building asses, share pledges in amount of Rp180,532. This guarantee covers the collateral coverage by more than 130% from the total outstanding loans by PT National Utility Helicopters

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp4.712
Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019
sebesar Rp76.778. Penerimaan atas
pembayaran di tahun berjalan sebesar
Rp18.849. Saldo pada 31 Desember 2019
sebesar Rp62.641.

c. PT Niaga Bumi Energi

Pada tanggal 31 Mei 2018 dilakukan Perjanjian
Pemberian Pinjaman Modal Kerja Kepada
PT Niaga Bumi Energi (PT NBE)
dengan No. PP-121/PPA/0518. Perusahaan
memberikan fasilitas pinjaman berupa pinjaman
modal kerja dalam bentuk *Project Financing*
dengan plafond sebesar Rp22.300 dengan
tingkat suku bunga 18% per tahun (gross) dan
biaya provisi sebesar 1% dari plafond.

Pinjaman modal kerja tersebut terdiri dari
Fasilitas Pinjaman *Tranche A* yang diberikan
dalam bentuk Pinjaman Berjangka dengan
plafond sebesar Rp10.500 yang jatuh tempo
pada 30 Mei 2021, tujuan penggunaannya yaitu
untuk *cash collateral*; Fasilitas Pinjaman
Tranche B yang diberikan dalam bentuk
Pinjaman *Revolving* dengan plafond sebesar
Rp7.500 yang jatuh tempo pada 30 Mei 2021,
digunakan untuk modal kerja pembelian
pelumas PT Total Oil Indonesia; dan Fasilitas
Pinjaman *Tranche C* yang diberikan dalam
bentuk Pinjaman Berjangka dengan plafond
sebesar Rp4.300 yang jatuh tempo pada 30 Mei
2020, digunakan untuk modal kerja
pengangkutan batubara milik PT Pada Idi.

Selanjutnya telah dilakukan beberapa kali
perubahan Perjanjian pada tahun 2018 dan
2019 yaitu *Addendum I* Perjanjian tanggal
30 Oktober 2018 No. 102 perihal penambahan
plafond Fasilitas Pinjaman *Tranche C* sebesar
Rp3.400; *Addendum II* Perjanjian tanggal
1 Februari 2019 No. 06 perihal penambahan
plafond Fasilitas Pinjaman *Tranche A* sebesar
Rp1.000; dan *Addendum III* Perjanjian tanggal
24 Juli 2019 No. 101 perihal penambahan
plafond Fasilitas Pinjaman *Tranche A* sebesar
Rp2.500 dan plafond Fasilitas Pinjaman
Tranche B sebesar Rp5.500.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp24.763.
Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019
sebesar Rp25.297. Penerimaan atas
pembayaran di tahun berjalan sebesar
Rp16.177. Saldo pada 31 Desember 2019
sebesar Rp33.883.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance at the beginning of the year is
Rp4,712. Total disbursement of loan in 2019
amounting to Rp76,778 Receipt of loan payment
in 2019 is Rp18,849 Balance at December 31,
2019 amounting to Rp62,641.

c. PT Niaga Bumi Energi

On May 31, 2018 a Working Capital Loan Loan
Agreement was granted to PT Niaga Bumi Energi
(PT NBE) with No. PP-121 / PPA / 0518. The
company provides a loan facility in the form of a
working capital loan in the form of *Project
Financing* with a ceiling of Rp22,300 with an
interest rate of 18% per year (gross) and a
provision fee of 1% of the ceiling.

The working capital loan consists of the *Tranche
A* Loan Facility provided in the form of a Term
Loan with a ceiling of Rp10,500 which will mature
on May 30, 2021, the purpose of which is to be
used for cash collateral; The *Tranche B* Loan
facility, which is provided in the form of a
Revolving Loan with a ceiling of Rp7,500 that is
due on May 30, 2021, is used for working capital
for PT Total Oil Indonesia lubricant purchases;
and the *Tranche C* Loan Facility, which is
provided in the form of a Term Loan with a ceiling
of Rp4,300, which will mature on May 30, 2020,
will be used for working capital for the
transportation of coal owned PT Pada Idi.

Furthermore, several amendments to the
Agreement have been made in 2018 and 2019,
namely *Addendum I* Agreement dated 30
October 2018 No. 102 concerning the addition of
the *Tranche C* Loan Facility ceiling of Rp3,400;
Addendum II Agreement dated February 1, 2019
No. 06 regarding the addition of the *Tranche A*
Loan Facility ceiling of Rp1,000; and *Addendum
III* Agreement dated 24 July 2019 No. 101
regarding the addition of the *Tranche A* Loan
Facility ceiling amounting to Rp2,500 and the
Tranche B Loan Facility ceiling of Rp5,500.

The balance at the beginning of the year is
Rp24,763. Total disbursement of loan in 2019
amounting to Rp25,297 Receipt of loan payment
in 2019 is Rp16,177. Balance at December 31,
2019 amounting to Rp33,883.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

d. PT Pratama Persada Airborne

Pada tanggal 22 Juni 2017 dilakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman *Standby Loan* dengan No.PP-130/PPA/0617 Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman berupa Pinjaman *Standby Loan* dengan *plafond* sebesar Rp20.000 dengan tingkat suku bunga 13% per tahun (*gross*) dan biaya provisi sebesar 0,25% dari *plafond* fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 21 Maret 2019. Tujuan penggunaan fasilitas pinjaman adalah untuk modal kerja dalam mengerjakan Proyek.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi *Standby Loan* No. PP-50/PPA/1217 pada tanggal 12 Desember 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman berupa Pinjaman Investasi *Standby Loan* dengan total jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp23.891 dengan tingkat suku bunga 15,3% per tahun (*gross*) dan biaya provisi sebesar 0,5% dari fasilitas pinjaman. Jatuh tempo pada 11 Desember 2022.

Tujuan Penggunaan fasilitas pinjaman adalah untuk membayar harga pembelian LIDAR Tipe ALS100. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan addendum atas Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi *Standby Loan* dengan No.PP-09/PPA/0818. Para pihak sepakat untuk mengubah ketentuan mengenai nama Lidar dari semula Lidar Tipe ALS100 menjadi Leica Terrain Mapper.

e. Pusaka Bumi Transportasi

Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Pusaka Bumi Transportasi ("PT PBT") berupa Investasi pembelian dan perakitan truk dan/atau alat berat yang diproduksi oleh Kamaz-rusia dan Belaz-belaruzia. Skema perjanjian ini adalah dengan tiga skema; Penjualan Tunai, Proyek Pengangkutan dan penjualan dengan fasilitas pinjaman dari Perusahaan. Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman dengan *plafond* fasilitas Rp 500.000. yang terdiri dari; Fasilitas pinjaman Tranche A berupa pinjaman modal kerja jangka pendek yang diberikan kepada PT PBT untuk pembiayaan pembelian dan perakitan truk dan/atau alat berat yang diperuntukan untuk dijual tunai. Fasilitas pinjaman Tranche B berupa pinjaman angsuran tetap yang diberikan kepada PT PBT untuk pembiayaan pembelian dan perakitan truk dan/atau alat berat yang diperuntukan untuk proyek pengangkutan hasil tambang, Fasilitas pinjaman Tranche C pinjaman yang diberikan untuk membeli truk dan/atau alat berat dari pabrikan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

d. PT Pratama Persada Airborne

On June 22, 2017 a *Standby Loan Lending Agreement* with No.PP-130 / PPA / 0617 was made. The Company provides a Loan Facility in the form of a *Standby Loan* with a ceiling of Rp20,000 with an interest rate of 13% per year (*gross*) and a provision fee of 0.25% of the loan facility ceiling that will mature on March 21, 2019. The purpose of using the loan facility is for working capital in working on the Project.

Based on the *Standby Loan Investment Loan Agreement* No. PP-50 / PPA / 1217 on December 12, 2017, the Company provided a Loan Facility in the form of a *Standby Loan Investment Loan* with a total maximum principal amount of Rp 23,891 with an interest rate of 15.3% per year (*gross*) and a provision fee of 0, 5% of the loan facility. Due on December 11, 2022.

The purpose of using the loan facility is to pay for the purchase price of ALD100 LIDAR Type. Then on August 10, 2018 an addendum was made to the Amendment to the *Standby Loan Investment Loan Agreement* with No.PP-09 / PPA / 0818. The parties agreed to change the provisions regarding the name Lidar from the original Lidar Type ALS100 to Leica Terrain Mapper.

e. Pusaka Bumi Transportasi

The Company cooperates with PT Pusaka Bumi Transportasi ("PT PBT") in the form of investing in purchasing and assembling trucks and / or heavy equipment produced by kamaz-russia and Belaz-belaruzia. The scheme of this agreement is with three schemes; Cash Sales, Transportation Projects and sales with loan facilities from the Company. The Company provides a loan facility with a facility limit of Rp500,000 which is consisting of; Tranche A loan facilities in the form of short-term working capital loans given to PT PBT for financing the purchase and assembly of trucks and / or heavy equipment intended for sale in cash. Tranche B loan facility in the form of fixed installment loans given to PT PBT for financing the purchase and assembly of trucks and/or heavy equipment intended for mining product transportation projects, Tranche C loan loan facilities provided to purchase trucks and/or heavy equipment from manufacturers.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tingkat suku bunga untuk Tranche A dan B adalah sebesar 13 % dan akan jatuh tempo pada tahun 2022 sedangkan untuk tranche C akan diatur dalam perjanjian terpisah.

Nilai Jaminan kewajiban PT PBT ditanggung oleh jaminan aktif berupa Fidusia truk dan atau alat berat dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp20.400.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp10,706. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp10.706.

f. PT Tropisindo Sumber Energi

Pada tanggal 22 Desember 2016 PT Tropisindo Sumber Energi dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual beli Surat Utang Konversi nomor SU-10/PPA/1216 dengan plafond sebesar Rp12.000 yang akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) Sengak 1 dengan tingkat suku bunga 12,5% pper tahun (bersih) ditambah dengan insentif bunga yang dibayarkan secara tahunan.

Surat Utang tersebut memiliki jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal efektif dan dapat dikonversi menjadi saham pada PT Tropisindo Sumber Energi pada tanggal jatuh tempo surat utang. Sampai dengan 31 Desember 2016 PT Tropisindo Sumber Energi belum melakukan penerbitan atas surat utang tersebut.

Selain Perjanjian Surat Utang Konversi PT Tropisindo Sumber Energi dan Perusahaan juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman nomor PP-23/PPA/1216 tertanggal 22 Desember 2016 dengan plafond sebesar Rp1.500. Perjanjian tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan untuk Pembayaran bunga surat utang konversi selama masa konstruksi / *Interest During Construction (IDC)*. Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga 12,5% per tahun (bersih) dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 48 bulan sejak di tanda tangannya perjanjian. Pada tahun 2017, Pembangunan dan penyelesaian Proyek PLTMH Sengak-1 terhenti karena terjadi *cost overrun* dan eskalasi biaya, sehingga membutuhkan tambahan biaya dalam melanjutkan pembangunan proyek.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The interest rates for Tranche A and B are 13% and will mature in 2022 while tranche C will be arranged in a separate agreement.

The Collateral Value of PT PBT liabilities is covered by active collateral in the form of Fiduciary trucks and or heavy equipment with a value of mortgage of Rp20,400.

The balance at the beginning of the year is Nil. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp10,706. Receipt of loan payment in 2019 is Nil. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp10,706.

f. PT Tropisindo Sumber Energi

On December 22, 2016 PT Tropisindo Sumber Energi and the Company signed a Conversion Purchase Agreement for SU-10 / PPA / 1216 with a ceiling of Rp12,000 which will be used to finance the development of the Sengak Mini Hydro Power Plant (PLTMH) project 1 with an interest rate of 12.5% per annum (net) plus an interest incentive paid annually.

The notes have a period of 60 months from the effective date and can be converted into shares in PT Tropisindo Sumber Energi on the maturity date of the debt securities. As of December 31, 2016, PT Tropisindo Sumber Energi had not yet issued the bonds.

In addition to the PT Tropisindo Sumber Energi Conversion Debt Securities Agreement and the Company has also signed a Loan Facility Provision Number PP-23 / PPA / 1216 dated December 22, 2016 with a ceiling of Rp1,500. The agreement is a facility provided by the Company for the payment of interest on convertible debt securities during the construction period/*Interest During Construction (IDC)*. The loan facility bears an interest rate of 12.5% per annum (net) with a term of the loan facility for 48 months from the signing of the agreement. In 2017, the construction and completion of the Sengak-1 PLTMH Project was halted due to cost overrun and cost escalation, thus requiring additional costs in continuing the construction of the project.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 26 April 2019 Perusahaan dan PT Tropisindo Sumber Energi telah melakukan penandatanganan *Addendum* Perjanjian Jual Beli Surat Utang yang isi perjanjiannya antara lain a) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Surat Utang terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, b) Perubahan suku bunga Surat Utang dari 12,5% (bersih) menjadi 3,6% (gross), c) PT Tropisindo Sumber Energi akan membayar sebesar Rp4.000 kepada Perusahaan secara bertahap yaitu Rp2.000 pada tanggal 30 April 2019 dan Rp2.000 pada tanggal 25 Agustus 2019.

Pembayaran tersebut digunakan pertama kali untuk melunasi utang pokok Perjanjian PP-23/PPA/1216 tertanggal 22 Desember 2016 dan selanjutnya digunakan untuk penebusan pokok Surat Utang, d) Sisa *outstanding* pokok senilai Rp9.437 akan dilunasi dalam jangka waktu 9 tahun sesuai dengan jadwal penebusan pokok surat utang.

Sampai dengan 31 Desember 2019 progres pembangunan PLTMH Sengak I yang dilanjutkan oleh Pemegang Saham PT Tropisindo Sumber Energi telah mencapai 60% dan direncanakan akan selesai sebelum target *Commercial On Date* (COD) pada tanggal 15 Juli 2020.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp13.438 Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Nihil Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp4.000. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp9.438.

g. PT Wisarada Sarana Aviati

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pengadaan Dan Pengoperasian Pesawat Fixed Wing BN-2T dengan No. PP-28/PPA/0818 tanggal 7 Agustus 2018, tujuan dari kerjasama ini yaitu dalam rangka pengadaan dan pengoperasian Pesawat BN-2T. Total pendanaan modal dengan plafond maksimal sebesar Rp9.900, tingkat suku biaya pendanaan sebesar 14% per tahun (gross) yang jatuh tempo pokok pada tahun 2022.

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, diserahkan jaminan berupa fidusia atas Mesin Pesawat BN-2T dengan nilai obyek dan nilai penjaminan sebesar Rp9.543, fidusia atas Badan/Airframe Pesawat BN-2T dan kelengkapan lainnya dengan nilai obyek dan nilai pinjaman sebesar Rp3.181, fidusia atas tagihan WISE AIR dengan nilai obyek dan nilai penjaminan sebesar Rp9.279, dan pemberian jaminan pribadi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On April 26, 2019 the Company and PT Tropisindo Sumber Energi signed the *Addendum of the Purchase and Purchase of Debt Securities Agreement*, which contains, among others, a) Extension of the term of the Debt Securities Agreement from December 22, 2016 to March 31, 2029, b) Changes in rates Debt interest from 12.5% (net) to 3.6% (gross), c) PT Tropisindo Sumber Energi will pay Rp4,000 in stages to the Company in the amount of Rp2,000 on April 30, 2019 and Rp2,000 on August 25 2019.

The payment is used for the first time to pay off the principal debt of the PP-23 / PPA / 1216 Agreement dated December 22, 2016 and subsequently is used for the redemption of the principal of the Debt, d) Remaining outstanding principal amounting to Rp9,437 will be repaid within a period of 9 years in accordance with the principal redemption schedule debt securities.

Until December 31, 2019 the progress of the development of PLTMH Sengak I, which was continued by the Shareholders of PT Tropisindo Sumber Energi, had reached 60% and was planned to be completed before the Commercial On Date (COD) target on July 15, 2020.

The balance at the beginning of the year is Rp13,438 Total disbursement of loan in 2019 amounting to Nil Receipt of loan payment in 2019 is Rp4,000. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp9,438.

g. PT Wisarada Sarana Aviati

Based on the Investment Cooperation Agreement in the Form of BN-2T Fixed Wing Aircraft Supply and Operation with No. PP-28 / PPA / 0818 dated 7 August 2018, the purpose of this collaboration is in the context of procurement and operation of BN-2T aircraft. Total capital funding with a maximum ceiling of Rp9,900, the rate of funding costs is 14% per annum (gross) with a principal maturity in 2022

As collateral for repayment of all debts, the collateral in the form of fiduciary over BN-2T Aircraft Machine with object value and guarantee value of Rp9,543, fiduciary for BN-2T Airframe Agency / Airframe and other objects with object value and loan value of Rp3,181 fiduciary over WISE AIR bills with object value and guarantee value of Rp9,279, and giving personal guarantees.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp2.200. Kemudian dikarenakan dengan jatuh tempo yang satu tahun, maka dipindahkan ke investasi jangka pendek.

h. PT Polytama Propindo

Pada tanggal 28 Agustus 2017 berdasarkan Perjanjian Pinjaman PP-16/PPA/0817, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman Investasi Rp20.000 kepada PT Polytama Propindo yang jatuh tempo pada 27 Agustus 2020 dengan bunga kredit sebesar 12% per tahun.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp12.800 kemudian dikarenakan dengan jatuh tempo yang satu tahun, maka dipindahkan ke investasi jangka pendek.

i. PT Inti Adhiyasa

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No.6 tanggal 29 Mei 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada PT Inti Adhiyasa berupa pembiayaan pembangunan rumah sederhana untuk proyek perumahan kota Kaharupan Purwakarta dengan saldo maksimum pinjaman senilai Rp50.000. Bunga kredit sebesar 10% pertahun dengan jangka waktu pinjaman adalah 24 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

Pada tanggal 30 Mei 2018 telah dilakukan *Addendum* Perjanjian Pinjaman No. PP-08. *Addendum* perjanjian tersebut membagi fasilitas awal menjadi 3 (tiga) tranche yang terdiri dari *Tranche A* bertujuan untuk pembangunan rumah sebesar Rp9.816; *Tranche B* untuk cadangan operasional sebesar Rp3.000; dan *Tranche C* sebesar Rp37.183 berasal dari kewajiban pokok, bunga dan biaya tertunggak per 30 April 2018 yang dikenakan bunga sebesar 15% gross.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp36.524 kemudian dikarenakan dengan jatuh tempo yang satu tahun, maka dipindahkan ke investasi jangka pendek.

j. PT Gali Terus Sejahtera

Berdasarkan M-102/PPA/D.2-ID/1017 yang telah disepakati oleh Perusahaan dan PT Gali Terus Sejahtera. Pemberian Pinjaman berupa Surat Utang dengan plafond sebesar Rp5.100 Fasilitas Surat Utang tersebut dikenakan suku bunga 13% per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 36 Bulan sejak di tanda tangannya perjanjian. Pinjaman Investasi dengan maksimal plafond sebesar Rp30.000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance at the beginning of the year is Rp2,200. Therefore due to the maturity of one year, then transferred to short-term investments.

h. PT Polytama Propindo

On August 28, 2017, based on Loan Agreement No. PP-16/PPA/0817, the Company agreed give Loan Investment to PT Polytama Propindo by Rp20,000 which will due on August 27, 2020 with interest rate 12% per annum.

The balance at the beginning of the year is Rp12,800 then due to the maturity of one year, then transferred to short-term investments.

i. PT Inti Adhiyasa

Based on the Loan Agreement No.6 dated May 29, 2017, the Company provides Loan Facility (Project Finance) to PT Inti Adhiyasa to finance the construction of a simple house for a Kaharupan Purwakarta residential project worth Rp50,000. Loan interest is 10% with the maturity period of 24 months starting from the date of signing the Loan Agreement.

On May 30, 2018, the Loan Agreement No. *Addendum* was made. PP-08. The *Addendum* to the agreement divided the initial facilities into 3 (three) tranche consisting of *Tranche A* aimed at housing construction of R 9,816; *Tranche B* for operational reserves of Rp3,000; and *Tranche C* amounting to Rp37,183 originating from principal obligations, interest and arrears as of April 30, 2018, which bears interest at 15% gross.

The balance at the beginning of the year is Rp36,524 then due to the maturity of one year, then transferred to short-term investments.

j. PT Gali Terus Sejahtera

Based on M-102/PPA/D.2-ID/1017 which has been agreed by the Company and PT Gali Terus Sejahtera. The Company approved to lending Bonds with Rp5,100 plafond with 13% interest rate per annum and loan term period 36 months since the agreement was signed. Investment loan with maximum plafond Rp30,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Fasilitas Pinjaman Investasi tersebut dikenakan suku bunga 13% per tahun (termasuk pajak) dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 30 Bulan sejak di tanda tangannya perjanjian sampai dengan 8 Mei 2020. Bunga yang akan dibayarkan secara Triwulan. Kedua fasilitas yang akan digunakan untuk pembiayaan Pembelian modal barang untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Jasa Proyek Rental Fasilitas Produksi Lapangan Gas Rayu Utara.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp26.517 kemudian dikarenakan dengan jatuh tempo yang satu tahun, maka dipindahkan ke investasi jangka pendek.

k. PT Riscon Duta Sarana

Pada tanggal 22 Juli 2016 PT Riscon Duta Sarana dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual beli Surat Utang Konversi No SU-03/PPA/0716 dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp10.000, tingkat suku bunga 5% per tahun dan IRR 35% pada saat pelunasan atau konversi surat utang dilaksanakan.

Surat Utang tersebut memiliki jangka waktu selama 24 bulan sejak tanggal efektif dan dapat dikonversi menjadi saham pada PT Riscon Duta Sarana sewaktu-waktu setelah 90 hari sejak tanggal penerbitan pertama kali surat utang. Surat Utang tersebut telah berlaku efektif pada tanggal 3 Agustus 2016.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp 10.000 kemudian dikarenakan dengan jatuh tempo yang satu tahun, maka dipindahkan ke investasi jangka pendek.

l. PT Survai Udara Penas

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi kepada PT Survai Udara Penas (Persero) yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2018 dengan No. PP-09 memberikan fasilitas pinjaman berupa pinjaman investasi dengan jumlah plafond maksimal sebesar Rp11.000. Tujuan fasilitas ini yaitu membiayai Kegiatan investasi berupa pengambilalihan 90% saham dalam PT Pratama Persada Airbone milik PT PPAK. Jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 2026 dengan tingkat suku bunga sebesar 14% per tahun.

Akta perjanjian ini, telah dilakukan perpanjangan perjanjian melalui *Addendum* dengan akta *Addendum* I No.38 tanggal 20 Desember 2019, yang menyepakati pembayaran bunga setelah tahun 2018, dilakukan secara dua tahunan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Investment Loan facility with 13% interest rate per annum (including taxes) and loan facility period 30 months since the agreement was signed until May 8, 2020. The interest will be paid quarterly. Both facilities will be used for financing Procurement of Rental Project Service Production Facilities in Lapangan Gas Rayu Utara.

The balance at the beginning of the year is Rp26,517 then due to the maturity of one year, then transferred to short-term investments.

k. PT Riscon Duta Sarana

On July 22, 2016 PT Riscon Duta Sarana and PPA signed the sale and purchase of Convertible Bonds number SU-03 / PPA / 0716 with a maximum total principal amount Rp10,000, with an interest rate of 5% pa and an IRR of 35% at the time of redemption or conversion of debentures held.

Bonds with the maturity period is 24 months from the effective date and can be converted into shares of PT Riscon Duta Sarana any time after 90 days from the date of first issuance of debt securities. Bonds has been effective on August 3, 2016.

The balance at the beginning of the year is Rp10,000 then due to the maturity of one year, then transferred to short-term investments.

l. PT Survai Udara Penas

Based on the Investment Loan Agreement to PT Survai Udara Penas (Persero) conducted on January 11, 2018 with No. PP-09 provides a loan facility in the form of an investment loan with a maximum ceiling amount of Rp11,000. The purpose of this facility is to finance investment activities in the form of taking over 90% of the shares in PT Pratama Persada Airbone owned by PT PPAK. The loan facility period is up to 2026 with an interest rate of 14% per year.

The deed of this agreement, an extension agreement through addendum was made with addendum I No. 38 dated December 20, 2019, which agreed to pay interest after 2018, carried out bi-annually.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp11.000 kemudian dikarenakan dengan jatuh tempo yang satu tahun, maka dipindahkan ke Pinjaman Yang diberikan Dana Talangan – Pihak berelasi.

m. PT Matoa Kidung Samudera

Berdasarkan Perjanjian kerjasama Pembiayaan Investasi KIP Matoa 1 Dengan PT MKS tanggal 22 Oktober 2018 dengan No. PP-16/PPA/1018, total nilai pokok fasilitas pendanaan sebesar Rp26.250 dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun (gross) yang akan jatuh tempo pada 29 Oktober 2023. Tujuan penggunaan dana fasilitas pembiayaan adalah untuk tujuan pembiayaan *refinancing* pengadaan KIP Matoa 1.

Kemudian berdasarkan Perjanjian kerjasama Pembiayaan Modal Kerja KIP Matoa 1 Dengan PT Matoa Kidung Samudera pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan No. PP-18/PPA/1018, total nilai pokok fasilitas pendanaan dengan *plafond* sebesar Rp7.500 dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun (gross) yang akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2023. Seluruh dana fasilitas pembiayaan investasi digunakan untuk tujuan Modal Kerja Operasional PT MKS atas KIP Matoa 1.

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, diserahkan jaminan berupa hipotik peringkat pertama atas KIP Matoa 1 dengan nilai hipotik sebesar nilai perolehan, hipotik peringkat pertama atas KIP Matoa 2 dengan nilai hipotik sebesar nilai perolehan, hak tanggungan peringkat pertama atas Aset Karimun dengan nilai hak tanggungan sebesar nilai pasar, dan aset dan atau kekayaan PT MKS dan/atau Grup Trimitra lainnya.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp26.250 kemudian pada bulan Januari 2019 telah diakusisi oleh PT PPA Kapital.

n. PT Matoa Kidung Bahtera

Pada tanggal 22 Oktober 2018 dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Investasi Kapal Isap Pasir (KIP) Matoa 2 Dengan PT Matoa Kidung Bahtera dengan No. PP-17/PPA/1018. Seluruh dana fasilitas pembiayaan investasi digunakan untuk tujuan pembiayaan *refinancing* pengadaan KIP Matoa 2. Total jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp26.250 dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun (gross) yang akan jatuh tempo pada 23 Agustus 2023.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance at the beginning of the year is Rp11,000 then due to the maturity of one year, then transferred to The loans given to the Bailouts – the parties closely related.

m. PT Matoa Kidung Samudera

Based on the Cooperation Agreement on Investment Financing KIP Matoa 1 with PT MKS dated October 22, 2018 with No. PP-16 / PPA / 1018, the total principal value of the funding facility is Rp26,250 with an interest rate of 13.5% per year (gross) which will mature on October 29, 2023. The purpose of the use of funding for financing facilities is for the purpose of financing the refinancing of procurement of KIP Matoa 1.

Then based on the cooperation agreement of KIP Matoa 1 Working Capital Financing with PT MKS on October 22, 2018 with No. PP-18/PPA/1018, the total principal value of the funding facility with a limit amounted to Rp7,500 with an interest rate of 13.5% per annum (gross) which will mature on October 30, 2023. All funds for investment financing facilities are used for working capital purposes PT MKS's operations on Kato Matoa 1.

As collateral for repayment of all debts, the collateral is in the form of first rank mortgages for Matoa 1 KIP with a mortgage value of acquisition value, first rank mortgages for Matoa 2 KIP with a mortgage value of acquisition value, first rank liability for Karimun Assets with the value of mortgage amounting to market value, and assets and or assets of PT MKS and/or other Trimitra Groups.

The balance at the beginning of the year is Rp26,250 then then in January 2019 it was acquired by PT PPA Kapital.

n. PT Matoa Kidung Bahtera

On October 22, 2018, the Investment Financing Cooperation Agreement of Sand Suction Dredges (KIP) Matoa 2 was conducted with PT MKB with No. PP-17 / PPA / 1018. All funds for investment financing facilities are used for the purpose of refinancing the procurement of KIP Matoa 2. The total principal amount of the loan facility is Rp26,250 with an interest rate of 13.5% per year (gross) which will mature on August 23, 2023.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kemudian berdasarkan Perjanjian kerjasama Pembiayaan Modal Kerja KIP Matoa 2 Dengan PT Matoa Kidung Bahtera pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan No. PP-19/PPA/1018. Seluruh dana fasilitas pembiayaan investasi digunakan untuk tujuan pembiayaan Modal kerja Operasional PT MKB atas Matoa 1. Total jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp7.500 dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun (gross) yang akan jatuh tempo pada 23 Agustus 2023.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp28.870 kemudian pada bulan Januari 2019 telah diakusisi oleh PT PPAK.

o. PT Prabu Wahana International

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 40 tanggal 13 Januari 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman (*Project Financing*) kepada PT Prabu Wahana International dengan total jumlah pokok maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp24.500 yang akan digunakan untuk pembiayaan penyewaan pesawat di wilayah provinsi Papua dan Kalimantan Utara. Bunga kredit sebesar 15% pertahun, *Management Fee* sebesar 3,5% perbulan dan *Monitoring Fee* sebesar 2,25% perbulan dengan jangka waktu pinjaman adalah 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.

Pada tanggal 28 Agustus 2017, dilakukan addendum I atas Perjanjian Pinjaman dengan No. 36, dengan melakukan penghapusan *Management Fee*, merubah *Monitoring Fee* menjadi sebesar 1,75% perbulan. Pada tanggal 25 Oktober 2018, dilakukan addendum II atas Perjanjian Pinjaman dengan No. 88, dengan melakukan penurunan *Monitoring Fee* menjadi sebesar 0,75% perbulan.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp8.419. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp8.419.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Then based on the cooperation agreement of KIP Matoa 2 Working Capital Financing with PT Matoa Kidung Bahtera on October 22, 2018 with No. PP-19/PPA/1018. All funds for investment financing facilities are used for the purpose of financing PT MKB's operational working capital for Matoa 1. The total principal amount of the loan facility is Rp7.500 with an interest rate of 13.5% per year (gross) which will mature on August 23, 2023.

The balance at the beginning of the year is Rp28,870. Therefore in January 2019 it was acquired by PT PPAK.

o. PT Prabu Wahana International

Based on the loan agreement No. 40 dated January 13, 2017, the company provides loan facility (*Project Financing*) to PT Prabu Wahana International with total principal amount maximum of Rp24,500 loan facility that will be used to lease financing in the region of Papua Province and North Borneo. The credit interest rate of 15% per year, *Management Fee* of 3.5% and monthly *Monitoring Fee* of 2.25% on average with the period of the loan is 48 months counted from the date of signing of the agreement.

On 28 August 2017, addendum I on the loan agreement No. 36, by doing the Elimination of *Management Fee*, change *Monitoring Fee* to 1.75% per month. On October 25, 2018, addendum II over the loan agreement with the No. 88, by doing the *Monitoring Fee* decreased to 0.75% per month.

The balance at the beginning of the year is Nil. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp8,419 Receipt of loan payment in 2019 is Nil. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp8,419.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

p. PT Bina Patria Transmitta

Pada tanggal 16 Oktober 2018 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama investasi Dalam Bentuk Pemberian Fasilitas Pinjaman Kepada PT Bina Patria Transmitta dengan No. PP-07/PPA/1018. Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman berupa pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja dengan plafond sebesar Rp24.500 dengan tingkat suku bunga 13% per tahun (*gross*) dan biaya provisi sebesar 1% dari *plafond*, jatuh tempo pada 15 Oktober 2020. Terdiri dari Fasilitas Pinjaman *Tranche A* yang diberikan dalam bentuk Pembiayaan Investasi dengan *plafond* sebesar Rp 12.000, tujuan penggunaannya yaitu untuk *refinancing* pinjaman investasi dan pembiayaan kebutuhan capital; dan Fasilitas Pinjaman *Tranche B* diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan *plafond* sebesar Rp12.500, digunakan untuk pembiayaan modal.

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, diserahkan jaminan berupa dua bidang tanah berikut bangunan dan segala turutannya yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp12.760, jaminan fidusia atas mesin dan alat berat sesuai nilai pasar berdasarkan hasil penilaian dari KJPP, dan jaminan fidusia tagihan/piutang dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp17.500.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp12.000. Total saldo pencairan pinjaman di tahun 2019 sebesar Rp30.737. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp25.990. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp16.748.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

p. PT Bina Patria Transmitta

On October 16, 2018 an Investment Cooperation Agreement was Formed in the Form of Providing Loan Facilities to PT Bina Patria Transmitta with No. PP-07 / PPA / 1018. The Company provides loan facilities in the form of investment loans and working capital loans with a ceiling of Rp24,500 with an interest rate of 13% per year (*gross*) and a provision fee of 1% of the ceiling, due on October 15 2020. Consisting of *Tranche A* Loan Facility given in the form of Investment Financing with a ceiling of Rp12,000, the purpose of which is to refinancing investment loans and financing capital requirements; and the *Tranche B* Loan Facility is provided in the form of working capital financing with a ceiling of Rp12,500, which is used to finance working capital.

As a guarantee of repayment of all debts, the collateral in the form of two plots of land and buildings and all of the pledges that will be burdened with the First Rank Mortgage amounting to Rp12,760. fiduciary guarantees for machinery and heavy equipment according to market value based on the results of the assessment of KJPP, and collateral fiduciary bills or receivables with a guarantee value of at least Rp17,500.

The balance at the beginning of the year is Rp12,000. Total disbursement of loan in 2019 amounting to Rp30,737. Receipt of loan payment in 2019 is Rp25,990. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp16,748.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

20. Investasi Jangka Panjang Lainnya

20. Other Long Term Investment

	2019 Rp	2018 Rp	
Investasi Jangka Panjang Lainnya			Other Long Term Investment
PT Super Exim Sari	78,438	78,438	PT Super Exim Sari
PT KNE Global Persada	49,477	49,426	PT KNE Global Persada
PT Asia Kaolinraya	15,000	15,000	PT Asia Kaolinraya
PT Ciptaindah Permata	10,000	10,000	PT Ciptaindah Permata
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	1,592	1,222	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Matoa Kidung Samudera	--	15,625	PT Matoa Kidung Samudera
PT Matoa Kidung Bahtera	--	15,625	PT Matoa Kidung Bahtera
Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas	--	3,246	Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas
Jumlah Investasi Jangka Panjang Lainnya	<u>154,507</u>	<u>188,582</u>	Total Other Long Term Investment
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Dana			Allowance for Impairment Loans Receivable
PT Super Exim Sari	(36,567)	(35,529)	PT Super Exim Sari
PT Asia Kaolinraya	(15,000)	(15,000)	PT Asia Kaolinraya
Jumlah Pengurang	<u>(51,567)</u>	<u>(50,529)</u>	Total Deduction
Jumlah	<u><u>102,940</u></u>	<u><u>138,053</u></u>	Total

1. PT Super Exim Sari

PT PPAF melakukan pengalihan piutang atas aset jaminan PT Super Exim Sari (PT SES) kepada PT SKI sebesar Rp78.438. Hal tersebut terkait proses penyelesaian piutang PT SES berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 12/Pdt.SusPembatalan.Perdamaian/2017 / PN. Niaga.Jkt.Pst,Jo Nomor: 70/Pdt. 2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Januari 2018 menjelaskan bahwa PT Super Exim Sari dalam keadaan pailit dan aset-aset yang dimiliki dalam proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor.

PT PPAK membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas investasi ke PT Super Exim Sari sebesar Rp36,567.

2. PT KNE Global Persada

Perusahaan memiliki Surat Utang Konversi dengan PT KNE Global Persada (KNE) sesuai dengan Akta Perjanjian No. 86 tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp15.000, dengan jangka waktu dari mulai tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2025, yang memiliki tingkat suku bunga 16% per tahun (sudah termasuk pajak). Realisasi surat utang per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp11.500.

Pada Januari dan Maret 2017 telah dilakukan pencairan atas sisa *plafond* Surat Utang Konversi PT KNE sejumlah Rp3.500.

1. PT Super Exim Sari

PT PPAF undertake the transfer on the guarantee assets of PT Super Exim Sari (PT SES) to PT SKI amounted to Rp78,438. This is related to the PT SES receivables settlement process based on the Commercial Court Decision at the Central Jakarta District Court Number: 12 / Pdt.Sus Cancellation. Peace / 2017 / PN. Niaga. Jkt. Pst, Jo Number: 70 / Pdt. 2015 / PN.Niaga.Jkt.Pst dated January 15, 2018 explained that PT Super Exim Sari was in a state of bankruptcy and assets held in the auction process by the State Wealth and Bogor Auction Service Office.

PT PPAK make an allowance for impairment losses on investment to PT Super Exim Sari amounting to Rp36,567.

2. PT KNE Global Persada

The Company has Convertible Debt Securities with PT KNE Global Persada (KNE) based on the Agreement Deed No. 86 dated August 30, 2016 amounted to Rp15,000, starting from the effective date until December 31, 2025 with net interest rate of 16% per annum (included tax). The realized convertible debt securities as of December 31, 2016 amounted to Rp11,500.

In January and March 31, 2017 total disbursement Convertible Debt Securities of PT KNE amounted to Rp3,500.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Perjanjian No. PJ-08/PPAK/1218 tanggal 28 Desember 2018, transaksi yang dilakukan oleh PT PPAK yaitu pengalihan piutang (cessie) PT KNE Global Persada dari PT PPAK dengan harga beli sebesar Rp21,826, dengan jangka waktu dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman sampai dengan tanggal 28 Desember 2024, yang memiliki tingkat suku bunga pinjaman 11% per tahun (sudah termasuk pajak).

3. PT Asia Kaolin Raya

PT PPAK memiliki Surat Utang Konversi dengan PT Asia Kaolinraya (AKR) sesuai dengan Akta Perjanjian No. 56 tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp15.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 30 Desember 2022 yang memiliki tingkat suku bunga 20% per tahun (tidak termasuk pajak).

Pada tahun 2017, PT PPAK membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas investasi ke PT Asia Kaolinraya sebesar Rp15.000.

4. PT Cipta Indah Permata

PT PPAK memiliki Surat Utang Konversi dengan PT Cipta Indah Permata (CIP) sesuai dengan Akta Perjanjian No. 90 tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp10.000 dengan jangka waktu 33 bulan, dengan tingkat suku bunga 16% per tahun (sudah termasuk pajak).

5. PT Jasamarga Kunciran Cengkareng

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya adalah melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Kunciran - Cengkareng, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT NK memiliki saham sebanyak 60.010 lembar saham senilai Rp499.954.000 (Rupiah penuh) dan persentase kepemilikan sebesar 0,28%. Aset ini dikelompokkan ke dalam aset yang tersedia untuk dijual.

Selama tahun 2018, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp251 atau sebesar 0.28% dan total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng perihal permohonan tambahan setoran modal. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2018, saldo investasi jangka Panjang setelah pembayaran tambahan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on agreement No. PJ-08/PPAK/1218, dated December 28, 2018, transactions made by PT PPAK are factoring (cessie) of PT KNE Global Persada ("KNE") from the Company, with the agreed with the agreed purchase price amounted to Rp21,826, with the maturity period from the date of signing the loan agreement until December 28, 2024 and the loan interest rate 11% per annum (included tax).

3. PT Asia Kaolin Raya

PT PPAK has Convertible Bonds with PT Asia Kaolinraya (AKR) based on Deed of Agreement No. 56 dated January 18, 2016 amounted to Rp15,000 starting from the effective date until December 30, 2022 with gross interest rate of 20% per annum (excluded tax).

In 2017, PT PPAK make an allowance for impairment losses on investment to PT Asia Kaolinraya amounting to Rp15,000.

4. PT Cipta Indah Permata

PT PPAK has Convertible Bonds with PT Cipta Indah Permata (CIP) based on Deed of Agreement No. 90 dated March 29, 2016 amounted to Rp10,000 with period of 33 months term and net interest rate of 16% per annum (included tax).

5. PT Jasamarga Kunciran Cengkareng

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng is a company which its business activity is concession Kunciran-Cengkareng Toll Road, which include funding, technical planning, construction implementation, operation and maintenance of the Toll Road, as well as other business activities in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

PT NK owns 60,010 shares of shares valued at Rp499,954,000 (full amount) and the percentage of ownership is 0.28%. These assets are classified as available for sale.

During December 2018, the Company paid additional capital to PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp251 or 0.28% of total share issued based on PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng request for additional capital injections. On December 31, 2018, the long term investment balance after payment of additional capital deposits was Rp1,222,475,800

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2019, Perusahaan melakukan pembayaran tambahan setoran modal kepada PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp370 atau sebesar 0.28% total saham yang dikeluarkan berdasarkan surat PT Jasamarga Kunciran Cengkareng perihal permohonan tambahan setoran modal.

6. PT Matoa Kidung Samudra

Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Surat Utang Konversi No. 10 tanggal 22 Oktober 2018, Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., PT PPAK memiliki Surat Utang Konversi dengan PT Matoa Kidung Samudra sebesar Rp15,625, dengan jangka waktu 60 bulan dan kupon sebesar 5% per tahun (belum termasuk pajak).

Pada tanggal 23 Januari 2019, PT MKS telah diakuisisi oleh PT PPAK (Catatan 22).

7. PT Matoa Kidung Bahtera

Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Surat Utang Konversi No. 11 tanggal 22 Oktober 2018, Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., PT PPAK memiliki Surat Utang Konversi dengan PT Matoa Kidung Bahtera sebesar Rp15,625, dengan jangka waktu 60 bulan dan kupon sebesar 5% per tahun (belum termasuk pajak).

Pada tanggal 23 Januari 2019, PT MKB telah diakuisisi oleh PT PPAK (Catatan 22).

8. Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas

PT PPAK memberikan fasilitas pinjaman kepada Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas dengan Akta Nomor 75 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta. Jumlah pokok fasilitas pinjaman keseluruhan sebesar Rp9.000 yang memiliki jangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga 18% per tahun netto. Realisasi pinjaman per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.246.

Pada tahun 2019, PT PPAK telah menerima pelunasan dari Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas sebesar Rp3.246.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai investasi jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Saldo Awal Tahun	(50,529)	(15,000)
Penambahan di Tahun Berjalan	(1,038)	(35,529)
Saldo Akhir Tahun	(51,567)	(50,529)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

In the period January to December 2019, the Company paid an additional capital deposit to PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng in the amount of Rp370 or 0.28% the total shares issued were based on a letter from PT Jasamarga Kunciran Cengkareng regarding the request for additional capital.

6. PT Matoa Kidung Samudra

Based on Deed of Convertible Bonds No. 10 dated October 22, 2018, Notary Lenny Janis Ishak, S.H., PT PPAK has Convertible Bonds with PT Matoa Kidung Samudra amounted to Rp15,625, with maturity date 60 months and interest rate 5% per annum (excluded tax).

On January 23, 2019, PT MKS has been acquired by PT PPAK (Note 22).

7. PT Matoa Kidung Bahtera

Based on Deed of Convertible Bonds No. 11 dated October 22, 2018, Notary Lenny Janis Ishak, S.H., PT PPAK has Convertible Bonds with PT Matoa Kidung Bahtera amounted to Rp15,625, with maturity date 60 months and interest rate 5% per annum (excluded tax).

On January 23, 2019, PT MKS has been acquired by PT PPAK (Note 22).

8. Joint Venture PPAK Rumah Cerdas

PT PPAK provides a loan facility to Joint Venture PPAK Rumah Cerdas by Deed No. 75 dated March 28, 2016, made by Mala Mukti, S.H., LL.M. notary in Jakarta. The principal amount of overall loan facility is Rp9,000 with period of 36 months and interest of 18% net rate per annum. Loan realized as of December 31, 2018 amounted to Rp3,246.

In 2019, PT PPAK has received settlement from Joint Venture PPAK Rumah Cerdas amounted to Rp3,246.

The movements in allowance for impairment losses of other long term investment are as follows:

Balance at Beginning of The Year
Addition in Current Year
Balance at Ending of The Year

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

21. Aset Tetap

21. Fixed Assets

	2019				
	1 Januari / January 1	Penambahan dari akuisisi Entitas Anak/ Addition from Acquisition of Subsidiaries	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	31 Desember/ December 31
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan:					
Kepemilikan Langsung					
Tanah	668,762	--	30,896	--	699,658
Bangunan	160,139	124,945	79,077	--	364,161
Kendaraan Bermotor	19,800	3,352	--	5,561	17,591
Peralatan Proyek	327,173	198,690	232,533	--	758,396
Peralatan Kantor	23,823	1,074	6,310	--	31,207
Prasarana umum	12,895	--	--	--	12,895
Aset dalam penyelesaian	44,592	--	--	44,592	--
Jumlah	1,257,184	328,061	348,816	50,153	1,883,908
Akumulasi Penyusutan					
Kepemilikan Langsung					
Bangunan	39,281	32,121	11,681	--	83,083
Kendaraan Bermotor	14,673	3,081	--	6,189	11,565
Peralatan Proyek	113,003	70,223	23,055	--	206,281
Peralatan Kantor	18,510	894	559	--	19,963
Prasarana umum	3,673	--	2,547	--	6,220
Jumlah	189,140	106,319	37,842	6,189	327,112
Nilai Tercatat	1,068,044				1,556,796

**Acquisition Cost:
Direct Ownership**

Lands
Buildings
Vehicles
Project Equipments
Office Equipments
Asset in Progress

**Total
Accumulated Depreciation
Direct Ownership**

Buildings
Vehicles
Project Equipments
Office Equipments

**Total
Carrying Value**

	2018			
	1 Januari / January 1	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	31 Desember/ December 31
	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan:				
Kepemilikan Langsung				
Tanah	480,240	139,447	--	668,762
Gedung	101,077	28,576	--	160,139
Kendaraan Bermotor	17,626	9,161	2,115	19,800
Peralatan Proyek	196,929	104,942	8,960	327,173
Peralatan Kantor	30,920	1,918	149	23,823
Prasarana Umum	11,023	4,736	--	12,895
Aset Dalam Penyelesaian	--	193,444	--	44,592
Jumlah	837,815	482,224	11,224	1,257,184
Akumulasi Penyusutan				
Kepemilikan Langsung				
Gedung	18,290	15,725	--	39,281
Kendaraan Bermotor	14,344	4,571	1,894	14,673
Peralatan Proyek	48,008	43,294	93	113,003
Peralatan Kantor	16,053	3,216	18	18,510
Kamera Large Format	--	3,612	--	3,673
Jumlah	96,695	70,418	2,005	189,140
Nilai Tercatat	741,120			1,068,044

**Acquisition Cost:
Direct Ownership**

Lands
Buildings
Vehicles
Project Equipments
Office Equipments
Camera Large Format
Asset in Progress

**Total
Accumulated Depreciation
Direct Ownership**

Buildings
Vehicles
Project Equipments
Office Equipments
Camera Large Format

**Total
Carrying Value**

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Perusahaan

Aset yang dinilai milik Perusahaan berupa Tanah dan Bangunan Gudang dengan total luas LT/LB +/- 576/406,5 m disertai sarana pelengkap yang terletak di Jalan Tekno 1 Kav C 2 I, Kelurahan Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

PT NK

Aset tetap berupa tanah dan bangunan dijadikan jaminan atas perolehan kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bangunan diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp43.469 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Bintang, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Jasindo, dan PT Asuransi Jasa Tania.

Beban penyusutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp32.826 dan Rp21.098 yang dialokasikan ke beban pokok pendapatan serta beban administrasi dan umum.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2019 dan 2018.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The Company

Assets rated by the Company in the form of Land and Warehouse Building with a total area of LT / LB +/- 576 / 406.5 m accompanied by complementary facilities located on Jalan Tekno 1 Kav C 2 I, Pasir Gombang Village, North Cikarang Subdistrict, Bekasi Regency, West Java Province.

PT NK

Fixed asset, such as land and building, are used as collateral for bank loans in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Building and vehicle are insured with of coverage value amounting to Rp43,469 against the risk of fire accident and others to PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Bintang, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Jasindo, and PT Asuransi Jasa Tania.

Depreciation expenses up to December 31, 2019 and December 31 2018 amounted to Rp32.826 and Rp21,098, respectively, which were allocated to cost of revenues and general and administrative expenses.

Based on Management review, there are no events or changes in circumstances indicating impairment of fixed asset, the Management does not provide allowance for impairment of property plant and equipment as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

22. Goodwill**Matoa Kidung Samudera ("PT MKS")**

PT PPAK mengakuisisi PT MKS tanggal 23 Januari 2019. Nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi PT MKS pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Imbalan Kas yang Dibayar	18,750
Dikurangi Saldo Kas yang Diperoleh:	
Kas	(3,149)
Arus Kas Keluar - Aktivitas Investasi	15,601
Harga Perolehan	
Kas yang Dibayar	18,750
Imbalan Kontinjensi	--
Jumlah Imbalan yang Dialihkan	18,750
Nilai Wajar Kepemilikan PT MKS	
Sebelum Kombinasi Bisnis	--
Jumlah Imbalan	18,750

22. Goodwill**Matoa Kidung Samudera ("PT MKS")**

PT PPA Kapital acquired PT MKS on January 23, 2019. The fair value of the assets and liabilities identified by PT MKS at the date of acquisition is as follows:

Cash Benefit Paid
Less Cash Balances Obtained
Cash
Cash Outflow - Investing Activities
Acquisition Cost
Cash Paid
Contingent Benefit
Amount of Rewards Transferred
Fair Value of PT MKS Ownership
Before Combination Business
Total Benefit

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Nilai Wajar diakui pada akuisisi/ <i>Fair Value</i> <i>recognized on acquisition</i>	
Kas dan Setara Kas	3,149	Cash & Cash Equivalent
Aset Lancar Lainnya	7,722	Other Current Assets
Aset Tetap	53,755	Property, Plant & Equipment
Liabilitas Jangka Pendek	(8,635)	Short-term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	(42,278)	Long-term Liabilities
Jumlah Aset Teridentifikasi, Bersih	13,713	Total Identifiable Assets, Net
Kepentingan Non-Pengendali	(5,485)	Non-Controlling Interest
<i>Goodwill</i>	10,522	<i>Goodwill</i>
Jumlah Imbalan	18,750	Total Benefit

Aset neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 didasarkan pada penilaian terhadap nilai wajarnya.

Net assets recognized in the December 31, 2019 consolidated financial statements are based on Fair Value assessment as of December 31, 2019.

PT Mtoa Kidung Bahtera ("PT MKB")

PT PPAK mengakuisisi PT MKB tanggal 23 Januari 2019. Nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi PT MKB pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

PT Mtoa Kidung Bahtera ("PT MKB")

PT PPAK acquired PT MKB on 23 January 2019. The fair value of the assets and liabilities identified by PT MKB at the date of acquisition is as follows:

Imbalan Kas yang Dibayar	18,750	Cash Benefit Paid
Dikurangi Saldo Kas yang Diperoleh:		Less Cash Balances Obtained
Kas	(455)	Cash
Arus Kas Keluar - Aktivitas Investasi	18,295	Cash Outflow - Investing Activities
Harga Perolehan		Acquisition Cost
Kas yang Dibayar	18,750	Cash Paid
Imbalan Kontinjensi	--	Contingent Benefit
Jumlah Imbalan yang Dialihkan	18,750	Amount of Rewards Transferred
Nilai Wajar Kepemilikan MKB		Fair Value of PT MKB Ownership
Sebelum Kombinasi Bisnis	--	Before Business Combination
Jumlah Imbalan	18,750	Total Benefit

	Nilai Wajar diakui pada akuisisi/ <i>Fair Value</i> <i>recognized on acquisition</i>	
Kas dan Setara Kas	455	Cash & Cash Equivalent
Aset Lancar Lainnya	10,207	Other Current Assets
Aset Tetap	53,694	Property, Plant & Equipment
Aset tidak lancar lainnya	--	Other Non Current Assets
Liabilitas Jangka Pendek	(12,063)	Short-term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	(26,250)	Long-term Liabilities
Jumlah Aset Teridentifikasi, Bersih	26,043	Total Identifiable Assets, Net
Kepentingan Non-Pengendali	(10,417)	Non-Controlling Interest
<i>Goodwill</i>	3,124	<i>Goodwill</i>
Jumlah Imbalan	18,750	Total Benefit

Aset neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 didasarkan pada penilaian terhadap nilai wajarnya.

Net assets recognized in the December 31, 2019 consolidated financial statements are based on Fair Value assessment as of December 31, 2019.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Rejeki Inti Logam Jaya ("PT RILJ")

PT PPA Kapital mengakuisisi PT RILJ tanggal 22 Maret 2019. Nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi PT RILJ pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Imbalan Kas yang Dibayar	6,000
Dikurangi Saldo Kas yang Diperoleh:	--
Kas	(5,166)
Arus Kas Keluar - Aktivitas Investasi	834

Harga Perolehan	
Kas yang Dibayar	6,000
Imbalan Kontinjensi	--
Jumlah Imbalan yang Dialihkan	6,000
Nilai Wajar Kepemilikan RILJ Sebelum Kombinasi Bisnis	--
Jumlah Imbalan	6,000

**Nilai Wajar diakui pada
akuisisi/Fair Value
recognized on acquisition**

Kas dan Setara Kas	5,166
Aset Lancar Lainnya	6,432
Aset Tetap	183,913
Aset tidak lancar lainnya	8,944
Liabilitas Jangka Pendek	(579,772)
Liabilitas Jangka Panjang	(101,509)
Jumlah Aset Teridentifikasi, Bersih	(476,826)
Kepentingan Non-Pengendali	126,216
Goodwill	356,610
Jumlah Imbalan	6,000

Aset neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 didasarkan pada penilaian terhadap nilai wajarnya

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Rejeki Inti Logam Jaya ("PT RILJ")

PT PPA Kapital acquired PT RILJ on March 22, 2019. The fair value of PT RILJ's identified assets and liabilities at the date of acquisition is as follows:

Cash Benefit Paid
Less Cash Balances Obtained
Cash
Cash Outflow - Investing Activities

Acquisition Cost
Cash Paid
Contingent Benefit
Amount of Rewards Transferred
Fair Value of PT RILJ Ownership Before Business Combination
Total Benefit

Cash & Cash Equivalent
Other Current Assets
Property, Plant & Equipment
Other Non Current Assets
Short-term Liabilities
Long-term Liabilities
Total Identifiable Assets, Net
Non-Controlling Interest
Goodwill
Total Benefit

Net assets recognized in the December 31, 2019 consolidated financial statements are based on Fair Value assessment as of December 31, 2019.

23. Cessie Piutang

	2019 Rp	2018*) Rp
<u>Cessie Piutang Jangka Pendek</u>		
Cessie Piutang PT Batam Islands Marina ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	243,000	243,000
Cessie Piutang KPR ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	41,535	47,445
Subtotal	284,535	290,445
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(2,436)	(1,843)
Jumlah	282,099	288,602
<u>Cessie Piutang Jangka Panjang</u>		
Cessie Piutang PT Primarindo Asia Infrastructure ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23,958	--
Cessie Piutang PT Ade Textile Industries ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	259,534	--
Jumlah	283,493	--

*Reklasifikasi (Catatan 42)

23. Cessie Receivable

<u>Short-term Cessie Receivables</u>
Cessie Receivable of PT Batam Islands Marina ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Cessie Receivable of KPR (Mortgage) ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Subtotal
Less: Allowance for Impairment Losses
Total
<u>Long-Term Cessie Receivable</u>
Cessie Receivable of PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cessie PT Ade Textile Industries ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total

* Reclassified (Note 42)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**Cessie Piutang KPR Ex Debitur PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk**

- Berdasarkan Akta Jual Beli Piutang No.72 tanggal 21 Desember 2018 dan No.104 tanggal 28 Desember 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN") menjual piutang nasabah Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) kepada Perusahaan, dengan harga jual masing-masing sebesar Rp31.143 dan Rp16.302.
- Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Piutang Nomor 105 tanggal 28 Desember 2018 di depan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., dinyatakan bahwa dalam penyelesaian transaksi aset yang dialihkan tersebut, mekanisme yang dilakukan yaitu:
 - Melakukan eksekusi aset yang merupakan jaminan atas piutang sesuai dengan Perjanjian Kredit;
 - Menjual aset yang dijaminan tersebut kepada pihak ketiga;
 - Menerima pelunasan dari Debitur.

Pengembalian atas transaksi aset yang dijaminan ini diperjanjikan sebesar 120% dari total harga pembelian aset yang dialihkan tersebut secara kolektif sesuai dengan Akta Jual Beli. Sampai dengan posisi 31 Desember 2019 pengembalian pokok sebesar Rp6.106 dengan hasil koleksi Rp1.751.

**Cessie Piutang PT BIM Ex Debitur PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Berdasarkan Akta Jual Beli Piutang No 115 tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan membeli piutang BTN kepada PT Batam Island Marina (PT BIM). Jumlah piutang yang dialihkan sebesar Rp300.669, dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman sebesar Rp243.000
- Tunggakan Bunga dari bunga berjalan sebesar Rp56.352
- Tunggakan denda dari denda berjalan sebesar Rp 1.317

Berdasarkan Akta Cessie Piutang No. 116 tanggal 31 Desember 2018, BTN dan Perusahaan mengefektifkan pengalihan piutang tersebut beserta seluruh hak-hak yang melekat pada piutang berdasarkan syarat dan kondisi dalam Akta Cessie Bank BTN dan Perusahaan sepakat bahwa jual beli piutang berdasarkan akta jual beli ini dilakukan dengan harga Rp243.000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**Cessie Receivable KPR Ex Debtor PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk**

- Based on the Deed of Sale and Purchase No.72 dated December 21, 2018, and No.104 dated December 28, 2018. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN") sold Mortgage receivables (KPR) to the Company, with selling price amounting to Rp31,143 and Rp16,302.
- Based on the Deed of Debt Management Cooperation Agreement Number 105 dated December 28, 2018 in front of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., stated that in the settlement of the transferred asset transaction, the mechanism carried out is:
 - Carry out assets which are collateral for accounts receivable in accordance with the Credit Agreement;
 - Sell the collateral assets to third parties;
 - Receiving repayments from the Debtor.

The return on the collateralized asset transaction is agreed to be 120% of the total purchase price of the transferred asset collectively in accordance with the Sale and Purchase Deed. As of December 31, 2019, the principal repayment amounted to Rp6,106 with a collection of Rp1,751.

**Cessie Receivables PT BIM Ex Debtor
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Based on the Receivable Sale and Purchase of Receivable Deed No. 115 dated December 31, 2018, The Company purchased BTN receivables from PT Batam Island Marina (PT BIM). The amount of receivables transferred amounted to Rp300,669, with details as follows:

- The loan principal is Rp243,000
- Interest from current period amounting to Rp56,352
- Fines from current period amounting to Rp1,317

Based on the Cessie Receivable Deed No. 116 dated December 31, 2018, BTN and the Company make effective the transfer of the receivables along with all rights attached to the receivables based on the terms and conditions in the Cessie Deed. BTN and the Company agree that the sale and purchase of receivables based on the Sale and Purchase Deed is carried out at Rp243,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kemudian berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelola Piutang No. 117 tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menunjuk BTN sebagai pengelola piutang tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018.

Cessie Piutang PT Primarindo Asia Infrastructure

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan telah mengambil alih piutang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk sebesar USD1,720,046.64. Pada hari yang sama juga ditandatangani Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk yang berisi restrukturisasi hutang atas pengambilalihan piutang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan pembiayaan modal kerja dengan plafond sebesar USD1,279,953.36 dengan tingkat suku bunga yang diberlakukan adalah 6% per tahun (gross).

Cessie Piutang PT Ade Textile Infrastructure

Perusahaan mengambil alih piutang bank mandiri kepada PT Adetex serta seluruh hak bank mandiri berdasarkan perjanjian kredit bank mandiri termasuk jaminan telah dialihkan kepada Perusahaan berdasarkan perjanjian pengalihan piutang (cessie) Nomor 38 dibuat di hadapan Adrian Juani, Notaris di Jakarta tertanggal 20 Desember 2019. Jumlah Keseluruhan pengalihan hutang pokok PT Adetex kepada Perusahaan adalah sejumlah USD18,526,367.

Pada Tanggal 20 Desember 2019 telah ditandatangani Perjanjian Restrukturisasi Hutang Nomor 44 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak S.H., Notaris di Jakarta termasuk penambahan fasilitas modal kerja sejumlah USD3,900,000. Tujuan penambahan fasilitas modal kerja adalah untuk kebutuhan modal kerja perusahaan dan perbaikan / penggantian fasilitas produksi yang rusak. Tingkat suku bunga yang diberlakukan adalah 5% per tahun (gross). Jaminan yang diberikan kepada Perusahaan adalah berupa jaminan tanah bangunan, jaminan fidusia persediaan, piutang dan mesin-mesin serta peralatan lainnya

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Then based on the Deed of Collaboration Management No. 117 dated December 31, 2018, the Company appoints BTN as the manager of the receivables for one year period of starting from December 31, 2018.

Receivable Cessie PT Primarindo Asia Infrastructure

On December 20, 2019, the Company took over the receivables from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk in the amount of USD1,720,046. On the same day the PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk Debt Restructuring Agreement was signed, which contained debt restructuring for the takeover of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk debt and working capital financing with a limit USD1,279,953.36 with an applicable interest rate of 6 % per year (gross).

Cessie Receivable PT Ade Textile Infrastructure

The Company took over the Bank Mandiri receivables from PT Adetex and all the rights of the Bank Mandiri based on the Bank Mandiri Credit Agreement, including collateral, has been transferred to the Company based on the Credit Receipt Agreement (Cessie) Number 38 made before Adrian Juani, Notary in Jakarta, dated December 20, 2019. The total transfer of PT Adetex's principal debt to the Company was USD18,526,367.

On December 20, 2019 a Debt Restructuring Agreement No. 44 was signed in the presence of Lenny Janis Ishak S.H., Notary in Jakarta, including the addition of a working capital facility of USD3,900,000. The purpose of adding working capital facilities is for the company's working capital needs and repair / replacement of damaged production facilities. The interest rate applied is 5% per year (gross). Collateral given to the Company is in the form of collateral for building land, fiduciary guarantee for supplies, accounts receivable and machinery and other equipment.

24. Utang Usaha

24. Accounts Payable

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 39)	140,455	92,420	Related Parties (Notes 39)
Pihak Ketiga	1,789,101	2,031,571	Third Parties
Jumlah	1,929,556	2,123,991	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

25. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

25. Bank and Financial Institution Loans

	2019 Rp	2018*) Rp
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Pendek		
Pihak Berelasi		
<u>Perusahaan</u>		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	939,791	547,130
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	312,447	--
<u>Entitas Anak</u>		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	25,000	110,000
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	100,000	65,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	30,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	145,000	100,000
Jumlah	1,522,238	852,130
Pihak Ketiga		
<u>Perusahaan</u>		
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	313,328	344,822
Shinhan Bank Indonesia	93,391	82,394
PT Bank Mega Tbk	521,584	334,028
PT Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	122,398	--
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	25,071	30,000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	40,093	--
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	--	128,000
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	110,000	120,000
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	7,489	35,258
PT Bank Pan Indonesia Tbk	35,000	20,000
PT Bank QNB Indonesia Tbk	25,000	--
PT Bank DBS Indonesia Tbk	4,366	--
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	--	34,197
Jumlah	1,297,720	1,128,699
Jumlah Pinjaman Jangka Pendek	2,819,958	1,980,829
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun		
Pihak Berelasi		
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	36,293
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	37,420
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	9,842
Jumlah	--	83,555
Pihak Ketiga		
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	17,044	17,969
Jumlah	17,044	17,969
Jumlah	17,044	101,524
Pinjaman Bank Jangka Panjang dan Non Bank Jangka Panjang		
Pihak Berelasi		
<u>Perusahaan</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	64,743	--
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	83,192	83,192
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	47,394	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60,461	7,559
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	625,690	99,611
Jumlah	881,480	190,362
Pihak Ketiga		
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Pembangunan Daerah Jateng	--	33,513
Medium Term Notes	--	--
Jumlah	--	33,513
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang	881,480	325,399

Short Term Bank and Financial Institution Loans

Related Parties	
<u>The Company</u>	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
<u>Subsidiaries</u>	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Total	
Third Parties	
<u>The Company</u>	
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	
Shinhan Bank Indonesia	
PT Bank Mega Tbk	
PT Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	
<u>Subsidiaries</u>	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	
PT QNB Indonesia Tbk	
PT Bank DBS Indonesia Tbk	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
Total	
Total Short Term Loans	

**Current Maturities of
Long Term Loans**

Related Parties	
<u>Subsidiaries</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Total	
Third Party	
<u>Subsidiaries</u>	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
Total	

Long Terms Bank and Financial Institution Loans

Related Parties	
<u>The Company</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
<u>Subsidiaries</u>	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Total	
Third Parties	
<u>Subsidiaries</u>	
PT Bank Pembangunan Daerah Jateng	
Medium Term Notes	
Total	
Total Long Term Loans	

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**1) Shinhan Bank Indonesia
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian No.38 tanggal 27 Desember 2017 dihadapan notaris Glenna Martin, S.H., MKn, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Shinhan Bank Indonesia. Pagu pinjaman tersebut sebesar Rp100.000. Pinjaman tersebut adalah fasilitas pinjaman yang bersifat revolving. Tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah 8.75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018.

Kemudian pada tanggal 12 Desember 2018 dengan No.227/PPWK-1/XII/2018 dilakukan perjanjian perpanjangan waktu kredit oleh Perusahaan dengan Shinhan Bank yang dimana Jangka waktu Fasilitas pinjaman sampai dengan 27 Desember 2019.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.268/PPWK/XII/2019 antara PT PPA dan PT Bank Shinhan di hadapan notaris Glenna Martin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Bank Shinhan telah setuju untuk memperpanjang jangka waktu Fasilitas Kredit dari yang semula jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2019, untuk selanjutnya diperpanjang selama 12 bulan sampai dengan tanggal 27 Desember 2020, sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Kredit dari Bank dengan No.480/BSI-LAD/EXT/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019. Atas perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit ini, Debitur wajib membayar kepada Bank dengan Suku Bunga 8,75 % tahun, Biaya Provisi 0,25% per tahun dan biaya Administrasi Rp20.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp82.394. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp38.441. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar Rp27.444. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp93.391.

**2) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian kredit No.23 tanggal 28 September 2017 dihadapan Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M.Com. Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank China Construction Bank Indonesia dengan *Plafond* pinjaman tersebut sebesar Rp400.000. Tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah 8,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dari 28 September 2017 sampai 28 September 2018.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**1) Shinhan Bank Indonesia
The Company**

Based on Agreement No.38 dated December 27, 2017 made in presence of notary Glenna Martin, S.H., MKn., the Company signed a credit agreement with Shinhan Bank Indonesia. Maximum limit amounting to Rp100,000. The loan is a revolving loan facility. The loan interest rate is 8.75% per annum with a loan term of 12 months and is due on December 28, 2018.

Then on December 12, 2018 with No.227 / PPWK-1 / XII / 2018 an agreement to extend the credit time by the Company with Shinhan Bank which is the term of the loan facility up to December 27, 2019.

Based on credit agreement No. 268/PPWK/XII/2019 between PT PPA and PT Bank Shinhan in front of notary Glenna Martin, law degree, Magister Kenotariatan, Shinhan Bank has agreed to extend the term of the credit facility from the original due on 27 December 2019, hereinafter extended for 12 (twelve) months until December 27, 2020, as it turns out in a letter of credit from the Bank with No. 480/BSI-LAD/EXT/XII/2019 dated December 17, 2019. For the extension of the term of this credit facility, the debtor shall pay the Bank with interest rate 8.75% year, provision fee 0.25% per year and administration fee Rp20.

The beginning balance of the year 2019 amounting to Rp82,394. Total drawdown of loans in 2019 amounting to Rp38,441. Loan Payment in the current year amounting to Rp27,444. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp93,391.

**2) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
The Company**

Based on the credit agreement No.23 dated September 28, 2017 before the Notary Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M.Com. The Company signed a credit agreement with PT Bank China Construction Bank Indonesia with a loan limit of Rp400,000. The loan interest rate is 8.75% per year with a loan period of 12 months from September 28, 2017 to September 28, 2018.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2018, dilakukan kembali Perubahan kedua atas Perjanjian Kredit yang meliputi perubahan jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 28 September 2019, dengan Tingkat suku bunga sebesar 9,25% dan Biaya provisi sebesar 0.25% dari jumlah *plafond* kredit serta mengubah persyaratan jaminan untuk memberikan *underlying* pinjaman kepada debitur investasi debitur menjadi CCR Minimum 100%.

Berdasarkan Akta Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit No. 018/APK/I/2020 Tanggal 20 Januari 2020 Perusahaan dengan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dengan memberikan Fasilitas Kredit berupa Demand Loan sebesar Rp400.000. Jangka waktu fasilitas Demand Loan diperpanjang selama 12 bulan sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan 28 September 2020. Tujuan penggunaan untuk modal kerja terhadap pembiayaan debitur investasi debitur. Tingkat bunga yang dikenakan 9.25% per tahun floating rate, biaya provisi yang dikenakan 0.25% per tahun, biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp40 dan denda keterlambatan sebesar 2% per tahun.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp344.822. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp293.322. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar Rp324.816. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 313.328.

3) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Kredit Swadana No.0001 /PK-Swad/Jkh.Ut/CSMU/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dari PT Bank Tabungan Negara Tbk dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp300.000, tingkat suku bunga 7,65% selama 12 bulan sampai 30 Agustus 2018.

Kemudian tanggal 30 Agustus 2018, dilakukan perjanjian Kredit Swadana antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Perusahaan dengan No.0008/PK-SWAD/JKH.UT/ CSMU/VIII/2018 atas perubahan jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 30 Agustus 2019.

Jaminan atas fasilitas kredit ini berupa deposito yang dijaminkan pada dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk senilai Rp301.308 (Catatan 14).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Then on October 15, 2018, the second Amendment to the Credit Agreement will be carried out, including the change in the loan facility until September 28, 2019, with an interest rate of 9.25% and a provision fee of 0.25% of the credit limit and amend the guarantee requirements to provide underlying loan to investment debtor becomes Minimum CCR 100%.

Pursuant to the Third Amendment Act of the Credit agreement No. 018/APK/I/2020 Date 20 January 2020 The Company with PT Bank China Construction Bank Indonesia TBK by providing credit facility in the form of Demand Loan of Rp 400,000. The Demand Loan facility is extended for 12 months since the September 28, 2019 to September 28, 2020. The purpose of use for working capital to fund debtor's investment debtor. The interest rate imposed is 9.25% per year floating rate, provision fee charged 0.25% per annum, administration fee is charged at Rp 40, and a penalty of delay of 2% per annum.

The beginning balance of the year 2019 amounting to Rp344,822. Total drawdown of loans in 2019 amounting to Rp293,322. Loan Payment in the current year amounting to Rp324,816. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp313,328.

3) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Company

Based on the Swadana Credit Agreement No.0001/PK-Swad/Jkh.Ut/CSMU/VIII/2017 dated August 30, 2017. The company signed a credit agreement from PT Bank Tabungan Negara Tbk. With a maximum loan limit of Rp300,000, the interest rate is 7.65% for 12 months until August 30, 2018.

On August 30, 2018, a Swadana Credit agreement was entered into between PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and the Company with No.0008 / PK-SWAD/JKH.UT/CSMU/VIII/2018 for changes to the loan facility tenure up to August 30, 2019.

Guarantee for this credit facility in the form of deposits pledged as collateral to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Amounted to Rp301,308 (Note 14).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit No.282/S/JKH.UT/BCSU/XII/2018 dan No.283/S/JKH.UT/BCSU/XII/2018 untuk fasilitas Kredit Modal Kerja dengan plafon masing-masing Rp60.000 dan Rp19.000 tingkat suku bunga 9,75% dengan jangka waktu 12 bulan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.0018/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU.L/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp390.000 dengan tingkat suku bunga 8,70% selama 12 bulan sampai dengan 30 Agustus 2020.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 Tanggal 28 Februari 2019 Perusahaan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan memberikan Kredit Modal Kerja sebesar Rp226.000. Tujuan Kredit Modal Kerja untuk Modal Kerja Pendanaan Perusahaan kepada end user (*Refinancing/Reimbursement*). Kredit Modal Kerja bersifat *non revolving*. Jangka waktu kredit selama 36 bulan dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2019. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 9.75 % per tahun, biaya provisi yang dikenakan sebesar 0,1%, biaya administrasi yang dikenakan sebesar 0.05%, dan denda keterlambatan sebesar 2%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 34 Tanggal 28 Februari 2019 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan memberikan Kredit Modal Kerja sebesar Rp378.000. Tujuan Kredit Modal Kerja untuk Modal Kerja Pendanaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada PT Lintas Samudera Sejahtera untuk pembelian Kapal Floating Storage Unit (FSU) yang terdiri dari pembiayaan Tranche A sebesar Rp300.000 dan Tranche B sebesar Rp78.000 untuk konversi kapal MV Aman Hakata menjadi Kapal FSU. Kredit Modal Kerja bersifat *non revolving*. Jangka waktu kredit selama 36 bulan dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2019. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 10% per tahun, biaya provisi yang dikenakan sebesar 0,10%, biaya administrasi yang dikenakan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen), dan denda keterlambatan sebesar 2%.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On December 28, 2018, the Company entered into a credit agreement No.282 / S / JKH.UT / BCSU / XII / 2018 and No.283 / S / JKH.UT / BCSU / XII / 2018 for Working Capital Credit facilities with a ceiling of Rp60,000 and Rp19,000, respectively, with an interest rate of 9.75% with a period of 12 months.

Based on Credit Agreement No.0018 / PK-SWAD / JKH.UT / BCSU.L / VIII / 2019 dated August 30, 2019. The Company entered into a credit agreement with PT Bank Tabungan Negara Tbk. With a maximum loan limit of Rp390,000 with an interest rate of 8.70% for the 12 months to August 30, 2020.

Based on the deed of Working Capital Credit Agreement No. 33 dated 28 February 2019 the Company with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by providing working capital credit of Rp226,000. The purpose of working capital credit for funding capital of the Company to end user (*Refinancing/Reimbursement*). Working capital Credit is *non revolving*. The term of credit is for 36 months and the due date on February 28, 2019. The interest rate charged is 9.75% per annum, provision fee charged at 0.10%, administration fee charged 0.05% and a late penalty of 2%.

Based on the deed of Working capital Credit agreement No. 34 dated 28 February 2019 PT Company of Asset Management (Persero) with PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK by providing working capital credit of Rp378,000. The purpose of working capital credit for the working capital of PT The Asset Management company (Persero) to PT Lintas Samudera Sejahtera for the purchase of Floating Storage Unit (FSU) ship consisting of Rp300,000 and Tranche B financing of Rp78,000 for conversion of MV Aman Hakata ship to FSU. Working capital Credit is *non revolving*. The term of credit is for 36 months and the due date on February 28, 2019. The interest rate is charged 10% per annum, provision fee is charged at 0.1%, administration fee is charged at 0.05%, and a delay fine of 2%.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp547.130. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp1.578.222. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar Rp1.185.561 Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp939.791.

4) PT Bank Pembangunan Daerah Banten

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian No.14 tanggal 21 Juni 2017, dihadapan Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., MKn., Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dengan total *plafond* Rp50.000 dengan Tingkat suku bunga dari pinjaman tersebut adalah 9% per tahun selama 12 bulan

Pada tanggal 6 Juni 2018 berdasarkan perpanjangan sementara perjanjian Kredit No. 010/2018 menyatakan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman kredit selama 3 bulan sehingga jatuh tempo pada tanggal 21 September 2018.

Kemudian pada tanggal 21 September 2018 dilakukan kembali addendum II No.14 atas perubahan jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 21 Juni 2019 dan perubahan tingkat suku bunga sebesar 9,25% per tahun kemudian biaya administrasi sebesar 0,30% dan biaya provisi sebesar 0,25% dari *plafond* pinjaman.

Berdasarkan Akta *Addendum III* Perjanjian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dengan Perusahaan No. 76 Tanggal 28 Juni 2019 perihal perubahan isi pada pasal 1, pasal 4, pasal 5. Pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Bank memberikan pinjaman dengan jumlah *plafond* tidak melebihi Rp25.000, jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan 21 Juni 2020. Biaya administrasi yang dikenakan sebesar 0,3 % persen dari *plafond* pinjaman yang dibayarkan sekaligus diawal dan biaya provisi yang dikenakan sebesar 0,35% persen per tahun dari *plafond* fasilitas kredit.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp30.000. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp90.071. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar Rp95.000. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp25.071.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The beginning balance of the year 2019 amounting to Rp547,130. Total drawdown of loans in 2019 amounting to Rp1,578,222. Loan Payment in the current year amounting to Rp1,185,561 Balance at December 31, 2019 amounting to Rp939,791.

4) PT Bank Pembangunan Daerah Banten

The Company

Based on Agreement No. 14 dated June 21, 2017, before Notary Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, The Company signed a Credit Agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk with a total ceiling of Rp50,000 with an interest rate of the loan is 9% per year for 12 months.

On June 6, 2018 based on the temporary extension of the Credit No. agreement. 010/2018 states the extension of the credit loan facility for 3 months so that it will mature on September 21, 2018.

Then on September 21, 2018, Addendum II 14 of the revision of the loan facility period up to June 21, 2019 and changes in interest rates of 9.25% per annum then administration fees of 0.30% and provision fees of 0.25% of the loan *plafond*.

Based on deed Addendum III Credit Agreement PT Bank Pembangunan Regional Banten TBK with The Company No. 76 dated 28 June 2019 regarding the change of contents in article 1, article 4, article 5. Article 6, article 7, and article 8. Bank provides loans with the amount of ceiling not exceeding Rp25,000, the term of the loan given is 12 months from 21 June 2019 until 21 June 2020. The administration fee is 0.3% percent of the loan amount paid at the earliest and the provision fee is charged at 0.35% percent per year from the credit facility *plafond*.

The beginning balance of the year 2019 amounting to Rp30,000. Total drawdown of loans in 2019 amounting to Rp90,071. Loan Payment in the current year amounting to Rp95,000. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp25,071.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PPAF

Berdasarkan *Addendum I* Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2017 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Perusahaan telah mendapatkan fasilitas Kredit Pinjaman maksimum sebesar Rp95.000, yang terdiri dari fasilitas KMK Pembiayaan sebesar Rp50.000 dengan bentuk Kredit Angsuran Berjangka dan fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp45.000. dengan bentuk Kredit Berjangka. Sifat fasilitas KMK Pembiayaan adalah *non-revolving*, sedangkan fasilitas Kredit Rekening Koran bersifat revolving. Jangka waktu kredit KMK Pembiayaan maksimal adalah 36 bulan per batch.

Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan piutang bersih senilai minimal 110% dari pokok pinjaman. Perusahaan diharuskan untuk mematuhi batasan kondisi keuangan dengan mempertahankan *Debt Equity Ratio* maksimal 8 kali. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo awal tahun 2019 untuk fasilitas kredit rekening koran sebesar Rp35.258. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp128.880. Total pembayaran selama tahun berjalan sebesar Rp156.650. Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 atas fasilitas rekening koran sebesar Rp7.489.

**5) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian kredit Modal Kerja Ekspor No.39 tanggal 28 November 2018 dihadapan notaris Notaris Veronica Nataadmadja, S.H. M.Corp. M.Com. Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan *plafond* pinjaman tersebut sebesar Rp500.000. Tingkat suku Bunga adalah Tenor sampai dengan 3 bulan *lending rate* yang diberikan diatas WAIR yang dihasilkan dari aset dalam bentuk penempatan pada bank, suku bunga sampai dengan per 31 Desember 2018 adalah sebesar 8.7% kemudian tenor sampai dengan 1 tahun sebesar 9.5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dari 28 November 2018 sampai 27 November 2019.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1/ADDPK/01/2020 dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Perusahaan telah disepakati bahwa fasilitas yang diberikan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT PPAF

Based on *Addendum I* of the Credit Agreement dated May 24, 2017 Number 13 made before the Notary Dewi Tenty Septi Artiany, SH, MH, M.Kn., the Company has obtained a maximum Credit Loan facility of Rp95,000, which consists of the KMK Financing facility in the amount of Rp50,000, in the form of Term Installment Loans and a Current Account Credit facility in the amount of Rp45,000, in the form of a Term Credit. The nature of the KMK Financing facility is *non-revolving*, while the Current Account Credit facility is revolving. The maximum term of KMK Financing is 36 months per batch.

The Company submits collateral to banks in the form of binding fiduciary collateral for net receivables receivable worth at least 110% of the loan principal. The company is required to comply with financial constraints by maintaining a maximum *Debt Equity Ratio* of 8 times. As of December 31, 2019 and 2018, the Company has complied with the loan terms and conditions determined by the bank.

The beginning balance of 2019 for the current account credit facility is Rp35,258. Total disbursements during the year were Rp128,880. Total payments during the year were Rp156,650. As of December 31, 2019, the balance of the current account facility was Rp7,489.

**5) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
The Company**

Based on the Agreement on Export Working Capital No.39 dated November 28, 2018 before Notary Veronica Nataadmadja, S.H. M.Corp. M.Com. The Company entered into a credit agreement with the Indonesian Export Financing Agency with a loan limit of Rp500,000. The interest rate is a tenor of up to 3 months lending rate given above WAIR generated from assets in the form of bank placements, interest rates up to December 31, 2018 are 8.7% then Tenor up to 1 year is 9.5% per annum with loan period of 12 months from November 28, 2018 to November 27, 2019.

Under the Working Capital Loan agreement No. 1/ADDPK/01/2020 with Indonesian Export Financing Institute and the Company has been agreed that the facilities provided by the

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

oleh Kreditur kepada Debitur diperpanjang untuk jangka waktu selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 28 November 2019 sampai tanggal 28 November 2020 dengan ketentuan *tenor* per Penarikan adalah sesuai dengan underlying dokumen penarikan dan tidak melampaui jangka waktu Fasilitas. Tingkat bunga yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur untuk Fasilitas berlaku ketentuan yaitu Tenor sampai 1 tahun adalah sebesar 9,75 % per tahun dan dapat di review sesuai dengan kebijakan Kreditur yang berlaku dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur. Debitur wajib membayar kepada Kreditur provisi sebesar 0,25% per tahun per penarikan dan maksimum biaya provisi selama jangka waktu Fasilitas 0,25% per tahun dari nilai *Plafond* Fasilitas.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp128.000. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp619.107. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar Rp747.107. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Nihil.

PT NK

Berdasarkan surat persetujuan kredit No. PKB/SP3/10/2019 tanggal 29 Mei 2019, Perusahaan, memperoleh kredit modal kerja dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), antara lain :

- 1) Fasilitas Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor
 - a. Pagu kredit yang diberikan Rp400.000.;
 - b. Tujuan penggunaan untuk proyek-proyek luar negeri ataupun proyek dalam negeri yang terkait/menunjang perdagangan internasional (ekspor);
 - c. Jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan 9 Juni 2020;
 - d. Jaminan berupa :
 - Piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh LPEI minimal 125% dari total pagu kredit (Catatan 5);
 - Tanah dan bangunan diatas SHGB No. 19 yang berlokasi di Jl. Padma No. 6 Kotamadya Denpasar, Bali atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.918 (Catatan 18);
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 352 yang berlokasi di Jl. Ciung Wanara No. 1 Kabupaten Badung, Bali atas nama Perusahaan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp4.862);

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

creditor to the debtor are extended for a period of 12 months from November 28, 2019 until November 28, 2020 with the terms of tenor per withdrawal is in accordance with the underlying withdrawal documents and not exceeding the facility period. The interest rate payable by the debtor to the creditor for the provision of provisions shall be valid, i.e. Tenor up to 1 year is 9.75% per annum and can be reviewed in accordance with the applicable creditors policy with prior notice to the debtor. The debtor shall pay the creditor for the provision of 0.25% per annum per withdrawal and maximum provision fee for the period of 0.25% per annum of the facility's value.

The beginning balance of the year 2019 amounting to Rp 128.000. Total drawdown of loans in 2019 amounting to Rp 619.107. Loan Payment in the current year amounting to Rp747.107. Balance at December 31, 2019 amounting to Nil.

PT NK

Based on the credit agreement letter No. PKB/SP3/10/2019 date May 29, 2019, the Company, obtained working capital credit from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), such as :

- 1) Financing facility of Working Capital Export Credit
 - a. Maximum limit amounting to Rp400,000,
 - b. The purpose of use is for overseas or domestic projects, which related to projects that support international trade (exports);
 - c. The period is for 1 (one) year, starting June 9, 2019 until June 9, 2020;
 - d. Collaterals :
 - Accounts receivable over a contract that financed and/or guaranteed by LPEI minimum 125% of total Maximum limit (Note 5);
 - Land and buildings on SHGB No. 19 located at Jl. Padma No.6 Kotamadya Denpasar, Bali registered under the name of Company tied with mortgage right rating I amounting to Rp1,918 (Note 18);
 - The land and building on SHGB No. 352, located at Jl. Ciung Wanara no.1 Bandung registered under the name of Company tied with mortgage right rating I amounting to Rp4,862,

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 3 dan SHGB No. 4 yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 129-A, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp11.563.);
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 65 dan SHGB No. 75 yang berlokasi di Jl. Majapahit No. 36, Kelurahan Ampenan Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp10.133.
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 356 yang berlokasi di Jl. Parikesit No. 10, Kelurahan Cakranegara Barat, Cakranegara, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp999.000.000 (Catatan 18);
 - Tanah di atas SHGB No. 1347 yang berlokasi di Jl. Cisait, Kelurahan Walantaka, Kragilan, Serang, Banten (Catatan 18).
- 2) Fasilitas Penerbitan dan/atau Pembiayaan LC/SKBDN
- a. Pagu kredit yang diberikan Rp250.000.
 - b. Tujuan penggunaan untuk proyek luar negeri ataupun proyek dalam negeri yang terkait/menunjang perdagangan internasional (ekspor);
 - c. Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 9 Juni 2019 s/d 9 Juni 2020;
 - d. Jaminan : piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh Indonesia Eximbank minimal sebesar 125% dari total plafond kredit.
- 3) Fasilitas Penjaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- a. Pagu kredit yang diberikan Rp200.000
 - b. Tujuan penggunaan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang menunjang kegiatan ekspor;
 - c. Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 9 Juni 2019 sampai dengan 9 Juni 2020;
- Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp110.000. Total pencairan pinjaman periode Januari sampai dengan Desember tahun 2019 sebesar Rp135.000. Total pelunasan pinjaman tahun 2019 sebesar Rp220.000. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp25.000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- The land and building on SHGB No. 3 and SHGB No. 4 located on Jl. Hayam Wuruk No. 129-A Sumerta Kelod Village, East Denpasar, Bali registered under the name of Company tied with mortgage right rating I amounting to Rp11,563);
 - The land and building on SHGB No. 65 and SHGB No. 75 located at Jl. Majapahit No. 36, Ampenan Selatan Village, Mataram, West Nusa Tenggara registered under the name of Company tied with mortgage right rating I amounting to Rp10,133.
 - The land and building on SHGB No. 356, located at Jl. Parikesit No.10, West Cakranegara Village, Cakranegara, West Nusa Tenggara, registered under the name of Company tied with mortgage right rating I amounting to Rp999,000,000 (Note 18);
 - The Land on SHGB No. 1347, located at Jl. Cisait, Walantaka Village, Kragilan, Serang, Banten (Note 18)
- 2) LC/SKBDN Publishing and/or Financing Facilities
- a. Maximum credit limit amounting to Rp250,000,;
 - b. The Purpose of use is for the overseas or domestic projects, which related to projects that support international trade (exports);
 - c. The period is for 1 (one) year starting June 9, 2019 until June 9, 2020;
 - d. Guarantees: accounts receivable for contracts financed and / or guaranteed by Indonesia Eximbank at a minimum of 125% of the total credit limit..
- 3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Guarantee Facilities
- a. Maximum credit limit amounting to Rp200,000,
 - b. The Purpose of use is for infrastructure projects undertaken in both domestic and foreign, which support export activities;
 - c. The period is for 1 (one) year, starting June 9, 2019 until June 9, 2020.
- The balance at the beginning of 2019 is Rp110,000. The total loan disbursement for the period of January to September 2019 is IDR 135,000. The total loan repayment for the year 2019 is Rp220,000. The balance as of December 31, 2019 is IDR 25,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

6) PT Bank Mega Tbk

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.20 tanggal 9 Mei 2018 dihadapan notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mega Tbk. Plafond pinjaman tersebut maksimal sebesar Rp500.000. Tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah 10% per tahun. *fixed* selama 1 tahun, akan ditinjau ulang tiap perpanjangan fasilitas. Biaya provisi sebesar 0,25% dari total fasilitas yang diberikan. Jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 9 Mei 2019.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.121 tanggal 27 Mei 2019 dihadapan notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mega Tbk. Bahwa berdasarkan perjanjian Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank dalam bentuk:

- Fasilitas Demand Loan 1 dalam jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp500.000.
- Fasilitas Demand Loan 2 dalam jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp500.000.

Bahwa Fasilitas DL 1 dan Fasilitas DL 2 tersebut akan jatuh tempo tanggal 9 Juni 2019. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perusahaan dan Bank sepakat dan setuju untuk untuk membuat Perubahan Kelima Perjanjian kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Fasilitas DL 1 tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun berlaku bagi fasilitas pinjaman yang penarikannya dilakukan terhitung sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019. Suku bunga 11% per tahun berlaku bagi fasilitas pinjaman yang penarikannya dilakukan sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal akhir.

Untuk Fasilitas DL 2 yaitu sebesar 11% per tahun dihitung dari jumlah baki debet/outstanding fasilitas pinjaman dengan ketentuan tingkat suku bunga tersebut dapat berubah dan akan ditinjau setiap saat oleh bank.

Berdasarkan perubahan kelima perjanjian kredit PT Bank Mega Tbk dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No. 121 Tanggal 27 Mei 2019 perihal perubahan atau tambahan dalam perjanjian. Bahwa berdasarkan perjanjian, Bank memberikan Fasilitas Demand Loan 1 (Fasilitas DL 1) dan Fasilitas Demand Loan 2 (Fasilitas DL 2) dengan masing-masing jumlah pokok tidak lebih dari Rp 500.000. Untuk

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

6) PT Bank Mega Tbk

The Company

Based on Credit Agreement No.20 dated May 9, 2018 before notary Desman, S.H., M. Hum., M.M The Company signed a credit agreement with PT Bank Mega Tbk. The loan limit is a maximum of Rp500,000. The interest rate of the loan is 10% per annum. *fixed* for 1 year, each facility extension will be reviewed. Provision fees are 0.25% of the total facilities provided. The loan period is 12 months and is due on May 9, 2019.

Based on the Credit Agreement No.121 dated May 27, 2019 before the notary Desman, S.H., M.Hum., M.M The Company signed a Credit Agreement with PT Bank Mega Tbk. That based on the agreement, the Company obtained a loan facility from the Bank in the form of:

- Demand Loan 1 facilities in a principal amount of not more than Rp500,000.
- Demand Loan 2 facility in the principal amount of not more than Rp500,000.

That the DL 1 Facility and the DL 2 Facility will mature on June 9, 2019. In connection with this, the Company and the Bank have agreed and agreed to make Amendments to the Fifth Credit Agreement with the following conditions:

For the DL 1 Facility, an interest rate of 10% per annum applies to loan facilities whose drawdowns are made from May 9, 2019 to June 9, 2019. The interest rate of 11% per annum applies to loan facilities whose drawdowns are made from June 10, 2019 until the end of the day.

For the DL 2 Facility, which is 11% per year, calculated from the number of debit / outstanding loan facilities provided the interest rate is subject to change and will be reviewed at any time by the bank.

Based on the Fifth Amendment of the Credit agreement of PT Bank Mega TBK with PT company Asset Management (Persero) No. 121 dated 27 may 2019 regarding changes or additions to the agreement. That by agreement, the Bank provides facility Demand Loan 1 (Facility DL 1) and Demand Loan 2 (Facility DL 2) with each principal amount not more than Rp 500,000. For a change of time

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

perubahan jangka waktu untuk Fasilitas DL 1 dan Fasilitas DL 2 selama 11 bulan sejak tanggal 9 Juni 2019 hingga tanggal jatuh tempo pada tanggal 9 Mei 2020. Untuk perubahan tingkat suku bunga untuk Fasilitas DL 1 sebesar 10% dan Fasilitas DL 2 sebesar 11%.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Suku Bunga No. 848/CRBS-COSA/19 Tanggal 11 Desember 2019 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan PT Bank Mega (Persero) Tbk menjawab Surat Permohonan Penurunan Suku Bunga Fasilitas oleh Perusahaan No. S-5639/PPA/DKDK/1019. Perubahan suku bunga terdapat di 2 (dua) jenis fasilitas Demand Loan 1 dan Demand Loan 2 dengan masing-masing plafond pinjaman sebesar Rp 500.000 dari tingkat suku bunga sebesar 11% (sebelas persen) menjadi 10,75% dengan penurunan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen). Perubahan suku bunga efektif pada tanggal 12 Desember 2019.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp334.028. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp554.192. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar Rp366.636. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp521.584.

**7) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No.24 tanggal 7 November 2018 berdasarkan surat No. CRO.KP/397/KMK/2018 dihadapan notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank memberikan Fasilitas Kredit dengan memperhatikan ketentuan dan syarat perjanjian dengan limit sebesar Rp500.000. Minimal limit untuk setiap *underlying* Perjanjian Pinjaman antara Debitur dengan nasabah Debitur yang dapat dibiayai Fasilitas KMK Transaksional Bank sebesar Rp20.000. Nominal penarikan tiap batch adalah sesuai *underlying* Perjanjian Pinjaman antara Debitur dengan nasabah Debitur dengan limit per *underlying* Perjanjian Pinjaman minimal sebesar Rp20.000.

Bank memberikan waktu pinjaman selama 48 bulan terhitung dari tanggal 7 November 2018 sampai dengan 6 November 2022. Untuk tingkat suku bunga ditentukan 8,50% selama 12 bulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank. Bank memberikan provisi sebesar 0,25% dari nilai limit yang menjadi Fasilitas Kredit Modal Kerja

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

period for facilities of DL 1 and facilities of DL 2 for 11 months since 9 June 2019 until the due date on 9 May 2020. For the change of interest rate for the DL 1 facility of 10% and the DL 2 facility of 11%.

Based on the notice of interest rate change No. 848/CRBS-COSA/19 dated December 11, 2019 PT the company's asset Management (Persero) with PT Bank Mega (Persero) Tbk replied the application letter of interest rate decrease facility by The Company No. S-5639/PPA/DKDK/1019. The change in interest rate is in 2 (two) types of Demand Loan 1 and Demand Loan 2 with each loan range of Rp 500,000 of interest rate of 11% to 10.75% with a decrease of 0.25%. The interest rate change was effective on 12 December 2019.

The beginning balance of the year 2019 amounting to Rp334,028. Total drawdown of loans in 2019 amounting to Rp554,192. Loan Payment in the current year amounting to Rp 366,636. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp521,584.

**7) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
The Company**

Based on the transactional working Capital Credit Agreement No. 24 dated 7 November 2018 based on letter No. Cro. KP/397/KMK/2018 before notary Desman, S.H., M. Hum., M. M Company signed a credit agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank provides credit facilities with respect to the terms and conditions of the agreement with a limit of Rp500,000. Minimum limit for each *underlying* loan agreement between the debtor and debtor customer who can be financed by the Bank transactional facility amounting to Rp20,000. The Nominal withdrawal per batch is according to the *underlying* loan agreement Between the debtor and debtor's customer with a minimum loan agreement of Rp20,000 per *underlying*.

The Bank provides loan time for 48 months from 7 November 2018 to 6 November 2022. Interest rates are determined to be 8.50% for 12 months and are subject to change at any time in accordance with the Bank's regulations. The Bank provides an provision of 0.25% of the limit value to be a transactional working capital credit facility and the company must pay the

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Transaksional dan perusahaan wajib membayar paling lambat pada saat penandatanganan Perjanjian. Terdapat *Servicing fee* sebesar 0,25% dari limit kredit dan dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian dan biaya Administrasi sebesar Rp50 dibebankan/dipotong saat penandatanganan Perjanjian.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. 76 Tanggal 16 Desember 2019 Perusahaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan memberikan Kredit Modal Kerja Transaksional sebesar Rp 250.000. Tujuan Kredit Modal Kerja untuk pembiayaan *cashflow* perusahaan dalam rangka pengelolaan portofolio pembiayaan (di luar pembiayaan restrukturisasi dan revitalisasi dan dana talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Kredit Modal Kerja Transaksional bersifat revolving. Jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 (lima belas) Desember 2020. Tingkat biaya provisi yang dikenakan sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen) dan denda keterlambatan sebesar 2.00 % (dua koma nol persen).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. 77 Tanggal 16 Desember 2019 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan memberikan Kredit Modal Kerja Transaksional sebesar USD30. Tujuan Kredit Modal Kerja untuk pembiayaan *cashflow* perusahaan dalam rangka pengelolaan portofolio pembiayaan (di luar pembiayaan restrukturisasi dan revitalisasi dan dana talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Kredit Modal Kerja Transaksional bersifat revolving. Jangka waktu kredit selama 12 bulan dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 (lima belas) Desember 2020. Tingkat denda keterlambatan yang dikenakan sebesar 2%.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp536.176. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar Rp158.986. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp377.190.

PT PPAK

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit CRO.KP/084/KMK/2019 No.37 tanggal 27 Maret 2019 dihadapan Notaris Adrian Djuaini, S.H.,.. Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

latest at the time of the agreement signing. There is a *Servicing fee* of 0.25% of the credit limit and payable at the time of agreement signing and the administrative fee of Rp50 is charged/deducted during the signing of the agreement.

Based on the deed of the transactional working capital credit No. 76 of 16 December 2019, PT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Persero), which provides the transactional working capital credit of Rp 250,000. The purpose of working capital credit for the company's cashflow financing in order to manage the financing portfolio (beyond the restructuring and revitalization financing and related party bailouts that use the state Capital Participation Fund (PMN). Transactional working capital Credit is revolving. The loan term is for 12 (twelve) months and the due date on the 15th (fifteenth) of December 2020. The level of provision fee is charged at 0.25% (zero comma two five percent) and a delay penalty of 2.00% (two zero-zero percent commas).

Based on the deed of the transactional working capital credit No. 77 dated 16 December 2019 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Persero), by providing the transactional working capital credit of USD30. The purpose of working capital credit for the company's cashflow financing in order to manage the financing portfolio (beyond the restructuring and revitalization financing and related party bailouts that use the state Capital Participation Fund (PMN). Transactional working capital Credit is revolving. The loan term is for 12 months and the due date on the 15th of December 2020. The fine rate of delay is imposed by 2%.

The beginning balance of the year 2019 amounting to Nil. Total drawdown of loans in 2019 amounting to Rp536,176. Loan Payment in the current year amounting to Rp158,986. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp377.190.

PT PPAK

Based on the Deed of Credit Agreement CRO.KP/084/KMK/2019 No.37 dated March 27, 2019 before Notary Adrian Djuaini, S.H.,.. The company entered into a credit agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the loan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Plafond pinjaman tersebut sebesar Rp147.043.143.262. Tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah 4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dari 27 Maret 2019 sampai 27 Maret 2029.

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit CRO.KP/084/KMK/2019 38 tanggal 27 Maret 2019 dihadapan Notaris Adrian Djuaini, S.H., Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Plafond pinjaman tersebut sebesar Rp210.542. Tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah 2% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dari 27 Maret 2019 sampai 27 Maret 2029.

Terhadap kewajiban bunga, ditangguhkan pembayarannya selama 6 bulan sejak tanggal efektif perjanjian dan bunga yang ditangguhkan dibayar pro rata selama 12 bulan.

PT PPAF

Pada tanggal 29 November 2017, Perusahaan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja I Nomor 154 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dihadapan Notaris M. Kholid Artha, S.H., dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp75.000 dengan tingkat bunga 9,75% sampai dengan 1 tahun pertama, selanjutnya 9,90% dari tahun pertama sampai tahun kedua, selanjutnya 10,00% dari tahun kedua sampai dengan tahun ketiga. Jangka waktu kredit 48 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 29 November 2021. Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan piutang bersih senilai minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank.

Saldo awal tahun 2019 pinjaman jangka panjang sebesar Rp135.905 Total pencairan di tahun berjalan sebesar Rp252.175, total pembayaran pokok di tahun berjalan sebesar Rp149.975. Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp238.105.

PT NK

Berdasarkan Surat No. CBG.CB2/SCD.SPPK.062/2019 tanggal 02 September 2019 dan Surat No. CBG.CB2/SCD.SPPK.058/2019 tanggal 21 Agustus 2019. Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dan Tambahan Limit Fasilitas Non Cash Loan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

ceiling amounting to Rp147,043,143,262. The loan interest rate is 4% per annum with a loan term of 10 years from 27 March 2019 to 27 March 2029.

Based on the Deed of Credit Agreement CRO.KP/084/KMK/2019 No.37 dated March 27, 2019 before Notary Adrian Djuaini, S.H., The company entered into a credit agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the loan ceiling amounting to Rp147,043,143,262. The loan interest rate is 4% per annum with a loan term of 10 years from 27 March 2019 to 27 March 2029.

With respect to interest obligations, payment is deferred for 6 months from the effective date of the agreement and the deferred interest is paid pro rata for 12 months.

PT PPAF

Dated November 29, 2017, the Company signed a Deed of Working Capital Credit Agreement No. 154 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in the presence of Notary M. Kholid Artha, SH, with a maximum loan value of Rp75,000 with an interest rate of 9.75% up to the first year, then 9.90% from the first year to the second year, then 10.00% from the second year to the third year. The credit period is 48 months from the date of signing up to November 29, 2021. The company submits collateral to banks in the form of binding fiduciary guarantees of net receivables totaling at least 110% of the principal amount of the credit facility to the bank.

Initial balance of 2019 long-term loans of Rp.135,905 Total disbursements in the current year amounted to Rp.252,175, total principal payments in the current year amounted to Rp.149,975. The balance as at 31 December 2019 for this loan facility amounted to Rp238,105.

PT NK

Based on the letter No. CBG.CB2/SCD.SPPK.062/2019 date September 02, 2019 and No. CBG.CB2/SCD.SPPK.058/2019 dated on August 21, 2019. The Company, obtained Transactional KMK Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- 1) Fasilitas Kredit Modal Kerja
 - a. Pagu kredit sebesar Rp300.000.
 - b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja untuk mendukung pelaksanaan proyek jasa Konstruksi a/d SPK/Kontrak;
 - c. Jangka Waktu: Sejak penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan 25 Agustus 2022;
 - d. Jaminan :
 - Piutang usaha dan/atau piutang retensi dan/atau piutang ventura bersama dan/atau tagihan bruto kepada pemberi kerja serta stock persediaan barang diikat fiducia
 - Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 414/Cipinang Cempedak, seluas 5.828 m2, terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama Perusahaan (Catatan 18);
 - Dua bidang tanah dan bangunan SHGB No. 1689 dan 1690, seluas 159 m2 dan 100 m2 di Komp. Sudirman Business Center Kav. 1 & 2, Desa Simpang Tiga, Pekanbaru atas nama Perusahaan (Catatan 18).
- 2) Non Cash Loan
 - a. Pagu kredit sebesar Rp1.100.000;
 - b. Jangka Waktu: sejak penandatanganan Perjanjian Kredit s.d. 25 Agustus 2020;
 - c. Jaminan dikaitkan dengan jaminan KMK.

Saldo awal tahun 2019 sebesar Rp30.000. Total pencairan pinjaman periode tahun 2019 sebesar Rp30.000. Total pelunasan pinjaman hingga periode tahun 2019 sebesar Rp30.000. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp30.000.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 105%;
- Rasio Hutang Terhadap modal maksimal 500% kali;

Per 31 Desember 2019, Perusahaan telah mematuhi batasan rasio keuangan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- 1) Working capital credit facility
 - a. Maximum limit amounting to Rp300,000.
 - b. Purpose of use: Additional working capital to support the implementation of construction services projects a / d SPK / Contract;
 - c. Duration: Since the signing of the addendum to the Credit Agreement until August 25, 2022;
 - d. Collateral :
 - Accounts receivable and / or accounts receivable retention and / or receivable from joint venture and / or gross amount due from customers and stock inventory fiduciary bound
 - Land and building SHGB No.414/Cipinang Cempedak, with a land area 5,828 Sqm, located at Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, East Jakarta registered under the name of Company (Notes 18);
 - Two land and buildings SHGB No.1689 and 1690, with a land area 159 Sqm and 100 Sqm, located at Sudirman Bussines Center Kav. 1 & 2, Desa Simpang Tiga, Pekanbaru registered under the name of Company (Note 18).
- 2) Non Cash Loan
 - a. Maximum limit amounting to Rp1,100,000;
 - b. Period: since the signing of credit add until August 25, 2019;
 - c. Collateral is related with KMK revolving collateral.

The initial balance of 2019 is Rp30,000. The total loan disbursement for the year 2019 is Rp30,000. Total repayment of loans up to the year 2019 amounting to Rp30,000. The balance on December 31, 2019 is Rp30,000.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratio as follows:

- Current Ratio minimum 105%;
- Debt to Equity Ratio maximum 500%;

As of December 31, 2019, the Company has complied with the required financial ratio limits.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**8) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk ("Bank BJB")**

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.01 tanggal 6 November 2019 dihadapan Notaris Nenny Yusni Hendriani S.H., perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank BJB dengan plafond kredit Rp100.000 dengan jenis kredit KMK R/C Terbatas. Pinjaman tersebut adalah fasilitas pinjaman yang bersifat *revolving*. Jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit. Tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah 9,25% flat per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.02 tanggal 6 November 2019 dihadapan Notaris Nenny Yusni Hendriani S.H., perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank BJB dengan plafond kredit Rp.100.000 dengan jenis Kredit Modal Kerja Umum. Pinjaman tersebut adalah fasilitas pinjaman yang bersifat *Non Revolving*. Jangka waktu pinjaman adalah 48 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit. Jangka waktu penarikan 12 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Jangka waktu angsuran per penarikan maksimal 36 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit. Tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah 9,25% flat per tahun.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp40.093. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp40.093.

PT NK

Berdasarkan Surat Penawaran Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Nindya Karya (Persero) No. 77/KOM-KKI/2019 tanggal 11 April 2019, Perusahaan mendapatkan pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), sebagai berikut:

- a. Jenis fasilitas kredit yaitu Kredit Modal Kerja Standby Loan sublimit fasilitas non cash loan.
- b. Pagu kredit yang diberikan Rp700.000.
- c. Tujuan :
Modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD/BUMN.
 - Fasilitas Cash Loan maksimum sebesar Rp350.000. yang dapat ditarik untuk pembiayaan proyek sedangkan Fasilitas Non Cash Loan maksimum sebesar Rp350.000.;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**8) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk ("Bank BJB")**

The Company

According to credit agreement No. 01 dated November 6, 2019 before notary Nenny Yusni Hendriani S.H., the company signed a credit agreement with Bank BJB with credit ceiling of Rp100,000 with credit type KMK R/C Limited. The loan is a revolving loan facility. The loan term is 12 months from the signing of the credit agreement. The interest rate of the loan is 9.25% flat per year.

Under credit Agreement No. 02 dated 6 November 2019 before notary Nenny Yusni Hendriani S.H., the company signed a credit agreement with Bank BJB with credit ceiling of Rp100,000 with the type of general working capital credit. The loan is a Non Revolving loan facility. The loan term is 48 months since the signing of the credit agreement. The withdrawal period of 12 months is counted as of the signing date of the credit agreement. Maximum installment period per withdrawal is 36 months from the date of withdrawal of credit facilities. The interest rate of the loan is 9.25% flat per annum.

The beginning balance of the year 2019 amounting to Nil. Total drawdown of loans in 2019 amounting to Rp40,093. Loan Payment in the current year amounting to Nil. Balance at Desember 31, 2019 amounting to Rp40,093.

PT NK

Based on the Letter of Offer for Extension of Credit Facility PT Nindya Karya (Persero) No. 77/KOM-KKI / 2019 dated April 11, 2019, the Company obtained a loan from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk (BJB Bank), as follows :

- a. Type of credit facility is Working capital credit facility Standby Loan and sublimit non cash loan
- b. Maximum credit limit amounting to Rp700,000,
- c. Purposes :
Working capital of construction and procurement services for the project which the funds originate from APBN/APBD/SOE.
 - The maximum of Cash Loan Facility is Rp350,000, which could be drawn for project financing, while the maximum of Non-Cash Loan Facility is Rp350,000,

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Fasilitas kredit Non Cash Loan per sub pagu kredit dapat berubah menjadi fasilitas kredit Cash Loan per sub pagu kredit apabila Fasilitas sub pagu kredit Non Cash Loan tersebut dinyatakan default. Selanjutnya atas seluruh fasilitas akan dilakukan stop booking (tidak dapat dicairkan) sampai dengan fasilitas sub pagu kredit yang default telah dilunasi oleh debitur;
 - Fasilitas Non Cash Loan dapat digunakan sebagai sarana disposisi untuk transaksi seperti SKBDN, L/C, Bank Garansi, Supply Chain Financing (SCF), dan Hedging.
- d. Jangka Waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo kredit sebelumnya 11 April 2019 sampai dengan 11 April 2020.
- e. Jaminan :
Piutang proyek diikat secara fidusia sebesar 125% dari plafon kredit.

Saldo awal tahun 2019 sebesar Rp120.000. Total pencairan pinjaman periode tahun 2019 sebesar Rp195.000. Total pelunasan pinjaman periode tahun 2019 sebesar Rp205.000. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp110.000.

**9) PT Bank Woori Saudara Tbk
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 109 tanggal 28 Februari 2019 dihadapan notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk. Bank memberikan Fasilitas Kredit *General Financing* dalam rangka pembiayaan Modal Kerja dengan memperhatikan ketentuan dan syarat perjanjian dengan plafon tidak lebih dari Rp140.000. tingkat suku bunga ditentukan 9,6% selama 12 bulan.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Nihil. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp413.773. Pembayaran atas pinjaman bank pada tahun berjalan sebesar Rp291.375. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp122.398.

**10) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk
PT PPAF**

Pada tanggal 17 November 2017 Perusahaan menandatangani Perjanjian KUP Modal Kerja No. Akta 38 dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dihadapan Notaris Dini Handanayatie, S.H. dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp75.000. dengan tingkat bunga 11,5% efektif per tahun adjustable rate yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- Sub-Plafon of Non Cash Loan Credit Facility can be turned into sub-plafon Cash Loan Credit Facility if the sub-plafon Non Cash Loan Facility is declared in default. Furthermore, the entire facilities will be stopped booking (could not be drawn) until the default sub-plafon facilities have been paid by the debtor;
 - Non-Cash Loan Facility can be used as a mean of disposition for such transactions, such as SKBDN, L/C, Bank Bond, and Hedging.
- d. Time Period
12 (twelve) months since the previous credit's due date on April 11, 2019 until April 11, 2020.
- e. Collaterals :
Project receivables are tied in fiduciary terms of 125% of the credit ceiling

The initial balance of 2019 is Rp120,000. The total loan disbursement for the year 2019 is Rp195,000. The total loan repayment for the year 2019 is Rp205,000. The balance on December 31, 2019 is Rp110,000,

**9) PT Bank Woori Saudara Tbk
The Company**

According to credit facility agreement No. 109 dated 28 February 2019 before the notary Desman, S.H., M. Hum., M. M Company signed a credit agreement with PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk. Bank providing General credit facilities Financing for working capital financing with respect to the terms and conditions of the agreement with loan limit no more than Rp140,000. Interest rates are determined to be 9.6% for 12 months.

The beginning balance of the year 2019 amounting to nil. Total drawdown of loans in 2019 amounting to Rp413,773. Loan Payment in the current year amounting to Rp291,375. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp122,398.

**10) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk
PT PPAF**

On November 17, 2017 the Company signed the Working Capital KUP Agreement No. Deed 38 with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah before Notary Dini Handanayatie, S.H. with a maximum loan value of Rp75,000 with an effective interest rate of 11,5% per year, an adjustable rate that can change at any time according to bank regulations. The credit

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

ketentuan bank. Jangka waktu kredit 60 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 17 November 2022. Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas daftar piutang yang dijaminakan kolektibilitas lancar minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank.

Saldo pada awal tahun 2019 pinjaman sebesar Rp51.481. Total pencairan di tahun berjalan adalah Nihil. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp4.087. Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp47.394.

11) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**PT PPAF**

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 08 tanggal 13 Juli 2018, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Sewa Pembiayaan (Leasing) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp125.000. yang bersifat non revolving dengan suku bunga kredit sebesar 10,25% per tahun. Jangka waktu kredit adalah 60 bulan dihitung sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023. Atas pinjaman ini Perusahaan memberikan jaminan pengikatan jaminan fidusia atas tagihan lancar senilai 110%.

Saldo awal tahun 2019 pinjaman sebesar Rp17.401. Total pencairan di tahun 2019 sebesar Rp56.464 Total pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp13.404. Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp60.461.

12) Bank Muamalat Indonesia Tbk**PT DMR**

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 14 September 2016 oleh Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn., ditandatangani Perjanjian Pemberian Line Facility Murabahah I antara PT DMR (Entitas Anak) dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan maksimum nominal fasilitas pinjaman sebesar Rp70.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman ini yaitu selama 60 bulan.

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 14 September 2016 oleh Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn., ditandatangani Perjanjian Pemberian Line Facility Murabahah II antara PT DMR (Entitas Anak) dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan maksimum nominal fasilitas pinjaman sebesar Rp5.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman ini yaitu selama 12 bulan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

period is 60 months from the date of signing up to November 17, 2022. The company submits collateral to the bank in the form of binding fiduciary guarantees on the list of receivables guaranteed by a current collectability of at least 110% of the principal amount of the credit facility to the bank.

The balance at the beginning of 2019 was Rp51,481. Total disbursement in the current year is Zero. Payment in the current year amounted to Rp4,087. The balance as of December 31, 2019 was Rp.47,394.

11) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**PT PPAF**

Based on Deed of Agreement No. 08 dated July 13, 2018, the Company obtained a Leasing Working Capital Credit Facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a maximum loan amount of Rp 125,000. which is non-revolving with a credit interest rate of 10.25% per annum. The credit period is 60 months calculated from July 13, 2018 to July 12, 2023. Based on this loan, the Company provides collateral for binding a fiduciary guarantee for a current bill of 110%.

The initial balance in 2019 of the loan is Rp17,401. Total disbursement in 2019 was Rp56,464 Total payments in the current year was Rp13,404. The balance as of December 31, 2019 amounted to Rp60,461.

12) Bank Muamalat Indonesia Tbk**PT DMR**

Based on Deed No. 09 September 14 2016 by Notary Nurhasanah, S.H., M.Kn., the Murabahah I Line Facility Agreement was signed between PT DMR (Subsidiary Entity) and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with a maximum nominal loan facility of Rp.70,000. The term of this loan facility is 60 months.

Based on Deed No. 10 dated 14 September 2016 by Notary Nurhasanah, S.H., M.Kn., the Murabahah II Line Facility Agreement was signed between PT DMR (Subsidiary Entity) and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with a maximum nominal loan facility of Rp 5,000. The term of this loan facility is 12 months.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Atas seluruh fasilitas pinjaman tersebut, PT DMR (Entitas Anak) menyerahkan jaminan berupa:

- Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 (Pengganti)/Kebun lado, seluas 100.000 (nilai Penuh) m2.
- Fidusia atas Piutang dengan nilai fidusia sebesar Rp75.000.
- Semua perlengkapan yang terdapat diatas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 (Pengganti)/Kebun Lado dengan nilai fidusia sebesar Rp93.661. milik PT DMR (Entitas Anak)
- Pemberian Corporate Guarantee dari Entitas Induk

Saldo awal tahun 2019 pinjaman sebesar Rp52.166. Total pencairan di tahun 2019 sebesar Nihil. Total pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp35.122. Saldo pinjaman Bank pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.044.

13) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT NK

- 1) Berdasarkan Surat No. BIN/2.3/0003 tanggal 10 Januari 2019, Perusahaan mendapatkan kredit modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk perihal penambahan fasilitas kredit kerja transaksional.

Jaminan berupa:

- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Brigjend Sudiarto No. 496 Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Semarang, Jateng di atas SHGB No. 2 dan SHGB No. 111 atas nama Perusahaan.
- Tanah/bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Tengah No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, kotamadya Surabaya, Jawa Timur dengan SHGB No. 721 dan SHGB No. 725 atas nama Perusahaan
- Tanah/bangunan di Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung dengan SHGB No. 05 atas nama Perusahaan
- Tanah di Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara dengan SHGB No. 546 atas nama Perusahaan
- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Raya Trosobo KM 25 Ds. Sidorejo, Krian, Sidoarjo, Jatim di atas SHGB No. 2 atas nama Perusahaan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

For all these loan facilities, PT DMR (Subsidiary) submits collateral in the form of:

- A plot of land for a Right to Building Certificate No. 01 (Substitute) / Lado garden, 100,000 area (full amount) m2.
- Fiduciary for accounts receivable with a fiduciary value of Rp. 75,000.
- All equipment contained in the land for Land Use Certificate Number 01 (Substitute) / Lado Garden with a fiduciary value of Rp93,661. owned by PT DMR (Subsidiary)
- Provision of Corporate Guarantee from the Parent Entity

The initial balance in 2019 of the loan is Rp52,166. Total disbursement in 2019 is Nil. Total payments in the current year was Rp35,122. The balance as of December 31, 2019 amounted to Rp17,044.

13) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT NK

- 1) Based on Letter No. BIN/2.3/0003 dated January 10, 2019, the Company obtained a working capital loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk regarding the addition of a transactional work credit facility.

Collaterals:

- Land/office buildings and warehouse on Jl. Pedurungan No. 496 Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Semarang, Central Java on SHGB No. 2 and SHGB No. 111 registered under the name of the Company
- Land/residential house on Jl. Tenggilis No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kab. Surabaya, East Java with SHGB No. 721 and SHGB No. 725 registered under the name of the Company
- Land/building on Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung with SHGB No. 05 registered under the name of the Company
- Land in Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra with SHGB No. 546 registered under the name of the Company
- Land/office building and warehouse on Jl. Raya Trosobo KM 25 Ds. Krian, Sidorejo, Sidoarjo, East Java, on SHGB No. 2 registered under the name of the Company

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Tanah/bangunan rumah tinggal serta gudang terletak di Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, Sul-Sel di atas SHGB No. 20005/Manuruki (d/h 4197/Mangasa) atas nama Perusahaan
- Tanah/bangunan rumah tinggal di Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 798/Gurabesi (d/h No. 508/Gurabesi) atas nama Perusahaan
- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 599 atas nama Perusahaan
- Tanah/bangunan gedung kantor pusat di Jl. Letjend. Haryono MT Kav.22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur di atas SHGB No.36 atas nama Perusahaan.

Pagu Kredit KMK Transaksional

a. Pagu kredit sebesar Rp375.000.

b. Jangka Waktu:

- Pagu kredit: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas yaitu sejak tanggal 21 Januari 2019 s/d 20 Januari 2020. Sesuai dengan surat No. BIN/2.3/003 tanggal 10 Januari 2019, fasilitas pinjaman telah diperpanjang sampai 20 Januari 2020.
- Realisasi Kredit: Maksimal sesuai dengan jangka waktu proyek dalam kontrak.

Pagu Kredit KMK Revolving

a. Pagu kredit sebesar Rp50.000.

- b. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 Januari 2019 s/d 20 Januari 2020. Sesuai dengan surat No. BIN/2.3/003 tanggal 10 Januari 2019, fasilitas pinjaman diperpanjang sampai 20 Januari 2020.
- c. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja untuk keperluan operasional perusahaan.

Non Cash Loan

a. Pagu kredit sebesar Rp2.675.000

- b. Jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal 21 Januari 2019 s/d 20 Januari 2020. Sesuai dengan surat No. BIN/2.3/003 tanggal 10 Januari 2019, fasilitas pinjaman diperpanjang sampai 20 Januari 2020.
- c. Jaminan dikaitkan jaminan KMK revolving.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- Land/building of House and warehouse located on Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, South Sulawesi on SHGB No. 20005/Manuruki (formerly 4197/Mangasa) registered under the name of the Company
- Land/residential house on Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. North of Jayapura, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 798/Gurabesi (formerly No. 508/Gurabesi) registered under the name of the Company
- Land/office building and warehouse on Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi North of Jayapura, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 599 registered under the name of the Company
- Land/main office building on Jl. Letjend. Haryono MT Kav.22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, on SHGB No. 36 registered under the name of the Company.

Maximum limit of KMK Transactional

a. Maximum credit limit to Rp375,000.;

b. Period:

- Maximum limit: 12 (twelve) months since maturity of the facility starting January 21, 2019 until January 20, 2020. Based on the letter No. BIN / 2.3 / 003 dated January 10, 2019, the loan facility has been extended until January 20, 2020.
- Credit realization: Maximum realization in accordance with the duration of the project in the contract.

Maximum limit of KMK Revolving

a. Maximum limit to Rp50,000

- b. Period: 12 (twelve) months starting January 21, 2019 until January 20, 2020. Based on the letter No. BIN / 2.3 / 003 dated January 10, 2019, the loan facility has been extended until January 20, 2020.
- c. The purpose: additional working capital for the company operating necessary.

Non Cash Loan

a. Maximum credit limit amounting to Rp2,675,000,

- b. The period is 12 (twelve) months since January 21, 2019 until January 20, 2020. Based on the letter No. BIN / 2.3 / 003 dated January 10, 2019, the loan facility has been extended until January 20, 2020.
- c. Collateral is related with KMK revolving collateral.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- 2) Berdasarkan Surat No. BIN/2.3/226/R tanggal 18 September 2018, Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Fasilitas Kredit Modal Kerja

- Pagu kredit sebesar Rp 70.000.
- Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Rehabilitasi Pasar Johar Kota Semarang TA 2018 - 2019;
- Jangka Waktu: 15 (lima belas) bulan sejak tanggal 18 September 2018 s/d 08 Desember 2019;
- Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat cession dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.

- 3) Berdasarkan Surat No. BIN/2.3/108/R tanggal 10 May 2019, Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Fasilitas Kredit Modal Kerja

- Pagu kredit sebesar Rp 175.000.
- Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie Paket 1 (MYC);
- Jangka Waktu: 45 (empat puluh lima) bulan terhitung sejak Perjanjian Kredit;
- Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat cession dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp100.000. Total pencairan pinjaman tahun 2019 sebesar Rp7.253.668 Total pelunasan pinjaman tahun 2019 sebesar Rp7.208.668.. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp145.000.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut :

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- *Debt Equity Ratio* maksimal 5 kali; dan
- Rasio *Debt Service Coverage* minimum 100%

Per 31 Desember 2019, Perusahaan telah mematuhi batasan rasio keuangan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- 2) Based on the letter No. BIN/2.3/226/R dated September 18, 2018, the Company, obtained Transactional KMK Facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Working capital credit facility

- Maximum limit amounting to Rp70,000
- The purpose: additional working capital for The Rehabilitation Project of Johar Market in Semarang City FY 2018 – 2019;
- Period: 15 (Fifteen) months starting September 18, 2018 until December 8, 2019;
- Collateral : Accounts receivable of financed projects is tied with cession and is associated with current facilities.

- 3) Based on Letter No. BIN / 2.3 / 108 / R dated 10 May 2019, the Company obtained a Transactional KMK Facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Working Capital Credit Facility

- Credit ceiling of Rp 175,000,
- Purpose of use: Additional working capital for the Pidie District Rukoh Dam Development Project Package 1 (MYC);
- Duration: 45 (forty five) months from the Credit Agreement;
- Guarantee: Receivables from projects financed will be tied to cession and linked to current facilities.

Balance at the beginning of 2019 is Rp100,000. The total loan disbursement for the year 2019 is Rp Rp 7,253,668. Total loan repayments for the year 2019 amounted to Rp7,208,668, The balance as of December 31, 2019 is Rp145,000,

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratio as follows :

- Current ratio minimum 1 time;
- Debt Equity Ratio maximum 5 times; and
- Debt Service Ratio ratio minimum 100%

As of December 31, 2019, the Company has complied with the required financial ratio limits.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**14) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk
PT NK**

- 1) Berdasarkan surat yang diterbitkan No. S-464/SMI/DPI/0619 tanggal 20 September 2019, Perusahaan mendapatkan kredit modal kerja dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) melalui Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* Fasilitas Pembiayaan dan Perjanjian Pembiayaan.
 - a. Jenis Fasilitas berupa Pembiayaan Modal Kerja;
 - b. Pagu kredit sebesar Rp200.000.000.000 (Total Fasilitas Pembiayaan);
 - c. Keperluan modal kerja untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur sebagai berikut:
 - Proyek Bendungan Temef berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03/SNVT/PEM-BEND-NT.II/DSE.I/89/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
 - Proyek Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket – II) di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03-AS/ KONT/SNVT PB NT I/904/2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - Proyek-proyek infrastruktur lain yang dibiayai dari dana APBN dan sektornya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.100/PMK.010/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015 dan Surat OJK No. S-7/D.05/2019 tanggal 12 Februari 2019;
 - d. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak 28 Juni 2019 s/d 27 Juni 2020;
 - e. Jaminan berupa jaminan yang lazim dipersyaratkan oleh Kreditur dalam Fasilitas Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 366/Harjosari II atas Nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 5.170 m² yang terletak di Jl. Sisingamaraja Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**14) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk
PT NK**

- 1) Based on the credit agreement No. S-464/SMI/DPI/0619 dated September 20, 2019, the Company obtained working capital loans from PT Sarana Multi infrastructure (Persero) (PT SMI) through a *Revolving Working Capital Financing Facility Agreement* and *Financing Facilities*.
 - a. Types of Facilities are Working Capital Financing;
 - b. Maximum credit limit amounting to Rp200,000,000,000 (Total Financing Facilities);
 - c. Working capital purposes to carry out the construction of infrastructure project as follow:
 - The Temef Dam Project is located in Central Timor Regency South, Nusa Tenggara Province East, based on Unit Price Contract Agreement No. HK.02.03 / SNVT / PEM-BEND-NT.II / DSE.I / 89 / XII / 2017 dated 22 December 2017;
 - Sila Beringin Dam Project (Package - II) in Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, based on Unit No. Contract Agreement. HK.02.03-US / KONT / SNVT PB NT I / 904/2018 dated 31 December 2018 ;
 - Other infrastructure projects funded by APBN and sector funds are in accordance with Minister of Finance Regulation No. 100 / PMK.010 / 2009 dated May 27, 2009 and Letter of Financial Services Authority No. S-48 / D.05 / 2015 April 30 2015 and OJK Letter No. S-7 / D.05 / 2019 February 12, 2019;
 - d. Period: 12 (twelve) months starting June 28, 2019 until June 27, 2020;
 - e. Collateral in the form of a guarantee is normally required by creditors in this financing facility, including but not limited to:
 - The land and building with SHGB No. 366/Harjosari II registered under the name of Company with a land area of 5,170 sqm located on Jl. Sisingamaraja Kel. Hardjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Tanah dan bangunan SHGB No. 118/Harjosari II atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.442 m² yang terletak di Jl. Kampung/Lorong IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara
- Tanah dan bangunan SHGB No. 20019/Losari atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 966 m² yang terletak di Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan);
- Tanah dan bangunan SHGB No. 601/Sukarami atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.619 m² yang terletak di Kel. Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan);
- Tanah dan bangunan SHGB No. 22/Neglasari atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.085 m² yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
- Tanah dan bangunan SHGB No. 23/Neglasari atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.085 m² yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
- Tanah dan bangunan SHGB No. 00023/Besusu Tengah atas nama PT Nindya Karya (Persero) dengan luas tanah sebesar 1.548 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah
- Tanah dan bangunan SHGB No. 18/Besusu atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 2.016 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah;
- Tanah dan bangunan SHGB No. 00022/Besusu Tengah atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.078 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- The land and building with SHGB No. 118/Harjosari II registered under the name of Company with a land area of 1,442 sqm located on Jl. Kampung/Hallway IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra
- The land and building with SHGB No. 20019/Losari registered under the name of Company with a land area of 966 sqm located on Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kel. Ujung Pandang, Makassar, South Sulawesi);
- The land and building with SHGB No. 601/Sukarami registered under the name of Company with a land area of 1,619 sqm located in Kel. Sukarami, Kec. Sukarami, Palembang, South Sumatra;
- The land and building with SHGB No. 22/Neglasari registered under the name of Company with a land area of 1,085 sqm located on Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, West Java
- The land and building with SHGB No. 23/Neglasari registered under the name of Company with a land area of 1,085 sqm located on Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Bandung City, West Java.
- The land and building with SHGB No. 00023/ Central Besusu registered under the name of PT Nindya Karya (Persero) with a land area of 1,548 sqm located in Kel. Central Basusu Kec. East Palu Kab. Dongkala, Central Sulawesi
- The land and building ownership proven with SHGB No. 18/Besusu registered under the name of Company with a land area of 2,016 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Tengah Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 18);
- The land and building with SHGB No. 00022/Besusu Central registered under the name of Company with a land area of 1,078 sqm located in Kel. Basusu tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Tanah dan bangunan SHGB No. 25/Besusu atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.169 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah
- Tagihan/piutang (sisa termin) atas proyek yang dibiayai dan akan dilakukan pengikatan awal secara Fidusia minimal sebesar 150% dari Total Fasilitas Pembiayaan. Selanjutnya nilai tagihan/piutang (sisa termin) dijaga minimal 150% dari *outstanding* Fasilitas Pembiayaan;
- Pembayaran utang Pokok Fasilitas Pembiayaan ini dilakukan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya perjanjian kontrak antara Debitur dengan pemberi Kerja atau pemilik proyek infrastruktur (*bouwheer*) atau berakhirnya jangka waktu Fasilitas Pembiayaan.

Saldo awal tahun 2019 sebesar Rp65.000. Total pencairan pinjaman periode tahun 2019 sebesar Rp165.000. Total pelunasan pinjaman periode tahun 2019 sebesar Rp130.000. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp100.000.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- Rasio *EBITDA* terhadap Biaya Bunga minimum 1,5 kali;
- Rasio Hutang terhadap *EBITDA* maksimal 6,5 kali.

Per 31 Desember 2019, Perusahaan telah mematuhi batasan rasio keuangan

**15) PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT NK**

Berdasarkan Surat No. 253/IBD/EXT/19 tanggal 28 September 2019. Perusahaan mendapatkan Fasilitas Pinjaman *Money Market*, SKBDN/Bank Garansi dan Transaksi Valuta Asing dari Bank PAN Indonesia.

- 1) Fasilitas Pinjaman *Money Market*;
a. Pagu kredit sebesar Rp350.000.;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- The land and building with SHGB No. 25/Besusu registered under the name of Company with a land area of 1,078 sqm located in Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi
- Billing/accounts receivable (the remainder of the term) for a project that was financed and will be conducted early in a binding Fiduciary minimum of 150% of the Total financing facility. Next invoice/receivable (the remainder of the term) is kept for a minimum of 150% of the outstanding financing facility;
- Principal of payment financing facility is conducted no later than at the of expiry of the contractual agreements between the debtor and employer or the owner of the infrastructure projects or the expiry of the period of financing facility.

The initial balance in 2019 was Rp.65,000. The total loan disbursement for the year 2019 was Rp165,000. The total loan repayment for the year 2019 amounted to Rp130,000. The balance as of December 31, 2019 was Rp100,000.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratio as follows:

- Current ratio minimum 1 time;
- *EBITDA* to Interest Ratio minimum 1,5 times;
- Debt to *EBITDA* Ratio maximum 6.5 times;

As of December 31, 2019, the Company has complied with the required financial ratio limits.

**15) PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT NK**

Based on Letter No. 253 / IBD / EXT / 19 dated September 28, 2019. The Company obtained a Money Market Loan Facility, SKBDN / Bank Guarantee and Foreign Exchange Transactions from Bank PAN Indonesia.

- 1) Money Market Loan Facility;
a. Maximum credit limit amounting to Rp350,000.;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- b. Tujuan penggunaan: Modal kerja umum;
 - c. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
 - d. Jaminan: Fidusia atas kontrak proyek yang sudah ada dengan nilai minimal 100% dari Pokok Pinjaman.
- 2) Fasilitas Pembukaan SKBDN/ Bank Garansi
- a. Pagu kredit sebesar Rp200.000.;
 - b. Tujuan penggunaan: Merealisasi pembelian bahan baku, bahan pendukung produksi dan suku cadang;
 - c. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan kredit sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
 - d. Jaminan : Jaminan: Fidusia atas kontrak proyek yang sudah ada dengan nilai minimal 100% dari Pokok Pinjaman.
- 3) Fasilitas Transaksi Valuta Asing
- a. Plafond sebesar USD2.000.000.;
 - b. Tujuan penggunaan: Memenuhi kebutuhan transaksi valuta asing dan lindung-nilai posisi valuta asing yang timbul dari kegiatan operasional;
 - c. Jangka Waktu sejak tanggal perubahan Pedagang Valuta Asing (PVA) sampai dengan 07 Oktober 2020.

Saldo awal tahun 2019 sebesar Rp20.000. Total pencairan pinjaman periode tahun 2019 sebesar Rp580.000. Total pelunasan pinjaman periode tahun 2019 sebesar Rp565.000. Saldo pada 31 Desember 2019 sebesar Rp35.000.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Pinjaman berbunga setelah dikurangi saldo kas dan bank dibagi total Ekuitas tidak melebihi 3 kali;
- EBITDA dibagi beban bunga pinjaman lebih besar dari 1,5 kali;
- Aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar lebih besar dari 1 kali.

Per 31 Desember 2019, Perusahaan telah mematuhi batasan rasio keuangan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- b. The purpose: general working capital;
 - c. Period: 12 (twelve) months from the signing of the credit until July 7, 2020;
 - d. Collateral: Fiduciary of an existing project contract with a value of at least 100% of Principal.
- 2) SKBDN Facility/Bank Guarantee Facility
- a. Maximum credit limit amounting to Rp200,000.;
 - b. The purpose: Realizing the purchase of raw materials, production support and spare parts;
 - c. Period: 12 (twelve) months from the signing of the credit until July 7, 2020;
 - d. Collateral : Guarantee: Guarantee: Fiduciary on existing project contracts with a minimum value of 100% of the Loan Principal..
- 3) Foreign Exchange Transaction Facility:
- a. Maximum limit amounting to USD2,000,000.;
 - b. The purpose: operational transaction for foreign exchange to fulfill the foreign exchange transaction needs and hedging which arising from the operational activities;
 - c. Duration from the date of change Foreign Exchange Traders (PVA) arrive by October 7, 2020.

The initial balance of 2019 is Rp20,000. The total loan disbursement for the year 2019 is Rp580,000,. Total loan repayments for the year 2019 amounting to Rp565,000,. The balance on December 31, 2019 is Rp35,000,

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratio as follows:

- Loans net of cash and bank balances divided by total equity does not exceed 3 times
- EBITDA divided by interest expense of loans greater than 1.5 times;
- Current Ratio greater than 1 times;

As of December 31, 2019, the Company has complied with the required financial ratio limits.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**16) PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT RILJ**

Saldo pinjaman PT Bank QNB Indonesia Tbk per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.000 sesuai dengan surat permohonan dari PT Rejeki Intilogam Jaya No. 018/RILJ/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang permohonan penyelesaian utang Perusahaan dan surat dari PT Bank QNB Indonesia Tbk No. 687A/SRT-SAM/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 tentang persetujuan pelunasan fasilitas kredit, bahwa permohonan pelunasan fasilitas kredit Perusahaan sebesar Rp25.000 telah disetujui oleh BDFK Limited sebagai penerima Cessie hak atas seluruh tagihan yang seharusnya dibayar oleh Perusahaan.

Saldo awal tahun 2019 pinjaman sebesar Nihil. Total pencairan di tahun 2019 sebesar Rp25.000. Total pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pinjaman Bank pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp25.000.

**17) PT Bank DBS Indonesia Tbk
PT RILJ**

Saldo pinjaman PT Bank DBS Indonesia per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.366, sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian Utang antara PT Bank DBS Indonesia dengan PT Rejeki Intilogam Jaya nomor 411/PPH-DBSI/VIII/3-4/2019 tanggal 30 Agustus 2019 pasal 1 mengenai Pembayaran Kembali Kewajiban Nasabah bahwa Atas permohonan nasabah, PT Bank DBS Indonesia setuju untuk menghapus penalti, denda dan memberikan pengurangan pembayaran kewajiban nasabah terutang sebesar 50%, dengan demikian dari total kewajiban nasabah sebesar Rp17.463, nasabah hanya wajib membayar sebesar Rp8.731 dengan jadwal sebagai berikut:

1. Rp4.365.722.154 wajib dibayar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ditandatangani.
2. Rp2.365.722.154 wajib dibayar paling lambat 31 Maret 2020
3. Rp2.000.000.000 wajib dibayar paling lambat 30 Juni 2020

Pembayaran pertama telah dilakukan pada tanggal 27 November 2019 sebesar Rp4.366 sehingga saldo pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.366.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**16) PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT RILJ**

The loan balance of PT Bank QNB Indonesia Tbk as of December 31, 2019 was Rp. 25,000 according to the application letter from PT Rejeki Intilogam Jaya No. 018 / RILJ / XII / 2019 dated 19 December 2019 concerning the application for resolving the Company's debts and a letter from PT Bank QNB Indonesia Tbk No. 687A / SRT-SAM / XII / 2019 dated December 28, 2019 concerning the approval of the repayment of credit facilities, that the application for the repayment of the Company's credit facilities in the amount of Rp.25,000 has been approved by BDFK Limited as the recipient of Cessie rights to all bills that should be paid by the Company.

The initial balance in 2019 of the loan is Nihil. Total disbursement in 2019 is Rp25,000. Total payments in the current year is Nil. The balance as of December 31, 2019 amounted to Rp25,000.

**17) PT Bank DBS Indonesia Tbk
PT RILJ**

The loan balance of PT Bank DBS Indonesia as of December 31, 2019 amounted to Rp4,366, in accordance with the Debt Settlement Agreement between PT Bank DBS Indonesia and PT Rejeki Intilogam Jaya number 411 / PPH-DBSI / VIII / 3-4 / 2019 dated 30 August 2019 article 1 regarding Repayment of Customer Obligations that, at the request of the customer, PT Bank DBS Indonesia agreed to write off penalties, fines and provide a 50% reduction in the payment of liabilities of the customer, thus from the total liabilities of the customer of Rp17,463, the customer is only required to pay Rp8,731 with the following schedule:

1. Rp4.365,722.154 must be paid no later than 3 (three) months after the agreement is signed.
2. Rp.2,365,722,154 must be paid no later than 31 March 2020
3. Rp.2,000,000,000 must be paid no later than June 30, 2020

The first payment was made on November 27, 2019 in the amount of Rp4,366 so that the loan balance as of December 31, 2019 was Rp4,366.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo awal tahun 2019 pinjaman sebesar Nihil. Total pencairan di tahun 2019 sebesar Rp4.366. Total pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pinjaman Bank pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.366.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The initial balance in 2019 of the loan is Nil. Total disbursement in 2019 is Rp4,366. Total payments in the current year is Nil. The balance as of December 31, 2019 amounted to Rp4,366.

26. Utang Bruto Kepada Pihak Ketiga

26. Gross Amount Due to Third Parties

	2019 Rp	2018 Rp	
Wilayah I	179,763	252,403	Region I
Wilayah II	208,076	281,664	Region II
Wilayah III	81,509	6,046	Region III
Wilayah IV	385,082	94,034	Region IV
Wilayah V	381,985	20,228	Region V
Divisi EPC	59,224	17,644	EPC Division
Divisi Properti	5,657	7,424	Division of Property
Unit Penunjang Produksi	574	11	Production Supporting Unit
PT Nindya Beton	36,604	5,734	PT Nindya Beton
Kantor Pusat	4,462	1,490	Head Office
Jumlah	1,342,936	686,680	Total

27. Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

27. Short-term Advances from Customers

	2019 Rp	2019 Rp	
Pihak Berelasi:			Related Parties:
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	6,250	6,250	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Ventura Bersama Nindya - PT PPA	4,122	4,594	Joint Venture Nindya - PT PPA
Ventura Bersama Nindya - Surya	--	2,822	Joint Venture Nindya - Surya
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	--	963	Others (each below Rp 1 Billion)
Jumlah Pihak Berelasi	10,372	14,629	Total Related Parties
Pihak Ketiga:			Third Parties:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	122,183	165,830	The Ministry of Public Works and Public Housing
Kementerian Pemuda dan Olahraga	47,928	21,888	Ministry of Youth and Sports
Bank Indonesia	23,577	41,776	Bank Indonesia
Dinas PUPR Kota Banjarbaru	11,766	--	PUPR Office of Banjarbaru Regency
Dinas PUPR Kab.Dharmasraya	10,766	--	PUPR Office of Dharmasraya Regency
Kementerian Perhubungan	19,684	--	The Ministry of Transportation
Universitas Islam Negeri Raden Fatah	7,240	24,618	Raden Fatah State Islamic University
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	--	--	PT Sinergi Solusi Utama
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	6,804	9,364	Pesisir Barat District Government
PT Maleo	2,500	2,500	PT Maleo
PT Karya Unggulan Gemilang	1,310	1,310	PT Karya Unggulan Gemilang
RSUD Undata	--	4,734	RSUD Undata
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	--	--	Others (Each below Rp 1 Billion)
Jumlah Pihak Ketiga	253,758	272,020	Total Third Parties
Jumlah Uang Muka Pemberi Kerja	264,130	286,649	Total Advances From Customers

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

28. Beban Akruai dan Utang Lain-lain

28. Accrued Expenses and Other Payables

	2019 Rp	2018 Rp	
Akrual Biaya Apresiasi Karyawan	40,420	26,340	Accrued Employee Appreciation
Akrual Biaya Tantiem	35,773	20,860	Accrued Tantiem
Utang Operasional Proyek	26,980	67,462	Projects Operational Payable
Akrual Bunga Surat Utang Jangka Menengah	11,263	7,423	Accrued Interest Medium Term Notes
Akrual Bunga Bank	5,712	8,275	Accrued Interest Loan
Akrual Gaji dan Upah	8,137	8,599	Accrued Salaries and Wages
Akrual Beban Kantor dan Umum	1,606	2,984	Accrued Office and General Expenses
Utang Lain-lain	130,588	68,317	Other Payables
Jumlah	260,479	210,260	Total

Utang operasional proyek merupakan utang atas beban ventura bersama yang terjadi atas pinjaman-pinjaman sementara ke proyek-proyek yang dikerjasamakan. Utang-utang ini akan diperhitungkan dengan laba ataupun kerugian yang dialami oleh masing-masing ventura bersama, setelah proyek dinyatakan selesai dan ventura bersama ditutup.

Projects operational payables are joint venture payable that occurred over the temporary loans to projects that cooperated. These debts will be calculated with a profit or loss experienced by each of the joint venture, after the project was finished and ventura joint closed.

Akrual biaya tantiem dan biaya apresiasi karyawan adalah pencatatan biaya secara akrual berdasarkan anggaran yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Accrued tantiem and employee appreciation were recorded based on accrual basis in accordance with budget approved by the General Meeting of Shareholders (RUPS).

Pada 31 Desember 2019, PT RILJ memiliki utang lain-lain kepada Sujono Kusnadi Subroto sebesar Rp85.840.

On December 31, 2019, PT RILJ has payables to Sujono Kusnadi Subroto amounted to Rp85,840.

29. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

29. Employee Benefit Liabilities

	2019 Rp	2018 Rp	
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan			Employee Benefit Liabilities
PT PPA	939	2,494	PT PPA
PT PPAF	--	118	PT PPAF
PT PPAK	1,025	571	PT PPAK
PT BSM	4,390	3,139	PT BSM
PT RILJ	1,456	206	PT RILJ
PT NK	14,934	16,032	PT NK
PT NB	345	206	PT NB
Jumlah	23,089	22,766	Total

Grup memberikan imbalan pasca kerja minimum kepada karyawan yang berhak berdasarkan Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan.

Group provides minimum of employment benefits to its eligible employees based on Labor Law No. 13 about Employment.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Perusahaan menyelenggarakan program iuran pasti untuk imbalan pascakerja karyawan bekerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BRI, sesuai Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan DPLK BRI Nomor: PPJ-39/PPA/1111 dan No. B.51-DPLK/11/2011 yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2011. Untuk beberapa karyawan Perusahaan yang tidak diikutkan dalam program tersebut (sebanyak 5 orang per 31 Desember 2018 dan 3 orang per 31 Desember 2017), Perusahaan telah menghitung liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp939 dan Rp2.493 per 31 Desember 2019 dan 2018.

Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pascakerja Grup per 31 Desember 2019 dan 2018 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria PT Katsir Imam Sapto, berdasarkan *Projected Unit Credit Method (PUC Method)* dengan asumsi sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Dasar Perhitungan	8.2% per tahun/ year	8.2% per tahun/ year	Basic Calculation
Tingkat diskonto	8.0% per tahun/ year	8.0% per tahun/ year	Discount Rate
Tingkat kenaikan gaji	56 tahun/ year		Salary increase rate
Usia pensiun	Tabel Mortalita Indonesia (TMI) II 2011/		Retirement age
Tabel mortalita	Indonesia Mortality Table (TMI) II 2011		Mortality table
Metode perhitungan	Projected Unit Credit		Method of calculation

Perusahaan

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya Jasa Kini	--	210	Current Service Cost
Beban Bunga	--	187	Interest Cost
Jumlah Beban Imbalan Kerja	--	397	Total Post-employment Benefits

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	939	1,618	Present Value of Defined Benefit Obligation
Penambahan Cadangan	--	876	Additional of Reserve
Liabilitas Imbalan Kerja	939	2,494	Post-employment Benefits Liability

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The Company has organized the defined contribution program for post-employment benefits of employees working with Financial Institution Pension Fund ("Pension Fund") BRI, according to the Cooperation Agreement between the Company and Pension Fund BRI Number: PPJ-39/PPA/1111 and No. B.51-DPLK/11/2011 signed on November 21, 2011. For several employees that are not included in this program (5 persons per December 31, 2018 and 3 persons per December 31, 2017), the Company has calculated the post-employment benefit liabilities as of December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp939 and Rp2,493, respectively.

Actuarial valuation post employment benefits of the Group as of December 31, 2019 and 2018 were conducted by the actuarial consulting firm of PT Katsir Imam Sapto, based on the Projected Unit Credit Method (PUC Method), with assumptions as follows:

The Company

The details of the Company's employee benefit expenses for the current year are as follow:

The details of the Company's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follow:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Movement in the Company's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp	
Kewajiban pada Awal Tahun	2,493	2,728	Beginning Balance of Liabilities
Pembayaran Imbalan Kerja	(1,554)	--	Employee Benefit Payment
Beban Imbalan Kerja	--	408	Employee Benefit Expense
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	--	(518)	Other Comprehensive Loss (Income)
Penambahan Cadangan	--	(125)	Additional of Reserves
Liabilitas pada Akhir Tahun	939	2,493	Ending Balance of Liabilities

PT NK

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT NK adalah sebagai berikut:

PT NK

The details of the employee benefit expenses for PT NK the current year are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya Jasa Kini	3,363	1,814	Current Service Cost
Beban Bunga	3,171	3,512	Interest Cost
Hasil Aset Program yang Diharapkan	(1,809)	(1,457)	Expected Return on Plan Assets
Jumlah Beban Imbalan Kerja	4,725	3,869	Total Employee Benefit Expense

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NK adalah sebagai berikut:

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT NK are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	37,851	37,309	Present Value of Defined Benefit Obligation
Nilai Wajar Aset Program	(22,918)	(21,277)	Fair Value of Plan Assets
Liabilitas Imbalan Kerja	14,933	58,586	Post-employment Benefits Liability

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NK adalah sebagai berikut:

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT NK are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp	
Liabilitas pada Awal Tahun	16,032	24,183	Beginning Balance of Liabilities
Beban Imbalan Kerja	4,725	3,869	Employee Benefit Expense
Pembayaran Imbalan Kerja	(4,579)	(4,445)	Benefit Payment
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	6,007	(324)	Other Comprehensive Loss (Income)
Iuran Dana Pensiun/Premi Asuransi	(7,251)	(7,251)	Dues Pension Fund / Insurance Premiums
Liabilitas pada Akhir Tahun	14,934	16,032	Ending Balance of Liabilities

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PPAF

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT PPAF adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya Jasa Kini	--	368	Current Service Cost
Beban Bunga	--	208	Interest Cost
Jumlah Beban Imbalan Kerja	--	576	Total Employee Benefit Expense

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	--	118	Present Value of Defined Benefit Obligation
Liabilitas Imbalan Kerja	--	118	Post-employment Benefits Liability

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Kewajiban pada Awal Tahun	118	581	Beginning Balance of Liabilities
Beban Imbalan Kerja	--	576	Employee Benefit Expense
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	--	(143)	Other Comprehensive Loss (Income)
Iuran Dana Pensiun / Premi Asuransi	--	(896)	Dues Pension Fund / Insurance Premiums
Aset yang belum diakui	--	--	Unrecognized Assets
Penyesuaian atas Program Iuran Pasti	(118)	--	Adjustment to the Defined Contribution Plan
Liabilitas pada Akhir Tahun	--	118	Ending Balance of Liabilities

PT PPAK

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT PPAK adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya Jasa Kini	365	352	Current Service Cost
Beban Bunga	119	33	Interest Cost
Jumlah Beban Imbalan Kerja	484	385	Total Employee Benefit Expense

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAK adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	1,025	571	Present Value of Defined Benefit Obligation
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	1,025	571	Total Post-employment Benefit Expense

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT PPAF

The details of the employee benefit expenses for PT PPAF the current year are as follow:

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAF are as follow:

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAF are as follow:

PT PPAK

The details of the employee benefit expenses for PT PPAK the current year are as follow:

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAK are as follow:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAK adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Kewajiban pada Awal Tahun	571	405
Beban Imbalan Kerja	484	385
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	(30)	(219)
Liabilitas pada Akhir Tahun	1,025	571

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT PPAK are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp	
Kewajiban pada Awal Tahun	571	405	Beginning Balance of Liabilities
Beban Imbalan Kerja	484	385	Employee Benefit Expense
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	(30)	(219)	Other Comprehensive Loss (Income)
Liabilitas pada Akhir Tahun	1,025	571	Ending Balance of Liabilities

PT NB

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT NB adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Biaya Jasa Kini	151	60
Beban Bunga	16	--
Jumlah Beban Imbalan Kerja	167	60

PT NB

The details of the employee benefit expenses for PT NB in the current year are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya Jasa Kini	151	60	Current Service Cost
Beban Bunga	16	--	Interest Expenses
Jumlah Beban Imbalan Kerja	167	60	Total Employee Benefit Expense

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NB adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	373	60
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria yang Belum Diakui	(28)	146
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	345	206

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT NB are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	373	60	Present Value of Defined Benefit Obligation
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria yang Belum Diakui	(28)	146	Unrecognized Actuarial Gains (Losses)
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	345	206	Total Post-employment Benefit Expense

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NB adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Kewajiban pada Awal Tahun	206	--
Beban Imbalan Kerja	167	60
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	(28)	146
Liabilitas pada Akhir Tahun	345	206

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT NB are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp	
Kewajiban pada Awal Tahun	206	--	Beginning Balance of Liabilities
Beban Imbalan Kerja	167	60	Employee Benefit Expense
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	(28)	146	Other Comprehensive Loss (Income)
Liabilitas pada Akhir Tahun	345	206	Ending Balance of Liabilities

PT BSM

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT BSM adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Biaya Jasa Kini	273	207
Beban Bunga	254	300
Jumlah Beban Imbalan Kerja	527	507

PT BSM

The details of the employee benefit expenses for PT BSM in the current year are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya Jasa Kini	273	207	Current Service Cost
Beban Bunga	254	300	Interest Cost
Jumlah Beban Imbalan Kerja	527	507	Total Employee Benefit Expense

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT BSM adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	4,390	3,345
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria yang Belum Diakui	--	--
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	4,390	3,345

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT BSM adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Kewajiban pada Awal Tahun	3,139	2,933
Beban Imbalan Kerja	527	301
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	724	(95)
Liabilitas pada Akhir Tahun	4,390	3,139

PT RILJ

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT RILJ adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Biaya Jasa Kini	857	206
Beban Bunga	--	--
Jumlah Beban Imbalan Kerja	857	206

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT RILJ adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	1,456	206
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	1,456	206

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT RILJ adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
Kewajiban pada Awal Tahun	206	--
Beban Imbalan Kerja	857	206
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	393	--
Liabilitas pada Akhir Tahun	1,456	206

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT BSM are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp
Present Value of Defined Benefit Obligation	4,390	3,345
Unrecognized Actuarial Gains (Losses)	--	--
Total Post-employment Benefit Expense	4,390	3,345

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT BSM are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp
Beginning Balance of Liabilities	3,139	2,933
Employee Benefit Expense	527	301
Other Comprehensive Loss (Income)	724	(95)
Ending Balance of Liabilities	4,390	3,139

PT RILJ

The details of the employee benefit expenses for PT RILJ in the current year are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp
Current Service Cost	857	206
Interest Cost	--	--
Total Employee Benefit Expense	857	206

The details in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT RILJ are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp
Present Value of Defined Benefit Obligation	1,456	206
Total Post-employment Benefit Expense	1,456	206

Movement in the employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position of PT RILJ are as follow:

	2019 Rp	2018 Rp
Beginning Balance of Liabilities	206	--
Employee Benefit Expense	857	206
Other Comprehensive Loss (Income)	393	--
Ending Balance of Liabilities	1,456	206

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, tingkat suku bunga dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti pensiun kesehatan dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek reksadana dan saham, instrumen utang dan lainnya. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek reksadana dan saham dan obligasi untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The defined benefit pension plan typically provides exposure for the Group to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk and salary risk.

Investment Risk

The present value of the defined benefit health care plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, the plan has relatively balanced investment in mutual fund and equity securities, and debt instruments and others. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested portion of the plan and equity securities and in debt instruments to leverage the return generated by the fund.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined liabilities are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonable possible changes of the respective assumptions occurring at the of the reporting period, while holding all other assumptions constants.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligations as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligations has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

30. Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang

30. Long-term Advances from Customers

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi:		
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	21,815	60,501
PT Pupuk Kalimantan Timur	14,150	--
Jumlah Pihak Berelasi	35,965	60,501
Pihak Ketiga:		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	140,063	115,332
Pemerintah Kabupaten Jembrana	--	11,005
Kementerian Perhubungan	--	8,749
Jumlah Pihak Ketiga	140,063	135,086
Jumlah Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	176,028	195,587

Related Parties:

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pupuk Kalimantan Timur
Total Related Parties

Third Parties:

The Ministry of Public Work and Public Housing
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kementerian Perhubungan
Total Third Parties

Total Long-Term Contract Advances

Akun ini merupakan saldo uang muka yang telah diterima dari pemberi pekerjaan (*bouwheer*) yang pembayarannya dipotongkan dengan tagihan atas setiap pekerjaan yang telah diselesaikan.

This account represents the advance balance that has been received from the customers (bouwheer), which is deducted with the payment for any work on progress that had been completed.

31. Utang Surat Berharga Komersial

31. Commercial Papper

	2019 Rp	2018 Rp
Surat Berharga Komersial	100,000	--
Biaya yang dapat diatribusikan	(6,428)	--
Total	93,572	--

Commercial Paper
Attributable cost
Total

Perusahaan menerbitkan Surat Berharga Komersial ("SBK") melalui PT Danareksa Sekuritas sebagai Penata Laksana Penerbitan / *Arranger* dan menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai lembaga penata usaha dan penyelesaian SBK pada tanggal 27 November 2019 sebesar Rp100.000. SBK tersebut memperoleh peringkat idA1 (*single A-one*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Jangka Waktu SBK tersebut adalah 12 bulan dengan jatuh tempo 28 November 2020. Besarnya tingkat diskonto adalah sebesar 7,50%.

The Company issued Commercial Securities ("SBK") through PT Danareksa Sekuritas as the Arranging Issuance / Arranger and appointed PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") as the SBK administration and settlement agency on November 27, 2019 amounting to Rp100.000. The SBK received an idA1 (single A-one) rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). SBK period is 12 months with a maturity date of November 28, 2020. The discount rate is 7.50%.

32. Surat Utang Menengah

32. Medium Term Notes

	2019 Rp	2018*) Rp
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek		
PT NK	300,000	--
Sub Jumlah	300,000	--
PT PPA	750,000	--
PT PPAF	60,000	300,000

PT NK
Sub Total

PT PPA
PT PPAF

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan *Medium Term Notes* I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 dihadapan notaris Lenny Jannis Ishak S.H., No. 01 Tanggal 1 November 2019 perihal surat hutang jangka menengah yang diterbitkan oleh Penerbit kepada Pemegang MTN yang ditawarkan oleh Arranger kepada Pemesan melalui Penawaran Terbatas sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Dokumen Transaksi dan MTN tersebut didaftarkan pada penitipan kolektif di KSEI, dengan nama *Medium Term Notes* I PPA Tahun 2019. Tujuannya guna mendukung penyediaan dana untuk menambah modal kerja dan/atau *refinancing* baik di Penerbit maupun di Entitas Anak. Nilai pokok keseluruhan MTN dalam Perjanjian Penerbitan MTN ini adalah sebesar Rp750.000, yang terdiri dari MTN Seri A sebesar Rp300.000 dan MTN seri B sebesar Rp450.000.

Tanggal Distribusi MTN 08 November 2019 yaitu tanggal dilakukannya distribusi secara elektronik di KSEI. Tanggal Pelunasan Pokok MTN Seri A 8 November 2021 dan MTN Seri B 8 November 2022 yaitu tanggal jatuh tempo Pokok MTN dan wajib dibayar oleh Penerbit kepada Pemegang MTN. Tanggal Pembayaran Bunga MTN Seri A sebesar 10,05% per tahun dan MTN Seri B sebesar 10,30% per tahun akan dibayarkan setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan MTN. Jika adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga MTN dan pokok MTN akan dikenakan denda sebesar 1% per tahun di atas tingkat Bunga MTN dari jumlah dana yang terlambat dibayar.

33. Ekuitas**a. Modal Saham**

Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.996.688 yang mewakili 2.996.688 lembar saham.

Modal saham yang ditempatkan per tanggal 31 Desember 2019 seluruhnya berjumlah Rp2.996.688 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, terdiri dari:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on the Company's 2019 *Medium Term Notes* I Issuance Agreement before the notary Lenny Jannis Ishak S.H., No. 01 dated November 1, 2019 regarding the medium-term debt securities issued by the Issuer to MTN Holders offered by Arranger to the Buyer through a Limited Offer in accordance with the conditions stated in the Transaction Document and the MTN is registered at a collective deposit at KSEI, with the name *Medium Term PPA Notes* I of 2019. The aim is to support the provision of funds to increase working capital and / or refinancing both at the Issuer and at the Subsidiaries. The total principal amount of MTN in the MTN Issuance Agreement is Rp750,000, consisting of Rp300,000 Series A MTN and Rp450,000 of Series B MTN.

Distribution date of MTN 08 November 2019 The date of electronic distribution in KSEI. The date of redemption of the series of MTN of Seri A November 8, 2021 and MTN series B November 8, 2022 is the maturity date of MTN and must be paid by the issuer to the MTN holder. Seri A's MTN interest payment date is 10.05% per year and series B MTN of 10.30% per year will be paid every 3 months from the date of MTN issuance. If there is a delay in the MTN interest payment obligation and the principal of MTN will be subject to a penalty of 1% per year above the MTN interest rate of the late amount of funds paid.

33. Shareholders' Equity**a. Share Capital**

The Company is owned by the Republic of Indonesia. Issued and fully paid shares capital made by the Republic of Indonesia as of December 31, 2019 amounting to Rp2,996,688, representing 2,996,688 shares.

Shares capital issued and fully paid as of December 31, 2019 amounting to Rp2,996,688 have been fully paid by the Republic of Indonesia, consists of:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Lembar Saham/ Shares	
Setoran modal awal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Februari 2004 dan telah dituangkan dalam akta Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak SH yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004.	300,000	Initial capital contribution by Government Regulation no. 10 year 2004 juncto Decree of the Minister of Finance No.82/KMK.02/2004 dated February 27, 2004 and has stasted under deed No. 7 dated February 27, 2004 in the presence of Notary Lenny Janis Ishak SH have been approved by the Minister of Justice and Human Rights No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 on March 9, 2004.
Setoran Modal Pemerintah RI sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Februari 2004 dalam bentuk aset tetap dan aset tak berwujud eks BPPN yang telah ditetapkan nilainya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.32/KMK.06/2007 tanggal 31 Juli 2007 masing-masing sebesar Rp 1.205 dan Rp 153.	1,358	Capital from the Goverment of the Republic of Indonesia in accordance with Article 2 Decree of the Minister of Finance No. 82/KMK.02/2004 February 27, 2004 in form of fixed assets and intangible assets of ex-BPPN which were pre determined value based on the Minister of Finance Decree No.32/KMK.06/2007 July 31, 2007 amounted to Rp 1,205 and Rp 153, respectively.
Setoran Modal Pemerintah RI yang dialokasikan dari Laba Bersih Tahun 2007 sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2007 tanggal 8 Mei 2008.	1	Capital from the Government of the Republic of Indonesia were allocated from Net Income year 2007 in accordance with the General Meeting of Shareholders of PT PPA concerning the Approval of Annual Report for Year 2007 dated May 8, 2008.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008.	1,500,000	Additional capital from the Government of Republic Indonesia from the 2009 state budget in accordance with the Government Regulation No 78 year 2009.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009.	1,000,000	Additional capital from the Government of the Republic of Indonesia from the 2009 state budget in accordance with the Government Regulation No 77 year 2009.
Setoran modal Pemerintah RI yang dialokasikan dari cadangan umum Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PPA Nomor:SK-366/MOU/2012 tanggal 9 Oktober 2012.	1	Deposit the Government the Republic of Indonesia allocated capital of the Company pursuant to the general reserve Minister of SOEs as GMS PT PPA Number: SK-366/MOU/2012 dated October 9, 2012.
Pengurangan penyertaan modal Negara RI berdasarkan Peraturan Menteri RI Nomor 86 Tahun 2012 Tanggal 20 Oktober 2012 terkait dengan pengalihan saham PT PPA pada PT Waskita Karya (99%) kepada Pemerintah RI.	(804,672)	RI State equity reduction in Government the Republic of Indonesia Regulation Number 86 Year 2012 Date October 20, 2012 relating to the transfer of the shares of PT PPA on PT Waskita Karya (99%) to the Government of Indonesia.
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.	1,000,000	Additional capital from the Government of the Republic of Indonesia from the 2016.
Jumlah Modal Saham per 31 Desember 2019	2,996,688	Total Shares Capital per December 31, 2019

Berdasarkan Akta No. 27 dari Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 menyatakan persetujuan penambahan modal Perusahaan sebesar Rp1. (nilai penuh) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dengan demikian modal ditempatkan yang semula sebesar Rp1.996.688 menjadi sebesar Rp2.996.688. Perubahan ini telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 8 Maret 2016.

Based on Notarial deed no. 27 of Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta, on February 15, 2016, declared approval of the capital increase of the Company Rp1. (full amount) from the State Budget for Fiscal Year 2015, thus the original issued capital amounted Rp1,996,688. (full amount) amounted to Rp2,996,688. (full amount). These changes have been noted by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Directorate General of Legal Administration on March 8, 2016.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

b. Dividen dan Cadangan

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No.1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995, dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 3 Mei 2019 para pemegang saham memutuskan untuk membentuk cadangan masing-masing sebesar Rp127.822, serta membagikan dividen tunai masing-masing sebesar Rp42.608.

c. Saldo Laba yang Belum ditentukan Penggunannya

	2019 Rp	2018 Rp
Saldo Awal	1,780,757	1,404,335
Pembagian Dividen	(42,608)	(20,000)
Penambahan Cadangan Umum	(127,822)	(30,175)
Laba Bersih	324,913	426,077
Penghasilan Komprehensif Lainnya	(6,583)	520
Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset	64,634	--
Saldo Akhir	1,993,291	1,780,757

d. Surplus Revaluasi Aset Tetap

Berdasarkan laporan penilai independen No.Lap.032702B/HMR-JKT/PPA/2018 /tanggal 27 Maret 2018 dan No. Lap 032702C/HMR-JKT/PPA/2018 tanggal 27 Maret 2018 oleh KJPP Herman Meirizki & Rekan, nilai wajar dari tanah Gresik dan Rungkut milik PT BSM per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp57.220 dan Rp81.585, sehingga terdapat surplus revaluasi per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Nil dan Rp79.910, yang dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

b. Dividend and Reserves

Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No.1/1995 issued in March 1995, and amended by Law No. 40/2007 which was published in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income to a minimum of 20% of the number of issued and fully paid. There is no time limit for the allowance.

Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) dated May 3, 2019 Shareholders have decided to the shareholders decided to form reserves of Rp127,822, respectively, and distributed cash dividends of and Rp42,608, respectively.

c. Unappropriated Retained Earnings

	2019 Rp	2018 Rp
Saldo Awal	1,780,757	1,404,335
Pembagian Dividen	(42,608)	(20,000)
Penambahan Cadangan Umum	(127,822)	(30,175)
Laba Bersih	324,913	426,077
Penghasilan Komprehensif Lainnya	(6,583)	520
Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset	64,634	--
Saldo Akhir	1,993,291	1,780,757

d. Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment

Based on an independent appraisal report No. Lap.032702B / HMR-JKT / PPA / 2018 dated March 27, 2018 and No. Lap 032702C / HMR-JKT / PPA / 2018 dated March 27, 2018 by KJPP Herman Meirizki and Partners, the fair value of PT BSM's Gresik and Rungkut land as of December 31, 2018 is Rp57,220 and Rp81,585, so there is a revaluation of surplus as of December 31, 2019 and 2018 amounting to Nil and Rp79,910, which is recorded as other comprehensive income.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

e. Kepentingan Non Pengendali

	2019 Rp	2018 Rp
Saldo Awal	117,612	10,847
Atribusi Laba Tahun Berjalan	2,159	2,723
Dividen	(2,529)	(175)
Dampak Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak	(110,315)	84,239
Atribusi Penghasilan Komprehensif Lain	(60)	19,978
Jumlah	6,867	117,612

e. Non Controlling Interest

Beginning Balance
Attribution of Income for the Year
Dividend
Impact of Acquisition and Establishment of Subsidiaries
Attribution of Other Comprehensive Income
Total

34. Pendapatan Usaha

34. Revenues

	2019 Rp	2018 Rp
Pendapatan Jasa Konstruksi	5,783,502	6,077,796
Penjualan	348,251	120,611
Pendapatan Hasil Investasi	273,367	223,398
Pinjaman yang Diberikan	198,908	210,458
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi	60,432	41,745
Pendapatan Manufaktur	--	144,629
Pendapatan Properti	--	3,031
Pendapatan Sewa alat	--	1,455
Pendapatan Penggantian Biaya	4,997	878
Jumlah	6,669,457	6,824,001

Construction Services Revenues
Sales
Revenue from Investment
Revenue from Interest and Provision of Loans
Revenue from Consultation Fee
Manufacturing Income
Property Income
Revenue from Rent Equipment
Revenue from Reimbursable Cost
Total

a. Pendapatan jasa konstruksi diakui ketika bagian dari pekerjaan telah selesai dikerjakan dan ditentukan berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

a. Revenue from construction services are recognized when part of the work has been completed and are determined based on stage of completion of the contract activity at the end of reporting period (percentage of completion method). Construction percentage of completion is determined based on surveys of work performed.

b. Dari hasil kegiatan investasi, Perusahaan memperoleh hasil sebagai berikut:

b. From the results of investment activities, the Company earns the following:

	2019 Rp	2018 Rp
Hasil Investasi Bunga	203,218	80,336
Bunga Deposito Berjangka	66,631	57,401
Dividen Tunai	2,001	2,175
Laba Penjualan Saham	1,517	3,026
Hasil Investasi yang dikelola		
Laba (Rugi) Belum Realisasi Saham	--	(1,376)
Lain-lain	--	81,836
Jumlah	273,367	223,398

Interest income from investment
Interest on Time Deposits
Cash Dividend
Gain on Sales of Shares
Investment Income which Managed
Unrealized Gain (Loss) from Shares
Others
Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- c. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	21,115	44,670
PT Istaka Karya (Persero)	8,857	8,245
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	7,598	6,586
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)	4,322	2,659
PT Industri Sandang Nasional (Persero)	3,234	--
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	3,232	3,413
PT Survey Udara Penas (Persero)	2,904	--
PT Artha Bangun Pratama	--	1,692
Lain-lain (di bawah Rp 1.000)	147,648	143,193
Jumlah	198,908	210,458

- c. Interest revenue on loans in 2019 and 2018 primarily were as follows:

PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Survey Udara Penas (Persero)
PT Artha Bangun Pratama
Others (less than Rp 1,000)
Total

- d. Pendapatan jasa konsultasi terbesar berasal dari Fee Terbang PT Wisarada sebesar Rp15.683. Pendapatan denda PT Polowijo sebesar Rp1.372. Pendapatan *commitment fee* PT Lintas Samudera Sejahtera sebesar Rp1.333, konsultasi PT Petro Energy sebesar Rp1.363, Pendapatan Provisi dan Biaya admin sebesar Rp1.299, Jasa Konsultasi dari Lembaga Penjamin Simpanan sebesar Rp1.018, PT Duta Utama Makmur Jasa Konsultasi sebesar Rp1.000, Pendapatan *monitoring fee* PT Bina Patria Transmitta sebesar Rp978, Pendapatan monitoring PT Polytama Propindo sebesar Rp795 dan Jasa konsultasi PT Pupuk Kujang sebesar Rp749. Dengan Total Pendapatan sebesar Rp60.432.

- d. The Largest consultancy service revenue is from PT Wisarada's Flying Fee of Rp15,683. The fine income of PT Polowijo amounting to Rp1,372. PT Lintas Samudera Sejahtera's commitment fee income amounting to Rp1,333, PT Petro Energy's consultancy amounting to Rp1,363 Provision Revenues and Admin Fees in the amount of Rp1,299, Consultation Services from the Deposit Insurance Corporation amounting to Rp1,018, PT Duta Utama Makmur Konsultasi Services amounting to Rp1,000, PT Bina Patria Transmitta's monitoring fee income of Rp978, PT Polytama Propindo's monitoring income of Rp795 and PT Pupuk Kujang consulting services in the amount of Rp749. With a total income of Rp60,432.

35. Beban Usaha

35. Operating Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban Usaha			Operating Expense
Beban Proyek	5,158,970	5,534,321	Constructions Services
Pegawai	307,175	280,170	Employee
Beban Bunga Bank	304,095	149,891	Interest Expenses
Harga Pokok Penjualan	318,800	77,148	Cost of Good Sold
Penyusutan	31,577	22,533	Depreciation
Keperluan Kantor	41,558	51,519	Office Supplies
Sewa dan Asuransi	39,180	35,788	Rent and Insurance
Perjalanan Dinas	24,647	21,299	Business Travelling
Pemasaran dan Penjualan	14,239	12,857	Sales and Marketing
Jasa Konsultan	8,543	7,472	Consultant Fees
Investasi	16,544	244	Investment
Imbalan Pasca Kerja - Bersih	5,323	6,039	Employees Benefit - Net
Penyisihan (Pemulihan) Penurunan Nilai Piutang	(32,864)	65,927	(Recovery) of Receivables
Lain-lain (di bawah Rp 1 milyar)	51,973	27,357	Others (below Rp 1 billion)
Jumlah Beban Usaha	6,289,760	6,292,565	Total Operating Expense

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

36. Bagian Laba Ventura Bersama

36. Share of the Profit of Joint Venture

	2019 Rp	2018 Rp	
Nindya - Jaya Konstruksi	22,510	40,480	Nindya - Jaya Konstruksi
Nindya - Adhi Karya	24,771	5,146	Nindya - Adhi Karya
Nindya - Sacna	20,650	—	Nindya - Sacna
Nindya - Utama Karya	11,741	3,631	Nindya - Utama Karya
Nindya - MCC - Wika - Waskita	10,131	14,702	Nindya - MCC - Wika - Waskita
Nindya - Karya Sarana	7,370	3,522	Nindya - Karya Sarana
Nindya - Waskita - Jaya Purnama	6,419	—	Nindya - Waskita - Jaya Purnama
Nindya - Wijaya Karya	5,794	12,774	Nindya - Wijaya Karya
Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya	4,961	4,911	Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya
Nindya - Gerbang Saranabaja	3,238	—	Nindya - Gerbang Saranabaja
Nindya - Thamrin - Dwifarita	1,875	—	Nindya - Thamrin - Dwifarita
Nindya - Bangun Bejana Baja	1,519	—	Nindya - Bangun Bejana Baja
Nindya - PP - Utama Karya	1,124	703	Nindya - PP - Utama Karya
Nindya - Kencana	(1,703)	3,898	Nindya - Kencana
Nindya - Dewa Ruci	(2,418)	5,328	Nindya - Dewa Ruci
Nindya - Pembangunan Perumahan	(8,622)	2,402	Nindya - Pembangunan Perumahan
Nindya - Bumi Karsa	(16,893)	4,462	Nindya - Bumi Karsa
Nindya - Cipuga	(28,896)	(6,074)	Nindya - Cipuga
Nindya - Adhi Karya - Wira	—	2,754	Nindya - Adhi Karya - Wira
Nindya - Leo Tunggal Mandiri	—	(3,030)	Nindya - Leo Tunggal Mandiri
Nindya - Universal	—	12,962	Nindya - Universal
Nindya - Indah Pratama	—	3,145	Nindya - Indah Pratama
Nindya - Sejahtera	—	1,583	Nindya - Sejahtera
Nindya - PP - Utama Karya	—	1,506	Nindya - PP - Utama Karya
Nindya - Tamiang	—	(14,458)	Nindya - Tamiang
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	3,135	6,474	Others (Less than Rp 1 Billion each)
Jumlah	66,706	106,821	Total

37. Laba per Saham

37. Earning per Share

Laba per saham 2019 dan 2018 dihitung dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah Rp108.424 dan Rp142.183(angka penuh).

Earning per share, 2019 and 2018 is calculated from income for the year attributable to owners of the parent is Rp108,425 and Rp142,183 (full amount).

	2019 Rp	2018	
Laba (Rupiah penuh)	324,914,807,035	426,076,501,124	Income (In full of Rupiah)
Jumlah Lembar Saham	2,996,688	2,996,688	Number of Shares
Laba Per Saham Dasar (Rupiah penuh)	108,424	142,183	Basic Earning per Share (In full of Rupiah)

Tidak ada potensi dilusi sehingga tidak menghitung laba dilutif.

There is no potential for dilution so it does not calculate dilutive profit.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

38. Beban Pajak Penghasilan Final

38. Final Income Tax Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	
Jasa Konstruksi			Construction
Pendapatan Jasa Konstruksi	5,571,735	6,077,796	Construction Income
Pendapatan Jasa Konstruksi Tidak Dikenakan Pajak	(274,054)	(279,230)	Construction Non-taxable Income
Jumlah Pendapatan Jasa Konstruksi	5,297,681	5,798,566	Construction Total Income
Non Jasa Konstruksi			Non-construction
Pendapatan Jasa Non Konstruksi	186,896	149,115	Construction Income
Pendapatan Jasa Non Konstruksi Tidak Dikenakan Pajak Final	(183,236)	(146,659)	Non-Construction Non-Final taxable Income
Jumlah Pendapatan Non Jasa Konstruksi	3,660	2,456	Construction Total Income
Ditambah (Dikurangi):			Added (Less):
Penambahan Beda Waktu Pengenaan Pajak	--	--	Addition of Time Difference of Tax
Pendapatan Jasa Konstruksi Kena pajak	5,297,681	5,798,566	Construction Taxable Income
Pendapatan Non Jasa Konstruksi Kena Pajak	3,660	2,456	Non-construction Taxable Income
Jumlah Pendapatan Perusahaan Kena Pajak	5,301,341	5,801,022	Total Taxable Income
Beban Pajak Final Konstruksi			Constructions Final Tax Expenses
3% x 2019 : Rp5.297.681	158,931	--	3% x 2019 : Rp5,297,681
3% x 2018 : Rp5.798.566	--	173,957	3% x 2018 : Rp5,798,566
Beban Pajak Final Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan			Land and Building Rental Final Tax Expenses
10% x 2019 : Rp2.361.288.600	236	--	10% x 2019 : Rp2,361,288,600
10% x 2018 : Rp1.997.706.000	--	200	10% x 2018 : Rp1,997,706,000
Beban Pajak Final atas Penjualan Properti			Non Constructions Final Tax Expenses
2.5% x 2019 : Rp1.297.790.520	32	--	2.5% x 2019 : Rp1,297,790,520
2.5% x 2018 : Rp458.563.640	--	11	2.5% x 2018 : Rp458,563,640
Jumlah Beban Pajak Final	159,199	174,168	Total Final Income Tax Expenses

40. Transaksi Non Kas

40. Non Cash Transaction

Grup memiliki transaksi non kas sehubungan dengan penambahan aset tetap, aset takberwujud dan properti Investasi dengan rincian berikut ini:

Group have non-cash transactions regarding acquisition of

	2019 Rp	2018 Rp	
Novasi Kredit antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT RILJ dan PT PPAK	357,586	--	Debt renewal between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT RILJ dan PT PPAK
Perolehan Aset Tetap melalui Utang Usaha	117,749	3,448	Property, Plant, Equipment Acquisition through Account Payable
Jumlah	475,335	3,448	Total

40. Kontinjensi

40. Contingencies

PT NK

PT NK sedang menghadapi beberapa perkara hukum baik dalam proses mengajukan gugatan maupun yang saat ini sedang menunggu putusan pengadilan atau kasasi. PT NK meyakini bahwa keputusan pengadilan atau kasasi dalam kasus-kasus tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja PT NK.

PT NK

PT NK is facing several legal cases both in the process of filing a lawsuit and currently waiting for a court verdict or cassation. PT NK believes that the decision of the court or cassation in such cases will not bring material impacts on the financial condition and performance of the PT NK.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 perkara hukum yang sedang berjalan antara lain:

1. Piutang kepada PT Buana Risma (PT BR) adalah sisa tagihan proyek kerja sama pembangunan perumahan Malaka Asri. PT BR sebagai konsultan manajemen proyek pembangunan serta pembuat program pemasaran telah melampaui batas kewenangannya dengan melakukan penjualan atas rumah dan menerima pembayaran langsung dari pembeli. Namun hasilnya tidak disetorkan kepada PT NK.

Berdasarkan kesepakatan PT BR mengakui memiliki utang kepada Perusahaan sebesar Rp3.083 termasuk bunga dan status penyelesaian tagihan saat ini adalah menunggu PT BR melakukan perhitungan kewajiban dan pelepasan hak tanggungan untuk aset yang akan diserahkan kepada Perusahaan. Perkara ini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN (Jamdatun).

Pada tanggal 13 November 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan yang dalam perkara tersebut PT NK sebagai Pihak Penggugat dan PT BR sebagai Tergugat. Putusan tersebut menyatakan gugatan PT NK tidak diterima. Sehingga Grup mengajukan Banding.

Kemudian pada tanggal 19 Juni 2015 terbit putusan Pengadilan Tinggi yang isinya menerima permohonan banding Grup dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut juga menyatakan PT BR telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap PT NK dan menghukum PT BR untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3.083.

Sesuai surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: W10.U3/1656/HK.02/8/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Permohonan Keterangan Inkracht, disampaikan bahwa dalam perkara perdata antara PT NK dan PT BR jika sampai dengan batas waktu yg ditentukan oleh Undang-undang para pihak (Penggugat & Tergugat) tidak mengajukan upaya hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Selatan No.171/Pdt.G/2014PN.Jkt.Sel juncto No.131/PDT/2015/PT.DKI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Up to December 31, 2019, legal cases in progress, are as follows:

1. Accounts receivable to PT Buana Risma (PT BR) is remaining billing of Malaka Asri residential construction cooperation project. PT BR as the projects construction management consultant as well as the creator of marketing program has exceeded its limit by selling home and received direct payment from the buyer. Meanwhile, the payment has not been received by the Company.

Based on the deal, PT BR admits that it has debt to the Company as Rp3,083 including interest. The current status of the bill is waiting PT BR to calculate liabilities and mortgage waiver for assets which shall be submitted to the company. These matters are handled by the Young Attorney General Civil and TUN (Jamdatun).

On November 13, 2014 the District Court of South Jakarta has determined the verdict that contains PT NK accusation. The verdict stated that the PT NK lawsuit is not accepted. So that, Group decided to fill the appeal.

Then, on June 19, 2015 the Supreme Court declared the verdict which stated that the Supreme Court had received the appeal of PT NK and issued cancelation of the South Jakarta District Court verdict. The Supreme Court also stated that PT BR had done a default that caused losses to PT NK and punished PT BR to pay compensation as much as Rp3,083

Based on the letter from South Jakarta District Court Number: W10.U3/1656/HK.02/8/2016 dated August 30, 2016 about Inkracht Certification Request, stated that the civil case between PT NK and PT BR up to the time limit specified by Law, the parties (Prosecutor & Defendant) would not filled a legal action, then the Sentence of South Jakarta District Court No. No.171/Pdt.G/ 2014PN.Jkt.Sel juncto No.131/PDT/2015/PT.DKI has a permanent legal course (inkrach van gewijsde).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Karena tidak ada upaya hukum lagi dari PT BR, dan sebagai tindak lanjut dari putusan PN Jakarta Selatan No.171/Pdt.G/2014PN.Jkt.Sel juncto Putusan PT No.131/PDT/2015/PT.DKI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde), PT NK mengajukan permohonan eksekusi putusan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, Tanggal 23 Agustus 2017 telah diterbitkan Surat Penetapan Eksekusi Putusan dari Ketua Pengadilan Negeri. Melalui Penetapan Eksekusi Tersebut, PT BR dipanggil sebanyak 2 kali oleh PN Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 10 Oktober PT NK mengajukan permohonan sita dan eksekusi putusan perkara No. 171/PDT.G/2014/PN.JKT SEL juncto Putusan PT No.131/PDT/2015/PT.DKI.

Tanggal 11 Juli 2018, adanya surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Hal : Menindaklanjuti Pengajuan Bukti Pendaftaran Blokir Terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 555 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 1452, terhadap Penetapan Nomor: 42/Eks.Pdt/2017.

Tanggal 30 Juli 2018, adanya Surat dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat kepada Ketua PN Jakarta Selatan perihal menindaklanjuti pengajuan bukti pendaftaran blokir terhadap Sertipikat HGB No. 555 dan Sertipikat SHM No. 1452, terhadap Penetapan Nomor: 42/Eks.Pdt/2017. Tanggal 21 Januari 2019 terbit pelaksanaan sita eksekusi.

Tanggal 22 April 2019 perusahaan telah mengajukan permohonan Lelang Eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Tanggal 7 Agustus 2019 telah dilaksanakan survey lokasi oleh KJPP Dolly dan tim pengacara untuk melakukan appraisal terhadap asetnya BR dalam rangka penentuan harga limit dari Pengadilan Negeri. pada tanggal 11 September 2019 telah dilakukan survey terhadap aset BR.

Tanggal 15 November 2019, KJPP Dolli Siregar & Rekan telah menyerahkan laporan final appraisal atas tanah kosong seluas 130 m² dan bangunan seluas 39 m² dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. nilai pasar sebesar Rp543.
- b. nilai likuidasi sebesar Rp434.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Due to no further legal remedies from PT BR, and as a follow up to the South Jakarta District Court decision No. 171/Pdt.G/2014PN.Jkt Sel juncto HC Decision No.131/PDT/2015/PT.DKI has legal force still (incracht van gewisjde), PT NK submitted an application for the execution of the verdict through the South Jakarta District Court. Then, on August 23, 2017, a Decision Letter on the Execution of Decisions has been issued from the Chair of the District Court. Through the Determination of Execution, PT BR was summoned twice by the South Jakarta DC. Then on October 10, PT NK submitted a petition for seizure and the execution of case decision No. 171/PDT.G/2014/PN.JKT SEL juncto HC Decision No.131/PDT/2015/ PT.DKI.

On July 11, 2018, there was a letter from the South Jakarta District Court to the Head of the West Bandung Regency: to follow up the evidence for block the Land Office, p. 555 and Buildings Rights of Certificate (SHGB) No. 1452, for Determination of Number: 42 / Eks.Pdt / 2017.

On July 30, 2018, there was a letter from the Ministry of Agrarian & Spatial Planning / BPN West Bandung Regency Land Office of West Java Province to the Chairperson of the South Jakarta District Court regarding the follow up on the submission of blocking registration evidence to the Certificate of HGB No. 555 and Certificate of SHM No. 1452, for Determination of Number: 42 / Eks.Pdt / 2017. January 21, 2019 the execution of seizure execution.

April 22, 2019 the company has submitted an application for Execution Auction to the District Court.

On August 7, 2019 a location team survey was conducted by KJPP Dolly and Team Lawyer to conduct an appraisal of BR assets in the context of determining the price limit of the District Court. On September 11, 2019, a survey of assets of BR.

On 15 November 2019, the KJPP Dolli Siregar & Partners has submitted a final appraisal report on vacant land measuring 130 sqm and building area of 39 sqm with the following conclusion :

- a. market value of Rp543.
- b. liquidation value of Rp434.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tanggal 6 Desember 2019, PT NK telah menyerahkan hasil laporan penilaian appraisal atas tanah kosong dari KJPP Dolly & Siregar kepada kuasa hukum untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Negeri Bandung.

2. Proyek Aston adalah proyek paket pekerjaan struktur dan general finishing Aston Mangga Dua Jakarta dengan PT Mandiri Karya Cipta Indah (PT MKCI) sebagai pemilik pekerjaan. Nilai proyek sebesar Rp52.000, proyek berakhir karena PT MKCI selalu menghindari untuk penetapan progress fisik pekerjaan termasuk menunda pembayaran sebagai akibat belum adanya kesepakatan progress.

Tagihan yang diajukan sebesar Rp13.678 termasuk kenaikan harga (eskalasi) dan status penyelesaian tagihan pada 2013 adalah menunjuk Tim Jamdatun sebagai kuasa direksi perusahaan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dilakukan registrasi perkara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan PT NK tidak dapat diterima. PT NK mengajukan upaya banding dan pada tanggal 23 April 2013 telah menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 20 Mei 2014 Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. PT NK mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan dari kasasi tersebut antara lain menolak permohonan kasasi PT NK.

Tanggal 2 Oktober 2017 sesuai surat Direksi nomor: 1676/DIRUT/SEKPER/10/2017 perihal Permohonan Pendapat Hukum, PT NK bersurat kepada Jamdatun meminta pertimbangan hukum atas penghapusan piutang macet pada proyek Aston Mangga Dua. Sampai saat ini Jamdatun masih mengkaji pertimbangan hukum atas penghapusan piutang macet tersebut.

Tanggal 3 Oktober 2019 telah dilakukan ekspose terhadap *Legal Opinion* (LO) untuk PT NK di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Date December 6, 2019, PT Nindya Karya has submitted the results of the assessment report on the appraisal of land left blank KJPP Dolly & Siregar to legal counsel to then submitted to the Bandung District Court.

2. Aston Project is a structural work package project and general finishing for Aston Mangga Dua Jakarta with PT Mandiri Cipta Karya (PT MKC) as the owner of the project. The project which values for Rp52,000, had to be ended due to PT MKC always evading the establishment of physical work progress, included delaying payments as the result of the lack of progress agreement.

The proposed bill of Rp13,678 including price increases (escalation) and the status of the settlement Bill in 2013 is pointing to the Jamdatun Team as the power of the directors of the company to file a lawsuit through the Central Jakarta District Court and registration have been made through the Registrar of the District Court in Central Jakarta.

Then the Central Jakarta District Court issued a ruling stating that the PT NK lawsuit was not acceptable. PT NK submitted an appeal attempt and on April 23, 2013, delivered a memory of the appeal to the High Court through the Central Jakarta District Court. On May 20, 2014 the Central Jakarta High Court issued a ruling stating that the District Court's verdict was upheld. PT NK submitted a request for cassation at the Supreme Court. The decision of the cassation, among others, rejected the application for the cassation of PT NK.

On October 2, 2017 according to the Directors' letter number: 1676/DIRUT/SEKPER/10/2017 regarding the Request for Legal Opinion, PT NK corresponded to Jamdatun asking for legal considerations for the elimination of bad debts in the Aston Mangga Dua project. Until now, Jamdatun is still reviewing legal considerations for the elimination of bad debts.

On October 3, 2019, a Legal opinion was held for PT NK at the Deputy Attorney General for Civil and Administrative Affairs (Jamdatun).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 29 Oktober 2019, melalui surat No. B-569/G/Gph.1/10/2019, Kejaksaan RI mengeluarkan Pendapat Hukum (LO) atas permohonan pendapat hukum PT NK pada perkara perdata, *Lawyer Opinion* tersebut pada intinya menyarankan untuk mengajukan kembali gugatan terhadap PT MKCI.

Pada tanggal 22 November 2019, pendapat hukum (*Legal Opinion*) dari *retainer* telah dinyatakan diterima dan Perusahaan akan mengajukan gugatan ulang.

- Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan proyek tahun anggaran 2004-2011. Nilai total kontrak proyek sebesar Rp771.599 dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebagai pemilik pekerjaan. Dalam mengerjakan proyek tersebut PT NK menjalin kerja sama operasi dengan PT Tuah Sejati, dan membentuk perjanjian kerja sama dengan nama Nindya Sejati Operasi Bersama.

Persentase nilai kepesertaan masing-masing perusahaan tersebut adalah PT Nindya Karya (Persero) sebesar 55% dan PT Tuah Sejati 45%. Laba yang dibukukan dari pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Lanjutan porsi PT NK yaitu sebesar Rp44.681.

Pada tanggal 29 Oktober 2018, pihak berwenang telah melakukan penyitaan dokumen berupa prosedur pemasaran, operasi, dan satuan pengawas *internal* Perusahaan. Sampai 31 Desember 2018, perkara ini masih dalam proses hukum.

Pada tanggal 31 Desember 2019, PT NK telah membukukan beban lain-lain sebesar Rp15.638. atas pencadangan dana yang dibatasi penggunaannya.

- Piutang kepada PT Maju Sentosa Cemerlang (MSC) adalah sisa tagihan kerjasama proyek. Pada paket pekerjaan struktur dan arsitektur pembangunan Koja Trade Mall di Jakarta Utara, MSC tidak melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar 90,77% dan pekerjaan tambah / kurang kepada PT NK.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On October 29, 2019, through letter No.B-569/G/Gph.1/10/2019, AGO RI issued a Legal Opinion (LO) on the request for a legal opinion PT NK on civil cases, the Opinion Lawyer in essence advised to resubmit the lawsuit against PT MKCI.

On November 22, 2019, the Legal Opinion from *retainer* had been received and the Company will resubmit the lawsuit.

- Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) s a 2004-2011 fiscal year project. The total contract value of the project is Rp771,599 with the Free Trade Zone and Sabang Free Port (BPKS) as the owner of the work. In working on the project PT NK established joint operations with PT Tuah Sejati, and formed a cooperation agreement under the name Nindya Sejati Joint Operation.

The share value percentage for each companies is PT Nindya Karya (Persero) amounted to 55% and PT Tuah Sejati 45%. Accounted operating income from the Sabang Loading Dock Construction Projects in the portion of PT NK which amounted to Rp44,681.

On October 29, 2018, the authorities have confiscated documents in the form of marketing procedures, operations, and the Company's internal supervisory unit. Until December 31, 2018, this case is still be in the legal process.

On December 31, 2019, PT NK has charged into other expenses amounted to Rp15,638, for the allowance of restricted fund.

- Receivables from PT Maju Sentosa Cemerlang (MSC) are the remaining project collaboration debts. In the Koja Trade Mall construction structure and architecture package in North Jakarta, MSC did not pay 90.77% for work performance and added / less work to PT NK.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT Nindya Karya (Pesero) mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan isi putusan mengabulkan gugatan MSC untuk sebagian. PT Nindya Karya (Pesero) mengajukan upaya banding melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan isi putusan menyatakan MSC telah wanprestasi kepada PT Nindya Karya (Pesero); menghukum MSC untuk membayar kerugian kepada PT Nindya Karya (Pesero) seluruhnya sebesar Rp5.226. Putusan kasasi telah terbit. Pada tanggal 24 Oktober 2018 PT MSC minta waktu 2 minggu untuk menyiapkan usaha penyelesaian kewajiban MSC kepada PT Nindya Karya (Pesero).

Pada tanggal 5 Agustus 2019 telah dilaksanakan survey lokasi aset MSC oleh KJPP Dolly dan Tim Kuasa Hukum.

Pada tanggal 20 Agustus 2019 telah keluar hasil appraisal dari KJPP Dolly Siregar & Rekan atas aset yang terletak di Jalan Kramat Jaya Koja, Jakarta Utara.

5. Poltekkes Bangka Belitung telah wanprestasi Terhadap Pembayaran atas progress pekerjaan yang proyek pembangunan gedung Poltekkes Bangka Belitung sehingga mengakibatkan kerugian oleh Perusahaan secara materiil.

Tanggal 7 Mei 2019 terima salinan Putusan Peninjauan Kembali nomor: 367/PK/Pdt/2018, tentang isi Putusan Pengadilan Peninjauan Kembali nomor: 367 PK/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Tanggal 24 Juli 2019 telah didaftarkan Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.: 5/Pdt.G/2015/PN.Pgp tgl 4 Agt 2015 Jo. 34/PDT/2015/PT.BBL tgl 10 Des 2015 Jo. 1762 K/PDT/2016 tgl 6 Sept 2016 Jo. 367 PK/PDT/2018 tgl 28 Juni 2018 kepada Ketua PN Pangkalpinang.

Pada tanggal 16 Desember 2019, PT NK mengeluarkan Penetapan No: 4/eks.2019.5. Pdt.G/2015/PN Pgp yang pada pokoknya memerintahkan Poltekkes Bangka Belitung untuk membayar kewajibannya sesuai putusan MA No. 1762 K/Pdt/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp30.506.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT Nindya Karya (Pesero) submits a lawsuit through the South Jakarta District Court, with the contents of the decision granting the MSC claim for part. PT Nindya Karya (Pesero) submitted an appeal effort through the DKI Jakarta High Court, with the contents of the decision stating MSC had defaulted to PT Nindya Karya (Pesero); sentencing MSC to pay losses to PT Nindya Karya (Pesero) for a total of Rp 5,226. The decision on cassation has been issued. On October 24, 2018, PT MSC requested 2 weeks to prepare an effort to settle MSC's obligations to PT Nindya Karya (Pesero).

On August 5, 2019, MSC's asset location survey was conducted by KJPP Dolly and the Legal Counsel Team.

On August 20, 2019, an appraisal result was issued by KJPP Dolly Siregar & Partners for assets located at Jalan Kramat Jaya Koja, North Jakarta.

5. Poltekkes Bangka Belitung has been in Wanprestasi against building project work Poltekkes Bangka Belitung so that losses by The Company

On May 7, 2019 receive a copy of Reconsideration Decision number: 367 / PK / Pdt / 2018, about the contents of the Review Court Decision number: 367 PK / Pdt / 2018 dated June 28, 2018, the verdict reads as follows:

On July 24, 2019 has been registered Pangkalpinang PN Request Execution Decision No.: 5 / Pdt.G / 2015 / PN.Pgp dated August 4, 2015 Jo. 34 / PDT / 2015 / PT.BBL date 10 Des 2015 Jo. 1762 K / PDT / 2016 dated of September 6, 2016 Jo. 367 PK / PDT / 2018 dated June 28, 2018 to the Chairman of the PN Pangkalpinang.

December 16, 2019, PT NK issued a Determination of No: 4 / eks.2019.5.Pdt.G / 2015 / PN PGP substantially KDP ordered to pay obligations under the Supreme Court decision No. 1762 K / Pdt / 2016 dated September 6, 2016 amounting to Rp30,506.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

6. PT NK telah menyelesaikan prestasi 94,76% kepada PT Fatimah Azzahra (FA) sehingga PT Fatimah Azzahra berkewajiban melaksanakan pembayaran kepada PT NK sebesar Rp 17.457 namun faktanya PT Fatimah Azzahra baru menyelesaikan kewajiban kepada NK sebesar Rp13.948.

Putusan BANI No. 861/VI/ARB-BANI/2016, tanggal 27 Maret 2017 yang memutuskan bahwa kewajiban PT Fatimah Azzahra kepada PT NK adalah sebesar Rp 3.566 telah bersifat mengikat dan *final*.

Pada tanggal 29 Oktober 2019, Kejaksaan Tinggi Riau menyampaikan surat kepada Perusahaan perihal penyampaian proposal rencana pembayaran dari PT Fatimah Azzahra yang menyatakan bahwa PT Fatimah Azzahra bersedia membayar sisa pembayaran dalam bentuk penyerahan apartemen di daerah Dago, Bandung dan terhadap kekurangan sisa pembayaran akan dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak Januari 2020 sampai Desember 2022.

7. PT. Dok Perkapalan Surabaya (Persero) ("DPS") tidak melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan Pembangunan Landasan Galangan DOK-Lamongan (PT Dok dan Perkapalan (Persero) yang telah diselesaikan oleh Perusahaan.

PT NK bersurat ke PT DPS sesuai surat nomor : 112/NK-WIL.IV/KEU/04/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Percepatan Penyelesaian Outstanding PT DOK Perkapalan.

PT NK bersurat ke PT DPS Perkapalan sesuai surat No:304/NK-WIL.IV/KEU/09/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian Outstanding PT DPS.

PT DPS bersurat ke PT NK nomor: 16/3501-12/DS/IV/N-Awn tanggal 30 Des 2016 perihal Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian Outstanding. Disampaikan bahwa berkaitan dg nilai outstanding PT DOK Perkapalan Surabaya (Persero) sebesar Rp4.730.048.000,- akan dibahas dalam pertemuan pada minggu ke 2 bulan Januari 2017 dengan agenda acara Pembahasan Penyelesaian para pihak dalam bentuk sinergi BUMN seperti melakukan KSO, pengerjaan proyek bersama ataupun dengan cara lainnya untuk penyelesaiannya.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

6. PT NK has completed the working progress 94.76% to PT. Fatimah (FA) so then PT Fatimah Azzahra is obliged to carry out payments to PT NK Rp17,457 but in fact the new PT Fatimah Azzahra has only settled NK amounting to liabilities to Rp13,948.

BANI Decision no. 861 / VI / ARB-BANI / 2016, dated March 27, 2017 which decided that the obligation PT Fatimah to PT NK is Rp3,566 has to be final.

On October 29, 2019, Riau High Prosecutors Office send a letter to the Company regarding submission of payment plan proposal from PT Fatimah Azzahra which stated that PT Fatimah Azzahra was willing to pay the remaining payment in the form of handing over an apartment in the Dago, Bandung and the remaining payment would be made by installments for a period 3 years from January 2020 to December 2022

7. PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero) ("DPS") does not make payments accomplishment of the Project Runway construction Shipyard DOK-Lamongan (PT Dok and Shipping (Persero) accomplished by Company.

PT NK send corresponding letter to PT DPS number: 112 / NK-WIL.IV / KEU / 04/2016 dated April 13, 2016, concerning the Acceleration Resolution Outstanding PT DOK Perkapalan.

PT NK send corresponding letter to PT DPS No:304 / NK-WIL.IV / KEU / 09/2016 on September 14, 2016 concerning the follow-up to Accelerate Completion of Outstanding PT DPS.

PT DPS sent a letter to PT Nindya Karya number: 16 / 3501-12 / DS / IV / N-Awn Des 30th, 2016 concerning the Follow-Up to Accelerate Completion of Outstanding. Submitted that the outstanding amount related dg PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero). Rp 4,730,048,000 will be discussed during the second week of January 2017 with the agenda discussion of the Settlement of the parties in the form of synergy as do KSO, jointly working on projects or otherwise for its completion.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Adanya pertemuan dari pihak PT NK (dihadiri oleh Pak Rusli) dengan PT DPS pada tanggal 28 Mei 2018, dengan kesepakatan PT DPS memutuskan untuk melepaskan Aset Tanah dan Bangunannya yang berlokasi di Jl. Irian Barat No. 19, Surabaya.

Tanggal 14 Agustus 2018, Direktur Utama PT DPS bersurat kepada Ibu Menteri BUMN Republik Indonesia. Sesuai surat nomor: 18/1958-8/DS/I/M-1 perihal Permohonan Persetujuan Ijin Pelepasan & Optimalisasi Aset Perusahaan

Pada tanggal 23 September 2019, Perusahaan telah bersurat kembali untuk penagihan kepada PT DPS sesuai surat No.1689/DKS/SEKPER/09/2019 tentang Penyelesaian Outstanding PT DOK.

8. PT NK dan PT Lampiri Djaya Abadi telah membentuk dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi nomor: 334/NKDI/TEKNIK/07/2013 tertanggal 2 Juli 2013 (NINDYA-LAMPIRI, JO) untuk Proyek Aceh Reconstruction Project (IP-545) – Road Sub Project Package No. I : Section Sp. Kraft-Batas Aceh Tengah dengan porsi kepesertaan PT NK : 51% dan PT Lampiri Djaya Abadi : 49%.

Tanggal 23 Agustus 2017, Kuasa Hukum PT Nindya Karya mengajukan permohonan kepada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Tanggal 13 Juli 2018 dibacakan putusan BANI, antara lain sebagai berikut:

- a. Lampiri dinyatakan telah wanprestasi
- b. Lampiri diperintahkan untuk mengembalikan dan membayar hutang sisa pencairan/pinjaman dana kepada PT NK sebesar Rp16,422.
- c. Lampiri diperintahkan untuk mengembalikan biaya BANI kepada PT NK sebesar Rp279.

Pada tanggal 12 Mei 2019, Kuasa Hukum PT NK mengajukan permohonan eksekusi putusan BANI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

A meeting of the PT NK (attended by Mr. Rusli) with PT DPS on May 28, 2018, with the agreement of PT DPS decided to release the Assets Land and Building located at Jl. Irian Barat No. 19, Surabaya.

August 14, 2018, President Director of PT DPS sent a letter to the Minister of SOEs Republic of Indonesia Corresponding letter number: 18 / 1958-8 / DS / I / M-1 regarding the Request Approval Waiver & Optimization Company Assets.

On September 23, 2019, the Company made the letter for billing to PT DPS in accordance with letter No. 1689/DKS/SEKPER/09/2019 concerning Settlement of Outstanding PT DPS.

8. PT NK and PT Lampiri Djaya Abadi has formed and signed a Joint Operation Agreement number: 334 / NKDI /TEKNIK/ 07/2013 dated July 2, 2013 (Nindya-Lampiri, JO) to project the Aceh Reconstruction Project (IP-545) - Road Sub Project Package No. I: Section Sp. Kraft-Border Central Aceh with a portion of membership PT NK 51% and PT Lampiri Djaya Abadi: 49%.

On August 23, 2017, Attorney team of PT NK apply to BANI (Indonesian National Board of Arbitration).

On July 13, 2018, BANI verdict was read, as follows:

- a. Lampiri declared default
- b. Lampiri ordered to restore and pay the residual debt disbursement / loan funds to PT NK of Rp16,422.
- c. Lampiri ordered to refund the cost of the descendants of the PT NK for Rp279.

On May 12, 2019, the Legal Counsel of the Company filed an application for the execution of BANI's decision through the West Jakarta District Court.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

41. Perikatan dan Perjanjian

**a. Perjanjian Restrukturisasi dan Dana
Talangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1. PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)**

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-716/MBU/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penyehatan PT MNA dan Surat Menteri Keuangan No. S-478/MK.06/2008 tanggal 5 September 2008 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT MNA, Perusahaan memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berlaku pada awal periode pembayaran bunga. Pinjaman akan jatuh tempo 8 (delapan) tahun dihitung sejak ditanda tangannya perjanjian pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 8 September 2016, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga pertama kali pada tanggal 8 Maret 2010.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-152/MBU/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi MNA dan surat persetujuan Menteri Keuangan No. S-427/MK.06/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal persetujuan usulan Menteri BUMN terkait tambahan pemberian fasilitas pinjaman oleh Perusahaan kepada MNA sebesar Rp561.000 dalam rangka restrukturisasi dan/atau revitalisasi MNA sebagai dana talangan untuk MNA sementara menunggu pencairan dana tambahan Penyertaan Modal Negara.

Pada tanggal 21 Oktober 2011 dilakukan Adendum IV No. 15 Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversikan Dalam Rangka Penyelamatan Usaha MNA yang diantaranya mengatur tentang penambahan Fasilitas Pinjaman dengan jumlah maksimal Rp861.000 dengan rincian Rp300.000 sebagai Fasilitas Pinjaman CLF (*Convertible Loan Facility*) dan Rp561.000 sebagai Fasilitas Pinjaman Talangan RR (Restrukturisasi dan Revitalisasi) serta perubahan mekanisme pembayaran bunga, tunggakan kewajiban, denda serta provisi dan biaya administrasi.

41. Commitments and Agreements

**a. Restructuring and Fund Advance of State
Own Enterprise (SOE's) Agreement
1. PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)**

Based On The Letter Of The Minister of State-Owned Enterprises No. S-716/MBU/2008 September 4, 2008 subject Bank PT MNA and the letter of the Minister of Finance No. S-478/MK. 06/2008 dated September 5, 2008 subject to approval of restructuring and/or Revitalizing PT MNA, the company provides loans with a ceiling of Rp300,000 with an interest rate of Bank Indonesia Certificates (SBI) in effect at the beginning of the the period of interest payments. The loan will be due 8 (eight) years counted since the signing of the loan agreement or no later than September 8, 2016, while overdue interest payments the first time on March 8, 2010.

Based on the decision letter of the Minister of State-owned enterprises no. KEP-152/MBU/2011 June 27, 2011 about the restructuring and revitalization of the MNA and/or approval of Finance Minister no. S-427/MK. 06/2011 July 27, 2011 subject to approval of the proposals of the Minister of State-Owned Enterprises the granting of additional related facilities loans by the company to the MNA Rp561,000 restructuring and/or revitalization of MNA as bailouts for MNA While waiting for the disbursement of additional Equity Capital of the country.

On October 21, 2011 done Adendum IV No.15 Loan Agreement can be converted in order to Rescue the MNA Ventures among them set about adding loan facility with maximum amount of Rp861,000 with details Rp300,000 loan facility as a CLF (Convertible Loan Facility) and Rp561,000 as Bridging loan facility RR (Restructuring and Revitalization) as well as changes in the mechanism of interest payments in arrears, liabilities, fines and fees and costs Administration.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-107/MBU/02/2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang pelaksanaan Restrukturisasi dan /atau Revitalisasi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan surat persetujuan Menteri Keuangan No. S-21/MK.06/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Permohonan Persetujuan atas Penggunaan Dana RR PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan penanganan RR PT MNA secara keseluruhan.

Pada Tanggal 16 Februari 2016, Perusahaan melalui Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Merpati Nusantara Indonesia Airlines (Persero) Nomor 17 memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp 500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5 %per tahun bruto (termasuk pajak atas bunga). Pinjaman akan jatuh tempo 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2018. Pinjaman akan dialokasikan untuk membayar upah tertunggak dan/atau sebagian pesangon karyawan PT MNA serta biaya proses RR lainnya.

Pada tanggal 16 November 2016 dilakukan Addendum V No. 09 Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversikan Dalam Rangka Penyelamatan Usaha MNA yang diantaranya mengatur perpanjangan jangka waktu Fasilitas Pinjaman dengan masa perpanjangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman CLF serta penyampaian informasi perubahan.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, telah dilakukan beberapa kali addendum perubahan atas Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Merpati Nusantara Indonesia Airlines (Persero). Pada tanggal 27 Mei 2019 melalui Addendum VII Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Merpati Nusantara Indonesia Airlines (Persero) No. 36 telah dilakukan perpanjangan jatuh tempo fasilitas pinjaman menjadi tanggal 15 Februari 2020.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based On The Letter of The Minister of State-Owned Enterprises No. S-107/MBU /02/2016 February 3, 2016 on the implementation of Restructuring and/or Revitalization of PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) by the Asset management company PT (Persero) and Letter of the Minister of Finance's approval No.S-21/MK-06/ 2016 dated January 20, 2016 about applying for Approval for the use of the Fund Asset management company RR PT (Persero) and PT MNA RR handling overall.

On February 16, 2016, based on Deed of Agreement Fund Lending for Restructuring and/or Revitalization Loan PT Merpati Nusantara Indonesia Airlines (Persero) No.17, the Company approved loans with maximum credit facility amounting to Rp500,000 with the interest rate of 10.5% per annum gross (including tax on interest). The loan will due date 2 (two) years from the signing of the loan agreement or at the latest dated February 15, 2018. The loan will be allocated to pay the owed wages and / or some of PT MNA employee severance and other RR process costs.

On November 16, 2016 do Addendum V No. 09 Loan Agreement can be converted in order to Rescue the MNA Ventures including arranging an extension period of loan facility with a maximum extension period 10 (ten) years from the date of the signing of the loan agreement as well as the delivery of information changes to CLF outstanding debt over loan facility CLF.

Since the year 2016 to 2019, has done a number of times changes to the deed of addendum Agreement Granting a loan Restructuring and/or Revitalization of PT Merpati Nusantara Airlines Indonesia (Persero). On May 27, 2019 through Addendum VII Deed Agreement Granting a loan Restructuring and/or Revitalization of PT Merpati Nusantara Airlines Indonesia (Persero) No. 36 has done an extension of the maturity of the loan facilities be February 15, 2020.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Dalam pelaksanaannya atas program restrukturisasi dan/atau revitalisasi PT MNA, pada tanggal 15 Januari 2018 terdapat salah satu kreditur PT MNA yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya. Pasca dikabulkannya permohonan dari kreditur tersebut, PT MNA masuk ke dalam kondisi "Dalam PKPU" dengan pengawasan dari Tim Pengurus PKPU yang ditunjuk oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

Sehubungan dengan kondisi PT MNA yang belum memiliki kemampuan keuangan dan telah berhenti beroperasi, PT MNA melakukan program pencarian mitra strategis sejak bulan April 2018, dengan harapan dapat memperoleh mitra yang mendukung PT MNA agar dapat beroperasi kembali. Pada tanggal 2 Juli 2018, setelah melalui tahapan program pencarian mitra strategis, PT MNA berhasil memperoleh mitra strategis yang akan melakukan penyetoran modal bersyarat untuk menjadi pemegang saham mayoritas PT MNA.

Pasca diperolehnya mitra strategis, PT MNA bersama Perusahaan menyusun rancangan proposal perdamaian untuk ditawarkan kepada para kreditur dalam rapat kreditur. Pada tanggal 31 Oktober 2018, telah dilakukan voting atas proposal perdamaian dengan hasil memperoleh persetujuan dari mayoritas para kreditur. Pada tanggal 14 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya telah membacakan putusan PKPU dan mengesahkan homologasi atas proposal perdamaian PT MNA.

Dalam proses masuknya mitra menjadi pemegang saham PT MNA, terdapat persyaratan pendahuluan yang harus dipenuhi, antara lain:

- i. Salinan putusan yang mengesahkan homologasi atas perdamaian PT MNA dari Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya;
- ii. Persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan (i) terdilusinya saham Negara dalam PT MNA sebagai konsekuensi atas masuknya modal dari investor dan dikonversinya piutang menjadi saham; dan (ii) berubahnya status PT MNA dari BUMN menjadi Perusahaan Swasta;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

In practice upon a program of restructuring and/or revitalize PT MNA, on January 15, 2018 there is one lender PT MNA that apply for Suspension of payment (PKPU) at the Court of Commerce in District Court Surabaya. Post dikabulkannya the petition from the lender, PT MNA enters into conditions "in the PKPU" with oversight from the PKPU Sysop Team appointed by Tribunal judges in the District Court of Surabaya

With respect to the condition of PT MNA has not had financial capability and has ceased operations, PT MNA programme search strategic partner since April 2018, in hopes of gaining a supportive partner PT MNA to be able to operate back. On July 2, 2018, after going through the stages of the program search strategic partner, PT MNA gaining a strategic partner who will do a conditional capital remittance to become the majority shareholder of PT MNA

Post acquired a strategic partner, PT MNA joint peace proposal drafting Company to offer to lenders in the meeting of creditors. On the date of October 31, 2018 has done voting up proposals for peace with the results obtained the consent of a majority of its creditors. On November 14, 2018, the Commercial Court judge in the District Court of Surabaya has read out the verdict and homologation certify the PKPU over peace proposals PT MNA.

In the process of inclusion of the partners became shareholders of PT MNA, there is a preliminary requirement which must be met, including:

- i. copy of the verdict that affirms the homologation over peace PT MNA from Tribunal Judges on the Court of Commerce in Surabaya District Court;*
- ii. The approval of the Government of the Republic of Indonesia and the Republic of Indonesia people's representative Council related to (i) diluted shares of PT MNA as consequences of the influx of capital from investors and dikonversinya receivables into shares; and (ii) of changing the status of STATE-OWNED PT MNA became a private company;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- iii. Persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas skema restrukturisasi utang Pajak;
- iv. Surat dan/atau dokumen lain terkait keabsahan proses restrukturisasi dan/atau revitalisasi PT MNA yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam perkembangannya pada tahun 2019, PT MNA telah memperoleh dokumen legal opinion atau keabsahan proses Restrukturisasi dan Revitalisasi PT MNA dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

Jaminan dari PT MNA adalah berupa hak tanggungan peringkat I atas 32 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp27.983, hipotik atas 18 unit pesawat dengan nilai Rp13.275, fidusia mesin pesawat Boeing 737-300 dan Boeing 737-400 dengan nilai Rp68.652 Juta, gadai 99,82% saham PT Merpati Maintenance Facility dan gadai 99,86% saham PT Merpati Training Center dengan nilai total Rp349.542.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp634.755. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp27.419. Pembayaran atas pinjaman pada tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 662.174.

2. PT PAL Indonesia (Persero)

Pada tanggal 30 Desember 2015, telah dilakukan restrukturisasi utang terhadap pemberian pinjaman untuk pembiayaan korporasi – *Tranche D* yang dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Utang PT PAL Indonesia (Persero) Nomor 47. Tanggal Jatuh Tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2030. Utang pokok sebesar Rp151.841 direstrukturisasi menjadi Fasilitas *Tranche A*, utang bunga sebesar Rp88.742 dan denda pokok sebesar Rp4.465 direstrukturisasi menjadi Fasilitas *Tranche B*.

Dengan dilakukannya restrukturisasi utang PT PAL kepada Perusahaan, maka seluruh Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Pembiayaan Proyek Kapal (*Project Financing*) tanggal 16 Desember 2009 No 09 (*Tranche A*), No 10 (*Tranche B*) dan No 11 (*Tranche C*) dinyatakan tidak berlaku lagi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- iii. approval of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia over Tax debt restructuring scheme;
- iv. Letter and/or other related documents the validity of the process of restructuring and revitalization of the PT or MNA issued by the Young Attorney General Civil and Administrative State.

In its development in 2019, PT MNA has obtained legal opinion document on the validity of PT MNA's Restructurization and Revitalization process from the Deputy Attorney General for Civil and State Administration.

The guarantee from PT MNA is in the form of mortgage of rank I for 32 land and / or building assets with a value of Rp27,983, mortgages for 18 aircraft with a value of Rp13,275, fiduciary Boeing 737-300 aircraft engines and Boeing 737-400 with value of Rp68,652, pawn of 99.82% stake in PT Merpati Maintenance Facility and pawn of 99.86% stake of PT Merpati Training Center with a total value of Rp349,542.

The beginning balance of the year 2019 amounting to Rp634,755. Total drawdown of loans in 2019 amounting to Rp27,419. Loan Payment in the current year amounting to Rp Nil. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp662,174.

2. PT PAL Indonesia (Persero)

On December 30, 2015, a debt restructuring was made to a loan lent to finance corporation – *Tranche D*, as outlined in the Debt Restructuring Agreement PT PAL Indonesia (Persero) Number 47. The expiry date of the agreement is on December 31, 2030. Debt principal amounted to Rp151,841 was restructured into Facility *Tranche A*, interest payable amounted to Rp88,742, and fine charged to loan amounted to Rp4,465 were restructured into Facility *Tranche B*.

In conjunction with the debt restructuring of PT PAL to the Company, therefore the entire Lending Agreement to Finance Ship Project (*Project Financing*) dated December 16, 2009 No. 09 (*Tranche A*), No. 10 (*Tranche B*), and No. 11 (*Tranche C*) are no longer valid.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Jaminan dari PT PAL adalah berupa hak tanggungan peringkat I atas 9 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp25.194, fidusia mesin dan peralatan produksi dengan nilai Rp190.241, fidusia piutang dengan nilai Rp27.697.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp220.246. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar nihil. Pembayaran atas pinjaman pada tahun berjalan sebesar Rp4.901. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp215.345.

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA)

Pada tanggal 19 November 2013, ditandatangani Perjanjian No PP-11/PPA/1113 antara Perusahaan dengan PT KKA perihal Perubahan Menyeluruh Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan menjadi Pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi. Adapun pokok-pokok dari pinjaman tersebut antara lain:

- Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara BUMN selaku ketua Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN No. KEP-02/MBU/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Perusahaan PT Kertas Kraft Aceh (Persero), maka Perusahaan melakukan pengalihan atas pinjaman dana talangan yang termasuk dalam program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi menjadi pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.
- Adapun perjanjian awal yang dialihkan status sumber pendanaan dari dana talangan menjadi dana RR adalah:
 1. Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 25 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan dari Perusahaan kepada PT KKA;
 2. Perjanjian No. PP-04/PPA/0710 tanggal 26 Juli 2010 untuk Biaya Jasa Konsultan Keuangan dan Konsultan Teknik;
 3. Perjanjian No. PP-01/PPA/0111 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberian Pinjaman Dana Talangan Untuk Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Aset;
 4. Perjanjian No. PP-13/PPA/1111 tanggal 23 November 2011 tentang Pemberian Pinjaman Dana Talangan Untuk Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Periode April – Juni 2011.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Collateral from PT PAL is in the form of a mortgage of rank I for 9 land and / or building assets with a value of Rp25,194, fiduciary machinery and production equipment with a value of Rp190,241, fiduciary receivables with a value of Rp27,697.

The beginning balance of the year 2019 amounting to Rp220,246. Total drawdown of loans in 2019 is nil. Loan Payment in the current year amounting to Rp4,901 Balance at December 31, 2019 amounting to Rp215,345.

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (KKA)

On November 19, 2013, an agreement was signed, that is the Agreement No PP-11/PPA/1113 between the Company and PT KKA regarding the Comprehensive Amendment of Lending Bailout Loan Agreement to become Restructuring and/or Revitalization Loan. The basic terms of Loan are as follows:

- As with the release of the Decision of State-Owned Enterprises Minister as the Chairman of State-Owned Enterprises Restructuring and Revitalizing Committee No. KEP-02/MBU/2012 on 4 January 2012 about Restructuring and/or Revitalization of PT Kertas Kraft Aceh (Persero), therefore the Company transferred the bailout loan that was included in Restructuring and Revitalizing Program into Restructuring and/or Revitalization Loan.
- The initial agreement which status of source of funding are transferred from bailouts loan into Restructuring and Revitalization funds are:
 1. Deed of Loan Agreement No. 25 on August 28, 2009 about Bailouts Loan Agreement from the Company to PT KKA;
 2. Agreement No. PP-04/PPA/0710 on July 26, 2010 for Costs of Financial Consultant and Engineering Consultant Services;
 3. Agreement No. PP-01/PPA/0111 on January 31, 2011 about Distribution the Bailout Loan for the Costs of Security and Safeguarding of Assets;
 4. Agreement No. PP-13/PPA/1111 on November 23, 2011 about Distribution of Bailouts Loan for Security and Safeguarding of Assets for the period April until June 2011.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Perjanjian No.PP-03/PPA/0414 tanggal 14 April 2014, Perusahaan memberikan pokok fasilitas pinjaman maksimal sebesar Rp120.132 berupa Fasilitas Pinjaman untuk Modal Kerja Pengadaan Gas sebesar Rp112.132 dengan peruntukan; uang jaminan kepada PT PIM selama kerjasama penyaluran gas secara proposional berdasarkan pemakaian volume gas alam, biaya pemakaian gas untuk *start up* dan *shut down*, dan pembayaran kargo gas.

Tingkat suku bunga yang diberlakukan atas pokok Fasilitas Pinjaman adalah sebesar 13% per tahun dan wajib dibayarkan kepada Perusahaan pada setiap hari kerja terakhir selama jangka waktu peminjaman.

Addendum I No. PP-04/PPA/0614 tanggal 10 Juni 2014 merupakan perubahan atas Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan Dalam Rangka Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) pada pasal Fasilitas Pinjaman untuk Biaya Pra Operasi dan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Pengadaan Gas.

Pada Addendum II PP-01/PPA/0115 tanggal 15 Januari 2015 dilakukan perubahan atas Fasilitas Pinjaman Untuk Biaya Pra Operasi, Tanggal Pembayaran Bunga, Provisi dan Administrasi serta jadwal angsuran pokok.

Addendum III PP-04/PPA/0515 tanggal 28 Mei 2015 dilakukan realokasi Fasilitas Pinjaman Untuk Modal Kerja Pengadaan Gas menjadi Fasilitas Pinjaman Pra Operasi, ketentuan penarikan dana fasilitas pinjaman untuk biaya pra operasi serta jadwal angsuran pokok.

Addendum IV PP-03/PPA/0216 tanggal 4 Februari 2016 dilakukan realokasi Fasilitas Pinjaman Untuk Modal Kerja Pengadaan Gas menjadi Fasilitas Pinjaman Pra Operasi serta jadwal pembayaran angsuran pokok. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah pada tanggal 31 Desember 2017 atau tanggal pencairan fasilitas.

Berdasarkan surat No.S-397/PPA/DU/0119 merupakan surat persetujuan Perpanjangan fasilitas Dana Talangan Modal Kerja Pengadaan Gas yang diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2019 dengan tujuan agar PT KKA dapat melakukan pembayaran atas pemakaian gas operasi periode Desember 2018 dan Januari 2019 tepat waktu.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on Agreement No.PP - 03 / PPA / 0414 on April 14, 2014, the Company provides a loan facility principal with maximum amount of Rp120,132 with details as Loan Facility of Working Capital for Gas Procurement amounted to Rp112,132 with allocation; bail to PT PIM during the cooperation of proportionate gas distribution based on the volume of natural gas used, gas usage fee to start up and shut down, and the gas cargo payment.

The interest rate applied to the principal of the Loan Facility is 13% per annum and must be paid to the Company every last business day during the loan period.

Addendum I No. PP-04 / PPA / 0614 dated June 10, 2014 constitutes an amendment to the Agreement for the Provision of Borrowing Loans in the Context of Operation and Maintenance of PT Kertas Kraft Aceh (Persero) Steam Power Plant in Article Article Loan Facilities for Pre-Operational Costs and Working Capital for Gas Procurement Loan Facilities.

In Addendum II PP-01 / PPA / 0115 dated January 15, 2015 changes were made to the Loan Facility for Preoperative Costs, Interest Payment Date, Provisions and Administration as well as the principal installment schedule.

Addendum III PP-04 / PPA / 0515 dated May 28, 2015 carried out the reallocation of the Loan Facility for Working Capital for Gas Procurement to become the Pre-Operational Loan Facility, the provision of withdrawal of loan facility funds for preoperative costs and the principal installment schedule.

Addendum IV PP-03 / PPA / 0216 dated February 4, 2016 carried out the reallocation of the Loan Facility for Working Capital for Gas Procurement into the Pre-Operational Loan Facility and the principal installment payment schedule. The maturity date of the loan is December 31, 2017 or the date of disbursement of the facility.

Pursuant to No.S-397 / PPA / DU / 0119 is an approval letter for the Extension of the Gas Procurement Working Capital Expansion Fund facility which is extended until February 28, 2019 with the aim that PT KKA can make payments for the use of operating gas for the period December 2018 and January 2019 on time .

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Dengan berakhirnya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan diubah menjadi Perjanjian Sewa maka seluruh fasilitas pinjaman Perusahaan kepada PT KKA jatuh tempo. Atas sisa pinjaman PT KKA yang tidak terbayarkan dibuat suatu perjanjian Pengubahan Perjanjian Restrukturisasi Dana Talangan PT KKA dalam Rangka Penyelesaian Utang No. PP-16/PPA/0719 tanggal 31 Juli 2019.

Jaminan dari PT KKA adalah berupa Surat Senior Kreditur dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memegang jaminan atas aset PT KKA dengan nilai Rp300.080.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp141.611. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar nihil. Pembayaran atas pinjaman pada tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp141.611.

4. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (DI)

Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No. S-720/MBU/2010 tanggal 23 November 2010 perihal pinjaman dalam rangka project financing bagi PT DI serta surat No.S-735/MBU/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal penegasan penggunaan dana korporasi Perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit/Pinjaman Jangka Pendek Nomor 13 tanggal 2 Desember 2010, Perusahaan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok fasilitas maksimal sebesar Rp237.180 dan telah direalisasikan sebesar Rp234.610 dengan tingkat suku bunga sebesar 11% per tahun.

Jatuh tempo pinjaman adalah setiap dibayarkannya tagihan atas proyek Super Puma dan/atau Bell ke rekening PT DI di Bank BNI yang menampung pembayaran Super Puma dan Bell atau tanggal 28 Februari 2010 mana yang lebih dulu.

Perjanjian pinjaman ini dijamin dengan Hak tagih atau piutang PT DI terhadap proyek Super Puma dan proyek Bell yang masing-masing bernilai Rp179.335 dan Rp99.866 yang selain kepada Perusahaan juga dijamin kepada Bank BRI dengan hak klaim secara pari passu, 2 (dua) unit mesin pesawat helikopter, yaitu NAS332 C1 SPUMA N-20 (Super Puma) dan Bell-412EP berikut komponennya yang masing-masing bernilai Rp179.335 dan Rp99.866.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

With the termination of the Electricity Sale and Purchase Agreement and converted into a Lease Agreement, all of the Company's loan facilities to PT KKA are due. For the remaining outstanding loans of PT KKA, an agreement to amend the PT KKA Bailout Restructuring Agreement in the Debt Settlement Framework No. PP-16 / PPA / 0719 dated July 31, 2019.

The guarantee from PT KKA is in the form of a Senior Credit Creditor from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk which holds a guarantee for the assets of PT KKA amounted to Rp300,080.

The beginning balance of the year 2019 amounting to Rp141,611. Total drawdown of loans in 2019 is nil. Loan Payment in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp141,611.

4. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (DI)

In accordance with the letter of the Ministry of SOE No. S-720/MBU/2010 dated November 23, 2010 regarding loan for PT DI project financing, as well as Letter No. S-735/MBU/2010 dated December 1, 2010 regarding the confirmation of the use of corporate funds as set in the Credit/Short Term Loan Agreement No. 13 dated December 2, 2010, the Company provides loans with a maximum of principal amount of Rp237,180, amount which has been realized is Rp234,610, with an interest rate of 11% per annum.

Loan maturity is on any bill-payment on the Super Puma and / or Bell project to the account of PT DI in Bank BNI that holds payment of Super Puma and Bell or on February 28, 2010 whichever is earlier.

The loan agreement is secured with Claim right or receivable of PT DI to the Super Puma and Bell projects, each worths Rp179,335 and Rp99,866 which in addition to the Company, also secured to Bank BRI with rights claims on pari passu, two (2) units of helicopter engines, i.e. NAS332 C1 SPUMA N-20 (Super Puma) and Bell-412EP along with the components, each of which is worth Rp179,335 and Rp99,866, respectively.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pinjaman tahap II kepada PT DI yang diberikan berdasarkan surat Menteri Negara BUMN No.S-79/MBU/2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Persetujuan Pinjaman Dana dari Perusahaan dan surat No.S-114/MBU/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Penetapan RUPS Perusahaan untuk memberikan Pinjaman Jangka Pendek Tahap II kepada PT DI. Pinjaman tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek No.182 tanggal 25 Maret 2011.

Jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp89.000, pinjaman tersebut akan digunakan untuk keperluan penyelesaian proyek, pembiayaan operasional, modal kerja dan pembiayaan tagihan PT DI lainnya yang dibagi dalam 3 (tiga) jenis pinjaman yaitu:

- *Tranche A* untuk penyelesaian proyek AD Trade dan pembayaran gaji bulan Februari 2011, dengan pokok pinjaman maksimal Rp32.800.
- *Tranche B* untuk pembiayaan modal kerja, pokok pinjaman maksimal Rp54.500.
- *Tranche C* untuk pembiayaan tagihan PT DI lainnya, dengan pokok pinjaman maksimal Rp1.700.

Pada tanggal 18 Agustus 2011, Perusahaan dan PT DI telah menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan korporasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.55, dimana Perusahaan memberikan pinjaman sebesar Rp675.000. Sejak tahun 2011 sampai dengan 2019, telah dilakukan beberapa kali addendum perubahan atas Akta No.55 tersebut dan yang terakhir adalah Akta Perubahan X (kesepuluh) Perjanjian Pembiayaan korporasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.114 pada tanggal 20 Desember 2019. Akta perubahan X (kesepuluh) tersebut mengatur penurunan suku bunga menjadi 2,18% dan perpanjangan proses sertifikasi dan pengikatan aset tanah jaminan serta penyelesaian hutang pokok dan bunga kepada Perusahaan.

Jaminan dari PT DI adalah berupa fidusia piutang dengan nilai Rp16.482, fidusia mesin sebesar dengan nilai Rp270.368, dan PT DI telah menyerahkan 7 sertifikat aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp590.265 yang dalam proses persetujuan pemegang saham PT DI untuk pengikatan jaminan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Phase II credit to PT DI given based on the Letter of the Minister of SOE No. S-79/MBU/2011 dated February 23, 2011 regarding the Approval of Fund Loan from the Company and Letter No. S-114/MBU/2011 dated March 14, 2011 regarding the Stipulation of Company RUPS to provide Short-Term Loans Phase II to PT DI. The loan was set into Short-Term Loan Agreement No. 182 dated March 25, 2011.

The principal amount of the loan facility to a maximum of Rp89,000, the loan will be used for completion of the project, financing operations, working capital and other financing charges of PT DI which are divided into three (3) types of loans as follows:

- *Tranche A for completion of AD Trade project and payroll of February 2011, with a maximum loan principal of Rp32,800.*
- *Tranche B for the financing of working capital, with a maximum loan principal of Rp54,500.*
- *Tranche C for PT DI other financing charges, with a maximum loan principal of Rp1,700.*

On August 18, 2011, The Company and PT DI signed the Deed of PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.55, in which The Company provided a loan of Rp675,000. Since 2011 until 2019, there have been several addendum changes to the Deed No.55 and the latest is the Deed of Amendment X (tenth) of PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.114 Corporate Financing Agreement on December 20, 2019. Deed of amendment X (tenth) regulates the reduction in interest rates to 2.18% and extends the certification process and the binding of collateral land assets and settlement of principal and interest payable to The Company.

Collateral from PT DI is in the form of fiduciary receivables with a value of Rp16,482, machine fiduciary at a value of Rp270,368 and PT has submit 7 certificate land asset and/or building with value amounting to Rp590,265 with approval process from shareholders PT DI regarding binding of guarantees.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp605.000. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Nihil. Pembayaran atas pinjaman tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp605.000.

5. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI)

Pada tanggal 27 Desember 2016, telah dilakukan restrukturisasi utang terhadap seluruh kewajiban PT IKI kepada Perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Utang PT Industri Kapal Indonesia (Persero) No. 42 ("Perjanjian") tanggal jatuh tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2022. Utang pokok sebesar Rp31.639 direstrukturisasi menjadi Tranche A, utang bunga sebesar Rp2.061 direstrukturisasi menjadi Tranche B.

Selanjutnya telah dilakukan perubahan Perjanjian melalui Addendum I Perjanjian No. 11 tanggal 4 Desember 2019 mengenai perubahan tanggal jatuh tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2028.

Jaminan dari PT IKI adalah berupa hak tanggungan peringkat I dan 2 atas 4 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp185.000 dan fidusia mesin dan peralatan produksi dengan nilai Rp45.000.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp28.639. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Nihil. Pembayaran atas pinjaman pada tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.639.

6. PT Iglas (Persero)

Pemberian pinjaman dalam rangka restrukturisasi dan atau revitalisasi PT Iglas (Persero) berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-15/MBU/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan Restrukturisasi dan /atau Revitalisasi PT Iglas dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-621/MK.06/2010 tanggal 29 November 2010 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas (Persero).

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas (Persero) No. 10 tanggal 15 April 2011, plafond pinjaman yang diberikan sebesar Rp106.770 untuk pembayaran kekurangan dana atas pembangunan kembali pabrik yang berlokasi

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance at the beginning of 2019 amounting to Rp605,000. Total disbursements during the year is Nil. Payment of current year loans amounted to Nil. As of December 31, 2019 the balance was Rp.605,000.

5. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI)

On December 27, 2016, a debt restructuring was carried out on all obligations of PT IKI to the Company as set forth in the PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Debt Restructuring Agreement No. 42 ("Agreement") the maturity date of the agreement to December 31, 2022. The principal Debt of Rp31,639 was restructured into Tranche A, the interest payable of Rp2,061 was restructured into Tranche B.

Subsequently the Agreement has been amended through Addendum I Agreement No. 11 December 4, 2019 concerning changes in the maturity date of the agreement to December 31, 2028.

The guarantee from PT IKI is in the form of mortgage of rights I and II for 4 land and / or building assets with a value of Rp185,000 and fiduciary machinery and production equipment with a value of Rp45,000.

The beginning balance of the year 2019 amounting to Rp28,639. Total drawdown of loans in 2019 is Nil. Loan Payment in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp28,639.

6. PT Iglas (Persero)

Provision of loans for the restructuring and / or revitalization of PT Iglas (Persero), based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number S-15/MBU/2011 dated January 14, 2011 concerning the Assignment of the Restructuring and/or Revitalization of PT Iglas and the Minister of Finance Number S-621/MK.06/2010 dated November 29, 2010 concerning the approval of Restructuring and/or Revitalization

Based on the Loan Agreement in the Context of Restructuring and/or Revitalization of PT Iglas (Persero) No. 10 dated April 15, 2011, loan plafond amounting to Rp106,770 for the payment of underfunded funds for the rebuilding of a factory located in Gresik known as the G-1 rebuild and debt payments, with an

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

di Gresik yang dikenal dengan rebuild G-1 serta pembayaran hutang, dengan tingkat bunga sebesar bunga SBI ditambah 3% per tahun (bersih). Jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Desember 2017.

Berdasarkan Perubahan I Perjanjian Restrukturisasi Hutang Atas Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas (Persero) No. 84 tanggal 19 Desember 2018, dimana sebelumnya telah dibuat dan ditandatangani akta Perjanjian Restrukturisasi Hutang Atas Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas (Persero) No. 82 tanggal 28 Desember 2017, Perusahaan menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu pelunasan fasilitas restrukturisasi yang diajukan PT Iglas (Persero) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Melalui Perubahan II Perjanjian Restrukturisasi Hutang atas Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas (Persero) No. 42 tanggal 20 Desember 2019 dilakukan perpanjangan jangka waktu fasilitas restrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 25 Mei 2018 dilakukan penandatangan Perubahan IV Perjanjian Pemberian Pinjaman yang mengatur penambahan fasilitas baru yaitu Tranche B sebesar Rp10.000 yang akan digunakan untuk penyelesaian sebagian kewajiban pesangon kepada eks karyawan PT Iglas (Persero). Tingkat suku bunga yang ditetapkan untuk fasilitas Tranche B sebesar 14.5% dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 atau tanggal diterimanya termin pembayaran pertama oleh PT Iglas (Persero) atas penjualan atau penyewaan Aset Gresik. Melalui Perubahan V Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 06 tanggal 09 Juli 2018, Perusahaan dan PT Iglas (Persero) melakukan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman Tranche A sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Kemudian melalui Perubahan VI Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 85 tanggal 19 Desember 2018, Perusahaan dan PT Iglas (Persero) melakukan penambahan plafond fasilitas pinjaman *Tranche A* maksimal Rp40.000 dan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman *Tranche A* sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

interest rate of SBI plus 3% per annum (net).
The term of loan facility until 31 December 2017.

Based on Amendments I of the Debt Restructuring Agreement for Loans in the Context of PT Iglas (Persero)'s Restructuring and/or Revitalization No. 84 dated December 19, 2018, was previously made and signed the deed of the Debt Restructuring Agreement for Loans in the Context of PT Iglas (Persero)'s Restructuring and/or Revitalization No. 82 dated December 28, 2017, The Company approved the proposed extension for the repayment period of the restructuring facility proposed by PT Iglas (Persero) until December 31, 2019.

Through Amendment II of the Debt Restructuring Agreement for Loans in the Context of PT Iglas (Persero) No. 42 Restructuring and/or Revitalization dated 20 December 2019, the period of the restructuring facility extend to 31 December 2020.

On May 25, 2018 the Amendment IV of the Lending Agreement was signed to regulate the addition of a new facility, Tranche B in the amount of Rp10,000, which will be used to settle part of severance pay obligations to former employees of PT Iglas (Persero). The interest rate determined for the Tranche B facility is 14.5% with a term until May 24, 2019 or the date of receipt of the first payment term by PT Iglas (Persero) for the sale or lease of Gresik Assets. Through Amendment V Loan Agreement No. 06 on July 9, 2018, The Company and PT Iglas (Persero) extended the time period of Tranche A loan facility until December 31, 2018.

Then through Amendment VI of the Lending Agreement No. 85 dated December 19, 2018, The Company and PT Iglas (Persero) increased the plafond of Tranche A loan facility to a maximum of Rp40,000 and extended time period of the Tranche A loan facility until June 30, 2019.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Sehubungan dengan akan berakhirnya Fasilitas Pinjaman Tranche A pada tanggal 30 Juni 2019 dan Fasilitas Pinjaman Tranche B pada tanggal 24 Mei 2019, melalui Perubahan VII Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 33 tanggal 22 Mei 2019, Perusahaan menyetujui permohonan PT Iglas (Persero) untuk memperpanjang jangka waktu Fasilitas Pinjaman Tranche A dan Fasilitas Pinjaman Tranche B sampai dengan 31 Desember 2019 dengan pertimbangan masih belum adanya mitra strategis/ investor yang akan bekerja sama serta ketidakmampuan PT Iglas (Persero) untuk membayar Fasilitas Pinjaman tersebut.

Kemudian Perusahaan dan PT Iglas (Persero) melakukan Perubahan kembali melalui Perubahan VIII Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 43 tanggal 20 Desember 2019 perihal penambahan plafond fasilitas pinjaman Tranche A maksimal Rp50.000 dan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Desember 2021.

Jaminan dari PT Iglas (Persero) adalah berupa hak tanggungan peringkat 6 dan 7 atas 14 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp139.100. Adapun atas peringkat HT 1 sampai dengan 5 yang sebelumnya dipegang oleh BNI sudah dilakukan Roya, sehingga saat ini posisi PT PPA dan BNI sudah setara.

Saldo pada awal tahun 2019 sebesar Rp89.084. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar nihil. Pembayaran atas pinjaman pada tahun berjalan sebesar nihil. Saldo pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp89.084.

7. PT Survai Udara Penas (Persero)

Perjanjian Restrukturisasi Hutang

Pada akhir Desember 2017, Perusahaan melakukan restrukturisasi seluruh hutang PT Penas yang tertuang pada Perjanjian Restrukturisasi Utang PT Survai Udara Penas (Persero) Nomor 40 tanggal 22 Desember 2017. Fasilitas Hutang ini dibagi menjadi 2 tranche yaitu *Tranche A* dan *Tranche B*, dengan detail sebagai berikut:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Due to the expiration of the Tranche A Loan Facility on June 30, 2019 and Tranche B Loan Facility on May 24, 2019, through the Deed of Amendment VII of PT Iglas (Persero) No. 33 dated May 22, 2019, The Company approved PT Iglas (Persero) 's request to extend the term of the Tranche A Loan Facility and Tranche B Loan Facility up to 31 December 2019 on the consideration that there were still no strategic partners/investors to cooperate with and PT Iglas (Persero)'s inability to pay the Loan Facility.

Then The Company and PT Iglas (Persero) made changes again through Amendment VIII No. 43 dated 20 December 2019 regarding the addition of a maximum Tranche A loan facility plafond of Rp50,000 and an extension of the term of the loan facility until 31 December 2021.

Collateral from PT Iglas (Persero) is in the form of a mortgage of rights rank 6 and 7 for 14 land and/or building assets with value of Rp139,100. As for the rank of 1 through 5 previously held by BNI has been Roya, so that currently the position of PT PPA and BNI is equal.

The beginning balance of the year 2019 amounting to Rp89,084. Total drawdown of loans in 2019 is Nil. Loan Payment in the current year amounting to Nil. Balance at December 31, 2019 amounting to Rp89.084.

7. PT Survai Udara Penas (Persero)

Debt Restructuring Agreement

At the end of December 2017, the Company restructured all of PT Penas' debts as stipulated in the PT Survai Air Penas (Persero) Debt Restructuring Agreement No. 40 dated December 22, 2017. This debt facility is divided into 2 tranche namely tranche A and tranche B, with details as following:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- a) Fasilitas Pinjaman *Tranche A* yang terdiri dari seluruh pokok utang PT Survei Udara Penas ke Perusahaan yaitu Pinjaman Dana Talangan, *Promissory Notes*, Pinjaman Jangka Pendek, *Promissory Notes* Seri A, dan jual beli piutang dari PT PPAF sebesar Rp80.739 yang wajib dilunasi pada tanggal 31 Desember 2019, dengan tingkat suku bunga sebesar 0,59% (gross);
- b) Fasilitas Pinjaman *Tranche B* yang terdiri dari seluruh hutang bunga sebesar Rp26.007 yang wajib dilunasi pada tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat suku bunga sebesar 0,59% (gross).

Perjanjian Restrukturisasi Utang ini merupakan perubahan secara keseluruhan atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman Awal berikut turunannya dalam rangka pembayaran kembali atas kewajiban pembayaran PT Survei Udara Penas kepada Perusahaan.

Seluruh jaminan PT Survei Udara Penas atas pinjaman-pinjaman sebelumnya telah diikat menjadi jaminan untuk Perjanjian Restrukturisasi Hutang. Pada tanggal 20 Desember 2019 telah dilakukan *Addendum I* atas Perjanjian Restrukturisasi Utang dengan Akta No. 39, yang menyatakan bahwa jatuh tempo pembayaran *Tranche A* berubah dari tanggal 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2020.

Perjanjian Pinjaman Investasi

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi kepada PT Survey Udara Penas yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2018 dengan Akta No. 09, Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman berupa pinjaman investasi dengan jumlah plafond maksimal sebesar Rp11.000. Tujuan fasilitas ini yaitu membiayai Kegiatan investasi berupa pengambilalihan 90% saham dalam PT Airbone milik PT PPAK. Jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 2026 dengan tingkat suku bunga sebesar 14% (gross) per tahun.

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, diserahkan jaminan berupa gadai atas 9.009 lembar saham dalam PT Pratama Persada Airbone dan aset – aset lainnya yang dimiliki oleh PT Survey Udara Penas dari waktu ke waktu yang belum dijaminkan untuk kepentingan pihak lain, untuk jumlah nilai penjamin yang dipandang cukup oleh Perusahaan. Pada tanggal 20 Desember 2019 telah dilakukan *Addendum I* atas Perjanjian Investasi nomor

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- a) *Tranche A Loan Facility* consisting of all principal debt of PT Survei Udara Penas to the Company, namely *Bailout Loans*, *Promissory Notes*, *Short Term Loans*, *Series A Promissory Notes*, and the sale and purchase of receivables from PT PPAF of Rp80,739 which must be repaid on 31 December 2019, with an interest rate of 0.59% (gross);
- b) *Tranche B Loan Facility* consisting of all interest debts of Rp26,007 which must be paid on December 31, 2020, with an interest rate of 0.59% (gross).

This Debt Restructuring Agreement is an overall change to the terms and conditions in the Initial Loan Agreement and its derivatives in the context of repayment of PT Survei Udara Penas payment obligations to the Company.

All guarantees of PT Survey Udara Penas for previous loans have been bound as collateral for the Debt Restructuring Agreement. On December 20, 2019 an Addendum I was made to the Debt Restructuring Agreement with Deed No. 39, which states that the due date for Tranche A payments changed from December 31, 2019 to December 31, 2020.

Loan Investment Agreement

Based on the Investment Lending Agreement to PT Survey Udara Penas conducted on January 11, 2018 with Deed no. 09, the Company provides a loan facility in the form of an investment loan with a maximum ceiling of Rp 11,000. The purpose of this facility is to finance investment activities in the form of a takeover of a 90% stake in PT Airbone owned by PT PPAK. The term of the loan facility is up to 2026 with an interest rate of 14% (gross) per annum.

As collateral for repayment of all debts, collateral in the form of a pledge of 9,009 shares in PT Pratama Persada Airbone and other assets owned by PT Survey Udara Penas from time to time that has not been guaranteed for the benefit of other parties, for the amount of the guarantor's value which is deemed sufficient by the Company. On December 20, 2019 Addendum I was made to Investment Agreement number 38, which states that the interest payment due will

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

38, yang menyatakan bahwa jatuh tempo pembayaran bunga berubah menjadi setiap 2 tahunan di akhir tahun untuk hutang pokok terutang sejak tanggal 1 Januari 2019.

Perjanjian Pinjaman Dana Talangan

Melalui Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Talangan kepada PT Survei Udara Penas (Persero) No: PP-16/PPA/0918 tanggal 18 September 2018, Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman berupa pinjaman modal kerja dengan jumlah *plafond* maksimal sebesar Rp11.000. Tujuan fasilitas ini yaitu memberikan modal kerja kepada PT Survei Udara Penas dalam melakukan kegiatan proyek pemetaan. Jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 17 September 2019 dengan tingkat suku bunga sebesar 14% (*gross*) per tahun

Jaminan dari PT SUP adalah berupa hak tanggungan peringkat 1, 2 dan 3 atas 2 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp2.360, fidusia 2 airframe pesawat Cessna 402B dan C208 dengan nilai Rp2.373, fidusia 2 engine pesawat Cessna 402B dengan nilai USD93.752, fidusia 2 engine pesawat Cessna 402B dan 1 engine 208B dengan nilai Rp201, gadai 90% saham PT Pratama Persada Airborne dengan nilai Rp9.009, fidusia piutang proyek dengan nilai Rp1.050, dan 1 unit Camera Large Format dan 16 peralatan IT dalam proses pengikatan jaminan fidusia dengan nilai Rp24.102 oleh PT SUP.

8. PT Kertas Leces (Persero)

Berdasarkan surat menteri BUMN No. S-511/MBU/2012 tanggal 18 September 2012 perihal Pemberian Dana Talangan kepada PT Kertas Leces (Persero) untuk *Revolving Working Capital* yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Kertas Leces (Persero) ("PT KL") No. 13 tanggal 11 Oktober 2012. Berdasarkan Perjanjian tersebut Perusahaan memberikan Pinjaman Dana Talangan dengan jumlah pokok fasilitas maksimum Rp50.000.

Jangka waktu Fasilitas Pinjaman adalah selama 1 tahun kalender terhitung sejak tanggal efektif dan dapat dilakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya tanpa dikenakan penalti. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 12% per tahun (*gross*) dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pemberitahuan dari Perusahaan. Denda keterlambatan pembayaran bunga adalah 6% per tahun.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

change to every two years at the end of the year for the principal debt due since January 1, 2019.

Bailout Loan Agreement

Through the Bailout Loan Facility Loan Facility Agreement to PT Survei Air Penas (Persero) No: PP-16 / PPA / 0918 dated September 18, 2018, the Company provided a loan facility in the form of working capital loans with a maximum ceiling of Rp11,000. The purpose of this facility is to provide working capital to PT Survei Udara Penas in conducting mapping project activities. The term of the loan facility is until September 17, 2019 with an interest rate of 14% (*gross*) per annum.

The guarantee from PT SUP is in the form of mortgage of rank 1, 2 and 3 for 2 land and / or building assets with a value of Rp2,360, fiduciary 2 airframe Cessna 402B and C208 aircraft with a value of Rp2,373, fiduciary 2 engine Cessna 402B with value of USD93,752, fiduciary 2 Cessna 402B aircraft engines and 1 208B engine with a value of Rp201, 90% pledge of PT Pratama Persada Airborne with a value of Rp9,009, fiduciary project receivables with a value of Rp1,050, and 1 unit of Large Format Camera and 1 unit of Camera Large Format and 16 IT equipment in the process of binding fiduciary guarantees with a value of Rp24,102 by PT SUP.

8. PT Kertas Leces (Persero)

Based on the Minister of SOE letter No. S-511 / MBU / 2012 dated 18 September 2012 concerning the Provision of Bailout Funds to PT Kertas Leces (Persero) for *Revolving Working*, the Bailout Loan Fund Loan Agreement has been signed to PT Kertas Leces (Persero) ("PT KL") No. 13 dated 11 October 2012. Based on the agreement, the Company provided a Bailout Loan with a maximum principal amount of Rp50,000.

The period of loan facility is for 1 calendar year starting from the effective date and can be settled early either partially or fully, without penalty. The interest rate of loan is 12% per year (*gross*) and may change at any time in accordance with notice from Company. Fine for late payment interest rate is 6% per annum.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang yang harus dibayar oleh PT Kertas Leces (Persero) kepada Perusahaan maka PT Kertas Leces (Persero) menyerahkan jaminan-jaminan sebagai berikut:

- Dua bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, masing-masing seluas 667 m² dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan (SHGB) No. 644/Darmo tanggal 22 Agustus 2002 senilai Rp5.200 dan tanah seluas 647 m² dengan SHGB No. 658/Darmo tanggal 30 September 2003 senilai Rp6.300.
- Bidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI seluas 623 m² dengan SHGB No. 227/Kramat tanggal 3 September 1979 senilai Rp9.500.
- *Unit Boiler* (Pesawat Uap) Batu Bara berikut perlengkapannya yang berada di Pabrik PT Kertas Leces (Persero) Jl. Raya Leces, Probolinggo senilai Rp87.298.

Merujuk surat PT Kertas Leces (Persero) kepada Perusahaan Nomor: 64/A-KEU/IX/2013 tanggal 11 September 2013 perihal : Perpanjangan Pokok Pinjaman Kredit KL telah diterbitkan Addendum I Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan (*Revolving Working Capital*) Kepada PT Kertas Leces (Persero) Nomor: PP-09/PPA/1013 tanggal 10 Oktober 2013.

Perjanjian dilakukan dibawah tangan antara Perusahaan dengan PT Kertas Leces (Persero). Dimana dalam Addendum I menerangkan bahwa para pihak sepakat untuk: Mengubah ketentuan "Tanggal Jatuh Tempo" dalam Pasal 1 Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT Kertas Leces (Persero) No.13 tanggal 11 Oktober 2012 menjadi 2 (dua) tahun kalender terhitung sejak tanggal efektif atau dalam hal penyelesaian permasalahan PT Kertas Leces (Persero) ditetapkan melalui restrukturisasi dan/atau revitalisasi, sampai dengan tanggal pencairan pertama kali atas dana fasilitas pinjaman restrukturisasi dan/atau revitalisasi yang diterima oleh PT Kertas Leces (Persero) dari Perusahaan (tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

To secure repayment of all debts must be paid by PT Kertas Leces (Persero) to the Company, therefore PT Kertas Leces (Persero) must provide warrants as follows:

- Two pieces of land and buildings are located in the following turutannya Darmo Village, District Wonokromo, Surabaya, East Java Province, each covering an area of 667 sqm with Certificate (Certificate of Proof of Rights) Building Purpose ("SHGB") No. 644/Darmo dated August 22, 2002 worth Rp5,200 and a land area of 647 sqm with SHGB No. 658/Darmo dated September 30, 2003 in worth to Rp6,300.
- Land and buildings located on Kramat Pela, District of Kebayoran Baru, South Jakarta, DKI, covers 623 sqm with SHGB No. 227/Kramat dated 3 September 1979 valued at Rp9,500.
- Boiler Units (Steam Aircraft) Coal with the following equipment is located in the Factory PT Kertas Leces (Persero) Jl. Raya Leces, Probolinggo in worth to Rp87,298.

Based on PT Paper Leces letter to the Company Number: 64/A-KEU/IX/2013 dated September 11, 2013 regarding :Extension of Loan Principal KL, Addendum I Bailout Lending Agreement (Revolving Working Capital) to PT Kertas Leces (Persero) Number: PP-09/PPA/1013, dated October 10, 2013 was made.

The agreement was made between the Company with PT Kertas Leces (Persero). Where in Addendum I are explained that the parties agree to: Changing the provisions of "Maturity Date" in Article 1 of Bailout Lending Agreement to PT Kertas Leces (Persero) No.13 dated October 11, 2012 into 2 (two) years commencing from the effective date or in terms of PT Kertas Leces (Persero) problem solving determined through Restructuring and / or Revitalization, until the date of the first withdrawal of funds loan restructuring and/or Revitalization that received by PT Kertas Leces (Persero) from the Company (whichever occurs first);

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Sesuai Putusan No. 5/PKPU/2014/PN.SBY tanggal 8 Agustus 2014, PT KL dalam status Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Untuk membantu proses PKPU dan implementasi program restrukturisasi PT KL, Menteri BUMN melalui surat nomor: S-133/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 menugaskan Perusahaan:

- (1) Membantu Manajemen, PT KL dalam penyusunan proposal perdamaian PKPU dan program restrukturisasi dalam rangka penyehatan PT KL;
- (2) Melakukan pendampingan pada, PT KL dalam mengimplementasikan program restrukturisasi, PT KL sesuai hasil perdamaian PKPU termasuk monitoring pelaksanaannya.

Proses PKPU PT Kertas Leces (Persero) telah selesai dengan disahkannya Perjanjian Perdamaian antara PT KL dengan Para Kreditur PT KL tertanggal 18 Mei 2015 yang tertuang dalam Proposal Perdamaian Perjanjian Perdamaian No.05/PKPU/2014/PN.Niaga.sby.

Merujuk kepada Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah disahkan pada tanggal 18 Mei 2015, kewajiban PT Kertas Leces (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Kreditur *Preferen*
 - Pajak, Rp10.800, diangsur 12 tahun, *grace period* 2 tahun
 - Utang Gaji dan Pesangon, Rp221.400, diangsur 12 tahun, *grace period* 2 tahun
 - Kementerian Keuangan, Rp515.700, diangsur 45 tahun, *grace period* 5 tahun
- b. Kreditur *Separatis*
 - KAM/Eldorado (*haircut* 77,5%), Rp218.000 dibayar dalam waktu 9 bulan
 - PT Waskita Karya dan Perusahaan, hapus bunga denda, pokok utang dikonversi menjadi *convertible bond zero coupon* 10 tahun, diangsur 15 tahun (jaminan tetap melekat).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

In accordance with Decision No. 5/PKPU/2014/PN.SBY dated August 8, 2014, PT KL is in the status of the Debt Payment Obligation Delay (PKPU) status. To assist the PKPU process and the implementation of the PT KL restructuring program, the Minister of SOEs through letter number: S-133 / MBU / 03/2015 dated 18 March 2015 commissioned the Company:

- (1) Assisting Management, PT KL in the preparation of the PKPU peace proposal and restructuring program in the framework of PT KL's restructuring;
- (2) Assisting PT KL in implementing the restructuring program, PT KL in accordance with PKPU peace results including monitoring of its implementation.

The PKPU process of PT Kertas Leces (Persero) has been completed with the ratification of the Peace Agreement between PT KL and the PT KL Creditors dated May 18, 2015 as stated in the Peace Proposal Peace Proposal No.05/PKPU/2014/PN.Niaga.sby.

Referring to the PKPU Peace Agreement which was passed on May 18, 2015, PT Kertas Leces (Persero) liabilities are as follows:

- a. Preferred creditors
 - Taxes, Rp10,800, paid in installments of 12 years, *grace period* of 2 years
 - Salaries and Severance Payables, Rp221,400, paid in installments of 12 years, *grace period* of 2 years
 - Ministry of Finance, Rp515,700, paid in installments of 45 years, *grace period* of 5 years
- b. Separatists creditors
 - KAM / Eldorado (77.5% haircut), Rp218,000 paid within 9 months
 - PT Waskita Karya and the Company, remove penalty interest, the loan principal is converted into zero coupon convertible bond of 10 years, in installments of 15 years (guarantees remain attached).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

c. Kreditur Konkuren

- PT PGN dan PT Mega Eltra, hapus bunga denda, *grace period* 3 tahun diangsur 15 tahun
- Kreditur <Rp1.500, tanpa *haircut* *grace period* 2 tahun diangsur 2 tahun
- Kreditur Rp1.500 - Rp7.500, *haircut* 30% *grace period* 3 tahun diangsur 5 tahun
- Kreditur >Rp7.500, *haircut* 50% *grace period* 3 tahun diangsur 8 tahun.

Perjanjian pinjaman dana talangan antara Perusahaan dan PT Kertas Leces (Persero) dalam rangka permohonan bantuan dana talangan untuk membayar sebagian utang hak-hak normatif karyawan sebanyak 1.879 eks karyawan, termasuk untuk biaya provisi, biaya peningkatan jaminan dan biaya notaris telah ditanda tangani pada tanggal 16 Juni 2017. Tanggal jatuh tempo atas fasilitas jaminan ini adalah 15 Juni 2018. PT Kertas Leces (Persero) menyerahkan jaminan berupa; Tanah berikut bangunan di kelurahan Darmo Surabaya seluas 667 m² dan 647 m². Total pinjaman yang diberikan Perusahaan kepada PT Kertas Leces (Persero) selama tahun 2017 adalah sebesar Rp5.219 dan pada tahun 2017 PT Kertas Leces (Persero) membayar sebagian dari pokok pinjaman sebesar Rp975.

Untuk membayar kembali kewajiban kepada eks karyawan, tanggal 1 Maret 2018 Perusahaan dan PT KL melakukan jual beli atas aset PT KL yang menjadi jaminan pada Perusahaan yang berlokasi di kelurahan Darmo Surabaya sebesar Rp27.500. Atas hasil penjualan tersebut, atas kewajiban PT KL kepada Perusahaan telah dibayarkan kepada Perusahaan untuk pelunasan kewajiban untuk fasilitas tahun 2017 dan sebesar Rp11.500 untuk pembayaran sebagian kewajiban dari dana talangan tahun 2012. Sehingga outstanding PT KL pada Perusahaan sebesar Rp38.500.

PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit sejak tanggal 25 September 2018. Tanggal 9 November 2018, Perusahaan telah mengajukan permohonan eksekusi lelang atas Aset Jalan Radio kepada Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V dimana Perusahaan selaku kreditor separatis PT KL dan selaku

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

c. Concurrent creditor

- PT PGN and PT Mega Eltra, remove penalty interest, *grace period* of 3 years in installments of 15 years
- Creditors <Rp1,500 without *haircut* *grace period* of 2 years 2 years in installments
- Creditors Rp1,500 - Rp7,500, *haircut* 30% 3-year *grace period* in installments 5 years
- Creditors > Rp7,500, *haircut* of 50% 3-year *grace period* of 8 years in installments.

Bailout loan agreement between the Company and PT Kertas Leces (Persero) is an appeals for bailout assistance to paid off the debt of the employee normative rights totaling 1.879 of ex employee, including provision fee, warranty fee and notary fee have been signed on June 16, 2017. The maturity date of this warranty facility is June 15, 2018. PT Kertas Leces (Persero) have submit the land following the bulding in Darmo Surabaya which has 667 sqm and 647 sqm width as a warranty. Total loans were given by the Company to PT Kertas Leces (Persero) during 2017 amounted to Rp5,219 and during 2017 PT Kertas Leces (Persero) paid Rp975 for the loan principle.

To repay obligations to former employees, on March 1, 2018 the Company and PT KL carried out a sale and purchase of PT KL's assets as collateral to the Company located in Darmo, Surabaya, for Rp27,500. For the proceeds of the sale, PT KL's obligations to the Company were paid to the Company for the repayment of obligations for the 2017 facilities and amounting to Rp11,500 for the payment of part of the obligations from the 2012 bailout funds. So that PT KL's outstanding to the Company amounted to Rp38,500.

PT Kertas Leces (Persero) has been declared bankrupt since September 25, 2018. November 9, 2018, PPA has submitted an application for auction execution on Radio Road Assets to the Jakarta V State Asset and Auction Management Office (KPKNL) where PT Asset Management Company ("PPA") as a

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

pemegang Hak Tanggungan (HT) peringkat I. Tanggal 11 Desember 2018, Perusahaan telah melakukan eksekusi lelang Aset Jl. Radio melalui KPKNL Jakarta V, Jalan KKO Usman, Jakarta Pusat dan atas objek lelang telah terjual dengan harga Rp11.495.

Tanggal 26 April 2019, Tim Kurator PT KL telah mengumumkan pembagian hasil dana lelang eksekusi dimana Perusahaan selaku kreditor separatis dan pemegang HT peringkat I diberikan sebesar Rp1.291. Atas pembagian ini dinilai terlalu rendah sehingga Perusahaan mengajukan keberatan atau perlawanan (Renvoi Prosedur). Tanggal 29 Agustus 2019 telah dilaksanakan pembacaan putusan Renvoi Prosedur, yang mana putusnya Menolak keberatan atau perlawanan dari Pelawan (Perusahaan) untuk seluruhnya, Perusahaan melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Ari Zulfikar & Partners (AZP) telah mengajukan upaya hukum Kasasi dan menyerahkan memori Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Jaminan dari PT KL adalah berupa hak tanggungan peringkat I atas 1 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp9.500, fidusia mesin dengan nilai Rp50.000.

9. PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Dana Talangan kepada PT Dok dan Perkapala Surabaya PP-32/PPA/1219 tanggal 06 Desember 2019, dibuat dihadapan Notaris Desman, SH., M. Hum dengan maksimal plafond senilai Rp20.800.

Tujuan dari pemberian fasilitas ini untuk mempergunakan setiap dan seluruh dana fasilitas pembiayaan hanya untuk tujuan refinancing (pelunasan) atas pembiayaan modal kerja yang telah diterima PT DPS dari Bank MNC. Tingkat suku Bunga sebesar 15,5% per tahun gross dan provisi sebesar 0,5% dari plafond Fasilitas Pembiayaan. Jatuh tempo Fasilitas ini yaitu pada tanggal 23 Februari 2020. Jaminan PT DPS Clean Basis Namun mendapatkan Cash Colateral sebesar Rp5.000 dan Hasil imbal bunga deposito di Bank BTN.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

separatist creditor of PT KL and as the holder of Mortgage Rights (HT) ranked I. December 11, 2018, PPA has carried out the Asset auction on Jl. Radio through the Jakarta V KPKNL, Jalan KKO Usman, Central Jakarta and for the auction object has been sold at a price of Rp11,495.

April 26, 2019. PPA as a separatist creditor and holding HT rank I was given Rp1,291. With regard to this division, it is considered that the PPA has raised an objection or resistance (Renvoi Procedure). August 29, 2019 the reading of the decision of the Renvoi Procedure has been carried out, in which the decision rejects the objection or resistance of the Opponents (PPA) for all. , PPA through legal counsel from the Law Office of Ari Zulfikar & Partners (AZP) has filed an appeal Cassation and handed over the memory of Cassation in the Supreme Court of the Republic of Indonesia

The guarantee from PT KL is in the form of a mortgage of right of rank I for 1 land and / or building asset with a value of Rp9,500, a machine fiduciary with a value of Rp.50,000.

9. PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)

The Company has signed a Bailout Fund Financing Facility Agreement for PT Dok and Perkapala Surabaya PP-32 / PPA / 1219 dated December 6, 2019, made before the Notary Desman, SH., M. Hum with a maximum ceiling of Rp20,800.

The purpose of this facility is to use any and all funds of the financing facility only for the purpose of refinancing (repayment) of working capital financing received by PT DPS from Bank MNC. The interest rate is 15.5% per annum gross and the provision is 0.5% of the ceiling of the Financing Facility. The maturity of this facility is on February 23, 2020. PT DPS Clean Basis Guarantee, however, gets a Colateral Cash of Rp5,000 and the deposit interest yield at Bank BTN.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

10. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 PT PPA telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Modal Kerja kepada PT Industri Sandang Nusantara No.26, dibuat dihadapan Notaris Muhamat Hatta, SH dengan maksimal plafond sebesar Rp26.000.

Tujuan dari dana fasilitas pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja umum PT ISN. Tingkat suku Bunga sebesar 13% per tahun netto dan provisi sebesar 1 % dari plafond Fasilitas Pembiayaan. Jatuh tempo Fasilitas ini yaitu pada tanggal 30 September 2019. Saat ini outstanding pinjaman pokok PT ISN tercatat sebesar Rp26.000. Jaminan atas pinjaman modal kerja PT ISN adalah 33% kepemilikan saham PT ISN di PT ABP. Berdasarkan penilaian KJPP Immanuel Johnny & Rekan tanggal 18 Des 2019, Nomor: 00040A/PB/IMM-XII/2019 nilai 100% saham PT ABP adalah Rp364.920 Dengan demikian nilai 33% kepemilikan saham PT ISN pada PT ABP adalah Rp121.640. Nilai jaminan tersebut mampu mencakup 468% OS pinjaman pokok saat ini yang tercatat sebesar Rp26.000. Jaminan telah diikat secara sempurna dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Gadai Saham No.27 tgl 28 Maret 2019, dihadapan Muhamat Hatta, SH, Notaris di Jakarta.

Kemudian pada tanggal 30 September 2019 PT PPA dan PT ISN melakukan addendum I atas perjanjian pemberian pinjaman modal kerja No. 34 untuk memperpanjang jangka waktu Fasilitas Pinjaman menjadi tanggal 31 Desember 2020.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

10. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

On Thursday, March 28, 2019 PT PPA has signed an Agreement on Granting Working Capital Facilities to PT Industri Sandang Nusantara No.26, made before the Notary Muhamat Hatta, SH with a maximum ceiling of Rp26,000.

The purpose of the loan facility fund is to finance PT ISN's general working capital needs. The interest rate is 13% per year net and provision is 1% of the ceiling of the Financing Facility. This facility will mature on September 30, 2019. Currently PT ISN's outstanding principal loan is Rp26,000. Collateral for PT ISN's working capital loan is 33% PT ISN's share ownership in PT ABP. Based on the KJPP assessment of Immanuel Johnny & Partners on 18 December 2019, Number: 00040A / PB / IMM-XII / 2019 the value of 100% shares of PT ABP was Rp364,920 Thus the value of 33% of PT ISN's shares in PT ABP was Rp121,640. The guarantee value is able to cover 468% of the current OS principal loan which is recorded at Rp26,000. The guarantee has been bound perfectly with the signing of the Deed of Agreement for the Grant of Share Pawn No.27 on March 28, 2019, before Muhamat Hatta, SH, Notary in Jakarta.

Then on September 30, 2019 PT PPA and PT ISN made an addendum I to the agreement on the provision of working capital loans No. 34 to extend the term of the Loan Facility to 31 December 2020.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

42. Reklasifikasi Laporan Keuangan Konsolidasian

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

42. Reclassification of Consolidated Financial Statement

Certain accounts in the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2018 have been reclassified to conform with the presentation of the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2019.

	31 Desember 2018			
	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Setelah Penyesuaian	
Laporan Posisi Keuangan:				Statement of Financial Position
Aset				Assets
Aset Lancar Lainnya	332,374	(288,602)	43,772	Other Current Assets
Cessie Piutang Jangka Pendek	--	288,602	288,602	Short-term Cessie Receivables
Liabilitas				Liability
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	1,128,699	(360,000)	768,699	Bank Loans
Surat Utang Jangka Menengah	--	360,000	360,000	Medium Term Notes

43. Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan dan mengelola aktivitasnya Perusahaan dan entitas anak terekspos terhadap berbagai risiko. Perusahaan dan entitas anak telah memetakan risiko-risiko potensial yang dihadapi oleh Perusahaan dan entitas anak yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut penanganan risiko sebagai upaya pencegahan agar risiko-risiko tersebut berada pada level yang diharapkan dan melakukan langkah-langkah mitigasi agar risiko yang dihadapi tidak meningkat ke level yang tidak dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anak.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko berjalan efektif dan efisien, maka proses manajemen risiko harus mengikuti kaidah, metode, dan sistem yang dibuat bersama antara satuan kerja yang terkait langsung dengan suatu kegiatan bersama dengan satuan kerja manajemen risiko.

Untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko yang independen dan bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko berjalan efektif dan efisien, maka proses manajemen risiko harus mengikuti kaidah, metodologi, dan sistem yang dibuat bersama antara Divisi Manajemen Risiko dengan satuan kerja terkait.

43. Financial Risk Management

Various activities undertaken by the Company and subsidiary make it exposed to various risks. The Company and subsidiary has mapped potential risks faced by the Company and subsidiary to be used as a reference to establish measures of risk as a follow-up of prevention efforts for these risks at the expected level and to conduct mitigation measures for the risks faced to avoid increasing to the levels that can not be accepted by the Company and subsidiary.

To ensure that the implementation of risk management runs effectively and efficiently, the risk management process must follow the rules, methods and systems that are made jointly between work units directly related to an activity together with the risk management work unit.

To coordinate and facilitate the implementation of risk management, the Company forms an independent Risk Management Division and reports to the Director of Finance and Work Support.

To ensure that the implementation of risk management runs effectively and efficiently, the risk management process must follow the rules, methodology, and system that are made jointly between the Risk Management Division and related work units.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Penerapan manajemen risiko oleh Grup antara lain bertujuan:

- Mendukung pencapaian tujuan Perusahaan dan Entitas Anak melalui penerapan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Menyediakan *early warning signal* bagi pengambilan keputusan dengan pengendalian risiko yang baik.
- Mencapai keseimbangan pada tingkat yang dapat diterima antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perusahaan dan Entitas Anak.
- Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan.

Perusahaan

Risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan aktivitas pengelolaan risiko antara lain sebagai berikut:

- (i) Risiko Kredit
Risiko kredit timbul ketika pihak lawan (*counterparty*) gagal memenuhi memenuhi liabilitasnya sehingga menyebabkan kerugian pada Perusahaan.

Perusahaan terekspos risiko kredit pada kegiatan pencairan dana atau pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN serta kegiatan investasi.

Instrumen keuangan Perusahaan yang memiliki potensi risiko kredit terdiri dari akun Piutang Usaha, Pinjaman, dan Piutang Lain-lain.

Pengelolaan risiko kredit antara lain dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN

Pengelolaan risiko kredit pada kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, antara lain dilakukan melalui:

- Pelaksanaan kajian kelayakan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN. Kajian kelayakan dilakukan terhadap seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kinerja usaha dan kemampuan BUMN guna merumuskan dan merekomendasikan opsi restrukturisasi dan/atau revitalisasi terbaik, sehingga BUMN dapat mengembalikan dana yang diterima dari Perusahaan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The implementation of risk management by the Group, among other aims at:

- Supporting the achievement of goals of the Company and Subsidiaries through the implementation of effective risk management system.
- Provides early warning signal for decision making with good risk control.
- Achieving a balance at an acceptable level of risk and returns and minimize potential adverse effects of the financial performance of the Company and Subsidiaries.
- Ensuring compliance with laws and legislations.

The Company

The primary risks faced by the Company and risk management activities are as follows:

- (i) Credit Risk
Credit risk arises when a counterparty failed to meet its liabilities, causing loss to the Company.

The Company is exposed to credit risk on the disbursement of funds or financing activities related to restructuring activities and / or revitalization of state-owned enterprises and investment activities.

The Company's financial instruments that have the potential credit risk consist of Accounts Receivable, Loans Granted and Other Receivables.

Credit risk management, among others carried out through the following activities:

- a. SOE's Restructuring activities and/or revitalization.

Credit risk management on restructuring activities and / or revitalization of enterprises, among others by:

- Implementation of the feasibility study of restructuring and / or revitalization of SOE. A feasibility study was conducted on all aspects that may affect the business performance and the ability to formulate and recommend SOE restructuring options and / or the best revitalization, so that SOE can return the funds received from the Company.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Mensyaratkan adanya jaminan/agunan.
 - Memantau pemenuhan persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan antara Perusahaan dan BUMN yang direstrukturisasi dan/atau revitalisasi.
 - Memantau pencapaian target kinerja BUMN yang direstrukturisasi dan/atau revitalisasi dan mengusulkan langkah antisipasi untuk meningkatkan kinerja.
 - Melakukan upaya penagihan yang efektif agar pembayaran kewajiban BUMN yang direstrukturisasi dan/atau revitalisasi (kepada Perusahaan) dapat dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.
 - Melakukan langkah-langkah dalam rangka mengupayakan agar program restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN dapat selesai tepat waktu sesuai perencanaan.
- b. Kegiatan investasi
Pengelolaan risiko kredit berkaitan dengan kegiatan investasi adalah sebagai berikut:
- Pengelolaan risiko pada kegiatan investasi melalui pembiayaan proyek-proyek tertentu dan pembelian surat utang dilakukan dengan melakukan due diligence dan kajian mengenai kelayakan suatu investasi sebelum membuat keputusan investasi.
 - Memantau dan mengevaluasi kinerja debitur/proyek/penerbit surat utang untuk memastikan pemenuhan persyaratan / kondisi yang diatur dalam perjanjian kredit atau perjanjian penerbitan penerbitan utang.
- (ii) Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi terkait dengan kewajiban pembayaran atau penyediaan dana kepada pihak lain atau kewajiban untuk membiayai kegiatan Perusahaan yang harus dipenuhi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan menerapkan strategi antara lain:
1. Penetapan skala prioritas untuk kegiatan investasi yang akan dibiayai dengan mempertimbangkan antara lain tingkat imbal hasil, risiko, dan nilai strategis proyek yang akan dibiayai.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- The determination of the requirements of assurance/collateral.
 - Monitoring of fulfill requirement and conditions that has been agreed between company and state-owned companies that restructured and/or revitalized.
 - Monitoring of the achievement of the performance of SOEs were restructured and / or revitalized and propose anticipatory steps in order to improve performance.
 - Conducting effective collection efforts so that the payment obligations of SOE's restructured and / or revitalization (the Company) may be carried out regularly in accordance with the payment schedule has been set.
 - Perform steps in order to devices for the restructuring and / or revitalization of SOE can be completed on time according to plan.
- b. Investment Activities
Credit risk management that be related with investment activity as follows:
- The management of risk on investment activities through the financing of certain projects conducted with due diligence and feasibility studies adequate investment before making an investment decision.
 - Monitor and evaluate the performance of the debtor / project / issuer of debt securities to ensure compliance with the requirements / conditions set forth in the credit agreement or the agreement issuance of debt issuance.
- (ii) Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk that occurs related to the payment obligations or provision of funds to other parties or the obligation to finance the Company's activities that must be met in both the short and long term.
- Liquidity risk management is carried out by implementing strategies including:
1. Determination of priority scale for investment activities to be funded by considering among other things the level of return, risk, and strategic value of the project to be financed.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2. Membangun hubungan dan jaringan yang baik dengan berbagai pihak serta mendayagunakan sumber daya Perusahaan dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak lain, baik sumber dana dari perbankan maupun dari hasil penerbitan surat utang.

(iii) Risiko Suku Bunga

Pergerakan suku bunga dipasar dapat berdampak pada meningkatnya biaya bunga yang harus ditanggung oleh Perusahaan. Pengelolaan risiko suku bunga dilakukan dengan mencari sumber dana dengan tingkat bunga yang optimal, baik melalui penerbitan surat utang maupun melakukan negosiasi dengan kreditur dalam rangka memperoleh tingkat suku bunga yang optimal.

Pergerakan suku bunga dipasar dapat berdampak pada meningkatnya biaya bunga yang harus ditanggung oleh Perusahaan. Pengelolaan risiko suku bunga dilakukan dengan mencari sumber dana dengan tingkat bunga yang optimal, baik melalui penerbitan surat utang maupun melakukan negosiasi dengan kreditur dalam rangka memperoleh tingkat suku bunga yang optimal.

PT NK

Instrumen keuangan PT NK yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimal sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2019 piutang usaha PT NK tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

PT NK mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank dan institusi keuangan ternama dan berpredikat baik yang dipilih.

(i) Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba NK.

Dampak dari pergerakan suku bunga di pasar tidak signifikan. NK mengelola risiko suku bunga melalui pengawasan terhadap dampak

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2. Building good relationships and networks with various parties and utilizing the Company's resources in order to obtain funding from other parties, both sources of funds from banks and from the issuance of debt securities.

(iii) Interest Rate Risk

The movement of interest rates in the market can have an impact on the rising cost of interest that must be borne by the Company. Interest rate risk management is carried out by finding funding sources with optimal interest rates, both through the issuance of debt securities and negotiating with creditors in order to obtain an optimal interest rate.

The movement of interest rates in the market can have an impact on the rising cost of interest that must be borne by the Company. Interest rate risk management is carried out by finding funding sources with optimal interest rates, both through the issuance of debt securities and negotiating with creditors in order to obtain an optimal interest rate.

PT NK

PT NK financial instruments which have the potential for credit risk consists of cash and cash equivalents, accounts receivable, retention receivables and other receivables. Total maximum credit risk exposure equal to carrying value of these accounts.

As of December 31, 2019 accounts receivable of PT NK are not concentrated on a certain customer.

PT NK managed credit risk by pre-defined limit of the acceptable risk for each customer and be more selective in election of banks and financial institutions, such well-known reputation banks and financial institutions.

(i) Interest Rate Risk

Interest rate risk is defined as the risk that future cash flows of a financial instrument fluctuate due to movement of market interest rates.

High interest rate which suddenly occurs could affect in declining of NK profit.

The impact of interest rate movements in the market was not significant. NK managed interest rate risk and monitoring the impact of interest

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap NK. NK akan mengawasi secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka NK akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan para *lender*.

(ii) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan NK dalam memenuhi Liabilitas keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. NK diharapkan dapat membayar seluruh Liabilitasnya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi Liabilitas tersebut, maka PT NK harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

PT NK mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen PT NK untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

(iii) Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik

Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh PT NK. Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistemik dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variable yang terlibat, sehingga membuat kinerja Perusahaan menurun, bahkan diversifikasi pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

PT PPAF

Bisnis PT PPAF mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan melakukan pembiayaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko PPA Finance adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur dan mengelola posisi risiko. PPA Finance secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pembiayaan terbaik.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended

December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

rate movements to minimize the negative impact on NK. NK might be closely monitoring interest rate movements in the market and if interest rates increase significantly, NK might negotiate the interest rates with the Creditors.

(ii) Liquidity Risk

Liquidity risk is defined as the risk in which the positions of cash flows indicate short-term cash inflow is not sufficient to short-term cash outflow.

Liquidity risks exposures are NK difficulties in fulfilling financial liabilities that must be settled by cash or other financial assets. NK is expected to settle all its obligations in accordance with contractual maturities. In fulfilling this obligation, PT NK should generate sufficient cash inflows.

PT NK manages liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents that sufficient to meet the commitments of PT NK for normal operation and regularly evaluate cash flow projections and actual cash flows, and the schedule date of maturity of assets and financial liabilities.

(iii) Risk of Changes in Government Policy, Economic and Social Politics.

Government policies concerning economic, monetary, social and political conditions that are less conducive might results in decrease of investment and development. These could lead to delay in projects which have been or might be acquired by PT NK. This risk is systemic risk if its incur then, the risk might negatively affect toward variables involved, thus declining performance of the Company, even diversification risk is unable to eliminate it.

PT PPAF

Business of PT PPAF covers risk-taking activities with a particular target by operating a professional financing. The primary function of the PPA Finance risk management is to identify all key risks, measure and manage risk. PPA Finance regularly reviews its policies and risk management system to conform with changes in market, product and best financing practices.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PPAF mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan efek negatif terhadap pencapaian tujuan PT PPAF.

Tujuan PT PPAF dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang terukur antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi kemungkinan efek memburuknya kinerja keuangan PT PPAF.

Risiko keuangan utama yang dihadapi PT PPAF adalah risiko kredit, risiko pasar di dalamnya terdapat risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang, risiko likuiditas dan risiko perubahan kebijakan Pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik.

Risiko kredit di PT PPAF merupakan risiko yang timbul atas pembiayaan yang diberikan. Risiko ini muncul apabila terjadi penurunan kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya.

Risiko suku bunga merupakan risiko yang terjadi karena fluktuasi suku bunga di pasar sehingga akan berdampak pada kenaikan *cost of fund* dan penurunan laba. Risiko ini muncul apabila terjadi kondisi makro ekonomi tidak kondusif sehingga tingkat suku bunga meningkat.

PT PPAK

Bisnis PT PPAK mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan melakukan pembiayaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko PT PPAK adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur dan mengelola posisi risiko. PT PPAK secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pembiayaan terbaik.

PT PPAK mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan efek negatif terhadap pencapaian tujuan PT PPAK.

Tujuan PT PPAK dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang terukur antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi kemungkinan efek memburuknya kinerja keuangan PT PPAK.

Risiko keuangan utama yang dihadapi PT PPAK adalah risiko kredit, risiko pasar di dalamnya terdapat risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang, risiko likuiditas dan risiko perubahan kebijakan Pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT PPAF defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors which have negative effects on the PT PPAF goals achievement.

The purpose of PT PPAF in managing financial risks is to achieve balance measurement between risk and returns then minimize the possibility effects of deteriorating PT PPAF financial performance.

The primary financial risks faced by the PT PPAF are credit risk, market risk including interest rate and currency exchange rate risk, liquidity risk and the risk of changes in government policy, social and political conditions.

PT PPAF credit risk is the risk arising from financing. This risk arises when there is a decrease in the ability of borrowers to make payments so it can not repay the loan.

Interest rate risk is the risk that occurs due to fluctuations in market interest rates that will increase the cost of funds and earnings decline. This risk arises in case of macro-economic conditions are not conducive to the interest rate increases.

PT PPAK

Business of PT PPAK covers risk-taking activities with a particular target by operating a professional financing. The primary function of the PT PPAK risk management is to identify all key risks, measure and manage risk. PT PPAK regularly reviews its policies and risk management system to conform with changes in market, product and best financing practices.

PT PPAK defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors which have negative effects on the PT PPAK's goals achievement.

The purpose of PT PPAK in managing financial risks is to achieve balance measurement between risk and returns then minimize the possibility effects of deteriorating PT PPAK's financial performance.

The primary financial risks faced by the PT PPAK are credit risk, market risk including interest rate and currency exchange rate risk, liquidity risk and the risk of changes in government policy, social and political conditions.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

44. Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal secara efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal sejalan dengan tujuan pendirian Grup untuk kesejahteraan pekerja maka para pemegang saham memutuskan untuk tidak membagi dividen.

44. Capital Management

The objectives of the Group in managing capital is to protect the Group's ability to maintain business continuity, therefore the entity can continue to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to manage the optimal capital structure to minimize the cost of capital effectively. In order to manage the capital structure in line with objectives of the Groups establishment to provide welfare for the workers, then the shareholders distribute not to divide the dividend.

45. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

45. Related Parties Balance and Transactions

Disclosure of Related parties significant balance and transaction are as follows:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan/ Relationship	Transaksi/ Transactions
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Cash and cash equivalent, Bank and Financial Institution Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas/Cash and cash equivalent
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Cash and cash equivalent, Bank and Financial Institution Loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Cash and cash equivalent, Bank and Financial Institution Loans
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Aset Keuangan Diperdagangkan/Financial Assets Held for Trading
PT Survei Udara Penas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Aset Keuangan Diperdagangkan/Financial Assets Held for Trading
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Aset Keuangan Diperdagangkan/Financial Assets Held for Trading
PT Istaka Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Aset Keuangan Diperdagangkan/Financial Assets Held for Trading
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Fund Advance Loans Receivable, Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization
PT Kertas Leces (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Survei Udara Penas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan/ Relationship	Transaksi/ Transactions
PT Artha Bangun Pratama	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization, Fund Advance Loans Receivable
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan, Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization, Fund Advance Loans Receivable
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization
PT Iglas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Restrukturisasi/Revitalisasi/Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Bank and Financial Institution Loans
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan/Bank and Financial Institution Loans
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek/Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Piutang Retensi/Accounts Receivable, Retention Receivable
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto/Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers
PT DOK & Perkapalan Surabaya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/Accounts Receivable
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Piutang Retensi, Tagihan Bruto/Retention Receivable, Gross Amount Due from Customers
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek/Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Tagihan Bruto/Gross Amount Due from Customers
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Tagihan Bruto/Gross Amount Due from Customers
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Berkari (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman yang Diberikan Dana Talangan/Fund Advance Loans Receivable
PT Pertani (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/Control by the Central Government of the RI	Pinjaman Investasi Jangka Pendek/Short-Term Investment Loans

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship
Perum LPPNPI (Ainav Indonesia)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Brantas Abipraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Nindya Beton	Entitas Anak Perusahaan / <i>The Company's Subsidiary</i>
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Pertamina Gas	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
PT Semen Padang	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / <i>Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia</i>
JV Nindya - Andesmont	Entitas Ventura Bersama Perusahaan / <i>The Company's Joint Ventures</i>
JV Nindya - Jaya Konstruksi	Entitas Ventura Bersama Perusahaan / <i>The Company's Joint Ventures</i>
JV Nindya - PT PPA	Entitas Ventura Bersama Perusahaan / <i>The Company's Joint Ventures</i>
JV Nindya - Surya	Entitas Ventura Bersama Perusahaan / <i>The Company's Joint Ventures</i>

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Jenis Transaksi / Nature of Transaction
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penempatan Giro / <i>Placement of Current Account</i>
Penempatan Giro, Pinjaman Bank dan Non Bank / <i>Placemet of Current Account, Bank and Non Bank Loans</i>
Penempatan Giro, Deposito / <i>Placemet of Current Account, Time Deposit</i>
Penempatan Giro / <i>Placement of Current Account</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penempatan Giro, Pinjaman Bank dan Non Bank / <i>Placemet of Current Account, Bank and Non Bank Loans</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Pinjaman Bank dan Non Bank / <i>Bank and Non Bank Loans</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>
Penagihan atas Jasa Konstruksi / <i>Billing of Construction Service</i>

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi:

Aset

	2019 Rp	2018 Rp	2019 %	2018 %
Kas dan Setara Kas	798,828	735,264	5.54%	6.26%
Piutang Usaha	386,413	269,725	2.68%	2.30%
Piutang Retensi	--	--	0.00%	0.00%
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan	223,046	215,581	1.55%	1.84%
Tagihan Bruto	--	--	0.00%	0.00%
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	1,416,472	1,388,273	9.83%	11.82%

Liabilitas

	2019 Rp	2018 Rp	2019 %	2018 %
Utang Usaha	140,455	92,420	0.97%	0.79%
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	2,403,718	1,286,784	16.67%	10.96%
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek	10,372	14,629	0.07%	0.12%
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang	35,965	60,501	0.25%	0.42%

Pendapatan

Pendapatan Usaha	198,908	125,391	2.98%	1.84%

Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total aset, total kewajiban, dan total pendapatan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Detail of items associated with the related parties transaction:

Asset

Cash and Cash Equivalent	798,828	735,264	5.54%	6.26%
Accounts Receivable	386,413	269,725	2.68%	2.30%
Retention Receivable	--	--	0.00%	0.00%
Loans Bailout	223,046	215,581	1.55%	1.84%
Gross Amount Due from Customers	--	--	0.00%	0.00%
Loans Receivable	1,416,472	1,388,273	9.83%	11.82%
Restructuring and/or Revitalization				

Liabilities

Accounts Payable	140,455	92,420	0.97%	0.79%
Bank and Financial Institution Loans	2,403,718	1,286,784	16.67%	10.96%
Short-Term Advances from Customers	10,372	14,629	0.07%	0.12%
Long-Term Advances from Customers	35,965	60,501	0.25%	0.42%

Revenue

Sales Revenue	198,908	125,391	2.98%	1.84%

Above percentage is a comparison with total assets, total liabilities and total revenue.

46. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

PT Ade Textile Industries

Pada periode setelah pelaporan keuangan, Perusahaan telah mencairkan fasilitas Tranche B kepada PT Adetex pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Hutang No. 44 Tanggal 20 Desember 2019 dengan *plafond Tranche B* sebesar USD3.900.000 dengan jumlah pencairan sebesar USD1,480,374.44. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk pembiayaan Modal Kerja dan pembelian mesin.

PT Primarindo Asia Infrastructure

Pada periode setelah pelaporan keuangan, Perusahaan telah mencairkan fasilitas Tranche B kepada PT Primarindo Asia Infrastructure pada tanggal 30 Januari 2020 berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Hutang No. 43 Tanggal 20 Desember 2019 dengan *plafond Tranche B* sebesar USD1.279.953 dengan jumlah pencairan sebesar USD182.951. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk Pembiayaan Modal Kerja.

46. Subsequent Events after Period ended

PT Ade Textile Industries

During the subsquence event period, the Company has disbursed the Tranche B facility dated January 31, 2020 to PT Adetex based on Debt Restructuring Agreement No. 44 December 20 2019 with *plafond Loans Tranche B* amounted to USD3,900,000, with Disbursement amounted to USD1,480,374. The purposes of facility is for Debtor's Working Capital and Financing the purchase of machinery.

PT Primarindo Asia Infrastructure

During the subsquence event period, the Company has disbursed the Tranche B facility dated January 01, 2020 to PT Primarindo Asia Infrastructure based on Debt Restructuring Agreement No. 43 December 20 2019 with *plafond Loans Tranche B* amounted to USD1,279,953, with disbursement amounted to USD182,951. The purposes of facility is for Debtor's Working Capital.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**47. Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku
di Tahun 2019**

Berikut ini adalah pengesahan amandemen dan penyesuaian atas ISAK dan PSAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI).

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 1 (Amendemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Hingga tanggal laporan keuangan perusahaan ini diotorisasi, perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**47. New Accounting Standards Not Yet Effective
for Year 2019**

The following are ratification of amendments and improvements of ISAK and PSAK issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesia Institute of Accountant (DSAK-IAI).

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 71: "Financial Instrument";
- PSAK 72: "Revenue from Contract with Customer";
- PSAK 73: "Lease";
- PSAK 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract";
- PSAK 15 (Amendment 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures";
- PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation";
- ISAK 35: "Presentation of Non-profit Oriented Entity Financial Statements";
- PSAK 1 (Amendment 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements";
- PSAK 1 (Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements";
- PPSAK 13: "Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting";
- PSAK 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Change in Accounting Estimates and Errors";
- PSAK 102 (Revised 2019): "Murabahah Accounting";
- ISAK 101: "Recognition of Resilient Murabahah Revenues Without Significant Risks Regarding Ownership of Inventory";
- ISAK 102: "Impairment of Murabahah Receivables Value".

Until the date of the Company financial statements is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2019 and December 31, 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**48. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari
Aktivitas Pendanaan**

**48. Reconciliation of Liabilities Arising from
Financing Activities**

	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows			Amortisasi Non Kas/ Non Cash Changes Amortization	2019 Rp	
	2018 Rp	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Biaya Emisi/ Issuance Cost		
Pinjaman Bank	2,306,228	13,066,442	(12,011,774)	--	357,586	Bank Loans
Surat Berharga Komersial	--	93,572	--	--	--	Commercial Paper
Surat Utang Menengah Jangka Pendek	600,000	747,455	(240,000)	--	--	Medium Term Notes
	2,906,228	13,907,469	(12,251,774)	--	357,586	4,919,509

**49. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan
Keuangan**

**49. Management Responsibility on the Financial
Statements**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2020.

The Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the financial statements which are authorized by Directors for issuance on February 28, 2020.

50. Informasi Keuangan Tambahan

50. Supplementary Financial Information

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif yang disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2019 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and related directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements.

LAMPIRAN I

APPENDIX I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INDUK PERUSAHAANTanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT COMPANYAs of December 31, 2019 and 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2019 Rp	2018 Rp
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	569,422	773,774
Pinjaman Investasi Jangka Pendek		
Pihak Berelasi	526,334	144,033
Pihak Ketiga	1,413,181	423,196
Aset Keuangan Diperdagangkan		
Pihak Berelasi	70,260	70,260
Pihak Ketiga	--	10,961
Piutang Usaha		
Pihak Berelasi	23,588	17,274
Pihak Ketiga	6,861	21,951
Piutang Anak Perusahaan	1,844	284
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan		
Pihak Berelasi	658,487	581,154
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	14,873	4,343
Cessie Piutang Jangka Pendek	282,099	288,602
Pajak Dibayar Di Muka	90,632	75,377
Aset Lancar Lainnya	4,952	4,092
Jumlah Aset Lancar	3,662,533	2,415,301
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	40,296	95,989
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi		
Pihak Berelasi	1,416,472	1,388,273
Pinjaman Investasi jangka Panjang		
Pihak Berelasi	623,021	317,319
Properti Investasi	366,062	354,966
Aset Pajak Tangguhan	20,968	15,015
Investasi pada Ventura Bersama	155,184	118,356
Investasi Jangka Panjang - Entitas Anak	749,995	798,995
Piutang Lain-lain	64,341	13,905
Aset Tetap	4,127	4,179
Cessie Piutang Jangka Panjang	283,493	--
Aset Tidak Lancar Lainnya	398,289	308,485
Jumlah Aset Tidak Lancar	4,122,248	3,415,482
JUMLAH ASET	7,784,781	5,830,783

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and Cash Equivalents
Short-term Investment Loans
Related Parties
Third Parties
Held for Trading Financial Assets
Related Parties
Third Parties
Accounts Receivable
Related Parties
Third Parties
Subsidiaries Receivable
Loans Receivable-Bailout
Related Parties
Advances and Prepaid Expenses
Short-Term Cessie Receivables
Prepaid Taxes
Other Current Assets
Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS
Available for Sale Financial Assets
Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization
Related Parties
Long term Investment Loan
Pihak Berelasi
Investment Property
Deferred Tax Assets
Investment in Joint Ventures
Long Term Investments-Subsidiary
Receivables to Subsidiary
Property, Plant and Equipment
Long-Term Cessie Receivables
Other Non-Current Assets
Total Non-Current Assets
TOTAL ASSETS

LAMPIRAN I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INDUK PERUSAHAAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

APPENDIX I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT COMPANY (Continued)

As of December 31, 2019 and 2018

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2019 Rp	2018 Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha		
Pihak Ketiga	24,863	3,194
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan		
Pihak Berelasi	1,252,238	547,131
Pihak Ketiga	1,115,864	919,242
Utang Surat Berharga Jangka Pendek	93,572	--
Utang Pajak	3,836	5,135
Beban Akrua dan Utang Lain-lain	266,089	254,404
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2,756,462	1,729,106
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	939	2,494
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan		
Pihak Berelasi	64,743	--
Surat Utang Jangka menengah	758,717	--
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	824,399	2,494
JUMLAH LIABILITAS	3,580,861	1,731,600
EKUITAS		
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham - Modal Dasar 5.000.000 saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 31 Desember 2019 dan 2018	2,996,688	2,996,688
Saldo Laba:		
Telah Ditentukan Penggunaannya	299,350	171,528
Belum Ditentukan Penggunaannya	885,731	905,339
Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih	22,151	25,628
JUMLAH EKUITAS	4,203,920	4,099,183
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7,784,781	5,830,783

LIABILITIES AND EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Accounts Payable
Third Parties
Bank and Financial Institution Loans
Related Parties
Third Parties
Commercial Debt Securities
Taxes Payable
Accrued Expenses and Other Payables
Total Current Liabilities
NON-CURRENT LIABILITIES
Employee Benefit Liabilities
Bank and Financial Institution Loans
Related Parties
Medium term Notes
Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Share Capital - Rp 1,000,000 par value per share - Authorized Capital 5,000,000 shares Issued and Fully Paid As of December 31, 2016 and 2015
Retained Earnings:
Appropriated
Unappropriated
Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities - Net
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

LAMPIRAN II
APPENDIX II
**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
INDUK PERUSAHAAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PARENT COMPANY**

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2019 Rp	2018 Rp	
PENDAPATAN USAHA	540,637	482,338	REVENUES
BEBAN USAHA	(402,010)	(353,100)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA	138,627	129,238	OPERATING INCOME
Pendapatan Bunga	15,424	15,512	Interest Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	237	–	Gain on Sale of Property, Plant, and Equipment
Beban Bunga dan Keuangan	(3,198)	(3,166)	Interest Expense and Financial Charge
Bagian Laba (Rugi) Ventura Bersama	247	(822)	Share of the Profit (Losses) of Joint Ventures
Beban Lain-lain	(6,468)	(5,571)	Other Expenses
LABA SEBELUM PAJAK	144,869	135,191	INCOME BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAXES
Manfaat (Beban) Pajak Kini			Current Tax Benefit (Expenses)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	5,952	124	Deferred Tax Benefit (Expenses)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	5,952	124	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	150,821	135,315	INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified to profit or loss
Keuntungan Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti	--	518	Actuarial Gain on Employee Benefit Liabilities
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(3,477)	(18,651)	Available for Sale Financial Assets
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(3,477)	(18,133)	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	147,344	117,182	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

LAMPIRAN III

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
INDUK PERUSAHAAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

	Jumlah Ekuitas/Total Equity				Jumlah/ Total
	Modal Saham/ Capital Stock	Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/ on Available for Sale Financial Assets	Saldo Laba/Retained Earnings *)		
			Telah Ditetapkan	Belum Ditetapkan	
			Penggunaannya/ Appropriated	Penggunaannya/ Unappropriated	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo Per 31 Desember 2017	2,996,688	44,279	141,353	819,691	4,002,011
Penggunaan Saldo Laba 2017					
Dividen Tunai	--	--	--	(20,000)	(20,000)
Cadangan Umum	--	--	30,175	(30,175)	--
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	135,305	135,305
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	(18,651)	--	518	(18,133)
Saldo Per 31 Desember 2018	2,996,688	25,628	171,528	905,339	4,099,183
Uang Muka Setoran Modal		--	--	--	--
Penggunaan Saldo Laba 2018					
Dividen Tunai	--	--	--	(42,607)	(42,607)
Cadangan Umum	--	--	127,822	(127,822)	--
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	150,821	150,821
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	(3,477)	--	--	(3,477)
Saldo Per 31 Desember 2019	2,996,688	22,151	299,350	885,731	4,203,920

APPENDIX III

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
PARENT COMPANY

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Balance as of December 31, 2017

Distribution of 2017 Retained Earnings

Cash Dividends

General Reserve

Income for the Year

Comprehensive Income for the Year

Balance as of December 31, 2018

Distribution of 2018 Retained Earnings

Cash Dividends

General Reserve

Income for the Year

Comprehensive Income for the Year

Balance as of December 31, 2019

LAMPIRAN IV

APPENDIX IV

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
INDUK PERUSAHAAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
PARENT COMPANY**

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2019 Rp	2018 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	10,741	101,571	Cash Receipts from Customers
Penerimaan Restitusi Pajak	21,947	18,656	Cash Receipts from Tax Refund
Penerimaan Bunga atas Pinjaman yang Diberikan	52,793	70,923	Proceeds from Loan Receivables Interest
Penerimaan Penggantian Biaya Aset	1,196	1,558	Reimbursable Cost of Assets
Pembayaran Beban Usaha	(195,394)	(196,177)	Payment of Operating Expenses
Pembayaran Beban Bunga	(211,799)	(74,735)	Payment of Interest Expenses
Pembayaran Pajak	(56,008)	(47,759)	Tax Paid
Penerimaan Hasil Investasi	295,965	165,248	Proceeds of Investment
Pencairan (Penempatan) Surat Berharga Diperdagangkan	10,942	638	Receipt from (Placement of) Trading Securities
Penerimaan (Pengeluaran) Lainnya	29,946	30,751	Other Income
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(39,671)	70,674	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil Penjualan Aset Tetap	237	--	Proceeds from Disposal of Property, Plant and Equipment
Investasi pada Ventura Bersama	44,306	18,000	Proceeds from Disposal of Fixed Assets
Penerimaan dari (Pengeluaran) Pinjaman yang Diberikan - Bersih	(1,990,199)	(963,671)	Receipt from (Disbursement) of Loans
Pencairan (Penempatan) Surat Berharga Tersedia untuk Dijual	(13,519)	17,779	Disbursement (Placement) Securities Available for Sale
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(1,959,175)	(927,892)	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman	4,248,734	2,757,183	Receipts from Loan
Pembayaran Pinjaman	(3,293,260)	(1,890,408)	Payment for Loan
Penerbitan Surat Berharga	842,933	--	Receipts From Securities
Pembayaran Dividen	(42,608)	(20,000)	Dividend Payment
Penerimaan Dividen	38,695	20,925	Dividend Receipt
Penerimaan Tambahan Modal	--	--	Paid Up Capital
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	1,794,494	867,700	Net Cash Provided by (Used in) by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(204,352)	10,482	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	773,774	763,292	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	569,422	773,774	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

LAMPIRAN V

APPENDIX V

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
INFORMATION TAMBAHAN
INDUK PERUSAHAAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
ADDITIONAL INFORMATION
PARENT COMPANY**

For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

1 Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terlampir adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

1 Separate Financial Statements

The statements of financial position, statements of comprehensive income, statement of changes in equity and the related statements of cash flows are separate financial statements which are additional information on the consolidated financial statements.

2 Investasi Pada Entitas Anak

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan tersendiri dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

2 Investment in Subsidiaries

Investments in subsidiaries as stated in separate financial statements are recorded using the cost method.

Entitas Anak	Kepemilikan/ Ownership	Saldo Awal Biaya Perolehan/ Beginning Balance of Acquisition Cost	Penambahan Penyertaan/ Addition in Participation	Pengurangan Penyertaan/ Reduction in Participation	Saldo Akhir Biaya Perolehan/ Ending Balance of Acquisition Cost	Subsidiaries
Entitas Anak						Subsidiaries
PT PPA Finance	100.00	149,999	--	--	149,999	PT PPA Finance
PT PPA Kapital	100.00	99,999	--	--	99,999	PT PPA Kapital
PT Nindya Karya (Persero)	99.00	499,997	--	--	499,997	PT Nindya Karya (Persero)
PT Nindya Beton	100.00	49,000	--	--	49,000	PT Nindya Beton

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018

2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
I. Umum		I. General
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	√	1. The Annual Report shall be written in good and correct Indonesian, and is recommended to be presented in English
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	√	2. The Annual Report shall be printed with good quality using readable type and size of fonts
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	√	3. The Annual Report shall present clear identity of the company
4. Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: a. Sampul muka; b. Samping; c. Sampul belakang; dan d. Setiap halaman.		4. Company name and the annual report financial year shall be presented on: a. Front Cover; b. Side Cover; c. Back Cover; and d. Every page
5. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√	5. The Annual Report shall be posted in the company's website Including the latest annual report as well as those for the last four years, at least.
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting	14-39	II. Key Financial Highlights
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	14-16	1. Income statement in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years
Informasi memuat antara lain: a. Penjualan/pendapatan usaha; b. Laba (rugi): ▪ Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan ▪ Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; c. Penghasilan komprehensif periode berjalan : ▪ Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan ▪ Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan d. Laba (rugi) per saham.	√ √ √	Information contains the following: a. Income; b. Profit (loss): ▪ Attributable to equity holders of the parent entity; and ▪ Attributable to non controlling interest; c. Total comprehensive profit (loss): ▪ Attributable to equity holders of the parent entity; and ▪ Attributable to non controlling interest; d. Earning (loss) per share.
Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	√	Note: If the company does not have subsidiaries, the profit (loss) and other comprehensive income is presented in total.

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat antara lain: a. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; b. Jumlah aset; c. Jumlah liabilitas; dan d. Jumlah ekuitas.	16-17	2. Financial position in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years Information contains the following: a. Total investment on associates; b. Total assets c. Total liabilities; and d. Total equity
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	18-19	3. Financial ratio in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years Information covers 5 (five) financial ratios, which are generally applied and relevant to the company's industry.
4 Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik a. Jumlah saham yang beredar; b. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: ▪ Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; ▪ Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan ▪ Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. c. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: ▪ Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan ▪ Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	20 ✓	4 Share price information in tables and charts a. Number of shares outstanding; b. The table forms contain the following information: ▪ Market capitalization based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; ▪ Highest, lowest and closing share price based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and ▪ Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed. c. The graph forms contain at least the following information: ▪ The closing price of shares based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and ▪ Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed For each quarter in the latest 2 (two) financial years. Note: Should be disclosed if the company does not have market capitalization, share price, and share trading volume.
5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir Informasi memuat: a. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); b. Tingkat bunga/imbalan; c. Tanggal jatuh tempo; dan d. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	21	5. Information regarding outstanding bonds, sukuk or convertible bonds, in 2 (two) latest financial years Information contains: a. Number of outstanding bonds, sukuk or convertible bonds; b. Interest rate/yield; c. Maturity date; and d. Rating of bonds/sukuk in 2015 and 2016. Note: Should be disclosed if the company does not have outstanding bonds, sukuk or convertible bonds.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	42-84	III. Board of Commissioners and Board of Directors' Report
1. Laporan Dewan Komisaris	42-63	1. Board of Commissioners' Report
Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; c. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan d. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.		Contain the following: a. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis for such evaluation; b. Views on the business prospects of the company as prepared by the Board of Directors and the basis for such consideration; c. Views on the implementation/management of the company's whistleblowing system (WBS), and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and d. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reason for such changes.
2. Laporan Direksi	64-84	2. Board of Directors' report
Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: ▪ kebijakan strategis; ▪ perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan ▪ kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; b. Analisis tentang prospek usaha; c. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan d. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	✓	Contain the following: a. Analysis of the company's performance, covering among others: ▪ strategic policies; ▪ comparison between targets and achievements; and ▪ challenges faced by the company and initiatives to deal with those challenges; b. Analysis on business prospects; c. Developments in the implementation of GCG during the fiscal year; and d. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reason for such changes.
3 Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	86-87	3 Signatures of members of the Board of Commissioners and Board of Directors
Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.		Contain the following: a. Signatures on a separate page; b. Statement of responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the accuracy of the contents of the Annual Report; c. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by stating their names and position; and d. Written explanation in separate letter from the person(s) concerned in the event that member(s) of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or: written explanation in separate letter from other member(s) in the event that there is no written explanation from the person(s) concerned.
IV. Profil Perusahaan	90-169	IV. Company Profile
1. Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	90	1. Name and complete address of the company Information contains, among others, name and address, post code, telephone number, fax, email and website.

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
2. Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	91-95	2. Brief history of the company Contain among others: date/year of establishment, name of the company, change of name (if any), and effective date of the change of name. Note: to be disclosed if the company never had a change of name
3. Bidang usaha Uraian mengenai antara lain: a. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; b. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan c. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	96-103	3. Line of business Description of, among others: a. The line of business as stated in the latest Articles of Association; b. Business activities; and c. Product and/or services offered.
4 Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.	108-109	4 Organization structure Diagram of organization structure, containing name and position of personnel up to one level below Director, at least
5. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup: a. Visi perusahaan; b. Misi perusahaan; c. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan d. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	104-106	5. Vision, Mission and Corporate Culture Covers: a. Vision; b. Mission; c. Statement that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Commissioners/Directors in the fiscal year; and d. Statement on the corporate culture.
6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain: a. Nama; b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); c. Umur; d. Domisili; e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	110-112	6. Profiles of members of the Board of Commissioners Contain information on: a. Name; b. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution); c. Age; d. Domicile; e. Education (study field and education institution); f. Work experience (position, company, and period in position); and g. History of assignments (period and position) as member of the Board of Commissioners at the company since the first appointment.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain: a. Nama; b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); c. Umur; d. Domisili; e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan g. Riwayat penunjukan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	113-116	7. Profiles of members of the Board of Directors Contain information on: a. Name; b. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution); c. Age; d. Domicile; e. Education (study field and education institution); f. Work experience (position, company, and period in position); and g. History of assignments (period and position) as member of the Board of Directors at the company since the first appointment.
8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Informasi memuat antara lain: a. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; b. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; c. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; d. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan e. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	121-130	8. Total number of employees (comparative for 2 years) and data on employee competence development programs reflecting equal opportunities for each level of the organization Information contains, among others: a. Number of employees at each level of the organization; b. Number of employees by education; c. Number of employees by employment status; d. Data on employee competence development programs during the fiscal year, concerning position of participants, type of training, and purpose of training; and e. The costs of employee competence development programs in the fiscal year.
9. Komposisi Pemegang saham Mencakup antara lain: a. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; b. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: ▪ Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan ▪ Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. c. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	135	9. Shareholders composition Covering among others: a. Names of the 20 largest shareholders and their shareholding percentage; b. Details of shareholders and shareholding percentage: ▪ Names of shareholders with 5% or more shareholding; and ▪ Group of public shareholders with individual shareholding of less than 5% each. c. Names of Director and Commissioner with director indirect share-ownership and the percentage of such shareholding. Note: should be disclosed if the Director and Commissioner does not own shares, directly or indirectly.
10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: a. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; b. Persentase kepemilikan saham; c. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan d. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	137-163	10. List of subsidiaries and/or associated entities In table form, containing: a. Name of subsidiary and/or associated entity; b. Share-ownership percentage; c. Line of business of subsidiary and/or associated entity; and d. Operational status of subsidiary and/or associated entity (in commercial operation/not yet in commercial operation).

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
11. Struktur grup perusahaan Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	136	11. Corporate group structure Diagram of corporate group structure involving relationship of the parent company, subsidiary, associated entity, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).
12. Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain: a. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); b. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan c. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	164	12. Chronology of share listing (including private placement) and/or share listing from the share issuance up to the end of the fiscal year Covers, among others: a. Year of share issuance, number of shares issued, par value, and share offer price, for each separate corporate action; b. Total number of shares outstanding following the corporate action; and c. The stock exchange where the shares are listed. Note: should be disclosed if the company does not have a chronology of share listing.
13. Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain: a. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; b. Nilai penawaran efek lainnya; c. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan d. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan	164	13. Chronology of other securities issuance and/or listing from the time of issuance up until the end of the fiscal year Covers, among others: a. Name of security instrument, year of issuance, interest rate/yield of securities, and maturity date; b. Offering price of other securities; c. The stock exchange where the securities are listed; and d. Rating of securities. Note: should be disclosed if the company does not have chronology of other securities issuance/listing
14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Informasi memuat antara lain: a. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; b. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan c. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	165-166	14. Name and address of supporting institutions and/or professionals Covers, among others: a. Name and address of the company's Share Registrar; b. Name and address of Public Accountant Firm; and c. Name and address of rating agencies.
15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun Internasional Informasi memuat antara lain: a. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; b. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; c. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan d. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	167	15. Awards received during the fiscal year, or valid certification in the fiscal year, at both national and international levels Covers, among others: a. Name of award and/or certification; b. Year received/issued; c. Name of institution that issued the award/certification; and d. Validity period (certification).

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
16. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Memuat informasi antara lain: a. Nama dan alamat entitas anak; dan b. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan	144-156	16. Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any) Covers information on: a. Name and address of subsidiaries; and b. Name and address of branch/representative office. Note: should be disclosed if the company does not have a subsidiary, branch office or representative office.
17. Informasi pada Website Perusahaan Meliputi paling kurang: a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; b. Isi Kode Etik; c. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; d. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); e. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan f. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komitekomite, dan Unit Audit Internal.	168-169	17. Information in the corporate website Covers at the very least: a. Information of shareholders up to the individual ultimate shareholder; b. Contents of the Code of Conduct; c. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), covering at least agenda of the GMS, summary of GMS resolutions, and information of pertinent dates, namely the dates of GMS announcement, GMS invitation, GMS event, and announcement of summary GMS resolutions; d. Annual financial statements (last 5 years); e. Profiles of the Board of Commissioners and Directors; and f. Board manual/Charter of the BoC. BoD, Committees and Internal Audit Unit.
18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): a. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; b. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; c. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; d. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; e. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; f. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan g. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	131-134	18. Training and education for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit Cover at least information of type of training and participant of: a. Training and/or education for Board of Commissioners; b. Training and/or education for Board of Directors; c. Training and/or education for Audit Committee; d. Training and/or education for Nomination and Remuneration Committee; e. Training and/or education for other Committee(s); f. Training and/or education for Corporate Secretary; and g. Training and/or education for Internal Audit Unit. During the fiscal year. Note: should be disclosed if there are no training and/or education during the fiscal year

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	172-286	V. Management Discussion and Analysis on the Company Performance
1. Tinjauan operasi per segmen usaha	175-196	1. Operation review per business segment
Memuat uraian mengenai: a. Penjelasan masing-masing segmen usaha. b. Kinerja per segmen usaha, antara lain: ▪ Produksi; ▪ Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; ▪ Penjualan/pendapatan usaha; dan ▪ Profitabilitas.		Includes analysis on: a. Elaboration on each business segment. b. Performance of each business segment, among others: ▪ Production; ▪ Increase/Decrease of production capacity; ▪ Sales/income; and ▪ Profitability
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	201-241	2. Description on the Company's financial performance An analysis comparing the performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) and the reasons for the increase/decrease of the accounts, including in: a. Current assets, non-current assets, and total assets; b. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; c. Equity; d. Sales/operating revenues, expenses, Profit (Loss), other comprehensive income, comprehensive income for the current year; and e. Cash flows
Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; c. Ekuitas; d. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan e. Arus kas		
3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	242-245	3. Discussion and analysis on solvability and level of the company receivables collectibility, by presenting relevant ratio calculation in line with the company's type of industry
Penjelasan tentang: a. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan b. Tingkat kolektibilitas piutang.		Explanation on: a. Solvability, both short term and long term; and b. Level of receivables collectibility.
4. Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)	245-247	4. Discussion on capital structure, and management policy on capital structure
Penjelasan atas: a. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan b. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan c. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.		Explanation of: a. Details of capital structure comprising of interestbearing debts/sukuk and equity; b. Capital structure policies; and c. Basis for the determination of capital structure policies.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang: a. Nama pihak yang melakukan ikatan; b. Tujuan dari ikatan tersebut; c. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; d. Mata uang yang menjadi denominasi; dan e. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	248-252	5. Discussion on material commitments of capital investments (instead of funding commitments) in the last fiscal year Explanation on: a. Parties in the commitments; b. Objectives of the commitments; c. Sources of funds to meet the commitments; d. Denomination currency of commitments; and e. Initiatives taken to mitigate exchange rate risk. Note: should be disclosed if the company does not have any material commitment for capital investments in the fiscal year.
6. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang: a. Jenis investasi barang modal; b. Tujuan investasi barang modal; dan c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	252-253	6. Discussion on capital investment realized at the latest financial year Explanation on: a. Type of capital investment; b. Objectives of capital investment; and c. Nominal value of capital investment realized in the last fiscal year. Note: should be disclosed if there are no capital investment.
7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Informasi memuat antara lain: a. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan b. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	254-264	7. Information on the comparison between initial target at the beginning of financial year and the realization and target or projection for the next year concerning income, profit, capital structure, and others considered significant target for the company. Contain information on: a. Comparison of targets at the beginning of fiscal year and achievements; and b. Targets or projections set for the next 1 (one) year.
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan	264-265	8. Information and material facts following the date of accounting report (Subsequent events) Description of significant events following the date of accounting report including its impact on business risk and performance in the future. Note: should be disclosed if there are no subsequent events.
9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	282-286	9. Business prospects Description on business prospects related to the general industry and economy including quantitative supporting data from reliable resources

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
10. Uraian tentang aspek pemasaran Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	197-200	10. Marketing aspects Description on marketing aspects of the company's products and/or services, among others marketing strategy and market shares
11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Memuat uraian mengenai: a. Kebijakan pembagian dividen; b. Total dividen yang dibagikan; c. Jumlah dividen kas per saham; d. Payout ratio; dan e. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	265-266	11. Description on dividend policy and total cash dividend per share and total dividend per year that are published or disbursed during last 2 (two) financial years Contain information on: a. Dividend payout policy; b. Total dividend disbursement; c. Total cash dividend per share; d. Payout ratio; and e. Announcement date and cash dividend payout for each year. Note: To disclose if there are no dividend disbursement and its reasons
12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku Memuat uraian mengenai: a. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; b. Jangka waktu; c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	267	12. Employee/Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) still ongoing in the fiscal year Contain information on: a. Number of ESOP/MSOP shares and its execution; b. Period; c. Eligible employee/management; and d. Exercise price. Note: should be disclosed if there are no such programs
13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Memuat uraian mengenai: a. Total perolehan dana; b. Rencana penggunaan dana; c. Rincian penggunaan dana; d. Saldo dana; dan e. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	267	13. Realization of initial public offering proceeds (in the event of the company is obligated to submit the report) Covers the following: a. Total proceeds; b. Proceeds utilization plan; c. Proceeds utilization details; d. Proceeds balance; and e. The date of GMS/GMB resolution on the change of proceeds utilization (if any). Note: should be disclosed if there are no such information of realization of proceeds of public offering.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Memuat uraian mengenai: a. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; b. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; c. Alasan dilakukannya transaksi; d. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; e. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan f. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	268-275	14. Material transaction information with conflict of interest and/or transaction with related parties Covers the following: a. Name of transacting parties and the nature of related parties; b. Description of the transaction fairness; c. Transaction background; d. Transaction realization at the last financial year; e. Company policy related with transaction review mechanism; and f. Compliance to relevant regulations and provisions. Note: To disclose if there are no transactions.
15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundangundangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: a. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan b. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	275	15. Description on changes in laws and regulations during the fiscal year that impacted on the company Covers information on: a. Name of regulations; and b. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company, or statement of the insignificant impact Note: To disclose if there are no changes in the laws and regulations that have significant impacts
16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: a. Perubahan kebijakan akuntansi; b. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan c. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	275-276	16. Description on the changes in accounting policy implemented by the company at the last financial year Descriptions include among others: a. Changes in accounting policy; b. Reasons for the change; and c. Quantitative impact on the financial statements Note: To disclose if there are no changes in accounting policies during the fiscal year

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
17. Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai: a. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; b. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan c. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	279-281	17. Information on business continuity Disclosures on: a. Significant issues on the company business continuity at the last financial year; b. Management assessment on point 1; and c. Assumption implemented by the management in conducting the assessment. Note: if there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year, to disclose the basis of management assumption in ensuring that there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year.
VI. Good Corporate Governance	290-698	VI. Good Corporate Governance
1. Uraian Dewan Komisaris Uraian memuat antara lain: a. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; b. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan c. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	346-366	1. Description on the Board of Commissioners Covers the following: a. Board of Commissioners responsibilities; b. Assessment of performance of committees under the Board and the basis for such assessment; and c. Board Charter disclosures (Board of Commissioners work guidelines and procedures)
2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Meliputi antara lain: a. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan b. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	366-369	2. Independent Commissioners (at least 30% of the total personnel of the Board of Commissioners) Covers the following: a. Assignment criteria of Independent Commissioners; and b. Independency statement of each Independent Commissioner.
3. Uraian Direksi Uraian memuat antara lain: a. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; b. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan c. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	369-383	3. Description on the Board of Directors Covers information on, among others: a. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; b. Assessment of performance of committees under the Board (if any); and c. Board Charter disclosures (Board of Directors work guidelines and procedures)

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi Memuat uraian mengenai: a. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; b. Pihak yang melakukan penilaian; c. Skor penilaian masing-masing kriteria; d. Rekomendasi hasil penilaian; dan e. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.	306-320; 391-414	4. GCG implementation assessment for 2018, at least for aspects of the Board of Commissioners and/or Board of Directors Covers the following: a. Assessment criteria; b. Assessor; c. Assessment score on each criteria; d. Recommendations on results of assessment; and e. Reasons for the delay or non implementation of such recommendations. Note: should be disclosed if there are no GCG assessment for fiscal 2015
5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Mencakup antara lain: a. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; b. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; c. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; d. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; e. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan f. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan	415-419	5. Description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors Covers the following: a. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Commissioners; b. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Directors; c. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Commissioners; d. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Directors; e. Disclosure of indicators for the remuneration of the Board of Directors; and f. Disclosure of performance bonus, nonperformance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors (if any). Note: should be disclosed if there are no performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors.
6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) Informasi memuat antara lain: a. Tanggal Rapat; b. Peserta Rapat; dan c. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	419-468	6. Meeting frequency and attendance of Board of Commissioners (at least once in 2 months), Board of Directors (at least once in a month), and joint meetings of BoC and BoD (at least once in 4 months) Covers among others: a. Date; b. Attendance; and c. Agenda. of each of the meetings of BoC, BoD and Joint Meetings of BoC and BoD

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	135-136; 323-324; 471	7. Information on majority and controlling shareholders, direct or indirect, up to the ultimate individual shareholder Diagram with separate illustration for majority shareholders and controlling shareholders Note: majority shareholders are parties that own, directly or indirectly, at least 20% of the voting rights of the total share with voting rights issued by the company, but is not the controlling shareholder
8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Mencakup antara lain: a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	468-472	8. Disclosure of affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majority/Controlling Shareholders Covers, among others: a. Affiliation between a member of the Board of Directors with fellow members of the Board of Directors; b. Affiliation between a member of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners; c. Affiliation between a member of the Board of Directors with Majority and/or Controlling Shareholder; d. Affiliation between a member of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners; and e. Affiliation between a member of the Board of Commissioners with Majority and/or Controlling Shareholder. Note: should be disclosed if there are no affiliation relationship
9 Komite Audit Mencakup antara lain: a. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; b. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; c. Independensi anggota komite audit; d. Uraian tugas dan tanggung jawab; e. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan f. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	478-501	9 Audit Committee Includes the following: a. Name, position and tenure of audit committee members; b. Education qualifications (study field and institution) and work experience (position, company and tenure) of audit committee members; c. Independency of audit committee members; d. Duties and responsibilities; e. Brief report of audit committee activity; and f. Meeting frequency and attendance of audit committee

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi Mencakup antara lain: a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; b. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; f. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan g. Kebijakan mengenai suksesi Direksi	522-526	10. Nomination and/or Remuneration Committee Includes the following: a. Name, position and brief profiles of members of the Nomination and/or Remuneration Committee; b. Independency of Nomination and/or Remuneration Committee; c. Duties and responsibilities ; d. Brief report of committee activity in the fiscal year; e. Meeting frequency and attendance; f. Statement of committee charter; and g. Policies on Director succession.
11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Mencakup antara lain: a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; b. Independensi komite lain; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	502-521	11. Other committees under the Board of Commissioners Includes the following: a. Name, position and brief profile of members of committee; b. Independency of committee; c. Duties and responsibilities ; d. Committee activity in the fiscal year; and e. Committee meeting frequency and attendance.
12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan Mencakup antara lain: a. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; b. Domisili; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan d. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	527-540	12. Description of duties and functions of Corporate Secretary Information on, among others: a. Name and brief work experience of Corporate Secretary; b. Domicile; c. Duties and responsibilities; and d. Report of activities of Corporate Secretary in the fiscal year.
13. Uraian mengenai unit audit internal Mencakup antara lain: a. Nama ketua unit audit internal; b. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; c. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; d. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; e. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan f. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	540-550	13 Description on Internal Audit Unit Includes the following: a. Name of internal audit unit head; b. Total employees (internal auditors) in internal audit unit; c. Certification on internal audit profession; d. Internal audit unit composition in the company's structure; e. Brief report on internal audit unit activity implementation; and f. The parties responsible to appoint/terminate the internal audit unit head.

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
14. Akuntan Publik Informasi memuat antara lain: a. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; b. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; c. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan d. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	556-563	14. Public Accountant Includes the following: a. Name and year of public accountant that audits the annual financial statements in the last 5 years; b. Name and year of Public Accountant Firm that audits the annual financial statements in the last 5 years; c. The amount of fee for each service provided by public accountant at the last financial year; and d. Other services provided by the accountant apart from the audit service of annual financial statements at the last financial year. Note: to disclose if there are no other services rendered
15. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Mencakup antara lain: a. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; b. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; c. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan d. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	550-557; 564-578	15. Description on risk management of the company Includes the following: a. Explanation on risk management system implemented by the company; b. Explanation on risk management system effectiveness evaluation; c. Explanation on risks faced by the company; and d. Risk mitigation.
16. Uraian mengenai sistem pengendalian intern Mencakup antara lain: a. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; b. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan c. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	579-585	16. Description of internal control system Includes the following: a. Brief explanation on internal control system, among others on financial and operational control; b. Explanation on internal control system alignment with international standard framework (COSO – internal control framework); and c. Explanation on internal control system effectiveness evaluation.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
17 Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait tata kelola Tanggung jawab sosial: a. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial b. Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan c. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan d. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan e. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban f. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder g. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan h. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial	647-654	17. Description of corporate social responsibility related to organizational governance of social responsibility: a. Information on Company's commitment to social responsibility; b. Information on methods and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts of Company's activities; c. Information on significant stakeholders that are impacted by, or having an influence to the impact of, the Company's activities; d. Information on significant social, economic and environmental issues related to impact of the Company's activities; e. Information on the scope of the Company's corporate social responsibility, both obligatory as well as beyond obligatory; f. Information on the Company's strategy and work programs in the management of social, economic and environmental issues, as a form of stakeholder engagement and in creating value for stakeholders and shareholders; g. Information on programs that are beyond the minimum obligatory level for the Company as relevant with its business activities; h. Information on the funding and budgeting of social responsibility programs.
18 Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Hak Azasi Manusia a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia c. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Azasi Manusia d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	655-657	18. Description of corporate social responsibility related to core subject - Human Rights: a. Information on commitment and policies related to social responsibility core subject - Human Rights; b. Information on Company's definition on the scope of social responsibility core subject - Human Rights; c. Information on the planning of CSR initiatives in the area of Human Rights; d. Information on the execution of CSR initiatives in the area of Human Rights; e. Information on achievements and awards for CSR initiatives in the area of Human Rights.
19 Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Operasi yang adil a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil c. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	658-661	18. Description of corporate social responsibility related to core subject - Human Rights: a. Information on commitment and policies related to social responsibility core subject - Human Rights; b. Information on Company's definition on the scope of social responsibility core subject - Human Rights; c. Information on the planning of CSR initiatives in the area of Human Rights; d. Information on the execution of CSR initiatives in the area of Human Rights; e. Information on achievements and awards for CSR initiatives in the area of Human Rights.

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
20 Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang; a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan b. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan c. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; d. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan e. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup f. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. g. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	662-667	20. Description of corporate social responsibility related to the environment: a. Information on commitment and policies on environment; b. Information on significant environmental impact and risks, both directly or indirectly related to the Company; c. Information on 2018 activity target/plan established by the Management; d. Information on environment-related activities or programs undertaken as related to the Company's operational activities; e. Information on the execution of CSR initiatives related to the environment; f. Information on the quantitative impact or achievement of such CSR initiatives, such as the use of environmental-friendly and recyclable material and energy, waste processing system, mechanism for environment-related complaints, consideration of environmental aspects in the granting of credit to creditors, and others. g. Environment-related certification.
21 Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mencakup antara lain informasi tentang: a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject ketenagakerjaan b. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan c. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan d. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut e. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	668-684	21. Description of corporate social responsibility related to labor practices, covering information on, among others: a. Commitment and policies on social responsibility core subject - labor practices; b. Information on scope and definition of social responsibility related to labor practices; c. Information on 2018 activity target/plan established by the Management; d. Information on initiatives undertaken and the quantitative impact of such initiatives; e. Information related to labor practices and work health and safety, such as gender equality and equal work opportunity, work health and safety equipment, employee turnover rate, work accident rate, employee remuneration, mechanism for laborrelated complaints, and others.
22 Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Mencakup antara lain: a. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan b. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut c. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanganan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	685-689	22. Description of corporate social responsibility related to consumer issues, covering among others: a. Information on 2018 activity target/plan established by the Management; b. Initiatives undertaken and the impact of such initiatives; c. Information related to product stewardship, such as consumer health and safety issues, product information, mechanism, number and resolution of consumer complaints, and others.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
23 Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, mencakup antara lain informasi tentang: a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject pengembangan sosial dan kemasyarakatan b. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan c. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan d. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan e. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; f. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan g. Biaya yang dikeluarkan h. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	690-698	23. Description of corporate social responsibility related to community involvement and development, covering among others: a. Commitment and policies on social responsibility core subject - community involvement and development; b. Information on social issues relevant to the Company; c. Information on social risks managed by the Company; d. Information on scope and definition of social responsibility related to community involvement and development; e. Information on 2018 activity target/plan established by the Management; f. Initiatives undertaken and the impact of such initiatives; g. Budget spent; h. Information related to community involvement and development, such as use of local workers, empowerment of surrounding communities, improvement of public facilities or infrastructure, other forms of donations, communications on anticorruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others.
24. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan Mencakup antara lain: a. Pokok perkara/gugatan; b. Status penyelesaian perkara/gugatan; c. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan d. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	587-593	24. Significant litigation currently faced by the company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors that served the position at the annual report period Includes the following: a. The principal litigation/claims; b. Settlement status of litigation/claims; c. Impact to the company's condition; and d. Administration sanctions charged to the company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by relevant authorities (capital market, banking and others) at the last fiscal year (or a statement of no administration sanction being charged) Note: To disclose in the event of no litigation
25. Akses informasi dan data perusahaan Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	594-617	25. Access to company information and data Description on the availability of company information and data for public access, including dissemination through company website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst gatherings, and others.

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
26. Bahasan mengenai kode etik Memuat uraian antara lain: a. Pokok-pokok kode etik; b. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; c. Penyebarluasan kode etik; d. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan e. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	618-625	26. Discussion on code of conduct Includes the following: a. Contents of Code of Conduct; b. Disclosure of code of conduct application in all level of organization; c. Code of conduct dissemination; d. Sanctions on code of conduct violations; and e. Number of violation and sanction in the last fiscal year. Note: should be disclosed if there are no violations of code of conduct in the last fiscal year.
27. Pengungkapan mengenai whistleblowing system Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: a. Penyampaian laporan pelanggaran; b. Perlindungan bagi whistleblower; c. Penanganan pengaduan; d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan e. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan f. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	635-640	27. Disclosure on whistleblowing system Includes the following mechanism of whistleblowing system: a. Violations report submission; b. Whistleblowers protection; c. Claims handling; d. Claims managers; and e. Total claims registered; and f. Sanctions/report processed at the last fiscal year including its follow up measures. Note: should be disclosed if there is no report and follow up action in the last fiscal year.
28. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	384-390	28. Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition Description of written policy regarding diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition regarding education, work experience, age, and gender Note: to disclose the reasons and considerations, if there is no policy applied
VII. Informasi Keuangan	702-890	VII. Financial Information
1. Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	704	1. Board of Directors and/or Board of Commissioners' Statements regarding the Responsibility for the Financial Statements Conformity with related regulations regarding the Financial Statements Responsibility
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan	705-707	2. Independent auditor opinion on financial statement

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
3. Deskripsi Auditor Independen di Opini Deskripsi memuat tentang: a. Nama dan tanda tangan; b. Tanggal Laporan Audit; dan c. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	706-707	3. Independent Auditor Description in the Opinion Description contains the following: a. Name & signatures; b. Audit Report date; and c. License of Public Accountant Firm and license of Public Accountant
4. Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: a. Laporan posisi keuangan; b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; c. Laporan perubahan ekuitas; d. Laporan arus kas; e. Catatan atas laporan keuangan; f. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan g. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	708-712	4. Comprehensive financial statements Comprehensively covers the financial statements elements: a. Statements of financial position; b. Statements of comprehensive income and other comprehensive income; c. Statements of changes in equity; d. Statements of cash flows; e. Notes to financial statements; f. Comparative information on previous periods; and g. Statements of financial position at the beginning of previous periods upon the application of retrospective accounting policy by the entity or representation of financial statements postings, or reclassifications of postings in the financial statements (if relevant).
5. Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	708-712	5. Profitability level comparison Comparison of current profit (loss) with the previous year
6. Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; b. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; c. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan d. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	712	6. Statements of Cash Flows Conformity to the following provisions: a. Grouping into three category of activities of operations, investment, and financing; b. Direct method application in the statements of cash flows from operations activity; c. Separation of presentation between cash in and or cash out during current year in the operation, investment and financing activities; d. Disclosure of non cash transaction shall be stated in the notes to financial statements.
7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Meliputi sekurang-kurangnya: a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; c. Pajak penghasilan; d. Imbalan kerja; dan e. Instrumen Keuangan.	718-747	7. Summary of accounting policies Including at least: a. Compliance statement to SAK; b. Basis of measurement and formulation of financial statements; c. Recognition of income and expense; d. Employee benefits; and e. Financial instrument

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain: a. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; b. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan c. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	879-882	8. Disclosure of related parties transactions The disclosures includes: a. Name of related parties, and the nature and relationship with related parties; b. Transaction values and its percentage to total income and expense; and c. Total balance and its percentage to total assets or liabilities.
9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; b. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; c. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; d. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan e. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	775-779	9. Disclosure related to taxes The disclosures shall includes: a. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation; b. Explanation of relationship between tax expenses (income) and accounting profit; c. Statement that Taxable Income as a result of reconciliation is use as the basis in completing the 2016 Annual corporate income tax return; d. The details of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial position statements for every presentation period, and total deferred tax expenses (income) recognized in the income statements if the total are not visible from the total deferred tax assets or liabilities recognized in the financial position statements; and e. Disclosure of availability or un-availability of tax disputes.
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Metode penyusutan yang digunakan; b. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan d. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	802-803	10. Disclosure related to fixed assets The disclosures shall includes: a. Used depreciation method; b. Description on accounting policies selected between revaluation model and cost model; c. Significant methods and assumptions used in estimation of fixed assets fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and d. Reconciliation of gross total recorded and accumulation of fixed assets depreciation at the beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.
11 Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; b. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; c. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan d. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	N/A	11 Disclosure related to operations segments The disclosures shall includes: a. General information covering factors used to identify reported segments; b. Information on segment's reported profit loss, assets, and liabilities; c. Reconciliation of segment's total revenues, segment's reported profit loss, segment's assets, segment's liabilities, and segment's other material elements to related total in entity; and d. Disclosure of entity level, which covers information on products and/or services, geographic areas and main customers.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARDS 2018
2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page	Criteria and Explanations
12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; b. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; c. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrument keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; d. Kebijakan manajemen risiko; dan e. Analisis risiko yang terkait dengan instrument keuangan secara kuantitatif.	873-879	12. Disclosure related to Financial Instruments The disclosures shall includes: a. Accounting requirements, conditions and policies for every financial instruments group; b. Financial instrument classification; c. Fair value of every financial instrument group; d. Risk management objectives and policies; e. Explanation on risks related to financial instrument: market risk, credit risk and liquidity risk; and f. Risk analysis related to financial instrument in quantitative way.
13. Penerbitan laporan keuangan Hal-hal yang diungkapkan antara lain: a. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan b. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan	884	13. Financial statements publication The disclosures includes: a. Date of financial statements authorized for publication; and b. Parties responsible to authorize the financial statements.

2019

Laporan Tahunan

Annual Report



PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Sampoerna Strategic Square,
North Tower Lantai 9 - 12
Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 - 46
Jakarta - 12930
Telp. 021 - 5798 2222
Fax. 021 - 5798 2233



www.ptppa.com